

Vol. 1 (2024): Kajian Inklusif Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Menyongsong Era Society 5.0

Peran Kepemimpinan Laki-Laki dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan pada Keluarga Poligami, Studi Kasus di Kecamatan Glagah Banyuwangi

Abu Sufyan[1], Marthin Fransisco Manihuruk[2]
[1,2] FHISIP Universitas Terbuka
e-mail: abu.psdarc@gmail.com

Abstrak

Dalam ranah hukum dan sosial, seringkali kepemimpinan seorang pria sebagai kepala keluarga dalam pernikahan poligami dianggap berkaitan dengan konflik dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran kepala keluarga dalam poligami menjalankan kepemimpinan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan. Studi empiris ini dilaksanakan di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan 24 kepala keluarga yang sedang atau pernah menjalani perkawinan poligami. Penelitian ini mengungkap tantangan besar dalam praktik poligami di Kecamatan Glagah Banyuwangi, yang umumnya terjadi akibat kepentingan sepihak laki-laki, dengan status perkawinan yang mayoritas masih siri. Kemudian masih belum terwujud kesejahteraan dan keadilan dalam keluarga poligami. Dan lebih dari 52% keluarga poligami tetap berkomitmen untuk mempertahankan perkawinan mereka dan berusaha melegalkannya di pengadilan.

***Kata Kunci**: kepemimpinan laki-laki, perkawinan poligami, prinsip keadilan*

PENDAHULUAN

Keluarga poligami sering kali mengalami konflik internal yang lebih sering dibandingkan dengan keluarga monogami. Fenomena ini menunjukkan pentingnya komitmen seorang pria yang berpoligami untuk mewujudkan prinsip keadilan untuk kesejahteraan keluarga. Keadilan diperlukan bukan hanya sebagai nilai moral, tetapi sebagai dasar hukum yang memberi perlindungan yang cukup.

Baik dalam pernikahan monogami maupun poligami, semua memiliki risiko mengalami ketidak adilan bagi individu. Manusia sebagai subjek dalam hukum, memiliki keinginan yang berusaha untuk dipenuhi (Mertokusumo, 2019, p. 17). Untuk mempertahankan martabat dan membatasi konflik antar individu, penting untuk menerapkan keadilan yang memberikan kepada setiap orang atas hak-haknya secara adil (Notonegoro, 1971, p. 98). Sebab keadilan yang sejati adalah realitas yang berlandaskan pada kebenaran (Kelsen, 2024, p. 48), dan harus diterapkan secara universal tanpa membeda-bedakan (Aristoteles dalam Salim, 2017, p. 27). Demikianlah wujud keadilan, ada untuk melindungi semua, yang esensinya memiliki prinsip; tidak memihak, konsisten dalam mengambil keputusan, berimbang sesuai kebutuhan, meminimalisir dampak negatif, terbuka dalam membuat keputusan, dan menghormati hukum dan hak asasi.

Dalam Islam, keadilan merupakan syarat utama untuk poligami, yang menekankan pentingnya melindungi kebenaran dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Munir oleh Zuhaili (2013, p. 573), yang merujuk pada Qur'an surat an-Nisaa' ayat 3 dan 129 "*Wa in khiftum allā tuqsiṭū*" dan "*Wa lan tastaṭī'ū an ta'dilụ bainan-nisā`i walau ḥaraṣtum*", poligami hanya diperbolehkan bagi laki-laki yang yakin dapat berlaku adil.

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

Jika tidak mampu memenuhi syarat ini, mereka dilarang melakukan poligami. Sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia, pernikahan poligami hanya diperbolehkan jika ada alasan yang kuat. Ketentuan mengenai izin poligami telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan spesifik untuk memberikan izin poligami dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 41 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, serta Pasal 57 dari Kompilasi Hukum Islam. Ini berarti, antara hukum Islam dan hukum formal di Indonesia, hanya mengijinkan praktik poligami dalam situasi yang sangat terbatas dan ketat, yaitu memberikan kepastian dalam melindungi hak-hak seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan syarat poligami; Hukum Islam dan positif di Indonesia sama-sama mengatur poligami dengan syarat keadilan suami, yang bisa didasarkan dari persepsi masing-masing pasangan. Ketika berdasarkan KHI terdapat tiga syarat sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 memiliki lima syarat, dengan demikian persyaratan poligami bersifat komplementer (Hayatuddin, 2022, p. 195). Kerangka hukum Indonesia memperbolehkan poligami dengan syarat suami bersikap adil (Ma'u, 2023, p. 669). Ini menunjukkan bahwa kedua kerangka hukum tersebut dirancang untuk memastikan poligami dilakukan dalam kondisi yang sangat terkontrol, tidak semata-mata memperbolehkan poligami tanpa batasan, tetapi mengaturnya dengan etika dan keadilan yang ketat.

Dari penelitian lainya, bahwa, dikotomi antara norma Islam dan hukum di Indonesia menimbulkan tantangan, khususnya bagi wanita yang terlibat dalam pernikahan poligami, sering mengalami ambiguitas hukum dan sosial yang mempengaruhi status serta hak mereka dalam keluarga (Wirastri, 2021, p. 1). Poligami bisa menyebabkan ketidakharmonisan keluarga, seperti pertengkaran antar istri, namun ada juga keluarga poligami yang harmonis jika suami tegas memimpin dan para istri saling menerima (Hakim, 2022, p. 34). Praktik poligami berdampak negatif pada kesejahteraan anak, mencakup penurunan kepercayaan diri, stres, depresi, penurunan prestasi sekolah, putus sekolah, isolasi sosial, dan *bullying* dari teman atau tetangga (Jumala, 2023, p. 88). Poligami seringkali menimbulkan ketidakadilan, namun keadilan bisa tercapai jika praktiknya dilakukan dengan keterbukaan dan kepemimpinan yang baik dari seorang kepala keluarga.

Posisi laki-laki sebagai kepala keluarga poligami umumnya memiliki peran yang sangat dominan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya, setiap individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan lainnya (Hart dalam Salim, 2017, p. 30). Keadilan dalam hukum, menjamin keamanan dan kesetaraan dalam masyarakat serta menjamin pencapaian struktur sosial yang diharap-harapkan oleh masyarakat (Fuady, 2023, p. 171). Sebab ada kehendak agar hukum responsif terhadap dinamika sosial, sehingga hukum harus lebih dari sekadar keadilan prosedural, fokus pada keadilan substansial, mengutamakan kepentingan publik, dan mengedepankan keadilan yang mendalam (Nonet & Selznick dalam Efendi, 2023, p. 57). Maka keadilan secara prosedural yang dijalankan dalam keluarga poligami harus dapat memberikan pengakuan dan kesetaraan bagi seluruh pihak, terutama untuk semua istri dan anak-anak.

Ketika peran laki-laki sangat dominan, maka penelitian ini akan fokus untuk mengetahui; Pertama, keberadaan keluarga poligami di Kecamatan Glagah Banyuwangi. Kedua, untuk menggali kepemimpinan laki-laki sebagai kepala keluarga poligami dalam memimpin keluarga. Dan ketiga, untuk mengetahui komitmen kepala keluarga dalam mempertahankan status pernikahan poligami mereka. Dengan demikian penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

memahami dominasi peran laki-laki terhadap rumah tangga poligami, kemudian untuk mengetahui sikap serta peran laki-laki dalam memimpin keluarga keluarga, dan untuk mengetahui masa depan keberlanjutan pernikahan keluarga poligami.

METODE

Artikel ini menjelaskan sebuah penelitian hukum empiris, dengan data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (Efendi, 2023, p. 149). Analisis dalam penelitian ini berdasarkan kaidah poligami secara syar'i, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dikomparasikan berdasarkan prinsip kepala keluarga untuk mewujudkan keadilan dalam keluarga poligami. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, yang dilaksanakan dari awal bulan Maret hingga pertengahan bulan Mei tahun 2024. Penelitian ini melibatkan 24 pria sebagai narasumber, yang sedang atau pernah menjalani perkawinan poligami. Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan mendetail terhadap dinamika dalam keluarga narasumber, sedangkan wawancara dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Keluarga Poligami di Kecamatan Glagah Banyuwangi

Kecamatan Glagah di Banyuwangi terdiri dari delapan desa dan dua kelurahan, memiliki populasi sekitar 36.950 orang pada tahun 2022, menurut data dari Badan Pusat Statistik. Dari jumlah tersebut, sangat sedikit keluarga yang menerapkan poligami, dengan proporsi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan total populasi. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk berhati-hati dalam mengumpulkan data untuk menghindari kesalahpahaman dengan narasumber, mengingat penelitian ini menyangkut isu sosial yang kompleks dan sensitif.

Dari pengamatan terkait tempat tinggal para istri, ada 22 keluarga yang memilih tinggal terpisah dan menjauh dari keluarga lainnya, dimana 10 keluarga tinggal dengan hanya beda desa atau kelurahan, kemudian lima keluarga tinggal di luar Kecamatan Glagah, dan tujuh keluarga menetap di luar Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, terkait dengan dua keluarga yang sepakat tinggal bersama, mereka tetap menempati rumah yang berbeda, meskipun masih dalam satu pekarangan. Maka realita tempat tinggal ini tentu memberikan informasi terkait dengan adanya tingkat kerukunan dan kesepakatan yang tinggi dalam mengatur kehidupan bersama.

Jarak menjadi pilihan dalam mengatur hubungan pribadi dalam keluarga poligami yang dinamis, sehingga diperlukan situasi yang dapat menciptakan ruang lebih luas untuk meminimalisir risiko konflik yang mungkin muncul dari interaksi sosial yang tidak diharapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa narasumber, mereka membangunkan rumah untuk keluarga istri keduanya di kawasan perumahan elit karena masyarakat di sana cenderung lebih sibuk dengan kehidupan pribadi mereka, yang secara tidak langsung memberikan ruang bagi keluarga poligami untuk mempertahankan privasi dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih normal.

Keputusan untuk tinggal di lingkungan yang kurang berinteraksi merupakan salah satu usaha dalam menjaga stabilitas dengan tetangga sekitar, namun masih terdapat metode konvensional lain yang dapat diterapkan. Sebagai contoh, Pak S' yang sering mengadakan acara makan bersama dengan tetangga dalam rangka doa keselamatan, menunjukkan upaya untuk memperbaiki hubungan sosial. Sementara itu, Pak N' memilih untuk mengabaikan gosipan tetangga. Situasi ini

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

mencerminkan realitas sosial dimana stigma negatif masyarakat terhadap keluarga yang berpoligami masih belum terhapus sepenuhnya.

Latar Belakang Keputusan Berpoligami

Latar belakang pernikahan poligami sering kali bermula dari keinginan pria yang sudah menikah untuk menambah istri lagi. Dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, keputusan tersebut bila diambil tanpa kesepakatan dari semua pihak terkait, utamanya adalah istri pertama, maka keputusan itu berdampak kurang baik terhadap dinamika dan interaksi antara anggota keluarga dalam jangka panjang. Kondisi-kondisi yang mendasari keputusan untuk berpoligami, mulai dari alasan klasik, pribadi, hingga kultural, memerlukan pengkajian yang mendalam untuk memahami implikasinya terhadap struktur keluarga dan kesejahteraan semua individu yang terlibat. Pemahaman ini penting untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar memberikan solusi atau justru menambah kompleksitas dalam hubungan keluarga.

Terdapat berbagai alasan yang mendasari keputusan seorang laki-laki untuk berpoligami. Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1. kita dapat melihat beragam faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut.

Tabel 1. Alasan Umum Laki-Laki Berpoligami

Alasan Melakukan Poligami	**Partisipan** (org)	**Persentase**
Keinginan untuk menolong	5	20.83 %
Perasaan tertarik dengan wanita lain	11	45.83 %
Ingin memiliki keturunan	7	29.17 %
Lain-lain	1	4.17 %
	24	100%

(Sumber: Analisis Penulis)

Tabel 1. menunjukan data, bahwa alasan "Keinginan untuk Menolong" yang mencakup 20.83% dan dilihat sebagai yang paling beralasan jika dilakukan secara altruistik untuk membantu wanita dalam kesulitan seperti janda atau yang membutuhkan dukungan ekonomi, dengan syarat dilaksanakan secara adil dan mendapat persetujuan dari istri pertama. Namun, "Perasaan Tertarik dengan Wanita Lain" yang mencapai 45.83%, dianggap kurang beralasan karena bersifat egois dan berpotensi menciptakan ketidakharmonisan. Kemudian "Ingin Memiliki Keturunan" dengan 29.17% bisa dipertimbangkan jika pasangan pertama tidak dapat memiliki anak dan ada kesepakatan bersama, namun tetap memerlukan sensitivitas tinggi. Hasil analisis juga menggambarkan adanya keputusan untuk berpoligami paling banyak didorong oleh ketertarikan terhadap wanita lain, diikuti oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak keturunan, dan sebagian kecil oleh keinginan untuk menolong. Alasan lain-lain yang tidak spesifik hanya sedikit mempengaruhi keputusan ini. Dengan nilai 4.17%, seperti adanya situasi tertentu yang mendorong istri pertama menyuruh suaminya rujuk kembali dengan mantan istri yang telah menjanda, dengan alasan untuk kepentingan anak-anak dari pernikahan sebelumnya yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibu kandung mereka.

Uraian data di atas juga menggambarkan dinamika keputusan untuk membangun keluarga poligami lebih dipengaruhi oleh kepentingan sepihak, yaitu laki-laki. Meskipun alasan-alasan yang ada seperti motivasi keinginan untuk menolong, alasan semacam ini masih sangat sulit untuk dapat diterima, meskipun dilaksanakan dengan persetujuan dari istri pertama dan memberikan

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

manfaat nyata bagi perempuan yang memerlukan. Sementara itu, alasan perasaan tertarik pada wanita lain, maka alasan ini telah melanggar prinsip keterbukaan, dan hanya berorientasi pada kepentingan pribadi.

Status Perkawinan Poligami

Berdasarkan data yang terdapat pada Tabel 2. tersaji data status pernikahan poligami di Kecamatan Glagah adalah sebagai berikut;

Tabel 2. Status Pernikahan Poligami

Status Pernikahan Poligami	**Partisipan** (org)	**Persentase**
Poligami sudah sah secara hukum formal	3	12.50 %
Menikah siri dengan ijin istri pertama	5	20.83 %
Menikah siri namun tidak disetuji istri pertama	9	37.50 %
Menikah siri diam-diam	7	29.17 %
	24	100%

(Sumber: Analisis Penulis)

Berdasarkan data Tabel 2. di lapangan telah terjadi praktik perkawinan poligami yang tidak selaras dengan ketentuan hukum secara syar'i maupun secara formal. Hanya 12.5% perkawinan poligami yang telah mendapatkan pengesahan secara hukum formal, sementara sisanya terjadi melalui nikah siri, baik dengan pernikahan siri yang mendapat persetujuan maupun tanpa persetujuan istri pertama atau dilakukan secara diam-diam. Ketika praktik pernikahan siri dalam poligami menjadi kasus yang mayoritas, ini mengindikasikan telah menyalahi ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan ada persetujuan istri pertama dan dimohonkan dipengadilan secara resmi, sehingga pernikahan poligami yang dilakukan dengan tidak transparan tersebut sudah mengabaikan terhadap hak-hak istri pertama, dan berpotensi mendistorsikan prinsip keadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum syar'i.

Kondisi seperti ini menunjukan ada implikasi hukum dan sosial, bahwa pernikahan yang sah secara hukum formal dan dengan persetujuan istri pertama memiliki tingkat keabsahan tertinggi dan paling sesuai dengan norma hukum dan sosial, menjadikannya bentuk pernikahan poligami yang paling stabil dan diterima. Sebaliknya, pernikahan siri tanpa persetujuan istri pertama atau yang dilakukan secara diam-diam menunjukkan potensi konflik yang tinggi dan ketidakstabilan dalam rumah tangga, serta mencerminkan ketidakpatuhan terhadap norma sosial dan hukum, yang dapat menyebabkan masalah jangka panjang.

Analisis ini dapat membantu dalam memahami dinamika pernikahan poligami di Kecamatan Glagah dan memberikan dasar untuk intervensi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum. Sebab juga berdasarkan hasil wawancara dengan 11 narasumber terungkap fakta, bahwa mereka memilih menikah dengan cara poligami siri karena menganggap perkawinan siri lebih mudah dan simpel untuk dilakukan, karena menurut mereka, yang paling penting adalah harus sah dahulu menurut ajaran agama. Situasi ini menunjukkan bahwa mereka telah menyadari terkait syarat untuk berpoligami secara formal sangat rumit dan memiliki keterikatan dengan prosedur hukum yang membutuhkan banyak persyaratan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan stigma sosial atau konsekuensi hukum. Situasi ini mengindikasikan ada diskrepansi atau ketidak sesuaian yang signifikan antara hukum formal dan adat.

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

2. Kepemimpinan Laki-Laki Sebagai Kepala Keluarga Poligami

Peran dan Tanggung Jawab Sebagai Kepala Keluarga

Tanggung jawab kepala keluarga secara umum telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII, yang berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara umum mendefinisikan kerangka hak dan kewajiban suami dan istri dalam konstruksi keluarga, dengan memberikan penekanan pada kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga dan peran istri dalam pengelolaan rumah tangga. Oleh sebab itu, laki-laki sebagai kepala keluarga, berperan penting dalam struktur keluarga dan dituntut untuk memenuhi berbagai kewajiban hukum yang ditetapkan. Khusus dalam keluarga poligami, maka tanggung jawabnya bisa berlaku secara umum dan juga khusus, yaitu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, suami harus dapat memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada anggota keluarganya, menjamin ketersediaan pendidikan atau pengasuhan yang layak bagi anak-anak, serta mengelola pewarisan harta kekayaan keluarga secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam poligami kepatuhan kepada hukum dapat menjadi aspek penting, sebab adanya hukum adalah untuk melindungi semua anggota keluarga.

Berdasarkan Tabel 3. berikut tersaji data penilaian peran dan tanggung jawab kepala keluarga dalam poligami adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penilaian Peran dan Tanggung Jawab Kepala Keluarga Dalam Poligami

No	Topik	Persepsi	Partisipan (org)	Persentase
1.	Memiliki keyakinan telah memenuhi kebutuhan dasar secara adil	Ya	3	12.50 %
		Tidak	3	12.50 %
		Pikir-pikir	18	75.00 %
			24	100%
2.	Memiliki keyakinan telah memberikan perhatian emosional yang cukup	Ya	1	4.17 %
		Tidak	8	33.33 %
		Pikir-pikir	15	62.50 %
			24	100%
3.	Memiliki komitmen telah menangani konflik internal dalam keluarga secara yang adil dan efektif	Ya	8	33.33 %
		Tidak	6	25.00 %
		Pikir-pikir	10	41.67 %
			24	100%
4.	Memiliki keterbukaan dan transparansi saat membahas rencana keuangan dengan semua istri	Ya	0	0 %
		Tidak	9	37.50 %
		Pikir-pikir	15	62.50 %
			24	100%
5.	Mampu memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang sama dan memadai	Ya	12	50.00 %
		Tidak	5	20.83 %
		Pikir-pikir	7	29.17 %
			24	100%
6.		Ya	6	25.00 %

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

Yakin telah memberikan perlindungan baik secara fisik, mental, dan hukum terhadap semua anggota keluarga	Tidak	5	20.83 %
	Pikir-pikir	13	54.17 %
		24	100%

(Sumber: Analisis Penulis)

Berdasarkan data Tabel 3. terlihat hanya sebagian kecil (12.50%) yakin bahwa kepala keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar secara adil, dengan persentase yang sama merasa sebaliknya dan mayoritas (75%) masih ragu-ragu. Mengenai perhatian emosional, sebagian besar narasumber (62.50%) belum yakin akan ketercukupannya, sedangkan hanya 4.17% yang yakin. Dalam pengelolaan konflik internal, 33.33% narasumber percaya kepala keluarga memiliki komitmen yang efektif, namun 41.67% masih mempertimbangkan hal tersebut. Terkait transparansi finansial, tidak ada narasumber yang yakin akan keterbukaan kepala keluarga, dengan sebagian besar (62.50%) menyatakan keraguan. Sebagai aspek positif, 50% narasumber yakin kepala keluarga mampu menjamin akses pendidikan yang sama untuk semua anak. Namun, dalam hal perlindungan secara menyeluruh terhadap anggota keluarga, lebih dari setengah (54.17%) masih ragu-ragu.

Hasil analisis menunjukkan ada beberapa area kritis yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan keluarga poligami. Sementara aspek pendidikan anak tampaknya dikelola dengan baik, ada kebutuhan mendesak untuk peningkatan dalam transparansi keuangan, dukungan emosional, dan manajemen konflik. Sehingga terkait peran dan tanggung jawab kepala keluarga harus dapat meningkatkan komunikasi melalui keterbukaan. Selain itu, penting untuk memastikan konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara adil.

Ada tingkat ketidakpastian yang signifikan di antara narasumber mengenai efektivitas kepala keluarga dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan persentase rata-rata yang rendah terkait pemenuhan kebutuhan dasar secara adil, perhatian emosional yang cukup, dan pengelolaan konflik internal secara efektif, data ini menunjukkan adanya kekhawatiran serius mengenai penerapan keadilan dan kesetaraan dalam keluarga poligami. Kemudian terkait dengan adanya sikap keterbukaan dalam keuangan yang minim dan ketidakpastian yang tinggi terkait dengan upaya memberikan perlindungan bagi anggota keluarga, baik secara fisik, mental, maupun hukum, ini mengindikasikan praktek poligami tidak selalu berjalan sesuai dengan ideal sesuai kaidah hukum, baik syar'i maupun hukum formal.

Kualitas Kepemimpinan Kepala Keluarga Poligami

Terkait kepemimpinan kepala keluarga dalam konteks poligami menurut hukum syari'ah, KHI, dan UU Perkawinan menunjukkan bahwa keefektifan kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan manajerial atau administratif tetapi juga dari kemampuan untuk memenuhi kewajiban hukum dan moral terhadap semua anggota keluarga, namun juga dapat dinilai berdasarkan tingkat kualitas kepemimpinan mereka dalam menerapkan konsep partisipatif dalam keluarga, sehingga mendorong keterlibatan semua anggota keluarga dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Tabel 4. berikut tersaji data mengenai kualitas kepemimpinan kepala keluarga dalam poligami yang dinilai berdasarkan sikap kepala keluarga disaat; mengambil keputusan dalam situasi kritis, mengatur keuangan keluarga, dan mengelola sumber daya keluarga.

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

Tabel 4. Kualitas Kepemimpinan Kepala Keluarga

No	Topik	Sikap	Partisipan (org)	Persentase
1.	**Mengambil keputusan dalam situasi krisis;**			
	Bertindak cepat dengan inisiatif pribadi	Ya	13	54.17 %
		Tidak	3	12.50 %
		Pikir-pikir	8	33.33 %
			24	100%
	Sering meminta masukan dari anggota keluarga lain	Ya	6	25.00 %
		Tidak	10	41.67 %
		Pikir-pikir	8	33.33 %
			24	100%
2.	**Mengatur keuangan keluarga;**			
	Memiliki rencana anggaran tetap untuk belanja bulanan keluarga	Ya	8	33.33 %
		Tidak	12	50.00 %
		Pikir-pikir	4	16.67 %
			24	100%
	Secara teratur menyisihkan dana untuk kebutuhan darurat atau mendadak bagi setiap anggota keluarga	Ya	16	66.67 %
		Tidak	6	25.00 %
		Pikir-pikir	2	8.33 %
			24	100%
3.	**Mengelola sumber daya keluarga;**			
	Efektif dalam mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan keluarga	Ya	8	33.33 %
		Tidak	10	41.67 %
		Pikir-pikir	6	25.00 %
			24	100%
	Bisa mengalokasikan waktu untuk membahas dan merencanakan penggunaan sumber daya keluarga dengan semua anggota keluarga	Ya	9	37.50 %
		Tidak	3	12.50 %
		Pikir-pikir	12	50.00 %
			24	100%

(Sumber: Analisis Penulis)

Data dari Tabel 4. menunjukkan variasi dalam pendekatan kepemimpinan kepala keluarga dalam konteks poligami, terutama dalam menghadapi situasi krisis, mengatur keuangan, dan mengelola sumber daya keluarga. Dalam situasi krisis, mayoritas kepala keluarga cenderung mengambil inisiatif pribadi dengan cepat (54.17%), tetapi kurang dari sepertiga sering meminta masukan dari anggota keluarga lain (25%). Dalam hal keuangan, hanya sepertiga yang memiliki rencana anggaran bulanan yang tetap (33.33%), sementara lebih dari setengahnya (66.67%) secara teratur menyisihkan dana untuk kebutuhan mendadak. Untuk pengelolaan sumber daya, sekitar sepertiga efektif mengelola sumber daya yang ada (33.33%) dan 37.50% berhasil mengalokasikan waktu untuk merencanakan penggunaan sumber dengan anggota keluarga.

Berdasarkan data, terkait sikap kepala keluarga dalam kepemimpinan individu, kepala keluarga dalam poligami cenderung bertindak secara mandiri saat menghadapi situasi krisis dan

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

jarang meminta masukan dari anggota keluarga lain, yang menunjukkan gaya kepemimpinan yang lebih top-down daripada partisipatif. Dalam perencanaan keuangan, kepala keluarga cukup baik dalam menyisihkan dana untuk kebutuhan darurat, tetapi kurang memiliki rencana anggaran tetap, mengindikasikan kesadaran akan pentingnya dana darurat namun perlu peningkatan dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Manajemen sumber daya dalam keluarga juga masih kurang efektif dengan rendahnya keterlibatan anggota keluarga dalam perencanaan, menunjukkan perlunya peningkatan dalam manajemen dan komunikasi dalam keluarga.

Kemudian berdasarkan KHI, bahwa nilai kualitas kepemimpinan lebih banyak terfokus pada aspek perlindungan, pemberian nafkah, dan harmonisasi kehidupan keluarga. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (1) dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan memberikan kerangka bagi suami untuk bertindak sebagai pemimpin keluarga, yang mencakup penyediaan nafkah dan perlindungan, serta mendefinisikan peran kepemimpinan istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

Sehingga secara keseluruhan, kualitas kepemimpinan kepala keluarga dalam poligami dapat ditingkatkan dengan memperbaiki komunikasi, keterlibatan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sedangkan terkait sikap kepala keluarga yang kadang kala terbuka dan kadang tertutup dapat ditoleransi sebagai sikap yang wajar, meskipun sikap tersebut tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan secara formalitas.

Dukungan Sosial Dalam Keluarga Poligami

Berdasarkan Tabel 5. tersaji data terkait hubungan dengan kerabat dan data jejaring sosial sebagai berikut:

Tabel 5. Hubungan Dengan Kerabat dan Jejaring Sosial

No	Topik	Sikap	Partisipan (org)	Persentase
1.	Yakin mampu mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan kerabat	Ya	9	37.50 %
		Tidak	5	20.83 %
		Pikir-pikir	10	41.67 %
			24	100%
2.	Ikut aktif dalam kegiatan masyarakat sekitar, untuk membantu memperkuat jaringan sosial keluarga	Ya	11	45.83 %
		Tidak	6	25.00 %
		Pikir-pikir	7	29.17 %
			24	100%

(Sumber: Analisis Penulis)

Berdasarkan uraian data Tabel 5. diatas terungkap ada persepsi dan partisipasi keluarga poligami dalam mempertahankan hubungan sosial yang harmonis, dengan 37.50% responden yakin akan kemampuannya dan 41.67% lainnya masih mempertimbangkan kemampuannya dalam memelihara hubungan baik dengan kerabat. Partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas mencapai 45.83%, menandakan upaya yang kuat dalam memperkuat jaringan sosial.

Interpretasi terhadap data menunjukkan bahwa kedua aspek, yaitu partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan keyakinan dalam menjaga hubungan dengan kerabat, memiliki nilai yang tinggi.

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

Namun, partisipasi dalam kegiatan masyarakat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keyakinan dalam menjaga hubungan dengan kerabat. Ini mengindikasikan bahwa dalam konteks dukungan sosial dalam keluarga poligami, partisipan lebih cenderung aktif dalam kegiatan masyarakat daripada hanya berfokus pada hubungan dengan kerabat. Meskipun partisipan memiliki keyakinan moderat dalam kemampuan mempertahankan hubungan dengan kerabat, keterlibatan dalam kegiatan sosial lebih ditekankan oleh mereka.

Keterlibatan dalam kegiatan masyarakat juga dapat dianggap sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam hukum syar'i dan juga termasuk berdasarkan KHI serta UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terkait hubungan antar keluarga dan partisipasi sosial dalam masyarakat harus bisa terjalin harmonis, hal ini dilakukan agar dapat pengurangan konflik, baik dalam lingkup keluarga maupun dengan masyarakat sekitar, yang secara psikologis dapat meningkatkan kedamaian.

Adanya dukungan sosial dalam struktur keluarga poligami tentu akan memiliki esensi yang dapat mengurangi konflik baik dari lingkup internal maupun eksternal. Berdasarakan data partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat sebesar 45,83%, hubungan ini menunjukkan bahwa keluarga telah berusaha keras untuk selalu menjaga hubungan baik dengan kerabat maupun dengan masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga peran kepala keluarga dalam menyediakan dukungan sosial itu tidak hanya terbatas pada memberi bantuan finansial tetapi juga meliputi partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Sebab dengan adanya hubungan sosial dalam masyarakat, secara signifikan dapat meningkatkan kohesi sosial yang akan menumbuhkan toleransi antar anggota masyarakat disekitar tempat tinggal keluarga.

3. Gambaran Masa Depan Keberlanjutan Keluarga Poligami

Stabilitas hubungan keluarga poligami dalam jangka panjang sangat tergantung pada kemampuan kepala keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Situasi ini tentu juga memiliki hubungan langsung dengan dinamika kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Tabel 6. tersaji data yang menjelaskan aspek-aspek yang memiliki kaitan dengan pengalaman dan persepsi kepala keluarga dalam berpoligami.

Tabel 6. Pengalaman dan Persepsi Kepala Keluarga Poligami

No	Topik	Tanggapan	Partisipan (org)	Persentase
1.	Peningkatan kualitas hidup setelah menjalani poligami	Ada	4	16.67 %
		Tidak ada	5	20.83 %
		Tidak tahu	15	62.50 %
			24	100%
2.	Peningkatan konflik dalam keluarga poligami	Ada	24	100 %
		Tidak ada	0	0 %
		Tidak tahu	0	0 %
			24	100%
3.	Pengaruh saudara, teman, dan tetangga terhadap konflik keluarga poligami	Ada	15	62.50 %
		Tidak ada	0	0 %
		Tidak tahu	9	37.50 %

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

			24	100%
4.	Pernah berfikir untuk mengakhiri komitmen pernikahan poligami	Ada	9	37.50 %
		Tidak ada	5	20.83 %
		Tidak tahu	10	41.67 %
			24	100%
5.	Keinginan mengesahkan status poligami siri secara formal	Ada	11	52.38 %
		Tidak ada	3	14.29 %
		Tidak tahu	7	33.33 %
			21	100%

(Sumber: Analisis Penulis)

Hasil analisis terhadap data Tabel 6. menunjukkan banyak ketidakpastian di kalangan partisipan mengenai manfaat poligami terhadap kualitas hidup dan komitmen mereka, yang mungkin disebabkan oleh tekanan sosial, konflik internal, dan kurangnya informasi. Selain itu, konflik dalam keluarga poligami sangat tinggi dan merupakan masalah universal bagi semua partisipan, mengindikasikan bahwa poligami lebih menimbulkan stres dan ketegangan daripada manfaat bagi keluarga. Lingkungan sosial juga memainkan peran besar dalam konflik keluarga poligami, menandakan pentingnya dukungan atau tekanan sosial dalam pengalaman berpoligami. Partisipan juga menunjukkan keinginan yang signifikan untuk mengesahkan status poligami mereka, menunjukkan adanya kebutuhan untuk pengakuan formal yang mungkin bisa membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik yang mereka hadapi.

Kondisi ini mengindikasikan ada kebutuhan darurat terkait dengan perlindungan hukum, yaitu untuk melindungi hak-hak hukum bagi setiap individu yang terdampak dalam keluarga-keluarga tersebut. Sebab hasil analisis ini dapat digunakan untuk memahami lebih dalam dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga poligami, serta untuk menginformasikan kebijakan atau intervensi yang dapat mendukung mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukan adanya tantangan besar dalam praktik perkawinan poligami di Kecamatan Glagah Banyuwangi, sebab perkawinan poligami yang terjadi dominan hanya kepentingan sepihak dari suami. Selain itu terkuak fakta, mayoritas (87,5%) status perkawinan poligami mereka masih berstatus siri. Kondisi yang seperti ini juga dapat menggambarkan masih belum terwujudnya cita-cita kesejahteraan dan keadilan dalam keluarga poligami, yang berdasarkan norma hukum dapat dinilai berdasarkan kesadaran beberapa keluarga poligami (12,5%) yang telah memenuhi kriteria dasar dalam memberikan perlindungan secara formal, yaitu tiga keluarga yang telah mengesahkan status perkawinan poligami mereka. Selain terkait fakta lainnya yang secara struktural menunjukkan banyak kelemahan kepala keluarga dalam memimpin keluarga poligami.

Bahwa ada lebih dari 52% keluarga poligami, yang tetap berkomitmen untuk tetap mempertahankan perkawinan poligami mereka, sebab ada keinginan dari beberapa keluarga poligami untuk mengesahkan secara hukum ke pengadilan. Fakta ini menunjukkan adanya harapan besar keluarga-keluarga yang masih terlibat dalam perkawinan poligami siri untuk mendapatkan kepastian hukum. Oleh sebab itu manjadi perlu untuk disarankan kepada pihak-pihak terkait agar memberikan pendampingan hukum bagi mereka, selain terkait adanya upaya

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

untuk meningkatkan pengawasan, dalam menerapkan hukum yang lebih ketat terkait praktik poligami di masyarakat luas. Saran ini penting agar keluarga-keluarga yang menjalani poligami benar-benar dapat menjalankan ketentuan hukum secara formal, sebab pemerintah melalui lembaganya telah proaktif dalam memberikan dukungan dan perlindungan hukum kepada anggota keluarga pelaku poligami yang memiliki resiko rentan terhadap diskriminasi dan ketidak adilan.

REFERENSI

Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Kedua. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana.

Fuadi, M. (2013). *Teori-Teori Besar* (*Grand Theory*) *Dalam Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

Hakim, A. (2022). Reasons for Polygamy and Its Impact on Muslim Family Life: Experiences of Polygamous Perpetrators in Babat, Lamongan, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 3(1), 34-53. Retrieved April 19, 2024, from doi: https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.529

Hayatuddin, A.K., Widiani, D., & Rohmah, B.E. (2022). Socio-Juridical Analysis on Polygamy Requirements in the Compilation of Islamic Law (KHI). *Al-'Adalah*, 19(1), 195-222. Retrieved April 19, 2024, from doi: https://doi.org/10.24042/al-'adalah.v19i1.10266

Jumala, N., & Zawil, M. (2023). Sakinah Family Portrait in A Polygamous Family (The Negative Impact of Polygamy of Children's Welfare in Families in North Aceh Region, Indonesia). *Jurnal Diklat Keagamaan*, 16(1), 88-99. Retrieved April 19, 2024, from doi: https://doi.org/10.52048/inovasi.v17i1.405

Kelsen, H. (Ed). (1996). *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Ma'u, D.H. (2023). The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia, *Samarah*, 7(2), 669-686. Retrieved April 19, 2024, from doi: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8519

Mertokusumo, S. (2019). *Teori Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Notonegoro, (1971). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara.

Salim, H.S., & Nurbani, E.S. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua. Cetakan Ketiga. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Cetakan Kedelapan. Bandung: CV. Alfabeta.

Tim Literasi Nusantara. (2021). *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Cetakan Pertama. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.

Wirastri, T.D., & Huis van, S.C. (2021). The Second Wife: Ambivalences Towards State Regulation of Polygamy in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 1-23. Retrieved April 19, 2024, from doi: https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1912579

Yunus, M., dkk. (2023). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Cetakan Ketiga. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.

Zuhaili, W. (2001). *Tafsir Al-Munir Aqidah-Syariah-Manhaj*. Terjemah. Kattani 2013. Jakarta: Gema Insani.

Hak Cipta © 2024, Abu Sufyan, Marthin Fransisco Manihuruk

Analisis Implementasi Strategi *Minus Growth* Kementerian Keuangan Berdasarkan Model 7S Mckinsey

Ade Trisha Darnanti[1], Benny Sigiro[2]
[1] Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
[2] Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, UniversitasTerbuka
email: ade.trisha@gmail.com , bennys@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan fit for purpose, serta pelayanan yang prima kepada stakeholder sebagai akibat dari adanya revolusi industri, pandemi covid- 19, dan masuknya masa Kabinet Indonesia Maju periode kedua, Kementerian Keuangan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia, salah satunya dengan menerapkan strategi minus growth. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi strategi minus growth pada Kementerian Keuangan dengan menggunakan model 7S McKinsey. Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur. Hasil kajian pada artikel ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah melampaui target minus growth yang ditetapkan dalam Renstra Kemenkeu 2022-2024 yaitu menunjukkan angka -4,35% dengan target hingga akhir 2024 adalah -3,95%. Realisasi capaian target sebesar -4,35% merupakan hasil penghitungan dari jumlah pegawai yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 82.468 menjadi 78.882 pada tahun 2022. Dapat disimpulkan bahwa Kementerian Keuangan telah mampu mengimplementasikan strategi minus growth dengan baik berdasarkan data dukung dan teori yang digunakan. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala agar implementasi minus growth dapat semakin optimal.

***Kata kunci**: Implementasi Strategi, Kementerian Keuangan, Minus Growth, Model 7S McKinsey.*

PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri keempat atau yang lazim disebut Era Revolusi Industri 4.0 memunculkan sebuah idiom popular yang bernama disrupsi. Disrupsi yang muncul akibat revolusi industri ini memberikan dampak yaitu adanya perubahan pada proses bisnis sebagian besar organisasi, baik sektor privat maupun publik. Penyederhanaan proses bisnis dan otomatisasi perlu diberlakukan pada cakupan yang lebih luas dan harus terus ditingkatkan (Kementerian Keuangan, 2020). Era Revolusi Industri ini menuntut organisasi untuk memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni agar mampu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang membawa berbagai macam dampak yang berbeda-beda. Pada kenyataannya, pandemi Covid-19 tidak hanya membawa dampak terhadap kesehatan, namun juga berdampak pada kondisi perekonomian, kehidupan sosial, pendidikan, serta pada bidang pekerjaan (Joesah, 2021).

Era ini kemudian memunculkan adanya kemungkinan penurunan beban kerja yang kemudian berimbas pada optimalisasi dan efisiensi pegawai khususnya pada organisasi sektor publik yaitu pemerintah. Lebih lanjut, adanya arahan reformasi birokrasi yaitu penyederhanaan birokrasi secara tidak langsung menuntut diaturnya pengelolaan SDM yang lebih efektif dan efisien. Pada keadaan tersebut, penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dihitung

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

berdasarkan analisis beban kerja menjadi kurang relevan karena seharusnya memerlukan analisis yang lebih komprehensif (Kementerian Keuangan, 2020). Padahal, SDM memiliki peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena mereka memiliki peran sebagai penentu dan penggerak berlangsungnya segala aktivitas organisasi. SDM juga memiliki andil yang besar dalam penentuan maju dan berkembangnya suatu organisasi. Kemudian, masuknya pemerintahan Kabinet Indonesia Maju periode kedua secara tidak langsung mengharuskan instansi pemerintah untuk menyusun dan menyesuaikan Rencana Strategisnya dengan RPJMN Pemerintah periode 2020-2024 dan visi misi presiden.

Sebagai bentuk respon atas masuknya era revolusi industri, adanya pandemi Covid-19, dan berjalannya pemerintahan Kabinet Indonesia Maju periode kedua, Kementerian Keuangan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan SDM Kementerian Keuangan agar mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Pengelolaan atau manajemen SDM merupakan sebuah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen SDM memiliki beberapa peranan seperti menetapkan penempatan tenaga kerja, menetapkan seleksi, mengatur mutasi, memperkiraan keadaan perekonomian, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan promosi, pemberhentian, mengatur pensiun dan pesangonnya, dan lainnya (Hasibuan, 2017). Upaya pengelolaan SDM ini kemudian dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Salah satu strategi yang dirumuskan demi mewujudkan optimalisasi SDM tersebut yaitu dengan mengimplementasikan strategi prioritas salah satunya adalah kebijakan *minus growth*.

Manajemen strategi merupakan suatu ilmu untuk melakukan perumusan, penerapan atau implementasi, dan evaluasi dari segala keputusan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuannya (David, 2009). Adnan & Hamim (2013) menyebutkan bahwa adanya manajemen strategi adalah sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien hingga pada implementasi sehingga tujuan atau sasarannya dapat tercapai. Perusahaan yang menggunakan manajemen strategis cenderung menunjukkan perubahan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki perencanaan strategi yang sistematis. Manajemen strategi dapat meliputi pengamatan lingkungan, perumusan atau perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian (Sudiantini, 2022).

Strategi *minus growth* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan diimplementasikan melalui beberapa kegiatan yaitu moratorium rekrutmen PKN STAN dan CPNS, redistribusi pegawai, dan implementasi kebijakan *exit strategy* (Kementerian Keuangan, 2020). Strategi *minus growth* tertuang dalam Rencana Strategis dan *Roadmap* Pengelolaan ASN Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang kemudian diturunkan ke dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Harapannya, dengan diimplementasikannya strategi ini akan mampu membantu Kementerian Keuangan dalam mengelola sumber daya manusianya dengan lebih baik dan tepat guna. Agar dapat melihat hal tersebut, maka dapat dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan model 7S McKinsey.

Model McKinsey 7S dikembangkan oleh McKinsey & Co. pada akhir tahun 1970-an sebagai kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk mendiagnosa masalah-masalah organisasi dan memformulasikan berbagai program perbaikan. Model 7S McKinsey memiliki tujuh elemen yang saling bergantung satu dengan lainnya yang terdiri dari strategi, struktur, *skill*, *staff*, sistem, *style*, dan *shared values* (Channon & Caldart, 2015). Ketujuh elemen tersebut

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu *the hard S's* yaitu struktur, strategi, dan sistem, sedangkan *the soft S's* yaitu *style*, *skill*, *staff*, dan *shared value* (Choerudin, 2019). Berikut penjelasan tiap-tiap elemen dari metode 7S McKinsey (Channon & Caldart, 2015):

1. *Strategic*

Strategi dianggap sebagai serangkaian tindakan terencana yang dilakukan perusahaan sebagai tanggapan atau untuk mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Tindakan-tindakan ini dirancang untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan menawarkan nilai yang berbeda kepada para pelanggannya. Intinya strategi merupakan arahan yang digunakan untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif perusahaan.

2. *Structure*

Tantangan utama terkait struktur organisasi terletak pada kemampuan untuk berkonsentrasi pada dimensi atau parameter desain yang penting bagi evolusi perusahaan saat ini, namun tetap dapat beradaptasi dengan perubahan dalam dimensi kritis ini. Parameter desain tambahan mencakup tingkat formalisasi dalam perilaku unit, desentralisasi pengambilan keputusan, dan perlunya mekanisme koordinasi horizontal antar unit. Intinya struktur merupakan struktur organisasi yang dimiliki perusahaan yang mengatur alur komunikasi, wewenang, tanggung jawab, dan pembagian tugas tiap karyawan.

3. *System*

Sistem merupakan prosedur formal dan informal yang mendorong fungsi organisasi. Sangat penting untuk memahami prosedur resmi dan cara kerja praktis organisasi, karena cara kerja praktis sering kali lebih bergantung pada sistem informal daripada sistem formal. Intinya sistem merupakan prosedur atau proses yang akan dilakukan oleh perusahaan yang berisikan aktivitas operasional dan pembuatan keputusan.

4. *Style*

Gaya manajemen, terutama gaya CEO, merupakan faktor penting dalam menentukan kemungkinan strategis bagi perusahaan, meskipun sering diabaikan. Pertimbangan utama termasuk kegiatan utama CEO, apakah manajer puncak cenderung melakukan manajemen mikro atau tetap terpisah dari operasi, pendekatan mereka terhadap perencanaan yang cermat atau fokus reaktif pada hal-hal yang mendesak, orientasi pasar mereka, dan tingkat kenyamanan mereka dalam mengambil risiko yang diperlukan. Intinya *style* adalah gaya kepemimpinan yang digunakan pimpinan organisasi dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

5. *Staff*

McKinsey memandang karyawan sebagai sumber daya yang berharga yang membutuhkan pemeliharaan, pengembangan, perlindungan, dan alokasi strategis. Peran manajer puncak disoroti dalam memastikan bahwa perusahaan menarik eksekutif muda berbakat dan memberi mereka jalur karir yang terencana dengan cermat dari peran awal mereka, dengan menekankan kontribusi substansial terhadap aspek fundamental bisnis. Intinya *staff* adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan yang digolongkan sebagai aset perusahaan/organisasi.

6. *Skill*

Skill memungkinkan perusahaan untuk menilai kemampuannya secara realistis berdasarkan faktor keberhasilan kritis yang relevan dengan bisnis mereka. Tantangan khusus mungkin melibatkan identifikasi dan penghapusan keterampilan yang sudah ketinggalan zaman, yang berpotensi menjadi hambatan signifikan terhadap perubahan penting dan menghambat pengembangan keterampilan baru yang dibutuhkan. Intinya *skill* merupakan kompetensi

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

karyawan yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan.

7. *Shared values*

Shared values berkisar pada tujuan-tujuan yang lebih tinggi dan nilai- nilai bersama yang menjadi fokus utama organisasi. Nilai-nilai ini mengekspresikan keyakinan dan aspirasi fundamental organisasi, yang membentuk esensi budaya perusahaan. Intinya, *shared values* adalah nilai-nilai yang melekat pada perusahaan yang kemudian menjadi budaya perusahaan tersebut dan menjadi pedoman bagi karyawan dalam berperilaku di perusahaan tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan model 7S McKinsey ini memiliki tujuan mendiagnosis efektivitas implementasi strategi yang dirumuskan oleh perusahaan (Djuardi et al., 2019). Jika suatu organisasi ingin mencapai keadaan keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan, maka mereka harus mampu memperoleh dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki. Baik tidaknya implementasi strategi berdasarkan model 7S McKinsey diukur melalui keselarasan 7 aspek tersebut. Apabila 7 aspek dalam model 7S McKinsey telah selaras, maka perusahaan atau organisasi dapat mengimplementasikan strategi-strateginya dengan lebih baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya (Eddy, 2020).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mencoba menganalisis bagaimanakah implementasi dari strategi *minus growth* yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan pendekatan model 7S McKinsey. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Maulyan & Sandini (2023), keberhasilan implementasi strategi bergantung pada harmonisasi keseluruhan elemen pada model 7S McKinsey. Ketidaksesuaian salah satu elemennya dapat mempengaruhi pelaksanaan strategi secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan penelitian Eddy (2020) yang menyebutkan bahwa apabila 7 aspek dalam model 7S McKinsey telah selaras, maka perusahaan atau organisasi dapat mengimplementasikan strategi-strateginya dengan lebih baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini difokuskan untuk membahas keselarasan strategi *minus growth* yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak 2020 hingga 2022. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi *minus growth* Kementerian Keuangan melalui model 7S McKinsey dan diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada pihak-pihak yang terkait. Analisis yang dilakukan dituangkan dalam bentuk artikel dengan judul "Analisis Implementasi Strategi *Minus Growth* Kementerian Keuangan Berdasarkan Model 7S McKinsey".

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi strategi *minus growth* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dengan menggunakan analisis implementasi dengan pendekatan model 7S McKinsey. Pengkajian dengan menggunakan Model 7S McKinsey ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mengimplementasikan strategi *minus growth* tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan membaca dan menelaah berbagai himpunan peraturan perundang-undangan, laporan, artikel ilmiah terdahulu, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam menulis dan menyusun artikel ilmiah ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui berbagai macam dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

HASIL DAN PEMBAHASAN

SDM Kementerian Keuangan dan Target *Minus Growth*

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menerapkan strategi *minus growth* pada Kementerian Keuangan sejak tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. *Minus growth* merupakan kebijakan untuk menurunkan jumlah pegawai yang ada dengan cara mengatur tingkat penerimaan pegawai yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengurangan pegawai melalui pensiun atau cara lainnya. Rencana pemenuhan kebutuhan SDM dihitung dengan memperhatikan beberapa hal yaitu kebijakan nasional yang berkaitan dengan pengadaan ASN, restrukturisasi organisasi, sasaran kinerja dan prioritas program unggulan, jumlah pegawai yang akan berhenti, kompetensi utama yang dibutuhkan organisasi, pertimbangan akan komposisi SDM, jalur pemenuhan pegawai, dan adanya calon pelamar (Kementerian Keuangan, 2020).

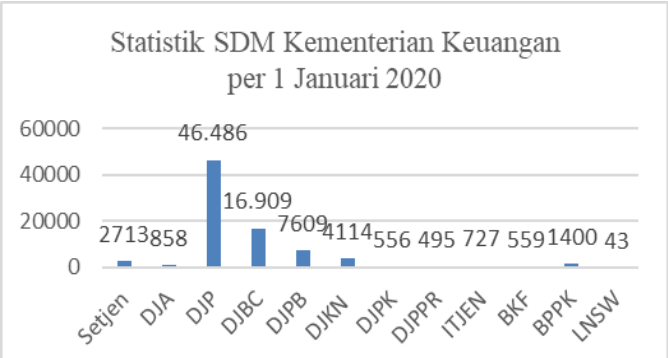
Selain itu, kebutuhan SDM juga dihitung dengan memperhatikan arahan dari Menteri Keuangan (*top-down approach*) agar *minus growth* selalu memperhatikan segala tantangan pengelolaan keuangan yang dapat muncul, kebutuhan pembentukan ulang (*reshaping*) organisasi, serta penataan penempatan lulusan PKN STAN. Strategi *minus growth* yang dilaksanakan selama 5 tahun ini secara tidak langsung akan mendorong pemanfaatan teknologi dan implementasi *Enterprise Architecture*, penerapan *new ways of working* (NWOW), penyederhanaan proses bisnis, dan optimalisasi SDM Kementerian Keuangan melalui pengembangan kompetensi SDM sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pegawai. Selain menjadi lebih ramping, strategi *minus growth* ini juga diharapkan membuat pelaksanaan proses bisnis Kementerian Keuangan menjadi lebih efisien karena potensi dari tiap-tiap SDM dapat lebih dioptimalkan.

Lebih lanjut, target *minus growth* yang ditetapkan selama 5 tahun ke depan yaitu mulai 2020 hingga 2024 adalah sebesar -3,95% di akhir tahun 2024, sehingga secara proporsional Kementerian Keuangan harus mengendalikan laju pertumbuhan pegawai sebesar -0,79% tiap tahunnya. Strategi *minus growth* ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan diantaranya yaitu moratorium PKN STAN dan CPNS, redistribusi pegawai, dan implementasi *exit strategy*. Moratorium *CPNS* dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga 2024 sedangkan moratorium PKN STAN dilaksanakan pada tahun 2020 dan dapat menyesuaikan. Kemudian, redistribusi pegawai dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai untuk memanfaatkan SDM Kementerian Keuangan secara *full employment* dan *full capacity* sebagai akibat dari dilaksanakannya moratorium. Redistribusi ini dilakukan secara bertahap dan apabila masih belum mencukupi maka akan dipenuhi melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain melalui rekrutmen, redistribusi juga dilakukan dalam bentuk mutasi, promosi, maupun *Internal Job Vacancy* (IJV) yaitu merupakan kesempatan yang diberikan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan, baik pelaksana maupun pejabat, untuk mutasi antar unit Eselon I/Non Eselon dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kompetensi, komposisi pegawai, *dan* pengalaman lintas fungsi (*cross function*) sesuai dengan pilihan karir masing- masing dengan tetap mempertimbangkan formasi yang tersedia berbasis sistem merit. Setelah diimplementasikannya strategi ini, pada tahun 2023 Kementerian Keuangan akan memperoleh hasil evaluasi implikasi penerapan strategi terhadap kebutuhan SDM. Atas hasil evaluasi yang dilakukan, apabila ditemukan ketidaksesuaian jumlah pegawai dengan kompetensi pegawai yang menyebabkan munculnya pegawai *idle*, maka Kementerian Keuangan akan menerapkan kebijakan *exit strategy*.

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti,' Benny Sigiro

Data kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan per tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan data yang diambil dari aplikasi *Human Resources Information System* (HRIS) dengan telah memperhitungkan lulusan PKN STAN tahun 2019 yang ditempatkan pada unit- unit Eselon I terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019 adalah sejumlah 82.451 orang.



Gambar 3. Data Persebaran Pegawai Kementerian Keuangan per 1 Januari 2020
Sumber: Laporan Kinerja PMO Kementerian Keuangan Tahun 2020

Implementasi Strategi *Minus Growth* Kementerian Keuangan 2020-2022
Tahun 2020

Target *minus growth* yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2020 adalah sebesar -0,5% s.d. -0,6%. Pertumbuhan pegawai dihitung berdasarkan perbandingan antara penambahan atau pengurangan pegawai selama satu tahun dengan jumlah pegawai yang ada di awal tahun. Implementasi strategi *minus growth* ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan diantaranya:

a. Redistribusi pegawai
   Pelaksanaan redistribusi dilakukan melalui *Internal Job Vacancy* (IJV) mutasi/promosi antar unit Eselon I baik karena penugasan atau atas permintaan sendiri. Tujuan redistribusi pegawai adalah agar formasi jabatan yang kosong dapat terisi sesuai kebutuhan organisasi dan arah karir pegawai tanpa harus menambah pegawai baru dari luar Kementerian Keuangan. Selama tahun 2020, terdapat 64 pegawai yang diredistribusi melalui IJV dan 52 orang melalui mutasi/promosi.
b. Pengembangan kompetensi
   Pengembangan kompetensi dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Data menunjukkan bahwa sebanyak 956 orang telah kembali dari tugas belajar pada tahun 2020. Sedangkan pegawai yang baru memulai tugas belajar sebanyak 199 orang. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan juga dilaksanakan melalui pemberian izin tugas belajar.
c. Rekrutmen
   Melaksanakan rekrutmen rekrutmen selektif CPNS dari rekrutmen umum dan lulusan PKN STAN. Penambahan pegawai melalui rekrutmen ini terdiri dari 89 orang rekrutmen umum dan 1.433 orang rekrutmen lulusan PKN STAN.

Jumlah pegawai Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2020 sebesar 82.024 orang. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 82.468 orang maka terdapat penurunan jumlah SDM sebanyak 444 orang, atau tumbuh negatif

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

sebesar -0,54%. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2020 yaitu sebesar -0,5% s.d. -0,6%.

Tahun 2021

Berdasarkan data pada Laporan *Project Management Office* (PMO) Kementerian Keuangan Tahun 2021, target *minus growth* yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2020 adalah sebesar -0,7% dengan realisasi sebesar -1,56% yang setara dengan penurunan 1.277 pegawai. Rincian pertumbuhan *(growth)* pegawai tiap unit Eselon I (data telah mencakup keseluruhan pegawai pada unit terkait) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. *Growth* pegawai per unit Eselon 1 Kementerian Keuangan Tahun 2021

UNIT	BEZETTING 1 JAN 2021	BEZETTING 31 DES 2021	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN SDM	GROWTH
SETJEN	2.752	2.795	43	1,56%
DJA	880	879	- 1	- 0,11%
DJP	46 . 231	45 . 684	- 547	- 1,18%
DJBC	16 . 711	16 . 362	- 349	- 2,09%
DJPB	7 . 618	7 . 282	- 336	- 4,41%
DJKN	4 . 090	3 . 998	- 92	- 2,25%
DJPK	550	546	- 4	- 0,73%
DJPPR	389	506	17	3,48%
ITJEN	719	714	- 5	- 0,70%
BKF	561	560	- 1	- 0,18%
BPPK	1.367	1.329	- 38	- 2,78%
LNSW	68	104	36	52,94%
TOTAL	82.036	80.759	-1.277	-1,56%

Sumber: Hasil Olah Penulis

Implementasi strategi *minus growth* Tahun 2021 diwujudkan dalam beberapa kegiatan diantaranya (Kementerian Keuangan, 2021):

a. Redistribusi pegawai

Redistribusi pegawai pada tahun 2021 dilakukan melalui IJV dan mutasi dan promosi. IJV pada tahun ini dilaksanakan sebanyak satu kali. Waktu pelaksanaannya mulai tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan 29 September 2021. Terdapat 417 formasi jabatan yang dibuka yang terdiri dari 386 jabatan pelaksana, 22 jabatan fungsional, serta 9 jabatan.

Lebih lanjut, mutasi dan promosi pada tahun 2021 dilaksanakan atas dasar penugasan dan atas permintaan sendiri. Mutasi karena penugasan antar unit eselon 1 dilakukan terhadap 80 pegawai. Sementara mutasi atas permintaan sendiri antar unit eselon 1 dilakukan terhadap 38 orang pegawai. Sehingga total terdapat 118 orang pegawai yang telah dimutasikan antar unit eselon 1 Kementerian Keuangan.

b. Rekrutmen

Rekrutmen berasal dari rekrutmen lulusan PKN STAN Tahun 2021 sebanyak 3.799 orang dengan distribusinya sebanyak 821 orang (21,6%) ditempatkan di Kementerian Keuangan dan sisanya sekitar 2.978 orang ditempatkan di 77 instansi pemerintah pusat dan daerah.

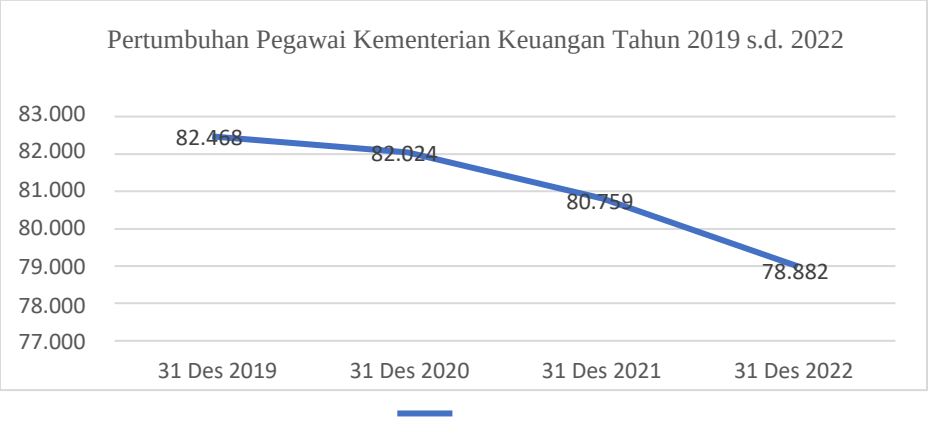
Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

c. Penataan komposisi SDM

Selain melakukan pengembangan kompetensi, upaya optimalisasi SDM dapat dilakukan melalui penataan komposisi SDM yang terdiri dari jabatan inti (*core*) dan jabatan penunjang (*support*). Pada tahun 2021, komposisi jabatan inti Kementerian Keuangan terdiri dari 74,6% dan jabatan penunjang sebesar 25,4%.

Tahun 2022

Berdasarkan data pada Laporan (PMO) Kementerian Keuangan Tahun 2022, realisasi *minus growth* yang dicapai oleh Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2022 adalah sebesar -2,32% yang setara dengan penurunan 1.877 orang pegawai. Angka tersebut merupakan pengurangan dari jumlah pegawai pada akhir tahun 2021 sebanyak 80.759 orang dengan pegawai pada akhir tahun 2022 sebanyak 78.882 orang. Kemudian, jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 31 Desember 2019, maka jumlah pegawai Kementerian Keuangan telah mengalami penurunan sebanyak 3.586 orang atau sekitar -4,54%. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah melampaui target *minus growth* yang ditetapkan di awal yaitu sebesar -3,95%. Berdasarkan capaian yang diperoleh Kementerian Keuangan, maka diproyeksikan bahwa pada akhir tahun 2024 jumlah pegawai Kementerian Keuangan mencapai angka 78.315 orang. Berikut adalah grafik pengurangan pegawai Kementerian Keuangan sejak 31 Desember 2019 hingga 31 Desember 2022.



Grafik 1. Pertumbuhan Pegawai Kementerian Keuangan Tahun 2019 s.d. 2022
Sumber: Hasil Olah Penulis

Implementasi strategi *minus growth* Tahun 2022 diwujudkan dalam beberapa kegiatan diantaranya (Kementerian Keuangan, 2022):

a. Redistribusi pegawai

Redistribusi dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1) IJV

IJV dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan di bulan Juni 2022 dengan formasi jabatan yang dibuka sebanyak 409 jabatan. Dari 409 jabatan yang tersedia, terpenuhi sebanyak 190 jabatan. IJV tahap kedua membuka formasi untuk 12 jabatan dan realisasinya terpenuhi 12 jabatan.

2) Mutasi/promosi

Mutasi dilaksanakan melalui dua cara yaitu mutasi karena penugasan dan mutasi atas

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

permintaan sendiri. Terdapat 246 orang pegawai yang dimutasi karena penugasan dan 11 orang di mutasi atas permintaan sendiri. Telah dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan mutasi. Evaluasi menunjukkan tingkat keefektifan pelaksanaan mutasi sebesar 95,1%.

b. Rekrutmen

Rekrutmen dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1) Rekrutmen ASN TA 2022

Rekrutmen hanya dilakukan secara terbatas melalui mekanisme pindah instansi.

2) Rekrutmen CASN TA 2022

Rekrutmen ini terdiri dari rekrutmen lulusan PKN STAN, lulusan STIS, dan magang. Rekrutmen lulusan PKN STAN adalah sejumlah 2.391 orang yang didistribusikan sebanyak 31% ke Kementerian Keuangan dan selebihnya ditempatkan pada 44 K/L dan 69 Pemerintah Daerah. Rekrutmen lulusan STIS sejumlah 7 orang. Terakhir melalui magang, magang yang disediakan Kementerian Keuangan magang regular, magang berdasarkan MoU dengan Perguruan Tinggi, dan Magang Tematik Bersertifikat melalui Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

c. Optimalisasi SDM

Pada akhir tahun 2022 jumlah pegawai yang menduduki jabatan inti mencapai 74,1% dan sisanya adalah pegawai yang menduduki jabatan penunjang.

Hingga tahun 2022, implementasi *exit strategy* belum dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan, 2022). Monitoring dan evaluasi terkait implementasi *minus growth* baru dilakukan sekali pada tahun 2022 dan belum dilaksanakan secara rutin. Monitoring dan evaluasi lainnya yang dilakukan hanyalah terkait pelaksanaan IJV dan Mutasi/Promosi, selebihnya belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

Analisis Implementasi Strategi *Minus Growth* Kementerian Keuangan Menggunakan Model 7S McKinsey

Efektivitas implementasi strategi *minus growth* dapat dilihat dari kesinambungan setiap elemen-elemen pada model 7S McKinsey. Berikut hasil analisis dengan menggunakan model 7S McKinsey:

1. Strategi

Berdasarkan teori McKinsey, strategi merupakan arahan yang digunakan untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif perusahaan. Strategi Kementerian Keuangan disusun berdasarkan visi misi Kementerian Keuangan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan yang penyusunannya mempertimbangkan RPJMN Pemerintah periode 2020-2024. Visi misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran strategis. Dari kesepuluh sasaran strategis yang dimiliki Kementerian Keuangan, sasaran strategis ketujuh adalah “Organisasi dan SDM yang Optimal”. Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dengan berbagai macam strategi dan diwujudkan melalui penerapan berbagai kegiatan. Salah satu strategi yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan sasaran strategis “Organisasi dan SDM yang Optimal” adalah dengan implementasi strategi *minus growth.* Strategi ini diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan moratorium PKN STAN dan PNS, redistribusi pegawai melalui rekrutmen PPPK, mutasi, promosi, dan

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

Internal Job Vacancy (IJV); serta implementasi *exit strategy*. Sejak tahun 2020 hingga 2022, Kementerian Keuangan telah menerapkan moratorium PKN STAN dan PNS, rekrutmen, dan redistribusi pegawai.

2. Struktur

Bentuk struktur organisasi Kementerian Keuangan didasarkan pada kinerja yang akan dicapai (performance *based organization*). Selain mengacu pada arahan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi, penyusunan struktur organisasi Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan proses bisnis yang lebih fleksibel dan juga adaptif. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya, Menteri Keuangan dibantu oleh Wakil Menteri Keuangan, 11 Unit Eselon I, 9 Staf Ahli, 5 Staf Khusus, 4 Tenaga Ahli, dan dibantu 3 Pusat. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang mempunyai karakteristik *holding type organization* yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat kompleks sehingga untuk menunjang pelaksanaan tugas di daerah perlu dibantu oleh beberapa unit kerja vertikal. Sementara untuk membantu pelaksanaan tugas teknis juga dibantu oleh beberapa unit kerja khusus.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa Kementerian Keuangan memiliki struktur organisasi yang khas yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi demi menunjang pelaksanaan proses bisnis yang optimal. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan telah memenuhi elemen struktur berdasarkan teori McKinsey. Apabila dikaitkan dengan teori McKinsey, Kementerian Keuangan telah memiliki struktur organisasi yang jelas termasuk pembagian wewenang, tanggung jawab, dan pembagian tugas yang jelas.

3. Sistem

Kementerian Keuangan menyusun *milestones* inisiatif strategis yang di dalamnya memuat keterangan nama *milestones* (mulai dari perencanaan berdasarkan Renstra hingga evaluasi) dan kapan target pelaksanaan milestones tersebut diselesaikan. Misalnya, kegiatan pengendalian growth dilaksanakan dalam jangka waktu 2020 s.d. 2024, evaluasi kebijakan minus growth dilaksanakan pada tahun 2024, dan tindak lanjut atas evaluasi dilaksanakan pada tahun 2025.

Kemudian, Kementerian Keuangan juga menerapkan sistem reward and punishment. *Punishment* ini disajikan dalam bentuk implementasi *exit strategy*, sedangkan *reward* diwujudkan salah satunya dalam bentuk program penghargaan ramah milenial. Program ini merupakan ajang pemberian apresiasi berupa penghargaan non finansial kepada pegawai yang dianggap telah melakukan inovasi yang memberikan manfaat kepada organisasi atau meraih prestasi kerja tertentu. Dengan adanya *reward and punishment* tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai Kementerian Keuangan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah menyusun reviu angka dasar, pagu indikatif, pagu anggaran, pagu alokasi anggaran, realisasi anggaran, evaluasi internal, dan sebagainya, secara jelas dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 dan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tiap tahunnya.

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori, Kementerian keuangan memiliki cara kerja yang *tersistem* dan terstruktur yang tercermin dari disusunnya *milestones* inisiatif strategi, pemberlakuan sistem *reward and punishment*, dan telah disusunnya pagu indikatif, pagu anggaran, dan sebagainya guna menunjang implementasi dari strategi *minus growth* ini.

4. Style

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

Manajer puncak merupakan posisi yang sangat krusial karena manajer puncak dapat mempengaruhi tidak hanya kinerja pegawai namun juga kinerja organisasi (Syaddad, A., et al., 2024). Kaitannya dengan kepemimpinan perusahaan, seorang pemimpin perusahaan harus memastikan penentuan arah perusahaan, memiliki visi misi ke depan dalam jangka waktu yang lama, menggerakkan orang, memberikan motivasi dan inspirasi, dan mampu merumuskan berbagai macam strategi untuk menunjang tercapainya visi tersebut (Eddy, 2020). Bagi perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi/bagian yang masing-masing memiliki kegiatan yang berbeda yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, seorang pemimpin harus mampu mengorganisasikan seluruh bagian fungsi tersebut menjadi satu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai pemimpin tertinggi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam implementasi strategi Kementerian Keuangan karena seluruh strategi yang disusun dilaksanakan dengan memperhatikan arahan dari Menteri Keuangan (*top-down approach*). Sejak awal Menteri Keuangan diharapkan memberikan arahan terkait penentuan arah kebijakan, isu-isu strategis, dan strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Arahan Menteri Keuangan tersebut akan dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan prioritas kegiatan dan fokus alokasi anggaran serta target kinerja. Salah satu contoh nyata pentingnya peranan Menteri Keuangan sebagai penentu arah yaitu kegiatan *Budget Committee Meeting* (BCM) dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan arahan dari Menteri Keuangan atas arah kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Keuangan beserta penentuan kegiatan strategisnya.

Menteri Keuangan telah menetapkan tujuan, visi, dan misi organisasi serta merumuskan berbagai macam strategi untuk menunjang pencapaian tujuan dan visi misi tersebut. Apabila muncul masalah di tengah pelaksanaan rencana tersebut, Menteri Keuangan akan mengambil tindakan korektif sebagaimana telah dilakukan oleh Menteri Keuangan pada Tahun 2021 yaitu:

- Melakukan *review* terhadap target, indikator kerja, dan peta mitigasi risiko kemudian melakukan adendum Kontrak Kinerja dari hasil *review* yang dilakukan.
- Melakukan penyesuaian terhadap Renstra Kementerian Keuangan 2020-2024 pada tahun 2021 yang perlu disesuaikan kembali dengan mempertimbangan keadaan tak terduga yang muncul pada saat itu.

Berdasarkan teori McKinsey, gaya kepemimpinan yang digunakan dalam sebuah organisasi merupakan faktor penting dalam menjalankan strategi karena akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi dari strategi tersebut. Dapat dilihat bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pimpinan puncak Kementerian Keuangan telah membantu mereka mencapai target *minus growth* tiap tahunnya. Menteri Keuangan selalu turut andil dalam setiap perencanaan dan selalu memberikan arahan-arahan kepada para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

5. *Staff*

Berdasarkan teori McKinsey, *staff* adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki organisasi yang dianggap sebagai aset organisasi tersebut. Pegawai adalah SDM yang berharga yang membutuhkan pemeliharaan, pengembangan, perlindungan, dan alokasi yang strategi. Pada dasarnya, hal tersebut telah diterapkan oleh Kementerian Keuangan. SDM Kementerian Keuangan didukung oleh pegawai yang penugasannya telah disesuaikan dengan *job family* dan *job competency*, yang tertuang dalam KMK Nomor 916/KMK.01/2019 tentang Rumpun Jabatan

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional juga telah dikelompokkan ke dalam 16 (enam belas) Jabatan Fungsional *core business* Kementerian Keuangan dan 17 (tujuh belas) Jabatan Fungsional dari K/L lain.

Sebagai tambahan, komposisi SDM Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan inti (*core*) selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Data terakhir menunjukkan komposisi jabatan inti telah mencapai 74,1% dibandingkan komposisi jabatan penunjang (*support*) yang berada pada persentase 25,9%. Hal ini menunjukkan bahwa 74,1% SDM Kementerian Keuangan telah menduduki jabatan inti yang ada pada Kementerian Keuangan (sesuai dengan *core* utama Kementerian Keuangan). Komposisi SDM pada jabatan inti dan penunjang dapat menjadi indikator penting untuk melihat keefektifan dan keefisienan SDM dalam suatu organisasi.

Selain itu, dalam menjalankan strategi-strategi yang telah disusun, Menteri Keuangan dibantu oleh 5 Staf Khusus yaitu Staf Khusus Komunikasi Strategis, Staf Khusus Kebijakan Fiskal Regional, Staf Khusus Sistem Informasi dan Teknologi, Staf Khusus Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi, dan terakhir Staf Khusus Fiskal Sektoral. Keberadaan staf khusus sebagaimana disebutkan tentunya membantu Menteri Keuangan dalam mengorganisasikan tugas dan pekerjaan terkait.

Proporsi terbesar pegawai Kementerian Keuangan, berdasarkan kualifikasi pendidikan, didominasi oleh pegawai dengan pendidikan S-1 atau D-IV yaitu sebesar 33%, sementara posisi kedua didominasi oleh pegawai dengan pendidikan di bawah D-III yaitu sebesar 32%. Melihat data tersebut, dapat diketahui bahwa komposisi sebagian besar pegawai Kementerian Keuangan masih didominasi oleh pelaksana teknis atau pelaksana tugas administrasi. Oleh karena itu, peningkatan komposisi pendidikan pegawai Kementerian Keuangan masih harus dioptimalisasi demi terwujudnya pengelolaan SDM yang cerdas teknologi dan adaptif.

6. *Skill*

Berdasarkan teori McKinsey, *skill* merupakan kompetensi pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam rangka membangun dan membentuk *skill* yang dibutuhkan oleh organisasi sebagaimana disebutkan dalam teori McKinsey, Kementerian Keuangan memfasilitasi pengembangan pegawai melalui *Corporate University* yang terintegrasi dengan *Human Resources Information System* (HRIS) Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan juga memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan kinerja melalui pemberian *coaching* dan konseling kinerja serta pengembangan sistem penilaian perilaku. Peningkatan *skill* para pegawai nantinya akan membantu Kementerian Keuangan dalam mengimplementasikan strategi yang dimiliki. Peningkatan *skill* juga difasilitasi melalui pelaksanaan diklat baik yang diselenggarakan secara *online*, *offline*, maupun *blended learning*.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan agar para pegawainya mampu "*up to task*" dan mampu bekerja dengan optimal dimanapun dan kapanpun mereka berada, adalah dengan menerapkan strategi peningkatan dan perluasan (*upskilling* dan *reskilling*) kompetensi seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Strategi ini diwujudkan dengan pertama-tama melakukan pemetaan kebutuhan *upskilling* dan *reskilling* kemudian membuat program pembelajaran *mandatory* baik berupa kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis; pembelajaran berdasarkan Kementerian Keuangan *Leadership Development Program* pada jabatan tiap-tiap pegawai; dan penguatan *Cross Function Competencies*. Kementerian Keuangan juga telah melakukan survei Literasi Digital kepada seluruh pegawai pada tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan program pembelajaran *e-learning* Literasi Digital.

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

7. *Shared Values*

Berdasarkan teori McKinsey, *shared values* menitikberatkan pada ada tidaknya nilai-nilai yang dianut pada sebuah organisasi yang menjadi pedoman bagi organisasi untuk bergerak. Nilai-nilai ini diwujudkan Kementerian Keuangan melalui penetapan visi-misi organisasi. Kementerian Keuangan memiliki visi dan misi yang sangat jelas yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan periode 2020-2024. Visi misi Kementerian Keuangan disusun berdasarkan visi misi Pemerintah yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Visi Kementerian Keuangan yang intinya adalah:

"Kementerian Keuangan berperan sebagai Pengelola Keuangan Negara guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang kompetitif, produktif, inklusif, dan adil untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Misi Kementerian Keuangan yang intinya yaitu:

1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan *continues*;
2) Meningkatkan pendapatan negara melalui pelayanan yang prima dan pengawasan serta penegakan hukum yang optimal;
3) memastikan bahwa pelaksanaan belanja negara telah adil, produktif, dan efisien;
4) mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko yang rendah/minimum; serta
5) mengembangkan proses bisnis inti yang berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang berkembang sesuai kemajuan teknologi.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diketahui bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan upaya untuk memenuhi ketujuh elemen dalam model 7S McKinsey. Aktivitas dan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan telah mendukung ketujuh elemen dalam model 7S McKinsey tersebut. Ketujuh elemen yang telah terpenuhi dan terharmonisasi tersebutlah yang mendukung keberhasilan implementasi strategi *minus growth*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Maulyan & Sandini (2023) bahwa keberhasilan implementasi strategi bergantung pada harmonisasi keseluruhan elemen pada model 7S McKinsey.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan model 7S McKinsey, dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar Kementerian Keuangan telah mampu mengimplementasikan strategi *minus growth* yang dilakukan sejak tahun 2020 dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya keselarasan terhadap ketujuh elemen McKinsey. Keselarasan tersebut dibuktikan dengan tercapainya target *minus growth* Kementerian Keuangan, dimana realisasinya mencapai angka -4,35% dengan target -3,95%. Meskipun tidak dapat dipungkiri masih ditemukan beberapa hal yang pelaksanaannya dirasa kurang optimal.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu perlunya dilaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi strategi *minus growth* setiap tahun secara rutin. Dengan dilaksanakannya evaluasi tiap tahun, akan memudahkan Kementerian Keuangan untuk mengontrol pelaksanaan strategi tersebut. Hasil dari evaluasi pun dapat digunakan sebagai data untuk pelaksanaan strategi lainnya. Kemudian, sebaiknya monitoring dan evaluasi implementasi *exit strategy* tidak hanya dilakukan pada akhir periode

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

Renstra yaitu tahun 2024, melainkan juga dilaksanakan di setiap tahun anggaran. Harapannya jika implementasi *exit strategy* telah dilaksanakan, sumber daya manusia Kementerian Keuangan benar-benar bebas dari adanya pegawai *idle*. Kementerian Keuangan juga sebaiknya mengoptimalkan penataan komposisi pegawai berdasarkan jabatan inti (*core*) dan jabatan penunjang (*support*) sehingga pemanfaatan dan pendayagunaan SDM Kementerian Keuangan dapat lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

Adnan, I. M. & Hamim, S. (2013). *Manajemen strategis dalam organisasi*. Trussmedia Grafika.

Channon, D. F. & Caldart, A. A. (2015). *McKinsey 7S model*. Wiley Encyclopedia of Management.

Choerudin, A. (2019), Strategi dan implementasi 7s mckinsey pengelolaan pasar rakyat (Studi empiris di dinas perdagangan-kota surakarta). *Research Fair UNISRI*, 3(1), 644-651.

David, F. R. (2009). *Manajemen strategi*. Salemba Empat.

Djuardi, D. K., Aprilia, H. D., Efendi, N., & Aprilani, D. (2019). Diagnosis efektivitas organisasi model 7s mckinsey. *Jurnal Perspektif Bisnis*, *2*(1), 19–27.

Eddy, H. C. (2020). *Implementasi strategi berdasarkan model 7s mckinsey (studi pada perusahaan jasa boga cv century utama lestari jakarta)*. Universitas Brawijaya.

Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia.* Bumi Aksara.

Joesah, N. (2021). Pandemi covid-19 pengaruhnya terhadap manajemen perubahan dan inovasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *1*(2), 81–87.

Kementerian Keuangan. (2020). *Rencana strategis kementerian keuangan tahun 2020-2024*.

Kementerian Keuangan. (2020). *Laporan kinerja project management office kementerian keuangan tahun 2020*. https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/pmo-setjen-2020.

Kementerian Keuangan. (2021). *Laporan kinerja project management office kementerian keuangan tahun 2021*. https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/pmo-setjen-2021.

Kementerian Keuangan. (2022). *Laporan kinerja project management office kementerian keuangan tahun 2022*. https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/pmo-setjen-2022.

Maulyan, F. F. & Sandini, D. (2023). Implementasi strategi pengembangan bisnis dengan model mckinsey 7-S. *Jurnal Sains Manajemen*, *5*(2), 91–96.

Sudiantini, D. (2022). *Manajemen strategi.* CV Pena Persada.

Syaddad, A., Winaya P., & Asep S. (2024). Implementasi strategi berdasarkan model 7s mckinsey (studi pada sma al aziz islamic boarding school, kab. bandung barat). *Jurnal Swins*, 31(1), 50-57.

Hak Cipta © 2024, Ade Trisha Darnanti, Benny Sigiro

Pengelolaan Arsip di Polsek Tanjungpinang Timur

Adelia[1], Purwanto Putra[2]
[1]Mahasiswa Program Studi D-IV, FISIP; Universitas Terbuka;
[2]Dosen Pembimbing Universitas Terbuka
E-mail: adelialia236@gmail.com; purwanto.putra@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Arsip mencerminkan aktivitas lembaga dan menjadi bagian dari memori lembaga itu sendiri. Pengelolaan arsip merupakan usaha untuk mengurus dokumen-dokumen yang terdapat dalam suatu lembaga dengan tujuan mendukung kegiatan lembaga tersebut dalam mencapai tujuan tertentu. Pada penelitian ini memiliki tujuan mengenai Bagaimana proses manajemen dokumen di Polsek Tanjungpinang Timur. penelitian ini untuk mendalami bagaimana arsip dikelola di Polsek Tanjungpinang Timur termasuk langkah-langkah penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip yang sesuai. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangakan pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polsek Tanjungpinang timur menunjukkan bahwa Polsek Tanjungpinang Timur memiliki tata Kelola arsip yang dimulai dengan proses penciptaan dokumen, penggunaannya, pemeliharaannya, dan penyusutan. Polsek Tanjungpinang Timur juga mengalami beberapa kendala yang dialami, Beberapa kendala juga dihadapi termasuk kekurangan staf, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan arsip, dan kekurangan dalam fasilitas serta infrastruktur. Adapun Beberapa Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi rintangan tersebut mencakup sosialisasi, bimbingan teknis, dan pengoptimalan fasilitas penyimpanan arsip.

Kata Kunci: *Arsip, Pengelolaan, Polsek*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam sebuah organisasi mereka pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Setiap organisasi memerlukan sebuah tempat yang disebut kantor untuk mencapai tujuan mereka. Kegiatan administratif di kantor menghasilkan berbagai dokumen seperti surat, formulir, dan laporan. Pengelolaan dokumen-dokumen tersebut, termasuk kearsipan, merupakan bagian integral dari proses tersebut.

Arsip merujuk pada berbagai jenis dokumen yang menyimpan informasi atau Fakta yang signifikan bagi institusi dipilih untuk disimpan karena relevansinya untuk masa mendatang. Arsip mencerminkan aktivitas lembaga dan menjadi bagian dari memori lembaga itu sendiri. Pengelolaan arsip merupakan usaha untuk mengurus dokumen-dokumen yang terdapat dalam suatu lembaga dengan tujuan mendukung kegiatan lembaga tersebut dalam mencapai tujuan tertentu.

Sebagai hasil dari informasi administrasi dan manajemen, arsip terus bertambah dan berkembang, yang pada akhirnya menyebabkan penumpukan arsip yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pengelolaan arsip menjadi sangat penting. Pengelolaan ini harus Proses tersebut dilakukan secara efektif dan teratur, dimulai dari pembuatan arsip, penggunaannya, pemeliharaannya, hingga penghapusan arsip. Tujuannya adalah untuk menyediakan data dan

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

informasi yang berkualitas, lengkap, dan akurat, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pentingnya pengelolaan arsip yang baik bagi Polsek Tanjungpinang Timur sebagai Instansi pemerintah ini memiliki berbagai jenis dokumen dan catatan yang harus dikelola dengan baik, mulai dari Surat Biasa, Surat Perintah Tugas dan dokumen administrasi lainnya. Pengelolaan arsip yang efisien di Polsek Tanjungpinang timur dalat mendukung kegiatan Instansi, mempermudah akses informasi, dan memastikan bahwa informasi penting selalu tersedia saat dibutuhkan. Dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat, pengelolaan arsip di Polsek Tanjungpinang timur dapat lebih terstruktur dan efisien, sehingga mampu mendukung berbagai kegiatan dan administrasi dengan lebih baik. PERKAP 17 tahun 2007 (Kepolisian & Republik, 2007) menetapkan peraturan tentang pengelolaan arsip di lembaga polisi. PERKAP ini berisi aturan tentang tata kearsipan di lingkungan Polri, termasuk penataan, penyimpanan, pemeliharaan, penilaian, dan penyajian arsip. Namun, masih ada beberapa masalah yang dihadapi dalam praktik pengelolaan arsip dinamis di Polri. Karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui perbedaan antara teori dan praktik pengelolaan arsip dinamis di Polri. Penelitian ini sangat penting untuk membahas perbedaan antara teori dan praktik pengelolaan arsip dinamis di Polri. Survei dan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh peneliti saat memilih subjek penelitian untuk menjelaskan karakteristik unik lingkungan ini. Data yang diinginkan akan diminta oleh peneliti saat penelitian dilakukan. Peneliti berharap dapat menyelesaikan penelitian ini sampai selesai dan mendapatkan informasi sumber yang dapat dipercaya.

Pengelolaan arsip dinamis merupakan langkah-langkah yang efisien, efektif, dan terorganisir dalam mengatur arsip, mencakup pembuatan, penggunaan, perawatan, dan pengurangan arsip. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa arsip tersedia ketika dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas, baik sebagai bukti kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan maupun sebagai dokumen resmi yang sah. Keberadaan dan pengelolaan yang efektif terhadap arsip dinamis akan mempermudah proses administrasi, memastikan informasi yang diperlukan mudah diakses, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas (Kurnia Farhan, 2022).

Dalam pengelolaan arsip yang tepat, terdapat beberapa langkah yang harus dilalui, dimulai dari penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, hingga penyusutan arsip. Penciptaan arsip melibatkan dokumentasi semua kegiatan yang relevan, penggunaan arsip merupakan pemanfaatan arsip, sedangkan pemeliharaan arsip mencakup penyimpanan dan perawatan untuk menjaga kondisi dan aksesibilitasnya. Penyusutan Arsip adalah proses mengurangi arsip baik secara fisik maupun dalam hal informasinya dengan cara memindahkan arsip dari unit pengolah/kerja ke unit kearsipan, melakukan pemusnahan, dan menyerahkan arsip ke lembaga kearsipan. (Saeroji et al., 2020a)

Pengelolaan arsip di Polsek Tanjungpinang Timur masih mengalami hambatan yang menyebabkan kinerjanya tidak optimal. Salah satu faktor utama yang memengaruhi adalah kekurangan sumber daya manusia, karena hanya memiliki dua staf yang bertugas mengelola arsip di kantor tersebut. Selain itu, kekurangan fasilitas dan infrastruktur penyimpanan arsip juga menjadi masalah serius. Hal ini dapat menyebabkan kekacauan dalam penyimpanan arsip, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian arsip dan kurangnya sistematisasi dalam penyimpanan, perawatan, dan keamanan. PERKAP 17 tahun 2007 telah mengatur pengelolaan arsip Polri dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pengelolaan arsip dinamis masih menjadi masalah di lokasi penelitian, Polsek Tanjungpinang Timur. Sumber daya manusia yang terbatas adalah masalah utama kantor karena hanya ada dua karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola arsip.

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

Selain itu, kekurangan infrastruktur dan fasilitas penyimpanan arsip adalah masalah besar. Kekurangan ini dapat menyebabkan kekacauan dalam penyimpanan arsip, yang pada gilirannya menyebabkan kerugian arsip dan kurangnya prosedur penyimpanan, perawatan, dan keamanan yang sistematis. Oleh karena itu, arsip harus dikelola dengan baik dan secara teratur untuk memastikan bahwa mereka tersedia ketika dibutuhkan untuk melakukan tugas, baik sebagai bukti kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan maupun sebagai dokumen resmi yang sah.

Pengertian Arsip

Secara etimologis, kata "arsip" berawal dari bahasa Yunani "archivum" yang berarti tempat untuk menyimpan. Pada konteks bahasa Indonesia, arsip sering kali disebut sebagai "warkat," (Barthos, 2017) adalah gambar yang berisi keterangan-keterangan mengenai suatu subjek atau keadaan yang dibuat guna membantu daya ingat orang tersebut. Konsep ini menunjukkan bahwa arsip tidak hanya berupa teks, tetapi bisa juga dalam bentuk gambar atau media lain yang menyimpan informasi penting.

Menurut (Rosalin, 2017) Arsip adalah kumpulan informasi yang direkam dalam bentuk teks, gambar, atau audio visual oleh berbagai jenis organisasi, baik itu publik maupun swasta, dan disimpan menggunakan berbagai jenis media.

Arsip adalah kumpulan informasi dari lembaga swasta maupun pemerintah yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk: (1) merumuskan, menerapkan, dan menjaga agar suatu kebijakan dapat efektif; (2) menjaga akuntabilitas; (3) melindungi hak karyawan dan warga negara; dan (4) melestarikan kontinuitas ilmu pengetahuan sepanjang masa. (Risparyanto, 2021)

kearsipan merupakan proses dari awal penyimpanan hingga penyusutan arsip yang dilakukan dan disimpan untuk kemungkinan dipergunakan pada waktu yang akan datang. (Yuliyanti, 2022)

Dari kumpulan pengertian diatas arsip merupakan proses awal dari penciptaan hingga penyusutan, arsip dilakukan dan disimpan untuk kemungkinan digunakan dan menjadi pusat sumber informasi di masa yang akan datang.

Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip melibatkan penerapan prinsip-prinsip manajemen untuk mengelola semua tahap dalam siklus hidup arsip, yang meliputi pembuatan dan penerimaan, distribusi, penggunaan, perawatan, dan pembuangan.

Pengelolaan arsip merupakan proses kontrol yang efisien, efektif, dan teratur (Muhidin). Terdiri dari empat kegiatan utama:

a. Penciptaan Arsip
   Kegiatan ini mencakup pembuatan dan penerimaan arsip. Pada tahap ini, Arsip harus terdaftar menggunakan buku agenda atau kartu kendali sebelum disebarkan.
b. Penggunaan Arsip
   Kegiatan ini mencakup penyajian dan Memanfaatkan dokumen yang tersimpan untuk kepentingan organisasi sambil memastikan keaslian, integritas, keamanan, dan keselamatan arsipnya merupakan praktek penting dalam pengelolaan informasi.
c. Pemeliharaan Arsip
   Kegiatan ini mencakup menjaga integritas, keaslian, keamanan, dan keselamatan dokumen. Merawat arsip secara dinamis melibatkan penyusunan dokumen aktif,

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

pengaturan dokumen yang tidak aktif, penyimpanan dokumen, dan transfer media dokumen.

d. Penyusutan Arsip
Kegiatan ini melibatkan mengurangi arsip yang jarang digunakan atau sudah kehilangan nilai. Ini meliputi pemindahan arsip yang tidak aktif, penghancuran, dan penyerahan arsip yang tidak berubah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan kegiatan kearsipan mencakup kebijakan, pengembangan kearsipan, dan pengelolaan dokumen dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh tenaga kerja, fasilitas, dan sumber daya lainnya (Republik Indonesia, 2009).

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia juga memberikan pedoman dalam pengelolaan arsip. Peraturan ini mengatur struktur organisasi dan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan arsip, termasuk perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang penyelenggaraan kearsipan (Republik Indonesia, 2022).

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia juga memberikan arahan dalam pengelolaan arsip. Regulasi ini mengatur struktur organisasi dan tanggung jawab yang terhubung dengan pengelolaan dokumen, termasuk pembuatan kebijakan teknis, pemberian arahan, dan pengawasan dalam domain penyelenggaraan kearsipan (Republik Indonesia, 2022).

Peran Arsip

Arsip harus mendapat perhatian yang cukup agar dapat berfungsi secara optimal dan mendukung penyelesaian tugas oleh semua pegawai organisasi. Menurut (Bhartos, 2013a), arsip sangat memiliki peran yang penting yaitu sebagai pusat ingatan, sumber informasi serta alat pengawasan yang diperlukan setiap organisasi. Peran ini mencakup banyak kegiatan seperti perencanaan, analisis, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian secara tepat. Adapun (Fathurrahman, 2018) menerangkan arsip memiliki peran yang luas. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu memori manusia, tetapi juga membantu usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Selanjutnya, arsip juga bahan yang penting untuk membantu proses penelitian ilmiah. Penelitian mengenai berbagai masalah akan menjadi lebih mudah jika arsip terkumpul, tersimpan dengan baik, dan terorganisir dengan rapi.

Arsip berperan penting dalam menyajikan informasi bagi para pemimpin dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Agar informasi yang disajikan lengkap, cepat, dan akurat, diperlukan sistem dan prosedur kerja yang baik dalam pengelolaan arsip. Arsip memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperkuat ingatan manusia, serta dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Selain itu, arsip juga merupakan salah satu sumber penting untuk penelitian ilmiah. Penelitian tentang berbagai masalah akan lebih mudah dilakukan jika bahan-bahan arsip terkumpul, tersimpan dengan baik, dan teratur.

Fungsi Arsip

Arsip merupakan salah satu sumber informasi yang penting yang dapat membatu proses administrasi. Fungsi arsip dapat dibedakan menjadi 2 bagian yang pertama digunakan secara

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

dalam perencanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan atau administrasi negara sehari-hari, dan yang kedua arsip digunakan secara tidak langsung untuk perencanaan atau administrasi negara sehari-hari. (Bhartos, 2013b)

Adapula fungsi arsip menurut (ANRI, 2009) yaitu sebagai berikut: (a) Melaksanakan penelitian guna mendukung pengembangan arsip nasional. (b) Membangun dan mengelola sistem arsip yang dinamis. (c) Melaksanakan pengembangan tenaga kerja dan pakar arsip melalui program pendidikan dan pelatihan. (d) Menerima, menyimpan, dan memelihara arsip statis yang diserahkan oleh lembaga negara, instansi pemerintah, dan badan lainnya. (e) Mengamankan dan menerima arsip statis dari badan swasta dan individu yang memiliki nilai serta makna penting sebagai bukti sejarah dan tanggung jawab nasional. (f) Memproses dan mengorganisir arsip statis yang telah diterima agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan, penelitian, dan kepentingan umum. (g) Mengatur hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga dome (Bhartos, 2013b)

Rumusan Masalah

Menurut (Bhartos, 2013b) arsip memiliki fungsi yang dibagi menjadi dua jenis utama. Yaitu arsip dalam perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan secara umum, atau dalam administrasi negara sehari-hari. Dan arsip biasanya tidak digunakan secara langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan secara umum, maupun dalam administrasi negara sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan fungsi arsip diatas bagian yang penting untuk proses administrasi organisasi. Akan tetapi masih kurangnya kesadaran pengelolaan arsip dari pegawai di Polsek Tanjungpinang timur. Setiap hari, jumlah arsip yang harus ditangani semakin bertambah, namun pengaturan mereka masih belum terorganisir dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya arsip yang tidak terstruktur dengan baik dan dibiarkan berserakan, bahkan ada yang diletakkan sembarangan di lantai. Keadaan ini tentu dapat meningkatkan risiko kerusakan terhadap arsip. Serta juga membuat sulit untuk menemukan kembali arsip yang diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menyusun pertanyaan penelitian secara umum sebagai berikut: Bagaimana proses pengelolaan arsip yang dilakukan di Polsek Tanjungpinang Timur?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengelolaan arsip di Polsek Tanjungpinang Timur. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran umum tentang bagaimana sistem pengelolaan arsip saat ini, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip di sekolah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari analisa ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pihak sekolah dalam upaya meningkatkan pengelolaan arsip dinamis, sehingga dapat mendukung kegiatan administrasi secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian adalah Polsek Tanjungpinang Timur, yang memiliki kegiatan administratif yang

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

menghasilkan berbagai dokumen. Subjek penelitian adalah staf yang bertugas mengelola arsip di Polsek Tanjungpinang Timur (Moleong, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung kegiatan administratif, wawancara dengan staf yang mengelola arsip, dan analisis dokumen yang terkait dengan pengelolaan arsip.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan analisis tema dan analisis konten. Analisis tema digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema yang terkait dengan pengelolaan arsip, sedangkan analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi isi dan struktur dokumen yang terkait dengan pengelolaan arsip.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Arsip di Polsek Tanjungpinang Timur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan arsip di Polsek Tanjungpinang Timur mencakup tentang pencitaan arsip, penggunaan arsip, penyimpanan arsip dan penyusutan arsip;

Penciptaan Arsip

Merupakan kegiatan merekam aktivitas atau suatu peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Arsip dinamis adalah tahap awal dalam siklus arsip yang terbentuk melalui aktivitas organisasi, baik melalui pembuatan maupun penerimaan dokumen. Dokumen ini bisa berupa surat, formulir, laporan, atau gambar. Proses kearsipan tidak hanya terjadi saat penyimpanan, tetapi dimulai sejak arsip tersebut dibuat, diproses, disimpan, hingga akhirnya dimusnahkan. Masa pembuatan arsip menandai awal terbentuknya rekaman arsip (arsip aktif dinamis). Suzan Z. Diamond menyatakan bahwa proses ini dimulai ketika informasi perlu dicatat secara tertulis, entah itu dalam bentuk kertas, data di komputer, atau informasi yang direkam dalam film.

Dari hasil pengamatan dan interaksi langsung yang terjadi di Polsek Tanjungpinang Timur, terdapat 6 unit bagian di Polsek Tanjungpinang timur yaitu unit kepala umum (Sium), unit Propam, unit intelkam, unit Patroli, Unit Binmas dan Unit reskrim yang melakukan penciptaan arsip. Menurut Read dan Ginn, tahap pertama dalam siklus hidup arsip adalah penciptaan. Pada tahap ini, arsip dapat dihasilkan baik dari dalam maupun luar instansi terkait (sebagaimana dijelaskan oleh (M et al., 2020)). Adapun arsip yang diciptakan oleh unit bagian yang ada di Polsek Tanjungpinang Timur sebagai berikut;

a. Unit kepala umum (Sium) yaitu sprint (surat perintah) yang merupakan surat dari atasan untuk anggotanya dengan tujuan memerintahkan atau menunjuk pegawai yang ditunjuk, unit ini juga membuat dan mengelola surat biasa surat biasa keluar serta nota dinas.
b. Unit Patroli yaitu laporan harian laporan yang berisi Berdasarkan rangkaian kegiatan yang terjadi dalam satu hari.
c. Unit intelkam yaitu laporan harian laporan Berdasarkan rangkaian kegiatan yang terjadi dalam satu hari. Laporan informasi suatu dokumen yang berisi tentang informasi peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, laporan penugasan dokumen yang disusun yang menyajikan detail tentang pekerjaan yang telah dilakukan, dan SKCK (Surat keterangan catatan kepolisian).
d. Unit propam yaitu daftar hadir anggota Polsek Tanjungpinang Timur.
e. Unit Binmas yaitu laporan bulanan kegiatan bhabinkamtibmas di wilayah Tanjungpinang Timur

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

f. Unit reskrim, berkas perkara yaitu berkas yang merajuk pada dokumen-dokumen yang terkait dengan suatu perkara hokum yang akan diserahkan ke pengadilan, surat perintah lidik sidik yang yang merupakan surat dari atasan untuk anggotanya dengan tujuan memerintahkan atau menunjuk anggota yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan lidik sidik.

Namun sumber mengatakan bahwa semua unit dapat melakukan penciptaan arsip namun nantinya surat biasa masuk dan surat biasa keluar, nota dinas, sprint (Surat Perintah) yang diciptakan oleh unit di Polsek Tanjungpinang timur akan diserahkan dan diberi penomoran serta dicatat di dalam buku agenda di ruangan unit kepala umum (sium)

Pembuat arsip seharusnya mencatat secara rinci seluruh langkah dalam pembuatan dokumen., serta mencatat distribusi dokumen baik pengiriman maupun penerimaan. Proses pencatatan ini meliputi penggunaan buku atau kartu agenda, lembar disposisi, lembar pencatatan penerimaan, dan komputer. Dokumentasi semua kegiatan yang relevan, termasuk kegiatan administratif di Polsek Tanjungpinang Timur, diperlukan untuk membuat arsip. Dokumen yang dibuat harus sesuai dengan Tata Naskah Dinamis (TND) di lingkungan POLRI (PERKAP no. 1 Tahun 2023). TND ini memberikan petunjuk tentang cara mengelola arsip dinamis dengan baik dan teratur. Arsip yang dibuat oleh Polsek Tanjungpinang Timur harus memenuhi standar yang ditetapkan, seperti format, isi, dan penggunaan bahasa yang tepat. Hasil analisis kesesuaian dengan tata naskah dinas di lingkungan POLRI menunjukkan bahwa Polsek Tanjungpinang Timur mengalami kendala seperti kekurangan personel dan fasilitas, yang menyebabkan arsip tidak dibuat dengan baik.

Dari hasil analisis, kesesuaian prosedur pengelolaan arsip di Polsek Tanjungpinang Timur dengan PERKAP no. 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa Polsek Tanjungpinang Timur masih mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut meliputi:

1. Penciptaan Arsip : Polsek Tanjungpinang Timur tidak memiliki prosedur yang jelas untuk membuat arsip. Arsip dibuat secara tidak sistematis dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PERKAP no. 1 Tahun 2023.
2. Penggunaan Arsip : Penggunaan arsip di Polsek Tanjungpinang Timur tidak terkontrol. Arsip digunakan secara tidak sistematis dan tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Pemeliharaan Arsip : Pemeliharaan arsip di Polsek Tanjungpinang Timur tidak efektif. Arsip tidak disimpan secara sistematis dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. Penyusutan Arsip : Penyusutan arsip di Polsek Tanjungpinang Timur tidak terkendali. Arsip tidak dihapus secara sistematis dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam analisis ini, Polsek Tanjungpinang Timur harus meningkatkan kesesuaian prosedur pengelolaan arsip dengan PERKAP no. 1 Tahun 2023 untuk memastikan bahwa arsip yang dibuat, digunakan, disimpan, dan dihapus secara sistematis dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dokumentasi semua kegiatan yang relevan, termasuk kegiatan administrasi di Polsek Tanjungpinang Timur, didokumentasikan dalam arsip. Dokumen yang dibuat harus sesuai dengan Tata Naskah Dinamis (TND) di lingkungan POLRI PERKAP no. 1 Tahun 2023 (INDONESIA, 2023). TND ini memberikan petunjuk tentang cara yang efektif dan teratur untuk mengelola arsip dinamis. Dalam kasus ini, Polsek Tanjungpinang Timur harus memastikan bahwa dokumen yang dibuat sesuai dengan persyaratan, termasuk format, konten, dan penggunaan bahasa yang tepat.

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

Arsip yang dibuat di Polsek Tanjungpinang Timur diklasifikasikan berdasarkan PERKAP 17 tahun 2007. Klasifikasi arsip ini meliputi:

1. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Dokumen : Arsip dibagi menjadi beberapa jenis, seperti surat, formulir, laporan, dan dokumen administrasi lainnya.
2. Klasifikasi Berdasarkan Tanggal : Arsip dibagi menjadi beberapa periode, seperti tahun, bulan, dan tanggal.
3. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi : Arsip dibagi menjadi beberapa fungsi, seperti administrasi, keuangan, dan operasional.

Dengan menggunakan klasifikasi arsip yang sesuai, Polsek Tanjungpinang Timur dapat memastikan bahwa arsip yang dibuat dapat diorganisasi dan diakses dengan efektif dan teratur.

Jika lembar penyimpanan belum ada, pengelola arsip di Polsek Tanjungpinang Timur dapat menjaga keamanan akses arsip dengan diatur berdasarkan tingkat keamanan akses. Arsip di Klasifikasi Tingkat 1 memiliki informasi sensitif yang hanya dapat diakses oleh beberapa orang yang berwenang; Arsip di Klasifikasi Tingkat 2 memiliki informasi yang tidak sensitif dan dapat diakses oleh semua orang yang berwenang; dan Arsip di Klasifikasi Tingkat 3 memiliki informasi yang tidak sensitif dan dapat diakses oleh semua orang yang berwenang.

Polsek Tanjungpinang Timur menggunakan arsip dengan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi dalam pengelolaan arsip berarti bahwa arsip disimpan dan dikelola oleh unit-unit yang berbeda di dalam organisasi. Pada saat ini, Polsek Tanjungpinang Timur memiliki beberapa unit yang berbeda yang memiliki arsip yang berbeda pula.

Sistem Desentralisasi Arsip di Polsek Tanjungpinang Timur

Sistem desentralisasi arsip di Polsek Tanjungpinang Timur melibatkan beberapa unit yang berbeda yang memiliki arsip yang berbeda pula. Unit-unit tersebut meliputi:

1. Unit Administrasi : Unit administrasi yang memiliki arsip yang terkait dengan kegiatan administratif, seperti surat, formulir, dan laporan.
2. Unit Operasional : Unit operasional yang memiliki arsip yang terkait dengan kegiatan operasional, seperti laporan, catatan, dan dokumen lainnya.
3. Unit Keuangan : Unit keuangan memiliki arsip yang terkait dengan kegiatan keuangan, seperti buku besar, laporan keuangan, dan dokumen lainnya.
4. Unit Pengawasan : Unit pengawasan yang memiliki arsip yang terkait dengan kegiatan pengawasan, seperti laporan, catatan, dan dokumen lainnya.

Dengan menggunakan sistem desentralisasi arsip, Polsek Tanjungpinang Timur dapat memastikan bahwa arsip yang tersimpan aman dan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Sistem ini juga memastikan bahwa arsip yang tersimpan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Penggunaan Arsip

Arsip merupakan sarana yang membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah, dan seringkali dipinjam oleh unit-unit lainnya. Jenis arsip yang dipinjam sangat bervariasi, mulai dari surat, buku, dokumen, dan sebagainya. Tentunya sudah dimengerti bahwa arsip adalah hasil dari aktivitas administrasi. Di sisi lain, rekaman informasi ini diperlukan untuk menjalankan kegiatan organisasi. Dengan kata lain, dalam siklus yang saling berkaitan antara arsip dan administrasi, keduanya saling bergantung satu sama lain. Arsip tersebut dimanfaatkan untuk memudahkan pelacakan data guna memenuhi keperluan organisasi. Penelitian di Polsek Tanjungpinang Timur

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

menunjukkan bahwa arsip memegang peranan penting dalam proses kerja setiap unit, membantu dalam memperoleh informasi dan menyelesaikan masalah yang timbul.

Untuk mencegah hilangnya arsip yang dipinjam dan memastikan keberadaannya tetap terjaga, diperlukan lembar peminjaman arsip. (Andriani et al., 2023) Menurut pendapat tersebut, pengendalian dan pemantauan peminjaman arsip oleh pegawai yang bertanggung jawab bisa dijalankan melalui penggunaan buku peminjaman arsip atau formulir khusus. Dalam proses ini, semua informasi yang relevan seperti identitas atau nama peminjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, detail arsip yang dipinjam, tanda tangan petugas yang bertugas, tanda tangan peminjam, dan informasi lainnya dicatat secara komprehensif. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan sumber dari Polsek Tanjungpinang Timur, mereka belum menggunakan sistem lembar peminjaman dan belum menerapkan prosedur tertulis, melainkan hanya mengandalkan komunikasi antar pegawai.

Penemuan kembali arsip menunjukkan seberapa efektif penyajian informasi arsip; proses ini, yang mencakup siklus penemuan kembali arsip dan penempatannya, memerlukan prosedur khusus yang harus diperhatikan dengan cermat. Dalam proses penemuan kembali arsip, unit kearsipan menggunakan buku agenda, surat, dan sistem klasifikasi. Namun, di Polsek Tanjungpinang Timur, terdapat sedikit kendala karena belum memiliki ruang penyimpanan arsip sendiri. Akibatnya, arsip hanya disimpan di filling cabinet di ruangan seksi umum (sium)

Penyimpanan Arsip

Dari hasil pengamatan dan interaksi langsung, sistem penyimpanan arsip yang diterapkan di Polsek Tanjungpinang mencakup sistem yang menyimpan nomor, wilayah, dan tanggal. Peraturan yang dibuat oleh masing-masing departemen mengatur penyimpanan ini. Dokumen umum seperti surat, dokumen keuangan, dan perencanaan laporan harian patrol, laporan bulanan bhabin, daftar absen disimpan dalam ruangan unit kepala umum (Kasium) yang diletakkan didalam sebuah box kotak arsip yang dilengkapi dengan folder. Sementara itu, berkas unit intelkam yang berupa laporan harian, laporan informasi, laporan penugasan serta SKCK disimpan didalam ruangan unit intelkam dengan mnggunakan lemari filling cabinet. Dan untuk berkas unit reskrim tentang tindak pidana disimpah didalam ruangan unit reskrim menggukan lemari filling cabinet.

Dalam sistem wilayah, kecamatan atau desa digunakan, sistem tanggal menggunakan tahun, dan sistem nomor menunjukkan kepemilikan. Tidak ada aturan yang mengatur bagaimana memilih sistem penyimpanan arsip; yang terpenting, sistem harus memungkinkan penemuan kembali dan penyimpanan dokumen yang dibutuhkan. Arsip aktif disimpan di setiap unit, sementara arsip inaktif disimpan di bagian Seksi Umum (SIUM). Ini adalah metode gabungan yang memanfaatkan kedua sentralisasi dan sentralisasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sugiarto tentang pengelolaan arsip aktif yang didesentralisasi dan arsip inaktif yang disentralisasi. Banyak organisasi yang menerapkan pendekatan kombinasi ini (Djamen & Pratasik, 2020).

Sementara itu, di Polsek Tanjungpinang Timur, belum menggunakan dan memiliki ruang khusus yang digunakan untuk menyimpan arsip inaktif sehingga arsip disimpan didalam ruangan seksi umum (sium) yang hanya menggunakan box kotak arsip dan lemari filling cabinet untuk penyimpanan arsip. Meskipun peralatan dalam kondisi baik, perlu diperluas karena banyaknya arsip yang harus disimpan.

Ruangan yang ada di polsek tanjungpinang timur dilengkapi dengan Air Conditioner (AC), sehingga dapat membantu untuk penyimpanan hanya sayangnya Ac hanya digunakan pada saat

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

jam kerja tidak dihidupkan selama 24 jam. Widyastuti (Putri et al., 2020) yang menyatakan penggunaan AC secara terus-menerus dapat membantu mengatur kelembaban dan suhu udara, serta berfungsi mengurangi jumlah debu yang ada di dalam ruangan.

(Handayani, 2021) mengatakan bahwa saat merencanakan tempat untuk menyimpan arsip, penting untuk mempertimbangkan jumlah ruang dan pencahayaan yang memadai. Menurut Wardah (2016), arsip harus diatur di dalam wadah atau kotak penyimpanan, dinomori dengan benar, ditempatkan di rak, dan digunakan sistem komputerisasi untuk penyimpanan arsip yang efektif.

Penyusutan Arsip

Istilah "penyusutan dokumen" mengacu pada jumlah dokumen yang saat ini tersedia. Ini dilakukan dengan memindahkan dokumen yang tidak lagi digunakan dari mesin pengolah ke lembaga kearsipan atau pusat kearsipan, menghancurkan dokumen yang tidak lagi berguna, dan memberikan dokumen yang statis kepada lembaga kearsipan. (Saeroji et al., 2020b) menyebutkan beberapa jenis penyusutan arsip: arsip yang tidak lagi berguna dibongkar; arsip dinamis yang tidak aktif ditransfer dari pengolah ke pusat kearsipan atau kearsipan; dan arsip statis diserahkan ke lembaga atau depo arsip lembaga induk.

Pada kegiatan penyusutan arsip di Polsek Tanjungpinang Timur, telah dilakukan penggunaan Jurnal Rekaman Arsip (JRA) untuk memastikan bahwa arsip yang dihapus memiliki catatan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. JRA digunakan untuk mencatat informasi tentang arsip yang dihapus, termasuk tanggal penghapusan, alasan penghapusan, dan nama penghapusan. Dalam hal ini, Polsek Tanjungpinang Timur telah berpedoman pada Peraturan Kearsipan Nomor 17 Tahun 2007 yang berisi pedoman tentang pengelolaan arsip di lingkungan Polri. Peraturan ini menegaskan bahwa pengelolaan arsip harus dilakukan secara sistematis dan teratur, serta memastikan bahwa arsip yang dihapus memiliki catatan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban penghapusan arsip di Polsek Tanjungpinang Timur dilakukan oleh staf yang bertugas mengelola arsip. Staf tersebut harus memastikan bahwa arsip yang dihapus memiliki catatan yang jelas dan sesuai peraturan dengan yang berlaku. Staf tersebut juga harus memastikan bahwa arsip yang dihapus tidak mengganggu kegiatan organisasi dan tidak menyebabkan kerugian.

Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip di Polsek Tanjungpinang Timur menghadapi beberapa tantangan yang membutuhkan perhatian khusus sehingga mampu memastikan arsip dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Berikut merupakan beberapa tantangan utama tersebut, antara lain:

1) Keterbatasan Ruang Penyimpanan
   Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan arsip adalah terjadinya keterbatasan dalam ruang penyimpanan (Azhari et al., 2023). Ruang yang tersedia seringkali tidak mencukupi dalam menampung setiap arsip yang terus bertambah seiring bertambahnya waktu. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan arsip yang tidak terorganisir dan sulit diakses.
   Terdapat beberapa rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah ini, misalnya:
   1. Digitalisasi Arsip, proses ini cukup efektif dalam penghematan ruang karena memindahkan arsip fisik ke dalam bentuk digital.

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

2. Penggunaan Rak Arsip Vertikal, memanfaatkan ruang vertikal dengan rak arsip yang tinggi dapat menambah kapasitas penyimpanan tanpa memerlukan tambahan ruang lantai.

2) Keamanan dan Kerahasiaan Arsip

Keamanan dan kerahasiaan arsip merupakan aspek yang krusial terutama untuk dokumen-dokumen yang sensitif dan berisi informasi rahasia (Khariroh, 2021). Resiko kehilangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah dapat diminimalisir.

Terdapat beberapa rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah ini, misalnya:

1. Sistem Keamanan Ganda, penggunaan sistem keamanan ganda berupa kunci fisik, akses berbasis kartu, dan pengawasan CCTV dapat meningkatkan keamanan arsip.
2. Pelatihan Karyawan, pemberiaan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya menjaga keamanan dan kerahasiaan arsip, serta prosedur yang harus diikuti untuk melindungi dokumen penting.

3) Penyusutan dan Pemusnahan Arsip

Arsip yang tidak lagi aktif atau tidak lagi dibutuhkan perlu disusutkan dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusutan yang tidak teratur dapat menyebabkan penumpukan arsip yang tidak perlu (Azhari et al., 2023).

Terdapat beberapa rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah ini, misalnya:

1. Jadwal Penyusutan Teratur, melakukan penetapan jadwal rutin untuk penyusutan dan pemusnahan arsip yang sudah tidak aktif.
2. Prosedur Pemusnahan yang Aman, melakukan sesuai prosedur pemusnahan yang aman dan sesuai regulasi untuk dokumen-dokumen yang sudah tidak diperlukan.

4) Pengelolaan Arsip Digital

Dengan semakin banyaknya arsip yang beralih ke format digital, pengelolaan arsip digital juga menjadi tantangan tersendiri (Fad'li et al., 2023). Aspek seperti format file, keamanan data digital, dan backup menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Terdapat beberapa rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah ini, misalnya:

1. Sistem Manajemen Arsip Digital (DMAS), melakukan implementasi DMAS yang andal untuk mengelola arsip digital secara efisien.
2. Backup dan Pemulihan Data, memastikan ada sistem backup yang teratur dan mekanisme pemulihan data untuk melindungi arsip digital dari kehilangan atau kerusakan.

5) Pengelolaan Akses dan Penggunaan Arsip

Menyediakan akses yang mudah namun tetap terkontrol untuk pengguna arsip merupakan tantangan dalam memastikan arsip dapat digunakan dengan optimal (Ramudin, 2019).

Terdapat beberapa rekomendasi solusi untuk mengatasi masalah ini, misalnya:

1. Sistem Pengelolaan Akses: Menggunakan sistem pengelolaan akses berbasis hak pengguna untuk memastikan hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses arsip tertentu.
2. Pelayanan Pengguna yang Efektif: Menyediakan layanan referensi dan bantuan bagi pengguna arsip untuk membantu mereka menemukan dan menggunakan arsip dengan efisien.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui solusi-solusi yang efektif, Polsek Tanjungpinang Timur dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsipnya, memastikan bahwa arsip-arsip penting terlindungi, mudah diakses, dan dikelola dengan baik.

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa Polsek Tanjungpinang Timur telah melaksanakan pengelolaan arsipnya dengan baik secara keseluruhan. Sedangkan itu, beberapa aspek masih diperlukan untuk dilakukan perbaikan oleh pihak Polsek Tanjungpinang Timur dalam pengelolaan arsip, di antaranya: Polsek Tanjungpinang Timur sudah melakukan penciptaan arsip dengan baik, penciptaan arsip di Polsek Tanjungpinang timur dilakukan oleh setiap bagian yang ada di Polsek Tanjungpinang Timur, lalu diserahan dan dikumpulkan ke bagian Seksi Umum (Sium) Polsek Tanjungpinang Timur untuk diberikan nomor surat dan dilakukan pencatatan di buku agenda; Untuk peminjaman arsip seperti buku agenda, Surat, dan dokumen lainnya sudah menggunakan pencatatan di buku peminjaman arsip sehingga meminimalisir kejadian kehilangan arsip; Penggunaan arsip Polsek Tanjungpinang Timur sudah cukup baik sebab arsip digunakan untuk informasi dan menyelesaikan masalah yang ada pada Polsek Tanjungpinang Timur; Pemeliharaan arsip di Polsek Tanjungpinang saat ini berjalan belum optimal dikarenakan tidak adanya anggaran dan pemahaman tentang pemeliharaan kearsipan sehingga staff Polsek Tanjungpinang Timur tidak ada pedoman untuk melakukan pemeliharaan. Tidak adanya ruangan khusus arsip di Polsek Tanjungpinang Timur sehingga arsip hanya disimpan di ruangan Seksi Umum (Sium) dengan menggunakan Filling Cabinet.Polsek Tanjungpinang Timur sudah melakukan penyusutan arsip dengan melakukan pemisahan arsip; dan kemudian dimasukkan kedalam kardus dan diletakkan di dalam gudang, dan untuk arsip yang berumur lima tahun keatas akan dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Penyusutan ini selalu dilakukan oleh staf Polsek Tanjungpinang Timur untuk menghindari penumpukan arsip. Beberapa tantangan juga dijumpai dalam aktivitas pengelolaan arsip misalnya keterbatasan ruang penyimpanan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan sistem keamanan arsip itu sendiri, maka dari itu diperlukan juga rekomendasi solusi dalam mengatasi tantangan tersebut.

Dari rangkuman tersebut, penulis menyarankan kepada Polsek Tanjungpinang Timur agar Polsek Tanjungpinang Timur perlu melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan memberikan pedoman kepada staff Polsek Tanjungpinang Timur tentang bagaimana pengelolaan arsip yang baik; agar Polsek Tanjungpinang Timur dapat melengkapi dan menyediakan anggaran serta fasilitas sarana dan prasarana untuk penimpanan arsip agar arsip dapat disimpan secara baik dan dapat meminimalisir kerusakan yang akan terjadi pada arsip; dn perlu adanya penambahan staf khusus dibidang kearsipan di Polsek Tanjungpinang Timur untuk membantu proses pengelolaan arsip dengan optimal.

REFERENSI

Buku

ANRI. (2009). *Modul Pengantar Kearsipan*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Barthos, B. (2017). *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Bhartos, B. (2013). *Manajemen Kearsipan*. PT. Bumi Aksara.

Moleong, J. L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. *PT Remaja Rosdakarya.*

Rosalin, S. (2017). *Manajemen Arsip Dinamis*. Universitas Brawijaya Press.

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

Jurnal

Andriani, J., Sasanti, E. E., & Mariadi, Y. (2023). Analisis Pengelolaan Dan Pengendalian Internal Piutang Pt Meka Asia Properti. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *3*(1), 163–174. https://doi.org/10.29303/risma.v3i1.399

Azhari, A., Wolor, C. W., & Marsofiyati. (2023). Analisis Pengelolaan Arsip Inaktif pada LKPP. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, *1*(6).

Djamen, A. C., & Pratasik, S. (2020). Pembangunan Aplikasi Arsip Pegawai PT. PLN Persero Wilayah Suluttenggo. *CogITo Smart Journal*, *6*(1), 60–72. https://doi.org/10.31154/cogito.v6i1.225.60-72

Fad'li, G. A., Marsofiyati, & Suherdi. (2023). Implementasi Arsip Digital Untuk Penyimpanan Dokumen Digital . *Jurnal Manuhara :Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, *1*(4).

Fathurrahman, M. (2018). Pentingnya Arsip Sebagai Sumber Informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, *3*(2), 215–225.

Handayani, T. (2021). Perencanaan Desain Tata Ruang Arsip Perguruan Tinggi: Sebuah Kajian Teoritis. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, *5*(2), 315–328. https://doi.org/10.14710/anuva.5.2.315-328

INDONESIA, K. K. N. R. (2023). *PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*. 1–23.

Kepolisian, K., & Republik, N. (2007). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007*. 1–6.

Khariroh, U. (2021). Analisis Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Universitas Sebelas Maret. *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, *5*(2).

Kurnia Farhan, E. (2022). Pengelolaan Arsip Dinamis Sekolah Menengah Atas Negeri Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *9*(1), 164–171.

Kusno, K., Juanda, Sulastri, & Kadariah. (2023). Pentingnya Peran Arsip di Lingkungan Instansi. *ABDIKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman*, *1*(2), 49–51. https://doi.org/10.32522/abdiku.v1i2.456

M, R. A., M, A. Y., & Arif, L. (2020). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK DI INDONESIA Ribka. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, *1*(3), 1–9.

Muhidin, S. A., Winata, H., & Santoso, B. (2019). Pengelolaan Arsip Digital. *JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Manajemen)*, *2*(3), 178–183.

Putri, I., Nurfajriyani, I., & Fadilatussaniatun, Q. (2020). Pengaruh Suhu Ruangan Kelas Terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Biologi Semester Vii (B). *BIO EDUCATIO : (The Journal of Science and Biology Education)*, *5*(1), 11–15. https://doi.org/10.31949/be.v5i1.1744

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

Ramudin, R. P. (2019). Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Internasional (ISO 15489-1:2016) Studi Kasus Pengelolaan Arsip Bank Indonesia. *DIPLOMATIKA: JURNAL KEARSIPAN TERAPAN*, *3*(1).

Risparyanto, A. (2021). Pengelolaan Arsip Perpustakaan. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, *4*(2), 161–172.

Saeroji, A., Kuswantoro, A., Ungu, R. B. M., & Rustiana, A. (2020a). Studi Kasus Penyusutan Arsip Di Universitas Negeri Semarang. *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi*, *17*(1), 81–94. https://doi.org/10.21831/efisiensi.v17i1.30442

Saeroji, A., Kuswantoro, A., Ungu, R. B. M., & Rustiana, A. (2020b). Studi Kasus Penyusutan Arsip Di Universitas Negeri Semarang. *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi*, *17*(1), 81–94. https://doi.org/10.21831/efisiensi.v17i1.30442

Yuliyanti, E. (2022). *Pengelolaan Arsip Dinamis di Polsek Majenang KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP*. 1–9.

Web Page

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Lembaran Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022*. Lembaran Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/255132/peraturan-anri-no-6-tahun-2022

Hak Cipta © 2024, Adelia, Purwanto Putra.

Pengelolaan Arsip Elektronik di Era Digital: Tinjauan Literatur Sistematis

Adhitya Farhan
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
Jl. Cabe Raya, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15418
E-mail: farhan.aditya5928@gmail.com

Abstrak

Abstract: *There are numerous issues with paper-based records management procedures, which makes electronic media available as an option for managing archives. According to Undang-Undang No. 11 Pasal 5 (1) 2008, electronic archives are a legitimate form of evidence and play a significant role in the administrative system. Advances in information technology necessitate computerized processing of the archive. This article aims to clarify what electronic archive management is and how to do it. On the basis of a review of the literature, this article was put together. Hardware (computers, print scanners, and media storage) and software are the tools used to administer the electronic archives. Print and electronic archives differ from one another. The construction and management of an electronic archive involves four cycles: distribution and use, storage, and maintenance, and attitude. It is possible to transfer print archives into electronic archives via scanning, converting, or importing. Online, offline, or nearline storage of electronic archives is possible.*

Key words*: Archieves, electronic, online*

Abstrak: *Ada banyak masalah dengan prosedur manajemen catatan berbasis kertas, yang membuat media elektronik tersedia sebagai opsi untuk mengelola arsip. Menurut Undang-Undang No. 11 Pasal 5 (1) tahun 2008, arsip elektronik merupakan bentuk bukti yang sah dan memainkan peran penting dalam sistem administrasi. Kemajuan dalam teknologi informasi membutuhkan pemrosesan komputerisasi arsip. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan apa itu manajemen arsip elektronik dan bagaimana melakukannya. Berdasarkan ulasan literatur, artikel ini dikumpulkan. Hardware (komputer, pemindai cetak, dan penyimpanan media) dan perangkat lunak adalah alat yang digunakan untuk mengelola arsip elektronik. Arsip cetak dan elektronik berbeda satu sama lain. Konstruksi dan manajemen arsip elektronik melibatkan empat siklus: distribusi dan penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan, dan sikap. Hal ini memungkinkan untuk mentransfer arsip cetak ke arsip elektronik melalui pemindaian, konversi, atau impor. Online, offline, atau nearline penyimpanan arsip elektronik dimungkinkan.*

Kata kunci*: Arsip, elektronik, online*

PENDAHULUAN

Kelaparan manusia untuk informasi meningkat sebagai akibat dari kemajuan informasi dan teknologi yang semakin canggih yang menentukan era globalisasi. Untuk banyaknya tugas yang dilakukan orang, informasi diperlukan. Untuk memfasilitasi penyimpanan, pencarian, dan berbagi informasi oleh orang-orang, berbagai bahan tertulis dan media diproduksi. Catatan ini dikenal sebagai arsip, yang menandai log tindakan atau peristiwa masa lalu. Arsip memainkan peran penting dalam banyak peristiwa yang berbeda karena, selain memberikan informasi, mereka berfungsi sebagai bukti yang dapat diperiksa. Arsip adalah “pencatatan kegiatan atau peristiwa

Hak Cipta © 2024, Adhitya Farhan.

dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan hukum". (Act No. 43 of 2009) yang dalam melaksanakan kehidupan sosial dan nasional, dikembangkan dan disetujui oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga pendidikan, partai politik, organisasi sosial, dan individu.[1]

Indonesia telah berkembang ke tingkat yang sangat tinggi sekarang dan mulai memasuki era digital, yang didefinisikan oleh pertumbuhan teknologi informasi yang cepat dan eksponensial. Masyarakatnya dipengaruhi oleh komputer dan teknologi berbasis internet di hampir setiap aspek keberadaan. Hari ini, Internet berfungsi sebagai sumber utama informasi dan hub untuk semua kebutuhan manusia. Sebuah jaringan global komputer yang saling terhubung dikenal sebagai Internet. Purbo (2006) menyatakan bahwa Internet dapat dipahami hanya sebagai jaringan jaringan. Karena interkoneksi, Internet adalah jaringan yang luas dengan banyak keuntungan, termasuk kemampuan untuk bertukar informasi. Organisasi dapat bertukar informasi secara eksternal atau internal, menurut Kadir (2003) dengan organisasi lainnya.

Kemajuan yang terus berlangsung dalam teknologi komputer dan Internet memiliki dampak tidak langsung terhadap masyarakat dengan memfasilitasi meningkatnya permintaan akan pengetahuan. Kebutuhan akan pengetahuan dalam budaya saat ini tidak dapat disangkal dan telah meresap ke setiap aspek kehidupan sehari-hari. Arsip adalah kumpulan catatan tertulis dan elektronik yang memberikan informasi tentang kehidupan publik.[2]

Selain itu, kemajuan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan organisasi, terutama yang berkaitan dengan arsip. Kegiatan-kegiatan ini meliputi: (1) modifikasi prosedur kerja; (2) penyesuaian teknik komunikasi; (3) penyesuaian persepsi efisiensi; (4) penyesuaian dalam penciptaan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi/arsip; dan (5) penyesuaian dalam pengelolaan arsip oleh para arsiparis. (Pratiwi Desi, 2012). Untuk alasan yang disebutkan di atas serta alasan lainnya, Indonesia memerlukan manajemen arsip berbasis TIK yang mematuhi sejumlah undang-undang dan menjadi dasar bagi pengelolaan arsip elektronik. Regulasi ini mencakup: (Hendri and Sambas, 2016: 425–426).

1. Dalam merujuk pada Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Pengembangan E-Government, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa: "Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menciptakan kemampuan dalam memproses, mengelola, mendistribusikan, dan memberikan layanan publik."
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5, ayat (3) menyebutkan bahwa: "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah jika menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini."
3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa :
    (a) Kecuali untuk informasi publik yang dikecualikan oleh peraturan, organisasi publik diwajibkan untuk memberikan, menyerahkan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kendali mereka kepada pemohon

[1] Fauziah, "*Pengantar Teknologi Informasi"*, Jurnal (Bandung: CV Muara Indah, 2010), hal. 182

[2] Yogi Andrianza, "*Pengelolaan Arsip Di Media Massa Radio Global 101.0 FM*", Jurnal (Palembang: Jurnal Perpustakaan dan Informasi) Vol 12 No. 1, 2018, hal. 58

Hak Cipta © 2024, Adhitya Farhan.

informasi.
(b) Informasi yang diberikan kepada publik oleh entitas publik haruslah benar, akurat, dan tidakmenyesatkan.
(c) Badan publik harus menciptakan dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk menangani informasi publik secara efektif dan efisien serta membuatnya mudah diakses guna memenuhi tugas yang disebutkan dalam paragraf. (2).
(d) Pengelolaan arsip dinamis dilakukan untuk memastikan ketersediaan arsip dalam pelaksanaan kegiatan sebagai dasar akuntabilitas kinerja dan bukti yang sah berdasarkan suatu sistem. Ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 40 ayat. (1) yang memenuhi persyaratan : (1) andal; (2) sistematis; (3) utuh; menyeluruh; dan (4) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kinerja."

METODE

Standar Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR) untuk pengembangan perangkat lunak, yang dikembangkan oleh Okoli & Schabram (2010), menjadi dasar bagi tinjauan pustaka sistematis ini. Adrian, Abdullah, Atan, & Jusoh (2016) mengurangi langkah-langkah metode SLR menjadi tiga: perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Dalam tahap perencanaan, prosedur yang diorganisir sesuai dengan lingkungan penelitian tertentu diperiksa, protokol tinjauan didefinisikan, dan pertanyaan penelitian dibuat. Selanjutnya, fase berikutnya melibatkan pelaksanaan prosedur pencarian dan ekstraksi data untuk mengklasifikasikan item data yang dihasilkan. Fase pelaporan, yang mengakhiri proses, mengumpulkan hasil penelitian dan pembicaraan yang telah dilakukan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Sistem Pengarsipan Arsip Elektronik?
2. Apakah upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan keaslian arsip elektronik di era digital?

HASIL DAN PEMBAHASAN

SISTEM PENGARSIPAN ARSIP ELEKTRONIK

Sistem pengarsipan profesional yang sesuai untuk pengelolaan arsip atau dokumen yang tepat saat ini ditawarkan oleh sejumlah penyedia. Tiga sistem berikut sedang digunakan:

1. Sistem Manajemen Dokumen Elektronik (EDMS), yang sering mengawasi arsip atau dokumen elektronik—seperti pengolahan kata, spreadsheet, presentasi, dan proyek terkait—melalui komputer yang digunakan oleh setiap karyawan.
2. Sistem Pencitraan Elektronik (EIS), yang bertanggung jawab untuk mengorganisir dokumen yang dipindai.
3. Data atau catatan kertas yang disimpan di tempat kerja atau fasilitas penyimpanan dokumen dikelola oleh Perangkat Lunak Manajemen Rekaman. (RMS). Apa pun sistemnya, ada beberapa elemen dasar yang dapat berfungsi sebagai panduan saat memilih suatu sistem, seperti :

a. Kecepatan di mana dokumen-dokumen dipindahkan

Hak Cipta © 2024, Adhitya Farhan.

Teknik utama untuk memasukkan data ke dalam sistem digitalisasi dokumen adalah sebagai berikut. Proses memindai kertas untuk membuat data gambar yang dapat disimpan di komputer dikenal sebagai pemindaian. Proses mengubah dokumen pengolah kata atau spreadsheet menjadi data gambar permanen untuk penyimpanan sistem komputer dikenal sebagai konversi. - Mengimpor: adalah proses memindahkan data elektronik ke dalam sistem pengarsipan dokumen elektronik, termasuk dokumen suite kantor, gambar, klip audio, dan data video.

b. Kemampuan untuk menyimpan dokumen.

Setelah dikirim ke sistem pengarsipan elektronik, dokumen perlu disimpan dengan baik. Sistem penyimpanan perlu cukup fleksibel untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru, memprediksi peningkatan volume dokumen, dan bertahan dalam waktu yang lama. Sistem digitalisasi dokumen merupakan langkah untuk memberikan kepastian pada pemanfaatan dan penyimpanan jangka panjang. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memilih cara yang sesuai dengan kebutuhan, baik pada masa saat ini ataupun pada masa yang akan datang.

c. Kemampuan untuk Mengindeks Dokumen Untuk kepentingan perusahaan

Dokumen kertas yang disimpan di tempat kerja harus dikelola dengan baik. Pelabelan, pengurutan, pengindeksan, dan penyimpanan dalam folder dengan menyimpannya di dalam lemari arsip adalah tindakan yang dapat dilakukan. Langkah ini akan mempermudah untuk menemukan dokumen tersebut. Hal yang sama berlaku untuk teks elektronik, yang memerlukan teknik yang sama untuk meningkatkan pemahaman sekarang dan di masa depan. Tiga pendekatan ada untuk pengelolaan arsip elektronik, yaitu:

- **Index Fields,** yang menggunakan kata kunci dan pengkategorian tematik sebagai teknik konvensional yang berlaku untuk dokumen kertas. Pengguna harus dapat membuat dan mengubah berbagai template, memperbarui indeks, dan memiliki berbagai jenis indeks dengan template yang berbeda dalam sistem ini. Tergantung pada nomor surat, tanggal pembuatan, dan detail lainnya, misalnya.
- **Full Text Indexing**, yang lebih cepat dan lebih sederhana untuk diindeks dibandingkan dengan menggunakan kata kunci dan memerlukan pemasangan perangkat lunak Pengenalan Karakter Optik (OCR).
- **Folder Or File Structure**, sebuah sistem yang menawarkan cara untuk melihat dokumen secara visual. Menemukan file yang fleksibel akan memudahkan konversi arsip kertas menjadi arsip digital.

d. Kapasitas untuk mengontrol akses

Kemampuan untuk membaca dokumen yang berkaitan dengan koneksi antara komputer LAN di kantor adalah komponen paling penting dari pengarsipan elektronik. Ketika berbicara tentang kontrol akses, ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan:
- Ketersediaan akses yang luas dan fleksibel: dengan menawarkan berbagai cara untuk mengakses sebuah file. Karena pemanfaatannya yang optimal, memperluas akses yang luas ini akan menghemat uang, kekayaan intelektual, dan bandwidth jaringan.
- Keamanan yang komprehensif: Sebuah perusahaan yang memiliki akses ke berbagai dokumen melalui arsip elektronik harus meningkatkan keamanan dengan menerapkan kontrol akses yang jelas dan komprehensif.

Hak Cipta © 2024, Adhitya Farhan.

Menghemat ruang adalah salah satu keuntungan utama dari digitalisasi. Sementara edisi fisik jurnal tidak memerlukan ruang sama sekali, versi elektronik membutuhkan ruang penyimpanan yang semakin meningkat. Sekarang juga memungkinkan untuk menyimpan beberapa gigabyte (Gb) data di hard drive karena penurunan harga perangkat penyimpanan komputer yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya popularitas teknologi DVD juga memungkinkan untuk menyimpan puluhan tahun edisi jurnal digital dalam satu disk, bahkan tanpa akses ke penyimpanan internal komputer, hanya memakan ruang rak sebesar buku kompak. Individu dengan ruang terbatas juga dapat mendapatkan manfaat, meskipun keuntungan tersebut paling jelas terlihat pada institusi dengan koleksi jurnal cetak yang besar.

Manfaat utama dari digitalisasi adalah pembentukan arsip jurnal yang komprehensif, abadi, dan mudah diakses. Karena beberapa konsumen memiliki seluruh katalog belakang setiap jurnal cetak, seringkali tidak mungkin untuk mendapatkan penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Mereka yang baru memasuki bidang ini dan mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya perpustakaan yang luas dapat mengabaikan bahan-bahan awal yang utama. Pencetakan ulang secara historis telah menjadi satu-satunya cara untuk membuat konten dapat diakses secara luas, meskipun biaya dan tantangan dalam menemukan bahan asli bisa menjadi penghalang. Teks digital dapat digunakan sebagai solusi untuk menurunkan biaya pencetakan ulang; menciptakan kembali seluruh sejarah cetakan jurnal hanya bisa memakan biaya beberapa dolar per salinan. Perhatian yang diberikan adalah perhatian yang diberikan diperhatikan saat memproduksi materi cetak dalam format elektronik yang dapat diandalkan dan tahan lama; pengarsipan digital memberikan kesempatan untuk mengakses semua masalah dengan cepat dan mudah secara global.

Dua alasan untuk arsip terpusat. Pertama, konstruksi, penyimpanan, dan pengkatalogan dokumen elektronik harus terus mengikuti disiplin standar dalam sistem hipertextual dengan kemampuan pencarian informasi yang canggih dan kualitas produksi jurnal yang tinggi. Pengguna seharusnya dapat memanipulasi dokumen seolah-olah mereka semua duduk di depan satu rak yang sama. Pengguna seharusnya tidak perlu menghadapi kesulitan mencari di bagian-bagian tersembunyi dari jaringan untuk mengambil makalah; akses ke dokumen seharusnya cepat, dapat diandalkan, dan jelas. Sebuah perpustakaan penelitian yang menghubungkan berbagai penerbit elektronik dan arsip serta bersifat terdesentralisasi dan terpusat di dalam jaringan harus menemukan cara untuk menetapkan disiplin dan koherensi.

Gardner (1990) menawarkan pandangan yang menarik tentang arah penerbitan psikologi ilmiah. Intinya, kami ingin mengganti sistem kami saat ini dengan solusi pengarsipan terstruktur yang dibangun di sekitar basis data elektronik. Saran tersebut sudah diajukan di sejumlah sektor yang berbeda. Jika dibandingkan dengan sistem yang ada, sistem pengarsipan akan memiliki sejumlah keuntungan. Fitur yang paling mencolok adalah pengajuan permintaan sesuai kebutuhan; alih-alih "menu tetap" dalam jurnal cetak, pengguna saat ini hanya memiliki akses ke artikel yang benar-benar mereka baca. Selain itu, arsip elektronik dapat menyediakan berbagai opsi pemberitahuan otomatis yang memungkinkan pengguna untuk diberitahu setiap kali artikel yang baru diterima sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Upaya untuk Mempertahankan Keaslian Arsip Elektronik di Era Digital

Para peneliti akan mempersempit fokus mereka dengan mengumpulkan temuan dari publikasi yang memiliki kode—yaitu, makalah yang mendapatkan skor delapan dari delapan belas—agar lebih terfokus. Yang berikut: A1, A3, A5, A7, A9, A10, A12, A13, A14, A15, A17,

Hak Cipta © 2024, Adhitya Farhan.

A18. Ini adalah gambaran umum tentang tindakan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan legitimasi arsip elektronik di era digital, termasuk rekomendasi dan inisiatif yang telah diselesaikan. Artikel pertama, yang diberi kode A1, menyatakan bahwa untuk menjaga bentuk asli arsip elektronik—preservasi jangka panjang—arsiparis dan pengelola arsip perlu memperhatikan pemilihan prosedur yang tepat (baik dan akurat).

Sehubungan dengan itu, Untuk menetapkan kriteria keaslian suatu objek, seorang arsiparis atau pengelola arsip elektronik atau digital harus: 1) menentukan asal-usul dan signifikansi objek tersebut; 2) menilai kualitas, konteks, dan konten objek, serta membuat seperangkat standar untuk pelestariannya; dan 3) menggunakan alat untuk mengonfirmasi bahwa objek tersebut asli dan bahwa salinan dibuat untuk distribusi atau pelestarian sambil secara konsisten mematuhi kriteria tersebut dari waktu ke waktu, Adam (2010).

Sesuai dengan artikel kedua dengan kode artikel A3, profesional arsip, yang juga dikenal sebagai arsiparis, perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dalam mengelola arsip elektronik. Ini dapat dicapai dengan mengejar pendidikan formal. Selain itu, mereka perlu membangun sistem pelestarian yang dapat diandalkan yang dapat menjamin pemeliharaan salinan asli yang akurat dari catatan pencipta. (Ngoepe & Mosweu, 2019).

Artikel ketiga, kode artikel A5, menyatakan bahwa standar internasional, seperti ISO 15489 (Standar Internasional tentang Manajemen Rekaman), ISO 16175 Persyaratan Dasar dan Fungsi untuk Rekaman dalam Lingkungan Elektronik, dan ISO 30300 terbaru tentang Sistem Manajemen untuk Seri Rekaman, diperlukan untuk menjaga keaslian dokumen atau arsip elektronik. (Linger, Reed, and Evans, 2014).

Artikel keempat, kode A7, menyatakan bahwa suatu sistem kebijakan, prosedur, teknologi, dan tindakan atau intervensi yang disengaja oleh entitas yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab atas catatan tersebut diperlukan untuk menjamin keaslian dan keandalan catatan. Dalam konteks kontrak elektronik, istilah "penjaga catatan pihak ketiga yang tepercaya" diciptakan untuk menunjuk kepada orang atau badan hukum yang telah diberikan tanggung jawab untuk memelihara catatan. (L. Duranti, 2011).

Untuk menjaga keabsahan arsip elektronik di era digital, teknologi komputer diperlukan, menurut artikel kelima dengan kode pasal A9. (Sabharwal) (2017).

Kebijakan mengenai upaya untuk menjaga keaslian dokumen elektronik ada dan perlu dikembangkan dengan memperhatikan bagaimana kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan digunakan untuk memberi informasi kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk donor, pencipta catatan, staf TI, dan peneliti, sesuai dengan artikel keenam, kode artikel A10. Untuk memperjelas kewajiban dan tugas institusi, praktik pengelolaan dan pelestarian yang lahir dari digital harus cukup fleksibel dan kuat untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan di masa depan. Meskipun mungkin tidak ada keamanan yang sempurna pada akhirnya, kita akan lebih tahu bagaimana mengenali, mengendalikan, dan meminimalkan bahaya terhadap catatan arsip yang dibuat secara digital—jika tidak sepenuhnya melindunginya. Pyatt & Goldman, 2013).

Menurut artikel 7 dengan Kode Pasal A12, pemeliharaan rutin diperlukan untuk menjamin integritas arsip elektronik dan menjaga keaslian catatan elektronik. Ini dapat dicapai dengan cara-cara berikut: 1) Mengidentifikasi 'titik masalah' dalam aliran konten digital; 2) Memastikan bahwa konten digital diarsipkan secara berkala; 3) Mengkomunikasikan apa yang sedang Anda kerjakan dan simpan; dan 4) Menerbitkan pengaturan akses untuk konten yang diarsipkan (sekarang dan ketika dianggap sebagai karya tak bertuan). (Burnhill, 2013).

Hak Cipta © 2024, Adhitya Farhan.

Artikel 8 dengan kode artikel A1 3 menyatakan bahwa pemeliharaan koleksi khusus (termasuk arsip elektronik) memerlukan upaya penyuluhan dan advokasi, pemahaman yang baik tentang aplikasi basis data dan pengolahan arsip, pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual dan hak cipta, kompetensi dan minat di bidang koleksi, dan yang terpenting, bantuan dari programmer yang berdedikasi. (M. R. Evans, 2015).

Menurut artikel kesembilan dengan kode A14, sebuah kebijakan harus ditetapkan untuk menciptakan repositori digital yang dapat dipercaya oleh penulis informasi dan komunitas pengguna untuk menjaga keabsahan materi elektronik. Untuk memenuhi persyaratan pelestarian digital sepanjang waktu, sebuah organisasi harus menunjukkan bahwa ia berkomitmen untuk menerapkan sistem yang memadai. Ini melibatkan kemampuan untuk mempertahankan hal-hal digital sambil memberikan perlindungan yang cukup terhadap kerusakan media, bencana alam yang tidak dapat dikendalikan, dan kesalahan manusia. Ini juga menawarkan kemampuan untuk menyajikan item-item tersebut dalam format baru yang menjaga keabsahan dan integritas dokumen asli, atau dalam format aslinya. Sebuah repositori digital yang dapat diandalkan akan memiliki cukup informasi tentang item yang ada di dalamnya untuk menunjukkan integritas dan keaslian dokumen asli, mencatat semua migrasi media dan format, serta inisiatif preservasi digital tambahan atau kontrol aksesibilitas yang diterapkan oleh repositori (Price & Smith, 2011).

Untuk menjaga keabsahan arsip elektronik di era digital, teknologi komputer dan sistem informasi harus digunakan, sesuai dengan artikel 10 dengan kode artikel A15. (Cohen, 2015).

Menurut artikel sebelas dengan kode artikel A1 7, informasi dan teknologi, bersama dengan organisasi atau individu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip, sangat penting untuk menjaga kebenaran dokumen elektronik di era digital. (Fang, Pan, Dekun, & Wei, 2016).

Artikel kedua belas, kode A18, menyatakan bahwa untuk menjamin keberlanjutan dokumen digital, metadata berkualitas tinggi harus dibuat, dan untuk itu, penyimpan data perlu menerima pelatihan dalam manajemen data. Untuk melindungi keabsahan catatan elektronik, disarankan untuk melakukan penilaian risiko, menyusun daftar aset digital, dan menunjuk pengawas teknologi guna mengurangi risiko. Pinnick (2017).

KESIMPULAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dukungan pemerintah untuk pemeliharaan arsip elektronik di Indonesia. Teknologi komputer digunakan untuk mengelola arsip dalam format baru yang disebut arsip elektronik. Untuk mengikuti perkembangan zaman, institusi yang saat ini mengelola arsip mereka secara manual sebaiknya beralih ke pendekatan elektronik.

Menghemat ruang adalah salah satu keuntungan utama dari mendigitalkan arsip. Sementara versi elektronik tidak memerlukan ruang fisik sama sekali, arsip terus berkembang, begitu pula dengan jumlah ruang rak yang dibutuhkan untuk penyimpanan. Digitalisasi arsip memiliki manfaat utama dalam menghasilkan dokumen yang komprehensif, tahan lama, dan mudah diakses.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, juga saya sampaikan terima kasih kepada orang – orang yang saya sayangi yang telah membersamai sampai kapanpun yaitu keluarga besar, orang tua, istri, saudara kandung, dan sahabat yang kenal dan yang saya kenal nantinya.

Hak Cipta © 2024, Adhitya Farhan.

REFERENSI

Amsyah, Zulkifli, *Manajemen Kearsipan.* (2005). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Andrianza, Yogi. (2018). Pengelolaan arsip di media massa radio Global 101.0 FM Palembang. IQRA: Jurnal Perpustakaan dan Informasi Vol. 12, No. 1. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/1848

Ardyawin, Iwin. (2017). Kompetensi Arsiparis Dalam Pengelolaan Kearsipan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Masyarakat. JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 2, No. 1. http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jipi/article/view/919

Armida Silvia Asriel, 2018, *Manajemen Kearsipan***,** Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Basuki, Sulistyo, *Kamus Istilah Kearsipan.* (2005). Yogyakarta: Kanisius.

Budiman, Muhammad Rosyid, 2009, *Dasar Pengelolaan Arsip Elektronik*, Yogyakarta: Badan Perpustakaan Arsip Daerah.

Fitriani, Yuni, Pakpahan, Roida. (2018). Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip pada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Palmerah Jakarta. Paradigma - Jurnal Komputer dan Informatika Vol. 20, No 2. DOI: 10.31294/p.v20i2.3991

Habiburrahman. (2016). Penggunaan Perangkat Lunak Dalam Pengelolaan Arsip Konvensional Dan Elektronik. JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi) Vol. 1, No. 2. DOI:10.30829/jipi.v1i2.559

Fauzi, Akhmad, 2008, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Goldman, B., & Pyatt, T. D. (2013). Security without obscurity: Managing personally identifiable information in born-digital archives. *Library & Archival Security*, *26*(1-2), 37-55.

Haryadi, Hendi, *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer dan Staff.* 2009. Jakarta: Visi Media Pustaka.

Muhidin, S. A. dan Hendri Winata, 2016, *Manajemen Kearsipan: Untuk Organisasi Publik, Bisnis, Sosial, Politik, dan Kemasyarakatan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Munir, Badri Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern.* (2007). Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama.

Rustam, Muhammad, *Pengelolaan Arsip Elektronik.* (2014). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Soesilo, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Kearsipan Melalui Arsip-E Di Direktorat Jenderal

Tjiptasari, Fitriana. (2017). Persepsi kegunaan pengelolaan arsip digital menggunakan SIKD (sistem informasi kearsipan dinamis). Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Vol. 5, No. 2. DOI: 10.24198/jkip.v5i2.12645

Yanti, Rani Nova, Nelisa, Malta. (2014). Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Sumatera Barat. Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol. 3, No. 1. DOI: 10.24036/5715-0934

Yona, Oktri, Marlini, Marlini. (2016). Penggunaan System Application and Product in Data Processing (SAP) dalam Pengelolaan Data Arsip pada Bagian Keuangan PT

Hak Cipta © 2024, Adhitya Farhan.

Telkom Witel Sumbar. Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Vol. 5, No. 1. DOI:10.24036/71900934

Yusron, Ali. (2019). Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Tata Usaha (TU) Dalam Pengelolaan Arsip Melalui Kegiatan Supervisi Manajerial Pada Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Istiqomah Padang sidempuan. Jurnal Education and Development Vol. 7 No. 1. http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/832

Zakiah, Azizah, Supriatna, Apit. (2015). Aplikasi Pengelolaan Arsip Surat Berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Anri Nomor 18 Th. 2009. Sentia 2015 Vol. 7, No. 2. http://sentia.polinema.ac.id/index.php/SENTIA2015/article/view/193

Hak Cipta © 2024, Adhitya Farhan.

Penyimpanan Arsip Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Vital di Kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H.

Adiki Mawadati[1)] Purwanto Putra[2)]
[1] Mahasiswa Program Studi D-IV, FISIP, Universitas Terbuka
[2] Dosen Pembimbing Universitas Terbuka
e-mail: [1)]adikimwdtt16@gmail.com [2)]purwanto.putra@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Minuta akta dikategorikan sebagai arsip vital terjaga khusus karena memuat informasi krusial terkait kontinuitas serta eksistensi bangsa dan negara. Pengakuan protokol notaris sebagai arsip negara didasari oleh fungsinya sebagai dokumen resmi dalam suatu perjanjian yang memuat status hukum, hak, dan kewajiban pihak para pihak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyimpanan arsip minuta akta notaris sebagai arsip vital di Kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sistem penyimpanan arsip akta minuta di Kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H. menggunakan sistem penyimpanan kronologis, dan menggunakan asas sentralisasi dengan menggunakan lemari besi. Arsip akta minuta yang sudah berusia 25 tahun yang seharusnya diserahkan kepada MPD sebagaimana disebutkan dalam UUJN masih disimpan di Kantor Notaris sehingga terjadi penumpukan di Kantor tersebut. Penumpukan arsip terjadi karena adanya ketidakpastian hukum dalam peraturan penyimpanan protokol notaris antara UUJN dan Undang-Undang Kearsipan. Upaya dalam mengatasi masalah tersebut dilakukan dengan cara menyediakan tempat penyimpanan protokol notaris, perbaikan regulasi, dan penyimpanan arsip secara elektronik.

Kata Kunci: *Arsip Vital, Minuta Akta Notaris, Protokol Notaris*

PENDAHULUAN

Setiap organisasi, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan tentu melaksanakan aktivitas administrasi dalam penyelenggaraan organisasinya. Aktivitas administrasi yang dimaksud meliputi berbagai aktivitas seperti pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan yang akan menciptakan sebuah arsip. Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi akan menghasilkan arsip yang dijadikan sebagai bukti autentik atas kegiatan yang sudah terjadi serta menjadi alat pembuktian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara resmi (Lutfi & Aliyah, 2022, p. 71).

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan dan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip, dari segi fungsinya dikategorikan menjadi dua jenis yaitu arsip statis dan arsip dinamis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan organisasi, memiliki nilai guna sejarah, dan disimpan permanen oleh lembaga kearsipan. Sedangkan arsip dinamis diartikan sebagai arsip yang frekuensi penggunaannya masih banyak dibutuhkan untuk perencanaan dan pelaksanaan pencipta arsip secara langsung. Arsip dinamis dijabarkan lebih rinci menjadi tiga kategori yakni arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif.

Arsip vital ialah arsip yang memiliki eksistensi sangat penting bagi kelangsungan aktivitas

Hak Cipta © 2024, Adiki Mawadati Purwanto Putra.

organisasi dan apabila hilang atau rusak tidak dapat diganti atau diperbarui. Krihanta menjelaskan, "Keberadaan arsip vital baik secara fisik maupun informasinya dalam kondisi apapun termasuk musibah atau bencana merupakan prasyarat demi berlangsungnya aktivitas atau operasional bagi suatu organisasi karena arsipnya tidak dapat diperbarui atau ditemukan di tempat lain." (Krihanta, 2019, p. 2.6).

Menurut Sumrahyadi & Widyarsono, terdapat dua asas yang dominan dalam pemberkasan arsip, yaitu asas desentralisasi dan asas sentralisasi. Asas desentralisasi artinya penyimpanan arsip yang dilakukan secara tersebar di masing-masing *central file* atau unit kerja. Umumnya, asas ini diterapkan pada organisasi yang kompleks yang memiliki banyak kegiatan dan unit kerja yang luas. Berbeda dengan asas desentralisasi, asas sentralisasi yaitu asas untuk mengelola penyimpanan arsip dalam satu unit kerja secara terpusat. Prinsip sentralisasi biasa diterapkan pada lingkup kerja yang relatif kecil (Sumrahyadi & Widyarsono, 2018, p. 3.8).

Sumrahyadi & Widyarsono lebih lanjut mengklasifikasikan sistem penyimpanan arsip menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Sistem Pemberkasan Berdasarkan Abjad (*Alpabetic Filing System)*, yakni sistem pemberkasan arsip yang mengacu pada urutan sesuai abjad.
2. Sistem Pemberkasan Berdasarkan Numerik (*Numeric Filing System*), adalah sistem pemberkasan arsip menggunakan urutan bilangan.
3. Sistem Pemberkasan Berdasarkan Kronologis (*Chronological Filing System*), merupakan sistem penyimpanan arsip berdasarkan penyusunan angka-angka secara kronologis atau berurutan menurut tanggal, bulan dan tahun.
4. Sistem Pemberkasan Berdasarkan Geografi (*Geographic Filing System*), yaitu sistem pemberkasan arsip yang penataannya berdasarkan wilayah atau geografi dan disusun secara hierarki.
5. Sistem Pemberkasan Berdasarkan Permasalahan (*Subject Filing System*), merupakan sistem pemberkasan berdasarkan kesamaan permasalahan atau subjek (Sumrahyadi & Widyarsono, 2018, p. 3.23).

Pengelolaan dan pengarsipan yang baik merupakan tanggung jawab bagi setiap organisasi, termasuk notaris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris memiliki tanggung jawab administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengarsipan dokumen. Dalam konteks ini, pengarsipan yang dimaksud meliputi penyimpanan protokol notaris. Selain kewenangan tersebut, notaris juga berkewajiban untuk menyerahkan laporan bulanan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) di wilayah jabatan notaris terkait laporan pembuatan dokumen, akta atau surat-surat lain sesuai kewenangannya (Agustianto, 2023, p. 30).

Disamping kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik, notaris juga bertanggungjawab untuk mengelola dan mengarsipkan dokumen-dokumen yang dibuatnya seperti akta, surat, dan dokumen lainnya. Dokumen-dokumen yang disimpan oleh notaris dikumpulkan dalam sebuah protokol. Protokol notaris adalah arsip negara sehingga notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga serta menyimpan protokol notaris berdasarkan aturan dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain bundel minuta akta, protokol notaris mencakup dokumen lain yang dikategorikan sebagai arsip negara sesuai peraturan perundang-undangan, seperti buku daftar akta/reportorium, buku daftar wasiat, buku daftar surat dibawah tangan yang dilegalisasi dan waarmerking, buku daftar protes, klapper, buku daftar

Hak Cipta © 2024, Adiki Mawadati Purwanto Putra.

hibah, buku daftar pendirian PT/CV/yayasan/firma, buku daftar *copie collationne*, dan perjanjian kawin (Tedjosaputro, 2021, p. 62). Diantara dokumen-dokumen yang dikumpulkan menjadi protokol, dokumen yang memiliki volume terbanyak adalah akta.

Akta merupakan bukti tertulis yang dibuat berdasarkan perjanjian atau kesepakatan oleh pihak-pihak yang terkait. Akta dibentuk saat perjanjian disepakati dan merupakan alat pembuktian yang kredibel ketika suatu saat terjadi perselisihan (Suwardiyati & Rustam, 2022, p. 119). Minuta akta memuat data diri para penghadap, tanda tangan, paraf, cap jempol para pihak dan saksi yang hadir serta tanda tangan notaris. Sebagai salah satu komponen protokol notaris, minuta akta dikategorikan sebagai arsip vital terjaga khusus karena memuat informasi krusial terkait kontinuitas serta eksistensi bangsa dan negara. Sebab itu, minuta akta harus dilindungi secara inklusif, termasuk menjaga keamanan, keselamatan dan keutuhannya (Pratiwi et al., 2022, p. 297).

Seiring dengan tuntutan hukum di berbagai bidang yang terus berkembang menyebabkan peningkatan terhadap kebutuhan pembuatan akta sebagai alat bukti tertulis. Akta autentik memiliki urgensi dalam melindungi hak dan kepentingan para pihak, menjamin kepastian hukum, serta mencegah potensi sengketa. Walaupun kemungkinan terjadinya sengketa tidak dapat dihindari, namun keberadaan akta ini memiliki kemampuan pembuktian yang mutlak dan sempurna di hadapan pengadilan sehingga penyelesaian perkara di pengadilan akan lebih mudah dan efisien karena keberadaan akta ini.

Berdasarkan karakteristik dan jenis arsip, protokol notaris termasuk dalam kategori arsip vital terjaga khusus. Keberadaan protokol notaris yang diakui sebagai arsip negara memiliki peran penting sehingga harus dijaga keamanan, keutuhan dan keselamatannya demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pengakuan tersebut didasari oleh fungsinya sebagai dokumen resmi dalam suatu perjanjian yang memuat status hukum, hak, dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, demi menjamin ketertiban, perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para pihak, protokol notaris harus disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya (Noer & Fajriyah, 2021, p. 82). Disamping itu, protokol notaris juga bertujuan:

a. Untuk melindungi keamanan dan keabsahan minuta akta asli, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan atau pemalsuan dapat diidentifikasi segera dengan cara membandingkan dengan asli aktanya.
b. Untuk memastikan kepentingan para pihak terlindungi dengan cara menjaga kerahasiaan informasi terkait akta atau surat lainnya untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan.
c. Sebagai alat bukti yang akurat karena memuat tanda tangan dan cap jempol serta dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa para pihak hadir secara langsung dan menyetujui pembuatan akta tersebut.
d. Sebagai jaminan keamanan dan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris melalui pembuatan surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris (Mulia et al., 2022, p. 229).

Dalam jangka panjang, volume minuta akta di kantor notaris akan terus mengalami penambahan. Hal ini memicu persoalan terkait penyimpanan arsip dimana ruang penyimpanan yang tersedia semakin terbatas. Notaris dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengelola arsip minuta akta yang terus menerus bertambah. Tantangan tersebut diantaranya biaya pemeliharaan yang mahal, kesulitan dalam menemukan kembali arsip karena penumpukan, dan risiko kerusakan akibat bencana alam atau serangan serangga (Burhanuddin, 2022, p. 3). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta © 2024, Adiki Mawadati Purwanto Putra.

1. Bagaimana sistem penyimpanan arsip akta minuta sebagai arsip vital di kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H.?
2. Apa saja problematika yang dihadapi oleh kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H. dalam penyimpanan arsip akta minuta sebagai arsip vital?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Marinu Waruwu menjelaskan, penelitian kualititatif yaitu penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan analisis. Artinya, penelitian ini mengutamakan penggunaan bahasa dalam menjelaskan peristiwa dan menginterpretasikan data hasil penelitian. Lebih lanjut Marinu Waruwu juga menjabarkan secara lebih rinci bahwa penelitian kualitatif memiliki tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Teknik Observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data di lokasi penelitian dengan pengamatan aktivitas di lokasi secara langsung. Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H., yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Observasi dilakukan selama tiga hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2024. Melalui teknik observasi ini, diharapkan peneliti dapat mengamati secara langsung mengenai aktivitas di lokasi penelitian sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang penyimpanan arsip minuta akta notaris di lokasi penelitian.
b. Teknik Wawancara. Wawancara merupakan teknik mengumpulkan informasi melalui percakapan secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi seperti telepon, *zoom, whatsapp* atau teknologi lainnya. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Mardiah, S. H., (53) sebagai pejabat notaris yang memiliki latar belakang ilmu hukum dan kenotariatan serta Ibu Nur Qomariah (53) sebagai karyawan notaris yang sudah bekerja di lokasi penelitian selama 23 tahun. Wawancara dilakukan sebanyak dua kali pada tanggal 14 Mei 2024 dan 15 Mei 2024. Wawancara ini memperoleh hasil mengenai sistem penyimpanan dan akses arsip minuta akta notaris serta problematika yang dihadapi dalam penyimpanan minuta akta notaris di lokasi penelitian.
c. Teknik Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode penelitian yang memiliki fokus dalam mencari bukti akurat sesuai topik pada masalah penelitian. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, peneliti mencari informasi dengan mempelajari, mengkaji buku-buku, jurnal bereputasi dan peraturan yang berkaitan dengan kearsipan dan protokol notaris. Dengan metode dokumentasi, diharapkan mampu memperkuat landasan teori dan mendapatkan informasi yang mendalam pada fokus penelitian (Waruwu, 2023, p. 2898).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penyimpanan Arsip Akta Minuta Sebagai Arsip Vital Di Kantor Notaris Dan PPAT Mardiah, S. H.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum untuk berbagai tindakan serta perjanjian dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan atau permintaan dari pihak yang memiliki kepentingan atas akta. Notaris berkewajiban menjamin kebenaran dalam membuat akta, menyimpan akta, menerbitkan salinan/grosse/kutipan akta, dan melaksanakan tugas-tugas tersebut sepanjang tidak ada

Hak Cipta © 2024, Adiki Mawadati Purwanto Putra.

penunjukan oleh undang-undang kepada pejabat atau pihak lain (Moechtar, 2024, p. 4). Disamping tugas pokok tersebut, notaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal administratif untuk melaksanakan pengelolaan arsip, termasuk arsip akta atau dokumen-dokumen yang lain yang disebut dengan protokol notaris.

Penyimpanan arsip merupakan salah satu aktivitas pengelolaan arsip meliputi penataan arsip secara sistematis dan logis guna mempermudah serta mempercepat penemuan kembali arsip apabila arsip diperlukan (Hayati & Noviani, 2019, p. 33). Setiap notaris memiliki kewajiban dalam membuat akta notaris berbentuk minuta dan wajib menyimpan minuta tersebut sebagai protokol notaris. Hasil observasi menunjukkan, sistem penyimpanan arsip akta minuta di Kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H. menggunakan sistem penyimpanan kronologis, yaitu penyusunan arsip berdasarkan urutan waktu. Dalam kurun waktu satu bulan, minuta akta yang dibuat akan dijahit dan dijilid menjadi buku atau kumpulan minuta akta maksimal berisi 50 (lima puluh) akta. Kumpulan minuta akta dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku apabila jumlah minuta akta yang dibuat dalam satu bulan tidak dapat dimuat dalam satu buku. Setiap buku diberi label yang memuat nomor akta, bulan dan tahun dibuatnya akta. Pemberian label bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan arsip dengan adanya kemudahan dan kecepatan dalam pencarian arsip apabila dibutuhkan.

Ruang lingkup kegiatan notaris terbatas pada satu gedung kantor, sehingga seluruh arsip yang berhubungan dengan dengan akta notaris disimpan dalam satu unit kerja atau disebut dengan asas sentralisasi (terpusat). Dengan asas sentralisasi ini akan mempermudah akses dan pencarian terhadap arsip, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. Sarana penyimpanan arsip akta minuta menggunakan lemari besi yang dapat menjamin keamanan informasi arsip terhadap bencana baik kebakaran, kebanjiran maupun kerusakan arsip akibat serangga. Resa Eka Nur Fitriasari menegaskan, “Notaris wajib menyimpan minuta aktanya di tempat yang telah disediakan seperti lemari besi yang dirancang khusus untuk menyimpan berkas-berkas penting seperti minuta akta dan minuta akta tersebut telah dibundel dengan lengkap dan rapi agar tidak hilang ataupun rusak.” (Fitriasari, 2022, p. 1065).

Menurut keterangan dari Ibu Nur Qomariah sebagai narasumber, akta notaris hanya dapat diakses oleh pejabat notaris dan staf yang berkepentingan. Pihak lain yang berhak atas akta, seperti para pihak dalam akta, ahli waris, atau pejabat yang berwenang juga memiliki hak untuk mengakses arsip. Keterbatasan akses arsip tersebut karena minuta akta dikategorikan sebagai arsip vital yang bersifat rahasia sehingga hanya pihak tertentu yang dapat mengaksesnya. Akses arsip dibatasi untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan terhadap informasi di dalam arsip tersebut. Yenny Febrianty menegaskan, “Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut.” (Febrianty, 2023, p. 5).

Problematika yang Dihadapi Oleh Kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H. Dalam Penyimpanan Arsip Akta Minuta Sebagai Arsip Vital

Problematika penyimpanan protokol notaris bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 65 yang mengamanatkan penyimpanan protokol notaris harus tetap dilaksanakan walaupun jabatan notaris sudah berakhir. Apabila protokol notaris dianggap sebagai sebuah arsip, maka tatakelolanya harus pula patuh pada peraturan kearsipan terutama terkait jadwal retensinya (jangka waktu penyimpanan). Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, aspek pengelolaan protokol notaris hanya mengatur tentang penyerahannya saja. Padahal dalam Undang-Undang Kearsipan, aspek pengelolaan arsip meliputi empat kegiatan, yaitu akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses terhadap arsip (Djaja, 2024, p. 16).

Hak Cipta © 2024, Adiki Mawadati Purwanto Putra.

Jadwal Retensi Arsip (JRA) merupakan kebijakan jangka penyimpanan arsip serta penetapan nasib akhir arsip. JRA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kearsipan sekurang-kurangnya memuat tentang jenis arsip, retensi arsip, dan keterangan nasib akhir arsip baik untuk dinilai kembali, dimusnahkan atau dipermanenkan. Namun, meskipun protokol notaris dianggap sebagai arsip negara di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, di dalam Undang-Undang Kearsipan tidak diatur secara jelas terkait jadwal retensi arsip protokol notaris. Kurang tegasnya regulasi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait pemeliharaan dan penyimpanan protokol bagi notaris.

Penyimpanan protokol notaris tidak melewati proses penyusutan seperti arsip-arsip yang lain. Notaris, notaris penerima protokol dan Majelis Pengawas Daerah tetap bertanggungjawab dalam hal penyimpanan protokol notaris walaupun protokol notaris terebut sudah tidak bernilai guna (Mulia et al., 2022, p. 237). Pasal 62 UUJN menjelaskan penyerahan protokol notaris dapat dilaksanakan apabila notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Arsip minuta akta notaris sebagai bagian dari protokol notaris yang disimpan sangat rentan terhadap kerusakan dan penumpukan arsip. Salah satu penyebab rusaknya arsip yaitu adanya penumpukan arsip yang terus menerus bertambah. Selain karena penumpukan, kerusakan arsip dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti fasilitas penyimpanan yang kurang memadai, bencana alam ataupun serangga.

Menurut observasi, selama aktif menjabat sejak tahun 1998, Notaris dan PPAT Mardiah, S. H sudah membuat kurang lebih 300 bundel buku kumpulan akta yang mana setiap bundel bukunya berisi maksimal 50 akta yang sudah dijahit. Di antara sekian banyak arsip, terdapat beberapa arsip yang sudah berusia 25 tahun. Namun, sampai saat ini arsip-arsip tersebut masih disimpan di Kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H.

Hasil wawancara dengan Notaris Mardiah, S.H., mendapatkan temuan bahwa sebenarnya notaris menyadari sesuai UUJN Pasal 65, protokol notaris harus diserahkan kepada MPD apabila sudah berusia 25 tahun atau lebih. Realitanya, peraturan tersebut belum diberlakukan sampai saat ini, sehingga mengharuskan arsip tetap disimpan oleh notaris itu sendiri atau penerima protokol notaris jika notaris sudah berakhir masa jabatannya atau karena alasan tertentu. Pelaksanaan peraturan tersebut terhambat dikarenakan kurangnya kapasitas penyimpanan yang memadai dari Majelis Pengawas Daerah untuk menyimpan arsip-arsip protokol dari notaris. Dian Ayu Yuhana menegaskan bahwa tidak ada arsip protokol notaris yang diserahkan kepada MPD sampai saat ini. Hal ini merupakan salah satu masalah nasional yang terjadi di Indonesia akibat tidak adanya sarana dan prasarana untuk menyimpan arsip (Yuhana, 2021, p. 49).

Mengingat bahwa problematika dalam penyimpanan protokol notaris cukup kompleks, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Langkah pertama yang dapat diambil yaitu, keterlibatan pemerintah dan Direkotorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Artinya, dapat diupayakan penyediaan sarana berupa tempat penyimpanan dan fasilitas lain yang dibutuhkan sebagai penunjang kegiatan kearsipan bagi MPD di setiap daerah guna menyimpan arsip-arsip notaris khususnya arsip protokol notaris. Dengan adanya sarana tersebut tugas MPD dapat berjalan dengan semestinya sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Kearsipan dan UUJN.

Permasalahan penyimpanan protokol notaris dapat diatasi dengan pengkajian ulang dan perbaikan regulasi terhadap Undang-Undang Kearsipan dan UUJN dalam hal pengelolaan protokol notaris meliputi kebijakan dan pembinaan khususnya terhadap jangka waktu

Hak Cipta © 2024, Adiki Mawadati Purwanto Putra.

penyimpanannya. Dengan penyempurnaan peraturan tersebut, kepastian hukum yang selaras dalam penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris sebagai arsip negara akan terwujud.

Disamping itu, untuk mengatasi problematika penyimpanan protokol notaris dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Penyimpanan arsip secara digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan penyimpanan arsip konvensional. Penyimpanan protokol notaris secara digital dilakukan dengan cara alih media dari arsip konvensional menjadi arsip digital melalui proses *scanning*. Penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk melindungi arsip dari kerusakan dan kehilangan. Digitalisasi penyimpanan minuta akta notaris bukan hanya meminimalisir kerusakan dan kehilangan arsip, tetapi juga mempermudah penemuan kembali arsip dan mengurangi penggunaan kertas secara signifikan. Dengan demikian, penerapan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik sangat penting bagi notaris untuk mendukung kegiatannya. (Mallolongan & Noor, 2023, p. 62).

KESIMPULAN

Setiap notaris memiliki kewajiban dalam membuat akta notaris berbentuk minuta dan wajib menyimpan minuta tersebut sebagai protokol notaris. Minuta akta memuat data diri para penghadap, tanda tangan, paraf, cap jempol para pihak dan saksi yang hadir serta tanda tangan notaris. Sebagai salah satu komponen protokol notaris, minuta akta dikategorikan sebagai arsip vital terjaga khusus karena memuat informasi krusial terkait kontinuitas serta eksistensi bangsa dan negara. Pengakuan tersebut didasari oleh fungsinya sebagai dokumen resmi dalam suatu perjanjian yang memuat status hukum, hak, dan kewajiban pihak para pihak. Akta otentik memiliki urgensi dalam melindungi hak dan kepentingan para pihak, menjamin kepastian hukum, serta mencegah potensi sengketa.

Sistem penyimpanan arsip akta minuta di Kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H. menggunakan sistem penyimpanan kronologis, yaitu penyusunan arsip berdasarkan urutan waktu. Seluruh arsip yang berkaitan dengan dengan akta notaris disimpan dalam satu unit kerja atau disebut dengan asas sentralisasi (terpusat). Dengan asas sentralisasi ini akan mempermudah akses dan pencarian terhadap arsip, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. Sarana penyimpanan arsip akta minuta menggunakan lemari besi yang dapat menjamin keamanan informasi arsip terhadap bencana baik kebakaran, kebanjiran maupun kerusakan arsip akibat serangga. Akta notaris hanya dapat diakses oleh pejabat notaris dan staf yang berkepentingan. Pihak lain yang berhak atas akta, seperti para pihak dalam akta, ahli waris, atau pejabat yang berwenang juga memiliki hak untuk mengakses arsip.

Meskipun protokol notaris dianggap sebagai arsip negara di dalam UUJN, di dalam Undang-Undang Kearsipan tidak diatur secara jelas terkait jadwal retensi arsip dari protokol notaris. Sehingga terjadi penumpukan arsip minuta akta notaris sebagai arsip vital di kantor ini. Penumpukan arsip terjadi karena kurang tegasnya regulasi terkait penyimpanan protokol notaris antara UUJN dan Undang-Undang Kearsipan yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Jika penumpukan arsip dibiarkan terus terjadi, lambat laun akan dimungkinkan terjadinya kerusakan pada kertas protokol notaris.

Upaya-upaya untuk mengatasi problematika penyimpanan arsip tersebut yang pertama, adanya keterlibatan pemerintah dan Ditjen AHU dalam penyediaan sarana berupa tempat penyimpanan dan fasilitas lain yang dibutuhkan sebagai penunjang kegiatan kearsipan bagi MPD di setiap daerah guna menyimpan menyimpan arsip-arsip notaris khususnya arsip protokol notaris. Kedua, perlunya pengkajian ulang dan perbaikan regulasi terhadap peraturan dalam hal pengelolaan protokol notaris khususnya terhadap jangka waktu penyimpanannya. Ketiga,

Hak Cipta © 2024, Adiki Mawadati Purwanto Putra.

memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penyimpanan protokol notaris secara elektronik untuk mengalih media arsip konvensional menjadi arsip digital.

REFERENSI

Buku

Burhanuddin. (2022). *Tanggung Jawab Notaris: Perlindungan Minuta Akta dengan Cyber Notary* (Safrinal (ed.)). CV. Azka Pustaka.

Djaja, B. (2024). *Bunga Rampai Kapita Selekta Kenotariatan Jilid I* (S. Murni (ed.)). Damera Press.

Febrianty, Y. (2023). *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia* (Komarudin (ed.)). CV. Green Publisher Indonesia.

Krihanta. (2019). *Pengelolaan Arsip Vital* (B. Pratiwi (ed.)). Universitas Terbuka.

Moechtar, O. (2024). *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Prenada Media.

Sumrahyadi, & Widyarsono, T. (2018). *Manual Kearsipan* (A. Sosiawan (ed.)). Universitas Terbuka.

Tedjosaputro, L. (2021). *Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris Dalam Kehidupan* (E. Nursanty (ed.)). Butterfly Mamoli Press.

Jurnal

Agustianto, A. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris di Provinsi Kepulauan Riau. *JUSTISI*, *9*(1), 30–43.

Febrianty, Y. (2023). *Keberadaan Hukum Kenotariatan di Indonesia* (Komarudin (ed.)). CV. Green Publisher Indonesia.

Fitriasari, R. E. N. (2022). Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *6*(2), 1052–1071.

Hayati, N., & Noviani, G. D. (2019). Pengelolaan dan Jaminan Keamanan Arsip Vital Kantor Notaris. *Al-Maktabah*, *18*, 22–36.

Lutfi, M., & Aliyah, S. M. (2022). Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Sesuai Standar ISO 15489 (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan PPAT Yudha Kusuma Putra, SH., M.Kn.). *JIM: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin*, *1*(2), 70–75.

Mallolongan, L. N., & Noor, H. J. (2023). Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *NoLaJ*, *2*(1), 54–81.

Mulia, J., Rahmi, E., & Nuriyatman, E. (2022). Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia. *MENDAPO: Journal of Administration Law*, *3*(3), 223–241.

Noer, Z., & Fajriyah, Y. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, *10*(2), 80–89.

Pratiwi, N. D., Rato, D., & Ali, M. (2022). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara. *Jurnal Syntax Transformation*, *3*, 290–307.

Suwardiyati, R., & Rustam, R. (2022). Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Peradaban Journal of Law and Society*, *1*(2), 119–132.

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode

Hak Cipta © 2024, Adiki Mawadati Purwanto Putra.

Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai* , *7*(1), 2896–2910.

Yuhana, D. A. (2021). Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notais Penerima Protokol terhadap Penyimpanan Protokol Notaris yang telah Berumur 25 Tahun. *Ofifcium Notarium*, *1*(1), 49–59.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Hak Cipta © 2024, Adiki Mawadati Purwanto Putra.

Pertanggung Jawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu

Adtlah Almuntas[1], Mohammad Jamin[2], Muhammad Rustamaji[3]
[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
e-mail: adtlah.almuntas11@gmail.com

Abstrak

Notaris dapat bertindak dengan itikad baik, kata UUJN. Akuntabilitas atas perilaku seseorang sangat penting bagi notaris. Ada kasus ketika dokumen yang dipakai untuk mendukung akta berisi informasi palsu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana notaris dilindungi secara hukum dan seberapa besar tanggung jawab mereka ketika mereka membuat akta dengan informasi palsu atau menyesatkan dalam dokumen. Dengan memakai data sekunder, pendekatan penelitian yuridis normatif dipakai. Pendekatan analisis data memakai teknik kualitatif dan menambahkan penalaran logis ke dalamnya. Pertama, mengacu pada simpulan penelitian, tanggung jawab notaris terbatas pada kebenaran formal dan bukan kebenaran material karena prinsip kehati-hatian lebih diutamakan. Notaris tidak bertanggung jawab secara hukum atas informasi yang tidak benar dalam dokumen pendukung yang diberikan oleh para pihak jika mereka mematuhi prinsip kehati-hatian dan tidak melanggar UUJN saat menyelesaikan akta. Kedua, Notaris memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan seperti UUJN dan KUHP, serta oleh organisasi seperti Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Notaris, jika dokumen pendukung memuat informasi yang tidak akurat. Beberapa istilah terkait meliputi: notaris publik, pidana, kesalahan, akta nyata, dan pemalsuan.

***Kata kunci**: Akta Otentik, Dokumen Palsu, Notaris, Pidana, Tanggung Jawab.*

PENDAHULUAN

Pancasila dan UUD NRI Th 1945 memberikan hak atas perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum kepada setiap warga negara. Putusan, akta, perjanjian, dan kejadian hukum lainnya yang bersifat resmi harus dicatat secara tertulis demi kejelasan, perlindungan, dan penerapan hukum (Noormansyah, 2006, hlm. 10). Mengacu pada Nugroho (2015), alat bukti tertulis merupakan salah satu alat bukti terpenting dalam hukum perdata untuk menegakkan kepastian hukum. Dokumen yang dibuat di hadapan pejabat publik yang berwenang, dalam bentuk yang diharuskan oleh undang-undang, dan di tempat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata dianggap asli.

Secara kelembagaan, lembaga Notaris merupakan badan sosial yang membuat akta-akta otentik. Lembaga ini muncul secara sosiologis sebagai respons terhadap tuntutan komunikasi antar manusia yang menuntut adanya dokumentasi hubungan hukum perdata yang ada atau dialami oleh para pihak (Heriyanti, 2016, p. 327). Ketika masyarakat membutuhkan dokumentasi tertulis autentik mengenai fakta-fakta seputar peristiwa atau perbuatan hukum, maka Notaris diciptakan untuk membantu dan melayani masyarakat tersebut. (Adjie, 2012, p. 13). “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana

Hak Cipta © 2024, Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji

dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)", Karena kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan peraturan, notaris memegang peranan penting dalam urusan nasional dan negara (HS, 2018, hlm. 26). Pejabat publik yang dikenal sebagai notaris membuat akta yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan terbaik masyarakat dengan menjaga kerahasiaan akta dan informasi relevan lainnya, sebagaimana diberitahukan oleh pihak yang meminta jasanya. Notaris harus hadir secara fisik di tempat tinggalnya untuk membuat akta, sebagaimana ditegaskan oleh UUJN. Notaris diharuskan membacakan akta dengan suara keras kepada para pihak di hadapan setidaknya dua orang saksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN.

Kehati-hatian harus menjadi prioritas utama bagi notaris dalam menjalankan perannya. Karena terlalu banyak pekerjaan, notaris terkadang bisa menjalankan tugasnya dengan ceroboh, misalnya melakukan kesalahan atau gagal memverifikasi keabsahan dokumentasi yang diberikan klien. Notaris harus memastikan kejelasan hukum dan layanan profesional sebagai bagian dari tugas dan kewajibannya karena akta notaris penting dalam hukum pembuktian. Kedua sisi profesi yang penuh dengan risiko ini menuntut notaris untuk senantiasa menaati hukum dan berperilaku sesuai dengan sumpah jabatan, asas kehati-hatian, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan perundang-undangan. Notaris juga harus memiliki pengetahuan hukum yang cukup, sangat cermat, dan bertanggung jawab. Notaris, apa pun kedudukannya di masyarakat, harus mampu menjalankan tugasnya tanpa bantuan orang lain. Notaris memiliki otonomi dan objektivitas (Salamah & Iriantoro, 2022, hlm. 553). Dalam upaya mempercepat administrasi dan pemrosesan transaksi, nasabah sering kali mencoba memalsukan surat saat akta dibuat, meskipun Notaris tidak mengetahuinya. Dalam kasus nasabah yang melakukan praktik tidak jujur, seperti memalsukan tanda tangan atau memalsukan dokumen, Notaris dapat ditetapkan sebagai pembuat akta yang sah jika terjadi sengketa di pengadilan. Notaris sering dituduh turut serta atau membantu melakukan tindak pidana, seperti memberikan keterangan palsu atau menyesatkan dalam akta notaris, ketika para pihak atau pihak ketiga mengajukan gugatan hukum terhadap dokumen tersebut. Sebenarnya Notaris tidak mengetahui bahwa data atau keterangan para pihak atau pemohon tidak benar. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya, seperti mengetahui atau memanfaatkan keterangan atau dokumen palsu yang diberikan oleh pemohon untuk membuat akta notaris, maka Notaris dapat dikenakan sanksi pidana.

Karena UUJN tidak mengatur hal tersebut, maka KUHP dan peraturan pidana umum lainnya lebih banyak mengatur tentang tata cara pemberian akibat pidana terhadap Notaris. Penulis berpendapat bahwa diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap pertanggungjawaban pidana Notaris yang membuat akta dengan memakai dokumen pendukung yang dibuat secara palsu karena masih banyaknya permasalahan hukum yang timbul akibat pemohon yang memberikan identitas, surat, dokumen, atau keterangan palsu kepada Notaris. Permasalahan tersebut dapat membahayakan tidak hanya para pihak yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga, termasuk Notaris, yang bisa dimintai pertanggungjawabannya karena turut membantu melakukan pemalsuan akta atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta.

Penulis melanjutkan bahwa notaris harus memiliki perlindungan hukum jika dokumen pendukung para pihak (pemohon) memuat informasi yang menyesatkan. Itulah sebabnya penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang konsekuensi hukum notaris yang bisa dituntut secara pidana karena membuat akta memakai dokumen yang memuat informasi palsu. Penelitian ini terkait dengan penelitian Mia Yunisa Setyaningtyas tahun 2021 yang meneliti tugas notaris untuk

Hak Cipta © 2024, Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji

membuat bukan hanya satu, tetapi dua akta terpisah dengan nomor dan tanggal pembuatan yang sama. Hadi Nuskah Alhaqi meneliti keabsahan akta notaris tahun 2021 tanpa menyertakan dokumen pelengkap dan komunikasi. Untuk membantu notaris memvalidasi informasi dan data pendukung untuk pembuatan akta asli, penelitian Indra Rachmadi tahun 2022 difokuskan pada topik ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini lebih berfokus pada tanggung jawab pidana Notaris jika ternyata dokumen pendukung yang diajukan para pihak (penghadap) palsu, dan kemudian dipermasalahkan oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal ini penulis lebih membahas mengenai dalam keadaan bagaimana Notaris dapat dibebankan tanggung jawab pidana jika dokumen para pihak (penghadap) palsu, dan bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris jika dituntut oleh pihak yang dirugikan dengan dugaan pemalsuan akta otentik, apakah Notaris dapat dianggap serta merta melakukan pemalsuan akta otentik jika ternyata dokumen pendukung yang diajukan oleh para pihak (penghadap) tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Penulis artikel ini memakai metode penelitian kualitatif, yaitu bagian dari penelitian hukum normatif, mengacu pada Sunggono. Anda dapat menemukan prinsip hukum yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit dalam penelitian hukum normatif. Selain itu, metode ini juga dapat dipakai untuk memperoleh asas-asas hukum yang bisa dimanfaatkan untuk memahami peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunggono (2003), peneliti memakai campuran sumber primer dan sekunder untuk menyusun karya tulis hukumnya. Penelitian ini memakai teknik konseptual dan legislatif. Pendekatan konseptual melihat pandangan dan teori para ahli yang telah mengembangkan pemahaman, gagasan, dan asas hukum yang relevan dan mendalam, sedangkan pendekatan legislatif melihat peraturan perundang-undangan yang sebenarnya, seperti UUJN dan KUHP (Marzuki, 2019, hlm. 142). Metode inventarisasi dilakukan dengan mencari bahan hukum yang relevan untuk mengidentifikasi sumber primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, unsur-unsur tersebut dipilah atau didokumentasikan, dicatat, dirangkum, dan ditinjau sesuai kebutuhan dengan memakai teknik kualitatif. Dengan memakai pendekatan metodis dalam pengelolaan bahan, dokumen hukum akan ditangani dan diperiksa setelah sumber primer dan sekunder terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu

Notaris merupakan orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum dan dapat memegang jabatan kepercayaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Akta yang sah yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini disebut akta notaris, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN. Dalam setiap transaksi hukum yang terjadi di masyarakat, akta notaris memegang peranan yang sangat penting dan merupakan alat bukti yang paling bisa diandalkan dan saksama. Akta yang benar yang memuat kewajiban dan hak para pihak menjamin adanya kejelasan hukum dan dapat mencegah terjadinya sengketa. Notaris akan menghadapi konsekuensi atas perbuatannya dan bertanggung jawab atas segala kesalahan yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya, baik yang disengaja maupun tidak.

Akta yang benar terbagi menjadi dua jenis. Terdapat dua jenis akta yang sah, yaitu akta

Hak Cipta © 2024, Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji

relaas yang dibuat oleh notaris dan akta partij yang dibuat di hadapan notaris. Akta relaas, yang sering disebut akta notaris, dibuat oleh notaris. Atas permintaan para pihak, notaris menyusun dokumen formal ini, yang memuat catatan terperinci tentang segala sesuatu yang dilihat langsung oleh notaris. Setelah ditandatangani di hadapan notaris, akta partij memuat syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak (Sari, 2021, hlm. 573). Kedua bentuk akta ini mengharuskan notaris untuk mengikuti keinginan para pihak yang terlibat, bukan pertimbangannya sendiri, saat menyusun dokumen. Notaris bertugas untuk mengonfirmasi semua pernyataan dan fakta yang diberikan kepadanya tentang hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pihak terkait. Akta yang dibuat mencakup semua tindakan atau perjanjian yang berada dalam yurisdiksi notaris, sesuai dengan persyaratan hukum. Secara sederhana, apabila notaris melakukan kekeliruan, maka akta yang dibuat di hadapan atau olehnya menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig), van rechtstrengbaar (batal), atau hanya terbatas pada akta di bawah tangan (onderhands acte). Para pihak dapat menuntut pembayaran kepada notaris dalam hal tersebut. Apabila kewenangan membuat akta tersebut belum dialihkan secara hukum kepada badan lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Jika tidak ada bukti lain yang bisa melemahkan kekuatan pembuktian akta asli, hakim dalam gugatan perdata harus menganggap bahwa semua fakta hukum yang dilaporkan dalam akta tersebut benar. Ini dikenal sebagai bukti yang mengikat dan bersifat memaksa. Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti bahwa siapa pun yang mengklaim atau menilai bahwa akta tersebut palsu harus memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka sesuai dengan hukum, sedangkan Dalam penuntutan pidana, kekuatan pembuktian akta notaris merupakan alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, meskipun demikian, nilai sempurna tersebut memerlukan dukungan alat bukti lainnya (Dharmawan, Nugroho, & Ramadhan, 2022, p. 74) “kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik. Notaris juga dapat menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyediakan grosse, salinan, dan kutipan akta”.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang mengatur tentang kewenangan Notaris, tugas utama Notaris adalah mencatat maksud para pihak dalam suatu akta. Jika Notaris memakai kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila diketahui bahwa dokumen pendukung para pihak (pihak yang menghadap) palsu. Alasannya sederhana, karena notaris sendirilah yang mengesahkan maksud para pihak sebagaimana dinyatakan dalam akta. Setiap dokumen pendukung yang menyesatkan yang diajukan oleh pihak yang menghadap harus disertakan (Zahrotun, 2021, hlm. 56). Mengacu pada pakar hukum pidana Andi Hamzah, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemalsuan akta palsu berdasarkan keterangan dan dokumen pendukung yang diberikan oleh para pihak karena yang dilakukannya hanyalah mencatat apa yang diucapkan. Notaris tidak ikut campur dalam hal-hal yang bersifat substansi; yang dilakukannya hanyalah mencatat keinginan atau kesepakatan formal para pihak. (Dharmawan, Nugroho, dan Ramadhan, 2022, halaman 76) para penulis. Apabila notaris memberikan keterangan atau dokumen palsu, baik pihak yang bersengketa maupun aparat penegak hukum tidak memiliki hak untuk menuntutnya. Namun, apabila notaris tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan merugikan para pihak atau pihak ketiga, maka ia dapat menghadapi akibat hukum. Kasus ini berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata karena pasal ini mengatur pertanggungjawaban perdata atas

Hak Cipta © 2024, Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji

perbuatan pidana. Notaris dapat menghadapi tuntutan pidana selain berbagai bentuk pertanggungjawaban yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini, "pidana" adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik yang berwenang membuat akta, yaitu notaris publik, dan bukan individu pada umumnya. Notaris berisiko dituntut secara pidana jika membantu membuat dokumen yang tampak sah tetapi tidak sesuai dengan fakta atau keadaan sebenarnya. Frasa "panduan ide" atau "Dader intelektual" menggambarkan perilaku semacam ini. (Prajitno, 2018, p. 38).

Contoh Notaris yang dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana karena diduga melakukan pemalsuan akta otentik, terjadi pada Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 63 PK/PID/2016, Terdakwa (Notaris) dituntut dengan Tindak Pidana Pemalsuan akta otentik (Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP) dengan alasan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh penghadap yang dijadikan sebagai salah satu dasar pembuatan Akta melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dimana seharusnya penghadap bukan satu-satunya ahli waris dari almarhum orang tuanya. Berdasarkan tuntutan tersebut Terdakwa (Notaris) dijatuhi Putusan tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan akta otentik oleh Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Peninjauan Kembali, namun dalam Putusan tingkat Kasasi, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa (Notaris) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik.

Pada contoh kasus tersebut di atas, untuk menentukan Notaris dalam membuat akta dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Ahli Waris yang ternyata tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dapat dibebankan tanggung jawab pidana atau tidak, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan analisis apakah Notaris mengetahui bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh para pihak (penghadap) adalah palsu/tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan apakah Notaris telah mengutamakan prinsip kehati-hatian. Mengacu pada Penulis pada kasus ini Notaris menuliskan keterangan pada komparisi bahwa Pihak Pertama adalah ahli waris satu-satunya dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagai pemilik tanah dengan dibuktikan dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris di bawah tangan tertanggal 5 April 2002 di bawah nomor: 474/095, yang dikeluarkan Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, yang mana aslinya juga diperlihatkan kepada Notaris, yang ternyata tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Di sini, Notaris berusaha memverifikasi keakuratan informasi dalam Surat Keterangan Ahli Waris, dan orang yang menghadap Notaris mengonfirmasi bahwa informasi tersebut benar. Dengan demikian, hanya Notaris yang mencatat data yang diberikan oleh pihak yang menghadap dan yang tercantum dalam akta. Sederhananya, Notaris tidak dapat meninjau atau meminta informasi yang relevan dari Surat Keterangan Ahli Waris milik para pihak (pihak yang menghadap). Dengan demikian, Notaris tidak perlu membayar jika penggugat memberikan informasi palsu—selama mereka berhati-hati sebelumnya. Dalam kasus khusus ini, satu-satunya fungsi notaris adalah mencatat pernyataan atau fakta yang diberikan oleh para pihak (pihak yang menghadap), yang kemudian digabungkan untuk membentuk suatu akta notaris. Kecuali apabila pada kasus tersebut, Notaris diberitahu oleh penghadap bahwa sebenarnya Surat Keterangan Ahli Waris tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, karena ahli waris dari almarhum orang tua penghadap tidak hanya satu, kemudian dengan pengetahuan Notaris tersebut, Notaris masih melanjutkan untuk membuat akta tanpa memberitahu penghadap yang lain, padahal dengan pembuatan akta tersebut, dapat merugikan penghadap yang lain, jika dikemudian hari ahli waris yang lain mengajukan gugatan. Dalam hal ini, Notaris dapat dikenakan tanggung jawab pidana,

Hak Cipta © 2024, Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji

karena Notaris secara sengaja atau lalai membuat akta palsu, sehingga merugikan orang lain.

Oleh karena notaris tidak berkewajiban untuk memperoleh kebenaran materiil dari surat-surat yang diajukan para pihak yang dijadikan data pendukung dalam pembuatan akta, maka pembuatan akta notaris berdasarkan surat-surat yang tidak benar yang diajukan para pihak kepada notaris, tanpa memeriksa kebenarannya, tidak menjadikan notaris sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik. Notaris bukanlah badan hukum yang perbuatan hukumnya dituangkan dalam akta notaris; melainkan para pihak dalam perjanjian yang menghendaki agar perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam akta otentik.

Akan tetapi, meskipun kewajiban Notaris hanya sebatas kebenaran formil, Notaris dalam melakukan tugas dan kewajibannya juga tetap harus menerapkan prinsip kehati- hatian, asli dari dokumen-dokumen pendukung tersebut harus diperlihatkan kepada Notaris dan sudah dinyatakan asli oleh para pihak dan berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perancangan kontrak harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut (Adjie, 2007, p. 86):

a) Dengan memakai keterangan yang diberikan kepadanya, notaris harus memeriksa identitas orang yang menghadap;
b) Notaris harus meminta, mendengarkan, dan mempertimbangkan pendapat para pihak;
c) harus menyelidiki tuntutan para pihak berdasarkan bukti-bukti yang tercatat; instansi pemerintah yang berwenang menyediakan surat-surat; para pihak (pihak yang menghadap) harus menyediakan aslinya;
d) Notaris harus memberi nasihat kepada para pihak (pihak yang menghadap) tentang masalah hukum mereka;
e) Mengatur struktur akta sesuai dengan keinginan para pihak yang terlibat;
f) Akta yang sah tidak dapat dibuat sebelum notaris menyelesaikan semua proses administratif, seperti pembacaan, penandatanganan, penyediaan salinan, dan pengarsipan arsip.
g) Notaris juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas kedinasan.

Notaris wajib menolak dengan tegas permohonan para pihak apabila terbukti keterangan yang disampaikannya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan. Pasal 16 UUJN menjelaskan bahwa “Notaris harus bertindak dengan sungguh-sungguh dan teliti dalam menjalankan tugasnya, namun dalam hal ini ketekunan dan ketelitian disini bersifat formal untuk memenuhi syarat yaitu untuk menegaskan kebenaran akta otentik”. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kebenaran formil, maka notaris wajib mempertanggung jawabkannya. Harus ada bukti pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dan penetapan pengadilan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar telah melanggar syarat formil. Mengacu pada Yudanti dan Zulfa (2022, hlm. 3159), tanggung jawab notaris hanya pada segi formil jabatannya. Memberitahukan kepada notaris segala bukti pelanggaran formil adalah perlu. Hal ini meliputi waktu, tanggal, bulan, dan tahun keberangkatan para pihak, disertai paraf dan tanda tangan mereka yang hadir. Mengacu pada Adjie (2009), notaris tidak berkewajiban untuk memastikan keakuratan dokumen para pihak (hlm. 212).

Perlindungan Hukum bagi Notaris Apabila Dokumen Pendukung yang Diajukan oleh Para Pihak (Penghadap) Mengandung Keterangan Palsu

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk

Hak Cipta © 2024, Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji

mengupayakan pemberian hak-hak kepada orang yang dilindungi sebagai ganti dari kewajiban yang telah dipenuhi. Pegawai negeri yang dikenal dengan sebutan notaris melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan huruf dan semangat undang-undang. Oleh karena itu, dalam situasi ini ia memperoleh perlindungan. Bekerja (bertanggung jawab) untuk suatu pemerintahan atau organisasi merupakan makna dari "jabatan". Terpeliharanya hak dan kewajiban merupakan ciri subjek hukum. Segala sesuatu yang dilakukan atas nama jabatan harus menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewenangan jabatan untuk mempertahankan hak dan kewajiban (Abigail, 2022, p. 508).

Pada dasarnya Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam profesinya dan harus menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat dalam memakai jasa notaris, maraknya kriminalisasi terhadap notaris memaksa untuk mengambil sikap terhadap strategi pencegahan sekaligus perlindungan hukum terkait kriminalisasi jabatan notaris. Gagasan perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi mereka yang menjadi subjek hukum. Segala sesuatu yang dikatakan memiliki hak dan kewajiban mengacu pada hukum, atau yang mendukung hak dan kewajiban tersebut, dianggap sebagai subjek hukum. Agar tercapai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, maka sistem hukum harus mencakup perlindungan hukum. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan merupakan upaya untuk menjamin agar objek hukum tidak mengalami kerugian. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara preventif yaitu dengan melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya konflik dan secara represif yaitu dengan melakukan tindakan ketika terjadi sengketa. Kepatuhan notaris terhadap standar profesi dalam melaksanakan tugasnya sangat penting untuk menghindari timbulnya masalah hukum di kemudian hari (Tedjosaputro, 2003, hlm. 12).

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai notaris, seseorang wajib menaati standar ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Semua pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut dilindungi kepentingannya, dan notaris harus bersikap tidak memihak, dapat dipercaya, jujur, cermat, dan mandiri (Adjie, 2015, hlm. 2). Notaris pada dasarnya tetap bertanggung jawab atas perbuatannya meskipun telah pensiun. Nama notaris boleh saja tercantum dalam akta, tetapi ia tidak ikut serta dalam akta tersebut. Hal ini dikarenakan notaris tidak dapat secara sah membuat akta, kecuali jika kedua belah pihak yang mengajukan permohonan benar-benar menghendaki notaris untuk melakukannya (Valentino & Dahana, 2022, p. 336).

Notaris hanya memakai kebenaran formal atau dokumen yang diberikan oleh para pihak untuk membuat akta yang sah. Tugas notaris hanya mengkonstantir pernyataan atau dokumen pendukung lainnya, apa yang telah diberitahukan dan disampaikan oleh para pihak kepada notaris, tentang apa yang telah didengar, dilihat, dan dialaminya. Notaris harus melaksanakan tugasnya dengan cara yang mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan nasihat hukum yang jujur dan tidak memihak kepada para pihak dan menjaga kerahasiaan informasi dan data yang diterimanya dari pihak tersebut atau kliennya. Pemalsuan akta dan pernyataan notaris dapat saja dilakukan oleh para pihak, meskipun notaris telah bertindak tidak memihak, jujur, dan cermat dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini membuat notaris rentan untuk dituntut di pengadilan. Dari segi materiil, akta notaris sering kali digugat dalam perkara pidana, yang bisa berujung pada tuduhan Jaksa Penuntut Umum atas notaris tersebut atas pemalsuan (Pasal 264 KUHP) dan membantu pembuatan surat palsu atau bekas serta memanfaatkannya (Pasal 56 KUHP). Notaris ini disebut-sebut mengetahui dan dapat membantu dalam pemalsuan surat. Pemalsuan surat menjadi penting karena dua alasan (Indriani, 2016, p.

Hak Cipta © 2024, Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji

158):

a) Menyusun surat atau menuliskannya dari awal sampai akhir agar tampak palsu dikenal sebagai membuat surat palsu.
b) Memalsukan surat adalah tindakan yang melibatkan perubahan yang tidak sah pada surat atau dokumen tertulis dengan mengubah tanda dan isinya. Contoh perubahan tersebut termasuk menambahkan, menghapus, atau mengganti kata, angka, atau frasa.

Pada dasarnya pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, yaitu apabila (Heriyanti, 2016, p. 330):

1) Notaris mengetahui sepenuhnya dan bermaksud menggugat aspek formal akta agar akta tersebut dapat dipakai untuk melakukan tindak pidana, baik dilakukan di hadapan mereka maupun bersama-sama;
2) Kelalaian Notaris dalam membuat akta yang mengacu pada penilaian UUJN melanggar atau tidak sesuai dengan UUJN;
3) Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan perintah organisasi yang berwenang, yaitu Majelis Pengawas Notaris.

UUJN bertanggung jawab penuh untuk menegakkan Tata Usaha Negara, Sanksi Perdata, dan Kode Etik. Oleh karena itu, hanya batasan-batasan tersebut di atas yang bisa dipakai untuk menghukum Notaris secara pidana. Dengan demikian, tindak pidana tersebut harus mematuhi definisi pelanggaran dalam KUHP di samping Kode Etik Notaris dan UUJN. Karena belum ada peraturan perundang-undangan yang komprehensif tentang tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam UUJN, maka dalam hal ini KUHP tetap harus dirujuk "Pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan dibutuhkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sesuai aturan Pasal 66 UUJN, yang merupakan pintu masuk yang memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk":

a. "Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris";
b. "Mengambil minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris";

Apabila Notaris dipanggil untuk menghadap di muka sidang, maka Majelis Kehormatan Notaris hadir untuk membelanya secara hukum, sebagaimana tercantum dalam peraturan di atas. Untuk memanggil Notaris menghadap hakim, jaksa penuntut umum, atau penyidik, maka harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Majelis Kehormatan Notaris. Notaris diatur oleh UUJN tentang perlindungan hukum yang diberikan kepadanya dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris secara khusus dibebaskan dari tanggung jawab pidana sepanjang mereka mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Pasal 16 UUJN dan memakai kekuasaan mereka sesuai dengan Pasal 15 UUJN. Hal ini dikarenakan notaris hanya bertanggung jawab untuk membuktikan keakuratan formal dari dokumen yang diajukan oleh para pihak dan diterima sebagai asli oleh mereka, serta setiap korespondensi dari badan pemerintah terkait. Persetujuan Dewan Kehormatan Notaris atas Panggilan Pemeriksaan Notaris juga diperlukan berdasarkan Pasal 66 UUJN. Sebelum pemerintah menyerahkan notaris yang tindakannya menimbulkan tanda bahaya, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan nasihat dan memeriksa mereka.

Jika notaris mengikuti prinsip kehati-hatian dan keakuratan dan tidak melakukan kesalahan, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, bahkan jika dokumen yang diajukan oleh orang yang berdiri di hadapan mereka adalah palsu. Hal ini karena ada alasan kuat untuk mengesampingkan hukuman pidana. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa dalil yang

Hak Cipta © 2024, Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji

menentang hukuman mati, seperti

1) Alasan pembenar *(rechtvaardigingsgrond)* yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan berkaitan dengan tindak pidana *(strafbaarfeit)*.
   Alasan pembenar berkaitan dengan dokumen pendukung yang diajukan penghadap palsu, adalah Notaris membuat akta karena menjalankan perintah Undang-Undang yaitu UUJN (Pasal 50 KUHP), dan menjalankan perintah jabatan Notaris yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP). Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana". Dengan demikian sepanjang Notaris dalam menjalankan jabatan dan profesinya, khususnya dalam pembuatan akta telah berdasarkan *"standard minimum of service"* yang ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, maka Notaris tidak dapat dibebankan tanggung jawab pidana karena tidak adanya kesalahan, meskipun dokumen pendukung yang diajukan pihak (penghadap palsu). Selain itu, Notaris dalam membuat akta otentik mendasarkan kewenangannya pada UUJN dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi Notaris dalam membuat akta adalah karena menjalankan perintah Undang-Undang yaitu UUJN untuk membuat akta otentik, maka terhadap Notaris berlaku ketentuan alasan penghapus pidana Pasal 50 KUHP.
2) Alasan pemaaf *(schuldduitsluitingsgrond)* yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Notaris sebagai pejabat publik yang diberi kewenangan untuk membuat akta, oleh karena itu juga diberikan perlindungan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena melaksanakan perintah jabatan Notaris dan perintah UUJN secara sah, maka notaris terbebas dari hukuman berdasarkan Pasal 50 KUHP (sebagaimana disebutkan pada ayat (1)) sepanjang melaksanakan akta sesuai dengan ketentuan hukum. Penafsiran ini menyatakan bahwa UUJN, KUHP, dan Majelis Kehormatan Notaris melindungi notaris dari kesalahan pidana apabila dokumen pendukung para pihak (penghadap) palsu. Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN, KUHP, dan Majelis Kehormatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) diakui sebagai Forum Organisasi Notaris dalam ayat (2) Pasal 82 UUJN. Sebagai pejabat publik, Notaris berhak mendapatkan perlindungan tertentu dari INI. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hukum bagi anggotanya, INI menjalin kerja sama dengan penegak hukum melalui nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006. Dengan tujuan untuk mengendalikan perkembangan profesionalisme hukum, nota kesepahaman ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum khusus notaris terkait kerahasiaan profesinya yang berdasarkan kepercayaan. Apabila notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian, maka notaris harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam nota kesepahaman di atas (Utami, 2015, p. 92).

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta berdasarkan dokumen pendukung yang mengandung keterangan palsu yang diajukan pihak (penghadap) yaitu pertanggungjawaban Notaris hanya sebatas pada kebenaran formil, tidak sampai pada kebenaran materiil, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, sehingga jika dokumen pendukung yang diajukan penghadap mengandung keterangan palsu, dan Notaris pada saat membuat akta tersebut telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak melanggar UUJN, maka tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Notaris. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas

Hak Cipta © 2024, Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji

kebenaran materiil, Notaris tetap harus cermat dan teliti dalam mengecek dokumen pendukung yang diajukan oleh pihak (penghadap). Asli dari dokumen tersebut harus diperlihatkan kepada Notaris dan dokumen tersebut harus benar-benar dikeluarkan oleh instansi Pemerintahan yang berwenang, serta Notaris tetap harus memastikan kembali mengenai kebenaran dokumen pendukung tersebut kepada pihak (penghadap). Apabila ternyata terdapat pelanggaran, maka Notaris harus melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak (penghadap) agar perbuatan yang melanggar hukum tersebut tidak berlanjut.

Perlindungan hukum bagi notaris apabila dokumen pendukung yang diajukan oleh para pihak (penghadap) mengandung keterangan palsu, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN, bahwa selama Notaris tidak melanggar ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, maka Notaris tidak dapat dibebani tanggungjawab pidana, perdata, maupun administratif. Selain itu, notaris juga dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjamin kekebalan hukum bagi warga negara yang taat hukum adalah Pasal 50. Notaris dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris di samping peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 UUJN. Majelis Kehormatan Notaris harus dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum penyidik, penuntut umum, atau pengadilan meminta kehadiran notaris atau memeriksa akta notaris. Terakhir, Ikatan Notaris Indonesia menawarkan perwakilan hukum sebagai wadah bagi notaris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan untuk penulis dalam penulisan hukum ini.

REFERENSI

Abigail, A. D. (2022). Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris. *Jurnal Officium Notarium Volume 2 Nomor 3*.

Adjie, H. (2007). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.* Bandung: Rafika Aditama.

Adjie, H. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT.* Bandung: Citra Aditya.

Adjie, H. (2012). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan).* Bandung: Mandar Maju.

Adjie, H. (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Surabaya: Refika Aditama.

Dharmawan, A., Nugroho, D., & Ramadhan, A. (2022). Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Volume 10 Nomor 3* .

Heriyanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Yustisia Volume 5 Nomor 2*.

HS, H. S. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta: Sinar Grafika.

Indriani, D. (2016). Pembatasan Kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris (UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). *Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Nomor 1*.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Hak Cipta © 2024, Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji

Noormansyah, D. (2006). Holding Game, Merger, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Litigasi Volume 7 Nomor 1*.

Nugroho, E. U. (2015). Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Bunghatta Volume 1 Nomor 2*.

Prajitno. (2018). *Pengetahuan Praktis Apa dan Siapa Notaris di Indonesia Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014.* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Salamah, S., & Iriantoro, A. (2022). Prinsip Kehati-hatian dan Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Volume 1 Nomor 2*.

Sari, S. D. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Memuat Keterangan Palsu. *Officium Notarium Volume 1 Nomor 3*.

Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tedjosaputro. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum.* Semarang: Aneka Ilmu.

Utami, S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Mengacu pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Repertorium Volume 1 Nomor 2*.

Valentino, F., & Dahana, C. (2022). Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2* .

Yudanti, H. N., & Zulfa, E. (2022). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didalamnya Terdapat Figur Palsu. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.

Zahrotun, N. N. (2021). *Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi pada Akta Pihak (Partij Acte).* Surabaya: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya.

Hak Cipta © 2024, Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji

Website Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Sebagai Pendukung Ekosistem Digital Pemerintah: Perspektif Manajemen Sektor Publik

Ahmad Muhardin Hadmar[1], Dyah Mutiarin[2], Zuly Qodir[3]

[1,2,3] Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
e-mail: ahmadmuhardin@gmail.com (penulis korespondensi)

Abstrak

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA) memiliki peran penting dalam transformasi teknologi informasi pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak positif penggunaan website Ditjen APTIKA terhadap pengembangan teknologi informasi dalam konteks pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan naratif. Analisis data menggunakan tools NVivo 12 Plus dan Vosviewer untuk mengidentifikasi visualisasi jaringan kata kunci, serta teori Agile Governance sebagai dasar analisis. Hasil temuan menunjukkan bahwa tata kelola website Ditjen APTIKA mendukung pengembangan ekosistem data di Indonesia. Meskipun penetrasi internet meningkat cukup tinggi, namun hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang menjadi pusat utama penggunaan internet. Sekitar 22% masyarakat Indonesia cenderung mengakses internet hanya untuk hiburan, yang menyebabkan penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan masyarakat. Pengembangan website APTIKA juga perlu memperhatikan ekosistem data yang menjadi fokus penting dalam transformasi layanan publik. Pengembangan tersebut melibatkan topik seperti literasi digital, perlindungan data pribadi, transformasi digital, dan penanganan hoaks COVID-19. Hasil penelitian ini dapat berimplikasi pada perumusan kebijakan, inovasi digital, dan peningkatan kualitas layanan website APTIKA.

***Kata kunci**: TIK, Website APTIKA, Ekosistem Digital, Layanan Publik*

PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, pemerintah semakin bergantung pada teknologi informasi untuk menyediakan layanan yang efektif dan efisien. Selama dua dekade terakhir, proses digitalisasi pelayanan publik telah dimulai sebagai upaya untuk meningkatkan layanan sektor publik serta modernisasi sistem pemerintahan (Nielsen & Ali, 2021). Transformasi digital pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi juga menjadi sangat penting dalam mendorong implementasi kebijakan pemerintah digital secara langsung (Chung & Kim, 2019). Dalam konteks ini, konsep pemerintahan digital mencerminkan upaya pemerintah dalam menemukan solusi digital inovatif di bidang sosial, ekonomi, dan politik, dan memberikan dampak yang signifikan terhadap transformasi proses pengambilan keputusan (Alvarenga et al., 2020). Upaya ini sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi layanan sektor publik dan pemberian layanan modernisasi sistem pemerintahan (Nielsen, 2019).

Menurut Correa-Ospina et al (2021), sektor publik telah mengalami transformasi digital yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah membuka jalan bagi adanya interaksi baru antara pemerintah dan konstituennya. Selain itu, teknologi juga menjadi bagian integral dari infrastruktur sektor publik yang tangguh, dan

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

memiliki peran penting dalam mendorong inovasi berkelanjutan dan penciptaan nilai baik di sektor publik maupun swasta, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Morte-Nadal & Esteban-Navarro, 2022). Teknologi ini membantu dalam keterbukaan pemerintah, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik melalui e-government (Mutar et al., 2022). Oleh karena itu, dengan terus mendorong inovasi dan adopsi teknologi yang tepat, sektor publik dapat mengambil manfaat maksimal dari e-government dan memberikan layanan publik yang lebih baik kepada konstituen mereka.

Sistem e-government merupakan salah satu aspek dari transformasi digital di sektor publik (Akbar et al., 2022). E-government sebagian besar merupakan kata kunci yang membawa perubahan dalam ruang lingkup pemerintahan digital (Mergel et al., 2019). Konsep ini memberikan layanan yang lebih baik dengan menggunakan *digital transformation* oleh otoritas publik yang berfokus pada penggunaan inovasi untuk mengumpulkan, mengirimkan, memproses, atau menganalisis data (Yuliantini, 2023). Transformasi digital dalam konteks e-government dapat membawa berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan efisiensi dalam penyediaan layanan publik, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengurangan birokrasi, peningkatan transparansi, dan pengurangan praktik korupsi. (Sidek & Ali, 2019). Sehingga hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan public. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi yang baik dalam e-government dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

Konsep e-government diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. E-government menyiratkan pendekatan internal, yang telah diperluas dengan pandangan eksternal sebagai konsekuensi dari transformasi digital di sektor publik dan hubungannya dengan kepercayaan warga negara (Parra & Libaque-Saenz, 2020). Jika dilihat dari sudut pandang penggunaan teknologi informasi untuk e-government, yang paling krusial adalah mengadvokasi kebijakan pemerintah dan meningkatkan pengiriman layanan dengan tujuan mengurangi praktik korupsi, mendorong pertumbuhan pendapatan, meningkatkan transparansi, kenyamanan, serta memfasilitasi efisiensi finansial dalam sektor publik (Agbozo & Asamoah, 2019).

Dalam rangka pengembangan *Information and Communication Technology* (ICT) yang efektif, Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mendirikan Ditjen APTIKA. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (selanjutnya disebut Ditjen APTIKA) memiliki kewajiban dalam mengatur perumusan dan penerapan aturan di bidang Penata Kelolaan Aplikasi Informatika (Hidayat, 2023). Tugas ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2015 tanggal 4 Mei tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keppres tersebut kemudian diterjemahkan menjadi peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kominfo yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur manajemen umum APTIKA. Selain itu, Direktorat Jenderal Aplikasi juga memiliki peran penting dalam memastikan keamanan, integritas, dan integritas aplikasi komputer di sektor publik. (Indriyani Putri, 2019).

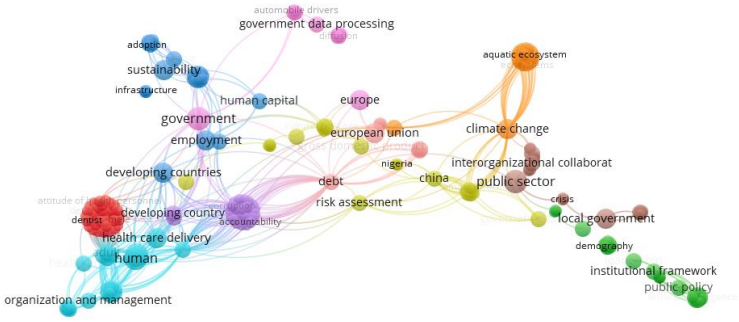
Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen Aptika bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyediaan layanan melalui Website APTIKA (Kusdiantoro, 2019). Website Ditjen Aptika menjadi semakin penting dalam e-government. Layanan yang disediakan melalui website APTIKA dapat mencakup berbagai hal, seperti pengajuan permohonan administrasi, pendaftaran online, pelaporan masalah, informasi kebijakan, dan berbagai layanan publik lainnya (Rumata & Nugraha, 2020). Website ini juga sering digunakan sebagai Website untuk berkomunikasi antara

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

pemerintah dan masyarakat, baik melalui formulir kontak, fitur komentar, atau kanal diskusi yang disediakan (Anita Rahmah Fitria, 2021). Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan interaksi dengan pemerintah melalui website ini, yang meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelayanan publik dan membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan konstituennya.

Melalui e-government, pemerintah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan (Jack, 2018). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan teori *Agile Governance*. Teori *Agile Governance* mengacu pada kemampuan sebuah organisasi untuk merespons dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi (Muttaqin & Permatasari, 2023). Konsep ini berasal dari prinsip-prinsip perangkat lunak (*software development*) yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi layanan. Dalam konteks organisasi, Agile Governance berarti kemampuan untuk merespon perubahan yang tak terduga dengan cepat dan tepat, serta memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berubah (Luna, 2015). Prinsip-prinsip *Agile Governance* meliputi *good enough governance, business-driven, human-focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, dan simple design and continuous refinement* (Luna et al., 2015). Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi kondisi lingkungan yang dinamis, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat, profesional, dan berkeadilan kepada masyarakat

Studi pelayanan publik dalam 10 tahun terakhir telah yang lebih fokus mengkaji isu dalam ruang lingkup ilmu sosial. Melalui analisis visualisasi jaringan kata kunci "*digital Website government"* yang terkait dengan layanan publik, kami membagi topik tersebut menjadi subtopik berdasarkan hubungannya dengan topik lain dalam database *Scopus*.



Gambar 1. Visualisasi Jaringan Kata Kunci Website Digital Pemerintah
(Sumber: Diolah Penulis menggunakan VOSViewer, 2023)

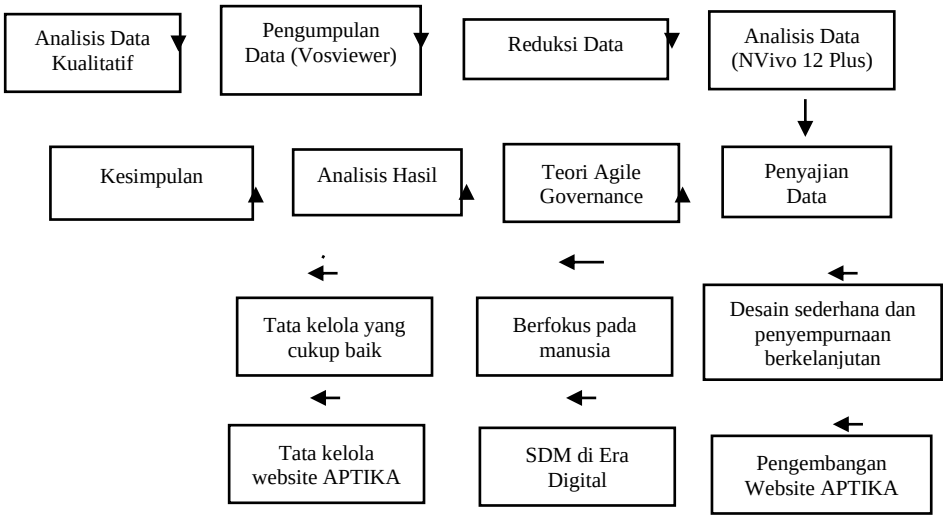
Analisis data visualisasi jaringan sesuai dengan Gambar 1 di atas, ditemukan bahwa perkembangan teknologi digital dalam pemerintahan memiliki peran penting pada negara berkembang. Dalam perspektif manajemen sektor publik, munculnya pelayanan publik berbasis digital telah berkembang dengan digitalisasi yang mulai meluas diterapkan dalam pengembangan e-government (Akatkin & Yasinovskaya, 2020). Menurut Welle Donker and van Loenen (2017) melalui perkembangan pesat dalam studi digital pelayanan publik, digital government tidak hanya sebatas mengembangkan e-government tetapi juga harus meningkatkan pemenfaatan *ecosystem data*. Ekosistem data yang baik memungkinkan integrasi berbagai sumber data yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian ini akan

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

mengisi kekosongan yang ada, dengan fokus pada Teori Agile Governance dalam mengkaji Website Ditjen Aptika. Teori yang akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Agile Governance* tiga melalui indikator utama, yaitu tata kelola yang baik, berfokus pada manusia di Era Digital, serta desain sederhana dan penyempurnaan berkelanjutan (Luna, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak positif Website Ditjen APTIKA terhadap pengembangan teknologi informasi dalam konteks pelayanan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan naratif. Menurut Gasparyan et al (2011), ulasan naratif adalah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menyajikan dan melakukan kajian komprehensif terhadap literatur yang ada pada topik penelitian tertentu. Sumber data yang digunakan adalah data website, artikel, paparan dari pemangku kebijakan, survey, buku, artikel maupun jurnal penelitian yang terkait dengan bidang kajian. Penelitian ini menggunakan teori *Agile Governance* untuk menganalisis dampak positif website Ditjen APTIKA. Selanjutnya penelitian ini menerapkan tiga indikator utama, yaitu tata kelola yang cukup baik, berfokus pada manusia, serta desain sederhana dan penyempurnaan berkelanjutan (Luna et al., 2015). Merujuk pada konsep teori tersebut, pembahasan akan dibagi menjadi tiga bagian utama: tata kelola website APTIKA, sumber daya manusia di Era Digital, dan pengembangan website APTIKA. Selain itu, alat visualisasi NVivo 12 Plus dan Vosviewer digunakan untuk memberikan analisis visual mengenai kemunculan kata kunci.



Gambar. 2 Tahapan Penelitian
(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Website Aptika

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan aplikasi informatika (Hidayat, 2023). Tugas utama Ditjen Aptika meliputi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan nasional dalam hal pengelolaan aplikasi informatika, termasuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Mereka juga bertugas dalam memberikan

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

bimbingan teknis kepada instansi pemerintah terkait dalam hal pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan aplikasi informatika (Kusdiantoro, 2019). Dengan peran dan tanggung jawab tersebut, Ditjen Aptika menjadi pengawas dan pengatur yang penting dalam memastikan penata kelolaan yang efektif dan efisien dari aplikasi informatika di sektor publik. Mereka mengawasi implementasi langkah-langkah keamanan teknis, serta melakukan pemantauan dan penanganan terhadap risiko keamanan yang mungkin timbul (Rumata & Nugraha, 2020).

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) yang pada awalnya Ditjen Aplikasi Telematika (Ditjen Aptel) dibentuk untuk melakukan pengembangan *Information and Communication Technology* (ICT) yang efektif di Indonesia. TIK tidak dapat dipisahkan dari 3C, yaitu comunication, computer dan conten yang kemudian diluncurkan sebagai logo Kemkominfo dengan tiga huruf C bernuansa biru. Direktorat Jendral Aplikasi dan Informatika (Ditjen Aptika) merupakan inovasi layanan publik yang dapat diakses melalui website resminya dengan mengakses link: https://aptika.kominfo.go.id/. Website ini menyediakan layanan dalam bentuk *virtual experience* dan *website konvensional.* Terdapat berbagai jenis opsi yang tersedia dalam website ini, diantaranya beranda, profil, informasi, publikasi, data aptika, kontak dan virtual tour.



Gambar 3. Halaman Beranda
(Sumber: Website Ditjen APTIKA)

Berdasarkan Gambar 3 diatas, menunjukkan beberapa layanan yang tersedia dalam website tersebut, yaitu pengaduan konten negative, layanan aptika terintegrasi, dan cek rekening.id. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dibidang teknologi dan informasi di Indonesia. Selain itu, website apptika menyediakan pula layanan pelaporan konten yang bersifat negative. Konten negatif yang dapat dilaporkan melalui e-Mail aduankonten@mail.kominfo.go.id atau web https://aduankonten.id. Informasi yang dapat dilaporkan, yaitu berita bohong, pornografi, sara/ujaran kebencian, narkoba, perjudian, penipuan, pishing/malware, terorisme/radikalisme, kekerasan dan pelanggaran haki. Selain itu, terdapat layanan lainnya yang tampil pada halaman utama, diantaranya berita, artikel, agenda kegiatan, pubikasi, galeri foto twitter @ditjenaptika, GPR Kominfo, topik popular, alamat kantor, tentang Ditjen Aptika dan media sosail (Titter, Instagram, dan Youtube).

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.



Gambar. 4 Dominan Frekwensi Kata Kunci menggunakan NVivo 12 Plus
(Sumber: Artikel berita website APTIKA, 2023)

Berdasarkan analisis klaster dengan NVivo 12 plus yang bersumber dari 8 artikel berita, yang bersumber dari Website Direktur Jendral Aplikasi Informatika. Hasil dari kategorisasi penelitian tema menunjukkan bahwa informasi mengenai data aplikasi banyak artikel membahas tentang data (126), aplikasi (99), pemerintah (59), pusat (53), dan Indonesia (33). Analisis klaster dan kategorisasi tema ini memberikan pemahaman tentang fokus dan tren dalam pembahasan data aplikasi. Data menjadi salah satu tema yang paling banyak dibahas, menunjukkan pentingnya peran data dalam konteks aplikasi informatika. Hal ini menunjukkan bahwa data memiliki peran sentral dalam ekosistem data, di mana pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data menjadi aspek penting dalam pengembangan aplikasi. Selain itu, kategori aplikasi juga merupakan tema yang signifikan. Ini menggambarkan bahwa fokus artikel berita banyak berhubungan dengan pengembangan, penerapan, dan inovasi aplikasi dalam konteks informatika (Gambar 4).

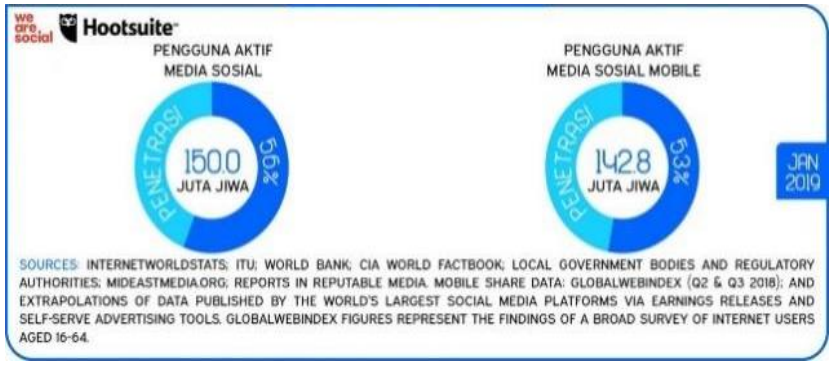
Melalui konsep ekosistem data, aplikasi berperan dalam pengolahan dan penggunaan data untuk memberikan solusi dan manfaat bagi pengguna (Cui et al., 2020). Adanya penekanan pada pemerintah dan pusat menunjukkan pentingnya peran lembaga pemerintah dalam mengelola dan mengarahkan penggunaan data aplikasi di Indonesia. Pemerintah pusat berperan dalam membentuk regulasi, kebijakan, dan kerangka kerja untuk memastikan penggunaan data aplikasi yang aman, etis, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi fokus perhatian, karena mengacu pada pusat data dan pengelolaan aplikasi yang memainkan peran penting dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Terakhir, adanya penekanan pada Indonesia menunjukkan bahwa pembahasan data aplikasi ini terkait dengan konteks nasional. Pengembangan ekosistem data yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia menjadi tujuan untuk mendukung pengembangan inovasi dalam bidang aplikasi informatika. Dengan demikian, analisis klaster ini membantu memberikan pemahaman tentang fokus dan tren pembahasan data aplikasi dalam konteks ekosistem data. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang keputusan dan strategi dalam pengelolaan data, pengembangan aplikasi, dan inovasi di Indonesia (Gambar 4).

Sumber Daya Manusia di Era Digital

Sumber daya manusia di era digital adalah unsur kunci dalam transformasi dan keberhasilan organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital (Debeljak & Dečman, 2022). Di Indonesia, pengguna internet mencapai 150 juta jiwa dengan penetrasi 56% tersebar di seluruh wilayah. Angka ini hanya berbeda tipis dengan jumlah

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

pengguna ponsel yang berjumlah 142,8 juta jiwa dengan penetrasi 53%. Temuan ini menggambarkan bahwa akses internet di Indonesia telah mencapai jumlah yang signifikan dan tersebar di seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet melalui perangkat mobile juga cukup tinggi, mengingat jumlah pengguna internet mobile mendekati jumlah total pengguna internet secara keseluruhan (Gambar 5).

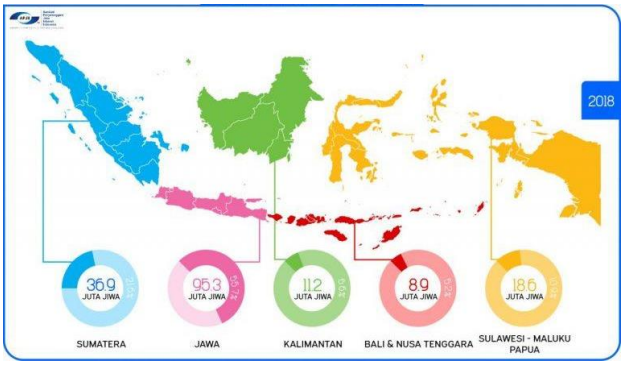


Gambar 5. Jumlah Pengguna Internet Aktif Indonesia (2019).
(Sumber: Kementrian Kominfo RI)

Ekosistem data terbuka yang berfungsi dengan baik adalah aksesibilitas dari perspektif teknis, hukum, dan organisasi (Welle Donker & van Loenen, 2017). Oleh karena itu, penting adanya kebijakan yang menetapkan konteks hukum, standar untuk memfasilitasi interoperabilitas data, dan jaringan yang stabil dan berkelanjutan bagi pengguna data. Berdasarkan hasil temuan, ekosistem data mengalami penetrasi yang tinggi dalam kategori internet dan penggunaan internet mobile yang mencerminkan ketersediaan data. *Ecosystem data* mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan analisis data yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan adanya tingkat penetrasi yang tinggi, terdapat peluang besar untuk mengumpulkan data dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti e-government, layanan publik, dan inisiatif digital lainnya. Pemanfaatan solusi digital yang memanfaatkan data tersebut dapat mendorong inovasi, transformasi digital, dan memajukan ekosistem digital secara keseluruhan di Indonesia (Gambar 5).

Pertumbuhan penggunaan internet telah menjadi fenomena yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Internet bukan lagi sekadar alat untuk mengakses informasi, tetapi juga menjadi platform untuk berkomunikasi, belajar, berbelanja, dan bahkan bekerja (Khutkyy & Laureda, 2023). Penggunaan internet yang meluas telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah data tentang tingkat penggunaan internet di Indonesia.

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.



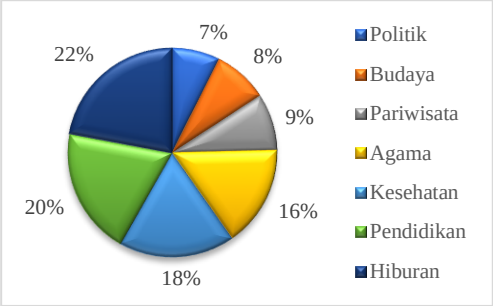
Gambar 6. Tingkat Penggunaan Internet di Indonesia
(Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018)

Gambar 6, menunjukkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa pengguna internet memiliki persentase paling tinggi di Indonesia adalah pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa mencatat jumlah pengguna internet terbanyak, dengan 95,3 juta jiwa atau sekitar 55,7% dari total pengguna internet di negara ini. Sementara itu, Sumatera menempati peringkat kedua dengan jumlah pengguna internet sebesar 36,9 juta jiwa, yang setara dengan 21,6% dari total pengguna internet di Indonesia. Sedangkan pulau Kalimantan memiliki 11,2 juta jiwa pengguna internet dengan tingkat penetrasi yang cukup tinggi, mencapai 66%. Di pulau Bali dan Nusa Tenggara, terdapat 8,9 juta jiwa pengguna internet dengan persentase penetrasi sebesar 52%. Sedangkan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, jumlah pengguna internet mencapai 18,6 juta jiwa atau 10,9% dari total pengguna internet di Indonesia (Gambar 6).

Tingkat penetrasi internet yang tinggi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berdampak signifikan pada pelayanan sektor publik dengan meningkatkan akses informasi, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan (Lima et al., 2022). Selain itu, TIK dapat digunakan untuk mengembangkan layanan kesejahteraan dan teknologi pendukung, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta memajukan pemerintahan dalam era digital. Namun, temuan di atas mengungkapkan ketimpangan dalam distribusi pengguna internet di Indonesia. Pulau Jawa dan Sumatera menjadi pusat utama penggunaan internet. Informasi ini memiliki relevansi penting dalam konteks upaya meningkatkan aksesibilitas dan literasi digital di wilayah-wilayah dengan tingkat penetrasi internet yang masih rendah. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat yang sama dari perkembangan teknologi digital (Gambar 6).

Di era digital saat ini, media online telah menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat (Chen et al., 2021). Ketersediaan berbagai jenis konten di internet memungkinkan pengguna untuk mengakses pengetahuan, berita, dan hiburan dengan mudah dan cepat. Namun, kualitas dan manfaat dari informasi yang tersedia sangat bervariasi.

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

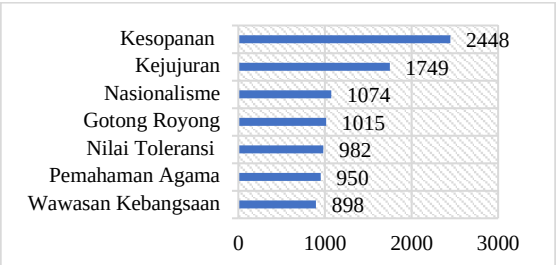


Gambar. 7 Informasi/Konten Bermanfaat di Media Online
(Sumber: Kementrian Kominfo RI, 2018)

Gambar 7 di atas, menunjukan hasil analisis temuan mengenai informasi/konten bermanfaat di media online menunjukkan persebaran persentase yang berbeda untuk beberapa topik yang paling banyak dibahas dalam konten tersebut. Dalam analisis ini, terlihat bahwa topik hiburan mendapatkan persentase tertinggi sebesar 22%, diikuti oleh pendidikan (20%), kesehatan (18%), agama (16%), pariwisata (9%), budaya (8%), dan politik (7%). Temuan ini menunjukkan adanya kepentingan yang signifikan dalam menyajikan konten yang relevan dalam bidang hiburan, pendidikan, kesehatan, agama, pariwisata, budaya, dan politik. Dalam konteks ekosistem data, informasi mengenai topik-topik ini dapat memberikan kontribusi dalam pengumpulan data, analisis, pengembangan solusi digital, dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan (Wretling & Balfors, 2021).

Data yang terkumpul dari konten-konten bermanfaat ini dapat menjadi sumber untuk menganalisis tren, preferensi, dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasil temuan menunjukkan adanya informasi yang relevan tentang hiburan dapat membantu dalam mengidentifikasi tren konsumsi dan kebutuhan pengguna dalam industri hiburan. Sementara itu, informasi tentang pendidikan, kesehatan, agama, dan pariwisata dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan solusi digital yang dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat. Pengumpulan data mengenai budaya dan politik juga penting untuk memahami dinamika masyarakat, preferensi politik, dan pengaruh kebijakan pemerintah. Dengan memanfaatkan ekosistem data ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengembangkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, membawa dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Prabandari, 2019). Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan pengaruh penggunaan TIK di kalangan masyarakat.



Gambar. 8 Data Pengaruh Penggunaan TIK Masyarakat (2018)
(Sumber: Kementrian Kominfo RI, 2018)

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

Gambar 8, menunjukan pengaruh penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada masyarakat, yaitu Wawasan Kebangsaan (898), Pemahaman Tentang Agama (950), Nilai Toleransi Antarumat Beragama (982), Gotong Royong (1015), Nasionalisme (1074), Kejujuran (1749), dan Kesopanan dalam Tingkah Laku (2448). Perubahan baik positif maupun negatif juga terjadi akibat penggunaan TIK dan internet. Persentase tertinggi terjadi pada kesopanan dalam tingkah laku, kejujuran dan gotong royong. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dalam beberapa aspek. TIK juga berperan dalam penyediaan berita dan informasi, memungkinkan akses ke sumber daya akademis, serta memfasilitasi aktivitas penelitian.

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek integral dalam kehidupan modern, mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, berkomunikasi, belajar, bersantai, dan menjalani sebagian besar aspek kehidupan sehari-hari dengan akses tak terbatas (Izdihar et al., 2022). Penggunaan TIK berkontribusi positif terhadap wawasan kebangsaan, pengetahuan dan pemahaman tentang agama, nilai toleransi antarumat beragama, gotong royong, nasionalisme, kejujuran, dan kesopanan dalam tingkah laku. Melalui akses mudah dan cepat terhadap informasi serta interaksi melalui TIK, masyarakat dapat memperluas pengetahuan mereka, memperkuat nilai-nilai sosial, dan meningkatkan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan TIK dalam membangun masyarakat yang berwawasan, beragam, solidaritas, dan berperilaku positif, serta mendorong terciptanya harmoni dan kemajuan sosial di tingkat nasional.

Pengembangan Website APTIKA

Untuk memfasilitasi aksesibilitas data terbuka, pemerintah di seluruh dunia sedang mengembangkan website data terbuka (Welle Donker & van Loenen, 2017). Layanan Virtual Experience merupakan jenis layanan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman interaktif dan imersif melalui Website virtual. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam lingkungan digital yang simulatif, seperti tur virtual, simulasi, atau pengalaman visual yang lebih mendalam. Sedangkan layanan Web Konvensional berfokus pada penyediaan informasi dan interaksi melalui situs web, yang mencakup berita, artikel, program, layanan, galeri, isu terkini, pengumuman, dan agenda kegiatan. Sejarah Aptika berfokus pada pengembangan aplikasi dan layanan informatika di Indonesia. Tugas dan fungsi Aptika meliputi pengembangan kebijakan, regulasi, dan pengawasan terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di berbagai sektor. Aptika juga memiliki struktur organisasi yang melibatkan berbagai divisi dan unit kerja yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pengembangan aplikasi dan layanan teknologi informasi melalui website Ditjen APTIKA (Tabel 1).

Tabel. 1 Layanan pada Website Ditjen Aptika

Pilihan	Layanan
Beranda	Virtual Experience dan Web Konvensional,
Profil	Sejarah Aptika, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan daftar nama pejabat Aptika
Informasi	berita, artikel, program, layanan, galeri, isu aptika, pengumuman dan agenda keguatan
Publikasi	Buku Aptika, dinamika data, dan laporan tahunan

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

Data Aptika	Internet dan media social, regulasi, infrastruktur TIK, aplikasi layanan publik, pengembangan SDM, kerjasama, komunitas TIK, pemeringkatan dan penghargaan
Kontak	Nomor fax dan telepon, email dan Website layanan publik
Virtual Tour	Tour Virtual Kantor Kominfo

(Sumber: Website Ditjen APTIKA, 2023)

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) memiliki kewajiban dalam mengatur perumusan dan penerapan aturan di bidang Penata Kelolaan Aplikasi Informatika (Hidayat, 2023). Hasil temuan menunjukan layanan berita, artikel, program, layanan, galeri, isu Aptika, pengumuman, dan agenda kegiatan merupakan bagian dari upaya Aptika untuk menyediakan informasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan aplikasi dan layanan informatika. Buku Aptika, dinamika data, dan laporan tahunan merupakan produk yang diterbitkan oleh Aptika sebagai sumber informasi dan evaluasi terkait kinerja dan perkembangan dalam bidang aplikasi informatika (Tabel 1).

Ditjen APTIKA juga terlibat dalam regulasi terkait internet dan media sosial, pengembangan infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi layanan publik, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak terkait, pembentukan dan pengembangan komunitas TIK, serta pemeringkatan dan penghargaan untuk aplikasi dan layanan TIK yang berprestasi. Untuk informasi lebih lanjut, nomor fax dan telepon, email, dan Website layanan publik Aptika dapat dihubungi. Tour Virtual Kantor Kominfo merupakan layanan virtual yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi kantor Kominfo secara digital. Ini memberikan pengalaman visual yang interaktif melalui Website virtual, memperlihatkan lingkungan kantor, ruangan, dan fasilitas yang ada. Layanan ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang struktur dan lingkungan kerja di Kantor Kominfo.

Website Ditjen APTIKA berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan terkait teknologi informasi dan komunikasi yang telah disediakan (Kusdiantoro, 2019). Penelusuran website APTIKA memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi penting seperti regulasi, program pemerintah, berita terbaru, serta panduan dan sumber daya terkait TIK. Selain itu, website ini juga menyediakan fitur interaktif dan layanan online yang memudahkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan Ditjen APTIKA. Dengan desain yang *user-friendly* website APTIKA berperan penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan keterbukaan informasi di bidang TIK di Indonesia.

Tabel. 2 Trend Topik Penelusuran

Trend	Topik	Penelusuran
1	Literasi Digital	253
2	RUU PDP	111
3	Perlindungan Data Pribadi	91
4	Transformasi Digital	78
5	Hoaks Covid-19	72
6	Virus Corona	64
7	SPBE	62

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

8	Smart City	55
9	Pusat Data Nasional	54
10	Startup Digtal	53
11	UMKM Go Online	48
12	UMKM Digtal	47
13	Kebocoran Data	47
14	Konten Negatif	46
15	Siberkreasi	40

(Sumber: Website Ditjen APTIKA, 2023)

Tabel 2, menunjukkan hasil temuan persebaran jumlah penelusuran terkait dengan topik-topik yang berbeda. Terdapat beberapa topik yang mendapatkan jumlah penelusuran yang lebih tinggi, seperti Literasi Digital (253), RUU PDP (111), Perlindungan Data Pribadi (91), Transformasi Digital (78), dan Hoaks Covid-19 (72). Data yang terkandung dalam topik ini dapat menjadi sumber informasi untuk memahami tren dan kebutuhan masyarakat terkait dengan literasi digital, kebijakan perlindungan data pribadi, transformasi digital, dan penyebaran hoaks terkait Covid-19. Ekosistem data dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait literasi digital, perlindungan data pribadi, dan transformasi digital dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan kebijakan yang relevan (Setiawan, 2018).

Selain itu, pengumpulan data terkait hoaks Covid-19 dapat membantu dalam upaya melawan penyebaran informasi yang salah dan mempromosikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Liang, 2020). Selain topik yang mendapatkan jumlah penelusuran yang lebih tinggi, terdapat pula topik lainnya seperti *Smart City*, Pusat Data Nasional, *Startup Digital*, *UMKM Go Online*, dan Digitalisasi Sektor Strategis yang juga memiliki kaitan dengan ekosistem data. Informasi terkait smart city dan pusat data nasional dapat memberikan wawasan tentang penggunaan data dalam pengembangan kota cerdas dan pengelolaan data yang efektif. Sementara itu, topik terkait startup digital, *UMKM go online*, dan digitalisasi sektor strategis. Dalam konteks ekosistem data, hal tersebut dapat digunakan untuk analisis data lebih lanjut, pengembangan kebijakan yang relevan, pengambilan keputusan yang berdasarkan data, dan pengembangan solusi teknologi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (Tabel 2).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan dampak positif terhadap layanan website Ditjen APTIKA melalui pengembangan teknologi informasi dalam konteks pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam teori Agile Governance, yang lebih menekankan pada peningkatan efisiensi dalam layanan publik. Hasil temuan menunjukkan bahwa tata kelola website Ditjen APTIKA merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan ekosistem data. Desain yang user-friendly berperan penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan keterbukaan informasi. Data menjadi salah satu tema yang banyak dibahas dalam artikel berita di website tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya peran data dalam ekosistem, di mana pengumpulan, pemrosesan, dan pengarsipan data merupakan komponen penting dalam pengembangan layanan publik. Selain itu, sumber daya manusia di era digital menunjukkan adanya penetrasi penggunaan internet yang tinggi, namun hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang menjadi pusat utama penggunaan internet di Indonesia. Dari seluruh pengguna internet, 22% di antaranya lebih banyak mengakses konten hiburan, yang berdampak pada penurunan nilai-nilai

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

wawasan kebangsaan hingga hanya 898 akses saja. Dalam konteks ekosistem data, terdapat beberapa topik yang menjadi fokus dalam pengembangan website APTIKA, termasuk smart city, pusat data nasional, startup digital, UMKM go online, dan digitalisasi sektor strategis. Ekosistem data menjadi aspek penting dalam melahirkan solusi teknologi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, hasil studi ini berimpikasi dalam pemerataan akses internet, pengembangan inovasi digital, dan peningkatan mutu layanan publik melalui website APTIKA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan wawasan berharga sepanjang proses penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada Penulis. Semoga hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

Agbozo, E., & Asamoah, B. K. (2019). The role of e-government systems in ensuring government effectiveness and control of corruption. *R-Economy*, *5*(2), 53–60. https://doi.org/10.15826/recon.2019.5.2.006

Akatkin, Y., & Yasinovskaya, E. (2020). Data-Driven Government in Russia: Linked Open Data Challenges, Opportunities, Solutions. *Communications in Computer and Information Science*, *1349*(September 2021), 245–257. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67238-6_18

Akbar, P., Nurmandi, A., Irawan, B., & Loilatu, M. J. (2022). Research Trends in E-Government Interoperability: Mapping Themes and Concepts Based on The Sco-pus Database. *EJournal of EDemocracy and Open Government*, *14*(2), 83–108. https://doi.org/10.29379/jedem.v14i2.707

Alvarenga, A., Matos, F., Godina, R., & Matias, J. C. O. (2020). Digital transformation and knowledge management in the public sector. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(14). https://doi.org/10.3390/su12145824

Anita Rahmah Fitria, R. G. P. (2021). *THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS (PR) THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS IN DISSEMINATING THE CONTENT COMPLAINS PROGRAM*.

Chen, C.-L., Lin, Y.-C., Chen, W.-H., Chao, C.-F., & Pandia, H. (2021). Role of government to enhance digital transformation in small service business. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(3), 1–26. https://doi.org/10.3390/su13031028

Chung, C.-S., & Kim, S.-B. (2019). A comparative study of digital government policies, focusing on E-Government acts in Korea and the United States. *Electronics (Switzerland)*, *8*(11). https://doi.org/10.3390/electronics8111362

Correa-Ospina, M., Saxena, D., & Pinzón, B. H. D. (2021). Mechanisms underpinning the usage of e-government services by businesses: A proposal based on previous empirical research. *EJournal of EDemocracy and Open Government*, *13*(2), 154–183. https://doi.org/10.29379/jedem.v13i2.685

Cui, Y., Kara, S., & Chan, K. C. (2020). Manufacturing big data ecosystem: A systematic literature review. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, *62*. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101861

Debeljak, A., & Dečman, M. (2022). Digital Transformation of Slovenian Urban Municipalities:

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

A Quantitative Report on the Impact of Municipality Population Size on Digital Maturity. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, *15*(2), 25–51. https://doi.org/10.2478/nispa-2022-0012

Gasparyan, A. Y., Ayvazyan, L., Blackmore, H., & Kitas, G. D. (2011). Writing a narrative biomedical review: Considerations for authors, peer reviewers, and editors. *Rheumatology International*, *31*(11), 1409–1417. https://doi.org/10.1007/s00296-011-1999-3

Hidayat, T. (2023). *STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (KEMKOMINFO RI) DALAM PENERAPAN PROGRAM LITERASI DIGITAL*. 29–31.

Indriyani Putri, K. R. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital "Tamasia." *Acta Comitas*, *4*(3), 465. https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p11

Izdihar, S., Asfianur, F., Nurmandi, A., & Mutiarin, D. (2022). *Information Services Through Social Media in the Covid-19 Pandemic Era*. 382–388.

Jack, J. (2018). E-government in Vanuatu: a whole-of-government approach. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, *40*(4), 228–234. https://doi.org/10.1080/23276665.2018.1545354

Khutkyy, D., & Laureda, E. A. (2023). Internet Voting for Policy Proposals: Amplifying Open Government in Chile and Colombia. *EJournal of EDemocracy and Open Government*, *15*(1), 48–72. https://doi.org/10.29379/jedem.v15i1.791

Kusdiantoro, A. (2019). *LKP: Rancang Bangun Aplikasi Sharing Document Berbasis Website Aptika di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*.

Liang, F. (2020). COVID-19 and Health Code: How Digital Platforms Tackle the Pandemic in China. *Social Media and Society*, *6*(3). https://doi.org/10.1177/2056305120947657

Lima, D., Zego, E. P., & Rodrigues, J. (2022). DIGITAL TRANSFORMATION IN PUBLIC FINANCE: A PARADIGM THAT HAS CONTRIBUTED TO CABO VERDE'S GROWTH. In A. L., S. D., & Z. L. (Eds.), *ACM International Conference Proceeding Series* (pp. 570–572). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3560107.3560198

Luna, A. J. H. de O. (2015). *Agile Governance Theory*. 601. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/15494

Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P., & de Moura, H. P. (2015). *Agile Governance Theory: conceptual development*. 1–22. http://arxiv.org/abs/1505.06701

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, *36*(4). https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Morte-Nadal, T., & Esteban-Navarro, M. A. (2022). Digital Competences for Improving Digital Inclusion in E-Government Services: A Mixed-Methods Systematic Review Protocol. *International Journal of Qualitative Methods*, *21*. https://doi.org/10.1177/16094069211070935

Mutar, A. F., Abdullah, A. R., Jasim, O. M., Saare, M. A., & Lashari, S. A. (2022). A comprehensive method of e-government transition for viable development in Iraq. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, *11*(4), 2388–2398. https://doi.org/10.11591/eei.v11i4.3142

Muttaqin, M. I., & Permatasari, A. (2023). Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023. *JIIP: Jurnal Ilmiah*

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

Ilmu Pemerintahan, *8*(2), 187–201. https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18875

Nielsen, M. M., & Ali, W. K. M. (2021). Governing and Monitoring the Digital Transformation: Assessing the Qatari Experience since 2003. *ACM International Conference Proceeding Series*, 246–253. https://doi.org/10.1145/3494193.3494227

Parra, R. D., & Libaque-Saenz, C. (2020). The influence of digital transformation of the peruvian public sector on citizen trust. *26th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2020*. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85097714729&partnerID=40&md5=04e69671c7092986cb9bbc3782d8cf42

Prabandari, L. M. A. S. (2019). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung*.

Rumata, V. M., & Nugraha, D. A. (2020). Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, *4*(2), 467. https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2230

Setiawan, A. B. (2018). Policy Development Towards Application and Contents Service Providers on Digital Ecosystem Through Over the Top. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, *8*(2), 169. https://doi.org/10.17933/jppi.2018.080206

Sidek, N., & Ali, N. B. (2019). Analysing the critical quality factors in IoT-based serviceimplementation: A systematic evaluation. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, *9*(1), 2276–2281. https://doi.org/10.35940/ijeat.A2631.109119

Welle Donker, F., & van Loenen, B. (2017). How to assess the success of the open data ecosystem? *International Journal of Digital Earth*, *10*(3), 284–306. https://doi.org/10.1080/17538947.2016.1224938

Wretling, V., & Balfors, B. (2021). Building institutional capacity to plan for climate neutrality: The role of local co-operation and inter-municipal networks at the regional level. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(4), 1–21. https://doi.org/10.3390/su13042173

Yuliantini, L. S. (2023). *The Impact of the E-Government Development Index (EGDI) on the Worldwide Governance Indicator (WGI) in European Union Countries*. *7*(2), 140–153.

Hak Cipta © 2024, Ahmad Muhardin Hadmar, Dyah Mutiarin, Zuly Qodir.

Analisis Efektivitas Aplikasi E-Surban sebagai Sarana Temu Balik Arsip Aktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Ani Ahmidah[1], Salmah Harun[2]
[1]Mahasiswa Program Studi Kearsipan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka
[2]Politeknik LP3I Makassar
E-mail: AniAhmidah@ecampus.ut.ac.id, salmahharun284@gmail.com

Abstrak

Arsip merupakan salah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi maupun birokrasi dan sangat berpengaruh pada seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dalam sebuah instansi. Apabila aktivitas suatu instansi tinggi dalam penggunaan arsip aktif maka semakin tinggi masalah yang akan dihadapi. Arsip yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sangat banyak sehingga diperlukan satu aplikasi yang secara efektif dapat digunakan untuk menemukan arsip. Dalam rangka menemukan kembali arsip secara efektif dan efisien Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul membangun aplikasi E-Surban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecepatan, ketepatan, dan persepsi kemudahan e-surban. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengetahui tingkat keefektifan aplikasi e-surban penelitian ini menggunakan matriks akurasi dari Chowdury. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi e-surban mendapatkan akurasi 100% dalam temu balik arsip dan lebih cepat dari cara manual serta persepsi mudah diakses, tidak menyulitkan pengguna sehingga dapat disimpulkan bahwa temu balik arsip aktif dengan e-surban efektif.
***Kata Kunci**: arsip aktif, aplikasi e-surban, temu balik arsip.*

PENDAHULUAN

Arsip merupakan sumber informasi penting yang menunjang proses administrasi dan mempunyai dampak signifikan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dalam sebuah organisasi atau instansi. Berdasarkan fungsinya arsip dibagi menjadi arsip statis dan arsip dinamis. Arsip statis merupakan arsip masa retensinya sudah habis dan tidak dipergunakan dalam perencanaan, penyelenggaraaan kegiatan sehari-hari namun memiliki nilai guna kesejarahan (Rosalin, 2019). Arsip dinamis dibedakan menjadi arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis aktif yakni frekuensi penggunaan arsip masih tinggi dalam kegiatan admistrasi dan apabila frekuensi penggunaannya sudah menurun akan disusutkan menjadi arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis inaktif yakni arsip yang frekuensinya penggunaannya sudah menurun dalam kegiatan admistrasi dan apabila tidak memiliki nilai guna akan dimusnahkan.

Arsip yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sangat banyak. Arsip dinamis yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul terbilang sangat banyak. Tercatat dalam tiga tahun terakhir total surat masuk dan keluar sebanyak

Hak Cipta © 2024, Ani Ahmidah, Salmah Harun.

7818 surat, dengan rincian 4063 surat masuk dan 3.855 surat keluar yang dikelola oleh bagian sekertariat yakni Aska Perwita.

Tabel 1. Jumlah surat masuk dan keluar dalam 3 tahun terakhir

Tahun	Surat Masuk	Surat Keluar	Jumlah
2021	1026	986	2012
2022	1435	2141	3576
2023	1602	728	2330

Efektivitas pengelolaan arsip dipengaruhi oleh unit kearsipan, fasilitas, pegawai dan jumlah aktivitas yang tercipta (Hapsari & Indrahti, 2022). Apabila aktivitas suatu instansi tinggi dalam penggunaan arsip aktif maka semakin tinggi masalah yang akan dihadapi. Jika kita lihat tabel 1 terlihat arsip yang dihasilkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sangat banyak.

Jumlah arsip yang besar memerlukan pengelolaan yang baik dan cermat agar pihak berwenang dapat melaksanakan kegiatan pelayanan sosial secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan satu aplikasi yang secara efektif dapat digunakan untuk menemukan arsip. Dalam rangka menemukan kembali arsip secara efektif, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul membangun aplikasi E-Surban. Meskipun, aplikasi E-Surban pernah diteliti, namun hingga saat ini efektivitas kinerja aplikasi tersebut belum pernah diukur. Sehingga sangat penting dilakukan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas kinerja aplikasi E-Surban sebagai alat temu kembali arsip aktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dengan merumuskan Bagaimana kecepatan dan ketepatan temu kembali arsip aktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul serta persepsi kemudahan aplikasi E-Surban dalam penemuan kembali arsip akif di Dinas Perpusakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

KAJIAN PUSTAKA

Arsip aktif adalah arsip yang sering digunakan atau terus menerus. Tingginya frekuensi penggunaan arsip menjadikannya sebagai komponen atau elemen penting yang menunjang kelancaran alur kerja dan mendukung proses pengambilan keputusan. (Muhidin & Winata, 2016). Untuk kelancaran kegiatan dibidang kearsipan, arsip aktif perlu disimpan dan diberkaskan dengan baik. Pemberkasan aktif merupakan serangkaian tindakan untuk membuat catatan arsip sebagai pendukung kelancaran alur kerja dan proses pengambilan keputusan sehingga menjadi satu file dari masalah item kerja yang sama . Pemberkasan arsip aktif pada Arsip Nasional Republik Indonesia memakai asas gabungan yaitu asas sentralisasi yang dipakai dalam menetapkan kebijakan, sistem manajemen arsip aktif, organisasi, sumber daya manusia (SDM), instrumen pengelolaan arsip aktif dan manajemen arsip secara elektronik. (Hendriyani, 2021).

Temu balik arsip salah satu kegiatan dalam pengelolaan arsip yang penting untuk tujuan menemukan kembali arsip yang akan digunakan (Hendrawan & Mukhlis, 2021). Information retrieval tool atau alat untuk temu kembali dibagi menjadi dua metode pencarian yaitu manual/konvensional dan penarian elektronik/digital. Pencarian manual yaitu dengan kartu indeks, kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks, dll. Pencarian elektronik yaitu pencarian yang dilakukan melalui sumber daya elektronik seperti

Hak Cipta © 2024, Ani Ahmidah, Salmah Harun.

OPAC, mesin pencari, database online, jurnal Elektronik, referensi elektronik dan informasi lainnya secara digital dengan menggunakan database dan internet (Prastiwi & Jumino, 2018). Penggunaan TI berbentuk aplikasi dalam manajemen perkantoran semakin mengalami kemajuan. Banyak instansi pemerintah yang menggunakan teknologi informasi untuk melakukan dan menjalankan tujuan organisasinya. Aplikasi adalah serangkaian tindakan atau instruksi yang dijalankan computer (Putra & Husna, 2019).

METODE

Penelitian tentang Analisis Efektivitas Aplikasi E-Surban sebagai Sarana Temu Balik Arsip Aktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul menggunakan metode desain kualitatif yang disusun secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan secara objektif berdasarkan realitas subjektif yang bertujuan untuk memahami kenyataan melalui proses penalaran induktif. (Adlini, et.al., 2022). Deskriptif adalah penelitian yang berfokus pada permasalahan aktual penelitian yang menggambarkan gejala dan peristiwa yang sedang terjadi dengan variable tunggal maupun jamak (Siregar & Harahap, 2019).

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi partisipasi, wawancara, dan studi dokumen. Data diperoleh melalui wawancara dengan dua petugas E-Surban dan tiga arsiparis. Wawancara adalah suatu komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu, seperti memperoleh informasi atau mengumpulkan data, dimana satu orang sebagai peawancara dan satu lagi sebagai responden. (Fadhallah, 2020). Semua data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis oleh peneliti menggunakan analisis data model Miles & Huberman yang dilakukan secara interaktif dan terjadi secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian yang disusun dalam tiga tahap, yaitu: Reduksi data, penyajian data (display data). dan penarikan kesimpulan (Mulyadi, 2018). Kemudian untuk keabsahan data peneliti menggunakan triagulasi data dan triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengkaji data (Amri, et.al.,202). Untuk mengetahui tingkat keefektifan aplikasi E-Surban peneliti juga menggunakan matriks akurasi dari Chowdury.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kecepatan temu kembali arsip aktif di Dinas Perpusatakaan Kabupaten Bantul dengan Aplikasi E-Surban

Aplikasi E-Surban merupakan aplikasi untuk mengelola surat masuk dan keluar, dan digunakan untuk pendistribusian surat dan pengarsipan digital. E-Surban memiliki beberapa fitur pendukung yang memudahkan pengguna dalam mengedit surat dan melakukan aktivitas pengarsipan digital. Selain itu, aplikasi ini merupakan aplikasi multi-user sehingga memudahkan proses pengiriman surat kepada pegawai yang bersangkutan melalui akun pegawai E-Surban yang dimilikinya. E-Surban mulai digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul tahun 2020. Aplikasi E-Surban dapat diakses oleh seluruh pegawai DISPUSIP yang telah memiliki akun namun, yang dapat mengirim dan menerima surat hanya petugas yang berada di sekertariat. Dalam aplikasi E-Surban, penyimpanan dokumen setiap item pekerjaan diterjemahkan ke dalam beberapa kata kunci, setelah itu setiap kata kunci digunakan untuk permintaan pencarian sederhana. Peneliti menemukan bahwa jumlah kata kunci yang digunakan dalam pencarian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil pencarian, yang meliputi jumlah total

Hak Cipta © 2024, Ani Ahmidah, Salmah Harun.

item yang ditemukan, terlepas dari apakah ada item terkait atau tidak, jadi semakin rendah jumlah kata kunci yang digunakan, semakin tinggi nomor pencarian, namun tingkat kepentingannya rendah. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan hasil pencarian menunjukkan bahwa hanya metode pencarian dengan Teknik sederhana yang dapat digunakan. Hal ini dapat diartikan pemilihan kata kunci yang digunakan dalam proses temu kembali arsip mengimplementasikan pencarian pada database, yang kemudian ditemukan dan ditampilkan pada kolom tampilan (Latiar, 2019)

Dalam pengaksesan aplikasi E-Surban ada beberapa langkah yang harus dilakukan terkait pencarian arsip aktif yaitu:

1. Pengguna aplikasi E-Surban harus login terlebih dahulu, dengan memasukan username dan password yang dimiliki kemudian klik login.
2. Pilih pencarian melalui kotak masuk, surat keluar, surat terkirim atau nomor surat keluar dengan memasukkan kata kunci sesuai dengan apa yang akan dicari. Untuk pencarian arsip secara luas dapat dengan kolom "search" dan untuk pencarian arsip secara sempit dapat dengan kolom "klasifikasi.
3. Setelah memasukkan kata kunci, kemudian klik pencarian

Tabel 1.1 Hasil Pencarian dengan Kata Kunci yang akan diuji

No	Kata Kunci	Waktu	Jumlah Arsip
1	Layanan Perpustakaan	1,3 Detik	36
2	MOU	1,1 Detik	38
3	Pembinaan Kearsipan	1,1 Detik	2
4	Pemusnahan Arsip	1,2 Detik	23
5	Pengawasan Kearsipan	1,4 Detik	15
6	Telekomunikasi	1,2 Detik	13
7	Penggunaan Fasilitas Kantor	1,5 Detik	35
8	Penyusutan Arsip	1,3 Detik	29
9	Standar Pelayanan	1,3 Detik	10
10	Pelayanan Publik	1,4 Detik	40

Query	**Relevan**	**Tidak Relevan**	**Total**
Found	A	B	a+b
Not found	C	D	c+d
	a+c	b+d	a+b+c+d

matriks akurasi dari Chowdury.

Berdasarkan matriks tersebut, diperoleh rumus
perolehan = [a : (a + c)] x 100%
pada dasarnya:

$$\text{Perolehan} = \frac{jumlah\ arsip\ yang\ relevan\ \ ditemukan}{jumlah\ arsip\ yang\ relevan\ dengan\ koleksi}$$

Hak Cipta © 2024, Ani Ahmidah, Salmah Harun.

Tabel 1.2 Hasil penelitian dari kata kunci layanan perpustakaan

Layanan perpustakaan	Relevan	Tidak Relevan	Total
Found	36	0	36
Not found	0	205	205
Total	36	205	241

$$\text{perolehan} = \frac{36}{36} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Hasil uji keefektifan E-Surban pada kata kunci layanan perpustakaan diperoleh hasil ketepatan 100% dan arsip yang relevan ada 36, tidak relevan dengan membutuhkan waktu 4,3 detik untuk temu balik arsip.

Tabel 1.3 Hasil penelitian dari kata kunci MOU

MOU	Relevan	Tidak Relevan	Total
Found	38	0	38
Not found	0	203	203
Total	38	203	241

$$\text{prolehan} = \frac{38}{38} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Hasil uji keefektifan E-Surban pada kata kunci MOU diperoleh hasil ketepatan 100% dan arsip yang relevan ada 38, tidak relevan 0 dengan membutuhkan waktu 4,5 detik untuk temu balik arsip.

Tabel 1.4 Hasil penelitian dari kata kunci Pembinaan Kearsipan

Pembinaan Kearsipan	Relevan	Tidak Relevan	Total
Found	2	0	2
Not found	0	239	239
Total	2	239	241

$$\text{perolehan} = \frac{2}{2} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Hasil uji keefektifan E-Surban pada kata kunci pembinaan kearsipan diperoleh hasil ketepatan 100% dan arsip yang relevan ada 2, tidak relevan 0 dengan membutuhkan waktu 1,7 detik untuk temu balik arsip.

Tabel 1.5 Hasil penelitian dari kata kunci Pemusnahan Arsip

Pemusnahan Arsip	Relevan	Tidak Relevan	Total
Found	23	0	23
Not found	0	218	218
Total	23	218	241

Hak Cipta © 2024, Ani Ahmidah, Salmah Harun.

$$\text{perolehan} = \frac{23}{23} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Hasil uji keefektifan E-Surban pada kata kunci pemusnahan arsip diperoleh hasil ketepatan 100% dan arsip yang relevan ada 23, tidak relevan 0 dengan membutuhkan waktu 2,9 detik untuk temu balik arsip.

Tabel 1.6 Hasil penelitian dari kata kunci Pengawasam Kearsipan

Pengawasan Kearsipan	Relevan	Tidak Relevan	Total
Found	15	0	15
Not found	0	226	226
Total	15	226	241

$$\text{perolehan} = \frac{15}{15} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Hasil uji keefektifan E-Surban pada kata kunci pengawasan kearsipan diperoleh hasil ketepatan 100% dan arsip yang relevan ada 15, tidak relevan 0 dengan membutuhkan waktu 2,6 detik untuk temu balik arsip.

Tabel 1.7 Hasil penelitian dari kata kunci Telekomunikasi

Telekomunikasi	Relevan	Tidak Relevan	Total
Found	13	0	13
Not found	0	228	228
Total	13	228	241

$$\text{perolehan} = \frac{13}{13} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Hasil uji keefektifan E-Surban pada kata kunci telekomunikasi diperoleh hasil ketepatan 100% dan arsip yang relevan ada 13, tidak relevan 0 dengan membutuhkan waktu 2,5 detik untuk temu balik arsip.

Tabel 1.8 Hasil penelitian dari kata kunci Pengunaan Fasilitas Kantor

Penggunaan Fasilitas Kantor	Relevan	Tidak Relevan	Total
Found	35	0	35
Not found	0	206	206
Total	35	206	241

$$\text{perolehan} = \frac{35}{35} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Hasil uji keefektifan E-Surban pada kata kunci penggunaan fasilitas kantor diperoleh hasil ketepatan 100% dan arsip yang relevan ada 35, tidak relevan 0 dengan membutuhkan waktu 4 detik untuk temu balik arsip.

Hak Cipta © 2024, Ani Ahmidah, Salmah Harun.

Tabel 1.9 Hasil penelitian dari kata kunci Penyusutan Arsip

Penyusutan Arsip	Relevan	Tidak Relevan	Total
Found	29	0	29
Not found	0	212	212
Total	29	212	241

$$\text{perolehan} = \frac{29}{29} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Hasil uji keefektifan E-Surban pada kata kunci penyusutan arsip diperoleh hasil ketepatan 100% dan arsip yang relevan ada 29, tidak relevan 0 dengan membutuhkan waktu 3 detik untuk temu balik arsip.

Tabel 1.10 Hasil penelitian dari kata kunci Standar Pelayanan

Penyusutan Arsip	Relevan	Tidak Relevan	Total
Found	10	0	10
Not found	0	231	31
Total	10	231	241

$$\text{perolehan} = \frac{10}{10} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Hasil uji keefektifan E-Surban pada kata kunci penyusutan arsip diperoleh hasil ketepatan 100% dan arsip yang relevan ada 10, tidak relevan 0 dengan membutuhkan waktu 2,3 detik untuk temu balik arsip.

Tabel 1.11 Hasil penelitian dari kata kunci Pelayanan Publik

Penyusutan Arsip	Relevan	Tidak Relevan	Total
Found	40	0	40
Not found	0	201	201
Total	40	201	241

$$\text{perolehan} = \frac{40}{40} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Hasil uji keefektifan E-Surban pada kata kunci penyusutan arsip diperoleh hasil ketepatan 100% dan arsip yang relevan ada 40, tidak relevan 0 dengan membutuhkan waktu 5 detik untuk temu balik arsip.

Ketepatan Temu Kembali Arsip Aktif di Dispusip Kab Bantul dengan Aplikasi E-Surban

a. Hasil penelusuran dari kata kunci layanan perpustakaan pada aplikasi E-Surban terbukti akurat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa kata kunci dan hasil yang dicari menghasilkan arsip yang sama atau relevan.

Hak Cipta © 2024, Ani Ahmidah, Salmah Harun.

b. Hasil penelusuran dari kata kunci MOU pada aplikasi E-Surban terbukti akurat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa kata kunci dan hasil yang dicari menghasilkan arsip yang sama atau relevan.
c. Hasil penelusuran dari kata kunci pembinaan kearsipan pada aplikasi E-Surban terbukti akurat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa kata kunci dan hasil yang dicari menghasilkan arsip yang sama atau relevan.
d. Hasil penelusuran dari kata kunci pemusnahan arsip pada aplikasi E-Surban terbukti akurat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa kata kunci dan hasil yang dicari menghasilkan arsip yang sama atau relevan.
e. Hasil penelusuran dari kata kunci pengawasan kearsipan pada aplikasi E-Surban terbukti akurat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa kata kunci dan hasil yang dicari menghasilkan arsip yang sama atau relevan.
f. Hasil penelusuran dari kata kunci telekomunikasi pada aplikasi E-Surban terbukti akurat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa kata kunci dan hasil yang dicari menghasilkan arsip yang sama atau relevan.
g. Hasil penelusuran dari kata kunci penggunaan fasilitas kantor pada aplikasi E-Surban terbukti akurat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa kata kunci dan hasil yang dicari menghasilkan arsip yang sama atau relevan.
h. Hasil penelusuran dari kata kunci penyusutan arsip pada aplikasi E-Surban terbukti akurat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa kata kunci dan hasil yang dicari menghasilkan arsip yang sama atau relevan
i. Hasil penelusuran dari kata kunci standar pelayanan pada aplikasi E-Surban terbukti akurat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa kata kunci dan hasil yang dicari menghasilkan arsip yang sama atau relevan.
j. Hasil penelusuran dari kata kunci pelayanan publik pada aplikasi E-Surban terbukti akurat dan tepat. Hal ini terbukti bahwa kata kunci dan hasil yang dicari menghasilkan arsip yang sama atau relevan.

Persepsi kemudahan Aplikasi E-Surban dalam penemuan kembali arsip aktif di Dinas Perpusatakaan Kabupaten Bantul

Persepsi kemudahaan penggunaan Aplikasi E-Surban dapat diartikan sebagai ukuran keyakinan seseorang bahwa Aplikasi E-Surban mudah untuk dipahami oleh pengguna seperti merasa sistem informasi mudah digunakan, tidak memerlukan banyak usaha untuk memahaminya, dan tidak menimbulkan masalah (Putra dan Husna, 2019). Menurut pengguna aplikasi E-Surban di Dinas Pepustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa penerapan aplikasi E-Surban sangat mudah dan tidak ada kesulitan dalam memperlajarinya. Hal ini dikarenakan aplikasi ini memiliki kemiripan dengan persuratan elektronik lain yang sudah digunakan. Hal tersebut terungap dari pernyataan beberapa informan yang merupakan pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjelaskan bahwa aplikasi ini memiliki tampilan yang sederhana untuk dipelajari serta menu-menu yang mudah untuk dioperasikan. Aplikasi ini juga memiliki petunjuk pengoperasian yang mempermudah penggunanya dalam menjalankan aplikasi ini.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian E-Surban di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sebagai pengelolaan arsip aktif terkhusus surat masuk dan

Hak Cipta © 2024, Ani Ahmidah, Salmah Harun.

surat keluar secara elektronik, memiliki keefektifan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan pengujian yang sudah dilakukan dan mendapatkan akurasi 100%. Temu balik arsip sebelum menggunakan aplikasi E-Surban membutuhkan waktu lama, dengan E-Surban dalam waktu kurang dari 10 detik arsip sudah dapat ditemukan. Pengoperasian E-Surban dinilai efektif, mudah diakses dan terdapat panduan yang mudah ditemukan sehingga tidak menyulitkan pengguna. Untuk meningkatkan keefektifan, peneliti menyarankan penentuan klasifikasi arsip didalam E-Surban diperkecil agar arsip lebih tertata dengan baik.

REFERENSI

Adlini, M. N. et al. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan,* 6(1), 974-980.

Amri, C. O., et al. (2021). Peningkatan Literasi Digital Peserta Didik: Studi Pembelajaran Menggunakan E-Learning. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan,* 6(3), 546-551.

Fadhallah, R. A. (2020). *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press.

Faisal. V. A. (2019). Impementasi Komunikasi Efektif Dalam Pembelajaran AnakUsia Dini Di Tk Rumah Citta Yogyakarta. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kependidikan*, 20(1), 1-20.

Hendrawan, M. R., & Mukhlis. (2021) *Pengantar Pengorganisasian dan Temu Balik Informasi.* Malang: Ub Press.

Hendriyani, M. (2021). Pemberkasan Arsip Dinamis Aktif Di Subbagian Persuratan dan Arsip Aktif Pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis,* 10 (01), 11-17.

Latiar, H. (2019). Efektifitas Sistem Temu Kembali Arsip Digital Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. *Jurnal Pustaka Budaya*, *6*(1), 9-15.

Muhidin, S. A. & Winata, H. W. (2016). *Manajemen Kearsipan.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Mulyadi. (2018). Efektivitas Sistem Kearsipan Dinamis (SIKD) Sebagai Sarana Temu Kembali Arsip Di Dinas Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi (ARPUSDOK) Kota Palembang. *JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi),* 3(1), 50–73.

Prastiwi, M. A., & Jumino, J. (2018). Efektvitas Aplikasi Ipusnas Sebagai Sarana Temu Balik Informasi Elektronik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(4), 231-240.

Putra, B. K., & Husna, J. (2019) Persepsi Penggunaan Persepsi Pengguna Outlook Web Applications Dalam Mendukung Pendistribusian Arsip Surat Masuk Di Pt Pelabuhan Indonesia Iii (Persero) Regional Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan.* 8(4), 184-193.

Rosalin, S. (2019). *Manajemen Arsip Dinamis.* Malang: Ub Press.

Siregar, A. Z., & Harahap. N. (2019) *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi.* Yogyakarta: Deepublish.

Hak Cipta © 2024, Ani Ahmidah, Salmah Harun.

Partisipasi dan Demokratisasi Informasi Era Society 5.0 di Indonesia

Annisarizki[1], Sigit Surahman[2]
[1]Universitas Serang Raya, Jl. Raya Serang-Cilegon Km 5 Serang-Banten,
[2]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara Jawa Barat
e-mail: annisarizzkii@gmail.com

Abstrak

Era Society 5.0 mengusung integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi publik dan mendemokratisasikan informasi. Fokus penelitian adalah pada dampak teknologi terhadap aksesibilitas informasi, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan tantangan yang muncul terkait privasi dan etika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, dan artikel berita yang relevan dengan topik partisipasi dan demokratisasi informasi di era Society 5.0.
***Kata kunci**: Ai, Big Data, Demokratisasi, Privasi, Teknologi*

PENDAHULUAN

Society 5.0 adalah konsep futuristik yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang untuk menjawab berbagai tantangan sosial melalui integrasi yang harmonis antara dunia fisik dan digital. Konsep ini pertama kali muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks seperti penuaan populasi, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan sosial dengan memanfaatkan teknologi canggih secara maksimal . Teknologi-teknologi ini, termasuk kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan Big Data, menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Nakanishi, 2019). Mereka dapat memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan dan memastikan akses yang lebih adil terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan.

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam berbagai kegiatan, proses, atau keputusan yang mempengaruhi mereka atau lingkungan di sekitar mereka. Ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari partisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum, hingga partisipasi dalam pembangunan masyarakat seperti program pengembangan lokal (Rosenstone & Hansen, 2023).

Namun, meskipun potensi manfaatnya sangat besar, penerapan teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai cara mereka dapat dimanfaatkan secara inklusif dan etis. Isu-isu seperti privasi, keamanan data, dan potensi eksklusi digital menjadi perhatian utama. Bagaimana teknologi ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi adalah tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa manfaat dari *Society* 5.0 dapat dirasakan oleh semua orang, bukan hanya oleh mereka yang sudah memiliki akses ke teknologi canggih.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah secara drastis cara masyarakat mengakses dan mendistribusikan informasi. Di era *Society* 5.0, perubahan ini diperluas dengan pengenalan teknologi seperti AI dan IoT yang memungkinkan pengolahan data dalam skala besar dan *real-time*. AI, misalnya, dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan

Hak Cipta © 2024, Annisarizki, Sigit Surahman.

yang lebih baik dan lebih cepat. Sementara itu, IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. Kombinasi dari teknologi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas dalam pemanfaatan teknologi, tetapi juga inklusif dan berkeadilan dalam distribusi manfaatnya.

Society 5.0 berupaya untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, dari kesehatan dan pendidikan hingga transportasi dan energi. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya tentang inovasi teknologi, tetapi juga tentang transformasi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung inklusi digital dan melindungi hak-hak individu (Surahman, 2024).

Melalui pendekatan ini, *Society* 5.0 berharap dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status ekonomi, atau lokasi geografis, untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan digital. Ini berarti bahwa teknologi harus diakses oleh semua orang, bukan hanya oleh mereka yang sudah memiliki keuntungan ekonomi atau pendidikan yang memadai. Dalam konteks ini, *Society* 5.0 menekankan pentingnya inklusi digital, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan teknologi canggih seperti internet, perangkat pintar, dan layanan digital untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, di sektor pendidikan, teknologi digital dapat menyediakan akses ke sumber daya pembelajaran yang berkualitas tinggi untuk anak-anak di daerah terpencil, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem pendidikan tradisional (Fukuyama, 2018).

Selain itu, *Society* 5.0 bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari kemajuan teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk peningkatan layanan kesehatan melalui *telemedicine* dan perangkat medis pintar yang dapat memantau kondisi pasien secara real-time, memungkinkan perawatan yang lebih cepat dan efektif, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang kurang terlayani (Nakano, 2019). Di sektor tenaga kerja, *Society* 5.0 mendukung penggunaan AI dan robotika untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja, sambil tetap menciptakan peluang baru bagi pekerja melalui pendidikan dan pelatihan ulang (Yamaguchi, 2020). Dengan demikian, *Society* 5.0 bukan hanya tentang penerapan teknologi tinggi untuk menciptakan solusi cerdas, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Ini berarti bahwa kebijakan dan inisiatif harus dirancang untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung akses universal terhadap teknologi, melindungi hak-hak privasi individu, dan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat (Morikawa, 2020).

Sedangkan demokratisasi adalah proses atau upaya untuk meningkatkan partisipasi politik, memperluas hak-hak sipil, dan memperbaiki sistem politik agar lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Ini sering kali melibatkan pengembangan lembaga-lembaga demokratis, perlindungan hak asasi manusia, penguatan ruang sipil, dan promosi nilai-nilai demokratis. Proses demokratisasi dapat melibatkan berbagai langkah, termasuk pengadopsian undang-undang yang mendukung kebebasan sipil, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan politik. Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka, inklusif, dan akuntabel, di mana kekuasaan dipertanggungjawabkan kepada rakyat (Diamond, 2023).

Pada intinya, *Society* 5.0 adalah visi tentang masa depan di mana teknologi berfungsi sebagai

Hak Cipta © 2024, Annisarizki, Sigit Surahman.

enabler bagi semua orang, bukan hanya segelintir elit. Ini adalah tentang membangun masyarakat yang lebih baik, di mana inovasi teknologi membantu mengatasi tantangan sosial dan menciptakan peluang baru bagi semua individu, tanpa kecuali. Oleh karena itu, *Society* 5.0 tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penciptaan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan yang memberdayakan setiap orang untuk mencapai potensi penuh mereka (Miyamoto, 2019)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode yang sering digunakan untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam. Dalam penelitian ini, metode studi literatur dan analisis konten digunakan untuk menggali informasi dan wawasan yang relevan. Studi literatur melibatkan penelusuran dan analisis sumber-sumber tertulis yang ada, yang mencakup berbagai teori, temuan penelitian, dan argumen yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan dengan topik partisipasi dan demokratisasi informasi di era *Society* 5.0. Sumber-sumber ini meliputi jurnal akademik yang memberikan landasan teoritis dan empiris dari penelitian sebelumnya, laporan pemerintah yang menawarkan pandangan resmi dan kebijakan terkait dengan penerapan *Society* 5.0, serta artikel berita yang memberikan konteks dan perkembangan terbaru di lasagna (Bryman, 2019).

Dengan menggabungkan berbagai jenis sumber data ini, penelitian ini dapat menawarkan pandangan yang komprehensif dan mendalam mengenai isu partisipasi dan demokratisasi informasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan teknologi di era *Society* 5.0, serta mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis tetapi juga menawarkan wawasan praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat luas untuk mengoptimalkan manfaat teknologi digital dalam konteks sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan (Yin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi dan Aksesibilitas Informasi

Teknologi di era *Society* 5.0 memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet, seperti *smartphone*, komputer, dan perangkat IoT *(*Internet *of Things).* Dengan teknologi ini, informasi dapat diakses secara real-time, memungkinkan individu untuk mendapatkan data dan informasi yang mereka butuhkan kapan saja dan di mana saja. Misalnya, melalui aplikasi pendidikan online, siswa dapat belajar dari rumah, dan melalui platform kesehatan digital, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus pergi ke klinik. Kemajuan ini telah membuka pintu bagi banyak orang untuk mengakses layanan dan informasi yang sebelumnya sulit dijangkau.

Namun, meskipun potensi manfaatnya sangat besar, masih ada kesenjangan digital yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini. Kesenjangan digital merujuk pada perbedaan antara individu yang memiliki akses dan keterampilan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mereka yang tidak. Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan ekonomi, kurangnya infrastruktur teknologi, dan rendahnya literasi digital. Misalnya, di beberapa daerah

Hak Cipta © 2024, Annisarizki, Sigit Surahman.

pedesaan atau terpencil, akses ke internet mungkin masih terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, membuat penduduk di daerah tersebut tidak dapat menikmati manfaat dari teknologi digital (Forum, 2020).

Untuk mengatasi kesenjangan ini, strategi peningkatan literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis. Program pelatihan dan edukasi dapat diimplementasikan untuk membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Misalnya, kursus-kursus online gratis atau murah yang mengajarkan keterampilan dasar komputer dan internet dapat sangat membantu. Selain itu, inisiatif pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) dapat berperan penting dalam menyediakan akses dan pelatihan teknologi kepada kelompok yang kurang terlayani.

Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi yang merata juga harus menjadi prioritas. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa infrastruktur internet yang memadai tersedia di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil. Kebijakan yang mendukung pengurangan biaya akses internet dan perangkat teknologi juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas. Meskipun teknologi di era *Society* 5.0 memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses informasi, tantangan kesenjangan digital harus diatasi melalui strategi peningkatan literasi digital dan pembangunan infrastruktur yang inklusif. Hanya dengan begitu, semua lapisan masyarakat dapat benar-benar memanfaatkan manfaat dari kemajuan teknologi ini dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan digital (Surahman, 2024)

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta orang dan ribuan pulau yang tersebar luas, menghadapi tantangan unik dalam hal teknologi dan aksesibilitas informasi. Di era *Society* 5.0, yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital melalui teknologi canggih seperti *Internet of Things* (IoT) dan kecerdasan buatan (AI), potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses informasi yang lebih baik sangat besar.

Teknologi dan aksesibilitas informasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, tetapi masih ada tantangan besar yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat penuh dari era *Society* 5.0. Inisiatif pemerintah dan kerja sama dengan berbagai pihak merupakan kunci untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan literasi digital di seluruh negeri. Dengan upaya yang berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan terhubung, di mana informasi dan teknologi dapat diakses oleh semua orang. Dengan demikian artikel ini

Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan

Teknologi seperti *platform* partisipatif *online* memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga suara mereka dapat didengar dan dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan. *Platform*-partisipatif ini mencakup berbagai alat digital seperti situs web pemerintah interaktif, aplikasi *mobile*, forum diskusi *online*, dan sistem *e-voting* yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan, suara, atau saran secara langsung tentang isu-isu publik. Misalnya, di beberapa kota besar, pemerintah telah mengadopsi platform ini untuk mengundang partisipasi warga dalam perencanaan tata kota, anggaran partisipatif, dan konsultasi kebijakan, yang tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya.

Contoh kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi ini dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Di Estonia, misalnya, penggunaan

Hak Cipta © 2024, Annisarizki, Sigit Surahman.

platform e-governance memungkinkan warga untuk melakukan banyak interaksi dengan pemerintah secara online, mulai dari pemungutan suara hingga pengurusan dokumen resmi. Hal ini telah menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi dan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap pemerintah karena prosesnya lebih terbuka dan dapat diaudit. Di Brasil, *platform "Participatory Budgeting"* memungkinkan warga untuk memutuskan penggunaan sebagian dari anggaran kota, yang meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik dan memastikan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Namun, agar partisipasi yang efektif melalui teknologi ini dapat terwujud, diperlukan infrastruktur teknologi yang memadai. Infrastruktur tersebut mencakup akses internet yang cepat dan stabil, perangkat teknologi yang terjangkau, serta dukungan teknis yang memadai. Tanpa infrastruktur yang kuat, platform online tidak akan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi. Selain infrastruktur, kebijakan yang mendukung juga sangat penting. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung inklusi digital, seperti subsidi untuk akses internet, program pelatihan literasi digital, dan inisiatif untuk mengurangi kesenjangan digital (Tanaka, 2020).

Selain itu, keberhasilan partisipasi melalui *platform* digital juga tergantung pada adanya budaya partisipatif dalam masyarakat. Ini berarti masyarakat perlu didorong dan dilatih untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta memahami bagaimana cara menggunakan teknologi untuk berpartisipasi. Pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi publik dan cara-cara efektif untuk berkontribusi melalui *platform* digital dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, meskipun teknologi *platform* partisipatif online menawarkan peluang besar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kebijakan yang mendukung. Kombinasi antara teknologi yang canggih, infrastruktur yang kuat, dan kebijakan yang inklusif akan memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dan mendapatkan manfaat dari keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan publik.

Partisipasi dan demokratisasi informasi di era *Society* 5.0 di Indonesia telah menjadi semakin penting dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penggunaan teknologi, inisiatif *Open Government Data*, partisipasi dalam proyek *Smart City*, penggunaan media sosial, dan program pelatihan literasi digital, Indonesia bergerak menuju masyarakat yang lebih partisipatif dan informasi yang lebih demokratis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa masyarakat Indonesia dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memanfaatkan potensi teknologi untuk kesejahteraan bersama.

Tantangan dan Peluang

Meskipun teknologi menawarkan banyak peluang untuk mendemokratisasikan informasi, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam mengimplementasikan konsep ini secara efektif di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah masalah misinformasi yang sering kali menyebar luas melalui platform digital. Misinformasi dapat mengganggu pemahaman yang akurat tentang isu-isu penting dan merusak proses demokrasi dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemilihan umum, kebijakan publik, dan isu-isu sosial lainnya. Di samping itu, polarisasi masyarakat juga menjadi masalah serius yang muncul akibat penggunaan teknologi dalam menyebarkan informasi. Terkadang, platform media sosial menjadi tempat di mana pandangan ekstrem dipertegas dan perdebatan menjadi lebih tidak sehat.

Hak Cipta © 2024, Annisarizki, Sigit Surahman.

Tidak hanya itu, ketergantungan berlebihan pada teknologi juga dapat menjadi tantangan dalam mendemokratisasikan informasi di Indonesia. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses informasi antara mereka yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tidak. Terutama di daerah-daerah pedesaan atau daerah terpencil, di mana infrastruktur teknologi mungkin belum terlalu berkembang, ketergantungan pada teknologi dapat mengisolasi sebagian masyarakat dari arus informasi utama.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang terkait dengan mendemokratisasikan informasi di Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung dan memfasilitasi proses demokratisasi informasi. Ini termasuk memberlakukan regulasi yang mempromosikan keberagaman informasi, mencegah penyebaran misinformasi, dan menjamin akses yang lebih merata pada teknologi di seluruh negeri. Selain itu, pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan literasi digital di antara masyarakat dan memperluas akses infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Sementara itu, sektor swasta dapat turut berkontribusi dalam menanggapi tantangan ini dengan mengambil langkah-langkah konkret. Misalnya, perusahaan teknologi dapat berperan dalam mengembangkan algoritma yang lebih netral dan transparan untuk mengurangi risiko penyebaran konten yang tidak benar atau berbahaya. Selain itu, mereka dapat menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan produktif. Tetap melalui nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial, sektor swasta dapat menjadi mitra yang efektif dalam memastikan bahwa dampak teknologi terhadap demokratisasi informasi menjadi lebih positif yang dikedepakan.

Di sisi lain, masyarakat sipil memiliki peran kunci dalam membentuk pemandangan sosial terkait dengan penggunaan teknologi dan informasi. Mereka dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital dan kritis di kalangan masyarakat, sehingga individu memiliki kemampuan untuk memilah-milah informasi yang benar dan mengidentifikasi misinformasi. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat mengadvokasi untuk kebijakan yang mendukung demokratisasi informasi dan memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dalam penggunaan teknologi.

Dengan kolaborasi yang kuat dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, diharapkan bahwa tantangan-tantangan kompleks yang terkait dengan mendemokratisasikan informasi dapat diatasi secara efektif. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, potensi positif dari teknologi dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat dapat dimanfaatkan sepenuhnya di Indonesia, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berpengetahuan, dan terlibat dalam proses pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Era *Society* 5.0 membawa peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas partisipasi publik dan mendemokratisasikan akses terhadap informasi. Dengan kemajuan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *big data analytics*, ada potensi untuk menciptakan transformasi yang signifikan dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Teknologi ini dapat berperan sebagai alat yang memungkinkan partisipasi lebih luas dari berbagai segmen masyarakat, termasuk yang sebelumnya terpinggirkan, dalam proses pembuatan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Namun, untuk mewujudkan potensi positif ini, penting untuk memperhatikan bagaimana

Hak Cipta © 2024, Annisarizki, Sigit Surahman.

teknologi ini diimplementasikan dan diatur. Tanpa kerangka kerja yang tepat, teknologi yang canggih ini bisa saja meningkatkan kesenjangan digital dan sosial yang sudah ada. Misalnya, jika akses terhadap teknologi tidak merata, maka kemungkinan terjadinya kesenjangan. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada masalah privasi dan keamanan data, mengingat bahwa teknologi ini akan mengumpulkan jumlah data yang lebih besar dari sebelumnya. Tanpa perlindungan yang cukup, ada risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi individu.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam memanfaatkan teknologi ini secara etis dan inklusif. Penelitian ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, agar mencakup perspektif yang beragam dan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar dari Era *Society* 5.0 untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi semua warganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada FISIPKUM Universitas Serang Raya dan FIKOM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mendukung kolaborasi dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

Bryman. (2019). *Social Research Methods.* USA: Oxford University Press.

Diamond. (2023). *Developing democracy: Toward consolidation.* JHU Press.

Forum, W. E. (2020). *Bridging the Digital Divide*. Retrieved from World Economic Forum: https://www.weforum.org/reports/bridging-the-digital-divide

Fukuyama. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-centered Society. *Japan Spotlight*, 47-50.

Morikawa. (2020). The Role of AI and IoT in Society 5.0. *Journal of Information Processing and Management*, *63*(2), 25-30.

Miyamoto. (2019). Inclusive Innovation in the Era of Society 5.0. *International Journal of Innovation Management*, *23*(4), 1950034.

Nakanishi. (2019). Integrating AI and IoT for Smart Society. *Advanced Robotics*, *32*(1), 12-19.

Nakano. (2019). Society 5.0: Digital Transformation and Its Impacts. *Fujitsu Scientific and Technical Journal*, *55*(1), 8-13.

Rosenstone, S. J., & Hansen, J. M. (2023). *Mobilization, Participation, and Democracy in America.* New York: Longman.

Surahman, S. (2024). *Ekonomi Politik Media: Dinamika Interaksi Teknologi, Media, dan Kekuasaan Era 5.0.* Yogyakarta: Madani Berkah Abadi.

Surahman, S. (2024). *Memahami Kajian Media dan Budaya: Pendekatan Multidisipliner*. Jakarta: Kencana Media Prenada.

Tanaka. (2020). Building an Inclusive Society through Technological Innovation. *Journal of Social Policy and Technology*, *44*(2), 112-120.

Yamaguchi. (2020). Policy Framework for Society 5.0. *Journal of Policy Innovation*, *15*(3), 50-57.

Yin, R. K. (2020). *Case Study Research and Applications: Design and Methods.* London, New York, United Kingdom: Sage Publications.

Hak Cipta © 2024, Annisarizki, Sigit Surahman.

Kinerja Pemerintah dalam Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum di Bidang Distribusi dan Penanganan di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Arman, [1] Balada RAF [2], Indriana [3] dan Nindia Utami Djalali [4]
[1,2,3,4] Ichsan University Gorontalo, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin No 10, Kota Gorontalo. Boalemo96128
e-mail: armansospol@gmail.com (penulis korespondensi)

Abstrak

Di Kabupaten Boalemo mengalami tantangan signifikan dalam pengelolaan air bersih, terutama dalam hal distribusi dan penanganan gangguan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam memastikan kualitas pelayanan PDAM di Gorontalo, khususnya dalam aspek distribusi dan penanganan gangguan. Dengan tujuan Menilai Kualitas Pelayanan PDAM: Menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pedistribusi air dan penanganan gangguan pelayanan. Metode Penelitiannya dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode survei untuk memastikan akurasi dan relevansi dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan teknik pengambilan sampel melalui snowball sampling dengan cara survei online . Hasil penelitian ini mengungkap berbagai temuan penting terkait kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Boalemo di Provinsi Gorontalo, khususnya dalam aspek distribusi dan penanganan gangguan pelayanan air Kinerja Pemerintah menunjukkan bahwa pengawasan dan dukungan pemerintah terhadap PDAM masih kurang optimal. Banyak kendala administratif dan birokrasi yang menghambat efisiensi operasional PDAM. Dalam Kualitas Pelayanan PDAM Data survei menunjukkan bahwa banyak pelanggan mengalami ketidak merataan distribusi air, dengan beberapa daerah mendapatkan pasokan air yang sangat terbatas. Hal ini terutama terjadi di wilayah pinggiran kota dan pedesaan.

***Kata kunci** : Kinerja, Kualitas Pelayanan , Perusahaan Daerah, Di Kabupaten Boalemo provinsi Gorontalo.*

PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan air minum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Air minum yang bersih dan aman sangat vital untuk kesehatan masyarakat dan kesejahteraan umum. Kabupaten Boalemo Di Provinsi Gorontalo, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memegang peranan penting dalam menyediakan layanan air minum kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi PDAM dalam mendistribusikan air serta menangani gangguan sangat bergantung pada dukungan dan kebijakan pemerintah daerah. Kinerja Pemerintah dalam Kualitas Pelayanan PDAM Distribusi Air Minum Pemerintah Di Kabupaten Boalemo telah melakukan investasi signifikan dalam memperbaiki dan memperluas jaringan pipa distribusi air.

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk berbagai fungsi hunian seperti air minum, memasak, sanitasi, dan irigasi. Air mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia yang sangat kompleks, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan kegiatan lainnya seperti beternak, berkebun, bercocok tanam, pengolahan makanan, budidaya

Hak Cipta © 2024, Arman, Balada RAF, Indriana dan Nindia Utami Djalali.

perikanan, dan perikanan.(Ningsih, Fitriani, and Hadinata 2023). Ini termasuk pemasangan pipa baru, perbaikan pipa yang bocor, serta pembangunan reservoir tambahan untuk memastikan ketersediaan air di berbagai wilayah. Pemeliharaan: Pemeliharaan rutin dan berkala menjadi fokus utama untuk memastikan tidak ada gangguan distribusi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan infrastruktur PDAM.

Mengidentifikasi sumber daerah aliran sungai yang rentan terhadap perubahan hidrologi pasca kebakaran hutan adalah penting untuk melindungi pasokan air minum masyarakat dari risiko kontaminasi yang dapat menyebabkan gangguan layanan(Robinne et al. 2019). Perlu adanya Inovasi Teknologi terbaru seperti sistem monitoring distribusi secara real-time dan penggunaan sensor untuk mendeteksi kebocoran telah membantu dalam meningkatkan efisiensi distribusi air. PDAM adalah organisasi pelayanan publik yang menyediakan air bersih untuk masyarakat.(Maulana and Rusindiyanto 2024). Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi kewajiban pemerintah yang harus direalisasikan dengan benar. Pemerintah merupakan pihak penting dalam penyelenggaraan kepentingan publik bagi masyarakat. Kebutuhan pelayanan publik akan melibatkan dua aktor, yaitu negara sebagai penyedia pelayanan publik dan individu warga negara sebagai penerima yang menikmati pelayanan publik.(Berlinda Putri et al. 2022). Penanganan Gangguan dengan Respons Cepat, pemerintah daerah telah mendirikan pusat layanan pelanggan yang beroperasi untuk menerima laporan gangguan. Ini memungkinkan PDAM untuk merespon dan menangani gangguan dengan cepat. Dapat dilakukan Pelatihan SDM Tenaga kerja PDAM diberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani berbagai jenis gangguan, baik teknis maupun non-teknis. Dengan Sistem Informasi manajemen untuk melacak laporan gangguan, progres perbaikan, dan penyelesaian masalah membantu dalam pengelolaan penanganan gangguan secara lebih efektif dan efisien.

Dengan melihat Tantangan yang Dihadapi Keterbatasan Anggaran Meskipun ada dukungan dari pemerintah, keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala dalam perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur secara optimal. Tingkat Kebocoran Tinggi Kebocoran air yang tinggi dalam jaringan pipa masih menjadi masalah utama, yang membutuhkan perhatian dan solusi lebih lanjut. Selain distribusi dan gangguan, memastikan kualitas air tetap baik selama proses distribusi juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah harus memastikan bahwa air yang sampai ke konsumen bebas dari kontaminan. Konsumen wajib diperhatikan kepentingannya supaya tidak selalu berada dipihak yang dirugikan(Negara and Lemes 2019).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah dalam Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum di Bidang Distribusi dan Penanganan Di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, untuk itu Belum ada studi komprehensif yang mengukur tingkat kepuasan pelanggan secara berkala terhadap layanan distribusi air oleh PDAM di Kabupaten Boalemo. Penelitian Diperlukan Survei dan analisis data kepuasan pelanggan untuk menilai perubahan dalam persepsi masyarakat dari waktu ke waktu serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kurangnya data mengenai efisiensi distribusi air, termasuk kehilangan air selama distribusi dan penyebabnya.Penelitian Diperlukan Studi teknis untuk mengukur tingkat kehilangan air, identifikasi infrastruktur yang membutuhkan perbaikan, dan rekomendasi untuk peningkatan efisiensi distribusi. Minimnya penelitian tentang pengelolaan sumber daya air yang digunakan oleh PDAM, termasuk sumber air baku dan keberlanjutannya, kebaruan dalam penelitian mengenai kinerja pemerintah dalam kualitas pelayanan

Hak Cipta © 2024, Arman, Balada RAF, Indriana dan Nindia Utami Djalali.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, menggunakan metode survei yang terstruktur dan analisis data untuk mengukur kepuasan pelanggan secara berkala. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang mungkin bersifat kualitatif atau ad-hoc, penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif yang sistematis untuk mengidentifikasi tren dan pola kepuasan pelanggan. Mengevaluasi sumber daya air yang ada dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim dan pengelolaan berkelanjutan. Penelitian ini memperkenalkan pendekatan ekologi dan manajemen lingkungan dalam konteks lokal, yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. kebaruan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek Meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional PDAM, serta kepuasan pelanggan secara Akademis Menambah literatur ilmiah dengan temuan-temuan baru yang relevan dalam konteks pengelolaan air minum di daerah tertentu.

Melibatkan sektor swasta dalam investasi infrastruktur dan pengelolaan dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan efisiensi. Kampanye kesadaran kepada masyarakat mengenai penggunaan air yang efisien dan pelaporan gangguan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kualitas layanan air. Kita lihat Kualitas air minum masih menjadi tantangan yang terus-menerus terjadi di wilayah regional dan terpencil di Australia. Kami meninjau pelaporan publik oleh 177 perusahaan utilitas dan melakukan penilaian nasional atas pelampauan yang dilaporkan terhadap nilai-nilai pedoman berbasis kesehatan dan estetika dari Pedoman Air Minum Australia (ADWG(Wyrwoll et al. 2022) dan Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan Perumda Air Minum Tirta Moedal sudah baik, dengan nilai rata-rata kinerja 3.5 dari skala penilaian. Dimensi yang harus diperbaiki adalah responsiveness dan empathy. Pada atribut proses penanganan saat ada keluhan, informasi saat ada maintenance, kecepatan merespon keluhan konsumen, pegawai mendengarkan keluhan konsumen, dan layanan konsultasi dan pengaduan untuk konsumen. (Nuswantoro and Nuswantoro 2024).

Dengan Pemerintah daerah perlu melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap kinerja PDAM untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa standar pelayanan terus ditingkatkan. Pemerintah Di Kabupaten Boalemo memiliki peran penting dalam memastikan kualitas pelayanan PDAM, terutama dalam distribusi dan penanganan gangguan. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, respons terhadap gangguan, dan inovasi teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, PDAM, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai pelayanan air minum yang optimal dan berkelanjutan di Gorontalo.

METODE

Metode Penelitiannya dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode survei untuk memastikan akurasi dan relevansi dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan teknik pengambilan sampel melalui snowball sampling dengan cara survei online. Data-data diperoleh melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat 9 unsur yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat yaitu:

Hak Cipta © 2024, Arman, Balada RAF, Indriana dan Nindia Utami Djalali.

1. Persyaratan
2. Sistem mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Waktu penyelesaian
5. Produk spe-sifikasi jenis pelayanan,
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana (Nafi'ah and Tukiman 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder(Aprilia, Ati, and Sekarsari 2020) Dan Pengolahan air limbah menjadi semakin penting karena berkurangnya sumber daya air, meningkatnya biaya pembuangan air limbah, dan peraturan pembuangan yang lebih ketat sehingga menurunkan tingkat kontaminan yang diizinkan dalam aliran limbah(Crini et al. 2019). Dengan sampel 14 orang pegawai PDAM Sementara itu, banyaknya sampel pelanggan PDAM sebanyak 86 orang. Sejalan dengan itu lokasi penelitian ini Perusahaan Daerah Air Minum di Bidang Distribusi dan Penanganan Di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan total sampel 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Boalemo di Provinsi Gorontalo, khususnya dalam bidang distribusi dan penanganan gangguan, pemerintah daerah yang bergerak dibidang pengolahan air bersih serta memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air bersih. Dalam upaya peningkatan kualitas tersebut seringkali menemui kendala-kendala seperti kerusakan pada mesin, kerusakan pada fasilitas produksi dan cara pengolahan bahan kimia yang dapat mengakibatkan kebocoran sistem produksi yang mempengaruhi kualitas produk, dan juga terdapat faktor-faktor risiko yang mengancam hal tersebut.(Putri 2020). Sejalan dengan itu kita lihat model summarynya pada pengolahan data IBM SPSS Statistics 29.0.0.0. Kinerja Pemerintah dalam Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum di Bidang Distribusi dan Penanganan Gangguan Kabupaten Boalemo provinsi Gorontalo.

Tabel 1. Model summary

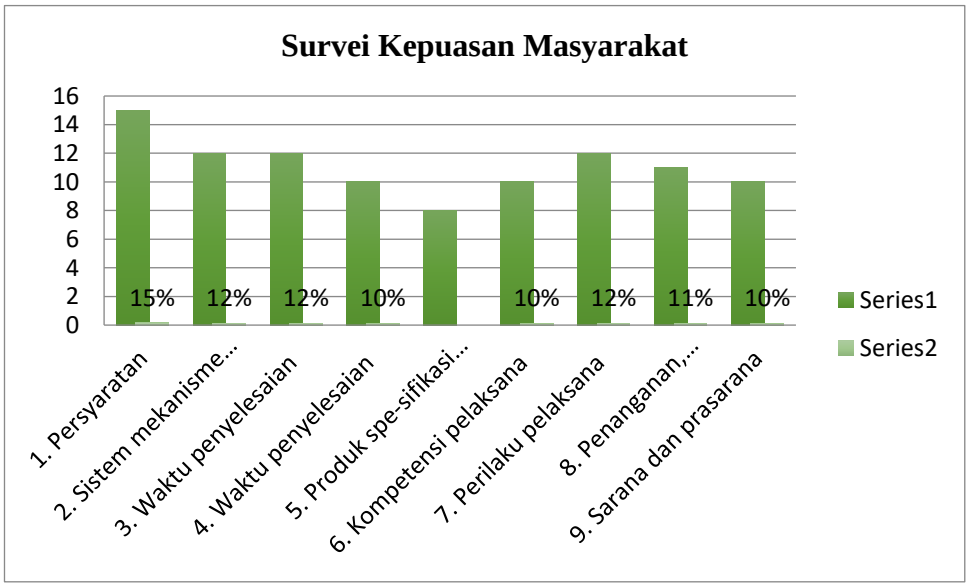
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685[a]	.469	.403	1.120

a. Predictors: (Constant Kinerja Pemerintah)

Hak Cipta © 2024, Arman, Balada RAF, Indriana dan Nindia Utami Djalali.

Melihat tabel di atas model summarynya dimana Kinerja Pemerintah atau hubungan R yaitu sebesar nilai .685 dan di jelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar . 469 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas(Kinerja Pemerintah dalam Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum di Bidang Distribusi dan Penanganan Gangguan Kabupaten Boalemo provinsi Gorontalo) adalah sebesar 46,9 % serta sedangkan sisanya 53,1 di pengaruhui faktor lain di luar variabel X. Terkait dengan hal tersebut. Sehingga dapat kita lihat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat 9 unsur yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat yaitu.



Dari tabel ini, terlihat bahwa aspek persyaratan mendapatkan perhatian tertinggi dengan 15%, diikuti oleh sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, dan perilaku pelaksana yang masing-masing memiliki persentase tinggi. Produk spesifikasi jenis pelayanan mendapat skor terendah, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk fokus peningkatan pada aspek ini. Semua aspek lainnya berada pada kisaran yang cukup penting (10-12%), menunjukkan bahwa setiap elemen dinilai cukup signifikan dalam kinerja pelayanan secara keseluruhan. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa ada beberapa area yang kuat dalam pelayanan PDAM, namun beberapa aspek lain, terutama produk spesifikasi jenis pelayanan, memerlukan perhatian dan peningkatan untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik.

Data yang diperoleh melalui survei lapangan, wawancara dengan pemangku

Hak Cipta © 2024, Arman, Balada RAF, Indriana dan Nindia Utami Djalali.

kepentingan, dan analisis dokumen internal PDAM menunjukkan beberapa temuan utama Pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan infrastruktur distribusi air melalui berbagai proyek pengembangan. Misalnya, penambahan jaringan pipa baru di daerah-daerah yang sebelumnya belum terlayani. Kualitas air yang didistribusikan telah memenuhi standar yang ditetapkan, meskipun masih ditemukan beberapa kasus kontaminasi ringan yang segera ditangani oleh tim PDAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Faucety(Abidin, Asmiddin, and Rasmuin 2022).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pembahasan lebih mendalam dapat dilakukan dengan menyoroti beberapa aspek penting dalam kinerja pemerintah terkait pelayanan PDAM Pengembangan Infrastruktur Investasi besar dalam infrastruktur telah memberikan dampak positif yang signifikan, meningkatkan cakupan layanan dan stabilitas pasokan air. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala, terutama dalam hal pemeliharaan rutin dan penggantian infrastruktur yang sudah tua. Keberhasilan Pemasangan teknologi deteksi kebocoran telah membantu mengidentifikasi masalah lebih cepat dan mengurangi kebocoran secara signifikan dalam beberapa area. Keberhasilan Pemerintah dan PDAM telah berhasil menjaga kualitas air sesuai standar kesehatan, meskipun ada beberapa insiden kontaminasi yang cepat ditangani. Memastikan kualitas air yang konsisten memerlukan monitoring yang lebih ketat dan peningkatan fasilitas pengolahan air.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	Kualitas Pelayanan	42.757	6.350		6.733	<.001
		-.547	.206	-.685	-2.659	.029

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan

Nilai konstanta sebesar 42.757 menunjukkan pengaruh positif variabel independen Kualitas Pelayanan). Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan maka variabel Kinerja Pemerintah di rektur turun atau tidak terpenuhi -.547. Dari implikasi administrasi publik teori dan aplikasi tersebut yang sangat penting adalah kepemimpinan yaitu kepemimpinan Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pendekatan itu berupaya memperkaya teori dan realitas kepemimpinan pelayanan publik yang sudah berjalan. Nilai konstanta sebesar 42.757 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (Kualitas Pelayanan) bernilai nol, maka nilai variabel dependen (Kinerja Pemerintah) akan berada pada nilai 42.757. Ini adalah titik awal (baseline) dari Kinerja Pemerintah saat tidak ada pengaruh dari Kualitas Pelayanan.

Hak Cipta © 2024, Arman, Balada RAF, Indriana dan Nindia Utami Djalali.

Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan menunjukkan adanya hubungan negatif antara Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pemerintah. Ini bisa menjadi indikasi bahwa ada variabel lain yang belum teridentifikasi yang mempengaruhi hubungan ini atau bahwa ada ketidakseimbangan dalam pengukuran. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami mengapa peningkatan Kualitas Pelayanan tidak berbanding lurus dengan peningkatan Kinerja Pemerintah. Mungkin ada kebutuhan untuk memperbaiki aspek-aspek lain dalam sistem pelayanan . Dalam konteks penelitian di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hasil ini bisa mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya peningkatan dalam Kualitas Pelayanan PDAM, dampaknya belum terlihat positif pada Kinerja Pemerintah. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk manajemen, regulasi, sumber daya manusia, atau teknologi yang belum optimal. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan Kualitas Pelayanan belum tentu langsung meningkatkan Kinerja Pemerintah, dan mungkin diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan integratif untuk mencapai perbaikan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan PDAM di Di Kabupaten Boalemo menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan penanganan gangguan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, tingkat kebocoran yang tinggi, dan menjaga kualitas air secara konsisten masih memerlukan perhatian lebih. Kolaborasi antara pemerintah, PDAM, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pelayanan air minum yang optimal dan berkelanjutan. Dalam Peningkatan Infrastruktur Distribusi Pemerintah Di Kabupaten Boalemo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan infrastruktur distribusi air minum. Dengan Sistem penanganan gangguan yang diimplementasikan oleh PDAM, dengan dukungan pemerintah, menunjukkan efektivitas yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penelitian ini Pemerintah Di Kabupaten Boalemo Terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan selama penelitian ini berlangsung. Dukungan Anda sangat berarti dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan, berterima kasih kepada seluruh staf dan manajemen PDAM Boalemo yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara, memberikan akses kepada dokumen internal, serta membantu dalam survei lapangan. Masyarakat Boalemo yang telah bersedia berpartisipasi dalam survei dan memberikan pandangan serta masukan yang sangat berharga bagi penelitian ini. Para Peneliti dan Tim Pendukung Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim peneliti dan staf pendukung yang telah bekerja keras, baik dalam pengumpulan data, analisis, maupun penyusunan laporan ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan air minum di Di Kabupaten Boalemo dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Hak Cipta © 2024, Arman, Balada RAF, Indriana dan Nindia Utami Djalali.

REFERENSI

Abidin, La Ode Zainal, Asmiddin, and Rasmuin. 2022. "The Effect of Service Quality and Employee Education Type on Customer Satisfaction in Buton Regency Regional Drinking Water Company (PDAM) Informasi Artikel Abstrak Print ISSN : 2302-254X." *Administratio: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 11(1):65–74.

Aprilia, Sintia, Nurul Ati, and Retno Sekarsari. 2020. "Analisis Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Dampit Dalam Menanggapi Pengaduan Masyarakat." *Jurnal Respon Public* 14(5):1–13.

Berlinda Putri, Shava, M. Husn. Tamrin, Sri Wahyuni, and Budi Rianto. 2022. "Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Di Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Kabupaten Gresik." *Jurnal Administrasi Publuk Dan Ilmu Komunikasi* 9(1):1–9. doi: 10.55499/intelektual.v9i1.60.

Crini, Grégorio, Eric Lichtfouse, Lee D. Wilson, and Nadia Morin-Crini. 2019. "Conventional and Non-Conventional Adsorbents for Wastewater Treatment." *Environmental Chemistry Letters* 17(1):195–213. doi: 10.1007/s10311-018-0786-8.

Maulana, Alfin B., and Rusindiyanto Rusindiyanto. 2024. "Analisis 5 Dimensi Kualitas Pelayanan Pdam Surya Sembada Kota Surabaya Terkait Keluhan Distribusi Air Bersih Terhadap Kepuasan Pelanggan." 2:264–74.

Nafi'ah, Zumrotun, and Tukiman Tukiman. 2022. "Kualitas Pelayanan Pelanggan Di Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam)." *Jurnal Kebijakan Publik* 13(3):252. doi: 10.31258/jkp.v13i3.8022.

Negara, I. Gede Punia, and I. Nyoman Lemes. 2019. "Upaya Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng." *Kertha Widya* 7(1):49–70. doi: 10.37637/kw.v7i1.402.

Ningsih, Wahyu, Heni Fitriani, and Febrian Hadinata. 2023. "Analysis of Technical Evaluation and Customer Satisfaction of Clean Water Services (Case Study: PDAM Lematang Enim at Muara Enim Regency, South Sumatra, Indonesia)." *Scientific Review Engineering and Environmental Sciences* 32(3):255–69. doi: 10.22630/srees.4856.

Nuswantoro, Universitas Dian, and Universitas Dian Nuswantoro. 2024. "Perbaikan Kualitas Pelayanan Dengan Metode Integrasi Servqual Dan Diagram Kartesius Di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Semarang." 2(2).

Putri, Indah Novianti. 2020. "Analisis Risiko Kegagalan Produk Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Menggunakan House Of Risk Dan Supply Chain Operations Reference." *Jurnal Optimasi Teknik Industri* 02(01):19–23.

Robinne, François Nicolas, Kevin D. Bladon, Uldis Silins, Monica B. Emelko, Mike D. Flannigan, Marc André Parisien, Xianli Wang, Stefan W. Kienzle, and Diane P. Dupont. 2019. "A Regional-Scale Index for Assessing the Exposure of Drinking-Water Sources to Wildfires." *Forests* 10(5):1–21. doi: 10.3390/f10050384.

Wyrwoll, Paul R., Ana Manero, Katherine S. Taylor, Evie Rose, and R. Quentin Grafton. 2022. "Measuring the Gaps in Drinking Water Quality and Policy across Regional and Remote Australia." *Npj Clean Water* 5(1):1–14. doi: 10.1038/s41545-022-00174-1.

Hak Cipta © 2024, Arman, Balada RAF, Indriana dan Nindia Utami Djalali.

Strategi Pengembangan Layanan Akses Informasi Perpustakaan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Avista Rahmadhani Hendraningtias [1], Lolytasari [2].
[1]Mahasiswa Program Studi Perpustakaan, Fakultas Hukum IIlmu Sosial dan Politik
Universitas Terbuka
[2]Dosen Program Studi Perpustakaan, Fakultas Hukum IIlmu Sosial dan Politik
Universitas Terbuka
E-mail: aviztarahma@gmail.com

Abstrak

Strategi pengembangan layanan informasi sangat penting dilakukan oleh perpustakaan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi. Peran perpustakaan menjadi bagian utama dalam memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan mudah dan efisien oleh semua kalangan. Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta sebagai salah satu jenis perpustakaan khusus berperan dalam menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah serta masyarak at. Artikel ini bertujuan untuk mengindentifikasi Strategi pengembangan layanan akses informasi pada perpustakaan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugapimpinan serta pengunjung perpustakaan,mendokumentasikan kegiatan,observasi langsung terhadap kondisi layanan yang ada serta melakukan kajian pustaka sesuai dengan permasalahan peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 3 strategi pengembangan layanan akses informasi pada perpustakaan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta yaitu : (1) Perbaikan Sistem Akses Layanan Perpustakaan, (2) Memberikan fasilitas Konsultasi data informasi Statistik dan Pembuatan Jadwal Piket Pelayanan (3) Menjadikan media sosial sebagai sarana berbagi informasi statistik. Implementasi dari strategi pengembangan layanan informasi meningkatkan aksesibilitas dan memberikan kontribusi layanan akses seluasnya kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Layanan akses informasi, Perpustakaan Khusus, Pengembangan Akses Informasi*

PENDAHULUAN

Strategi pengembangan layanan informasi sangat penting dilakukan oleh perpustakaan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi. Kemudahan akses dalam memberikan layanan informasi akan membuat masyarakat merasa nyaman. Sebagai pusat pengetahuan, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan berbagai jenis literatur, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan individu dengan berbagai sumber informasi yang relevan dan bermanfaat. Era digital saat ini, peran perpustakaan menjadi bagian utama dalam memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan mudah dan efisien oleh masyarakat secara luas.

Perpustakaan menjadi pusat penting bagi masyarakat khususnya para akademisi, untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam menemukan dan memperluas referensi menyelesaikan tugas akhir mereka seperti skripsi (Amri, 2020). Perkembangan yang cepat dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk struktur dan fungsi perpustakaan. Perubahan TIK tersebut akan mempengaruhi kualitas dan kecepatan pada pelayanan peprustakaan.

Hak Cipta © 2024, Avista Rahmadhani Hendraningtias, Lolytasari.

Perpustakaan bisa dijadikan sebagai tempat penyedia layanan yang dibutuhkan penggunanya untuk mengakses informasi. Sehingga, perpustakaan harus memenuhi kebutuhan (need) dan keinginan (want) pemustaka/ pengguna perpustakaan dimanapun dan kapanpun dibutuhkan (Khotijah dkk., 2022).Layanan perpustakaan merupakan layanan yang mempertemukan langsung antara pustakawan dengan pemustakanya (Wahyuntini & Endarti, 2021: 5). Kemudahan akses dalam pelayanan merupakan hal yang penting. Citra keberhasilan perpustakaan dalam menjalankan fungsinya ditentukan oleh kinerja layanan perpustakaan kepada pemustaka.

Dalam megembangkan pelayanan perpustakaan membutuhkan strategi agar informasi yang disediakan dapat diakses oleh masyarakat. Menurut (Ridwan, 2023) "Strategi Pengembangan perpustakaan merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas perpustakaan dalam bidang sumber daya manusia, sistem layanan, koleksi, dan fasilitas pendukung lainnya yang harus diperhatikan guna melakukan pengembangan perpustakaan agar dapat berkembang"

Salah satu jenis perpustakaan menurut Undang- Undang No. 43 Tahun 2007 adalah perpustakaan khusus yaitu perpustakaan yang menyediakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungnya. Perpustakaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Perpustakaan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. Dikutip dari website PPID BPS (RI, n.d.) menyebutkan bahwa "Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang memiliki peran menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah serta masyarakat. BPS sebagai lembaga memiliki fungsi sebagai sumber utama data statistik resmi dan memiliki tanggung jawab untuk mendiseminasikan data untuk pengguna umum. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di BPS yang dikelola oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Diseminasi ialah fase dari proses kegiatan statistik dimana data yang telah dikumpulkan dan dikompilasi oleh lembaga statistik, dirilis kepada publik untuk digunakan. Setiap BPS pada kabupaten/kota memiliki fasilitas PST namun tidak dikembangkan menjadi perpustakaan. BPS Kota Yogyakarta melakukan gebrakan dengan menggabungkan layanan PST dengan layanan Perpustakaan

Salah satu fasilitas dari BPS Kota Yogyakarta yang bertugas menyediakan layanan untuk mendiseminasikan data adalah unit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik. Unit ini bertanggung jawab untuk menangani informasi yang dihasilkan dari kegiatan perstatistikan dan diarsipkan dalam berbagai bentuk. Hasil statistik tersebut kemudian disajikan melalui publikasi. Pelayanan Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta dilakukan secara dua metode yaitu Pelayanan secara online melalui website dengan akses data softfile dan Pelayanan secara langsung dengan akses data secara tercetak.

Informasi strategis penting yang perlu diketahui oleh masyarakat seperti kemiskinan, jumlah penduduk dan inflasi yang disediakan oleh BPS untuk memberikan dampak keputusan dan pembangunan. Berbagai publikasi data akan lebih maksimal termanfaatkan jika khalayak mengetahui strategi pengembangan layanan perpustakaan BPS Kota Yogyakarta. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elis Heni

Hak Cipta © 2024, Avista Rahmadhani Hendraningtias, Lolytasari.

Nurhasanah dengan judul "Pengembangan Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah Badan Pusat Statistik" menyatakan bahwa BPS mengembangkan perpustakaannya dengan terlebih dahulu memiliki fokus yang kuat untuk berorientasi layanan pada publik berdasarkan Undang-Undang keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi. Dari penelitian tersebut penulis ingin juga ingin mengetahui lebih dalam layanan yang ada di Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi pengembangan layanan yang dilakukan Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta dalam memberikan akses layanan Informasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi ke Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta untuk mengetahui keadaan secara langsung. Selain itu penulis jgga melakukan wawancara dengan pimpinan BPS Kot Yogyakarta serta pengunjung perpustakaan. Kajian ditulis dan dianalisis secara deskriptif dengan melakukan kajian pustaka sesuai dengan permasalahan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta menghasilkan statistik resmi berupa data dan informasi statistik. Data statistik tersebut diperoleh dari kegiatan statistik berupa sensus, survay serta kompilasi produk administrasi. Dari kegiatan tersebut Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta mempunyai tanggung jawab untuk mengelola serta melayankan koleksi publikasi yang telah diterbitkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut adalah strategi pengembangan layanan akses informasi perpustakaan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta:

1. Perbaikan Akses Sistem Layanan Perpustakaan

Perbaikan akses layanan perpustakaan merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta. Perpustakaan tercetak adalah layanan informasi yang berisi koleksi tercetak seperti buku, *leaflet, booklet* serta referensi penunjang kegiatan statistik sejak tahun 1980an sampai sekarang . Awalnya koleksi publikasi yang ada diperpustakaan tidak tertata sesuai kategori. Penataan buku yang tidak rapi membuat pemustaka kesulitan dalam menemukan informasi yang mereka cari. Pemustaka juga dibebaskan mengakses publikasi pada rak yang belum ada katalognya. Pelayanan seperti ini banyak dikeluhkan oleh pemustaka karena mereka bingung dalam menemukan data.

Pengolahan buku yang diklasifikasikan sesuai dengan jenis kegiatan statistik merupakan langkah perbaikan dari strategi pengembangan koleksi. Penambahan pegawai pustakawan yang ahli dalam bidangnya juga merupakan nilai tambah bagi Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta karena tidak setiap perpustakaan BPS yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pustakawan seperti yang dinyatakan oleh Kepala BPS

Hak Cipta © 2024, Avista Rahmadhani Hendraningtias, Lolytasari.

Kota Yogyakarta *"Dengan adanya penambahan pustakawan dari BPS Pusat ini memberikan nilai tambah dan perbaikan bagi akses layanan publikasi kita karena mengusai pengolahan serta pelayanan pustaka dalam bidangnya."*

Setelah melakukan penataan dan pengolahan koleksi Perpustakaan melakukan strategi pengembangan berupa sistem akses layanan perpustakaan secara terbuka dan tertutup. Pada sistem layanan terbuka pemustaka bebas mengakses publikasi secara langsung sesuai dengan kebutuhan informasi mereka. Layanan ini untuk mengakses publikasi yang rutin setiap tahun terbit seperti daerah Kota Yogyakarta dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Hasil survai kepuasan pengguna, angka kemiskinan, pengganggguran dan lain sebagainya. Karena perpustakaan BPS Kota Yogyakarta merupakan perpustakaan khusus maka semua koleksi publikasi tidak boleh dipinjamkan. Jika ada pemustaka yang membutuhkan data maka mereka hanya boleh *mencopy* maksimal 5 halaman saja. Yang kedua yaitu akses layanan publikasi secara tertutup.Akses Layanan tertutup adalah bentuk pelayanan yang memberikan akses terbatas kepada pengunjung melalui pustakawan. Pengunjung tidak bisa secara langsung mencari publikasi pada rak namun harus memberitahu pustakawan data apa yang mereka butuhkan. Layanan ini bersifat terbatas pada koleksi yang sudah berumur 90an keatas. Layanan tertutup ini diberikan pada terbitan koleksi lama agar tidak mudah rapuh dan rusak karena sering diakses oleh pengunjung. Proses untuk mendapatkan data pada koleksi ini juga hanya boleh difoto tanpa menggunakan *flash* atau lampu kamera .

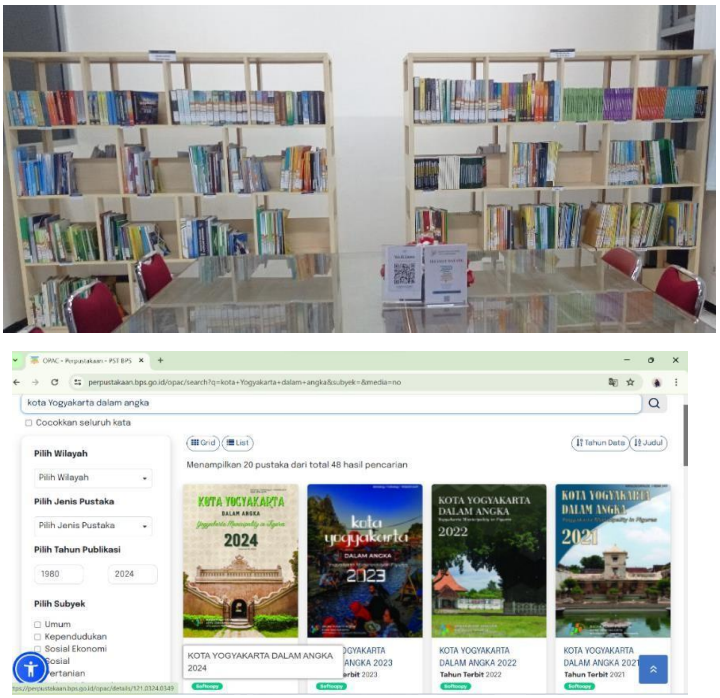
Dari perbaikan akses layanan pada perpustakaan tercetak, Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta melakukan strategi pengembangan dengan memberikan kemudahan akses layanan koleksi publikasi secara digital. Layanan perpustakaan digital BPS Kota Yogyakarta adalah jenis layanan yang diberikan kepada pengunjung berupa layanan *online* yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja untuk mengunduh ataupun mencari data dalam bentuk *softcopy*. Fasilitas yang diberikan kepada pengunjung dalam layanan perpustakaan digital adalah layanan file elektronik yang dapat diunduh secara gratis. Walaupun dapat diunduh secara gratis namun pengunjung tidak diperbolehkan untuk menyalin softcopy publikasi kedalam media apapun. Ada dua alamat website untuk dapat mengakses koleksi pustaka elektronik. Pertama yaitu dari website BPS Kota Yogyakarta yang beralamat pada link https://jogjakota.bps.go.id/. Pada website tersebut pengunjung dapat mengakses semua koleksi pustaka secara digital yang dipublikasikan oleh BPS Kota Yogyakarta. Untuk mencari data pengunjung hanya perlu memasukkan kata kunci sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan setelah itu mereka diminta untuk memasukkan alamat email untuk dapat mengunduh koleksi. Selain fitur publikasi yang dapat dakses secara digital, Pada website BPS Kota Yogyakarta juga terdapat informasi tabel dinamis serta tabel statis yang membuat data informasi strategis pada wilayah Kota Yogykarta dinamis. Yang kedua yaitu laman perpustakaan digital pada website Perpustakaan

BPS Pusat. Layanan ini dapat diakses pada https://perpustakaan.bps.go.id/opac/ . OPAC BPS merupakan layanan perpustakaan digital yang terintegrasi dengan seluruh terbitan publikasi BPS seluruh Indonesia termasuk peprustakaan BPS Kota Yogyakarta.

Hak Cipta © 2024, Avista Rahmadhani Hendraningtias, Lolytasari.

Untuk dapat mengakses layanan publikasi pada laman OPAC

Perpustakaan BPS pengunjung perlu membuat akun terlebih dahulu dengan mendaftarkan email agar dapat masuk dan mengakses seluruh publikasi BPS.



Gambar 1. Layanan Perpustakaan Tercetak dan digital Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta
Dokumentasi Pribadi, 2024

Dari pegembangan layanan perpustakaan tercetak menjadi layanan perpustakaan digital memudahkan akses informasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat tidak lagi harus datang ke perpustakaan BPS Kota Yogyakarta namun informasi sudah bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Perpustakaan BPPS Kota Yogyakarta selalu melakukan evaluasi terhadap pengembangan akes layanan informasi secara tercetak ataupun digital.

2. Memberikan fasilitas Konsultasi data informasi Statistik dan Pembuatan Jadwal Piket Pelayanan

Strategi pengembangan perpustakaan BPS Kota Yogyakarta yang kedua agar masyarakat mudah melakukan akses informasi yaitu dengan memberikan fasilitas layanan konsultasi serta pembuatan Jadwal Piket Pelayanan. Layanan Konsultasi statistik adalah layanan yang menjawab serta menjelaskan pertanyaan pemustaka terkait konsep dan definisi statistik metodologi sensus dan survey, cara penghitungan indikator dan variabel statistik. Selain itu pertanyaan terkait cara mengakses informasi statistik juga ada pada pelayanan ini. Ada dua cara pemustaka dapat dapat mengakses layanan ini yaitu :

Hak Cipta © 2024, Avista Rahmadhani Hendraningtias, Lolytasari.

a. Pemustaka Datang Langsung ke PST BPS Kota Yogyakarta

Pemustaka bisa datang langsung ke PST BPS Kota Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan pustakawan. Pemustaka hanya perlu mengisi buku tamu dengan membawa kartu identias serta surat permohonan izin konsultasi atau permintaan data. Dengan bantuan konsultasi dengan pustakawan secara langsung diharapkan pemustaka dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka cari seperti yang dikatakan oleh pustakawan berikut ini

" Dengan memberikan konsultasi secara langsung dengan pemustaka diharapkan dapat meningkatkan strategi pengembangan akses layanan informasi kepada mereka agar tidak



ada kesulitan dalam mengakses data. Selain itu sebagai wujud sharing knowladge antara pustakawan dengan pemustaka dalam meningkakan literasi informasi serta meningkatkan minat kunjung ke perpustakaan BPS Kota Yogyakarta"

Gambar 2. Layanan Konsultasi Statistik Secara langsung
Dokumentasi Pribadi, 2024

b. Melalui Aplikasi *LiveChat* dan *Email.*

Layanan konsultasi statistik dilakukan secara online melalui Aplikasi *Livechat* dan *email* pada *webiste* BPS Kota Yogyakarta. Konsultasi ini dilakukan secara daring oleh pemustaka. Layanan aplikasi *LiveChat* pada Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta selalu tampil pada *website* BPS Kota Yogyakarta ketika jam kerja yaitu hari Senin- Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB serta hari Jumat 08.00 – 16.00 WIB. Pada aplikasi ini pemustaka dapat secara daring bertanya terkait informasi data yang mereka butuhkan dan secara langsung akan dibalas oleh admin sehingga terjadi komunikasi dua arah. Yang kedua yaitu konsultasi melalui email. Pengunjung dapat menuliskan kebutuhan informasi data mereka melalui alamat email bps3471@bps.go.id Nantinya pertanyaan data atau konsultasi statistik mereka akan admin balas maksimal 2x 24 jam setelah email tersebut masuk. Layanan akses konsultasi online ini merupakan pengembangan dari layanan akses konsultasi secara langsung sehingga memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk mendapatkan informasi data yang mereka butuhkan secara jarak jauh.

Untuk memberikan pelayanan prima pada konsutasi statistik secara cepat

Hak Cipta © 2024, Avista Rahmadhani Hendraningtias, Lolytasari.

Perpustakaa BPS Kota Yogyakarta juga melakukan strategi pengembangan melalui pembentukan daftar piket pelayanan. Terdapat 2 unsur petugas piket pelayanan konsultasi statistik setiap harinya yaitu pustakawan dan pegawai BPS Kota Yogyakarta. Pustakawan bertugas sebagai petugas pelayanan untuk pemustaka yang ingin mencari data informaasi secara langsung dirak atau bertanya terkait data informasi statistik dasar.

Pegawai BPS Kota Yogyakarta bertugas untuk melayani pemustaka yang melakukan konsultasi statistik yang bersifat mendalam seperti penelitian ataupun metode survay yang akan digunakan oleh instansi pemerintah. Kerjasama antara pustakawan dan pegawai BPS Kota Yogyakarta mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat kepada masyarakat yang membutuhkan secara langsung.

3. Menjadikan media social sebagai sarana berbagi informasi statistik

Menjadikan media social sebagai sarana berbagi informasi statistik merupakan strategi pengembangan layanan akses informasi yang tepat untuk generasi anak muda zaman sekarang. Pemanfaatan media sosial instagram dan Facebook digunakan Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta untuk memberikan konten edukasi serta informasi data yang kepada masyarakat. Pembuatan konten berupa infografis yang diunggah pada media sosial memberikan informasi statistik secara visual yang menarik untuk dilihat tanpa harus membaca publikasi secara penuh. Media sosial instagram yang beralamat pada @bpsjogjakota dan facebook @ BPS Jogja Kota berperan sebagai jembatan penghubung antara BPS Kota Yogyakarta dengan pengunjung untuk menyebarkan infromasi. Banyaknya data yang kurang *terfilter* kebenaranya pada media sosial memberikan dampak berita *hoak*, sehingga Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta ingin lebih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui media sosial untuk mengedukasi terkait data yang valid.

KESIMPULAN

Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta sebagai perpustakaan khusus mempunyai tanggung jawab penyedia data kepada masyarakat. Strategi pengembangan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan informasi kepada pengunjung sudah dilakukan oleh BPS Kota Yogyakarta. Strategi pengembangan tersebut meliputi (1) Perbaikan Akses Sistem Layanan Perpustakaan. Pada perbaikan akses sstem sistem layanan Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta melakukan strategi pengembangan dari perpustakaan menjadi perpustakaan digital. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat yang membutuhkan informasi terkait data secara cepat dimana saja dan kapan saja. 2) Memberikan fasilitas Konsultasi data informasi Statistik dan Pembuatan Jadwal Piket Pelayanan. Layanan Konsultasi Statistik yang berguna untuk menjawab pertanyaan pemustaka lebih mendalam terkait kegiatan statistik. Layanan konsultasi statistik dapat diakses melalui dua cara yaitu konsultasi secara langsung dan secara online. Untuk mendukung kegiatan konsultasi statistik Perpustaaan BPS Kota Yogyakarta melakukan strategi pengembangan dengan pembuatan jadwal piket. Tujuan pembuatan jadwal piket ini untuk mempercepat konsultasi dan memberikan pelayanan prima pada pemustaka. 3) Menjadikan media social sebagai sarana berbagi informasi statistik. Layanan melalui

Hak Cipta © 2024, Avista Rahmadhani Hendraningtias, Lolytasari.

media sosial yaitu pengembangan strategi akses informasi yang sering diakses oleh kalangan anak muda zaman sekarang berisi konten infografis yang mudah difahami .Ketiga strategi pengembangan layanan tersebut terus dilakukan oleh Perpustakaan BPS Kota Yogyakarta untuk memberikan kemudahan serta kenyaman akses informasi kepada pengunjung. Diharapkan data informasi yang dipublikasikan oleh BPS Kota Yogyakarta memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan masyarakat dan penelitian di wilayah tersebut.

REFERENSI

Dhiah Ayu Pawastri. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan pada Perpustakaan di Badan Pusat Statistik

UNECE. (2018). Guidance on modernizing statistical leg islation. Geneva, Switzerland: United Nations.

Amri, Saeful, Ahmad Rifa'i, dan Mohammad Burhan Hanif. 2020. Peran Akses E-Skripsi untuk Mahasiswa Universitas Semarang Selama Perkuliahan Online. Information Science and Libary, 1 (2) 12-17

United Nations. (2021). Buku Pegangan Manajemen dan Organisasi Sistem Statistik Nasional. United Nations.

Statistik Kota Surabaya Journal of Public Sector Innovations, Vol. 4, No. 1, November Tahun 2019, (48-54) diakses dari https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/6456

Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemn, 11(2), pp. 165–178.

Rohan Ardi.(2022). Pembangunan Sistem Layanan Statistik Online Menggunakan Metode Waterfall pada Pelayanan Statistik Terpadu. JUSTIN Jurnal Vol.10,No.4 Otober 2022. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/view/47828/75676595690

Sutarno NS. Perpustakaan dan Masyarakat. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003). hal.7

Pemerintah Indonesia. Undang- Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta

Wahyuntini, S., & Endarti, S. (2021). Tantangan Digital dan Dinamisasi Koleksi Dalam Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Bagi Prestasi Belajar Mahasiswa. ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan, 1(1), 1–6.

RI, B. (n.d.). *Profil BPS*. Retrieved from Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : https://ppid.bps.go.id/app/konten/0000/Profil-BPS.html

Ridwan, R. N. (2023, Juli- Desember). STRATEGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI Di ERA DIGITAL (Studi UPT Perpustakaan UIN Mataram).

Hak Cipta © 2024, Avista Rahmadhani Hendraningtias, Lolytasari.

Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi , 15.

Khotijah, Koerniawati, & Lestari. (2022). *Pengaruh Promosi Perpustakaan melalui Media Sosial Instagram terhadap Pemanfaatan Perpustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Jurnal Perpustakaan, 10.

Hak Cipta © 2024, Avista Rahmadhani Hendraningtias, Lolytasari.

Implikasi Hukum Terhadap Batas Usia Capres dan Cawapres Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Bimo febriyanto[1], Hisyam Asyiqin[2]
[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka
E-mail: bimofebriyanto@gmail.com & hisyamasyiqin17@gmail.com

ABSTRAK

Dalam permohonan judial review yang diajukan oleh salah seorang mahasiswa yang telah diputuskan menimbulkan beberapa kejanggalan dalam menguji konstitusionalitas pasal 166 huruf (q) Undang-Undang Pemilu. Ada beberapa faktor yang membuat putusan ini menjadi kejanggalan bagi masyarakat dan beberapa pihak antara lain konteks politik dimana dengan batas waktu pendaftaran capres dan cawapres. Sehingga dalam artikel ini penulis bertujuan untuk dapat menganalisis dampak atau Implikasi Hukum yang timbul Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap batas usia Capres dan Cawapres, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber keputuskaan baik buku maupun jurnal terkait. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan adanya Implikasi Hukum dan ketidakpastian hukum akibat adaanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada pelaksanaan sistem politik demokrasi Indonesia sebagai mana terjadinya kemunduran pada Mahamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya independen dan tidak dapat diintervensi pihak manapun menjadi lembaga kalkulator.

Kata Kunci : Batas Usia, Capres dan Cawapres, Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia ialah sebuah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Dengan banyaknya penduduk yang ada dan bentuk pemerintahan yang menggunakan demokrasi sebagai proses pemerintahannya dan sistem politiknya maka dalam perjalanannya, indonesia memiliki proses-proses demokrasi dan sistem politik dalam menentukan sebuah regulasi atau pemilihan kepala negara, daerah, kota, kabupaten sampai dengan desa. Adapun menurut M. Fadhillah Hermawansyah *Sistem Politik Indonesia* (2019;hlm.13-14) menyimpulkan bahwa pengertian sistem politik ialah suatu hubungan/keterikatan antar manusia atau antar individu dengan negara/lembaga dalam satu negara (lingkungan domestik/nasional) tertentu. Hubungan tersebut diatur dengan sistematis dalam arti dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan, yang didalamnya mengatur juga adanya ruang lingkup kekuasaan dan kewenangan, termasuk hubungan antar Negara (lingkungan internasional) yang saling mempengaruhi dalam satu sistem. Sedangkan dalam prespektif sejarahnya sistem politik telah mengalami beberapa fase antara lain.

a. Masa Pra-kemerdekaan

Dalam fase ini sebelum Indonesia merdeka, sistem politik yang digunakan Nusantara adalah sistem politik yang dibuat oleh pemerintahan Belanda pada saat pendudukannya di Indonesia. Tentunya sistem politik ini sangat kental dengan sistem politik Belanda

Hak Cipta © 2024, Bimo febriyanto, Hisyam Asyiqin.

yang berbentuk kerajaan. Dimana pada saat itu untuk mempertahankan kekuasaannya Belanda digunakanlah sistem politik "pecah belah" (*devide de empera)* antara suku dan daerah serta antar masyarakat Nusantara. Sehingga Belanda dapat menaklukan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Lalu untuk menarik perhatian seluruh masyarakat Nusantara dan dengan disertai kebutuhan-kebutuhan tenaga pendamping Belanda kemudian menerapkan politik "balas budi" dengan membuka berbagai fasilitas pendidikan, seperti sekolah dasar (Sekolah rakyat) hingga pendidikan tinggi (Universitas). Namun secara keseluruhan sistem politik Indonesia belum terlihat pada saat itu, karena memang model pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah pemerintahan militer (Otoriter)

b. Masa Orde Lama

Berbicara dalam Orde Lama, sering kali terjadi kekeliruan pemahaman tentang batasan kekuasaan Orde Lama, sebab dalam masa pada tahun 1945 sampai dengan 1950 dapat dikatakan sebagai episode buruk bagi Orde Lama. Karena pada saat itu terjadi pemantapan kelembagaan politik negara. Hingga masa pada tahun 1960 sampai 1969 ialah masa buruk bagi Orde Lama. Presiden Soekarno yang menjadi presiden pada awal-awal kemerdekaan Indonesia seumur jagung. pada tahun 1949, pengakuan kedaulatan oleh Belanda merubah sistem ketatanegaraan dari sistem politik berdasarkan UUD 1945 menjadi UUDS 1950. Oleh karena itu pemerintah harus menyelenggarakan pemilu untuk menghasilkan legislatif yang representatif hasil pemilu. Maka dilakukan pemilihan umum pertama kalinya pada tahun 1955. Yang menghasilkan dibangunnya demokrasi yang baik pada saat pemilu tersebut. namun setelah berjalan 4 tahun legislatif atau DPR danatau konstituante pada saat itu tidak mampu menyelesaikan tugas membuat UUD baru, sehingga dikeluarkannya dekrit presiden pada tahun 1959 yang memaksa Indonesia menggunakan konstitusi Negara UUD 1945. Dengan dekrit tersebutlah presiden Soekarno mendapat legitimasi penuh pemerintahan dengan menggunakan sistem politik yang dikenal dengan "Demokrasi Terpimpin" .

c. Masa Orde Baru

Era pemerintahan Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, mulai tahun 1966 hingga 1998. Dasar pemerintahan yang diterapkan Orde Baru sama dengan Orde Lama, yaitu Pancasila dan UUD 1945; selanjutnya diturunkan dalam bentuk operasional melalui ketetapan MPRS yang telah direncanakan secara sistematis oleh rezim Orde Baru. pada masa awal pemerintahan Orde Baru juga, dilakukan penataan dalam sistem politik, dimana pemerintahan menyiapkan penyelenggaraan pemilu, yang terselenggara pada tahun 1971. Penetapan pemilu ini dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan mengeluarkan Undang-Undang Tentang Pemilu Tahun 1969, satu tahun pasca beliau diambil sumpah sebagai mandataris MPRS ditahun 1968. Rezim Orde Baru dalam melaksanakan Pemilu, sekaligus dengan agenda dan kerangkan stabilitas politik (bagian dari Trilogi pembangunan yang dicanangkan presiden Soeharto), sehingga praktik pemilu berjalan seperti mobilisasi nasional. Nilai-nilai demokrasi tidak tumbuh dan di impelemantasikan secara nyata, sebab tidak adanya

Hak Cipta © 2024, Bimo febriyanto, Hisyam Asyiqin.

tidak adanya kebebasan memilih dan tidak memberikan kesempatan yang sama pada partai politik lain selain partai politik pemerintah (Golkar) yang dapat memperoleh kemenangan dalam Pemilu.

d. Masa Reformasi

Masa ini dimulai sejak tanggal 1 mei 1998, dimana Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden dan digantikan Oleh Presiden B.J Habibie (Wakil Presiden saat itu). Pemerintahan Habibie, memang tidaklah sama dengan Orde Baru. Dimasa beliau para tahanan politik dibebaskan, dan bahkan dimasa beliau untuk pertama kalinya pemilu era reformasi ini dilakukan lebih cepat dari periodenya, yakni pemilu pemilu pada tahun 1999, merupakan pemilu yang sangat demokratis sebanding dengan pemilu tahun 1955. hingga sampai dengan saat ini walaupun beberapa kali mengalami berbagai dinamika politik.

Dari berbagai prespektif sejarah itulah yang sampai saat ini masih dijalankan dalam sistem ketatanegaraan dan sistem politik indonesia yaitu Pemilu (Pemilihan Umum). Dimana dalam Pemilu ini dilakukan pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh seluruh rakyat indonesia, dengan berbagai kriteria KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur dan menjalankan pemilihan umum. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 22E pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. yang dalam edisi terakhir menimbulkan polemik terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dengan diputuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam beberapa waktu lalu masyarakat ramai-ramai menyoroti tentang batasan minimal usia capres dan cawapres. Dimana dalam putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 telah ditetapkan batasan usia minimal capres dan cawapres ialah 40 (empat puluh) Tahun dan pernah atau sedang menjabat sebagai suatu kepala daerah yang memenangkan dalam suatu pemilihan umum.

Dalam permohonan *judicial review* yang diajukan oleh salah seorang mahasiswa yang telah diputuskan menimbulkan beberapa kejanggalan, dalam menguji konstitusionalitas pasal 166 huruf (q) Undang-Undang Pemilu. Ada beberapa faktor yang membuat putusan ini menjadi kejanggalan bagi masyarakat dan beberapa pihak antara lain konteks politik dimana dengan batas waktu pendaftaran capres dan cawapres. sehingga analisisnya pasti siapa yang diuntungkan, secara tegas (disebutkan namanya) dalam putusan itu contohnya adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai anak dari presiden Jokowi, sehingga dikhawatirkan menimbulkan pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda dari presiden untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Selanjutnya putusan ini diputus tidak dengan suara bulat karena adanya dissenting opinion dan concurring opinion Antar majelis hakim. (Syahputra,Adhari.2024;hlm.2927) Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden adalah indikasi kuat adanya campur tangan kekuasaan politik didalamnya, sebab masalah yang muncul dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 di ambil dengan menabrak aturan main hakim MK. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

Hak Cipta © 2024, Bimo febriyanto, Hisyam Asyiqin.

48/2009 dan Undamg-Undamg Nomor 24/2003 termasuk kode etik dan perilaku Hakim MK. **Mahfud MD** menerangkan " didalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu praktik mengenai pemilihan umum adalah ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. yang mana Mahkamah konstitusi dan Mahkamah agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang khusus berwenang menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik".(Adji,Mau,Chandra.2024;hlm.18). Sehingga dalam artikel ini penulis bertujuan untuk dapat menganalisis dampak atau Implikasi Hukum yang timbul Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap batas usia Capres dan Cawapres.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini ialah metode yuridos-normatif, melakukan penelitian hukum dengan menganalisa dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. yang mencakup bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berhubungan dengan implikasi hukum terhadap batas usia capres dan cawapres pasca putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. dalam mengumpulkan dan menghimpun data dari berbagai sumber, seperti aturan perundang-undangan, literature buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. dilakukan analisa sesuai rumusan masalah dan ditarik kesimpulan dari data- data untuk menjadi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil presiden yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa kriteria persyaratan dalam penyelenggaran pemilihan Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejalan dengan pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Sehingga dalam penyelenggaraan pemilu secara khusus mempunyai persyaratan bagi masing-masing calon peserta. Dalam penelitian berfokus pada dampak apa saja yang muncul akibat adanya batasan usia calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 lalu, dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Jika berbicara Putusan Mahkamah konstitusi tidak bisa lepas dari sifatnya yang final dan mengikat bagi seluruh masyarakat. Adapaun sifat putusan yang *Erga Omnes* ini ialah sifat yang sama seperti Undamg-Undamg, dimana Undang -Undang merupakan sebuah produk hukum yang mengatur secara umum dan mengikat bagi seluruh masyarakat indonesia. Sifat umum dan abstrak Undang-Undang itu juga yang sama melekatnya pada putusan mahkamah konstitusi sesuai sifat *Erga Omnes* tersebut. Meskipun bersifat *Erga Omnes* yang sama seperti Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan peninjauan kembali seperti yang sama pada Undang-Undang. Karena putusan mahkamah konstitusi bersifat final , dimana putusan tersebut diputuskan berdasar UUD Negara Republik Indonesia 1945. Artinya, putusan tersebut putusan yang berdasarkan tafsir UUD1945 dan/atau tidak mungkin masih bertentangan dengan UUD 1945. Adapun dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan beberapa polemik yang berlaku pada sejak dibacakannya putusan tersebut.

Hak Cipta © 2024, Bimo febriyanto, Hisyam Asyiqin.

Sekalipun dalam prespektif hukum Islam tidak melanggar norma-norma hukum Islam baik dalam konsep hukum Islam ataupun konsep kepala negara dalam Islam.

Dalam konsep kepala negara dalam islam menurut **Yusril Ihza Mahendra** "hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan secara tegas mengenai sistem pemerintahan, konsep kepala negara dalam Islam, konsepsi kekuasaan dan ide ide tentang konstitusi. (Sadi Is,2021:hlm.153). Sedangkan menurut **Jaenudin** "menjelaskan mengenai pemegang kekuasaan dalam suatu negara adalah Kepala negara atau Khalifa, yang berkedudukan sebagai pemimpin bukan pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan syariat-Nya serta membimbingnya kejalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia kearah kehidupan mulia dan terhormat". (Sadi Is,2021:hlm.153). Dari beberapa pandangan diatas bahwasannya dari segi prespektif hukum Islam tidak ada larangan dalam syarat ataupun kriteria yang di uraikan secara tegas dan jelas aturan atau aspek kriteria umur seperti yang ada dalam probelematika putusan tersebut.

Mahfud MD menerangkan "didalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu praktik mengenai pemilihan umum adalah mengenai kententuan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. yang mana Mahkamah konstitusi dan Mahkamah agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang khusus berwenang menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik".(Ajdi,Mau,Chandra.2024;hlm.18). pengujian dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya inheren dengan kekuasaan kehakiman dan menjadi sifat pembawaan dari tugas hakim dalam menjalankan fungsi untuk mengadili. Hal ini mengandung makna bahwa agar bisa memastikan produk perundang-undangan tidak bertentangan dari norma hukum serta tidak merugikan hak-hak warga negara yang telah dijamin dalam norma hukum dasar melalui mekanisme pengujian pengujian peraturan perundang-undangan. (Bachtiar,2015;hlm.120-121). Pada perkara ini mahkamah konstitusi yang biasanya menjadi *negative legislator* yang hanya membatalkan suatu norma hukum dalam Undang-Undang bila bertentangan pada UUD 1945, berubah menjadi *positive legislator*, dimana merumuskan Norma baru, yang hakikatnya peran ini di pegang oleh DPR dan Pemerintah. dari adanya beberapa pertimbangan untuk melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan di masyarakat, mengisi kekosongan hukum, dan untuk menguji konstitusionalitas norma. dalam putusan tersebut terjadi beberapa perbedaan antara beberapa hakim, Menurut **M. Guntur Hamzah** bahwa pembatasan usia yang ditetapkan adalah salah bentuk diskriminatif terhadap usia dan generasi muda, yang mana memiliki hak yang sama seperti jaminan dalam konstitusi (*pengujian materil Undang-Undang Nomor 7* Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,2023). Lalu muncul beberapa pendapat berbeda (*Concurring opinion)* dari beberapa hakim salah satunya adalah Hakim Eny Nurbaningsih permasalahan terkait batas usia menurut pendapat DPR dan Presiden adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy)* untuk memutuskan diperlukan partisipasi publik secara luas, penyerahan kebijakan kepada mahkamah konstitusi bilamana perkara tersebut melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidak

Hak Cipta © 2024, Bimo febriyanto, Hisyam Asyiqin.

adilam yang intolereble, sehingga harus dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun komposisi pendapat hakim konstitusi dalam perkara putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023; 3 Hakim konstitusi menerima permohonan (Anwar Usman, M Guntur Hamzah, dan Manahan M. P. Sitompul), dan 2 Hakim dengan *concurring opinion* (Daniel Yusmic P. Foekh dan Eny Nurbaningsih) dimana menenkankan pada batas usia pada persyaratan capres dan cawapres minimal 40 tahun dan harus pernah dan/atau sedang menjabat menjadi Gubernur, 4 Hakim lainnya (Wahiduddin Adams, Saldo Isra, Arief Hidayat dan Suhartoyo) *dissenting opinion* untuk menolak permohonan. jika diputuskan dengan dasar komposisi hakim diatas maka dibuat seadil-adilnya dengan proses yang lebih matang sebab *concurring opinion* dari 2 hakim konstitusi menghasilkan amar putusan yang berbeda dari yang disetujui.

Atas kejanggalan-kejanggalan putusan itulah akhirnya masyarakat yang pada awalnya tidak terlalu peduli dengan proses konstitusi, menjadi aktif berperan dalam proses konstitusi sebagaimana putusan tersebut mempengaruhi pada pemilihan umum yang terjadi pada pemilu 2024. Ada beberapa faktor yang membuat putusan ini menjadi kejanggalan bagi masyarakat dan beberapa pihak antara lain yaitu konteks politik dimana dengan batas waktu pendaftaran capres dan cawapres. Sehingga analisisnya pasti siapa yang diuntungkan secara tegas adalah Gibran Rakabuming Raka sebagai anak dari presiden Jokowi, sehingga dikhawatirkan muncul pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda dari presiden untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Adapun dalam keluh kesah masyarakat dan ketidakpastian hukum yang terjadi pasca putusan tersebut dibacakan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menerima beberapa laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dari laporan laporan tersebut mendorong MKMK melakukan sidang pemeriksaan yang menghasilkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan prilaku Hakim konstitusi yaitu ketua MK Anwar Usman yang dilakukan pelaporan oleh Denny indrayana dkk.; hingga akhirnya ketua MK Amwar Usman selaku hakim konstitusi dan paman dari Gibran Raka Buming Raka dinyatakan bersalah dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Sebab Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden adalah indikasi kuat adanya campur tangan kekuasaan politik didalamnya, sehingga dikhawatirkan muncul pandangan bahwa ini merupakan salah satu agenda dari presiden untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Selanjutnya putusan ini diputus tidak dengan suara bulat karena adanya *dissenting opinion* dan *concurring opinion* Antar majelis hakim. sebab masalah yang muncul dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diambil dengan menabrak aturan main hakim MK. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48/2009 dan Undamg-Undamg Nomor 24/2003 termasuk kode etik dan perilaku Hakim MK. Padahal **Siahaan** mengatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan yang tentunya akan memengaruhi satu keadaan hukum, hak dan/atau kewenangan”. (Putra,2022;hlm.298) .

Hak Cipta © 2024, Bimo febriyanto, Hisyam Asyiqin.

Dampak dan akibat hukum dari implikasi hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamakh Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah terhadap suatu sistem politik dan demokrasi ialah terjadinya kemunduran yang dialami Mahkamah Konsitusi yang tidak lagi dianggap sebagai lembaga independen yang tidak diintervensi pihak manapun sehingga menjadi lembaga yang independen yang menegakan hukum dan keadilan. Seharusnya sebagai lembaga yudisial mahkamah konstitusi memperdalam dasar-dasar ide konstitusionalitas dalam UUD 1945. Ini sebagai bentuk menciptakan sebuah *check and balance* lembaga Negara agar menjadi perimbangan kekuasaan. Ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kewenangan hak menguji MK terhadap Undang-Undang dilatar belakangi oleh Undang-Undang yang dibuat DPR dan Presiden yang belum tentu sebagai cita hukum dan nilai-nilai konstitusi. dalam berdemokrasi sebagaimana demokrasi yang berpedoman pada istilah dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat tidaklah hanya menjadi semboyan yang tidak bertuan. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi memiliki kewenangan dalam menelaah setiap substantif keadilan didalam masyarakat serta tidak terjebak dalam sesuatu yang ditetapkan Undang-Undang. Disisi lain mahkamah sebagai lembaga yang independen seharusnya tidaklah menjadi pihak pendukung salah satu kebijakan politik dalam suatu pemerintahan yang membuat jati diri mahkamah konstitusi tidak pada mestinya. Oleh sebab itu, Hakim konstitusi haruskan memiliki kriteria khusus sebagai seseorang terpilih yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sebab Hakim konstitusi seharusnya tidak hanya dipilih oleh Legislatif, Presiden saja. Tetapi harus melewati proses yang akuntabel partisifatif dan transparan oleh suatu lembaga khusus komisi yudisial, oleh sebabnya dalam hal ini akan menyumbang indepensi MK. Sehingga pada prosesnya MK akan menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen yang tidak bisa intervensi oleh pihak manapun tanpa terkecuali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkara batas usia Capres dan Cawapres Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan banyak diskresi dan implikasi Hukum. Sebagai lembaga independen Mahkamah Konstitusi yang hakikatnya menjadi penjaga dan pengawal demokrasi berubah menjadi lembaga kalkulator karena ketidak patuhan dan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh Hakim konstusi itu sendiri. keterlibatan putra presiden Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden adalah indikasi kuat adanya campur tangan kekuasaan politik didalamnya, sebab masalah yang muncul dari putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diambil dengan menabrak aturan main hakim MK. Sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48/2009 dan Undang-Undang Nomor 24/2003 yaitu kode etik dan perilaku Hakim MK. memutuskan dengan *conccuring opinion and dissenting opinion* menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjalankan konstitusi, pengendoran sistem demokrasi Indonesia akibat majunya anak Presiden dalam kontestasi pemilu Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal Calon Wakil Presiden yang belum berusia 40 tahun namun sah berdasarkan putusan tersebut. Tetapi disisi lain proses pencalonannya mengakibatkan

Hak Cipta © 2024, Bimo febriyanto, Hisyam Asyiqin.

patahnya palu hukum bagi mahkamah konstitusi sebagai lembaga penjaga demokrasi menjadi titik kemunduran kinerja mahkamah konstitusi dan kemunduran demokrasi.

Saran

Adapun penunjukan Hakim Konstitusi tidak serta merta hanya dilakukan oleh DPR dan Presiden saja, seperti yang dicantumkan dalam Undamg-Undamg, tetapi sebaiknya dilakukan oleh lembaga yudisial dan melewati test yang komprehensif, sebab Hakim konstitusi memiliki spesifikasi khusus, agar supaya tetap terjaga Marwah dan identitas mahkamah konstitusi yang independen dan tidak bisa dilakukan intervensi oleh pihak manapun.

Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah putusan yang sangat mengundang perdebatan dan kontroversial, karena dalam pengambilan keputusannya muncul perbedaan-perbedaan dalam internal majelis hakim, oleh sebab itu sebagai penjaga demokrasi seharusnya Mahkamah konstitusi bisa menjaga marwah dan independensinya seperti *guardian constitution dan* memberikam kepastian hukum bukan hanya individu ataupun kelompok tertentu namun haruslah melihat kondisi yang lebih luas, karena putusan MK sifatnya *Erga Omnes* yang mana sama seperti Undang-Undnag yang final dan mengikat untuk seluruh warga negara Indonesia sejak dibacakannya putusannya.

REFERENSI

Putra, A. (2021). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*, *14*(3), 291-311.

Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(1), 16-25.

Syahputra, U., & Adhari, A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, *6*(5), 2919-2930.

Sugitanata, A. (2023). DINAMIKA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *4*(2), 127-146

Nugroho, F. B. S. (2019). Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Gorontalo Law Review*, *2*(2), 95-104.

Hernawansyah, F. M. (2019). Sistem Politik Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Is, S. M. (2021). Hukum Pemerintahan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jakarta:Kencana. Edisi Pertama.

Bachtiar. (2015). Problematika Implemantasi Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD. Jakarta: Raih Asa Sukses(Penebar Swadaya Grup).

Prasetyo, T. (2019). Pemilu Dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat. Bandung: Nusa Media.

Tempo, A., Data, P. (2022). Utak Atik *Presidential Threhold*, Syarat Pencalonan Presiden. Jakarta:Tempo Publishing.

Hak Cipta © 2024, Bimo febriyanto, Hisyam Asyiqin.

The Translation of Humanitarian Articles on Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia's Website

Dini Ria Pratiwi
Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia
E-mail: diniriapratiwi@gmail.com

Abstract

In this modern era, the development of language is growing fast and giving high attention to society. English is international language and use as the international conversation both oral and writing. Nowadays, many articles mostly are written in English. Based on this issue, this article aims to show the translation analysis of humanitarian articles on Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia's website that is written in Indonesia and been translated into English. This article pays attention to the use of methodology of translation namely literal translation and borrowing technique that is applied in this article. This article also applied contrastive analysis approach to analyze the comparison text from Indonesia and English based on the differentiation and similarity structural method that is used translate an article. The Indonesian text will stand as source text (ST) and the result of the translation will stand as the target text (TT). This analysis focused on translation techniques used in the three humanitarian articles on a website. The result found in this article showed from those three humanitarian articles used literal translation technique and borrowing technique as the method for translating the articles from source text into the target text. according to the findings, it can be concluded that the literal translation and borrowing technique become the most dominant methods used for translating the three humanitarian articles on Ministry of Foreign Affairs of The Republic Indonesia's website.

Keywords*: Borrowing Technique, Humanitarian Article, Literal Translation, Translation*

INTRODUCTION

English is one of the global languages is used as international language for many people in the world. Nowadays, English is used as daily conversation both oral and written. English language is also applied in any aspects of life, we could see it by people today in their daily life conversation use English as mix language between Bahasa Indonesia and English. We also could find it in any books, the equipment, and any products around us that most of them of them are written in English.

In this research, the writer will analyze the method used for translating articles on the internet. This research will concern on literal translation and borrowing technique that are used to translate article from Bahasa Indonesia into English. As we know about translation that is stated by Budianto & Fardhani (2010), translation is the general term referring to the transfer of thoughts and ideas from one language (Sources Text) to another language (Target Text), whether the language is in written or oral form. Translation is a text in one language which is produced based on a text in another language for a particular purpose (Williams & Chesterman, 2002).

A good translation will help the reader to understand the content of the text. The aim of the translation depends on the type of the text. In this research the translator will focus on analysis of one of translation procedures, namely literal translation. Newmark (1988) on his book *Textbook of Translation*, defines literal translation as one-to-one translation including as the literal equivalent; it is particularly applicable to the language that do not have definite and/or indefinite

Hak Cipta © 2024, Dini Ria Pratiwi.

article (p. 69). The second opinion declares literal translation is a grammatical language form that converted into the nearest language equivalent (Yusuf & Fajri, 2021). Literal translation implies the transfer of communicatively irrelevant elements of the source text, which may result in a violation of the semantic component of the target text or a shift in semantic emphasis (Lomaka, 2017). Therefore, literal translation is more about free translation uses in the target language without any change from the source language. Another technique apply in this paper is called borrowing technique. The borrowing technique is known as taking a word or expression straight from another language. It can be pure (without any change), or it can be naturalized (to fit the spelling rules in the TL) (Ulfah, 2022).

The other sources, based on Permatasari (2020), analyze that borrowing technique in Rainbow Rowell's novel *Fangirl* show the Indonesian translator mostly use both pure and naturalized borrowing, but the mostly used in this translation is naturalized borrowing technique. The different statement is said by Nasution & Sinar (2017). For them, using borrowing technique is not appropriate for some cases. The other perception has stated by Suryasa (2015) that borrowing technique should translate from source language into target language by adding a full absorption word and modifying the pronunciation.

The purpose of this research analysis is to show the translation technique which is used to translate the humanitarian article on a website. Showing the literal translation and borrowing technique could be applied in this research analysis. The result of the translation will be used for student especially for them whom coming for English Department. This research will also be useful for the student especially those who are learning English that are focusing on English translation as their reference to understand the technique that is used in the process of translate an article.

RESEARCH METHOD

This research used contrastive analysis approach by collect the data analysis based on the three articles on Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia's website. Contrastive studies mostly talked about evaluating the language that connected to sociocultural which focused on contrastive studies (Gast, 2008). Contrastive analysis dealt with linguistic comparison of the structure which more focused on distinction and similarity to both language from source text and target text (Al Khresheh, 2016). Data collecting was used to observe the technique of the translation that is used to translate the humanitarian articles entitled 1) *Indonesia Kecam Keras Tindakan Kekesaran di Gaza* (Indonesia Strongly Condemns Violence in Gaza); 2) *Indonesia Desak Dewan Keamanan PBB Segera Hentikan Perang di Gaza* (Indonesia Urges UN Security Council to Immediately End War in Gaza); and the last article entitled 3) *Presiden Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina* (President Jokowi Releases Humanitarian Aid for Palestine).

The phase analysis of this research applied two phases of the translation process. It chronologically consists of two sequential phases, namely analysis and synthesis phase model. In the first phase the translator reads the source text and analyzes all the relevant aspects. In the second phase, the source text meaning or sense are deverbalized into the target text (Nord, 2005). This research used journals and books related to the translation technique used. This research applied two technical translations (Molina & Hurtado Albir, 2004), namely literal translation and borrowing technique. The borrowing technique is divided into two types, pure and naturalized

Hak Cipta © 2024, Dini Ria Pratiwi.

borrowing. It is used only two kind of technical translation procedures since both techniques were suited to apply in the translation article above.

FINDINGS AND DISCUSSION

According to the articles above, the researcher performed two translation techniques in that article:

LITERAL TRANSLATION

Hatim and Munday (2004, p. 149) stated that *"*literal translation is the direct transfer of a SL text into grammatically or idiomatically appropriate in TL text in which the translator task is limited to observing the adherence to the servitudes of the TL". This technique can be read as follows:

ST	TT
"Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan di Gaza."	"Indonesia strongly condemns violence in Gaza."
"Indonesia desak dewan keamanan PBB segera hentikan perang di Gaza."	"Indonesia urges UN security council to immediately end war in Gaza."
"Presiden Jokowi lepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina."	"President Jokowi releases humanitarian aid for Palestine."

Data 1. Literal Translation

Based on the example above, literal translation has the same explanation as Newmark, exposed that literal translation occurred converting the grammatical structure from one language to another by stating the closest version in the target language without adding or deleting original part of it (Yusuf & Fajri, 2021b).

Literal translation applied the direct translating sentence from the ST (Source Text) into the TT (target text) without any changing. The word *mengecam keras* in Indonesia convert to English version become *strongly condemns*. The word *mengecam* in Indonesia has the same meaning as *menghukum* or *mengutuk*. The suitable word while translated into English could be condemns. So that, the translator used the similar word to translate it into English by using condemn.

It is also happened while choosing the suitable word that translated into English. Literal translation keeps the source text originally adapted into English without any changes of word. It is applied to the other example since the translation result from the source text into target text shows no changing of structural or grammatical equivalent from the original word. Literal translation converts one by one word translate into English as the real meaning in the target text.

BORROWING TECHNIQUE

Borrowing technique, as stated by Molina & Hurtado Albir (2004b), is one of the translation techniques which is done by borrowing or adopted word purely from SL (source language) and then translated into TL (target language) without changing grammatical structure. Borrowing technique from the source language able to take place through the oral communication directly with native speakers or by written (Borkovska, 2018).

Borrowing technique is divided into two types, pure and naturalized borrowing. Pure borrowing is naturally taken from SL without any changing. They adopt and absorb the whole word from source text and use in target text with the same grammatical structure and pronunciation. However naturalized borrowing is the word that being naturalized to suit the

Hak Cipta © 2024, Dini Ria Pratiwi.

spelling rules in the TL (target language). Borrowing is also known as loan word. The definition of loan word expanded by Devianti (2016) who stated that the loan word needs to adapt the terminology from foreign language into Indonesian for writing and speech. In conclusion, the usage of loan word should be followed the term in Indonesia to make the loan word from source text understandable and able to absorb in Indonesian language.

ST	**TT**
Global	Global
Forum	Forum
Parameter	Parameter
Bilateral	Bilateral
Ilegal	Illegal
Alhamdulillah	*Alhamdulillah*
Ton	Ton
TNI	TNI
Polri	Polri

Data 2. Pure Borrowing

According to the list of pure borrowing words above, there are at least nine words used pure borrowing technique applied on the three example humanitarian articles. Here the example from the word *global* in source text is the same as the writing and spelling *global* in the target text. They produce the same aspect from the original language to the target language without any change of spelling and writing in the target text. It could be seen that the pure borrowing from the source text while translated into the target text there is no changing from the original word in source text. Pure borrowing technique used to give a linear parameter and tied the certain word to be used in target language without modification the writing term and pronunciation. Pure borrowing techniques transform purely and absorb the whole word from the source text without any different parameter.

ST	**TT**
Presiden	President
Sipil	Civil
Humaniter	Humanitarian
Internasional	International
Eskalasi	Escalation
Solidaritas	Solidarity
Konflik	Conflict
Krisis	Crisis
Aksi	Action
Situasi	Situation
Blokade	Blockade
Akses	Access
Konsensus	Consensus
Instabilitas	Instability

Hak Cipta © 2024, Dini Ria Pratiwi.

Memobilisasi	Mobilizing
Roket	Rocket
Impunitas	Impunity
Kolektif	Collective
Konvoi	Convoy
Solusi	Solution
Logistik	Logistics
Proses	Process
Solidaritas	Solidarity
Tragedi	Tragedy

Data 2. Naturalized Borrowing

There are twenty-four-word that used naturalized borrowing technique applied in those three humanitarian articles. Naturalized borrowing is made to shape the fit from the spelling and writing aspect in order to compose the source text have a similar spelling and pronounce in the target text. The word aksi for instance, in source text it is written *aksi* (Bahasa Indonesia), while if it is translated into *action* in the target text change the writing and spelling aspects. It delivered the word from the source text to make it equivalent to the target text by changing a little bit from the spelling and the writing aspect. Naturalized borrowing technique is used in certain words to produce the same meaning in different aspects suitable with the target text purpose.

CONCLUSION

By analyzing the technique used in those humanitarian articles, it is found that the most technique used and suitable with the translation article are usage of literal translation and borrowing technique. The literal translation almost applied in the three articles. The translator keeps the translation linear by using literal translation to make the result of the translation have the closest meaning in the target text. In line with the usage of literal translation technique, the use of borrowing technique is also dominant in some parts of the text. The translator applied the pure and naturalized borrowing to produce an understandable translation. Pure borrowing is less used than naturalized borrowing words. There are nine words of pure borrowing found from the articles and there are twenty-four words of naturalized borrowing applied in the text. Based on the result above, the literal translation is suitable used to translate the humanitarian articles on the Ministry of Foreign Affair of The Republic of Indonesia's Website. Borrowing technique especially focus on naturalized borrowing is dominant technique used to translate the article. Despite not all the theory of (Molina & Hurtado Albir, 2004) and the techniques are applied to this article, yet it is possible to use the books and any references from another theory and reference applied in this article to create another point of view from the other preference.

In this paper hopefully will be useful for the student in the future especially for those who learning English majoring in translation department and for the next researcher would be able to continue the research of the translation technique analyzing use the different method and technique.

REFERENCES

Al Khresheh, M. H. (2016). A Review Study of Contrastive Analysis Theory. *Journal Of Advances in Humanities and Social Sciences*, *2*(6), 330–338.

Hak Cipta © 2024, Dini Ria Pratiwi.

Borkovska, I. P. (2018). The Theory of Borrowing in The Linguistic Literature. *Journal of the National Technical University of Ukraine "KPI": Philology and Educational Studies*, *10*.

Budianto, L., & Fardhani, A. E. (2010). *A Practical Guide for Translation Skill*. UIN Maliki Press.

Devianti, R. (2016). Loan Words in Indonesian. *Semantic Scholar*.

Gast, V. (2008). Contrastive Analysis. In *Encyclopedia of Bilingual Education*. SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412963985.n74

Lomaka, A. O. (2017). Literal approach to translation: a classification and literature review. *XLinguae*, *10*(4), 234–244. https://doi.org/10.18355/XL.2017.10.04.19

Molina, L., & Hurtado Albir, A. (2004a). Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach. *Meta*, *47*(4), 498–512. https://doi.org/10.7202/008033ar

Molina, L., & Hurtado Albir, A. (2004b). Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach. *Meta*, *47*(4), 498–512. https://doi.org/10.7202/008033ar

Nasution, D. K., & Sinar, T. S. (2017). Borrowing Technique in The Translation of Incantation Texts of Sea Offerings. *Researchers World: Journal of Arts, Science and Commerce*, *8*(2), 125–133. https://doi.org/10.18843/rwjasc/v8i2/13

Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice Hall.

Nord, C. (2005). *Text Analysis in Translation* (2nd ed.). Rodopi.

Permatasari, F. C. (2020). Borrowing Technique as Reflected in the Rainbow Rowell's Novel "Fangirl." *Journal of English Language Teaching and Cultural Studies*, 1–9. https://doi.org/10.48181/jelts.v3i1.9095

Suryasa, I. W. (2015). Borrowing Technique in The Translation Bali Live Magazine into Indonesian. *International Journal of Research in Social Sciences*, *5*(4).

Ulfah, B. (2022). Pure Borrowing Technique in Indonesian Translation of Novel Entitled Little Woman by Louisa May Alcott. *Journal of English Educational Study (JEES)*, *5*(2), 132–140. https://doi.org/10.31932/jees.v5i2.1605

Williams, J., & Chesterman, A. (2002). *The map: A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies.* Routledge.

Yusuf, F., & Fajri, M. (2021a). Using Literal Translation Method in the Novel the Rise of the Underground. *Anglophile Journal*, *1*(2), 13. https://doi.org/10.51278/anglophile.v1i2.220

Yusuf, F., & Fajri, M. (2021b). Using Literal Translation Method in the Novel the Rise of the Underground. *Anglophile Journal*, *1*(2), 13. https://doi.org/10.51278/anglophile.v1i2.220

Hak Cipta © 2024, Dini Ria Pratiwi.

Penggunaan Sistem Katalog Deskriptif dari AACR2 ke RDA pada Perpustakaan Kabupaten Temanggung

Dwi Chandra Susanti[1], Asma Rakha' Dinazzah[2]
[1, 2] Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
e-mail: dechan662@gmail.com (penulis korespondensi)

Abstrak

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin mengetahui tentang penggunaan sistem katalog deskriptif dari AACR2 ke RDA pada Perpustakaan Kabupaten Temanggung dan kendala yang dihadapi saat pengisian data bibliografi oleh tenaga pengelola perpustakaan. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen yang digunakan penulis pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa Perpustakaan Kabupaten Temanggung sejak tahun 2022 sudah menggunakan standar pengtalogan deskriptif Resource Description and Access (RDA). Standar ini memperhatikan 6 poin perbedaan yaitu aturan nama pengarang lebih dari tiga, penulisan edisi, deskripsi fisik, daerah penerbitan, nomor seri dan kategori sumber. Kendala yang ditemui disebabkan istilah masih baru dan belum akrab digunakan untuk pencantuman data bibliografi. Pengisian data lebih lama karena nama pengarang harus ditulis semua serta singkatan tidak berlaku lagi. Pelatihan intern dilaksanakan pustakawan yang telah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis dari Perpustakaan Nasional RI. Untuk mengantisipasi kesalahan memasukkan data bibliografi pada sistem otomasi, terlebih dahulu dikerjakan pada worksheet dan memvalidasi data pada pangkalan data sebelum ditampilkan pada OPAC. Dari observasi langsung diketahui bahwa Perpustakaan Kabupaten Temanggung beralih ke standar pedoman RDA karena merupakan Perpustakaan Pembina untuk semua jenis perpustakaan di wilayahnya, memiliki koleksi tercetak dan digital, serta sudah terotomasi menggunakan Slims 8.

***Kata kunci**: AACR2, Katalog deskriptif, RDA*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi pada abad ini terjadi sejak ditemukannya internet. Hal ini memberi pengaruh pada semua sektor kehidupan manusia di berbagai bidang tidak terkecuali perpustakaan. Perpustakaan saat ini tidak hanya mengoleksi bahan perpustakaan tercetak tetapi juga digital. Oleh karena itu pengelolaan penyelenggaraan perpustakaan juga berubah disesuaikan dengan perkembangan jaman termasuk didalamnya perpustakaan umum. Jika dulu dalam pengelolaan perpustakaan menggunakan sistem manual sekarang sudah beralih ke sistem otomasi menggunakan aplikasi. Demikian juga dengan pengolahan bahan perpustakaan. Sebelum era internet dengan kemajuan teknologi dan informasinya, International Standard Bibliographic Description (ISBD) dan Anglo American Cataloguing Rules[2nd] (AACR2) digunakan sebagai standar pengolahan bahan perpustakaan.

Standar ini sebagai pedoman untuk pembuatan katalog yang merupakan wakil ringkas dokumen koleksi perpustakaan. Katalog dalam ilmu perpustakaan mempunyai pengertian suatu daftar koleksi dari berbagai macam bahan perpustakaan yaitu buku, serial atau terbitan berkala,

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

rekaman baik suara dan video serta lain sebagainya disusun menggunakan standar tertentu yang dimiliki suatu perpustakaan. Katalog adalah alat bantu penelusuran bahan perpustakaan baik oleh pemustaka maupun pustakawan pada suatu perpustakaan.

"Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, AACR2 dirasa tidak mampu lagi merepresentasikan isi dari bahan perpustakaan jenis digital. Kemunculan *Resource Description and Access* (RDA) didorong oleh adanya fakta banyaknya koleksi perpustakaan yang berbentuk digital yang membuat hubungan antara pustakawan dan pemustaka menjadi semakin penting. RDA dibangun diatas dasar fondasi AACR2 dan menjadi standar baru pendeskripsian dan akses semua jenis konten dan media. RDA bertujuan membantu pemustaka dalam mencari, mengidentifikasi, memilih dan mendapatkan informasi yang diinginkan" (Fardhiyah, et.al. 2016, p.1).

Perpustakaan Kabupaten Temanggung berdiri sejak tahun 2001. Pedoman pengatalogan deskriptif bahan perpustakaannya masih menggunakan standar AACR2, dengan sistem manual dimana untuk penelusuran informasi berupa katalog tercetak. Akan tetapi, dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi dan informasi, Perpustakaan Kabupaten Temanggungpun mulai berbenah diri. Pada tahun 2012 pengelolaan perpustakaan beralih ke sistem automasi dimana penelusuran informasi menggunakan komputer yang sudah terpasang *Online Public Access Catalog* (OPAC) di dalam sistemnya. Koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten Temanggung semakin meningkat dari segi jumlah maupun variasinya baik dalam bentuk tercetak maupun digital.

Pada tahun 2022 Perpustakaan Kabupaten Temanggung mulai menggunakan standar RDA untuk melakukan pengatalogan deskriptifnya. Hal ini dilakukan sebab dirasa AACR2 tidak mampu lagi mendeskripsikan isi dari koleksi bahan perpustakaan berjenis digital. Perubahan pengatalogan deskriptif menggunakan standar RDA dilakukan karena Perpustakaan Kabupaten Temanggung adalah perpustakaan umum Tingkat Kabupaten dan merupakan instansi pembina untuk semua jenis perpustakaan yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung dan juga karena koleksi yang dimiliki tidak hanya dalam versi tercetak tetapi juga dalam versi digital. Menurut Suharyanto (2014) "RDA tidak lagi mengatur tentang GMD untuk bahan perpustakaan. Sub ruas $h […] digantikan dengan ruas 336, 337, dan 338." (p.11). Perubahan standar pengatalogan deskriptif ini juga membawa perubahan perilaku dari sumber daya manusianya dalam hal pengolahan bahan perpustakaan. Standar RDA yang masih baru dikenal tidak serta merta dapat dipahami walaupun sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan Perpustakaan Pembina dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI telah diikuti dan ditindaklanjuti.

Selain istilah-istilah baru yang belum familier dan belum dipahami dengan baik, menurut Fardhiyah et.al (2016) "RDA dibuat berdasarkan model konseptual FRBR, FRAD, dan FRSAD. Model ini merupakan konsep *entities, relationship, and attributes* yang dikembangkan oleh IFLA. Model konseptual dipandang lebih relevan di era informasi saat ini karena dapat membantu memahami isi karya dari suatu bahan perpustakaan*"* (p.10).

"Perubahan tidak cuma terjadi pada pertambahan jenis sumber informasi, namun juga perilaku pencarian informasi pemustaka di era digital yang "terbiasa" menggunakan link untuk melanjutkan pencarian informasi ke halaman web lain di internet. Untuk mengatasi masalah tersebut disusunlah suatu aturan baku yang baru dalam pengkatalogan yang dirancang untuk kepentingan dunia digital, yaitu Resource Description and Access (RDA)". (Ardoni, 2016, p.19-20).

"RDA menyajikan kerangka yang luwes untuk mendeskripsikan sumber-sumber digital.

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

Aturan-aturan di dalam RDA juga lebih mudah disesuaikan dengan struktur pangkalan data yang lebih efisien dan kompatibel dengan cantuman yang ada dalam katalog perpustakaan daring (dalam jaringan atau online). RDA juga memiliki aturan yang memungkinkan perilaku pencarian informasi di era digital dapat difasilitasi, misalnya dengan menyediakan aturan untuk me-link-kan suatu butir informasi di dalam suatu deskripsi sumber informasi ke sumber informasi lainnya" (penelitian Ardoni, 2016, p.20).

Penelitian oleh Nabawi (2019) menuliskan "namun sejatinya bahwa perubahan standar pengatalogan dari AACR2 menuju RDA merupakan perubahan paradigma terhadap pendekatan informasi. Berbeda dengan AACR2 yang mengelola sumber informasi berdasarkan karakteristik fisiknya, RDA justru mengelola sumber informasi berdasarkan perilaku pemustaka (pengguna) dalam memilih, mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya" (p. 189). Perlu dipahami bahwasannya rancangan RDA sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran pengguna informasi atau pemustaka dengan istilah-istilah yang dipahami oleh masyarakat luas. Penggunaan istilah yang sudah *familier* oleh pengguna akan membuat penelusuran informasi lebih efisien dan efektif.

"RDA menjadi kerangka kerja yang lebih konsisten dan fleksibel dalam menggambarkan semua jenis sumber informasi, baik koleksi berbasis fisik atau non-fisik. RDA dirancang untuk bekerja dengan aplikasi format perpustakaan seperti format metadata terbacakan mesin untuk data bibliografi (MARC), format umum untuk pertukaran data melalui internet seperti bahasa extensible markup (XML) dan struktur data baru yang belum dikembangkan" (Nabawi, 2019, seperti yang dikutip dalama Keenan,2014, p. 189). Koleksi perpustakaan merupakan kekayaan yang paling utama dan berharga pada suatu perpustakaan baik dalam bentuk tercetak maupun digital dan informasinya dibutuhkan oleh pengguna. Koleksi yang dimiliki perpustakaan merupakan persyaratan yang harus ada untuk memenuhi kriteria jenis layanan yang dimiliki perpustakaan.

Menurut Anggraeni & Christiani (2016) dalam penelitiannya menyebutkan "Dalam proses pengatalogan koleksi di PNRI dilakukan oleh Bidang Pengolahan di Pusat Pengembangan Koleksi dan Bahan Pustaka. Pengatalogan dilakukan dengan menggunakan AACR2. Namun seiring berkembangnya teknologi, AACR2 dinilai tidak mampu mengakomodir sumber-sumber baru tersebut. Oleh karena itu, PNRI menerapkan standar pengatalogan terbaru yaitu RDA." (p.1).

Dari ketiga penelitian dan penjelasan tentang pedoman RDA yang disebutkan diatas maka kesimpulan yang bisa ditarik yaitu penggunaan pengatalogan deskriptif menggunakan standar RDA dapat diterapkan karena perpustakaan saat ini menggunakan teknologi informasi berbasis web yang berhubungan dengan kreator, metadata dan pengguna. Akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena pedoman RDA belum dipahami secara menyeluruh oleh sumber daya yang ada. Hal ini disebabkan masih terbatasnya penyelenggaraan bimbingan teknis atau diklat tentang pedoman RDA serta minimnya dana untuk mengikutkan tenaga pengelola guna meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan mereka.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini ditulis untuk mengetahui mengapa harus pindah dari sistem katalog deskriptif basis AACR2 ke basis RDA (Resource Description and Access) pada Perpustakaan Kabupaten Temanggung serta cara menghadapi kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya.

METODE

Penulis menggunakan teknik penelitian pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

melalui pengamatan langsung, wawancara, dan analisis dokumen. Menurut Lasa HS (2023) "penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan secara sistematis dengan memusatkan masalah-masalah yang ada sekarang atau masalah-masalah yang akurat. Kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan kemudian diinterprestasikan" (p.5.17). Metode ini merupakan penelitian dalam hal pengumpulan data, pengambilan makna, dan kemudian mendapat pemahaman dari kasus tersebut namun kasus tersebut bukan suatu kesimpulan dari populasi dan tidak mewakili suatu populasi.

"Metode studi kasus adalah penelitian yang mengelaborasi tentang individu, suatu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam ruangan dan waktu tertentu" (Laksmi 2022, p. 6.23). Para informan adalah tujuh orang pustakawan terdiri dari 1 (satu) pustakawan ahli dan 6 (enam) pustakawan trampil dari unit pengolahan bahan perpustakaan Bidang Perpustakaan. Penelitian ini bertempat di Perpustakaan Kabupaten Temanggung sebagai sumber data yang relevan untuk penulis. Data yang diperoleh diharapkan dapat mendukung penelitian ini secara akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman dan Standar Pengatalogan

Menurut Bahaunsa (2019) "adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan perpustakaan disini merupakan sebuah organisasi yang terus mengalami sebuah perkembangan. Hal ini berdampak pada perkembangan fungsi katalog itu sendiri dengan seiring berjalannya waktu. Zaman sekarang pedoman AACR2 sudah berkembang menjadi Resource Description and Access (RDA)" (p.5). Demikian juga pada Perpustakaan Kabupaten Temanggung, mulai Tahun 2022 pengatalogan bahan perpustakaan sudah beralih menggunakan standar baru sebagai pedoman yaitu RDA.

Kebijakan konsep pengatalogan menyebutkan, "RDA berdasarkan pada bagaimana mendeksripsikan isi intelektual bahan pustaka kepada pemustaka bukan berdasarkan jenis bahan pustaka dan berdasarkan pada ISBD. Pada AACR2 dikenal adanya Tajuk Entri Utama dan Tajuk Entri Tambahan, sedangkankan pada RDA semua data dianggap setara sebagai titik akses" (Masykuri, 2018, p.14). Pedoman untuk pengatalogan bahan perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten Temanggung mengunakan standar nasional yang meliputi: pedoman pengatalogan deskriptif, daftar tajuk kendali untuk kepengarangan, pedoman kebahasaan dan pedoman metadata. Pedoman yang dimiliki Perpustakaan Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Pedoman RDA: Resource Description and Access;
2. Pedoman Pengolahan Bahan Perpustakaan Perpustakaan Nasional RI;
3. Panduan Pengolahan Bahan Kartografi;
   Nomor 1 -3 merupakan pedoman pengatalogan bahan perpustakaan baik tercetak maupun digital terbitan Perpusnas RI
4. Petunjuk Teknis Penentuan Kata Utama dan Ejaan untuk Tajuk Nama Pengarang Indonesia;
5. Daftar Tajuk Nama Pengarang Indonesia;
6. Daftar Tajuk Nama Geografi Indonesia;
7. Daftar Tajuk Nama Badan Korporasi;
   Nomor 4 – 7 merupakan pedoman untuk tajuk kendali kepengarangan yang mengatur, penetuan tajuk kendali utama, penulisan ejaan yang berlaku, aturan penulisan nama pengarang dan nama tempat terbitan Perpusnas RI

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

8. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
9. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
10. Kamus istilah berbagai bidang pengetahuan;
11. Kamus Bahasa Asing (Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Arab)
    Nomor 8 – 11 merupakan pedoman kebahasaan yang diperlukan untuk keabsahan penulisan sesuai dengan pedoman/aturan yang berlaku
12. Suplemen Indomarc: Revisi Kompilasi Daftar Kode Indomarc terbitan Perpustakaan Nasional RI.
    Nomor 12 merupakan pedoman metada untuk kode ruas dalam deskripsi bibliografi yang diterapkan pada aplikasi dan kode perpustakaan.

Perpustakaan Kabupaten Temanggung memiliki berbagai variasi bahan perpustakaan. Data tersebut meliputi:

1. Buku/ monograf sejumlah 35.814 judul;
2. Bahan kartografis meliputi peta, atlas dan globe sejumlah 4 buah;
3. Rekaman video dalam bentuk DVD dan VCD sejumlah 297 judul,
4. Manuskrip berupa Naskah Kuno sejumlah 5 judul
5. Sumber Daya Elektronik: e-book sejumlah 1.170 judul.

Elemen Pengatalogan Deskriptif dengan standar RDA

Resource Description and Access selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan RDA merupakan rancangan untuk format standar pengatalogan deskriptif dan akses pada semua jenis bahan perpustakaan terutama yang berbentuk digital serta konten dan media. RDA merupakan standar pengolahan baru dan berdasarkan pondasi dari AACR2. Pada AACR2 terdapat 8 (delapan) daerah deskripsi yang disandarkan pada General International Standars Bibliographic Description (ISBD) ini meliputi: 1) daerah judul besertaketerangan penanggung jawab, 2) daerah edisi (cetakan), 3) daerah data khusus, 4) daerah penerbitan dan distribusi, 5) daerah deksripsi fisik/kolasi, 6) daerah seri (serial), 7) daerah catatan, dan 8) daerah nomor standar (ISBN/ISSN).

Pada standar RDA tidak dikenal penyebutan daerah deskripsi akan tetapi disebut dengan elemen, dan mempunyai 13 elemen inti. Menurut Fardhiyah, et.al. (2016) “elemen merupakan kata, karakter, atau sekelompok kata dan/atau berbagai karakter yang merupakan bagian dari informasi Bibliografi. Elemen inti merupakan elemen yang harus dicatat pada saat melakukan pendeskripsian bibliografi yang harus dapat menggambarkan atribut atau hubungan yang terdapat pada suatu sumber daya dengan konsep FRBR” (p.x).

“Functional Requirement for Bibliographic Records (FRBR) adalah kerangka kerja terstruktur yang bertugas menghubungkan data yang tercantum pada metadata dengan kebutuhan pengguna dan metadata-metadata lain yang saling berkaitan. FRBR mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data diperlukan dalam menemukan metadata atau records. FRBR juga menjelaskan bagaimana pengguna dapat memanfaatkan informasi tersebut. Secara khusus, FRBR menekankan konteks dari suatu resource dan kaitannya dengan resource lainnya” (Shadrina, 2016, p.95)**.**

Elemen inti pada RDA meliputi: 1) Judul, 2) Pernyataan Tanggung Jawab, 3) Pernyataan Edisi, 4) Penomoran Serial, 5) Pernyataan Produksi; 6) Pernyataan Publikasi; 7) Pernyataan Distribusi; 8) Pernyataan Pembuatan; 9) Tahun Hak Cipta; 10) Pernyataan Seri; 11) Identifikasi Manifestasi; 12) Jenis Wadah; 13) Batasan.

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

Perbedaan standar AACR2 dan standar RDA tersebut telah merubah penulisan data cantuman bibliografi pada aplikasi otomasi Slims 8. Oleh karena itu pustakawaan dan tenaga teknis perpustakaan dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai standar RDA ini. Poin – poin utama perbedaan yang perlu menjadi perhatian untuk dipahami meliputi:

1. Pengarang/Kreator: Aturannya: lebih dari 3 orang nama pengarang (Rules of three)	AACR2 menetapkan penulis lebih dari 3 (tiga) untuk sumber daya apapun, nama penulis pertamalah yang akan dicatat dan diikuti dengan singkatan… [et al.] sedangkan Tajuk Entri Utama terdapat pada judul. Contoh: Buku Pintar Rumus Super Lengkap SMK (Rumpun Teknik)/ Nanik Mirnani, Imam Wicaksono, Dyah Saptarika Hiqmah, …[et.al] Tajuk Entri Utama: Buku Pintar Rumus Super Lengkap SMK	Pada standar RDA setiap penulis berkontribusi dalam suatu karya. Jika penulis lebih dari tiga orang, maka titik akses ada pada nama pengarang yang pertama kali disebut dan pengarang lainnya sebagai kontributor. Karya dari editor atau penyunting, titik akses (Tajuk Entri Utama) ada pada judul, sedangkan kontributornya adalah editor atau penyunting tersebut. Contoh: Buku Pintar Rumus Super Lengkap SMK (Rumpun Teknik)/ Nanik Mirnani, Imam Wicaksono, Dyah Saptarika Hiqmah, Minyati, Betty Sekarasih Hadiyani; editor, Qoni Titik Akses (Tajuk Entri Utama): Nanik Mirnani
2. Penulisan edisi dan cetakan	Pada AACR penulisan disingkat: Ed. V Ed. Rev. Cet. 1	Pada RDA tidak ada singkatan, data ditulis sesuai yang tercantum pada bahan perpustakaan: Edisi V Edisi Revisi Cetakan 1 Cetakan pertama
3. Deskripsi Fisik atau Kolasi merupakan keterangan tebal dan tinggi buku serta memuat ilustrasi yang mewakili isi buku	Pada AACR2 penulisan halaman dan ilustrasi disingkat. Contoh: 279 hlm: ilus; 30 cm	Pada RDA penulisan halaman dan ilustrasi tanpa singkatan kecuali cm yang merupakan lambang matematika. Contoh: 279 halaman: ilustrasi berwarna; 30 cm

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

4. Daerah penerbitan	Pada AACR: Kota terbit jika tidak diketahui ditulis dengan singkatan [s.l]: sine loco, Penerbit jika tidak diketahui ditulis dengan singkatan [s.n]: sine nomine, Tahun terbit jika tidak diketahui ditulis menggunakan singkatan [s.a.] = sine anno [c.a] = sekitar… Contoh: [s.l]: [s.n.], 2018 Jakarta: [s.n.], 2018 Jakarta: Grasindo, [s.a.] Jakarta: Grasindo, [c.a. 2018?]	Daerah penerbitan pada RDA dikenal dengan istilah daerah distribusi, karena tidak hanya penerbit yang ditulis tetapi diperluas dengan penambahan pada percetakan, distribusi dan hak cipta. Singkatan [s.l], [s.n.], [s.a.], [c.a] tidak digunakan dan diganti menjadi: tidak teridentifikasi. Untuk tahun terbit, data dapat dicari dari sumber lain yang dapat dipercaya jika data tidak tercantum pada koleksi. Contoh penulisan menjadi: - [Tempat terbit tidak teridentifikasi: penerbit tidak teridentifikasi, diperkirakan terbit tahun 2018]
5. Penulisan pada nomor seri seperti: jilid, volume atau nomor	AACR penulisannya disingkat, contoh: - Vol. 7 - No. 3 - Jil. IV	Pada RDA cara penulisannya sama seperti yang tercantum pada koleksi, contoh: - Cetakan pertama - Cetakan 4 - Edisi 3 - Jilid 1
6. Kategori sumber	AACR2 menggunakan penanda bahan umum atau GMD (*General Material Designation*)	Pada RDA jenis bahan perpustakaan dibedakan beradasarkan: *content type*, *media type*, dan *carrier type*

Berikut ini di Tabel 1, dapat dilihat perbedaan kategori sumber antara AACR2 dan RDA yang mencangkup:

Indikator	**AACR2**	**RDA**

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

Kategori Sumber	GMD (General Material Designation): 1. Rekaman Suara 2. Rekaman video 3. Bahan Grafis 4. Bahan Kartografi 5. Bentuk Mikro 6. Sumber Elektronik 7. Musik 8. Manuskrip 9. Artefak dan tiga dimensi	1. Jenis Isi *(Content Type)* adalah bentuk dasar komunikasi yang isinya (content) diungkapkan dan dirasakan oleh manusia. Sumber informasi untuk jenis isi diambil dari semua sumber - Contoh: Kumpulan data kartografi 2. Jenis Media *(Media Type)* adalah mencatat perangkat yang digunakan untuk melihat, memutar, menjalankan isi dari sumber daya. Sumber informasi untuk jenis media dilihat dari bentuk sumber daya itu sendiri atau pada setiap materi yang menyertai atau wadah sebagai dasar untuk merekam jenis media - Contoh: Suara; Komputer 3. Jenis Wadah *(Carrier Type)* adalah format media penyimpanan yang digunakan atau jenis perangkat intermediasi yang diperlukan untuk melihat, memutar, dan menjalankan isi dari sumber daya. Sumber informasi jenis wadah dapat dilihat dari bentuk penyajian sumber daya itu sendiri atau pada setiap materi yang menyertai wadah sebagai dasar untuk jenis wadah rekaman. - Contoh: Cakram Audio

Tabel 1. Perbedaan kategori sumber antara AACR2 dan RDA
Sumber: AACR2 (Suharyanto, 2014, p.10) dan RDA (Indreswari NS, 2018, p.13-14)

Kategori sumber merupakan jenis bahan perpustakaan. Seperti pada tabel 1 dapat dilihat bahwa GMD pada AACR2 adalah penjelasan tentang penanda bahan umum koleksi perpustakaan yang dicantumkan setelah penulisan judul sebenar menggunakan kurung siku. Akan tetapi pada RDA penulisan jenis bahan perpustakaan dibagi berdasarkan tipe isi (*content type*), tipe media (*media type*) dan sarana (*carrier type*). Lebih jelasnya dapat dlihat seperti contoh dibawah ini:

AACR2		**RDA**	
Judul dan Penanggung jawab:	Mainkan Gitarmu dengan Iringan Musik Digital Komputer [rekaman video]/ Adi Jarot Pamungkas, Renati Winong Rosari	Judul dan Penanggung jawab:	Mainkan Gitarmu dengan Iringan Musik Digital Komputer/ Adi Jarot Pamungkas, Renati Winong Rosari
		Jenis Isi :	Gambar bergerak dua dimensi

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

Jenis Media:	Komputer
Jenis Kemasan:	Computer disk

Tabel 2. Contoh Kategori sumber AACR2 dan RDA
(Sumber data: Perpustakaan Kabupaten Temanggung)

Pada Tabel 2 dapat dijelaskan data bibliografi pada AACR terlihat setelah judul sebenar terdapat keterangan GMD yaitu rekaman video yang ditulis menggunakan kurung siku baru kemudian ditulis data penanggung jawab. Pada RDA penanda bahan umum sudah tidak digunakan, akan tetapi setelah penulisan judul dan penanggung jawab terdapat penulisan data pembagian jenis bahan perpustakaan pada jenis: isi, media, dan wadah.

Perpustakaan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kegiatan pendiskripsian bibliografi menggunakan standar RDA. Perubahan standar dari AACR2 ke RDA dilaksanakan setelah mengadakan kegiatan sosialisasi serta pelatihan secara *intern* kepada pustakawan dan staf teknis di Bidang Perpustakaan oleh tenaga pustakawan yang telah mengikuti sosialisasi serta bimbingan teknis yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional RI. Perubahan ini bukan tanpa kendala karena harus merubah sistem aplikasi otomasi perpustakaan yang ada mengikuti standar pedoman RDA.

Berdasarkan wawancara dari dua orang pustakawan di Perpustakaan Kabupaten Temanggung didapatkan penjelasan:

> “bagi saya dari sisi pustakawan, awal menggunkan standar RDA masih kagok dan lupa-lupa untuk tidak menulis singkatan seperti hlm dan ilus. Pengisian tambah lama karena yang diisi lebih rinci, harus menulis tipe isi, tipe media dan tipe pembawa tapi lebih memudahkan juga. Nama pengarang jika lebih dari tiga harus ditulis semua. Kalau dari sisi pemustaka yang saya tahu, lebih jelas karena tidak ada singkatan, untuk pengarang lebih jelas”
> (Tifa HS, personal communication, 5 Mei 2024)
> “Begini bu, sebagai pustakawan bagi saya standar RDA lebih rinci dalam memasukkan data bibliografinya pada aplikasi otomasi. Selain itu istilah-istilah pada RDA dan beberapa perubahan dalam pengisian data bibliografi belum akrab atau familier. Pengisian data pada aplikasi menjadi lebih lama dibandingkan menggunakan AACR karena pada RDA sudah tidak menggunakan singkatan seperti penulisan halaman dan ilustrasi. Demikian juga untuk penulisan pada daerah penerbitan”
> (Wahyu NF, personal communication, 7 Mei 2024)

Dari penjelasan pustakawan diatas, dapat diketahui bahwa standar pengatalogan deskriptif bahan perpustakaan telah menggunakan RDA. RDA lebih terinci dalam pengisian data bibliografi pada sistem aplikasi otomasi karena semua elemen inti dimasukkan. Singkatan yang sudah tidak digunakan pada daerah penerbitan dan deskripsi fisik serta penulisan semua pengarang jika lebih dari tiga orang menambah lama pengisian data bibliografi untuk satu judul bahan perpustakaan. Istilah yang masih baru dan belum akrab dengan pustakawan menjadi kendala dalam pengisian data bibliografi. Pada awal perubahan dari standar AACR2 ke RDA pustakawan masih sering lupa untuk tidak menulis singkatan pada deskripsi fisik. Pada daerah penerbitan jika tidak diketahui penerbit, tempat terbit atau tahun terbit harus ditulis tidak teridentifikasi tidak boleh

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

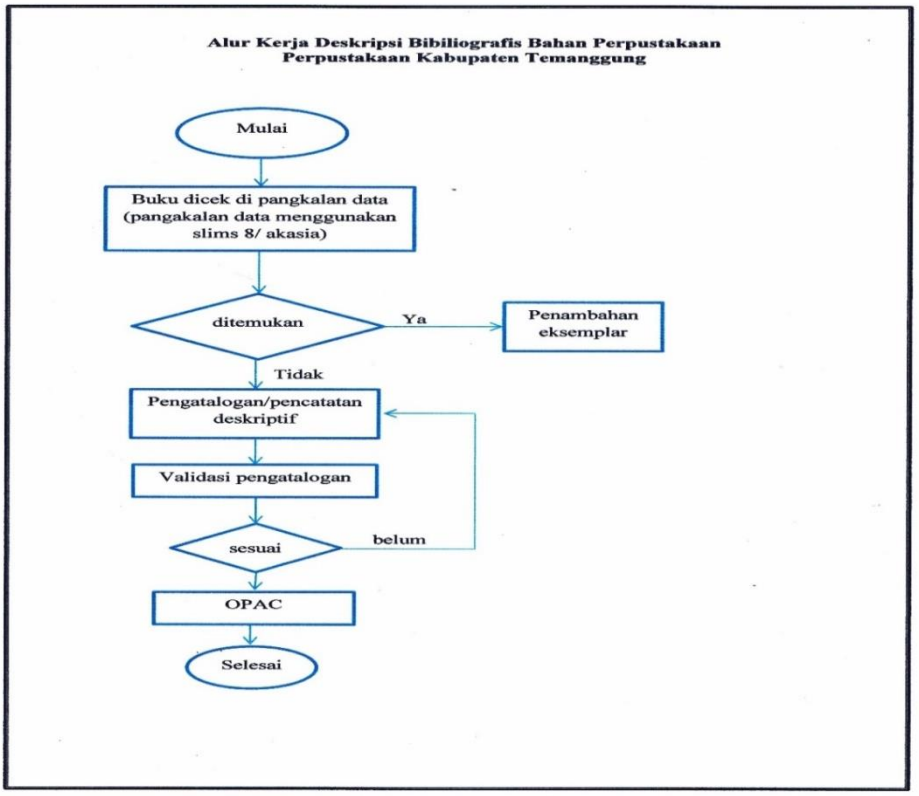
disingkat seperti masih menggunakan AACR2.

Kabupaten Temanggung merubah standar pengatalogan deskriptif dari AACR2 ke RDA adalah:

1. Perpustakaan Kabupaten Temanggung merupakan instansi pembina untuk semua jenis perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dan kepanjangan tangan dari instansi perpustakaan diatasnya yaitu Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan Perpustakaan Nasional RI;
2. Perpustakaan Kabupaten Temanggung mempunyai koleksi tercetak dan digital;
3. Perpustakaan Temanggung menggunakan aplikasi otomasi Slims 8/Akasia (Senayan Library Information Management System) untuk pengatalogan deskriptif yang telah disesuaikan ruas-ruasnya dengan standar RDA.

Selain yang disebut diatas juga ditemukan kesalahan-kesalahan dalam pengisian data bibliografi menggunakan standar RDA. Hal ini disebabkan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan masih terbiasa dengan cara pengisian data bibliografi menggunakan standar AACR2 dan belum akrab atau familier dengan istilah dan pedoman yang ada pada RDA.

Dari kesalahan-kesalahan tersebut diatasi dengan cara menulis isian data bibliografi menggunakan worksheet sebelum dipindahkan ke aplikasi otomasi. Kemudian pustakawan senior bertugas melakukan validasi data bibliografi pada aplikasi Slims 8, apakah sudah sesuai dengan pedoman RDA, jika ditemukan kesalahan maka segera dilaksanakan edit data untuk dibetulkan sesuai dengan pedoman sehingga data menjadi tervalidasi. Alur kerja pengatalogan deskriptif di Perpustakaan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

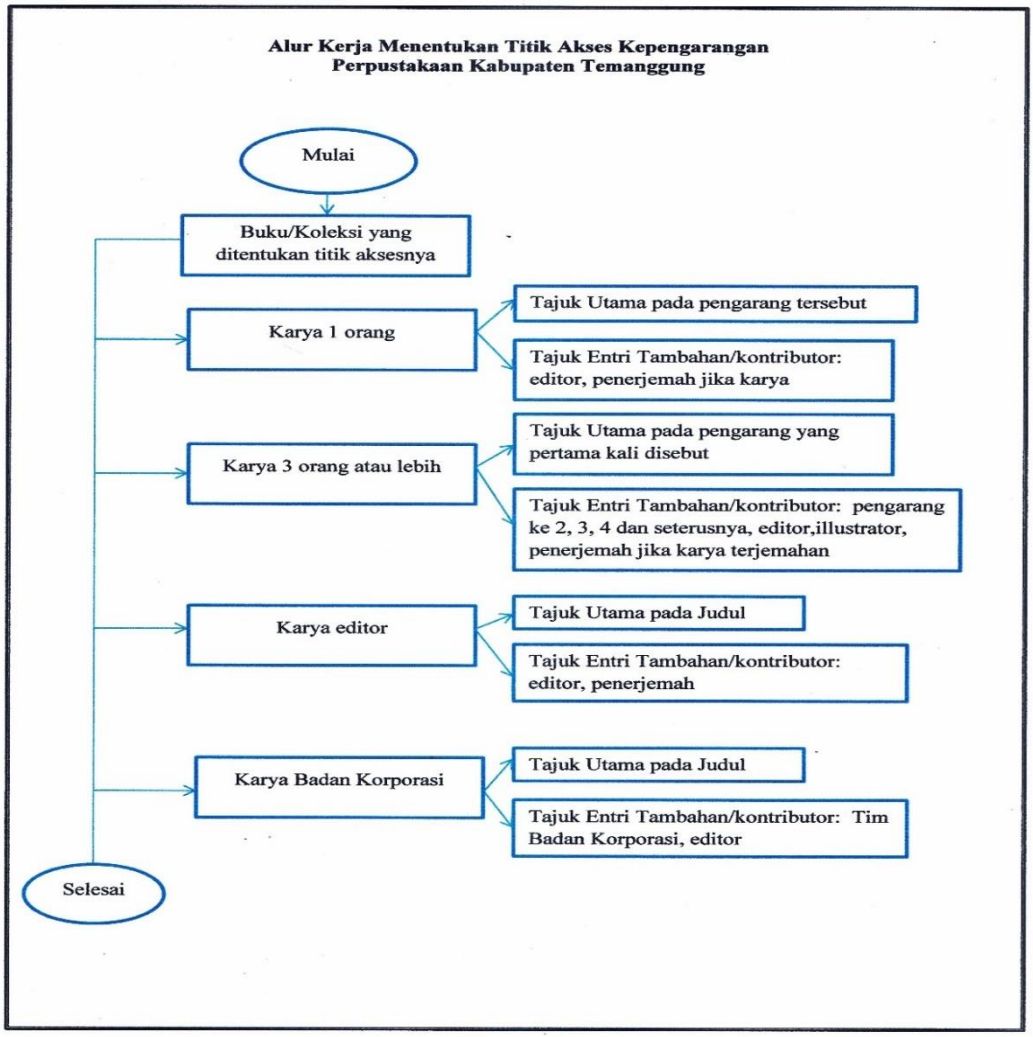


Gambar 1. Alur Deskripsi Bibliografi Bahan Perpustakaan
(Sumber Perpustakaan Kabupaten Temanggung)

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

Alur deskripsi bibliografis pada Gambar 1 merupakan alur pengolahan bahan perpustakaan di Perpustakaan Kabupaten Temanggung. Dimulai dari meneliti koleksi baru yang berasal dari kegiatan pengadaan pada pangkalan database yang menggunakan aplikasi otomasi Slims 8. Jika data bibliografis buku baru sudah ada didalam pangkalan data maka pustakawan mencatatkan penambahan nomor inventaris/nomor induk. Jika belum maka dilaksanakan kegiatan pendiskripsian bibliografis. Kegiatan selanjutnya adalah memvalidasi data dari koleksi baru tersebut.

"Kegiatan validasi merupakan rangkaian kegiatan dalam pengesahan data bibliografis di pangkalan data. Kegiatan ini memastikan bahwa data bibliografis yang ada di pangkalan data katalognya sudah benar dan koleksinya sudah dapat didayagunakan oleh pemustaka" (Wiliharti, 2018, p. 9). Jika data bibliografis sudah benar maka koleksi dapat ditayangkan pada Online Public Access Catalog (OPAC) dan siap dimanfaatkan oleh pemustaka untuk mencari informasi yang dibutuhkan.



Gambar 2. Alur Kerja Menentukan Titik Akses Kepengarangan
(Sumber Perpustakaan Kabupaten Temanggung)

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

Gambar 2 merupakan alur kerja menentukan titik akses kepengarangan. Dimulai dari bahan pustaka yang akan ditentukan titik akses kepengarangannya. Koleksi kemudian dilihat dan dicermati apakah karya tersebut ditulis oleh satu orang atau lebih dari tiga penulis. Koleksi tersebut apakah karya editor atau badan korporasi. Hal ini akan menentukan juga pada penulisan nomor panggil apakah titik akses ada pada nama pengarang pertama atau pada judul karya tersebut. Pada standar RDA penulis lebih dari 3 orang maka titik akses kepengarangannya ada pada pengarang atau penulis yang pertama kali disebut. Penentuan titik akses kepengarangan ini menjadi satu dengan kegiatan pendeskripsian bibliografi karena menggunakan worksheet yang sama.

No	Pengarang (Author)	Daerah Judul dan penanggung jawab/Kreator					Edisi/ Cetakan	Jenis Isi	Jenis Media	Jenis Kemasan	Daerah Penerbitan				Daerah Deskripsi		Bahasa	Catatan	ISBN	Pengarang Tambahan/ Kontributor
		Judul Buku	Penerjemah	Editor	Penanggung jawab	Illustrator					Tempat Terbit	Penerbit	Tahun Terbit	Hak Cipta	Deskripsi Fisik	Judul Seri				
1	Nanik Mirnani	Buku Pintar Rumus Super Lengkap SMK (Rumpun Teknik)		Qoni	Nanik Mirnani, Imam Wicaksono, Dyah Saptarika Hiqmah, Minyati, Betty Sekarasih Hadiyani		Cetakan pertama: Juni 2015	text	unmediated	volume	Yogyakarta	Familia	2015	© 2015 pada penerbit	536 halaman: ilustrasi berwarna; 19 cm		ind	Buku ini berisi rumus super lengkap yang dapat dipelajari oleh siswa-siswa SMK	978-602-9434-59-0	Imam Wicaksono, penulis Dyah Saptarika Minyati, penulis Betty Sekarasih Hadiyani, penulis Qoni, editor
2	Adi Jarot Pamungkas	Mainkan Gitarmu dengan Iringan Musik Digital Komputer		Renati Winong Rosari	Adi Jarot Pamungkas			gambar bergerak dua dimensi	komputer	computer disk	Yogyakarta	Andi	2007		1 CD-ROM : digital, Stereo; 4 3/4 in.		ind	CD pendamping buku dengan judul yang sama ini berisi iringan musik digital dengan format flp yang dapat dibuka pada Fruity Loop untuk latihan mengaran semen iringan musik digital.		Renati Winong Rosari, editor

Tabel 3. Contoh *Worksheet* pengerjaan pengtalogan dskriptif standar RDA
(Sumber Perpustakaan Kabupaten Temanggung)

Tabel 3 merupakan contoh *worksheet* saat melaksanakan pekerjaan deskripsi bibliografi dan penentuan titik akses kepengarangan. Kerta kerja dijadikan satu untuk memudahkan pustakawan dan tenaga teknis memasukkan data dari koleksi bahan perpustakaan sebelum memindahkan ke aplikasi otomasi Slims 8 serta meminimalisir kesalahan data.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Perpustakaan Kabupaten Temanggung telah mengunakan standar pedoman pengatalogan deskriptif yang baru yaitu RDA. Perubahan pengatalogan deskriptif dari standar AACR2 ke standar RDA dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala berupa kesalahan penulisan singkatan dan penulisan kepengarangan jika karya

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

lebih dari tiga orang. Kemudian kesalahan penulisan pada saat pengisian data biblografi pada aplikasi otomasi Slims 8.

Kesalahan dikarenakan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan belum familiar dan hafal dalam penggunaan pedoman RDA sebagai standar baru serta pengaplikasiannya pada aplikasi otomasi yang digunakan Perpustakaan Kabupaten Temanggung. Kondisi tersebut diatasi dengan menggunakan worksheet dalam pengerjaannya sebelum pengisian kedalam aplikasi Slims 8. Serta pelaksanaan kegiatan validasi data pada pangkalan data untuk meneliti apakah data yang diisi atau ditulis sudah sesuai dengan pedoman standar yang berlaku sebelum ditayangkan pada katalog terpasang (OPAC)

Saran yang dapat diberikan penulis untuk Perpustakaan Kabupaten Temanggung adalah melaksanakan bimbingan teknis secara berkala tentang pendeskripsian bibliografi menggunakan standar pedoman RDA. Hal ini supaya pustakawan dan tenaga teknis semakin memahami mengenai pendeskripsian bibliografi dengan pedoman RDA sehingga pengatalogan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar. Evaluasi kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pustakawan dan tenaga teknis tentang standar pedoman RDA dan pengisian data bibliografi pada aplikasi Slims 8.

REFERENSI

Anggraeni, R.J & Christiani, L. (2016). Proses adopsi Resource Description andAccess (RDA) di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 5(2), 141-150. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/15168

Ardoni. (2016). RDA: langkah awal. *Prosiding Seminar Nasional Perpustakaan "Pustakawan: Peluang dan Tantangan Karier Menghadapi Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)* (pp. 18-26). Padang: Prodi IPK FBS UNP. Retrieved from http://repository.unp.ac.id/24662/1/Ardoni-MakalahRDA.pdf#

Bahaunsa, I.A. (2019). Persepsi pustakawan terhadap implementasi Resource Description and Access (RDA) di Perpustakaan Universitas Indonesia. 1-214. Retrieved from https://repository.ub.ac.id/id/eprint/177587/.SKR/FIA/2019/742/051911464

Fardhiyah, L. et.al. (2017). *Pedoman RDA: resources description & access.* Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Indreswari, NS. et.al. (2018). *Pedoman Pengolahan Bahan Perpustakaan.* Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Laksmi. (2022). *Metode Penelitian Perpustakaan.* Tangerang: Universitas Terbuka.

Lasa, HS. (2023). *Penyusunan Artikel dan Publikasi Sekunder.* Tangerang: Universitas Terbuka.

Masykuri, A. (2015). Kebijakan penerapan Resource Descriptionand Access (RDA) di Indonesia. *Workshop pedoman pengkatalogan deskriptif berbasis RDA* (pp. 1-12). Bandung: JBPTUNIKOMPP. Retrieved from https://elib.unikom.ac.id/files/diskI/749/jbptunikompp-gdl-sriutamile-37416-2-rdakebi-i.pdf

Nabawi, I. (2019). Apa kabar penerapan Resource Description and Access (RDA) di Indonesia? *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, *11*(2), 185-197. doi:10.37108

Shadrina, R. (2016). Models FRBR and FRAD. *Jurnal Iqra, 10*(02), 950106. Retrieved from https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/543/434

Suharyanto. (2014). *Kajian komparatif atas penggunaan AACR2 dan RDA dalam format*

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

MARC21 terhadap bahan perpustakaan di Perpustakaan Nasional RI. Jakarta: Perpusnas Press.

Wiliharti, E. et.al. (2023). *Panduan Pengatalogan Praktis.* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

Hak Cipta © 2024, Dwi Chandra Susanti, Asma Rakha Dinazzah.

Melestarikan Identitas Budaya dalam Masyarakat Multikulturalisme di Era Society 5.0

Dwi listriyani[1], Yopan Tri Agustian[2], Ika Pasca Himawati[3]
[123] Program Studi Sosiologi, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia,
e-mail: dwilistriyani60@gmail.com (penulis korespondensi)

Abstrak

Di era modernisasi yang pesat, identitas budaya kian terancam pudar, termasuk dalam hal cara berpakaian dan gaya hidup. Globalisasi dan arus informasi yang deras membawa pengaruh budaya luar yang mendominasi, berpotensi menggerus tradisi dan nilai-nilai lokal. Pada era Society 5.0, di mana teknologi canggih dan kecerdasan buatan semakin menyatu dalam kehidupan sehari-hari, tantangan dalam mempertahankan identitas budaya dalam masyarakat multikultural semakin kompleks. Mempertahankan identitas budaya dalam era globalisasi yang semakin menguat adalah tantangan yang signifikan bagi banyak komunitas di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang dihadapi dan solusi untuk menjaga identitas budaya tetap hidup dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis penelitian yang sudah ada tentang topik tertentu. Metode ini membantu peneliti memahami apa yang telah diketahui, mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur. Data diperoleh melalui literatur rexiew dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendidikan budaya, teknologi informasi, dan kebijakan pemerintah yang inklusif sangat krusial dalam mempertahankan identitas budaya. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat lokal dan global melalui platform digital dapat memperkuat pemahaman lintas budaya dan mendorong harmoni sosial, dan juga mengakibatkan akulturasi serta lunturnya budaya lokal. Studi ini menyimpulkan bahwa adaptasi dan inovasi dalam menjaga identitas budaya merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era Society 5.0, serta menawarkan rekomendasi praktis seperti edukasi ke masyarakat luas kebijakan dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk pelestarian budaya di lingkungan yang semakin heterogen dan terhubung secara digital. perlunya menekatkan kepada generasi penerus terhadap kesadaran akan pentingnya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya yang turun-temurun.

***Kata Kunci**: Pendidikan Multikultural, Kebudayaan Indonesia, Masyarkat multikultural dan Society 5.0.*

PENDAHULUAN

Di era modernisasi yang kian pesat, identitas budaya di berbagai belahan dunia menghadapi ancaman pudar. Hal ini tak lepas dari pengaruh globalisasi dan arus informasi yang deras, membawa budaya luar mendominasi dan berpotensi menggerus tradisi serta nilai-nilai lokal. Tantangan ini semakin kompleks di era Society 5.0, di mana teknologi canggih dan kecerdasan buatan menyatu dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat pengaruh budaya luar dan mempersulit upaya pelestarian budaya lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi seolah-olah memperpendek jarak geografis antarnegara. Globalisasi yang semakin mengikis jarak ini tidak secara otomatis berarti akan menyatukan manusia. Interdependensi tetap membuat hubungan antarnegara, antar-masyarakat, dan antar-individu semakin kompleks. Walaupun semua pihak menjadi lebih dekat dan saling tergantung satu sama lain, hal ini tidak serta-merta menghasilkan pemahaman yang lebih baik di antara mereka. Dengan kata lain,

Hak Cipta © 2024, Dwi listriyani, Yopan Tri Agustian Ika Pasca Himawati.

interdependensi global tidak menjamin kehidupan yang lebih baik untuk setiap negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, globalisasi juga membawa serta industrialisasi yang menerobos struktur masyarakat. Meskipun berbagai masyarakat cenderung mempertahankan elemen-elemen kebudayaan, keagamaan, atau identitas partikular lainnya, munculnya kekuatan-kekuatan industri dapat mengikis ikatan-ikatan dalam masyarakat tersebut. Risiko inilah yang menyebabkan individu merasa terasing, meskipun jarak antar-manusia semakin kabur. Globalisasi memang mendekatkan dan menghapus jarak, tetapi sekaligus dapat meningkatkan pertentangan antar-individu, antar-komunitas, dan antar-kebudayaan. Dalam konteks Indonesia, memperkuat persatuan sebagai bangsa menjadi kebutuhan untuk menghadapi berbagai dampak negatif dari globalisasi. Upaya untuk menggalang potensi yang beragam perlu ditingkatkan melalui kerja sama yang sederajat di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. (Zulfa, A, 2022)

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan keragaman dalam berbagai aspek, termasuk kekayaan alam, agama, suku, dan ras, yang mempengaruhi keanekaragaman budayanya. Keanekaragaman atau kemajemukan budaya ini tentu akan mempengaruhi watak dan karakter penduduk setempat atau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kemajemukan masyarakat tidak selalu berjalan damai dan tenteram, tetapi dapat memunculkan konflik karena adanya perbedaan watak dan karakter antar golongan masyarakat (Siti Nurhidayah, Ayu Rahmawati, 2022). Konflik yang terjadi di masyarakat bisa berlarut-larut jika pemahaman mengenai kemultikulturalan tidak diperbaiki. Pemahaman tentang perilaku saling menghormati, menghargai, dan memahami perbedaan budaya ini perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi karakter bawaan yang secara tidak sadar tertanam dalam diri seseorang.

Multikulturalisme adalah keberagaman bangsa yang memiliki potensi besar dan harus dikembangkan, meskipun kombinasi dan pemetaannya berbeda-beda (Kamil dan Saputra, 2022). Pendidikan multikultural ini juga berfungsi sebagai pemulihan karakter setelah masa COVID-19, di mana interaksi dengan lingkungan berkurang dan kecenderungan individualisme meningkat. Dalam era globalisasi yang berkembang pesat, penggunaan teknologi dan masuknya budaya luar ke Indonesia terjadi dengan cepat, sehingga sangat disayangkan jika kesempatan untuk memanfaatkan globalisasi malah menimbulkan masalah baru seperti lunturnya identitas nasionalisme dan karakter asli warga Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membentuk perubahan reformasi tersebut.

Era globalisasi memicu perkembangan pola kehidupan masyarakat yang pesat, sehingga budaya atau tren baru dapat mengikis jiwa nasionalisme. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faulinda, globalisasi dan perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif, seperti munculnya konflik disintegrasi, separatisme, dan rasisme yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat (Faulinda dan Aghni Rizqi Ni'mal, 2020). Oleh karena itu, diperlukan program yang mampu menjaga dan menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme peserta didik, mengingat mereka adalah penerus bangsa dalam 10 tahun atau lebih di masa yang akan datang. Persiapan calon penerus bangsa yang peka dan sadar terhadap multikulturalisme sangatlah penting. Membangun strategi pelestarian seperti spesies laut yang penting secara ekonomi dapat dikembangkan dengan menggunakan teknologi modern dan pendekatan berbasis data dari Society 5.0. Strategi ini akan menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan ekonomi industri perikanan dalam jangka Panjang (Majumdar et al., 2023). Keterlibatan masyarakat lokal adalah kunci pelestarian warisan budaya (Oladeji et al., 2022) sehingga diperlukan edukasi

Hak Cipta © 2024, Dwi listriyani, Yopan Tri Agustian Ika Pasca Himawati.

kepada generasi penerus dalam membangun kesadaran akan pentingnya menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya yang turun-temurun.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis penelitian yang telah ada mengenai keberlanjutan identitas budaya dalam era globalisasi dan Society 5.0. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan, yang diidentifikasi melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest. Proses pengumpulan data melibatkan identifikasi, seleksi, dan ekstraksi informasi penting dari literatur yang terpilih. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, di mana data yang telah diekstraksi dikelompokkan ke dalam tema-tema utama. Langkah-langkah ini mencakup koding data, pengelompokan tema, dan sintesis temuan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar tema.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur. Diskusi dengan ahli di bidang kebudayaan dan teknologi juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dan verifikasi terhadap hasil penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan akurat mengenai upaya mempertahankan identitas budaya di era modernisasi yang pesat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan multikultural saat ini menjadi keharusan untuk diperkenalkan kepada peserta didik sejak dini. Menurut Khoirunnisa (2022), manajemen sekolah yang terkait dengan pendidikan multikultural memiliki dampak besar terhadap sistem pembelajaran guru untuk menanamkan sikap adil terhadap tindakan serta jiwa toleransi pada siswa. Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa perilaku adil dan toleran muncul karena dukungan dari seluruh pengelola sekolah terhadap kesadaran siswa terhadap keberagaman. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Khairiah dan Syarifuddin (2020) yang menyoroti pentingnya pendidikan multikultural sebagai sumber pembelajaran untuk meningkatkan rasa toleransi dan saling menjaga di antara siswa. Mereka juga menegaskan bahwa pendidikan multikultural tidak terlepas dari integrasi jiwa nasionalisme.

Dalam konteks media digital yang sedang berkembang pesat, dampaknya bisa positif maupun negatif bagi masyarakat. Rohmah et al. (2022) dalam penelitiannya mengamati peran manajemen pendidikan dalam mencetak lulusan yang memiliki wawasan luas namun tetap mempertahankan jiwa nasionalisme. Mereka menekankan bahwa integrasi nilai-nilai moral bangsa Indonesia dalam penggunaan media digital dapat menghasilkan output yang kompetitif. Pendapat ini didukung oleh penelitian Hermino (2015) yang menyoroti bahwa karakter dan psikologis siswa dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang menerapkan pendidikan karakter yang positif di lingkungan sekolah.

Namun, seiring dengan kemudahan teknologi global yang semakin instan, kearifan lokal dalam budaya Indonesia terancam luntur. Sudargini dan Purwanto (2020) dalam penelitian mereka menjelaskan bahwa dampak negatif dari era digital dan globalisasi termasuk konflik dan diskriminasi di lingkungan sosial. Hal ini terjadi karena semakin berkurangnya sikap toleransi dan tenggang rasa akibat mudahnya budaya asing masuk melalui media sosial dan internet, yang

Hak Cipta © 2024, Dwi listriyani, Yopan Tri Agustian Ika Pasca Himawati.

pada akhirnya dapat mengikis budaya asli dan menurunkan rasa nasionalisme serta patriotisme

Penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap keberlanjutan identitas budaya dalam era globalisasi dan Society 5.0, di mana pendidikan budaya, teknologi informasi, kebijakan pemerintah, dan kolaborasi lintas budaya memainkan peran penting. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, baik melalui jalur formal maupun informal, terbukti efektif dalam memperkuat identitas budaya. Program pendidikan yang mengajarkan bahasa daerah, kesenian tradisional, dan sejarah lokal mampu membangun rasa keterikatan pada warisan budaya di kalangan generasi muda. Hal ini tidak hanya meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal tetapi juga menguatkan karakter dan jati diri bangsa.

Selain itu, teknologi informasi menjadi alat yang sangat kuat dalam mendokumentasikan, menyebarluaskan, dan mempromosikan budaya lokal. Di era digital, platform seperti media sosial, situs web budaya, dan aplikasi edukatif berperan penting dalam menjaga dan menghidupkan kembali tradisi budaya. Generasi muda, yang sangat akrab dengan teknologi, dapat dengan mudah mengakses informasi tentang budaya lokal dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan budaya secara virtual. Teknologi juga memungkinkan penyebaran informasi budaya secara lebih luas dan cepat, sehingga budaya lokal dapat dikenal dan dihargai tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.

Kebijakan pemerintah yang inklusif dan mendukung pelestarian budaya lokal juga sangat krusial. Pemerintah dapat memainkan peran signifikan melalui program-program yang mendukung pendidikan budaya, memberikan subsidi untuk kegiatan budaya, serta merumuskan regulasi yang melindungi warisan budaya dari komersialisasi yang berlebihan. Kebijakan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelestarian budaya dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hidup dan relevan di tengah arus modernisasi.

Kolaborasi antara masyarakat lokal dan global melalui platform digital dapat memperkuat pemahaman lintas budaya dan mendorong harmoni sosial. Kolaborasi semacam ini memungkinkan pertukaran budaya yang lebih dinamis dan inklusif, memperkaya pengalaman budaya masing-masing pihak. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa akulturasi dan lunturnya budaya lokal dapat terjadi akibat dominasi budaya asing. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan selektif dalam menerima pengaruh budaya luar, serta terus menguatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan bahwa pendidikan, teknologi informasi, kebijakan pemerintah, dan kolaborasi lintas budaya adalah kunci dalam mempertahankan identitas budaya di era globalisasi dan Society 5.0. Adaptasi yang bijaksana dan inovatif dalam menggunakan teknologi, serta dukungan kebijakan yang kuat, menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan identitas budaya. Strategi-strategi ini tidak hanya akan membantu melestarikan budaya lokal tetapi juga memungkinkan budaya tersebut berkembang dan beradaptasi dalam lingkungan global yang semakin kompleks dan terhubung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan budaya merupakan fondasi penting dalam mempertahankan identitas budaya. Program pendidikan yang dirancang dengan baik dapat menanamkan rasa bangga terhadap warisan budaya dan mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian budaya. Teknologi informasi juga memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan identitas budaya. Dengan semakin banyaknya konten budaya yang tersedia secara online, masyarakat memiliki akses lebih mudah untuk belajar dan terlibat dalam kegiatan budaya.

Kebijakan pemerintah yang mendukung sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelestarian budaya. Kebijakan yang mendukung dapat berupa dukungan

Hak Cipta © 2024, Dwi listriyani, Yopan Tri Agustian Ika Pasca Himawati.

finansial, regulasi pelindungan warisan budaya, serta program-program yang mempromosikan keragaman budaya. Kolaborasi antara masyarakat lokal dan global melalui teknologi digital dapat memperkuat identitas budaya, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya untuk mencegah dominasi budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal.

Studi ini juga menyoroti pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menjaga identitas budaya di era Society 5.0. Teknologi canggih dan kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mempromosikan budaya lokal secara lebih luas dan efektif. Namun, adaptasi ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak inti dari tradisi budaya tersebut. Rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas meliputi pengembangan strategi yang efektif untuk pelestarian budaya yang mencakup pendidikan, teknologi, dan kebijakan yang mendukung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi upaya pelestarian identitas budaya di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Adaptasi yang bijaksana dan inovatif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, sekaligus memastikan keberlanjutan identitas budaya di era Society 5.0.

KESIMPULAN

Penelitian ini mempertahankan identitas budaya di era Society 5.0 dengan menggunakan pendekatan yang mencakup pendidikan budaya, teknologi informasi, kolaborasi lintas budaya, dan kebijakan pemerintah. Pendidikan budaya adalah fondasi utama untuk menanamkan kesadaran dan kebanggaan akan identitas budaya sejak dini, melalui program pendidikan yang mengajarkan sejarah, bahasa lokal, dan seni tradisional. Teknologi informasi juga menjadi alat yang sangat baik untuk mendokumentasikan, menyebarluaskan, dan mempromosikan budaya lokal, sehingga menjadi lebih mudah dan cepat diakses oleh generasi muda dan masyarakat umum. Kebijakan pemerintah yang inklusif serta dukungan untuk pelestarian budaya lokal sangat penting. Kebijakan ini harus mencakup dukungan keuangan, peraturan untuk melindungi warisan budaya, dan program untuk mendorong keragaman budaya. Selain itu, kolaborasi di internet antara masyarakat lokal dan internasional dapat meningkatkan pemahaman lintas budaya dan mendorong harmoni sosial. Namun, ini harus diimbangi dengan upaya untuk mencegah dominasi budaya asing yang dapat merusak nilai lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada teman-teman kolega dan relasi yang telah membantu menyelesaikan artikel ini.

REFERENSI

Aditya, J., et al. (2023). Identistas Nasional: Kontribusi Program P5 dalam Kurikulu BaruGuna Membangun Rasa Nasionalisme di SMP Negeri 16 Pontianak. Jurnal Kependidikan, 7(1), 1–18. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4579

Aprianti, M., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2022). Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi terhadap Identitas Nasional Indonesia. Jurnal Pendidikan, 6(1), 996 998.https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2294

Bisri, A. M. (2020). Studi Analisis Komite Sekolah/Madrasah dalam MengawalKualitas Pendidikan. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1), 51 64. https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.31

Hak Cipta © 2024, Dwi listriyani, Yopan Tri Agustian Ika Pasca Himawati.

Dewi, C. S. (2010). Multikulturalisme dalam Penguatan Identitas Nasional: Kajian Pameran Seni Rupa Nusantara Pasca Reformasi di GNI, Jakarta. Seminar Nasional Institut Kesenian Jakarta (IKJ), 1(1). https://doi.org/10.52969/semnasikj.v1i1.44

Dewantara, J. A., & Juliansyah, N. (2023). Identitas Nasional: Kontribusi Program P5 dalam Kurikulum Baru Guna Membangun Rasa Nasionalisme di SMP Negeri 16 Pontianak. *Jurnal Kewarganegaraan*, *7*(1), 1-18.

Faulinda, E. N., & Aghni Rizqi Ni'mal, A. (2020). Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0. Edcomtech: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 5(1),61–66. http://dx.doi.org/10.17977/um039v5i12020p061

Handayani, N., & Wulandari, T. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Multikultural Di SMK Negeri 2 Mataram. ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah, 13(2). https://doi.org/10.21831/istoria.v13i2.17650

Hutagalung, R., & Ramadan, Z. H. (2022). Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Multikultural di Lingkungan Keluarga Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6(5), 4967–4991.https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2895

Kamil, N. K., & Saputra, Y. E. (2022). Bahan Ajar Pendidikan Multikultural untuk meningkatkan Rasa Nasionalisme Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar. JurnalJUPISI, 1(1). Retrieved from https://jupisi.untara.ac.id/index.php/jupisi/article/view/15%0Ahttps://jupisi.untaa.ac.id/index.php/jupisi/article/download/15/15

Khairiah, K., & Syarifuddin, S. (2020). Peran Manajemen Pendidikan dalam MasyarakatMultikultural. Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, 13(1),63–75. http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v13i1.3337

Majumdar, P., Bhattacharya, S., Sarkar, S., & Ghosh, U. (2023). On optimal harvesting policy for two economically beneficial species mysida and herring: a clue for conservation biologist through mathematical model. International Journal of Modelling and Simulation, 43(3), 200–222. https://doi.org/10.1080/02286203.2022.2064708

Oladeji, S. O., Grace, O., & Ayodeji, A. A. (2022). Community Participation in Conservation and Management of Cultural Heritage Resources in Yoruba Ethnic Group of South Western Nigeria. SAGE Open, 12(4), 215824402211309. https://doi.org/10.1177/21582440221130987

Hak Cipta © 2024, Dwi listriyani, Yopan Tri Agustian Ika Pasca Himawati.

Inovasi Kebijakan Pendidikan Tinggi di Era Society 5.0 sebagai Solusi Kenaikan UKT

Dwi Putri Vidiastuti[1], Muh. Adzam[2]
[1]Universitas Gadjah Mada, Gedung Masri Singarimbun Jln. Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta,
[2]STIE Yogyakarta, Jl. Seturan Raya, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman
e-mail: dwiputri2020@mail.ugm.ac.id (penulis korespondensi)

Abstrak

Di era Society 5.0, kajian inklusif dalam ilmu sosial, politik, dan humaniora, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi, menjadi semakin mendesak. Merespons pernyataan Kemendikbud yang menganggap pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier dan menghadapi isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus di Indonesia, muncul tantangan bagi pemerintah untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata. Studi ini mengeksplorasi berbagai inovasi digital seperti Kebijakan endowment fund (dana abadi), kebijakan blended learning (pembelajaran campuran), dan Kebijakan student loan (pinjaman biaya kuliah). Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Melalui analisis kebijakan, peran e-government, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kajian ini bertujuan memberikan panduan bagi strategi pemerintahan yang responsif dan adaptif di era digital. Kesimpulannya, pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat komitmen negara terhadap pendidikan tinggi yang terjangkau dan inklusif.

***Kata kunci**: Inovasi, Kebijakan, Pendidikan Tinggi, Society 5.0, dan Kenaikan UKT.*

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi (Marlinah, 2019). Di era *Society* 5.0, yang diinisiasi oleh Jepang, terdapat fokus untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi digital dengan kehidupan masyarakat guna menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. *Society* 5.0 lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti *Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT),* dan teknologi robot dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi maupun pendidikan (Hamu et al., 2023).

Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, salah satu tantangan utama adalah aspek pembiayaan atau UKT (Uang Kuliah Tunggal), biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi di Indonesia. Jika kenaikan UKT terus berlanjut, hal ini dapat membatasi aksesibilitas pendidikan bagi sebagian besar masyarakat. Salah satu faktor utama penyebab kenaikan UKT adalah peralihan status PTN (Perguruan Tinggi Negeri) menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) melalui UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, status tersebut akan membebankan pembiayaan pendidikan pada perguruan tinggi, biaya pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara. Perguruan tinggi diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan, hal ini menyebabkan beberapa perguruan tinggi menaikkan UKT untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Hak Cipta © 2024, Dwi Putri Vidiastuti, Muh. Adzam.

Selain itu, pada Pasal 76 ayat (2) huruf C UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pemerintah dalam melakukan pemenuhan terhadap hak mahasiswa yang kurang mampu memberikan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau setelah mendapat pekerjaan, dimana hal ini semakin memberatkan mahasiswa dengan bunga pinjaman. Di berbagai negara yang lain seperti Amerika dan Australia, solusi untuk memberikan keringanan bagi pembiayaan UKT untuk mahasiswa bisa dilakukan melalui *Income Share Agreement* (ISA) seperti yang dilakukan di Australia (Holliday & Gide, 2016). Namun, tentu saja ISA tidak relevan jika diterapkan di Indonesia, mengingat sulitnya mendapatkan pekerjaan setelah kuliah.

Salah satu upaya yang dilakukan perguruan tinggi untuk meringankan kenaikan biaya UKT adalah dengan memberikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa prestasi seperti yang dilakukan UIN Sumatera Utara maupuan Universitas Negeri Padang (UNP), UIN Sumatera Utara memanfaatkan layanan zakat melalui unit pengumpul zakat, sedangkan UNP memberikan potongan 50% bagi mahasiswa tingkat akhir (Ardiansyah et al., 2022).

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mendukung pendidikan tinggi melalui alokasi dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta berbagai program beasiswa, namun alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi di Indonesia hanya 0,6-1,6 persen dari total APBN. Angka tersebut jauh lebih rendah dari rekomendasi UNESCO yakni 2 persen dari anggaran negara. Kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah mendapat resistensi signifikan dari masyarakat. Kenaikan UKT dianggap tidak seimbang dengan penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa pendidikan tinggi akan menjadi semakin tidak terjangkau bagi banyak calon mahasiswa, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, karena masyarakat menilai kenaikan UKT sebagai bentuk komersialisasi pendidikan. Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek, Tjitjik Tjahjandarie, yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi bersifat tersier dan tidak wajib (Aditya & Rastika, 2024).

Dengan semakin meningkatnya tuntutan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi, diperlukan inovasi kebijakan yang dapat menekan biaya UKT tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Era Society 5.0 menawarkan berbagai peluang untuk menerapkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perguruan tinggi. Penggunaan teknologi canggih dalam proses pembelajaran dan administrasi, penerapan model pembiayaan yang inovatif, serta kerjasama yang lebih erat dengan sektor industri dan pemanfaatan sumber daya secara optimal merupakan beberapa strategi yang dapat diambil..

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *library reseacrh*. Paradigma interpretatif diterapkan untuk memahami makna dari fenomena sosial terkait inovasi kebijakan pendidikan tinggi di era Society 5.0. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti jurnal akademik, laporan kebijakan, dan dokumentasi implementasi kebijakan di institusi pendidikan tinggi. Analisis data berupa analisis deskriptif dan komparatif, serta interpretasi hasil untuk memberikan wawasan mengenai inovasi kebijakan yang dapat menekan biaya UKT. Unit analisis adalah kebijakan pendidikan tinggi yang diterapkan untuk mengatasi kenaikan UKT.

Hak Cipta © 2024, Dwi Putri Vidiastuti, Muh. Adzam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa inovasi kebijakan pendidikan tinggi di era Society 5.0 yang berpotensi menekan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Berikut adalah beberapa inovasi yang ditemukan beserta analisis dampaknya terhadap biaya pendidikan:

a. Kebijakan *Endowment Fund* (Dana Abadi)

Investasi dana abadi merupakan salah satu inovasi kebijakan yang diusulkan untuk mendukung keberlanjutan finansial perguruan tinggi di Indonesia. *Endowment fund (*dana abadi*)* adalah dana yang diinvestasikan dengan tujuan agar hasil investasinya dapat digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan perguruan tinggi secara berkelanjutan tanpa harus meningkatkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan sumber pendapatan alternatif yang stabil bagi perguruan tinggi, sehingga dapat mengurangi beban finansial mahasiswa. Alokasi 2% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk pendidikan, di mana 2% dari alokasi tersebut secara khusus digunakan untuk pendidikan tinggi.

b. Kebijakan *Blended Learning* (Pembelajaran Campuran)

Blended learning merupakan pendekatan pendidikan yang menggabungkan materi pembelajaran daring dengan peluang interaksi online, serta metode pembelajaran tradisional di dalam kelas. Pendekatan ini tetap membutuhkan kehadiran fisik dari pengajar dan siswa. Di sisi lain, blended learning juga diterapkan dalam pengembangan profesional dan pelatihan, namun sangat bergantung pada konteks, sehingga sulit untuk menemukan definisi yang seragam (Hidayah et al., 2020). Blanded learning juga memberikan pendekatan yang bisa meningkatkan mutu pembelajaran dengan menggabungkan dua model pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (Indah et al., 2024).

Dalam melaksanakan blanded learning, terdapat berbagai kelebihan serta tantangan seperti yang dijelaskan oleh (Achmad Firmansyah et al., 2023). *Blended Learning* meliputi kemampuannya sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dapat diterapkan sesuai dengan rencana pembelajaran yang meliputi kehadiran, orientasi, materi, dan evaluasi, serta telah terbukti efektif. Pendekatan pembelajaran campuran ini akan meningkatkan peluang kerja sama, menjadi model keberhasilan tidak hanya dalam persaingan tetapi juga dalam kolaborasi. Untuk mengadopsi fase pendidikan baru ini, seluruh pihak harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, termasuk pendidik yang harus terbuka terhadap perubahan.

1. Implementasi *Blended Learning* di Perguruan Tinggi

Universitas Harvard dan Massachusetts Institute of Technology (MIT) telah bekerja sama untuk menggunakan platform edX sebagai bagian dari inisiatif *Blended Learning* mereka. EdX adalah platform pembelajaran daring terkemuka yang menyediakan akses ke kursus-kursus dari berbagai universitas ternama di seluruh dunia. Dengan menggunakan edX, Harvard dan MIT dapat menghadirkan materi-materi pembelajaran yang berkualitas tinggi kepada mahasiswa mereka secara daring. Melalui platform edX, kedua universitas dapat mengintegrasikan materi pembelajaran daring ke dalam kurikulum mereka. Mahasiswa dapat mengakses kuliah-kuliah online, membaca materi, dan mengerjakan tugas secara mandiri melalui platform ini. Selain itu, edX juga menyediakan berbagai fitur interaktif, seperti forum diskusi dan kuis online, yang memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan staf pengajar.

Hak Cipta © 2024, Dwi Putri Vidiastuti, Muh. Adzam.

Penggunaan edX sebagai bagian dari *Blended Learning* memungkinkan Harvard dan MIT untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran mahasiswa. Mereka dapat menggabungkan pembelajaran daring melalui edX dengan sesi tatap muka yang terarah, seperti diskusi kelompok dan praktikum, untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang komprehensif dan interaktif. Dengan demikian, platform edX menjadi salah satu alat yang penting dalam upaya kedua universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka melalui Blended Learning (Shirokolobova, 2024).

UNU Pasuruan untuk mengatasi permasalah pro kontra dalam perkuliahan secara blended learning adalah membuat kebijakan baru yaitu perkuliahan ganjil genap, yang mana pada tanggal ganjil perkuliahan dilakukan secara tatap muka dan pada tanggal genap perkuliahan dilakukan secara online melalui google meet, zoom dan sebagainya (Achmad Firmansyah et al., 2023).

2. Dampak *Blended Learning* terhadap UKT

Penurunan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dapat berdampak positif terhadap Blended Learning dengan mengurangi beban finansial mahasiswa melalui beberapa cara. Pertama, dengan memanfaatkan platform pembelajaran daring, institusi pendidikan dapat mengurangi biaya operasional, seperti biaya bangunan dan perawatan fasilitas fisik, sehingga dapat mengurangi beban UKT yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Kedua, Blended Learning memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran dari mana saja, mengurangi biaya transportasi dan akomodasi yang biasanya diperlukan untuk hadir secara fisik di kelas. Selain itu, fleksibilitas waktu dalam Blended Learning memungkinkan mahasiswa untuk bekerja paruh waktu atau melakukan kegiatan lain secara fleksibel, yang dapat membantu mereka mendapatkan pendapatan tambahan untuk mengurangi beban biaya pendidikan. Dengan demikian, Blended Learning dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi beban UKT mahasiswa dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi.

c. Kebijakan *Student Loan* (Pinjaman Mahasiswa)

Student loan atau pinjaman mahasiswa adalah salah satu kebijakan inovatif yang bertujuan untuk membantu mahasiswa membiayai pendidikan tinggi mereka. Kebijakan ini menyediakan dana yang dapat dipinjam oleh mahasiswa untuk menutupi biaya pendidikan, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT), buku, dan biaya hidup. Setelah menyelesaikan pendidikan, mahasiswa diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan. *Student loan* dinilai berhasil di beberapa negara seperti, Amerika, Australia dan bahkan Nigeria. Berdasarkan hasil penelitian (Edinoh & Fatimayin, 2024) program pinjaman mahasiswa di Nigeria dianggap dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi, membantu mahasiswa kurang mampu, meningkatkan tingkat retensi, dan kelulusan di institusi pendidikan tinggi di Nigeria. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti pembayaran pinjaman, korupsi, pendanaan, keahlian personel, infrastruktur, dan emigrasi yang dapat menghambat implementasi program ini. Rekomendasi yang diberikan termasuk pemerintah harus memastikan pelaksanaan penuh program pinjaman mahasiswa di Nigeria karena program ini memiliki potensi untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi.

Berbeda dengan Nigeria, konsep *Income Share Agreements (ISA)* sebagai model alternatif pembiayaan pendidikan tinggi semakin menarik minat, terutama di Amerika Serikat. ISA dapat mengalihkan beban pendanaan dari pemerintah ke sektor swasta, yang berpotensi membebaskan dana pemerintah untuk diinvestasikan dalam sektor pendidikan tinggi. Meskipun ISA membuat beberapa lulusan membayar lebih banyak dibandingkan dengan sistem saat ini, mereka juga menawarkan manfaat seperti hambatan masuk yang lebih rendah dan opsi pembayaran yang

Hak Cipta © 2024, Dwi Putri Vidiastuti, Muh. Adzam.

fleksibel berdasarkan pendapatan. Sedangkan di Australia, sistem HECS-HELP yang ada saat ini memberikan metode pembiayaan yang nyaman dan berisiko rendah untuk kontribusi mahasiswa terhadap pendidikan tinggi (Holliday & Gide, 2016).

Student loan dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi masalah kenaikan UKT dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, skema student loan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja yang tidak selalu memungkinkan lulusan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan segera setelah lulus. Oleh karena itu, skema student loan yang diusulkan harus fleksibel dan inklusif, dengan mempertimbangkan beberapa faktor:

1. Pembayaran Bertahap:
   Skema *student loan* harus memungkinkan mahasiswa untuk memulai pembayaran pinjaman secara bertahap, mungkin beberapa tahun setelah lulus, untuk memberikan waktu bagi mahasiswa untuk menemukan pekerjaan dan stabilkan keuangan mereka.
2. Fleksibilitas Pembayaran:
   Harus ada opsi pembayaran yang fleksibel yang dihubungkan dengan pendapatan mahasiswa, sehingga memastikan bahwa pembayaran pinjaman tidak menjadi beban yang tidak terbawa saat mereka belum memiliki pendapatan yang stabil.
3. Bantuan dan Pendampingan:
   Program pendampingan dan bantuan karir harus disediakan untuk membantu lulusan dalam mencari pekerjaan dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan di pasar kerja. Peringanan Pinjaman: Bagi lulusan yang mengalami kesulitan finansial atau tidak dapat menemukan pekerjaan, harus ada mekanisme untuk memberikan peringanan atau penghapusan pinjaman.
4. Kolaborasi dengan Industri:
   Kerjasama dengan industri dan sektor swasta dapat membantu meningkatkan peluang kerja bagi lulusan dan memastikan bahwa program student loan tidak hanya berorientasi pada pendanaan tetapi juga pada hasil pendidikan dan kesempatan kerja.
5. Pendanaan Alternatif:
   Eksplorasi pendanaan alternatif, seperti dana abadi atau investasi sosial, dapat membantu mengurangi kebutuhan untuk student loan dan mengurangi beban hutang pada lulusan.

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja yang tidak pasti dan tantangan yang dihadapi oleh lulusan di Indonesia, skema student loan yang diusulkan harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak menambah beban kepada mahasiswa dan lulusan yang sudah menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan.

KESIMPULAN

Inovasi kebijakan pendidikan tinggi di era Society 5.0 menawarkan berbagai solusi untuk menekan kenaikan UKT. Implementasi *Endowment fund, blended learning* dan *student loan* dapat mengurangi biaya pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas serta kualitas pembelajaran. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada dukungan dari berbagai pihak dan penanganan tantangan yang ada. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan efisien

Hak Cipta © 2024, Dwi Putri Vidiastuti, Muh. Adzam.

REFERENSI

Achmad Firmansyah, Siti Nur Dianah, & Agus Qowiyuddin. (2023). Pro dan Kontra dalam Perkuliahan Secara Blended Learning di Program studi Pendidikan Matematika UNU Pasuruan Tahun 2023. *Jurnal Riset Rumpun Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, *3*(1), 158–165. https://doi.org/10.55606/jurrimipa.v3i1.2337

Aditya, N. R., & Rastika, I. (2024). Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal. In *Kompas.com*. https://nasional.kompas.com/read/2024/05/17/10201251/pernyataan-kemendikbud-soal-pendidikan-tinggi-sifatnya-tersier-dinilai-tak

Ardiansyah, M., Suharto, T., & Farid, A. S. (2022). Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bermasalah bagi Mahasiswa yang tidak Mampu pada Perguruan Tinggi. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(10), 4432–4441. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i10.1036

Edinoh, K., & Fatimayin, F. F. (2024). *Perception of Undergraduate Students on Implementation of Student Loan Programme in Tertiary Education in Nigeria*. *April*, 5–11. https://doi.org/10.17605/cajssh.v5i3.1

Hamu, M. H. A., Kalam, A. K., Megawaty, M., Daga, R., Katti, S. W. B., Sulkipli, S., Sudirman, S., Sujatmiko, S., Didiharyono, D., Qur'ani, B., & Jaya, A. K. (2023). Are We Ready to Face Society 5.0? In *Tangguh Denara Jaya* (Issue June).

Hidayah, N., Ahli, W., Bpsdm, M., & Penulis Korespondensi, A. (2020). Efektifitas Blended Learning Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Pencerahan*, *14*(1), 1693–7775. https://edukasi.kompas.com/read/2012/06/06/11503150/Perpaduan.Tatap.Mukadan.Kuliah

Holliday, S., & Gide, E. (2016). Funding Higher Education in Australia: Is it Time to Look at Income Share Agreement as an Alternative Model to Income Contingent Loans? *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, *15*(1), 1–13.

Indah, N., Ningsih, W., & Yuliana, F. (2024). *B lended Learning and Hybrid Learning*.

Marlinah, L. (2019). Pentingnya Peran Perguruan Tinggi dalam Mencetak SDM yang Berjiwa Inovator dan Technopreneur Menyongsong Era Society 5.0. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, *2*(3), 17–25. http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/647

Shirokolobova, A. G. (2024). Blended learning with digital didactics in higher education. *Vestnik of Samara University. History, Pedagogics, Philology*, *30*(1), 77–86. https://doi.org/10.18287/2542-0445-2024-30-1-77-86

Hak Cipta © 2024, Dwi Putri Vidiastuti, Muh. Adzam.

Auto-Translation of Formula 1 Terms: Analysing Race Radio Spoken by Lando Norris and His Engineers

Dzulfa Anita Royan
English Literature for Translation, Faculty of Law, Social, and Political Sciences,
Indonesia Open University, Cabe Raya St., Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, 15437, Banten – Indonesia
E-mail: dzulfa.anita@gmail.com

Abstract

Formula 1 is a popular and captivating sport that attracts a large number of people. The presence of numerous supporters from different parts of the world, each with their own native language, could be a significant challenge. This sport offers more than simply fast car racing; it also provides fans with opportunities, such as broadcasting race radio dialogue between drivers and their engineers during the race. For fans, broadcasting race radio is a fantastic advantage because it allows them to observe what happens between the athletes and their team. However, for non-English speaker like Indonesian have a problem understanding the dialogue. Despite the use of Auto-Translation in Closed Caption (CC) in the YouTube video used as the source for this article, the researcher identified a few instances of translation errors. This article analyses the results of Auto-Translation from English to Indonesian to determine the translation quality. Additionally, the results section details the correct translation and its methodology. This research uses the descriptive-qualitative method to collect dialogue samples from YouTube videos and analyse them one by one. The results indicate that there is still a significant loss of meaning, particularly to fully convey the meaning of race-related radio dialogue.

***Keywords**: Closed Caption, Formula 1, Race radio, Translation, YouTube*

INTRODUCTION

Quoted from Kurnia, 2022, *"Translation is the process of comprehending a source text (TT) and accurately rendering it into another language (TT) to facilitate comprehension by individuals. Translation is fundamentally an intercultural activity. It is true that culture is transferred when messages are sent in the target language rather than the original."*. When discussing language and translation, the feature's output language can be examined (Utama, 2019). Broadcast, print, and newer desktop computing are still prominent. Given the amazing connection between live sport and mass audiences that continue to enjoy communal and communicated experiences, this is especially true with television (Hutchins, 2019). Formula 1 is the best single-seater, open-cockpit racing class. Formula 1 independently produces its own race broadcasts, including races, qualifying sessions, practices, and highlights, on television and other media platforms in specific countries or regions and in specific languages(Shields & Reavis, 2020). Race radios for media transmissions are crucial in Formula One. Racing radio is a form of distance communication that the FIA (Federation International de l'Automobile) monitors and records. Race radio is a platform for exchanging messages between drivers and engineers on the pit wall while racing (Callies & Levin, 2019). This media is presented through live streaming, allowing fans to both enjoy and stay informed about their favourite driver. Linguistically, Indonesian fans and other non-English speakers have a difficulty. YouTube allows viewers to replay Formula 1 records and race radio broadcasts using Auto-Translation of Closed Caption (CC), yet errors still occur while translating English to Indonesian. Researcher collected few

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

samples of dialogue from the YouTube video titled '*Best of Lando Norris Team Radio from Shanghai 2024 China*', '*Best of First Time Race Winner Lando Norris Team Radio from Miami 2024*', and '*Lando Norris: Greatest Team Radio Moments*'. In this article, the researcher explores the error of Formula 1 term in Indonesian. For the purpose of conducting an analysis of the subject matter, the researcher uses descriptive-qualitative methodologies to study the meaning of the dialogue, as well as an Indonesian translation based on the description of the Formula 1 term.

METHODS

Collecting qualifiable samples from several sources is crucial for the analysis performed in this paper. The descriptive-qualitative method is a frequent strategy that entails the analysis or description of particular parts of the sample. Initially, the researcher takes a video recording of Lando Norris's racing radio from the online platform known as YouTube. Examine the video closely to verify that it includes a clear transcription (not an automated transcription), and also confirm that the Closed Caption (CC) functionality is enabled. To conduct a thorough analysis of Formula 1 terms, it is important to initially gather speech samples that have ambiguous meanings or jargon that lacks clarity using all possible approaches, and subsequently evaluate the inaccuracies. The next phase involves actively listening to the dialogue while the transcription is displayed and the closed caption feature is enabled. This allows for the comparison and identification of translations that may result in a loss of meaning. As automated technology lacks the ability to understand human language, it often leads to mistranslations. specifically, the person's verbal communication and the exact words they have expressed. After finishing it, keep a note of the dialogue section, along with its translated version, which includes technical terms from Formula 1. Finally, the researcher will thoroughly analyze each sample and thereafter translate it according to the Formula 1 dictionary.

RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION

A. Research Findings

The researcher has discovered several mistranslations of Formula 1 terms in the race radio speech samples collected from McLaren F1 driver Lando Norris and his engineers. The researcher randomly collected sentences from the YouTube video of race radio that exhibited a lack of significance. While the majority of the discussion focused on Formula 1, not all of it did. However, this fact served as a motivation for the researcher to select random dialogue.

TO LANDO NORRIS	INDONESIAN
Both Red Bulls medium. Both Mercedes hard. Both Astons hard.	Keduanya Red Bull medium. Kedua hati Mercedes. Kedua hati Aston.
And Lando, for your awareness. There is potentially smoke, coming in onto the track. Between turn 6 and turn 7, nothing to worry about.	ATL untuk kesadaran anda ada potensi asap masuk ke trek antara tikungan enam dan belokan 7 tidak ada yang khawatir.
We're suggesting 1 more timed lap, with no DRS.	Kami sarankan sekali lagi bahwa tanpa DRS.

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

And Lando, the tyre is cooling down. So, I think what you've done is correct. What you've done with the Strat is correct.	L dan mendarat ban sedang mendingin jadi menurut saya apa yang anda lakukan sudah benar apa yang anda lakukan dengan Strat sudah benar.
And then people like hulkenberg has pitted onto the hard the undercut power looks potentially quite big.	Dan kemudian orang-orang seperti Hulkenberg telah mengadu ke hard tenaga undercut terlihat berpotensi cukup besar.
Ok Lando, our main goal is just managing the gap to Sainz. For awareness, Russell has pitted. He's 26.2, not on our race.	Oke tujuan utama kami hanya mengelola kesenjangan terhadap sains. Untuk kesadaran Russell telah melakukan ped dia 26,2.

Table 1. The dialogue from Engineer to Lando Norris as **samples**
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

FROM LANDO NORRIS	**INDONESIAN**
It seems better than race sim, for the time being.	Lebih baik dari RAC untuk saat ini.
Should I fire up?	Haruskah saya bersemangat?
Yeah, I can't mate. I'm aquaplaning. It's too wet at the minute.	Ya saya tidak bisa sobat. Saya akan merencanakan di sana terlalu basah pada saat itu.
There is a bollard on track, could go VSC.	Ada Bard di trek, bisa pergi VC mengerti.
I think we gotta box anyway, yeah?	Aku pikir kita punya kotak pokoknya ya
Yeah, tyres are fine, I'm just struggling with the front right a lot. Sorry the rears. My fronts are still fine.	Ya TI baik-baik saja. Saya hanya kesulitan dengan pengendaraan depan jadi bagian belakang depan saya masih baik-baik saja.

Table 2. The dialogue from Lando Norris to Engineer as samples
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

B. Discussion

When the sample are completely collected and written neatly on the table, researcher start to analyze the error of translation.

TO LANDO NORRIS	**INDONESIAN**
Both Red Bulls medium. Both Mercedes hard. Both Astons hard.	Keduanya Red Bull medium. Kedua hati Mercedes. Kedua hati Aston.

Sample 1.
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

Some of the words in the first sample have a loss of meaning. Firstly, carefully examine each inaccuracy in translation and assign each one a precise definition based on reputable English dictionaries such as Oxford Dictionary and Cambridge Dictionary. Both, /bəʊθ/ (predeterminer, determiner, pronoun) denotes the collective reference to two individuals or objects. In the

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

Indonesian translation, the word 'Keduanya' accurately represents the original meaning. However, in order to obtain a more precise understanding of the phrase, it is advisable to interpret 'both' as 'Kedua' because the subsequent phrase is 'Red Bull' as the subject, thus it can be translated into Indonesian as 'Kedua Red Bull' which refers to the Formula 1 drivers of Red Bull. The phrase "Both Mercedes hard. Both Astons hard." is entirely incorrect in Indonesian. Prior to analyzing the inaccuracy in translation, researchers discovered auditory impairment resulting from automatic translation using the Closed Caption (CC) feature. The issue involves the translation of the word 'hard' into Indonesian. The literal meaning of 'hard' in Indonesian is 'keras', but unfortunately it was translated as 'hati' since the feature identifies it with the concept of 'heart'. Therefore, it was decided to translate it as 'hati'. The issue arises from the fact that the speaker, who happens to be Lando Norris's engineer, talks with his own specific accent. If the research follows to the use of dialogue and employs the literal translation approach, the phrase 'Both Mercedes hard. Both Astons hard.' would be translated as 'Kedua Mercedes keras. Kedua Aston keras.' Indonesian Formula 1 fans may already be familiar with the meaning of the term 'hard' in Formula 1 races. However, individuals who are new to Formula 1 or unfamiliar with it may encounter difficulties in comprehending it. According to Jonathan Noble's book titled "Formula 1 Racing for Dummies," the term "hard" in Formula 1 refers to a specific type of tire compound. To ensure the terms have a clear meaning, the researcher decision to translate them into Indonesian as 'Mercedes and Aston Martin use hard tires.' The researcher has joined the sentence 'Both Mercedes hard. Both Astons hard.' in order improve its structure, as it conveys the same concept but with distinct subjects. The term 'Astons' is a translation of 'Aston Martin', which is associated with one of the Formula 1 teams. The researcher had the option to translate 'hard' as 'keras' in Indonesian, but chose to retain the English phrase due to its specificity and originality in the context of Formula One. Another purpose is to prevent ambiguity, since Indonesian fans may interpret it as 'ban keras', but in reality, all types of tires are hard. To ensure accurate translation while preserving the intended meaning refer to the table provided below.

TO LANDO NORRIS	**INDONESIAN**
Both Red Bulls medium. Both Mercedes hard. Both Astons hard.	Kedua Red Bull menggunakan *medium*. Mercedes dan Aston Martin menggunakan *hard*.

Result 1.
(source: author analysis)

FROM LANDO NORRIS	**INDONESIAN**
It seems better than race sim, for the time being.	Lebih baik dari RAC untuk saat ini.

Sample 2.
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

Foreign vocabulary in sports is critical for the learning process. Furthermore, mastering foreign language is essential to avoiding misunderstandings caused by misinterpretation of a foreign term's meaning in a sport (Lestari, 2019). *Sim racing, also referred to as 'simulation racing' within the community, involves virtual races that occur on simulated software* (Dave, 2021). The Indonesian equivalent is commonly referred to as 'RAC'. Evidence demonstrates that the translation has significant problems. The issue arises from the fact that the speaker, Lando

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

Norris, possesses a distinct accent when he communicates. The technology identifies this as 'RAC' due to the potential confusion in pronunciation between 'racing sim' and 'R A C', which, although similar, could pose a significant problem. To ensure accurate translation while preserving the intended meaning refer to the table provided below.

FROM LANDO NORRIS	INDONESIAN
It seems better than race sim, for the time being.	Untuk saat ini, lebih baik daripada yang di simulator.

Result 2.
(source: author analysis)

TO LANDO NORRIS	INDONESIAN
And Lando, for your awareness. There is potentially smoke, coming in onto the track. Between turn 6 and turn 7, nothing to worry about.	ATL untuk kesadaran anda ada potensi asap masuk ke trek antara tikungan enam dan belokan 7 tidak ada yang khawatir.

Sample 3.
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

Audiovisual texts rely on several codes to convey meaning. Their multimodal nature is both engaging and challenging. Sound, visuals, voice, written material, and music. Translators face the issue of only being able to transfer verbal information from a source language into a target language, despite everyone contributing to the final message (Rogers, 2020). The init (Christanti V. , 2020)ial sentence highlights that the Auto-Translation of Closed Caption (CC) has already inaccurately transcribed its transcript. The transcription of 'And Lando' as 'ATL' is entirely incorrect and empty of any significance. The term 'consciousness' is accurately rendered as 'kesadaran' by a direct translation. In order to accurately reflect the sentence's context, it is more appropriate to interpret it as 'informasi' as Lando's engineer is attempting to convey the status of the track. The term 'turn' has multiple translations. One is referred to as 'tikungan' and the other as 'belokan'. According to the literal translation in Indonesian, those are accurate. In order to enhance clarity and maintain consistency in translation, the researcher made the decision to exclusively utilize the term 'tikungan' as the translation for the word 'turn'. The table below displays an improved translation conducted by the researcher.

TO LANDO NORRIS	INDONESIAN
And Lando, for your awareness. There is potentially smoke, coming in onto the track. Between turn 6 and turn 7, nothing to worry about.	Lando, sebagai informasi, ada potensi asap akan masuk di antara tikungan 6 dan 7. Namun tidak perlu khawatir.

Result 3.
(source: author analysis)

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

FROM LANDO NORRIS	INDONESIAN
Should I fire up?	Haruskah saya bersemangat?

Sample 4.
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

When it comes to Formula 1 terminology and its meaning, the language has its own unique qualities. During Lando's call on race radio, he highlighted the concept of "fire up." The term 'fire up' is a phrasal verb that denotes the act of developing someone with energy or enthusiasm, as defined by Merriam-Webster. The Auto-Translation accurately displays the right translation in Indonesian. While technically accurate, the term "correct" carries a distinct connotation in the context of Formula 1. As stated in the YouTube video "*Tech Bites: Fire-up of an F1 Engine – Sauber F1 Team*," the fire-up is the initial process of checking the systems once the vehicles have been put together. Another source that can enhance one's understanding of the F1 terminology is a video titled "*What is 'Fire Up' in Formula 1?*" available on the McLaren YouTube channel. Andrew, car assembly and hydraulics at McLaren Racing, stated that the "fire up" is essentially the initial occasion when the cars are fully assembled. Furthermore, according to Abby, the reliability engineer at McLaren Racing, "*We ignite the car to verify the functionality of all its mechanical components*." After considering the given descriptors of fire up, the researcher made the decision to translate it into Indonesian as 'nyalakan'.

FROM LANDO NORRIS	INDONESIAN
Should I fire up?	Harus kunyalakan?

Result 4.
(source: author analysis)

TO LANDO NORRIS	INDONESIAN
We’re suggesting 1 more timed lap, with no DRS.	Kami sarankan sekali lagi bahwa tanpa DRS.

Sample 5.
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

Acronyms are quite popular words used by people nowadays (Christanti V. , 2020). The challenge with the Auto-Translation feature mentioned above is that it occasionally fails to translate certain words. In this example, the researcher identified the problem that led to ambiguity in the Indonesian language. The functionality fails to recognise and translate the term 'timed lap'. *A timed lap is when a driver completes a full circuit of the track during a session of free practice or qualifying. Furthermore, a timed lap refers to a lap where a driver is putting up their best effort to achieve a rapid time. This differs from a warm-up or cool-down lap, which involves the driver's attention being directed towards getting the car ready for a following fast lap* (McLaren Formula 1, 2024). Due to its status as an original term in Formula 1, researchers have chosen not to translate it into Indonesian. Another Formula 1 phrase that remains untranslated in Indonesian is 'DRS'. DRS is an acronym for Drag Reduction System. *The technology is described as efficiently elevating the top rear wing flap to reduce air resistance on straight parts, hence granting the driver extra speed to surpass the car ahead. The activation is triggered when drivers come within*

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

a one-second distance of another car in front of them at specific areas of the circuit. This activation is referred to as DRS Activation Zones (Noble, 2020). The researcher approved with the usage of Auto-Translation in this instance, as it is both accurate and an authentic term in the field of F1. Therefore, in the Indonesian translation, it is appropriate to just borrow the phrase.

TO LANDO NORRIS	INDONESIAN
We're suggesting 1 more timed lap, with no DRS.	Kami sarankan satu putaran lagi tanpa *DRS*.

Result 5.
(source: author analysis)

FROM LANDO NORRIS	INDONESIAN
Yeah, I can't mate. I'm aquaplaning. It's too wet at the minute.	Ya saya tidak bisa sobat. Saya akan merencanakan di sana terlalu basah pada saat itu.

Sample 6.
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

The analysis of meaning presented a substantial practical obstacle because the translators, some of whom were non-native English speakers, lacked competence in this area. *Frequently, they had challenges in comprehending the complexities and ambiguities of the original text, especially when it entailed many meanings, metaphorical interpretations, and almost identical words* (Nida, as cited in Hatim & Munday, 2019). The translation issue in this situation arises from the term 'aquaplaning'. The Auto-Translation tool identified the word as 'planning', resulting in an Indonesian translation of 'merencanakan', which is indeed inaccurate. *Aquaplaning is a phenomenon that occurs on a wet race track when Formula 1 tyres can displace a significant amount of water, resulting in the formation of a very thin layer of water between the tyre and the track. This can pose a significant risk of losing control of the vehicle* (McLaren Formula 1, 2024). There are two distinct translation alternatives available to the researcher for translating this phrase. One approach is to retain the original name, and in the case of translating it to Indonesian, the researcher chose to utilise the term 'tergelincir' due to the fact that aquaplaning involves the potential for a car to slip.

FROM LANDO NORRIS	INDONESIAN
Yeah, I can't mate. I'm aquaplaning. It's too wet at the minute.	Ya, aku tidak bisa. Aku dalam keadaan *aquaplaning*. Ini terlalu basah.
Yeah, I can't mate. I'm aquaplaning. It's too wet at the minute.	Ya, aku tidak bisa. Aku tergelincir. Ini terlalu basah.

Result 6.
(source: author analysis)

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

TO LANDO NORRIS	INDONESIAN
And Lando, the tyre is cooling down. So, I think what you've done is correct. What you've done with the Strat is correct.	L dan mendarat ban sedang mendingin jadi menurut saya apa yang anda lakukan sudah benar apa yang anda lakukan dengan Strat sudah benar.

Sample 7.
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

Researchers concur that the Auto-Translation tool is not always capable of accurately correcting translations into another language. In this example, a problem arises at the start of the statement. The terms used in sample 7 of Formula 1 are 'cooling down' and 'Strat'. Cooling down refers to the process of decreasing the temperature of an object or substance. In Formula 1, the term is also employed to denote the temperature of the tyres. In Indonesian, the term 'mendinginkan' is used, and the translation provided by Auto-Translation is accurate and appropriate. *'Strat', refers to a mode on the steering wheel that is in the form of a dial. Its goal is to modify engine modes, particularly to increase power for overtaking or to conserve engine power* (Singh, 2020). *Another name, known as Rotary mode for strategic purposes: During the racing weekend, it is employed for various power mode combinations* (Noble, 2020). To translate this term, simply refer to the source text as it does not have a comparable definition in Indonesian.

TO LANDO NORRIS	INDONESIAN
And Lando, the tyre is cooling down. So, I think what you've done is correct. What you've done with the Strat is correct.	Dan Lando, suhu ban sedang menurun. Kurasa, yang kau lakukan tadi sudah benar. Yang kau lakukan dengan *Strat* sudah benar.

Result 7.
(source: author analysis)

FROM LANDO NORRIS	INDONESIAN
There is a bollard on track, could go VSC.	Ada Bard di trek, bisa pergi VC mengerti.

Sample 8.
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

The researcher has identified a problem with the Indonesian translation of the term 'bollard' in sample 8. Bollards are cylindrical posts that are inserted into the ground and are used to direct the flow of traffic (Samantha, 2022). A bollard is a device used in Formula 1 to prevent drivers from taking shortcuts via cutting corners. The Auto-Translation is unable to sustain its translation accuracy for Indonesian fans. While the term 'bollard' is already used in Indonesian, the closest equivalent is 'tiang pengaman'. However, in order to ensure a precise and appropriate translation, the researcher will adhere to using the term 'bollard' while translating into Indonesian. Another problem identified in the sample is the translation of the phrase 'might go VSC' as 'bisa pergi VC', which is entirely inaccurate. VSC is an acronym for Virtual Safety Car, which refers to a system used in racing to efficiently handle small errors on the course without requiring extensive

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

intervention. The literal meaning is 'virtual safety mobile', although it may not be an accurate translation.

FROM LANDO NORRIS	INDONESIAN
There is a bollard on track, could go VSC.	Ada *bollard* di trek, kemungkinan ada *VSC*.

Result 8.

(source: author analysis)

TO LANDO NORRIS	INDONESIAN
And then people like hulkenberg has pitted onto the hard the undercut power looks potentially quite big.	Dan kemudian orang-orang seperti Hulkenberg telah mengadu ke hard tenaga undercut terlihat berpotensi cukup besar.

Sample 9.

(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

Auto-translation consistently employs a literal technique that disregards the context in which it is conveyed. The literal translation of "pitted" in the previously mentioned the table is "mengadu," which is accurate. However, it is incorrect in terms of Formula 1. *The pit is the name of the area between the race track and the garages where the team are based for the duration of the race. This area is called the pits because originally, in the dim and dusty past, there was a pit dug out of the track surface where the team personnel would sit and signal their drivers (Noble, 2024).* The researcher is obviously convinced that the term "pitted" does not require translation into Indonesian; rather, it should be reformed to "pit." This conclusion is based on the description. The literal translation of "undercut" in Indonesian is "melemahkan." Translating the F1 term in this manner is ineffective. An undercut is a racing strategy when overtaking the car ahead by doing the pit first to use fresh tyres to obtain a position (Shields & Reavis, 2020). The term "undercut" is accurate in order to preserve the originality of the term; therefore, there is no need to modify it to Indonesian.

TO LANDO NORRIS	INDONESIAN
And then people like hulkenberg has pitted onto the hard the undercut power looks potentially quite big.	Hulkenberg telah melakukan *pit*. Mengganti ban *hard.* Ia memiliki potensi besar untuk melakukan *undercut*.

Result 9.

(source: author analysis)

FROM LANDO NORRIS	INDONESIAN
I think we gotta box anyway, yeah?	Aku pikir kita punya kotak pokoknya ya

Sample 10.

(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

Box is an additional Formula 1 term that many individuals are familiar with. The presence of individuals who are already aware may not pose any difficulties for them. As Indonesian supporters, they may already be aware of this issue; however, the researcher has identified a translation issue. Box is equivalent to "kotak" or "tempat penyimpanan" in Indonesian if translated

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

literally. In Formula 1, the word ‘box’ is an instruction to a driver over the radio, it means that they need to pit. Used as a noun, it refers to the drivers’ servicing area in the pit lane. Box comes from the German Boxenstopp, meaning pit stop (Stuart, 2020). Given the meaning, the researcher determined that translating the term into Indonesian could result in a loss of meaning.

FROM LANDO NORRIS	INDONESIAN
I think we gotta box anyway, yeah?	Kurasa kita harus menepi, ‘ya?

Result 10.
(source: author analysis)

TO LANDO NORRIS	INDONESIAN
Ok Lando, our main goal is just managing the gap to Sainz. For awareness, Russell has pitted. He's 26.2, not on our race.	Oke tujuan utama kami hanya mengelola kesenjangan terhadap sains. Untuk kesadaran Russell telah melakukan ped dia 26,2.

Sample 11.
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

An additional translation issue arises as a result of the automatic translation. The terms "gap" and "pitted" are used to describe the translation feature. A gap is a break or free space, as defined by the Cambridge Dictionary. While in Indonesian, it is referred to as "kerenggangan," "celah," or "kesenjangan." Based on the dictionary, the Indonesian translation demonstrates one of the accurate translations. The problem is that the word selection is not particularly effective. The Indonesian translation of "jarak" is more appropriate for the context of the sentence regarding the Formula 1 term, as it serves as an indication the distance between the cars. The pits are the area situated between the garages and the race course, where the crew is stationed for the duration of the race. The term "pits" refers to a place on the track where team personnel would sit and signal their drivers. This name originated from a pit that was dug out of the track surface in the distant past (Noble, 2020).Based on the description, the researcher strongly believes that the term 'pitted' does not require translation into Indonesian, but rather substitution with the word 'pit'. The term '26.2' refers to the time interval between drivers' cars. To translate this term into Indonesian, there is no need to make any changes except for adding a word as a time marker.

TO LANDO NORRIS	INDONESIAN
Ok Lando, our main goal is just managing the gap to Sainz. For awareness, Russell has pitted. He's 26.2, not on our race.	Ok, Lando, tujuan utama kita adalah menjaga jarak dengan Sainz. Sekedar informasi, Russell sedang menepi. Dia 26.2 detik di belakangmu. Bukan target kita.

Result 11.
(source: author analysis)

FROM LANDO NORRIS	INDONESIAN
Yeah, tyres are fine, I’m just struggling with the front right a lot. Sorry the rears. My fronts are still fine.	Ya TI baik-baik saja. Saya hanya kesulitan dengan pengendaraan depan jadi bagian belakang depan saya masih baik-baik saja.

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

Sample 12.
(source: YouTube videos mentioned in Introduction)

Translating a Formula 1 phrase involves more than simply converting it to another language. It is always difficult to adapt its meaning as well. In this instance, the automated function has inaccurately translated the term 'tyre'. The correct terms in Indonesian are 'ban' or 'roda'. Another translation problem has been identified in the phrase '...the front right a lot. Sorry the rears. My fronts are still fine.'. The phrase 'front right' refers to the section of the car's wing located at the front and on the right side. On the other hand, the term 'rear' refers to the wing section located at the back of the car (Noble, 2020). The automated Indonesian translation is ambiguous and inefficient.

FROM LANDO NORRIS	INDONESIAN
Yeah, tyres are fine, I'm just struggling with the front right a lot. Sorry the rears. My fronts are still fine.	Ya, bannya aman. Hanya saja sangat kesulitan dengan sayap depan-kanan. Maksudnya sayap belakang. Sayap depan masih aman.

Result 12.
(source: author analysis)

CONCLUSION

A vital issue with the translation discussed in this study is the failure to effectively communicate the content with clarity and precision. In order to acquire the true meaning of any sport terminology, particularly in Formula 1, more study was required. Although certain translations generated by the Auto-Translation feature may be correct in terms of literal translation, it is still crucial to check and evaluate the translations in the target language. The absence of automated transcription of the dialogue is also more difficult to translate the discourse into the target language. Acquiring knowledge of sports terminology is advantageous for individuals who are fluent in a language other than the original language of the sport. Instead of being translated incorrectly, the majority of the sports phrases that were discussed earlier are still used in their original form or in the language from where they originated. Researchers have found the errors translation that occurred on race radio communication between Lando Norris and his engineer were primarily due to changing the meaning of the terminology meaning to suit the context and its equivalent in the target language.

ACKNOWLEDGMENTS

I am deeply grateful to Allah for His unwavering guidance, blessings, and strength throughout my study journey. His divine wisdom has illuminated every step of my journey, and I am deeply grateful for His kindness and grace. Second, I'd like to convey my deepest gratitude to myself for the faithfulness, determination, and enthusiasm I put into this study. This journey has been a proof to personal development and self-discovery, and I am glad for the opportunity to broaden my horizons in academia. I owe my parents an enormous amount of appreciation. Their unfailing love, support, and sacrifices have been the foundation of my academic aspire. Their enthusiasm and belief in my ability has served as a constant source of inspiration and motivation. I am also grateful to my lecturer, Irwin Talenta, for providing invaluable assistance, mentorship,

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

and encouragement throughout this scientific paper project. Also, the knowledge, critical input, and constant support helped shape the direction and quality of this study. As a last note, I would like to offer my deepest gratitude to my favorite Formula 1 driver, who not only served as my study's subject but also motivated me to see this work through to its conclusion, Lando Norris. I would also like to extend my congratulations to him on get his first win in the Formula 1 Grand Prix in Miami in 2024.

REFERENCES

Callies M, L. M. (2019). When Did I Do Dangerous Driving Then? In *Corpus approaches to the Language of Sports* (pp. 111-119). Bloomsblury Publishing.

Christanti, V. (2020). An Error Analysis of Comments and Photo Captions on Social Media: A Study of YouTube and Instagram. *University of Kristen Satya Wacana Repository*.

Christanti, V. (2020). An Error Analysis of Comments and Photo Captions on Social Media: A Study of YouTube and Instagram. *University of Kristen Satya Wacana Repository*.

Dave. (2021, 6 16). *Getting Started with Sim Racing in Coach Dave Academy*. Retrieved from coachdaveacademy.com: https://coachdaveacademy.com/tutorials/what-is-sim-racing/

Hatim, B. &. (2019). *Translation an Advanced Resource Book for Students (Second Edition).* Routledge Taylor & Francis Group.

Hutchins, B. (2019). Mobile Media Sport: The Case for Building a Mobile Media and Communications Research Agenda. Communication & Sport. 466-487.

Kurnia, A. (2020). *Seni Penerjemahan Sastra.* DIVA Press.

Lestari, S. D. (2022). ISTILAH BERBAHASA INGGRIS DI CABANG OLAHRAGA SEPAKBOLA (SOCCER TERM GLOSSARY). *Jurnal Ilmu Olah Raga Dan Kesehatan*, 51-60.

McLaren. (2024). *F1 Playbook for Drifters, Pacers, and Armchair Racers*. Retrieved from mclaren.com: https://www.mclaren.com/racing/formula-1/playbook/

Noble, J. (2020). *Formula One Racing 2nd Edition.* John Wiley & Sons, Inc.

Rogers, S. E. (2020). *The Palgrave Studies in Translating and Interpreting.* Springer Nature Switzerland AG.

Samantha. (2022, 12 20). *The Use of Concrete Bollards on Race Tracks*. Retrieved from streetscape.co.za: https://streetscape.co.za/the-use-of-concrete-bollards-on-race-tracks/

Sauber, T. (2013, 9 13). *Tech Bites: Fire-up of an F1 Engine*. Retrieved from YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JbZr7GgJuUQ

Shields. B., &. R. (2020). Formula 1: Unleashing the Greatest Racing Spectacle on the Planet. 19-194.

Singh, S. (2020, 3 30). *What All the Controls Do on a Modern-Day F1 Steering Wheel*. Retrieved from evoindia.com: https://www.evoindia.com/blog/f1-steering-wheel

Stuart, G. (2020, 2 8). *A Beginner's Guide to… F1 Slang*. Retrieved from formula1.com: https://www.formula1.com/en/latest/article/a-beginners-guide-to-f1-slang.1Pg6tvGZ2y7u4KAnc8WXGl

Utama, F. U. (2019). Analisa Teknik Penerjemahan pada Kalimat Deklaratif oleh Auto Translation dalam fitur Closed Caption (CC) pada video di YouTube.com. *Universitas Gadjah Mada Repository*, 57-61.

Hak Cipta © 2024, Dzulfa Anita Royan.

Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Menolak Kebijakan Neoliberal di Pesisir Selatan Kulon Progo

Eka Zuni Lusi Astuti
University of Limerick, Irlandia
e-mail: Eka.Astuti@ul.ie

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PT Jogja Magasa Iron mensosialisasikan rencana penambangan pasir besi kepada masyarakat pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada pertengahan tahun 2006 silam. Petani lahan pantai menolak rencana penambangan tersebut karena penambangan akan merampas lahan pertanian mereka yang telah puluhan tahun menjadi sumber penghidupan. Penambangan juga akan merusak ekosistem pesisir. Pada tahun 2007, petani lahan pantai mendirikan Paguyuban Petani Lahan Pantai-Kulon Progo (PPLP-KP) untuk menghimpun kekuatan petani melawan rencana penambangan. PPLP-KP melakukan perlawanan terbuka (overt resistance) seperti berdemonstrasi, memasang poster-poster perlawanan di wilayah pesisir, berdoa secara masal (mujahadah), dan memboikot pilot proyek pabrik pasir besi di wilayah pesisir. Perlawanan tertutup (hidden transcript) juga dilakukan, seperti mengeksklusi warga pesisir yang mendukung rencana penambangan pasir besi. Pada tahun 2014, pemerintah menunda rencana penambangan tersebut tanpa kejelasan. Sampai saat ini, PPLP-KP tetap Bersatu menolak rencana penambangan dan semua aktivitas yang berpotensi merampas lahan pertaniannya. Perlawanan PPLP ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ektraktivisme yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor bisnis. Perlawanan tersebut merefleksikan premis kelima teori David Harvey dimana Accummulation by Dispossession yang mendorong perlawanan. Tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana PPLP-KP mempertahankan perlawanannya selama 18 tahun.

Kata kunci: *perlawanan petani, neoliberalisme, ekstraktivisme, Accummulation by Dispossession*

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Indonesia mendapat predikat sebagai negara ekstraktif (*extractivist state*) karena sistem ekonomi dan model produksinya mengimplementasikan kegiatan-kegiatan ekstraktif yang masif. Bagaikan dua sisi mata uang, sumber daya alam (SDA) yang berlimpah-ruah membawa keberuntungan sekaligus mendatangkan berbagai tantangan. Keberuntungan tersebut berupa melimpahnya pendapatan dari hasil eksplorasi sumber daya alam dan keunggulan komparatif pada sektor pertanian. Selain itu, pemerintah mendapatkan banyak keuntungan dari penyewaan sumber daya alam (*natural resource rents*). Maka, pendapatan dari sektor ekstraktif berkontribusi besar pada pendapatan nasional. Di sisi lain, tantangan hadir ketika pemerintah membuka seluas-luasnya pintu bagi investasi asing untuk mengeksploitasi SDA Indonesia. Investasi tentunya membawa keuntungan bagi negara, investor, pengusaha, dan membawa multiplier efek bagi masyarakat sekitarnya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa eksploitasi SDA menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu komunitas lokal sehingga menuai perlawanan. Sebagian besar kasus perlawanan komunitas akar rumput terhadap eksploitasi SDA

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

berupa konflik agraria. Bentuk-bentuk eksploitasi SDA yang merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya disebut sebagai ekstraktifisme (*ekstraktivism*). Ekstraktivisme mengacu pada sistem penindasan, kekerasan, penipisan sumber daya, dan non-timbal balik yang didukung dan dibenarkan oleh jaringan praktik, mentalitas, dan perbedaan kekuasaan yang saling terkait (Chagnon dkk. 2022).

Proses ekonomi ekstraktif di Indonesia dapat dikaji dari ekonomi politik Indonesia sejak zaman kolonial. Secara umum, ekonomi politik Indonesia terdiri dari empat era yaitu era kolonial, era milik negara (*state owned*), era marketisasi, dan era demokratisasi. Ekonomi ekstraktif Indonesia didirikan dan dipupuk sejak zaman kolonial. Menggunakan merkantilisme, *Vereenig-de Oost-Indische Compagnie* (VOC) menerapkan ekonomi ekstraktif murni dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah pada tahun 1800-1900. Ekonomi ekstraktif dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui sistem ekstraktif modern dengan menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1815-1830. Oleh karena itu, ekonomi politik Indonesia mewarisi sifat kolonial, seperti ekspor yang didominasi oleh bahan baku, impor yang didominasi oleh barang-barang konsumsi, dan pasar keuangan yang digunakan oleh investor asing untuk memutar kelebihan modal mereka (Baswir 2009). Sifat kolonial ekonomi politik diterapkan pada era marketisasi dan era demokratisasi. Pemerintah menjalankan liberalisme dan neoliberalisme seperti mengundang modal asing dan bersandar pada pinjaman luar negeri.

Sumber daya alam Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Investasi sumber daya alam memberikan manfaat bagi investor, negara, dan membawa multiplier effect bagi masyarakat. Namun, eksploitasi sumber daya alam juga menyebabkan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat setempat, sehingga mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Ada begitu banyak kasus di mana masyarakat lokal memerangi eksploitasi sumber daya alam di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kulon Progo dimana serikat petani bernama PPLP menolak rencana penambangan pasir besi. Rencana penambangan ini digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Jogja Magasa Iron, Ltd (PT JMI). Pada 2006, mereka mensosialisasikan rencana tersebut kepada masyarakat pesisir. Pada saat yang sama, masyarakat pesisir, khususnya petani pesisir, menolak rencana penambangan tersebut. Pasalnya, pertambangan akan mengambil alih lahan pesisir sebagai sumber mata pencaharian mereka. Berdasarkan rencana kontrak karya penambangan besi, luas konsesi pertambangan pasir besi mencapai 2.987,79 hektar, meliputi Desa Banaran dan Karangsewu di Kecamatan Galur, Bugel, Plered, dan Garongan di Kecamatan Panjatan, dan Karangwuni di Kecamatan Wates. Daerah tersebut merupakan pantai yang digunakan oleh masyarakat untuk bertani dan memelihara ternak. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat pesisir menolak rencana tersebut. Pemerintah melanjutkan proyek tersebut, memicu perlawanan dari masyarakat pesisir.

Konflik muncul karena perbedaan kepentingan penggunaan lahan pesisir antara pemerintah dan masyarakat pesisir. Menurut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, lahan pesisir memiliki potensi sumber daya alam pasir besi berdaya jual tinggi. Dengan demikian, jika pasir besi ditambang dan diolah di Kabupaten Kulon Progo, maka akan mendongkrak pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan, dan mendorong perkembangan ekonomi Kulon Progo. Sebaliknya, para petani pesisir menolak keras rencana tersebut untuk mempertahankan sumber mata pencaharian mereka. Pengalaman sejarah juga mendukung penolakan tersebut. Pertama, para petani pesisir telah bekerja keras sejak tahun 1984 untuk mengubah lahan pantai yang tandus menjadi lahan pertanian produktif. Kedua, para petani pesisir

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

tidak mengakui tanah pesisir sebagai Paku Alam Ground (PAG) yakni tanah milik Paku Alam (bagian dari keluarga kerajaan Yogyakarta). Menurut masyarakat pesisir, tanah pesisir adalah tanah negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, tanah tersebut berpotensi menjadi milik perorangan setelah lebih dari 20 tahun digarap oleh masyarakat. Para petani pesisir percaya bahwa tanah pesisir adalah milik mereka meskipun mereka tidak memiliki sertifikat tanah. Sebaliknya, pemerintah berpendapat bahwa pemilik tanah adalah Paku Alam.

Selanjutnya, pada tahun 2007 para petani pesisir mendirikan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Penolakan tersebut semakin kuat pasca berdirinya PPLP yang mengorganisir para petani pesisir untuk memerangi pemerintah melalui aksi protes, demonstrasi, melakukan eklusi sosial terhadap warga yang pro rencana penambangan, memboikot beberapa program pemerintah, dan melakukan doa bersama (mujahadah). Mereka juga membangun jaringan dengan organisasi masyarakat sipil akar rumput, LSM, akademisi, dan jurnalis untuk mengadvokasi perjuangan mereka. Konflik meningkat selama 2010 – 2012, di mana awalnya merupakan konflik vertikal, kemudian menjadi konflik horizontal. Seiring waktu, konflik telah menciptakan disintegrasi sosial dan mengkerdilkan norma-norma sosial di wilayah pesisir.

Penolakan PPLP terhadap rencana penambangan pasir besi merupakan salah satu praktik terbaik gerakan akar rumput di Indonesia. Konflik berakhir sekitar tahun 2014 ketika rencana penambangan pasir besi ditunda dan masih belum jelas sampai saat ini. Namun, PPLP terus berjuang. Mereka memperingati hari lahir PPLP setiap tahun untuk menunjukkan eksistensinya menolak perampasan ruang hidup, membangun jaringan dengan serikat petani lain dan mengadvokasi kasus yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana PPLP mempertahankan perlawanannya.

b. Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan dan menambah landasan penelitian sarjana (skripsi) dan pascasarjana saya (tesis) mengenai konflik rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. Penelitian sarjana saya pada tahun 2010 memetakan pro dan kontra aktor dan minat mereka pada rencana penambangan besi pasir, dinamika, dan bentuk konflik. Sementara itu, penelitian pascasarjana saya pada tahun 2012 mengeksplorasi konstruksi konflik dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.

Resistensi petani adalah masalah sosial klasik di banyak bagian dunia. Sebagian besar berupa gerakan sosial akar rumput untuk mempertahankan mata pencaharian mereka atau melindungi mode produksi dari modernisasi. PPLP, dalam konteks konflik rencana penambangan pasir besi, terbukti tangguh untuk mempertahankan perlawanan mereka. Sangat penting untuk menguraikan bagaimana perjuangan para petani memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana PPLP mempertahankan perlawanannya selama 18 tahun? Penelitian ini akan memperkaya studi perlawanan petani terhadap rezim ekstraktif dalam konteks ekonomi politik Indonesia, khususnya di Asia Tenggara. Selanjutnya, hasilnya dapat digunakan untuk merumuskan strategi dan kebijakan perlawanan petani untuk mendukung hak-hak petani.

c. Kajian Teoritik

Kerangka kerja (*theoretical framework*) penelitian ini menggunakan teori akumulasi dengan perampasan (*Accummulation by Dispossession*) atau disingkat ABD dan teori perlawanan

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

(*resistance*). Perlawanan petani di akar rumput sering kali dilihat sebagai fenomen praksis yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, dan perebutan sumber-sumber ekonomi. Namun demikian, fenomena tersebut dipengaruhi oleh fenomena global dengan lingkup yang sangat luas, salah satunya adalah globalisasi dan neoliberalisme. Oleh sebab itu, perlawanan petani yang dilakukan oleh PPLP-KP penting dipahami menggunakan perspektif ekonomi politik yang dapat mengantarkan kepada kerangka mengapa potensi perampasan tanah terjadi dan apa dampaknya. Kajian teoritik ini mencoba menelaah konsepsi-konsepsi ekonomi politik yang dapat menjelaskan munculnya perlawanan petani di akar rumput. Kondisi ekonomi politik di Indonesia akan dilihat menggunakan perspektif akumulasi dengan perampasan (ABD) yang kemudian mengantarkan pada konseptualisasi perlawanan sebagai respon terhadap dominasi elit global.

Accummulation by Dispossession

Accummulation by Dispossession (akumulasi dengan perampasan) disingkat ABD merupakan konsep yang menjelaskan kapitalisme neoliberal yang dihasilkan dari sentralisasi kekayaan dan kekuasaan para elite yang didapatkan dengan cara merampas kekayaan atau tanah sektor publik maupun sektor privat. Konsep ini dicetuskan oleh seorang ahli geografi beraliran Marxist bernama David Harvey. Harvey (2003) melakukan penelusuran mendalam terhadap diskursus kapitalisme dengan menggunakan konsep dari Rosa Luxemburgh tentang disposisi ganda pada akumulasi kapital (*the dual disposition of capital accumulation*) dan konsep dari Karl Marx tentang akumulasi primitif (*primitive accumulation*). Menggunakan konsep yang pertama, ia berpendapat bahwa proses ekonomi diwarnai dengan kekerasan politik dan kontestasi kekuasaan. Sementara itu, berlandaskan konsep akumulasi primitif ia merumuskan *Accummulation by Dispossession* (ABD) sebagai sebuah teori baru untuk memahami kapitalisme yang terjadi saat ini. Argumentasi utamanya bahwa ABD merupakan pusat kapitalisme kontemporer. Kapitalisme melahirkan disposisi ganda pada konsep akumulasi kapital. Pada satu sisi, akumulasi kapital adalah sebuah prosedur ekonomi yang memiliki tiga aspek. Pertama, fase terpenting dalam akumulasi adalah proses bisnis antara pelaku industri dan pekerja. Kedua, komoditas pasar mampu menghasilkan nilai surplus. Ketiga, akumulasi bertransformasi menjadi perampasan milik orang lain ketika suatu komoditas di eksploitasi dan peran kelas menggeser kesetaraan. Di sisi lain, akumulasi kapital menunjukkan keterkaitan antara model produksi kapitalis dan non-kapitalis yang muncul di konteks internasional. Pada arena ini, akumulasi kapital menggunakan kebijakan kolonial, sistem kredit global, dan perang sebagai sarana-sarana utama. Dalam proses tersebut, kekuatan, penipuan, dominasi, dan penjarahan dilakukan secara terbuka.

ABD menawarkan lima premis. Pertama, ABD mampu berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan akumulasi berlebihan. Akumulasi berlebihan (*overaccumulation*) adalah situasi dimana kapital yang sangat besar tidak dapat menghasilkan keuntungan. Terkadang kondisi tersebut disertai dengan kelebihan tenaga kerja. Oleh sebab itu, ABD melepaskan aset dengan harga rendah yang kemudian dibeli oleh akumulasi kapital yang berlebih dan mengubahnya menjadi barang yang berharga. Sebagai contoh, di dalam konteks akumulasi primitif aktor melakukan perampasan tanah dan mengusir penduduknya sehingga menjadi tidak memiliki tanah. Tanah tersebut kemudian diprivatisasi sebagai bagian dari proses akumulasi kapital. Harvey menyoroti permodalan dan institusi pemberi kredit yang didukung oleh kekuatan negara, melibatkan ABD dalam proses ini.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Premis kedua menyatakan bahwa ABD adalah sebuah kontingensi. Sebab, ABD kemungkinan dimanifestasikan dalam aksi-aksi tidak terlihat, baik sah maupun melanggar hukum, yang mana memungkinkan kelas tertentu untuk menguasai kapital. ABD muncul dari dua kondisi. Kondisi pertama adalah waktu dan cara krisis diciptakan oleh produksi yang diperluas. Kondisi kedua menyatakan bahwa ABD terjadi ketika pengusaha dan pemerintah bersama-sama mendirikan sebuah sistem dan berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan darinya. Dengan kata lain, ABD dapat dilihat sebagai biaya yang sangat diperlukan untuk mengembangkan lompatan kuantum menuju perkembangan kapitalis, yang sepenuhnya didukung oleh negara. Perubahan tersebut dikendalikan oleh alasan internal dan tekanan eksternal. Sebagai contoh, krisis ekonomi terjadi ketika sistem kredit ditekan, likuiditas terkuras habis, dan perusahaan bankrut. Pada umumnya, kondisi tersebut menyebabkan devaluasi dan merusak kesejahteraan sosial dan institusi sosial. Proses tersebut diciptakan oleh kapitalisme global.

Premise ketiga menyatakan bahawa privatisasi adalah ujung tombak dari ABD. Teori neoliberal dan privatisasi politik mengindikasikan bahwa kekuasaan negara adalah aktor utama ABD. Proses tersebut dibiayai oleh finansialisasi, liberalisasi perdagangan, dan penyesuaian sistem pembiayaan global. Proses tersebut akan memicu devaluasi dan akumulasi dengan perampasan di area-area tertentu. Neoliberalisme menggunakan privatisasi dan liberalisasi untuk mengubah fase baru '*enclosure of the commons*' menjadi tujuan kebijakan negara. Pemerintah menjual kekayaannya kepada pasar yang dikelola oleh over akumulasi kekayaan. Neoliberalisme merupakan transformasi radikal, mengubah relasi sosial dan redistribusi kapital yang mana menguntungkan orang-orang kaya dan memiskinkan orang yang kekurangan. Melalui privatisasi negara mengalihkan aset produktif publik, seperti sumber daya alam, ke sektor privat. Hendaknya aset produktif publik tersebut dimiliki oleh rakyat, negara bertanggung jawab mengelolanya. Maka dari itu, para ahli memandang proses ini sebagai perampasan yang bar-bar. Di banyak negara, neoliberalisme merampas kekayaan masyarakat adat sehingga mendorong perlawanan.

Pada premis keempat Harvey memiliki keyakinan bahwa kapitalisme membutuhkan fase penghancuran kreatif yang disertai dengan kekejaman. Atas alasan ini, akumulasi primitif diwarnai dengan serangkaian serangan brutal dan perlawanan. Fenomena tersebut juga terjadi di ABD, memicu perjuangan sosial dan politik serta perlawanan. Gerakan perlawanan ini melanjutkan pertempuran sebelumnya untuk merebut kembali hak. Di sisi lain, perlawanan mampu membangun kekuasaan kelas yang kuat untuk menghasilkan keuntungan material dan mengembangkan standar hidup yang tinggi. Intinya, akumulasi primitif membangun jalan untuk memperluas reproduksi. Sementara itu, ABD mengganggu dan bahkan merusaknya. Tidak diragukan, perlawanan terhadap akumulasi primitif mendorong ketidakpuasan yang berkembang menjadi gerakan pemberontakan, terutama di dalam komunitas masyarakat miskin. Sangat jelas bahwa tujuan politik sosialis adalah untuk menyerang relasi kelas dan model kekuasaan negara yang ingin merubahnya. Maka dari itu, ini bukan untuk melindungi penguasa sebelumnya. Sayangnya pada banyak kasus, developmentalisme sosialis tidak menghargai gerakan pemberontak yang menentang akumulasi dengan perampasan.

Premis kelima menyatakan bahwa perjuangan anti kapitalist dan anti imperialis memiliki domain ganda. Kubu Marxis (sosialis kiri) berpendapat bahwa aktor utama yang mengubah sejarah adalah kaum proletar. Mereka mendeskripsikan kaum proletar sebagai pekerja upahan (buruh) yang tidak memiliki alat produksi. Kontradiksi secara langsung terletak antara kapital dan buruh di dalam ruang produksi. Sementara itu, institusi kelas pekerja menggunakan serikat pekerja dan partai politik. Kedua institusi tersebut bertujuan untuk memperoleh kekuasaan negara

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

untuk mengontrol atau menggantikan dominasi kelas kapitalis. Akumulasi kapital menganggap bahwa relasi kelas dan perjuangan kelas serupa dengan reproduksi yang diperluas. Sebagian besar perjuangan melawan kapitalisme tidak memiliki kekuatan yang cukup sehingga gerakan yang dilakukan dapat diberantas dengan mudah oleh perkembangan kapitalisme global.

Perlawanan terhadap perampasan tumbuh di dalam kadar yang berbeda-beda, di level lokal, regional, dan global. Pada kondisi ini, peran negara terlihat tidak relevan. Selain itu, target dan sasaran gerakan ini menyebar, terfragmentasi, dan kontingen. Sebagai contoh, kerusakan lingkungan, privatisasi layanan, perampasan tanah, dan *biopiracy* memiliki pola proses yang berbeda. Di sisi lain, masyarakat dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cara membentuk institusi perlawanan yang cair. Para ahli mengkategorisasikan perlawanan tersebut sebagai gerakan pos modern. Harvey juga mengemukakan pendapat jika akumulasi kapital memiliki dua karakteristik, yakni reproduksi yang diperluas dan akumulasi dengan perampasan. Kedua karakteristik tersebut saling terkait satu sama lain. Maka dari itu, baik perjuangan melawan reproduksi yang diperluas dan akumulasi dengan perampasan (ABD) memiliki hubungan dialektikal dimana gerakan sosial berkonsolidasi dengan gerakan anti globalisasi dan bentuk-bentuk alternatifnya. Secara singkat, ABD adalah tantangan terkini bagi gerakan anti globalisasi. Meskipun demikian, relasi dialektikal melawan reproduksi yang diperluas membutuhkan kesadaran. Persoalannya terletak pada tidak setiap gerakan melawan ABD bersifat progresif. Meskipun demikian, perlawanan tersebut penting untuk dipertahankan.

Penelitian ini menggunakan konsep ABD untuk menjelaskan ekonomi politik Indonesia. Terutama di rezim ekstraktif dan bagaimana keterkaitannya dengan perlawanan petani. Premis pertama ABD digunakan untuk menginterpretasikan bagaimana pemerintah Indonesia bersepakat dengan over akumulasi pada rezim ekstraktif melalui ekonomi politik. Premis kedua digunakan untuk membantu menjelaskan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan sektor publik untuk membangun pertambangan dan industri ekstraktif untuk menghasilkan keuntungan. Premis ketiga digunakan untuk mengkerangki privatisasi yang terjadi di Indonesia. Sedangkan premis keempat dan kelima digunakan untuk mengkaitkan narasi ekonomi politik Indonesia yang kemudian mendorong perlawanan, dilihat dari konsep-konsep perlawanan.

Konsep Perlawanan

Pada awalnya, studi perlawanan (*resistance study*) berpusat pada revolusi dan gerakan kolektif besar-besaran untuk menentang kebijakan negara secara terang-terangan. Fletcher (2001) menjelaskan bahwa hampir pada saat yang sama, tiga perspektif baru tentang perlawanan muncul pada 1970-an dan 1980-an. *Pertama*, Foucault dan Certeau bekerja dalam filsafat sosial Prancis untuk mengembangkan bentuk kehidupan sehari-hari dan subjektivitas marjinal yang lebih eksplisit. *Kedua*, dalam studi agraria, Scott mempromosikan bentuk sehari-hari (*everyday resistance*) perlawanan petani. *Ketiga*, Guha, dalam historiografi Marxis, mendorong komunitas kolonial di Asia Selatan untuk secara cerdas membantah dominasi kolonialis Eropa. Bentuk perlawanan sehari-hari menjadi perspektif utama dalam studi resistensi.

Pada dasarnya, studi tentang perlawanan berasal dari agenda politik kiri atas keyakinan bahwa masyarakat harus berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan dan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan oleh pelanggaran prinsip-prinsip ini (Fletcher, 2001). Fletcher menegaskan bahwa perlawanan sangat terkait dengan kekuasaan. Dia menyarankan beberapa ide. *Pertama*, dikotomi antara kekuasaan dan perlawanan harus diberantas. Perlawanan harus dipahami sebagai produk kekuasaan karena ia menjalankan kekuasaan. Perlawanan bisa

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

menjadi perebutan kekuasaan antara yang kuat dan yang tidak berdaya. Dengan kata lain, perlawanan adalah fungsi kekuasaan sebagai upaya untuk membangun arena kekuasaan di mana bawahan diizinkan untuk mewujudkan dominasi yang perlu dilawan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tempat seperti itu didirikan dan bagaimana subaltern dapat diberdayakan sehingga mereka dapat melawan. *Kedua*, identifikasi bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari dapat dihapus karena perlawanan terhadap kekuasaan, seperti ketidakpuasan dan pemberontakan kecil, selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kekuasaan selalu hadir dalam hubungan sosial, sehingga selalu ada perlawanan terhadap kekuasaan itu. *Ketiga*, perlawanan dan oposisi perlu dipisahkan. Perlawanan muncul ketika subjek kekuasaan mengakui dan mempertahankan legitimasinya. Perlawanan berubah menjadi oposisi ketika bawahan tidak lagi tunduk pada kekuasaan. Membedakan perlawanan dan oposisi dapat mempertajam eksplorasi asal-usul perjuangan bawahan, di mana hegemoni elit ditantang dan diatasi. Upaya untuk memperjuangkan pengaruh luar yang tidak pernah dianggap sah juga dapat disebut sebagai oposisi.

Studi resistensi pesat berkembang. Sebagian besar perlawanan lebih terkait dengan sikap antisosial, destruktif, ideologi revolusioner reaksioner, ledakan kekerasan yang tak terduga, dan wabah emosional. Perlawanan berpotensi produktif, jamak, cair, dan terintegrasi ke dalam kehidupan sosial sehari-hari sehingga dapat secara menguntungkan membentuk kembali masyarakat dan mengubah sejarah. Baaz dkk. (2016) mengkategorikan wacana resistensi menjadi tiga kelompok studi (Baaz dkk., 2016). *Pertama*, tantangan konfrontatif dan publik dari kontra-kekuasaan, seperti revolusi, demonstrasi, pemogokan serikat pekerja, dan boikot. *Kedua*, perlawanan sehari-hari oleh Scott, yang mengembangkan jenis perlawanan, seperti bentuk perlawanan terselubung yang tersembunyi. *Ketiga*, adalah komponen campuran dari bentuk terselubung dan publik. Berdasarkan kuantitas dan manajemen, para pakar perlawanan mengkategorikan perlawanan sebagai perlawanan kolektif/terorganisir dan perlawanan individu/tidak terorganisir atau skala kecil. Perlawanan skala kecil dapat diajukan di antara tindakan individu dan kolektif. Baaz et al. (2016) menyarankan tujuh aspek analisis (dimensi) untuk mengeksplorasi resistensi secara komprehensif. Aspek-aspeknya adalah (1) repertoar resistensi mengenai konfigurasi kekuasaan tertentu, (2) spektrum antara resistensi terorganisir dan individu, (3) aspek temporal resistensi, (4) dimensi spasial resistensi, (5) hubungan antara tubuh dan representasi, (6) resistensi memperkuat dan / atau menciptakan kinerja resistensi baru, dan (7) proses refleksi diri dan mempengaruhi (Baaz et al. 2016, hlm.45-48).

Menurut Hollander dan Einwohner (2004), perlawanan adalah pencegahan oleh aktor, target, dan pengamat lainnya. Oleh karena itu, memahami interaksi aktor (penentang), target, dan pengamat lainnya adalah cara untuk memahami sifat perlawanan. Mempertimbangkan interaksi ini menekankan peran kekuasaan yang bermanifestasi dalam hubungan interaksional. Young (2015) berargumen bahwa perlawanan dibentuk oleh lima masalah mendasar yaitu interaksi struktur dan agensi, peran yang dimainkan niat dalam perlawanan, sifat kekuasaan, pemahaman pasar, dan kemungkinan emansipasi. Sementara itu, Johansson dan Vinthagen (2016) membangun kerangka kerja yang terdiri dari empat dimensi perlawanan sehari-hari, yaitu repertoar, hubungan agen, spasialisasi, dan temporalisasi. Penelitian dalam perlawanan sehari-hari harus mempertimbangkan empat dimensi sosiologis mendasar repertoar, waktu, ruang, dan hubungan) bersama dengan empat persimpangan mendasar dari hubungan kekuasaan (gender, seksualitas, kelas dan ras/etnis).

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Di sisi lain, Chin dan Mittelman (1997) meneliti perlawanan terhadap globalisasi menggunakan teori resistensi trialektik oleh Gramsci, Polanyi, dan Scott. Dengan membandingkan tiga teori perlawanan utama, mereka mengidentifikasi dan menentang bentuk-bentuk dominasi, memperluas wilayah politik dan memulai aaksi baru. Mereka mengembangkan konseptualisasi perlawanan kontemporer terhadap globalisasi yang terdiri dari empat dimensi, yaitu bentuk perlawanan, agen perlawanan, tempat perlawanan, dan strategi perlawanan. Menurut Lilja, Baaz, dan Vinthagen (2013), perlawanan adalah respons terhadap kekuasaan dari 'bawah', praktik subaltern yang dapat menantang, menegosiasikan, dan melemahkan kekuasaan. Namun, resistensi mungkin dapat menjadi parasit untuk kekuasaan dan/atau merusak kekuasaan.

Dari berbagai definisi dan dimensi perlawanan tersebut, dirumuskan beberapa aspek penting perlawanan sebagai berikut:

1. Sasaran dan tujuan perlawanan
2. Pendorong perlawanan
3. Konfigurasi kekuasaan di dalam perlawanan
4. Karakter perlawanan terorganisir atau individual
5. Dimensi spasial perlawanan
6. Representasi di dalam perlawanan
7. Refleksi atau dampak perlawanan
8. Inspirasi perlawanan
9. Basis perlawanan
10. Gaya perlawanan
11. Skala perlawanan
12. Tingkat koordinasi di dalam perlawanan
13. Nilai hidup dan budaya
14. Perbedaan perspektif di dalam perlawanan

Aspek-aspek di dalam perlawanan tersebut digunakan untuk menginterpretasikan data temuan lapangan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan Wilayah Kontrak Karya (konsesi) rencana penambangan besi pasir. Lokasi penelitian meliputi Trisik di Desa Banaran, Gupit dan Siliran di Desa Karangsewu (Kecamatan Galur), Bugel dan Garongan (Kecamatan Panjatan) serta Karangwuni (Kecamatan Wates). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal untuk fokus pada peristiwa kontemporer. Sebuah studi kasus dapat melibatkan orang dengan pengalaman kasus atau untuk memberikan gambaran yang kaya dari suatu peristiwa, proyek, atau program kemudian menafsirkan temuan untuk membangun pemahaman tentang kasus (Leavy, 2014). Studi kasus digunakan untuk menjelaskan resistensi petani dalam konteks rencana pertambangan sebagai fenomena tertentu. Studi kasus mencari faktor-faktor kasual untuk menjelaskan fenomena tertentu. Fokus utama dari studi kasus adalah untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana kondisi tertentu muncul, yaitu mengapa urutan peristiwa tertentu terjadi atau tidak terjadi (Yin, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, observasi langsung dan naturalistik serta analisis dokumen. Wawancara semi-terstruktur dilakukan secara individual dengan mewawancarai orang per orang (*one on one interview*). Wawancara berlangsung sekitar 1 – 2 jam melalui satu kali kunjungan atau beberapa kali kunjungan.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Observasi akan dilakukan melalui pengamatan langsung dan naturalistik. Pengamatan naturalistik sangat penting dalam lingkungan yang sangat dipolitisasi, seperti dalam masyarakat paska konflik, di mana dalam wawancara informan dapat nyembunyikan "kebenaran". Observasi dilakukan ketika acara peringatan hari ulang tahun PPLP yang mengekspresikan perlawanan mereka. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan pada media yang memberitakan perlawanan PPLP.

Target informan sekitar 15 orang yang ditentukan secara purposif. Informan meliputi pengurus dan anggota PPLP yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu anggota PPLP, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan berusia di atas 40 tahun yang terlibat konflik rencana penambangan pasir besi sejak awal (tahun 2006 atau sebelumnya). Setiap selesai melakukan wawancara, dibuat catatan lapangan untuk merekam data. Data tersebut akan ditafsirkan menggunakan fenomenologi hermeneutik, memberikan kesempatan terbaik untuk 'menyuarakan' pengalaman dalam konteks konflik rencana penambangan pasir besi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlawanan PPLP terhadap rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo dilihat menggunakan sudut pandang perlawanan terhadap neoliberalisme. Oleh sebab itu, sebelum membahas tentang perlawanan di akar rumput tersebut, dibahas tentang bagaimana neoliberalisme berkembang dalam proses ekonomi politik Indonesia yang kemudian menghasilkan rezim ekstraktif. Rezim ekstraktif inilah yang kemudian melakukan eksploitasi SDA dan mendorong lahirnya gerakan masyarakat akar rumput untuk melawan perampasan tanah, perampasan ruang hidup, dan mencegah kerusakan lingkungan.

a. Neoliberalisme Mendorong Berkembangnya Rezim Ekstraktif di Indonesia

Globalisasi dan neoliberalisme secara signifikan mempengaruhi perkembangan ekonomi politik Indonesia yang menerapkan ide-ide neoliberalisme. Aktor global seperti negara, lembaga keuangan internasional, LSM, dan sektor swasta mengendalikan ekonomi politik Indonesia. Pemerintah Indonesia menempatkan ekonomi nasional di tengah ekonomi pasar yang berorientasi pada akumulasi keuntungan dan memprioritaskan kekayaan pribadi pihak-pihak tertentu. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menganut ekstraktivisme dan mengembangkan rezim ekstraktif yang mengandalkan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka pintu paling ekspansif bagi investasi asing. Setelah era kolonial, kebijakan neoliberal diterapkan oleh setiap rezim penguasa yang mendukung investasi asing, utang luar negeri, dan akumulasi kepemilikan pribadi.

Boediono (2016) menekankan bahwa situasi ekonomi yang dialami oleh periode tertentu dihasilkan dari interaksi tiga aspek. *Pertama*, kebijakan moneter, yang pada umumnya merupakan hasil dari pandangan politik. *Kedua*, situasi politik yang menginspirasi dan mengakomodasi kebijakan. *Ketiga*, fenomena dunia yang mempengaruhi urusan dalam negeri. Tidak diragukan lagi, situasi kebijakan, politik, dan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh politik global dan fenomena ekonomi. Misalnya, depresi ekonomi dunia adalah fenomena ekonomi global, dan perang dunia adalah fenomena politik internasional.

Selanjutnya, politik dan ekonomi saling terkait dalam kehidupan bernegara dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kasus Indonesia, politik menentukan ekonomi. Pasalnya, pandangan dan tujuan politik menentukan pola kebijakan ekonomi untuk mewujudkan tujuan politik tersebut. Booth (2016) mengkategorikan perubahan politik Indonesia pasca kemerdekaan menggunakan

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

tiga periode. Periode pertama adalah pada tanggal 27 Desember 1949, ketika pemerintah Hindia Belanda mengalihkan kekuasaan terakhir kepada pemerintah Indonesia yang baru. Periode kedua terjadi pada 11 Maret 1966, ketika pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintahan Orde Baru. Periode ketiga pada 21 Mei 1998, ketika era demokratisasi dimulai.

Penelitian ini mengkategorisasikan tahapan ekonomi politik Indonesia menjadi tiga periode. Periode pertama adalah era milik negara (*state owned*), kedua adalah era marketisasi, dan yang ketiga adalah era demokratisasi. Eksplorasi bagaimana setiap era membentuk ekonomi politik Indonesia sangat penting karena memiliki karakteristik, pendekatan, dan tujuan yang berbeda dalam mengembangkan kapitalisasi. Setiap era memiliki strategi untuk menerapkan ide-ide kapitalisme dan neoliberalisme untuk mendukung kebijakan pembangunan pro-pasar. Keberadaan utang luar negeri yang meningkat menjadi pertanyaan besar. Mengapa pembangunan ekonomi di Indonesia tidak mampu menciptakan kedaulatan ekonomi? Pinjaman luar negeri, investasi asing, dan pengerukan sumber daya alam juga meningkat. Singkatnya, era marketisasi mengembangkan tonggak ekonomi politik Indonesia, menerapkan ide-ide neoliberalisme yang mempengaruhi perkembangannya saat ini.

Indonesia mengalami berbagai strategi ekonomi politik, antara lain merkantilisme di era kolonial awal, ekonomi terpimpin di era *state owned*, liberalisme di era marketisasi, dan neoliberalisme di era demokratisasi. Rezim ekstraktif Indonesia dimulai pada masa kolonial, ditandai dengan perubahan komoditas ekspor. Misalnya, pada abad kesembilan belas, terjadi perubahan komoditas ekspor dari kopi menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi minyak bumi pada akhir abad keduapuluh. Selanjutnya, rezim berkembang selama proyek pembangunan pasca-Perang Dunia II. Menurut Gellert (2019), rezim ekstraktif Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua periode yang berbeda, yaitu siklus nasionalisme sumberdaya pertama pada 1950an sampai 1970an dan siklus nasionalisme sumberdaya kedua pada tahun 1980an sampai 1990an.

Di era pasca-kolonial, rezim ekstraktif Indonesia muncul karena interaksi antara ideologi sosialis dan nasionalis Sukarno dan kapitalisme Orde Baru Suharto yang otoriter, ditandai dengan ekonomi non-liberal. Gellert (2010) berpendapat bahwa keterkaitan faktor lokal dan global, membentuk kemunculan dan perkembangan rezim ekstraktif di Indonesia. Realitas historis adalah bahwa presiden perdana Indonesia, Sukarno, mengadopsi sikap non-blok selama Perang Dingin, yang merupakan faktor internasional. Selanjutnya, pada tahun 1965, kudeta dan genosida yang didukung Amerika Serikat yang diatur oleh partai komunis Indonesia terjadi. Presiden berikutnya, Suharto, mengadopsi posisi yang menentang komunisme dan mendukung Amerika Serikat di berbagai domain, termasuk ekonomi, politik, dan militer.

Rezim ekstraktif didirikan berdasarkan developmentalisme selama fase awal siklus nasionalisme sumberdaya. Tujuannya adalah untuk menasionalisasi kepemilikan sumber daya untuk memfasilitasi redistribusi progresif, transformasi industri, dan tindakan kolektif untuk memperbaiki harga pasar. Dalam siklus nasionalisme sumberdaya saat ini, ideologi neoliberalisme telah mempengaruhi prinsip-prinsip developmentalisme dan menghasilkan pendekatan yang lebih berorientasi pasar. Untuk memperoleh izin penggunaan lahan, pemerintahan Indonesia berupaya melembagakan modalitas kepemilikan bersama atas tambang dan perkebunan melalui hegemoni politik lokal dan regional. Paradigma pembangunan yang berkembang menggabungkan tuntutan khusus untuk mengakui hak atas tanah dari masyarakat regional dan penduduk asli. Tujuan utamanya adalah membangun dan meningkatkan jaminan hukum untuk komersialisasi ekstensif tanah dan sumber daya Indonesia, yang biasa disebut 'pasar dalam', menggunakan komodifikasi yang meningkat dan berkelanjutan (Gellert 2019). Negara

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

semi-periferal, diklasifikasikan sebagai sub-imperialis karena praktik ekspansi teritorial mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Kecenderungan ideologis mereka adalah terhadap neoliberalisme yang kemudian berkembang menjadi predatoris.

Rezim kontemporer di Indonesia dibentuk oleh rezim yang mengekstraksi sumber daya, dengan pergeseran jenis sumber daya yang diekstraksi. Periode neoliberalisme awal di Indonesia menyaksikan rezim ekstraktif yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno (Pemerintah Orde Lama) dan Presiden Suharto (Pemerintah Orde Baru). Siklus pertama nasionalisme sumberdaya dimulai pada pemerintahan rezim Orde Lama. Perang Dingin di Asia memperkuat keadaan ini melalui pengesahan strategi nasional dan fasilitasi agregasi sumber daya. Fenomena nasionalisme sumber daya muncul dalam konteks gerakan anti-kolonial. Paska kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1950an terjadi proses nasionalisasi ladang minyak dan perkebunan milik Belanda. Dampaknya adalah adanya kepentingan kapitalis Amerika Serikat yang diduga memberikan dukungan untuk pemberontakan Partai Komunis Indonesia terhadap kepemimpinan Sukarno, serta genosida berikutnya yang terjadi selama tahun 1965-1966.

Di era Perang Dingin, kepentingan geopolitik dan ideologis Indonesia bagi Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, cenderung rendah. Presiden Sukarno mengarahkan negara Indonesia untuk non-blok dan tidak berpihak pada Blok Barat atau Blok Timur. Pada akhir 1950an dan awal 1960an, Pemerintah Orde Lama berusaha untuk membangun ekonomi nasional dengan menasionalisasi industri perkebunan, minyak, dan pertanian yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda dan perusahaan-perusahaan Barat lainnya. Selain itu, Sukarno mengabaikan bantuan internasional. Pada tahun 1964, ia membuat keputusan penting bahwa Indonesia keluar dari PBB. Tindakan-tindakan ini menunjukkan sikap anti-Barat Sukarno. Sayangnya kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan kesulitan ekonomi yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, inflasi, dan kemunduran dari pasar internasional selama puncak masa jabatan Sukarno. Pada tahun 1965, Pemerintahan Sukarno digulingkan oleh kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan PKI diikuti dengan kekerasan politik, dimana terjadi pembantaian jutaan anggota PKI oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pemerintahan selanjutnya adalah Orde Baru. Di Era Orde Baru, rezim ekstraktif mengalami pertumbuhan signifikan dengan mengeksploitasi berbagai industri seperti minyak, kayu, mineral, dan komoditas lainnya. Periode ini juga sejalan dengan fase neoliberalisme. Dimulainya neoliberalisme dapat ditelusuri kembali ke tahun 1968, ketika Suharto memprakarsai liberalisasi kebijakan investasi asing, yang mengakibatkan stabilisasi inflasi dan pemulihan ekonomi. Daya tahan sistem politik ini dikaitkan dengan ketergantungannya pada bantuan keuangan eksternal, investasi, dan partisipasi aktifnya di pasar mata uang internasional. Rezim liberal dimulai pada tahun 1967 melalui undang-undang investasi asing dan tur internasional untuk mempromosikan lingkungan politik baru yang ramah bagi bisnis dan investor asing. Pada saat yang sama, bantuan asing menyerbu Indonesia, salah satunya adalah Bank Dunia. Pada saat itu, rezim ekstraktif didirikan untuk mengeksploitasi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, deposit mineral, kayu, dan sektor kelautan. Orde Baru menambah skala ekspor dan mengejar industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk membangun legitimasi rezim ekstraktif. Selain itu, rezim ekstraktif mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak penduduk lokal dan memunculkan perselisihan dengan anggota masyarakat. Untuk melawan protes di berbagai daerah, Suharto memanfaatkan kekuatan militer.

Selanjutnya, Pemerintahan Suharto terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam dan memanfaatkan ekspor sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Orde Baru menerapkan undang-undang sumber daya sektoral yang melampaui kewenangan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada saat yang sama, lembaga administrasi menciptakan mekanisme hukum yang memberikan kekuatan besar kepada pemerintah pusat untuk mengelola SDA. Monopoli pengelolaan sumber daya oleh pemerintah pusat telah menyebabkan berbagai konflik. Selama periode itu, rezim ekstraktif didirikan dengan memanfaatkan beragam SDA, tetapi tidak terbatas pada minyak, gas, pertambangan, kayu, dan perikanan. Negara memberikan wewenang atas sumber daya hutan untuk mengakumulasi modal dan menetapkan kontrol eksklusif atas rute perdagangan. Rezim ekstraktif sangat bergantung pada ekspor komoditas hutan, termasuk kayu lapis dan kayu gelondongan. Pada 1980an, Indonesia menerapkan langkah-langkah untuk beradaptasi dengan kebijakan ekonomi neoliberalisme, yang mencakup liberalisasi nilai tukar dan perbankan. Gelar negara berkembang disematkan pada Indonesia pada akhir masa Orde Baru pada tahun 1980an hingga 1990an.

Industri pertambangan menjadi target pertama penerapan gagasan neoliberalisme di Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintah membuka penanaman modal asing dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pasal 8 undang-undang tersebut menyatakan bahwa investasi asing di bidang pertambangan didasarkan pada kerja sama dengan pemerintah berdasarkan kontrak karya atau bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan penanaman modal di bidang pertambangan dirinci dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang ini melegalkan Kontrak Karya, model kontrak antara pemerintah dan perusahaan asing, yang dianggap paling liberal di industri pertambangan.

Freeport Sulphur Company dari Amerika Serikat adalah perusahaan asing pertama yang menerima Kontrak Karya dari pemerintah Indonesia pada bulan April 1967. Perusahaan tersebut menerima berbagai hak istimewa dari pemerintah. Salah satunya adalah menyiapkan rancangan kontrak kerja, yang disetujui pemerintah. Pemerintah mengambil langkah ini untuk menarik investasi asing. Upaya pemerintah untuk mengundang investasi asing berhasil. Pada tahun 1970, sembilan perusahaan asing memperoleh kontrak kerja. Era pemerintahan Orde Baru membuat Indonesia menjadi lahan subur bagi investasi asing. Bahkan mendapat predikat negara paling menarik pada bidang investasi pertambangan di Asia. Perusahaan industri pertambangan internasional seperti Rio Tinto, Newmont Gold Company, Newcrest Mining Ltd, Broken Hill Proprietary Company Ltd, Freeport McMoran Copper & Gold Inc., dan Inco Ltd. berinvestasi di Indonesia. Mereka mendapatkan keuntungan besar dan dilindungi oleh jaminan politik yang solid. Namun, pemerintah harus membayar harga yang mahal untuk keberhasilan ini. Karena fungsi negara neoliberal pusat dalam memastikan pengerukan mineral, telah terjadi konflik dan kekerasan di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai sengketa terjadi di industri berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Pasalnya, negara perlu melindungi kepemilikan barang milik pribadi dengan memberikan jaminan kepada korporasi swasta dan tidak mengakui berbagai model kepemilikan petani atas tanah (Pratiwi, 2021).

Di Indonesia, krisis keuangan Asia pada tahun 1998 berdampak demonstrasi besar-besaran yang bertujuan menggulingkan Soeharto dari kekuasaan. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada Mei 1998. Sayangnya, reformasi politik tidak secara mendasar mengubah struktur negara atau komposisi kelas masyarakat. Titik ini menandai dimulainya fase reformasi demokratis pasca-Suharto, di mana peluang yang lebih signifikan tersedia untuk ekstraksi sumber daya. Rezim ekstraktif memasuki fase baru yang berpusat pada ekstraksi berbagai komoditas. Pengaruh liberalisme kapitalis telah menambah dan memperluas lingkup komodifikasi.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Rezim ekstraktif di Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa hingga saat ini. Meskipun menghadapi perlawanan di berbagai wilayah di Indonesia, rezim ini mempertahankan posisi yang mengakar kuat. Dapat disimpulkan bahwa lintasan perkembangan rezim ekstraktif menunjukkan dikotomi antara dua aspek antitesis. Menurut pemerintah dan elit global pendukungnya, rezim ini dianggap benar dan sah. Sebaliknya, bagi masyarakat yang terpinggirkan oleh industri ekstraktif, sistem pemerintahan dianggap tidak sah dan ditandai dengan tindakan kekerasan.

Sejarah ekonomi Indonesia dalam dua abad terakhir menunjukkan pemisahan antara negara predator dan negara maju. Negara pembangunan saat ini adalah tujuan utama, tetapi itu tidak berarti rezim ekstraktif berakhir. Gellert (2010) percaya bahwa ekstraksi sumber daya yang digerakkan oleh kapitalis ke inti sistem dunia mengakomodasi akumulasi periferal dan memperkuat para pemimpin politik. Dari tahun 1950an hingga awal 1970an, nasionalisme sumber daya menekankan gagasan kepemilikan ekstraksi dan pemrosesan sumber daya. Dari tahun 1980an hingga awal 1990an, kebijakan statisme diterapkan, menghasilkan transformasi industri yang lebih luas. Marketisasi semakin tergantung pada konsep keunggulan komparatif dan perluasan ekstraktivisme. Fenomena ini umumnya dikenal sebagai 'developmentalisme baru', ditandai dengan peran negara yang diperluas dengan tetap menerima modal swasta.

Pada tahun 2000an, Indonesia mengubah struktur ekonominya, beralih dari ketergantungan sumber daya alam. Ekonomi mengalami proses re-periferalisasi, di mana penggantian ekspor sumber daya dengan yang baru terjadi karena kegagalan industri manufaktur. Indonesia telah bertransisi menuju negara berpenghasilan menengah yang didorong oleh konsumerisme, namun ekonominya sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam. Meskipun banyak investor asing membutuhkan sumber daya alam mereka, Indonesia mengalami kematian pembangunan seperti proyek nasional lainnya. Gelombang nasionalisme sumber daya kontemporer membatasi peran marketisasi. Selain itu, dapat diamati bahwa negara dan modalnya telah memainkan peran penting dalam proses akuisisi lahan untuk budidaya kelapa sawit melalui pengambilalihan (akumulasi dengan perampasan), serta ekspansi kegiatan penambangan batubara, yang telah disertai dengan langkah-langkah pemaksaan kepada pemilik tanah untuk melepaskan hak kepemilikan mereka.

Proses ekonomi politik tersebut menjadi lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya akumulasi dengan perampasan dan mendorong lahirnya berbagai perlawanan masyarakat akar rumput yang dirugikan. Perlawanan PPLP terhadap rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo, merupakan bagian dari upaya melawan hegemoni neoliberalisme yang digencarkan sektor bisnis dan didukung oleh negara. Oleh sebab itu, untuk memahi perlawanan petani di akar rumput, perlu memahami terlebih dahulu kondisi ekonomi politik di level nasional dan global supaya mendapatkan potret bagaimana neoliberalisme bekerja, khususnya di dalam rezim ekstraktif.

b. Keberlanjutan Perlawanan PPLP terhadap Kebijakan Neoliberalisme

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Perlawanan petani lahan pantai, dimulai pada tahun 2006, ketika Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Bersama dengan PT Jogja Magasa Mining, Ltd (PT JMI) mensosialisasikan rencana penambangan pasir besi di desa-desa pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo. Pada saat itu, perlawanan masih bersifat sporadis berupa penolakan untuk menghadiri acara sosialisasi dan pemboikotan acara sosialisasi. Untuk memperkuat perlawanan, petani lahan pantai membentuk Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) pada 1 April 2006. Sejak saat itu berbagai aksi penolakan rencana penambangan pasir besi dilakukan, seperti demonstrasi, publik hearing dan mujahadah atau doa bersama. Berikut kronik perjuangan PPLP tersebut.

Tabel 1. Kronik Perjuangan PPLP

Tanggal	Aksi
1 April 2006	Masyarakat pesisir dari 10 desa di 4 kecamatan membentuk PPLP
27 Agustus 2007	PPLP berdemonstrasi di Kantor DPRD Kulon Progo menuntut pembatalan proyek pasir besi
4 Februari 2008	Warga pesisir melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR RI dan Kedubes Australia meminta kejelasan identitas PT Indo Mines, Ltd. (PT JMI).
1 Maret 2008	Warga Bugel melakukan aksi blokir jalan menuju kawasan pantai untuk menghadang pengangkutan material ke Pilot Proyek PT. JMI.
20 Oktober 2009	Konsultasi publik KA ANDAL oleh PT JMI yang tidak menampung aspirasi masyarakat terdampak sehingga diwarnai kericuhan.
April 2010	Masyarakat pesisir mengirimkan surat pernyataan sikap penolakan rencana penambangan pasir besi kepada Presiden RI.
Mei 2010	Masyarakat pesisir mengirim surat kepada DPRD DIY menuntut DPRD DIY mengusut dugaan skandal perundang-undangan dalam proses penyusunan Perda No. 2 Tahun 2010 tentang RTRWP DIY 2009-2019 oleh Gubernur Propinsi DIY.
Juni 2010	Masyarakat pesisir berkirim surat kepada DPRD untuk mengajukan pembatalan Perda No. 2 Tahun 2010 yang melanggar UU No. 10 Tahun 2004 dan Permendagri No. 28 Tahun 2008.
15 Desember 2010	Aksi rapat akbar menolak rencana penambangan pasir besi bertepatan dengan penilaian dokumen KA ANDAL di Desa Bugel.
16 Desember 2010	Aksi warga menghentikan tindakan yang meresahkan yang dilakukan oleh oknum Pakualam di Bugel.
3 – 6 Juni 2008	KOMNAS HAM melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap rencana penambangan pasir besi dan merekomendasikan bahwa rencana penambangan tersebut dapat memicu pelanggaran HAM, yakni hak atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, dan hak petani.
21 Juli 2008	3000 massa PPLP berdemonstrasi di UGM menuntut penghentian kerja sama reklamasi lahan paska penambangan oleh Fakultas Kehutanan UGM dengan PT JMI. Tuntutan ini disetujui.
27 Oktober 2008	Sekumpulan massa dari luar Kawasan konflik melakukan persakan dan pembakaran 7 posko PPLP dan 1 rumah milik warga pesisir.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Tanggal	Aksi
23 – 25 Oktober 2008	Masyarakat pesisir berdemonstrasi di Kantor DPRD Kulon Progo untuk menuntut pembatalan rencana penambangan pasir besi karena berpotensi melanggar HAM.
19 Juli 2009	PPLP mengadakan pertemuan di LBH membahas kasus kriminalisasi terhadap salah satu warga pesisir.
17 Desember 2010	PPLP melakukan penutupan Pilot Proyek PT JMI di Pantai Trisik setelah 3 tahun beroperasi.
9 Februari 2011	Mediasi oleh KOMNAS HAM di Bugel, menghasilkan rekomendasi *deadlock* untuk mediasi para pihak terkait.

Sumber: Asmara Artzine, 2024.

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi DIY menunda rencana penambangan pasir besi sampai saat ini tanpa kejelasan. Namun demikian, PPLP tetap menunjukkan eksistensinya menolak rencana penambangan pasir besi. Perlawanan ditunjukkan dengan menyelenggarakan ulang tahun peringatan hari lahir PPLP, doa bersama (mujahadah), dan syawalan masyarakat pesisir untuk memper erat silaturahmi dan merawat solidaritas perlawanan. Selain itu, perlawanan ditunjukkan melalui upaya terus bercocok tanam di wilayah pesisir yang telah puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga peisir.

Pada saat artikel ini ditulis, penelitian lapangan sedang berjalan sehingga data penelitian belum terkumpul secara lengkap. Berikut analisis terhadap temuan lapangan sementara.

Tabel 2. Interpretasi Temuan Lapangan Sementara

Aspek Perlawanan	Temuan
Sasaran dan tujuan perlawanan	Perlawanan PPLP menyasar rencana penambangan pasir besi dan semua bentuk kebijakan neoliberalisme yang berpotensi merampas tanah dan ruang hidup mereka di pesisir Kulon Progo
Pendorong perlawanan	Perlawanan didorong untuk mempertahankan lahan pantai sebagai sumber mata pencaharian petani
Konfigurasi kekuasaan di dalam perlawanan	Perlawanan PPLP dilakukan oleh semua petani lahan pantai yang didukung oleh beberapa LSM, akademisi, dan seniman. Konfigurasi kekuasaan cukup beragam dan saling mengisi satu-sama lain
Karakter perlawanan: terorganisir atau individual	Perlawanan PPLP teroganisir. Terdapat koordinator lapangan di level dusun dan desa sehingga koordinasi berjalan cepat dan terstruktur
Dimensi spasial perlawanan	Perlawanan PPLP merupakan gerakan sosial akar rumput di ranah lokal, yakni di pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo
Representasi di dalam perlawanan	Setiap dusun dan desa memiliki wakil di dalam kepengurusan PPLP
Refleksi atau dampak perlawanan	Perlawanan memunculkan solidaritas petani pesisir dan perlawanan PPLP menjadi praktik baik serta rujukan

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Aspek Perlawanan	Temuan
	belajar bagi gerakan akar rumput lainnya
Inspirasi perlawanan	Perlawanan terinspirasi oleh penokohan yang kuat di tubuh PPLP
Basis perlawanan	Basis perlawanan PPLP adalah petani lahan pantai
Gaya perlawanan	Perlawanan berupa perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup
Skala perlawanan	Pada umumnya skala perlawanan cukup besar, melipatkan hampir semua petani di lahan pantai
Tingkat koordinasi di dalam perlawanan	Koordinasi dilakukan mulai dari tingkat pedukuhan, desa, dan antar-kecamatan
Nilai hidup dan budaya	PPLP yakin bahwa perlawanan mereka berhasil berkat ijin Allah SWT karena mereka mempertahankan hak hidup dan kelestarian lingkungan
Perbedaan perspektif di dalam perlawanan	Setidaknya terdapat dua karakteristik perlawanan di dalam tubuh PPLP, yakni perlawanan secara halus menggunakan strategi dan perlawanan secara frontal

Perlawanan PPLP didukung oleh berbagai kalangan seperti solidaritas seniman Jogja, LBH, dan para aktivis yang membela hak-hak asasi manusia. *Networking* yang memberikan informasi dan meningkatkan keterampilan mengorganisasikan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan perjuangan PPLP menolak rencana penambangan pasir besi. Oleh sebab itu, perjuangan PPLP melawan kebijakan neoliberalisme tetap dipelihara karena sewaktu-waktu perampasan lahan pantai dapat saja terjadi.

KESIMPULAN

Konsistensi dan keberlanjutan perlawanan PPLP ini menunjukkan kekuatan gerakan akar rumput menentang kebijakan yang mengeksploitasi sumber daya alam (ekstrativisme). Pada kasus ini, akumulasi dengan perampasan dilakukan oleh sektor swasta yang didukung oleh negara dan aristokrat lokal yang mengklaim sebagai pemilik lahan pantai. Rezim ekstraktivis yang diperakan oleh negara melahirkan berbagai macam kebijakan untuk mendukung rencana penambangan pasir besi. Namun, berbagai strategi perampasan ruang hidup tersebut berhasil digagalkan berkat perjuangan PPLP yang menggunakan berbagai bentuk perlawanan baik secara terbuka maupun tertutup dengan mengandalkan jejaring yang dimilikinya. Perlawanan PPLP ini menjadi bukti bahwa masyarakat akar rumput dapat menang melawan upaya negara dan sektor swasta melakukan akumulasi dengan perampasan (ABD) di tengah banyaknya kasus represi terhadap gerakan perlawanan serupa di seluruh penjuru Indonesia. PPLP telah membuktikan perlawanan dari bawah tidaklah mudah, namun bisa dilakukan, dan bisa berhasil jika mampu mengorganiasikan masyarakat dan menggunakan strategi yang tepat.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Penelitian ini masih berjalan, sehingga masih banyak ruang-ruang yang belum dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, secara metodologis, penelitian ini dihadapkan pada kendala sulitnya mengakses informan dan dokumen tertulis. Tidak semua informan potensial mau diwawancarai dan tidak bisa mengakses data-data tertulis. Secara substantif, persoalan status kepemilikan tanah pesisir merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diteliti secara lebih mendalam. Sampai saat ini, terdapat perbedaan pandangan terhadap status kepemilikan lahan pantai, apakah milik Pakuaman (*Pakualam Ground*) atau tanah *wedi kengser* sehingga bebas dikelola dan miliki oleh warga pesisir. Selain itu, pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh PPLP juga menarik untuk digali lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan beasiswa untuk menempuh studi doktoral di University of Limerick, Irlandia.

REFERENSI

Asmara Artzine. (2024). *Riwayat Pemakan Pasir*. Yogyakarta: Asmara Artzine.

Baaz, M., Lilja, M., Schulz, M., and Vinthagen, S. (2016). Defining and Analyzing "Resistance": Possible Entrances to the Study of Subversive Practices, *Alternatives. Global, Local, Political*, 41(3), 137–153, available: https://doi.org/10.1177/0304375417700170.

Baswir, R. (2009) *Bahaya Neoliberalisme (The Dangers of Neoliberalism)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Booth, A. (2016). *Economic Change in Modern Indonesia*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Boediono, (2016). *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (Indonesia's Economy on a Historical Trajectory*. Bandung: Mizan.

Chagnon, C.W., Durante, F., Gills, B.K., Hagolani-Albov, S.E., Hokkanen, S., Kangasluoma, S.M.J., Konttinen, H., Kröger, M., LaFleur, W., Ollinaho, O., and Vuola, M.P.S. (2022). From extractivism to global extractivism: the evolution of an organizing concept. *The Journal of Peasant Studies*, 49(4), 760–792, available: https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2069015.

Chin, C.B.N. and Mittelman, J.H. (1997). Conceptualising Resistance to Globalisation. *New Political Economy*, 2(1), 25–37, available: https://doi.org/10.1080/13563469708406282.

Fletcher, R. (2001). What are we fighting for? Rethinking resistance in a Pewenche community in Chile. *Journal of Peasant Studies*, 28(3), 37–66, available: https://doi.org/10.1080/03066150108438774.

Gellert, P.K. (2010). Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian Development. *Rural Sociology*, 75(1), 28-57.

Gellert, P. K. (2019). Neoliberalism and altered state developmentalism in the twenty-first-century extractive regime of Indonesia. *Globalizations*, *16*(6), 894-918.

Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

Hollander, J.A. and Einwohner, R.L. (2004). Conceptualizing Resistance. *Sociological Forum*, 19(4), 533–554.

Johansson and Vinthagen. (2016). Dimensions of Everyday Resistance: An Analytical Framework. *Critical Sociology*, 42(3), 417–435, available:

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

https://doi.org/10.1177/0896920514524604.

Leavy, P. (Ed.) (2014). *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. Oxford library of psychology, Oxford; New York: Oxford University Press.

Lilja, M., Baaz, M. and Vinthagen, S. (2013). Exploring "irrational resistance". *Journal of Political Power*, 6(2), pp. 201–217. Available at: https://doi.org/10.1080/2158379X.2013.809212.

Pratiwi, A. (2021). Kebijakan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik dalam Pembangunan di Indonesia (Economic Policy: Perspectives on Political Economy in Development in Indonesia), *Jurnal Abiwara*, 3(1), 1-14.

Yin, R.K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods, 6th* ed. Los Angeles: SAGE Publications.

Young, G.W. (2015). Conceptualizing Resistance in Post-Conflict Environments. *International Peacekeeping*, 22(2), 169–185, available: https://doi.org/10.1080/13533312.2015.1017081.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Menolak Kebijakan Neoliberal di Pesisir Selatan Kulon Progo

Eka Zuni Lusi Astuti
University of Limerick, Irlandia
e-mail: Eka.Astuti@ul.ie

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PT Jogja Magasa Iron mensosialisasikan rencana penambangan pasir besi kepada masyarakat pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada pertengahan tahun 2006 silam. Petani lahan pantai menolak rencana penambangan tersebut karena penambangan akan merampas lahan pertanian mereka yang telah puluhan tahun menjadi sumber penghidupan. Penambangan juga akan merusak ekosistem pesisir. Pada tahun 2007, petani lahan pantai mendirikan Paguyuban Petani Lahan Pantai-Kulon Progo (PPLP-KP) untuk menghimpun kekuatan petani melawan rencana penambangan. PPLP-KP melakukan perlawanan terbuka (overt resistance) seperti berdemonstrasi, memasang poster-poster perlawanan di wilayah pesisir, berdoa secara masal (mujahadah), dan memboikot pilot proyek pabrik pasir besi di wilayah pesisir. Perlawanan tertutup (hidden transcript) juga dilakukan, seperti mengeksklusi warga pesisir yang mendukung rencana penambangan pasir besi. Pada tahun 2014, pemerintah menunda rencana penambangan tersebut tanpa kejelasan. Sampai saat ini, PPLP-KP tetap Bersatu menolak rencana penambangan dan semua aktivitas yang berpotensi merampas lahan pertaniannya. Perlawanan PPLP ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ektraktivisme yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor bisnis. Perlawanan tersebut merefleksikan premis kelima teori David Harvey dimana Accummulation by Dispossession yang mendorong perlawanan. Tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana PPLP-KP mempertahankan perlawanannya selama 18 tahun.

Kata kunci: *perlawanan petani, neoliberalisme, ekstraktivisme, Accummulation by Dispossession*

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Indonesia mendapat predikat sebagai negara ekstraktif (*extractivist state*) karena sistem ekonomi dan model produksinya mengimplementasikan kegiatan-kegiatan ekstraktif yang masif. Bagaikan dua sisi mata uang, sumber daya alam (SDA) yang berlimpah-ruah membawa keberuntungan sekaligus mendatangkan berbagai tantangan. Keberuntungan tersebut berupa melimpahnya pendapatan dari hasil eksplorasi sumber daya alam dan keunggulan komparatif pada sektor pertanian. Selain itu, pemerintah mendapatkan banyak keuntungan dari penyewaan sumber daya alam (*natural resource rents*). Maka, pendapatan dari sektor ekstraktif berkontribusi besar pada pendapatan nasional. Di sisi lain, tantangan hadir ketika pemerintah membuka seluas-luasnya pintu bagi investasi asing untuk mengeksploitasi SDA Indonesia. Investasi tentunya membawa keuntungan bagi negara, investor, pengusaha, dan membawa multiplier efek bagi masyarakat sekitarnya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa eksploitasi SDA menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu komunitas lokal sehingga menuai perlawanan. Sebagian besar kasus perlawanan komunitas akar rumput terhadap eksploitasi SDA

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

berupa konflik agraria. Bentuk-bentuk eksploitasi SDA yang merugikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya disebut sebagai ekstraktifisme (*ekstraktivism*). Ekstraktivisme mengacu pada sistem penindasan, kekerasan, penipisan sumber daya, dan non-timbal balik yang didukung dan dibenarkan oleh jaringan praktik, mentalitas, dan perbedaan kekuasaan yang saling terkait (Chagnon dkk. 2022).

Proses ekonomi ekstraktif di Indonesia dapat dikaji dari ekonomi politik Indonesia sejak zaman kolonial. Secara umum, ekonomi politik Indonesia terdiri dari empat era yaitu era kolonial, era milik negara (*state owned*), era marketisasi, dan era demokratisasi. Ekonomi ekstraktif Indonesia didirikan dan dipupuk sejak zaman kolonial. Menggunakan merkantilisme, *Vereenig-de Oost-Indische Compagnie* (VOC) menerapkan ekonomi ekstraktif murni dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah pada tahun 1800-1900. Ekonomi ekstraktif dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui sistem ekstraktif modern dengan menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1815-1830. Oleh karena itu, ekonomi politik Indonesia mewarisi sifat kolonial, seperti ekspor yang didominasi oleh bahan baku, impor yang didominasi oleh barang-barang konsumsi, dan pasar keuangan yang digunakan oleh investor asing untuk memutar kelebihan modal mereka (Baswir 2009). Sifat kolonial ekonomi politik diterapkan pada era marketisasi dan era demokratisasi. Pemerintah menjalankan liberalisme dan neoliberalisme seperti mengundang modal asing dan bersandar pada pinjaman luar negeri.

Sumber daya alam Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Investasi sumber daya alam memberikan manfaat bagi investor, negara, dan membawa multiplier effect bagi masyarakat. Namun, eksploitasi sumber daya alam juga menyebabkan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat setempat, sehingga mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Ada begitu banyak kasus di mana masyarakat lokal memerangi eksploitasi sumber daya alam di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kulon Progo dimana serikat petani bernama PPLP menolak rencana penambangan pasir besi. Rencana penambangan ini digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Jogja Magasa Iron, Ltd (PT JMI). Pada 2006, mereka mensosialisasikan rencana tersebut kepada masyarakat pesisir. Pada saat yang sama, masyarakat pesisir, khususnya petani pesisir, menolak rencana penambangan tersebut. Pasalnya, pertambangan akan mengambil alih lahan pesisir sebagai sumber mata pencaharian mereka. Berdasarkan rencana kontrak karya penambangan besi, luas konsesi pertambangan pasir besi mencapai 2.987,79 hektar, meliputi Desa Banaran dan Karangsewu di Kecamatan Galur, Bugel, Plered, dan Garongan di Kecamatan Panjatan, dan Karangwuni di Kecamatan Wates. Daerah tersebut merupakan pantai yang digunakan oleh masyarakat untuk bertani dan memelihara ternak. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat pesisir menolak rencana tersebut. Pemerintah melanjutkan proyek tersebut, memicu perlawanan dari masyarakat pesisir.

Konflik muncul karena perbedaan kepentingan penggunaan lahan pesisir antara pemerintah dan masyarakat pesisir. Menurut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, lahan pesisir memiliki potensi sumber daya alam pasir besi berdaya jual tinggi. Dengan demikian, jika pasir besi ditambang dan diolah di Kabupaten Kulon Progo, maka akan mendongkrak pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja baru di sektor industri pengolahan, dan mendorong perkembangan ekonomi Kulon Progo. Sebaliknya, para petani pesisir menolak keras rencana tersebut untuk mempertahankan sumber mata pencaharian mereka. Pengalaman sejarah juga mendukung penolakan tersebut. Pertama, para petani pesisir telah bekerja keras sejak tahun 1984 untuk mengubah lahan pantai yang tandus menjadi lahan pertanian produktif. Kedua, para petani pesisir

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

tidak mengakui tanah pesisir sebagai Paku Alam Ground (PAG) yakni tanah milik Paku Alam (bagian dari keluarga kerajaan Yogyakarta). Menurut masyarakat pesisir, tanah pesisir adalah tanah negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, tanah tersebut berpotensi menjadi milik perorangan setelah lebih dari 20 tahun digarap oleh masyarakat. Para petani pesisir percaya bahwa tanah pesisir adalah milik mereka meskipun mereka tidak memiliki sertifikat tanah. Sebaliknya, pemerintah berpendapat bahwa pemilik tanah adalah Paku Alam.

Selanjutnya, pada tahun 2007 para petani pesisir mendirikan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Penolakan tersebut semakin kuat pasca berdirinya PPLP yang mengorganisir para petani pesisir untuk memerangi pemerintah melalui aksi protes, demonstrasi, melakukan eklusi sosial terhadap warga yang pro rencana penambangan, memboikot beberapa program pemerintah, dan melakukan doa bersama (mujahadah). Mereka juga membangun jaringan dengan organisasi masyarakat sipil akar rumput, LSM, akademisi, dan jurnalis untuk mengadvokasi perjuangan mereka. Konflik meningkat selama 2010 – 2012, di mana awalnya merupakan konflik vertikal, kemudian menjadi konflik horizontal. Seiring waktu, konflik telah menciptakan disintegrasi sosial dan mengkerdilkan norma-norma sosial di wilayah pesisir.

Penolakan PPLP terhadap rencana penambangan pasir besi merupakan salah satu praktik terbaik gerakan akar rumput di Indonesia. Konflik berakhir sekitar tahun 2014 ketika rencana penambangan pasir besi ditunda dan masih belum jelas sampai saat ini. Namun, PPLP terus berjuang. Mereka memperingati hari lahir PPLP setiap tahun untuk menunjukkan eksistensinya menolak perampasan ruang hidup, membangun jaringan dengan serikat petani lain dan mengadvokasi kasus yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana PPLP mempertahankan perlawanannya.

b. Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan dan menambah landasan penelitian sarjana (skripsi) dan pascasarjana saya (tesis) mengenai konflik rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. Penelitian sarjana saya pada tahun 2010 memetakan pro dan kontra aktor dan minat mereka pada rencana penambangan besi pasir, dinamika, dan bentuk konflik. Sementara itu, penelitian pascasarjana saya pada tahun 2012 mengeksplorasi konstruksi konflik dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.

Resistensi petani adalah masalah sosial klasik di banyak bagian dunia. Sebagian besar berupa gerakan sosial akar rumput untuk mempertahankan mata pencaharian mereka atau melindungi mode produksi dari modernisasi. PPLP, dalam konteks konflik rencana penambangan pasir besi, terbukti tangguh untuk mempertahankan perlawanan mereka. Sangat penting untuk menguraikan bagaimana perjuangan para petani memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana PPLP mempertahankan perlawanannya selama 18 tahun? Penelitian ini akan memperkaya studi perlawanan petani terhadap rezim ekstraktif dalam konteks ekonomi politik Indonesia, khususnya di Asia Tenggara. Selanjutnya, hasilnya dapat digunakan untuk merumuskan strategi dan kebijakan perlawanan petani untuk mendukung hak-hak petani.

c. Kajian Teoritik

Kerangka kerja (*theoretical framework*) penelitian ini menggunakan teori akumulasi dengan perampasan (*Accummulation by Dispossession*) atau disingkat ABD dan teori perlawanan

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

(*resistance*). Perlawanan petani di akar rumput sering kali dilihat sebagai fenomen praksis yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, dan perebutan sumber-sumber ekonomi. Namun demikian, fenomena tersebut dipengaruhi oleh fenomena global dengan lingkup yang sangat luas, salah satunya adalah globalisasi dan neoliberalisme. Oleh sebab itu, perlawanan petani yang dilakukan oleh PPLP-KP penting dipahami menggunakan perspektif ekonomi politik yang dapat mengantarkan kepada kerangka mengapa potensi perampasan tanah terjadi dan apa dampaknya. Kajian teoritik ini mencoba menelaah konsepsi-konsepsi ekonomi politik yang dapat menjelaskan munculnya perlawanan petani di akar rumput. Kondisi ekonomi politik di Indonesia akan dilihat menggunakan perspektif akumulasi dengan perampasan (ABD) yang kemudian mengantarkan pada konseptualisasi perlawanan sebagai respon terhadap dominasi elit global.

Accummulation by Dispossession

Accummulation by Dispossession (akumulasi dengan perampasan) disingkat ABD merupakan konsep yang menjelaskan kapitalisme neoliberal yang dihasilkan dari sentralisasi kekayaan dan kekuasaan para elite yang didapatkan dengan cara merampas kekayaan atau tanah sektor publik maupun sektor privat. Konsep ini dicetuskan oleh seorang ahli geografi beraliran Marxist bernama David Harvey. Harvey (2003) melakukan penelusuran mendalam terhadap diskursus kapitalisme dengan menggunakan konsep dari Rosa Luxemburgh tentang disposisi ganda pada akumulasi kapital (*the dual disposition of capital accumulation*) dan konsep dari Karl Marx tentang akumulasi primitif (*primitive accumulation*). Menggunakan konsep yang pertama, ia berpendapat bahwa proses ekonomi diwarnai dengan kekerasan politik dan kontestasi kekuasaan. Sementara itu, berlandaskan konsep akumulasi primitif ia merumuskan *Accummulation by Dispossession* (ABD) sebagai sebuah teori baru untuk memahami kapitalisme yang terjadi saat ini. Argumentasi utamanya bahwa ABD merupakan pusat kapitalisme kontemporer. Kapitalisme melahirkan disposisi ganda pada konsep akumulasi kapital. Pada satu sisi, akumulasi kapital adalah sebuah prosedur ekonomi yang memiliki tiga aspek. Pertama, fase terpenting dalam akumulasi adalah proses bisnis antara pelaku industri dan pekerja. Kedua, komoditas pasar mampu menghasilkan nilai surplus. Ketiga, akumulasi bertransformasi menjadi perampasan milik orang lain ketika suatu komoditas di eksploitasi dan peran kelas menggeser kesetaraan. Di sisi lain, akumulasi kapital menunjukkan keterkaitan antara model produksi kapitalis dan non-kapitalis yang muncul di konteks internasional. Pada arena ini, akumulasi kapital menggunakan kebijakan kolonial, sistem kredit global, dan perang sebagai sarana-sarana utama. Dalam proses tersebut, kekuatan, penipuan, dominasi, dan penjarahan dilakukan secara terbuka.

ABD menawarkan lima premis. Pertama, ABD mampu berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan akumulasi berlebihan. Akumulasi berlebihan (*overaccumulation*) adalah situasi dimana kapital yang sangat besar tidak dapat menghasilkan keuntungan. Terkadang kondisi tersebut disertai dengan kelebihan tenaga kerja. Oleh sebab itu, ABD melepaskan aset dengan harga rendah yang kemudian dibeli oleh akumulasi kapital yang berlebih dan mengubahnya menjadi barang yang berharga. Sebagai contoh, di dalam konteks akumulasi primitif aktor melakukan perampasan tanah dan mengusir penduduknya sehingga menjadi tidak memiliki tanah. Tanah tersebut kemudian diprivatisasi sebagai bagian dari proses akumulasi kapital. Harvey menyoroti permodalan dan institusi pemberi kredit yang didukung oleh kekuatan negara, melibatkan ABD dalam proses ini.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Premis kedua menyatakan bahwa ABD adalah sebuah kontingensi. Sebab, ABD kemungkinan dimanifestasikan dalam aksi-aksi tidak terlihat, baik sah maupun melanggar hukum, yang mana memungkinkan kelas tertentu untuk menguasai kapital. ABD muncul dari dua kondisi. Kondisi pertama adalah waktu dan cara krisis diciptakan oleh produksi yang diperluas. Kondisi kedua menyatakan bahwa ABD terjadi ketika pengusaha dan pemerintah bersama-sama mendirikan sebuah sistem dan berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan darinya. Dengan kata lain, ABD dapat dilihat sebagai biaya yang sangat diperlukan untuk mengembangkan lompatan kuantum menuju perkembangan kapitalis, yang sepenuhnya didukung oleh negara. Perubahan tersebut dikendalikan oleh alasan internal dan tekanan eksternal. Sebagai contoh, krisis ekonomi terjadi ketika sistem kredit ditekan, likuiditas terkuras habis, dan perusahaan bankrut. Pada umumnya, kondisi tersebut menyebabkan devaluasi dan merusak kesejahteraan sosial dan institusi sosial. Proses tersebut diciptakan oleh kapitalisme global.

Premise ketiga menyatakan bahawa privatisasi adalah ujung tombak dari ABD. Teori neoliberal dan privatisasi politik mengindikasikan bahwa kekuasaan negara adalah aktor utama ABD. Proses tersebut dibiayai oleh finansialisasi, liberalisasi perdagangan, dan penyesuaian sistem pembiayaan global. Proses tersebut akan memicu devaluasi dan akumulasi dengan perampasan di area-area tertentu. Neoliberalisme menggunakan privatisasi dan liberalisasi untuk mengubah fase baru '*enclosure of the commons*' menjadi tujuan kebijakan negara. Pemerintah menjual kekayaannya kepada pasar yang dikelola oleh over akumulasi kekayaan. Neoliberalisme merupakan transformasi radikal, mengubah relasi sosial dan redistribusi kapital yang mana menguntungkan orang-orang kaya dan memiskinkan orang yang kekurangan. Melalui privatisasi negara mengalihkan aset produktif publik, seperti sumber daya alam, ke sektor privat. Hendaknya aset produktif publik tersebut dimiliki oleh rakyat, negara bertanggung jawab mengelolanya. Maka dari itu, para ahli memandang proses ini sebagai perampasan yang bar-bar. Di banyak negara, neoliberalisme merampas kekayaan masyarakat adat sehingga mendorong perlawanan.

Pada premis keempat Harvey memiliki keyakinan bahwa kapitalisme membutuhkan fase penghancuran kreatif yang disertai dengan kekejaman. Atas alasan ini, akumulasi primitif diwarnai dengan serangkaian serangan brutal dan perlawanan. Fenomena tersebut juga terjadi di ABD, memicu perjuangan sosial dan politik serta perlawanan. Gerakan perlawanan ini melanjutkan pertempuran sebelumnya untuk merebut kembali hak. Di sisi lain, perlawanan mampu membangun kekuasaan kelas yang kuat untuk menghasilkan keuntungan material dan mengembangkan standar hidup yang tinggi. Intinya, akumulasi primitif membangun jalan untuk memperluas reproduksi. Sementara itu, ABD mengganggu dan bahkan merusaknya. Tidak diragukan, perlawanan terhadap akumulasi primitif mendorong ketidakpuasan yang berkembang menjadi gerakan pemberontakan, terutama di dalam komunitas masyarakat miskin. Sangat jelas bahwa tujuan politik sosialis adalah untuk menyerang relasi kelas dan model kekuasaan negara yang ingin merubahnya. Maka dari itu, ini bukan untuk melindungi penguasa sebelumnya. Sayangnya pada banyak kasus, developmentalisme sosialis tidak menghargai gerakan pemberontak yang menentang akumulasi dengan perampasan.

Premis kelima menyatakan bahwa perjuangan anti kapitalist dan anti imperialis memiliki domain ganda. Kubu Marxis (sosialis kiri) berpendapat bahwa aktor utama yang mengubah sejarah adalah kaum proletar. Mereka mendeskripsikan kaum proletar sebagai pekerja upahan (buruh) yang tidak memiliki alat produksi. Kontradiksi secara langsung terletak antara kapital dan buruh di dalam ruang produksi. Sementara itu, institusi kelas pekerja menggunakan serikat pekerja dan partai politik. Kedua institusi tersebut bertujuan untuk memperoleh kekuasaan negara

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

untuk mengontrol atau menggantikan dominasi kelas kapitalis. Akumulasi kapital menganggap bahwa relasi kelas dan perjuangan kelas serupa dengan reproduksi yang diperluas. Sebagian besar perjuangan melawan kapitalisme tidak memiliki kekuatan yang cukup sehingga gerakan yang dilakukan dapat diberantas dengan mudah oleh perkembangan kapitalisme global.

Perlawanan terhadap perampasan tumbuh di dalam kadar yang berbeda-beda, di level lokal, regional, dan global. Pada kondisi ini, peran negara terlihat tidak relevan. Selain itu, target dan sasaran gerakan ini menyebar, terfragmentasi, dan kontingen. Sebagai contoh, kerusakan lingkungan, privatisasi layanan, perampasan tanah, dan *biopiracy* memiliki pola proses yang berbeda. Di sisi lain, masyarakat dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cara membentuk institusi perlawanan yang cair. Para ahli mengkategorisasikan perlawanan tersebut sebagai gerakan pos modern. Harvey juga mengemukakan pendapat jika akumulasi kapital memiliki dua karakteristik, yakni reproduksi yang diperluas dan akumulasi dengan perampasan. Kedua karakteristik tersebut saling terkait satu sama lain. Maka dari itu, baik perjuangan melawan reproduksi yang diperluas dan akumulasi dengan perampasan (ABD) memiliki hubungan dialektikal dimana gerakan sosial berkonsolidasi dengan gerakan anti globalisasi dan bentuk-bentuk alternatifnya. Secara singkat, ABD adalah tantangan terkini bagi gerakan anti globalisasi. Meskipun demikian, relasi dialektikal melawan reproduksi yang diperluas membutuhkan kesadaran. Persoalannya terletak pada tidak setiap gerakan melawan ABD bersifat progresif. Meskipun demikian, perlawanan tersebut penting untuk dipertahankan.

Penelitian ini menggunakan konsep ABD untuk menjelaskan ekonomi politik Indonesia. Terutama di rezim ekstraktif dan bagaimana keterkaitannya dengan perlawanan petani. Premis pertama ABD digunakan untuk menginterpretasikan bagaimana pemerintah Indonesia bersepakat dengan over akumulasi pada rezim ekstraktif melalui ekonomi politik. Premis kedua digunakan untuk membantu menjelaskan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan sektor publik untuk membangun pertambangan dan industri ekstraktif untuk menghasilkan keuntungan. Premis ketiga digunakan untuk mengkerangki privatisasi yang terjadi di Indonesia. Sedangkan premis keempat dan kelima digunakan untuk mengkaitkan narasi ekonomi politik Indonesia yang kemudian mendorong perlawanan, dilihat dari konsep-konsep perlawanan.

Konsep Perlawanan

Pada awalnya, studi perlawanan (*resistance study*) berpusat pada revolusi dan gerakan kolektif besar-besaran untuk menentang kebijakan negara secara terang-terangan. Fletcher (2001) menjelaskan bahwa hampir pada saat yang sama, tiga perspektif baru tentang perlawanan muncul pada 1970-an dan 1980-an. *Pertama*, Foucault dan Certeau bekerja dalam filsafat sosial Prancis untuk mengembangkan bentuk kehidupan sehari-hari dan subjektivitas marjinal yang lebih eksplisit. *Kedua*, dalam studi agraria, Scott mempromosikan bentuk sehari-hari (*everyday resistance*) perlawanan petani. *Ketiga*, Guha, dalam historiografi Marxis, mendorong komunitas kolonial di Asia Selatan untuk secara cerdas membantah dominasi kolonialis Eropa. Bentuk perlawanan sehari-hari menjadi perspektif utama dalam studi resistensi.

Pada dasarnya, studi tentang perlawanan berasal dari agenda politik kiri atas keyakinan bahwa masyarakat harus berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan dan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan oleh pelanggaran prinsip-prinsip ini (Fletcher, 2001). Fletcher menegaskan bahwa perlawanan sangat terkait dengan kekuasaan. Dia menyarankan beberapa ide. *Pertama*, dikotomi antara kekuasaan dan perlawanan harus diberantas. Perlawanan harus dipahami sebagai produk kekuasaan karena ia menjalankan kekuasaan. Perlawanan bisa

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

menjadi perebutan kekuasaan antara yang kuat dan yang tidak berdaya. Dengan kata lain, perlawanan adalah fungsi kekuasaan sebagai upaya untuk membangun arena kekuasaan di mana bawahan diizinkan untuk mewujudkan dominasi yang perlu dilawan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana tempat seperti itu didirikan dan bagaimana subaltern dapat diberdayakan sehingga mereka dapat melawan. *Kedua*, identifikasi bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari dapat dihapus karena perlawanan terhadap kekuasaan, seperti ketidakpuasan dan pemberontakan kecil, selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kekuasaan selalu hadir dalam hubungan sosial, sehingga selalu ada perlawanan terhadap kekuasaan itu. *Ketiga*, perlawanan dan oposisi perlu dipisahkan. Perlawanan muncul ketika subjek kekuasaan mengakui dan mempertahankan legitimasinya. Perlawanan berubah menjadi oposisi ketika bawahan tidak lagi tunduk pada kekuasaan. Membedakan perlawanan dan oposisi dapat mempertajam eksplorasi asal-usul perjuangan bawahan, di mana hegemoni elit ditantang dan diatasi. Upaya untuk memperjuangkan pengaruh luar yang tidak pernah dianggap sah juga dapat disebut sebagai oposisi.

Studi resistensi pesat berkembang. Sebagian besar perlawanan lebih terkait dengan sikap antisosial, destruktif, ideologi revolusioner reaksioner, ledakan kekerasan yang tak terduga, dan wabah emosional. Perlawanan berpotensi produktif, jamak, cair, dan terintegrasi ke dalam kehidupan sosial sehari-hari sehingga dapat secara menguntungkan membentuk kembali masyarakat dan mengubah sejarah. Baaz dkk. (2016) mengkategorikan wacana resistensi menjadi tiga kelompok studi (Baaz dkk., 2016). *Pertama*, tantangan konfrontatif dan publik dari kontra-kekuasaan, seperti revolusi, demonstrasi, pemogokan serikat pekerja, dan boikot. *Kedua*, perlawanan sehari-hari oleh Scott, yang mengembangkan jenis perlawanan, seperti bentuk perlawanan terselubung yang tersembunyi. *Ketiga*, adalah komponen campuran dari bentuk terselubung dan publik. Berdasarkan kuantitas dan manajemen, para pakar perlawanan mengkategorikan perlawanan sebagai perlawanan kolektif/terorganisir dan perlawanan individu/tidak terorganisir atau skala kecil. Perlawanan skala kecil dapat diajukan di antara tindakan individu dan kolektif. Baaz et al. (2016) menyarankan tujuh aspek analisis (dimensi) untuk mengeksplorasi resistensi secara komprehensif. Aspek-aspeknya adalah (1) repertoar resistensi mengenai konfigurasi kekuasaan tertentu, (2) spektrum antara resistensi terorganisir dan individu, (3) aspek temporal resistensi, (4) dimensi spasial resistensi, (5) hubungan antara tubuh dan representasi, (6) resistensi memperkuat dan / atau menciptakan kinerja resistensi baru, dan (7) proses refleksi diri dan mempengaruhi (Baaz et al. 2016, hlm.45-48).

Menurut Hollander dan Einwohner (2004), perlawanan adalah pencegahan oleh aktor, target, dan pengamat lainnya. Oleh karena itu, memahami interaksi aktor (penentang), target, dan pengamat lainnya adalah cara untuk memahami sifat perlawanan. Mempertimbangkan interaksi ini menekankan peran kekuasaan yang bermanifestasi dalam hubungan interaksional. Young (2015) berargumen bahwa perlawanan dibentuk oleh lima masalah mendasar yaitu interaksi struktur dan agensi, peran yang dimainkan niat dalam perlawanan, sifat kekuasaan, pemahaman pasar, dan kemungkinan emansipasi. Sementara itu, Johansson dan Vinthagen (2016) membangun kerangka kerja yang terdiri dari empat dimensi perlawanan sehari-hari, yaitu repertoar, hubungan agen, spasialisasi, dan temporalisasi. Penelitian dalam perlawanan sehari-hari harus mempertimbangkan empat dimensi sosiologis mendasar repertoar, waktu, ruang, dan hubungan) bersama dengan empat persimpangan mendasar dari hubungan kekuasaan (gender, seksualitas, kelas dan ras/etnis).

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Di sisi lain, Chin dan Mittelman (1997) meneliti perlawanan terhadap globalisasi menggunakan teori resistensi trialektik oleh Gramsci, Polanyi, dan Scott. Dengan membandingkan tiga teori perlawanan utama, mereka mengidentifikasi dan menentang bentuk-bentuk dominasi, memperluas wilayah politik dan memulai aaksi baru. Mereka mengembangkan konseptualisasi perlawanan kontemporer terhadap globalisasi yang terdiri dari empat dimensi, yaitu bentuk perlawanan, agen perlawanan, tempat perlawanan, dan strategi perlawanan. Menurut Lilja, Baaz, dan Vinthagen (2013), perlawanan adalah respons terhadap kekuasaan dari 'bawah', praktik subaltern yang dapat menantang, menegosiasikan, dan melemahkan kekuasaan. Namun, resistensi mungkin dapat menjadi parasit untuk kekuasaan dan/atau merusak kekuasaan.

Dari berbagai definisi dan dimensi perlawanan tersebut, dirumuskan beberapa aspek penting perlawanan sebagai berikut:

1. Sasaran dan tujuan perlawanan
2. Pendorong perlawanan
3. Konfigurasi kekuasaan di dalam perlawanan
4. Karakter perlawanan terorganisir atau individual
5. Dimensi spasial perlawanan
6. Representasi di dalam perlawanan
7. Refleksi atau dampak perlawanan
8. Inspirasi perlawanan
9. Basis perlawanan
10. Gaya perlawanan
11. Skala perlawanan
12. Tingkat koordinasi di dalam perlawanan
13. Nilai hidup dan budaya
14. Perbedaan perspektif di dalam perlawanan

Aspek-aspek di dalam perlawanan tersebut digunakan untuk menginterpretasikan data temuan lapangan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan Wilayah Kontrak Karya (konsesi) rencana penambangan besi pasir. Lokasi penelitian meliputi Trisik di Desa Banaran, Gupit dan Siliran di Desa Karangsewu (Kecamatan Galur), Bugel dan Garongan (Kecamatan Panjatan) serta Karangwuni (Kecamatan Wates). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal untuk fokus pada peristiwa kontemporer. Sebuah studi kasus dapat melibatkan orang dengan pengalaman kasus atau untuk memberikan gambaran yang kaya dari suatu peristiwa, proyek, atau program kemudian menafsirkan temuan untuk membangun pemahaman tentang kasus (Leavy, 2014). Studi kasus digunakan untuk menjelaskan resistensi petani dalam konteks rencana pertambangan sebagai fenomena tertentu. Studi kasus mencari faktor-faktor kasual untuk menjelaskan fenomena tertentu. Fokus utama dari studi kasus adalah untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana kondisi tertentu muncul, yaitu mengapa urutan peristiwa tertentu terjadi atau tidak terjadi (Yin, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, observasi langsung dan naturalistik serta analisis dokumen. Wawancara semi-terstruktur dilakukan secara individual dengan mewawancarai orang per orang (*one on one interview*). Wawancara berlangsung sekitar 1 – 2 jam melalui satu kali kunjungan atau beberapa kali kunjungan.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Observasi akan dilakukan melalui pengamatan langsung dan naturalistik. Pengamatan naturalistik sangat penting dalam lingkungan yang sangat dipolitisasi, seperti dalam masyarakat paska konflik, di mana dalam wawancara informan dapat nyembunyikan "kebenaran". Observasi dilakukan ketika acara peringatan hari ulang tahun PPLP yang mengekspresikan perlawanan mereka. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan pada media yang memberitakan perlawanan PPLP.

Target informan sekitar 15 orang yang ditentukan secara purposif. Informan meliputi pengurus dan anggota PPLP yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu anggota PPLP, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan berusia di atas 40 tahun yang terlibat konflik rencana penambangan pasir besi sejak awal (tahun 2006 atau sebelumnya). Setiap selesai melakukan wawancara, dibuat catatan lapangan untuk merekam data. Data tersebut akan ditafsirkan menggunakan fenomenologi hermeneutik, memberikan kesempatan terbaik untuk 'menyuarakan' pengalaman dalam konteks konflik rencana penambangan pasir besi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlawanan PPLP terhadap rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo dilihat menggunakan sudut pandang perlawanan terhadap neoliberalisme. Oleh sebab itu, sebelum membahas tentang perlawanan di akar rumput tersebut, dibahas tentang bagaimana neoliberalisme berkembang dalam proses ekonomi politik Indonesia yang kemudian menghasilkan rezim ekstraktif. Rezim ekstraktif inilah yang kemudian melakukan eksploitasi SDA dan mendorong lahirnya gerakan masyarakat akar rumput untuk melawan perampasan tanah, perampasan ruang hidup, dan mencegah kerusakan lingkungan.

a. Neoliberalisme Mendorong Berkembangnya Rezim Ekstraktif di Indonesia

Globalisasi dan neoliberalisme secara signifikan mempengaruhi perkembangan ekonomi politik Indonesia yang menerapkan ide-ide neoliberalisme. Aktor global seperti negara, lembaga keuangan internasional, LSM, dan sektor swasta mengendalikan ekonomi politik Indonesia. Pemerintah Indonesia menempatkan ekonomi nasional di tengah ekonomi pasar yang berorientasi pada akumulasi keuntungan dan memprioritaskan kekayaan pribadi pihak-pihak tertentu. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menganut ekstraktivisme dan mengembangkan rezim ekstraktif yang mengandalkan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka pintu paling ekspansif bagi investasi asing. Setelah era kolonial, kebijakan neoliberal diterapkan oleh setiap rezim penguasa yang mendukung investasi asing, utang luar negeri, dan akumulasi kepemilikan pribadi.

Boediono (2016) menekankan bahwa situasi ekonomi yang dialami oleh periode tertentu dihasilkan dari interaksi tiga aspek. *Pertama*, kebijakan moneter, yang pada umumnya merupakan hasil dari pandangan politik. *Kedua*, situasi politik yang menginspirasi dan mengakomodasi kebijakan. *Ketiga*, fenomena dunia yang mempengaruhi urusan dalam negeri. Tidak diragukan lagi, situasi kebijakan, politik, dan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh politik global dan fenomena ekonomi. Misalnya, depresi ekonomi dunia adalah fenomena ekonomi global, dan perang dunia adalah fenomena politik internasional.

Selanjutnya, politik dan ekonomi saling terkait dalam kehidupan bernegara dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kasus Indonesia, politik menentukan ekonomi. Pasalnya, pandangan dan tujuan politik menentukan pola kebijakan ekonomi untuk mewujudkan tujuan politik tersebut. Booth (2016) mengkategorikan perubahan politik Indonesia pasca kemerdekaan menggunakan

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

tiga periode. Periode pertama adalah pada tanggal 27 Desember 1949, ketika pemerintah Hindia Belanda mengalihkan kekuasaan terakhir kepada pemerintah Indonesia yang baru. Periode kedua terjadi pada 11 Maret 1966, ketika pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintahan Orde Baru. Periode ketiga pada 21 Mei 1998, ketika era demokratisasi dimulai.

Penelitian ini mengkategorisasikan tahapan ekonomi politik Indonesia menjadi tiga periode. Periode pertama adalah era milik negara (*state owned*), kedua adalah era marketisasi, dan yang ketiga adalah era demokratisasi. Eksplorasi bagaimana setiap era membentuk ekonomi politik Indonesia sangat penting karena memiliki karakteristik, pendekatan, dan tujuan yang berbeda dalam mengembangkan kapitalisasi. Setiap era memiliki strategi untuk menerapkan ide-ide kapitalisme dan neoliberalisme untuk mendukung kebijakan pembangunan pro-pasar. Keberadaan utang luar negeri yang meningkat menjadi pertanyaan besar. Mengapa pembangunan ekonomi di Indonesia tidak mampu menciptakan kedaulatan ekonomi? Pinjaman luar negeri, investasi asing, dan pengerukan sumber daya alam juga meningkat. Singkatnya, era marketisasi mengembangkan tonggak ekonomi politik Indonesia, menerapkan ide-ide neoliberalisme yang mempengaruhi perkembangannya saat ini.

Indonesia mengalami berbagai strategi ekonomi politik, antara lain merkantilisme di era kolonial awal, ekonomi terpimpin di era *state owned*, liberalisme di era marketisasi, dan neoliberalisme di era demokratisasi. Rezim ekstraktif Indonesia dimulai pada masa kolonial, ditandai dengan perubahan komoditas ekspor. Misalnya, pada abad kesembilan belas, terjadi perubahan komoditas ekspor dari kopi menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi minyak bumi pada akhir abad keduapuluh. Selanjutnya, rezim berkembang selama proyek pembangunan pasca-Perang Dunia II. Menurut Gellert (2019), rezim ekstraktif Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua periode yang berbeda, yaitu siklus nasionalisme sumberdaya pertama pada 1950an sampai 1970an dan siklus nasionalisme sumberdaya kedua pada tahun 1980an sampai 1990an.

Di era pasca-kolonial, rezim ekstraktif Indonesia muncul karena interaksi antara ideologi sosialis dan nasionalis Sukarno dan kapitalisme Orde Baru Suharto yang otoriter, ditandai dengan ekonomi non-liberal. Gellert (2010) berpendapat bahwa keterkaitan faktor lokal dan global, membentuk kemunculan dan perkembangan rezim ekstraktif di Indonesia. Realitas historis adalah bahwa presiden perdana Indonesia, Sukarno, mengadopsi sikap non-blok selama Perang Dingin, yang merupakan faktor internasional. Selanjutnya, pada tahun 1965, kudeta dan genosida yang didukung Amerika Serikat yang diatur oleh partai komunis Indonesia terjadi. Presiden berikutnya, Suharto, mengadopsi posisi yang menentang komunisme dan mendukung Amerika Serikat di berbagai domain, termasuk ekonomi, politik, dan militer.

Rezim ekstraktif didirikan berdasarkan developmentalisme selama fase awal siklus nasionalisme sumberdaya. Tujuannya adalah untuk menasionalisasi kepemilikan sumber daya untuk memfasilitasi redistribusi progresif, transformasi industri, dan tindakan kolektif untuk memperbaiki harga pasar. Dalam siklus nasionalisme sumberdaya saat ini, ideologi neoliberalisme telah mempengaruhi prinsip-prinsip developmentalisme dan menghasilkan pendekatan yang lebih berorientasi pasar. Untuk memperoleh izin penggunaan lahan, pemerintahan Indonesia berupaya melembagakan modalitas kepemilikan bersama atas tambang dan perkebunan melalui hegemoni politik lokal dan regional. Paradigma pembangunan yang berkembang menggabungkan tuntutan khusus untuk mengakui hak atas tanah dari masyarakat regional dan penduduk asli. Tujuan utamanya adalah membangun dan meningkatkan jaminan hukum untuk komersialisasi ekstensif tanah dan sumber daya Indonesia, yang biasa disebut 'pasar dalam', menggunakan komodifikasi yang meningkat dan berkelanjutan (Gellert 2019). Negara

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

semi-periferal, diklasifikasikan sebagai sub-imperialis karena praktik ekspansi teritorial mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Kecenderungan ideologis mereka adalah terhadap neoliberalisme yang kemudian berkembang menjadi predatoris.

Rezim kontemporer di Indonesia dibentuk oleh rezim yang mengekstraksi sumber daya, dengan pergeseran jenis sumber daya yang diekstraksi. Periode neoliberalisme awal di Indonesia menyaksikan rezim ekstraktif yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno (Pemerintah Orde Lama) dan Presiden Suharto (Pemerintah Orde Baru). Siklus pertama nasionalisme sumberdaya dimulai pada pemerintahan rezim Orde Lama. Perang Dingin di Asia memperkuat keadaan ini melalui pengesahan strategi nasional dan fasilitasi agregasi sumber daya. Fenomena nasionalisme sumber daya muncul dalam konteks gerakan anti-kolonial. Paska kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1950an terjadi proses nasionalisasi ladang minyak dan perkebunan milik Belanda. Dampaknya adalah adanya kepentingan kapitalis Amerika Serikat yang diduga memberikan dukungan untuk pemberontakan Partai Komunis Indonesia terhadap kepemimpinan Sukarno, serta genosida berikutnya yang terjadi selama tahun 1965-1966.

Di era Perang Dingin, kepentingan geopolitik dan ideologis Indonesia bagi Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, cenderung rendah. Presiden Sukarno mengarahkan negara Indonesia untuk non-blok dan tidak berpihak pada Blok Barat atau Blok Timur. Pada akhir 1950an dan awal 1960an, Pemerintah Orde Lama berusaha untuk membangun ekonomi nasional dengan menasionalisasi industri perkebunan, minyak, dan pertanian yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda dan perusahaan-perusahaan Barat lainnya. Selain itu, Sukarno mengabaikan bantuan internasional. Pada tahun 1964, ia membuat keputusan penting bahwa Indonesia keluar dari PBB. Tindakan-tindakan ini menunjukkan sikap anti-Barat Sukarno. Sayangnya kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan kesulitan ekonomi yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, inflasi, dan kemunduran dari pasar internasional selama puncak masa jabatan Sukarno. Pada tahun 1965, Pemerintahan Sukarno digulingkan oleh kudeta Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan PKI diikuti dengan kekerasan politik, dimana terjadi pembantaian jutaan anggota PKI oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pemerintahan selanjutnya adalah Orde Baru. Di Era Orde Baru, rezim ekstraktif mengalami pertumbuhan signifikan dengan mengeksploitasi berbagai industri seperti minyak, kayu, mineral, dan komoditas lainnya. Periode ini juga sejalan dengan fase neoliberalisme. Dimulainya neoliberalisme dapat ditelusuri kembali ke tahun 1968, ketika Suharto memprakarsai liberalisasi kebijakan investasi asing, yang mengakibatkan stabilisasi inflasi dan pemulihan ekonomi. Daya tahan sistem politik ini dikaitkan dengan ketergantungannya pada bantuan keuangan eksternal, investasi, dan partisipasi aktifnya di pasar mata uang internasional. Rezim liberal dimulai pada tahun 1967 melalui undang-undang investasi asing dan tur internasional untuk mempromosikan lingkungan politik baru yang ramah bagi bisnis dan investor asing. Pada saat yang sama, bantuan asing menyerbu Indonesia, salah satunya adalah Bank Dunia. Pada saat itu, rezim ekstraktif didirikan untuk mengeksploitasi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, deposit mineral, kayu, dan sektor kelautan. Orde Baru menambah skala ekspor dan mengejar industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk membangun legitimasi rezim ekstraktif. Selain itu, rezim ekstraktif mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak penduduk lokal dan memunculkan perselisihan dengan anggota masyarakat. Untuk melawan protes di berbagai daerah, Suharto memanfaatkan kekuatan militer.

Selanjutnya, Pemerintahan Suharto terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam dan memanfaatkan ekspor sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Orde Baru menerapkan undang-undang sumber daya sektoral yang melampaui kewenangan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada saat yang sama, lembaga administrasi menciptakan mekanisme hukum yang memberikan kekuatan besar kepada pemerintah pusat untuk mengelola SDA. Monopoli pengelolaan sumber daya oleh pemerintah pusat telah menyebabkan berbagai konflik. Selama periode itu, rezim ekstraktif didirikan dengan memanfaatkan beragam SDA, tetapi tidak terbatas pada minyak, gas, pertambangan, kayu, dan perikanan. Negara memberikan wewenang atas sumber daya hutan untuk mengakumulasi modal dan menetapkan kontrol eksklusif atas rute perdagangan. Rezim ekstraktif sangat bergantung pada ekspor komoditas hutan, termasuk kayu lapis dan kayu gelondongan. Pada 1980an, Indonesia menerapkan langkah-langkah untuk beradaptasi dengan kebijakan ekonomi neoliberalisme, yang mencakup liberalisasi nilai tukar dan perbankan. Gelar negara berkembang disematkan pada Indonesia pada akhir masa Orde Baru pada tahun 1980an hingga 1990an.

Industri pertambangan menjadi target pertama penerapan gagasan neoliberalisme di Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintah membuka penanaman modal asing dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pasal 8 undang-undang tersebut menyatakan bahwa investasi asing di bidang pertambangan didasarkan pada kerja sama dengan pemerintah berdasarkan kontrak karya atau bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan penanaman modal di bidang pertambangan dirinci dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang ini melegalkan Kontrak Karya, model kontrak antara pemerintah dan perusahaan asing, yang dianggap paling liberal di industri pertambangan.

Freeport Sulphur Company dari Amerika Serikat adalah perusahaan asing pertama yang menerima Kontrak Karya dari pemerintah Indonesia pada bulan April 1967. Perusahaan tersebut menerima berbagai hak istimewa dari pemerintah. Salah satunya adalah menyiapkan rancangan kontrak kerja, yang disetujui pemerintah. Pemerintah mengambil langkah ini untuk menarik investasi asing. Upaya pemerintah untuk mengundang investasi asing berhasil. Pada tahun 1970, sembilan perusahaan asing memperoleh kontrak kerja. Era pemerintahan Orde Baru membuat Indonesia menjadi lahan subur bagi investasi asing. Bahkan mendapat predikat negara paling menarik pada bidang investasi pertambangan di Asia. Perusahaan industri pertambangan internasional seperti Rio Tinto, Newmont Gold Company, Newcrest Mining Ltd, Broken Hill Proprietary Company Ltd, Freeport McMoran Copper & Gold Inc., dan Inco Ltd. berinvestasi di Indonesia. Mereka mendapatkan keuntungan besar dan dilindungi oleh jaminan politik yang solid. Namun, pemerintah harus membayar harga yang mahal untuk keberhasilan ini. Karena fungsi negara neoliberal pusat dalam memastikan pengerukan mineral, telah terjadi konflik dan kekerasan di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai sengketa terjadi di industri berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Pasalnya, negara perlu melindungi kepemilikan barang milik pribadi dengan memberikan jaminan kepada korporasi swasta dan tidak mengakui berbagai model kepemilikan petani atas tanah (Pratiwi, 2021).

Di Indonesia, krisis keuangan Asia pada tahun 1998 berdampak demonstrasi besar-besaran yang bertujuan menggulingkan Soeharto dari kekuasaan. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada Mei 1998. Sayangnya, reformasi politik tidak secara mendasar mengubah struktur negara atau komposisi kelas masyarakat. Titik ini menandai dimulainya fase reformasi demokratis pasca-Suharto, di mana peluang yang lebih signifikan tersedia untuk ekstraksi sumber daya. Rezim ekstraktif memasuki fase baru yang berpusat pada ekstraksi berbagai komoditas. Pengaruh liberalisme kapitalis telah menambah dan memperluas lingkup komodifikasi.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Rezim ekstraktif di Indonesia telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa hingga saat ini. Meskipun menghadapi perlawanan di berbagai wilayah di Indonesia, rezim ini mempertahankan posisi yang mengakar kuat. Dapat disimpulkan bahwa lintasan perkembangan rezim ekstraktif menunjukkan dikotomi antara dua aspek antitesis. Menurut pemerintah dan elit global pendukungnya, rezim ini dianggap benar dan sah. Sebaliknya, bagi masyarakat yang terpinggirkan oleh industri ekstraktif, sistem pemerintahan dianggap tidak sah dan ditandai dengan tindakan kekerasan.

Sejarah ekonomi Indonesia dalam dua abad terakhir menunjukkan pemisahan antara negara predator dan negara maju. Negara pembangunan saat ini adalah tujuan utama, tetapi itu tidak berarti rezim ekstraktif berakhir. Gellert (2010) percaya bahwa ekstraksi sumber daya yang digerakkan oleh kapitalis ke inti sistem dunia mengakomodasi akumulasi periferal dan memperkuat para pemimpin politik. Dari tahun 1950an hingga awal 1970an, nasionalisme sumber daya menekankan gagasan kepemilikan ekstraksi dan pemrosesan sumber daya. Dari tahun 1980an hingga awal 1990an, kebijakan statisme diterapkan, menghasilkan transformasi industri yang lebih luas. Marketisasi semakin tergantung pada konsep keunggulan komparatif dan perluasan ekstraktivisme. Fenomena ini umumnya dikenal sebagai 'developmentalisme baru', ditandai dengan peran negara yang diperluas dengan tetap menerima modal swasta.

Pada tahun 2000an, Indonesia mengubah struktur ekonominya, beralih dari ketergantungan sumber daya alam. Ekonomi mengalami proses re-periferalisasi, di mana penggantian ekspor sumber daya dengan yang baru terjadi karena kegagalan industri manufaktur. Indonesia telah bertransisi menuju negara berpenghasilan menengah yang didorong oleh konsumerisme, namun ekonominya sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam. Meskipun banyak investor asing membutuhkan sumber daya alam mereka, Indonesia mengalami kematian pembangunan seperti proyek nasional lainnya. Gelombang nasionalisme sumber daya kontemporer membatasi peran marketisasi. Selain itu, dapat diamati bahwa negara dan modalnya telah memainkan peran penting dalam proses akuisisi lahan untuk budidaya kelapa sawit melalui pengambilalihan (akumulasi dengan perampasan), serta ekspansi kegiatan penambangan batubara, yang telah disertai dengan langkah-langkah pemaksaan kepada pemilik tanah untuk melepaskan hak kepemilikan mereka.

Proses ekonomi politik tersebut menjadi lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya akumulasi dengan perampasan dan mendorong lahirnya berbagai perlawanan masyarakat akar rumput yang dirugikan. Perlawanan PPLP terhadap rencana penambangan pasir besi di Kabupaten Kulon Progo, merupakan bagian dari upaya melawan hegemoni neoliberalisme yang digencarkan sektor bisnis dan didukung oleh negara. Oleh sebab itu, untuk memahi perlawanan petani di akar rumput, perlu memahami terlebih dahulu kondisi ekonomi politik di level nasional dan global supaya mendapatkan potret bagaimana neoliberalisme bekerja, khususnya di dalam rezim ekstraktif.

b. Keberlanjutan Perlawanan PPLP terhadap Kebijakan Neoliberalisme

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Perlawanan petani lahan pantai, dimulai pada tahun 2006, ketika Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Bersama dengan PT Jogja Magasa Mining, Ltd (PT JMI) mensosialisasikan rencana penambangan pasir besi di desa-desa pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo. Pada saat itu, perlawanan masih bersifat sporadis berupa penolakan untuk menghadiri acara sosialisasi dan pemboikotan acara sosialisasi. Untuk memperkuat perlawanan, petani lahan pantai membentuk Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) pada 1 April 2006. Sejak saat itu berbagai aksi penolakan rencana penambangan pasir besi dilakukan, seperti demonstrasi, publik hearing dan mujahadah atau doa bersama. Berikut kronik perjuangan PPLP tersebut.

Tabel 1. Kronik Perjuangan PPLP

Tanggal	Aksi
1 April 2006	Masyarakat pesisir dari 10 desa di 4 kecamatan membentuk PPLP
27 Agustus 2007	PPLP berdemonstrasi di Kantor DPRD Kulon Progo menuntut pembatalan proyek pasir besi
4 Februari 2008	Warga pesisir melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR RI dan Kedubes Australia meminta kejelasan identitas PT Indo Mines, Ltd. (PT JMI).
1 Maret 2008	Warga Bugel melakukan aksi blokir jalan menuju kawasan pantai untuk menghadang pengangkutan material ke Pilot Proyek PT. JMI.
20 Oktober 2009	Konsultasi publik KA ANDAL oleh PT JMI yang tidak menampung aspirasi masyarakat terdampak sehingga diwarnai kericuhan.
April 2010	Masyarakat pesisir mengirimkan surat pernyataan sikap penolakan rencana penambangan pasir besi kepada Presiden RI.
Mei 2010	Masyarakat pesisir mengirim surat kepada DPRD DIY menuntut DPRD DIY mengusut dugaan skandal perundang-undangan dalam proses penyusunan Perda No. 2 Tahun 2010 tentang RTRWP DIY 2009-2019 oleh Gubernur Propinsi DIY.
Juni 2010	Masyarakat pesisir berkirim surat kepada DPRD untuk mengajukan pembatalan Perda No. 2 Tahun 2010 yang melanggar UU No. 10 Tahun 2004 dan Permendagri No. 28 Tahun 2008.
15 Desember 2010	Aksi rapat akbar menolak rencana penambangan pasir besi bertepatan dengan penilaian dokumen KA ANDAL di Desa Bugel.
16 Desember 2010	Aksi warga menghentikan tindakan yang meresahkan yang dilakukan oleh oknum Pakualam di Bugel.
3 – 6 Juni 2008	KOMNAS HAM melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap rencana penambangan pasir besi dan merekomendasikan bahwa rencana penambangan tersebut dapat memicu pelanggaran HAM, yakni hak atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, dan hak petani.
21 Juli 2008	3000 massa PPLP berdemonstrasi di UGM menuntut penghentian kerja sama reklamasi lahan paska penambangan oleh Fakultas Kehutanan UGM dengan PT JMI. Tuntutan ini disetujui.
27 Oktober 2008	Sekumpulan massa dari luar Kawasan konflik melakukan persakan dan pembakaran 7 posko PPLP dan 1 rumah milik warga pesisir.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Tanggal	Aksi
23 – 25 Oktober 2008	Masyarakat pesisir berdemonstrasi di Kantor DPRD Kulon Progo untuk menuntut pembatalan rencana penambangan pasir besi karena berpotensi melanggar HAM.
19 Juli 2009	PPLP mengadakan pertemuan di LBH membahas kasus kriminalisasi terhadap salah satu warga pesisir.
17 Desember 2010	PPLP melakukan penutupan Pilot Proyek PT JMI di Pantai Trisik setelah 3 tahun beroperasi.
9 Februari 2011	Mediasi oleh KOMNAS HAM di Bugel, menghasilkan rekomendasi *deadlock* untuk mediasi para pihak terkait.

Sumber: Asmara Artzine, 2024.

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi DIY menunda rencana penambangan pasir besi sampai saat ini tanpa kejelasan. Namun demikian, PPLP tetap menunjukkan eksistensinya menolak rencana penambangan pasir besi. Perlawanan ditunjukkan dengan menyelenggarakan ulang tahun peringatan hari lahir PPLP, doa bersama (mujahadah), dan syawalan masyarakat pesisir untuk memper erat silaturahmi dan merawat solidaritas perlawanan. Selain itu, perlawanan ditunjukkan melalui upaya terus bercocok tanam di wilayah pesisir yang telah puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga peisir.

Pada saat artikel ini ditulis, penelitian lapangan sedang berjalan sehingga data penelitian belum terkumpul secara lengkap. Berikut analisis terhadap temuan lapangan sementara.

Tabel 2. Interpretasi Temuan Lapangan Sementara

Aspek Perlawanan	Temuan
Sasaran dan tujuan perlawanan	Perlawanan PPLP menyasar rencana penambangan pasir besi dan semua bentuk kebijakan neoliberalisme yang berpotensi merampas tanah dan ruang hidup mereka di pesisir Kulon Progo
Pendorong perlawanan	Perlawanan didorong untuk mempertahankan lahan pantai sebagai sumber mata pencaharian petani
Konfigurasi kekuasaan di dalam perlawanan	Perlawanan PPLP dilakukan oleh semua petani lahan pantai yang didukung oleh beberapa LSM, akademisi, dan seniman. Konfigurasi kekuasaan cukup beragam dan saling mengisi satu-sama lain
Karakter perlawanan: terorganisir atau individual	Perlawanan PPLP teroganisir. Terdapat koordinator lapangan di level dusun dan desa sehingga koordinasi berjalan cepat dan terstruktur
Dimensi spasial perlawanan	Perlawanan PPLP merupakan gerakan sosial akar rumput di ranah lokal, yakni di pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo
Representasi di dalam perlawanan	Setiap dusun dan desa memiliki wakil di dalam kepengurusan PPLP
Refleksi atau dampak perlawanan	Perlawanan memunculkan solidaritas petani pesisir dan perlawanan PPLP menjadi praktik baik serta rujukan

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Aspek Perlawanan	Temuan
	belajar bagi gerakan akar rumput lainnya
Inspirasi perlawanan	Perlawanan terinspirasi oleh penokohan yang kuat di tubuh PPLP
Basis perlawanan	Basis perlawanan PPLP adalah petani lahan pantai
Gaya perlawanan	Perlawanan berupa perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup
Skala perlawanan	Pada umumnya skala perlawanan cukup besar, melipatkan hampir semua petani di lahan pantai
Tingkat koordinasi di dalam perlawanan	Koordinasi dilakukan mulai dari tingkat pedukuhan, desa, dan antar-kecamatan
Nilai hidup dan budaya	PPLP yakin bahwa perlawanan mereka berhasil berkat ijin Allah SWT karena mereka mempertahankan hak hidup dan kelestarian lingkungan
Perbedaan perspektif di dalam perlawanan	Setidaknya terdapat dua karakteristik perlawanan di dalam tubuh PPLP, yakni perlawanan secara halus menggunakan strategi dan perlawanan secara frontal

Perlawanan PPLP didukung oleh berbagai kalangan seperti solidaritas seniman Jogja, LBH, dan para aktivis yang membela hak-hak asasi manusia. *Networking* yang memberikan informasi dan meningkatkan keterampilan mengorganisasikan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan perjuangan PPLP menolak rencana penambangan pasir besi. Oleh sebab itu, perjuangan PPLP melawan kebijakan neoliberalisme tetap dipelihara karena sewaktu-waktu perampasan lahan pantai dapat saja terjadi.

KESIMPULAN

Konsistensi dan keberlanjutan perlawanan PPLP ini menunjukkan kekuatan gerakan akar rumput menentang kebijakan yang mengeksploitasi sumber daya alam (ekstrativisme). Pada kasus ini, akumulasi dengan perampasan dilakukan oleh sektor swasta yang didukung oleh negara dan aristokrat lokal yang mengklaim sebagai pemilik lahan pantai. Rezim ekstraktivis yang diperakan oleh negara melahirkan berbagai macam kebijakan untuk mendukung rencana penambangan pasir besi. Namun, berbagai strategi perampasan ruang hidup tersebut berhasil digagalkan berkat perjuangan PPLP yang menggunakan berbagai bentuk perlawanan baik secara terbuka maupun tertutup dengan mengandalkan jejaring yang dimilikinya. Perlawanan PPLP ini menjadi bukti bahwa masyarakat akar rumput dapat menang melawan upaya negara dan sektor swasta melakukan akumulasi dengan perampasan (ABD) di tengah banyaknya kasus represi terhadap gerakan perlawanan serupa di seluruh penjuru Indonesia. PPLP telah membuktikan perlawanan dari bawah tidaklah mudah, namun bisa dilakukan, dan bisa berhasil jika mampu mengorganiasikan masyarakat dan menggunakan strategi yang tepat.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Penelitian ini masih berjalan, sehingga masih banyak ruang-ruang yang belum dieksplorasi secara mendalam. Selain itu, secara metodologis, penelitian ini dihadapkan pada kendala sulitnya mengakses informan dan dokumen tertulis. Tidak semua informan potensial mau diwawancarai dan tidak bisa mengakses data-data tertulis. Secara substantif, persoalan status kepemilikan tanah pesisir merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diteliti secara lebih mendalam. Sampai saat ini, terdapat perbedaan pandangan terhadap status kepemilikan lahan pantai, apakah milik Pakuaman (*Pakualam Ground*) atau tanah *wedi kengser* sehingga bebas dikelola dan miliki oleh warga pesisir. Selain itu, pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh PPLP juga menarik untuk digali lebih lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan beasiswa untuk menempuh studi doktoral di University of Limerick, Irlandia.

REFERENSI

Asmara Artzine. (2024). *Riwayat Pemakan Pasir*. Yogyakarta: Asmara Artzine.

Baaz, M., Lilja, M., Schulz, M., and Vinthagen, S. (2016). Defining and Analyzing "Resistance": Possible Entrances to the Study of Subversive Practices, *Alternatives. Global, Local, Political*, 41(3), 137–153, available: https://doi.org/10.1177/0304375417700170.

Baswir, R. (2009) *Bahaya Neoliberalisme (The Dangers of Neoliberalism)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Booth, A. (2016). *Economic Change in Modern Indonesia*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Boediono, (2016). *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (Indonesia's Economy on a Historical Trajectory*. Bandung: Mizan.

Chagnon, C.W., Durante, F., Gills, B.K., Hagolani-Albov, S.E., Hokkanen, S., Kangasluoma, S.M.J., Konttinen, H., Kröger, M., LaFleur, W., Ollinaho, O., and Vuola, M.P.S. (2022). From extractivism to global extractivism: the evolution of an organizing concept. *The Journal of Peasant Studies*, 49(4), 760–792, available: https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2069015.

Chin, C.B.N. and Mittelman, J.H. (1997). Conceptualising Resistance to Globalisation. *New Political Economy*, 2(1), 25–37, available: https://doi.org/10.1080/13563469708406282.

Fletcher, R. (2001). What are we fighting for? Rethinking resistance in a Pewenche community in Chile. *Journal of Peasant Studies*, 28(3), 37–66, available: https://doi.org/10.1080/03066150108438774.

Gellert, P.K. (2010). Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian Development. *Rural Sociology*, 75(1), 28-57.

Gellert, P. K. (2019). Neoliberalism and altered state developmentalism in the twenty-first-century extractive regime of Indonesia. *Globalizations*, *16*(6), 894-918.

Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

Hollander, J.A. and Einwohner, R.L. (2004). Conceptualizing Resistance. *Sociological Forum*, 19(4), 533–554.

Johansson and Vinthagen. (2016). Dimensions of Everyday Resistance: An Analytical Framework. *Critical Sociology*, 42(3), 417–435, available:

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

https://doi.org/10.1177/0896920514524604.

Leavy, P. (Ed.) (2014). *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. Oxford library of psychology, Oxford; New York: Oxford University Press.

Lilja, M., Baaz, M. and Vinthagen, S. (2013). Exploring "irrational resistance". *Journal of Political Power*, 6(2), pp. 201–217. Available at: https://doi.org/10.1080/2158379X.2013.809212.

Pratiwi, A. (2021). Kebijakan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik dalam Pembangunan di Indonesia (Economic Policy: Perspectives on Political Economy in Development in Indonesia), *Jurnal Abiwara*, 3(1), 1-14.

Yin, R.K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods, 6th* ed. Los Angeles: SAGE Publications.

Young, G.W. (2015). Conceptualizing Resistance in Post-Conflict Environments. *International Peacekeeping*, 22(2), 169–185, available: https://doi.org/10.1080/13533312.2015.1017081.

Hak Cipta © 2024, Eka Zuni Lusi Astuti.

Analisis Yuridis Pengaturan Pemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Setelah Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023

Endang Lestari[1], I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani[2], Rachma Indriyani[3]
[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
e-mail: endangglest11@gmail.com

Abstrak

Terjadi perubahan pada aturan mengenai kepemilikan Rusun oleh warga negara asing. Pasal 9 UUPA menyebutkan pengertian kewarganegaraan atas tanah. Apakah konsep kewarganegaraan UUPA menginformasikan peraturan perundang-undangan yang telah direvisi yang menata tentang kemampuan WNA untuk memiliki Rusun, dan apakah pembatasan ini memberikan kejelasan hukum yang cukup? Riset ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan Rusun oleh WNA pasca disahkannya UU 6 Th. 2023. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kejelasan hukum atau bertentangan dengan konsep kewarganegaraan UUPA. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Data sekunder dipakai. Jenis riset ini didasarkan pada studi hukum deskriptif. Analisis ini menemukan bahwa, pertama, WNA dapat memiliki Rusun sesuai dengan Pasal 144 dan 145 UU No. 6 Th. 2023. WNA kini secara sah dapat memiliki Rusun baik dalam Hak Pakai maupun Hak Guna Bangunan, menurut aturan baru ini. Kedua, belum ada kejelasan hukum norma hukum yang menata kepemilikan Rusun oleh WNA. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 9 UUPA yang menyebutkan yang bisa mempunyai hubungan langsung dengan tanah secara utuh di Indonesia hanya WNI.

Kata kunci: *Asas Nasionalitas, Pemilikan, Pengaturan, Satuan Rumah Susun, Warga Negara Asing.*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan manusia semakin meningkat, terutama kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal yang aman. Kebutuhan akan tempat tinggal menjadi pendorong utama pembangunan rumah baru. Selain sebagai tempat tinggal yang aman, rumah merupakan komponen penting bagi pertumbuhan setiap keluarga. Pesatnya pertambahan jumlah penduduk dan terbatasnya lahan menyebabkan permintaan Rusun meningkat, sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan lahan yang efektif melalui pembangunan Rusun. Undang-Undang Rumah Susun yang secara resmi dikenal dengan UU No. 20 Th. 2011 menata segala hal yang berkaitan dengan Rusun, kemudian direvisi dengan disahkannya UU No. 6 Th. 2023 yang menetapkan Perpu No. 2 Th. 2022.

Salah satu pilihan untuk memanfaatkan lahan yang luas adalah membangun Rusun di sana. Rumah susun dapat menampung banyak orang. Rusun merupakan cara yang lebih ekonomis untuk menyediakan perumahan sekaligus memanfaatkan lahan yang tersedia secara efisien, terutama di kota-kota besar yang ketersediaan lahannya tidak sebanding dengan kepadatan penduduk (Santoso, 2017, p. 214). Permintaan akan permukiman dan perumahan berskala besar dirasakan baik oleh WNI maupun WNA yang ada di Indonesia. Orang asing terpaksa berada di

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

Indonesia untuk jangka waktu lama karena koneksi komersial dan politik mereka, sehingga mereka membutuhkan tempat tinggal. Terkait HPL, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 18 Tahun 2021), Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "orang asing" yaitu orang asing yang mempunyai kepentingan di Indonesia, seperti yang mengelola usaha atau melakukan penanaman modal yang dapat menguntungkan Indonesia.

Berlandaskan Pasal 17 UU Rumah Susun, terdapat tiga jenis tanah yang bisa dipakai untuk pembangunan Rusun, yaitu: HGB atau Hak Pakai Atas Tanah Negara, HGB atau Hak Pakai di Atas HPL, dan Hak Milik. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) merupakan kodifikasi UUD Tahun 1945. Pada hakikatnya menjadi dasar pengaturan pertanahan Indonesia. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan secara maksimal untuk memakmurkan rakyat". Sikap ini merupakan landasan UUPA, sebuah mahakarya pengaturan pertanahan. Ideologi ini mencakup gagasan tentang Hak Menguasai Negara yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Undang-undang pertanahan tambahan yang berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 sebagian besar ditata dalam UUPA (Wardhani, 2020, hlm. 441). UUPA memberikan hak tunggal kepada WNI untuk memiliki hak milik atas tanah dengan status hukum HGU dan HGB, sebagaimana termaktub melalui Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 36. Sebagaimana termaktub melalui Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA, WNA hanya diberikan hak pakai dan hak sewa atas tanah, namun WNA dibatasi kepemilikannya atas rumah tinggal dengan Hak Pakai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 PP No. 103 Th. 2015. Pencabutan PP No. 103 Th. 2015 dilakukan melalui PP No. 18 Th. 2021.

WNA diperbolehkan mempunyai hunian atau bangunan tempat tinggal di Indonesia melalui PP Nomor 18 Th. 2021: "rumah tapak di atas tanah hak pakai; rumah tapak di atas tanah hak pakai di atas tanah hak milik; atau rumah tapak di atas tanah hak pakai di atas tanah HPL. Selanjutnya, rusun yang dibangun di atas tanah HGB atau Hak Pakai di atas tanah negara atau tanah HPL, maupun tanah dengan hak milik dapat dimiliki oleh WNA.

HSMRS juga bisa diberikan kepada WNA dengan syarat memenuhi izin yang ditentukan oleh perundang-undangan, sebagaimana termaktub dalam UU No. 6 Th. 2023 ditata pada bagian keempat Pertanahan Pasal 144 huruf c. Selain itu, Pasal 145 menyebutkan bahwa "Rumah susun bisa dibangun di atas tanah: a. HGB atau Hak Pakai di atas Tanah Negara; atau b. HGB atau Hak Pakai di atas tanah HPL". Dengan demikian, berlandaskan UU No. 6 Th. 2023 dan PP Nomor 18 Th. 2021, berkaitan dengan rumah susun bisa disimpulkan bahwa WNA bisa mempunyai rumah susun yang dibangun di atas HGB bukan hanya di atas Hak Pakai.

Uraian di atas menunjukkan bahwa UUPA sebagai hukum agraria nasional melarang WNA untuk dapat mempunyai tanah dengan status "Hak Milik, HGB, dan HGU", dan larangan tersebut selanjutnya ditegakkan melalui UU No. 6 Th. 2023. Satu-satunya hak atas tanah yang sah dipunyai oleh WNA adalah hak pakai dan hak sewa. Namun, menurut UU No. 6 Th. 2023, WNA juga dapat memiliki rumah susun di atas HGB di atas Tanah Negara atau HGB di atas Tanah HPL. Alternatifnya, HGB hanya boleh dipunyai oleh WNI atau perusahaan yang berbadan hukum sesuai UUPA.

Penelitian lebih lanjut diperlukan karena, seperti yang penulis kemukakan, mungkin ada inkonsistensi antara peraturan dan perundang-undangan sebagai akibat dari pengetatan pembatasan jumlah tanah yang dipunyai warga negara asing, termasuk HGB, diperbolehkan

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

untuk dikembangkan menjadi apartemen. Selain itu, mengingat kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan fakta bahwa penduduk setempat masih memiliki lebih sedikit pendapatan yang bisa dipakai untuk membeli rumah susun, penulis bertanya-tanya apakah adil untuk memperluas ketentuan tentang hak atas tanah yang bisa dipunyai oleh WNA, sedangkan WNI sendiri rata-rata penghasilannya masih rendah dan sejumlah besar penduduk Indonesia sekarang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis hukum terhadap peraturan tentang kepemilikan rumah susun bagi WNA setelah berlakunya UU No. 6 Th. 2023" untuk alasan tersebut. Riset ini bertujuan untuk mengkaji undang-undang tentang kepemilikan rumah susun oleh WNA setelah berlakunya UU No. 6 Th. 2023, dan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut telah menetapkan persyaratan hukum yang jelas dan apakah bertentangan dengan konsep kewarganegaraan dalam UUPA.

Penelitian terkait dari tahun 2023 oleh Baron Fernanda Simarmata meneliti proses penerbitan SHMRS bagi WNA yang berkaitan dengan kepemilikan unit rumah susun di Indonesia, dengan penekanan pada pemberian kepastian hukum dan perlindungan kepada individu tersebut. Ketika 2018, I Wayan Kartika Jaya Utama melakukan penelitian yang berpusat pada fitur hak kepemilikan unit rumah susun di atas properti HGB yang berdiri di atas tanah Hak Milik, sebagaimana dituangkan dalam perjanjian sewa. Penelitian yang dilakukan ketika 2023 oleh Sapto Hermawan dan Dimas P. Setyo Wibowo meneliti ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan kepemilikan unit rumah susun oleh WNA, dengan penekanan khusus pada unit-unit yang terletak di atas tanah milik Negara. Tidak seperti penelitian sebelumnya, yang mengandalkan undang-undang Cipta Kerja yang sudah ketinggalan zaman, penelitian saat ini terutama meneliti bagaimana Undang-Undang 6 Th. 2023 menata kepemilikan unit rusun bagi WNA. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang 11 Th. 2020, yang berkaitan dengan Cipta Kerja. Lebih lanjut, riset ini mengkaji lebih jauh perubahan yang dilakukan terhadap peraturan pertanahan dalam UU No. 6 Th. 2023, khususnya bagian yang menyatakan WNA saat ini bisa mempunyai rumah susun dengan status tanah HGB, bukan hanya yang memiliki Hak Pakai. Tidak diragukan lagi bahwa ini berbeda dari persyaratan UUPA yang menyebutkan bahwa satu-satunya subjek hukum yang diperbolehkan memiliki HGB adalah WNI atau badan hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang mengacu pada standar atau aturan yang berlaku dan bisa ditegakkan secara hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti (Marzuki, 2011, hlm. 103). Data sekunder merupakan data yang dipakai, yaitu data yang berasal dari sumber pustaka melalui identifikasi publikasi yang relevan. Data penelitian sekunder diperoleh dari literatur hukum primer dan sekunder. Metodologi riset ini adalah penelitian hukum deskriptif, yang terkadang disebut penelitian hukum deskriptif. Gaya riset ini mempunyai tujuan guna memberikan pemahaman menyeluruh tentang keadaan hukum yang relevan dengan topik kepemilikan rumah susun bagi WNA di Indonesia melalui penekanan penjelasan (Muhammad, 2004, hlm. 49).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Pemilikan Satuan Rumah Susun Bagi WNA Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

Pada UU No. 6 Th. 2023 bagian keempat Pertanahan Pasal 143 menjelaskan bahwa "HSMRS merupakan hak kepemilikan bersama atas area, barang, dan tanah umum, dipadukan dengan hak kepemilikan individu atas unit hunian terpisah". HSMRS bisa diberikan kepada salah satunya adalah WNA (Pasal 144 UU No. 6 Th. 2023)

Berkaitan dengan pembangunan rumah susun, Pasal 17 Undang-Undang Rumah Susun menata bahwa "Rumah susun bisa dibangun di atas tanah: a) Hak Milik; b) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Negara; dan c) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan"(Santoso, 2017, p. 230). Terkait hak kepemilikan satuan rumah susun oleh WNA, disebutkan dan dipatuhi berbagai ketentuan yang menata hak atas tanah yang bisa dipunyai oleh WNA di Indonesia. Disebutkan juga dan dipatuhi pembatasan jenis rumah susun yang dapat dan tidak bisa dipunyai oleh warga negara asing, serta pembatasan kepemilikan tanah atau rumah tinggal bagi WNA (Janah, 2020, p. 490). Pada UUPA dijelaskan bahwa "Hak Milik hanya bisa dipunyai oleh WNI (Pasal 21 UUPA)"; "Hak Guna Bangunan hanya bisa dipunyai oleh WNI atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia (Pasal 36 UUPA)"; "Hanya badan-badan berikut ini yang memenuhi syarat untuk memiliki Hak Pakai: a) penduduk Indonesia; b) WNA yang berdomisili di Indonesia; c) badan hukum asing yang terdaftar berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan d) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. (Pasal 42 UUPA)"; dan "Hanya pihak-pihak berikut ini yang memenuhi syarat untuk memperoleh hak sewa: a) warga negara Indonesia; b) WNA yang berdomisili di Indonesia; c) badan hukum asing yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia; dan d) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Jadi berlandaskan UUPA yang merupakan hukum agraria nasional, Warga Negra Asing hanya dapat memiliki Hak Pakai dan Hak Sewa.

Peraturan pada UUPA tersebut sejalan dengan UU No. 1 Th. 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut UU Nomor 1 Th. 2011) Pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hanya rumah dengan status hak sewa dan/atau hak pakai saja yang dapat ditempati oleh orang asing, serta PP Nomor 18 Th. 2021 Pasal 49 yang mengatur bahwa orang asing dapat diberikan Hak pakai dengan jangka waktu.

Berkaitan dengan pengaturan pada UUPA, UU No. 1 Th. 2011, dan PP Nomor 18 Th. 2021 yang menata bahwa WNA hanya dapat memiliki Hak Pakai dan Hak Sewa, pada UU No. 6 Th. 2023 bagian keempat Pertanahan Pasal 145 menata bahwa "Rumah susun untuk orang asing bisa dibangun di atas tanah":

a) "HGB atau Hak Pakai di Atas Tanah Negara"; Atau
b) "HGB atau Hak Pakai di Atas Tanah HPL".

Berlandaskan peraturan pada UU No. 6 Th. 2023 tersebut, maka berarti WNA diperkenankan mempunyai rusun baik di atas tanah HGB maupun Hak Pakai tanpa mengubah alas tanah menjadi Hak Pakai. Pada UU No. 6 Th. 2023 tersebut juga tidak memberikan pengaturan pembatasan kepemilikan rumah susun oleh WNA, jadi tidak ada batasan tanpa turut memiliki tanah bersama seperti yang ditata dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) PP No. 18 Th. 2021 yang menyebutkan bahwa "Berdasarkan nilai perbandingan proporsional, hak bersama ditentukan sehubungan dengan obyek bersama, komponen bersama, dan tanah bersama. Tanah bersama di mana unit rusun dibangun tidak secara otomatis menjadi milik orang asing yang diberikan HSMRS. Sebab, dalam hal orang asing memiliki satuan rumah susun, hak atas tanah bersama tersebut tidak diperhitungkan".

Satu-satunya batasan yang dikenakan oleh UU No. 6 Th. 2023 adalah pada kemampuan

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

WNA untuk memperoleh rusun, dan ini terbatas pada kawasan industri, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, dan kawasan ekonomi khusus; sebaliknya, PP No. 18 Th. 2021 menata bahwa WNA tidak serta merta bisa mempunyai hak atas tanah bersama dalam memiliki satuan rumah susun. Jadi pengaturan pada UU No. 6 Th. 2023, hak atas tanah bersama tetap dihitung berlandaskan nilai perbandingan proporsional meskipun satuan rumah susun dibangun di HGB. Artinya, WNA dapat memiliki rumah susun berlandaskan UU No. 6 Th. 2023, terlepas apakah tanah tersebut merupakan Hak Pakai atau HGB, sehingga tidak ada pembatasan bagi WNA untuk memiliki Satuan Rumah Susun. Berlandaskan UUPA, UU No. 1 Th. 2011, dan PP Nomor 18 Th. 2021, sebagaimana disebutkan sebelumnya, oleh karena yang berhak atas tanah hanya penduduk Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, maka WNA hanya diperbolehkan memiliki Hak Pakai dan tidak diperbolehkan memiliki HGB. Peraturan UU No. 6 Th. 2023 bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Pengaturan Mengenai Pemilikan Satuan Rumah Susun Bagi WNA dalam UU No. 6 Th. 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Th. 2022 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Kepastian Hukum dan Asas Nasionalitas UUPA

Pentingnya tanah sebagai komponen permukaan bumi dan implikasinya secara ekonomi, budaya, sosial, hukum, dan politik, maka tanah merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Setiap orang yang memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dapat memiliki satuan rumah susun (sarusun) secara di bawah tangan. Pada dasarnya, begitulah aturannya. Peristiwa hukum, hibah, jual beli, dan bentuk pengalihan perdata (levering) lainnya menyediakan dasar bagi pengalihan atau pemindahan hak dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya. Pengalihan inilah yang pada akhirnya mengarah pada kepemilikan ini. Istilah "sarusun" yang mengacu pada kepemilikan individu bisa dipahami sebagai bagian dari rumah susun yang fungsi utamanya adalah untuk dipakai secara terpisah (individual) sebagai tempat tinggal dengan jalan umum yang menghubungkannya, sehingga pemiliknya dapat menggunakannya kapan saja mereka mau tanpa melanggar hak orang lain (Hartanto, 2013, p. 11).

Berbagai jenis penguasaan tanah yang bisa dipakai untuk membangun rumah susun telah dibahas: Hak Milik, HGB atau Hak Pakai atas tanah Negara, HGB atau Hak Pakai atas HPL. Secara teori, kepemilikan rumah susun tunduk pada aturan yang berbeda dari bentuk properti hunian lainnya. Hak kepemilikan seseorang atas rumah susun dibatasi pada area spesifiknya. Asas horizontal tidak sepenuhnya terpenuhi oleh pemilikan hak atas tanah atas sarusun karena tidak seperti kepemilikan individu dalam UUPA, semua pemilik satuan bangunan rumah susun memiliki tanah secara kolektif.

UUPA menata melalui Pasal 9 bahwa "Hanya WNI yang diperbolehkan terdapat hubungan yang utuh dengan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia". Akibatnya, dalam hal kepemilikan rumah susun, orang asing yang berdomisili di Indonesia benar-benar ditata oleh hukum pertanahan nasional Indonesia. Hanya warga negara asing dan badan hukum asing yang bertempat tinggal tetap di Indonesia yang diizinkan memperoleh dan memiliki satuan rumah susun berstatus Hak Pakai, sesuai dengan Pasal 9 UUPA (Pasal 42 UUPA) (Saraswati & et. al, 2023, p. 387).

Dalam hukum pertanahan, asas Nasionalitas menata siapa yang berhak mempunyai dan menguasai tanah dan sumber daya alam dalam suatu yurisdiksi menurut standar kewarganegaraan. Dengan kata lain, asas ini menunjukkan bahwa sumber daya alam dan wilayah suatu negara dipunyai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh orang-orang berlandaskan kewarganegaraan mereka. Asas ini membatasi kepemilikan asing atas aset agrarian dan

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

memberikan warga negara keutamaan atas kepemilikan hak atas tanah. Melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional suatu negara ketika mengelola sumber daya alam yang signifikan adalah tujuan utama dari asas Nasionalitas. Seperangkat undang-undang tersebut membatasi tanah yang bisa dipunyai oleh orang asing, memberikan WNI prioritas atas warga negara lain dalam hal kepemilikan tanah.

Penguasaan hak milik oleh WNI didahulukan oleh Asas Kebangsaan, yang juga membatasi kemampuan WNA untuk memiliki hak milik dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan negara. Asas ini juga melindungi hak masyarakat setempat atas tanah dan sumber daya alam. Dengan demikian, untuk menegakkan Asas Kebangsaan dalam hukum agraria Indonesia, orang asing dibatasi kemampuannya untuk menjalankan hak atas tanah dan tidak boleh memiliki hak utama untuk memiliki hak milik, yaitu hak milik. Dalam hal aturan dan asas yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan tanah oleh warga negara Indonesia, Asas Kebangsaan lebih diutamakan. Pengaturan umum Asas Nasionalitas yaitu Pasal 9 ayat (1) UUPA dan pasal-pasal lainnya yang menata mengenai kepemilikan hak atas tanah seperti Hak Milik (Pasal 21 ayat (1) UUPA), HGU (Pasal 30 ayat (1) UUPA), serta HGB (Pasal 36 ayat (1) UUPA). Berlandaskan hal tersebut maka orang asing diberikan batasan kepemilikan yaitu hanya berupa hak sementara yang memiliki jangka waktu, seperti hak sewa, hak pakai, serta HSMRS (HMSRS) dengan ketentuan-ketentuan tertentu (Prithresia, 2020, p. 7309).

UUPA menata bahwa “HGB hanya tersedia bagi mereka yang merupakan WNI. Hal ini dikarenakan HGB merupakan hak atas tanah yang bersifat kebendaan, seperti halnya hak milik, dan dapat diberikan kepada pihak lain melalui hibah, penjualan, tukar-menukar, penyertaan modal, dan pewarisan (Pasal 34 UUPA)”. Selain itu, WNA kini dapat mempunyai sarusun yang dibangun di atas tanah dengan status Hak Pakai dan HGB berlandaskan UU No. 6 Th. 2023, sehingga tidak perlu lagi mengubah status HGB menjadi Hak Pakai. Artinya, WNA yang memiliki sarusun juga memiliki hak atas hak pakai atas bangunan dan hak atas tanah bersama lainnya. Padahal, tujuan UUPA adalah untuk memastikan bahwa hanya WNA yang diberikan Hak Pakai; lagi pula, pengalihan hak tersebut hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku, yang dalam hal ini memerlukan persetujuan pemilik tanah (Pasal 43 ayat (2) UUPA).

Hal tersebut mengakibatkan adanya asimetri antara kedua undang-undang dan aturan yang menata kepemilikan rumah susun yaitu antara UUPA dengan UU No. 6 Th. 2023. Gagasan kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sidharta Arief, yang berpendapat bahwa ketertiban sosial bisa dibangun melalui asas kebenaran, relevan dengan persoalan kepastian hukum dalam kasus ini, kejelasan hukum diperlukan untuk mewujudkan ketertiban sosial (Shidarta, 2020, p. 461). Untuk memperkuat argumen Sidharta Arief, dipakai teori Nurhasan Ismail yang menyebutkan bahwa ketentuan harus dibuat dalam struktur internal norma hukum itu sendiri untuk mencapai kepastian hukum. Menurut teori Radbruch, kepastian hukum merupakan produk hukum itu sendiri, dan terbitnya suatu produk perundang-undangan menunjukkan adanya kepastian hukum di dalamnya (Astuti & Daud, 2023, p. 219).

Pada hakikatnya, pemenuhan keadilan oleh suatu peraturan saja tidak cukup karena kejelasan hukum tetap diperlukan. Suatu peraturan hanya bisa dianggap pasti secara hukum apabila dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan munculnya makna ganda atau ambiguitas dan tidak memunculkan penafsiran yang berbeda-beda serta dengan peraturan lain pun juga tidak tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal. Subekti menegaskan bahwa hukum memenuhi tujuan dasar negara untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

warga negara (Lijaya, 2019, p. 49). Akan tetapi, terdapat kontradiksi norma antara UUPA dengan UU No. 6 Th. 2023, sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 42 UUPA menyebutkan WNA hanya dapat memiliki Hak Pakai, sedangkan UU No. 6 Th. 2023 menyebutkan bahwa WNA juga dapat mempunyai rusun dengan status HGB atau Hak Pakai. Hal ini membuka peluang baru bagi WNA dalam kepemilikan rumah di Indonesia, seperti kemungkinan membangun di atas tanah Hak Pakai maupun bukan Hak Pakai. Padahal, UUPA menata bahwa "HGB hanya bisa dipunyai oleh WNI atau badan hukum yang berdomisili dan berasal dari Indonesia sebagaimana didefinisikan oleh hukum Indonesia (Pasal 36 UUPA)".

Karena adanya tumpang tindih antara UUPA dan UU No. 6 Th. 2023, terlihat bahwa belum diperolehnya kejelasan hukum terkait pengaturan kepemilikan Rusun oleh WNA. Karena status UUPA sebagai payung hukum, norma hukum yang terkandung di dalamnya dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan norma hukum yang ada dalam undang-undang lainnya, bahkan yang menata tentang pertanian. Menurut Muskur dan Susilo (2023, hlm. 53), kasus ini merupakan contoh asas *lex* superior *derogate legi inferior* yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lebih diutamakan daripada perundang-undangan yang lebih rendah. Meskipun WNA dapat memiliki Rusun yang dibangun di atas Hak Guna Bangunan menurut UU No. 6 Th. 2023, penulis berpendapat bahwa undang-undang juga harus menata pembatasan agar kepemilikan orang asing atas satuan Rusun tidak serta merta diperhitungkan dengan hak atas tanah bersama, sebagaimana termaktub melalui Pasal 67 PP Nomor 18 Th. 2021, dengan mempertimbangkan asas kebangsaan yang terkandung dalam UUPA. Pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi hak atas tanah masyarakat Indonesia dengan memberikan kejelasan hukum, keadilan, dan keuntungan bagi mereka.

Menurut Karanina dan Setyono (2021, hlm. 221), WNA secara hukum tidak memiliki tanah bersama yang di atasnya Rusun tersebut dibangun. Sebab, secara teori, seseorang hanya dapat memiliki atau menguasai HSMRS Tanah Bersama yang dimanfaatkan untuk bangunan Rusun itu sendiri apabila memenuhi syarat sebagai subjek yang dapat memiliki Hak Milik, HGB, atau Hak Pakai atas Tanah menurut hukum UUPA. Peraturan tersebut bertujuan untuk membentuk norma hukum yang sejalan dengan asas UUPA, yang menyebutkan bahwa WNA tidak terdapat hak apa pun atas tanah bersama ketika memiliki satuan Rusun di atas tanah Hak Guna Bangunan. Pemisahan kepemilikan ini didasarkan pada konsep pemisahan horizontal. Hak-hak WNI harus dilindungi, dan pembatasan ini harus diberlakukan agar WNA dapat memperoleh satuan Rusun dengan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Pasal 144 dan 145 UU No. 6 Th. 2023 menata tentang aturan kepemilikan satuan Rusun oleh WNA. Undang-Undang ini memperluas kewenangan WNA, yaitu bisa mempunyai satuan Rusun baik di atas Hak Pakai maupun Hak Guna Bangunan, dan tidak ada pembatasan kepemilikan satuan Rusun oleh WNA terkait dengan hak atas tanah secara kolektif, artinya hak atas tanah secara kolektif tetap ditentukan oleh nilai perbandingan proporsional meskipun WNA memiliki satuan Rusun yang dibangun di atas HGB. Berbeda dengan UUPA yang mengatur bahwa hanya WNI yang bisa mempunyai HGB, dan WNA hanya bisa memiliki Hak Pakai.

Karena UUPA dan UU No. 6 Th. 2023 saling tumpang tindih, maka pengaturan mengenai kepemilikan satuan Rusun bagi WNA belum memberikan kejelasan hukum. Pasal 9 UUPA menyebutkan bahwa yang boleh memiliki keterkaitan secara utuh dengan tanah hanya WNI, sedangkan Rumah susun yang dibangun di atas HGB bisa dipunyai oleh WNA menurut UU No.

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

6 Th. 2023. Dengan memperhatikan asas kebangsaan dalam UUPA, seharusnya dalam undang-undang tersebut juga ditata bahwa orang asing tidak dapat serta merta memiliki tanah bersama apabila memiliki satuan Rusun dengan hak atas tanah bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pembimbing membantu penulis dalam penulisan artikel ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih..

REFERENSI

Astuti, B., & Daud, M. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review Volume 6 Nomor 2*.

Hartanto, J. A. (2013). Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. *Jurnal Rechtens Volume 2 Nomor 1*.

Janah, S. N. (2020). Status Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing di Indonesia. *Jurnal Selat Volume 3 Nomor 2*.

Karenina, L., & Setyono, Y. (2021). Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris" Volume 5 Nomor 2*.

Lijaya, M. P. (2019). Karakteristik Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing yang Berkedudukan di Indonesia. *Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Volume 1 Nomor 1*.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. *Yuridika Volume 16 Nomor 2*.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muskur, L. O., & Susilo, L. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Nasionalitas dalam Jual Beli Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio Volume 4 Nomor 1*.

Prithresia, B. (2020). Kajian Perbandingan Asas Nasionalitas Hukum Agraria dalam Konteks Internasional. *UNES Law Review Volume 6 Nomor 2*.

Santoso, U. (2017). *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Saraswati, A. N., & et. al. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Terhadap Peroleh Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Volume 11 Nomor 2*.

Shidarta. (2020). Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembanan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2*.

Wardhani, D. K. (2020). Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Volume 6 Nomor 2*, 441.

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

Pengaruh Perpustakaan Digital Terhadap Tingkat Minat Baca Masyarakat di Era Digitalisasi

Eqbal Alfanda[1], Fransiska Timoria Samosir[2]
[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
[2] Dosen Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
e-mail: eqbalalfanda@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang: *Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah menjadi motor penggerak utama dalam membentuk peradaban manusia dalam era yang didominasi oleh inovasi dan kemajuan teknologi. Studi menunjukkan bahwa minat membaca di Indonesia rendah karena banyak orang di Indonesia lebih tertarik menghabiskan waktu dengan menonton TV atau mengoperasikan perangkat elektronik daripada membaca buku. Perpustakaan digital atau digital library telah muncul sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung literasi modern di era di mana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sudah memperbaharui gaya kita dalam mengakses, menyimpan, dan berbagi informasi. Kemampuan literasi modern sangat penting untuk keterampilan abad ini.* ***Tujuan:*** *Tujuan dilakuaknnya penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh perpustakaan digital terhadapa tingkat baca masyarakat pada era digitalisasi.* ***Metode:*** *Penelitian ini menggunakan metode Systemic Literatur Review (SLR). Data yang diperoleh dalam penelitian bersumber dari situs dengan membatasi jumlah sebanyak 200 artikel dari tahun 2019 sampai 2024.* ***Hasil:*** *Hasil didapatkan 34 artikel yang memenuhi kriteria penelitian. Kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi terpilih 4 artikel. Dari 4 artikel tersebut akan dilakukan QA dengan 3 kriteria kemudian dilanjutkan proses review.* ***Kesimpulan:*** *Dari 4 artikel tang telah dipilih dan dianalisis dapat disimpulakan bahwa perpustakaan digital memilik dampak positif pada minat membaca dan keterampilan literasi.*

Kata kunci *: Perpustakaan Digital, Minat Baca, Era Digitalisasi, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah menjadi motor penggerak utama dalam membentuk peradaban manusia dalam era yang didominasi oleh inovasi dan kemajuan teknologi. Mulai dari revolusi industri hingga era digital saat ini, IPTEK terus menghasilkan perubahan yang mendalam dalam tatanan hidup, bekerja, dan berinteraksi terhadap orang lain dan lingkungan. Revolusi Industri 4.0 mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk pemerintah, pendidikan, industri, dan bisnis (Prasetyo 2019). Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK, kemudahan tekonologi menjadikan segala sesuatu lebih efisien dan cepat (Nur Alifah et al. 2023). Dengan perkembangan teknologi, media informasi juga berkembang. Sebelumnya hanya terdiri dari kertas, sekarang dapat diakses dengan perangkat elektronik elektronik diantaranya computer, laptop, ponsel dan lain sebagainya. Supaya seseorang atau kelompok tidak ketinggalan informasi, kemudahan mendapatkan media harus digunakan dengan bijak (Akbar, Saleh and Nahdiana 2023)

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

Digitalisasi memiliki dua sisi. Di satu sisi, itu dapat bermanfaat bagi masyarakat, seperti membuat mereka lebih mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Di sisi lain, digitalisasi juga dapat memiliki efek negatif, seperti mendorong banyak orang untuk meninggalkan buku dan beralih ke perangkat elektronik seperti *gadget*. Disrupsi digital ini menyebabkan kebiasaan membaca berkurang. Studi menunjukkan bahwa minat membaca di Indonesia rendah karena banyak orang di Indonesia lebih tertarik menonton TV atau mengoperasikan perangkat elektronik daripada membaca buku untuk menghabiskan waktunya (Andita 2022). Data dari UNESCO tahun 2017, masyarakat Indonesia minat bacanya sangat rendah yaitu hanya 0,001%, yang artinya hanya satu orang dari 1.000 masyarakat Indonesia terbilang rajin membaca (Qulloh 2021). Dan menurut survei *Program for International Student Assessment* (PISA) yang dikeluarkan pada 2019 oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), Indonesia berada di urutan 62 dari 70 negara. Hal ini menjadikan Negara Indonesia diposisi 10 terbawah dari beberapa negara dengan tingkat literasi yang rendah (Andita 2022).

Perpustakaan digital atau *digital library* telah muncul sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung literasi modern di era di mana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sudah memperbaharui gaya kita dalam mengakses, menyimpan, dan berbagi informasi. Perpustakaan digital mencakup koleksi digital, termasuk buku dan jurnal yang disimpan dalam bentuk elektronik (Zailani, Hamdani, and Rusydiyah 2022). Perpustakaan telah lama dianggap sebagai pusat pendidikan karena peranannya yang penting dalam membentuk pengetahuan dan intelektualitas masyarakat (Sukri and Wahyuni 2024). Perpustakaan digital selain memberikan kemudahan akses diberbagai sumber daya dan informasi, akan tetapi memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat secara keseluruhan. Menurut (Prasetyo 2019) dalam proses peningkatan layanan perpustakaan digital, desain informasi harus dipersiapkan dan direncanakan untuk mengatasi terjadinya disrupsi digital. Pengalaman penggunaka perpustakaan, koleksi yang ditunjang dengan data, dan ide-ide kolaboratif merupakan tiga konsep dalam meningkatakan perpustakaan di era digitalisasi saat ini.

Kemampuan literasi modern sangat penting untuk keterampilan abad ini. Di abad ini, semua orang harus memiliki kemampuan literasi, baik lama maupun baru. Literasi lama mencakup kemampuan calistung (baca-tulis-hitung), sedangkan literasi modern mencakup kemampuan untuk memahami data, teknologi, dan manusia (Kamariah, Arifin, and Jamilah 2023). Hasil penelitian kuantitatif dari Zailani, Hamdani, and Rusydiyah (2022) dengan uji regresi linear sederhana diperoleh nilai signifikan, jadi kesimpulannyapenggunaan *digital library* memiliki pengaruh terahadap minat baca mahasiawa. Jika digital library memiliki fasilitas yang baik, siswa akan tertarik untuk menggunakannya. Mereka akan merasa nyaman menelusuri beberapa buku referensi, menyelesaikan tugas, dan belajar, serta membaca. Sehingga, fasilitas ini dapat menarik siswa sering datang di perpustakaan digital untuk memeroleh informasi yang dibutuhkan. Untuk itu Tujuan dilakuaknnya penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh perpustakaan digital terhadapa tingkat baca masyarakat pada era digitalisasi.

METODE

Metode dalam penelitian ini Systemic Literatur Review (SLR). Penggunaan Metode SLR sebagai identifikasi, meninjau, mengevaluasi serta menafsirkan semua penelitian yang tersedia pada bidang topik fenomena yang diminati dan pertanyaan penelitian khusus yang signifikan (Triandini et al. 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh atau bersumber dari

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

situs *google scholar* melalui aplikasi atau *software Publish or Perish* (PoP) untuk menemukan jurnal yang dibutuhkan. Kata kunci yang digunakan dalam *search process* atau proses pencarian adalah"Perpustakaan Digital, Minat Baca, Era Digitalisasi, Masyarakat" dengan membatasi jumlah sebanyak 200 artikel dari tahun 2019-2024.

Setelah itu melakukan peninjauan dengan cara membaca judul dan abstrak untuk memilih artikel jurnal yang sesuai dengan tema. Kemudia dilakukan klasisfikasi sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Didapatkan 4 artikel yang dipilih sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi yang dipublikasikan dalam Bahasa bahasa Indonesia.
2. Studi yang membahas pengaruh perpustakaan digital terhadap minat baca.
3. Studi yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir
4. Studi yang dengan jenis kuantitatif.
5. Artikel yang tersedia dalam teks penuh, tidak hanya abstrak saja
6. Artikel yang sudah melalui proses peer-review.

Langkah selanjurnya dilakukann penilaian kualitas (*Quality Assessment :* QA). Dalam penilaian kualitas (QA) terdiri dari 3 kriteria.

Tabel 1. Penilaian Kualitas (*Quality Assessment* : QA)

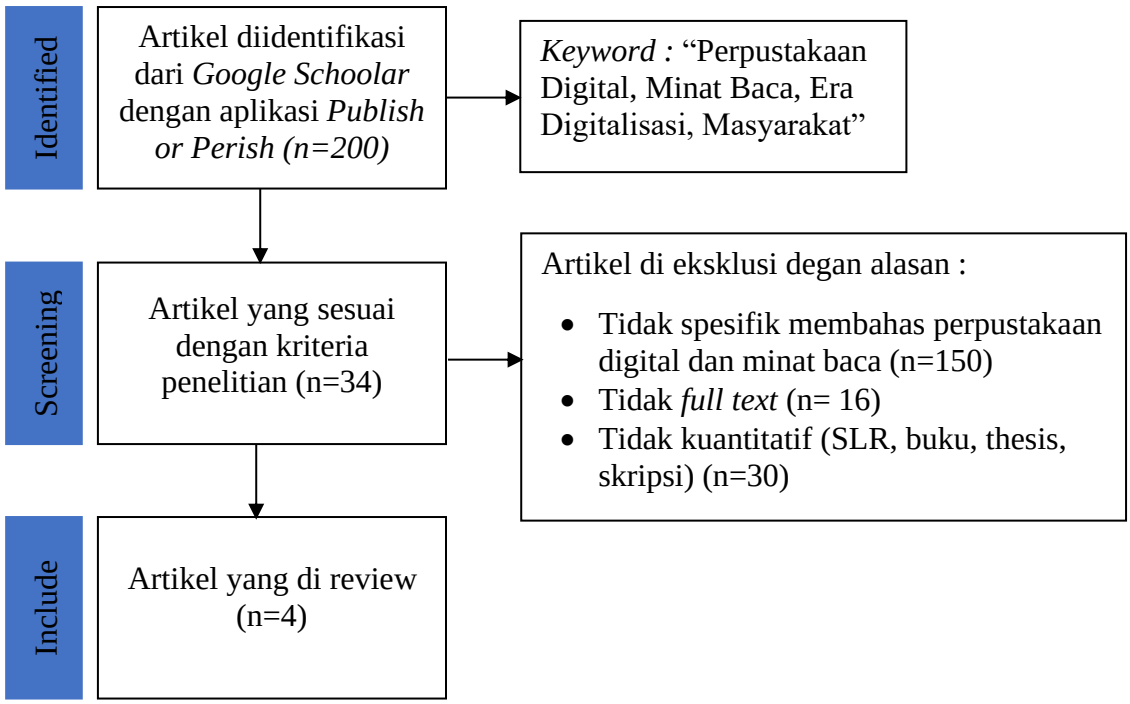
QA1	Apakah artikel diterbitkan pada jurnal degan rentang waktu 2019-2024?
QA2	Apakah artikel membahas pengaruh digital terhadap minat baca?
QA3	Apakah artikel mendeskripsikan penggunaan perpustakaan digital dalam meningkatkan minat baca?

Dengan demikian, didapatkan sebanyak 34 artikel dengan karakteristik sesuai target penelitian. Setelah itu klasifikasi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi didapatkan 4 artikel. Dari 4 artikel tersebut akan dilakukan QA dengan 3 kriteria kemudian dilanjutkan proses review.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pencarian literatur yang bersumber dari situs *google scholar* melalui aplikasi atau *software Publish or Perish* (PoP) dengan batasan jumlah artikel sebanyak 200 yaitu dari tahun 2019-2024 didapatkan 34 artikel yang memenuhi kriteria penelitian. Kemudian disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi terpilih 4 artikel. Dari 4 artikel tersebut akan dilakukan QA dengan 3 kriteria kemudian dilanjutkan proses review. Tahapan dari proses pencarian literatur tersebut sebagai berikut :

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.



Gambar 1. Tahapan Pencarian Literatur

Tabel 2. Hasil Pencarian Artikel

Penulis, Tahun	Judul Artikel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
(Zailani, Hamdani, and Rusydiyah 2022)	Pengaruh Digital Library Terhadap Minat Baca Mahasiswa	Penelitian ini termasuk jenis penelitian kolerasi, dimana pendekatan kuantitatif sebagai dasarnya. Populasi penelitian melibatkan 13 mahasiswa magister Pendidikan agama islam kelas B angatan 2021. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini merujuk pada non-probability sampling yang menggunakan teknik simple jenuh disitu keseluruhan anggota populasi menjadi sampelnya. Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data angket.	Berdasarkan hasil paparan penelitian ini terlebih dahulu telah dilakukan uji regresi linear sederhana, yang diperoleh dari nilai signifikansi tabel *coefficient* sebesar 0,000 < 0,05, artinya perpustakaan digital (X) memberikan dampak kembang minat baca siswa (Y). Terlihat T hitung mencapai 3,038 > T tabel 2,20099. Dari itu bisa disimpulkan bawasanya pemanfaatan perpustakaan digital berdampak pula terhadap minat baca mahasiswa (Ha). Alhasil mahasiswa lebih termotifasi dalam membaca ketika menggunakan *digital library*.

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

(Ratnawita, Masyhudi, and ... 2023)	Pemanfaatan Aplikasi iSumbar Mambaco Untuk Meningkatkan Literasi Digital Bagi Mahasiswa Uin Imam Bonjol Pada Masa Pandemi Covid-19	Metode penelitian ini didasari oleh *mixed methods* (metode kombinasi) dengan model penelitian *concurrent*. Adapun angket, wawancara dan dokumentasi sebagai dasar teknik pengumpulan datanya. Data angket dari penelitian menjadi rujukan data kuantitatif yang selanjudnya dianalisis secara deskriptif persentase	Hasil angket penelitian ini membuktikan presentase tertinggi adalah pernyataan butir angket no 4, yang berisi "Aplikasi iSumbar Mambaco memungkinkan saya untuk belajar kapan saja dan dimana pun saya berada" dengan skor 527 atau 82,34%, sedangkan persentase terendah mengarah pada pernyataan butir angket nomor 11 yang berisi "Saya mampu menyelesaikan tugas akhir dengan menggunakan aplikasi iSumbar Mambaco" dengan skor 483 atau 75,46%.
(Saleh and Nahdiana 2023)	Asosiasi Surat Kabar Digital Terhadap Minat Membaca Koran Masyarakat di Kota Makassar	Penelitian dengan metode kuantitatif Linear Regresi Sederhana, pengujian hipotesis yang dilakuakan bertujuan memperkuat teori yang dijadikan rujukan. Peneliti dilakukan dengan membagiakan kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan terstruktur. Populasi ini mengarah kepada masyarakat di kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dengan jumlah 13.135 jiwa, laki-laki 6.499 jiwa dan perempuan 6.636 jiwa.	Hasil dari penelitian menunjukkan bawasannya responden membaca Surat Kabar signifikan disebabkan hubungannya dengan asosiasi dalam memanfaatkan Surat Kabar Digital. Minat membaca masyarakat dimasosiasi melalui Surat Kabar Digital yaitu 0,185 atau 18,5% berdasarkan nilai Adjusted R Square selebihnya 81,5% diasosiasikan melalui faktor lainnya. Nilai signifikan menghasikan (Sig.) 0,000 adapaun nilai probabilitas yaitu 0,05, alhasil sig yaitu 0,000<0,05. Sehingga Surat Kabar Digital (X) Minat Membaca (Y) dinilai signifikan.
(Fitri, Supriyatno, and Yaqin 2022)	Pengaruh Penerapan Literasi Berbasis Web terhadap Peningkatan Minat Baca Peserta Didik Kelas V	Penelitian dengan melihat data dari penelitian lapangan tentang bagaimana penerapan serta dampak literasi berbasis web pada perkembangan minat baca siswa kelas V. Penelitian menerapkan teknik angket dan dokumentasi melalui pengolahan data analisis deskriptif statistik serta statistik	Penelitian didasarkan pada observasi yang dilakukan peneliti selama proses penelitian serta angket yang dibagikan kepada siswa. Nilai Thitung 28.867 > Ttabel 2,032 dengan nilai sig 0,000 kurang dari 0,05. Alkasil, literasi berbasis web dapat berperan secara efektif dalam proses

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

	inferensial yang mengkaji keberhasilan sebelum dan sesudah tindak uji normalitas, homogenitas dan hiposesis dalam menumbuhkan minat membaca yang mengacu pada program SPSS for Windows versi 16.	belajar mengajar dalam rangka menumbuhkan minat membaca siswa kelas V.

Artikel-artikel yang jadikan landasan dalam penelitian ini telah melalui penilaian kualitas (*Quality Assessment:* QA) dengan 3 kriteria untuk mengetahui kelayakan artikel untuk diterima dan digunakan dalam penelitian ini.

Dari empat artikel terpilih, berikut hasil penilaian kualitas penilaian kualitas (QA) terdiri dari 3 kriteria:

Tabel 3. Penilaian Kualitas (Quality Assessment: QA)

Penulis, Tahun	QA1	QA2	QA3	Hasil
(Zailani, Hamdani, and Rusydiyah 2022)	✓	✓	✓	Diterima
(Ratnawita, Masyhudi, and ... 2023)	✓	✓	✓	Diterima
(Saleh and Nahdiana 2023)	✓	✓	✓	Diterima
(Fitri, Supriyatno, and Yaqin 2022)	✓	✓	✓	Diterima

Pada Tabel 3. Menunjukkan bahwa 4 artikel yang akan dilakukan proses review dapat diterima. Dari ke-empat jurnal yang telah dilakukan analisis menunjukkan penggunaan *digital library* atau perpustakaan digital memiliki pengaruh terhadap peningkatan minat baca. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa perpustakaan digital memiliki berbagai macam variasi, seperti bebasis web, aplikasi, dan bisa juga media lain seperti koran digital. Yang mana itu semua dapat manambahkan keterampilan literasi. Semakin berkembangnya zaman, pengertian literasipun juga dapat berubah. Literasi lama mencakup kemampuan calistung (baca-tulis-hitung), sedangkan literasi modern mencakup kemampuan untuk memahami data, teknologi, dan manusia (Kamariah, Arifin, and Jamilah 2023).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zailani, Hamdani, and Rusydiyah (2022) memberikan bukti bahwa *digital library* memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan minat baca mahasiswa. Dalam pengumpulan data penelitiannya menggunakan angket dengan pilihan 4 jawaban yaitu: 1) Sangat Puas (SP)= skor 4, 2) Puas (P)= skor 3, 3) Kurang Puas (KP) = skor 2, 4) Tidak Puas (TP)= skor 1. Analisis statistik untuk penelitian memakai uji kolmogorov-smirnov untuk uji normalitas data kemudian untuk mengetahui apakah kedua variabel memiliki hubungan linear menggunakan teknik one way anova. Untuk itu sangat penting perpustakaan konvensional untuk mengembangkan fasilitas dengan digitalisasi. Sebagai hasil dari penelitian, persamaan regresi linier berganda adalah Y = 24,573 + 0,234 + 0,352. Hal ini menunjukkan

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

bahwa layanan dan fasilitas perpustakaan memiliki dampak positif dengan minat baca siswa SMA Negeri 4 Panddeglang (Delis et al. 2021).

Dalam penelitian Ratnawita. et al. (2023) menyebutkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat merancang aplikasi iSumbar Membaco dalam rangka meningkatkan literasi dan jangkauan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi iSumbar Mambaco dapat membantu mahasiswa UIN IB yang sedang menyusun skripsi selama pandemi Covid-19 meningkatkan kemampuan literasi mereka, dengan pernyataan angket 4 yang menerima skor tertinggi, 527, dan persentase 82,34%. Mahasiswa dapat memanfaatkan iSummbar Mambaco tanpa batasan tempat dan waktu. Saat ini, sangat penting untuk melakukan inovasi dalam manajemen layanan perpustakaan. Hal itu sejalan dengan sebuah penelitian dari Nurrochma (2022) yang sama-sama memanfaatkan perpustkaan digital daerah yaitu tentang "Manajemen Strategis iMadiun dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Madiun di Perpustakaan Kota Madiun" dilakukan dengan empat strategi analisis SWOT. Hasilnya menunjukkan bahwa iMadiun berperan aktif dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.

Hasil penelitian dari (Saleh and Nahdiana 2023) menunjukkan bahwa orang-orang yang membaca surat kabar memiliki hubungan yang signifikan dengan mengakses surat kabar digital. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,185, atau 18,5%, dari hubungan ini dengan surat kabar digital, dan faktor lain menyumbang 81,5% dari total. Nilai signifikan (Sig.) yang dihasilkan adalah 0,000 karena nilai probabilitas atau angka kemungkinan adalah 0,05. Oleh karena itu, nilai signifikan (Sig.) 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Surat Kabar Digital (X) dan Minat Membaca (Y) memiliki hubungan yang signifikan. Hal itu menunjukkan bahwa digitalisasi sangat penting saat ini untu meningkatkan minat baca maupun pemahaman literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk memanfaatkan kemampuan kognitif dan teknis melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menemukan, mengevaluasi, membuat, serta mengkomunikasikan informasi (Dwi et al. 2020).

Penelitian dari Fitri, Supriyatno, and Yaqin (2022) ini dilakukan dengan cara melihat data dari penelitian di lapangan tentang bagaimana pengaplikasian literasi berbasis web berdampak pada peningkatan minat baca siswa kelas V. Hasil penelitian didapatkan Nilai Thitung 28.867 > Ttabel 2,032 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dengan kata lain, literasi berbasis web dapat digunakan secara efektif sebagai bagian dari proses pembelajaran guna merangsang minat baca siswa kelas V. Menurut penelitaian Dwi et al. (2020) kemampuan mahasiswa ilmu perpustakaan angkatan 2016 dalam menggunakan sumber daya digital menunjukkan grand mean 3,95, berada di rentang 3,4–4,2, menunjukkan bahwa kemampuan mereka sangat baik. Namun, salah satu indikator yang perlu ditingkatkan adalah skill metode penelusuran informasi *Boolean "And,Or,Not"*, yang mendapatk grand mean 2,59 dan termasuk dalam kategori rendah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan perpustakaan digital baik itu *e-resources* ataupun dalam bentuk web perlu ditingkatkan dalam mendukung proses belajar serta dapat meningkatkan minat baca, sehingga pustakawan perlu meningkatkan dan mengembangkan manajemen perpustakaan berbasis digital.

KESIMPULAN

Dari 4 artikel tang telah dipilih dan dianalisis dapat disimpulakan bahwa perpustakaan digital memilik dampak positif pada minat membaca dan keterampilan literasi. Temuan ini mendukung kebutuhan perpustakaan konvensional untuk mengembangkan fasilitas dan layanan

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

digital untuk meningkatkan akses ke informasi dan mempromosikan kebiasaan membaca. Penggunaan aplikasi digital dan program literasi berbasis web telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan literasi dan meningkatkan minat membaca di antara siswa. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya digitalisasi dalam manajemen perpustakaan dan kebutuhan untuk inovasi berkelanjutan dalam layanan perpustaka untuk memenuhi tantangan era digital.

REFERENSI

Andita, Shafa ShafinaPutri. 2022. "Manfaat Perpustakaan Digital DalamMeningkatkan Minat Baca Generasi Milenial Di Era Globalisasi." *LIBRIA* 14(2): 121–42.

Delis, Iis, Anis Zohriah, Nana Suryapermana,) Uin, and Maulana Hasanuddin Banten. 2021. "Pengaruh Pelayanan Dan Fasilitas Perpustakaan Terhadap Minat Membaca Siswa." *AKADEMIKA* 3(2).

Dwi, Ade, Nurrizqi Uin, Raden Fatah Palembang, and Rhoni Rodin. 2020. "Tingkat Literasi Digital Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Dalam Pemanfaatan E-Resources UIN Raden Fatah Palembang." *Pustakaloka:Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* 12(1). https://apjii.or.id/downfile/file/PROFILPENGGUNAINTERNETINDONESIA2014.pdf.

Fitri, Fitri, Triyo Supriyatno, and Mohamad Zubad Nurul Yaqin. 2022. "Pengaruh Penerapan Literasi Berbasis Web Terhadap Peningkatan Minat Baca Peserta Didik Kelas V." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8(3): 1173. doi:10.32884/ideas.v8i3.828.

Kamariah, Johan Arifin, and Jamilah. 2023. "Implementasi Konsep Literasi Modern Dan Keterampilan Abad 21 Dalam Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Di Sekolah." *Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Seni, dan Pendidikan Dasar 3*: 72–79.

Nur Alifah, Hasna, Umi Virgianti, Muhammad Imam Zamah Sarin, Dicky Amirul Hasan, Fina Fakhriyah, Erik Aditia Ismaya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, et al. 2023. "Systematic Literature Review: Pengaruh Media Pembelajaran Digital Pada Pembelajaran Tematik Terhadap Hasil Belajar Siswa SD." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1(3): 103–15.

Nurrochma, Alif Widya. 2022. "Manajemen Strategis IMadiun Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kota Madiun Di Perpustakaan Kota Madiun." *Publika* 9(5): 87–100.

Prasetyo, Arienda Addis. 2019. "Dampak Era Digital Terhadap Perpustakaan Sebagai Upaya Menarik Generasi Milenial." *Tibanndaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 3(2): 1. doi:10.30742/tb.v3i2.761.

Qulloh, Fadila Ita. 2021. "Pengembangan Literasi Dalam Peningkatan Minat Baca Santri Pada Perpustakaan Mini Pesantren Pelajar Al-Fath Rejomulyo Kediri." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 1(2): 271–78.

Ratnawita, R, Fauza. Masyhudi, and ... 2023. "PEMANFAATAN APLIKASI ISUMBAR MAMBACO UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL BAGI MAHASISWA UIN IMAM BONJOL PADA MASA PANDEMI …." *Ensiklopedia of …* 5(2). http://jurnal.ensiklopediaku.org.

Saleh, Akbar., and Nahdiana. 2023. "Asosiasi Surat Kabar Digital Terhadap Minat Membaca Koran Masyarakat Di Kota Makassar." *Journal of Communication Sciences* 6(1): 38–51.

Sukri, Makmur, and Sri Wahyuni. 2024. "Perpustakaan Sebagai Jantung Pendidikan." *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 4(1): 319–34.

Triandini, Evi, Sadu Jayanatha, Arie Indrawan, Ganda Werla Putra, and Bayu Iswara. 2019. "Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia." *Indonesian Journal of Information Systems* 1(2): 63. doi:10.24002/ijis.v1i2.1916.

Zailani, Kholili, Muhammad Husni Hamdani, and Evi Fatimatur Rusydiyah. 2022. "Pengaruh Digital Library Terhadap Minat Baca Mahasiswa." *Akademika* 11(02): 389–400. doi:10.34005/akademika.v11i02.2267.

Hak Cipta © 2024, Endang Lestari, I Gusti Ayiu Ketut RH, Rachma Indriyani.

Peran Perempuan dalam Kepemimpinan di Ruang Redaksi Media Lokal (Studi Pada Radio Kalimaya Bhaskara FM Malang)

Furqonita[1], Agung Dwi Wicaksono[1], Nurul Fatihah[1], Vionita Rondonuwu[1], Devi Arianti[1], Irwansyah[2]

[1] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran No. 10-11 Malang, Jawa Timur

[2] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Depok, Jawa Barat

e-mail: furqonitaap@gmail.com,agungdwi.wicaksono@gmail.com, fatihah334@gmail.com, aenntvio@gmail.com, deviarianti352@gmail.com, dr.irwansyah.ma@gmail.com

Abstrak

Dunia jurnalistik mengalami transformasi siginifikan di era konvergensi media terutama dalam struktur ruang redaksi. Konvergensi media mencakup lebih dari sekadar perubahan teknologi, telah mengubah interaksi antara teknologi, sektor pasar, genre, dan konsumen. Fenomena tersebut tidak hanya terbetas pada peralihan teknologi namun dalam kajian ini juga berdampak pada kontribusi seorang perempuan dalam sebuah ruang redaksi serta peran dan pengaruhnya dalam segala aspek di ruang redaksi. Stigma yang melekat pada industri media adalah merupakan ruang maskulin sehingga pimpinan media identik dengan sosok laki-laki. Namun, dengan konvergensi media dan perkembangan teknologi digital memberikan kesempatan baru sekaligus tantangan bagi perempuan dalam mencapai dan mempertahankan posisi kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran perempuan dalam kepemimpinan di ruang redaksi media lokal pasca konvergensi media, seperti yang dilakukan oleh radio Kalimaya Bhaskara FM. Menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus pada radio Kalimaya Bhaskara FM. Penelitian ini mengidentifikasi dampak kepemimpinan perempuan di ruang redaksi radio, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manajemen untuk terus bertahan dan beradaptasi.

***Kata kunci**: Konvergensi, kepemimpinan, perempuan, ruang redaksi.*

PENDAHULUAN

Dunia jurnalistik mengalami transformasi signifikan di era konvergensi media, terutama dalam struktur ruang redaksi. Membahas konsep konvergensi media, tidak hanya tentang pergeseran teknologi dan mengubah keterkaitan dan iteraksi antara teknologi, industri, pasar, genre, dan konsumen. Jenkins menguraikan tren kontradiktif yang membentuk lingkungan media Amerika, seperti penurunan biaya produksi dan distribusi akibat teknologi media baru, serta konsentrasi kepemilikan media yang mengkhawatirkan oleh beberapa konglomerat multinasional (Jenkins, 2004). Transformasi atau fenomena tersebut tidak hanya mempengaruhi bagaimana berita diproduksi dan didistribusikan, tetapi juga berdampak pada struktur dalam ruang redaksi. Dalam kajian ini, konteks perempuan menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Bagaimana dengan kontribusi seorang perempuan dalam sebuah ruang redaksi serta peran dan pengaruhnya dalam segala aspek di ruang redaksi.

Jurnalis dan pekerja pers bukanlah pekerjaan yang diperuntukkan hanya untuk kaum laki-

Hak Cipta © 2024, Furqonita, Agung Dwi Wicaksono, Nurul Fatihah, Vionita Rondonuwu, Devi Arianti, Irwansyah

laki. Semua orang, baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan latar pendidikan yang berbeda bisa menjadi jurnalis, dan bahkan menjadi pimpinan redaksi. Realitas seorang perempuan yang menjadi minoritas di ruang redaksi telah terlihat jelas di Indonesia maupun global. Penelitian yang dilakukan oleh O'Brien (2017) terdapat sedikit perempuan yang memiliki posisi pengambilan keputusan dalam industri media. Perempuan kurang mendapat tempat yang strategis dalam struktur pengambilan keputusan dalam media besar, baik di tingkat operasional sebagai manajer senior maupun satu tingkat di bawah sebagai CEO dan anggota dewan.

Dalam ruang redaksi, keberagaman tidak akan mengubah berita secara substansial. Keberagaman yang dimaksud adalah gender dan ras pekerja, hal tersebut tidak akan memberikan perbedaan pada ruang redaksi (Meyers & Gayle, 2015). Ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja, budaya melihat jurnalis wanita ini masih kental dan dekat di sekitar kita. Wanita dikelompokkan menjadi minoritas dalam penelitian-penelitian sebelumnya, namun ternyata tidak ada perbedaan signifikan jika "kelompok minoritas" ini memiliki kontribusi lebih di dalam ruang redaksi yang umumnya didominasi oleh laki-laki (Meyers & Gayle, 2015).

Perempuan adalah minoritas dalam kepemimpinan media telah jelas terlihat di tingkat global, Eropa, dan nasional (O'Brien, 2017). Saat ini kehadiran perempuan sebagai profesional dan jurnalis telah dianggap biasa, namun sedikit dari mereka yang menduduki posisi di ruang redaksi. Kedudukan perempuan di ruang redaksi yang terbatas ini ruang redaksi masih dianggap sebagai domain laki-laki (Tejedor, dkk, 2020). Mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) pada tahun 2019 didapatkan sekitar 105 responden jurnalis perempuan yang tersebar di delapan provinsi di Indonesia meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Barat, Papua Barat, dan Papua. Dari 105 wartawan perempuan tersebut, hanya 37 wartawan atau sekitar 35% saja yang menduduki posisi manajemen di organisasi media. Angka ini jumlahnya akan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah wartawan laki-laki.

Minimnya jumlah perempuan di ruang redaksi industri media (*newsroom*) berdampak kepada proses produksi berita yang bias gender. Selain itu, minimnya perempuan di tingkat manajemen juga mempengaruhi kebijakan media yang kurang mengakomodir terhadap kebutuhan perempuan, termasuk upah yang berbeda dengan wartawan laki-laki, serta fasilitas yang tidak memadai seperti ruang ibu menyusui, tempat penitipan anak, dan cuti haid yang belum tentu diberikan oleh perusahaan (Rizky, 2021). Penelitian tentang kepemimpinan perempuan di ruang redaksi media lokal mengungkapkan beberapa tantangan utama yang mereka hadapi, termasuk bias gender, kurangnya dukungan manajerial, dan stereotip yang merugikan. Selain itu, konvergensi media dan perkembangan teknologi digital membawa kesempatan baru sekaligus tantangan tambahan bagi perempuan dalam mencapai dan mempertahankan posisi kepemimpinan. Studi menunjukkan bahwa pemimpin perempuan yang mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional yang menekankan visi, inspirasi, dan manajemen perubahan lebih mampu meningkatkan keterlibatan karyawan dan komitmen organisasi, yang pada gilirannya berdampak positif pada produktivitas karyawan (Yoola & Triwidyati, 2023).

Selain tantangan, ada juga studi kasus yang menunjukkan keberhasilan perempuan dalam memimpin transformasi di ruang redaksi lokal. Pemimpin perempuan ini sering kali fokus pada pengembangan budaya kerja yang inklusif dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penyampaian berita dan keterlibatan audiens. Mereka menjadi teladan bagi calon pemimpin perempuan lainnya dan menunjukkan bahwa dengan dukungan dan kebijakan yang

Hak Cipta © 2024, Furqonita, Agung Dwi Wicaksono, Nurul Fatihah, Vionita Rondonuwu, Devi Arianti, Irwansyah

tepat, perempuan dapat berperan signifikan dalam mengarahkan masa depan media (Eckert & Assmann, 2022). Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi serta menganalisis peran perempuan dalam kepemimpinan di ruang redaksi media lokal pasca konvergensi media, seperti yang dilakukan oleh radio Kalimaya Bhaskara FM. Mereka memiliki peran perempuan yang lebih dominan dibanding laki-laki di ruang redaksi.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme untuk fokus mendeskripsikan secara mendalam peran perempuan di ruang redaksi Radio Kalimaya Bhaskara FM, khususnya dalam konteks teknologi dan konvergensi media. Metode konstruktivisme dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan makna secara mendalam dari pengalaman dan perspektif perempuan yang bekerja di radio. Secara ontologis, dalam kajian ini sebuah realita bukanlah suatu yang yang memiliki sifat alamiah tetapi hasil dari kelompok atau komunitas yang dominan yang ada di masyarakat sosial dengan menggunakan kekuasaannya untuk menekan kelompok marjinal yang bertindak secara alamiah (Sunarto et al., 2020). Dalam penelitian ini, semua karyawan radio Kalimaya Bhaskara FM yang mayoritas adalah seorang perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam sebuah ruang redaksi (Sunarto et al., 2020).

Data penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi, wawancara dilakukan langsung dengan Program Officer Amalia Khoirunnisa dan Penyiar Radio Rifqi Aniqo. Kriteria narasumber yang dipilih adalah seorang perempuan yang merepresentasikan dan mempunyai pengaruh serta kewenangan di ruang redaksi di radio Kalimaya Bhaskara FM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran perempuan di ruang redaksi Radio Kalimaya Bhaskara FM, serta kontribusi mereka dalam industri radio di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam industri media, khususnya di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Radio Kalimaya Bhaskara**

Radio Kalimaya Bhaskara mulai didirikan pada tahun 1968 oleh mahasiswa pemuda kristen yang bernama SOBC (Suara Oikumene Broadcasting Coorporation) yang adalah radio komunitas kristen. Komunitas tersebut awalnya adalah sebuah forum remaja kristen yang memiliki kesenangan mendengarkan musik, terutama musik luar negeri, yang akhirnya munculah ide membuat pemancar kecil yang akan digunakan untuk kepenetingan siaran. Seiring perkembangan teknologi komunitas yang awalnya bernama SOBC berganti nama menjadi Kalimaya Bhaskara yang kemudian menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa atau pemuda Malang pada saat itu (Malang Retro, 2024). Meskipun telah mengudara selama 54 tahun, radio Kalimaya Bhaskara masih memiliki kendala seperti mengejar target digital juga dalam hal SDM. Di radio Kalimaya Bhaskara, mereka memiliki target pendengar dari usia 18-31 karena itu perlu untuk menunjuk penyiar muda dalam siarannya. Sehingga, Kalimaya Bhaskara harus terus mencari penyiar muda yang baru (Amien, 2002)

Radio Kalimaya Bhaskara masuk dalam KG Group (Kompas Gramedia Group), yang mana dalam KG sendiri terbagi dalam 3 jaringan yaitu motion network, Sonora FM, dan Smart FM seperti yang disampaikan oleh Nisa, Program Officer dari radio Kalimaya Bhaskara. Ketiga jaringan tersebut memiliki segmen atau konsep yang berbeda, untuk motion network lebih

Hak Cipta © 2024, Furqonita, Agung Dwi Wicaksono, Nurul Fatihah, Vionita Rondonuwu, Devi Arianti, Irwansyah

menjurus kepada khalayak muda karena dari awal memang target motion adalah anak muda dan Kalimaya termasuk dalam motion network yang masih menggunakan nama Kalimaya Bhaskara bukan motion FM Malang karena branding Kalimaya Bhaskara lebih pakem dari motion itu sendiri. Untuk Sonora FM termasuk dalam jaringan keluarga yang target pendengarnta adalah usia sekitar 40an yang memang sudah berkeluarga, yang isi darai siarannya aman untuk didengarkan oleh anak-anak. Yang terakhir, Smart FM adalah jaringan atau netowork khusus untuk membahas bisnis, usaha, ekonomi, dan lain sebagainya.

B. Konvergensi Media di radio Kalimaya Bhaskara

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah memicu transformasi penting di bidang media, di mana konten media telah mengalami pergeseran ke format digital. Industri radio telah mengalami transformasi signifikan seiring berkembangnya teknologi digital. Jenkins (2006a)berpendapat bahwa konvergensi media lebih dari sekadar transisi dari media tradisional ke media modern, tetapi sebaliknya mewakili fenomena berkelanjutan yang ditandai dengan sinergi dan peningkatan timbal balik di antara berbagai format dan saluran media. Stasiun radio pun turut memasuki ranah online dengan meluncurkan situs website, serta memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menunjang proses pengumpulan dan penyebaran berita. Disisi lain, media sosial juga berperan untuk mengembangkan bisnis radio itu sendiri, agar para pendengarnya senantiasa dapat mengakses konten radio tersebut kapanpun dan dari manapun.

Konvergensi media menghasilkan pergeseran signifikan pada teknologi radio yang sebelumnya bergantung pada gelombang radio berupa transmisi sinyal analog, kini beralih ke pemanfaatan media streaming yang ditandai dengan gelombang digital dan penyebaran sinyal suara melalui jaringan internet yang luas (Rahayu & Amalia, 2021)Transformasi teknologi ini telah menjembatani penyebaran program radio dalam skala global, meskipun bergantung pada para pendengarnya yang memiliki perangkat yang kompatibel dan adanya akses koneksi internet. Oleh sebab itu, fenomena konvergensi media muncul sebagai alat penting dalam meningkatkan aksesibilitas informasi bagi pengguna dalam masyarakat, menyederhanakan proses pengambilan dan penyebaran informasi. Selain itu, konvergensi juga berperan sebagai mekanisme strategis bagi radio untuk memperluas jangkauan dan cakupan area mereka. Berbagai keuntungan dan efisiensi operasional yang diantarkan oleh pergeseran paradigma ini menghadirkan prospek yang menarik bagi radio untuk memulai jalur konvergensi media, di antaranya pada Radio Kalimaya Bhaskara FM.

Konvergensi media yang diterapkan di Radio Kalimaya Bhaskara FM tidak serta merta menyatukan radio dengan media baru, namun berpengaruh juga dalam hal manajemen dan pengelolaan media baru. Perubahan mendasar yang dialami adalah dalam hal pergantian media interaksi antara penyiar dan pendengar. Sebelum melakukan konvergensi, interaksi dilakukan melalui media telepon, setelah konvergensi interaksi terjadi melalui aplikasi percakapaan (whatsapp) dan komentar media sosial (instagram, tiktok, twitter/X). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Grant & Wilkinson (2009)bahwa ada tiga bentuk konvergensi media yang dapat diimplementasikan, yaitu konvergensi newsroom, konvergensi newsgathering, dan konvergensi content.

Pertama, pada bentuk konvergensi newsroom peneliti menemukan bahwa telah terjadi perubahan proses produksi program yang ada di Radio Kalimaya Bhaskara FM. Sebelum konvergensi proses produksi menitik beratkan pada penyiaran melalui gelombang radio secara on

Hak Cipta © 2024, Furqonita, Agung Dwi Wicaksono, Nurul Fatihah, Vionita Rondonuwu, Devi Arianti, Irwansyah

air. Setelah diterapkan konvergensi media produksi program terdapat on air, off air, dan streaming online. Sehingga program yang disajikan menjadi lebih beragam dengan memanfaatkan berbagai platform digita dan media sosial seperti streaming melalui aplikasi Joox, program podcast di Spotify, website (sonora.id), media sosial instagram (@kalimaya_malang), twitter/X (@kalimaya_malang), dan youtube (@kalimaya_malang). Produksi program dilakukan secara bersamaan di ruang redaksi Radio Kalimaya Bhaskara FM, minimal ada satu konten yang harus di unggah pada masing-masing platform media digital yang dimiliki. Hal ini berimbas bagi pengelola Radio Kalimaya Bhaskara untuk terus berpikir kreatif dan inovatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Grant & Wilkinson (2009) bahwa jurnalis bersatu dalam ruang produksi program, namun tetap bekerja sesuai dengan platformnya sendiri-sendiri.

Kedua, konvergensi newsgathering. Menurut Grant & Wilkinson (2009) bentuk ini berkaitan dengan pelatihan tertentu dan evaluasi kerja secara teratur yang dilakukan oleh industri media agar sumber daya manusianya mencapai level multitasking. Hal ini telah dijalankan di Radio Kalimaya Bhaskara FM. Peneliti menemukan bahwa pengembangan SDM melalui pelatihan dengan menghadirkan praktisi atau pihak ketiga, bahkan dari kalangan instansi pemerintahan agar SDM di Radio Kalimaya Bhaskara memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengembangkan program radio. Ketiga, konvergensi content. Pada bentuk ini, penulis menemukan bahwa Radio Kalimaya Bhaskara FM memanfaatkan kombinasi antara foto, video, streaming, serta teks. Sejalan dengan pemikiran Grant & Wilkinson (2009) konvergensi konten berfokus pada penyampaian isi media yang berbentuk multimedia.

C. **Peran Kepemimpinan Perempuan di Radio Kalimaya Bhaskara**

Memahami kepemimpinan pasca konvergensi media atau dikenal juga sebagai era disrupsi. (Dalam Sunarto et al., 2020) disrupsi adalah bagian dari sebuah inovasi. Dimana dalam perkembangan ini dapat dikatakan sesuatu yang lama kemudian digantikan dengan yang baru. Menurut Cragun dan Seetman (dalam Sunarto et al., 2020) beberapa faktor yang melatarbelakangi era ini yakni; teknologi informasi, metode baru dalam mengelola suatu sumber daya manusia, leadership, produksi, serta isu-isu ekonomi. Pada era ini dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dalam berpikir secara disruptif. (Kasali, 2019) Perkembangan pada era ini tentunya kriteria seorang pemimpin yang dimaksud adalah memiliki kemampuan yang secara cepat membaca suatu fenomena, bertindak cepat, disiplin dalam menjaga sebuah organisasi yang dipimpin, mampu menemukan solusi serta membuat suatu keputusan yang adil dan berimbang. Pemimpin seperti ini juga harus mempunyai inovatif dan memiliki jiwa visioner yang tinggi guna berkembangnya suatu organisasi yang di pimpin, mampu untuk mengambil keputusan dengan risiko yang besar untuk mencapai tujuan dari organisasi.

Pandangan (Schwab, 2019) pada era disrupsi, seorang pemimpin dituntut memiliki kecerdasan kognitif yang mampu memecahkan masalah, memahami sebuah informasi, kemampuan berpikir, kecerdasan emosional, mampu memotivasi dan kecerdasan fisik. Berkaitan dengan peran gender yang merupakan hasil dari kosntruksi sosial di masyarakat dimana memiliki peran penting dalam keberhasilan penggunaan gaya kepemimpinan tertentu. (Dalam Rosener, 2011) bahwa gaya kepemimpinan pria yang berfokus pada command and control terhadap bawahannya. Selain fokus pada common and control, pemimpin pria juga mengapresiasi bawahannya yang mampu bekerja dengan baik. Dalam penelitian yang dilakukan (Gamble & Gamble, 2013) kepemimpinan seorang pria banyak menempati kekuasaan dan memiliki

Hak Cipta © 2024, Furqonita, Agung Dwi Wicaksono, Nurul Fatihah, Vionita Rondonuwu, Devi Arianti, Irwansyah

pengetahuan untuk dirinya sendiri. Dibandingkan dengan gaya pemimpin tradisional laki-laki, yang lebih fokus pada kontrol dan arahan, kepemimpinan perempuan seringkali lebih inklusif dan kolaboratif (Nizomi, 2019). Perempuan yang memegang peran kepemimpinan di Radio Kalimaya Bhaskara kerap menyumbangkan sudut pandang yang beragam serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan.

Kepemimpinan yang adaptif dan inovatif ini telah membawa Radio Kalimaya Bhaskara meraih penghargaan bergengsi. Berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa, di bawah arahan pemimpin perempuan, radio ini mendapatkan penghargaan tingkat nasional dari KPI Pusat dalam ajang "Anugerah KPI 2023 - Eco Broadcasting" untuk kategori "Talkshow Radio". Tak hanya itu, mereka juga berhasil meraih penghargaan dari pemerintah Kota Batu dalam ajang Anugerah Jurnalis Kominfo 2024 sebagai Juara 3 untuk Kategori Jurnalis Multimedia. Prestasi ini menunjukkan bahwa pendekatan kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif dapat menghasilkan pencapaian yang signifikan, sekaligus mengukuhkan posisi Radio Kalimaya Bhaskara sebagai salah satu stasiun radio terdepan dalam inovasi dan kualitas program di tengah era disrupsi.

Gaya kepemimpinan seorang perempuan pada Radio Kalimaya Bhaskara yang juga inklusif sejalan dengan konsep Jenkins terkait Participatory Culture (Jenkins, 2006b). Di bawah kepemimpinan perempuan, Radio Kalimaya Bhaskara ini mampu mendorong partisipasi aktif dari anggota tim, menghargai kontribusi setiap individu dan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung berbagai ide. Selain itu untuk memperkuat keterlibatan sosial dalam ruang redaksi, pemimpin menekankan rasa empati dan menjalin komunikasi interpersonal yang kuat. Meskipun sebagian besar karyawan adalah perempuan namun perlakuan terhadap individu tetap setara tanpa memandang gender, yang memungkinkan setiap individu dapat berkolaborasi dengan harmonis. Hal ini menunjukan pendekatan manajemen yang diterapkan di Radio Kalimaya Bhaskara tersebut proporsional dan efektif, sehingga setiap karyawan memiliki tanggung jawab yang jelas dan terarah. Hasilnya, di bawah kepemimpinan seorang perempuan, radio ini berhasil mengatasi tantangan konvergensi media. Kepemimpinan perempuan di Radio Kalimaya Bhaskara tidak hanya membuktikan bahwa perempuan dapat bekerja secara strategis, tetapi juga mampu menggunakan pemikiran logis, menepis anggapan bahwa perempuan cenderung sensitif saat menjadi seorang pemimpin.

Radio Kalimaya Bhaskara di bawah kepemimpinan seorang perempuan sejak tahun 2012 telah menepis stereotip gender dengan ide dan gagasannya yang membawa Radio Kalimaya Bhasakara tetap eksis hingga saat ini dengan meraup pendengar di era digital di berbagai kalangan dan generasi tentunya dengan program-program yang variatif. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara langsung bersama Amalia Khoirunisa selaku Program Officer bahwa manager dari Radio Kalimaya Bhaskara tidak mempersoalkan gender dalam menjalankan tugas dan tidak menemukan konflik kepada karyawan laki-laki sekalipun karena semua saling memberikan dukungan penuh. Prinsip kerja, leadership, character building serta tujuan ke arah perubahan menjadi ciri khas manager dari Radio Kalimaya Bhaskara.

Pendekatan manajemennya yang inklusif dan progresif menghasilkan Radio Kalimaya Bhaskara dikenal dengan inovasi-inovasinya yang memberikan wadah bagi kaum muda dan perempuan untuk berkarya dan menginspirasi. Salah satu contohnya adalah program "Local Heroes" dan "Hangout". Program "Hangout" dirancang sebagai platform spesial bagi komunitas, yang saat ini banyak diisi oleh perempuan dengan berbagai inisiatif yang luar biasa. Radio

Hak Cipta © 2024, Furqonita, Agung Dwi Wicaksono, Nurul Fatihah, Vionita Rondonuwu, Devi Arianti, Irwansyah

Kalimaya Bhaskara memfasilitasi perempuan-perempuan ini untuk berbagi karya dan pengalaman mereka. Sementara itu, "Local Heroes" menonjolkan individu-individu yang memberikan edukasi dan inspirasi secara personal. Program ini juga mengakui dan mendukung para pemimpin lokal, tidak terbatas pada suatu gender yang dapat memberikan dampak positif bagi audiens. Dengan demikian, Radio Kalimaya Bhaskara tidak hanya menyediakan ruang bagi kreativitas dan inspirasi, tetapi juga mendukung kepemimpinan lokal dalam segala bentuknya, mencerminkan komitmen mereka terhadap inklusivitas dan pemberdayaan komunitas.

KESIMPULAN

Di era konvergensi media seperti saat ini, peran perempuan dalam kepemimpinan ruang redaksi radio menjadi sangat penting. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, memahami tren digital, serta memanfaatkan berbagai platform media secara efektif menjadi kunci sukses bagi seorang pemimpin redaksi radio. Perempuan telah terbukti mampu memimpin transformasi digital di ruang redaksi Radio Kalimaya Bhaskara FM dengan keterampilan kepemimpinan dan kreativitas yang dimilikinya. Mereka membawa perspektif baru, mendorong kolaborasi lintas platform, dan menciptakan konten yang menarik bagi audiens di berbagai saluran media. Kepemimpinan perempuan di ruang redaksi radio mendorong diversitas sudut pandang, memperkaya diskusi editorial, dan memastikan bahwa suara-suara yang beragam turut diwakili dalam penyiaran radio. Di samping itu, kehadiran perempuan sebagai pemimpin redaksi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk turut berkiprah dalam industri radio dan media. Dengan demikian, peran kepemimpinan perempuan dalam ruang redaksi radio menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era konvergensi media saat ini.

REFERENSI

Amien, A. M. (2002). *IMPLEMENTASI SEGMENTASI PASAR DALAM PEMOGRAMAN ACARA PADA PT RADIO KALIMAYA BHASKARA FM MALANG*. Universitas Jember.

Eckert, S., & Assmann, K. (2022). The "ProQuote" initiative: women journalists in Germany push to revolutionize newsroom leadership. *Feminist Media Studies*, *22*(5), 1011–1028. https://doi.org/10.1080/14680777.2021.1881984

Gamble, T. K., & Gamble, M. W. (2013). *Leading With Communication: A Practical Approach to Leadership Communication*. SAGE Publications.

Grant, A. E., & Wilkinson, J. S. (2009). *Understanding Media Convergence: The State Of The Field*. Oxford University Press.

Jenkins, H. (2004). The Cultural Logic of Media Convergence. *International Journal of Cultural Studies*, *7*(1), 33–43. https://doi.org/10.1177/1367877904040603

Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York University Press.

Kasali, R. (2019). *Disruption: Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*. Jakarta: Gramedia.

Malang Retro. (2024, June 18). *Life Style: Malang Retro*. https://malangretro.com/2022/08/31/kalimaya-bhaskara-radio-yang-tetap-awet-muda/

Meyers, M., & Gayle, L. (2015). African American Women in the Newsroom: Encoding Resistance. *Howard Journal of Communications*, *26*(3), 292–312.

Hak Cipta © 2024, Furqonita, Agung Dwi Wicaksono, Nurul Fatihah, Vionita Rondonuwu, Devi Arianti, Irwansyah

https://doi.org/10.1080/10646175.2015.1049760

Nizomi, K. (2019). Gaya Kepemimpinan Perempuan Dalam Budaya Organisasi. *JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, *4*(2), 128. https://doi.org/10.30829/jipi.v4i2.3885

O'Brien, A. (2017). Feminine or feminist? Women's media leadership. *Feminist Media Studies*, *17*(5), 836–850. https://doi.org/10.1080/14680777.2017.1300593

Rahayu, D. A., & Amalia, D. (2021).). Konvergensi Media Pada Radio Kota FM (88.1 FM) Sebagai Radio Dangdut di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*.

Rosener, J. B. (2011). Ways Women Lead. In *Issues in Business Ethics* (Vol. 27, pp. 19–29). Springer Science and Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9014-0_3

Schwab, K. (2019). *Revolusi Industri Keempat*. Jakarta: Gramedia.

Sunarto, Hasfi, N., & Yusriana, A. (2020a). *Esensi Kepemimpinan Jurnalis Wanita di Media Era 4.0* (Susanto, Ed.; p. 18).

Sunarto, Hasfi, N., & Yusriana, H. (2020b). *ESENSI KEPEMIMPINAN JURNALIS WANITA DI MEDIA PADA ERA 4.0*. CV. ALINEA MEDIA DIPANTARA.

Yoola, Y. yunanto, & Triwidyati, E. (2023). THE INFLUENCE OF WOMEN'S TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS. *Media Mahardhika*, *21*(3), 500–522. https://doi.org/10.29062/mahardika.v21i3.631

Hak Cipta © 2024, Furqonita, Agung Dwi Wicaksono, Nurul Fatihah, Vionita Rondonuwu, Devi Arianti, Irwansyah

Analisis Terjemahan Lagu "Champagne Problems" dan "Mad Woman" oleh Taylor Swift Pada Channel Youtube "Indolirik"

Hanna Umi Nuraini[1], Enggar Mulyajati[2]
[1,2] Universitas Terbuka, Tangerang Selatan
e-mail: hunhanna47@gmail.com (penulis korespondensi)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perihal lirik lagu "Champagne Problems" dan "Mad Woman" yang dihasilkan oleh channel youtube "Indolirik" yang saat ini mempunyai lebih dari 2 juta pengikut. Kedua lagu tersebut dinyanyikan oleh Taylor Swift, permasalahan utamanya yakni ditemui beberapa hasil terjemahan "Indolirik" yang kurang sesuai dalam menyampaikan makna yang berada dalam lirik tersebut. Hal ini dikarenakan di beberapa bagian lagu milik Taylor Swift terdapat sebuah ungkapan yang dalam kata, frasa, serta kalimat memiliki makna ganda. Maka dari itu, tujuan penelitian adalah menentukan metode dan teknik penerjemahan yang akurat dan sesuai agar istilah atau ungkapan tersebut menghasilkan sebuah terjemahan yang lebih berterima. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan menyajikan sebuah analisa hasil penerjemahan terhadap hasil penerjemahan channel youtube "Indolirik", kemudian penulis akan membandingkan hasil terjemahannya dengan dua metode penerjemahan yakni idiomatis dan komunikatif. Analisis ini menghasilkan adanya kesalahan atau kurang tepatnya penerjemahan pada tingkat kata, frasa, serta kalimat yang dihasilkanpada channel youtube "Indolirik", setelah diterapkannya metode dan teknik penerjemahanyang sesuai. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yakni penerjemahan yang dihasilkan channel youtube "Indolirik" cukup mendekati kepada penerjemahan yangberterima dan wajar, maka dari itu penulis tetap memberikan penerjemahan yang baik dan benar, lalu disertakan dengan penjelasannya.

***Kata kunci**: Lirik lagu; Taylor Swift; Terjemahan.*

PENDAHULUAN

Lagu merupakan sebuah karya sastra yang telah melekat pada keseharian masyarakat, mulai dari berbagai jenis genre seperti pop, jazz, hip hop, blues, bahkan dangdut yang identik dengan dunia permusikan di Indonesia. Musik dapat menjadi sebuah jembatan dalam mempelajari sebuah bahasa terlepas dari perbedaan budaya yang ada. Namun, karena keterbatasan pemahaman sebuah bahasa menyebabkan terjadinya sebuah tidak kesepadanannya makna dalam lagu yang sedang didengarkan.

Seperti yang diketahui, lagu merupakan salah satu bentuk karya sastra yang tergolong ke dalam puisi dengan diiringi oleh sebuah melodi atau yang biasa dikenal sebagai musik. Contohnya, seperti lagu milik Taylor Swift yang berjudul *"Champagne Problems"* dan *"Mad Woman"* lirik yang terkandung di dalamnya mempunyai makna atau ungkapan-ungkapan yang lebih luas dan dalam dari lirik itu sendiri, maka tidak

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

bisa hanya menerjemahkannya secara harfiah. Berikut merupakan contoh penggalan lirik dari kedua lagu yang tidak dapat diterjemahkan secara harfiah, *Your Midas touch on the Chevy door* diterjemahkan menjadi *kau membuat hubungan kita terlihat indah namun semua percuma* pada lirik "Champagne Problems". Kemudian pada lirik lagu "Mad Woman" yang memilki makna ganda di dalamnya seperti pada bagian *Does a* scorpion *sting when fighting back?*, yang mempunyai pesan tersendiri yakni apabila diterjemahkan secara harfiah akan kurang menangkap isi pesan dalam lirik tersebut, maka terjemahannya menjadi *bukankah orang akan melawan apabila ia disakiti?*. Pada lirik tersebut berisikan tentang majas simile yang memberikan sebuah perumpamaan apabila kalajenking disakiti maka ia akan berusaha melindungi dirinya dari bahaya, dari perumpamaan tersebut penulis memilih menggambarkan konteks yang sama namun hanya membedakan subjek yang berada di dalamnya.

Menurut Rahmat Budiman, dkk (2018), metode penerjemahan harfiah hanya digunakan dalam tahap awal penerjemahan secara harfiah, yang pada akhirnya menghasilkan terjemahan yang kaku dan tidak wajar. Metode harfiah hanya mampu menunjukkan sebuah bentuk yang hasil terjemahannya akan menyesuaikan bentuk (*form*) dari teks sasaran, nyatanya teks yang berupa lagu tidak akan tersampaikan dengan baik apabila metode ini dipergunakan, sebab perihal kepahaman pendengarberkaitan dengan pengertian atau makna terhadap lagu itu sendiri. Alhasil, para pendengar kurang mampu memaknai serta menghayati pesan apa yang ingin disampaikan oleh si penyanyi.

Pemilihan kedua lirik lagu ini karena kedua lagu ini memuat latar belakang yang sama, yakni mengisahkan seseorang wanita yang mengidap gangguan mental, akan tetapi ia harus mengalami beberapan tekanan dari orang sekitarnya akibat penyakityang ia miliki. Di satu sisi, ia juga masih berusaha untuk menjalani kehidupannya dengan baik terlepas dari penyakit mental yang ia idap. Faktor lain pemilihan lagu milikTaylor swift sebagai salah satu bagian penelitian ini ialah dikarenakan Taylor Swift amat sangat dikenal sebagai penyanyi yang selalu memabawakan sebuah lirik yang mendalam dan memilki ciri khas memasukkan beberapa idiom untuk menjadi bagian lirik-lirik lagunya. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Taylor Swift mempunyai ciri khas tersendiri yakni adanya benang merah satu lagu dengan lagu lainnya, terkadang lagu tersebut menceritakan sebuah peristiwa sesuatu yang terkait dengan kehidupan miliknya. Bahkan lagu-lagu yang telah ia nyanyikan terdapat alur cerita tersendiri yang bahkan membuat lagu tersebut seakan-akan berbentuk naratif, yakni dikemas terdapat awal mula cerita, konflik, dan bahkan akhir atau penyelesaian cerita dari peristiwa tersebut.

Maka dari itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah mengidentifikasi dan memberikan sebuah pemaparan metode serta teknik dalam penerjemahan yang dihasilkan oleh channel Youtube "Indolirik" terhadap lagu *"Champagne Problems*" dan *"Mad Woman"*. Ketika telah mendapatkan analisis metode penerjemahan, penulis akan berupaya untuk memberikan sebuah penjelasan penerjemahan pada "*Champagne Problems"* dan *"Mad Woman"* di channel "Indolirik". Lalu, penulis akan menyampaikan sebuah proses penerjemahan dari sebuah karya sastra berupa lagu agar menjadi sebuah terjemahan yang berterima, wajar, serta akurat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah metode kualitatif deskriptif dengan menyajikan sebuah analisa hasil penerjemahan terhadap hasil penerjemahan channel youtube "Indolirik". Penelitian ini mempergunakan metode dan teknik dalam proses penerjemahan sebuah karya sastra berbentuk lagu yang berjudul "*Champagne Problems*" dan

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

"*Mad Woman*" oleh Taylor Swift. Penulis akan menggunakan dua metode penerjemahan yakni metode idiomatis serta metode komunikatif, metode komunikatif merupakan metode yang nantinya akan menyesuaikan konteks makna yang tersimpan pada teks sumber lalu akan diterjemahkan sesuai kontekstual yang berada pada teks sasaran, menurut Newmark (1988:47) yang dikutip oleh Yuliani Rahmah (2018), penerjemahan komunikatif adalah upaya untuk menerjemahkan makna kontekstual dalam teks Bsu, baik dalam aspek kebahasaan maupun aspek isinya, agar hasil terjemahan dapat diterima dan dimengerti oleh pembaca.

Metode penerjemahan yang digunakan selain komunikatif yakni metodepenerjemahan idiomatis Menurut Newmark (1988) yang dikutip oleh Rahmat Budiman, dkk (2018) bahwa penerjemahan idiomatik mereproduksi pesan dalam Tsa denganungkapan yang lebih alamiah dan akrab daripada Tsu. Maka dalam penerjemahan lirik lagu yang berisikan pesan-pesan tersirat akan disampaikan dengan berterima dan wajar, serta tak akan terjadi kehilangan atau pergeseran makna di teks sasaran. Hal ini karena kedua lagu milik Taylor Swift ini menyertakan beberapa idiom atau ungkapan-ungkapan yang perlu diterjemahkan secara khusus, dikarenakan maknanya tidak bisa diterjemahkan secara harfiah atau secara logis. Serta untuk tingkat kata dan frasa akan diterapkan teknik-teknik penerjemahan yang sesuai, dan dicantumkan sebuah penjelasan yang teperinci, agar terjemahan dapat lebih mudah dimengerti.

Kemudian untuk langkah-langkah pembahasan penulis melakukan penerjememahan dengan cara membagi menjadi tiga tabel yakni, tabel pertama berisikan lirik lagu dari "Champagne Problems" dan "Mad Woman" dan diberi judul sebagai teks sasaran. Lalu, tabel kedua akan ditempatkan sebagai teks sasaran yang dihasilkan oleh "Indolirik", dan tabel yang terakhir akan diisi hasil terjemahan atau teks sasaran oleh penulis. Penulis akan menggarisbawahi serta mencetak tebal terhadap kata, frasa, serta kalimat yang membutuhkan metode dan teknik penerjemahan yang sesuai. Setelah itu, di bawah tabel akan diberikan penjelasan mengenai mengapa penulis menerjemahkan kata, frasa, dan kalimat sedemikian rupa untuk menghasilkan terjemahan yang berterima bagi para pembaca sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel-tabel di bawah ini adalah hasil data dari penerjemahan "indolirik" pada lirik lagu "*Champagne Problems*" dan "*Mad Woman*" oleh Taylor Swift. Tabel terbagi menjadi tiga bagian yakni, teks sumber, penerjemahan "indolirik" dan penerjemahan penulis.

Tabel 1. Bait Pertama

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
You booked the night trainfor a reason **So you could sit there inthis hurt** Bustling crowds or **silentsleepers** You're not sure which is worse	Kau sudah tau akan berakhir seperti ini Jadi kau bisa menangis dengan tenang Ditolak keramaian atau menangis sendirian Kau tak tahu mana yang lebih buruk	Kau memesan kereta malam untuk sebuah alasan **Agar kau bisa duduk menangisdengan tenang** Tanpa adanya keramaian ataupun **orang-orang yang mudah terbangun** Kau tak yakin mana yang lebih buruk

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

Kalimat "*so you could sit there in this hurt*" adalah sebuah ungkapan orang tersebut sedang bersedih, dalam hasil penerjemahan indolirik kata "sit" dihilangkan, namun menurut penulis kata tersebut tetap perlu digunakan agar para pembaca bisa merasakan dan menggambarkan situasi secara detail dan terperinci. Frasa "*silent sleepers*" diterjemahkan oleh penulis menjadi "orang-orang yang mudah terbangun", adanya penggunaan teknik penambahan (addition) guna menjelakan lebih detail tentang istilah tersebut.

Tabel 2. Bait Kedua

Teks Sumber	Teks Sasaran(Indolirik)	Teks sasaran (penulis)
Because I dropped yourhand while **dancing** Left you out there standing Crestfallen on the landing **Champagne problems**	Karena kupatahkan hatimu ketika melamarku Meninggalkanmu di keramaian dengan rasa malu Begitu sakit dan kecewa Keputusan yang sulit	Karena kujatuhkan tanganmu ketika kau **melamarku** Meninggalkamu berdiri sendirian Begitu sakit dan kecewanya dirimu **Semua ini adalah keputusan yangsulit**

"*Dancing*" adalah sebuah kata yang tidak dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi "menari", saat menerjemahkan kata tersebut dibutuhkannya konteks situasi berkaitan dengan register dalam teks lirik ini. Banyak kata kunci yang menunjukkan bahwa lagu ini merupakan bentuk penolakan seorang wanita ketika dilamar oleh kekasihnya, maka dari itu menerjemahkannya "melamarku" akan lebih sesuai terhadap konteks yang ada. Lalu, frasa "*champagne problems*" adalah sebuah frasa yang berulang-ulang ditemukan dalam bait-bait lainnya. Frasa ini adalah menyimpan arti bahwa keadaan yang dialami oleh si wanita tersebut, sehingga ia merasa ragu kepada situasi yang ada, maka "semua ini adalah keputusan yang sulit" menggambarkan bahwa wanita tersebut masih bimbang dan belum dapat menentukan pilihannya.

Tabel 3. Bait Ketiga

Teks Sumber	Teks Sasaran(Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
Your mom's ring in yourpocket My picture in your wallet **Your heart was glass, I dropped it** Champagne problems	Cincin kawin sudah kau siapkan Fotoku selalu dompetmu Hatimu yang rapuh, kupatahkan Sungguh keputusan yang sulit	Di sakumu terdapat **cincin kawinibumu** Fotoku berada di dompetmu **Hatimu seperti kaca, kujatuhkan begitu saja** Semua ini adalah keputusan yang sulit

Teknik addition diterapkan dalam frasa "*your mom's ring*" dalam budaya bahasa sumber istilah ini digunakan ketika seseorang ingin melamar pasangannya, pada umumnya si pria akan meminta cincin kawin milik ibunya untuk diberikan kepada pasangannya, penambahan kata

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

"kawin" agar memperjelas makna yang ada, karena dalam budaya bahasa sasaran "cincin ibumu" masih terlalu luas, serta kurang terperinci. "*Your heart was glass, I dropped it*" bagian ini ditejemahkan menjadi "hatimu yang rapuh, kupatahkan", kalimat ini menyimpan sebuah pesan tersirat dari kata "*glass*" yangbersifat rapuh dan mudah pecah, maka metode idiomatis diterapkan untuk menerjemahkan kalimat tersebut, tetapi tetap menejermahkannya menjadi "kaca" akan lebih menyesuaikan nuansa dalam kalimat tersebut, agar berkaitan dengan verba "dropped".

Tabel 4. Bait Keempat

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
You told your family for a **reason**	Kau sudah beritatahu keluargamu tentang lamaran itu	Kau telah memberitahu keluargamu tentang **lamaran** itu
You couldn't keep it in Your sister **splashed out on the bottle**	Kau tak bisa menyembunyikannya Saudarimu akan menuangkan sebotol	Kau tak mampu menyembunyikannya Saudarimu membuka sebotol
Now no one's celebrating	sampanye Sekarang tak akan ada yang merayakan	sampanye Sekarang tak seorang pun yang merayakannya

Kata "reason" mempunyai hasil penerjemahan "lamaran" agar nuansa yang berada dalam teks sesuai dengan yang ada pada bait kesatu. Maksud dari kata splashed adalah situasi di mana seseorang mendengar kabar bahagia maka ia akan membukabotol berupa sampanye untuk merayakannya. Di terjemahan "indolirik" kata "splashed diterjemahkan menjadi menuangkan, sedangkan alkohol sampanye dalam budaya bahasa sasaran ketika seseorang berselebrasi akan menyemburkan sampanye tersebut, dan ini akan berbanding terbalik dengan kata "menuangkan", sementara "membuka" akan lebih sesuai untuk menggambar situasi dari verba "splashed" karena ketika sebuah botol sampanye dibuka, maka akan menghasilkan semburan berupa air sebab terjadinyafermentasi pada minuman tersebut.

Tabel 5. Bait Kelima

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
Dom Pérignon, you brough it	Kau telah membawa sampanye mahal tapi tak ada	Kau membawa **sampanye mahal**
No crowd of friends applauded	teman kita yang akan merayakan	Namun tak ada teman pun yang merayakannya
Your hometown skeptics called it	Orang-orang kota menyebutnya	**Orang-orang di sekitarmu** menyebutnya
Champagne problems	Masalah orang kaya	Masalah orang kaya

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

"Dom perignon" adalah sebuah jenis minuman alkohol yang tergolong dalam sampanye, minuman ini amat sangat dikenal sebagai minuman alkohol yang mahal, dengan menggunakan teknik pemadanan budaya, para pembaca teks sasaran akan lebih mudah memahami maksud dari istilah tersebut. Berikutnya, frasa "your hometownskeptics" adalah sebuah ungkapan atau bisa jadi sindiran untuk orang-orang yang berada di sekitar orang tersebut, yang di mana dalam hasil google translate terlalu mempertahankan bentuk terjemahan per-kata yang akhirnya menghasilkan sebuah terjemahan yang tak berterima.

Tabel 6. Bait Keenam

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
You had a speech, you're speechless	**Kau punya banyak yang akan diungkapkan, namun tercekik di tenggorokan**	**Kau punya banyak kata yang ingin diungkapkan, tetapi kau terdiam**
Love slipped beyond your reaches	Cinta tergelincir di luar jangkauanmu	Kini cinta telah terlepas dari genggamanmu
And I couldn't give a reason	Dan aku tak bisa memberikan alasan	Dan aku tak dapat memberikan sebuah alasan
Champagne problems	Sungguh keputusan yang sulit	Sungguh keputusan yang sulit

Terjemahan "Indolirik" pada kalimat "You had a speech, you're speechless" adalah terjemahan yang sudah baik dan berterima, namun tercekik di tenggorokan akan mengarah ke pengertian lainnya. Sedangkan, kata "speech" dan "speechless" adalah duakata yang memilki pesan tersendiri dan berkaitan satu sama lain. Ketika "speech" menjelaskan tentang orang sedang berbicara, sementara "speechless" menggambarkan orang yang terdiam, maka penerjemahan yang sesuai adalah sesuai dengan tabel teks sasaran (penulis), agar pembaca mengerti bahwa dua kata tersebut mempunyai kesinambungan dan memilki makna yang berlawanan.

Tabel 7. Bait Ketujuh

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
Your Midas touch on the Chevy door	Hubungan kita terlihat indah namun tak berguna	**Kau membuat hubungan kita terlihat indah namun semua percuma**
November flush **and your flannel cure**	Hubungan yang intim karena ku mengira kau adalah obatnya	Hubungan yang indah karena **ku mengira kau adalah orang yang tepat**
"This dorm was once a **madhouse**"	Mereka bilang hubungan ini tidak waras	Mereka berkata **hubungan ini tak sehat**
I made a joke, "Well, it's made for me"	Aku bilang ya hubungan ini dikhususkan untukku	Aku membuat lelucon "ya hubungan ini cocok untukku"

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

"Midas touch" merupakan istilah yunani tentang raja Midas ketika menyentuh apapun berubah menjadi emas. Idiom ini digunakan untuk menyampaikan suatu keberhasilan, "kau membuat hubungan kita terlihat indah" adalah penerjemahan yang menyesuaikan ungkapan dalam idiom tersebut dengan menerapkan metode idiomatis. Frasa "*your flanel cure*" adalah istilah untuk seseroang mendapatkan kesembuhan dan pengobatan, namun perlu diingat lirik lagu atau karya sastra pasti cenderung mempunyai makna tersendiri. "Madhouse" di sini ialah sebuah kata yang merujuk kepada lirik-lirik sebelumnya, maka "hubungan ini tak sehat" lebih menyesuaikan benang merah lirik ini, sedangkan penggunaan kata "waras" tidak menyelaraskan konteks yang berada pada teks sumber.

Tabel 8. Bait Kedelapan

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
How evergreen, our group of friends	Kita mempunyai kelompok teman yang sama	Kita memilki kelompok pertemanan yang telah berteman sejak lama
Don't think we'll say that word again	Karena penolakan itu aku harus menjauh dari mereka	**Namun karena aku menolak lamaranmu, aku harus menjauh dari mereka**
And soon they'll have the nerve to deck the halls	Dan segera mereka akan melupakan rasa sakit yang mereka alami hari itu	**Secepat itu mereka melupakan kejadian hari itu**
That we once walked through	Dan bertindak seolah tak pernah terjadi apa-apa	**Seolah-olah tidak terjadi apa-apa**

Kalimat "how evergreen, our group of friends" adalah sebuah ungkapan menandakan bahwa ia telah berteman sejak lama atau pertemanan mereka terkesanawet. Penulis memilih untuk menerjemahkan kembali ke sesuai konteks yang ada, sebabdi "indolirik" menyampaikan terjemahan yang berbeda. Terdapatnya unsur pertemanan, lalu dilanjutkan kaitannya dengan kalimat berikutnya yang berbunyi "don't think we'll say that word again", kalimat ini menyimpan ungkapan setelah terjadinya sebuah penolakan tersebut si wanita ini tidak dapat berteman kembali karena ia dan pasangannya memiliki perkumpulan yang sama.

Tabel 9. Bait Kesembilan

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
One for the money, two for the show	Kita bersiap siap,	**Kau telah siap**
I never was ready, so I watch you go	Tapi aku tak pernah siap, jadi kubiarkan kau pergi	Namun aku tak pernah siap, jadi
Sometimes you just	Terkadang kau tak tahu	Terkadang kau tak tahu

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

don't know the answer	jawabannya	jawabannya
'Til **someone's on their knees and asks you**	Hingga seseorang benar-benar melamarmu	Sampai akhirnya **seorang melamarmu**

One for the money, two for the show adalah sebuah idiom yang biasa digunakan untuk menghitung mundur sebuah kegiatan, sehingga kata "siap" adalah sebuah kata sifat yang menunjukkan kondisi bahwa sesuatu akan segera dilaksanakan. Hal ini terlihat pada kalimat selanjutnya yang berbunyi *I never was ready* maka kedua kalimatnya memilki arti yang sama sebab terdapat kata "ready" di dalamnya. Terjemahan di "Indolirik" pada frasa *on their knees and asks you* sudah mendekati penerjemahanya yang baik dan benar. Karena frasa "their knees" ialah perumpaan ketika orang sedang melamar pasti orang tersebut akan bertumpu pada kedua kakinya, dengan petunjuk yang terdapat pada nomina "knees" yakni bentuk jamak dari lutut.

Tabel 10. Bait Kesepuluh

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
"She would've made such a **lovely bride**	Orang bilang "dia **akan cantik mengenakan gaun itu**	Mereka berkata "dia akan menjadi **pengantin yang cantik**
What a shame she's **fucked in the head**, " they said	Tapi sungguh disayangkan **dia sakit mental"**	Sayangnya **dia memiliki penyakit mental**
But you'll find **the real thing instead**	Tapi kau akan menemukan **yang nyata** sebagai gantinya	Tapi kau akan **menemukan orang lain sebagai gantinya**
She'll patch up your tapestry that I shred	Dia akan mengobati hatimu yang aku hancurkan	Ia akan mengobati hatimu yang telah ku hancurkan

Frasa *lovely bride* seharusnya tidak memerlukan sebuah penggantian makna yang terlalu jauh, sebab hanya dengan menerjemahkannya secara harfiah para pendengar telah mengerti isi pesan yang ingin disampaikan. Pemilihan menerjemahkan frasa *she's fucked in the head* ke teks sasaran oleh penulis adalah salah satu penyulihan budaya dan penyesuaian kaidah bahasa sasaran, agar yang tadinya teks sumber terasa informal dan kurang pantas, namun dalam teks sasaran diubah menjadi tatanan bahasa yang lebih baik serta formal. "*Fucked in the head*" sendiri merupakan istilah untuk seseorang yang kesehatan psikisnya terganggu atau bisa disebut juga dengan gangguan mental. *The real thing instead* adalah frasa yang berkaitan dengan bait-bait sebelumnya,frasa ini menjelaskan bahwa si wanita yang menolak lamaran tersebut berharap pasangannya akan menemukan pengganti dirinya, hasil terjemahan penulis akan berkaitan dengan bait selanjutnya.

Tabel 11. Bait kesebelas

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
And hold your hand	**Yang tidak akan menolak**	**Dan menerima lamaranmu**

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

while dancing	**lamaranmu** dan	Tak meninggalkanmu
Never leave you standing	meninggalkanmu di keramaian	berdiri
Crestfallen on the	Membuatmu begitu sakit	Tidak membuatmu kecewa
landing	dan kecewa	dan sakit
With champagne	Dengan keputusan yang sulit	Dengan keputusan yang sulit
problems		

Berkaitan dengan penggunaan metode idiomatis sebagai salah satu metode utama dalam menerjemahkan lirik-lirik yang berada pada penelitian ini, maka kata "dancing" tersebut berkaitan dengan konteks situasi yang berada pada bait kesatu yang juga tertera kata "dancing" di dalamnya, yang membedakan kedua kata "dancing" ini ialah saat bait pertama menunjukkan penolakan lamaran, sedangkan di bait ini sang wanita berharap ada orang lain yang dapat menerima lamaran pasangannya seperti yang telah dijelaskan dalam bait sebelumnya.

Tabel 12. Bait Keduabelas

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
Your mom's ring in yourpocket	**Cincin kawin sudah kausiapkan**	**Di sakumu terdapat cincin kawinibumu**
Her picture in your wallet You won't remember all my Champagne problems	Fotonya ada di dompetmu Kau tak akan mengingat kembali keputusan sulit yang kubuat	Fotonya berada di dompetmu Kau tak akan mengigat semua keputusan sulit yang telah kubuat
You won't remember all my Champagne problems	Kau tak akan mengingat kembali keputusan sulit yang kubuat	Kau tak akan mengingat semua keputusan sulit yang kubuat

Pada teks sasaran milik penulis terdapat teknik penambahan (*addition*) samaseperti pada bait ketiga untuk memperjelas milik dan jenis apakah cincin tersebut.

Setelah penjelasan dan pemaparan teknik dan metode penerjemahan pada lirik "Champagne problems", berikut adalah analisa tentang makna dan penerjemahan lirik "Mad Woman"

Tabel 13. Bait kesatu

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
What did you think I'd say to that?	Menurutmu apa yang akan kukatakan tentang perlakuanmu padaku?	Menurutmu apa yang kurasakan terhadap perlakuanmu ke padaku?
Does a	Bukankah kalajengking	**Bukankah orang akan melawan apabila ia disakiti?**

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

scorpion sting when fighting back?	akan menyengat ketika diserang duluan?	
		Mereka akan membalasnya dan kau tahu aku akan melakukannya
They strike to kill and you know I will	Kalajengking itu menyerang untuk membunuh dan kau tahuaku akan melakukannya juga	Kau tahu aku akan melakukannya
You know I will	Kau tahu aku akan melakukannya	
What do you sing on your drive home?	Tidakkah kau berpikir sebelum bertindak?	Tidakkah kau berpikir sebelumbertindak?
Do you see my face in the neighbor's lawn?	Apa kau melihat reaksiku saat itu?	Apa kau melihat reaksiku saatitu?
	Apakah ia tersenyum?	Apakah aku tersenyum?
Does she smile?	Atau apakah ia bicara “persetan denganmu selamanya”?	Atau apakah aku berbicara “persetan denganmu selamanya?
Or does she mouth, "Fuckyou forever"?		

“Does a scorpion sting when fighting back?”, di hasil terjemahan milik indolirik menggunakan teknik harfiah yang berbentuk “Bukankah kalajengking akan menyengat ketika diserang duluan?”, penerjemahan tersebut tidak salah namun hanya saja kalimat tersebut ingin memberitahu ungkapan tersirat dalam kalimat tersebut “scorpion sting” adalah sengatan yang dikeluarkan kalajegking yang sedang terancam, maka penulis mengambil penerjemahan menggunakan teknik modulasi untuk menyesuaikan sudut pandang terhadap kalimat tersebut, yang akhirnya diterjemahkan menjadi “Bukankah orang akan membalas apabila ia disakiti?” agar menunjukkan inti pesan yang sama yakni apabila disakiti pasti akan ada balasannya karena itu adalah sebuah bentuk pertahanan diri.

Tabel 14. Bait Kedua

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
Every time you call me crazy	Tiap kali kau memanggilku gila	Tiap kali kau memanggilku gila
I get more crazy	Aku menjadi semakin gila	Aku menjadi semakin gila
What about that?	Bagaimana dengan itu?	Bagaimana menurutmu?
And when you say I seem angry	Dan ketika kau mengatakan aku tampak marah	Dan ketika kau mengatakan aku terlihat marah
I get more angry	Aku menjadi semakin marah	Aku menjadi semakin

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

		marah

Dalam hasil penerjemahan yang dihasilkan oleh indolirik tidak memilki kesalahan dan tingkat keterbacaan dari terjemahan tersebut amat sangat mudah dipahami, karena penulis juga menerjemahkannya juga demikian, faktor lainnya adalah tidak ada istilah atau ungkapan khusus pada bait kedua ini sehingga menerjemahkannya secara harfiah sudah cukup menyampaikan makna teks sumber.

Tabel 15. Bait Ketiga

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
And there's nothin' like a mad woman	Dan tidak ada yang menyukai wanita gila	Dan tidak ada yang menyukai wanita gila
What a shame she went mad	Sayang sekali dia menjadi gila	Sayangnya dia menjadi gila
No one likes a mad woman	Tidak ada yang suka wanita gila	Tidak ada yang suka wanita gila
You made her like that	Kau membuatnya seperti itu	Kau yang membuatnya seperti itu
And you'll poke that bear 'til her claws come out	Dan kau terus melempar fitnah hingga membuatnya ingin membunuhmu	**Dan kau terus menyakitinya sampai akhirnya dia ingin membalasmu**
And you find something to wrap your noose around	Dan kemudian kau temukan cara yang membuat seolah-olah itu bukan ulahmu	Dan kemudian kau temukan cara yang membuat seolah-olah itu bukan kesalahanmu
And there's nothin' like a mad woman	Dan tidak ada yang menyukai wanita gila	Dan tak ada yang menyukai wanita gila

"And you'll poke that bear 'til her claws come out." Lirik ini berkaitan dengan kalimat yang terdapat dalam bait pertama yakni *"Does a scorpion sting when fighting back?",* sama halnya dalam kalimat tersebut. Kalimat ini memuat sebuah ungkapanyang menunjukkan pertahanan diri seekor beruang apabila disakiti, dan menulis menggunakan teknik modulasi dan penambahan dalam penerjemahannya. Hasil terjemahan indolirik terdapat kata "fitnah" yang kurang sesuai untuk penyesuaian konteks dalam lirik lagu tersebut, karena lagu ini menceritakan seorang wanita yang dihina serta disakiti, maka pemilihan kata "fitnah" akan terkesan jauh dari isi pesan teks sumber.

Tabel 16. Bait Keempat

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
Now I breathe flames each time I talk	Sekarang aku menghirup api tiap kali bicara	**Sekarang setiap kali aku berbicara pasti semakin emosi**
My cannons all firin' at your yacht	Segala kekuatanku kukerahkan untuk melawanmu	Segala emosiku kukumpulkan untuk melawanmu
They say, "Move on", but you know, I won't	Mereka mengatakan "sudah, lupakan saja"	Mereka berkata, "sudah
And women like	tetapi kau tahu aku tidak akan	

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

hunting witches, too	melupakannya	maafkan saja" tetapi kau tahu
Doing your dirtiest work for you	Dan istrimu sepertinya juga sangat senang menyerangku	aku tak akan bisa memaafkanmu
It's obvious that wanting me dead	Membantu melakukan pekerjaan kotormu	**Dan istrimu sepertinya juga sangat senang menyerangku**
Has really brought you two together	Dengan jelas menginginkanku mati	Membantu melakukan pekerjaan kotormu
	Sifat seperti itulah yang menyatukan kalian berdua	Dengan jelas ingin **menjatuhkanku**
		Hal itulah yang menyatukan kalian berdua

Pada kalimat "*Now I breathe flames each time I talk."* Terdapat frasa yaitu "breath flames" yang merupakan sebuah ungkapan ketika seseorang sedang dalam kondisi amarah yang sangat tinggi, sedangkan disayangkan dalam terjemahan indolirik hanya menerjemahkan sesuai bentuk harfiahnya saja tanpa menerjemahkannya ke makna yang sesungguhnya. Penulis memilih untuk menerjemahkannya "Sekarang setiap kali aku berbicara pasti semakin emosi" agar para pembaca dan pendengar lebih memahami maksud frasa tersebut. Di kalimat, "*And women like hunting witches, too"* penulis dan indolirik menghasilkan penerjemahan yang sama, hal dikarenakan konteks dari kata "women" di sini ialah seorang istri dari laki-laki yang dibahas dalam lirik-lirik sebelumnya, yakni laki-lai yang selalu menyakiti dan memanggil gila kepada perempuan yang terdapat dalam lirik *"Mad Woman".* "Dead" di sini bukanlah benar-benar ingin membunuh melainkan ingin menjatuhkan wanita yang berada dalam lirik ini, karena ini akan berkaitan pada bait ketujuh.

Tabel 17. Bait Kelima

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
Every time you call me crazy I get more crazy	Tiap kali kau memanggilku gila	Tiap kali kau memanggilku gila
What about that?	Aku menjadi semakin gila	Aku menjadi semakin gila
And when you say I seem angry	Bagaimana dengan itu?	Bagaimana menurutmu?
I get more angry	Dan ketika kau mengatakan aku tampak marah	Dan ketika kau mengatakan aku terlihat marah
	Aku menjadi semakin marah	Aku menjadi semakin marah

Penerjemahan ini telah dijelaskan oleh penulis, karena pada bait ini terdiri dari kalimat-kalimat yang sama seperti di bait kedua.

Tabel 18. Bait Keenam

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

And there's nothin' like a mad woman	Dan tidak ada yang menyukai wanita gila	Dan tidak ada yang menyukai wanita gila
What a shame she went mad	Sayang sekali dia menjadi gila	Sayangnya dia menjadi gila
No one likes a mad woman	Tidak ada yang suka wanita gila	Tidak ada yang suka wanita gila
You made her like that	Kau membuatnya seperti itu	Kau yang membuatnya seperti itu
And you'll poke that bear 'til her claws come out	Dan kau terus melempar fitnah hingga membuatnya ingin membunuhmu	Dan kau terus menyakitinya sampai akhirnya dia ingin membalasmu
And you find something to wrap **your noose around**	Dan kemudian kau temukan cara yang membuat seolah-olah itu bukan ulahmu	Dan kemudian **kau temukan cara yang membuat seolah-olah itu bukan kesalahanmu**
And there's nothin' like a mad woman	Dan tidak ada yang menyukai wanita gila	Dan tidak ada yang menyukai wanita gila

Frasa *your noose around* biasa digunakan untuk menggambarkan sebuah situasi yang menjebak seseorang atau hal lain agar terjebak dalam situasi sulit, maka penulis *menerjemahkannya* menjadi "kau temukan cara yang membuat seolah-olah itu bukan kesalahanmu." Agar kesalahan tersebut tidak dilimpahkan ke laki-laki yang berada dalam lirik tersebut, melainkan agar dapat menyalahkan orang lain.

Tabel 19. Bait Ketujuh

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
I'm takin' my time Takin' my time	Aku mengambil waktuku Mengambil waktuku	Aku berusaha bersabar Dan bersabar
'Cause you took everything from me	Karena kau mengambil semuanya dariku	Namun karena kau mengambil semuanya dariku
Watchin' you climb	Mengamati kau mencakar	Kulihat kau
Watchin' you climb Over people like me	Mengamati kau mencakar Menindih orang-orang	**Kulihat kau Menindih orang-orang**
The master of **spin**	sepertiku	**sepertiku**
Has a couple side **flings**	Sepertinya si tukang bohong	Kau adalah orang yang lihai
Good wives always know	memiliki beberapa selingkuhan	**berbohong** Bahkan kau mempunyai
She should be mad	Tetapi istrinya membiarkan	beberapa **selingkuhan**
Should be scathing like me	saja Dia seharusnya marah	Tetapi istrimu membiarkanmu
	harus berubah kejam sepertiku	begitu saja Seharusnya ia juga harus marah sepertiku

Kalimat *Watchin' you climb over people like me* mempunyai sebuah ungkapan pada harfiahnya frasa *climb over* ialah menandakan orang memanjat kita, akan tetapi makna atau pesan yang terdapat di dalamnya yakni bentuk sebuah penindasan atau penekanan kepada orang tersebut. Maka dengan teknik modulasi, kalimat tersebut dapatmenggambarkan kondisi serta

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

pesan yang terkandung dalam teks sumber. Kata *spin* adalah sebuah istilah lain untuk menyatakan pembohong atau ketika terdapat seseorang tidak berkata jujur, terlebih lagi ini berkaitan dengan kata selanjutnya yakni *flings.* Istilah tersebut dikenal dalam budaya bahasa sasaran sebagai simpanan, pelarian, bahkan juga selingkuhan. Maka konteksnya akan berkesinambungan di penerjemahan kalimat berikutnya pada *good wived always know*, dari kata "know" sendiri yang berkontradiksi dengan kata "spin".

Tabel 20. Bait Kedelapan

Teks Sumber	Teks Sasaran (Indolirik)	Teks sasaran(penulis)
But no one likes a mad woman What a shame she went mad You made her like that	Tapi, tidak ada yang suka wanita gila Sayang sekali dia menjadi gila Kau menjadikannya seperti itu	Tapi, tidak ada yang suka wanita gila Sayangnya dia menjadi gila Tak ada yang suka wanita gila Kau yang membuatnya seperti itu

Bait terakhir ini berisikan kalimat-kalimat yang sama pada bait kedua dan kelima. Dan yang membedakan hanya terdapat kata penghubung atau konjungsi padaawal baitnya yakni kata "but" selebihnya lirik di dalamnya mempunyai makna yang sama pada bait kedua dan kelima.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah teks hasil terjemahan yang dihasilkan kanal YouTube "Indolirik" cukup mendekati kepadapenerjemahan yang berterima dan wajar. Tetapi, terjemahan yang berada pada chanel tersebut masih terdapat beberapa kurang penjelasan serta dalam bagian-bagian yang memuat sebuah idiom atau ungkapan-ungkapan bermakna lain masih belum disesuaikan dalam teks sasaran. Sedangkan, dalam lirik "*Champagne Problems*" dan "*Mad Woman*"banyak sekali kata, frasa, dan kalimat yang tidak dapat diterjemahkan secara langsung atau harfiah, melainkan membutuhkan penalaran dan sudut pandang terhadap ungkapan atau istilah tersebut.

Saran untuk hasil penerjemahan dari chanel youtube "Indolirik" yakni berusaha tetap mengupayakan penerjemahan yang berterima, natural, dan wajar. Dengan demikian, hasil penerjemahan tersebut akan lebih mudah dipahami oleh pendengar dan pembaca terjemahan lirik tersebut. Seperti lebih memberikan penjelasan yang detail dan terperinci terhadap budaya-budaya yang berada pada bahasa sumber dan mencari padanan budaya yang sesuai ke dalam bahasa sasaran akan membuat para pembaca mengerti terjemahan tersebut dengan mudah, serta tidak menimbulkan kerancuan pada penerjemahan lirik tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prodi Sastra Inggris, FHISIP Universitas Terbuka yang telah menjadi wadah bagi kami untuk menimba ilmu Sastra Inggris terutama di bidang penerjemahan. Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada FHISIP UT yang telah menyelenggarakan Seminar Nasional dan memberikan fasilitas untuk mendiseminasikan hasil penelitian yang telah kamu buat.

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

REFERENSI

Arba, N., Widyasari, Efendi, Y., Syaputri, W. (2023). Analisa Hasil Terjemahan Google Translate Dalam Lirik Lagu "To The Bone" oleh Pamungkas. Pembahsi: Jurnal Pembelajaran Bahasa Indonesia. 13(1), 59.

Budiman, R. dkk. (2018). *Teori dan Masalah Penerjemahan* (Edisi Kesatu). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Harsono, S. (2020). Penerjemahan Lirik Lagu untuk Pembelajaran Bahasa Inggris. *Jurnal Harmon*i, 4(1), 2.

Karnedi. (2018). *Analisis Teks dalam Penerjemahan* (Edisi Kesatu). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Kardijan, D. (2019). Analisis Penerjemahan Lirik Lagu "It's My Life" Karya Bon Jovi Versi Tautan HTTP://GUDANG-TERJEMAHAN-LAGU.BLOGSPOT.CO.ID. 5(1), 32.

Maulida, H. (2017). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Google Translate Sebagai Media Menerjemahkan Materi Berbahasa Inggris. *Jurnal Saintekom*, 7(1), 58.

Newmark, Peter. (1988). *A Textbook of Translation.* Hertfordshire: Prentice Hall International English Language Teaching.

Putri, G. A., & Gusthini, M. (2022). Analisis Strategi Penerjemahan Metafora pada Lagu"Skyfall" oleh Adele. *HUMAYA:Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, danBudaya*, 2(2) 2022, 121.

Rachmawati, I. (2020). *Teori Penerjemahan Teks Tulis dan Praktik Penerjemahan*. Sleman: Deepublish

Rahmah, Y,. (2018). Metode dan Teknik Penerjemahan Karya Sastra. *KIRYOKU: JurnalStudi Kejepangan*, 2(3), 132.

Suharto. (2006). Permasalahan Musikal dan Lingual dalam Penerjemahan Lirik Lagu. *Harmonia Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, 7(2).

Wicaksono, G, A. (2020). *Pengantar Penerjemahan: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Wuryantoro, A. (2018). *Pengantar Penerjemahan*. Sleman: Deepublish.

Referensi Website

8 Metode Penerjemahan. (2019/10). Militerdefence. https://www.militerdefence.com/ Contoh Karya Ilmiah Universitas Terbuka "Analisis Prosedur Penerjemahan Teks".

(2022/12). Militerdefence. https://www.militerdefence.com/

Taylor Swift-Mad Woman Lirik Terjemahan. (2020/10/10). Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=IjzkP3x-GtQ

Taylor Swift-Champagne Problems Lirik Terjemahan. (2020/12/17). Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=vPkRDr9o08c

Hak Cipta © 2024, Hanna Umi Nuraini, Enggar Mulyajati

Pengaturan Ethnomedicine dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No 17 Tahun 2023

I Gede Eka Agung Agastya Punia [1,2,3]
[1] Fakultas Kedokteran, Program Studi Sarjana Kedokteran, Universitas Mahasaraswati, Denpasar
[2.] School Of Computer Sciences, Program Studi Teknik Indormatika, Universitas Bina Nusantara, Jakarta
[3] Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Matematika, Universitas Terbuka, Tangerang
e-mail: agastya@unmas.ac.id

Abstrak

Ethnomedicine merupakan sebuah studi praktik medis tradisional yang memiliki hubungan dengan interpretasi dari budaya kesehatan, penyakit dan juga membahas proses pencarian perawatan kesehatan dan praktik penyembuhan. Minat penelitian dan kegiatan di bidang Ethnomedicine telah meningkat pesat dalam dekade terakhir. Sejak awal disiplin, penelitian ilmiah di Ethnomedicine telah memberikan kontribusi penting untuk memahami subsisten tradisional, pengetahuan medis dan praktek. Di Indonesia, penggunaan tanaman dalam menjaga kesehatan sudah lama dilakukan sejalan dengan perkembangan peradaban. Sebagai contohnya adalah penggunaan jamu dalam mengobati penyakit yang sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Selain pemanfaatan pertumbuhan beberapa pelayanan medis tradisional juga terbukti secara penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat kepada kesehatan manusia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membuat legalitas mengenai praktik Ethnomedicine di Indonesia Peraturan mengenai Ethnomedicine diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023 dimulai dari bab V mengenai Upaya kesehatan dimana pasal 159 mengatur tentang praktik ethnomedicine, Pasal 161 mengatur tentang persyaratan praktisi Ethnomedicine, serta pasal 193 mengatur tentang pengaturan sumber daya

***Kata kunci**: Ethnomedicine, Pelayanan Medis, Undang-Undang Kesehatan*

PENDAHULUAN

Ethnomedicine adalah bidang yang menungkapkan pengetahuan atau keilmuan lokal dalam banyak ethis untuk menjaga kesehatannya. Secara derivasi kata, Ethnomedicine berasal dari kata *Ethno* (Etnis) dan *Medicine* (obat). Berdasarkan definisi dari etimologis dapat dikatakan bahwa *ethnomedicine* merupakan cabang ilmu yang menghubungkan etnis dan obat. Berdasarkan ilmiah, Ethnomedicine merupakan konsepsi dan persepsi dari masyarakat tradisional untuk mendefinisikan atau mengartikan kesehatan atau studi yang mempelajari dari ilmu medik etnis tradisional. Ethnomedicine memiliki 2 tujuan utama. Tujuan utama adalah mempelajari dari teori yang berhubungan dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang diwariskan dan dipelajari dengan hidup di buidaya tertentu. Informasi ini membentuk sebuah landasan dari pengetahuan obat dari etnis tertentu yang dapat digunakan oleh masyarakat tertentu dalam menjelaskan dan melakukan terapi pada penyakit tersebut.

Dalam perkembangannya *Ethnomedicine* dalam bidang hukum dapat dikatakan sebagai Pengobatan Tradisional akan tetapi berdasarkan definisi tidak berfokus kepada pengobatan tradisional akan tetapi jauh lebih berfokus kebada perbandingan antara budaya dengan sistem medis. Contoh dari pengembangan *Ethnomedicine* yang diakui sebagai pelayanan kesehatan

Hak Cipta © 2024, I Gede Eka Agung Agastya Punia.

adalah akupuntur. Akupuntur merupakan sebuah jenis pengobatan tradisional yang menggunakan jarum di beberapa bagian *acupoints* yang terdapat di dalam meridian tubuh. Pengembangan akupuntur dari pengobatan tradisional menjadi suatu pengobatan yang diakui oleh kalangan medis merupakan tujuan akhir dari studi *Ethnomedicine*.

Indonesia dengan banyak suku dan budaya memiliki potensi dalam mengembangan pengobatan tradisional menjadi pengobatan yang diakui oleh kalangan medik. Masyarakat Indonesia *juga* masih mempercayai pengobatan tradisional yang berbasis suku mereka masing-masing dapat memberikan manfaat medis dan Pemberian pengobatan secara tradisional di pandang lebih minim efek samping yang negatif di bandingkan dengan metode pengobatan secara modern. Semenjak diundangkan di Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023, Keberadan pengobatan tradisional yang dapat dikembangan semakin diakui di Indonesia. Penelitian ini akan membahas dasar legalitas mengenai pelayanan Ethnomedicine di negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia.

METODE

Jenis penelitian ini adalah yang bersifat yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara umum tentang pengaturan *Ethnomedicine* di Indonesia. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif Dengan metode deskriptif ini peneliti akan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi.Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan Empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan undang-undang *Ethnomedicine* di Indonesia

Perkembangan legalitas *Ethnomedicine* di Indonesia sangat berkaitan dengan perkembangan dan legalitas dari pengobatan tradisional yang diakui oleh pemerintah. Peraturan pertama yang mengatur secara legal mengenai penyelenggaraan pengobatan tradisional di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 1186/Menkes/Per/XI/1996 tentang pemanfaatan akupuntur di sarana pelayanan kesehatan dimana Akupuntur, sebuah pengobatan tradisional dari negara Tiongkok, sudah diakui secara legal dalam peraturan mentri kesehatan yang tertulis pada pasal 1 dimana menjelaskan mengenai status praktik akupuntur di Indonesia yang menjelaskan bahwa pengobatan akupuntur yang berbasis tradisional dapat dilaksanakan serta dipraktikkan di sarana pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan alternatif yang berjalan dengan pelayanan kesehatan yang diakui secara sains

Peraturan ini secara eksplisit menyebutkan bahwa pengobatan tradisional akupuntur sudah diakui sebagai metode pengobatan alternatif yang dapat dilaksanakan disamping pelayanan kesehatan pada umumnya. Sebelum peraturan ini dimunculkan, belum ada peraturan yang mengatur segala jenis pengobatan alternatif di Indonesia. Tahapan ini merupakan tahapan penting karena pengobatan tradisional pada tahap ini sudah memasuki fase awal dalam proses menjadi legal di Indonesia dan ini merupakan tahapan awal dari *Ethnomedicine* berkembang di Indonesia.

Peraturan mentri yang pertama mengakui mengenai peredaran obat tradisional di Indonesia adalah peraturan mentri kesehatan nomor 246/Menkes/Per/V/1990 yang

Hak Cipta © 2024, I Gede Eka Agung Agastya Punia.

menjelaskan izin dari usaha industri obat tradisional dimana peraturan perundang-undangan ini menjelaskan bahwa obat tradisional deapat berupa ramuan atau bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan yang disebutkan sebelunya secara tradisional yang secara turun-temurun sudah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman Peraturan tersebut juga menjadi landasan mengenai definisi pengobatan tradisional yang berlaku di masa itu.

Undang-undang kesehatan yang pertama kali mengakui pengobatan tradisional adalah undang-undang kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan di pasal 47 yang menyatakan bahwa:

1. Pengobatan tradisional diakui sebagai satu Upaya dari pengobatan dan/atau perawatan yang terdapat diluar ilmu kedokteran dan keperawatan
2. Pengobatan tradisional harus diawasi serta dilakukan pembinaan untuk menjadi sebuah pengobatan yang dapat terbukti kemanfaatanya serta keamanannya dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Pengobatan tradisional wajib ditingkatkan serta dikembangkan untuk mewujudkan kesehatan yang baik serta optimal untuk khalayak masyarakat umum

Pengobatan tradisional sebagaimana dijabarkan dalam undang-undang kesehatan republik Indonesia tahun 1992 mengatakan bahwa perlu pembinaan dan pengawasan agar dapat menjadi pengobatan dan/atau perawatan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Oleh karena itu pemerintah negara Indonesia sudah menyebutkan untuk pengembangan obat tradisional agar dapat diakui manfaat dan keamanannya secara empiris sehingga dapat berjalan atau dapat diakui oleh ilmu kesehatan.

B. Pengaturan Ethnomedicine berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No 17 Tahun 2023

Peraturan mengenai *Ethnomedicine* diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023 dimulai dari bab V mengenai Upaya kesehatan. Pada pasal 18 z dikatakan bahwa salah satu upaya kesehatan adalah pelayanan kesehatan tradisional. Kemudian diperjelas lagi pada pasal 159 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa:

1. Pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan cara pengobatan meliputi dari penggunaan keterampilan dan ramuan
2. Pelayanan yang dimaksud dari no 1 berasal dari nilai kearifan lokal, keahlian, dan/atau pengetahuan
3. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional agar kemanfaatanya serta keamanannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan norma sosial

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa terutama poin b dijelaskan bahwa ramuan yang disebutkan diatas merupakan hasil karya yang berasal dari sumber daya alam baik dalam bentuk tanaman, hewan, ataupun mineral, jasad renik, atau campuran dari semuanya yang telah digunakan dari generasi ke generasi atau terbukti berkhasiat dengan penelitian dan

Hak Cipta © 2024, I Gede Eka Agung Agastya Punia.

aman digunakan demi pemeliharan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, peningkatan kesehatan, hingga pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empirk atau saintifik. Metode diatas juga dapat diterapkan mengikuti norma yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa poin b ini menjelaskan segala jenis ramuan yang digunakan masyarakat kita untuk mengobati penyakit.

Pada pasal 159 juga dijelaskan bahwa "Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan/atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal." Menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tradisional ini merupakan sebuah Ethnomedicine karena pasal ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tradisional adalah pengertian dari budaya kesehatan, penyakit dan juga membahas proses pencarian perawatan kesehatan dan praktik penyembuhan.

Berdasarkan undang-undang yang terbaru, Pemerintah Indonesia sudah membuat regulasi bahwa setiap praktisi Ethnomedicine yang bekerja di Griya Sehat harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dimana dengan hal ini Tertulis pada pasal 161 ayat (2) dan (3) dimana menjelaskan bahwa:

1. Kepala Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional griya sehat atau penanggung jawab dapat melaksanakan pengelolaan griya sehat. Pengelola wajib merupakan seorang tenaga kesehatan tradisional yang memiliki surat tanda registrasi (STR)
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional griya sehat merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dari pelayanan kesehatan tradisional

Dengan kata lain, Pemerintah Negara Republik Indonesia (NKRI) Telah membuat praktik ethnomedicine diakui secara nasional dan setiap praktisi Ethnomedicine yang bekerja di griya sehat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi

KESIMPULAN

Ethnomedicine adalah bidang yang menungkapkan ilmu pengetahuan saintifik lokal dari berbagai ethis dalam menjaga kesehatannya. Secara derivasi kata, Ethnomedicine berasal dari kata Ethno (Etnis) dan Medicine (obat). Ethnomedicine memiliki 2 tujuan utama. Tujuan utama adalah mempelajari dari teori yang berhubungan dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan yang diwariskan dan dipelajari dengan hidup di buidaya tertentu. Informasi ini membentuk sebuah landasan dari pengetahuan obat dari etnis tertentu yang dapat digunakan oleh masyarakat tertentu dalam menjelaskan dan melakukan terapi pada penyakit tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan mengenai pengobatan tradisional berbasis etnis ini dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1186/Menkes/Per/XI/1996 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan akupuntur di sarana pelayanan kesehatan dimana Akupuntur, sebuah pengobatan tradisional dari negara Tiongkok, sudah diakui secara legal dalam peraturan mentri kesehatan. Undang-undang Kesehatan Republik Indonesia yang terbaru yakni Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 juga menjelaskan tata cara praktik dari pengobatan tradisional sehingga kedepannya pengobatan tradisional ini diharapkan dapat mengikuti praktik ilmu kesehatan secara umum karena ada yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan

Hak Cipta © 2024, I Gede Eka Agung Agastya Punia.

manusia.

REFERENSI

Silalahi, Marina. (2016). Studi Etnomedisin di Indonesia dan Pendekatan penelitiannya. Jurnal Dinamika Pendidikan Vol 9 No 3 (2016): November. DOI: https://doi.org/10.51212/jdp.v9i3.344

Ibo, Lebrina Kristina dan Nissa Arifa (2021). Etnomedisin Tumbuhan Obat Masyarakat di Kampung Kaliki Meruke-Papua. Al-Kauniyah: Jurnal Biologi, 14(1), 2021,90-100.

Mahapatra, Anaya Das dkk. (2019). Ethnomedical Wisdom. Journal New Look to Phytomedicine 2019. 35-61. DOI: 10.1016/B978-0-12-814619-4.00003-3

Kinaryosih, Lintang dan Farisha Jasmine Farahan (2023). Qi, Yin and Yang: Traditional Medicine concepts of Accupunture. Journal of Maobi Linguistics, Education, Literature and Culture Vol 01 No. 01. November 2023. Halaman 14-19

Skripsa, T. H. (2020). Pemanfaatan Pelayanan Pengobatan Tradisional (Batra) Sebagai Role Model Back To Nature Medicine di Masa Datang. ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat. Vol 01. No. 1 (2020). DOI: https://doi.org/10.55583/arsy.v1i1.44.

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1186/Menkes/Per/XI/1996 tentang Pemanfaatan Akupuntur Di Sarana Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang izin usaha industri obat tradisional.

Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2023.

Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. 2023.

Hasty, Jennifer dkk. (2022). *Introduction to Antropology*. Georgia: OpenStax.

Hak Cipta © 2024, I Gede Eka Agung Agastya Punia.

Strategi Promosi Perpustaakan dalam Meningkatakan Minat Kunjungdi Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali

Indah Lestari Wulan Aji[1], Indah Wijaya Antasari[2]
[1]Prodi Ilmu Perpustakaan dan sains Informasi, Universitas Terbuka, Indonesia
[2]Prodi Ilmu perpustakaan dan Sains Informasi UIN Saizu Purwokerto, Indonesia
indahlestari2705@gmail.com

ABSTRAK

Perpustakaan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran siswa, namun saat ini banyak yang mengabaikan keberadaannya. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasistrategi promosi perpustakaan di SMP Negeri 1 Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi yang diterapkan berhasil meningkatkan minat kunjung ke perpustakaan melalui penerapan bauran pemasaran 4P (Price, Product, Place, dan Promotion). Strategi ini mencakup penyesuaian layanan, peningkatan kualitas dan variasi produk perpustakaan, pemilihan lokasi yang strategis di sekolah, serta promosi aktif melalui berbagai media. Artikel ini memberikan gambaran tentang pentingnya perpustakaan di lingkungan sekolah dan strategi efektif untuk meningkatkan minat kunjung, yang pada akhirnya mendukung proses pembelajaran siswa secara keseluruhan.

Kata kunci: *Minat Kunjung, Strategi Promosi, Promosi Perpustakaan*

PENDAHULUAN

Perpustakaan mencakup suatu ruangan, bagian dari bangunan atau gedung berisi buku-buku koleksi yang diatur dan disusun demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan oleh pembaca (Sutarno, 2006). Perpustakaan bisa dijadikan sebagai tempat penyedia layanan yang dibutuhkan penggunanya untuk mengakses informasi. Sehingga, perpustakaan harus memenuhi kebutuhan (need) dan keinginan (want) pemustaka/ pengguna perpustakaan dimanapun dan kapanpun dibutuhkan (Khotijah dkk., 2022). Namun saat ini keberadaannya sering terabaikan, baik dikalangan siswa ataupun guru dalam menggunakan fasilitas sekolah secara rutin. Salah satu contohnya adalah Perpustakaan SMP Negeri 1Boyolali.

Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali berdiri sejak tahun 1946 terletak di lantai utama berdiri pada sebuah gedung yang luas dengan jendela yang besar untuk memudahkan cahaya yang masuk, dilengkapi dengan AC yang mampu menciptakan suasana sejuk sehingga membuat setiap pengunjung yang datang betah untuk berlama-lama disana. Ruangan perpustakaan dilengkapi dengan meja dan kursi yang bisa digunakan oleh pengunjung. Sudut

ruangan perpustakaan terdapat komputer yang tersambung dengan internet sehingga memudahkan siswa untuk melakukan pencarian informasi secara online. Selain itu perpustakaan memiliki ruang audiovisual yang dilengkapi dengan proyektor sehingga bisa digunakann untuk pemutaran film atau pembelajaran berbasis multimedia.

Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali memiliki berbagai macam koleksi seperti koleksi fiksi, koleksi non fiksi, koleksi referensi, koleksi serial, koleksi digital, surat kabar, karya guru dan karya siswa. Pemustaka juga bisa mendapatkan informasi dari setiap alat peraga yang terletak di setiap sudut ruangan yang berisi berbagai permainan catur, puzzle, ular tangga. Permainan ini bisa dimainkan saat istirahat atau disela pembelajaran guna mengembangkan kreativitas siswa, mengisi waktu luang, atupun

Hak Cipta © 2024, Indah Lestari Wulan Aji, Indah Wijaya Antasari.

menghilangkan rasa jenuh setelah mengikuti aktivitas belajar di kelas.

Kekayaan dan keindahan perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali sudah tergambarkan, namun sayangnya jumlah pengunjung tidak sebanding dengan potensi yang dimilikinya. Ditambah lagi dengan diizinkannya penggunaan hp di sekolah, sehingga dalam pencarian informasi bergantung pada alat elektronik yang dimilikinya. Adanya perkembangan teknologi yang cepat dan kebutuhan informasi yang kompleks maka perpustakaan dituntut untuk terus berinovasi baik dalam koleksi maupun layanan yang disediakan (Mustofa, 2017). Sepinya pengunjung di Perpustakaan menjadi tanda bahwa kurang berhasilnya pelayanan yang diberikan. Semakin banyak pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan maka perpustakaan tersebut berhasil dalam memberikan layanan tetapi jika jumlah pemustaka yang berkunjung rendah atau sangat rendah dapat dikatakan layanan yang disedikan kurang berhasil dan tidak menarik bagi pemustaka (Setiawan, 2013).

Meningkatkan minat kunjung perpustakaan menjadi fokus utama dalam strategi promosi perpustakaan agar nantinya dapat berjalan selaras dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sejalan dengan yang dikatakan Asdam (2015) bahwa perpustakaan sebagai lembaga pengelola informasi harus bisa mempertahankan reputasinya dengan melakukan promosi terhadap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menarik minat kunjung pemustaka. Melalui strategi promosi yang tepat, diharapkan mampu mendorong partisipasi siswa maupun guru dalam penggunaan perpustakaan sekolah sesuai dengan tujuan penulisan karya ilmiah ini yaitu mengindentifikasi strategi promosi perpustakaan di SMP Negeri 1 Boyolali dalam meningkatkan minat kunjung.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi yang menyangkut tujuan jangka panjang, prioritas pengalokasian sumber daya, dan inisiatif tindak lanjut (Chandler, 1962). Strategi merupakan perencanaan pembuatan metode untuk berkompetisi dalam pasar, membuattaktik yang digunakan untuk menjalankan aktivitas dan tujuan yang sudah direncanakan, dengan mempertimbangkan organisasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi persaingan (Harahap, 2021: 4). Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah metode yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan melibatkan pengalokasian sumber daya, penentuan prioritas, dan inisiatif tindak lanjut. Selain itu, strategijuga mencakup perencanaan pembuatan metode untuk bersaing di pasar, penggunaan taktik dalam menjalankan aktivitas, serta penyesuaian dengan kondisi persaingan.

Sutarno (2006) mengungkapkan bahwa promosi perpustakaan merupakan suatu kegiatan masyarakat dalam mensosialisasikan perpustakaan melalui media cetak baik secara langsung atau tidak langsung. Promosi merupakan suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang agar tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkan (Deliyanti, 2012). Dapat disimpulkan bahwa promosi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat perpustakaan melalui koleksi, fasilitas, dan layanan yang disediakan sebagai berbagai upaya untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang lain agar tertarik menggunakan produk atau layanan perpustakaan yang ditawarkan.

Menurut Moekijat (2000) strategi promosi merupakan kegiatan perusahaan untuk mendorong penjualan dengan mengarahkan komunikasi-komunikasi yang meyakinkan kepada para pembeli. Sedangkan menurut Lamb, dkk (2001) strategi promosi adalah rencana untuk penggunaan yang optimal dari elemen-elemen promosi yaitu periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi dan promosi penjualan. Promosi perpustakaan adalah aktivitas memperkenalkan perpustakaan dari segi fasilitas, koleksi, jenis layanan, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemustaka secara lebih teperinci

Hak Cipta © 2024, Indah Lestari Wulan Aji, Indah Wijaya Antasari.

(Rahmah, 2018). Dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi promosi adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui komunikasi yang meyakinkan dan penggunaan optimal elemen – elemen promosi seperti periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan, sedangkan dalam konteks perpustakaan, promosi melibatkan pengenalan fasilitas, koleksi, layanan, dan manfaat secara rinci kepada pemustaka.

Menurut Sulistyo-Basuki (1998) metode promosi perpustakaan berupa, nama dan logo, poster dan leaflet, pameran, media dan video, ceramah, serta iklan. Sedangkan menurut Rahayu (2020) sarana promosi perpustakaan terdiri atas, media elektronik, media cetak, pameran, perpustakaan turun langsung, perpustakaan keliling, bekerjasama dengan pihak lain (swasta/asing), pemutaran film dokumenter koleksi perpustakaan, dan library tour.

Adapun Kotler & Amstrongg (1996) mengungkapkan bahwa dalam pemasaran sering menggunakan istilah 4P yang berpengaruh terhadap tanggapan konsumen pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam konteks perpustakaan, 4P yang dimaksud terdiri dari: Product: produk atau jasa yang ada di perpustakaan berupa koleksi perpustakaan, jasa layanan yang ada dan lain sebagainya. Price: adanya denda keterlambatan pengembalian buku, kemudahan menjadi anggota tanpa harus membayar.. Person : diklat pengembangan layanan perpustakaan yang diikuti oleh pustakawan dalam rangka peningkatan komepetensi. Promotion: proses keluarnya barang dari penjual ke tangan pelanggan dalam bentuk ATL (Above the Line) iklan media massa, social media, atau BTL (Below the Line) yaitu brosur, papan iklan (bill board), pameran, kehumasan, menjalin hubungan media.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan pada saat penelitian dilakukan. Sebagaimanamenurut Moleong (2004) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena terhadap apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam bentuk deskriptif atau kata-kata. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh data secaramendalam, mengembangkan teori yang sudah ada, serta menggambarkan keadaan di lapangansecara nyata. Seperti yang dikatakan Moleong (2004) bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui pengumpulan data yang terfokusdari data numerik.

Lokasi penelitian ini berada di SMP Negeri 1 Boyolali, Jalan Merbabu No.37, Boyolali yang dilaksanakan selama satu bulan pada bulan April 2024. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali tanpa melibatkan partisipan. Selanjutnya informan terdiri dari Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, satu guru, dan empat siswa/pemustaka. Dokumentasi dilakukan dengan dengan cara mengumpulkan dokumen pendukung seperti jurnal literasi, laporan harian pengunjung, dan dokumentasi kegiatan yang diamati.

Analisis data merupakan kegiatan dalam mengolah data yang sudah didapatkan. Analisis data merupakan proses mengurutkan data, mengorganiasaikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong, 2004). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara reduksi data yaitu memiliha dan merangkum data yang diperoleh dengan mencocokkan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian data disajikan dalam bentuk deskriptif. Selanjunya melakukan verifikasi data dengan cara mengecak kembali data yang sudah terkumpiul untuk mengetahui keabsahan data. Tahapan yang terkahir yaitu penarikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan fakta dengan belandaskan teori yang sudah ada.

Hak Cipta © 2024, Indah Lestari Wulan Aji, Indah Wijaya Antasari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Strategi promosi yang dilakukan oleh perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali adalah sebagaiberikut

1. *Product*:

   Peningkatan minat kunjung perpustakaan dilakukan dengan menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pemustaka seperti buku fiksi yang terdiri dari novel, cerpen, dan karya fiksi lainnya yang digunakan untuk rekreasi dan pengembangan literasi. Buku ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan membaca mereka, termasuk kosakata, tatabahasa, dan pemahaman baca, memicu imajinasi siswa dengan memperkenalkan mereka pada dunia, karakter, dan situasi yang beragam, dan menjadi salah satu sarana hiburan yang menyenangkan sebagai tempat refresing setelah kegiatan belajar di dalam kelas. Seperti yang disampaikan Alvin selaku pemustaka atau siswa SMP Negeri1 Boyolali padawawancara 5 April 2024 bahwa:

   "*buku pelajaran itu banyak sekali buk, jadi terkadang saya dan teman teman bosen danbutuh bacaan yang membuat pikiran kamis refresh kembali yaitu dengan membaca buku fiksi di perpustakaan*" (Wawancara, 5 April 2024)

   Tidak hanya buku fiksi, perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali juga menyediakan bukunon fiksi sebagai penunjang buku pelajaran, karena tidak semua materi yang disampaikanada dalam buku pegangan siswa. Mereka dibiasakan mencari referensi dari sumber lain agar wawasan yang didapatkan lebih luas. Buku non-fiksi yang disediakan bersisi tentangberbagai topik seperti sejarah, sains, teknologi, seni, dan lainnya yang dapat digunakan untuk penelitian dan pembelajaran. Buku ini biasanya juga digunakan oleh guru sebagai pelengkap materi. Seperti yang dikatakan ibu Dewi selaku Guru Bahasa Indonesia pada wawancara 5 April 2024 bahwa:

   "*buku di perpustakaan sudah cukup lengkap namun ada beberapa buku yang tahunnya sudah lama sehingga kurang sinkron dengan keadaan saat ini. Sejauh ini sudah cukup membantu dan mendukung materi pembelajaran namun akan lebih baik jika dilakukan pengadaan buku baru yang lebih relevan"* (Wawancara, 5 April 2024)

2. *Price*:

   Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali menetapkan kebijakan bahwa pembuatan kartu anggota tidak dipungut biaya apapun, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan saatbergabung menjadi anggota perpustakaan. Kebijakan ini didasarakan pada peraturan sekolah yang tidak boleh memungut biaya apapun seperti yang dikatakan oleh Ibu Idawatiselaku kepala perpustakaan pada wawancara 5 April 2024 bahwa

   "*kami memberi kemudahan setiap siswa untuk menjadi anggota peprustakaan tanpa dipungut biaya, karena peraturan di sekolah ini tidak mengizinkan untuk memungut biayaapapun dari siswa. Sehingga dengan adanya kebijakan ini memudahkan siswa untuk bisa menggunakan fasilitas sekolah utamanya di perpustakaan*" (Wawancara, 5 April 2024)

   Selain tidak adanya biaya dalam pembuatan kartu, perpustakaan juga tidak memungut biaya denda keterlambatan buku. Namun, denda diganti dengan skorsing yaitupemustaka tidak bisa meminjam dalam kurung waktu sesuai dengan jumlah hari dimana ia terlamabat mengembalikan. Pada kasus lain, apabila buku yang dipinjam hilang, maka peminjam wajib mengganti dengan buku yang sama sesuai yang ia pinjam. Dalam hal inidenda berupa uang tidak diberlakukan. Seperti yang dikatakan Ibu Idawati selaku kepala perpustakaan pada wawancara 5 April 2024 bahwa

   "*tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki terhadap apa yang ia gunakan. Jadi jika terjadi sesuatu hal, maka mereka harussiap menerma*

Hak Cipta © 2024, Indah Lestari Wulan Aji, Indah Wijaya Antasari.

konsekuensinya. Dengan kebijakan mengganti buku yang hilang sesuai dengan judul diharapkan mampu memberikan efek jera. Jika pelanggaran bisa diganti dengan uang maka mereka akan menganggap hal itu mudah. (Wawancara, 5 April 2024)

3. *Person* :

Promosi perpustakaan dapat dilakukan dengan cara pengembangan kompetensipustakawan melalui diklat (pendidikan dan pelatihan) untuk memastikan pustakawan agarmampu menjalankan peran mereka secara efektif di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurnaningsih, S.Pd.M.M selakukepala SMP Negeri 1 Boyolali pada wawancara 6 April 2024

"Untuk meningkatkan operasional perpustakaan maka kami memberikan fasilitas kepada pustakawan untuk mengikuti diklat guna mengajarkan pustakawan cara mengoptimalkan proses operasional di perpustakaan, termasuk pengelolaan koleksi,layanan peminjaman, dan manajemen sumber daya. Agar kedepannya perpustaakaan dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya" (Wawancara, 6 April 2024)

Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali bekerjasama dengan Perpustakaan Daerah Kabupaten Boyolali untuk meningktaan kompetensi pustakawan melalui diklat maupun bimbingan teknis yang diselenggarakan setiap tahunnya. Selain itu, perpustakaan nasionaljuga menyelenggarakan diklat secara daring sehingga pustakawan bisa mengikuti kegiatantersebut dengan lebih mudah.

4. *Promotion*:

Pustakawan turun langsung pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah setiap tahun ajaran baru. Pada kesempatan ini pustakawan memberikan penjelasan mengenai letak perpustakaan, koleksi yang dimiliki, fasilitas yang bisa didapatkan, peraturan yang boleh dilakukan ataupun yang dilarang saat berkunjung, cara meminjam koleksi dan jugalayanan yang tersedia didalamnya. Sehingga siswa baru memiliki gambaran terhadap perpustkaan di SMP Negeri 1 Boyolali.

Terdapat perbedaan saat pustakawan terjun langsung kepada siswa, seperti yang di sampaikan oleh Ibu Idawati selaku Kepala Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali pada wawancara 5 April 2024 bahwa

"*Pada tahun 2020 tidak ada sosialisasi perpustakaan kepada siswa baru, hal ini terjadikarena adanya pandemik Covid 19, namun pada tahun 2021 kami tim pustakawan terjun langsung untuk melakukan sosialisasi kepada siswa baru saat masa pengenalan lingkungan sekolah dan efeknya bisa dirasakan bahwa ada peningkatan pengunjung yangsangat signifikan*". (Wawancara 5 April 2024).

Keberhasilan dalam kegiatan sosialisasi untuk mengenalkan perpustakaan di SMP Negeri 1 Boyolali sanagat dirasakan. Dengan adanya sosialisasi, siswa menjadi tahu keberadaan perpustakaan sehingga bisa memanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Seperti yang disampaikan Ibu Rini selaku Pustakawan di SMP Negeri 1 Boyolali pada wawancara 5 April 2024 bahwa

"*sasaran kami memang siswa baru, karena mereka terkumpul dari beberapa SDsehingga belum mengetahui keadaan sekolah barunya di SMP. Program sosialisasi ini diharapkan terus berjalan saat setiap tahun ajaran baru agar setiap siswa baru mengetahui adanya perpustakaan dan bisa memanfaatkannya untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah*". (Wawancara 3 April 2024).

Kegiatan ini dapat menciptakan kesadaran yang lebih besar terhadap pentingnya perpustakaan untuk mendukung pembelajaran, dari sisi pustakawan juga

Sebagai upaya untuk meningktakan minat kunjung, perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali melakukan promosi melalui media elektronik. Strategi ini dipercaya sangat efektif karena sesuai

Hak Cipta © 2024, Indah Lestari Wulan Aji, Indah Wijaya Antasari.

dengan perkembangan teknologi saat ini. Seperti tanggapan dari Dian selakupemustaka atau siswa SMP Negeri 1 Boyolali bahwa

"*saya merasa terbantu dengan promosi perpustakaan yang menggunakan media elektronik karena kami suka sekali scrolling instagram, tik tok jadi dapat dengan mudah mendapatakn informasi terbaru dari platform tersebut*". (Wawancara 4 April 2024).

Penggunaan media elektronik disesuaikan dengan perilaku para pengguna yang aktif dalam bersosial media seperti instagram, tik tok, maupun youtube. Berikut ini tampilan instagram Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali sebagai salah satu media yang digunakan promosi.



Gambar 1. Instagram Perpustakan SMP Negeri 1 Boyolali
(sumber: Dokumentasi pribadi, 2024)

Instagram Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali, dikelola oleh petugas perpustakaan dengan mempublikasikan kegiatan setiap minggunya. Selain itu admin perpustakaan juga mempostingbuku baru dan resensi buku untuk mengenalkan kepada siswa koleksi terbaru sehinggamenumbuhkan keinginan siswa untuk berkunjung ke perpustakaan.



Gambar 2. Koleksi terbaru Perpustakan SMP Negeri 1 Boyolali
(sumber: Dokumentasi pribadi, 2024)

Kegiatan lomba juga diadakan dengan tujuan untuk mendorong minat membaca siswamelalui berbagai jenis lomba seperti *story telling*, menulis cerita pendek, membuat poster. Dengan adanya lomba ini setiap siswa mampu memperluas pengetahuan dari mata lomba yangdiujikan, membantu peserta lomba untuk memperdalam pemahaman terhadap topik yang berkaitan dengan sejarah ataupun isu-isu terkini. Lomba membaca ataupun lomba menulis akan meningkatkan keterampilan dalam membaca cepat,

Hak Cipta © 2024, Indah Lestari Wulan Aji, Indah Wijaya Antasari.

memperkaya kosa kata yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Seperti yang dikatakan oleh Nurul selaku pemustaka atau siswa SMP Negeri 1 Boyolali pada wawancara 5 April 2024 bahwa

> "*saya suka sekali bercerita, dengan adanya lomba ini saya bisa menungakan perasaan yang saya rasakan ketika membaca buku, jadi saya bisa berbagi dengan teman-teman melalui lomba story telling ini*". (Wawancara, 5 April 2024).

Lomba story telling mampu meningkatkan keterampilan berbicara, setiap siswa dapat mengatur kata-kata yang akan diucapkan, intonsi, dan ekspresi wajah agar pesan yang ingin disampaikan lebih menarik daan meyakinkan. Selain lomba story telling, perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali juga mengadakan lomba membuat poster. Manfaat lomba poster dirasakan oleh beberapa siswa yang suka mengggambar seperti yang dikatakan oleh Kirana, siswi SMP Negeri 1 Boyolali bahwa,

> "*saya malu berbicara di depan umum, namun saya suka menggambar, jadi sayabisa bercerita melalui gambar*". (Wawancara, 22 April 2024).

Lomba ini mamapu memfasilitasi siswa yang kesulitan dalam berbicara di depan umum, mereka tetep bisa menyampaikan pesan yang ingin ia sampaikan melalui gambar atau poster. Setiap siswa memiliki kelemahan dan dibidanngnya masing masing, untuk mendukungdan mengapresiasi kreativitas siswa, maka perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali rutin membuatperlombaan setiap satu tahun 2 kali. Hal ini sekaligus menjadi wadah untuk melakukan promosiperpustakaan, agar siswa tertarik untuk berkunjung dan mampu menggunakan layanan yang disediakan.

Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali juga memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah berpartisipasi mengikuti rangkaian perlombaan yang diadakan setiap tahunnya, yaitu dengan memberikan hadiah agar siswa lebih semangat lagi kedepannya.



Gambar 3. Penyerahan hadiah lomba literasi terbaik
(sumber: Dokumentasi pribadi, 2024)

Dokumentasi penyerahan hadiah juga diunggah ke media sosial Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempromosikan kegiatan yang rutindilakukan sekaligus apresiasi terhadap pemustaka.

PEMBAHASAN

Perpustakaan sekolah berperan dalam mendukung pembelajaran siswa namun keberadaannya saat ini malah terabaikan. Perpustakan SMP Negeri 1 Boyolali terus berbenah agar fungsi dari adanya perpustakaan dapat berjalan dengan maksimal. Keberhasilan layanan perpustakaan bisa dilihat dari banyak

Hak Cipta © 2024, Indah Lestari Wulan Aji, Indah Wijaya Antasari.

sedikitnya pengunjung yang datang. Untuk itu, perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali melakukan promosi sebagai upaya meningkatkan minat kunjung. Kegiatan promosi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara diantaranya

1. *Product*

   Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pemustaka seperti adanya buku fiksi maupun non fiksi untuk menambah wawasan para pemustaka. Dengan menawarkan produk yang dimiliki maka perpustakan telah melakukan salah satu bentuk dari kegiatan promosi. Hal ini juga dilakukan oleh Riski (2021) dalam tulisannya yang berjudul Strategi promosi perpustakaan khusus: studi pada Perpustakaan Museum Sonobudoyo Yogyakarta bahwa Pustakawan akan mempromosikan koleksi – kkoleksi apa saja yang terdapat di perpustakaan. Hal lain juga dilakukan dengan membantu pemustaka yang kesulitan menemukan informasi yang dibutuhkan.

   Agar perpustakaan memiliki koleksi yang mendukung guna mencapai visi danmisi sesuai yang telah ditetapkan maka pengadaan koleksi harus didasarkan pada kebutuhan pemustaka, sebagai pustakawan juga harus aktif untuk menarik pemustaka agar terlibat dalam pengadaan koleksi karena nantinya koleksi tersbeut akan kembali digunakan oleh pemustaka. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Yulia (2003) bahwa pengembangan koleksi hendaknya memenuhi asas – asas sebagai berikut:Kebijakan pengembangan koleksi didasari asas kerelevanan, berorientasi kepada pemustaka, kelengkapan, kemutakhiran, dan kerjasama.

2. *Price*

   Perpustakaan terus mengembangkan layanan dan fasilitas guna memenihi kebutuhan pemustaka, namun sayangnya perpustakaan tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Seperti halnya yang dikatkan oleh Sungadi (2019) bahwa tidak ada perpustakaan yang dapat mencukupi kebutuhan sendiri, dalam upaya peningkatan layanan perpustakaan diperlukan adanya anggaran yang cukup dan memadai, sehinggaketersedaiaan bahan bacaan yang lengkap dan bervariasi.

   Sebagai bentuk promosi, peprustakaan SMP Negeri 1 Boyolali menetapkan kebijakan bahwa tidaka da biaya dalam pembuatan kartu anggota serta tidak diberlakukannya denda berupa uang apabila terlambat mengembalikan buku namun denda diganti enganpenangguhanan pemijaman sesuai dengan jumlah hari keterlambatan. Ternyata hal ini juga dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY yang tertera pada suratedaran pada nomer 004.4.14.1/3338 tentang Pemberlakukan Sanksi Suspend Keterlambatan Pengembalian Buku.

3. *Person*

   Peningkatan kompetensi pustakawan menjadi salah satu sarana promosi perpustakaan.Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti diklat, ataupun bimbingan teknis. Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali telah memfasilitasi pustakawan untuk mengikuti kegiatan tersebut, harapannya kompetensi yang dimiliki menjadi berkembang sehingga perpustakaan yang dijalankan bisa menjadi lebih baik. Hal ini juga dinyatakan dalampenelitian Masruri, dkk (2016) dalam penelitiannya yang berjudul PengembanganKompetensi dan Pendidikan Berkelanjutan Pustakawan PTAIN: Studi Kasus Di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa peningkatan kompetensipustakwan perlu dikuasai dengan sebaik-baiknya agar pustakawan UIN Sunan KalijagaYogyakarta mendapat kepercayaan dari pimpinan dan dilibatkan dalam setiap prosesperencanaan yang sangat menentukan bagi pengembangan perpustakaan.

Hak Cipta © 2024, Indah Lestari Wulan Aji, Indah Wijaya Antasari.

4. *Promotion*

Promosi perpustakaan adalah rangkaian kegiatan perpustakaan yang dirancanguntuk memperkenalkan koleksi, layanan, dan fasilitas di perpustakaan. Secara umum promosi dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pengetahuan dan perilaku target promosi untuk membujuk mereka membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan (Adhyria, 2015). Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali melakukan promosi perpustakaan melalui sosialiasi kepada siswa baru, media sosial, dan juga melakukan berbagai perlombaan seperti *story telling* dan poster. Kegiatan ini disambut baik oleh siswa karena bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Dengan melakukan promosi melalui media sosial juga membantu siswa untuk lebih mengenal layanan, produk, dan fasilitas yang dimiliki perpustakaan SMP Negeri1 Boyolali. Hal yang sama juga dilakukan oleh Theodora (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Elemen AIDA Pada Media Sosial Instagram Sebagai Media Promosi Perpustakaan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung bahwa penggunaan media sosial seperti instagram merupakan salah satu media sosial yang hingga saat ini banyak digunakan oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Instagram merupakan media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran secara langsung. Di mana Instagram memfasilitasi penggunanya untuk mengunggah foto dan video.

KESIMPULAN

Perpustakaan SMP Negeri 1 Boyolali telah menerapkan strategi promosi untuk meningkatkan minat kunjungan dengan berpedoman pada 4P diantaranya *product* yaitu menyediakan koleksi buku fiksi dan non fiksi. *Price*, dengan membebaskan biaya pembuatan kartu dan tidak memberlakukan denda keterlambatan. *Person*, memfasilitasi pustakawan untuk mengikuti diklat dan bimbingan teknis guna meningkatkan kompetensi. *Promotion*, dengan melakukan sosialisasi, penggunaan media sosial yang optimal, dan mengadakan lomba.

REFERENSI

Adhyria, F. A. (2015). *Strategi Promosi Perpustakaan Khusus (Studi Pada Bank IndonesiaSurabaya)*. Jurnal Administrasi Publik, 3(12), 2101–2106. administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1101

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.

Asdam, B. (2015). *Minat Baca Dan Promosi Perpustakaan sebagai Sarana MendekatkanMasyarakat pada Perpustakaan.* Jupiter, Vol. XIV No.1.

Chandler, A. D. (1962). *Strategic and Structure: Chapters in the History of the lndustrialEnterprise*. MIT Press.

Deliyanti, O. (2012). *Manajemen Pemasaran Modern.* Laksbang Pressindo.Harahap, W. R. (2021). *Penerapan Strategi Promosi Perpustakaan*. *6*(1).

Khotijah, Koerniawati, & Lestari. (2022). *Pengaruh Promosi Perpustakaan melalui Media Sosial Instagram terhadap Pemanfaatan Perpustakaan di Perpustakaan UniversitasMuhammadiyah Surakarta*. Jurnal Perpustakaan, 10.

Kotler, P., & Amstrongg, G. (1996). *Principle of Marketing* (7 ed.). NJ prenticehall,inc.Lamb, Hair, & McDaniel. (2001). *Pemasaran*. Salemba Empat.

Masruri, A., Kuntoro, S. A., & Arikunto, S. (2016). *Pengembangan Kompetensi Dan Pendidikan Berkelanjutan Pustakawan Ptain: Studi Kasus Di Perpustakaan Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Hak Cipta © 2024, Indah Lestari Wulan Aji, Indah Wijaya Antasari.

Jurnal Pembangunan Pendidikan*:* Fondasi dan Aplikasi, 4(1), 1. https://doi.org/10.21831/jppfa.v4i1.9818

Maydi Aula Riski. (2021).

Moekijat. (2000). *Manajemen Pemasaran*. Mandar Maju.

Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Mustofa, M. (2017). *Promosi Perpustakaan Melalui Media Sosial: Best Practice*. PublicationLibrary and Information Science, 1(2), 21. https://doi.org/10.24269/pls.v1i2.691

Rahmah, E. (2018). *Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi*. Prenada MediaGroup.

Setiawan, A. (2013). Strategi Promosi Perpustakaan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Jurnal ISI, *1*.

Sulistyo, B. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Gramedia.

Sungadi (2019).

Sutarno, N. (2006). *Perpustakaan dan Masyarakat*. Sagung Seto.

Theodora, D. (2021). *Analisis Elemen AIDA Pada Media Sosial Instagram Sebagai MediaPromosi Perpustakaan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung*.

Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan, 12(1), 37–47. https://doi.org/10.20473/pjil.v12i1.25152

Yulia, Y. (2003). *Pengembanagn Koleksi Perpustakaan*. Tangerang Selatan: UniversitasTerbuka.

Hak Cipta © 2024, Indah Lestari Wulan Aji, Indah Wijaya Antasari.

Analisis Efektivitas Pemanfaatan Media Sosial Facebook sebagai Sarana Promosi di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari Berdasarkan Engagement Rate By Post

Intan MonalizaYorfa[1], Diana Maulida Zakiah[2]
[1]Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
[2]Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia
Email : intanmonalizayorfaa@gmail.com

Abstrak

Penyebaran informasi perpustakaan telah berubah menjadi virtual melalui media sosial berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas pemanfaatan media social Facebook sebagai sarana promosi Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari berdasarkan Engagement Rate by Post. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan menggunakan data insight postingan akun Facebook dari 2 Agustus 2023 sampai 9 April 2024. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui survei untuk mengamati akun Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari. Selanjutnya data dianalisis menggunakan persamaan engagement rate by post dari Mackenzie Taylor, Kemudian untuk menginterpretasikan kualitas engagement rate, menggunakan klasifikasi engagement rate value yang diambil dari artikel karangan M. Leander. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas nilai rata-rata engagement rate media social Facebook sebagai sarana promosi berada pada level average/ rata-rata. Fakta ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata engagement rate keseluruhan postingan dari 2 Agustus 2023 sampai 9 April 2024, yaitu, 0,73 % untuk postingan tipe image dan 0,72 % postingan tipe video.

***Kata kunci** : Efektvitas, Facebook, sarana promosi , perpustakaan umum, engagement rate by post.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membantu manusia melakukan banyak hal dengan lebih mudah dan lancar, termasuk mendapatkan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi peluang bagi perpustakaan (Septiyanto, 2023). Perkembangan teknologi ini juga menimbulkan dampak dibidang perpustakaan. Undang- Undang RI No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa "perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka".

Perpustakaan harus menyesuaikan diri dengan meningkatnya kebutuhan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan globalisasi informasi. Mereka juga harus berubah untuk memberikan layanan yang efektif dan tepat sasaran, dengan menyediakan berbagai bentuk informasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Selain itu, perpustakaan harus siap memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan tepat di zaman modern .

Undang- Undang RI No. 43 tahun 2007 pasal 20 menyebutkan bahwa "perpustakaan terdiri

Hak Cipta © 2024, Intan MonalizaYorfa, Diana Maulida Zakiah.

atas, perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus". Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari merupakan salah satu perpustakaan umum, perpustakaan ini beralamat di Jl. Jenderal Sudirman KM 6 Kelurahan Rengas Condong, Muara Bulian. Perpustakaan umum ini menyediakan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya, khususnya masyarakat di daerah Kabupaten Batanghari. "Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi" (Rahayu, L. et.al., 2020).

Teknologi yang ada saat ini sangat membantu Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari dalam hal menyebarkan informasi mengenai apapun, seperti pengenalan koleksi, dokumentasi kegiatan perpustakaan serta pengumuman maupun pengenalan berbagai program dan layanan yang ada di perpustakaan. Terlebih dengan perkembangan media sosial saat ini, sehingga memudahkan perpustakaan untuk memberikan berbagai informasi mengenai perpustakaan dan pengetahuan kepada para pemustaka.

Media sosial telah menjadi kebutuhan penting hampir setiap orang karena sangat penting untuk hampir semua aspek masyarakat modern, seperti mencari informasi, mengirim pesan ke teman, dan berbagi informasi. Menurut Jamaludin, et al. (2022) sosial media adalah platform online yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi satu sama lain. Sosial media memiliki banyak bentuk salah satunya Facebook. Dalam penelitian Statista (2021) menyatakan bahwa Facebook menduduki peringkat pertama media sosial terpopuler dan sering digunakan kemudian di ikuti media sosial Youtube dan WhatsApp di peringkat dua dan tiga. Seperti yang dinyatakan oleh Patel dan Vyas (2019), media sosial memainkan peran penting dalam pembangunan perpustakaan saat ini dan di masa depan.Itu artinya media sosial Facebook dapat dioptimalkan sebagai media promosi perpustakaan.

Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari, melalui account media sosial Facebook nya dapat berbagi informasi koleksi terbaru dan berbagai kegiatan maupun layanan yang dimiliki perpustakaan. Untuk mengurangi jarak antara perpustakaan dan masyarakat, dapat dilakukan acara sosialisasi untuk mempromosikan keberadaan perpustakaan dan layanan yang ditawarkannya kepada masyarakat (Purwanto, 2023). Media sosial merupakan media yang efektif dalam kegiatan promosi di era kemajuan teknologi saat ini. Dengan memanfaatkan media social Facebook, perpustakaan dapat meningkatkan layanan pemustaka. Beberapa tujuan promosi perpustakaan yang dikemukakan oleh Indreriyeni (2020) : Memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai, mendorong minat membaca masyarakat, dan mendorong pemanfaatan koleksi perpustakaan sebaik mungkin. Promosi dapat meningkatkan kesadaran untuk memanfaatkannya

Untuk mengetahui apakah promosi perpustakaan melalui media sosial Facebook tersebut berjalan efektif atau tidak, maka dapat diukur berdasarkan engagement rate nya. Engagement rate adalah metrik yang digunakan untuk menghitung tingkat partisipasi atau tingkat keterlibatan yang diterima oleh sebuah konten atau akun media social dari pemirsanya atau followers (Camilla, 2024). Salah satu cara menghitung rasio engagement rate Facebook adalah Rasio Engagement berdasarkan Postingan/ Engagement Rate by Post (ERP), metode ini menggantikan jangkauan dengan pengikut, yang biasanya merupakan statistik yang lebih dapat diandalkan. Rasio ini akan mengukur interaksi follower terhadap postingan tertentu, dihitung dengan membagi jumlah like, comment and share dengan jumlah total pengikut, dan mengalikan hasilnya dengan 100 untuk mendapatkan persentase.

Hak Cipta © 2024, Intan MonalizaYorfa, Diana Maulida Zakiah.

Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari, dalam melakukan promosi perlu menggunakan media sosial. Hal ini dikarenakan melalui media sosial perpustakaan dapat menjangkau pemustaka lebih luas, selain itu juga mudah diakses dan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Utomo (2022) menyatakan bahwa melalui media sosial informasi dapat dengan mudah dibagikan perpustakaan dengan biaya yang murah. Dengan penggunaan media sosial Facebook dapat mempermudah Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari mempromosikan perpustakaannya. Namun dalam kenyataan nya penggunaannya yang belum maksimal, dikarenakan kurangnya kualitas SDM dalam mengelola akun media sosial Facebook perpustakaan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Nduka et al. (2021) bahwa perpustakaan menghadapi kendala seperti waktu yang terbatas, tenaga yang tidak memadai, dan kurangnya akses ke internet. Saat ini engagement rate Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari masih dilevel kurang baik.

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan media sosial Facebook sebagai media promosi di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari berdasarkan Engagement Rate by Post, dan mengetahui bagaimana respon followers media sosial Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari terhadap konten yang di posting di media social Facebook.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Amelia (2023), metode kuantitatif merupakan penyelidikan sistematis mengenai suatu fenomena dengan pengumpulan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik.Data yang digunakan menggunakan data insight postingan akun Facebook seperti data jumlah *like*, *comment* dan *share* dari 2 Agustus 2023 sampai 9 April 2024. Penelitian ini menggunakan survei untuk mengumpulkan data dalam mengamati akun Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustakawan yang mengelola akun Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari. Untuk menghitung *engagement rate by post* digunakan persamaan Mackenzie Taylor (Taylor, 2019), seperti dibawah ini:

$$ER = \frac{like + comment + share}{total\ number\ of\ follower} \times 100$$

Untuk menghitung rata-rata *engagement rate*, digunakan persamaan :

$$\text{Rata-rata ER} = \frac{\text{Total ER seluruh postingan}}{\text{Total seluruh postingan}}$$

Kemudian untuk menginterpretasikan kualitas *engagement rate*, menggunakan klasifikasi *engagement rate* yang diambil dari artikel karangan M. Leander (2021) sebagai berikut:

Tabel 1. *Engagement rate value*

Engagement Rate	Klasifikasi
<0,5 %	Rendah

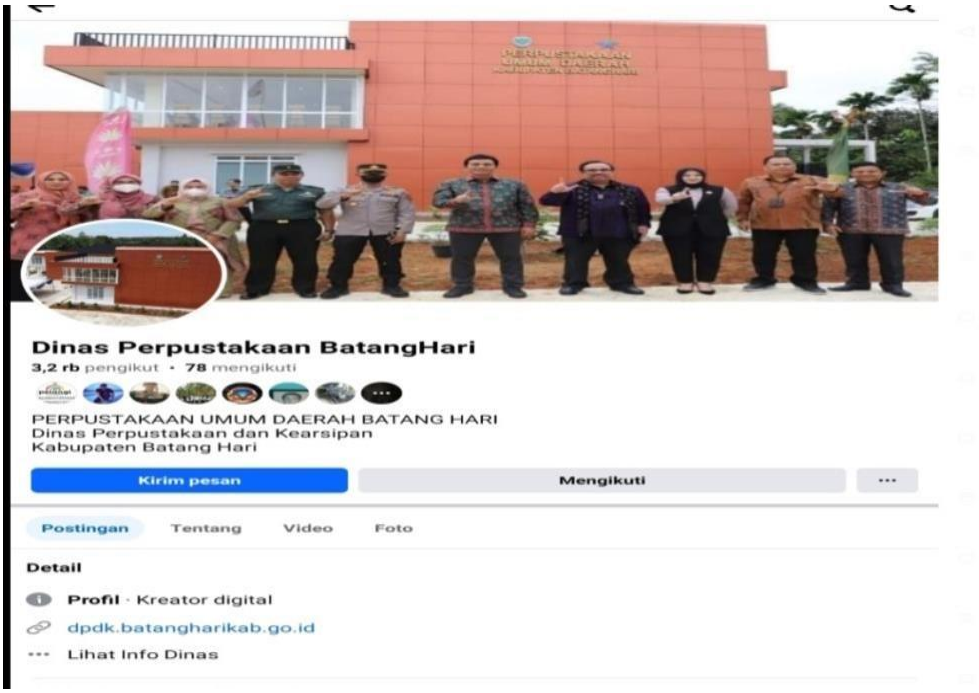
Hak Cipta © 2024, Intan MonalizaYorfa, Diana Maulida Zakiah.

0,5% - 0,99 %	*Avarege/* rata-rata
> 1 %	Baik

(Sumber : https://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples/social-media/facebook-engagementmetrics)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan promosi perpustakaan melalui media sosial Facebook dilakukan dengan cara membuat konten yang berisi berbagai informasi tentang jenis layanan perpustakaan atau pengenalan program perpustakaan, informasi koleksi perputakaan, gerakan berliterasi dan ucapan hari besar, jam layanan, pengumuman, ajakan, serta dokumentasi berbagai kegiatan perpustakaan. Frekuensi postingan media sosial Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari tidak menentu, biasanya perpustakaan meng –*upload* konten-konten pada perayaan hari besar maupun apabila ada kegiatan perpustakaan.



Gambar 1. Tampilan Homepage Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari.
(sumber: https://www.facebook.com/perpustakaan.batanghari.7?mibextid=ZbWKwL)

Gambar 1 merupakan tampilan Homepage Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari memiliki akun resmi Facebook dengan nama @Dinas Perpustakaan BatangHari. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari mulai menggunakan media sosial Facebook sejak tanggal 17 Oktober 2018 dan sudah diikuti sebanyak 3.210 *follower* sampai bulan April 2024. Postingan yang pertama kali yaitu sejak 6 November 2018, mengenai gedung perpustakaan. Tujuan dari penggunaan Facebook tersebut adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten

Hak Cipta © 2024, Intan MonalizaYorfa, Diana Maulida Zakiah.

Batanghari seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta menjangkau target pustaka yang cenderung lebih sering menggunakan media sosial Facebook kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data postingan dari akun media sosial Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari pada bulan Agustus 2023 sampai 9 April 2024 terdapat 14 postingan, dari jumlah tersebut sebanyak 10 postingan menggunakan postingan tipe *image*, dan 4 postingan menggunakan postingan tipe video. Adapun rincian masing-masing tipe postingan tersebut adalah sebagai berikut:

Postingan Tipe *Image*

Pada Agustus 2023 sampai 9 April 2024 konten yang di posting tipe image dengan sepuluh postingan. Jenis posting ini digunakan untuk memposting konten yang berisi informasi tentang dokumentasi kegiatan perpustakaan, pengenalan program perpustakaan dan jenis layanan perpustakaan, ucapan hari besar, serta ajakan gerakan berliterasi.



Gambar 2. Tampilan postingan dengan tipe *image.*
(sumber : https://www.facebook.com/share/p/SQ9cZTrZXbZ3m5te/?mibextid=oFDknk)

Gambar 2 menunjukkan postingan tanggal 11 Maret 2024 di akun Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari tentang gerakan berliterasi yang mendapatkan 66 *like*, 16 komentar, dan 2 kali dibagikan oleh *followers* . Tabel 2 menunjukkan rincian postingan gambar yang diposting dari Agustus 2023 hingga 9 April 2024

Hak Cipta © 2024, Intan MonalizaYorfa, Diana Maulida Zakiah.

Tabel 2. Data rincian postingan dengan tipe image di akun Facebook Dinas Perpustakaan BatangHari dari bulan Agustus 2023 sampai 9 April 2024.

No	Tanggal	*Like*	*Comment*	*Share*	*Engagement Rate (%)*
1	17-08-2023	7	0	0	0,22
2	18-09-2023	19	0	0	0,60
3	28-09-2023	22	2	0	0,75
4	28-09-2023	31	0	1	0,99
5	28-10-2023	2	0	0	0,06
6	08-02-2024	6	0	0	0,18
7	11-03-2024	10	0	0	0,31
8	11-03-2024	66	16	2	2,61
9	11-03-2024	23	1	0	0,74
10	09-04-2024	27	0	0	0,84

(sumber: analisis penulis)

Tabel 2 menunjukkan perhitungan *engagement rate* tipe postingan *image* dari bulan Agustus 2023 sampai 9 April 2024 di akun Facebook Dinas Perpustakaan BatangHari. Berdasarkan data tabel di atas, konten yang diposting pada bulan Agustus 2023 sampai 9 April 2024,yang berisi informasi tentang peringatan hari besar, pengumuman layanan perpustakaan, dokumentasi perpustakaan, informasi pengetahuan, dan ajakan untuk meningkatkan literasi pemustaka. Postingan yang diposting pada 11 Maret 2024 memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi daripada postingan lainnya yang diposting dari Agustus 2023 hingga 9 April 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tipe postingan gambar lebih efektif untuk memposting konten yang berisi informasi pengetahuan dan ajakan untuk meningkatkan literasi pemustaka.

Postingan Tipe Video

Pada bulan Agustus 2023 sampai 9 April 2024, konten yang di posting dengan empat postingan video. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari menggunakan jenis posting ini untuk memposting konten yang berisi dokumentasi kegiatan dan pengenalan program perpustakaan.

Hak Cipta © 2024, Intan MonalizaYorfa, Diana Maulida Zakiah.



Gambar 3. Tampilan postingan di akun Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari dengan tipe video.
(sumber : https://www.facebook.com/share/v/WPeZDxcjcsFTFfRT/?mibextid=oFDknk)

Gambar 3 menunjukkan pada 11 Maret 2024 postingan di akun Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari tentang dokumentasi kegiatan kunjungan dari pemustaka mendapatkan 20 *like*, 276 tayangan, dan 1 kali dibagikan oleh *followers*

Adapun rincian data postingan tipe video yang di posting dari bulan Agustus 2023 sampai 9 April 2024 dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Data rincian postingan dengan tipe video di akun Facebook Dinas Perpustakaan BatangHari dari bulan Agustus 2023 sampai 9 April 2024.

No	Tanggal	*Like*	*Comment*	*Share*	Tayangan	*Engagement Rate %*
1	02-08-2023	16	1	0	180	0,53
2	05-10-2023	20	0	1	277	0,65
3	11-01-2024	5	4	0	110	0,28
4	07-03-2024	42	4	0	335	1,43

(sumber: analisis penulis)

Berdasarkan data tabel di atas, konten dengan tipe postingan video yang diposting pada bulan Agustus 2023 sampai 9 April 2024, yang memuat informasi tentang dokumentasi kegiatan kunjungan dari SD IT Muara Bulian dengan tajuk "Wisata Literasi" di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari memiliki nilai keterlibatan yang lebih tinggi daripada postingan lainnya yang diposting dari Agustus 2023 hingga 9 April 2024, menunjukkan bahwa postingan video lebih cocok untuk menyampaikan informasi tentang dokumentasi kegiatan kunjungan.

Hak Cipta © 2024, Intan MonalizaYorfa, Diana Maulida Zakiah.

Efektivitas penggunaan media sosial Facebook untuk mempromosikan perpustakaan Menurut data yang dikumpulkan dari Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari mulai Agustus 2023 hingga 9 April 2024, tingkat keterlibatan akun media sosial Facebook Perpustakaan masih di bawah rata-rata, dengan nilai keterlibatan 0,5 hingga 0,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa, seperti yang dinyatakan oleh M. Leander (2021), efektivitas penggunaan media sosial Facebook sebagai alat promosi perpustakaan masih rendah.Nilai rata-rata *engagement rate* akun media sosial Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari pada bulan Agustus 2023 sampai 9 April 2024, dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Nilai rata-rata*engagement rate* berdasarkan tipe postingan.

No	Tipe postingan	*Engagement Rate (%*)
1	*Image*	0,73
2	Video	0,72

(sumber: analisis penulis)

Berdasarkan nilai keterlibatan rata-rata dari jenis gambar dan video yang digunakan untuk memposting konten di Facebook dari Agustus 2023 hingga 9 April 2024, konten mengenai informasi pengetahuan ataupun ajakan meningkatkan literasi lebih besar dari pada konten-konten yang diposting lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan konten yang berisi pengetahuan atau ajakan literasi lebih efektif.

Putut et al. (2020) menyatakan bahwa menggunakan media sosial sebagai media promosi lebih efektif, salah satu caranya adalah dengan lebih baik mengelola jenis konten yang akan diposting. Menurut Ulfa et al. (2020), kualitas informasi, frekuensi update, dan tanggapan komentar semua berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat. Agar *engagement rate* Facebook perpustakaan meningkat, pustakawan atau pengelola media sosial diharapkan untuk membuat konten yang berkualitas, konten tersebut dapat berupa gambar, video, atau animasi yang dirancang untuk menarik *followers*, selanjutnya selalu *update* informasi terkait dengan tren yang tengah terjadi, selalu konsisten dan memposting konten secara berkala dan selalu berkomunikasi dengan *followers* atau pemustaka di media sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan analisis penelitian penggunaan media sosial Facebook sebagai sarana promosi di perpustakaan, tingkat keterlibatan media sosial sebagai media promosi berada pada tingkat rata-rata, yang menunjukkan bahwa tingkat kritik masih rendah.Umum Daerah Kabupaten Batanghari dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Keefektifan media sosial Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari sebagai sarana promosi masih dalam klasifikasi rata-rata (*avarage*), hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata kualitas *engagement rate* Facebook pada bulan Agustus 2023 sampai 9 April 2024 yang berada di antara 0,5 % - 0,99 % yaitu, 0,73 % untuk postingan tipe *image* dan 0,72 % postingan tipe video.
2. Persepsi atau penilaian *followers* terhadap konten-konten media sosial Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batangharidinilai cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan, seperti yang ditunjukkan dari nilai rata-rata *engagement rate* Facebook yaitu berada pada 0,5 % - 0,99 %, nilai engagement rate yang diperoleh kurang dari 1%. *Value*

Hak Cipta © 2024, Intan MonalizaYorfa, Diana Maulida Zakiah.

engagement rate sebuah media sosial Facebook termasuk dalam klasifikasi baik apabila nilai *engagement rate nya* >1%, seperti yang dikemukakan oleh M. Leander (2021). Hal ini berarti menunjukkan konten-konten yang di posting Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Batanghari masih perlu perbaikan, perpustakaan diharapkan memperbaiki kualitas konten yang di *posting* kepada *follower* atau pemustaka.

Diharapkan bahwa perpustakaan dapat menciptakan konten-konten yang kreatif tentang informasi dan pengetahuan yang berbasis media sosial untuk menjaga eksistensi mereka sebagai lembaga informasi. Untuk itu para pustakawan atau pengelola perpustakaan khususnya pengelola media sosial Facebook perpustakaan dapat memaksimalkan pemanfaatan media sosial Facebook sebagai sarana promosi perpustakaan dengan cara membuat konten yang berkualitas, konten tersebut dapat berupa gambar, video, atau animasi yang dirancang untuk menarik *follower*, selanjutnya selalu *update* informasi terkait dengan tren yang tengah terjadi, dan selalu berkomunikasi dengan *follower* atau pemustaka di media sosial. Usaha ini diharapkan dapat mencapai kepuasan pengguna layanan informasi.

REFERENSI

Amelia, D. (2023). *Metode penelitian kuantitatif.* Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Retrieved March 22, 2024, from https://eprints.uniskabjm.ac.id/19327/1/Book%20Chapter%20%202024%20Metode%20Penelitian%20Kuantitatif.pdf

Camila. (2024). *Cara menghitung engagement rate Facebook?*. Waalaxy. Retrieved March 21, 2024, from https://blog.waalaxy.com/id/engagement-rate-Facebook-cara-menghitung/.

Inderiyeni. (2020). *Strategi promosi perpustakaan*. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. Retrieved March 22, 2024, from https://dispusip.pekanbaru.go.id/strategi-promosi-perpustakaan/.

Jamaludin, T., AF, G., & RM, HB, Pramudhita, P., et al. (2022). *Pemasaran era kini: Pendekatan berbasis digital*. Media Sains Indonesia. Retrieved March 20, 2024, from https://www.researchgate.net/publication/368392577_Pemasaran_Era_Kini_PendekatanBerbasis_Digital/link/63ef424c51d7af054030c937/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19.

M. Leander. (2021). *Facebook engagement metrics*. Klipfolio. Retrieved March 19, 2024, from https://www.klipfolio.com/resources/kpi-examples/social-media/facebook-engagementmetrics.

Nduka, S. C., Adekanye,. A.E., & Adedokun, T. O. (2021). Usage of social media tools by library and Information professionals (LIPs) in selected academic libraries in South-West, Nigeria. *International Journal of Knowledge Content Development & Technology*, 11(3), 7-27. Retrieved March 22, 2024, from https://journals.sfu.ca/ijkcdt/index.php/ijkcdt/article/view/413.

Patel, M.B. & Vyas, P.R. (2019). Libraries and social media : modern practices and coming opportunities. *International Journal of Information Dissemination and Technology*, 9 (3), 129-131. Doi 10.5958/2249_5576_2019.00027.x. Retrieved March 20, 2024, from https://www.google.com/url?q=https://search.proquest.com/openview/ab4cab0c0ddc0cb1b45c341ffc09a2da/1%3Fpq-origsite%3Dgscholar%26cbl%3D1036413&sa=U&ved=2ahUKEwjvhOC634mGAxVS

Hak Cipta © 2024, Intan MonalizaYorfa, Diana Maulida Zakiah.

ZWwGHR8ZDVYQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw1UduHXbDs7KjkGgV-knq5P.

Purwono. (2023). *Profesi Perpustakaan*. Tangerang: Universitas Terbuka.

Putut, S., & Ayu, M. (2020). Pemanfaatan media sosial instagram pada perpustakaan perguruan tinggi. *Edulib*, 10(1), 1–14. Retrieved March 21, 2024, from https://doi.org/10.17509/EDULIB.V10I1.20984.

Rahayu, L., Anggraeni, R., Sumiati, O., Makariam, L., Permatasari, B. R.(2020). *Pemasaran Jasa Informasi*. Tangerang: Universitas Terbuka.

Septiyanto, T. (2023). *Literasi informasi*. Tangerang: Universitas Terbuka.

Statista. (2021). *Most popular social networks worldwide as of july 2021, ranked by number of active users (in million).* Retrieved March 22, 2024, from https://www.statista.com/statistics/272014/globalsocial-networks-ranked-by-number-of-users.

Taylor, M. (2019). *Instagram Engagement: Everything You Need to Know*. Social bakers. Retrieved March 21, 2024, from https://www.flick.teach/learn/blog/post/instagram-engagement-rate-everything-youneed-to-know.

Ulfa, F.F., Nuraini, R., & Sidki, R. (2020). Pemanfaatan dan partisipasi masyarakat Indonesia terhadap media sosial Perpustakaan Nasional. *Bibliotika*, 4(1), 18-28. Retrieved March 20, 2024, from http://journal2.um.ac.id/index.php/bibliotika/article/view/14753.

Undang- Undang RI No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Retrieved March 19, 2024, from https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/uu/uu-nomor-43-tahun-2007.pdf.

Utomo, T, P. (2022). Optimalisasi media sosial untuk pemasaran perpustakaan perguruan tinggi. *Buletin Perpustakaan* , 5 (1), 99 – 133. Retrieved March 21, 2024, from https://journal.uii.ac.id/Buletin-Perpustakaan/article/download/24369/13823/70462.

Hak Cipta © 2024, Intan MonalizaYorfa, Diana Maulida Zakiah.

Tata Kelola Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Desa Gudang Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang

Jovanscha Qisty Adinda FA[1], Selvi Centia [2], Zhahirah Indrawati Zainuddin[3]
[123] Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jatinangor
e-mail: jovanscha@unpad.ac.id

Abstrak

Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal, seperti di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tata kelola media sosial dalam konteks pedesaan dan bagaimana tata kelola media sosial berdampak pada penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola media sosial di Desa Gudang memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi. Beberapa kelompok masyarakat di desa ini aktif menggunakan platform media sosial untuk berbagi informasi tentang kegiatan sosial, pembangunan, dan kebijakan lokal. Namun, beberapa tantangan terkait tata kelola media sosial juga teridentifikasi, seperti kurangnya literasi digital di kalangan sebagian masyarakat dan potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi digital dan regulasi yang mendukung penggunaan media sosial yang bertanggung jawab di tingkat desa. Studi ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konteks lokal, khususnya peran tata kelola media sosial di Desa Gudang. Makna dari penelitian ini adalah dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan literasi digital dan pengelolaan informasi, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kegunaan media sosial dalam mendukung penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat di tingkat desa berpotensi memberikan landasan bagi pengembangan program.

***Kata kunci**: Tata Kelola, Komunikasi, Media Sosial, Pemerintahan Desa*

PENDAHULUAN

Saat ini fungsi hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pemerintah begitu penting, banyaknya media komunikasi yang saat ini digunakan oleh masyarakat menjadi sebuah tantangan baru guna efektivitas komunikasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah, merujuk pada IDN *Indonesian Millennial Report* 2024 penggunaan internet di hampir seluruh provinsi di Indonesia dapat dikatakan setara. Saat ini penggunaan internet termasuk media sosial juga menjadi alat utama masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dan berita, penggunaan media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai bentuk ruang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan suatu instansi maupun lembaga pemerintah, dalam media sosial masyarakat dapat diajak untuk mengkritisi rancangan kebijakan, program bahkan layanan yang diberikan tanpa harus bertemu langsung ataupun menggunakan waktu yang lama, dan dari respon masyarakat di media sosial tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dari instansi maupun lembaga.

Sesuai dengan amanat dari UU No.6 Tahun 2014 terkait dengan Desa, masyarakat berhak

Hak Cipta © 2024, Jovanscha Qisty Adinda FA, Selvi Centia, Zhahirah Indrawati Zainuddin.

untuk mendapatkan informasi terkait berbagai rencana dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa juga melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemerintah Desa wajib untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh karena itulah media sosial dianggap menjadi salah satu alat yang paling mudah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan desa.

keterbukaan informasi sebagai bentuk dari pelaksanaan *good governance* menjadi sebuah hal tidak asing lagi, informasi yang dibutuhkan masyarakat harus dapat diakses dengan cepat dan akurat guna terciptanya akuntabilitas dan transparansi, diperlukan strategi penguatan aspek

akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa melalui pemanfaatan media sosial. Media sosial dapat dijadikan sebagai saluran informasi utama bagi Pemerintahan Desa untuk menginformasikan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, Dengan penguatan tata kelola media sosial, aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dapat memperkuat aspek akuntabilitas publik pengelolaan dana desa dan peningkatkan pembangunan .

Peningkatan pembangunan tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran serta masyarakat, karena masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan di desa, maka dari itu dibutuhkan sekali peran serta atau pastisipatif masyarakat.

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003:78) adalah “proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehiduapan mereka”.

Turindra (200949) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu: Pertama partispasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakatan, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisiapsi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep mancetered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Dengan partisipasi masyarakat maka pemberdayaan masyarakat dapat tercipta. Partisipasi masyarakat sering dianggap sebagai salah satu komponen utama dalam pemberdayaan. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, mereka merasa memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap hasilnya. Melalui partisipasi juga , masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas mereka. Ini merupakan aspek penting dari pemberdayaan.

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”.

Dengan keterbukaan informasi, masyarakat lebih terdorong untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan sosial. Media sosial memungkinkan mereka untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah atau organisasi non-pemerintah, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam diskusi publik.

Hak Cipta © 2024, Jovanscha Qisty Adinda FA, Selvi Centia, Zhahirah Indrawati Zainuddin.

Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari saat ini memiliki media sosial instagram sebagai salah satu sarana komunikasi, berbeda dengan desa-desa lain yang ada di kecamatan Tanjungsari, Desa Gudang terlihat aktif membagikan berbagai informasi terkait kegiatan dan pelayanannya di media sosial Instagram, terlihat media sosial Desa Gudang sangat interaktif dan informatif, secara berkala pengumuman seperti jadwal posyandu ataupun pelayanan administratif yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gudang tersebut dibagikan melalui content interaktif di dalam media sosial.

ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca atau kolega tentang apa yang dibahas dan disampaikan artikel tersebut. Melalui penelitian yang dilakukan, fokus utamanya adalah menilai sejauh mana upaya tersebut telah mencakup kebutuhan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta tata kelola penggunaan media sosial di desa tersebut, Dalam penelitian ini, kami menggunakan Government Communication Professional Competency Framework sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi upaya komunikasi pemerintah Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari. Kerangka kerja ini mengidentifikasi empat strategi komunikasi yang penting: Insight, Ideas, Implementation and Impact. Kami ingin melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Desa Gudang mencerminkan pengaruh dari setiap tahapan dalam kerangka kerja ini, serta sejauh mana mereka menerapkan amanat dari UU No.6 Tahun 2014 terkait dengan Desa, Ini termasuk hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelayanan pemerintah desa, pemantauan terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, dan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan menggabungkan kerangka kerja komunikasi pemerintah dan amanat hukum dari UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas komunikasi pemerintah di Desa Gudang serta ketaatan mereka terhadap prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa.

METODE

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokan menjadi tiga yaitu sumber data, teknik pengumpulan data dan prosedur pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu data primer itu diperoleh langsung dari lapangan baik hasil pengamatan langsung dan informasi dari subjek penelitian (informan) yang dilakukan bersama Kepala Desa Gudang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data lembaga yang sudah di olah maupun data publikasi, buku, jurnal maupun data dari media masa.

Teknik dan prosedur pengumpulan data yang di lakukan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi literatur.

Wawancara yaitu memberikan sejumlah pertanyaan yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian kepada subjek penelitian yang berada d Desa Gudang. Observasi yaitu melakukan kegiatan pengamatan secara langsung dan tidak langsung yaitu pada medsos milik nya Desa Gudang. Studi Literatur yaitu mempelajari bacaan berbagai sumber tentang konsep dan teori yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan medsos, seperti mengelola, mengawasi dan memanfaatkan media sosial untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Selain itu mempelajari peraturan perundang-undangan, melakukaan analisis terkait artiket yang dipublikasikan dan sumber lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif , dimana penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang menggambarkan kondisi objek penelitian untuk memperoleh temuan penelitian yang ada serta relevan dengan pertanyaan

Hak Cipta © 2024, Jovanscha Qisty Adinda FA, Selvi Centia, Zhahirah Indrawati Zainuddin.

penelitian , yaitu bagaimana rencana dan pelayanan pemerintah desa, pemantauan terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, dan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan bebrapa tahapan , yaitu diantaranya :

- Seleksi data, yaitu memilih data-data yang digunakan yang dianggap relevan dengan kebutuhan analisis data penelitian;
- Reduksi data, yaitu melakukan pemilihan data dan pengurangan data yang di tidak digunakan sehingga melalui proses reduksi, data yang digunakan sebagai bahan analisis merupakan data yang memang relevan dengan pertanyaan, maksu dan tujuan penelitian;
- Intepretasi data, yaitu melakukan analisa dn penafsiran terhadap data-data yang sudah terpiluh dan terseleksi; dan
- Penarikasn kesimpulan, yaitu hasil interprestasi data digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat menjawab pertanyan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola komunikasi melalui media sosial di Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, telah diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai pelaporan kinerja yang dapat disampaikan melalui media sosial, yang sejalan dengan praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Gudang.

Prinsip-prinsip tata kelola yang dijalankan oleh pemerintah desa, yaitu transparansi, responsivitas, dan partisipatif, menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa komunikasi melalui media sosial berjalan dengan baik dan efektif. Mereka secara aktif menyampaikan informasi terkini mengenai program-program pembangunan, kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan berbagai informasi penting lainnya kepada masyarakat melalui platform media sosial yang mereka kelola.

Insight

Dalam tahap Insight, Desa Gudang telah berhasil mendapatkan pemahaman yang akurat dan mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Mereka telah menggunakan wawasan yang mereka peroleh untuk mengidentifikasi audiens target yang relevan dalam hal ini adalah masyarakat Desa Gudang. Dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat, pemerintah desa dapat merencanakan komunikasi yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan dan solusi yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Gudang telah memulai proses komunikasi dengan langkah yang tepat, dengan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang konteks dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari.

Ideas

Pada tahap Ideas, Desa Gudang telah menghasilkan berbagai ide kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat. Mereka telah menggunakan wawasan yang mereka peroleh dari tahap Insight untuk merancang konten yang menarik dan relevan. Ide-ide kreatif ini memungkinkan mereka untuk menciptakan konten-konten yang dapat menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan keterlibatan mereka dengan informasi yang disampaikan. Dengan demikian, Desa Gudang telah menunjukkan kemampuan untuk berpikir kreatif dalam merancang strategi komunikasi mereka, memahami bahwa

Hak Cipta © 2024, Jovanscha Qisty Adinda FA, Selvi Centia, Zhahirah Indrawati Zainuddin.

kebutuhan untuk menyebarkan informasi terkait pelayanan publik menjadi salah satu bahan konten dalam media sosial Desa Gudang adalah langkah awal yang baik. Kreativitas ide yang muncul dalam penyampaian informasi menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk memberikan informasi yang menarik dan relevan bagi masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat antusiasme masyarakat Desa Gudang dalam penggunaan media sosial. Meskipun ide-ide kreatif telah diciptakan, efektivitasnya terbatas karena kurangnya minat dan partisipasi dari masyarakat dalam mengakses dan berinteraksi dengan konten yang disampaikan.

Implementation

Pada tahap Implementasi, Desa Gudang telah melaksanakan rencana komunikasi mereka dengan baik. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana penggunaan media sosial di kalangan masyarakat desa yang masih sangat minim, terutama di kalangan usia 50 tahun ke atas. Sebagian besar masyarakat desa yang masih membutuhkan informasi mengenai pelayanan di Desa Gudang rata-rata berumur lanjut. Oleh karena itu, cara yang efektif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa masih terlihat dalam bentuk metode konvensional. Salah satu metode konvensional yang digunakan adalah pengumuman di tempat ibadah. Tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan pura merupakan pusat kegiatan masyarakat di mana banyak warga berkumpul secara rutin. Menggunakan tempat-tempat ini sebagai saluran informasi memungkinkan pesan-pesan penting mengenai pelayanan desa disampaikan secara langsung dan didengar oleh banyak orang.

Selain itu, menyampaikan informasi melalui RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) setempat juga merupakan metode yang sangat efektif. RT dan RW memiliki struktur organisasi yang sudah mapan dan dikenal baik oleh warga. Informasi yang disampaikan melalui ketua RT dan RW cenderung lebih dipercaya dan diikuti oleh warga, karena mereka memiliki hubungan yang dekat dan saling mengenal. Metode lain yang juga efektif adalah himbauan dari warga ke warga. Dalam lingkungan desa yang erat, komunikasi antar warga sangat penting. Mengajak warga yang lebih aktif dan memiliki pengaruh di komunitas untuk menyebarkan informasi kepada tetangga mereka dapat memastikan bahwa pesan-pesan penting mencapai semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang terjangkau oleh media sosial.

Impact

Pada tahap Impact, Desa Gudang telah berhasil mencapai dampak yang positif melalui upaya komunikasi mereka. Mereka telah melihat peningkatan dalam keterlibatan masyarakat dengan informasi yang disampaikan, serta peningkatan partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan sosial di desa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya komunikasi Desa Gudang telah berhasil mencapai tujuan mereka untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Namun, dampak dari penggunaan media sosial masih dirasa minim. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat penggunaan media sosial di kalangan masyarakat Desa Gudang, terutama di antara kelompok usia lanjut. Meskipun media sosial memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan komunikasi dan melibatkan lebih banyak warga, kenyataannya adalah sebagian besar masyarakat desa masih mengandalkan metode komunikasi yang lebih tradisional.

Hak Cipta © 2024, Jovanscha Qisty Adinda FA, Selvi Centia, Zhahirah Indrawati Zainuddin.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa saat ini masih didominasi oleh cara-cara yang cukup tradisional, seperti melalui pengumuman di tempat ibadah, penyampaian informasi melalui RT dan RW, serta himbauan dari warga ke warga. Meskipun metode-metode ini telah terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat, terutama yang berusia lanjut, ada kebutuhan untuk terus mencari cara-cara inovatif guna meningkatkan penggunaan media sosial.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Desa Gudang telah menggunakan Government Communication Professional Competency Framework dengan baik, terdapat beberapa area yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dalam framework tersebut, tahap implementasi menjadi fokus utama, tetapi efektivitas penyebaran informasi masih menjadi perhatian. Keterbatasan akses masyarakat terhadap media sosial Desa Gudang menjadi hambatan utama dalam menyebarkan informasi. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kehadiran mereka di platform online, namun masih ada sebagian besar masyarakat yang lebih responsif terhadap pengumuman langsung dan tradisional. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat diakses oleh sebanyak mungkin masyarakat. Adapun saran yang peneliti sampaikan terkait dengan kesimpulan yang telah dipaparkan adalah

- Komitmen terhadap Keterbukaan: Desa Gudang perlu memperkuat komitmen mereka terhadap keterbukaan dan aksesibilitas informasi. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan berbagai saluran komunikasi yang berbeda, termasuk pengumuman langsung, media sosial, dan portal online, untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki opsi untuk mengakses informasi sesuai preferensi mereka.
- Edukasi dan Pelatihan: Pemerintah desa dapat mengadakan program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat tentang penggunaan media sosial dan manfaatnya dalam mendapatkan informasi. Dengan meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam jumlah orang yang mengakses media sosial desa.
- Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Desa Gudang dapat menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, seperti organisasi non-pemerintah atau perusahaan lokal, untuk meningkatkan visibilitas media sosial mereka. Ini bisa dilakukan melalui promosi bersama atau kampanye kolaboratif untuk menarik lebih banyak pengikut dan pengguna aktif.
- Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat: Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lokal atau influencer yang memiliki pengaruh di komunitas dapat membantu meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap penggunaan media sosial desa.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Desa Gudang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi mereka dan memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan mencapai sebanyak mungkin masyarakat.

Hak Cipta © 2024, Jovanscha Qisty Adinda FA, Selvi Centia, Zhahirah Indrawati Zainuddin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari atas kesempatannya meneliti terkait pembahasan ini.

REFERENSI

Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka. Cipta. Jakarta.

Bokau, I. N. (2013). Peranan Komunikasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Boyong Atas (Suatu Studi Peranan Kepala Desa). Jurnal Acta Diurna, 2(3), 12. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/1916

Government Communication Service UK. (2016). Government Communication Professional Competency Framework. February, 1–24. https://3x7ip91ron4ju9ehf2unqrm1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/Government-Communications-Professional-Competency-Framework.pdf

Institute, I. R. (2024). Indonesia Millennial Report. IDN Research Institute. 1-104.

PERMENPANRB. (2012). Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012, 1–23.

Ulber Silalahi. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik, 3(*1), 36–39.

Hak Cipta © 2024, Jovanscha Qisty Adinda FA, Selvi Centia, Zhahirah Indrawati Zainuddin.

Popularitas UKM - Eco Print Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Penciptaan Keseimbangan Lingkungan

Firman Karim[1], Siti Samsiyah[2]
[1,2] Universitas Terbuka , Jl. Raya Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten
e-mail: firmank@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Pelestarian lingkungan menjadi tema utama saat ini dalam pembangunan di semua sektor. Kerusakan alam yang semakin mengkhawatirkan mengancam seluruh komponen kehidupan. Penelitian dengan tema Popularitas UKM - Eco Print Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Penciptaan Keseimbangan Lingkungan, bertujuan untuk mendeskripsikan semakin populernya eco print di lingkup ukm yg bergerak di sektor tekstil. Masyarakat mulai menyadari kerusakan lingkungan yang semakin parah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, data primer dari interview dengan beberapa ukm yang bergerak di sektor eco print. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tercetak dan elektronik yang membahas mengenai manajemen, kebijakan dan implementasi berbagai aspek yang berkaitan dengan eco - print serta dampaknya yang positif bagi lingkungan. Dari data yang dihimpun, diklasifikasikan dan diolah menghasilkan temuan bahwa popularitas eco print pada sektor tekstil diminati oleh ukm selain bahan baku bisa diperoleh di lingkungannya juga limbah pewarnaan tekstil ini tidak merusak lingkungan. Dengan teknik pewarnaan dan cetak eco print memiliki karakter kuat pada motif kain dan hasil produksi di tiap daerah dapat beragam. Dengan peningkatan ketrampilan cetak dan pewarnaan yang intens maka produksi kain eco print dapat menciptakan kemandirian ekonomi di masyarakat.
***Kata Kunci** : eco - print, usaha kecil menengah (ukm), kemandirian perekonomian Masyarakat*

PENDAHULUAN

Usaha kecil menengah atau dikenal dengan UKM merupakan kewiraswastaan yang banyak ditemui di Masyarakat. Keberadaan UKM ini juga berperan penting dalam menjaga ketahanan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kemerosotan pertumbuhan ekonomi beberapa waktu lalu hingga saat ini jenis usaha inilah yang paling stabil pertumbuhannya. Dengan jumlah UKM yang banyak terdapat di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten .kota bahkan di propinsi sangat berpotensi untuk membantu ketahanan perekonomian masyarakat. UKM di setiap daerah banyak jumlahnya apabila keberadaan UKM ini diorganisir dengan baik maka akan sangat membantu perekonomian kerakyatan. Jika diibaratkan sebuah jaringan maka anggota jaringan berupa sub - sub sistem yang unitnya kecil banyak jumlahnya dan sangat produktif. Namun demikian apabila UKM tidak dibantu oleh regulasi dari pemerintah dan mitra lainnya maka usaha kecil menegah ini tidak akan dapat berkembang, dari sisi manajemen, kualitas produk dan keberagaman produk yang dijual. Peran pemerintah dalam pengembangan UKM sangat penting melalui regulasi yang ada maka UKM dapat dibantu dari berbagai sisi diantaranya

1. pendanaan
2. penjualan produk
3. pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas produksi dan keanekaragaman jenis produk yang dijual.

Hak Cipta © 2024, Firman Karim, Siti Samsiyah.

Melalui berbagai keikutsertaan dari pemerintah inilah UKM dapat berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja informal yang berada di sekitarnya. UKM yang berkembang di masyarakat beragam, selain jenis UKM bertambah banyak juga dalam hal pengelolaannya. Misalnya UKM jenis tekstil, UKM jenis ini banyak dijumpai di berbagai daerah. Dari tekstil yang memfokuskan pada bahan tradisional, maupun tekstil yang diproduksi oleh cetak mesin atau printing. Seiring perkembangan teknologi yang ada dan semakin banyaknya sektor di masyarakat yang memanfaatkan teknologi maka dampak lain dari pemanfaatan teknologi inipun juga ada yakni limbah. Dimana limbah dari berbagai kegiatan utamanya dari hasil produksi tekstil ini volumenya sangat besar. Apabila tidak dicegah dengan berbagai upaya dalam meminimalisasi produksi limbah tekstil maka akan ditemui banyak polutan yang mengalir di sungai, tanah yang kering yang diakibatkan pembuangan polutan di media tanah. Dari kondisi yang ada saat ini di masyarakat ada sebagian UKM yang telah mengurai limbahnya menjadi ramah lingkungan namun banyak juga UKM tekstil yang membuang limbahnya tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Saat ini pelestarian lingkungan telah menjadi masalah utama di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Dengan semakin rusaknya lingkungan yang ada saat ini, berbagai pihak pemerintah maupun swasta terus berupaya mengedukasi masyarakat dalam pembuangan limbah khususnya limbah produk tekstil. Dengan semakin rusaknya lingkungan banyak diantara masyarakat Indonesia telah mengembangkan produksi tekstilnya yang sejak diciptakan telah ramah lingkungan , yakni produk tekstil yang menggunakan materi ramah lingkungan untuk memproduksi tekstilnya. *Eco print* – produk ini mulai populer di masyarakat karena selain desainnya yang khas, juga tidak ada dampak terhadap lingkungan karena dari pewarnaan tekstil, desain atau corak kain seluruhnya menggunakan bahan yang alami, diantaranya bahan kayu – kayuan, daun dan akar tanaman. Dengan kemajuan teknologi saat ini maka sosialisasi/penyebarluasan *eco -print* di masyarakat juga lebih mudah. Berikut ini adalah contoh motif tekstil yang diperoleh dari bahan – bahan ramah lingkungan



Hak Cipta © 2024, Firman Karim, Siti Samsiyah.





(sumber : kumparan.com, Highlight.ID)

Pada ilustrasi produk kain ramah lingkungan terlihat bahan yang digunakan berupa tanaman yang berada di lingkungan sendiri. Bahan yang mudah diperoleh, dan tidak merusak lingkungan setelah menjadi limbah. Dengan mencermati dari berbagai sumber referensi tercetak mengenai desain *eco- print* yang bergam dan memiliki karakteristik khusus ini maka *eco – print* dapat dijadikan sebagai pengembangan UKM tekstil terkini yang populer untuk meningkatkan kemandirian perekonomian di masyarakat, karena bahan utamanya mudah diperoleh di lingkungan sekitar dan limbahnya tidak berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

Bagaimanakah potensi produk *eco – print* menjadi pilihan masyarakat yang bergerak di sektor UKM tekstil yang pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan tidak menimbulkan dampak negatif berupa polutan yang dapat merusak lingkungan ?

METODE

Penelitian Popularias UKM – *Eco Print* Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat dan Penciptaan Keseimbangan Lingkungan bertujuan untuk mendeskripsikan *eco print* sebagai model desain bahan tekstil ramah lingkungan yang semakin populer dan banyak digunakan oleh masyarakat terutama usaha kecil menengah dalam memproduksi kain di daerahnya. Penelitian kualitatif ini selain memperoleh data primer dari masyarakat yang terlibat langsung menerapkan *eco print* pada produksinya juga data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari sumber cetak dan elektronik yang sesuai dengan tujuan

Hak Cipta © 2024, Firman Karim, Siti Samsiyah.

penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan saat ini sudah tinggi, sehingga pelaku usaha tekstil cenderung memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Hal ini tercermin dari pemanfaatan bahan ramah lingkungan oleh pelaku UKM untuk membuat produk kerajinan yang berbahan dasar kain. *Eco print* yang dimaknai sebagai produksi kain termasuk pewarnaan kain yang ramah lingkungan ini dapat mengambil bahan – bahan yang terdapat di lingkungan / pelaku UKM.

Produk *eco print* ini juga sudah banyak ditemui diluar wilayah negara Indonesia yang artinya hal ini bukanlah ide baru. Bahan yang digunakan pun menggunakan material dari alam yang ada di lingkungannya seperti : daun maple, daun indigo, dan daun eucalyptus. Dari bahan – bahan alami ini diproduksi kain-kain tradisional yang ramah lingkungan atau tanpa penghasil limbah. Dan mampu diekspor ke beberapa negara.

Untuk produk eco print di Indonesia lebih menonjolkan flora yang ada di alam Indonesia. Adapun wilayah yang memproduksi eco print dari data yang diperoleh dari berbagai sumber diantaranya: Jogjakarta, Jatim, Jateng, Palembang, Bali, dan daerah lainnya di tanah air. Dengan semakin banyaknya UKM yang bergerak di bidang tekstil yang menggunaan bahan – bahan ramah lingkungan maka minimalisasi volume limbah produk tekstil dapat terealisasi.

Produk eco print ini oleh UKM telah diproduksi untuk sektor fashion dengan varian pakaian, scraft, tas, dan peralatan rumah tangga yang lain. Apabila *eco print* diidentikkan kategori batik maka 10 propinsi berikut ini berpotensi berkontribusi pada pengurangan kerusakan lingkungan yang diakibatkan limbah produksi tekstl.



(GoodStats data produsen batik)

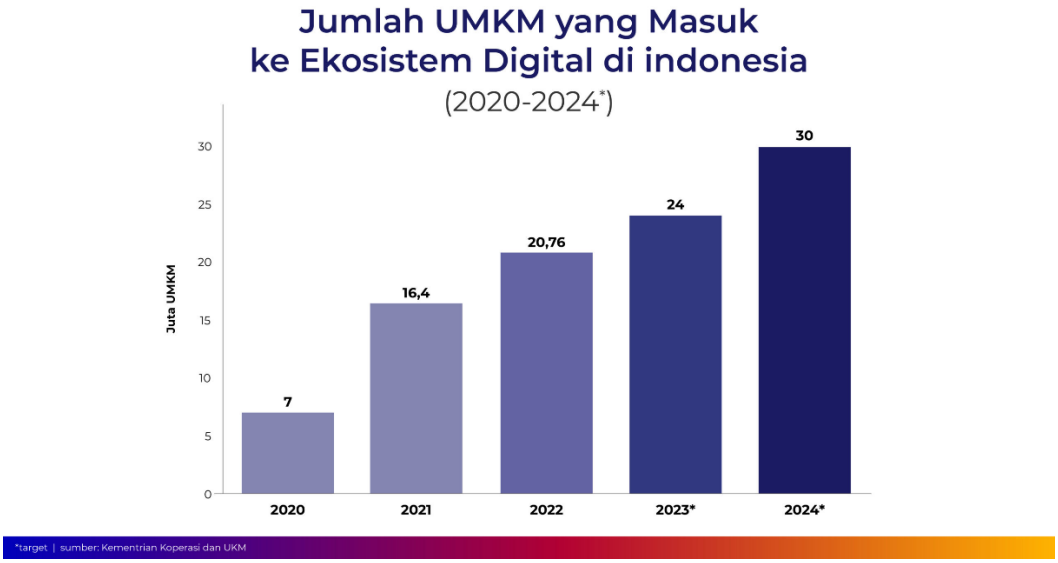
Hak Cipta © 2024, Firman Karim, Siti Samsiyah.

Kesepuluh propinsi ini adalah sebagai berikut (diurutkan berdasarkan lokasi propinsi)
1.Sumatera barat
2.Jambi
3,DKI Jakarta
4.Kalimantan Selatan
5.Jawa Timur
6.Bali
7. D.I Jogjakarta
8.Jawa Tengah
9. Jawa barat
10. Banten

Potensi yang besar dalam hal pengurangan dampak negatif lingkungan terutama untuk pengolahan tekstil batik yang menghasilkan limbah.

Dari berbagai produk yang dihasilkan tersebut, dan dengan keunikan motif batik yang diperoleh khas tumbuhan yang ada di alam Indonesia, akan menambah aksen kekayaan nusantara sekaligus memperkenalkan keberagaman tanaman yang diujudkan pada motif kain. Melalui teknik yang sederhana sekalipun akan dapat menghasilkan desain kain yang menarik, natural dan tidak merusak lingkungan.

Sebagai realisasi dari produksi *eco print*, dan diperlukannya pemasaran produk yang ramah lingkungan yang dapat dikenal oleh masyarakat luas, dan pada akhirnya berdampak pada nilai penjualan produk yang meningkat maka UKM eco -print perlu mensosialisasikan produknya melalui platform digital. Berikut ini adalah ilustrasi UMKM yang masuk ke ekosistem digital sepanjang tahun 2020 – 2024, data ini diperoleh dari Kadin.



(*https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/*)

Hak Cipta © 2024, Firman Karim, Siti Samsiyah.

Dengan melihat jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital bisa dipastikan akselerasi produk yang ramah lingkungan ini dikenal oleh masyarakat yang akhirya masyarakat akan memanfaatkannya.

Produk dari bahan ramah lingkungan ini dapat juga bersaing dengan pasar global dengan motif yang khas, pewarnaan yang eksklusif akan mampu menyerap daya beli internasional.

Dengan semakin banyaknya UKM yang memiliki daya saing dalam produksi eco print ini selain memiliki nilai jual yang menjajikan juga dapat membantu memandirikan ekonomi masyarakat tanpa harus merusak alam. Dengan kerjasama dari semua pihak, pemerintah, pelaku UKM eco- print, juga pihak yang terlibat dalam produksi tekstil eco-print maka sektor kewiraswastaan jenis produksi tekstil ramah lingkungan dapat terus meningkat jumlahnya. Data yang diperoleh dari Direktori Industri Batik Sekala besar dan sedang tahun 2021 (208 pelaku usaha) Industri batik (2.951). Apabila jumlah pelaku usaha batik dalam skala besar, sedang dan UKM dijumlahkan maka sangat besar potensi produksi tekstil ramah lingkungan yang mampu meningkatkan perekonomian secara nasional, maupun individu yang berpotensi juga melestarikan lingkungan yang bersih. Sedangkan mengenai produk ekspor tekstil Indonesia (2019 – 2021) mencapai 100 Perusahaan dengan berbagai produk berbahan dasar tekstil termasuk tekstil batik. Jumlah tersebut masih perlu dikembangkan lagi utamanya peningkatan tekstil eco-print sebagai tekstil andalan Di Indonesia, karena negara kita kaya flora yang hampir terdapat di semua wilayah.

KESIMPULAN

Sebagai negara tropis yang kaya tumbuhan beranekaragam yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, kewiraswastaan eco-print perlu dikembangkan. Karena realita di masyarakat saat ini eco-print telah banyak diproduksi oleh masyarakat. Dari sumber data yang diperoleh usaha eco-print ini belum diproduksi dalam skala besar dan dalam volume yang besar sekelas produksi oleh indusri. Dengan upaya kerjasama dari berbagai pihak baik pelaku UKM eco-print, pemerintah, pihak lain yang berkompeten mampu meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi tektil eco-print ini, di sisi lain dapat memandirikan perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan ekspor tekstil. Dampak positif lain dari produksi tekstil eco-print adalah pelestarian lingkungan karena produk yang dihasilkan tidak merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Suhardi, Yusuf. 2011. Kewirausahaan. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia

Sari, Ratna Chandra dan Prof, Mahfud Sholihin. 2022. Etika Bisnis Di Era Teknologi Digital .Jogjakarta : Andi Offset

Uskara, Amir. 2021. UMKM Adalah Kunci (Membangitkan Sektor UMKM Untuk Kemajuan Ekonomi Indonesia. Jakarta Selatan : Graha Pena

Y Anni Aryani1, Isna Putri Rahmawati2*, An Nurrahmawati3, Payamta4, Taufiq Arifin5 1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. Diversifikasi Produk Batik Ecoprint pada Masyarakat Desa Pokak. Kabupaten Klaten. JAMALI - Jurnal Abdimas Madani dan Lestari. Vol. 04, Issue. 01, Maret 2022, Hal 9-16p-ISSN: 2798-0227 | e-ISSN: 2686-097X . https://journal.uii.ac.id/JAMALI

Kumparan. Com

Highlight.ID

(GoodStats akses 10 jui 2024)

Hak Cipta © 2024, Firman Karim, Siti Samsiyah.

https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/

Asis, A. 2021. Pewarnaan Kain Sutera dari Berbagai Jenis Tumbuhan dengan Teknik Ecoprint. Skripsi. Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Hikmah, A. R., & Retnasari, D. 2020. Ecoprint sebagai Alternatif Peluang Usaha Fashion yang Ramah Lingkungan.

Husna, F. 2016. Eksplorasi Teknik Eco Dyeing dengan Tanaman sebagai Pewarna. E-Proceeding of Art & Design, 3(2), 280–293.

Tresnarupi, R. N., & Hendrawan, A. 2019. Penerapan Teknik Ecoprint pada Busana dengan Mengadaptasi Tema Bohemian. E-Proceeding of Art & Design, 6(2), 1954–1960.

Dwita Anja Asmara dan Sarasati Meilina. 2020. Penerapan Teknik Ecoprint pada Dedaunan Menjadi Produk Bernilai Jual. Jurnal Pengabdian Seni Vol. 1 No. 2.

Fabio Ricardo Toreh. 2020. Implementasi Teknik Ecoprinting Dalam Pemanfaatan Limbah Organik di Pasar Bunga Kayoon. MODA. Vol. 2 No. 1.

Trias Setyowati, F. N. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Pengrajin Batik Eco Print Yang Berdaya Saing Dimasa New Normal Covid 19. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks, 112-122

KRJogya. (2021, 8 3). KKN-PPM UMY Optimalkan Kemampuan Ecoprint UMKM Sekaron. Retrieved from https://www.krjogja.com: https://www.krjogja.com/pendidikan/pengabdian-umy/kknppm-umy-optimalkan-kemampuan-ecoprint-umkm-sekaron/

Hak Cipta © 2024, Firman Karim, Siti Samsiyah.

Transformasi Praktik Pengelolaan Arsip Dinamis melalui Aplikasi Srikandi Dinas Perpustakaan dan Arsip Purworejo: Studi Kualitatif Efek Impelentasi pada Efesiensi dan Persepsi Pengguna.

Masrurotul Fadilah[1], Purwanto Putra[2]
[1] Mahasiswa Program Studi D-IV, FISIP, Universitas Terbuka
[2] Dosen Pembimbing Universitas Terbuka

e-mail: Berlianlian483@gmail.com, purwanto.putra@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Arsip dinamis adalah jenis arsip yang masih aktif digunakan dalam kegiatan operasional sehari hari di lembaga atau organisasi. Arsip ini mencakup dokumen yang masih sering diakses, diubah, atau diperbarui karena relevansinya dengan proses bisnis atau tugas tugas yang sedang berjalan. Untuk memaksimalkan dalam pengelolaan maka dibutuhkan sebuah alat guma untuk mempermudah pekerjaan para pegawai dan alat bantu ini bernama aplikasi SRIKANDI.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi dan persepsi pengguna aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) terhadap esisensi, keamanan, dan aksesibilitas pengelolaan arsip dinamis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo. Metodologi penelitian melibatkan teknik wawancara dengan penggunaan utama aplikasi, observasi langsung terhadap proses pengelolaan arsip, dan analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur kearsipan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan aplikasi SRIKANDI secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomasisasi proses dan penggurangan pengunaaan kertas, memperkuat keamanan data dengan fitur control yang bagus, serta meningkatkan aksesibilitas arsip melalui fitur pencarian dan akses online. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan system kearsipan digital dan pemahaman mengenai implementasi teknologi dalam manajemen informasi di organisasi.

***Kata kunci**: Aplikasi srikandi, Arsip, Pengelolaan*

PENDAHULUAN

Masyarakat selalu membutuhkan catatan dan catatan atas segala aktivitas yang dilakukannya sebagai alat pengingat untuk keperluan administratif, hukum, atau lainnya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa arsip sangat diperlukan dimanapun aktivitas manusia berlangsung. (Basuki, 2017). Kesamaan yang dimiliki semua organisasi adalah mereka membuat arsip sebagai bagian dari aktivitas manajemennya. Karena keberadaan arsip sangatlah penting bagi organisasi. Selain sebagai tempat penyimpanan, arsip juga dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan aset dan sebagai tandingan dalam pengambilan kebijakan(Putri & Setyawan, 2020). Umumnya sebuah organisasi akan memiliki catatan atau dokumen, surat menyurat, formulir yang hal itu akan tersimpan sebagai arsip yang nantinya akan berguna di masa akan mendatang, karena yang seperti kita ketahui bahwasanya arsip memiliki peran dan ber-nilai guna untuk hukum, historis, sejarah dan nilai kebuktian, serta nilai primer dan sekunder. Yang diperkuat dengan pendapat Drs the Liang Gie dalam buku modul Administrasi perkantoran yang ditulis oleh halimah Beliau mengungkapkanbahwa arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis agar dimasa mendatang menjadi bukti dan penyelamat dan disimpan

Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

dengan baik agar mudah ditemukan bila diperlukan (Halimah, 2020).

Arsip dibedakan menurut fungsinya menjadi dua golongan yaitu arsip dinamis dan arsip statis. (Sumrahyadi, 2019) Menjelaskan secara singkatnya Arsip dinamis adalah arsip yang dapat digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Arsip statis tidak lagi digunakan untuk pengelolaan organisasi penciptanya, tetapi dapat dimanfaatkan oleh pengguna dan generasi mendatang untuk tujuan pendidikan dan penelitian.

Pada penelitian ini akan banyak membahas tentang organisasi yang bersingungan dengan Arsip dinamis, di dalam organisasi dapat dikatakan baik apabila organisasi tersebut dapat menata dokumen catatan atau pun surat surat yang masuk dan keluar dengan baik, begitu juga dengan yang dikatakan oleh pratiwi dan kawan kawan yang mengatakan "pengelolaan arsip dinamis yang baik dan teratur tidak hanya membantu melindungi arsip, tetapi juga meningkatkan efesiensi operasional organisasi atau instansi. Pengelolaan arsip dinamis dengan baik juga merupakan bukti bahwa organisasi tersebut terkelola atau terurus dengan baik dan dilihat sebagai bagian yang integral dengan kegiatan organisasi. Dalam muka public, arsip merupakan dasar bagi konsep sebuah demokrasi. Di dalam rekaman informasi mendasari perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan hukum, serta perlakuan yang adil dan setara untuk setiap warga. Warga negara mengharapkan pemerintah dapat mempertahankan bukti dokumen yang handal dan akurat dari semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah". (Pratiwi et al., 2022).

Selain itu penataan arsip yang baik dapat membantu para ASN ketika akan melakukan pemusnahan seperti yang dikatakan oleh (Saptorina&sari, 2023) Fenomena situasi pengelolaan kearsipan yang terjadi pada instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan selama ini terdiri dari dua situasi. Yang pertama adalah hubungan antara arsip dengan status arsip yang diselenggarakan menurut sistem dan aturan kearsipan. Evaluasi arsip dilakukan secara berkala dan nilai guna serta masa retensi (durasi) dimasukkan ke dalam rencana pelestarian arsip sebagai sistem pengelolaan arsip, serta penyusutan status arsip baik tradisional maupun yang dikelola secara konvensional sebagai dasar penyusutan. Karena sistem dan aturan pengarsipan tidak terorganisir, evaluasi terhadap arsip hanya dapat dilakukan jika arsip diorganisasikan baik secara fisik maupun informasi.

Pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan arsip, penggunaan, pemeliharaan arsip, serta penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dinamis pada berbagai lembaga, instansi, perguruan tinggi dilakukan dalam system kearsipan nasional. Yang ditegaskan oleh pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No 43 tahun 2009 dalam jurnalnya (Laili, 2014)menerangkan bahwa pengelolaan arsip dinamis ini mencakup: penciptaan arsip, penggunaan, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.

Instansi pemerintah umunya melayani kepentingan public dan di antaranya dengan pengelolaan arsip dinamis sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan, dan secara tidak sadar di instansi ini di haruskan bertindak secara tepat dan akurat (Fathurrahman, 2018).

Dalam kesempatan ini peneliti melakukan terjun lapangan ke kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo atau yang di singkat dengan DINPUSIP guna untuk meneliti sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau yang di singkat dengan (SRIKANDI). SRIKANDI ini adalah salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan administrasi internal antar Instansi. Peluncuran aplikasi ini dilakukan oleh Bupati Purworejo untuk seluruh Instansi yang ada di Kabupaten purworejo, yang mana

Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

dalam Instruksi Bupati Purworejo tersebut berisi keputusan penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis yang terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024. Yang diperkuat dengan surat INSTRUKSI BUPATI PURWOREJO.



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI PURWOREJO
NOMOR 000.5.1 / 16881 / 2023
TENTANG
PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi yang terekam dapat disimpan sebagai bukti akuntabilitas dan memori kolektif kabupaten, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo
3. Inspektur Kabupaten Purworejo
4. Kepala Badan/Dinas/Camat se-Kabupaten Purworejo

Untuk :
KESATU : Menerapkan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024;
KEDUA : Menerapkan aplikasi SRIKANDI secara konsisten dan berkesinambungan;
KETIGA : Menghentikan penggunaan aplikasi SIKD paling lambat pada Bulan Juni 2024 dikarenakan sudah menggunakan Aplikasi SRIKANDI.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2023
Bupati Purworejo,

Hasuti

Gambar 1. Surat Instruksi Bupati Purworejo atas penerapan Aplikasi SRIKANDI.
(sumber: Dinpusip Kabupaten Purworejo, Tahun 2024)

Aplikasi Srikandi merupakan aplikasi yang dirancang untuk proses distribusi dokumen dan penyimpanan digital dokumen. Aplikasi Srikandi Memudahkan pendistribusian dokumen berupa surat tanpa kita harus mengantarkan surat tersebut dalam pendistribusian dokumen-

Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

dokumen tersebut. Bisa dikatakan untuk menghemat waktu(Bahari & Frinaldi, 2023). Fungsi Aplikasi SRIKANDI ini sangat memudahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan karena dari yang di katakana oleh Bahari dan Frinaldi aplikasi ini dapat mempermudah dan menyingkat waktu bila sewaktu waktu akan mengirim surat karena tidak lagi perlu berjalan jauh untuk mengantar surat.Tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dokumen tetapi berfungsi juga sebagai penyimpanan dokumen secara digital, yang dikelompokan berdasarkan kode klasifikasi kearsipan, serta mengelompokan berdasarkan unsur musnah atau permanen atau waktu retensi.

Tentunya di dalam menjalankan aplikasi ini memiliki tantangan tersendiri serta kesulitan yang ada. Dalam hal ini peneliti akan mengulik atas permasalahan yang terjadi di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo berikut ini adalah hal yang akan peneliti bahas dalam Karya Ilmiah:

1. Bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi SRIKANDI terhadap pengelolaan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana persepsi pengguna terhadap penggunaan aplikasi ini dalam konteks pengelolaan arsip dinamis?

METODE

Data Kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kata-kata, karakter yang berwujud pertananyaan dan kategori. Metode yang digunakan dalam kesempatan ini adalah metode penelitan kualitatif. Demikian Moleong berpendapat dalam jurnal yang dibuat oleh Dasnoer et al. Penelitian Kualitatif mengacu pada pemahaman holistic terhadap fenomena yang berkaitan dengan apa yang dialami subjek penelitian, seperti tindakan, persepsi, motivasi, tindakan. Melalui deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa yang bertujuan untuk riset. Data yang dikumpulkan yaitu melalui wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya seperti artikel, majalah, buku dan surat kabar(Dasnoer et al., 2023). Untuk pengambilan data saya terfokuskan dengan 3 cara berikut ini.

a. Teknik Wawancara: Untuk mengumpulkan data dari partisipan menegnai topic yang di bahas saya mengunakan teknik wawancara. Wawancara Sebuah proses komunikasi dua arah di mana seorang pewawancara mengajukan pertanyaan kepada seorang atau lebih responden untuk mengumpulkan informasi. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tidak bias diperoleh melalui metode lain, seperti survey atau observasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ibu Rosa Delima Nilakusum Wardani Penata Tk III/d Arsiparis Ahli Muda beliau adalah salah satu ASN Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang beralamatkan di Sindurjan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, yang bekerja selama 24 tahun. Beliau adalah pemegang UK1 kabuapten Purworejo yaitu Unit Kearsipan Instansi di Aplikasi SRIKANDI. Wawancara ini dilakukan selama 2 hari yaitu terhitung sajak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2024. Diharapkan dari wawancara ini adalah memperolehnya data yang akurat dengan apa yang dibutuhkan.
b. Teknik Observasi: Untuk selanjutnya untuk mengumpulkan dengan observasi. Oservasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengmatai subjek atau fenomena dalam lingkungan alaminya tanpa menganggu atau mempengaruhinya. Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan langsung. Observasi ini dilakukan secara

Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

langsung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Berharap dengan observasi ini dapat melengkapi data yang ada.

c. Teknik Dokumentasi: Dokumentasi adalah proses pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi atau data yang telah dikumpulkan dalam berbafgai bentuk untuk keperluan refrensi, analisis, atau pelaporan. Dengan dokumentasi ini dapat membantu dan memperkuat data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya adalah Hasil dan Pembahasan, sebelum memasuki pembahasan dan hasilnya, Peneliti sedikit memaparkan tentang kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan.

Setelah melewati beberapa amandemen perubahan akhirnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini dapat berdiri pada tahun 2008 dengan menganut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Purworejo. Dan Kemudan Terjadi perubahan lagi sesuai dengan edaran Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Purworejo, maka terjadi perubahan nomenklatur Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah kabupaten Purworejo.menjadi Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kabupaten Purworejo. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo. Dan dijadikan sebagai dasar hukum berdirinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo. Dan begitu juga memiliki Visi dan misi berikut ini:

1. Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia yang Unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing sector pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industry.
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industry serta potensi pariwisata dan seni budya.
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govenance).
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Visi Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Purworejo selaras dengan Visi Bupati yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan 2026 yaitu: “Purworejo Berdaya Saing 2025”. Sedangkan misi Dinas Perpustkaan Dan Kearsipan Purworejo Mengambil salah satu misi Bupati tersebut yaitu “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govenance)”

Pengaruh penggunaan aplikasi SRIKANDI terhadap pengelolaan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo

Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamsi Terintegrasi yag di sebut dengan SRIKANDI merupakan salah satu upaya pemerintah yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan mutu kearsipan, namun juga mendukung system pemerintah berbasis elektronik atau yang bias disebut dengan SPBE. Aplikasi Srikandi memungkinkan anda untuk mengontrol

Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

berfungsinya system pengarsipan anda dengan baik dan efisien, memungkinkan penguna untuk mengontrol berfungsinya system pengarsipan penguna dengan baik dan efisen, memungkinkan penguna untuk memberikan layanan public dengan cepat dan aman.(Millenia, 2023).

Sebelum penggunaan Aplikasi SRIKANDI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengunakan Aplikasi SIKD yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Mengulik dari hasil wawancara yang dikatakan Bu Rosa adalah " Sebelum membahas pengaruhnya saya terlebih dahulu menjelaskan bahwasanya pengunaan aplikasi SRIKANDI ini adalah salah satu keinginan Bapak Presiden untuk para pemerintah sendiri agar diharapkanya para instansi maupun organisasi yang bersangkut dengan kedinasan ini, dapat mengunakan system pemerintahan berbasis elektronik, dan memang harapaya untuk pemerintah segala urusan umum atau khusus dituangakan dalam bentuk aplikasi yang terintegrasi. Dan Aplikasi SRIKANDI sendiri di luncurkan oleh bapak Bupati pada tangal 2 Januari 2024." Dengan begini aplikasi SRIKANDI dapat mewujudkanya para pemerintah mencapai kinerja yang baik dan menjaga mutu kearsipan yang baik serta terwujudnya SPBE. Aplikasi SRIKANDI sendiri di luncurkan oleh bapak Bupati pada tangal 2 Januari 2024.

Penggunaan aplikasi SRIKANDI ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Berikut ini saya gambarakan beberapa pengaruh tersebut:

1. Efesiensi dan Produktivitas: Aplikasi SRIKANDI sangat memungkinkan pengelolaan arsip secara digital, sehingga dari proses ini memiliki pengaruh terhadap proses penyimpanan, pencarian, dan pengambilan arsip menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan pengelolaan dan meningkatkan produktivitas para ASN.
2. Akurasi dan Keamanan Data: dengan bergantinya system digital, resiko yang terjadi seperti kehilangan arsip atau kerusakan fisik arsip sangat bisa diminimalisir**.** Selain SRIKANDI juga menyediakan fitur keamanan yang memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses arsip tertentu sehingga menjaga keamanan serta kerahasiaan dan integritas data.
3. Penghematan Biaya: Penggunaan aplikasi yang berbasis elektronik mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan fisik dan bahan seperti kertas dan tinta. Selain itu juga menghemat biaya operasional (Hal ini dapat di sesuaikan dengan kondisi karena perlu adanya bukti atau suatu fisik arsip tertentu).
4. Kemudahan Akses dan kolaborasi: Arsip digital data diakses dari berbagai lokasi melalui jaringan internet, memudahkan kolaborasi antar kantor LKPD atau OPD maupun Instansi.Sehingga ini sangat bermanfaat apalagi untuk organisasi dengan distribusi geografis yang luas.
5. Pemenuhan Reguasi dan Standar: Aplikasi SRIKANDI di ciptakan untuk memenuhi Standar kearsipan nasional, sehingga kami para Instansi dapat lebih mudah mematuhi standard an kebijakan yang ada.
6. Pelestarian Arsip: Arsip digital atau elektronik lebih tahan lama, apliksi SRIKANDI membantu dalam memastikan arsip tetap terjaga.
7. Analisis dan Pelaporan: Aplikasi ini juga dilengkapi fitur analisis dan pelaporan yang memungkinkan organisasi untuk memantau dan mengevaluasi secara berkala. Dan data yang didapat dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik.

Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

Secara keseluruhan Aplikasi ini mempengaruhi pengelolaan yang ada di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo (Ibu Rosa Delima).

Persepsi pengguna terhadap penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam konteks pengelolaan arsip dinamis

Tjiptasari memberikan pendapat mengenai aplikasi ini SRIKANDI memiliki fungsi dalam pengelolaan arsip, kehadiran srikandi memudahkan penguna dalam melakukan pekerjaan.(Devega & Yuhelmi, 2023).

Dilihat dari penjelasan Tjiptasari bahwasanya hadirnya aplikasi ini sangat membantu para penguna sehinga para pegawai tidak terbebani. Berikut adalah jawaban yang diberikan oleh Ibu Rosa Delima. Persepsi pengguna terhadap penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dalam konteks pengelolaan arsip dinamis umumnya positif, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Berikut adalah ringkasan persepsi pengguna berdasarkan berbagai factor:

1. Kemudahan Penggunaan: Pengguna umumnya menemukan aplikasi SRIKANDI mudah digunakan karena antarmuka yang intuitif dan fitur yang user-friendly. Pelatihan yang disediakan membantu karyawan memahami cara menggunakan aplikasi dengan efisien.
2. Efisiensi Proses: Banyak ASN melaporkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan arsip dianamis. Proses penyimpanan, pencarian, dan distribusi arsip menjadi lebih cepat dan tidak memerlukanya banyak waktu dibandingkan dengan system manual.
3. Keandala dan Keamanan: Pengguna merasa bahwa SRIKANDI memberikan keandalan dan keamanan yang tinggi dalam pengelolaan arsip. Fitur keamanan yang disertakan, seperti otorisasi akses, memberikan rasa aman**,** bahwa data dan arsip mereka terlindungi dengan baik.
4. Pengehmatan Biaya dan Sumber Daya: Persepsi para pegawai mengatakan aplikasi ini membantu mengurangi biaya operasional terkait penyimpanan dan pengelolaan arsip fisik, serta mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan.
5. Aksesibilitas: Pengguna menghargai kemampuan untuk mengakses arsip dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Hal ini sangat memudahkan terutama dalam situasi kerja jarak jauh satau saat dibutuhkan akses cepat terhadap dokumen tertentu.
6. Dukungan dan Pelatihan: Beberapa Pengguna menyatakan bahwa dukungan teknis dan pelatihan yang disediakan sangat membantu dalam mengatasi kendala teknis dan memastikan semua pengguna dapat memanfaatkan fitur aplikasi secara optimal.
7. Resistensi Terhadap Perubahan: Meskipun banyak yang menerima dengan baik, ada juga pegawai ASN yang awalanya ragu terhadap perubahan dari SIKD ke SRIKANDI.

Secara keseluruhan, Persepsi pengguna terhadap aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis cenderung positif. Sehingga para pengguna dari DINPUSIP secara teknis merasa terbantu.

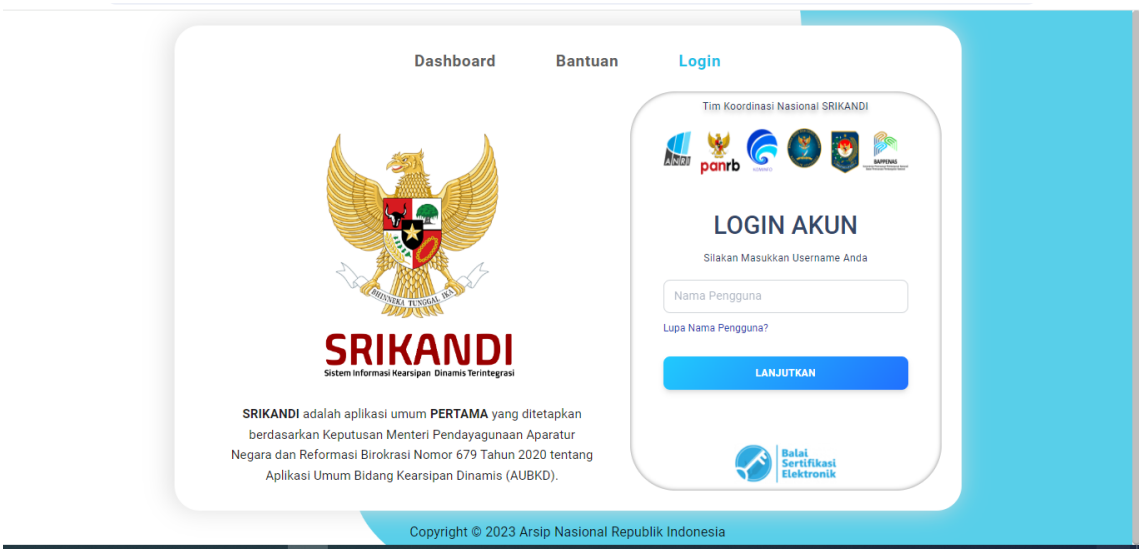
Error sering terjadi saat menggunakan aplikasi tersebut. Pasalnya, Aplikasi diakses oleh seluruh instunsi baik pusat maupun daerah diseluruh indonesaError sering terjadi saat menggunakan. Masalah ini jelas menganggu proses komunikasi ketika suatu instunsi pemerintah membutuhkan segera proses pembuatan arsip(Aini, 2023).

Pada bagian ini Ibu Rosa delima juga menambahkan bahwasanya dalam menggunakan ini ada kendala dan probelamtikanya sendiri seperti : Kesulitan dalam adaptasi awal pengunaan aplikasi ini tenunya ada beberapa yang merasa kesulitan entah itu factor usia atau kesulitan

Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

dalam memahami beberapa fungsi fitur fitur tertentu dalam aplikasi SRIKANDI dengan hal ini pada saat setelah peresmian Dari lembaga daerah memberikan penyuluhan atau bimtek mengenai penggunaan Aplikasi SRIKANDI. Selanjutnya Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Masalah yang sering terjadi di DINPUSIP adalah lambanya koneksi internet yang dimana hal itu dapat memperlambat kinerja para pegawai, atau terjadinya server down karena pemakaian yang secara bersama dapat mempengaruhi aplikasi. Tapi berdasarkan yang di sampaiakan oleh Ibu Rosa bahwasanya hal ini sudah di koordinasikan dengan KOMINFO setempat sehingga tidak menganggu kinerja para pegawai.

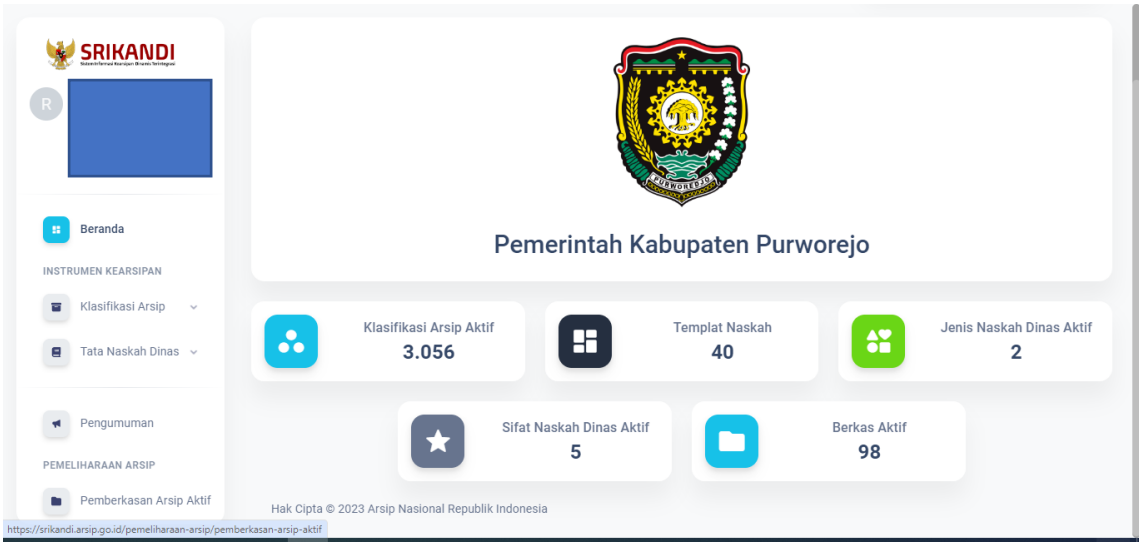
Dibawah ini saya sajikan cara mengakses aplikasi SRIKANDI dan isi dari aplikasi tersebut.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi SRIKANDI.
(sumber: srikandi.arsip.go.id, Tahun 2024)

Pertama hal yang perlu dilakukan adalah ketik alamat website srikandi.arsip.go.id. Setelah masuk ke alamat tersebut akan disuguhi seperti tampilan di atas, kemudian masukan nama pengguna dan sandi dan klik login. Apabila berhasil login maka akan berpindah ke beranda.

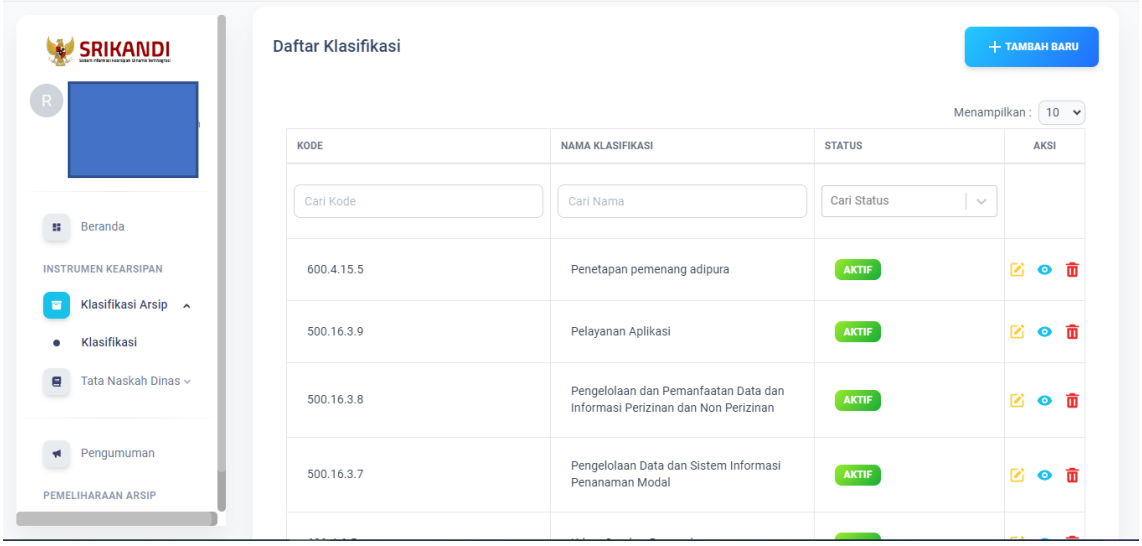
Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra



Gambar 3. Tampilan Halaman Beranda.
(sumber: srikandi.arsip.go.id, Tahun 2024)

Di atas adalah tampilan halaman beranda yang menampilkan beberapa fitur:

1. Klasifikasi Arsip Aktif
2. Temmplate Tata Naskah Dinas
3. Pengumuman
4. Pemberkasan Arsip Aktif

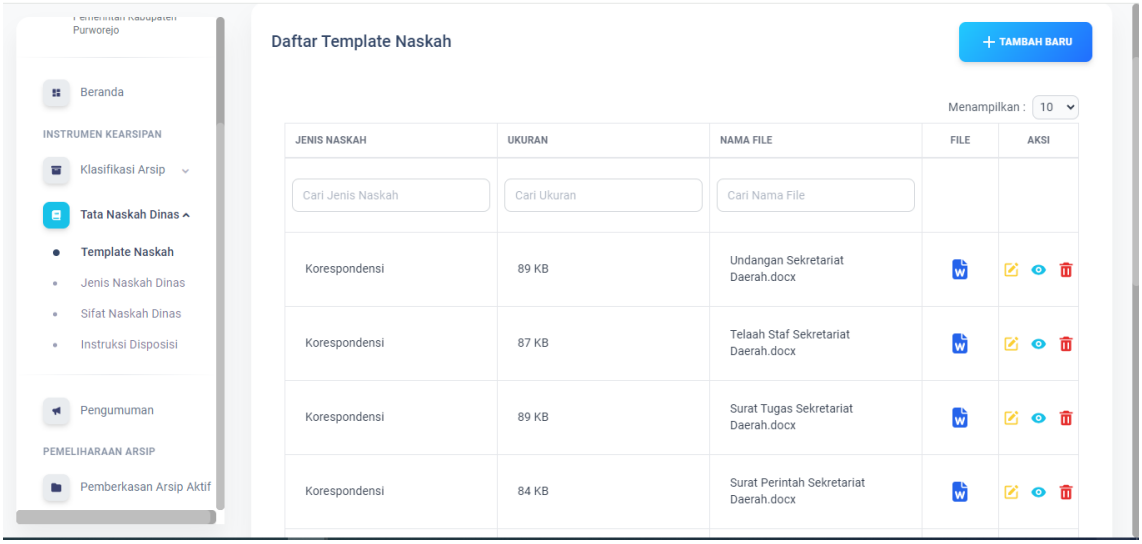


Gambar 4. Tampilan Halaman Klasifikasi Arsip.
(sumber: srikandi.arsip.go.id, Tahun 2024)

Pada gambar ke empat ini menampilkan isi dari aplikasi srikandi pada bagian klasifikasi Arsip. Template klasifiksi arsip ini berguna untuk menyimpan klasifikasi. Pada bagian cetak

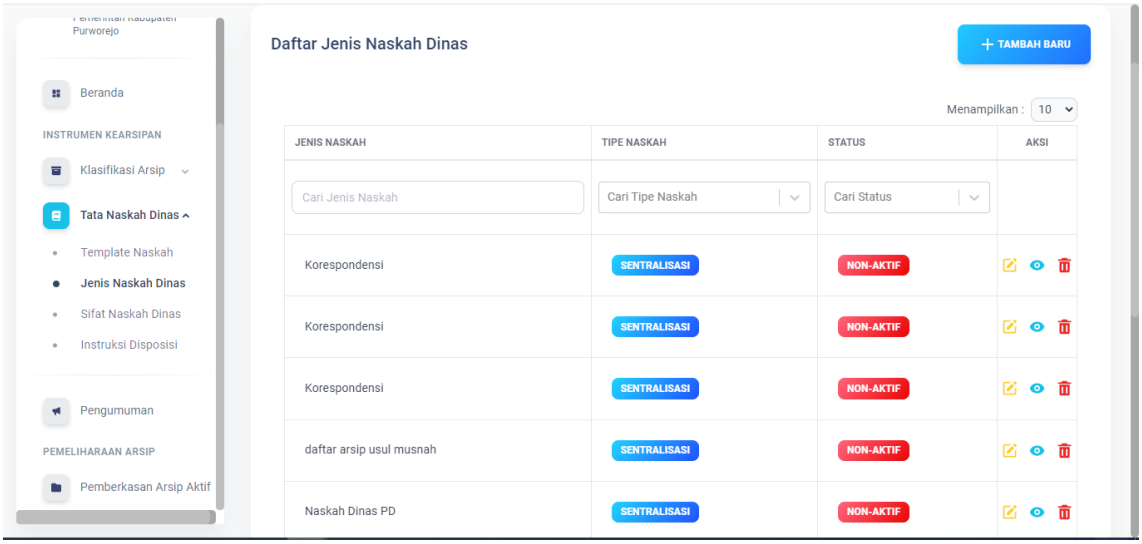
Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

biru yang bertuliskan tanda (+) adalah fitur untuk menambahkan klasifikasi baru, setelah itu bagian kode untuk mencari klasifikasi yang telah tersimpan di aplikasi tersebut. Sedangkan nama klasifikasi adalah nama yang digunakan untuk pengklasifikasian, dan yang terakhir yaitu status setelah menyimpan klasifikasi arsip di template tersebut akan tampil dia aktif atau tidak.



Gambar 5. Tampilan HalamanTata Naskah Dinas.
(sumber: srikandi.arsip.go.id, Tahun 2024)

Selanjutnya adalah Template Tata Naskah Dinas di sini di tampilkan beragam fitur seperti Jenis Naskah, Ukuran, Nama File, File dan aksi.

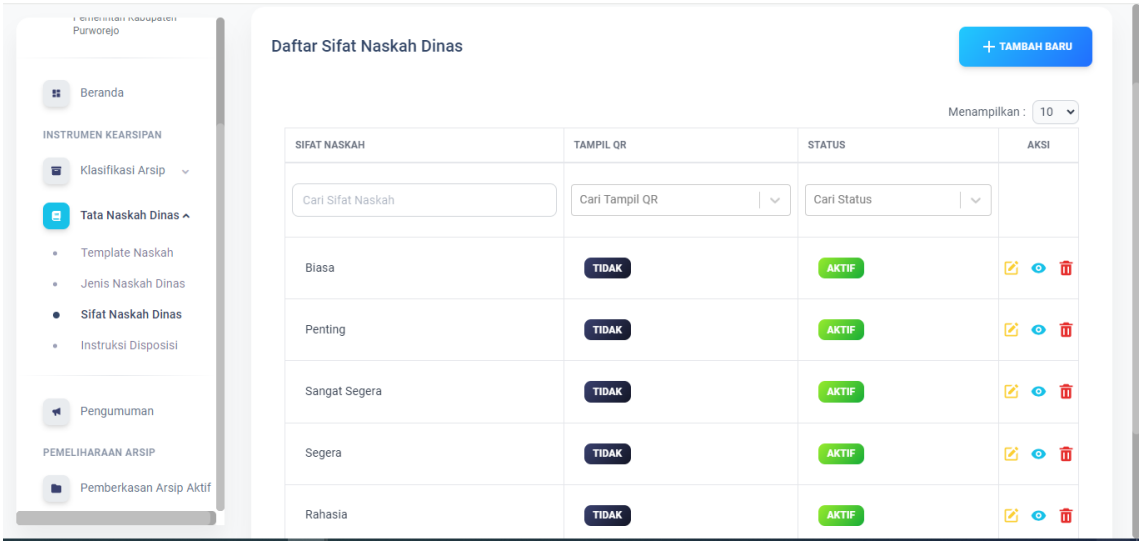


Gambar 6. Tampilan Halaman Jenis Naskah Dinas.
(sumber: srikandi.arsip.go.id, Tahun 2024)

Gambar ke 6 yaitu masih pada halaman Tata Naskah Dinas Jenis Naskah Dinas seperti tampilan di atas naskah akan dibedakan menurut pengaturanya masing masing, tergolong ke

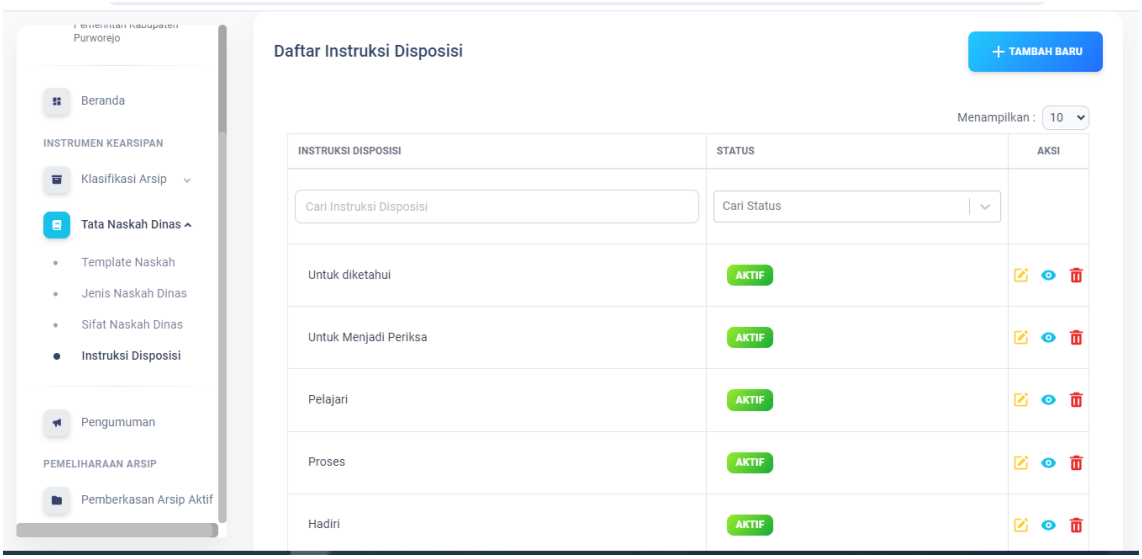
Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

jenis naskah dinas yang mana.



Gambar 7. Tampilan Halaman Sifat Naskah Dinas.
(sumber: srikandi.arsip.go.id, Tahun 2024)

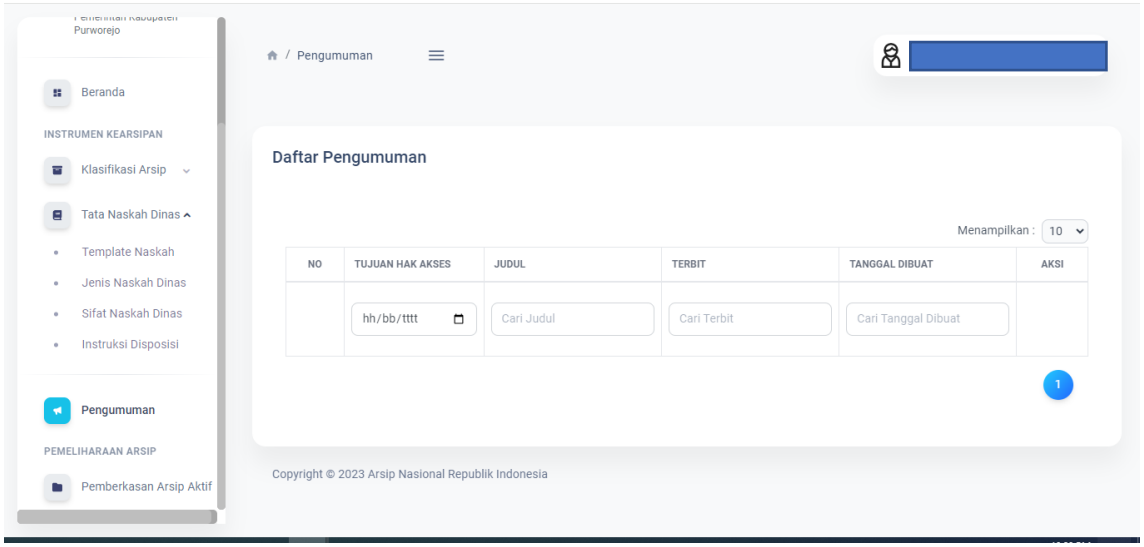
Halaman di atas masih pada bagian Tata Naskah Dinas pada bagian Sifat Naskah Dinas. Halaman ini menampilkan apakah Naskah dinas tersebut memiiki sifat naskah yang bagaimana apakah penting, rahasia, segera, sangat segera.



Gambar 7. Tampilan Halaman Instruksi Disposisi.
(sumber: srikandi.arsip.go.id, Tahun 2024)

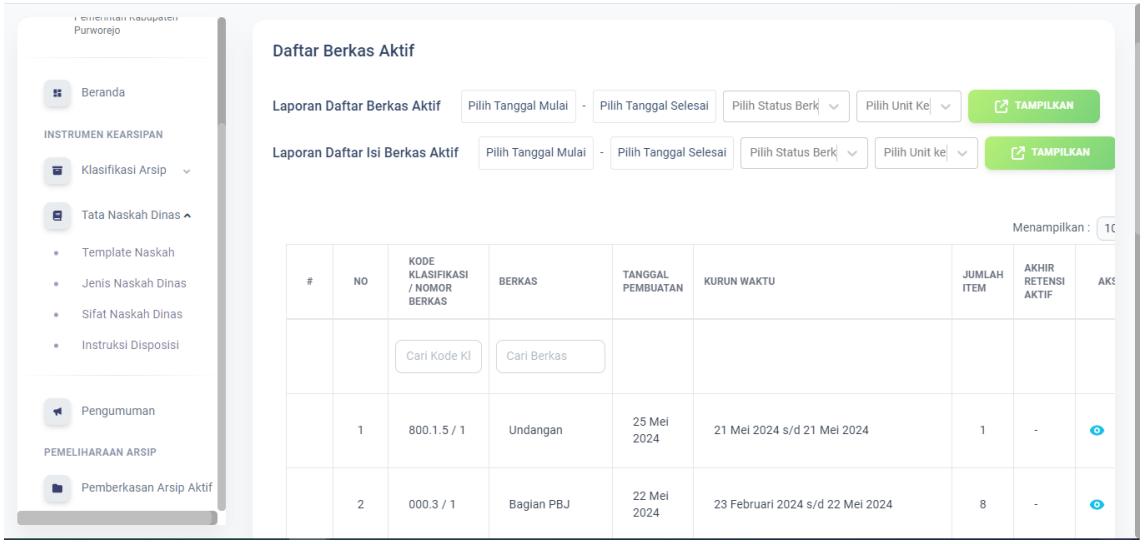
Gambar tersebut masih termasuk kategori Tata Naskah Dinas dan masuk bagian Instruksi Disposisi.

Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra



Gambar 8. Tampilan Halaman Pengumuman.
(sumber: srikandi.arsip.go.id, Tahun 2024)

Jika terdapat pengumuman maka di halaman tersebut akan tampil daftar pengumuman.



Gambar 9. Tampilan Halaman Pemberkasan Arsip Aktif.
(sumber: srikandi.arsip.go.id, Tahun 2024)

Yang terakhir adalah tampilan halaman dari Pemberkasan Arsip Aktif.

KESIMPULAN

Setiap organisasi akan menghasilkan arsip dan arsip ini diibaratkan sebagai jantung organisasi karena pada arsip ini rahasia perusahaan di simpan, bukti bukti di simpan, dan sejarah berdiri maupun keuangan berada, sehingga kelayakan penataan arsip dinamis sangat di butuhkan. Penataan arsip secara efisien dan terkendali adalah gambaran betapa terorganisirnya

Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

organisasi tersebut. Maka dari itu untuk membuat organisasi medapat wajah public bagus maka dimulai dari manajemen arsip, sehingga dari itu adanya peluncuran aplikasi SRIKANDI ini sangat membantu. Selain itu aplikasi SRIKANDI membantu pelayanan administrasi menjadi mudah dan terkendali.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwasanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo penerapan apliaksi SRIKANDI terlihat bagus dan berjalan semestinya meskipun terdapat beberapa kendala dan peneliti rasa masalah itu adalah hal yang kompleks, meskipun terlihat sepele akan tetapi perlu juga untuk diperhatikan.

Mengatasi contoh problematika di atas dimungkinkan memerlukan perencanaan yang matang, dukungan dari manajemen puncak, pelatihan berkelanjutan, serta dukungan teknis yang handal untuk memastikan implementasi dan penggunaan aplikasi SRIKANDI berjalan dengan lancer dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaiakn terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Pertama-tama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Purwanto Putra, M.Hum, selaku pembimbing utama, atas segala ilmunya, arahan, waktu dan kesabaran yang diberikan selama proses penelitian ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk membimbing dan memberikan masukan yang berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Agus Santoso, M.Si. sebagai Direktur Universitas Terbuka Yogyakarta, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pembuatan karya ilmiah ini. Ucapan Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, terkhusus kepada Ibu Dra. Eni Sudiyati, M.M., sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo yang telah memberikan dukungan fasilitas dan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Tak lupa, kepada seluruh pegawai Dinpusip, terimakasih atas bantuan teknis dan dukungan selama melakukan penelitian. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada rekan-rekan seperjuangan di Universitas Terbuka terkhusus prodi D-4 Kearsipan, yang telah memberikan semangat, kerjasama dan dukungan kalian sangat berarti bagi penulis.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya.

Dengan ucapan terima kasih yang tulus, penulis berharap segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

REFERENSI

Aini, Y. N. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, *7*(1), 84–88. https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/900

Bahari, K. M., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Pengolahan Arsip Dinamis Melalui Aplikasi SRIKANDI Di Kabupaten Solok. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, *8*(2), 874–879. http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/mm

Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

Basuki, S. (2017). Pengantar Ilmu Kearsipan. Tanggerang Selatan. Universitas Terbuka.

Dasnoer, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. *Jurnal IlmiahWahana Pendidikan, Agustus*, *2023*(16), 319–324. https://doi.org/10.5281/zenodo.8242137

Devega, M., & Yuhelmi. (2023). Sosialisasi Aplikasi Srikandi Pada Kecamatan Sail Pekanbaru. *J-COSCIS : Journal of Computer Science Community Service*, *3*(2), 120–126. https://doi.org/10.31849/jcoscis.v3i2.12927

Fathurrahman, M. (2018). Pentingnya Arsip Sebagai Sumber Informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, *3*(2), 215–225.

Halimah, M. (2020). *Administrasi Perkantoran*. Tanggerang selatan. Universitas Terbuka

Laili, M. (2014). Pengelolaan Arsip Dinamis Pada Kantor Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, *3*(3), 551–557.

Millenia, M. (2023). Efektivitas Pelayanan Pegawai Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Pekanbaru. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, *2*(2), 54–58. https://doi.org/10.46730/jsdmu.v2i2.41

Pratiwi et al., (2022). *Pengurusan Surat, Tata Persuratan dan Formulir*. Tanggerang selatan Universitas Terbuaka

Putri, A. E., & Setyawan, H. (2020). Urgensi Implementasi Jadwal Retensi Arsip dalam Rangka Menuju Efisiensi dan Efektivitas Organisasi Studi Kasus di Universitas Negeri Yogyakarta. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, *13*(1), 34. https://doi.org/10.22146/khazanah.54805

Saptosari, C., & sari, A, T, P. (2023). Penilaian dan Penyusutan Arsip. Tanggerang Selatan. Universitas Terbuka.

Sumrahyadi (2019). *Perancangan Jadwal Retensi Arsip*. Tanggerang Selatan. Universitas Terbuka

Hak Cipta © 2024, Masrurotul Fadilah, Purwanto Putra

Pemanfaatan Pojok Baca dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas I SD Al-Falah: Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif

Mela Melawati[1], Ursa Agniya[2]
[1] Mahasiswa Program Ilmu perpustakaan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
[2]Dosen Pembimbing Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
e-mail: dinaranafeesa0@gmail.com[1], ursaagniya@gmail.com[2]

Abstrak

Literasi membaca di sekolah merupakan kegiatan yang sangat lah penting untuk membantu perkembangan peserta didik dalam menumbuhkan minat baca. Minat baca merupakan suatu keinginan yang kuat dengan disertai usaha untuk mendapat dan membaca bahan bacaan baik atas kesadaran sendiri maupun dorongan dari luar (Falah & Adhela, 2022). Faktor konvensional dan non konvensional mempengaruhi minat baca. Pojok baca merupakan pemanfaatan sudut ruangan di sekolah yang berfungsi sebagai sarana untuk menambah ilmu dan sarana rekreasi bagi para siswa. Pelaksanaan program pojok baca ini dapat menumbuhkan minat siswa untuk lebih gemar membaca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan pojok baca dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 1 di SD AL-FALAH. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selain metode deskriptif kualitatif digunakan juga metode penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik melihat langsung atau observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian menujukan bahwa pemanfaatan pojok baca memiliki peran penting dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 1 di SD AL-FALAH. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pemanfaatan pojok baca dilakukan melalui tiga hal, diantaranya melakukan GLS selama 15 menit, memanfaatkan buku yang ada di pojok baca sebagai sumber referensi dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan untuk mengisi waktu luang siswa.

***Kata kunci**: literasi, minat baca, pojok baca*

PENDAHULUAN

Perkembangan minat baca di indonesia sangatlah memprihatinkan. Merujuk pada hasil survey *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* pada 2011, dari 187 negara, Indonesia menempati urutan ke 124 dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut UNESCO indeks tingkat membaca masyarakat di Indonesia hanya 0,0001 persen. Ini artinya dari 1000 penduduk hanya ada satu orang yang masih mau membaca buku secara serius (Falah & Adhela, 2022).

Sejalan dengan pendapat (Bangsawan, 2024), kurangnya minat membaca siswa dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan mereka dimasa yang akan datang. Kurangnya kemampuan membaca akan menghambat mereka dalam memahami instruksi, mengejar pendidikan yang lebih tinggi, juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik. Menurut Adib & Hermintoyo dalam Sinaga , Sinaga, & Thesalonika (2022) Ada beberapa penyebab rendahnya minat baca siswa, diantaranya: tingkat kemahiran membaca siswa sekolah dasar masih rendah, teralihnya perhatian anak oleh tayangan TV, budaya membaca orang dewasa yang masih minim, dan koleksi buku anak yang masih minim.

Budaya membaca di sekolah sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kualitas dalam kegiatan belajar mengajar, karena dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami

Hak Cipta © 2024, Mela Melawati.

materi pembelajaran dengan lebih menyenangkan. Selain itu siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih luas baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bermasyarakat (Farrahatni, Fahri, & Hamdani, 2022). Sukardi dalam (Shofiyuddin, et al., 2021) menyatakan bahwa terdapat faktor konvensional dan faktor non konvensional yang mempengaruhi minat baca anak. Faktor konvensional ini berkaitan dengan ketersediaan buku bacaan, desain buku, isi, ilustrasi, dan cara penyajian buku itu sendiri. Sedangkan faktor non konvensional berkaitan dengan pengenalan dan promosi buku, seperti mengadakan pameran buku ataupun sosialisasi pada kegiatan tertentu. Selain itu, pengadaan pojok baca di sekolah juga termasuk kedalam faktor non konvensional yang mempengaruhi minat baca. Pojok baca merupakan pemanfaatan berbagai sudut yang ada di sekolah sebagai tempat untuk memajang koleksi buku dan tulisan siswa. Selain perpustakaan, siswa dapat memanfaatkan koleksi di pojok baca sebagai sumber ilmu. Tak hanya buku pelajaran, pojok baca juga dapat dilengkapi dengan koleksi seperti majalah anak dan buku cerita agar dapat menarik minat baca para siswa. Minat merupakan proses untuk menumbuhkan rasa senang subjek terhadap suatu aktivitas dengan cara memusatkan perhatiannya, berusaha untuk mendapatkan, juga memiliki keingintahuan terhadap suatu objek, sehingga timbul rasa ketertarikan dan perasaan senang dari subjek terhadap objek tersebut (Faiz, et al., 2022). Minat menjadi salah satu syarat dalam keberhasilan membaca (Seniani, Numertayasa, & Sudirman, 2023). Pengertian minat baca menurut Ibrahim dalam (Faiz, et al., 2022) merupakan keinginan kuat dalam diri seseorang yang juga disertai usaha untuk membaca. Seseorang akan bersedia untuk mendapatkan bacaan dan membaca bahan bacaan tersebut atas kesadaran dirinya sendiri jika dalam dirinya terdapat minat baca yang kuat.

Menurut penelitian Rahayu, Wahib, & Besari, (2023) Pojok baca memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan minat baca siswa. Menurutnya akses dalam pojok baca ini sangat mudah bagi siswa baik untuk membaca buku maupun kegiatan lainnya seperti menulis resensi buku. Ini sangat membantu untuk mendorong minat siswa dalam hal membaca dan menulis secara teratur. Pernyataan ini dinyatakan juga dalam penelitian Khasanah, Miyono, Utami, & Rachmawati (2023). Mereka menyatakan bahwa pemanfaatan pojok baca berperan penting dalam menumbuhkan minat baca. Seseorang dengan kemampuan membaca baik itu lancar maupun lambat sama-sama memiliki rasa antusias yang tinggi untuk memilih dan membaca bahan bacaan di pojok baca.

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemanfaatan pojok baca di SD AL-FALAH. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pojok baca dimanfaatkan oleh siswa kelas 1, juga mengetahui seberapa besar peran sekolah dalam meningkatkan minat baca siswanya. Karena dewasa ini berbagai jenjang pendidikan di Indonesia dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tingkat tinggi mulai menggalakan kegiatan literasi informasi. Paradina dalam (Kurniawan, et al., 2019. p.49) menyatakan Gerakan Literasi sekolah (GLS) adalah upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah (Guru, Peserta Didik, Orang tua/wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem Pendidikan. Sependapat dengan Nuswantari & Manik (2023) kegiatan literasi disekolah menjadi hal yang penting untuk diterapkan guna meningkatkan kemampuan peserta didik terutama dalam menumbuhkan minat baca. Nuswantari & Manik (2023) berpandangan bahwa tujuan literasi selain untuk menumbuhkan budi pekerti adalah agar terciptanya budaya literasi sebagai upaya terwujudnya *Long Life Education*. Melalui literasi ini juga dapat diperoleh kemampuan siswa dalam bidang lain diluar bidang sekolah. Oleh karena itu literasi memiliki manfaat yang sangat banyak, terutama pada era globalisasi seperti sekarang. Praktik dari kegiatan

Hak Cipta © 2024, Mela Melawati.

gerakan literasi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam membiasakan peserta didik untuk membaca (Kurniawan, et al., 2019). Kegiatan literasi juga mempunyai manfaat yang sangat banyak, terutama di era globalisasi seperti sekarang ini. Beberapa manfaat menurut Nuswantari & Manik (2023. P. 146) yang didapatkan dalam belajar literasi, antara lain: memperbanyak perbendaharaan kata, wawasan dan pengetahuan menjadi luas, dapat berpikir kritis dalam pengambilan keputusan, mengoptimalkan kinerja otak, mengasah daya tangkap dan pemahaman informasi dari bahan bacaan, melatih fokus dan konsentrasi, meningkatkan kemmapuan verbal, meningkatkan rasa tanggap informasi dari media digital, mengembangkan kemampuan dalam memilih dan menyusun kata.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desktriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan penguraian suatu data secara objektif berdasarkan fakta di lapangan. Sedangkan metode kualitatif merupakan pengumpulan data-data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk menerjemahkan atau menggambarkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Anggito & Setiawan, 2018). Pada data kualitatif, validitas dan reabilitas atau ketepatan data dapat dipakai melalui teknik penggambaran yang rinci dan mendalam, yang disebut sebagai *thick description* dan *triangulasi* (Laksmi, 2021). Tujuan digunakannya penelitian kualitatif ini yaitu untuk mendapatkan hasil yang jelas dan mendalam mengenai program pojok baca dalam meningkatkan gerakan literasi di sekolah (Jamaludin, Pribadi, & Rahmah, 2023). Metode penelitian kualitatif ini mencakup juga studi kasus, dalam penelitian ini di SD AL-FALAH. Selain itu digunakan juga penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, maupun laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang dipecahkan (Dharma, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi pelaksanaan pojok baca dan wawancara terhadap guru dan siswa kelas 1. Observasi merupakan suatu proses peneliti untuk terjun langsung melihat situasi di lapangan, dengan metode observasi peneliti dapat memperoleh data dengan mempelajari dan memahami secara langsung. Sedangkan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab (Hikmawati, 2020).

Tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain tahap persiapan, yang diawali oleh perizinan dan koordinasi terhadap pihak sekolah, yakni kepala sekolah dan guru. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, yaitu observasi dan wawancara terhadap guru dan siswa kelas 1 guna mendapatkan informasi mengenai pojok baca di SD AL-FALAH sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca siswa. Tahap terakhir yaitu evaluasi apabila ada hal-hal yang perlu dikembangkan atau diperbaiki. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minat baca menjadi fokus pada penelitian ini. Sejalan dengan (Oktaviani, Suja'i, Suherman, & Sya, 2023) lingkungan menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan minat baca siswa. Maka dari itu pojok baca dapat menjadi faktor pendorong adanya minat baca bagi siswa. Pada saat peneliti melaksanakan pengamatan, telah terdapat pojok baca di SD AL-FALAH. Didalam pojok baca terdapat sebuah lemari buku yang didalamnya terdapat macam-macam koleksi bacaan baik itu buku pelajaran, majalah anak maupun buku cerita. Buku-buku dipojok baca tersebut bersumber dari pihak sekolah dan wali murid.

Hak Cipta © 2024, Mela Melawati.

Pojok baca berbeda dengan perpustakaan, karena sudut ini sepenuhnya milik siswa dan keberadaannya terpisah dari perpustakaan. Tujuan diadakannya pojok baca yaitu untuk meningkatkan minat baca, maka siswa bebas memilih buku bacaan mereka, siswa juga tidak perlu melakukan registrasi untuk melakukan akses masuk pojok baca seperti halnya di perpustakaan, tapi siswa juga tidak dapat meminjam buku yang ada di pojok baca untuk dibawa ke rumah.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan pojok baca dalam rangka meningkatkan minat baca siswa maka semua pihak yang ada disekolah terlibat dalam kegiatan ini, salah satunya adalah guru. Upaya yang dilakukan oleh guru SD AL-FALAH dalam pemanfaatan pojok baca dilakukan melalui tiga hal, diantaranya:

1. Melakukan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) selama 15 menit
   Gerakan Literasi Sekolah merupakan upaya holistik dan berkesinambungan untuk mengubah sekolah menjadi organisasi pembelajar yang warganya dapat melek huruf sepanjang hayat (Seniani, Numertayasa, & Sudirman, 2023). GLS sangatlah penting diterapkan karena dapat membantu perkembangan peserta didik terutama dalam menumbuhkan minat membaca. Sekolah menerapkan Gerakan Literasi Sekolah selama 15 menit sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung. Siswa dipersilahkan memilih buku bacaan yang mereka ingin baca dari pojok baca. Mereka dapat membaca secara individual maupun berkelompok.
2. Referensi diskusi pada pelajaran tertentu
   Selain melakukan Gerakan Literasi Sekolah, guru juga memanfaatkan buku yang ada di pojok baca ini sebagai sumber referensi dari tugas-tugas yang diberikan, tak hanya itu guru juga menjadikannya sebagai bahan diskusi bagi siswa mengenai materi tertentu. Hal ini dilakukan agar keberadaan pojok baca dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3. Pemanfaatan waktu luang
   Pemanfaatan pojok baca dalam meningkatkan minat baca siswa SD AL-FALAH juga dilakukan di waktu-waktu luang. Yaitu dilakukan pada jam istirahat dan juga pada saat siswa laki-laki melaksanakan shalat jum'at maka siswi perempuan melakukan kegiatan literasi di pojok baca, setelah siswa laki-laki selesai shalat jum'at maka giliran mereka yang melakukan kegiatan literasi.

Dalam upaya yang dilakukan oleh pihak guru di SD AL-FALAH ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswanya. Menurut Abidin dalam (Rawin, Sudiana, & Astawan, 2023. p.2) membaca memiliki makna menjadikan peserta didik literat terhadap suatu konteks. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang dihadapi oleh guru, salah satunya yaitu dari segi kelengkapan buku bacaan. Buku bacaan yang ada di pojok baca masih sangat sedikit dan kurang lengkap, baik itu buku pelajaran maupun buku cerita dan majalah. Tak hanya itu kelancaran murid dalam membaca juga menjadi kendala bagi guru dalam pemanfaatan pojok baca. Terutama dalam pemanfaatannya sebagai sumber referensi.

Ada beberapa solusi yang dilakukan oleh pihak guru dalam menghadapi kendala diatas, diantaranya dengan memberikan kebebasan untuk siswa membawa buku bacaan yang diminatinya dari rumah dan membacanya di pojok baca. Juga dengan membimbing siswa yang belum lancar membaca untuk memahami buku yang dibacanya agar dapat dijadikan sebagai sumber referensi, seperti menurut Sudarsana & Bastiano (2010) diperlukan latihan yang cukup agar dapat membaca sesuai tujuannya.

Hak Cipta © 2024, Mela Melawati.

Pada saat pengamatan kedua, terlihat antusias para siswi perempuan yang dibimbing oleh guru melakukan kegiatan membaca pada saat siswa laki-laki melakukan shalat jum'at berjamaah di masjid. Mereka sangat asyik menikmati buku bacaannya masing-masing. Setelah selesai membaca, mereka merapikan kembali buku dengan menyimpannya di tempat asalnya. Ini juga dapat melatih tanggung jawab mereka terhadap hal yang telah dikerjakan. Saat siswa laki-laki selesai melakukan shalat jum'at, maka giliran mereka membaca di pojok baca sampai bel masuk berbunyi, sementara siswi perempuan melakukan shalat dzuhur bersama guru perempuan.

Pengamatan selanjutnya peneliti melakukan wawancara. Subjek yang diambil pada penelitian ini yaitu 30 siswa kelas 1 di SD AL-FALAH. Berdasarkan wawancara tersebut ditemukan bahwa 26 siswa menyatakan sangat senang membaca buku di pojok baca, sedangkan 4 lainnya menyatakan biasa saja. 24 siswa menyatakan mempergunakan waktu luangnya untuk membaca buku yang tersedia di pojok baca, 1 orang menyatakan kurang suka karena lebih suka bermain bola, dan 5 orang lainnya tergantung keinginan mereka. 25 orang menyatakan bahwa pojok baca membantu mereka dalam diskusi pelajaran, 5 orang lainnya menyatakan kurang terbantu karena mereka belum lancar membaca. 28 orang siswa menyatakan bahwa mereka sangat termotivasi dengan adanya pojok baca yang didesain rapi dan bersih, 2 orang menyatakan biasa saja dengan hal tersebut. 27 orang siswa menyatakan bahwa mereka senang saat membaca buku karena buku – buku di pojok baca sangat menarik dan seru, 3 orang menyatakan membaca buku ketika diminta oleh guru.

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat minat baca siswa kelas 1 SD AL-FALAH sangatlah tinggi, siswa sangat senang dengan adanya pojok baca tersebut. Siswa dapat membaca buku apapun yang diminati, membantu siswa dalam pengerjaan tugas dari guru sebagai bahan referensi, dan juga siswa dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca buku. Siswa juga banyak menemukan buku bacaan yang menarik dan belum pernah dibaca sebelumnya. Hal ini juga dimanfaatkan oleh siswa yang belum lancar membaca menjadi sebuah kesempatan untuk mereka lebih giat lagi dalam belajar membaca.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian di SD AL-FALAH tentang Pemanfaatan Pojok Baca Untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas 1 dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dan guru SD AL-FALAH dalam pemanfaatan pojok baca sekolah dilakukan melalui tiga hal, diantaranya melakukan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) selama 15 menit, memanfaatkan buku yang ada di pojok baca sebagai sumber referensi dari tugas-tugas yang diberikan, tak hanya itu guru juga menjadikannya sebagai bahan diskusi bagi siswa mengenai materi tertentu, dan pemanfaatan waktu luang, yaitu pada jam istirahat dan juga pada saat siswa laki-laki melaksanakan shalat jum'at maka siswi perempuan melakukan kegiatan literasi di pojok baca, setelah siswa laki-laki selesai shalat jum'at maka giliran mereka yang melakukan kegiatan literasi.

(Septiyantono, 2014) berpendapat bahwa pendidikan sangat berperan dalam transformasi ilmu pengetahuan. Transformasi ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan dilakukan melalui informasi. Dan informasi inilah yang dikemas sebagai bahan bacaan yang harus dibaca oleh siswa, termasuk informasi yang ada di dalam koleksi pojok baca SD AL-FALAH. Fungsi yang dapat dicapai pojok baca adalah: 1. sebagai sarana untuk membaca, 2. sebagai bahan bacaan terkini, 3. sumber berbagi informasi, 4. tempat membaca yang nyaman dan juga menarik.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh guru dalam pemanfaatan pojok baca yaitu

Hak Cipta © 2024, Mela Melawati.

koleksinya yang kurang lengkap dan masih ada siswa yang belum lancar membaca. Solusi dari masalah tersebut guru memberikan kebebasan bagi siswa untuk membawa bacaan dari rumah dan membacanya di pojok baca, juga guru membimbing siswa yang belum lancar membaca dalam memahami bahan bacaan.

Terkait minat baca siswa kelas 1 sangatlah tinggi. Mereka senang dengan adanya pojok baca yang ada di sekolah. Mereka juga sadar akan manfaat dan pentingnya membaca.

Menurut Saputri, Pradana, Apriliyanto, & Wahyudi (2022) pojok baca akan berjalan efektif apabila dikelola dengan baik. Dan pojok baca di SD AL-FALAH telah dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak sekolah, guru dan siswa dalam meningkatkan minat baca siswa di SD AL-FALAH.

Untuk melengkapi koleksi bahan bacaan di pojok baca diharapkan pihak sekolah dapat menganggarkannya setiap satu tahun sekali untuk mengadakaan bahan bacaan yang baru dan terkini.

REFERENSI

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif.* Sukabumi: CV Jejak. Diambil kembali dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Metode+deskriptif+adalah+uraian+atau+penyajian+data+secara+objektif+berdasarkan+fakta.+Penelitian+kualitatif+mengacu+pada+penelitian+yang+bertujuan+untuk+memahami+sepenuhnya+fenom

Bangsawan, I. R. (2024). *MInat Baca Siswa.* Banyuasin: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Diambil kembali dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OCN9DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+minat+baca&ots=l8mJSUzcLy&sig=hBjupwP3SgnSj5d3--r21ekKtCI&redir_esc=y#v=onepage&q=buku%20minat%20baca&f=false

Dharma, K. B. (2020). Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 73. Diambil kembali dari https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/403

Faiz, A., Novthalia, A. P., Nissa, H. S., Suweni, Himayah, T., & Damayanti, S. (2022). Pemanfaatan Pojok Baca dalam Menanamkan Minat Baca Siswa Kelas 3 di SDN 1 Semplo. *JURNAL LENSA PENDAS, 07*, 61-62. Diambil kembali dari http://jurnal.upmk.ac.id/index.php/lensapendas/article/download/1714/864

Falah, I. N., & Adhela, D. (2022). Implementasi Program Pojok Baca Sebagai Upaya Mebumbuhkan Minat Baca di SDN Sawahlega. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 2763. Diambil kembali dari http://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/587

Farrahatni, F., Fahri, M., & Hamdani, I. (2022). Upaya Guru Dalam Pemanfaatan Pojok Baca Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas IV SDN Semanan 04 Pagi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *06*, 10243. Diambil kembali dari https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4034

Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada. Diambil kembali dari https://etheses.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian.pdf

Jamaludin, U., Pribadi, R. A., & Rahmah, Y. M. (2023). Optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah dengan Pojok Baca Terhadap MInat Baca Peserta Didik Kelas VA SD Negeri Rawu.

Hak Cipta © 2024, Mela Melawati.

Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, 5294. Diambil kembali dari https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/download/1097/1053

Khasanah, U., Miyono, N., Utami, R. E., & Rachmawati, Y. (2023). Pemanfaatan Pojok Baca Dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa Kelas II Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio, 9*, 705. Diambil kembali dari https://ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/download/4813/2951/23457

Kurniawan, A. R., Destrinelli, Hayati, S., Rahmad, Riskayanti, J., Wasena, I. S., & Triadi, Y. (2019). Peranan Pojok Baca dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar. *JURNAL INOVASI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR, 03*, 49. Diambil kembali dari https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jippsd/article/view/107562

Laksmi. (2021). *Metode Penelitian Perpustakaan.* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Muktiono, J. D. (2003). *Aku Cinta Buku.* Jakarta: PT. Elex Media Computindo. Diambil kembali dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LNi5Oqr3BK0C&oi=fnd&pg=PR9&dq=buku+minat+baca&ots=EKO8SXBULa&sig=x1zVxcSKYB8kixW2UXnGza6V6n0&redir_esc=y#v=onepage&q=buku%20minat%20baca&f=false

Nuswantari, N. F., & Manik, Y. M. (2023). Membudayakan Gemar Membaca Melalui Pojok Baca Sekolah. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 03*, 146. Diambil kembali dari https://jurnal.itscience.org/index.php/educendikia/article/view/2378

Oktaviani, R., Suja'i, M. I., Suherman, I., & Sya, M. F. (2023). Upaya Peningkatan Minat Baca di SDN Cibalung 02 dengan Program Pojok Baca. *Educivilia: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 04*, 74. Diambil kembali dari https://ojs.unida.ac.id/educivilia/article/view/6623

Rahayu, A. P., Wahib, A., & Besari, A. (2023). Peningkatan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar Melalui Pojok Baca. *Open Community Service Journal*, 123. Diambil kembali dari https://opencomserv.com/index.php/OCSJ/article/view/41

Rawin, S. C., Sudiana, I. N., & Astawan, I. G. (2023). Peran Budaya Literasi dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa. *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, 07*, 2. Diambil kembali dari https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_pendas/article/view/1371

Saputri, R. N., Pradana, F. G., Apriliyanto, E., & Wahyudi. (2022). Peranan Pojok Baca dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa SDN Jati 2 Masaran. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar, 02*, 104. Diambil kembali dari http://journals.alptkptm.org/index.php/jikm/article/view/40

Seniani, N. W., Numertayasa, I. W., & Sudirman, I. N. (2023). Pemanfaatan Pojok Baca Untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa di SDN 1 Menanga. *Jurnal Pendidikan Dasar Rare Pustaka, 5*, 12. Diambil kembali dari https://jurnal.markandeyabali.ac.id/index.php/rarepustaka/article/view/147

Septiyantono. (2014). *Literasi Informasi.* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Shofiyuddin, M., Tuzzakiyah, F., Barokah, K. F., Rindiani, D. A., Failasifa, G. S., Rifqia, R. N., & Zulfahmi, M. N. (2021). Peningkatan Minat Baca Anak Melalui Pojok Baca Purnama Desa Gemulung Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. *JAMALI - Jurnal Abdimas Madani dan Lestari, 03*, 59. Diambil kembali dari https://journal.uii.ac.id/JAMALI/article/view/19602

Sinaga , I. F., Sinaga, C. V., & Thesalonika, E. (2022). Pengaruh Pojok Baca terhadap Peningkatan Minat Baca Siswa Kelas V SDN 091254 Batu Onom. *Jurnal Pendidikan dan*

Hak Cipta © 2024, Mela Melawati.

Konseling, 6418. Diambil kembali dari http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7725

Sudarsana, U., & Bastiano. (2010). *Pembinaan Minat Baca.* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Hak Cipta © 2024, Mela Melawati.

Pengimplementasian Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang

Muhamad Suepa
Mahasiswa D4 Kearsipan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka UPBJJ UT Serang
e-mail: muhamadsuepa@gmail.com

Abstrak

Sebagai Lembaga Kearsipan Nasional (LKN), ANRI berwenang menetapkan kebijakan hukum dan peraturan sesuai tugas dan tanggung jawabnya di bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan penyelenggaraan dinamika terpadu. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pegimplementasi aplikasi srikandi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pandeglang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah pada teori faktor keberhasilan inovasi menurut Masak, Matthew dan Irwin Ningtias (2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa penerpan aplikasi SRIKANDI dapat melakukan Langkah-langkah pengelolaan arsip mulai dari pembuatan, pendistribusian, penggunaan,pemeliharaan, dan pemusnahan. Namun masih belum dapat melakukan penghapusan yaitu.e.pemusnahan atau pemindahan ke arsip permanen, karena aplikasi ini masih dalam arsip.tahap pengembangan. Namun, aplikasi ini stabil dan seluruh bagian internal organisasi dikerahkan secara besar-besaran.Selain itu, penerapan Pengimplentasian Aplikasi SRIKANDI didukung oleh kondisi internal organisasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis penulis terhadap cara penerapan kebijakan SRIKANDI yang positif menunjukkan bahwa isi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, meliputi manfaat, keuntungan, laju perubahan, tempat pengambilan keputusan, program.pelaksanaan, sumber daya dan lingkungan pelaksanaan mendukung pelaksanaan SRIKANDI.

Kata Kunci : Arsip, Pengimplementasian, SRIKANDI

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bergerak dengan sangat pesat membuat sistem administrasi pemerintahan beralih menjadi berbasis sistem elektronik. Percepatan perluasan perubahan bidang informasi dan komunikasi merupakan fakta yang terjadi saat ini. Perkembangan ini telah mempengaruhi kehidupan sebagian besar individu, kelompok masyarakat, dan lembaga pemerintah, seperti penggunaan Internet. Internet telah mengubah bentuk komunikasi interpersonal yang dominan, serta perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam mencari dan memperoleh informasi.

Setiap instansi atau lembaga pemerintah tentu saja bergerak dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memerlukan penyediaan data dan informasi yang rinci, cepat, akurat, dan tepat. Informasi penting untuk pengetahuan, pendapat dan pengambilan keputusan.Informasi adalah tentang data. Arsip juga merupakan media sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang sudah barang pasti setiap orang memiliki dan selalu dibutuhkan dalam kehidupan

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

baerbangsa dan bernegara dan arsip juga sebagai sebagai pedoman penyelenggaran sistem pemerintahan bagi suatu lembaga pemerintahan tanpa terkecuali pemerintahan pusat dan daerah Kearsipan menunjang proses operasional internal suatu lembaga atau lembaga, khususnya dalam operasional administrasi (Erlyani, 2020). Hal ini dikarenakan arsip merupakan catatan atau rekaman kegiatan yang menunjang birokrasi (Fathurrahman, 2018). Catatan tergolong naskah atau dokumen atau rekaman informasi berupa cerita atau tulisan, gambar dan suara.

Kegiatan kearsipan termasuk dalam Undang-Undang Kearsipan No.43 Tahun 2009.Isi peraturan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah rekaman atau peristiwa lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan.dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai format dan media. Penerapan individu dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara.Mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau sistem pengarsipan otomatis, pengelolaan arsip merupakan sistem pengarsipan yang menggunakan perangkat pengolah data elektronik

Perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat memberikan peluang terjadinya otomasi kearsipan. Selain menciptakan efisiensi, sistem file ini juga dapat mengelola digitalisasi arsip sehingga memudahkan pengaksesan kapan saja dan dimana saja. Efisiensi kerja merupakan suatu prinsip organisasi dimana seluruh pekerjaan dilakukan menurut prosedur yang berlaku dengan usaha yang seminimal mungkin, namun hasil yang maksimal dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengurangi beban seluruh penggunaan energi, penggunaan pikiran, objek, dan waktu dapat diminimalkan.Efisiensi kerja sangat menunjang keberhasilan organisasi dalam melayani masyarakat dan negara(Hendra, 2017).

Srikandi merupakan aplikasi pemerintah Indonesia yang merupakan aplikasi multidisiplin atau kelompok, dimana aplikasi tersebut dirancang dan dikembangkan oleh empat lembaga utama yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Arsip Nasional Republik.Indonesia (ANRI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Aplikasi Srikandi dirancang untuk memudahkan untuk membuat dan mengirim surat keluar, menerima surat masuk, mengagendakan surat. Fitur Penyusun Naskah Keluaran juga memfasilitasi pemeriksaan, penandatanganan elektronik, dan penomoran otomatis serta draf yang dihasilkan sebelum Naskah diserahkan. Selain itu, naskah masuk dan keluar di aplikasi Srikandi dapat berkaskan untuk klasifikasi dan pengarsipan sesuai ketentuan yang berlaku.(Lemhanas RI, 2022). Tujuan diberlakukannya aplikasi Srikandi adalah untuk mempercepat pekerjaan, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas untuk memudahkan pekerjaan dan memberi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.Seluruh departemen dan lembaga pemerintah diarahkan untuk mengimplementasikan aplikasi Srikand.Selain itu,Aplikasi Srikandi bertujuan untuk mengurangi penggunaan papperless.

Mendukung gerakan pemerintah sistem e-Government berdasarkan Keputusan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem e-Government dan Peraturan Presiden No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem e-Government (Surat Edaran Dirjen SPBE dan PPI No.SE.1/PPI/ Set.8/Set.2/1/2023 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi(SRIKANDI) dan terkait peningkatan kinerja para pegawai serta dalam upaya pengembangan fasilitas pengelolaan arsip di masing-masing instansi pemerintah, perguruan tinggi dan badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta.

Pemerintah Provinis Banten berupaya menyelenggarakan pelayanan pemerintahan

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

berbasis elektronik melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, salah satunya di bidang kearsipan dengan menggunakan sistem pengarsipan elektronik yang disebut Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten terus mempercepat penerapan aplikasi Srikandi yang berlaku secara nasional ini di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan sekolah di wilayah Provinsi Banten.

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan salah satu sarana pengelolaan arsip dinamis berdasarkan Keputusan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.Tujuan dari sistem informasi kearsipan dinamis yang terintegrasi(SRIKANDI) adalah mewujudkan kelancaran dan efisiensi pengarsipan elektronik dalam penyelenggaraan negara.Aplikasi ini memenuhi kebutuhan untuk menciptakan sesuatu yang terintegrasi dan terpeliharaa di pusat data nasional .

Namun berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang dapat diketahui bahwa penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di dilingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang belum berjalan secara optimal, hal tersebut karena tingkat pemahaman pengelola arsip masih belum sepenuhnya memahami karena masih dalam proses belajar mengimplementasikannya.

Oleh karena itu, agar arsip dapat memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya, diperlukan pengelolaan arsip yang baik dan terorganisir. Oleh sebab itu hal tersebut dapat membantu inovator dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta dapat menghemat waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang harus ditingkatkan untuk mendukung produktivitas dan efisiensi pekerjaan kantor.Era disruptif ini berarti berkembangnya pengelolaan arsip digital akan terus berlanjut dan akan dilakukan beberapa perubahan pada aplikasi SIKD dengan adanya Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dijelaskan dalam Perpres ini penerapannya bersifat umum semua instansi, lembaga, kementrian baik pusat maupun daerah semua aplikasi yang ada harus bertransformasi kepada aplikasi umum untuk mendukung arsitektur yang ada dalam SPBE maka dari itu ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) mengeluarkan Peraturan Kepala Arsip Nasiolnal Republik Indonelsia Nomor 4 Tahun 2021 Telntang Pedoman Penerapan Apilkasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang menjadi aplikasi umum di bidang kelarsipan. Salah satu pemerintah yang menerapkan aplikasi SRIKANDI adalah pemerintah Kabupaten Pandeglang yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang.

Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) adalah aplikasi umum yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang khusunya dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah wilayah di Kabupaten pandeglang serta seluruh lembaga pemerintahan baik kementrian maupun non kementrian, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indoensia pada umumnya. Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) resmi di luncurkan bertepatan pada hari ulang tahun Kabupate Pandeglang yang ke 153 bertempat di Pendopo Kabupaten Pandeglang – Banten.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian "PengImplementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pandeglang" dengan rumusan masalah Bagaimana Pengimplementasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) Pada Dinas

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang yang bertujuan untuk mengetahui cakupan bagaiman penerapan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pandeglang.

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh informasi dengan tujuan dan sasaran tertentu.Agar suatu penelitian dapat teruji dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahan hasil penelitian yang di sajikan, maka dalam penelitian itu harus digunakan metode-metode ilmiah dan kaidah-kaidah yang sah, dengan tentu saja memperhatikan kesesuaian dengan kondisi lapangan di mana penelitian itu dilakukan.(Marjano2018).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (Anggito 2018), penelitian kualitatif berlandaskan filsafat post-positivis karena mengkaji keadaan benda-benda alam (berbeda dengan eksperimen) dimana peneliti mempunyai kuncinya, pengambilan sampel menggunakan pendekatan kualitatif karena mencoba mengetahui fakta Kabupaten Pandeglang dihubungkan dengan penerapan Sistem Informasi Arsip Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglag. Dipilihnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai tempat penelitian karena Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan pemerintah daerah yang menerapkan Sistem Informasi Arsip Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) real-time menggunakan Srikandi versi 3. Subyek penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi.Namun, itu teknik analisis data menggunakan konsep analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman Usman (2009), yaitu terdiri dari pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penyajian data menarik kesimpulan/konfirmasi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Nomor 4 tahun 2021 Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), mengingat Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) mempunyai peranan yang sangat penting hal ini guna mendukung pengenalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aplikasi Srikandi adalah persuratan pertama yang terpusat dan terintegrasi antara pemerinatahan pusat dan pemerintahan daerah. Arsip Nasional RepublikIndonesia berhak menentukan praktik hukum dan peraturan sesuai tugas dan tanggung jawabnya di bidang kearsipan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penyusunan peraturan ANRI untuk penyelenggaraan kearsipan.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabpaten Pandeglang mengeluarkan surat keputusan Nomor : 800/12-DPAD/SK/2022 tentang Penunjukan Admin dan Operator pengelola Saplikasi Srikandi dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang. Adapun pegawai-pegawai yang ditunjuk adalah sebagai berikut :

Admin dan Operator Aplikasi SRIKANDI
Pada DPAD Kabupaten Pandeglang

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	Hendriana, S.Sos., M.Si	Admin SRIKANDI	
2.	Muhamad Azizul Rochman	Operator SRIKANDI	

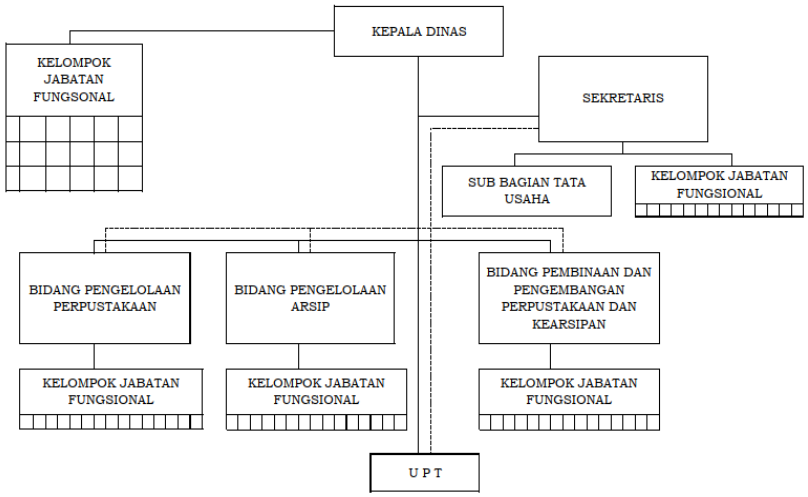
Sumber : Sub Bagian TU DPAD Kabupaten Pandeglang

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tugas, serta Tata Cara Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan Adalah Kepala Dinas
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah sekretariat terdiri dari :
    1. Subbagian Tata Usaha
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
    1. Bidang Pengelolaan Perpustakaan
    2. Bidang Pengelolaan Arsip; dan
    3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
d. Unit Pelaksana Teknis
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: .

Berdasarkan Pasal 34 UU Kearsipan No.43 Tahun 2009, negara wajib menjaga perlindungan dan pelestarian arsip sebagai obyek tanggung jawab baik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luarnya. Dalam UU Kearsipan No.43 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa salah satu tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara..

Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diwajibkan melalui Keputusan Presiden No.95 Tahun 2018 untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel serta bermutu.dan pelayanan publik yang dapat diandalkan.Mengenai manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE), Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

pandeglang mengimplementasikannya dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang merupakan perpaduan antara praktik kearsipan dengan ICT dan pengelolaan kearsipan konvensional.Dengan diperkenalkannya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di bidang kearsipan, fungsi administrasi publik akhirnya dapat diselaraskan melalui aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis yang terintegrasi (SRIKANDI) di masing-masing institusi dengan beberapa penyesuaian tertentu.

Saat ini Pemerintah menerapkan dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua sektor baik pemerintahan pusat maupun daerah, termasuk dalam hal pengelolaan kearsipan.Proses kerja sistem kearsipan khususnya persuratan akan terus menjadi lebih cepat, efisien dan lebih banyak diarahkan kepada jenis persuratan yang bersifat elektronik atau digital. Salah satu contohnya adalah penerapan aplikasi srikandi, dimana sistem kearsipan menjadi terpusat dalam satu jaringan dan terintegrasi dari tingkat pemerintahan daerah hingga pemerintahan pusat sehingga hal ini dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Dahulu ketika hendak mengirimkan surat membutuhkan waktu hingga berhari hari jika ingin mengirimkan surat dari daerah ke pusat, namun sejak adanya aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Cuma dalam hitungan detik surat sudah terkirim dan tersampaikan kepada instansi pemerintahan pusat.

Dalam mendukung gerakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sisitem Pemeritahan Berbasis Elektronuik (SPBE) maka Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) serta sekaligus dalam rangka peningkatan kinerja sumber daya manusia dan peningkatan pegambangan pengelolaan kearsipan berbasis digital sehingga kita dapat mengakses arsip yang kita butuhkan kapanpun dan dimanapun.

Oleh sebab itu, dalam rangka memberi sokongan lembaga kearsipan dalam menemukan arsip-arsip seperti memori kolektif bangsa dan juga memori kolektif masyarakat yang belum menjadi bagian dari arsip yang dikelola oleh lembaga kearsipan, maka perlu disusun suatu panduan kearsipan daftar Pencarian arsip pedoman ini hendaknya memberikan bimbingan teknis kepada lembaga kearsipan yang berada di bawah kewenangannya dalam penyusunan dan penerbitan daftar pencarian arsip, sehingga arsip statis dapat terjaga dan terpelihara di lembaga kearsipan sebagai memori kolektif banga sehingg akan bermanfaat bagi negara, Lemabaga Pemerintahan dalam rangka pelayanan publik dalam hal informasi kesejarahan. Hal ini juga dapat di jadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian sebagai sumber pendidikan sejarah.

Untuk menjamin keikutsertaan dalam penyelamatan kearsipan, setiap lembaga wajib menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden No.132 Tahun 2018 tentang arsitektur sistem pemerintahan elektronik, dengan memperhatikan asas, kriteria kearsipan dan pelaksanaannya, agar arsip dapat cepat ditemukan dan diserahkan kepada lembaga kearsipan..

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) meliputi: Pengelolaan surat masuk dan keluar serta pengarsipan naskah.Dinas Perpustakaan dan arsip Daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai 4 (empat) sistem pengelolaan kearsipan yang meliputi pengelolaan kearsipan resmi atau formal (naskah dinas), klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip dan sistem klasifikasi keamanan serta akses arsip dinamis serta pemanfaatan arsip dinamis. Kesempurnaan dari4 (empat) media arsip menjadi salah satu prasyarat implementasi aplikasi Srikandi. Sebelum penerapan aplikasi Srikandi,Dinas

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pandeglang sebelumnya telah menerapkan aplikasi E-Office yang merupakan aplikasi pengelolaan dokumen surat menyurat secara online atau digital.Namun aplikasi ini hanya berfungsi untuk mengambil dokumen resmi yang keluar, sedangkan pihak ketiga menggunakan aplikasi Simaya untuk mengembangkan skrip guna mengelola arsip mulai dari pembuatan hingga penghapusan. Aplikasi Srikandi merupakan salah satu inovasi yang diciptakan pemerintah untuk memfasilitasi sistem persuratan dan pengelolaan dokumen yang terintegrasi secara nasional..

Proses pengimplementasian aplikasi Srikandi pada Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang belum berjalan secara optimal karena penguasaan aplikasi belum secara keseluruhan mengusai, apalagi aplikasi ini sudah tidak lagi menggunakan kertas tapi seluruhnya menggunakan aplikasi baik untuk melakukan paraf, sampai tanda tangan sekalipun menggunakan aplikasi ini serta pengiriman dilakukan secara online. Dengan demikian tujuan diterapkannya aplikasi ini dalam upaya efisiensi waktu. Dengan pelaksanaan kegiatan ini akan lebih meningkatkan kinerja dalam penatausahaan dan pengadministrasian naskah dinas. Hal ini juga menunjang kinerja serta searah dengan tujuan perubahan iklim dalam hal menjaga lingkungan dengan meminimalkan penggunaan kertas atau ***paperless.***

Berdasarkan hasil taanya jawab yang dilakukan dengan para narasumber ditemukan hal-hal bahwa aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) masih dianggap barang baru sehingga masih belum banyak pegawai khususnya dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang yang belum menguasai tapi masih bertumpu pada tenaga operator saja. Hal ini disebabkan pengguna harus melalui banyak proses untuk melakukan suatu tindakan (tampilan kurang sederhana) dan tidak ada notifikasi penerimaan suratnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa faktor yang dapat menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan penataan, yaitu:

a. Pengelolaan arsip masih sulit dilakukan karena kurangnya sumber daya anggaran, sehingga kurangnya sumber daya untuk menunjang operasional kearsipan, serta sumber daya manusia sehingga proses pengelolaan arsip menjadi rumit.
b. Pejabat pengelola arsip masih merupakan bagian dari staf tata usaha, dan bukan tenaga ahli kearsipan sehingga pengolahan arsip dapat terpecah menjadi tugas lain.
c. Masih kurangnya keterampilan dan pengetahuan di kalangan staf tata usaha terakit dengan tata cara pengelolaan arsip.

sehinga berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut perlu di lakukan beberapa upaya penanggulang yang harus dilakukan dalam rangka penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terinetgrasi (SRIKANDI) beberapa upaya tersebut agar penggunaan aplikasi srikandi menjadi lebih baik adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi yang segera dan berkesinambungan dengan seluruh pegawai khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pandeglang terkait dengan pengimplementasian aplikasi Srikandi.
b. Memerikan penjelasan yang mudah di pahami kepada para pengguan serta para operator aplikasi srikandi agar mereka dapat memahami dengan baik
c. membatkan role atau alur tata cara penggunaan aplikasi srikandi untuk tiap kepentingan pengguna pengguna, mulai dari pencatat surat, konseptor, verifikator,penandatangan hingga balik lagi ke pencata surat dalam hal pengiriman naskah keluar..

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

Proses pengelolaan arsip dimulai dari proses penciptaan, yang tergantung pada apakah arsip tersebut dibuat secara manual atau digital. Jika proses penciptaannya manual, langkah awal adalah mengalihkan media ke format digital, sedangkan jika penciptaannya digital, langkah pertama adalah mengidentifikasi arsip tersebut. Setelah melakukan identifikasi berdasarkan instrumen yang tersedia, langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam file home. Jika arsip digital belum memiliki file home, maka file home akan dibuat terlebih dahulu. Setelah arsip masuk ke dalam file home, langkah berikutnya adalah memilih item dan menambahkan metadata yang sesuai. Kemudian, arsip dimasukkan ke dalam daftar arsip. Untuk naskah dinas atau jenis arsip lainnya, daftar arsip sudah diinput terlebih dahulu di Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terinetgrasi (SRIKANDI) sebelum dikirim melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN). Pada tahap pengelolaan naskah dinas atau daftar arsip untuk mendukung pelayanan publik dan transparansi informasi, proses dimulai dengan pengolahan informasi. Informasi yang telah diolah kemudian disusun menjadi daftar informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah menyusun daftar informasi, persetujuan dari pejabat yang berwenang akan diminta sebelum informasi dapat digunakan atau disebarluaskan lebih lanjut. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara sistematis, pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Ide pemuatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) adalah untuk mendorong seluruh pegawai pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya bertujuan agar pelayanan persuratan menjadi mudah dan cepat dengan penerapan aplikasi Srikandi. Aplikasi Srikandi merupakan sebuah aplikasi berbentuk *website* yang bisa diakes kapanpun dan dimanapun tetapi dengan catatan ada koneksi internet serta tanpa perlu melakukan inastalasi. Aplikasi ini juga sangat ekeftif dan efisien serta *reeltime* terhadapat tenaga dan biaya, hal ini dikarenakan semua proses dilakukan secara online mulai dari pencatatan, pembautan,pengiriman,penerimaan hingga dispoisi dan penyelesaian disposisi semuanya di lakukan secara onlione dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Aplikasi Srikandi Versi 3 mempunyai fitur populer yang mendukung keunggulan aplikasi ini beberapa fitur tersebut adalah sebgai berikut :

1. Aplikasinya berbasis cloud dan disimpan di pusat data nasional , sehingga instansi tidak perlu menyediakan peralatan perlengkapan secara mandiri dan tanpa mengelaurakan biaya.
2. Penyusunan, pengiriman dan penerimaan dokumen resmi antar lembaga dapat dilakukan dengan mudah dan dapat dilakukan kapan saja tergantung kebutuhan dan menyesuaikan dengan situasi dan konsidi hal ini dalam artian reel time.
3. Sama halnya dengan pemanfaatan arsip antar satuan kerja atau instansi, hal ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat serta dapat menghemat waktu dan tenaga, hal ini dikarena kita tidak perlu berangkat ke suatu instansi atau lembaga karena sekali klik surat atau naska dinas langsung terkirim ke instansi yang kita tuju.
4. Unit kerja lebih mudah mengelola arsip serta dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaan.
5. Multiple sign
6. Notifikasi Gmail
7. Application Programing Interfavev Management untuk kebutuhan integrasi dengan aplikasi lain.

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

Berikut ini adalah beberapa menu aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada role pencatat surat satker yang di dapatken peneliti saat melakukan observasi dari Muhamad Azizul Rochman selaku operator aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang.

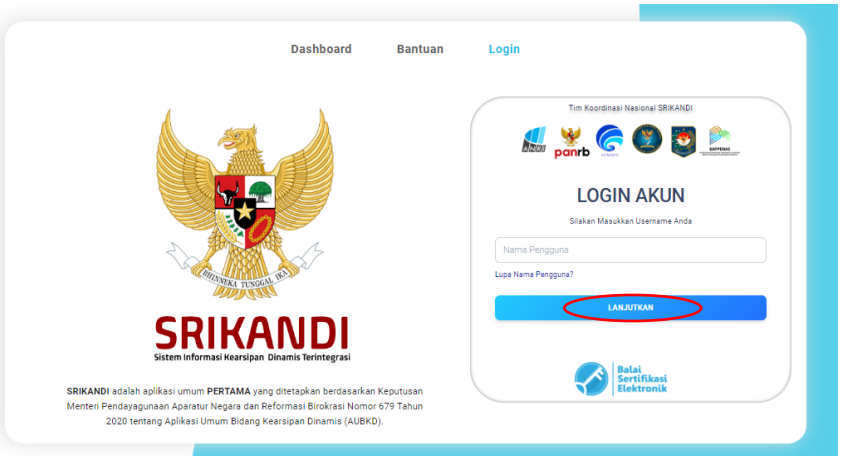
Tabel Menu Aplikasi Srikandi

No	Nama Menu	Fungsi
1	Dashboard	Menampilkan Dashboard Aplikasi
2	Pencipta Arsip	
	- [Naskah Masuk | Registrasi Naskah Masuk]	Menampilkan Form Registrasi Naskah Masuk
	- [Naskah Masuk | Daftar Naskah Masuk]	Mengelola Data Naskah Dinas Masuk
	- [Naskah Masuk | Log Naskah Masuk]	Mengelola Data Log Naskah Masuk
	- [Naskah Keluar | Daftar Naskah Keluar]	Mengelola Data Nasah Dinas Keluar
	- [Naskah Keluar | Log Naskah Keluar]	Mengelola Log Naskah Dinas Keluar
3	Master	
	- [Pengguna | Penandatangan]	Mengelola Data Penandatangan
	- [Pengguna | Tujuan Naskah]	Mengelola Data Tujuan Naskah
	- [Pengguna | Group Tujuan Naskah]	Mengelola Data Group Tujuan Naskah
	- [Pengguna | Verifikator]	Mengelola Data Verifikator
	- [Pengguna | Tembusan]	Mengelola Data Tembusan
	- [Pengguna | Group Tembusan]	Mengelola Data Group Tembusan
	- [Pengguna | Group Tujuan Disposisi]	Mengelola Data Group Tujuan Dispoisi
4	Instrumen Kearsipan	
	- [Klasifikasi Arsip | Klasifikasi]	Mengelola Data Klasifikasi
	- [Klasifikasi Arsip | Peyusutan Akhir]	Mengelola Data Penyusutan Akhir
	- [Klasifikasi Arsip | Kategori Berkas	Mengelola Data Kategori Berkas
	- Klasifikasi Keamanan	Mengelola Data Klasifikasi Keamanan
	- [Tata Naskah Dinas | Jenis Naskah]	Mengelola Jenis Naskah Dinas
	- [Tata Naskah Dinas | Sifat Naskah]	Mengelola Data Sifat Naskah Dinas
	- [Tata Naskah Dinas | Instruksi Disposisi	Mengelola Data Instruksi Disposisi
5	Pemeliharaan	
	- Pemberkasan Arsip Aktif	Mengelola Data Pemberkasan Arsip Aktif
	- Pemberkasan Mandiri	Mengelola Data Pemberkasan Mandiri

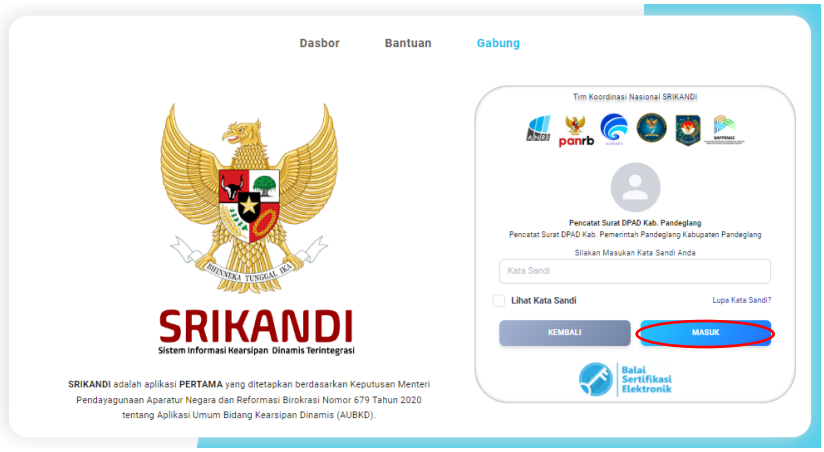
Berdasarkan tabel daftar menu di atas berikut ini adalah tampilan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

1. Halaman log in
   a. Log in
      Tampila Form Log ini sebgai berikut :

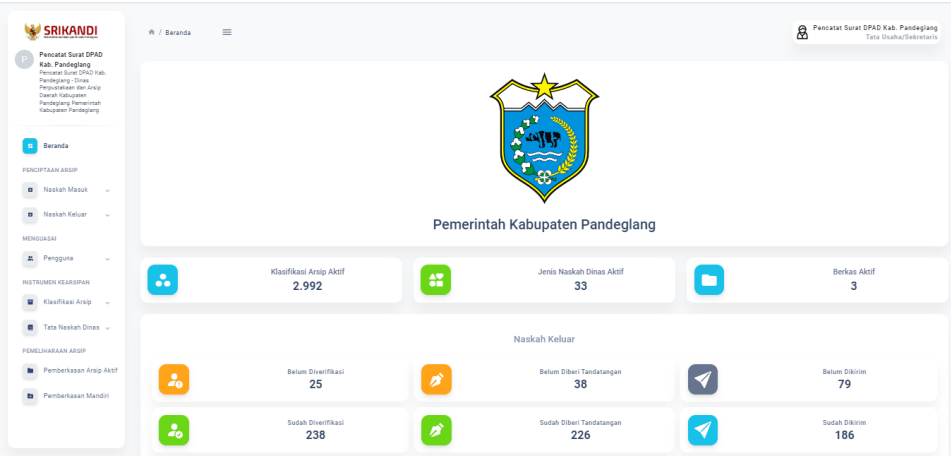
Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.



Masukkan Nama Pengguna, lalu klik tombol LANJUTKAN, akan menampilkan form Password berikut:



Masukkan Kata Sandi, lalu klik tombol MASUK, akan menampilkan Dashboard aplikasi SRIKANDI versi 3.0



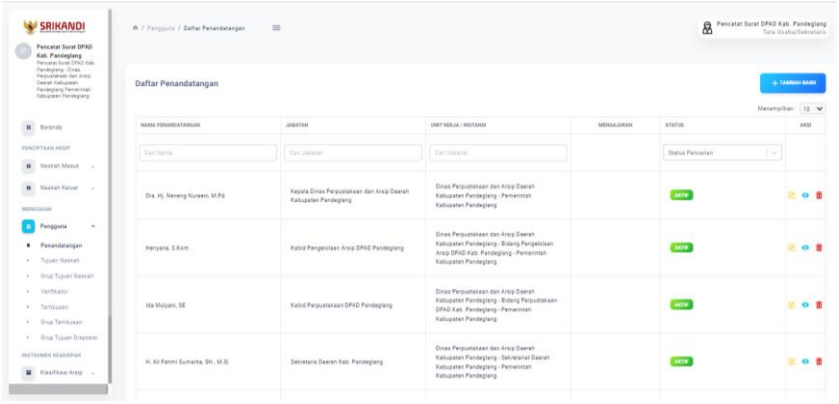
Setelah diklik masuk akan muncul tampilan Dashbord seperti pada gambar diatas.

2. Master

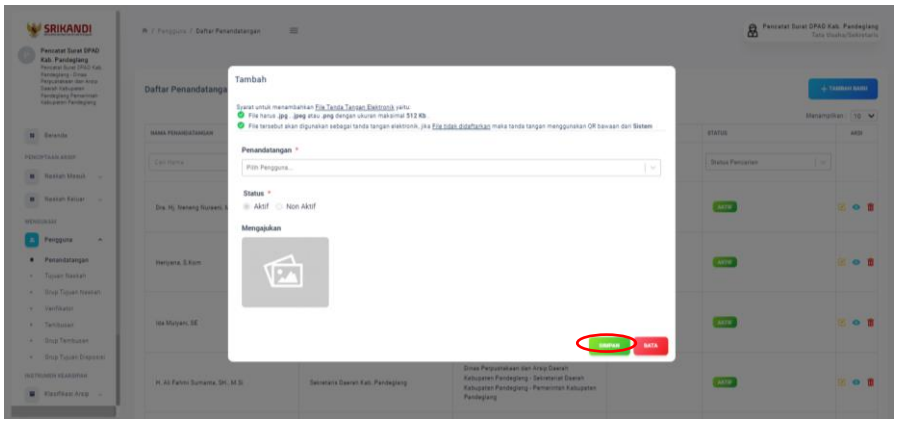
Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

a. [Pegguna | Penandatangan]

Pilih menu [PENGGUNA | PENANDATANGAN] akan menampilkan Daftar Penandatangan sebagai berikut :



Klik TAMBAH BARU untuk membuat data baru, dan akan menampilkan form berikut:

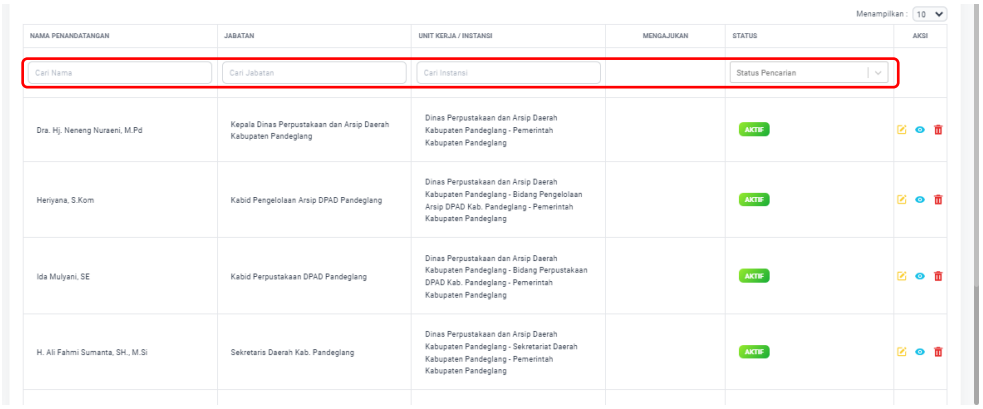


Masukkan data sesuai kebutuhan, lalu klik SIMPAN. Data berhasil disimpan dan akan ditampilkan pada Daftar Penandatangan.

Keterangan simbol pada menu daftar penandatangan :

No	Simbol	Keterangan
1		Klik untuk mengubah data
2		Klik untuk menampilkan detail data
3		Klik untuk menghapus data
4	10	Klik untuk menampilkan jumlah data per halaman

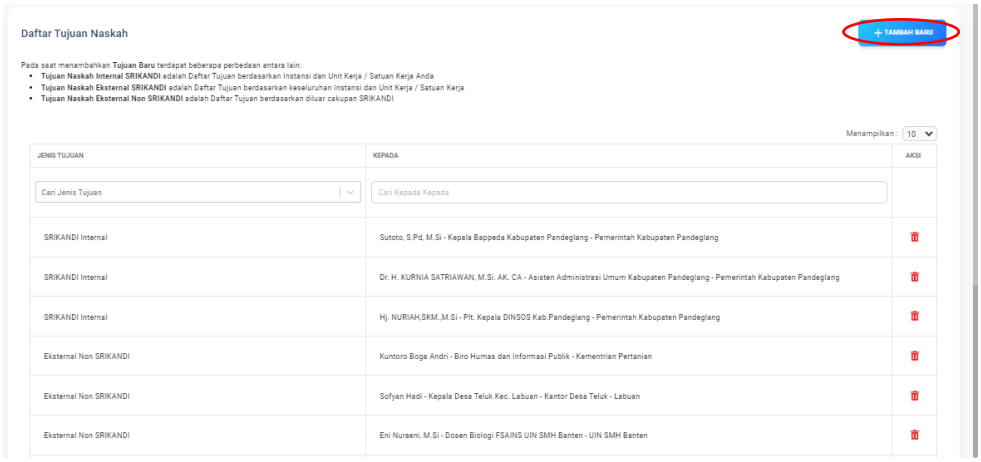
Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.



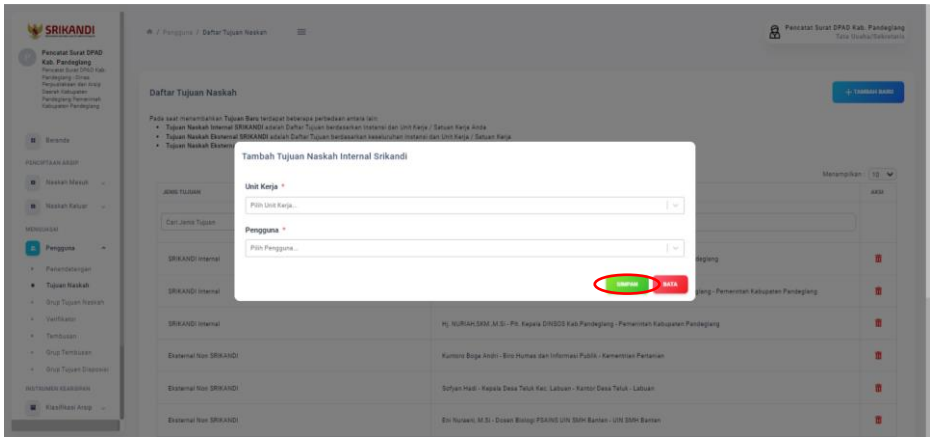
Masukkan kata kunci pencarian pada bagian yang ditandai kotak merah sesuai kebutuhan. Data akan ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang telah dimasukkan.

b. [Pengguna | Tujuan Naskah]

- Klik tombol [PENGGUNA | TUJUAN NASKAH], akan menampilkan Daftar Tujuan Naskah sebagai berikut:



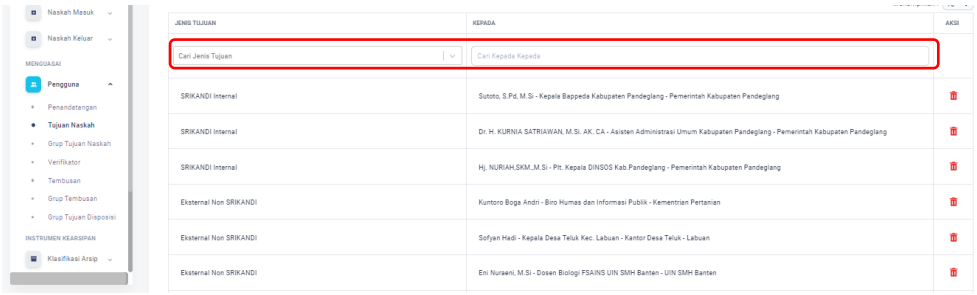
- Klik TAMBAH BARU untuk membuat data baru, dan akan menampilkan form berikut



Masukkan data sesuai kebutuhan, lalu klik SIMPAN. Data berhasil disimpan dan akan

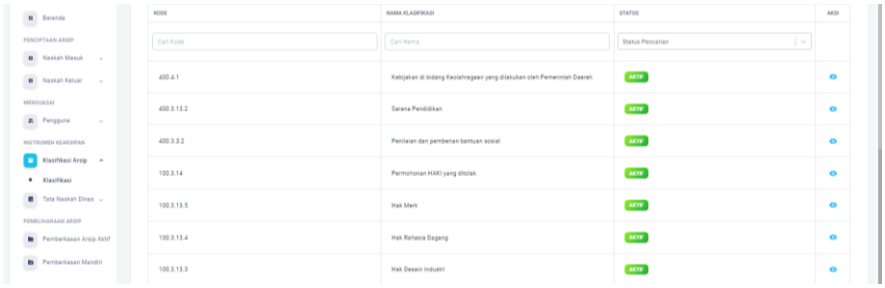
Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

ditampilkan pada Daftar Penandatangan.

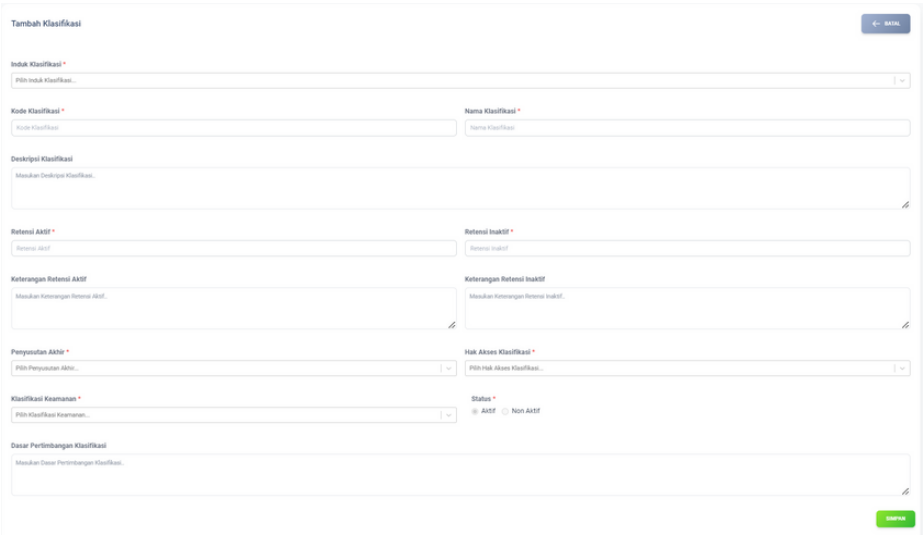


Masukkan kata kunci pencarian pada bagian yang ditandai kotak merah sesuai kebutuhan. Data akan ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang telah dimasukkan.

3. Instrumen Kearsipan
   a. [Klasifikasi Arsip | Klasifikasi]
      Pilih menu [Klasifikasi Arsip | Klasifikasi] akan menampilkan Daftar Klasifikasi sebagai berikut:

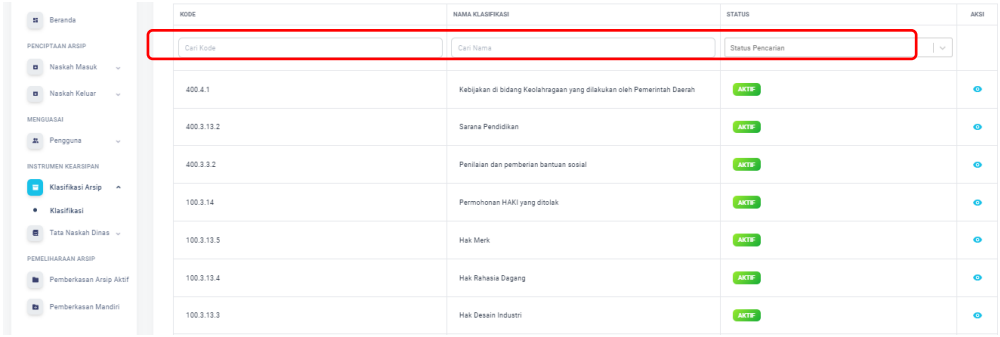


Klik TAMBAH BARU untuk membuat data baru, dan akan menampilkan form berikut:



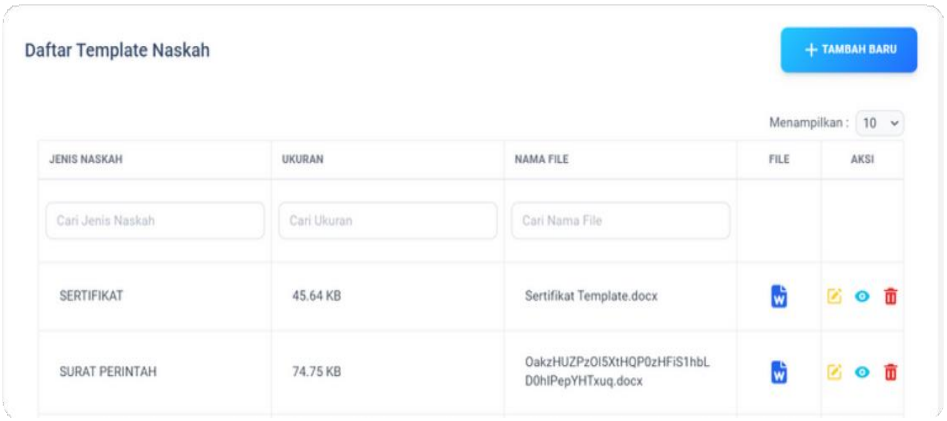
Masukkan data sesuai kebutuhan, lalu klik SIMPAN. Data berhasil disimpan dan akan ditampilkan pada Daftar Unit Kerja.

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.



Masukkan kata kunci pencarian pada bagian yang ditandai kotak merah sesuai kebutuhan. Data akan ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang telah dimasukkan.

4. Tata Naskah Dinas
   a. [Templet Naskah Dinas | Templet Naskah]
   Pilih menu [Tamplate Naskah Dinas | Tamplate Naskah] akan menampilkan Daftar tamplate naskah sebagai berikut:

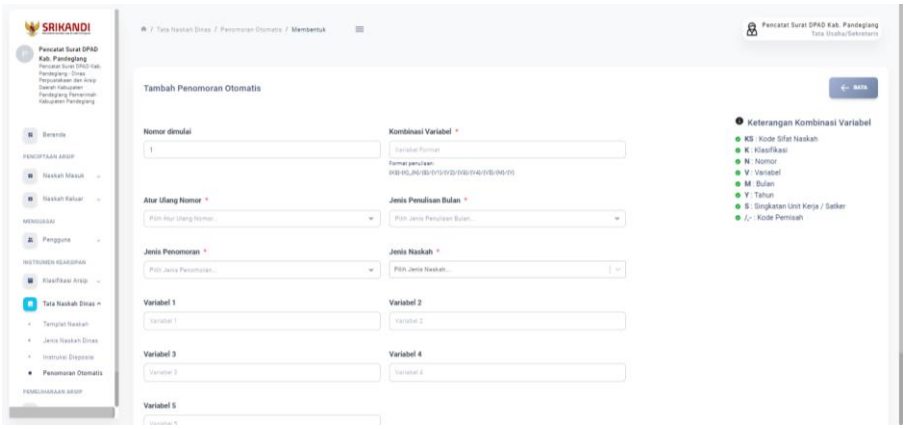


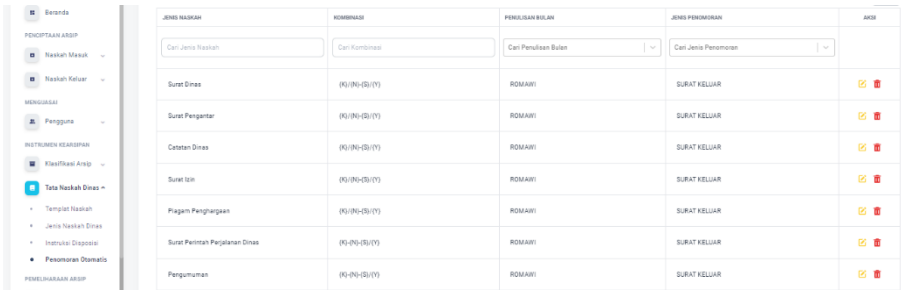
   b. [Templet Naskah Dinas | Penomoran Otomatis]
   Pilih menu [Tamplate Naskah Dinas | Penomoran Otomatis] akan menampilkan Daftar Penomoran Otomatis sebagai berikut:



Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

Klik TAMBAH BARU untuk membuat data baru, akan menampilkan form berikut:

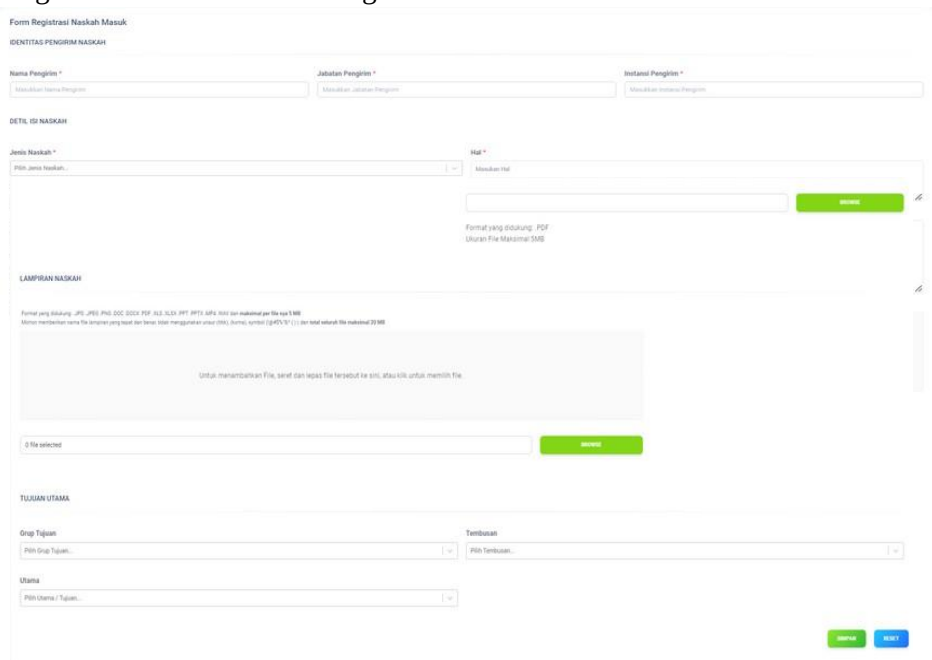




Masukkan kata kunci pencarian pada bagian yang ditandai kotak merah sesuai kebutuhan. Data akan ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang telah dimasukkan.

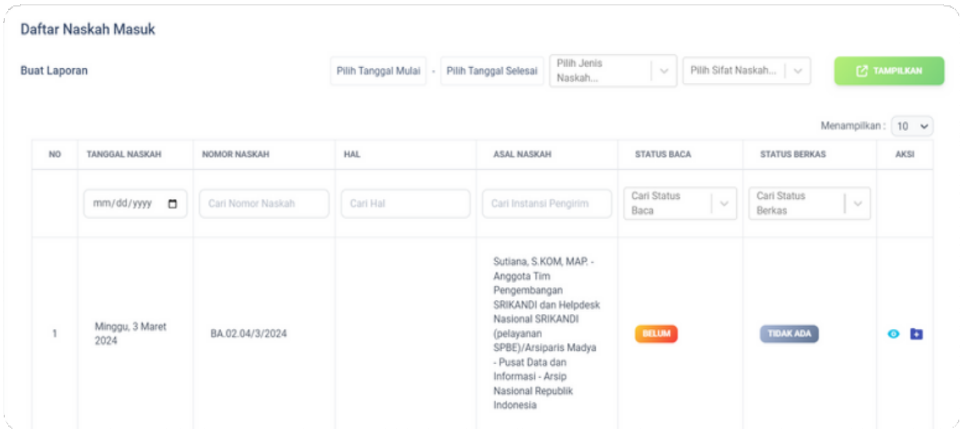
Penciptaan Arsip

a. [Naskah Masuk | Registrasi Naskah Masuk]
Pilih menu [Naskah Dinas | Registrasi Naskah Masuk] akan menampilkan form Registrasi Naskah Masuk sebagai berikut:

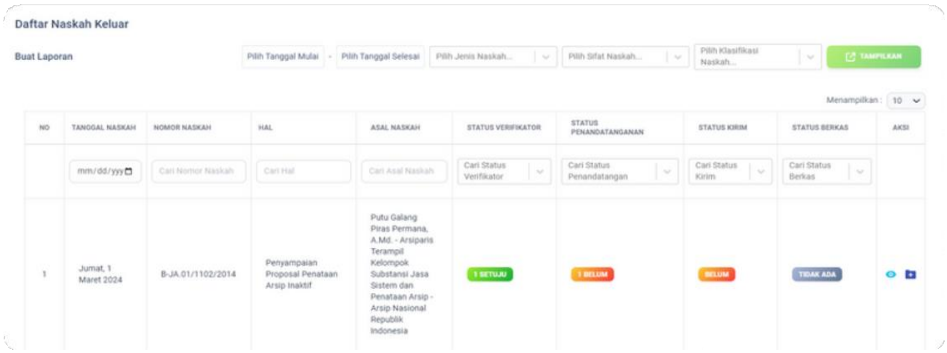


Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

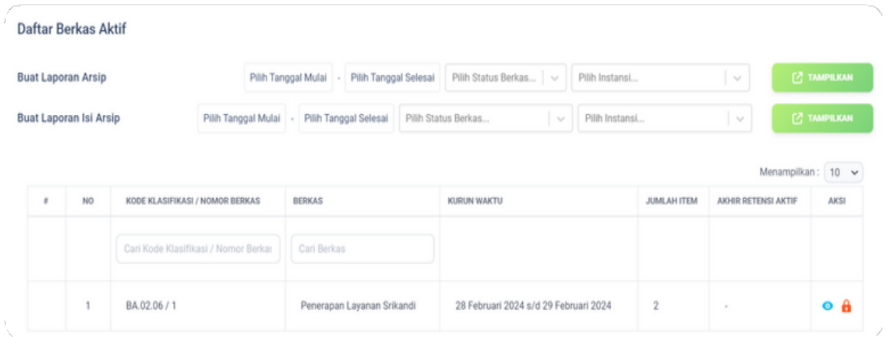
b. [Naskah Masuk | Realisasi Naskah Masuk]
Pilih menu [Naskah Masuk | Daftar Naskah Masuk] akan menampilkan Daftar Naskah Masuk sebagai berikut:



c. [Naskah Keluar | Daftar Naskah Keluar]
Pilih menu [Naskah Keluar | Daftar Naskah Keluar] akan menampilkan Daftar Naskah Keluar sebagai berikut:



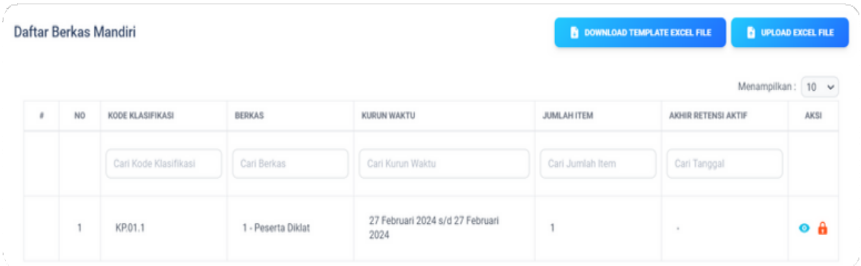
5. Pemeliharaan Arsip
   a. Pemberkasan Arsip Aktif
   Pilih menu Pemberkasan Arsip Aktif akan menampilkan daftar pemberkasan arsip aktif sebagai berikut:



Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

b. Pemberkasan Mandiri

Pilih menu Pemberkasan Mandiri akan menampilkan daftar pemberkasan mandiri sebagai berikut:



Masukkan kata kunci pencarian pada bagian yang ditandai kotak merah sesuai kebutuhan. Data akan ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang telah dimasukkan. Klik tombol DOWNLOAD TEMPLATE EXCEL FILE untuk mendowload tamplate pemberkasan dan klik tombol UPLOAD EXCEL FILE untuk mengupload berkas secara mandiri.

KESIMPULAN

SRIKANDI merupakan sIstem aplikasi untuk penatausahaan arsip dinamis yang baru maka Kepala DPAD Kabupaten Pandeglang harus selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan pemahaman pengelola arsip sekolah khususnya terlebih pada aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dengan selalu mengikutsertakan operator dan admin untuk mengikuti bimbingan teknis, konsultasi maupun studi banding dengan DPK Provinsi Banten dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mempunyai kewenangan dalam penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Terkait dengan hambatan serta upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), diantaranya penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang terutama dengan pihak Pihak terkait harus melakukan penambahan daya pada jaringan internetnya, karena apabila jaringan internetnya terbagi dengan aktivitas lain maka tidak dapat mengupload data maupun penerimaan data arsipnya. Serta selalu dilakukan perawatan secara periodik agar data-data arsip yang sudah tersimpan dalam aplikasi tidak dapat diretas oleh haker.

Dalam upaya untuk mendukung terlaksananya SRIKANDI diharapkan operator Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang hendaknya segera menyusun *Standar Operation Prosedure (SOP)* dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) agar lebih memudahkan kepada para pengguna. Dalam upaya percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang harus mulai mempersiapkan segala bentuk kebutuhan baik dari segi alat alat sebagai penunjang juga kesiapan sumber daya manuisa untuk meingkatkan kualitas pengelolaan aplikasi Srikandi.

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakulas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Terbuka selaku penyeelenggaran Seminar Nasional.

REFERENSI

Aini, Y. N. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, *7*(1), 84–88. https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/900

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. *Arsip Nasional Republik Indonesia*, *7*(2), 107–115.

Endang Sri, M. S. S. (2009). *Manajemen Kearsipan*. Jakarta, PT Glora Aksara Pratama.

Febrianto, F. A. (2023). *Implementasi Program Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Salatiga*. https://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/2156/

Harves Dasnoer, Frinaldi A, M. l. (2023). *Implementasi Sistem Kebijakan Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang*. https://zenodo.org/records/8242137

Huan Hakiki Piculima, Lastria Nurtanzila, SIP, M. (2023). *Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia*. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/231422

Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah*. *144*, 1–74.

Martono, B. (2014). *Penataan Berkas Dalam Manajemen Kearsipan*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Mulyadi. (2016). *Pengelolaan Arsip Berbasis Otomasi*. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.

Pandeglang, P. K. (2019). *Keududukan, Susuna Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang*. *1999*.

Pemerintah Pusat. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.

PERPRES 132. (2022). Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Peraturan Presiden Republik Indonesia*, *021*, 1–155. https://peraturan.bpk.go.id/Details/233483/perpres-no-132-tahun-2022

Pudji Muljono, Janti G Sujana, B. P. (2014). *Metodologi Penelitian dan Laporan Kearsipan*. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.

Rahmah, F., & Meirinawati, M. (2023). Penerapan Electronic Government Melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Probolinggo. *Publika*, 2341–2350. https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2341-2350

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

Santoro, A. (2014). *Pengantar Manajemen Kearsipan*. Yogyakarta, Graha Ilmu Bhartos.

Sugiarto, A. T. W. (2015). *Manajemen Kearsipan Modern*. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.

Sukoco, B. M. (2006). *Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis*. Jakarta, Graha Pedia.

Sutirman. (2016). *Manajemen Arsip Elektronik*. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. *Nomor 43 Tahun 2009*, *1*, 1–86. https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu0442009.pdf

Hak Cipta © 2024, Muhamad Suepa.

Praktik dan Tantangan dalam Pengelolaan Arsip Penelitian: Kasus Fakultas ABC Universitas XYZ

Nisa Khaerani Mulia
Program Studi D4 Kearsipan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UniversitasTerbuka
e-mail: nisakhaerani33@gmail.com

Abstrak

Dalam melaksanakan penyelenggaraan penelitian yang merupakan salah satu kewajibannya, Fakultas ABC Universitas XYZ harus melakukan pengelolaan arsip penelitian agar arsip tersebut dapat menjadi sumber bahan bukti dan informasi untuk menjamin akuntabilitas dan reputasi di bidang penelitian. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan arsip penelitian yang tercipta, praktik, beserta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC. Studi dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui suatu studi kasus. Data dan informasi dikumpulkan melalui observasi partisipasi, wawancara, serta studi dokumen. Studi ini menemukan bahwa Fakultas ABC menciptakan arsip penelitian berupa proposal penelitian, data penelitian, laporan penelitian, sertifikat hak cipta, dan naskah dinas terkait kegiatan penelitian. Praktik pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC terdiri dari penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip. Kendala dan tantangan dalam pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta kebijakan dan komitmen manajemen Fakultas ABC. Temuan penelitian ini diperkirakan dapat mengarahkan Fakultas ABC untuk merumuskan kebijakan dan meningkatkan komitmen manajemen dalam pengelolaan arsip penelitian, mengisi gap dalam penelitian pengelolaan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan arsip penelitian dan pengelolaan arsip perguruan tinggi, serta dapat menjadi pembelajaran bagi fakultas atau perguruan tinggi lain.

***Kata kunci**: arsip penelitian, pengelolaan arsip, perguruan tinggi, tantangan*

PENDAHULUAN

Penelitian merupakan salah satu kewajiban, fungsi, dan tugas utama perguruan tinggi. Penelitian juga merupakan salah satu indikator dalam menentukan kualitas dan reputasi suatu perguruan tinggi. Dalam menyelenggarakan penelitian, perguruan tinggi tentunya menghasilkan arsip (*records*) sebagai bukti transaksi, kegiatan, dan keputusan dalam penelitian. Arsip penelitian tersebut memiliki peran penting dalam mengelola serta mengatur kegiatan dan hasil penelitiaan, mendokumentasikan kolaborasi, mematuhi peraturan pemerintah dan institusi, serta menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual (Schreier et al., 2006). Arsip penelitian juga dibuat dan digunakan sebagai pendukung efisisensi bisnis dan administrasi, pembuktian, untuk akuntabilitas, dan tujuan fiskal perguruan tinggi (Childs & McLeod, 2004).

Arsip penelitian dikelola oleh perguruan tinggi untuk memastikan arsip penelitian tersebut terjaga keautentikan, keandalan, integritas, dan kegunaannya, baik selama masih digunakan oleh si pencipta arsip ataupun ketika sudah menjadi memori kolektif perguruan tinggi (The University of Melbourne, 2023). Oleh karena itu, perguruan tinggi harus melakukan kegiatan pengelolaan arsip (records *management*) untuk menjaga arsip penelitian tersebut (Simwaka et al., 2023) yang meliputi penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan disposisi arsip (Franks, 2018).

Hak Cipta © 2024, Nisa Khaerani Mulia

Terkait definisi arsip penelitian, Shankar (1999) menyebutkan bahwa arsip penelitian yaitu dokumen yang diciptakan selama pelaksanaan penelitian, direkam dengan sengaja untuk memungkinkan orang lain dapat mereplikasi kegiatan yang didokumentasikan, menguraikan proses intelektual dan tindakan praktisnya, dan untuk menciptakan dokumentasi untuk administrasi peraturan untuk kegiatan tersebut, contohnya yaitu data penelitian beserta metadatanya, catatan penelitian, hasil observasi, korespondensi selama proyak penelitian, laporan hibah, *logbook*, dan lain-lain. Lalu, Childs & McLeod (2004) menyebutkan bahwa arsip penelitian terdiri dari arsip yang merekam proses penelitian, luaran atau produk penelitian, manajemen proses, dan data penelitian itu sendiri, misalnya berupa proposal, kontrak, transaksi keuangan, kegiatan sumber daya manusia, notulen rapat, dan lain-lain. Selain itu, Schreier et al. (2006) secara singkat menyebutkan arsip penelitian adalah informasi yang direkam, apapun medianya, yang diperlukan untuk rekonstruksi dan evaluasi penelitian. Arsip penelitian juga dapat diartikan sebagai arsip yang dibuat di perguruan tinggi oleh fakultas, staf, mahasiswa, peserta pelatihan, dan peneliti tamu selama kegiatan ilmiah mereka (Washington State University, 2019). Dengan demikian, dalam studi ini peneliti akan fokus pada arsip penelitian yang mencakup pada definisi-definisi di atas.

Banyak yang menganggap bahwa data primer penelitian bukan tergolong arsip, tetapi Grant (2017) menyatakan bahwa data penelitian sebanding dengan arsip penelitian lainnya dalam hal nilai guna informasional dan evidensial, serta keterampilan dan keahlian dari para professional kearsipan diakui relevan dengan pengelolaan dan pelestarian data penelitian tersebut. Hal ini juga didukung oleh pendapat Childs & McLeod (2004) yang menyebutkan bahwa data penelitian disimpan untuk mendukung pengaplikasian paten dan penelitian berikutnya, dan bahkan harus dipublikasikan jika penelitiannya yang dibiayai oleh dana masyarakat atau negara. Oleh karena itu, data penelitian perlu dijadikan sebagai arsip agar dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diakses saat diperlukan. Dengan demikian, peneliti akan memasukkan data penelitian sebagai salah satu arsip penelitian yang harus dikelola di Fakultas ABC.

ISO 15489-1:2016 mendeskripsikan pengelolaan arsip (*records management*) sebagai "*field of management responsible for the efficient and systematic control of creation, receipt, maintenance, use, and disposition of records, including processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records*" (Franks, 2018, p.35). Berdasarkan pengertian pengelolaan arsip tersebut, peneliti akan mendeskripsikan pengelolaan arsip penelitian yang meliputi proses penciptaan (penerimaan dan pengkapturan), pemeliharaan, penggunaan, dan disposisi (penyusutan atau pemindahan dan pemusnahan) arsip. Hal tersebut juga sesuai dengan proses pengelolaan arsip di Universitas XYZ yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip (Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, 2009). Oleh karena itu, peneliti akan mendeskripsikan proses penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip untuk menggambarkan praktik pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC.

Dalam pengelolaan arsip penelitian tentunya terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang akan dihadapi. Tantangan tersebut muncul karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mengubah bagaimana suatu arsip diciptakan, dikumpulkan, dianalisa, dan disimpan (Schreier et al., 2006). Tantangan tersebut harus diidentifikasi,

Hak Cipta © 2024, Nisa Khaerani Mulia

diantisipasi, dan diselesaikan oleh perguruan tinggi agar tujuan pengelolaan arsip penelitian tercapai dan arsip penelitian dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Kepemilikan dan pengelolaan arsip penelitian perguruan tinggi didasarkan pada peraturan pemerintah dan prinsip-prinsip manajemen yang baik, serta berlaku untuk proyek penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi, proyek penelitian yang dilakukan di bawah naungan perguruan tinggi, dan menggunakan sumber daya perguruan tinggi. Penelitian di perguruan tinggi meliputi penelitian yang disponsori oleh perguruan tinggi itu sendiri (*non-sponsored research*) atau oleh pihak eksternal (*sponsored research*)(Washington State University, 2019).

Fakultas ABC Universitas XYZ merupakan salah satu institusi perguruan tinggi yang menyelenggarakan penelitian. Dalam menyelenggarakan penelitian, Fakultas ABC tentunya menghasilkan arsip penelitian. Arsip-arsip penelitian yang diciptakan dan diterima oleh Fakultas ABC harus dikelola dengan baik agar arsip dan informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan dan diakses dengan cepat dan tepat saat diperlukan untuk menunjang kegiatan layanan, pengelolaan sumber daya, dan pengembilan keputusan di Fakultas ABC.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan arsip penelitian apa saja yang dikelola di Fakultas ABC, bagaiman proses pengelolaannya dari penciptaan hingga disposisi arsip tersebut, serta apa saja tantangan yang ditemui dalam pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC. Dengan demikian, dapat diketahui praktik pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC, serta tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi selama pengelolaan arsip penelitian, sehingga dapat diberikan beberapa rekomendasi dan saran untuk perbaikan praktik pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC.

Temuan penelitian ini diperkirakan dapat mengarahkan Fakultas ABC untuk merumuskan kebijakan dan meningkatkan dukungan manajemen dalam pengelolaan arsip, khususnya arsip penelitian. Pada akhirnya, diharapkan dapat meningkatkan praktik pengelolaan arsip khususnya arsip penelitian di Fakultas ABC. Temuan penelitian ini kemungkinan juga signifikan dalam mengisi *gap* dalam penelitian pengelolaan arsip (*records management*) yang berkaitan dengan pengelolaan arsip penelitian dan pengelolaan arsip perguruan tinggi, serta dapat menjadi pembelajaran bagi fakultas atau perguruan tinggi lain.

METODE

Dalam menjawab rumusan masalah, peneliti melakukan penelitian kualitatif deskriptif melalui suatu studi kasus agar dapat dengan jelas menggambarkan secara pendalam praktik pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC. Data dan informasi yang dibutuhkan, dikumpulkan menggunakan metode observasi partisipasi. Bungin (2001) mengatakan observasi partisipasi adalah “pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam sirkulasi kehidupan objek pengamatan” (p.146). Peneliti memilih metode observasi ini karena sesuai dengan tujuan penelitian dan situasi peneliti.

Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan studi dokumen untuk dapat memahami proses bisnis kegiatan penelitian di Fakultas ABC, serta wawancara kepada beberapa dosen peneliti di Fakultas ABC untuk dapat mengetahui jenis arsip, praktik, kendala, dan tantangan dalam pengelolaan arsip penelitian yang mereka lakukan dan hadapi. Selain itu, peneliti juga melakukan tinjauan pustaka untuk lebih memahami definisi arsip penelitian, proses pengelolaan arsip secara teori, serta mendapatkan gambaran tentang pengelolaan arsip penelitian yang sudah pernah dilakukan di institusi lain.

Hak Cipta © 2024, Nisa Khaerani Mulia

Studi ini akan fokus pada arsip penelitian yang berupa arsip dinamis saja. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan masih disimpan selama jangka waktu tertentu. Pencipta arsip penelitian ini mencakup peneliti, Fakultas ABC yang diwakili oleh Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat, dan Universitas XYZ. Lalu, praktik pengelolaan arsip penelitian tersebut meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip penelitian di Fakultas ABC. Sedangkan tantangan dalam pengelolaan arsip penelitian adalah hambatan atau kendala yang dihadapi oleh dosen peneliti dan Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas ABC sebagai pencipta dan pengelola arsip penelitian di lingkungan Fakultas ABC Universitas XYZ.

Dalam tulisan ini, peneliti mensamarkan nama institusi menjadi Fakultas ABC Universitas XYZ karena informasi yang terkandung dalam tulisan ini dapat menimbulkan beberapa risiko kepada institusi yang bersangkutan. Risiko tersebut diantaranya yaitu risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Risiko kepatuhan dapat disebabkan karena institusi tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan kearsipan atau kebijakan internal yang berlaku sehingga dapat menimbulkan ancaman hukum dan reputasi terhadap institusi. Akibatnya, juga akan menimbulkan risiko reputasi di mana tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepada institusi dapat menurun. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko tersebut, peneliti memutuskan untuk menyamarkan nama institusi pada tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dipresentasikan berdasarkan tujuan penelitian: arsip penelitian yang dikelola di Fakultas ABC; praktik pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC; dan kendala serta tantangan dalam pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC.

Arsip Penelitian

Di Fakultas ABC Universitas XYZ, Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat serta masing-masing dosen peneliti memiliki kontrak kinerja dengan universitas di mana mereka harus memenuhi capaian kinerja di bidang penelitian yang dievaluasi setiap tahun. Oleh karena itu, kegiatan terkait penelitian di Fakultas ABC cendrung mengacu pada pemenuhan capaian kinerja tersebut.

Kegiatan-kegiatan terkait penelitian yang dilakukan oleh dosen peneliti meliputi: (1) penyusunan rencana penelitian; (2) program hibah atau bantuan penelitian; (3) penjalinan kerja sama atau kolaborasi penelitian; (4) penyusunan desain penelitian; (5) pengajuan kaji etik penelitian; (6) pengumpulan data penelitian; (7) pengolahan dan analisis data penelitian; (8) diseminasi atau publikasi hasil penelitian; (9) penyusunan laporan penelitian; (10) pengajuan pendaftaran kekayaan intelektual; dan (11) pertemuan-pertemuan ilmiah.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, dihasilkan arsip penelitian berupa: rencana dan kontrak kinerja penelitian dosen, proposal penelitian, surat perjanjian hibah atau bantuan penelitian, surat persetujuan kerja sama atau kolaborasi penelitian, berkas pengajuan kaji etik penelitian, hasil kaji etik penelitian, data penelitian, *logbook* kegiatan penelitian, hasil analisis data penelitian, naskah tulisan hasil penelitian, laporan penelitian, laporan keuangan penelitian, bukti korespondensi dengan mitra penelitian, bukti korespondensi dengan penerbit hasil penelitian, berkas pengajuan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikat hak cipta atau paten, dan berkas serta sertifikat keikutsertaan pertemuan ilmiah.

Hak Cipta © 2024, Nisa Khaerani Mulia

Sedangkan, kegiatan-kegiatan terkait penelitian yang dilakukan oleh Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat yaitu: (1) penyusunan rencana penyelenggaraan penelitian; (2) administrasi program hibah penelitian dari universitas atau eksternal; (3) penyelenggaraan program hibah atau bantuan penelitian internal; (4) pembentukan dan operasional Komite Etik Penelitian; (5) administrasi pendaftaran kekayaan intelektual; (6) penyelenggaraan *workshop* atau pelatihan untuk dosen peneliti; (7) penyelenggaraan konferensi ilmiah; (8) pengelolaan jurnal ilmiah; (9) pengusulan calon *adjunct professor*; serta (10) pelaporan kinerja unit.

Berdasarkan kegiatan tersebut, Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat menghasilkan arsip penelitian berupa: peraturan dan pedoman penyelenggaraan penelitian, nota dan surat dinas yang masuk dan keluar, berkas-berkas keuangan kegiatan, laporan kegiatan, proposal penelitian, formulir penilaian proposal penelitian, surat perjanjian hibah atau bantuan penelitian, surat perjanjian kerja sama penelitian, laporan penelitian, laporan keuangan penelitian, berta acara hasil penilaian atau monitoring dan evaluasi penelitian, hasil kaji etik penelitian, laporan kinerja komite etik penelitian, berkas pengajuan kekayaan intelektual, sertifikat hak cipta atau paten, sertifikat peserta workshop atau pelatihan, email bukti korespondensi, berkas penyelenggaraan konferensi ilmiah (SK panitia, bukti pendaftaran dan pembayaran, *Letter of Acceptance* artikel, prosiding, sertifikat peserta, dan laporan kegiatan), berkas pengelolaan jurnal ilmiah (SK pembentukan, *Letter of Acceptance* artikel, artikel yang terbit, dan bukti permohonan dan pembayaran honorarium), berkas pengajuan pencalonan adjunct professor, piagam penunjukan *adjunct professor*, daftar metadata hibah penelitian, daftar sertifikat kekayaan intelektual, daftar publikasi ilmiah dosen, dan laporan capaian kinerja unit.

Jika dikelompokkan berdasarkan tipe atau jenis arsipnya, maka arsip penelitian di Fakultas ABC terdiri dari: naskah dinas peraturan seperti pedoman, POB, dan SK; surat (nota dan surat dinas); surat atau kontrak perjanjian; proposal penelitian; data penelitian; laporan penelitian; laporan kegiatan unit; hasil pengkapturan korespondensi dari email atau sistem; berkas keuangan; sertifikat; artikel ilmiah, prosiding, buku, dan book chapter; daftar-daftar; dan dokumentasi kegiatan (foto dan video).

Berdasarkan hasi observasi, diketahui bahwa Unit menerima beberapa jenis arsip dari dosen peneliti. Arsip tersebut diantaranya yaitu proposal penelitian dan laporan penelitian. Hal tersebut dilakukan dosen peneliti sebagai bukti pemenuhan kinerja penelitian mereka kepada Fakultas ABC. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa dosen peneliti tidak menyerahkan arsip data penelitian mereka kepada Fakultas ABC. Padahal, menurut beberapa dosen peneliti, jika data penelitian para dosen dikumpulkan dan diolah oleh Unit, akan dapat menghasilkan kumpulan informasi atau sumber informasi baru yang akan sangat bermanfaat bagi peneliti lainnya atau penelitian selanjutnya.

Arsip yang tercipta baik dari dari dosen peneliti maupun unit merupakan arsip dalam bentuk konvensional dan digital. Untuk arsip konvensional atau kertas, dilakukan alih media sehingga juga tercipta arsip dalam versi digitalnya. Arsip digital tersebut, baik yang born digital atau yang dialihmediakan, dibuat atau diubah ke dalam format PDF karena dianggap lebih mudah untuk disimpan dan digunakan kembali.

Praktik Pengelolaan Arsip Penelitian

Di Fakultas ABC Universitas XYZ, terdapat beberapa peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan arsip penelitian, diantaranya yaitu Peraturan Rektor Universitas XYZ tentang Sistem Penelitian, dan Kebijakan-Kebijakan Arsip Universitas. Akan tetapi, peneliti

Hak Cipta © 2024, Nisa Khaerani Mulia

tidak menemukan pedoman, standar, atau kebijakan yang secara khusus atau rinci dalam mengatur pengelolaan arsip dan data penelitian.

Praktik pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC akan peneliti jelaskan dengan mendeskripsikan kenyataan dari penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan arsip penelitian. Proses ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Penciptaan arsip

Arsip dapat tercipta melalui proses pembuatan, pengkapturan, dan penerimaan arsip. Di Fakultas ABC, penciptaan arsip penelitian dilakukan melalui: pembuatan dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata dan *spreadsheet*; pembuatan dan pengiriman email; pengisian formulir, baik kertas atau *e-form*; pengkapturan gambar atau *screenshot*; melalui pengambilan foto dan video; serta penerimaan arsip baik secara digital atau konvensional. Berdasarkan hasil observasi, arsip penelitian di Fakultas ABC paling banyak diciptakan dari proses pembuatan dokumen menggunakan aplikasi pengolah kata dan *spreadsheet.* Sedangkan proses pembuatan dengan pengambilan foto dan video yang paling sedikit.

Berdasarkan observasi juga ditemukan bahwa arsip penelitian di Fakultas ABC pada awalnya diciptakan sebagai draf atau berkas kerja dalam format digital atau elektronik, kemudian dicetak ke format kertas. Setelah menjadi arsip yang utuh, kemudian dialihmediakan menjadi format digital kembali. Cara pembuatan arsip sebagian besar dilakukan menggunakan paket Microsoft seperti Word, Excel, dan Power Point. Dengan demikian, dengan jelas dapat diketahui bahwa penggunaan komputer dan teknologi informasi mendukung pertumbuhan pembuatan arsip penelitian sehingga membutuhkan cara pengelolaan yang tepat.

Dalam proses penciptaan arsip juga ada kegiatan registrasi atau pendataan arsip yang sudah tercipta. Para dosen peneliti mengaku mereka tidak pernah melakukan pendataan atau pencatatan terhadap arsip yang mereka buat atau terima. Sedangkan pada Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat, mereka melakukan pendataan dan pencatatan terhadap arsip yang mereka buat dan terima ke dalam Agenda Surat Masuk dan Keluar, dan dalam Daftar Arsip Aktif.

2. Pemeliharaan

Arsip penelitian yang tercipta di Fakultas ABC disimpan oleh pencipta arsip (dosen peneliti dan Unit) menggunakan berbagai fasilitas atau tempat penyimpanan. Fasilitas yang digunakan yaitu: personal computer atau laptop, tempat penyimpanan cloud, dan hardcopy yang disimpan ke dalam map atau odner. Di antara fasilitas tersebut, PC, laptop, dan tempat penyimpanan cloud yang mendominasi. Penemuan ini menunjukkan bahwa dosen peneliti dan Unit sangat mengandalkan arsip elektronik (e-records) dalam pemeliharaan dan penggunaan arsip penelitian.

Arsip tersebut diberkaskan dan disimpan berdasarkan klasifikasi atau kelompok tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pencarian dan penemuan kembali arsip. Klasifikasi yang digunakan diantaranya yaitu klasifikasi berdasarkan subjek, kronologis, dan alfabetis.

Bagi para dosen peneliti, mereka mengelompokkan arsip penelitian (baik arsip elektronik ataupun arsip kertas) mereka berdasarkan tahun, di mana satu folder memuat arsip penelitian yang diciptakan dalam satu tahun, dan folder tersebut dinamakan berdasarkan nama tahunnya. Kemudian, arsip di dalam folder tahun tersebut dikelompokkan berdasarkan subjek proyek penelitian, di mana satu folder memuat semua arsip penelitian yang diciptakan selama pelaksanaan suatu proyek penelitian, mulai dari pendaftaran hibah penelitian, penyusunan desain penelitian, hingga diseminasi hasil. Folder ini kemudian dinamakan berdasarkan judul proyek penelitian atau nama program hibahnya sehingga dapat diurutkan secara alfabetis. Di dalam folder proyek penelitian, arsip dikelompokkan lagi berdasarkan kegiatan atau transaksi yang dilakukan

Hak Cipta © 2024, Nisa Khaerani Mulia

selama melaksanakan penelitian. Folder kegiatan atau transaksi tersebut dinamakan berdasarkan tanggal pelaksanaan dan nama kegiatan atau transaksinya, sehingga dapat diurutkan secara kronologis. Bagi kegiatan atau transaksi yang bukan merupakan bagian dari suatu kegiatan proyek penelitian, misalnya kegiatan keikutsertaan pada pertemuan ilmiah, dosen peneliti memberkaskan arsip kegiatan tersebut dengan folder yang setara dengan folder subjek penelitian, yang dinamakan berdasarkan nama kegiatannya.

Sebagian besar dosen peneliti hanya melakukan pengelompokkan arsip penelitian hingga folder subjek penelitian, karena menurut mereka hal tersebut sudah cukup. Arsip atau informasi yang mereka butuhkan masih dapat dicari dan didapatkan pada saat dibutuhkan meskipun arsipnya cenderung berantakan dan pencariannya membutuhkan waktu. Para dosen peneliti mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam penyimpanan dan temuan kembali arsip penelitian mereka. Sebagian besar sepakat bahwa penamaan item arsip dan foldernya merupakan prosedur yang paling penting dalam proses penyimpanan arsip penelitian, terutama untuk arsip penelitian elektronik atau digital. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa identifikasi dan penamaan arsip beserta berkasnya menjadi poin penting dalam proses penyimpanan arsip penelitian meskipun belum ada suatu standar khusus dalam prosedur penyimpanan arsip penelitian bagi para dosen peneliti di Fakultas ABC.

Suatu berkas atau folder dibuat pada saat suatu proyek penelitian atau kegiatan mulai dilakukan. Isi berkas akan terus bertambah jumlah dan ragamnya seiring dengan berjalannya penelitian dan kegiatan. Sebagian besar dosen peneliti mengaku bahwa, saat suatu penelitian atau kegiatan selesai, mereka tidak melakukan pemilahan atau penyusutan terhadap isi folder tersebut, sehingga draf atau dokumen kerja masih ada di dalam folder tersebut dan tercampur dengan arsip. Mereka mengaku hal ini terjadi karena merasa bahwa draf atau dokumen kerja tersebut masih akan berguna, sehingga mereka enggan untuk menghapus dokumen tersebut. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada proses pemeliharaan, penemuan kembali, kontrol volume arsip, dan kapasitas tempat penyimpanan. Arsip yang masih bercampur dengan non arsip akan membuat dosen peneliti tidak bisa memprioritaskan mana yang harus dilakukan *back-up* dan disimpan dengan jangka waktu yang lebih lama, akibatnya mereka akan kesulitan dalam melakukan pencarian dan penemuan kembali arsip, serta kesulitan dalam penyusutan arsip dan kontrol volume arsip, sehingga tempat penyimpanan dapat menjadi penuh dan dapat menghambat penyimpanan arsip yang baru. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun mereka menyadari pentingnya pemberkasan arsip, mereka belum menyadari pentingnya pemilahan dan kontrol volume arsip.

Sedangkan untuk penyimpanan arsip penelitian di Unit, para staf dan rekod manajer memberkaskan arsip berdasarkan tahun penciptaan arsip, subjek kegiatan, dan kronologis kegiatan, serta berdasarkan bentuk redaksi arsip. Proses pemberkasannya hampir serupa dengan proses pemberkasan arsip penelitian yang dilakukan oleh dosen peneliti. Perbedaannya yaitu Unit melakukan penggandaan terhadap arsip yang merupakan suatu naskah dinas, kemudian disimpan dan diberkaskan berdasarkan tahun, pejabat yang menandatangani, bentuk naskah dinas, kode klasifikasi, dan nomor naskah dinas. Naskah dinas yang dimaksud di antaranya yaitu nota dinas, surat dinas, surat keterangan, berita acara, nota kesepahaman bersama, surat perjanjian, surat keputusan, dan surat tugas. Hal tersebut dilakukan oleh Unit untuk mengetahui jumlah naskah dinas yang dimiliki oleh Unit, serta memudahkan pencarian dan temu kembali arsip naskah dinas karena pimpinan sering meminta informasi arsip yang hanya berbentuk naskah dinas. Selain itu, hampir semua arsip kertas di Unit merupakan arsip berbentuk naskah dinas, dan arsip tersebut

Hak Cipta © 2024, Nisa Khaerani Mulia

juga diberkaskan berdasarkan tahun, pejabat yang menandatangani, bentuk naskah dinas, kode klasifikasi, dan nomor naskah dinas untuk memudahkan penemuan kembali dan alih media arsip.

Di Unit, suatu berkas atau folder dibuat di PC para staf pada saat suatu kegiatan mulai dilakukan. Berkas tersebut dinyatakan selesai atau ditutup setelah kegiatan benar-benar selesai. Di setiap akhir tahun, para staf dan rekod manajer akan melakukan pemilahan terhadap arsip dan non arsip dari folder tersebut. Bagi yang dinilai sebagai arsip, akan dilakukan back-up atau penggandaan ke tempat penyimpanan cloud yang dimiliki Unit, meskipun draf atau dokumen kerja masih disimpan di dalam PC masing-masing staf.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa proses penyimpanan arsip penelitian di Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat masih dilakukan secara manual dan belum terotomasi menggunakan suatu sistem informasi, meskipun arsip yang disimpan sebagian besar merupakan arsip elektronik. Selain itu, sebagai upaya pemeliharaan arsip, Unit melakukan alih media atau digitalisasi arsip serta penggandaan dan *back-up* arsip ke dalam tempat penyimpanan yang berbeda.

3. Penggunaan

Pada pengelolaan arsip penelitian oleh para dosen peneliti di Fakultas ABC, arsip penelitian sebagian besar dipergunakan untuk bahan bukti pelaksanaan kegiatan penelitian, terutama bagi penelitian yang mendapatkan hibah atau bantuan dana penelitian, serta sebagai bukti atas capaian kinerja dosen di bidang penelitian. Selain itu, arsip penelitian seperti data penelitian dipergunakan sebagai sumber informasi untuk pelaksanaan penelitian lanjutan atau penelitian serupa di masa mendatang. Temuan ini sejalan dengan studi (Childs & McLeod, 2004) yang menyatakan bahwa tujuan pengelolaan arsip penelitian diantaranya yaitu untuk sebagai bahan bukti akuntabilitas, serta sebagai sumber informasi bagi penelitian atau peneliti lain.

Sedangkan di Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas ABC, arsip penelitian yang mereka kelola sebagian besar digunakan sebagai bukti pencapaian kinerja Unit di bidang penelitian serta sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Untuk itu, rekod manajer tidak hanya melakukan pengelolaan file arsip, tetapi juga mengelola serta merangkum data dan informasi yang terkandung di arsip penelitian yang tersimpan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dosen, pimpinan, atau *stakeholder* dalam melihat dan menilai capaian kinerja di bidang penelitian tersebut dengan lebih mudah sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan tepat. Temuan tersebut membuktikan bahwa, dalam pengelolaan arsip penelitian, rekod manajer atau pengelola arsip penelitian tidak hanya harus memiliki keterampilan dalam mengelola file arsipnya, tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam mengolah hingga menyajikan data dan informasi yang terkandung di dalam arsip penelitian secara cepat dan tepat kepada *stakeholder* yang membutuhkan data dan informasi tersebut

4. Penyusutan

Dalam proses penyusutan arsip penelitian, para dosen peneliti Fakultas ABC hanya melakukan pemindahan arsip berupa penyerahan beberapa jenis arsip penelitian kepada Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas. Akan tetapi, yang mereka lakukan sebenarnya adalah memberikan salinan arsip penelitian mereka kepada Unit. Mereka tidak melakukan proses pemusnahan arsip dan penyerahan arsip yang memiliki nilai permanen seperti arsip data penelitian. Akibatnya, Unit sama sekali tidak menyimpan arsip penelitian yang berbentuk data penelitian milik dosen peneliti Fakultas ABC. Padahal, arsip data penelitian memiliki nilai guna sekunder berupa nilai informasional dan kesejarahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Hak Cipta © 2024, Nisa Khaerani Mulia

Kegiatan penyusutan arsip penelitian di Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas ABC dilakukan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Universitas XYZ. Akan tetapi pada kenyataannya, kegiatan penyusutan arsip yang berupa pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan tidak dilakukan tepat waktu sesuai masa retensi arsip. Hal tersebut menyebabkan arsip inaktif, yang sudah habis masa simpan aktifnya dan dipindahkan ke unit kearsipan, menumpuk di ruang penyimpanan arsip, di PC, atau di tempat penyimpanan *cloud*. Akibatnya, kapasitas ruang penyimpanan akan penuh dan arsip baru tidak bisa disimpan dengan baik dan benar.

Selain itu, Unit ternyata belum melakukan proses pemusnahan arsip penelitian, khususnya arsip elektronik, dengan prosedur yang benar sejak tahun 2015. Pemusnahan arsip dilakukan langsung oleh Unit atau staf berdasarkan keputusan sendiri tanpa melalui proses penilaian dari Unit Kearsipan Fakultas ABC. Akibatnya, akan ada kemungkinan bahwa beberapa arsip penelitian yang masih bernilai guna hilang atau tidak lengkap karena penghapusan dan kesalahan penilaian Unit atau staf. Unit juga belum pernah melakukan penyerahan arsip bernilai permanen kepada Lembaga Kearsipan Universitas karena pengelolaan arsip inaktifnya masih belum sesuai standar dan prosedur sehingga sulit untuk mengetahui arsip apa saja yang memiliki nilai simpan permanen. Temuan di atas menunjukkan bahwa proses penyusutan arsip penelitian, baik pemindahan, pemusnahan, atau penyerahan arsip permanen belum dilakukan secara optimal, baik oleh para dosen peneliti ataupun oleh Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat di Fakultas ABC. Padahal, proses penyusutan arsip penelitian merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan arsip penelitian yang efektif dan efisien. Temuan di atas juga mengindikasikan bahwa dibutuhkan aturan yang mengikat serta komitmen yang kuat bagi Fakultas ABC untuk dapat melaksanakan proses penyusutan arsip penelitian.

Kendala dan Tantangan

Menurut para dosen peneliti, yang menjadi kendala dalam pengelolaan arsip penelitian mereka diantaranya yaitu:

a. banyaknya volume serta ragam arsip penelitian yang mereka ciptakan, sehingga mereka kewalahan dalam mengelola arsip penelitian sesuai standar dan prosedur pengelolaan arsip di Fakultas ABC;
b. tidak ada pedoman dan kepastian tentang sejauh mana suatu data penelitian dianggap sebagai arsip penelitian;
c. aplikasi atau sistem yang digunakan dalam mengolah data penelitian berkembang dengan cepat sehingga ada kemungkinan data penelitian yang mereka miliki saat ini tidak bisa atau sulit untuk dibaca dan digunakan kembali di masa mendatang;
d. di suatu proyek penelitian yang memiliki jumlah anggota peneliti yang banyak, para peneliti kesulitan melacak dan menentukan versi terbaru atau versi final dari arsip yang diciptakan karena setiap peneliti cendrung menyimpan data atau arsip penelitian di PC atau laptop mereka masing-masing; serta
e. banyaknya anggota peneliti tersebut juga menyebabkan arsip dan data penelitian menjadi sering dibagi atau diakses oleh banyak orang sehingga menimbulkan risiko atas kerahasiaan dan integritas atas arsip dan data penelitian.

Sedangkan untuk pengelolaan arsip di Unit, kendala yang dihadapi diantaranya yaitu:

a) tidak adanya sistem, standar, pedoman, atau aturan yang mengikat bagi para dosen peneliti untuk menyerahkan arsip dan data penelitiannya kepada Unit sehingga arsip dan data penelitian yang diterima oleh Unit tidak lengkap, serta membutuhkan waktu

Hak Cipta © 2024, Nisa Khaerani Mulia

bagi Unit untuk melengkapi arsip tersebut karena harus berurusan dengan masing-masing dosen peneliti;

b) belum adanya sistem pengelolaan arsip elektronik mulai dari penciptaan hingga penyusutan di Fakultas ABC sehingga Unit harus mengelola arsip penelitian yang mayoritas merupakan arsip elektronik secara manual. Akibatnya, pengelolaan arsip penelitian menguras banyak waktu dan tenaga sehingga tidak efisien; serta
c) belum adanya definisi yang jelas atas peran dari aktor-aktor yang terlibat dalam suatu penelitian terhadap praktik pengelolaan arsip penelitian. Aktor-aktor tersebut yaitu dosen peneliti, pemberi hibah atau bantuan dana penelitian, rekod manajer, pustakawan, dan manajemen perguruan tinggi.

Beberapa kendala tersebut sesuai dengan pendapat Maday & Moysan (2014) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan arsip penelitian, diantaranya yaitu terdapat ketidakpastian tentang sejauh mana suatu data peneltian dianggap sebagai arsip penelitian, serta semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam suatu kegiatan penelitian yang masing-masing memiliki ide sendiri dalam pengelolaan arsip dan data penelitian (peneliti, manajer rekod, dan pustakawan)

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC yaitu:

1) pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan semakin tingginya volume dan kompleksitas pengelolaan arsip penelitian; dan
2) kurang kuatnya komitmen dari pimpinan dan manajemen dalam pewujudkan pengelolaan arsip penelitian yang autentik, utuh, dan akuntabel yang menyebabkan belum tersedianya kebijakan, prosedur, serta belum tersedianya infrastruktur yang memadai berupa sistem pengelolaan arsip elektronik beserta sumber dayanya yang mendukung pengelolaan arsip penelitian yang efektif dan efisien di Fakultas ABC.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC belum terlaksana secara optimal. Meskipun pada tahap penciptaan sudah dilakukan baik dan arsip penelitian dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam operasional di bidang penelitian, akan tetapi pengelolaan arsip penelitian pada tahap pemeliharaan dan penyusutan belum terlaksana sesuai dengan praktik pengelolaan arsip yang baik. Ketika arsip penelitian dikelola sebagai sumber bahan bukti dan informasi, kebijakan dan prosedur perlu dirumuskan untuk menentukan jenis arsip penelitian apa yang disimpan, di mana arsip tersebut disimpan, siapa yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaannya, siapa yang memiliki akses terhadap arsip tersebut, serta kapan dan bagaimana arsip tersebut harus dipindahkan, dimusnahkan, atau disimpan permanen. Selain itu, juga perlu ada infrastruktur serta sumber daya yang mumpuni agar arsip penelitian dapat dikelola dengan efektif dan efisien serta dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam penyelenggaraan penelitian di perguruan tinggi.

Limitasi penelitian ini adalah penelitian dilakukan di satu fakultas di satu perguruan tinggi, sehingga perlu kehati-hatian dalam menggeneralisasi temuan ini ke fakultas atau perguruan tinggi lain di Indonesia. Penelitian atau studi di masa depan mungkin dapat menargetkan semua perguruan tinggi atau bahkan mencakup lembaga penyelenggara penelitian lainnya. Temuan pada penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh manajemen Fakultas ABC Universitas XYZ untuk merumuskan kebijakan agar dapat meningkatkan praktik pengelolaan arsip perguruan tinggi,

Hak Cipta © 2024, Nisa Khaerani Mulia

khususnya pada pengelolaan arsip penelitian. Selain itu, temuan ini dapat menjembatani kesenjangan dalam literatur mengenai pengelolaan arsip penelitian di perguruan tinggi Indonesia.

Studi ini merekomendasikan bahwa pimpinan atau manajemen Fakultas ABC Universitas XYZ harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengelolaan arsip penelitian di Fakultas ABC, serta menfasilitasi praktik pengelolaan arsip penelitian tersebut dengan menyediakan infrastruktur sistem pengelolaan arsip elektronik dan pelatihan bagi staf pengelola arsip penelitian di Fakultas ABC.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen peneliti yang sudah bersedia diwawancara dan Unit Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas ABC Universitas XYZ. Serta, kepada dosen pembimbing karya ilmiah Universitas Terbuka atas bimbingan dan arahannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

REFERENSI

Bungin, B. (2001). *Metodologi penelitian sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Airlangga University Press.

Childs, S., & McLeod, J. (2004). Sharing research records and research data: Findings from a research project in higher education. *New Review of Information Networking*, *10*(2), 131–145. https://doi.org/10.1080/13614570500053866

Franks, P. C. (2018). *Records and information management* (2nd ed.). American Library Association.

Grant, R. (2017). Recordkeeping and research data management: a review of perspectives. *Records Management Journal*, *27*(2), 159–174. https://doi.org/10.1108/RMJ-10-2016-0036

Maday, C., & Moysan, M. (2014). Records management for scientific data. *Archives and Manuscripts*, *42*(2), 190–192. https://doi.org/10.1080/01576895.2014.911686

Schreier, A. A., Wilson, K., & Resnik, D. (2006). Academic Research Record-Keeping: Best Practices for Individuals, Group Leaders, and Institutions. *Academic Medicine*, *81*(1), 42–47. https://doi.org/10.1097/00001888-200601000-00010

Shankar, K. (1999). Towards a framework for managing electronic records in scientific research. *Archival Issues*, *24*(1), 21–36. https://minds.wisconsin.edu/handle/1793/45890

Simwaka, K., Malanga, D. F., & Chipeta, G. T. (2023). The status of records management in Malawian private universities: the empirical case of University of Livingstonia. *Records Management Journal*, *33*(2/3), 165–182. https://doi.org/10.1108/RMJ-07-2022-0021

The University of Melbourne. (2023, April 4). *Research data management policy (MPF1242)*. https://policy.unimelb.edu.au/MPF1242/

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009

Washington State University. (2019, February). *45.35 Managing research records*. https://policies.wsu.edu/prf/index/manuals/business-policies-and-procedures-manual/bppm-45-35/

Hak Cipta © 2024, Nisa Khaerani Mulia

Peran Litbang dalam Pengambilan Kebijakan Strategis dan Pemecahan Masalah di Kota Bandung

Novie Indrawati Sagita[1], Selvi Centia[2], Agus Taryana[3], Nurul Asiah[4]
[1,2,3,4] Universitas Padjadjaran, Jalan Ir Soekarno KM 21 Jatinangor-Sumedang
e-mail: selvi.centia@unpad.ac.id

Abstrak

Riset ini didasari sentralnya peran Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dalam mengakselerasi pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang mana litbang berperan dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Sebagai salah satu kota metropolitan, Kota Bandung memerlukan badan penelitian dan pembangunan dalam mengatasi berbagai problamatika kompleks dan multidimiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerahnya. Berkontradiktif dengan itu, badan Litbang Kota Bandung masih dianggap belum optimal menjadi solusi pemecahan permasalahan Kota Bandung. Tujuan riset ini mencorong terciptanya penguatan bagi badan Litbang, khususnya akselerasi output penelitian litbang dalam merumuskan strategi kebijakan dan prioritas utama program Kota Bandung secara cermat, terpadu, serta berkelanjutan. Dalam riset ini metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, Focussed Group Discussion (FGD), dan studi literatur. Sedangkan analisis menggunakan pendekatan analisa kebijakan dan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil riset menunjukan bahwa Litbang Kota Bandung mengalami kendala dalam menemukan invensi, menciptakan inovasi, mengembangkan potensi pendayagunaannya, dan menumbuhkan kemajuan IPTEK. Kendala tersebut diantaranya Program riset belum didasarkan pada permintaan dan kebutuhan pengguna. kurangnya tindak lanjut terhadap produk risert Litbang, kurangnya produk Litbang yang inovatif dan berdaya saing, terbatasanya SDM & anggaran, perlunya penguatan komitmen, dan kurangnya publikasi hasil Litbang. Sehingga diperlukan adanya penataan pengorganisasian dan mekanisme kerja organisasi Litbang, akselerasi kapasitas sumberdaya Litbang, Penyusunan RIPP yang sinergis dan berkesinambungan, penyusunan dan penerapan SOP keLitbangan, dorongan intensitas Publikasi ilmiah keLitbangan, serta mendorong kerjasama yang distruktif untuk penguatan kapasitas kelembagaan Libtang Kota Bandung.

***Kata Kunci**: Litbang ,Optimalisasi, Organisasi, Peran.*

PENDAHULUAN

Penelitian dan pengembangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah dan kinerja administrasi. Salah satu tantangan strategis penelitian dan pengembangan adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan berdasarkan eksplorasi dan analisis data ilmiah. Keberadaan penelitian dan pengembangan sangat penting dalam menunjang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002, Sistem Nasional (SINa) merupakan salah satu unsur penting dalam Lembaga penelitian dan pengembangan . Misinya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar berdasarkan karakteristiknya: industri, masyarakat, dan pemerintah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan berbagai

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

sektor (serta perekonomian, pendidikan, pertahanan, social dan budaya), sehingga penelitian dan pengembangan dapat menjadi kunci dan kekuatan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing negara baik dalam lingkungan regional maupun global. Dengan berlakunya undang-undang ini, di lembaga litbang semakin dikembangkan oleh pemerintah nasional dan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 219 menyatakan bahwa litbang merupakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh suatu badan. Pada Pasal 388 UU yang sama juga dikatakan bahwa daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangannya yaitu mengelola unsur manajemen yang diantaranya meliputi fungsi penelitian dan pengembangan. Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 (beserta PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Berdasarkan perda tersebut, Mulai tahun 2017, Bappeda Kota Bandung menjadi Badan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan (Bappelitbang). Apabila bidang penelitian dan pengembangan mempunyai 3 (tiga) subbidang yaitu I subsektor sosial dan administrasi, II subsector ekonomi dan pembangunan, dan III subsektor inovasi dan teknologi. Dengan munculnya nomenklatur penelitian dan pengembangan di Bappelitbang serta bertambahnya tugas penelitian dan pengembangan dari tingkat subbagian hingga tingkat lapangan, maka peran penelitian dan pengembangan menjadi semakin strategis. Kegiatan penelitian dan pengembangan hendaknya mampu memberikan solusi penyelesaian permasalahan Kota Bandung, yang dapat dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah, khususnya dalam menghadapi berbagai peluang, tantangan dan permasalahan perkotaan yang ada. Luaran kegiatan litbang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi politik dan prioritas program utama Kota Bandung secara cermat, terpadu dan berkelanjutan.

Namun demikian, posisi litbang dalam sistem pembangunan daerah, pada umumnya masih menghadapi kendala, diantaranya:

- Sumber daya penelitian yang belum termanfaatkan secara optimal;
- Selama ini penelitian yang dilakukan masih bersifat parsial serta belum terfokus pada isu-isu strategis dan pemecahan masalah pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD);
- Rendahnya pemanfaatan dan tindaklanjut hasil penelitian;
- Belum adanya pedoman terkait arah penelitian dan penentuan prioritas kegiatan penelitian dan pengembangan; serta
- Belum adanya standardisasi dan prosedur baik dalam pelaksanaan, koordinasi maupun kerjasama dengan *stakeholder* terkait kegiatan kelitbangan.

Kondisi ini mendorong Bappelitbang Kota Bandung (khususnya Bidang Litbang) perlu merumuskan reorientasi kebijakan tentang pedoman penelitian dan pengembangan maupun prioritas program penelitian serta perumusan strategi.

Dalam penelitian ini menggunakan basis peningkatan kapasitas litbang yang di kemukakan `oleh (Lakitan, 2010). Dalam meningkatkan kapasitas litbang dapat dilakukan dengan menempuh langkah – langkah penting berikut, yakni:

- Merumuskan kembali tujuan dan menetapkan sasaran yang ingin dicapai;
- Melakukan reformasi struktural agar organisasi lembaga litbang dapat menjadi kendaraan yang efektif untuk mencapai tujuan;

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

- mengubah mindset dan budaya kerja komunitas litbang;
- Merubah paradigma riset yang semula hanya untuk pemuasan hasrat akademik semata, atau bersifat academic exercise, dengan mendahulukan prioritas kegiatan riset yeng berorientasi pada untuk menghasilkan iptek yang sesuai kebutuhan dan bermanfaat secara nyata; serta
- Meningkatkan kapasitas pengembangan teknologi, lembaga litbang perlu mengembangkan kapasitas serapnya ('*absorptive capacity*').

METODE

Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik hasil pengamatan maupun informasi dari subjek penelitian (informan). Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data lembaga yang sudah diolah maupun data publikasi yang disediakan institusi maupun media massa.

Teknik dan prosedur pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian, adalah sebagai berikut :

- Wawancara yakni menanyakan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian yang berada pada bidang litbang Bappelitbang Kota Bandung.
- *Focussed Group Discussion* yakni melakukan diskusi secara terfokus dan mendalam dengan para pakar dan *stakeholder* yang berhubungan dengan kegiatan kelitbangan.
- Studi Literatur; mempelajari bahan bacaan dari bebagai macam sumber mengenai konsp-konsep yang ada kaitannyadengan kegiatan kelitbangan pemerintah daerah, seperti peran, tugas dan fungsi kelitbangan, pengembangan kapasitas, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan, koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan kelitbangan; Mempelajari perauran Perundangan-undangan serta berbagai dokumen resmi milik pemerintah lainnya; Melakukan telaah artikel yang dipublikasikan dan berbagai sumber lainnya seperti dokumen yang tidak dipublikasikan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni penelitian analisa kebijakan dan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kebijakan terfokus pada telaah bahan-bahan peraturan tertulis secara selektif. Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang berusaha menggambarkan kondisi obyek penelitian dalam seting natural untuk memperoleh temuan-temuan penelitian yang ada serta yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yakni bagaimana landasan kebijakan lingkup Kota Bandung mengenai Rencana Induk Kelitbangan, Pedoman Pengusulan dan Pemanfaatan hasil Kegiatan Kelitbangan; serta Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penyusunan kegiatan Kelitbangan yang perlu disusun, serta strategi apa yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelibangan dan Kerjasama kelitbangan.

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu : melakukan coding, seleksi data, reduksi data dan penarikan Kesimpulan. Prosedur analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif. kegiatan litbang dan pengembangan kemampuan litbang, serta arah peraturan perundang- undangan yang mengatur kegiatan litbang kota daerah. Analisis induktif mengacu pada fakta empiris melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Gambaran kondisi saat ini dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, diuraikan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi pembentukan dan mekanisme operasional Lembaga litbang, berdasarkan aspek aspek berikut: struktur organisasi, yurisdiksi dan manajemen,

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

koordinasi antarlembaga, kapasitas ekonomi regional, dan isu-isu terkait litbang di bidang tersebut kota Bandung. Kedua, kondisi sumber daya litbang yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, dan jaringan litbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa litbang Kota Bandung mengalami kendala dalam menemukan invensi, menciptakan inovasi, mengembangkan potensi pendayagunaannya, dan menumbuhkan kemajuan IPTEK yang dapat memberikan dukungan kinerja terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandung. Kendala tersebut, sebagai berikut :

- Program riset yang dilakukan oleh litbang belum semuanya didasarkan pada permintaan dan kebutuhan pengguna (perangkat daerah yang berkepentingan);
- Litbang kurang menindaklanjuti melalui pendampingan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan produk riset litbang yang telah didayagunakan. Hal ini dapat menjatuhkan kredibilitas dan menurunkan tingkat kepercayaan perangkat daerah terhadap litbang;
- Produk litbang kurang mampu melakukan inovasi dan produk yang inovatif dan berdaya saing;
- Kondisi sumber daya litbang yang sangat terbatas, yakni SDM peneliti/perekayasa sebagai unsur utama pelaksana kegiatan kelitbangan dan SDM yang melakukan tugas penunjang kegiatan litbang, terbatasnya anggaran untuk membiayai kegiatan litbang, dan sarana dan prasarana seperti peralatan teknologi, perpustakaan, jaringan internet, laboratorium, dan sarana prasarana penunjang lainnya;
- Tenaga ahli dari unsur akademisi dan perguruan tinggi mendominasi kegiatan penelitian dalam institusi litbang Kota Bandung;
- Masalah anggaran/dana penelitian yang tidak memungkinkan litbang melakukan kegiatan penelitian yang berkelanjutan guna memenuhi rangkaian ilmiah kegiatan litbang, sehingga membatasi kesiapan dalam penyerapan dan penguasaan teknologi serta kemampuan berinovasi;
- Waktu sangat terbatas yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan litbang, menyulitkan penelitian yang bersifat invensi, pengembangan dan penerapan teknologi;
- Penelitian yang dilakukan litbang belum berorientasi pada bisnis sehingga kurang memiliki nilai komersial;
- Aspek pengorganisasian dan manajemen kegiatan kelitbangan belum optimal;
- Masih rendahnya komitmen pemimpin dalam pendayagunaan hasil litbang dalam membantu kelancaran program perangat daerah maupun menjadi acuan/pertimbangan rekomendasi kebijakan;
- Kurangnya publikasi terhadap hasil-hasil litbang.

B. Pembahasan

Strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan litbang, adalah sebagai berikut :

- Menata kembali aspek pengorganisasian dan mekanisme kerja organisasi litbang, yang diawali pembentukan MP dan TPM secara legal formal;

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

- Peningkatan sumber daya litbang, diantaranya peningkatan kapasitas SDM litbang, pembiayaan, dan sarana prasarana;
- Penyusunan RIPP yang menggambarkan rangkaian kegiatan ilmiah kelitbangan secara sinergis dan berkesinambungan;
- Penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur kegiatan kelitbangan;
- Meningkatkan intensitas publikasi karya ilmiah hasil kegiatan kelitbangan;
- Merumuskan pola kerjasama yang dapat mendukung penguatan kapasitas kelembagaan litbang Kota Bandung.

a. Penataan Mekanisme Kerja dan Pengorganisasian Litbang Kota Bandung

Litbang Kota Bandung, perlu segera menginisiasi pembentukan Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu secara legal formal. Legalitas pengorganisasian tersebut akan menjamin kejelasan mekanisme kegiatan litbang. Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, mekanisme kegiata kelitbangan suatu rangkaian sub kegiatan, yang mana keluaran dari sub kegiatan terdahulu yang menjadi masukan bagi sub kegiatan selanjutnya. Adapun urutan sub penelitian dalam kegiatan litbang dapat digambarkan pada bagan alir sebagai berikut :

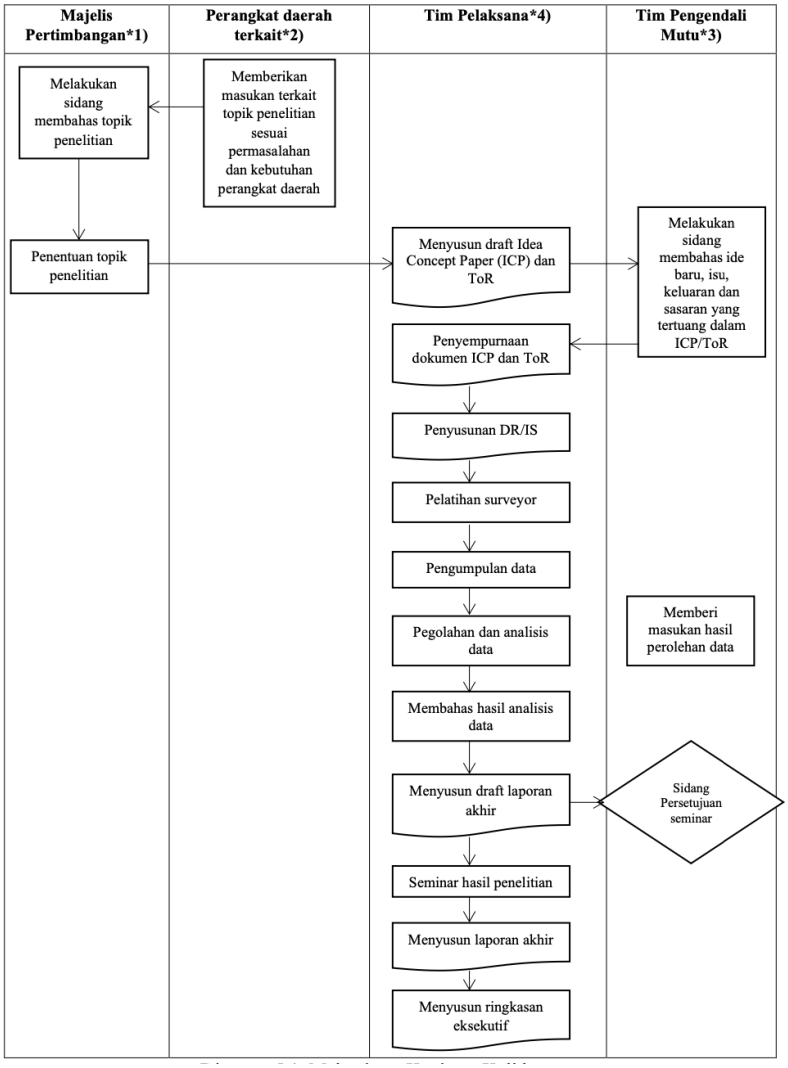


Diagram 1 Mekanisme Kegiatan Kelitbangan
(Sumber : Permendagri no 17 tahun 2016)

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

Catatan

MP*1) = Walikota, Sekretariat Daerah, Kepala Bappelitbang, Kabid Litbang, Akademisi/Pakar
PD*2) = Perangkat daerah
Tim Pengendali Mutu*3) = Kabid Litbang, Kasubbid Litbang, Pejabat Pengawas, Akademisi/Pakar/Tenaga ahli

Tim Pelaksana*4) = Pejabat fungsional peneliti/perekayasa, Akademisi/Pakar/Tenaga ahli

Laporan akhir penelitian yang sudah disetujui dan diseminarkan disokumentasikan dalam perpustakaan litbang dan dituangkan dalam naskah jurnal ilmiah.

b. Peningkatan Sumber Daya Litbang Kota Bandung

Peningkatan SDM Litbang, sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, menghendaki ketersediaan SDM bagi lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan , terdiri atas :

a) Peneliti, terdiri dari Pejabat Fungsional Peneliti dan perekayasa (yang tidak merangkap melaksanakan tugas dan jabatan mengerjakan urusan administrasi dan manajerial);
b) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi, yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
c) Pegawai lain , yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan pada jabatan struktural;.

Peningkatan SDM Litbang dilakukan guna mengurangi bantuan teknis dan tenaga ahli dari perguruan tinggi/akademi/peneliti luar negeri, dan dapat meningkatkan proporsi keterlibatan peneliti litbang daripada keterlibatan bantuan teknis atau tenaga ahli dalam dan luar negeri. Optimalisasi SDM Litbang juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, *workshop*, Bimtek, serta beasiswa pendidikan.

Sumber daya litbang yang perlu ditingkatkan bukan hanya SDM litbang saja, melainkan fasilitas komputer, internet, dan perpustakaan agar peneliti litbang dapat bekerja secara optimal, melakukan perbandingan, penemuan, melakukan modifikasi ataupun pengembangan sehingga menghasilkan suatu produk litbang yang bernilai tinggi.

c. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Kota Bandung

Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, Kegiatan kelitbangan dilakukan melalui tahapan:

a. Perencanaan

Tahapan perencanaan mencakup penyiapan dokumen Rencana program penelitian dan pengembangan yang disusun secara sistematis dan terukur sesuai dengan semua kelompok kepentingan. Tujuan penyusunan rencana kerja litbang adalah untuk melihat berbagai isu dan topik terkini terkait tugas dan tugas masing masing pemangku kepentingan, untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan dan pemilihan program prioritas litbang, kemudian diarahkan kedalam topiktopik kelitbangan. Mekanisme penyusunan rencana program kerja litbang dimulai dengan memetakan permasalahan yang ada saat ini dan permasalahan yang dilaksanakan secara internal, mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan yang dapat dilakukan dengan menggunakan formulir melingkar, dan mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan. Hasil penyusunan program kerja litbang disampaikan kepada TKPMP untuk dibahas sehubungan dengan penyusunan rancangan prioritas kebijakan litbang.

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

Selanjutnyarancangan tersebut diserahkan kepada MP (Majelis Pertimbangan) untuk ditinjau dan disetujui, sehingga dapat ditetapkan sebagai program kerja penelitian dan pengembangan. Program litbang yang disetujui MP akan disinergikan dan dipadukan ke dalam dokumen Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung (Bappelitbang). Dalam perspektif juridis formal, karena Litbang Kota Bandung sebagai salah satu bidang yang ada di Bappelitbang Kota Bandung, maka rencana program kerja kelitbangan secara tahunan dituangkan dalam Renja Bappelitbang, sedangkan aspek pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan dituangkan dalam Dokumen Pelaksamaan Anggaran (DPA) Bappelitbang Kota Bandung, yang mana sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Secara khusus, dokumen perencanaan kegiatan kelitbangan dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RIPP) kota Bandung. Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, Rencana induk Kelitbangan merupakan dokumen kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan dokumen orientasi kebijakan penelitian dan pengembangan yang memuat strategi langkah demi langkah dan arahan rinci program penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah selama 5 (lima) tahun. Tujuan umum rencana penelitian dan pengembangan ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra dan RPJMD) agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan program penelitian dan pengembangan. Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan. Rencana Induk Kelitbangan dilakukan dengan menjaring permasalahan didasarkan permintaan dan kebutuhan pengguna (perangkat daerah) dan menjadi bahan penyusunan Idea Concept Proposal dan roadmap agenda penelitian, yang memiliki pandangan ke depan, mampu mengantisipasi perubahan, dan memenuhi harapan dalam menghadapi peluang dan tantangan.

Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan ditetapkan oleh Walikota melalui Peraturan Walikota. Pelaksanaan Rencana induk kelitbangan harus selalu dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program, serta menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatannya.

b. Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, Penelitian dan pelaksanaan pengembangan meliputi penelitian kebijakan, pengembangan, evaluasi, perancangan, penerapan, pemanfaatan dan evaluasi, yang merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis, nilai-nilai dan konteks keilmuan baru atau cara baru. sehubungan dengan administrasi di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Terdapat berbagai jenis dan keluaran dari kegiatan kelitbangan, yaitu:

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

Tabel 1 Jenis dan Keluaran Kegiatan Kelitbangan

No	Jenis Kelitbangan	Keluaran
1	Penelitian	Rekomendasi
2	Pengkajian	
	A. Strategis	
	B. Aktual	
	C. Kompetitif	
3	Pengembangan	Naskah akademis dan rancangan regulasi
		Pemodelan kebijakan/program
4	Perekayasaan	Pedoman umum/ teknis pelaksanaan model kebijakan/ program
5	Penerapan	Uji coba model kebijakan/program pada daerah percontohan
6	Pengoperasian	Penerapan model kebijakan/program secara lebih luas/menyeluruh dan pendampingan
7	Evaluasi Kebijakan	Rekomendasi→ lanjut dengan perbaikan → Dicabut/diberhentikan

(Sumber: Permendagri no 17 tahun 2016)

c. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi program penelitian dan pengembangan merupakan dua tugas yang berbeda, namun kegiatannya sangat berkaitan. “Tindak lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi sejalan dengan rencana dan masalah dapat terdeteksi pada waktu yang tepat. Pemantauan memberikan informasi penting untuk menanggapi permasalahan, sedangkan evaluasi memposisikan informasi sehingga dapat digunakan dan menciptakan nilai. Evaluasi merupakan kajian terhadap kejadian, pemberian solusi, rekomendasi dan saran perbaikan, sehingga *monitoring* dan evaluasi harus berjalan beriringan” (Litbang, 2024).

Maksud pemantauan adalah untuk memastikan pelaksanaan program kerja penelitian dan pengembangan telah memenuhi sasaran dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara memantau kemajuan pelaksanaan program kerja penelitian dan pengembangan, mengidentifikasi dan mencegah permasalahan yang timbul dan/atau yang akan datang. melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Pemantauan terhadap program kerja litbang dilakukan pada setiap kegiatan litbang selama 3 (tiga) bulan (triwulan), setiap 6 bulan (semester), pada akhir tahun atau bila diperlukan.

d. Pelaporan.

Pelaporan program kerja kelitbangan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada setiap aktivitas kelitbangan. “Pelaporan merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis yang memberikan nilai tambah bagi lembaga penelitian dan pengembangan serta memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai proses pengambilan keputusan secara cepat, akurat dan tepat. Program kerja penelitian dan pengembangan dilaporkan secara berkala dan bertahap. Dalam konteks ini pelaporan yang dilakukan secara berkala adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), 6 (enam) bulan (semester) atau 1 (satu) tahun (tahunan) sesuai dengan tahapan monitoring dan evaluasiyang dilakukan. Penerapan pelaporan dilakukan secara bertahap mulai dari unit kerja penelitian dan pengembangan terendah dalam organisasi hingga pimpinan puncak organisasi, misalnya dari manajer operasi atau manajer program hingga manajer program kepada pimpinan kementerian/lembaga. Datar juga berarti pelaporan dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya pelaporan litbang Kota Bandung ditujukan ke provinsi kemudian diteruskan ke pemerintah

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

pusat". (Litbang, 2024)

d. Pendayagunaan Hasil Kelitbangan

Salah satu tugas seluruh penelitian dan pengembangan adalah menghasilkan sebanyak mungkin inovasi, yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok kepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Oleh karena itu pemanfaatan hasil kegiatan litbang harus diawasi oleh lembaga litbang agar tidak menyimpang dari gagasan awal. Oleh karena itu, pendampingan lembaga penelitian dan pengembangan kepada pemangku kepentingan (*user*) sangatlah penting. Pendampingan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai interaksi yang terus menerus terjadi antara kegiatan penelitian dan pengembangan Kota Bandung dengan perangkat daerah hingga terjadi perubahan kreatif dalam pengambilan kebijakan yang digagas oleh komponen atau perangkat daerah tersebut.

Pendayagunaan hasil kelitbangan oleh komponen dan perangkat daerah, menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu: inisiasi, internalisasi, institusionalisasi, dan keberlanjutan. Hubungan keempat tahap tersebut dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1 Tahapan Pendayagunaan Hasil Kelitbangan
(Sumber: Permendagri Nomor 17 tahun 2016)

Inisiasi adalah tahap pertama dalam suatu proses inovasi.. Agar hasil litbang dapat diketahui dan dimanfaatan secara luas, maka litbang perlu menyampaikan produk litbang secara proaktif melalui seminar/*workshop*/*roadshow* kepada perangkat daerah dan/atau pengguna lainnya.inisiasi dipahami sebagai proses yang menghasilkan laporan akhir penelitian.

Internalisasi merupakan tahap kedua dari proses inovasi, dimana tahap awal penelitian dan *pengembangan* sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah. Fase ini merupakan fase yang sangat penting, pada fase internalisasi berlangsung proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari penanggung jawab inisiasi yaitu lembaga penelitian dan pengembangan kepada penanggung jawab internal yaitu pihak yang bertanggung jawab. lembaga pelaksana (perangkat daerah). Pera lihan dari tahap inisiasi ke tahap penyisipan setidaknya melibatkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: adopsi, adaptasi dan replikasi.

Pada awal internalisasi, peran lembaga litbang sangat besar. Dengan semakin intensnya interaksi antara *lembaga* litbang dengan pemangku kepentingan, dimana pemahaman dan penerapan keluaran litbang oleh para pemangku kepentingan meningkat, maka peran lembaga litbang pada saat itu semakin berkurang.

Institusionalisasi *adalah* tahap ketiga tahap ketiga dari proses inovasi. Lembaga penelitian

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

dan pengembangan tidak lagi terlibat dalam proses ini. Penyelenggaraan dan pelembagaan kegiatan penelitian dan pengembangan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah masing-masing. Lembaga litbang hanya memantau dan/atau mengkaji fungsi hasil litbang yang dilembagakan.

Keberlanjutan adalah tahap akhir dari proses inovasi yang bertujuan untuk melanjutkan produksi penelitian dan pengembangan agar lebih bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

e. Pola Kerjasama dalam Rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Kota Bandung.

Dalam melaksanakan kegiatan, Litbang Kota Bandung perlu mebangun jejaring kerjasama IPTEK yang berfungsi membentuk jalinana hubungan interaktif dengan memadukan unsur-unsur kelembagaan Pengembangan jejaring kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional dilakukan dalam rangka penguasaan Iptek (***scientific recognition***) dan peningkatan peran litbang dalam pembangunan. Jejaring kerjasama IPTEK diperlukan guna menyiasati keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan pembiayaan.

Unsur-unsur jaringan IPTEK yang dapat diajak kerjasama, adalah:

- Badan litbang lain milik pemerintah (Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat);
- Badan litbang non pemerintah dalam dan luar negeri (CIFOR);
- Perguruan tinggi di dalam maupun di Luar Negeri; dan
- Swasta/industri

Strategi peningkatan kerjasama yang dapat dilakukan litbang Kota Bandung, adalah sebagai berikut:

- Melakukan pendekatan dan menggali sumber-sumber kerjasama baik dalam maupun luar negeri;
- Peningkatan kerjasama melalui sistem *cost sharing;*
- Menjalin *sharing* pengetahuan bagi peningkatan wawasan dan pemahaman SDM Litbang;
- Kerjasama *data sharing*; yaitu kerjasama pemanfaatan dan memonitor pergerakan arus data dan informasi guna diakses sebagai informasi dasar kelitbangan;
- peningkatan penelitian kolaboratif dalam rangka meningkatkan kapasitas litbang; penjaringan mitra kerjasama melalui usaha komersialisasi berbasis *joint research;*
- peningkatan pengelolaan/manajemen kerjasama penelitian.

KESIMPULAN

Kondisi persaingan global, regional, nasional maupunn lokal, menuntut pemerintah meningkatkan kemajuan pembangunan serta inovasi melalui kegiatan litbang. Litbang diharapan mampu bersaing dengan mengandalkan keunggulan kompetitif, menghasilkan produk inovatif dengan kualitas tinggi, tepat guna, yang di dasarkan pada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Tenologi (IPTEK), serta bermanfaat bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan pembangunan , penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pemecahan masalah social dan ekonomi. Dengan dibentuknya litbang diharapkan mampu menumbuhkan kemajuan IPTEK, bertanggung jawab mencari berbagai invensi serta menggali potensi pendayagunaannya di daerah.

Mengamati pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan selama

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

ini, bahwa dari hasil-hasil kelitbangan yang dilaksanakan Kota Bandung di akui masih belum dilasanakan secara optimal untuk menjawab berbagai macam dinamika dan persoalan lingkup pemerintahan Kota Bandung

- Tidak didukung oleh sumberdaya (SDM, dana, dan fasilitas) penelitian dan pengembangan yang memadai.
- Rendahnya komitmen pimpinan dan para pemangku kepentingan (perangkat daerah) untuk memanfaatkan hasil litbang.
- Hasil kegiatan litbang belum mencerminkan kebutuhan solusi atas permasalahan yang dihadapi perangkat daerah secara proporsional
- Peran dan fungsi litbang belum menjadi mitra kerja utama perangat daerah.
- Aspek pengorganisasian belum terbentuk secara legal formal
- Pengendalian mutu pada manajemen riset litbang belum optimal dan belum berwujud rangkaian kegiatan ilmiah yang berkesinambungan dan berkelanjutan
- Belum optimalnya jejaring kerjasama litbang

Tingginya dinamika di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, membutuhkan peran dan fungsi Litbang untuk memberikan dukungan kepada perangkat daerah, dalam rangka pelaksanaan program dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan. Strategi yang dapat diterapkan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan litbang Kota Bandung, sebagai berikut:

- Strategi penguatan Badan Litbang difokuskan pada upaya-upaya perluasan cakupan substansi dan kualitas penelitian,
- Pemantapan fasilitasi serta penguatan insfrastruktur kelembagaan dan sarana prasarana
- Penyediaan dan distribusi SDM aparatur/personil litbang (peneliti, perekayasa, tim penunjang) yang tepat kompetensi dan jumlah pengalokasian anggaran kelitbangan.
- Merumuskan kembali manajemen riset dengan memperhatikan jumlah dan skala prioritas kegiatan, ketersediaan SDM, anggaran, dan sumber daya lainnya
- Pelibatan narasumber/pakar/praktisi secara tepat (dari aspek latar belakang keilmuan atau pemahamannya atas realita persoalan).

Dengan menerapkan strategi tersebut di atas, kita berharap dapat berhasil meningkatkan kegiatan litbang, yang diwujudkan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia litbang yang berkualitas, harmonisasi metode operasional kegiatan litbang, peningkatan proporsi hasil riset, dan peningkatan hasil riset. pemanfaatan hasil penelitian. Hasil penelitian dan pengembangan berhasil menghasilkan inovasi yang dapat diterima oleh pemangku kepentingan dan mempunyai nilai komersial yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan lainnya. Lembaga penelitian dan pengembangan struktur pemerintahan Kota Bandung diharapkan dapat berperan strategis dalam mendorong pembangunan daerah. Semakin besar kapasitas penelitian dan pengembangan Kota Bandung, maka semakin besar pula peluang terciptanya konsep, model, dan pilihan kebijakan yang akurat, yang menjadi dasar penentuan arah dan strategi yang tepat untuk mendorong keberhasilan Pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah mempunyai dampak besar terhadap keberhasilan pembangunan negara. Oleh karena itu, pembentukan lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan Langkah strategis dalam pengembangan kebijakan daerah berbasis penelitian agar dapat berperan efektif dan efisien dalam meningkatkan kegiatan perekonomian kegiatan pembangunan Kota Bandung.

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Padjadjaran dan Bappelitbang Kota Bandung yang telah memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan riset ini.

REFERENSI

Arikunto, S. (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka. Cipta. Jakarta.

Cohen, W.M. and D.A. Levinthal. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective On Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly 35:128 –152

Dahlander, L and D. M. Gann. (2010). How Open Is Innovation? Research Policy 39:699 –709 Freeman, C. And L. Soete. (2009). Developing Science, Technology And Innovation Indicators: What We Can Learn From The Past. Research Policy 38:583 –589

Hasibuan, Malayu, S.P. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Kementerian Riset dan Teknologi. (2010). Indikator ekonomi berbasis pengetahuan Indonesia. Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta

Kersanah. (1993). Iklim Kerja yang Kondusif di Organisasi Litbang. Warta Pengelolaan Litbang, Perkembangan Iptek, Volume 4 No. 11/1993: 23-28

Lakitan, B. (2010). Revitalisasi Kelembagaan Riset Dan Pengembangan Untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional. Seminar Revitalisasi Kelembagaan Litbang, Universitas Sahid, Jakarta 23 November 2010

----------. (2011). Indikator Kinerja Lembaga Litbang di Era Informasi Terbuka, Kementerian Riset dan Teknologi, Makalah pengarahan pada Temu Peneliti Badan Litbang dan Diklat VIII Kementerian Agama RI di Makassar tanggal 12 - 15 April 2011

Putera, Prakoso Bhairawa, dkk. (2013). Struktur Baru Organisasi Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Pemerintah Di Indonesia: Sebuah Konsep dan Respon atas Kebijakan Penataan dan Penguatan Organisasi 1 dalam Reformasi Birokrasi, Jurnal Borneo Administrator, Volume 9, Nomor 3 Tahun 2013 hal 299-317

Surminah, Lin. (2012). Manajemen Aset di Lembaga Litbang, Warta Kebijakan Iptek & Manajemen Litbang, Jakarta: Penerbit Papiptek-LIPI, 2008:77-94.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Hak Cipta © 2024, Novie Indrawati Sagita, Selvi Centia, Agus Taryana, Nurul Asiah.

Peran Pemuda dalam Pelestarian Alat Musik Kompang di Riau

Puja Debi Yanti
Mahasiswa Program Studi Sosiologi, Fakultas Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Universitas Terbuka
Email: pujadebi523@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran pemuda dalam pelestarian alat musik kompang di Dumai, Riau. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dan pengumpulan data melalui observasi di SMKN 2 Dumai. Temuan menunjukkan bahwa pemuda memiliki pemahaman yang berbeda tentang kompang, dengan sebagian besar dari mereka melihatnya sebagai simbol identitas budaya Melayu. Motivasi mereka untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh kebanggaan budaya dan pengakuan dari festival. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya akses pelatihan berkualitas dan keterbatasan fasilitas. Sekolah memainkan peran penting dalam menyediakan ruang pelestarian melalui program ekstrakurikuler. Peluang yang diidentifikasi termasuk pelatihan terstruktur, festival budaya, dan dukungan teknologi digital. Kolaborasi keluarga dan kampanye di sekolah direkomendasikan sebagai cara meningkatkan minat pemuda dalam melestarikan kompang. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya peningkatan program pendidikan budaya di sekolah serta dukungan pemerintah untuk program pelatihan dan fasilitas yang lebih baik.

Kata Kunci: *kompang, pemuda, pelestarian budaya, Riau, alat musik tradisional*

PENDAHULUAN

Alat musik kompang memiliki peranan penting dalam budaya Melayu di Dumai, Riau. Ia tidak hanya menjadi simbol identitas budaya tetapi juga instrumen yang menyatukan masyarakat melalui perayaan, upacara adat, dan kegiatan sosial. Sayangnya, seperti alat musik tradisional lainnya, kompang menghadapi ancaman dari perubahan zaman dan preferensi generasi muda. Hal ini mengakibatkan perlunya pelestarian budaya kompang agar tetap hidup dan dikenal. Salah satu komponen utama dalam pelestarian tersebut adalah pemuda. Menurut Hasan (2021), "Pemuda memiliki peran signifikan sebagai pelindung masa depan budaya, mereka perlu menjadi bagian penting dari pelestarian alat musik kompang dan budaya Melayu secara keseluruhan."

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketertarikan dari generasi muda terhadap kompang, namun hal ini tidak cukup kuat untuk menjaga eksistensinya. Kartika (2019) menemukan bahwa meski anak muda tertarik pada kompang, mereka cenderung menganggapnya sebagai hiburan yang ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan musik modern. Oleh karena itu, penulis menekankan perlunya program-program edukatif dan kolaboratif antara komunitas musik tradisional dengan generasi muda.

Tidak hanya minat, partisipasi aktif dari pemuda juga sangat diperlukan. Menurut Rasyid (2020), "Pemuda Dumai menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pelatihan kompang, tetapi keterbatasan fasilitas dan kurangnya dukungan dari institusi terkait membuat upaya pelestarian ini terhambat." Hal ini menunjukkan perlunya keterlibatan pemerintah lokal dan organisasi budaya dalam mendukung keberlanjutan tradisi musik kompang. Festival, pelatihan, dan kegiatan sekolah bisa menjadi media efektif untuk menginspirasi dan meningkatkan keterlibatan generasi

Hak Cipta © 2024, Puja Debi Yanti

muda dalam praktik kompang.

Dari sisi edukasi formal, Affandi (2022) berpendapat bahwa "Mengintegrasikan musik tradisional ke dalam kurikulum pendidikan akan memberikan landasan kuat bagi anak muda untuk memahami nilai budaya mereka sendiri." Dengan menjadikan kompang bagian dari pelajaran di sekolah, pemuda di Dumai, Riau bisa mengenal alat musik tersebut sejak dini dan terlibat dalam praktiknya secara lebih mendalam. Hal ini selaras dengan penelitian Suryani (2023) yang menemukan bahwa siswa yang terpapar pada pelajaran musik tradisional di sekolah cenderung memiliki apresiasi yang lebih besar terhadap seni dan budaya lokal.

Tidak hanya dari sisi edukasi, peran komunitas dan keluarga juga penting. Dalam riset yang dilakukan oleh Yusran (2022), terlihat bahwa "keluarga yang secara aktif memainkan musik kompang di rumah mereka berhasil menanamkan kecintaan pada budaya ini kepada anak-anak mereka." Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran lingkungan keluarga dalam memastikan kelangsungan budaya kompang di Dumai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam peran pemuda dalam melestarikan alat musik kompang di Dumai, Riau. Penelitian ini akan berusaha memahami sejauh mana pemuda saat ini terlibat dalam upaya pelestarian, apa yang memotivasi mereka, serta apa saja hambatan dan peluang yang mereka hadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa rekomendasi praktis dan strategis kepada lembaga terkait, baik pemerintah, sekolah, maupun organisasi kebudayaan, dalam menyusun program pelestarian yang efektif dan relevan bagi generasi muda.

Manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk memperkuat dasar keilmuan tentang keterlibatan pemuda dalam pelestarian budaya lokal, khususnya dalam konteks musik tradisional. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi riset-riset lanjutan serta dapat menjadi acuan bagi komunitas dan individu yang tertarik dalam pengembangan budaya kompang di masa depan.

Dalam kerangka penelitian ini, fokus tulisan terletak pada keterlibatan pemuda dan peran mereka dalam pelestarian kompang, dengan pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka, baik dari sisi lingkungan sosial, ekonomi, maupun budaya. Penelitian ini juga akan mengkaji peran institusi pendidikan dan pemerintah lokal dalam memfasilitasi upaya pelestarian.

Sebagai keterbatasan, penelitian ini hanya akan berfokus pada lingkup daerah Dumai dan mungkin belum mencakup variasi budaya kompang di daerahdaerah lain di Riau. Namun demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi contoh yang aplikatif untuk program pelestarian kompang di wilayah lain. Dengan demikian, latar belakang, justifikasi, dan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang jelas untuk studi yang lebih mendalam mengenai peran pemuda dalam pelestarian alat musik kompang di Dumai, Riau, sekaligus menawarkan wawasan yang lebih komprehensif mengenai strategi terbaik dalam mendukung pelestarian budaya lokal tersebut.

METODELOGI PENELTIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam peran pemuda dalam pelestarian alat musik kompang di Dumai, Riau. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggali perspektif, pemahaman, dan pengalaman pribadi pemuda yang terlibat dalam pelestarian kompang. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif

Hak Cipta © 2024, Puja Debi Yanti

atas konteks sosial dan budaya yang melingkupi peran pemuda.

Metode yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini akan memfokuskan studinya pada satu lokasi tertentu, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 2 Dumai. Sekolah ini dipilih karena memiliki program pelestarian budaya kompang yang telah berjalan selama beberapa tahun, sehingga dapat memberikan pandangan yang kaya tentang keterlibatan pemuda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa alat musik kompang, meskipun menghadapi tantangan dalam menghadapi budaya populer modern, tetap memiliki daya tarik dan potensi untuk bertahan. Pemuda di Dumai, khususnya yang terlibat dalam program pelestarian di SMKN 2 Dumai, menunjukkan tingkat partisipasi dan minat yang tinggi dalam menjaga tradisi ini. Namun, berbagai hambatan dan peluang turut memengaruhi upaya pelestarian.

1. Pemahaman Pemuda tentang Kompang

Penelitian ini menemukan bahwa transmisi budaya, terutama terkait alat musik kompang, terjadi melalui berbagai cara di SMKN 2 Dumai. Para siswa mendapatkan pemahaman dan keterampilan bermain kompang melalui kegiatan ekstrakurikuler, workshop, dan acara budaya yang diadakan sekolah. Selain itu, sebagian siswa juga menerima pengetahuan dan keterampilan dari anggota keluarga mereka, seperti kakek atau nenek yang memainkan kompang. Untuk memahami bagaimana transmisi budaya ini berlangsung, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sepuluh siswa yang aktif dalam kegiatan kompang di sekolah.

a. Workshop dan Ekstrakurikuler:

Mayoritas siswa yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka pertama kali belajar bermain kompang melalui program ekstrakurikuler di sekolah. Program ini melibatkan latihan rutin dan workshop yang dipandu oleh guru seni budaya dan praktisi kompang dari komunitas setempat. Salah satu siswa mengatakan, "Saya mulai belajar kompang di ekstrakurikuler sekolah. Kami sering mengadakan workshop yang mengundang pemain kompang profesional untuk mengajari kami teknik-teknik bermain yang benar." Workshop ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis tetapi juga pemahaman mendalam tentang sejarah dan nilai budaya kompang.

b. Pengaruh Keluarga:

Sebagian besar siswa mengakui bahwa keterlibatan mereka dalam kegiatan kompang juga dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil di lingkungan keluarga atau komunitas. Beberapa siswa menyebutkan bahwa mereka belajar bermain kompang dari kakek atau nenek mereka yang merupakan pemain kompang. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi budaya melalui keluarga tetap relevan dan penting. Seorang siswa mengungkapkan, "Kakek saya yang mengajari saya bermain kompang. Setiap kali ada acara keluarga, kami selalu bermain kompang bersama." Ini sejalan dengan pernyataan Yusran (2022) yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Melayu.

c. Pertunjukan dan Festival:

Selain pelatihan di sekolah, siswa juga mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam berbagai acara budaya lokal, seperti festival dan pentas seni. Pertunjukan ini tidak hanya menjadi ajang untuk menampilkan keterampilan mereka tetapi juga untuk memperkuat rasa kebanggaan budaya dan identitas Melayu. "Bermain kompang di festival membuat saya merasa bangga sebagai bagian dari budaya Melayu," ujar seorang siswa. Partisipasi dalam festival ini memberikan motivasi tambahan bagi siswa untuk terus berlatih dan mengembangkan keterampilan mereka.

Hak Cipta © 2024, Puja Debi Yanti

d. Kendala dan Tantangan:

Meskipun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses transmisi budaya ini. Beberapa siswa menyebutkan bahwa keterbatasan fasilitas dan kurangnya akses ke pelatihan profesional menjadi tantangan utama. Fasilitas yang ada di sekolah sering kali tidak memadai, dan tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap instrumen berkualitas. "Kami perlu lebih banyak dukungan untuk mendapatkan instrumen yang baik dan pelatihan dari ahli," kata salah satu siswa.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian mengenai peran pemuda dalam pelestarian alat musik kompang di Dumai, Riau. Pemuda di Dumai yang terlibat dalam program pelestarian kompang memiliki pemahaman beragam tentang alat musik ini. Mereka yang tumbuh di lingkungan keluarga atau komunitas yang memainkan kompang cenderung memiliki keterkaitan emosional yang kuat dan memahami kompang sebagai simbol budaya Melayu. Motivasi untuk berpartisipasi didorong oleh kebanggaan identitas budaya, pengakuan melalui festival, dan dorongan dari keluarga.

Hambatan utama yang dihadapi pemuda dalam pelestarian kompang meliputi kurangnya akses ke pelatihan berkualitas, keterbatasan instrumen yang memadai, serta kesenjangan teknologi yang memengaruhi minat mereka terhadap musik tradisional. Program ekstrakurikuler kompang di SMKN 2 Dumai menunjukkan bahwa pendidikan formal memiliki potensi besar dalam memfasilitasi pelestarian budaya. Namun, masih ada tantangan dalam hal motivasi siswa, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya dukungan dari pemerintah.

Terdapat berbagai peluang untuk meningkatkan partisipasi pemuda, termasuk pengembangan program pelatihan yang terstruktur, festival budaya, dukungan teknologi melalui media digital, dan kolaborasi dengan keluarga. Dukungan dari berbagai pihak dapat membuka jalan untuk pelestarian kompang secara lebih inklusif.

REFERENSI

Affandi, R. (2022). Strategi Pendidikan Budaya di Sekolah. Medan: Penerbit Wacana Edukasi.

Anwar, S. (2022). "Factors Affecting Youth Participation in Traditional Music Programs." Journal of Ethnomusicology, 13(4), 91-105.

Hasan, A. (2021). Generasi Muda dan Pelestarian Kompang di Riau. Jakarta: Penerbit Buku Kita.

Johari, R. (2023). "Collaboration between Schools and Communities in Traditional Music Preservation." Journal of Southeast Asian Studies, 28(1), 63-75.

Kartika, D. (2019). Minat Pemuda Terhadap Musik Tradisional: Studi Kasus di Riau. Bandung: Penerbit Gramedia.

Rahman, M., & Sutanto, P. (2021). "The Role of Extracurricular Activities in Preserving Traditional Musical Heritage." Journal of Cultural Studies, 22(3), 77-89.

Rasyid, M., & Halim, A. (2018). Festival Budaya dan Partisipasi Muda. Surabaya: Penerbit Paramadina.

Smith, L., & Harris, K. (2020). "Social Media as a Tool for Preserving Traditional Music." International Journal of Music Education, 35(1), 112-124.

Suryani, D. (2023). Pemuda dan Budaya Lokal: Kasus Kompang di Pekanbaru.
Bandung: Penerbit Nuansa.

Yusran, F. (2022). Kolaborasi Keluarga dalam Pelestarian Musik Tradisional.

Hak Cipta © 2024, Puja Debi Yanti

Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Zulkifli, F. (2019). Edukasi Budaya dan Pemuda: Studi tentang Kompang. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Zulkifli, S. (2019). "Pelatihan Terstruktur dan Minat Pemuda dalam Melestarikan Musik Tradisional." Jurnal Budaya Nusantara, 15(2), 57-68. Ramaswamy, K. & Glinow, M.A.V. (2000). Organizational performance following changes in ownership: modelling post-privatization outcomes. *Journal of Strategic Change*, *9*(8), 297-310.

Walsh, C. (2003). *Key Management Ratios: Rasio-rasio Manajemen Penting Penggerak dan Pengendali Bisnis* (3rd ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hak Cipta © 2024, Puja Debi Yanti

Dari Pendirian Hingga Fase Awal Kemunduran: *Bibliotheek* Dan Inventaris Arsip-Arsip *Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen*, 1778-1820

Purwanto Putra[12]
[1] Program Studi D3 Perpustakaan FISIP Universitas Lampung, [2] Program Studi D4 Kearsipan FHISIP Universitas Terbuka
e-mail: purwanto.putra@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas sejarah dan dinamika lembaga Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (KBGKW) tercatat pernah berdiri pada tahun 1778 di Batavia, lembaga ini merupakan cikal bakal dari Perpustakaan dan Museum Nasional Indonesia. Arsip KBGKW yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi sumber utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yang terdiri dari empat langkah: heuristik, kritik eksternal dan internal, interpretasi, serta historiografi. Dari hasil kajian ini diupayakan untuk mengungkap pentingnya KBGKW dalam mempromosikan ilmu pengetahuan dan budaya di Hindia Belanda, serta peran perpustakaannya yang didirikan bersamaan dengan KBGKW pada tahun 1778. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KBGKW berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan diseminasi pengetahuan yang melibatkan berbagai bidang seperti sejarah, arkeologi, linguistik, dan ilmu alam. Meski mengalami kemunduran dan perubahan status selama masa pendudukan Jepang dan masa-masa setelahnya, perpustakaan KBGKW tetap menjadi institusi penting dalam menjaga dan melestarikan koleksi dokumentasi berharga. Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian sejarah kelembagaan dan menunjukkan relevansi arsip KBGKW bagi studi sejarah dan ilmu sosial di Indonesia.

***Kata kunci**: Arsip, Bataviaasch Genootschap, Ilmu Pengetahuan,* Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen *, KBGKW, Perpustakaan*

PENDAHULUAN

Dokumen dan arsip dari *Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen* (KBGKW) merupakan sumber penting untuk studi sejarah dan budaya Indonesia. Sebagai kumpulan dokumentasi dari sebuah masyarakat ilmiah yang berdiri sejak tahun 1778 di Batavia dan jejakannya ada hingga saat ini. Berbagai dokumen dan arsip tersebut menawarkan wawasan mendalam tentang berbagai bidang ilmu selama periode kolonial. Mempelajari arsip-arsip ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan dikumpulkan dan disebarluaskan pada masa itu, tetapi juga membuka peluang untuk mengevaluasi kembali narasi sejarah dari perspektif yang lebih beragam. Upaya pelestarian dan digitalisasi arsip-arsip ini harus menjadi prioritas untuk memastikan akses yang lebih luas dan pemanfaatan optimal dalam penelitian akademis.

Dokumen-arsip KBGKW merujuk pada arsip-arsip dari Batavian Society of Arts and Sciences, sebuah masyarakat ilmiah yang ketika itu juga pernah hadir di tengah masyarakat Batavia (sekarang Jakarta, Indonesia). Kelompok masyarakat ilmiah ini berperan penting dalam mempromosikan penelitian dan beasiswa diberbagai bidang seperti sejarah, arkeologi, linguistik,

Hak Cipta © 2024, Purwanto Putra.

dan ilmu alam selama masa kolonial.

Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia (atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen), sudah ada sejak tahun 1778 dan diketahui menjadi semacam pendahulu dari keberadaan lembaga Perpustakaan Nasional dan Museum Nasional Republik Indonesia. Sekarang ini Masyarakat ilmiah ini menjalankan peran sebagai organisasi budaya dan ilmiah paling penting di Hindia Belanda pada masa Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) dan periode kolonial. Studi ini memberikan perhatian pada pendirian, program, dan bidang minat masyarakat, juga pada anggotanya, organisasi, pertumbuhan, kemunduran, dan kebangkitannya kembali, tetapi terutama pada hubungan dengan pemerintah dari sebuah perusahaan swasta yang secara formal, yang kadang-kadang tampak menjadi bagian dari struktur pemerintahan.

Arsip ini disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Sejak tahun 1878, arsip ini hanya sedikit tersedia bagi para ilmuwan di luar Masyarakat. Namun demikian, arsip ini terbukti sangat penting bagi para sejarawan, ahli bahasa, dan antropolog. KBGKW, yang telah berdidiri sejak tahun 1778, merupakan lembaga pendahulu dari kemudian hari di masa Republik Indonesia, berdiri Museum Nasional dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dianggap sebagai organisasi budaya dan ilmiah paling penting di Hindia Belanda dan bahkan sejak masa VOC bercokol di bumi Nusantara ini.

Dalam studi tentang sejarah awal lembaga yang terhormat ini, dibahas pendirian, program, dan bidang kerja *genootschap*, anggota dan pemimpin, pertumbuhan, kemunduran, dan kebangkitan kembali, tetapi terutama hubungan dengan pemerintah dari perusahaan swasta yang secara formal, yang terkadang lebih mirip menjadi lembaga pemerintah. Dokumen-arsip KBGKW yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, merupakan sumber utama untuk studi ini. Sejak tahun 1878, arsip ini hampir tidak tersedia bagi peneliti di luar lingkaran *genootschap*. Namun, bagi sejarawan, ahli bahasa, antropolog, arkeolog, dan lainnya, arsip *genootschap* dan sejarah *genootschap* sangat penting.

Hans Groot (1949) belajar bahasa dan sastra Belanda serta Italia di Amsterdam dan bekerja dilingkup bidang pendidikan tinggi (1976-1986), pertama di Amsterdam, kemudian di Trieste (Italia). Sejak tahun 1986, ia bekerja di Pusat Bahasa Erasmus di Jakarta. Setelah mengunjungi Museum Nasional di sana, ia bertanya-tanya tentang sejarah museum tersebut. Itu adalah awal dari penelitian yang menghasilkan studi ini.

Bahwa yang disebut sebagai perpustakaan nasional menurut Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya harus memenuhi aspek-aspek berikut ini, di antaranya: menyusun bibliografi nasional, menyimpan dan meng*update* (pemutakhiran) koleksi sumber asing yang besar dan representatif (termasuk buku mengenai negara yang bersangkutan), bertindak sebagai pusat bibliografi nasional, menyusun katalog induk, dan menerbitkan bibliografi nasional retrospektif (Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024, 2020).

Lalu, bagaimana terkait fungsi, tugas dan tanggungjawab Perpustakaan Nasional RI sekarang ini, apakah masih mengemban dan secara konsekuen menjalankannya? Lebih jauh lagi jikapun masih menjalankan pertanyaan selanjutnya apakah ketiga hal itu masih relevan dengan perkembangan saat ini?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut mungkin juga tak mudah, bukan sekedar jawaban

Hak Cipta © 2024, Purwanto Putra.

benar dan salah atau sudah benar atau belum. Selain itu kiranya juga ada banyak pendekatan yang bisa digunakan. Maka dari itu dalam rangka untuk memberikan penjelasan penting pertanyaan tersebut coba didekati dari perspektif sejarah. Melihat perkembangan dan Perubahan fungsi perpustakaan di Indonesia seiring berjalannya waktu sangat penting untuk dilakukan guna mengatasi ketidakpastian mengenai peran dan tanggung jawab Perpustakaan Nasional RI sesuai fungsinya yang sesungguhnya. Bisa saja perpustakaan mengklaim bahwa institusinya sudah menjalankan peran dan fungsi, bisa saja hanya menjalankan fungsi sebagai perpustakaan tetapi tidak fungsi yang seharusnya diemban sebuah perpustakaan nasional. Jika demikian lalu apa kategori "perpustakaan nasional" dari masa ke masa?

Jika demikian pertanyaan mendasarnya, sejak kapankah Indonesia mengenal adanya perpustakaan? Bagaimanakah perkembangan perpustakaan di Indonesia? Apakah pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara telah berdiri institusi perpustakaan dan seperti apa bentuk dan peranannya? Lalu, apa argumen yang mendasari pendiriannya? Mayoritas tulisan dan sumber-sumber yang ada menyebut bahwa keberadaan perpustakaan di Indonesia (ketika itu masih disebut Nusantara) bermula dari kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, sekitaran abad ke-16. Walaupun demikian, ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa sejarah perpustakaan itu sudah dimulai sejak masa berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban masyarakatnya. Hal tersebut tentu saja bisa benar juga bisa salah. Bahwa tak perlu diberi penyangkalan bahwa keberadaan perpustakaan di Nusantara ini masih lebih muda ketika dibandingkan dengan tradisi perpustakaan yang ada negara-negara jazirah Arab dan wilayah Eropa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada kajian sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Pendekatan ini terfokus pada analisis dan interpretasi data historis untuk memahami perkembangan fenomena atau peristiwa sepanjang waktu. Metode sejarah melibatkan empat langkah utama: heuristik, kritik eksternal dan internal, interpretasi, serta historiografi. Dengan upaya untuk menyajikan perspektif baru dalam penelitian sejarah, ilmu sosial, dan khususnya tentang pendirian suatu lembaga pengelola ilmu pengetahuan yang telah berdiri sejak masa VOC hingga masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tema ini boleh dikatakan berada diluar dari keumuman topik tentang politik, ekonomi, dan militer) (International Conference on history, social sciences, and education & Universitas Negeri, 2022), yang dapat dikatakan masihsangat relevan dengan kebutuhan baik secara teoritis dan praktis terutama tentang sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang dimasa silam pernah berdiri di wilayah Indonesia ini.

Tahap pertama, heuristik, melibatkan pengumpulan sumber historis relevan terkait dengan pendirian lembaga KBGKW. Selanjutnya, tahap kritik ekstern dan kritik intern digunakan untuk mengevaluasi keandalan dan keberhasilan sumber-sumber tersebut, termasuk dokumen-dokumen yang terkait dengan lembaga tersebut. Kemudian, tahap interpretasi melibatkan analisis sistematis data historis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang relevan terkait dengan sejarah *Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen* (KBGKW). Terakhir, tahap historiografi memungkinkan peneliti untuk membuat laporan penelitian yang jelas dan sistematis berdasarkan temuan dan interpretasi mereka, termasuk pendirian, kemunduran (dinamika perkembangan) dan pengetahuan terkait dokumen-arsip Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen (KBGKW) ini. Dengan menggunakan metode

Hak Cipta © 2024, Purwanto Putra.

sejarah, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konteks dan perkembangan lembaga ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya perpustakaan mulai dari masa VOC, masa Hindia Belanda, periode pendudukan Jepang, dan era Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen (KBGKW) yang dalam Bahasa Inggris bisa disebut: *Batavian Academy of Arts and Sciences*) merupakan sebuah himpunan yang didirikan di Batavia (Jakarta) sejak tahun 1778 yang hampir seperempat millennium lalu (245 tahun). Himpunan ini nantinya juga akan menjadi institusi ilmiah tertua di Indonesia dan bahkan di seluruh Asia Tenggara.

Kelahiran himpunan ini bermula dari seorang Rademacher, pria kelahiran Den Haag, Belanda dari keluarga yang cukup berada dengan nama lengkap Jacobus Cornelis Mattheus Radermacher atau J.C.M Radermacher (1741-1783) yang pertama kali datang ke Hindia Belanda pada 1757 dan bekerja sebagai pegawai VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), tidak berselang lama karena kecerdasannya dalam waktu singkat ia berhasil naik pangkat kemudian Ia tampil menjadi tokoh muda pejabat VOC. Ketika mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, ia sudah memegang posisi sebagai penasihat khusus gubernur-jenderal. Karirnya terus berkembang, dan antara tahun 1763 hingga 1767, ia kembali ke Belanda untuk melanjutkan studi hukum dan akhirnya memperoleh gelar doktor.

Setelah lulus Radermacher kembali ke Hindia Belanda, yang ketika itu juga telah memperistri anak anak dari Gubernur-Jendral, Reynier de Klerk yang terkenal dengan berbagai upaya untuk memperbaiki pendidikan di wilayah Batavia. Banyak yang tidak tahu bahwa Radermacher juga merupakan pendiri organisasi internasional yang menganut prinsip persaudaraan dan tolong menolong (*Ordo Freemason*) pertama di Batavia.

Ketika menjadi studi di Belanda, Ia memiliki minat yang besar dengan pemikiran dan berbagai kegiatan Himpunan “De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen” (HMW) (Akademi Ilmu Pengetahuan Holland), di kota Haarlem yang berdiri pada 1752 (himpunan akademi keilmua tertua di Belanda). HMW berfokus pada urusan perdagangan, peran ilmu pengetahuan dan kesenian dalam penyebaran agama Kristen di wilayah koloni. Rademacher juga ahli botani kemudian terinspirasi dan berupaya mengubah banyak hal dan memulai misi memajukan ilmu pengetahuan dan kesenian di Batavia. Ia mengusulkan untuk didirikannya himpunan sejenis di Batavia.

Banyak pihak yang menganggap usulnya tak masuk akal dan bahkan mustahil dapat direalisasikan. Walaupun ada banyak tantangan dikemudian hari Ia terbukti berhasil mendirikan perkumpulan ilmu pengetahuan, museum, hingga perpustakaan. Hal itu terjadi ketika kekuasaan VOC mendekati keruntuhan (1795) setelah sebelumnya berjaya, selama hampir dua ratus tahun, memonopoli perdagangan di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara. Suasana kemasyarakatan yang dibangun VOC memang tidak mendukung untuk pengembangan iklim intelektual dan ilmu pegetahuan. Lebih pada upaya untukmemperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari usaha dagangnya. Aspek pendidikan, penerbitan, termasuk dunia pers nyaris tak ada.

Kondisi di Belanda mulai berubah, dipengaruhi oleh apa yang dikenal sebagai 'Era Pencerahan' Eropa. Perubahan ini mencakup transformasi dalam pemikiran dan kehidupan masyarakat Eropa, yang dimulai setelah akhir abad pertengahan sekitar tiga abad yang lalu. Kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan mendapat tempat yang bagus, dengan bekal itu

Hak Cipta © 2024, Purwanto Putra.

akhirnya usul Radermacher ini juga disetujui. Secara resmi pada 24 April 1778, berdirilah sebuah himpunan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW). Himpunan ini bertujuan untuk memajukan kegiatan penelitian khususnya bidang seni dan ilmu pengetahuan (arkeologi, biologi, etnologi, ilmu fisika, sastra dan termasuk sejarah) serta menerbitkan berbagai hasil penelitian.

Himpunan menyadari bahwa keberlangsungan lembaga yang bergerak dalam seni dan ilmu pengetahuan sangat tergantung pada dukungan dari pihak berkuasa, dalam hal ini para pejabat VOC. Kemudian, para pendiri mencoba melakukan pendekatan. Pertama, dengan mengajak para petinggi VOC untuk terlibat sebagai pengurus dan mengerjakan administrasi, sekaligus strategi untuk mempermudah diperolehnya izin pendirian agar menjadi organisasi terbuka (berbeda berbeda dengan organisasi, Vrij Masonrij/Free Masons yang berdiri 15 tahun sebelumnya organisasi bersifat tertutup). Himpunan berupaya menciptakan hubungan baik dengan penguasa agar eksistensi organisasi terjamin (Groot, 2006). Maka setelah himpunan ini berdiri Gubernur Jenderal dan pejabat-pejabat VOC diangkat menjadi anggota direksinya, sedangkan tokoh-tokoh masyarakat bergabung sebagai anggota.

Radermacher sendiri kemudian turut menghibahkan rumah besarnya di Kali Besar (dekat Stadhuis, kantor Gubernur Jenderal VOC), daerah yang merupakan permukiman kalangan atas dan urat nadi perdagangan di Batavia. Radermacher yang juga memiliki latar belakang ilmu botani bersama himpunan berhasil membuat katalog jenis hewan dan tumbuhan di Pulau Jawa dan Sumatera. Walaupun demikian akhir hanyatnya berakhir secara tragis, tahun 1783 karena alasan kesehatan, Ia kembali ke Belanda, namun, nasib naas mesti diterima ketika dalam perjalanan Ia terbunuh akibat pemberontakan yang terjadi di kapal yang ditumpanginya.

Pada sisi yang lain perhimpunan ini dianggap berhasil memajukan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda, khususnya bahasa, ilmu bumi dan antropologi dan keteraturannya dalam penerbitan, Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dan Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, pada tahun 1923 [1924] himpunan ini mendapat gelar kehormatan dari Ratu Wilhelmina, berupa hak untuk memperpanjang namanya, dengan nama depan '*Koninklijk*' atau '*Koninklijke*' (diucapkan [koːnɪŋkləkə(ə)]) sehingga nama lengkapnya menjadi *Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen* (KBGKW).

Fase Awal Kemunduran Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen (KBGKW) didirikan selain sebagai akademi ilmu pengetahuan ternyata secara bersamaan pada 24 April 1778 itu yang masih berada di bawah kewenangan VOC juga mendirikan *bibliotheek* (perpustakaan). Menurut berbagai sumber, VOC telah mendirikan perpustakaan yang dikenal sebagai Perpustakaan Gereja di Batavia sejak tahun 1624. Namun, karena berbagai kendala, perpustakaan ini baru secara resmi dibuka pada 27 April 1643 dengan menunjuk Ds. (Dominus) Abraham Fierenius sebagai pustakawan. Pada masa inilah perpustakaan tidak lagi diperuntukkan bagi sebatas keluarga atau kalangan kerajaan saja, perpustakaan sudah bisa digunakan khalayak luas atau masyarakat umum, misalnya perpustakaan sudah melayankan koleksinya untuk para perawat rumah sakit Batavia, bahkan diperluas sampai ke Semarang (layanan pinjam antar perpustakaan atau interlibrary loan).

Seratus tahun kemudian berdiri perpustakaan khusus di Batavia. Pada tanggal 25 April 1778 berdiri Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW). Bahwa dalam perkembangannya Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Masyarakat Seni

Hak Cipta © 2024, Purwanto Putra.

dan Ilmu Pengetahuan Batavia, 1778) dan perpustakaannya yang kemudian menjadi cikal bakal Perpustakaan Nasional RI yang berdiri secara resmi tahun 1980 (Massil, S. W., 1989). Perpustakaan KBGKW di awal pendiriannya sudah dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai jenis koleksi yang terdiri atas buku, surat kabar, majalah, dan termasuk sumber peta. Setelah Perpustakaan Nasional RI resmi berdiri, koleksi-koleksi tersebut terus dipertahankan dan menjadi koleksi langka yang terdiri dari majalah, surat kabar, buku dan peta (Arliana Wijayanti, 2018).

Perpustakaan *Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen* (KBGKW) pada awal pembentukannya merupakan jenis perpustakaan khusus. Pengklasifikasian atas dasar jenis koleksinya yang memang bersifat khusus serta pemustaka (penggunanya) yang memang ketika spesifik untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi bagi para peneliti. Ketika Pemerintah colonial Belanda menginisiasi sistem tanam paksa, ketika itu dibuka banyak lahan perkebunan dan balai-balai penelitian bidang pertanian. Adanya kebijakan tersebut ternyata juga turut mendorong pendirian perpustakaan khusus bidang pertanian dan lahirnya majalah pertanian, yang kemudian waktu menjadi majalah pertanian pertama di Hindia Belanda yang terbit pada tahun 1779 (Sulistyo Basuki, 1977). Majalah yang diberi titel, Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunten en Wetenschap (Spat, C., 1927).

Pada awal pendirian Perpustakaan BGKW untuk menambah koleksinya juga turut disumbangkan berbagai benda-benda kuno dan koleksi arkeologi, alat musik, buku-buku serta enam lemari yang terisi penuh buku-buku dan dokumen. Buku-buku itu terdiri dari buku ilmu alam, hayat, hukum, dan lain sebagainya. Sama dengan perhimpunan, perpustakaan ini dalam operasional sehari-hari juga mengandalkan sumbangan dermawan serta bantuan keuangan dari *Raad van* Indie. Bahkan ketika VOC bubar tahun 1799, perpustakaan BGKW tetap beroperasi dengan mengandalkan sumbangan dermawan dan gubernemen. Kendati demikian perpustakaan ini pernah menjadi salah satu perpustakaan yang terbesar di Batavia dan dapat diakses seluruh kalangan masyarakat, seperti juga museumnya.

Selama masa Pendudukan Jepang, mulai tahun 1942 sampai 1945 koleksi KBGKW boleh dikatakan tetap utuh, padahal pada beberapa perpustakaan ainnya, banyak yang rusak atau dirusak seperti misalnya perpustakaan yang berada di wilayah perkebunan atau berada jauh dari kota yang dimasa pendudukan juga setelahnya (Inotji Hajatullah, Surja Mansjur dan Maksum, 2002). Sedangkan, sebelumnya berbagai koleksi itu dalam kondisi baik dan terawat (Victor Honig and Frans Verdoron, 1943). Koleksi Perpustakaan KBGKW aman karena Pemerintah Hindia Belanda sebelum kejatuhan ke Jepang telah menyatakan bahwa Batavia merupakan kota terbuka, selain itu di sebelah perpustakaan, merupakan gedung Rechtshogeschool yang dijadikan markas besar Kempetai (polisi rahasia Jepang) yang ketika itu sangat ditakuti, maka atas dasar itu koleksi perpustakaan tetap terjaga.

Pendirian Perpustakaan (Bibliotheek) Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

KBGKW didirikan dengan tujuan awal pendirian awalnya sebagai akademi ilmu pengetahuan, secara bersamaan pada 24 April 1778 ternyata VOC juga mendirikan *bibliotheek* (perpustakaan). Dari sumber, disinyalir jauh sebelum KBGKW ini VOC juga sudah mendirikan berbagai perpustakaan, satu diantaranya yaitu Perpustakaan Gereja di Batavia yang berdiri sejak tahun 1624. Namun, karena sejumlah kendala, perpustakaan ini baru dapat diresmikan pada 27 April 1643 dengan penunjukan Ds. (Dominus) Abraham Fierenius sebagai pustakawan. Pada periode ini, perpustakaan tidak lagi hanya untuk keluarga atau kalangan kerajaan, melainkan telah dibuka untuk umum dan dapat diakses oleh masyarakat luas, misalnya perpustakaan sudah

Hak Cipta © 2024, Purwanto Putra.

melayankan koleksinya untuk para perawat rumah sakit di Batavia, bahkan layanannya diperluas sampai ke Semarang (layanan pinjam antar perpustakaan atau *interlibrary loan*).

Seratus tahun kemudian berdiri perpustakaan khusus di Batavia. Pada tanggal 25 April 1778 berdiri Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW). Bahwa dalam perkembangannya Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia, 1778) dan perpustakaannya yang kemudian menjadi cikal bakal Perpustakaan Nasional RI yang berdiri secara resmi tahun 1980 (Massil, S. W., 1989). Perpustakaan KBGKW di awal pendiriannya sudah dengan tujuan untuk mengumpulkan berbagai jenis koleksi yang terdiri atas buku, surat kabar, majalah, dan termasuk sumber peta. Setelah Perpustakaan Nasional RI resmi berdiri, koleksi-koleksi tersebut terus dipertahankan dan menjadi koleksi langka yang terdiri dari majalah, surat kabar, buku dan peta (Arliana Wijayanti, 2018).

Perpustakaan KBGKW pada awal pembentukannya merupakan jenis perpustakaan khusus. Pengklasifikasian atas dasar jenis koleksinya yang memang bersifat khusus serta pemustaka (penggunanya) yang memang ketika spesifik untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi bagi para peneliti. Ketika Pemerintah colonial Belanda menginisiasi sistem tanam paksa, ketika itu dibuka banyak lahan perkebunan dan balai-balai penelitian bidang pertanian. Adanya kebijakan tersebut ternyata juga turut mendorong pendirian perpustakaan khusus bidang pertanian dan lahirnya majalah pertanian, yang kemudian waktu menjadi majalah pertanian pertama di Hindia Belanda yang terbit pada tahun 1779 (Sulistyo Basuki, 1977). Majalah yang diberi titel, Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunten en Wetenschap (Spat, C., 1927).

Pada awal pendirian Perpustakaan BGKW untuk menambah koleksinya juga turut disumbangkan berbagai benda-benda kuno dan koleksi arkeologi, alat musik, buku-buku serta enam lemari yang terisi penuh buku-buku dan dokumen. Buku-buku itu terdiri dari buku ilmu alam, hayat, hukum, dan lain sebagainya. Sama dengan perhimpunan, perpustakaan ini dalam operasional sehari-hari juga mengandalkan sumbangan dermawan serta bantuan keuangan dari Raad van Indie. Bahkan ketika VOC bubar tahun 1799, perpustakaan BGKW tetap beroperasi dengan mengandalkan sumbangan dermawan dan gubernemen. Kendati demikian perpustakaan ini pernah menjadi salah satu perpustakaan yang terbesar di Batavia dan dapat diakses seluruh kalangan masyarakat, seperti juga museumnya.

Selama masa Pendudukan Jepang, mulai tahun 1942 sampai 1945 koleksi KBGKW boleh dikatakan tetap utuh, padahal pada beberapa perpustakaan ainnya, banyak yang rusak atau dirusak seperti misalnya perpustakaan yang berada di wilayah perkebunan atau berada jauh dari kota yang dimasa pendudukan juga setelahnya (Inotji Hajatullah, Surja Mansjur dan Maksum, 2002). Sedangkan, sebelumnya berbagai koleksi itu dalam kondisi baik dan terawat (Victor Honig and Frans Verdoron, 1943). Koleksi Perpustakaan KBGKW aman karena Pemerintah Hindia Belanda sebelum kejatuhan ke Jepang telah menyatakan bahwa Batavia merupakan kota terbuka, selain itu di sebelah perpustakaan, merupakan gedung Rechtshogeschool yang dijadikan markas besar Kempetai (polisi rahasia Jepang) yang ketika itu sangat ditakuti, maka atas dasar itu koleksi perpustakaan tetap terjaga.

Inventaris, Penyelamatan Dan Pemindahan Arsip-Arsip Koninklijk Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen (KBGKW) Ke Arsip Nasional RI

Pada tahun 1990, arsip KBGKW ini berhasil dipindahkan dari Museum Nasional ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pemindahan tersebut berdasarkan dari arsip bertanggal 30 Juni 1990 dari Bambang SR, yang merupakan salah seorang pegawai ANRI, yang memang secara langsung ketika itu ditugaskan oleh ANRI untuk mempersiapkan penyerahan arsip KBGKW dari

Hak Cipta © 2024, Purwanto Putra.

Museum Nasional ke ANRI. Sebelum itu, ternyata arsip-arsip Bataviaasch Genootschap ini pada awal mulanya didokumentasikan dalam bentuk laporan oleh seorang peneliti KITLV, Jaap Erkelens, yang sekitar tahun 1987 yang menemukan arsip-arsip KBGKW dalam keadaan terbengkalai di salah satu ruangan belakang kantor Museum Pusat di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Namun, laporan Erkelens ini tak banyak mendapat perhatian atau bahkan tak mendapat tanggapan serius dari pihak Museum Pusat, pada waktu itu pun pihak ANRI juga tidak dapat berbuat banyak untuk mengambil tindakan atas keberadaan dan situasi yang melingkupi arsip-arsip tersebut.

Tiga tahun kemudian, pada awal Juni 1990, setelah pemisahan Perpustakaan Nasional dari Salemba, Jaap Erkelens kembali menyusun laporan. Arsip Nasional kemudian menugaskan Bambang SR untuk memeriksa dan memotret dokumen-arsip KBGKW. Laporan tersebut mengungkapkan kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan adanya sarang rayap pada tumpukan arsip. Pihak Arsip Nasional kemudian meminta izin pihak Museum pusat untuk meminta arsip-arsip tersebut guna diselamatkan. Karena pihak Museum Pusat tidak mempunyai alokasi biaya untuk perawatan arsip-arsip tersebut maka pembiayaan sepenuhnya ditangani oleh Arsip Nasional. Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai tanggal 25 Juni 1990.

Dapat ditambahkan di sini, bahwa menurut keterangannya Jaap Erkelens sudah pernah mendekati pihak pimpinan Museum Pusat pada tahun 1980 dengan permintaan agar supaya arsip KBGKW dapat diselamatkan dan diinventarisasi oleh Arsip Nasional. Pada saat itu ia masih sempat menemukan juga berkas arsip *Afdeeling Adatrecht* (Bagian Hukum Adat). Beberapa tahun kemudian arsip ini tidak dapat ditemukan kembali lagi hingga saat keseluruhan berkas arsip KBGKW dapat dipindahkan ke ANRI.

Dengan memperhatikan penataan asli pada saat penyerahannya, berkas- berkas arsip KBGKW disusun inventarisnya sesuai dengan tata organisasi lembaga tersebut. Inventaris berkas-berkas ini dilakukan dengan menggunakan komputer dan sebuah program database ‘inmagic’ berdasarkan program pengendali komputer ‘MS-DOS’. Dengan demikian pekerjaan inventarisasi ini menyimpang dari kebiasaaan untuk menggunakan kartu pengendali yang berisi catatan tentang berkas-berkas yang kemudian akan disusun inventarisnya.

Keunggulan penggunaan perangkat komputer dan program basis data 'Inmagic' meliputi: 1. Kemampuan untuk melakukan berbagai koreksi pada tahap awal tanpa perlu mengulang entri data, 2. Penataan ulang seluruh inventaris dapat dilakukan oleh komputer setelah urutan berkas ditetapkan, 3. Penyusunan inventaris dalam format akhir dikelola oleh program laporan yang terintegrasi dalam sistem ini, memungkinkan desain tata inventaris sesuai standar arsip, 4. Selain dalam format cetak, inventaris KBGKW juga dapat diakses dan dilacak melalui komputer.

Skema penyusunan arsip KBGKW dalam format cetak terdiri dari kategori utama seperti Direksi, Afdeeling, Museum, Perpustakaan, dan Redaksi, yang masing-masing diikuti oleh sub-kategori pertama dan sub-kategori kedua untuk detail lebih lanjut. Ketersediaan atau ketidaktersediaan topik tertentu dan berkas terkait diatur dalam sub-kategori pertama dan kedua. Urutan berkas dalam setiap sub-kategori disusun secara kronologis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kepada institusi Diploma3 Perpustakaan Universitas Lampung dan mewujudkan selesai dan publikasi dari karyatulis ini. Terima kasih juga kepada para pihak yang telah membantu dalam menyediakan berbagai data dan informasi yang digunakan sebagai bahan analisis dan kutipan. Selanjutnya terima kasih juga pada panitia yang

Hak Cipta © 2024, Purwanto Putra.

memfasilitasi terselenggaranya dan terbitnya prosiding yang turut mengakomodir karya ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang dapat mengambil manfaat dari karya ini.

KESIMPULAN

Artikel ini mengulas tentang sejarah pendirian dan perkembangan awal Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (BGKW) serta kemunduran dan evolusinya hingga masa kini. Berdiri sejak tahun 1778 di Batavia (sekarang Jakarta), BGKW merupakan lembaga ilmu pengetahuan tertua di Indonesia dan Asia Tenggara, yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di wilayah tersebut.

Temuan dalam artikel ini menggarisbawahi pentingnya dukungan dari otoritas penguasa dalam pendirian dan keberlangsungan sebuah lembaga ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, BGKW berhasil menarik minat dan dukungan dari pejabat VOC yang membantu memperlancar pendiriannya. Implikasi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga ilmiah dan otoritas pemerintahan bisa sangat krusial dalam memperkuat dan memajukan misi keilmuan. Artikel ini memperluas kerangka teoritis tentang dinamika kelembagaan dalam konteks kolonial dengan menyoroti bagaimana BGKW berkembang di bawah pengaruh VOC. Ini mencerminkan pentingnya pemahaman kontekstual dan historis dalam studi lembaga ilmiah, terutama dalam konteks kolonial yang unik. Metodologis, kajian ini juga menunjukkan perlunya penelitian multidisiplin yang mencakup sejarah, politik, dan sosiologi untuk memahami perkembangan lembaga seperti BGKW.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, terdapat beberapa prospek untuk studi lebih lanjut: melakukan studi komparatif antara BGKW dengan lembaga ilmu pengetahuan serupa di wilayah lain pada periode yang sama untuk memahami faktor-faktor kunci keberhasilan dan tantangan; meneliti lebih dalam kebijakan-kebijakan VOC yang mempengaruhi pendirian dan pengembangan BGKW serta dampaknya terhadap komunitas ilmiah di Hindia Belanda; mengeksplorasi lebih lanjut pengaruh BGKW terhadap perkembangan sosial dan budaya masyarakat lokal di Batavia dan sekitarnya; serta melakukan studi tentang peran Freemason dalam mendukung dan memfasilitasi pendirian BGKW, serta pengaruhnya terhadap jaringan intelektual di Hindia Belanda.

Secara keseluruhan, BGKW memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, dari masa kolonial hingga modern. Keberhasilan dan keberlanjutannya sangat bergantung pada dukungan otoritas dan kolaborasi lintas sektor. Studi lebih lanjut tentang BGKW dan institusi serupa dapat memberikan wawasan berharga tentang dinamika kelembagaan dalam konteks kolonial dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan budaya.

REFERENSI

Arliana Wijayanti. (2018). Implementation of Knowledge Management (Km) on Bound Magazine Service Group at The National Library of Indonesia. *Proceeding International Confrerence of Library, Archives, And Information Sciences (ICOLAIS)*. https://icolais.ui.ac.id/wp-content/uploads/sites/193/2018/11/ICOLAIS2018-Proceeding-FINAL.pdf

Christie Stefanie. (2017, September 14). Jokowi Resmikan Gedung Perpustakaan Tertinggi di Dunia [News]. *https://www.cnnindonesia.com/*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170914114846-20-241669/jokowi-resmikan-

Hak Cipta © 2024, Purwanto Putra.

gedung-perpustakaan-tertinggi-di-dunia

Fabian Januarius Kuwado. (2017, September 14). Jokowi Resmikan Gedung Perpustakaan Nasional Tertinggi di Dunia [News]. *https://nasional.kompas.com/*. https://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/11221951/jokowi-resmikan-gedung-perpustakaan-nasional-tertinggi-di-dunia.

Fransisca Tjandrasih Adji. (2008). Konsep Religi Dan Nilai Historis Dalam Kakawin Brahmanda Purana. *Sintesis*, *6*(2).

Fuentes-Romero, J. J. (2003). The Concept of a National Library in Less Developed Countries, with Special Reference to Africa. *Alexandria: The Journal of National and International Library and Information Issues*, *15*(1), 23–35. https://doi.org/10.1177/095574900301500104

Gonda, J. (1932). Het Oud-Javaansche Brahmanda Purana: Prozatekst en Kakawin. *B.J.*, *5*.

Groot. (2006). *Van de Groote River naar het Koningsplein: Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapen 1778-1867*. Disertasi Leiden Universitiet.

Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024, (2020).

Inotji Hajatullah, Surja Mansjur dan Maksum. (2002). *160thAnniversary of Bibliotheca Bogoriensis*. Indonesian Center for Agricultural Library dan Technology Dissemination.

Massil, S. W. (1989). The History of the National Library of Indonesia: The Bibliographical Borobudur. *Libraries & Culture*, *24*(4), 475–488.

Ockeloen, G. (1939). *Catalogus van Boeken en Tijdschriften uitgegeven in Ned. Oost-Indië van 1870-1937 [with] Catalogus dari Boekoe-boekoe dan Madjallah-madjallah jang diterbikan di Hindia Belanda dari tahoen 1870-1937*. Kolff.

Ockeloen, G. (1950). *Catalogus dari buku-buku jang diterbitkan di Indonesia*. Kolff.

Schick, F. L. (1971). The International Standardization of Library Statistics. *UNESCO Bulletin for Libraries*, *25*(1), 2–11.

Spat, C. (1927). *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*. s'Gravenhage Nijhoff.

Sulistyo Basuki. (1977). Pertumbuhan dan perkembangan majalah pertanian di Indonesia antara tahun 1820-1942. *Bersama Jurusan Ilmu Perpustakaan FS UI*, *3*(2), hal.59-79.

Victor Honig and Frans Verdoron (Ed.). (1943). *Science and Scienctist in Netherlands Indies*. Board of the Netherlands Indies, Surinam and Curacao.

Hak Cipta © 2024, Purwanto Putra.

Customer Engagement PT. KAI melalui akun Instagram @KAI121_

Rahmad Hidayat
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka
Email : rahmadhidayatanwar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi customer engagement yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melalui akun Instagram resmi, @KAI121_. Instagram digunakan sebagai platform untuk membangun interaksi dengan pengguna, mempromosikan layanan, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang melibatkan observasi terhadap konten yang diposting serta analisis terhadap respons pengguna. Data dikumpulkan dari Maret hingga Mei 2023, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa konten visual dan teks yang membangkitkan emosi positif dan informatif memiliki dampak positif terhadap keterlibatan pengguna. Hasil ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif di platform media sosial..

***Kata kunci** : customer engagement, Instagram @KAI121_, strategi komunikasi, konten visual, emosi positif*

LATAR BELAKANG

Saat ini, Indonesia termasuk kedalam pengguna media sosial terbesar di dunia pada Tahun 2021 sebanyak 193 juta pengguna yang terdaftar (I News Tv, 2022). Pengguna internet merupakan faktor utama yang menentukan pertumbuhan media sosial di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 100 juta pengguna. Sadar atau tidaknya saat ini, media beserta isinya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, kehadiran media semakin banyak dan berkembang. Dulunya komunikasi di dalam media hanya berjalan dengan satu arah yang sering dimaknai hanya sebagai penikmat berita atau konten. Tapi seiring berjalannya waktu, media tidak hanya bisa dinikmati namun juga bisa di buat oleh siapa saja. Beberapa kegiatan yang paling umum termasuk mengakses media sosial seperti instagram (Alyusi, 2019).

Instagram adalah platform media sosial populer yang memungkinkan pengguna berbagi foto dan video, serta berinteraksi dengan pengguna lain melalui komentar, suka, dan pesan pribadi. Pengguna dapat membuat profil pribadi, mengunggah konten, menambahkan filter dan efek, mengikuti pengguna lain, dan menemukan konten menarik melalui fitur browsing. Instagram juga menawarkan fitur-fitur seperti Instagram Stories, IGTV, dan Instagram Live yang memungkinkan pengguna berbagi konten secara langsung atau dalam bentuk cerita pendek. Individu, bisnis, dan merek menggunakan platform ini untuk membangun kehadiran online, mempromosikan produk atau layanan, dan terlibat dengan audiens target KAI (Perkasa, How to Use Instagram Like a Beauty Brand, 2016).

Menurut (Roderick, Linda, Biljana, & Ana, 2011), *Customer engagement* adalah konsep yang mengacu pada interaksi dan keterlibatan antara perusahaan atau merek dengan pelanggannya. Ini mencakup semua upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat, relevan, dan berkelanjutan dengan pelanggan. Selain itu, menurut (Fung so,

Hak Cipta © 2024, Rahmad Hidayat.

2014) customer engagement merupakan input fisik, intelektual dan emosional yang akan membangun hubungan dengan perusahaan. Customer engagement melibatkan komunikasi dua arah di mana perusahaan mendengarkan pelanggan, merespons kebutuhan, dan mengundang partisipasi aktif. Tujuan dari customer engagement adalah untuk menciptakan loyalitas pelanggan, memperkuat hubungan, meningkatkan retensi pelanggan, dan mempromosikan pertumbuhan bisnis melalui dukungan, interaksi, dan pengalaman positif.

@KAI121_ adalah akun media sosial instagram resmi milik perusahaan kereta api yang mengoperasikan layanan kereta api di Indonesia. Melalui akun Instagram resmi KAI, @KAI121_ dapat berinteraksi dengan pengguna dan pelanggannya. KAI dapat berbagi informasi tentang jadwal perjalanan, penawaran spesial, dan update terkait layanan kereta api. Dalam hal ini, dapat memanfaatkan fitur-fitur Instagram seperti berbagi foto atau video perjalanan kereta api, memberikan saran perjalanan, atau memberikan informasi dan berita perusahaan.

Customer engagement Instagram untuk Kereta Api Indonesia (KAI) mencakup upaya perusahaan untuk terlibat dengan pelanggannya melalui platform media sosial Instagram @KAI121_. Selain itu, @KAI121_ juga dapat meningkatkan customer engagement menjawab pertanyaan dan pesan pengguna, memberikan dukungan pelanggan, serta menanggapi pertanyaan atau masalah yang mungkin muncul dari pengguna. Hal ini membantu membangun hubungan yang kuat dan positif antara KAI dan pelanggannya. @KAI121_ juga dapat menggunakan fiturfitur Instagram seperti Instagram Stories atau IGTV untuk menghasilkan konten yang lebih menarik, misalnya melalui story pengalaman perjalanan pelanggan, pengumuman layanan terbaru atau video singkat kereta api. Secara keseluruhan, customer engagement KAI dengan Instagram mencakup upaya untuk memberikan informasi, dukungan, dan pengalaman positif kepada pelanggan melalui platform media sosial Instagram.

Berdasarkan latar belakang maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konten customer engagement yang dibuat oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melalui akun instagram @KAI121_.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang dirancang untuk memberikan interpretasi mendalam terhadap data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan analisis konten di Instagram @KAI121_ (Akhmad, 2015). Metode ini dianggap ideal karena mampu memahami kompleksitas fenomena dalam konteks nyata, dengan fokus pada individu atau kelompok tertentu.

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki berbagai aspek yang muncul dari konten yang diposting di platform media sosial seperti Instagram (Sholikhah, 2016). Pendekatan ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga bertujuan untuk menginterpretasikan makna dari data tersebut. Dalam hal ini, data akan dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap konten yang diunggah oleh akun Instagram @KAI121_. Observasi ini mencatat jenis konten yang diposting (baik visual maupun tekstual), gaya komunikasi yang digunakan, serta respons pengguna dalam bentuk komentar dan interaksi lainnya.

Analisis konten akan menjadi fokus utama dalam memahami pola-pola dan tema-tema yang muncul dari konten yang dipublikasikan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi preferensi informasi pengguna dan gaya komunikasi yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan pelanggan di Instagram. Proses analisis ini melibatkan pengelompokan

Hak Cipta © 2024, Rahmad Hidayat.

data berdasarkan kategori-kategori yang relevan, seperti jenis konten yang paling diminati oleh pengguna atau jenis respons yang paling umum muncul dari komunitas pengikut @KAI121_.

Dalam hal pengumpulan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Para informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti menjadi pengikut aktif Instagram @KAI121_ yang secara konsisten berinteraksi dengan konten yang diposting. Pelanggan dipilih karena pengalamannya yang relevan dalam menggunakan platform ini dapat memberikan wawasan yang berharga terkait dengan preferensi terhadap konten dan cara berinteraksi dengan konten tersebut (Yuliani, 2018).

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2012). Ini mencakup identifikasi tema-tema dominan, pola-pola, dan aspek signifikan lainnya dalam konten yang diposting di Instagram @KAI121_. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan secara mendalam untuk memahami dampak konten visual dan tekstual terhadap keterlibatan pengguna. Interpretasi yang akurat diperoleh melalui refleksi yang cermat terhadap temuan data dan pengelompokan dalam konteks yang lebih luas dari strategi customer engagement yang digunakan oleh @KAI121_.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui strategi triangulasi, yang menggunakan beberapa teknik pengumpulan data (observasi dan analisis konten) untuk memvalidasi temuan penelitian. Selain itu, keabsahan data juga dijaga melalui refleksi peneliti terhadap posisi dan pengaruh pribadi dalam proses analisis, dengan tujuan meminimalkan bias yang mungkin timbul. Kredibilitas data dipertahankan dengan menggunakan kutipan langsung dari data yang dikumpulkan dan menyajikan konteks yang memadai untuk memastikan interpretasi yang akurat dari temuan penelitian.

Secara keseluruhan, pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konten visual dan tekstual di Instagram @KAI121_ mempengaruhi keterlibatan pengguna. Dengan memahami preferensi dan respons pengguna, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara merek dan pelanggan melalui media sosial.

Studi tersebut meneliti preferensi informasi emosional dan informatif dalam konten visual dan tekstual serta pengaruhnya terhadap keterlibatan konsumen dalam hal minat dan interpretasi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang penting bagi pengiklan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong pelanggan untuk berinteraksi dengan postingan di media sosial. Periode penelitian ini dimulai dari Maret hingga Mei 2023 dengan melihat Instagram @KAI121_ tempat perusahaan saya bekerja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akun @KAI121_ dalam bulan Mei ini sudah memposting konten sebanyak 19 konten dan berinteraksi dengan pengikutnya dengan membuat postingan menggunakan visual dan teks.

Postingan dapat menjangkau audiens yang besar dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan layanan iklan berbayar. Misalnya, @KAI121_ telah menarik 908 ribu pengikut dalam dua belas tahun terakhir (pada saat penulisan tahun 2023) dan memiliki 600 lebih postingan unik yang mengarah ke berbagai tingkat minat dan komentar per postingan pada akun tersebut (KAI121_, 2023)

Memahami apa yang mendorong pelanggan untuk berinteraksi di seluruh postingan penting bagi @KAI121_ karena strategi keterlibatan memiliki dampak positif dan menguntungkan. Studi

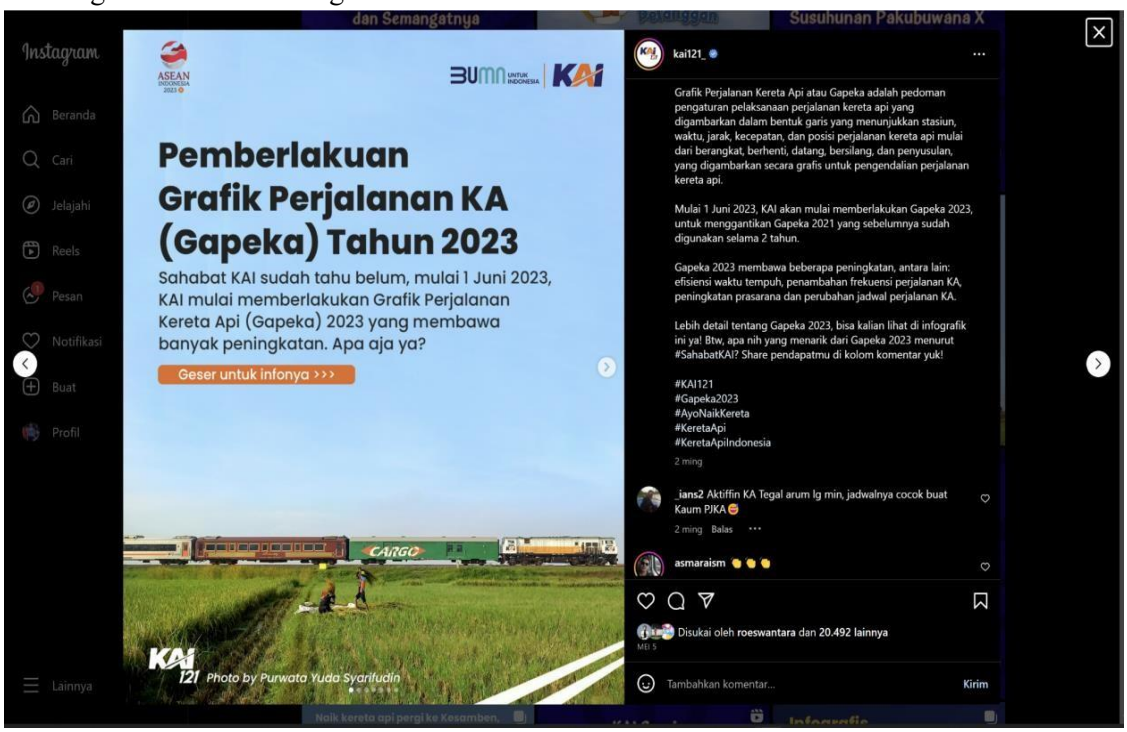
Hak Cipta © 2024, Rahmad Hidayat.

kami meneliti bagaimana preferensi informasi emosional dan informatif dalam konten visual dan tekstual memengaruhi keterlibatan konsumen dalam hal minat dan interpretasi.

Emotional Appeals

Dalam studi ilmiah ini, daya tarik emosional didefinisikan sebagai informasi visual dan tertulis yang disampaikan oleh akun Instagram @KAI121_ dapat membuat konsumen merasa positif tentang postingan merek atau produk, yang pada gilirannya memicu reaksi fisik yang positif dan meningkatkan daya ingat komunikasi. Emosi memiliki peran penting dalam memotivasi dan membujuk konsumen, sering kali mengarah pada pembentukan sikap dan perilaku selanjutnya (Anisa, 2023). Gambar berperan penting dalam proses ini karena memberikan pengalaman langsung tentang apa yang ada dalam situasi dan menciptakan representasi mental yang terkait dengan respons emosional yang kuat. Respons emosional dapat dijelaskan melalui dua dimensi utama: gairah dan valensi.

Kombinasi gairah dan valensi dapat membentuk berbagai jenis emosi yang dapat mempengaruhi reaksi dan respons konsumen. Memahami gairah dan valensi emosi yang ditimbulkan oleh konten visual dan teks dapat membantu dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan konsumen (Novianti, 2021). Berdasarkan gairah dan valensi, ada empat jenis gairah emosional: gairah positif tinggi, gairah negatif tinggi, gairah positif rendah, dan gairah negatif rendah (Wardiyanta, Septiyani, & Rejeki, 2020). Konsumen yang sensitif secara emosional dapat merespons secara berbeda jika tidak memiliki sistem pensinyalan berbasis tujuan, seperti yang mungkin terjadi saat menjelajahi jejaring sosial yang bersifat hedonis. Karena konsumen seringkali dihadapkan pada sejumlah besar postingan di jejaring sosial, konten visual yang menarik dapat menjadi cara untuk menonjolkan diri dan membangun keterlibatan dengan iklan.



Gambar 1. Pemberlakuan Grafik Perjalanan KA Tahun 2023
(KAI121_, Pemberlakuan Gapeka 2023, 2023)

Hak Cipta © 2024, Rahmad Hidayat.

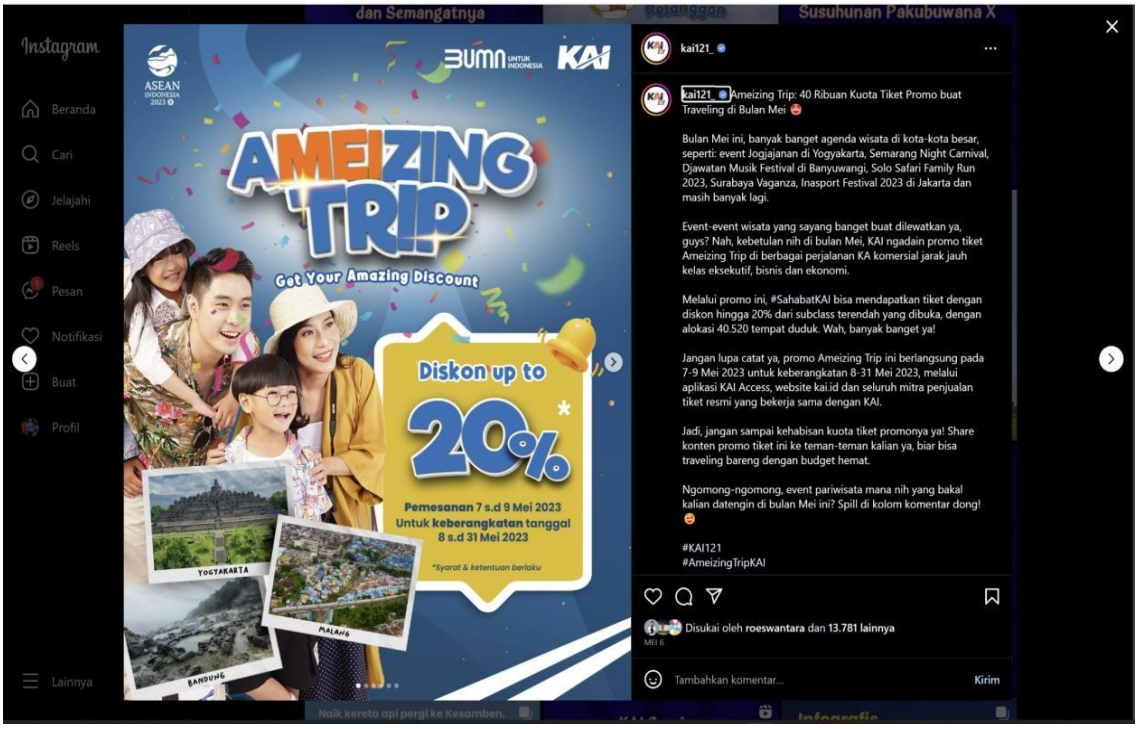
Kelucuan emosional juga diukur dalam penelitian ini dengan melihat subjek untuk merespons dengan dua cara berbeda, misalnya "stiker malu" atau "tepuk tangan". Studi ini memberikan pemahaman tentang bagaimana daya tarik emosional, termasuk minat dan valensi, dalam konten visual dan tekstual, mempengaruhi keterlibatan konsumen di media sosial. Terlihat pada postingan tersebut disukai oleh 20.493 orang. Dengan memahami cara-cara di mana emosi dapat dipicu melalui gambar, @KAI121_ dapat menciptakan konten yang lebih menarik dan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara positif.

Informative Appeals

Informative appeals merupakan upaya untuk mempengaruhi keyakinan konsumen menggunakan argumen yang disajikan dalam konteks pesan (Maulana & Gumelar, 2013). *informative appeals* juga diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menunjukkan fitur produk dan manfaat yang akan didapat pelanggan dari penggunaan produk. Ini cara yang bagus untuk meyakinkan konsumen bahwa produk adalah sesuatu yang benar-benar inginkan dan dapat gunakan. (Ratnasari, Sumartias, & Romli, 2020). Panggilan ini seringkali didasarkan pada fakta dan asumsi, menggunakan simbol dan teks penjelasan untuk memberikan informasi yang relevan dan mengurangi ketidakpastian. Namun, Informative Appeals juga bisa menyebabkan konfirmasi yang tidak diminta atau memberikan informasi baru yang tidak diinginkan pelanggan. Iklan visual berfokus pada branding, konten produk, dan fitur, serta postingan. Contoh produk yang ditampilkan dalam gambar postingan Instagram @KAI121_ dapat memberikan informasi yang penting untuk kegiatan promosi atau kampanye tanpa harus menunjukkan produk itu sendiri. Isyarat visual dalam media dapat meningkatkan memori dengan menarik perhatian dan memunculkan asosiasi positif atau negatif dengan memori.

Informative Appeals dalam bentuk SMS dapat dikategorikan ke dalam delapan kelompok, yaitu produk, penawaran, harga, perbandingan harga, fitur, ketersediaan produk, dan status produk. Misalnya, topik yang dibahas di Instagram @KAI121_ dapat disertai dengan teks, termasuk penggunaan hashtag #AmeizingTripKAI. Penggunaan Informative Appeals ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada konsumen dan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku agar membeli tiket promo #AmeizingTripKAI. Dalam kasus media sosial seperti Instagram, penggunaan visual dan teks yang tepat dapat meningkatkan pesan yang dikirimkan kepada pengguna dan meningkatkan pemasaran.

Hak Cipta © 2024, Rahmad Hidayat.



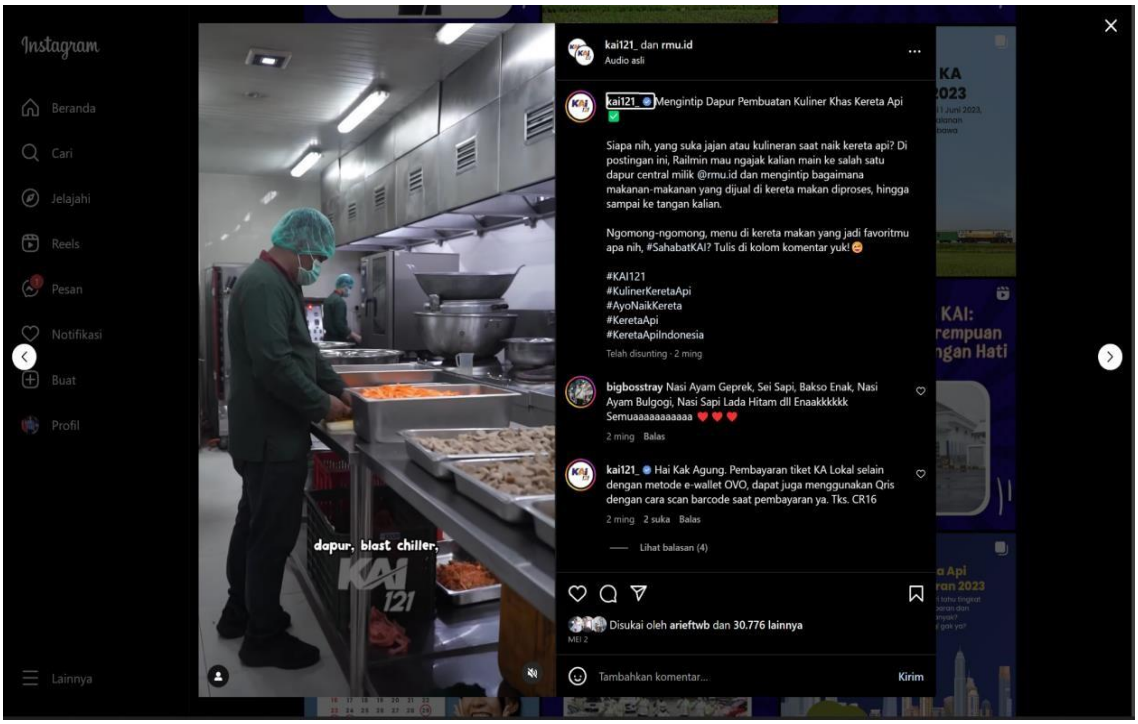
Gambar 2. Amezing Trip

(KAI121_, Ameizing Trip: 40 Ribuan Kuota Tiket Promo buat Traveling di Bulan Mei, 2023)

Findings

Tanggapan konsumen terhadap media sosial Instagram @KAI121_bergantung pada muatan emosional yang terkandung dalam citra visual dan isi pesannya. Secara khusus, kami menarik empat kesimpulan dari hasil kami. Pertama, daya tarik emosional lebih memengaruhi keterlibatan pelanggan daripada daya tarik deskriptif untuk konten visual dan tekstual. Kedua, tingkat kekuatan dan valensi gairah harus diperhitungkan. Pertimbangkan untuk menggunakan rangsangan kesenangan dan negatif yang tinggi untuk meningkatkan minat dan ekspresi. Hasilnya menunjukkan bahwa fitur wajah yang efektif memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan faktor visual lainnya. Ketiga, selain pelaporan merek, kami menemukan efek negatif pelaporan merek terhadap keterlibatan pelanggan. Meskipun konsumen mengikuti merek untuk bersenang-senang, media sosial, terutama seputar produk, dapat menunjukkan upaya tak terduga yang akan dianggap sebagai penipuan. . Keempat, selain dampak negatif keindahan, diyakini bahwa simbol visual dan tekstual berkontribusi pada komunikasi dan minat yang lebih baik. Konten visual dan tertulis dapat menjadi sumber daya bagi pembeli potensial, yang dapat menghasilkan hubungan pelanggan yang lebih baik. didirikan pada pengalaman masa lalu merek dalam pikiran.

Hak Cipta © 2024, Rahmad Hidayat.



Gambar 3. Masak di Atas KA
(KAI121_, Mengintip Dapur Pembuatan Kuliner Khas Kereta Ap, 2023)

Pada postingan video terkait mengintip rahasia dapur proses pembuatan kuliner khas kereta api ada sebanyak 30.776 ribu yang menyaksikan, sehingga dapat di katakan cukup lumayan banyak peminat konten @KAI121_berbentuk video.

Managerial Insights

Implikasi manajerial dari pekerjaan ini untuk @KAI121_ pemahaman bagaimana daya tarik visual, emosi dan informasi dapat mempengaruhi hubungan pelanggan. Hasil kami memberikan wawasan tentang panggilan yang dapat memengaruhi minat dan interpretasi. @KAI121_ dalam iklan media sosialnya, pengguna akun harus fokus pada kebahagiaan dan nilai emosional negatif atau positif dari pemirsa yang terlibat dengan orang lain, tiket, diskon dan perjalanan kereta api. konten visual. Emosi positif dan tingkat kebahagiaan yang tinggi seperti kebahagiaan, kejutan, kekaguman, dan perhatian dapat meningkatkan hubungan pelanggan dan minat terhadap detail. Ajakan bertindak negatif dan kehadiran tatap muka menghasilkan retensi pelanggan yang lebih baik. Memahami cara menciptakan kegembiraan dan ajakan bertindak yang menarik adalah kunci keberhasilan pemasaran Instagram.

Media sosial tidak selalu menjadi saluran komunikasi utama yang efektif, terutama dalam hal promosi produk atau layanan. Setiap platform memiliki kelebihan dan kelemahan masingmasing, dan penting bagi PT.KAI untuk mengambil pendekatan yang tepat dalam suatu upaya.

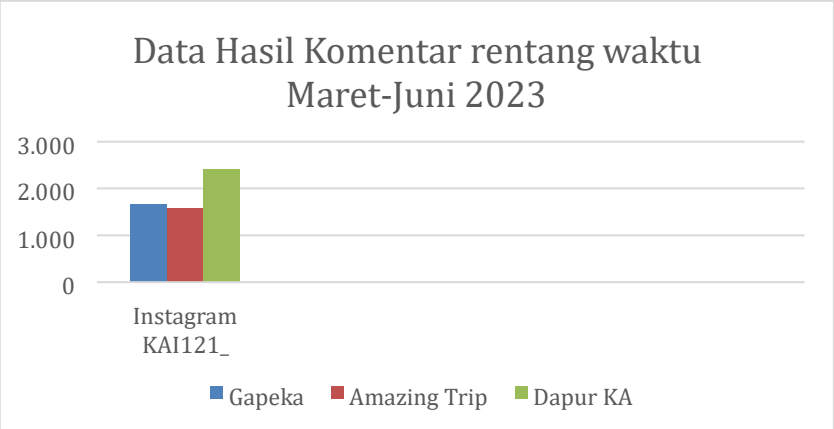
Menghubungkan dengan audiens melalui pesan dan teks tertulis adalah strategi baik yang harus dilakukan oleh PT.KAI. Konten yang baik dan informatif dapat membantu menarik perhatian dan membangun kepercayaan dengan pelanggan potensial. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan platform lain yang mungkin lebih cocok untuk tujuan komunikasi.

Hak Cipta © 2024, Rahmad Hidayat.

Misalnya, platform seperti Instagram khusus real estat dapat memberikan ruang yang lebih baik untuk menyampaikan informasi yang relevan dan mendalam tentang hal yang ditawarkan.

Instagram dan platform media sosial lainnya masih dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas. Posting gambar dan konten yang menarik dapat menarik minat calon pembeli atau investor, tetapi tetap perlu didukung dengan strategi komunikasi yang lebih efektif seperti pertemuan tatap muka atau panggilan telepon.

Penting bagi PT.KAI untuk secara aktif mencari peluang baru dan menerapkan metode terbaik yang sesuai dengan tujuan dan penggemar. Penggabungan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, panggilan pesan, pertemuan langsung, dan lainnya, dapat membantu mencapai hasil yang diinginkan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Hasil komentar dari 3 konten yang dipilih



Dari diagram *column* diatas terlihat sekali banyak masyarakat yang ikut terlibat dari posting-postingan yang di unggah oleh akun resmi KAI yaitu @KAI121_ tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pemahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akun Instagram @KAI121_ berhasil memanfaatkan konten visual dan teks untuk mencapai keterlibatan yang tinggi dengan audiensnya, baik melalui daya tarik emosional maupun informatif. Pada bulan Mei, @KAI121_ telah berhasil memposting 19 konten yang mampu menjangkau audiens secara efektif, tanpa mengeluarkan biaya besar seperti dalam layanan iklan berbayar. Dengan jumlah pengikut mencapai 908 ribu dalam dua belas tahun terakhir, @KAI121_ menunjukkan dampak positif dari strategi keterlibatan dalam membangun dan mempertahankan komunitas pengikut yang besar.

Studi ini menyoroti pentingnya memahami preferensi audiens terhadap konten emosional dan informatif. Daya tarik emosional, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan gambar dan teks yang memicu reaksi positif dan meningkatkan daya ingat, menjadi kunci dalam memotivasi perilaku konsumen. Emosi positif seperti kebahagiaan dan kekaguman dapat meningkatkan keterlibatan, sementara informasi yang informatif tentang produk atau layanan dapat mempengaruhi keyakinan konsumen.

Selain itu, studi ini menemukan bahwa konten visual yang menarik dapat berperan penting dalam membedakan diri di tengah jumlah besar postingan di media sosial. Dengan memanfaatkan

Hak Cipta © 2024, Rahmad Hidayat.

rangsangan emosional yang sesuai, seperti gairah positif tinggi, @KAI121_ dapat lebih efektif dalam menarik perhatian dan mempertahankan minat pengikutnya.

Dari segi manajerial, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi @KAI121_ untuk meningkatkan strategi komunikasi di media sosial. Fokus pada penggunaan konten yang membangkitkan emosi positif dan memberikan informasi yang relevan kepada konsumen dapat membantu memperkuat hubungan pelanggan dan mempengaruhi sikap serta perilaku secara positif. Selain itu, penting bagi PT.KAI untuk terus mengeksplorasi dan menerapkan metode komunikasi yang sesuai dengan tujuan, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari setiap platform media sosial yang gunakan.

Dengan demikian, penggunaan strategi keterlibatan yang efektif dan pemahaman yang mendalam terhadap preferensi konsumen terbukti menjadi kunci keberhasilan @KAI121_ dalam memanfaatkan Instagram sebagai alat pemasaran yang efektif dan berdaya saing tinggi di era digital saat ini.

Saran

Adapun saran yang perlu diberikan kepada pemilik akun @KAI121_ adalah:

1. Akun Instagram @KAI121_ harus responsif terhadap masalah atau keluhan yang disampaikan pelanggan melalui komentar atau pesan pribadi.
2. Akun Instagram @KAI121_ harus memanfaatkan fitur-fitur interaktif seperti polling, tanya jawab, atau kuis untuk melibatkan pelanggan dalam interaksi dan memperoleh umpan balik.
3. Akun Instagram @KAI121_ dapat bekerja sama dengan influencer atau pengguna yang memiliki minat serupa terkait kereta api untuk menghasilkan konten yang menarik dan meningkatkan keterlibatan pelanggan.
4. Akun Instagram @KAI121_ harus memanfaatkan platform tersebut untuk memberikan informasi terkini, seperti jadwal perjalanan, promo, atau perubahan layanan, sehingga pelanggan merasa terinformasi dengan baik.
5. Akun Instagram @KAI121_ dapat membagikan cerita atau pengalaman pengguna yang positif melalui fitur-fitur seperti testimoni atau repost konten pelanggan. Hal ini dapat memperkuat kedekatan dengan pelanggan dan membangun kepercayaan.
6. Akun Instagram @KAI121_ harus mengikuti tren terkini dalam penggunaan media sosial dan terus mengembangkan strategi komunikasi yang relevan dengan target audiensnya.

REFERENSI

Akhmad, K. (2015). Pemanfaatan media sosial bagi pengembangan pemasaran UMKM (Studi deskriptif kualitatif pada distro di Kota Surakarta). *9(1)*, 43-43.

Alyusi, S. (2019). *Media sosial: Interaksi, identitas dan modal sosial.* Prenada Media.

Anisa, N. (2023). *Perilaku Konsumen: Strategi dan Teori.* IOCS Publisher.

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R., & Afgani, M. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, 3(01)*, 1-9.

Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Memilih. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fung so, K. K. (2014). The Role of Customer Engagement in Building Consumen. *Journal of Travel Research, 1*, 64-78.

I News Tv. (2022, August 8). *Inilah 4 Negara dengan Pengguna Media Sosial Terbesar di Dunia, Indonesia Urutan Berapa?* Retrieved May 20, 2023, from iNews.id:

Hak Cipta © 2024, Rahmad Hidayat.

https://karanganyar.inews.id/read/141095/inilah-4-negara-dengan-pengguna-mediasosial-terbesar-di-dunia-indonesia-urutan-berapa

John W, C. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset* (3 ed.). Pustaka Pelajar. Retrieved from https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=939481

KAI121_. (2023, Mei 20). *Ameizing Trip: 40 Ribuan Kuota Tiket Promo buat Traveling di Bulan Mei*. Retrieved from https://www.instagram.com/p/Cr4epXXgz_D/

KAI121_. (2023, Mei 20). *Instagram KAI121_*. Retrieved from https://www.instagram.com/kai121_/

KAI121_. (2023, Mei 20). *Mengintip Dapur Pembuatan Kuliner Khas Kereta Ap*. Retrieved from https://www.instagram.com/p/CruXl18peIN/

KAI121_. (2023, Mei 20). *Pemberlakuan Gapeka 2023*. Retrieved from https://www.instagram.com/p/Cr2kVkXB_TG/

Lantowa, J., Marahayu, N., & Khairussibyan, M. (n.d.). Semiotika: Teori, Metode, dan Penerapannya dalam Penelitian Sastra.

Maulana, H., & Gumelar, G. (2013). Psikologi komunikasi dan persuasi. Jakarta. 113.

Novianti, E. (2021). *Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Perkasa, F. S. (2016, April 11). *How to Use Instagram Like a Beauty Brand.* Retrieved from ″ - Wiktionary: www.frans.co.id

Perkasa, F. S. (2023, Februari). *How to Use Instagram Like a Beauty Brand.* Retrieved May 20, 2023, from ″ - Wiktionary: www.frans.co.id

Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2020). Penggunaan Message Appeals dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 18(3)*, 352-370.

Roderick, B. J., Linda, H. D., Biljana, J., & Ana, I. (2011). Customer Engagement: Conceptual Domain, Fundamental Propositions, and Implications for Research. *https://doi.org/10.1177/1094670511411703*.

Sholikhah, A. (2016). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikas, 10(2)*, 342-362.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alpabheta.

Wardiyanta, W., Septiyani, R., & Rejeki, M. (2020). Studi Kasus Kualitatif Keberhasilan Restoran Non Waralaba di Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian, 1(7)*, 1475-1486.

Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *2(2)*, 83-91.

Zhang, M., Guo, L., Hu, M., & Liu, W. (2017). Influence of customer engagement with company social networks on stickiness: Mediating effect of customer value creation. *International Journal of Information Management, 37*(3), 229-240. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.04.010

Hak Cipta © 2024, Rahmad Hidayat.

Pelayanan Publik Berbasis Inovasi (*E-Government*) melalui Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SIPITER) dalam Menghadapi Revolusi Society 5.0 di Kabupaten Cirebon

Rakhmat Hardiyansyah
Politeknik Bina Persada Cirebon
e-mail: rakhmat.hardi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna mengeksplorasi bagaimanakah pelayanan publik berwujud inovasi E-Government, khususnya lewat Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SIPITER), bisa menyambut tantangan revolusi Society 5.0 di Kabupaten Cirebon. Metode yang dipakai yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi ini dilangsungkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan seluruh informan merupakan pegawai dari dinas tersebut. Studi ini menyarankan beberapa langkah teruntuk pemerintah pada penerapan inovasi pelayanan publik berwujud e-government lewat SIPITER di Kabupaten Cirebon, ditengah lain: memakai SDM aparatur pada pengelolaan *E-Government*, memberikan tugas yang jelas kepada pegawai guna pengelolaan dana *E-Government*, juga memakai kekuatan Kabupaten Cirebon yang menyimpan SDM kompeten sesuai bidangnya guna meningkatkan pengetahuan mengenai *Smart Governance*. Selain itu, terdapat 82 aplikasi layanan publik dan 56 layanan pemerintahan yang mendukung inisiatif *Smart City* di Kabupaten Cirebon, dengan adanya *Command Center* selaku pusat kendali teknologi informasi yang juga berpotensi menjadi destinasi wisata edukasi.

***Kata kunci**:Pelayanan Publik, Implementasi, E-Government, Society 5.0*

PENDAHULUAN

Di era digital kini, rancangan society 5.0 sudah muncul selaku kelanjutan atas revolusi industri 4.0. Pada rancangan industri 4.0, individu dipandang selaku sumber inovasi yang tidak terpisahkan atas teknologi. Kehadiran rancangan ini semakin mempermudah penyelesaian masalah yang dihadapi individu di lingkungan perkotaan, satu atas banyaknya lewat penerapan *smart city* (Putra Ardinata et al., 2022). Sementara itu, revolusi industri 5.0 ataupun society 5.0 melibatkan otomatisasi seluruh proses pada beragam aktivitas. Kemajuan teknologi internet tidak hanya memperluas konektivitas ditengah individu di seluruh dunia, tapi juga menjadikan rancangan society 5.0 selaku dasar guna proses transaksi online ditengah pemerintah juga masyarakat (Heri et al., 2021).

Oleh sebab itu, pemerintah wajib cerdas pada menyambut era globalisasi juga revolusi 5.0. Secara tidak langsung, hal ini membuktikan bahwasanya revolusi digital juga tantangan globalisasi yakni sesuatu yang tidak bisa dihindari, juga memerlukan prinsip transparansi juga akuntabilitas (Sahrir, 2022). Pada perwujudan pendekatan, terdapat peluang juga tantangan pada memakai data atas beragam aspek yang terintegrasi, sehingga memungkinkan penduduk guna mengakses layanan dengan lebih baik. (Budi & Priska Lestari, 2022).

E-government memakai teknologi guna memperbaiki akses distribusi layanan atas pemerintah pusat juga daerah, membagikan kegunaan teruntuk warga negara, mitra bisnis, juga pegawai. Pemerintah daerah memakai aplikasi digital (*E-Government*) guna menyesuaikan

Hak Cipta © 2024, Rakhmat Hardiyansyah.

susunan organisasi juga proses yang mendasari distribusi layanan publik (Pittaway & Montazemi, 2020).

Pelayanan publik mencakup semua aktivitas yang dilangsungkan pemerintah guna sejumlah orang pada sebuah kelompok ataupun komunitas, dengan tujuan membagikan kegunaan juga kepuasan, meskipun hasilnya tidak berupa produk fisik (Sinambela, 2010). Beberapa faktor krusial pada keberhasilan implementasi e-government meliputi ketersediaan SDM, kelembagaan, infrastruktur, juga regulasi yang menyeluruh. Satu atas banyak peraturan atas Pemerintah Pusat yang mengelola hal ini yakni (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga sudah mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengelola perihal e-government, yakni (Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 perihal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon). Seluruh pelayanan publik juga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cirebon sudah berwujud internet dengan memakai e-government. E-Government Kabupaten Cirebon bisa diakses lewat situs web https://cirebonkab.go.id/, peluncuran aplikasi mobile Cirebon katon pada penataan layanan publik seperti pengurusan izin usaha, pembayaran pajak juga informasi pariwisata, juga aplikasi Sistem Kependudukan Informasi juga Layanan (SIPENDIL), Call Center 112 guna keluhan juga layanan informasi teruntuk masyarakat, juga pengingkatan Sistem Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) guna menampung aspirasi juga keluhan masyarakat (Priyono et al., 2022).

Satu atas banyak inovasi yang sudah diterapkan yakni perubahan manajemen tata kelola pelayanan teruntuk masyarakat yang berdasar teknologi. Pergeseran pada pelayanan publik juga mencerminkan awal penerapan era Big Data ataupun era Teknologi Data (Intan Purnama Sari et al., 2022). Upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon menerapkan rancangan *e-government* pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon diantaranya:

1. 73 Perangkat daerah yang terakses internet di Kabupaten Cirebon.
2. 33 Perangkat daerah yang mendukung layanan publik dan administrasi umum.
3. 551 Menara BTS.
4. 82 Aplikasi Layanan Publik.
5. 56 Aplikasi Layanan Pemerintahan.

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon 2023

Hasil studi membuktikan bahwasanya layanan pemerintah yang memakai *e-government* bisa membantu mendekatkan masyarakat memakai perangkat teknologi tanpa membatasi jarak juga waktu. Jikalau informasi *e-government* lengkap juga mudah diakses, itu akan meningkatkan tata kelola pemerintahan juga meningkatkan akuntabilitas di lembaga pemerintah. *E-government* bercita-cita guna meningkatkan produktivitas juga efisiensi birokrasi. Kreativitas juga terobosan juga diharapkan meningkat, yang akan menguntungkan masyarakat juga penyedia layanan publik. Jikalau e-government dipakai pada praktik penyelenggaraan pelayanan publik, itu bisa meningkatkan kenyamanan juga efisiensi; guna mencapai hal ini, jaringan kerja tiap lembaga wajib dioptimalkan. Jikalau layanan konvensional tidak beralih secara terpadu ke layanan berdasar elektronik, ini akan berdampak negatif pada Masyarakat (Rahmadany, 2021).

Tapi, masih ada beberapa masalah yang dihadapi. Penataan *E-Government* pada era society 5.0 masih menyambut kelemahan pada hal pengawasan. Selain itu, fasilitas yang ada belum memadai guna implementasi *E-Government*. Pola relasi antarunit kerja juga norma-norma yang berlaku juga wajib ditingkatkan pada pelaksanaannya. Meskipun pendekatan *E-Government* guna

Hak Cipta © 2024, Rakhmat Hardiyansyah.

merealisasikan *Smart Governance* sudah diterapkan, pencapaian keberhasilan masih belum mencakup semua aspeknya (B. Nugraha, 2020). Selain itu, implementasi pendekatan ini belum sepenuhnya efektif sebab banyak warga yang belum memahami pendekatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan SDM, anggaran, transparansi, juga konsistensi tiap organisasi, juga kurangnya pemahaman juga respons aparat, keseriusan pada perwujudan pendekatan, juga kekurangan pada sumber daya ekonomi juga kekuasaan (Ramadhani S, 2023).

E-government yakni proses sistem pemerintahan yang memakai teknologi informasi juga komunikasi (TIK) guna mempermudah komunikasi juga transaksi ditengah warga, organisasi bisnis, lembaga pemerintah, juga stafnya. Tujuannya yakni guna mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, juga akuntabilitas pemerintah atas warganya. Rancangan ini mencakup relasi ditengah Pemerintah ke Pemerintah (G2G), Pemerintah ke Bisnis (G2B), juga Pemerintah ke Warga (G2C) (J. T. Nugraha, 2022).

Kabupaten Cirebon, seperti daerah lain di Indonesia, tengah bertransformasi menuju era Society 5.0, di mana teknologi informasi juga komunikasi menjadi elemen kunci pada beragam aspek kehidupan. Hal ini membawa peluang besar teruntuk inovasi pelayanan publik berdasar e-government guna meningkatkan kualitas juga efisiensi layanan teruntuk masyarakat. Tapi, di sisi lain, terdapat pula beragam fenomena permasalahan yang dihadapi pada implementasi e-government di Kabupaten Cirebon, di antaranya:

Ketersediaan jaringan internet yang belum merata, khususnya di daerah pedesaan, menjadi kendala teruntuk masyarakat pada mengakses layanan e-government. Selain itu, kapasitas SDM (SDM) yang belum optimal, kurangnya koordinasi juga sinergi tiap pemangku kepentingan, keterbatasan literasi digital juga kemampuan masyarakat pada memakai teknologi informasi juga komunikasi, juga budaya birokrasi yang masih kaku juga tradisional menyulitkan adaptasi atas pola kerja berdasar digital.

Perilaku birokrasi memainkan peran penting pada pengingkatan Kabupaten Cirebon menuju status Smart City. Selama perwujudan program Society 5.0, tujuan ini yakni menciptakan kota yang layak huni, efisien guna masyarakat, dengan pelayanan publik yang baik, perekonomian yang kuat, juga infrastruktur yang teratur juga rapi. Pemerintah Kabupaten Cirebon berusaha merealisasikan hal tersebut dengan membangun "Orang Pintar" selaku pendukung Komunitas 5.0. Tapi, menciptakan "Orang Pintar" tidaklah mudah. Bupati Cirebon wajib terlebih dahulu membangun Pemerintah Pintar, sebab pemerintah berperan selaku pelaksana utama Komunitas 5.0.

Berlandaskan fenomena yang sudah dijelaskan, penting guna melangsungkan studi guna mengevaluasi sejauh mana kesiapan pelayanan publik berdasar inovasi (E-Government) lewat Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon. Peneliti memilih Kabupaten Cirebon ataupun Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon selaku lokasi studi sebab Kabupaten Cirebon yakni satu atas banyak kabupaten yang sudah menerapkan rancangan *Smart City*.

METODE

Studi ini bertujuan guna mengeksplorasi inovasi pada Pelayanan Publik *Berbasis E-Government* lewat Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon. Metode yang dipakai yakni deskriptif kualitatif, memakai teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara, juga dokumentasi.

Hak Cipta © 2024, Rakhmat Hardiyansyah.

Studi kualitatif, yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, mengkaji objek pada kondisi alaminya (berbeda dengan pendekatan eksperimen). Studi ini memakai metode kualitatif selaku alat utama, memakai teknik pengumpulan data yang dilangsungkan secara triangulasi (menggabungkan beragam metode), juga analisis data dilangsungkan secara induktif ataupun kualitatif. Hasil atas studi kualitatif menekankan pada pentingnya generalisasi (Sugiyono, 2018)

Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, juga penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan proses penyaringan juga pemfokusan pada data "mentah." Penyajian data merupakan subproses atas "penyajian" yang mencakup pengorganisasian informasi. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti mulai melangsungkan interpretasi, yakni membagikan makna pada data ataupun informasi yang sudah disajikan (Nugroho, 2020).

Studi ini dilangsungkan di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon, dengan keseluruhan informan berasal atas pegawai Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon. Informan yang terlibat pada studi ini yakni:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon (1 Orang).
2. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan *E-Government* (1 Orang).
3. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian (1 Orang).
4. Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Cirebon (3 Orang).
5. Camat Mundu dan Camat Palimanan (2 Orang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi membuktikan bahwasanya ada tiga pendekatan yang bisa diterapkan guna mempersiapkan ASN pada memakai teknologi guna mendukung pengingkatan berkelanjutan di Era Society 5.0. Pendekatan tersebut meliputi: 1) Pemerintah wajib menyusun kebutuhan juga rencana pengingkatan kecakapan ASN pada jangka waktu satu tahun, yang mencakup inventarisasi kecakapan teknis lewat dialog ditengah pimpinan juga staf. 2) Melangsungkan pengingkatan kecakapan teknis pegawai lewat program pelatihan. 3) Melangsungkan evaluasi guna menilai kesesuaian perencanaan juga perwujudan pengingkatan kecakapan ASN, juga mengukur kegunaan program atas kenaikan kecakapan, kapasitas pejabat fungsional, juga kapasitas instansi (Kusuma, 2022).

Hasil studi membuktikan bahwasanya Pendekatan juga Strategi Nasional Pengingkatan E-Government sudah mulai diimplementasikan di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon sudah mengembangkan e-government dengan menyusun website selaku media utama guna pelayanan informasi publik. Tapi, wajib dilangsungkan studi lebih lanjut mengenai aspek-aspek lain yang mendukung Society 5.0 agar Kabupaten Cirebon bisa dikategorikan selaku kabupaten dengan rancangan Society 5.0 (Chairunisa et al., 2024).

Guna mengevaluasi efektivitas penerapan pendekatan e-government lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi masyarakat 5.0 di Kabupaten Cirebon, peneliti melangsungkan wawancara, observasi, juga dokumentasi. Studi ini dilangsungkan di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon. Teori yang diuraikan oleh G. Shabbir Cheema juga Dennis A. Rondinelli pada Subarso menyatakan bahwasanya implementasi pendekatan dipengaruhi oleh empat faktor: kondisi lingkungan, relasi organisasi, sumber daya, juga agen penerima program. Keempat faktor ini saling terkait satu sama lain (Subarsono, 2012).

Kondisi Lingkungan

Keberhasilan sebuah pendekatan didukung oleh kondisi lingkungan yang ada di pada

Hak Cipta © 2024, Rakhmat Hardiyansyah.

instansi ataupun organisasi. Kondisi ini mencakup ketersediaan sarana juga prasarana yang mendukung pelayanan. Di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon, keadaan lingkungan sudah amat baik. Hal ini terbukti atas pendapat informan yang menyatakan bahwasanya terdapat operator juga fasilitas jaringan internet di setiap unit kerja perangkat daerah, yang berperan pada penataan *e*-government lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER).

Pada kenaikan pelayanan lewat Sistem Informasi pelayanan Terpadu (SIPITER), Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan juga Catatan Sipil juga Dinas Pendapatan Daerah sudah berjalan juga bisa diikuti oleh para para aparatur satuan kapasitas perangkat daerah juga para satuan kapasitas perangkat daerah, tapi bilamana ada kekurangan wajib ditingkatkan lagi pada pemakaian pelayanan lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) yakni dengan mengadakan pelatihan juga penambahan menu layanan publik pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon.

Relasi tiap Organisasi

Atas hasil wawancara dengan informan, bisa disimpulkan bahwasanya dimensi relasi tiap organisasi pada implementasi pendekatan e-government dianggap selaku pendekatan juga strategi yang baik guna penyelenggaraan pemerintahan, juga guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cepat, efektif, juga efisien. Pendekatan juga strategi ini diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan guna memperkuat penerapan e-government di Indonesia, juga diatur pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon juga sudah melangsungkan Komitmen bersama pada merealisasikan Gerakan *Smart City* selaku upaya penampung komunikasi dengan satuan kapasitas perangkat daerah maka dibentuk pokja pengingkatan *smart city* pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon sudah berjalan sesuai ketentuan.

Penguatan Smart City yang dilangsungkan oleh Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon mencakup pengingkatan jaringan yang menghubungkan seluruh unit kerja perangkat daerah, kecamatan, juga kelurahan, juga penyediaan gedung data center yang berfungsi selaku tempat penyimpanan server aplikasi yang sudah dibangun oleh pemerintah. Ini diharapkan bisa mempermudah proses integrasi seluruh aplikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Meskipun sudah ada pola kerja sama terkait penataan *e-government* pada menyambut revolusi society 5.0, perwujudan masih membuktikan kelemahan pada hal pengawasan. Guna mengatasi masalah ini, Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon meningkatkan komunikasi juga kerja sama guna mengelola *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) dengan lebih baik.

Sumber Daya

Berlandaskan hasil wawancara dengan informan, bisa disimpulkan bahwasanya pada dimensi sumber daya guna penataan *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi society 5.0 di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon sudah memahami penataan dana dekonsentrasi. Meskipun sarana juga prasarana sudah ada, dukungannya belum maksimal guna penataan dana tersebut. Selain itu, meskipun sanksi yang berlaku sudah diterapkan, masih diperlukan kenaikan kesadaran aparatur atas tanggung jawab kerja mereka. Dengan demikian, diharapkan bahwasanya faktor SDM juga non-individu bisa meningkatkan pelayanan publik lewat SIPITER secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan juga mendorong tercapainya

Hak Cipta © 2024, Rakhmat Hardiyansyah.

smart city yang berkelanjutan.

Karakteristik juga Kemampuan Agen Pelaksana

Bisa disimpulkan bahwasanya karakteristik juga kemampuan agen pelaksana pada implementasi pendekatan, khususnya pada penataan *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) di Kabupaten Cirebon, sudah cukup baik juga memadai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang wajib diperbaiki guna meningkatkan perwujudan pendekatan anggaran *e-government*. Pola relasi tiap unit kerja juga pengawasan wajib diperbaiki agar tanggung jawab juga tugas bisa dilangsungkan dengan lebih baik. Dengan demikian, penataan e-government lewat SIPITER pada menyambut revolusi society 5.0 bisa berjalan secara efektif juga efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga menghindari masalah seperti korupsi.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil studi yang sudah dilangsungkan, peneliti menyimpulkan bahwasanya implementasi pendekatan *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi society 5.0 di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut bisa dilihat atas temuan yang didapat peneliti lewat observasi juga wawancara, ditengah lain:

Pertama, kondisi lingkungan di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon sudah memadai, seperti yang diungkapkan oleh informan mengenai kondisi sosial juga budaya juga penerima program pada penataan e-government lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) pada menyambut revolusi society 5.0 di Kabupaten Cirebon.

Kedua, meskipun penataan e-government pada menyambut revolusi society 5.0 sudah ada, masih ada kelemahan pada pengawasan selama pelaksanaannya. Pola penataan e-government lewat SIPITER belum merata, terdapat perbedaan ditengah instansi yang satu dengan yang lainnya.

Ketiga, berlandaskan wawancara dengan responden, dimensi sumber daya guna penataan e-government lewat SIPITER di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon belum optimal.

Keempat, karakteristik juga kemampuan agen pelaksana pada implementasi pendekatan e-government lewat SIPITER di Dinas Komunikasi juga Informatika Kabupaten Cirebon sudah cukup baik, tapi pola relasi tiap unit kerja juga norma-norma yang berlaku wajib ditingkatkan pada pelaksanaannya.

SARAN

Adapun saran yang penuli ajukan pada studi sebagai berikut:

Memakai SDM aparatur pada penataan *e-government* lewat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPITER) yakni penting, termasuk membagikan tugas yang jelas teruntuk pegawai guna mengelola dana *e-government*. Kabupaten Cirebon menyimpan kekuatan berupa SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing, yang bisa meningkatkan pengetahuan perihal *Smart Governance*. Dengan 82 aplikasi layanan publik juga 56 layanan pemerintahan, Kabupaten Cirebon mendukung rancangan *Smart City* lewat adanya *Command Center* selaku pusat pengendali teknologi informasi, yang juga bisa berfungsi selaku tempat wisata edukasi. Selain itu, hal ini bisa menjadi inspirasi teruntuk daerah lain yang ingin mengadopsi *smart governance*. Pemerintah daerah mampu mengelola data juga informasi dengan cepat, yang berkontribusi pada

Hak Cipta © 2024, Rakhmat Hardiyansyah.

perkembangan positif pada membangun Kabupaten Cirebon menjadi *Smart City* pada pelayanan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih teruntuk beasiswa, penyandang dana, enumerator dll.

REFERENSI

Budi, B. N., & Priska Lestari, R. (2022). Keadaan Big Data bisa menjadi Peluang juga Tantangan Teruntuk Good Governance di Kemajuan Sosial. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*, *5*(01), 10–17. https://doi.org/10.51192/almubin.v5i01.245

Chairunisa, M., Prima, Y., & Priyatna, C. (2024). Evaluasi Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *2*(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.10700698

Heri, O., Sandika, F., Apriliani, F., Ramadhan, G., & Adilah, H. (2021). *Jurnal Ilmiah "Neo Politea" FISIP Universitas Al-Ghifari Revolusi Industri 5.0 Pada Perspektif Ekologi Administrasi Desa* (Vol. 2, Issue 1).

Intan Purnama Sari, M., Haris Saputra, M., & Ihsan Mattalitti, M. (2022). *Transformasi Pelayanan Publik Menuju Era Data Technology di Masa New Normal*.

K, K. F. (2022). *Kesiapan Juga Tantangan Aparatur Sipil Negara Pada Menyambut Perkembangan Tekhnologi Guna Mempercepat Pengingkatan Berkelanjutan Di Era Revolusi Digital Society 5.0*.

Nugraha, B. (2020). Implementation of E-Government Policy in Making Smart Governance at Government Communication and Informatics Department, Bandung. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Juga Konsultan Sosial*, *2*(1), 1–10. https://doi.org/10.51486/jbo.v2i1.46

Nugraha, J. T. (2022). *E-government juga Pelayanan Publik (Studi perihal Elemen Sukses Pengingkatan E-government di Pemerintahan Kabupaten Sleman)*.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Cirebon. (n.d.).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (n.d.).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (n.d.).

Pittaway, J. J., & Montazemi, A. R. (2020). Know-how to lead digital transformation: The case of local governments. *Government Information Quarterly*, *37*(4), 101474. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101474

Priyono, T., Kabupaten, A., Provinsi, C., & Barat, J. (2022). *Evaluasi Pendekatan Program Smart City Oleh Dinas Komunikasi Juga Informatika Di Kabupaten Cirebon*.

Putra Ardinata, R., Rahmat, H. K., Andres, F. S., Waryono, W., Studi, P., Perhotelan, M., Pariwisata, F., & Perhotelan, D. (2022). Kepemimpinan Transformasional Selaku Solusi Pengingkatan Rancangan Smart City Menuju Era Society 5.0: Sebuah Kajian Literatur Transformational Leadership As A Solution For The Development Of The Smart City Concept In The Society Era: A Literature Review. In *Multidisciplinary Journal of Counseling and Social Research* (Vol. 1, Issue 1).

Rahmadany, A. F. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-government pada*

Hak Cipta © 2024, Rakhmat Hardiyansyah.

menyambut Pandemi Covid-19 di Indonesia. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2042

Ramadhani Shofy Nurul, M. A. (2023). *Implementasi Inovasi E-Government Pada Pelayanan Publik Studi Kasus Aplikasi Sampah Online Banyumas (Salinmas)*.

Sahrir, R. (2022). *Strategi Pemerintah Pada Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menyambut Tantangan Industri 5.0*. https://doi.org/10.31219/osf.io/h6gfn

Sbm, N. (2020). *Beberapa Masalah Pada Pengingkatan Sektor Pariwisata Di Indonesia*. *7*(2). http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp

Sinambela, L. P. (2010). *Reformasi pelayanan publik: teori, pendekatan, juga implementasi*. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=aKKJAAAAMAAJ

Subarsono, A. (2012). *Analisis Pendekatan Publik (Rancangan, Teori, juga Aplikasi)*.

Sugiyono, D. (2018). Metode studi kuatintatif, kualitatif juga R & D/Sugiyono. *Bandung: Alfabeta*, *15*(2010).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik. (n.d.).

Hak Cipta © 2024, Rakhmat Hardiyansyah.

Analysis of Characteristics and Meanings of Slang Found in Netflix Reality Show "The Circle"

Rana Nadiyah Adwinda[1], Pratama Irwin Talenta[2]
[1]Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemah Universitas Terbuka
e-mail: ranadwinda627@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan arti slang yang terdapat dalam reality show berjudul "The Circle" di Netflix. Analisis karakteristik dan arti slang merupakan salah satu masalah yang dihadapi penerjemah karena adanya perbedaan makna. Data diperoleh dari naskah reality show berjudul "The Circle" di Netflix. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik dan arti slang yang diujarkan di bahasa sumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut temuan Allan dan Burridge (2006), yang mengemukakan bahwa bentuk-bentuk slang atau bahasa gaul yang terlihat di media sosial sangat beragam, kreatif, dan dinamis, sehingga terbagi menjadi 5 karakteristik yaitu, Fresh and Creative, Flippant, Imitative, Acronyms, dan Clipping. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah slang banyak ditemukan dalam serial televisi, namun kebanyakan dalam situasi informal.

Kata Kunci: *Bahasa Informal, Karakteristik, Makna, Media Sosial, Slang, The Circle*

PENDAHULUAN

Bahasa adalah alat penting untuk berkomunikasi karena memungkinkan individu untuk menyampaikan ide dan berbagi informasi. Sosiolinguistik adalah studi tentang bahasa dan masyarakat dengan melihat bagaimana orang menggunakan bahasa dalam interaksi sehari-hari dan bagaimana lingkungan, budaya, dan norma mempengaruhi penggunaan bahasa. Fenomena keragaman bahasa, terlihat di pembicaraan masyarakat dan dipengaruhi oleh perilaku sosial dan aktivitas bicara dialektik. Situmorang dan Herman (2021) mengutip Hudson (1966) yang mengatakan bahwa bagian dari linguistik dengan distribusi sosial yang sebanding adalah variasi bahasa yang menekankan keragaman dan heterogenitas dalam komunikasi dalam masyarakat.

Media sosial telah menjadi platform utama yang memengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, seperti digitalisasi yang semakin meningkat, globalisasi, dan perubahan linguistik. Salah satu area di mana fenomena ini sangat terlihat adalah penggunaan bahasa informal di platform media sosial. Dalam kalangan generasi muda saat ini, gaya bahasa informal termasuk penggunaan kode-switching, campuran kode, interferensi (memasukkan elemen bahasa asing ke dalam kata-kata Indonesia atau sebaliknya), meminjam istilah asing, dan slang, baik secara lisan maupun tertulis (Budiasa, 2021).

Menurut Senefonte (2018, p.28), "bahasa informal pada asalnya adalah jenis variasi diafase." Namun, bergantung pada konteks, ia dapat merangkul variasi yang berbeda seperti diamesik, diastratik, atau diatopik. Selain itu, dapat terjadi di semua segmen bahasa (fonetik, leksikal, dll.). Jenis dari Bahasa informal terdiri dari; slang, idiom, beberapa frasa verb, dan kolokial adalah ciri lain dari bahasa Inggris informal (Lima & Senefonte, 2020). Slang adalah

Hak Cipta © 2024, Rana Nadiyah Adwinda, Pratama Irwin Talenta.

terminologi kolokial yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam percakapan sehari-hari, seringkali di antara generasi muda yang tinggal di daerah yang sama (Swan (1966) yang dikutip oleh Oktaviani dan Agung (2023)).

Slang adalah dialek sosial atau sociolekt yang jatuh di bawah bidang sosiolinguistik dan sering digunakan dalam obrolan pribadi untuk mempertahankan privasi. Karena slang lebih ekspresif dan menarik daripada bahasa formal, istilah baru diciptakan dan dimasukkan ke dalam percakapan sehari-hari. Slang digunakan spesifik untuk subkultur tertentu dan merupakan frasa kolokial yang tidak boleh digunakan dalam komunikasi formal. Orang perlu tahu siapa yang berbicara dan apa yang mereka bicarakan baru-baru ini untuk menginterpretasi makna bahasa slang yang dibicarakan.

Idiom adalah bagian penting dari bahasa, yang mencakup berbagai ekspresi informal dan kreatif yang memainkan peran penting dalam kelompok sosial tertentu. Istilah linguistik yang menyimpang dari makna kata-kata yang membentuknya disebut idiom (Kövecses & Szabó,1996). Pendekatan semantik kognitif berpendapat bahwa idiom, seperti metonyme, metafora, dan pengetahuan konvensional, didorong oleh pengetahuan konseptual, bertentangan dengan pandangan tradisional, yang menganggap idiom memiliki makna yang tidak terduga. Idiom digunakan untuk memperkuat identitas sosial dan meningkatkan rasa akrab, dan mereka dapat berguna untuk berbagai tujuan, termasuk dalam sosiolinguistik.

Ahli linguistik sering menggunakan istilah colloquialism, atau bahasa kolokial, untuk menggambarkan interaksi informal dan berbagai jenis bahasa informal. Penutur asli bahasa sering menggunakan bahasa kolokial, yang merupakan gaya komunikasi informal yang digunakan dalam percakapan kasual. Bahasa kolokial memfasilitasi komunikasi yang lebih sederhana dan lebih mudah ketika digunakan dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Bentuk kalimat dan pengucapan tidak menjadi penekanan utamanya. Dianggap sebagai bahasa pertama yang dipelajari anak-anak, digunakan oleh orang-orang dari berbagai kasta sosial, ekonomi, politik, agama, dan administrasi. Bahasa kolokial formalitasnya lebih tinggi dari bahasa slang, tetapi lebih rendah dari bahasa standar karena keragaman pengucapannya, pemilihan kata, dan konstruksi gramatikal (Suhardianto, 2019).

Dalam penelitian ini, reality show digunakan sebagai sumber data karena jenis hiburan ini paling populer, terutama di kalangan anak muda. Ketika menonton reality show, anak muda sering meniru gerakan dan ucapan pemeran. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu apa artinya.

Bahasa informal berupa slang, idiom, dan kolokial menarik untuk dianalisis dalam suatu reality show karena hal-hal tersebut merupakan salah satu fenomena bahasa. Selain itu, menganalisis jenis, karakteristik dan makna bahasa informal yang ditemukan dalam reality show sangat menarik karena dapat meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang asing dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan hubungan sosial, dan belajar sesuatu yang baru.

Reality show “The Circle” dipilih sebagai sumber objek penelitian karena menggambarkan diskusi di media sosial yang menggunakan slang yang menampilkan percakapan yang menarik.

METODE

Peneliti melihat kata-slang dalam reality show “The Circle” melalui pendekatan deskriptif kualitatif. “The Circle” di Netflix adalah serial realita televisi Amerika yang diproduksi oleh Studio Lambert dan Motion Content Group. Pertama kali ditayangkan di Netflix pada Januari 2020, para peserta, yang disebut sebagai "pemain", tinggal di apartemen terpisah dan berkomunikasi satu sama lain melalui platform media sosial yang disebut "The Circle". Untuk

Hak Cipta © 2024, Rana Nadiyah Adwinda, Pratama Irwin Talenta.

berinteraksi dengan orang lain, mereka dapat memilih untuk menjadi diri mereka sendiri atau membuat persona yang sepenuhnya fiktif. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menjadi pemain paling populer dan menghindari diblokir oleh pemain lain. Untuk mendapatkan popularitas, para pemain berpartisipasi dalam berbagai tantangan dan interaksi strategis. Dalam interval tertentu, para pemain menilai satu sama lain secara anonim. Pemain dengan peringkat terendah berisiko dieliminasi dari permainan, atau diblokir. "The Circle" membahas topik tentang media sosial, identitas, dan popularitas di era digital. Reality show ini menawarkan perspektif menarik tentang bagaimana orang menampilkan diri mereka secara online dan dinamika hubungan online. Untuk membuat pengalaman menonton yang menghibur dan memprovokasi pemikiran, reality show ini menggabungkan elemen realitas televisi dengan budaya media sosial.

Serial televisi reality show ini mengandung banyak bahasa informal bahasa Inggris, terutama yang berasal dari budaya Amerika, yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari yang terdiri dari slang, idiom, dan kolokial. Selain itu, ada juga kata-kata baru yang diciptakan oleh beberapa karakter dalam dialog, yang sebelumnya tidak pernah terdengar. Kedua alasan ini merupakan daya tarik untuk menganalisis serial televisi reality show ini.

Data diperoleh dengan menonton serial televisinya. Setelah itu, dipilih dan dikategorikan kata-kata temuan menjadi 5 karakteristik slang meurut teori Allan dan Burridge (2006). Teori ini membagi karakteristik bahasa menjadi lima jenis: (1) Fresh and Creative, yang menunjukkan bahwa istilah slang sekarang memiliki kosa kata baru untuk menjelaskan hal-hal yang lebih informal, (2) Flippant, yang menunjukkan bahwa istilah slang mengacu pada bahasa informal yang digunakan dengan santai atau tidak sopan, seringkali tanpa banyak pemikiran atau keseriusan, dan (3) Imitative, yang menunjukkan bahwa istilah slang mengacu pada bahasa yang meniru atau meniru suara, tindakan, atau karakteristik tertentu yang terkait dengan kelompok, budaya, atau subkultur tertentu yang sering kali melibatkan pembuatan kata atau frasa baru yang mencerminkan bunyi atau pola bicara dalam konteks tertentu, (4) Acronyms, yang diciptakan dengan menggabungkan huruf pertama setiap kata dalam sebuah frasa, atau dengan mengambil inisial dari beberapa frasa atau suku kata dan mengucapkannya sebagai satu kata, dan (5) Clipping, yang digunakan untuk membuat istilah slang yang lebih pendek dengan makna yang sama dengan memotong bagian dari istilah yang lebih panjang. Kemudian, berdasarkan kamus dan konteks percakapan atau dialog, makna masing-masing dari bahasa yang ditemukan dalam percakapan di serial televisi tersebut akan dicari dan diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori Allan dan Burridge (2006) untuk mengklasifikasikan dan menganalisis slang yang diucapkan oleh pemeran reality show "The Circle" setelah melihat dan mencocokkannya dengan naskah dialog beberapa kali. Teori ini menyatakan bahwa ada lima karakteristik slang, yaitu: Fresh and Creative, Flippant, Imitative, Acronyms, dan Clipping. Data yang telah dianalisis telah dianalisis sebagai berikut:

Tabel 1.1 Karakteristik Slang yang ditemukan di dalam reality show "The Circle"

Karakteristik Slang	Jumlah	Persentase
Fresh and Creative	13	52%

Hak Cipta © 2024, Rana Nadiyah Adwinda, Pratama Irwin Talenta.

Flippant	4	16%
Imitative	2	8%
Acronym	3	12%
Clipping	3	12%
Total	25	100

(sumber: Reality Show "The Circle")

Tabel 1.2 Penemuan Slang, Karakteristik, dan Artinya dari reality show "The Circle"

Kata atau Frasa	Arti	Karakteristik Slang
LOL	Laugh Out Loud	Acronym
LMAO	Laugh My Ass Off	
Hashtag	refer to the symbol (#) and the associated keyword or phrase used for metadata tagging on social media platforms	
Dope	Cool or excellent	Clipping
Goofball	A person who is silly in a way that is funny, often intentionally	
Newbie	Someone who is new to a particular activity, environment, or community.	
Catty	Mean, sneaky, and cunning.	Flippant
Raising some flags	When someone's behavior seems unusual or if there are indications of potential problems	
Look Shady	Someone appears suspicious or untrustworthy	
Jerk move	An action or behavior that is rude, selfish, or inconsiderate.	
This is sick	Excitement, admiration, & impression	Fresh and Creative
The fliest boy on the block	A young man who is exceptionally stylish, cool, or impressive in some way.	
Ibiza up in that joint	The atmosphere or vibe at a particular event is exciting	

Hak Cipta © 2024, Rana Nadiyah Adwinda, Pratama Irwin Talenta.

	and lively	
Catfish	Someone who sets up a fake online profile to trick people.	
Fenty all the way down	Something is exceptionally good thoroughly	
You Gucci	You are good or Everything is okay	
Hitting 90 on the freeway	A sense of urgency or excitement	
Straight to nitty gritty	Getting directly to the most important or essential aspects of something, without wasting time on irrelevant details or small talk	
Buddy	Good Friend	
Fangs come out	Someone becoming aggressive or confrontational.	
It's a jungle in there	A situation is chaotic, competitive, or challenging.	
All glitz and glam	A situation that is flashy, extravagant, or glamorous.	
Spilling the tea	the act of sharing gossip or revealing secrets	
Klutzy	A clumsy or stupid person.	
What's Poppin'	What's happening or What's going on	Imitative

(sumber: Reality Show "The Circle")

Berdasarkan data di atas, data tersebut dianalisis dan diklasifikasikan kata-slang yang terdapat dalam reality show "The Circle". Setelah mencari makna dari kamus dan memahami konteks dalam serial realita televisi, ditemukan 5 jenis slang berdasarkan teori Allan dan Burridge (2006), yaitu Fresh and Creative, Flippant, Imitative, Acronyms, dan Clipping.

A. Acronym

Karakteristik slang Acronym terbentuk dari setiap awal kata pada suatu frasa atau dibuat dari sekelompok kata atau suku kata dan diucapkan sebagai sebuah kata baru. Slang acronym

Hak Cipta © 2024, Rana Nadiyah Adwinda, Pratama Irwin Talenta.

ditemukan pada menit ke 31:25 yang diucapkan oleh Alana untuk mengirim suatu pesan di group chat. Ia mengirimkan pesan bertuliskan “LMAO” yang merupakan akronim dari “Laugh My Ass Off” yang biasanya digunakan dalam komunikasi informal, terutama dalam pesan online dan di media sosial, untuk mengekspresikan kesenangan atau tawa. Akronim seperti "LMAO" memungkinkan komunikasi dalam mengekspresikan emosi atau reaksi yang cepat dan efisien dalam percakapan digital.

B. Clipping

Clipping adalah karakteristik slang yang sebagian kata sudah terhapus namun masih mempunyai makna yang sama dengan kata aslinya. Penghapusan sebagian kata dalam ungkapan bahasa gaul merupakan salah satu bentuk penggunaan imajinasi dan upaya untuk mencapai titik tertentu dalam komunikasi. Salah satu contoh pengucapan slang dengan karakteristik clipping ada pada menit ke 3:52, ketika salah satu pemain, Joey, pertama kali memasuki apartemen barunya dan berkata “This is Dope!” Kata "dope" termasuk slang dalam karakteristik clipping. Kata "dope," adalah bentuk singkat dari istilah "dopamine," yang menggambarkan hormon yang ada di tubuh manusia yang membuat manusia merasakan suatu kesenangan. Kata "dope" telah memperoleh beberapa konotasi dari waktu ke waktu, seperti menandakan sesuatu yang menakjubkan, fantastis, atau keren.

C. Flippant

Karakteristik slang Flippant adalah jenis slang yang digunakan dengan mengacu pada sikap tidak sopan, sering ditandai dengan kurangnya keseriusan atau pertimbangan ketika berbicara. Slang dengan karakteristik ini dapat digunakan dalam situasi biasa, dengan menggambarkan tindakan yang kasar, tidak berpikir, atau tidak berhati-hati. Slang yang berkarakteristik flippant tidak selalu mengenai nada atau sikap pembicara, tetapi juga mengenai perilaku yang terlihat. Pada reality show “The Circle”, ditemukan slang dengan karakteristik flippant pada menit ke 23:35 ketika Karyn berada dalam obrolan group chat. “Catty” memiliki arti seseorang yang jahat, dan suka bergosip, terutama dalam di percakapan antar wanita. Namun “Catty” juga dapat dikategorikan dalam karakteristik fresh and creative karena berasal dari kata "Caterwaul", yang awalnya dimaksudkan untuk membuat tangisan keras seperti kucing.

D. Fresh and Creative

Karakteristik slang Fresh and Creative adalah jenis yang slangnya mempunyai perbendaharaan kata yang baru, kepandaian berimajinasi, variasi informal dan dapat berupa kata-kata terkini atau bahkan kata-kata lama yang belum diketahui orang. Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti menganalisis tipe-tipe fresh and creative dari reality show “The Circle”. Salah satu contoh pengucapan slang dengan karakteristik clipping ada pada menit ke 18:25, ketika salah satu pemain, Karyn, pertama kali mengenalkan dirinya dan menyebut bahwa dirinya berpakaian seperti “The fliest boy on the block.” "The fliest boy on the block" dikategorikan sebagai slang dengan karakteristik fresh and creative. Frasa ini menggunakan bahasa informal dengan cara yang kreatif dan ekspresif. "Fly" adalah istilah slang yang berarti bergaya atau keren, dan "on the block" berarti suatu lingkungan atau suatu komunitas. Dengan menggabungkan dua frasa tersebut, frasa ini menyampaikan gambaran kehidupan seseorang yang sangat bergaya atau mengesankan dalam suatu lingkungan atau komunitas.

E. Imitative

Karakteristik slang Imitative dari slang berarti kata yang berasal dari penyalinan kata dalam Bahasa Inggris dalam arti yang berbeda, biasanya mengacu pada kata-kata atau frasa yang meniru suara atau tindakan., atau menggabungkan dua kata yang berbeda untuk menghasilkan sebuah

Hak Cipta © 2024, Rana Nadiyah Adwinda, Pratama Irwin Talenta.

kata baru. Ucapan slang "What's poppin'?" merupakan salah satu contoh bahasa informal, yang meniru kata dalam bahasa inggris yaitu "What's happening?". Ekspresi ini digunakan untuk bertanya tentang apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi dalam situasi tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan dari percakapan yang didapat di reality show "The Circle", yang kemudian dianalisis dan dikategorikan sesuai karakteristiknya, dapat disimpulkan bahwa ada lima kategori slang yang digunakan dalam reality show "The Circle": "fresh and creative", "imitative", "flippant", "acronym", dan "clipping". Analisis dari data tersebut mengungkapkan bahwa dari reality show "The Circle" ditemukan kurang lebih 25 istilah slang: 14 slang dengan karakteristik "fresh and creative", 4 slang dengan karakteristik "flippant", 2 slang dengan karakteristik "imitative", 3 slang dengan karakteristik "acronym", dan 2 slang dengan karakteristik "clipping". Namun, beberapa slang juga dapat dikategorikan lebih dari satu karakteristik. Istilah-istilah ini memiliki berbagai makna, seperti yang dijelaskan dalam hasil dan pembahasan. Namun, fungsi utama dari penggunaan slang dalam reality show "The Circle" dapat diklasifikasikan sebagai percakapan sehari-hari dengan bahasa informal.

REFERENSI

Allan, K. & Burridge, K. (2006). Forbidden Word. New York: Cambridge

Alvin Delvary, N. R. (2023) 'Word Formation Analysis of English Slang Language on Furious 7 Movie', E-Journal of English Language & Literature, Vol. 12(No. 3), p. pages 518-528. Available at: https://ejournal.unp.ac.id/index.php/ell/article/download/122800/108332.

Amilia, I. K. and Andini, D. W. (2022) 'An Analysis of Swearing Word Types and Translation Techniques in Shaft Movie Subtitles', Jurnal Bahasa Asing Lia, 3(1), pp. 40–54. Available at: https://www.researchgate.net/publication/366167106.

Azim, R., Handoyo, R. P. and Yulianita, N. G. (2023) 'Subtitling Strategies and Acceptability of Humour in "Modern Family" Season 6 (2014)', J-Lalite: Journal of English Studies, 4(2), p. 120. doi: 10.20884/1.jes.2023.4.2.9460.

Barriga Fray, J. I., & McCandless, M. J. (2020). The effects of using American idioms in the development of the speaking skill in L2 students. Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 4(16), 432-438.

Budiasa, I. G. (2021) 'Slang Language in Indonesian Social Media', Lingual: Journal of Language and Culture, 11(1), p. 30. doi: 10.24843/ljlc.2021.v11.i01.p06.

Di, P. et al. (2023) 'Seminar Nasional Bahasa , Sastra , Seni , dan Pendidikan Dasar 3 Universitas PGRI Kalimantan 13 Desember 2023 ISSN 2963-2528 PEMBUATAN POHON LITERASI DALAM PEMBELAJARAN KREATIF, Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Seni, dan Pendidikan Dasar 3 (SENSASEDA) 3, 3, pp. 103–108.

Kövecses, Z., & Szabó, P. (1996). Idioms: A View from Cognitive Semantics. Applied Linguistics, 17, 326. https://doi.org/10.1093/applin/17.3.326

Kurmanbekova, Z. R. et al. (2023) 'A Linguistic Analysis of Social Network Communication', International Journal of Society, Culture and Language, 11(1), pp. 119–132. doi: 10.22034/ijscl.2023.1972010.2824.

Lima, A. R. D. C. and Senefonte, F. H. R. (2020) 'Informal English through sitcoms', BELT – Brazilian English Language Teaching Journal, 11(1), p. e36650. doi: 10.15448/2178-3640.2020.1.36650.

Hak Cipta © 2024, Rana Nadiyah Adwinda, Pratama Irwin Talenta.

Muslimawati, N. S. (2022) 'Formal and Informal Language Expressions Used by English Students of Indonesia in Classroom Presentation-Interaction', Elsya : Journal of English Language Studies, 4(1), pp. 12–23. doi: 10.31849/elsya.v4i1.8293.

Nisphi, M. L. and Armanto, A. (2021) 'The Existence of Language Deviation in Online Language During the Covid 19 Pandemic', Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 513, 513, pp. 533–540. doi: 10.2991/assehr.k.201230.159.

Putu, N. et al. (2023) 'Slangs Used i n The Movie " Lady Bird "', Wanastra: Jurnal Bahasa Dan Sastra, 15(1), pp. 1–6. Available at: https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/wanastra/article/view/13721/5945.

Situmorang, R. K. and Herman, H. (2021) 'an Analysis of Slang Language Styles Used in Charlie'S Angels Movie', Journal of English Educational Study (JEES), 4(1), pp. 21–29. doi: 10.31932/jees.v4i1.820.

Suhardianto and Hulu, F. (2019) 'Colloquail, Slang and Transformational Language: Comperative Study', Jurnal Basis, 6(1), p. 105. doi: 10.33884/basisupb.v6i1.1059.

Syahputra, P. S. and Syafitri, D. (2022) 'Slang Words Analysis in The Movie Ralph Breaks The Internet', EDULIA: English Education, Linguistic and Art Journal, 2(2), pp. 46–52. doi:10.31539/edulia.v2i2.3939.

Hak Cipta © 2024, Rana Nadiyah Adwinda, Pratama Irwin Talenta.

Efektivitas Organisasi dalam Pelayanan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Ranap Simanungkalit[1], Benny Sigiro[2]
[1)] Program Studi Ilmu Administrasi Negara Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
[2)] Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
ranapsimanungkalit@gmail.com, bennys@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Kondisi anak yang berhadapan dengan hukum masih menjadi perhatian khusus pemerintah karena masih ditemukannya kasus kelebihan masa penahanan, layanan makanan dan kesehatan yang buruk, serta pendampingan hukum yang minim. Sebagai organisasi pemerintah yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dituntut untuk memiliki efektivitas organisasi dalam melakukan pelayanan kepada anak didik pemasyarakatan (Andikpas) melalui proses pembinaan dan pemenuhan hak anak setiap tahunnya. Pelayanan Andikpas menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi LPKA Kelas II Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas organisasi dalam pelayanan Andikpas di LPKA Kelas II Bengkulu. LPKA perlu dilihat efektivitas organisasinya berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi dan dokumentasi melalui buku, dokumen laporan kinerja, laporan survei, internet, peraturan perundang-undangan, dan sumber kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan LPKA Kelas II Bengkulu mampu mencapai tujuan-tujuannya, mampu berintegrasi dengan berbagai mitra, dan mampu melakukan adaptasi atau inovasi dalam pelayanan Andikpas.Hal ini menunjukkan bahwa LPKA Kelas II Bengkulu sudah efektif, namun masih perlu ditingkatkan lagi efektivitas organisasinya dalam melaksanakan pelayanan Andikpas.

Kata kunci: *efektivitas organisasi, pelayanan andikpas, pelayanan publik*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah aktivitas berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepada para masyarakat. Pelayanan publik berkaitan dengan semua hal mengenai penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah (Widiyaningrum, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai bidang seperti misalnya bidang kependudukan, bidang keuangan, bidang admnistrasi, bidang hukum, dan bidang lainnya. Pelayanan publik bisa kita lihat melalui organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah merupakan lembaga dari pemerintah yang berisi aparatur pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Umasangaji, et al., 2021). Sebagai contoh misalnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu yang berada di bawah naungan

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Bengkulu. Pelayanan yang diberikan oleh LPKA secara umum berupa layanan kunjungan keluarga Andikpas, pos bantuan hukum, pembinaan dan pemenuhan hak Andikpas. Secara khusus LPKA sebagai organisasi pemerintah dibentuk memang untuk melakukan pelayanan kepada Andikpas berupa pembinaan dan pemenuhan hak-haknya.

Sebagaimana yang kita ketahui, pada era globalisasi dan dinamika perubahan yang begitu cepat, hal yang sangat penting dalam mendukung pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik terbaik adalah efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi menjadi kunci keberlanjutan dan kemajuan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Organisasi diharapkan tetap dapat bertahan di gempuran perubahan yang begitu cepat, seperti misalnya perubahan teknologi yang sangat signifikan. Perubahan teknologi menuntut terjadinya digitalisasi di berbagi aspek organisasi. Berdasarkan hal tersebut, efektivitas organisasi dirasa sangat penting bagi organisasi pemerintah mengingat organisasi yang efektif mampu beradaptasi, berkembang, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Menurut Steers (1985), faktor-faktor dalam menentukan efektivitas organisasi adalah sebagai berikut: (1) Pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu kesatuan upaya yang berkelanjutan. Untuk memastikan kesuksesan pencapaian akhir, perencanaan yang terstruktur perlu dilakukan, baik dalam hal langkah-langkah pencapaian setiap bagian maupun dalam hal penjadwalan secara berkala. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan mencakup rentang waktu dan target yang merupakan sasaran yang spesifik. (2) Integrasi yang merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. (3) Adaptasi yang merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri yang dilakukan individu atau organisasi untuk menyelaraskan diri terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan sarana dan prasarana. Adaptasi juga bisa dilihat dari inovasi suatu organisasi yang mengarah pada perbaikan atau berbeda dari yang sebelumnya.

Lokus penelitian adalah LPKA Kelas II Bengkulu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selama tahun 2020-2023 terjadi peningkatan kasus pidana anak. Kenaikan ini seharusnya menjadi pengingat berbagai pihak bahwa keadaan anak-anak di Indonesia harus mendapat perhatian khusus. Sisi lainnya, berdasarkan survei yang dilakukan Institute For Criminal Justice Form diketahui bahwa kondisi anak yang berhadapan dengan hukum tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan survei tersebut, masih ditemukan kasus anak yang kelebihan masa penahanan, kondisi layanan makanan dan kesehatan yang buruk, serta pendampingan hukum yang minim. Sebagai organisasi pemerintah yang menangani anak berhadapan dengan hukum, LPKA tentu saja dituntut untuk memiliki efektivitas organisasi dalam pelayanan kepada Andikpas berupa proses pembinaan dan pemenuhan hak anak setiap tahunnya. Pentingnya pembinaan terhadap Andikpas di dalam LPKA tidak bisa diabaikan, karena hal ini membantu mereka menyadari kesalahan dan mencegah mereka mengulangi kesalahan tersebut. Melalui pembinaan, anak-anak tersebut diharapkan dapat mengubah diri menjadi individu yang lebih baik secara moral dan dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah keluar nanti (Rizkiawan, 2021).

LPKA perlu dilihat efektvitas organisasinya melalui indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Oleh karena hal yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas organisasi dalam pelayanan kepada Andikpas di LPKA Kelas II Bengkulu. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas organisasi dalam

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

pelayanan kepada Andikpas di LPKA Kelas II Bengkulu. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada efektivitas organisasi dalam pelayanan yang berkaitan dengan Andikpas itu sendiri. Penelitian ini melihat efektivitas organisasi melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah agar dapat memberikan informasi mengenai efektivitas organisasi dalam pelayanan Andikpas di LPKA Kelas II Bengkulu yang dapat dijadikan sebagai referensi bacaan dan pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Selain itu, manfaat praktisnya adalah penelitian ini dapat menjadi acuan untuk LPKA Kelas II Bengkulu semakin berusaha meningkatkan efektivitas organisasinya.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif cocok untuk penelitian ini karena membutuhkan studi yang komprehensif sehingga bisa meneliti masalah-masalah (Hasbullah, et al., 2022). Penelitian dilakukan di LPKA Kelas II Bengkulu yang berlokasi di Jalan Semarak Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu, Bengkulu. Pemilihan lokasi dilakukan mengingat LPKA Kelas II Bengkulu merupakan tempat penulis bekerja sehingga mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun informan yang memiliki informasi dan data mengenai hal yang diteliti adalah Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha, dan Andikpas. Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam penelitian yang mana akan merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui beberapa cara, yakni: (1) wawancara secara tatap muka langsung, telepon, maupun melalui *platform* daring; dan (2) observasi melalui pengamatan keadaan kamar Andikpas, sarana dan prasarana, serta proses bisnis organisasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, memo, dan surat yang berasal dari lingkungan LPKA. Adapun dalam penelitian ini disebutkan istilah teknik pengolahan data. Menurut Miles & Huberman (1992) beberapa hal yang dilakukan agar penelitian kualitatif tidak terlalu melebar, yaitu:

1. Reduksi Data
   Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data.
2. Penyajian Data
   Setelah data di reduksi, data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi
   Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan organisasi pemerintah di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ketentuan mengenai LPKA terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA dan berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Andikpas. Sesuai pasal 3 Undang-

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan dengan: (a) Perlakuan secara manusia dengan memperhatikan sesuai dengan umurnya; (b) Pemisahan dari orang dewasa; (c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan secara efektif; (d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional; (e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; (f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/ pidana seumur hidup; (g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (h) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; (j) Pemberian pendapingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; (k) Pemberian advokasi sosial; (l) Pemberian kehidupan pribadi; (m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; (n) Pemberian pendidikan; (o) Pemberian pelayanan kesehatan.

Organisasi merupakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antara individu baik secara resmi maupun tidak resmi. Pendekatan dinamis terhadap organisasi menekankan pada interaksi antara anggota di dalamnya (Nur, 2023). LPKA yang merupakan organisasi pemerintah harus memiliki tujuan jelas dan spesifik, yang sering kali diungkapkan secara tertulis untuk menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Tujuan yang jelas dan spesifik ini tertulis di dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat setiap tahun. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen tahunan antara pemimpin instansi pemerintah atau unit kerja dengan amanah atau tanggung jawab kinerja. Ini merupakan kesepakatan antara pejabat yang menerima amanah dengan atasan mereka, dengan menetapkan tujuan-tujuan dan juga target kinerja yang akan dicapai oleh instansi atau unit kerja dalam periode tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian ini ditujukan kepada atasan langsung dari kepala LPKA yaitu Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Wilayah Bengkulu. Melalui perjanjian kinerja, maka kita bisa melihat sejauh mana efektivitas organisasi berjalan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun efektivitas organisasi dalam pelayanan kepada Andikpas di LPKA Kelas II Bengkulu sesuai konsep Steers (1985) dapat dilihat melalui faktor berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan (Hasibuan, 2019). Dalam perjanjian kinerja dijelaskan tujuan-tujuan atau sasaran kegiatan apa yang ingin dicapai oleh LPKA setiap tahunnya. Adapun tujuan LPKA Kelas II Bengkulu terhadap pelayanan Andikpas adalah: (1) Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular, dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah. (2) Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar. Berikut adalah persentase pencapaian tujuan LPKA.

Tabel 1. Tujuan LPKA Kelas II Bengkulu dalam Pelayanan Andikpas Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan	Pemenuhan layanan makanan bagi	85%	85%	100%

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

	Narapidana/Tahanan/ Anak, pengendalian penyakit menular, dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah.	tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dicapai			
		Tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkelanjutan.	95%	95%	100%
		Tahanan/Narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	90%	100%
		Tahanan/Narapidana/anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	90%	100%
		Keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif	70%	70%	100%
		Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan Narkotika	25%	25%	100%
2	Meningkatnya layanan pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar.	Anak yang mengikuti pendidikan formal dan nonformal, serta pendidikan keterampilan bersertifikat	80%	80%	100%
		Anak yang memperoleh hak layanan integrasi	100%	100%	100%
		Anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%	80%	100%

(sumber: Laporan Kinerja LPKA Kelas II Bengkulu Tahun 2023)

Indikator kinerja merupakan rincian dari sasaran kegiatan yang menjadi tujuan LPKA Kelas II Bengkulu. Hal tersebut akan dirincikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular, dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah. Pelayanan perawatan ini dilaksanakan mulai dari penerimaan Andikpas sampai dengan mereka keluar dari LPKA. Adapun butir-butir indikator pada bagian ini yakni:
   1) Pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar berhasil dicapai.

      Angka Kecukupan Gizi (AKG) Anak sesuai dengan Permenkumham 20 Tahun 2017 adalah sebanyak 2240 kalori. Untuk memenuhi AKG tersebut maka Andikpas makan 3 kali dalam sehari dengan menu yang berkualitas. Jumlah AKG didapatkan dengan mengukur berat dan jenis kandungan makanan seperti misalnya daging sapi, daging ayam ikan segar, telur, tempe, tahu, sayur-mayur, dan buah-buahan. Untuk menu

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

snack tambahan contohnya adalah bubur kacang hijau, kolak, ubi, dan kacang rebus. Adapun kandungan gizi yang diperhatikan adalah sumber karbohidrat, sumber protein nabati, sumber protein hewani, vitamin, dan gula. Sajian makanan ini sudah memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar gizi di setiap penyajiannya dengan melakukan kalkulasi terhadap berat dan kandungan makanan di dalamnya menggunakan kalkulator kalori. Kepala LPKA bertanggungjawab mengecek standar makanan menggunakan kalkulator kalori. Apabila Kepala LPKA merasa makanan tersebut belum sesuai standar, maka itu harus segera diganti sesuai standar dengan segera. Hal ini menjamin standar layanan makanan Andikpas.

2) Tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkelanjutan.

Kesehatan merupakan unsur yang sangat penting bagi Andikpas. Keadaan kesehatan bisa kita lihat melalui lingkungan kamar hunian LPKA Kelas II Bengkulu yang cukup baik. Kamar dilengkapi dengan sistem pengairan dan sistem ventilasi udara yang baik pula. Selain itu, tempat tidur anak disediakan dalam bentuk matras. Kapasitas kamar di LPKA adalah 126 Andikpas. Sedangkan jumlah Andikpas di LPKA tahun 2023 adalah 104 berdasarkan Laporan Kinerja LPKA Tahun 2023. Artinya adalah masih ada kelegaan sekitar 18% dari kapasitas maksimal kamar LPKA. Hal ini membuat kondisi tubuh anak menjadi sehat dan tetap prima. LPKA sendiri memiliki Poliklinik Kesehatan tersendiri yang diisi oleh 3 orang tenaga medis yaitu perawat serta kunjungan dokter yang terjadwal. Ini membuat lingkungan LPKA menjadi sehat. Penyakit yang sering muncul di lembaga masyarakat seperti sakit pencernaan, malaria, demam berdarah, jantung, hepaitis, pernafasan, ginjal dan saluran kemih, diabetes melitus, dan lain sebagainya tidak terjadi. Andikpas selalu dicek kesehatannya setiap hari oleh petugas medis dan diberikan vitamin serta suplemen yang bermanfaat untuk menjaga kesehatannya. Hanya saja pada tahun 2023 pernah ada anak yang memiliki penyakit bawaan hernia saat dia belum masuk LPKA. Hal ditindaklanjuti dengan baik yaitu dengan merujuknya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bengkulu. Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Umum, apabila terjadi urgensi yang berkaitan dengan masalah kesehatan, LPKA sudah bekerjasama dengan RSUD Kota Bengkulu yang mana setiap ada keadaan darurat seperti kecelakaan ataupun keadaan yang membutuhkan rawat inap, maka RSUD Kota Bengkulu siap merawatnya dengan biaya gratis. Pada intinya, layanan kesehatan selalu dilaksanakan rutin sehingga Andikpas memiliki kesehatan yang baik

3) Tahanan/Narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.

Selama berdiri, LPKA belum pernah mendapatkan Andikpas yang mengalami gangguan mental. Akan tetapi, LPKA berkomitmen untuk menangani dengan baik setiap anak yang memiliki gangguan mental. Oleh karena anak gangguan mentalnya belum ada, maka yang dilakukan adalah tindakan pencegahan. Wujud dari tindakan pencegahan ini adalah melakukan konseling secara rutin. Konseling ini dilakukan dengan pihak eksternal dan internal. Pihak eksternal bekerjasama dengan lembaga psikologi swasta dan internal dilakukan dengan pegawai sendiri. Pada konseling ini juga ada istilahnya pegawai dengan jabatan pembimbing kemasyarakatan yang terus

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

melakukan pembimbingan terhadap permasalahan anak. Selain itu, ada beberapa pegawai LPKA juga yang menjadi penanggungjawab Andikpas. Jadi pegawai ini diberikan tugas tambahan untuk menjadi "orang tua/wali" bagi Andikpas. Pegawai inilah yang biasa menjadi orang terdekat Andikpas. Mereka bisa bercerita terkait seluruh permasalahannya sehingga merasa lebih tenang dan terhindar dari gangguan mental itu sendiri. Pada intinya, layanan terkait penanganan gangguan mental dapat dicegah dan diantisipasi dengan baik.

4) Tahanan/Narapidana/anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

Selama tahun 2023, Andikpas di LPKA belum pernah ada yang disabilitas. Akan tetapi, LPKA memiliki komitmen memberikan layanan yang baik kepada seluruh Andikpas. Sebelum masuk, LPKA tentu saja melakukan pendataan terhadap Andikpas disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara Kasubbag Umum, apabila pada saat masuk Andikpas sudah mengalami disabilitas atau berkebutuhan khusus, maka LPKA akan berkoordinasi dengan RSUD Kota Bengkulu terkait penanganan, pemberian obat-obatan dan pemeliharaan kesehatannya. Kemudian untuk perawatannya tersendiri, Andikpas akan diberikan penempatan kamar yang aksesibilitas. LPKA merupakan tempat yang ramah disabilitas.



Gambar 1 Sarana Ramah Disabilitas LPKA
(sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2024)

Kasubbag Umum menjelaskan bahwa LPKA memiliki sarana yang ramah disabilitas seperti adanya kursi roda dan tongkat, ada akses jalan khusus disabilitas, dan pegangan tangan. Selain itu biasanya andikpas yang disabilitas juga mendapatkan perhatian khusus bagi petugas medis di sana. Hal ini menandakan bahwa layanan kesehatan disabilitas dapat dicegah dan diantisipasi dengan baik oleh LPKA.

5) Keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif

Untuk penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif ini belum pernah ditemukan di LPKA. Pada saat awal masuk biasanya andikpas selalu di *screening* terkait kesehatannya terutama HIV-AIDS dan TB Positif. Hal ini tentu untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Apabila ditemukan penyakit tersebut maka Andikpas akan ditempatkan di kamar khusus yang sudah disediakan sejak awal sembari terus melakukan pengobatan dan perawatan berjalan. Pada intinya, layanan terkait

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif.dapat dicegah dan diantisipasi dengan baik.

6) Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan Narkotika

Untuk pecandu atau penyalahgunaan narkoba belum pernah ditemukan di LPKA. Pada saat awal masuk biasanya Andikpas selalu di test narkoba. Hal ini tentu untuk melakukan pemantauan dan perawatan secara khusus. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasubbag Umum, LPKA Kelas II Bengkulu bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu untuk rutin melaksanakan test narkoba. Apabila Andikpas ditemukan positif menggunakan narkoba, maka Andikpas tersebut akan direhabilitasi dan dilakukan pemantauan secara intesif. Pada intinya, layanan terkait penanganan pecandu atau penyalahgunaan narkoba.dapat dicegah dan diantisipasi dengan baik.

Setiap indikator pada tujuan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular, dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah dapat dicapai tujuannya dengan baik sesuai dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Meningkatnya layanan pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar.

Layanan pendidikan dan pengentasan anak merupakan fokus dari LPKA. Hal ini karena *output* yang diharapkan adalah anak dapat menunjukkan perilaku yang baik, mendapatkan kembali kepercayaan diri, dan terpenuhinya hak-hak mereka sehingga dapat kembai dengan baik kepada keluara nantinya. Adapun butir-butir indikator pada bagian ini yakni:

1) Anak yang mengikuti pendidikan formal/nonformal atau pendidikan keterampilan bersertifikat.

Andikpas yang berada di LPKA memiliki hak mendapatkan pendidikan formal/nonfomal. Pendidikan formal di sini maksudnya adalah pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C. Jadi Andikpas diberi fasilitas untuk melanjutkan pendidikan formalnya. Bahkan LPKA Kelas II Bengkulu bekerjasama dengan berbagai sekolah dan perguruan tinggi untuk mengajarkan materi sekolah agar Andikpas mampu menyelesaikan pendidikan kesetaraan. Jadi apabila mereka mengikuti pendidikan ini dengan baik, sebelum keluar dari LPKA mereka telah mendapat ijazah pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk pendidikan non formal, LPKA Kelas II Bengkulu mengajarkan pendidikan keagamaan sesuai dengan keagamaan Andikpas. Jadi masing-masing Andikpas akan mendapatkan pendidikan keagamaan dari guru agama ataupun pemuka agama yang dipanggil oleh LPKA Kelas II Bengkulu. Selain pendidikan keagamaan, hal lainnya adalah pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara yang terdiri dari: (1) wawasan kebangsaan, (2) upacara bendera, dan (3) pramuka. Tujuan dari hal ini adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan nonformal lainnya pendidikan olahraga seperti misalnya voli, futsal, dan tenis meja. Selain untuk menambah ilmu di bidang olahraga, pendidikan ini akan membuat mereka semakin sehat. Selain pendidikan formal/non formal, Andikpas juga mendapatkan pendidikan keterampilan yang bersertifikat. Contoh pendidikan keterampilan yaitu las listrik, pangkas rambut,

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

pelatihan reparasi AC, dan pertanian. Setiap pendidikan keterampilan ini mendapatkan sertifikat yang menunjukkan bukti bahwa mereka telah berkompeten di bidang tersebut. Tentu saja ini memudahkan mereka saat ingin mencari atau membuka usaha sendiri setelah keluar dari LPKA. Berikut adalah tabel rinciannya:

Tabel 2 Jumlah Andikpas yang Mendapatkan Pendidikan Formal/Nonformal atau Pendidikan Keterampilan Bersertifikat Tahun 2023

No	Uraian Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan Kesetaraan	
	a. Paket A	25
	b. Paket B	9
	c. Paket C	11
2.	Keagamaan	
	a. Islam	104
	b. Katolik/Kristen/Hindu/Budha/Konghucu	-
3.	Kesadaran berbangsa dan bernegara	
	a. Wawasan Kebangsan	-
	b. Upacara Bendera	8
	c. Pramuka	75
4.	Olahraga	104
5.	Kursus-kursus	
	a. Las Listrik	20
	b. Pangkas Rambut	20
	c. Pelatihan Reparasi AC	20
	d. Pertanian	20

(sumber: Laporan Kinerja LPKA Kelas II Bengkulu Tahun 2023)

Sebanyak 45 Andikpas telah mendapatkan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C karena sejumlah itulah Andikpas yang mengikuti pendidikan formal sebelum masuk LPKA. Sedangkan yang lainnya merupakan anak yang tidak sekolah sama sekali. Secara keseluruhan pada tahun 2023, jumlah Andikpas di LPKA yaitu 104 orang. Target capaian indikator kinerja ini sebesar 80 persen. Sebagaimana yang menjadi target capaian indikator kinerja tersebut, 80 persen dari 104 tersebut telah mendapatkan pendidikan formal/nonformal atau pendidikan keterampilan bersertifikat sebanyak 84 orang. 84 orang tersebut ada yang hanya mendapatkan pendidikan formal/nonformal atau hanya mendapatkan pendidikan keterampilan bersertifikat. Ada juga yang mendapatkan ketiganya. Jadi ada irisan antara pendidikan formal/nonformal atau pendidikan keterampilan bersertifikat. Pada intinya proses pendidikan pendidikan formal/non formal atau keterampilan bersertifikat tujuannya tercapai.

2) Anak yang memperoleh hak layanan integrasi

Layanan integrasi adalah layanan yang diberikan kepada Andikpas dan keluarganya terkait keluarnya mereka dari LPKA dengan keadaan tertentu yang terdiri dari Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan asimilasi. Berikut adalah penjelasannya:

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

a. Pembebasan Bersyarat (PB)
PB adalah proses pembinaan Andikpas di luar LPKA setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan**.**
b. Cuti Bersyarat (CB)
CB adalah proses-proses pembinaan di luar LPKA bagi Andikpas yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**,** sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.
c. Cuti Menjelang Bebas (CMB)
CMB adalah proses pembinaan diluar LPKA bagi Andikpas yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.
d. Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)
CMK adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Andikpas untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
e. Asimilasi
Asimilasi adalah proses pembinaan Andikpas yang dilaksanakan dengan membaurkan Andikpas di dalam kehidupan masyarakat.

Bagi setiap Andikpas yang mengusulkan layanan integrasi tersebut pasti akan dikabulkan selagi memenuhi syarat yang telah diatur. Layanan ini diberikan kepada Andikpas dan keluarganya secara gratis atau tanpa dipungut biaya sedikitpun. Berdasarkan Laporan Kinerja LPKA Kelas II Bengkulu tahun 2023, capaian layanan integrasi sebesar 100 persen yang mana usulannya adalah 32 orang, tetapi Andikpas yang menerimanya adalah 37 karena 5 Andikpas diurus oleh LPKA sendiri. Begitu juga dengan layanan integrasi CB yang dikabulkan adalah 41 orang dari 36 yang mengusulkan. 5 orang lainnya diurus oleh LPKA sendiri. Usulan yang berasal dari LPKA sendiri merupakan bentuk layanan jemput bola yang mana yang melengkapi syarat berkasnya adalah LPKA sendiri.

3) Anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap Andikpas mendapatkan “orang tua asuh” selama di LPKA. Tujuan dari hal ini adalah untuk tetap mendapatkan peran orang tua yang bisa dijadikan sebagai orang terdekat atau tempat bercerita secara luas oleh Andikpas. Dengan begitu, akan terjalin ikatan emosional yang baik antara Andikpas dan pegawai LPKA yang menjadi ”orang tua/wali”nya. Selain hal tersebut, Kasubbag Umum menambahkan bawa hal pengasuhan ini juga bisa dilakukan melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pemberian dukungan bagi kondisi fisik dan mental bagi orang tua Andikpas, pembangunan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan Andikpas, serta pemberian perhatian terhadap kondisi dan kebutuhannya. Kemudian, salah seorang Andikpas juga mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh LPKA Kelas II Bengkulu juga baik sehingga merasa nyaman dan aman.

Berdasarkan yang sudah dijelaskan, kita bisa melihat bahwa efektivitas organisasi LPKA Kelas II Bengkulu dari sisi pencapaian tujuan. Berdasarkan data dan apa yang sudah dijelaskan, LPKA dapat mencapai tujuan-tujuan yang meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan Ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (2019) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. LPKA sudah berhasil dalam mencapai tujuannya berdasarkan penjelasan di atas. Ini juga sejalan dengan konsep efektivitas organisasi yang menyatakan bahwa efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin dekat hasil kegiatan dengan tujuan yang ditetapkan, semakin tinggi efektivitasnya (Agustina, et al., 2020).

2. Integrasi

LPKA Kelas II Bengkulu dalam menguatkan proses integrasi sering mengadakan rapat mingguan dan rapat bulanan secara rutin. Kasubbag Umum menambahkan bahwa rapat mingguan dan rapat bulanan diisi dengan sosialisasi peraturan baru, buku pedoman, dan standar operasional, serta hal-hal teknis lain yang berkaitan dengan pelayanan Andikpas. Rapat juga dimanfaatkan untuk konsultasi mengenai cara pelayanan yang baik dan *sharing* mengenai apa yang menjadi kendala terhadap pelayanan Andikpas. Selain itu, Kepala LPKA juga sering melakukan diskusi dan dialog kepada Andikpas langsung. Diskusi ini terkait kendala yang dirasakan Andikpas selama di LPKA dan saran perbaikan kepada LPKA berkaitan dengan pelayanan.

Selain integrasi antar sesama pegawai, LPKA juga melakukan komunikasi dengan *stakeholder* lain berupa kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dalam pelayanan kepada Andikpas. Komunikasi dengan stakeholder ini membahas tentang jenis-jenis pelayanan yang bisa diberikan kepada Andikpas seperti pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan. Jadi secara bersama-sama dengan organisasi lain mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah daftar kerjasama LPKA Kelas II Bengkulu:

1) Bidang Kepribadian
   (1) Agama: Rafflesian Nurul Dakwah, (2) Pramuka: UIN Famawati Bengkulu, (3) Jasmani: Gymnastic Center, dan (4) Penyuluhan Hukum: Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham Wilayah Bengkulu.
2) Bidang Keterampilan
   (1) Las listrik, Pangkas Rambut, Pertukangan Kayu, Pelatihan Reprasi AC: Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu, (2) Fotografi: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Bengkulu, dan (3) Pertanian: BPTP Provinsi Bengkulu.
3) Bidang Pendidikan Formal
   (1) SD, SMP, SMA: Sekolah Asal dan (2) Paket A, Paket B, dan Paket C: PKBM Ilmu Bunda
4) Bidang Kesenian
   (1) Musik Band dan Kesenian Tradisonal Dol: Sanggar Seni Sikta Gema Pelangi
5) Bidang Literasi
   (1) Menulis Puisi dan Menulis Cerpen: PKBM Ilmu Bunda dan (2) Perpustakaan: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bengkulu.
6) Bidang Pengentasan
   (1) PB, CB, Asimilasi: Aparat Penegak Hukum Wilayah Bengkulu, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, dan masyarakat dan (2) Pemenuhan Hak Identitas Anak: Dinas Dukcapil Kota Bengkulu.
7) Bidang Pengasuhan

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

(1) Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Ketahanan Remaja: BKKBN Provinsi Bengkulu dan (2) Konseling: PKBI, Sahabat Psikologi Universitas Bengkulu, BKKBN Provinsi Bengkulu, Prodi Konseling Universitas Prof Hazairin

8) Bidang Kesehatan
   (1) Perawatan Kesehatan: RSUD Kota Bengkulu dan (2) Rehabilitasi: BNN Kota Bengkulu

Bentuk integrasi yang dilakukan LPKA kepada para pegawainya maupun kepada *stakeholder* lain merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam pelayanan Andikpas. Ini sejalan dengan konsep integrasi yang mana sudah sewajarnya organisasi memiliki pemahaman, kemampuan meramal, dan mengatur tingkah laku individu dalam konteks kerjasama organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi (Tewal, et al., 2017). Hasil akhir dari integrasi bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Begitu halnya dengan *stakeholder* tersebut, mereka melakukan integrasi dengan LPKA karena memiliki tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan pelayanan Andikpas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha, integrasi ini bisa dilakukan karena masing-masing memiliki tujuan yang beririsan sehingga akan organisasi akan mewujudkannya bersama. Ini sesuai dengan konsep integrasi yang dikemukakan oleh (Rowa, 2021) yang mana integrasi merujuk pada penyertaan suatu urusan organisasi kepada organisasi lain karena dianggap semakin vital dan dapat lebih optimal secara efisiensi jika disatukan yang dalam hal ini adalah pelayanan Andikpas.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan yang sangat penting bagi organisasi. Kemampuan ini merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri yang dilakukan individu atau organisasi untuk menyelaraskan diri terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Ini pun juga bisa dilihat dari inovasi suatu organisasi yang mengarah pada perbaikan, perbedaan dari yang sebelumnya, serta hal yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah demi tercapainya tujuan organisasi. Salah satu metode inovasi dalam pelayanan publik yang bisa digunakan adalah dengan berfokus pada pemecahan masalah yang melihat pada kebutuhan pengguna layanan (Prabowo, et al., 2022). Berdasarkan observasi di lapangan, LPKA Kelas II Bengkulu telah menyediakan seperangkat komputer lengkap dengan kamera dan speaker yang bagus dan diletakkan di dekat kamar Andikpas. Perangkat komputer ini menjawab permasalahan pengguna layanan dimana perangkat komputer digunakan untuk melakukan *video call* antara Andikpas dan keluarganya. Jadi dengan adanya inovasi ini, maka Andikpas bisa bertemu melalui *video call* dengan keluarganya. Ini sangat membantu mengingat keluarga Andikpas ada yang berada di luar Kota Bengkulu seperti misalnya di Kabupaten Muko-Muko yang waktu tempuhnya sekitar 12 jam.



Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

Gambar 2 Perangkat Komputer untuk Layanan *Video Call* LPKA Kelas II Bengkulu
(sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2024)

Selain itu, mengingat pengalaman pandemi Covid-19 lalu, pembelajaran yang dapat diambil adalah melakukan sterilisasi terhadap barang titipan keluarga Andikpas. Hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai macam virus, kuman, bakteri, dan penyakit lainnya. Maka dari itu, LPKA menyediakan sarana *sterilizer. Sterilizer* ini berfungsi untuk mensterilkan setiap barang titipan keluarga Andikpas seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya.



Gambar 3 Alat sterilisasi LPKA Kelas II Bengkulu Tahun 2024
(sumber: Dokumentasi peneliti tahun 2024)

Kemudahan layanan *video call* dan penitipan barang menunjukkan prosedur yang cepat, tepat, dan memuaskan yang menandakan ciri efektivitas organisasai (Widiyaningrum, 2022). Inovasi yang telah dilakukan LPKA juga merupakan pemecahan masalah dalam pelayanan terhadap Andikpas pada bagian kunjungan keluarga dan penitipan barang. Inovasi dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan pengguna layanan sesuai yang dikatakan oleh Prabowo, et al. (2022). Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, LPKA Kelas II Bengkulu memenuhi syarat sebagai organisasi yang efektif karena mampu mencapai tujuan, berintegrasi, dan melakukan adaptasi. Untuk pencapaian tujuan, pelayanan Andikpas pada perjanjian kinerja memiliki capaian seratus persen (100%) sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel 1. Ini sesuai dengan konsep efektvitas organisasi secara keseluruhan yang mana efektivitas organisasi menekankan pada hasil yang dicapai, semakin besar hasil atau target yang dicapai maka semakin besar pulalah efektvitas sebuah organisasi tersebut (Wibowo & Soleh, 2022). Selain itu, LPKA Kelas II Bengkulu juga mampu berintegrasi secara internal antar sesama pegawai yang ditunjukkan dengan rapat rutin yang membahas pelayanan terhadap Andikpas. Sedangkan proses berintegrasi eksternal antar organisasi dapat dilihat melalui perjanjian kerjasama untuk mencapai tujuan dalam pelayanan Andikpas. Kemudian LPKA Kelas II Bengkulu juga mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan yang ada serta melakukan inovasi. Sebagai contohnya adalah layanan kunjungan melalui *video call* dan pengadaan alat sterilisasi.

Melalui Kasubbag Umum dan Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha sama-sama berpendapat bahwa LPKA Kelas II Bengkulu merupakan satuan kerja Kemenkumham Wilayah Bengkulu yang berprestasi karena mampu mencapai tujuan yang ditetapkan sehingga mendapatkan berbagai piagam penghargaan. Hal yang tak kalah penting juga adalah terkait survei

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkumham RI pada bulan Maret 2024 yang diisi oleh responden seperti masyarakat, Andikpas dan *stakeholder* terkait. Hasil survei menunjukkan nilai yang diperoleh LPKA Kelas II Bengkulu sangat baik sebesar 17,50 dari nilai maksimal yaitu 17,50.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian perihal efektivitas organisasi dalam pelayanan Andikpas di LPKA Kelas II Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi LPKA Kelas II Bengkulu sudah baik karena mampu mencapai tujuannya, mampu melakukan integrasi dengan Andikpas dan *stakeholder* lain, dan mampu melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam pelayanan Andikpas. Dari sisi pencapaian tujuan, LPKA mampu mencapai tujuan berdasarkan pencapaian target standar yang telah ditetapkan oleh LPKA. Dari sisi integrasi, LPKA mengadakan komunikasi internal kepada seluruh pegawai terkait pelayanan Andikpas agar maksimal. Selain itu, diskusi kepada Andikpas juga rutin dilaksanakan untuk mengetahui kendala Andikpas selama di LPKA dan mendapatkan saran perbaikan yang membangun. Sedangkan untuk adaptasi, LPKA telah melakukan pengadaan seperangkat komputer untuk komunikasi jarak jauh kepada keluarga melalui video call dan alat sterilisasi untuk penitipan barang dan makanan kepada Andikpas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat dikemukakan yakni hendaknya LPKA Kelas II Bengkulu dapat semakin meningkatkan efektivitas organisasinya dalam pelayanan Andikpas sebagaimana yang telah menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi. LPKA bisa melakukan kerjasama, studi banding dan *sharing* bersama *stakeholder* lain untuk semakin mencapai efektivitas organisasi yang lebih baik ke depannya.

REFERENSI

Agustina, Y. N., Yaqub, C., & Roni, P. W. (2020). Efektivitas Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi pada Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Respon Publik*, *14*(5), 81–84.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkumham RI. (2024, Mei 30) Survei Kepuasan Masyarakat LPKA Kelas II Bengkulu. https://survei.balitbangham.go.id/

Hasbullah., Rini, A., Syaiful., Syaiful, A., & Ria, K. (2022). Efektivitas Organisasi dalam Perspektif Model Richard M Steers di Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. *Journal of Social Community*, 7(14), 63–72.

Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Universitas Indonesia.

Nur, M. (2023). *Organisasi dan Manajemen*. Deepublish.

Prabowo, H., Dadang, S., & Wirman, S. (2022). *Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik.* Remaja Rosdakarya.

Rizkiawan, R. R. (2021). Pembinaan dan Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cilacap. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, *8*(4), 844–851.

Rowa, H. (2021). *Organisasi Pemerintahan dalam Teori dan Praktik.* Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Steers, R. (1985). *Efektivitas Organisasi.* Erlangga

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

Tewal, B., Adolfina., Merinda, P., & Hendra, N. T. (2017). *Perilaku Organisasi.* Patra Media Grafindo.

Umasangaji, M. K., Salmin, D., & Very, Y. L. (2021). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(97), 49–56.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/ UU Nomor 25 Tahun 2009.pdf

Wibowo, M. T. H., & Soleh, S. (2022). Analisis Efektivitas Organisasi pada Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Neo Politea*, *3*(1), 21–35.

Widiyaningrum, W. Y. (2022). Efektivitas Mall Pelayanan Publik (MPP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung. *Jurnal Jisipol*, 6(3), 57–68.

Hak Cipta © 2024, Ranap Simanungkalit Benny Sigiro.

Desain Institusional Badan Penghubung Daerah sebagai *Liaison Office* Pemerintah Daerah yang Fungsional

Ray Ferza
Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Gatot Subroto No.10, RT.2/RW.2, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710
e-mail: rayf001@brin.go.id

Abstrak

Badan Penghubung Daerah (BPD) berperan penting sebagai perantara antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dengan fungsi institusional yang terefleksikan dalam dimensi sosial-politik, dan ekonomi namun eksistensi BPD di Jakarta masih belum optimal. BPD seringkali hanya berfokus pada tugas administratif dan memandang sebelah mata peran fasilitator ekonomi serta mitigator kondusivitas social-politik pusat-daerah. Studi ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: perkembangan lanskap perekonomian dan sosial politik saat ini serta desain institusional ideal BPD sebagai liaison office yang fungsional. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desain institusional BPD yang ideal mencakup stuktur eselonering yang adaptif dan orientasi kelembagaan yang menitikberatkan fungsi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan status eselonering, perampingan birokrasi, dan penguatan fungsi dengan penempatan pejabat fungsional yang relevan. Implementasi struktur ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran BPD dalam memfasilitasi pembangunan daerah yang lebih merata dan sinergis dengan kebijakan nasional, serta mengatasi berbagai patologi birokrasi yang ada saat ini.

***Kata kunci**: Badan Penghubung, Pemerintah Daerah, Pembangunan, Birokrasi, Administrasi*

PENDAHULUAN

Pembentukan Badan Penghubung Daerah (BPD) dilandasi oleh berbagai dimensi, dengan dimensi sosial, politik, dan ekonomi menjadi faktor paling fundamental. Faktor-faktor tersebut meliputi intensitas ekspor-impor, kerjasama internasional seperti sister city, pengendalian rantai ekonomi daerah, hubungan keuangan pusat-daerah, manajemen konflik pusat-daerah, dan kebutuhan fasilitas bagi masyarakat daerah perantau.

Meskipun telah terbentuk dengan memiliki fungsi yang esensial, eksistensi BPD di ibukota masih belum optimal. BPD terkesan hanya melayani kebutuhan administratif bagi masyarakat daerah di Jakarta, dengan fungsi fasilitator integrasi ekonomi dan sinergitas pusat-daerah yang belum terlihat jelas. Koordinasi pusat-daerah masih didominasi oleh kegiatan formal dalam rangka akselerasi realisasi anggaran daerah, seperti perjalanan dinas ke Jakarta (Habibah 2019), bukan optimasi fungsi BPD sebagai representasi eksekutif daerah di ibukota. Hal ini patut disayangkan mengingat kompleksitas tantangan kelembagaan dalam menjawab sinergitas pusat-daerah di masa depan.

Beberapa studi terdahulu telah memotret inefektivitas dari eksistensi BPD. Maharani, Kurnia, and Kushartono (2021) menyatakan bahwa untuk memenuhi akselerasi Pembangunan, BPD Pemerintah Aceh belum merefleksikan kinerja yang handal. BPD juga dinilai masih berkutat pada pekerjaan yang bersifat administrasi umum (Simanullang, R.N.S.R; et, al. 2022). Potret

Hak Cipta © 2024, Ray Ferza.

inefektivitas dari eksistensi BPD sebagai lembaga yang menjembatani sinergitas Pemerintah Pusat - Daerah merupakan area studi terkait BPD yang eksis sementara ini. Penulis berupaya melanjutkan jejak akademis tersebut dengan menawarkan distingsi penelitian pada keumuman area studi terkait eksistensi BPD di Indonesia (tidak spesifik-kasuistik seperti yang telah dilakukan pada studi terdahulu). Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana perkembangan lanskap perekonomian dan sosial politik sejauh ini?
2. Bagaimana desain institusional BPD yang ideal sebagai *Liaison Office* Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan perekonomian dan sosial politik?

TINJAUAN LITERATUR

Entitas Badan Penghubung Daerah

Dalam literatur terdahulu, Badan Penghubung Daerah dikenal sebagai *liaison office (agency) of the local government* atau *regional representative*. Badan ini biasanya berkantor di ibukota negara seperti badan penghubung provinsi di negara RRT, *zhu jing ban* yang berkantor di Beijing. Pembentukan *zhu jing ban* dibarengi dengan fenomena melonjaknya angka ekspor di wilayah provinsi bahari sampai pada angka 90%. Untuk itu, badan penghubung daerah yang menjadi kelompok lobi di RRT dibentuk dalam jumlah yang cukup banyak, bahkan sampai diatas 100 pada 2009 (perlu diketahui bahwa pada saat itu provinsi otonom di RRT hanya 31 ditambah 4 provinsi berotonomi khusus) (Yuejin 2014, 332).

Pemerintah Pusat RRT kewalahan menangani sejumlah lobi dari daerah-daerah tersebut sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan audit dengan tujuan merasionalisasi jumlah *zhu jing ban* yang berkantor di Beijing. Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Pusat RRT tidak hanya melakukan rasionalisasi *zhu jing ban* tetapi juga memberlakukan insentif non fiskal, seperti menyediakan promosi jabatan birokrasi Pemerintah Pusat bagi para pejabat birokrasi Pemerintah daerah supaya loyalitas Badan Penghubung Daerah *zhu jing ban* terhadap Beijing tetap terkendali (C. Li 2014, 99).

Zhu jing ban di RRT memiliki peran sentral dalam melobi Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan sejumlah Dana Transfer bagi Daerah. Pengalokasiannya memiliki 4 kategori umum, antara lain bantuan khusus (*earmarked grants*), dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan pengembalian pajak. Meskipun demikian, pengalokasiannya terkendala pada tingginya ketergantungan terhadap kekuatan lobi dari masing-masing *zhu jing ban* dan diskresi dari pejabat Pemerintah Pusat RRT(Wang 2014, 3). Dinamika relasi *zhu jing ban* dengan Beijing juga menuai kritik dimana praktiknya dianggap koruptif dan nepotis. Relasi tersebut juga dianggap hanya mengarah pada kebijakan Beijing-sentris yang elitis dan cenderung mengeksploitasi sumberdaya daerah (Smith 2009, 55).

Peran dari *Zhu Jing Ban* juga terlihat pada asistensi praktikal bagi masyarakat daerah yang merantau di ibukota. *Zhu jing Ban* Hong Kong atau dikenal juga sebagai *BJO* secara konsisten menciptakan kegiatan-kegiatan bagi warga Hong Kong, pelaku usaha Hong Kong, dan Mahasiswa Hong Kong yang sedang menetap di Beijing. Asistensi tersebut bahkan berada pada tingkatan dimana mahasiswa hongkong yang kuliah di kampung halaman tidak mendapatkan fasilitas sepadan dengan yang diberikan oleh *BJO* kepada mahasiswa hongkong di Beijing. Selain memfasilitasi kerjasama antara Hongkong dan RRT (Cina Daratan), *BJO* juga mengutamakan kualitas hidup warga masyarakat rantau. (Xu 2019, 10)

Badan Penghubung Daerah juga dapat berkantor di wilayah luar negeri yang menjadi pusat

Hak Cipta © 2024, Ray Ferza.

dari komunitas internasional semisal di Brussel sebagai lokasi kantor pusat Uni Eropa. Brussel menjadi rumah bagi Badan Penghubung Daerah negara-negara uni eropa, yang dikenal sebagai *Committee of The Regions* (*CoR*). Sejak terbentuk pada 1994, *CoR* dimaksudkan sebagai kanal pengaruh kebijakan Uni Eropa yang berangkat dari perspektif daerah negara anggota. Meskipun *CoR* memiliki mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dalam memengaruhi kebijakan Uni Eropa, peran CoR sebagai badan konsultatif (*advisory body*) terbilang amat terbatas dalam mewarnai kanvas kebijakan Uni Eropa. Selain *CoR,* Uni Eropa juga pernah mengenal entitas penghubung daerah untuk menjadi kanal pengaruh daerah bagi kebijakan Uni Eropa, seperti *The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)* dan terdapat pula entitas perwakilan pemerintah daerah bagi Brussel dari masing-masing negara, seperti Irlandia yang memiliki *Nasc.* sebagai badan yang terdiri dari gabungan perwakilan enam pemerintah daerah di Irlandia Barat *plus* unsur akademik yang diwakili oleh *University College Galway* (Callanan 2004, 423).

Selain itu, badan penghubung daerah juga dapat dibentuk berlandaskan kepentingan kerjasama yang temporer seperti *sister city*. Beberapa diantaranya adalah Pemerintah Provinsi Shandong, Pemprov Jiangsu, dan Dinas Kepariwisataan dari Pemerintah Kota Xiamen RRT yang memiliki badan penghubung di kota Seoul, Korea Selatan. Ketiga badan penghubung daerah tersebut dibentuk untuk menjaga relasi ekonomi daerah antara masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama *sister city* RRT- Korsel (M. Li 2017, 7).

Badan Penghubung Daerah tidak selalu berpangkal dari cabang kekuasaan eksekutif. Amerika Serikat memiliki agen legislatif berbasiskan representasi geografis yang duduk di kongres. Kamar perwakilan yang mewakili wilayah tersebut juga berperan sebagai pelobi formal untuk mempengaruhi kebijakan Washington. Bahkan, daerah juga dimungkinkan untuk memiliki pejabat yang ditunjuk untuk secara langsung menghubungi pejabat Washington guna menyalurkan kepentingan daerah. Aktivitas lobi seperti ini dikenal sebagai jalur formal (*inside pathways of representation*). Meskipun demikian, praktik pemerintahan daerah di AS juga diwarnai oleh aktivitas lobi pemerintah daerah yang justru berasal dari perwakilan informal. Aktivitas melobi pemerintah pusat tersebut dilakukan oleh Pelobi Profesional melalui jalur informal dengan honorarium dalam jumlah tertentu(*outside pathways*). Hal ini kerapkali dilakukan daerah untuk mendapatkan atensi lebih dari Pemerintah Pusat ditengah beragam jalur formal yang telah tersedia untuk menata relasi pusat-daerah. (Loftis and Kettler 2015).

Berdasarkan hasil berbagai studi tersebut dapat dipahami bahwa badan penghubung daerah merupakan kanal penyalur kepentingan pemerintah daerah di tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk kasus Indonesia, Badan Penghubung Daerah hanya diperbolehkan terlibat di tingkatan nasional sesuai dengan ketentuan urusan pemerintahan absolut dalam peraturan perundangan. Urusan pemerintahan absolut menegaskan bahwa politik luar negeri merupakan salah satu dari keenam urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan badan penghubung daerah di Indonesia tidak dapat berkantor secara resmi di negara-negara yang menjadi tuan rumah bagi kantor komunitas internasional, seperti yang selama ini terjalin di antara negara anggota Uni Eropa. Badan penghubung daerah di Indonesia hanya terletak di Jakarta sebagai kepanjangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Fungsi perantara (*intermediary*) yang dijalankan oleh badan penghubung daerah terdiri dari ketiga dimensi ekonomi, politik, dan sosial, sementara pada perkembangannya fungsi perantara tersebut dapat dijalankan oleh berbagai lini cabang kekuasaan. Untuk lini cabang kekuasaan, fungsi perantara ini dilakukan oleh cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam menjalankan

Hak Cipta © 2024, Ray Ferza.

fungsi yang demikian, disamping Badan Penghubung Daerah yang berkantor di Jakarta, Ketatanegaraan Indonesia juga mengenal Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi kewilayahan dalam menyalurkan kepentingan daerah di tingkatan nasional.

Karakter kelembagaan dari suatu badan penghubung juga dapat dibentuk sesuai fleksibilitas organisasi. Konsep badan penghubung daerah sejatinya adaptif dengan kebutuhan dalam pelaksanaan fungsi. Badan penghubung daerah bisa saja berasal dari dua lini cabang kekuasaan, yakni eksekutif dan legislatif (bahkan dari luar pemerintahan sekalipun) dan bisa saja terdiri dari beberapa pemerintah daerah dalam satu badan penghubung. Selama ini, badan penghubung daerah di Indonesia untuk cabang kekuasaan eksekutif dimanifestasikan dalam suatu Badan Penghubung Provinsi X yang berkantor di Jakarta sedangkan untuk fungsi yang seirama, cabang kekuasaan legislatif penghubung provinsi X dimanifestasikan dalam entitas Dewan Perwakilan Daerah yang berkantor di Senayan, Jakarta.

Pelaksanaan fungsi badan penghubung daerah juga perlu meninjau beberapa titik kritis seperti, aktivitas lobi yang melampaui batas prosedural hubungan pusat dan daerah; kehilangan rasa kepedulian daerah sehingga badan penghubung cenderung menjadi produsen kebijakan pusat yang hanya menguntungkan ibukota dan eksploitatif bagi daerah; patron klien hubungan birokrasi pusat-daerah; dan maraknya praktik korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan kebijakan hubungan pusat dan daerah.

Kehadiran dua kanal penyaluran kepentingan daerah Indonesia yang masing-masing direpresentasikan Badan Penghubung Provinsi X (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi X (legislatif) juga masih belum mampu memberantas beberapa patologi birokrasi yang menjangkit sinergitas kebijakan pusat-daerah. Setidaknya, sampai detik ini Indonesia masih dinaungi catatan minor seperti terabaikannya kebijakan di tingkat pusat untuk dilaksanakan di daerah, miskoordinasi pusat-daerah, minimalnya intentitas ekspor daerah, minimalnya penanaman modal asing di daerah, penyaluran bantuan sosial yang tidak teratur, dan praktik suap dana transfer daerah yang melibatkan pelobi ilegal diluar birokrasi badan penghubung provinsi.

METODE

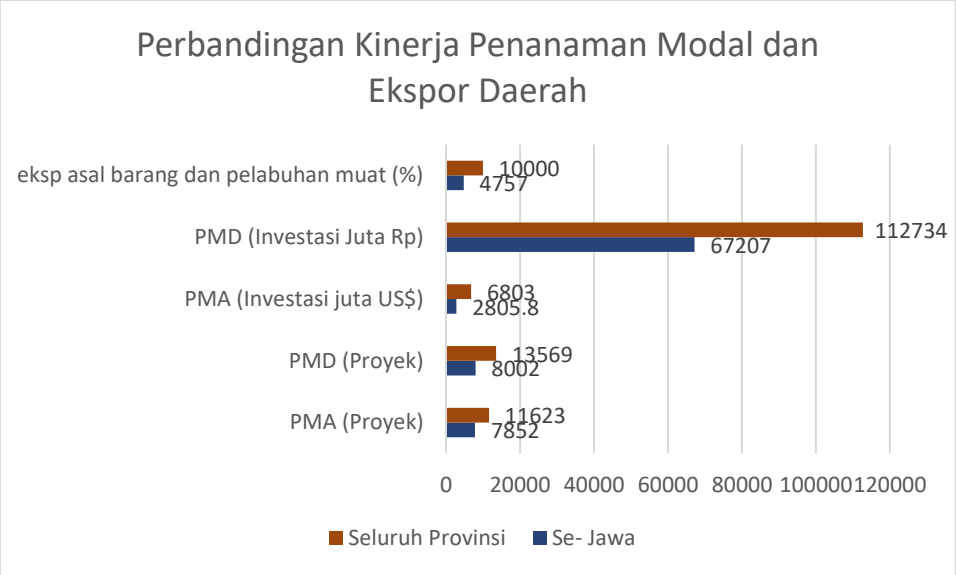
Jenis Penelitian merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Menurut Crasswell (1994) "*qualitative research focuses on the process that is occurring as well as the product uroutcome.* Researches *are particulars interested in understandaing how thingsoccurs".* Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan wawancara. Wawancara, bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dapat dijelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara obyektif. Pada peneltian ini, wawancara dilakukan terhadap Pejabat (informan) di Pemerintah Daerah lokasi penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang penyerapan anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini menentukan informan sebagai berikut: (1) Kepala BPD Sumatera Barat, (2) Kepala BPD Nusa Tenggara Timur, (3) Kepala BPD Riau, (4) Kepala BPD Sulawesi Tenggara, (5) Kepala BPD Kalimantan Utara.

Hak Cipta © 2024, Ray Ferza.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lanskap Ekonomi dan Sosial Politik dalam Relevansi Eksistensi BPD

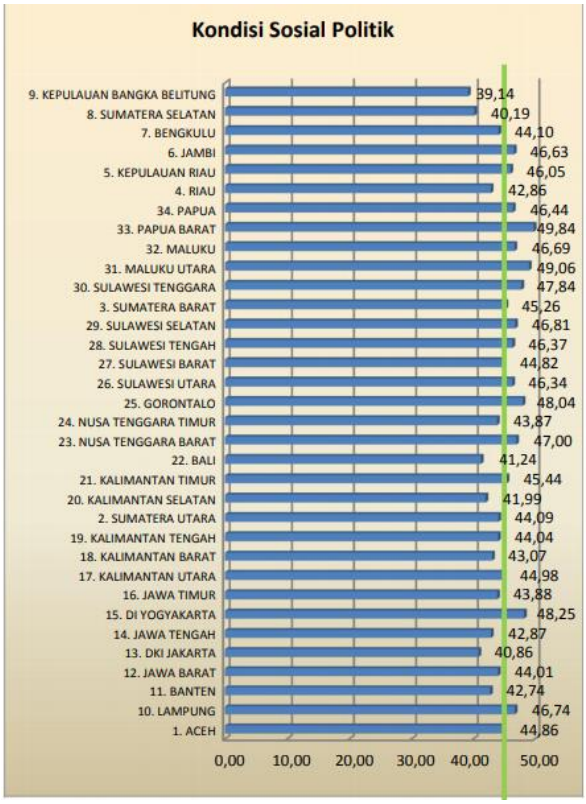
Badan Penghubung Daerah se-Indonesia telah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Terlebih, tantangan bangsa sebagaimana yang sering diuraikan oleh Presiden Jokowi berkaitan dengan daya saing. Tantangan tersebut seringkali diindikasikan dengan posisi Indonesia dalam peringkat kemudahan berusaha atau *ease of doing business*. Presiden juga sempat melontarkan pernyataan bahwa Indonesia kerapkali gagal mengundang investor asing untuk menanamkan modal. Portret internal bangsa memperlihatkan ketimpangan yang luar biasa dalam memicu daya saing antar daerah dimana kinerja realisasi penanaman modal baik asing maupun dalam negeri mencerminkan ketimpangan antara Jawa dengan Non Jawa.



Sumber: BPS & BKPM, diolah, 2020.

Hampir separuh dari kinerja penanaman modal dan ekspor daerah hanya ditopang oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jika dijabarkan, gambar diatas masing-masing menunjukkan bahwa 47,57% ekspor daerah, 59,6% investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, 41,4% investasi penanaman modal asing, 58,9% proyek Penanaman Modal Dalam Negeri, dan 67,55% proyek Penanaman Modal Asing hanya ditampung oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Disamping itu, kinerja pembangunan diluar bidang ekonomi juga mencerminkan ketimpangan yang Jawa Sentris. Pada 2019, Bawaslu merilis indeks kerawanan pemilu 2019 yang didalamnya mencakup kondisi sosial politik di masing-masing provinsi, hasilnya adalah hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa dinyatakan aman secara sosial politik kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, 15 Provinsi yang dinyatakan rawan secara sosial politik 14 diantaranya terletak di luar Pulau Jawa dan secara geografis cenderung jauh dari Provinsi DKI Jakarta kecuali Provinsi Lampung yang rawan namun secara geografis relatif dekat dengan lokasi ibukota.

Hak Cipta © 2024, Ray Ferza.



Sumber: *Courtesy* Bawaslu RI, 2019.

Fakta ini mendorong pada suatu urjensitas bahwa pembangunan Indonesia menuju pada pembangunan Indonesia-sentris bukan lagi Jawa Sentris. Dalam rangka menjadi perekat pembangunan pusat dan daerah, reputasi yang berkembang terhadap predikat BPD justru kurang menggembirakan. BPD kerapkali disematkan sebagai "Kantor Penampung Istri" karena fungsinya justru sebagai penampung PNS Daerah perempuan yang harus mendampingi suami yang bertugas di ibukota. Badan Penghubung Daerah juga seringkali disikapi sebagai tempat pengasingan bagi PNS Daerah yang tidak berkinerja di Perangkat Daerah lain. Untuk itu, peningkatan kapasitas Badan Penghubung Provinsi sebagai perantara sinergitas pusat daerah menuju pemerataan pembangunan nasional menjadi amat relevan.

Fungsi yang melekat pada suatu Badan Penghubung terutama sebagai *liaison office of local government* adalah menjadi perantara kepentingan daerah terutama pada bidang sosial politik dan ekonomi. Pada bidang ekonomi, Badan Penghubung dapat menjadi perantara pembangunan ekonomi daerah yang terintegrasi dengan rantai pembangunan ekonomi nasional dan internasional. Dominasi perekonomian yang berputar di Pulau Jawa perlu segera ditangkap oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan peran badan penghubung sebagai penjemput modal dalam negeri dan luar negeri yang terpusat di Pulau Jawa.

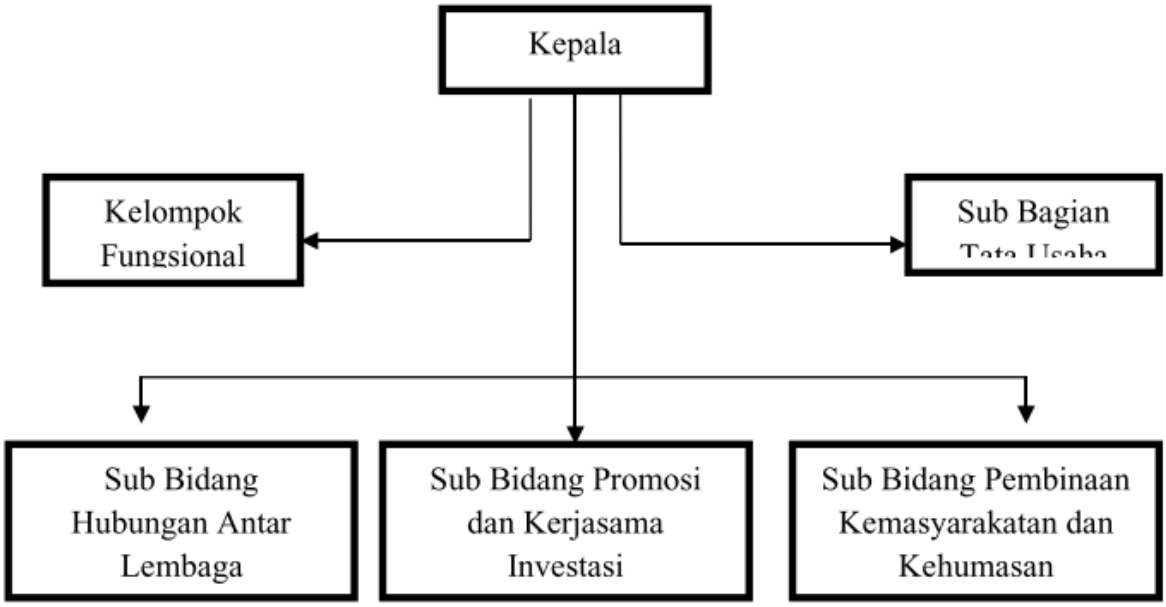
Desain Institusional BPD sebagai *Liaison Office* Pemerintah Daerah

Identifikasi level organisasi Badan Penghubung Daerah

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh pejabat eselon IIIa. Struktur organisasinya terdiri dari satu Kepala Badan yang membawahi maksimal tiga subbidang dan satu subbagian tata usaha. Hal ini merupakan anomali tersendiri karena dalam peraturan tersebut, hanya kepala badan

Hak Cipta © 2024, Ray Ferza.

penghubung daerah saja yang disebutkan sebagai ‘kepala badan’ tapi tidak menduduki eselon IIa sebagaimana perangkat daerah lain yang menggunakan nomenklatur badan. Peraturan seperti UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN turut menyatakan bahwa Kepala Badan Daerah Provinsi setara dengan Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama.



Sumber: Pergub NTT Nomor 88 Tahun 2016

Berikut gambar struktur organisasi dari Badan Penghubung Provinsi NTT yang lazim digunakan oleh para Badan Penghubung Daerah lain. Berdasarkan struktur seperti itu, Kepala Badan cenderung tereksploitasi dengan bobot kinerja yang sangat besar. Meskipun secara konseptual Kepala Badan memberikan laporan kepada Sekretaris Daerah dan menerima arahan dari Sekretaris Daerah, pada praktiknya Kepala Badan terbebani tugas koordinatif yang lebih besar di ibukota. Kehadiran sehari-hari Sekretaris Daerah secara fisik bertempat di Daerah bukan di ibukota meskipun intensitas Sekretaris Daerah dalam menjembatani sinergitas pemerintah daerahnya dengan pemerintah pusat terbilang cukup tinggi.

Fungsi Badan Penghubung juga mengalami kendala serius bila menjabat eselon IIIa dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menuntut koordinasi dengan pejabat tinggi seperti para menteri, para duta besar, para pimpinan BUMN, Gubernur DKI Jakarta, dan para calon investor. Rentang perbedaan hirarki jabatannya terlalu jauh sehingga cenderung tidak mampu menghasilkan putusan yang konkret.

Selain itu, posisi eselon IIIa juga tidak diberikan mata anggaran khusus di dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) sehinga menyulitkan Badan Penghubung untuk mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya teknis. Kepala Badan perlu dibentuk setingkat eselon IIa supaya lebih optimal dalam menjalankan fungsi koordinatif yang. Selain itu, kedudukan jabatan setingkat eselon IIa mampu memperkecil ‘eselonering gap’ jika Kepala Badan berkewajiban menggantikan Gubernur dalam rapat-rapat ketika Gubernur berhalangan hadir.

Meninjau kebijakan sumberdaya manusia birokrasi pemerintahan terkini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi maka kedepan perlu

Hak Cipta © 2024, Ray Ferza.

dirumuskan struktur organisasi Badan Penghubung Daerah yang ramping tapi kaya akan fungsi. Untuk itu, Kepala Badan Penghubung Daerah perlu diperkuat pejabat fungsional yang relevan antara lain, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perancang peraturan perundang-undangan, perencana, pranata hubungan kemasyarakatan, analis kebijakan, statistisi, pranata komputer, analis kepegawaian, pengelola pengadaan barang/jasa dan bendahara keuangan. Komposisi pejabat fungsional yang demikian dibentuk karena susunannya terkait dengan fungsi-fungsi Badan Penghubung sebagai kantor perwakilan yang membutuhkan kualitas dalam mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bersama dengan Kementerian terkait yang berkantor di Jakarta; Perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun *drafting* dokumen resmi yang menghasilkan keputusan penting mengenai kerjasama dengan pihak terkait seperti negara sahabat, pelaku usaha, BUMN, dan sebagainya; Statistisi untuk menghimpun data dan mengolah data sebagai landasan penyusunan keputusan; Perencana untuk mengelola sinergitas dokumen perencanaan pusat-daerah dari hulu ke hilir; Pranata hubungan kemasyarakatan untuk menjadi *person in contact* bagi kantor Badan Penghubung; Analis kebijakan sebagai pengendali kualitas *output* & *outcome* dari sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan ole Badan Penghubung.

Subordinat eselonering dari Kepala Badan cukup satu eselon III yang menjadi sekretaris badan dan satu eselon IV menjadi subbagian tata usaha dengan mempertimbangkan satu unit khusus. Unit khusus tersebut membidangi fungsi yang strategis dan spesifik, semisal sekretariat kerjasama dengan entitas penting yang berkantor di Jakarta, misal sekretariat *sister city* dengan kedutaan negara terkait**.**

Struktur Ideal Badan Penghubung Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Pengorganisasian Perangkat Daerah:

Eselon IIa (Kaban) -> Eselon IIIa (Sesban) -> Eselon IV (Ketatausahaan)
↓
Kelompok Jabatan Fungsional: pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perancang peraturan perundang-undangan, perencana, pranata hubungan kemasyarakatan, analis kebijakan, statistisi, pranata komputer, analis kepegawaian, pengelola pengadaan barang/jasa dan bendahara keuangan (relevan dan sesuai kebutuhan)

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, para SDM didalamnya perlu diperkuat dengan pengendalian kinerja berbasis renumerasi yang setimpal. Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi yang kaya akan fungsi ini juga menjustifikasi Kepala Badan selaku eselon IIa. Selaku pimpinan, Kepala Badan akan bertugas melakukan pembinaan kepada para pejabat fungsional sebagai subordinatnya. Ketercapaian setiap akumulasi indikator kinerja para pejabat fungsional secara bersamaan menjadi ketercapaian indikator kinerja bagi Kepala Badan selaku atasan langsung. Indikator kinerja, baik individu dan organisasi dibentuk secara riil menyesuaikan kondisi faktual masing-masing pekerjaan dan berpengaruh langsung terhadap renumerasi.

Hak Cipta © 2024, Ray Ferza.

Rumusan tugas dan wewenang Badan Penghubung

Badan Penghubung menyusun rencana kerja seperti halnya perangkat daerah lain. Tugas-tugas untuk melakukan fasilitasi tetap harus dipertahankan oleh Badan Penghubung dengan penguatan tugas organisasi dari sisi ekonomi dan sosial politik, dalam sasaran kinerja bisa dibuat konkret semisal berapa target interaksi dengan perusahaan yang berkantor di Jakarta, interaksi dengan Kedutaan Besar Negara Sahabat, interaksi dengan pemerintah pusat dst.

Dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas, Badan Penghubung menjadi pengendali frekuensi pelaksanaan tugas perangkat daerah teknis yang bersifat koordinasi perjalanan dinas ke Pusat. Setiap perjalanan dinas yang dilangsungkan oleh perangkat daerah merupakan kelanjutan dari *deadlock* koordinasi yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh Badan Penghubung menjadi suatu hal yang penting untuk meningkatkan efisiensi kinerja koordinasi pusat-daerah.

Badan Penghubung perlu memiliki ekosistem penyaluran kepentingan yang terintegrasi dengan para *stakeholders* (termasuk perangkat daerah). Ekosistem ini nanti menjadi landasan bagi indikator efektivitas penyaluran kepentingan daerah di Jakarta dan sebaliknya (Jakarta ke Daerah). Setiap hasil *output* dari Badan Penghubung meskipun sifatnya hanya advis harus jelas *cascading*nya dalam dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme interaksi antara DPD RI dengan Badan Penghubung dalam menyalurkan dan menerima aspirasi hubungan pusat-daerah perlu digariskan secara linier karena keduanya memiliki irisan fungsi yang berkelindan, misalnya baik Badan Penghubung maupun DPD RI sama-sama membawa aspirasi masyarakat daerah di Jakarta dan sama-sama memiliki kapasitas untuk menghimpun kritik terhadap kebijakan Pemerintah yang berlaku di daerah. Meskipun DPD RI tidak berkewajiban untuk melaporkan kinerjanya ke Gubernur.

Kewenangan Delegatif kepada BPD (Analogi Kepala BPD dengan Administrator Kawasan Khusus)

Tugas dan Wewenang dari Badan Penghubung bersifat dependen pada putusan Gubernur. Meskipun demikian, kewenangan-kewenangan tertentu dapat didelegasikan kepada seorang personel yang telah diberikan kekuasaan oleh Gubernur seperti yang terjadi pada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Administrator KEK dapat memberikan persetujuan pada sejumlah jenis perizinan di seluruh tingkatan pemerintahan. Pada Badan Penghubung Daerah perlu dirumuskan kebijakan untuk membuka ruang diterapkannya pendelegasian kewenangan kepada personel yang berkantor di Badan Perhubungan Daerah. Untuk itu, diawal tahun perlu ditetapkan produk hukum daerah yang memastikan daftar kewenangan yang relevan jika didelegasikan kepada Badan Penghubung Daerah di Jakarta sehingga Badan Penghubung dapat mempersiapkan teknis pengorganisasiannya.

SIMPULAN

Relevansi eksistensi institusional BPD, sejatinya berpijak pada kebutuhan pemerintah daerah dalam menjawab tujuan pembangunan daerah yang mengandalkan poros sumberdaya pembangunan di ibukota. Secara dimensional, pembangunan tersebut terefleksikan dalam dimensi ekonomi dan sosial-politik yang dalam konteks institusional BPD, dicapai melalui sinergitas pemerintah pusat dan daerah. Lanskap perekonomian yang mendorong urjensitas optimalisasi fungsi BPD adalah berkaitan dengan penyerapan penanaman modal daerah *via* perputaran ekonomi di ibukota. Pada titik ini, penanaman modal dan ekspor daerah menampilkan fenomena jawa-sentris dimana pulau jawa mewakili setengah dari penanaman modal nasional.

Hak Cipta © 2024, Ray Ferza.

Adapun, dimensi sosial politik juga merefleksikan disparitas dimana sentralitas pembangunan yang diindikasikan melalui kerawanan sosial politik ternyata didominasi oleh daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

Bedasarkan praktik-praktik mancanegara terkait *liaison office* pemerintahan subnasional di ibukota, BPD perlu didesain dengan mengutamakan fungsi yang secara konkret mampu menjawab prakondisi dari pembangunan daerah. BPD tidak hanya berkutat pada kerja administrasi umum, dimana *liaison office* diharapkan dapat melayani masyarakat perantauan di ibukota, namun BPD perlu berkinerja pada pekerjaan-pekerjaan fungsional yang memiliki indikator kinerja konkret dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dan sosial politik di daerah. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, momentum reformasi birokrasi yang mencoba menggeser pembangunan administrasi publik kepada koridor fungsional, BPD dituntut segera meningkatkan status eselonering (mempersempit eselonering gap antara pimpinan BPD dengan *stakeholders* di ibukota) dan merampingkan birokrasi menuju organisasi yang kaya akan fungsi (merasionalisasi jumlah personel eselon dan meningkatkan jumlah personel jabatan fungsional).

REFERENSI

Callanan, M. 2004. "Local Government and The European Union." In *Local Government in Ireland: Inside Out*, edited by Justin F Callanan, Mark; Keogan, 1–573. Dublin.

Habibah, Astrid Faidlatul. 2019. "Sri Mulyani Imbau Pemda Kurangi Perjalanan Dinas." antaranews. https://www.antaranews.com/berita/1163059/sri-mulyani-imbau-pemda-kurangi-perjalanan-dinas.

Li, Cheng. 2014. "The Local Factor in China's Intra-Party Democracy." In *Democratization in China Korea and Southeast Asia?: Local and National Perspectives*, edited by Lynn T Zhou, Kate Xiao; Rigger, Shelley; White III, 87–110. New York: Routledge.

Li, Mingjiang. 2017. "Central-Local Interactions in Foreign Affairs." In *Assessing the Balance of Power in Central-Local Relations in China*, edited by John A Donaldson. New York: Routledge.

Loftis, Matt W., and Jaclyn J. Kettler. 2015. "Lobbying from Inside the System: Why Local Governments Pay for Representation in the U.S. Congress." *Political Research Quarterly* 68 (1): 193–206. doi:10.1177/1065912914563764.

Maharani, Tri, Dadan Kurnia, and Toto Kushartono. 2021. "Efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh Dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Aceh Ke Pemerintah Pusat Guna Memajukan Pembangunan Daerah Aceh." *Jurnal Caraka Prabu* 5 (2): 127–40. doi:10.36859/jcp.v5i2.438.

Simanullang, R.N.S.R; Adimulyo, Rayhan Ahmad; Wisesa, Satrio Panji; Wardani, Sulistia; Faisal, Muhammad. 2022. "Efektivitas Badan Penghubung Dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Daerah Dan Pembangunan Kepada Pemerintah Pusat." *E-Journal IPDN* 4 (1): 89–98.

Smith, Graeme. 2009. "Political Machinations in a Rural County." *China Journal* 31 (62): 29–59. doi:10.1086/tcj.62.20648113.

Wang, Lei. 2014. "Forging Growth by Governing the Market in Reform-Era Urban China." *Cities* 41. Elsevier Ltd: 187–93. doi:10.1016/j.cities.2014.02.008.

Xu, Cora Lingling. 2019. "'Diaspora at Home': Class and Politics in the Navigation of Hong Kong Students in Mainland China's Universities." *International Studies in Sociology of Education* 00 (00). Routledge: 1–18. doi:10.1080/09620214.2019.1700821.

Hak Cipta © 2024, Ray Ferza.

Yuejin, Jing. 2014. "China's Interest Coordination Mechanism." In *China's Political Development: Chinese and American Perspectives*, edited by Yu Lieberthal, Kenneth; Li, Cheng; Keping, 308–40. Washington, DC: Brooking Institutions Press.

Hak Cipta © 2024, Ray Ferza.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan Kabupaten Klungkung pada Era Society 5.0

Richard Togaranta Ginting[1], Sang Ayu Nyoman Pujiati[2], Agus Aditya Wiguna[3]
1,2,3 Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi FHISIP Universitas Terbuka, UPBJJ Denpasar, Bali

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan Kabupaten Klungkung pada era society 5.0. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data melalui studi literatur dan bahan bacaan terkait, serta melakukan observasi dan dokumentasi. Tulisan ini menjelaskan bahwa program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi meningkat yang berujung peningkatan kreativitas masyarakat dan menipiskan kesenjangan akses informasi.

Kata kunci: *Transformasi Perpustakaan, Inklusi Sosial, Perpustakaan Kabupaten Klungkung*

PENDAHULUAN

Perpustakaan adalah milik semua kalangan masyarakat baik anak-anak, muda, maupun tua. Perpustakaan dapat menyediakan akses tanpa adanya batas dalam pengetahuan dan informasi bagi setiap individu, tanpa adanya memandang latar belakang maupun tanpa memandang status sosial. Menurut Prof. Sulistyo Basuki, perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah Gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Dalam pengertian buku dan terbitan lainnya termasuk di dalamnya semua bahan cetak, buku, majalah, laporan, pamflet, *prosiding*, manuskrip (naskah), lembaran musik, berbagai karya musik, berbagai karya media audio visual seperti film, slide, kaset, piringan hitam, bentuk mikro seperti mikrofilm, *mikrofis*, dan mikro buram (*micro opaque*). Webster menyatakan bahwa perpustakaan merupakan kumpulan buku, manuskrip, dan bahan pustaka lainnya yang digunakan untuk keperluan studi `atau bacaan, kenyamanan, atau kesenangan. Perpustakaan menjadi tempat yang dimana setiap orang dapat memperluas wawasannya dan juga dapat meningkatan kualitas hidup melalui akses terbuka ke dalam sumber pengetahuan. Perpustakaan menyediakan akses bagi semua orang untuk kegiatan belajar, berkembang , dan juga dapat menikmati pengetahuan tanpa adanya diskriminasi terhadap orang berkebutuhan khusus.

Setiap orang berhak mendapatkan informasi karena akses ke pengetahuan merupakan hak dasar yang dapat mendukung kemajuan serta kesejahteraan terhadap individu maupun masyarakat. Setiap orang berhak mendapatkan informasi untuk mendukung hak mereka dalam belajar, berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus untuk memastikan dalam kesetaraan akses terhadap informasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Hak Cipta © 2024, Richard Togaranta Ginting1, Sang Ayu Nyoman Pujiati2, Agus Aditya Wiguna.

Perpustakaan wajib menyediakan koleksi yang dibutuhkan oleh penggunanya untuk memastikan akses terhadap informasi yang tepat serta relevan dan pengetahuan dalam mendukung kebutuhan mereka kemudian juga setiap orang berhak mendapatkan informasi sebagai bagian dari hak dasar mereka untuk bekerja maupun berkembang. Perpustakaan merupakan pusat dari ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk dalam mendukung proses pendidikan baik formal maupun informal. Informasi yang relevan bagi setiap karakter pengguna akan dapat membantu dalam study mereka serta mengembangkan potensi yang mereka punya ataupun menemukan potensi baru yang mereka miliki.

Pengguna perpustakaan beraneka ragam mulai dari latar belakang, kebutuhan informasi, dan tujuan datang ke perpustakaan. Keberagaman ini dapat mencerminkan peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan serta sebagai media yang bersifat inklusif. keanekaragaman ini mencangkup usia, latar belakang pendidikan, kebutuhan khusus atau disabilitas, latar belakang sosial dan ekonomi, budaya dan bahasa, serta hobi dan ketertarikan. Dari keanekaragaman yang ada, maka disini akan membahas mengenai pengguna yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Pengguna dengan kebutuhan khusus atau kaum difabel membutuhkan fasilitas maupun koleksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka seperti buku braille dan fasilitas yang ramah terhadap kaum disabilitas.

Koleksi harus menyesuaikan dengan karakter penggunanya yang sangat beragam. Keberagaman karakter pengguna ini juga harus diimbangi dengan koleksi yang beragam pula khususnya dalam kaum difabel. Untuk karakter khususnya kaum difabel, maka perpustakaan wajib menyediakan koleksi sesuai dengan minatnya seperti koleksi buku Braille dan audio book.

Tujuan utama perpustakaan klungkung adalah menyediakan layanan perpustakaan untuk semua orang yang tertuang dalam visi misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung yaitu Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera kemudian misinya yaitu

1. Menguatkan dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana bentuk transformasi dari eklusif menjadi inklusi sosial pada perpust?

TINJAUAN TEORITIS

Perpustakaan umum

Perpusnas RI pada tahun 2011 menetapkan standar tertulis yang menyatakan bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukkan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat (Zen & Wuryani, 2011). Menurut IFLA 2010, perpustakaan umum memberikan layanan tanpa memandang ras, kebangsaan, usia, jenis kelamin, agama, bahasa, difabel, status sosial, dan ekonomi. Perpustakaan umum merupakan sebuah lembaga yang menyediakan akses gratis ataupun terbuka kepada masyarakat umum untuk berbagai jenis koleksi seperti buku, media digital, dan sumber informasi lainnya. Dengan adanya perpustakaan umum dapat mendukung dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan budaya masyarakat.

Hak Cipta © 2024, Richard Togaranta Ginting1, Sang Ayu Nyoman Pujiati2, Agus Aditya Wiguna.

Perpustakaan umum berfungsi sebagai pusat komunitas yang dapat mempromosikan literasi, pembelajaran sepanjang hayat, dan inklusi sosial.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial

Dalam pasal 5 Undang- undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat terhadap perpustakaan, yaitu:

1. Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus;
3. Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing

Perpustakaan perlu di rancang agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dimana setiap orang maupun sekelompok orang tidak membeda-bedakan ekonomi, budaya, jender dan keadaan fisik seseorang. Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan institusi yang patut kita terapkan dimana saja dan kapan saja karena dengan inklusi sosial seorang yang berkebutuhan khusus tidak akan minder terhadap orang yang ada di sekitarnya. Perpustakaan berbasis inklusi sosial sangat bermanfaat bagi semua orang dengan adanya inklusi sosial maka tidak ada lagi orang yang suka mem*bully* maupun merendahkan orang yang berkebutuhan khusus. Perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk menyetarakan kaum difabel dengan non difabel serta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka melalui menyediakan ruang bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, pengetahuan, dan belajar sepanjang ayat.

Koleksi khusus perpustakaan

Koleksi perpustakaan merupakan kumpulan materi dan sumber informasi yang disimpan, dikelola, dan diorganisasi oleh perpustakaan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi para pengguna. Koleksi mencakup berbagai jenis yang dapat diakses oleh masyarakat, baik dalam format fisik maupun digital. Jenis koleksi perpustakaan yaitu buku, majalah, jurnal, surat kabar, multimedia, e-*resources* dan referensi. Dalam perpustakaan tidak hanya terdapat koleksi untuk non difabel saja melainkan adanya koleksi khusus difabel yaitu seperti koleksi braille dan buku audio. Koleksi braille dan buku audio merupakan bagian penting dari layanan perpustakaan yang ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna di fabel. Dengan menyediakan koleksi braille dan buku audio, perpustakaan dapat memainkan peran penting dalam memastikan inklusivitas dan aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk pengguna yang memiliki keterbatasan khusus.

Fasilitas perpustakaan berbasis inklusi

Fasilitas perpustakaan berperan untuk memberikan kelancaran dan kenyamanan bagi pengunjung perpustakaan dan petugasnya. Tersedianya fasilitas perpustakaan yang memadai seperti gedung dan ruangan yang bersih dan nyaman, koleksi bahan pustaka yang sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan, perabotan dan perlengkapan seperti rak buku, meja dan kursi baca, loker penitipan barang bagi pengunjung. Fasilitas perpustakaan juga harus bisa mengikuti perkembangan jaman sehingga perlu menyediakan akses internet dan sarana pendukungnya seperti komputer dan laptop. Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan dapat mendukung bagi semua anggota masyarakat, termasuk pengguna difabel. Dengan menyediakan fasilitas perpustakaan dapat menjadi pusat komunitas yang memberdayakan semua individu, mendorong kesetaraan, dan meningkatkan kualitas hidup

Hak Cipta © 2024, Richard Togaranta Ginting1, Sang Ayu Nyoman Pujiati2, Agus Aditya Wiguna.

bagi semua pengguna. Perpustakaan Kabupaten Klungkung telah menyediakan fasilitas perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dimana perpustakaan ini menyediakan fasilitas bagi pengguna disabilitas. Fasilitas yang ada di Perpustakaan Kabupaten Klungkung bagi para pengguna disabilitas yaitu jalur disabilitas dan toilet disabilitas. Jalur disabilitas dan toilet disabilitas merupakan fasilitas yang penting dalam memastikan aksesibilitas dan inklusi bagi pengguna disabilitas. Jalur disabilitas, seperti jalur khusus untuk kursi roda yang dapat membantu pengguna di fabel berpindah dengan lebih mudah dan aman kemudian juga dengan adanya toilet disabilitas dapat memenuhi kebutuhan pengguna difabel, memastikan kenyamanan, keamanan, dan kemandirian dalam penggunaannya. Kedua fasilitas ini adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang. Berikut ini gambar fasilitas perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ada di Perpustakaan Kabupaten Klungkung :



Gambar 1: Jalur disabilitas



Gambar 2: Toilet disabilitas

PEMBAHASAN

Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi di Perpustakaan Klungkung

Dalam upaya mempertahankan eksistensinya, perpustakaan perlu melakukan transformasi. Transformasi ini akan mengarah ke perpustakaan yang berbasis inklusi sosial dengan tujuan menguatkan literasi sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Perpustakaan perlu menyediakan fasilitas yang ramah terhadap setiap karakter pengguna perpustakaan, khususnya kaum difabel agar mereka juga bisa menikmati kegiatan membaca guna meningkatkan taraf hidup mereka. Dari segi fasilitas, perpustakaan Klungkung telah dirancang sedemikian rupa agar aksesnya mudah di jangkau oleh kaum difabel. Sebagai contoh, terdapat 2 pintu akses keluar masuk yang ada di depan dan di sebelah samping kanan gedung. Pintu akses depan diperuntukkan bagi masyarakat normal dan pintu samping kanan gedung di buat sedikit menanjak untuk akses pengguna kursi roda. Selain itu terdapat fasilitas toilet bagi difabel yang memiliki pintu akses yang lebih besar untuk memudahkan mereka menggunakan toilet tersebut. Ruang baca di perpustakaan Klungkung dibuat sangat luas, sehingga memungkinkan pengguna leluasa dalam melakukan kegiatan membaca. Selain itu, disana juga disediakan ruangan khusus bagi mereka yang ingin berdiskusi.

Setiap fasilitas yang disebutkan tadi berbeda dengan perpustakaan Kabupaten Klungkung sebelum tahun 2023. Sebelumnya, gedung perpustakaan yang digabung menjadi satu dengan Kedinasan, sangat sempit dan sulit untuk diakses. Ruang baca dan tata letak rak koleksi sangat berimpitan sehingga terasa kurang lega bila melakukan pengambilan koleksi. Ini disebabkan ruang gedung yang tidak terlalu luas namun memiliki koleksi yang lumayan banyak. Sehingga

Hak Cipta © 2024, Richard Togaranta Ginting1, Sang Ayu Nyoman Pujiati2, Agus Aditya Wiguna.

setiap koleksi harus di pajang dan setiap rak harus disusun sedemikian rupa agar muat dalam gedung perpustakaan yang minimalis. Selain itu, kurangnya pencahayaan menjadi kendala dalam membaca disana. Ruangan yang sempit dan jendela yang bersebelahan dengan gedung lain menyebabkan cahaya sulit menjangkau seluruh ruangan. Sehingga ruangan terasa redup dan menyebabkan ketidaknyamanan ketika membaca.

Beralih ke sisi koleksi, perpustakaan Klungkung masih belum memiliki koleksi khusus seperti Braille dan Audio *books*. Tentunya hal ini menjadi tantangan dan kendala bagi perpustakaan dalam memberdayakan masyarakat berkebutuhan khusus. Koleksi khusus tentunya menjadi media dasar yang bisa dimanfaatkan bagi kaum difabel untuk memperoleh pengetahuan dalam upaya meningkatkan taraf hidup. Penyediaan koleksi khusus tentunya menjadi topic utama yang harus dipikirkan perpustakaan dalam kegiatan pengadaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada juga menjadi faktor penting terjadinya tranformasi berbasis inklusi sosial di perpustakaan Klungkung. Tanpa adanya SDM yang berkualitas maka keberfungsian perpustakaan akan terhambat. Pustakawan selaku SDM yang dada di perpustakaan ini, perlu untuk menjadi sosok yang ramah dan terampil dalam menarik perhatian masyarakat khususnya kaum difabel agar mau untuk memanfaatkan perpustakaan sebagaimana mestinya. mereka perlu menyusun strategi agar kaum difabel tidak malu datang ke perpustakaan caranya dengan memperlakukan mereka secara layak dan ramah agar mereka tidak sungkan bertanya terkait kebutuhan mereka. Pustakawan perlu melayani mereka seperti memilihkan atau mengambilkan koleksi apa yang mereka inginkan sehingga mereka tidak kesusahan ketika membaca. Tanpa adanya diskriminasi, kaum difabel akan merasa nyaman, dihargai dan tidak dibeda-bedakan dengan kaum non difabel. Jadi transformasi tidak hanya terjadi pada fasilitas berupa gedung namun juga terjadi pada pelayanan yang diberikan pustakawan terhadap setiap karakter pengguna perpustakaan tanpa terkecuali.

Pada era 5.0 ini, pustakawan dituntut untuk ikut dalam perkembangan zaman agan posisinya tidak tergantikan oleh mesin. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kemampuan dan *skill* dalam berinteraksi terhadap pengguna. Pustakawan harus bertransformasi agar mampu berkomunikasi dengan baik tidak hanya pasif menunggu namun juga aktif dalam mencari pemustaka. Member pelayanan yang maksimal dan selalu bersikap ramah kepada pengguna akan menjadikan pustakawan lebih dihargai di masa yang akan datang.

Perpustakaan Klungkung sebelum 2023

Sebelum diresmikannya perpustakaan Daerah Kabupaten Klungkung pada tahun 2023, tempat penyimpanan koleksi milik perpustakaan masih di gabung menjadi satu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Disana merupakan gedung dinas yang terdiri dari 2 lantai dengan lantai pertama dialokasikan sebagai perpustakaan dan di lantai kedua dialokasikan menjadi kantor kedinasan. Sempat terjadi beberapa kali penataan ulang sebelum gedung baru perpustakaan diresmikan.



Gambar 3 : Kondisi Perpustakaan Kabupaten Klungkung setelah 2023

Hak Cipta © 2024, Richard Togaranta Ginting1, Sang Ayu Nyoman Pujiati2, Agus Aditya Wiguna.



Gambar 4: Rak Buku Perpustakaan Kabupaten Klungkung



Gambar 5: Ruang Baca di Perpustakaan Kabupaten Klungkung

Peran dan Tantangan Perpustakaan Kabupaten Klungkung

Perpustakaan Kabupaten Klungkung memainkan peran penting dalam masyarakat yang menyediakan berbagai layanan dan sumber daya yang mendukung pendidikan, literasi, dan perkembangan komunitas. Peran utama Perpustakaan Kabupaten Klungkung yaitu sebagai pusat sumber informasi dan pengetahuan bagi semua pengguna yaitu menyediakan akses berupa buku, majalah, jurnal, dan sumber daya digital dengan adanya akses informasi akan dapat memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan informasi terbaru kemudian adanya sumber referensi yang daoat menyediakan layanan referensi untuk membantu pengguna dalam menemukan informasi yang mereka inginkan, baik untuk tujuan pribadi, akademik, maupun profesional.

Perpustakaan Kabupaten Klungkung berperan juga dalam meningkatkan literasi yaitu dengan cara melakukan literasi yang dinama dengan Inovasi Gema Arca (Gerakan masyarakat gemar Membaca) , inovasi yang diinisiasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat sehingga menjadi masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Adapun pelaksanaannya dengan pelayanan masyarakat secara langsung melalui kegiatan seperti layanan WIKAN (Wahana Literasi Kantor), LITAKU (Literasi di Tempat Wisata & Kuliner), LAPAK (Layanan Alat Permainan Anak Kurang Mampu) Pinter (Pelayanan Literasi Antar Kerumah), layanan berbasis inklusi sosial (Mola Bali) dan PUSPA MUNGGAH (Perpustakaan Terapan Menuju Klungkung Sejahtera) merupakan penerapan literasi yang diambil dari buku ilmu terapan dengan kode klasifikasi 600 dengan cara memberikan buku terapan, bimbingan , kerja sama dan pelatihan sehingga dapat membuka lapangan kerja, memingkatkan pendapatan menuju peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sejalan dengan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berikut ini beberapa

Hak Cipta © 2024, Richard Togaranta Ginting1, Sang Ayu Nyoman Pujiati2, Agus Aditya Wiguna.

gambar perpustakaan Kabupaten Klungkung selama mahasiswa Universitas Terbuka Denpasar melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tahun 2023 dalam pelayanan masyarakat secara langsung :



Gambar 6
Melaksanakan kegitan WIKAN di Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.



Gambar 7
Melaksanakan kegiatan WIKAN di Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
.



Gambar 8
Melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling atau mobil layanan berbasis inklusi sosial (Mola Bali).



Gambar 9
Melaksanakan kegiatan LITAKU di Laklak Pengangon.



Gambar 10
Melaksanakan kegiatan perpustakaan Keliling ke SD Negeri Tohpati

Perpustakaan Kabupaten Klungkung tidak hanya peran saja melainkan menghadapi berbagai tantangan dalam tiga aspek utama yaitu pendanaan, sumber daya manusia, dan aksebilitas bagi pengguna disabilitas. Berikut ini penjelasan tentang tantangan tiga aspek yaitu :

Hak Cipta © 2024, Richard Togaranta Ginting1, Sang Ayu Nyoman Pujiati2, Agus Aditya Wiguna.

1. Perdanaan yang tidak stabil yang dimana perpustakaan kabupaten klungkung bergantung pada anggaran pemerintah daerah yang dapat berubah setia tahunnya. Ketidakpastian ini dapat menyulitkan perencanaan jangka panjang dan implementasi program-program berkelanjutan kemudian juga keterbatasan anggaran, hal ini dapat membatasi kemampuan perpustakaan untuk memebeli bahan bacaan baru, teknologi, dan sumber daya lainnya. Selain itu juga biaya operasional yang tinggi berupa biaya untuk pemeliharaan bangunan, pengadaan dan pembaruan teknologi dapat menjadi beban besar pada anggaran perpustakaan.
2. Tantangan perpustakaan Kabupaten Klungkung dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu kekurangan staf karena anggaran yang terbatas maka dengan anggaran yang terbatas tidak dapat mempekerjakan staf yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional.
3. Tantangan perpustakaan Kabupaten Klungkung dari segi aksebilitas bagi pengguna disabilitas yaitu perlu menyediakan buku dan materi dalam format yang dapat diakses oleh pengguna difabel seperti, buku braille dan audio *book*, selain itu juga staf perpustakaan harus dilatih dalam melayani pengguna disabilitas agar mampu memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna di fabel.

Kesimpulan

Pada tanggal 16 Februari 2023 adalah hari dimana Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Klungkung diresmikan. Letak akurat dari gedung ini berada di Jl. Ngurah Rai, Semarapura Kauh, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali. Peresmian ini dilakukan oleh Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando dan I Nyoman Suwirta selaku Bupati Klungkung. Gedung tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp. 4,5 Miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Tahun 2022. Dalam upaya mempertahankan eksistensinya, perpustakaan perlu melakukan transformasi. Transformasi ini akan mengarah ke perpustakaan yang berbasis inklusi sosial dengan tujuan menguatkan literasi sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Perpustakaan perlu menyediakan fasilitas yang ramah terhadap setiap karakter pengguna perpustakaan, khususnya kaum difabel agar mereka juga bisa menikmani kegiatan membaca guna meningkatkan taraf hidup mereka. Dari segi fasilitas, perpustakaan Klungkung telah dirancang sedemikian rupa agar aksesnya mudah di jangkau oleh kaum difabel.

Sebelum diresmikannya perpustakaan Daerah Kabupaten Klungkung pada tahun 2023, tempat penyimpanan koleksi milik perpustakaan masih di gabung menjadi satu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Klungkung. Disana merupakan gedung dinas yang terdiri dari 2 lantai dengan lantai pertama dialokasikan sebagai perpustakaan dan di lantai kedua dialokasikan menjadi kantor kedinasan. Sempat terjadi beberapa kali penataan ulang sebelum gedung baru perpustakaan diresmikan.

Perpustakaan Kabupaten Klungkung berperan juga dalam meningkatkan literasi yaitu dengan cara melakukan literasi yang dinama dengan Inovasi Gema Arca (Gerakan masyarakat gemar Membaca), inovasi yang diinisiasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat sehingga menjadi masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Adapun pelaksanaannya dengan pelayanan masyarakat secara langsung melalui kegiatan seperti layanan WIKAN (Wahana Literasi Kantor), LITAKU (Literasi di Tempat Wisata & Kuliner), LAPAK (Layanan Alat Permainan Anak Kurang Mampu) Pinter (Pelayanan Literasi Antar Kerumah), layanan berbasis inklusi sosial (Mola Bali) dan PUSPA MUNGGAH (Perpustakaan Terapan Menuju Klungkung Sejahtera)

Hak Cipta © 2024, Richard Togaranta Ginting1, Sang Ayu Nyoman Pujiati2, Agus Aditya Wiguna.

merupakan penerapan literasi yang diambil dari buku ilmu terapan dengan kode klasifikasi 600 dengan cara memberikan buku terapan, bimbingan , kerja sama dan pelatihan sehingga dapat membuka lapangan kerja, memingkatkan pendapatan menuju peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sejalan dengan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan Kabupaten Klungkung tidak hanya peran saja melainkan menghadapi berbagai tantangan dalam tiga aspek utama yaitu pendanaan, sumber daya manusia, dan aksebilitas bagi pengguna disabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan paper ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Terbuka
2. Dekan FHISIP Universitas Terbuka
3. Direktur UPBJJ UT Denpasar
4. Kepala Program Studi Perpustakaan Universitas Terbuka
5. Dosen Pembimbing Naskah

REFERENSI

W. T. Haryanti, "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial," *TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, vol. Vol 2 No 2, no. Vol 2 No 2 (2019): TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA), 2019.

D. U. W. D. Prasetyo2, "PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT," *VISI PUSTAKA*, Vols. Vol. 21, No. 1, no. Vol. 21, No. 1, April 2019, pp. 31-38, 2019.

R. Mahdi, "PERPUSTAKAAN UMUM BERBASIS INKLUSI SOSIAL: APA DAN BAGAIMANA PENERAPANNYA? (SEBUAH KAJIAN LITERATUR)," *FIHRIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vols. Vol. 15, No.2, no. Vol. 15, No.2, Juli-Desember 2020, pp. 1-15, 2020.

R. A. Rachman1*, "Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial," *Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran*, pp. 1-12, 2019.

R. Kurniasih1* and R. S. Saefullah1, "Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Perpustakaan Daerah Karanganyar," *Lentera Pustaka:Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, vol. 7 (2), pp. 149-160, 2021.

L. S. L. A. AyuWulansari1*, "DAMPAKTRANSFORMASIPERPUSTAKAANDESABERBASISINKLUSISOSIALTERHADAPKESEJAHTERAANMASYARAKAT," *JURNAL PUBLIS*, vol. Vol 5No2, pp. 34-47, 2021.

B. Sartika, "https://www.perpusnas.go.id/berita/gedung-baru-perpustakaan-daerah-klungkung-megah-dan-dukung-ekonomi-masyarakat," Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 16 02 2023. [Online]. Available: www.perpusnas.go.id. [Accessed 08 06 2024].

E. G. F. M. I. C. P. Ragil Tri Atmi1*, "Peningkatan literasi masyarakat melalui perpustakaan desa berbasis inklusi sosial," *JURNAL INOVASI HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT (JIPEMAS)*, vol. VOL. 5 NO. 3 , pp. 355-364, (2022).

Hak Cipta © 2024, Richard Togaranta Ginting1, Sang Ayu Nyoman Pujiati2, Agus Aditya Wiguna.

M. Huda, "PERPUSTAKAAN DAN MUTU PENDIDIKAN: PERAN DAN TANTANGAN PERPUSTAKAAN DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN KARAKTER," *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan,* Vols. Vol. 5, No. 2, pp. 342-364, 2017.

S. Aminah, "Peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Gayo Lues Dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial," *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam,* vol. Vol. 2 No. 1, pp. 6-12, 2023.

Hak Cipta © 2024, Richard Togaranta Ginting1, Sang Ayu Nyoman Pujiati2, Agus Aditya Wiguna.

Kode Etik *Public Relations* dalam *Climate Change Communication*: Tinjauan Literatur Sistematis

Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah
Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia, 16422, Depok, Indonesia
E-mail: riezkakhairunnisa@gmail.com, amadeanaomi07@gmail.com,
dr.irwansyah.ma@gmail.com

Abstrak

Perubahan iklim merupakan isu prioritas PBB dan masuk dalam 17 Target Sustainable Development Goals (SDG) PBB. IPRA (International Public Relations Association) sebagai pemimpin komunikasi perubahan iklim dari SDG 13 memiliki tanggung jawab meningkatkan kesadaran publik akan perubahan iklim dan upaya menghentikannya. IPRA menggunakan pedoman dari pasal kode etik IPRA dan mengimplementasikannya dalam komunikasi perubahan iklim. Ketika kode etik ini sangat penting untuk diterapkan dalam climate change communication, literatur terkait apakah praktisi PR saat ini sudah menggunakan kode etik tersebut, masih sangat kurang. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan penerapan kode etik dalam climate change communication dalam industri PR dan membandingkan studi yang telah dipublikasikan dalam konteks global. Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review standar PRISMA 2020, yaitu: 1) pertanyaan penelitian; 2) kriteria kelayakan dan sumber informasi; 3) strategi pencarian; 4) proses pemilihan literatur; dan 5) koding dan sintesis data. Dari analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai Kode Etik PR masih terfokus di negara Amerika Serikat, artikel mengenai topik ini semakin berkurang dari tahun ke tahun dan tidak ditemukan artikel yang membahas Kode Etik PR yang berkaitan dengan climate change communication. Kedepannya diharapkan semakin banyak penelitian mengenai PR terutama berkaitan dengan Kode Etik PR dan climate change communication.

***Kata Kunci**: Climate Change Communication, IPRA, Kode Etik Public Relations, Tinjauan Literatur Sistematis*

PENDAHULUAN

Laporan perubahan iklim yang dirilis oleh *United Nations* (UN) atau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 2022 mengeluarkan peringatan yang mengerikan mengenai perubahan iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya dan konsekuensi bencana yang mungkin akan terjadi. Perubahan iklim merupakan prioritas bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan PBB UNESCO dan Organisasi Meteorologi Dunia bersama-sama bertanggung jawab atas pengetahuan iklim dan penyuluhannya. Untuk melawan ancaman tersebut, pemerintah dan organisasi antar pemerintah telah memperkenalkan kebijakan selama bertahun-tahun, dengan tujuan yang berbeda, dan melibatkan pihak internasional dan pemangku kepentingan (Wang & Huan, 2024).

Salah satu pihak yang terlibat adalah *International Public Relations Association* (IPRA). Status penasehat IPRA di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghubungkannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. *Sustainable Development Goals* (SDG) yang dilahirkan oleh PBB pada tahun 2012 silam sendiri memiliki 17 target utama untuk menghasilkan tujuan universal yang mampu menangani tantangan lingkungan hidup, politik, dan ekonomi yang dihadapi di dunia. Salah satu target dari SDG yang perlu diperhatikan adalah target SDG 13 mengenai perubahan iklim, yang dimana IPRA merupakan pemimpin dalam komunikasi

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

perubahan iklim dari SDG 13 untuk "segera mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya" (IPRA, 2023).



Gambar 1. SDG 13
(Sumber: www.un.org)

Dengan menggunakan keahlian mereka, para anggota IPRA memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran publik akan perubahan iklim dan upaya untuk menghentikannya. Pada tahun 2020, David Attenborough mengatakan, "menyelamatkan planet ini sekarang menjadi masalah komunikasi". Oleh karena itu, komunikator memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi yang diperlukan terkait perubahan iklim, karena mereka adalah penghubung antara organisasi dan pemangku kepentingan (IPRA, 2023).

Menurut survei IPRA tahun 2022, perubahan iklim adalah topik utama PR. Sebanyak 81%, yang merupakan sebagian besar responden, memperkirakan bahwa perubahan iklim akan menjadi semakin penting dalam pekerjaan mereka dalam dua tahun ke depan, dan hampir 90% responden percaya bahwa profesi PR memiliki tanggung jawab untuk mengatasi perubahan iklim. Para profesional PR mengindikasikan bahwa melibatkan klien dalam aksi iklim merupakan tanggung jawab utama. IPRA percaya bahwa dengan hasil survei ini merupakan ajakan untuk bertindak bagi profesi komunikasi. IPRA memiliki posisi yang unik untuk memberikan dampak di seluruh dunia (IPRA, 2023).

Dalam melaksanakan komunikasi perubahan iklim, IPRA menggunakan pedoman 7 dari 18 pasal kode etik IPRA (IPRA *Code of Conduct*), yang merupakan penegasan perilaku profesional dan etis oleh anggota IPRA pada tahun 2011 lalu, dan mengimplementasikan kode etik tersebut dalam kaitannya dengan komunikasi perubahan iklim. Dalam melaksanakan komunikasi perubahan iklim, praktisi PR perlu menerapkan kode etik IPRA (IPRA, 2023):

- Pasal 2: bertindak dengan kejujuran dan integritas;
- Pasal 3: menetapkan kondisi moral untuk dialog;
- Pasal 4: terbuka dan transparan;
- Pasal 5: menghindari konflik personal;
- Pasal 7: menjamin kebenaran dan keakuratan;

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

- Pasal 8: tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan; dan
- Pasal 10: tidak menggunakan organisasi yang melayani kepentingan yang dirahasiakan

Penerapan ini mengacu pada tanggung jawab pribadi, organisasi, dan masyarakat dari seorang praktisi PR.

Etika dan moral menjadi instrumen hubungan masyarakat, namun dalam praktiknya sangat disayangkan tidak selalu diterapkan oleh para praktisi PR (Besio & Pronzini, 2014). Berdasarkan artikel CNBC, peran perusahaan PR dalam "*greenwashing*" telah menjadi sorotan publik, dimana mereka dituduh menghalangi aksi iklim dengan menyebarkan informasi palsu untuk menipu atas nama klien mereka. Di tahun 2021, sebuah studi yang diterbitkan di jurnal *Climatic Change* mendokumentasikan peran perusahaan PR dalam membantu perusahaan minyak dan gas yang paling menguntungkan di dunia untuk meningkatkan citra lingkungan mereka dan menghambat aksi perubahan iklim (Meredith, 2022).



Gambar 2. *Screen shot* berita
(Sumber: www.cnbc.com)

Salah satu contoh nyata dimana perusahaan PR membantu perusahaan minyak dan gas adalah kasus Edelman Canada dengan The David Suzuki Foundation (DSF) pada tahun 2008 silam. Edelman Canada, yang merupakan anak perusahaan Edelman Worldwide dan merupakan perusahaan PR terbesar di dunia, dikontrak oleh DSF untuk memberikan nasihat terkait strategi dalam mempengaruhi persepsi masyarakat Quebec tentang isu lingkungan hidup. Kesepakatan ini merupakan kesempatan bisnis yang bagus bagi Edelman, karena dapat membantu dalam meningkatkan citra perusahaannya. Setelah sepakat dengan DSF, Edelman Worldwide menyatakan bahwa mereka akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam upaya lingkungan mereka, bahkan menunjuk '*Global Environmental Manager*' dengan alasan untuk memperjuangkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan akan terlibat dalam mengurangi konsumsi energi dan jejak karbon. Namun, dua bulan kemudian, kantor Edelman yang ada di Inggris (Edelman UK), dikontrak oleh *Kingsnorth Power Station* (Pembangkit Listrik Kingsnorth) untuk melobi pemerintah agar mempertahankan izinnya untuk melanjutkan pembangunan pembangkit listrik batu bara pertama di Inggris dalam 20 tahun (Greenberg et al., 2011).

Bukan hanya itu, Edelman juga berencana untuk meluncurkan kampanye PR yang "agresif" untuk membujuk warga Kanada agar mendukung pembangunan Keystone XL Pipeline untuk mengirimkan *tar sands oil* yang kontroversial untuk diekspor, dan hal itu dibuktikan oleh

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

dokumen yang diperoleh oleh Greenpeace. Berdasarkan dokumen tersebut, kampanye PR tersebut juga mencakup kampanye 'tekanan' ('*pressure' campaign*) terhadap aktivis untuk mengalihkan perhatian dari misi mereka, yang mencakup 'Penelitian Latar Belakang Terperinci tentang Kelompok Oposisi Utama', yang dimana David Suzuki juga termasuk di dalamnya.

Mayoritas profesi memiliki kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi di bidangnya masing-masing dengan tujuan mendefinisikan norma-norma profesional secara eksplisit bagi para praktisinya. Kode etik pada umumnya bersifat spesifik pada pekerjaan, sehingga dapat mendefinisikan praktisi yang ideal. Dalam industri PR, kumpulan pengetahuan, kode etik, dan sertifikasi telah dianggap sebagai infrastruktur yang memenuhi syarat sebagai profesi sejati, sehingga para asosiasi PR profesional bermaksud untuk meningkatkan status profesional dan perilaku etis dengan memberikan arahan normatif bagi para praktisi PR. Tujuan kode etik bukan hanya mengingatkan para profesi mengenai standar profesi, melainkan juga untuk memastikan bahwa profesi tersebut menjaga standar etika (Kim & Ki, 2014). Penggagas kode etik internasional pertama di bidang PR, yaitu Lucien Matrat, menyatakan bahwa "*without ethical practice, public relations has no purpose*" (Stanic, 2019).

Ketika kode etik ini sangat penting untuk diterapkan dalam *climate change communication*, literatur terkait apakah praktisi PR saat ini sudah menggunakan kode etik tersebut, masih sangat kurang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk untuk memetakan penerapan kode etik dalam komunikasi perubahan iklim di dalam industri PR dan membandingkan studi yang telah dipublikasikan dalam konteks global.

Pertanyaan penelitian dari *systematic literature review* ini adalah: 1) Bagaimana karakteristik dokumen dari penelitian mengenai Kode Etik PR dan *climate change communication*? dan 2) Bagaimana praktisi PR di dunia saat ini menerapkan Kode Etik PR dalam menjalankan *climate change communication*? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dokumen dari penelitian mengenai Kode Etik PR dan *climate change communication* dan bagaimana praktisi PR di dunia saat ini menerapkan Kode Etik PR dalam menjalankan *climate change communication*.

LITERATURE REVIEW

SDG's dan *Climate Change*

Sustainable Development Goals (SDG) atau Tujuan pembangunan Bersama milik PBB memiliki 17 *target* utama untuk menghasilkan tujuan universal yang mampu menangani tantangan lingkungan hidup, politik, dan ekonomi yang dihadapi di dunia. Salah satu tujuan dari SDG terkait dengan perubahan iklim, yang disebut sebagai SDG 13.

Tujuan yang ingin dicapai dalam SDG 13 meliputi: (13.1) memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi semua negara terhadap bahaya dan bencana alam terkait iklim; (13.2) *menjadikan aksi iklim sebagai bagian dari kebijakan nasional. (13.3) meningkatkan pendidikan, kesadaran dan kapasitas manusia dan kelembagaan terkait dengan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim; (13.a) memasukkan ke dalam strategi dan rencana; Memenuhi komitmen negara-negara maju anggota PBB untuk mencapai tujuan bersama sebesar 100 miliar yen per tahun dari semua sumber pada tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang melalui aksi iklim yang berarti dan transparansi dalam implementasinya. Memobilisasi dolar AS untuk memanfaatkan dan melaksanakan Dana Iklim Hijau secara efektif dan komprehensif sesegera mungkin dan (13.b) mempromosikan mekanisme; meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil,*

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

termasuk dengan fokus pada perempuan, pemuda, dan masyarakat lokal dan terpinggirkan (United Nations, n.d.).

Public Relations

Menurut *Chartered Institute of Public Relations* (Chartered Institute of Public Relations, n.d.), humas mengacu pada reputasi, reputasi yang kita peroleh melalui praktik kita dalam mengelola tindakan kita, apa yang kita katakan, dan distribusi informasi, antara lain orang atau organisasi. Hubungan masyarakat adalah studi tentang menjaga reputasi untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan, serta untuk mempengaruhi opini dan tindakan. Ini adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk membangun dan memelihara niat baik antara organisasi dan masyarakat.

James Grunig, seorang ahli teori PR, mengartikulasikan bahwa PR memiliki peran sebagai penasihat etis bagi organisasi, peran dimana mereka membantu organisasi untuk berperilaku etis, bertanggung jawab, dan juga berkelanjutan atau *sustainable*. Etika telah menjadi isu krusial dalam dunia *public* relations, dan sangat diperlukan oleh setiap praktisi PR dalam menjalin hubungan perusahaan dengan masyarakat, yang dimana dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan (Kolić Stanić & Barišić, 2019).

IPRA dan Kode Etik IPRA

IPRA (IPRA, n.d.), yang merupakan singkatan dari *International Public Relations Association* (Asosiasi Hubungan Masyarakat Internasional) adalah jaringan global bagi para profesional PR yang bertujuan untuk memajukan komunikasi yang terpercaya dan praktik hubungan masyarakat yang etis melalui jaringan, kode etik, dan kepemimpinan intelektual profesi mereka. Konsep terbentuknya IPRA berasal dari pertemuan di London pada bulan November 1949 antara dua praktisi PR yang berasal dari Belanda (Hans Hermans and Jo Brongers) dan dua yang berasal dari Inggris (R S Forman, Roger Wimbush, Tom Fife Clark, and Norman Rogers), dimana mereka mendiskusikan kegiatan profesional mereka sehingga memunculkan ide untuk mengorganisir para profesional PR ke dalam masyarakat transnasional dengan tujuan meningkatkan standar praktik PR di berbagai negara, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi praktisi PR. Menyadari pentingnya merealisasikan konsep tersebut, maka dibentuklah komite IPRA, dan selama lima tahun berikutnya diadakan rapat rutin komite yang akhirnya melahirkan IPRA secara resmi pada tanggal 1 Mei 1955 di London.

IPRA selalu berupaya memberikan kepemimpinan intelektual bagi para praktisi PR, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, IPRA mengembangkan sejumlah *Codes and Charter* (Kode dan Piagam) yang berupaya memberikan kerangka etika bagi aktivitas profesi PR. Dilahirkan pada tahun 2011 dan telah ditinjau kembali pada tahun 2020, Kode Etik IPRA merupakan penegasan perilaku profesional dan etis oleh anggota IPRA dan sangat direkomendasikan kepada seluruh praktisi PR di seluruh dunia. Kode Etik ini menggabungkan *The 1961 Code of Venice*, *The 1965 Code of Athens*, dan *The 2007 Code of Brussels*, sehingga menghasilkan Kode Etik milik IPRA, yaitu (IPRA, 2011):

1. *Observance* (Ketaatan): Mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB (*UN Charter*) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR);
2. *Integrity* (Integritas): Selalu bertindak dengan kejujuran dan integritas untuk mengamankan dan menjaga kepercayaan orang-orang yang berhubungan dengan praktisi;
3. *Dialogue* (Dialog): Berusaha menciptakan kondisi moral, budaya dan intelektual untuk berdialog dan mengakui hak semua peserta untuk menyatakan pandangan dan menyatakan pandangan mereka;

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

4. *Transparency* (Transparansi): Bersikap terbuka dan transparan dalam menyatakan nama, organisasi, dan kepentingan yang mereka wakili;
5. *Conflict* (Konflik): Hindari konflik kepentingan profesional dan ungkapkan konflik tersebut kepada pihak yang terkena dampak;
6. *Confidentiality* (Konfidensialitas): Menghormati informasi rahasia yang diberikan;
7. *Accuracy* (Akurasi): Ambil semua langkah yang wajar untuk memastikan kebenaran dan keakuratan semua informasi yang diberikan;
8. *Falsehood* (Kebohongan): Lakukan segala upaya untuk menghindari penyebaran informasi palsu atau menyesatkan dengan sengaja, dan kami akan berhati-hati untuk menghindari penyebaran informasi palsu atau menyesatkan secara tidak sengaja, dan kami akan segera memperbaiki aktivitas tersebut;
9. *Deception* (Penipuan): Tidak memperoleh informasi dengan cara yang menipu atau tidak jujur;
10. *Disclosure* (Penyingkapan): Tidak membuat atau menggunakan organisasi untuk melayani tujuan yang diumumkan namun sebenarnya melayani kepentingan yang dirahasiakan;
11. *Profit* (Keuntungan): Tidak menjual salinan dokumen yang diperoleh dari otoritas publik untuk mendapatkan keuntungan;
12. *Remuneration* (Remunerasi): Saat memberikan jasa profesional, tidak menerima segala bentuk pembayaran sehubungan dengan jasa tersebut selain prinsipal;
13. *Inducement* (Bujukan): Tidak menawarkan atau memberikan dorongan keuangan atau dorongan lainnya kepada perwakilan publik atau media, atau pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung;
14. *Influence* (Pengaruh): Tidak mengusulkan atau melakukan tindakan apa pun yang dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap perwakilan publik, media, atau pemangku kepentingan lainnya;
15. *Competitors* (Kompetitor): Tidak dengan sengaja mencemarkan nama baik profesional praktisi lain;
16. *Poaching* (Pembajakan): Tidak berusaha mengambil klien praktisi lain dengan cara yang menipu;
17. *Employment* (Pekerjaan): Saat mempekerjakan personil dari otoritas publik atau pesaing, berhati-hati untuk mengikuti peraturan dan persyaratan kerahasiaan organisasi tersebut;
18. *Colleagues* (Kolega): Mematuhi Kode ini sehubungan dengan sesama anggota IPRA dan praktisi PR di seluruh dunia.

Climate Change Communication

Perubahan iklim atau *climate change*, yang merupakan fenomena kompleks dengan sebab akibat yang berada di luar jangkauan kehidupan sebagian orang, dan hanya sedikit orang yang mempunyai pengalaman langsung, merupakan permasalahan yang sulit untuk dikomunikasikan. Perdebatan publik mengenai perubahan iklim dan tanggapan yang tepat terhadap isu tersebut diperebutkan dengan persaingan yang cukup besar di antara ilmuwan, industri, pembuat kebijakan, dan organisasi non-pemerintah, yang masing-masing akan mencari solusi dan menetapkan perspektif khusus terkait perubahan iklim. Karenanya, upaya komunikasi strategis yang dilakukan oleh PR memainkan peran yang sangat penting dalam membingkai isu perubahan iklim (Schäfer, 2012).

Climate change *communication* merupakan komunikasi yang bertujuan untuk mendidik, memberi informasi, dan membujuk kepada masyarakat terkait dengan perubahan iklim, serta untuk menyelesaikan krisis tersebut (Armstrong et al., 2018). Lebih lengkapnya *climate change*

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

communication adalah tentang mengedukasi, menginformasikan, memperingatkan, membujuk, memobilisasi, dan memecahkan masalah kritis ini (climatecommunication.yale.edu, n.d.), yang saat ini biasanya dilakukan melalui media online. Perusahaan *public relations* yang memiliki komitmen terhadap politik dan lingkungan semakin berpengaruh dalam wacana perubahan iklim dengan melakukan komunikasi perubahan iklim, baik untuk perusahaannya sendiri maupun merepresentasikan atau membantu perusahaan, organisasi atau NGO yang terjun di dalam bidang perubahan iklim. Hal tersebut disambut dengan baik oleh beberapa pihak karena dianggap sebagai peluang untuk dapat mempengaruhi kebijakan perubahan iklim. Namun, di saat yang bersamaan, terdapat perusahaan PR lain yang memainkan peran yang ambivalen (Greenberg et al., 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur sistematis berdasarkan standar PRISMA 2020 untuk mengidentifikasi kriteria, sumber, strategi pencarian literatur, proses seleksi, proses pengumpulan data, dan penyusunan data (Page et al., 2021). PRISMA 2020 menyediakan daftar periksa yang terdiri dari 27 elemen serta panduan mengenai teknik untuk menemukan, menganalisis, dan mensintesis data penelitian dengan lima fase (Tawfik et al., 2019).

Tahap 1 adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dari systematic literature review ini adalah: 1) Bagaimana karakteristik dokumen dari penelitian mengenai Kode Etik PR dan *climate change communication*? Dan 2) Bagaimana praktisi PR di dunia saat ini menerapkan Kode Etik PR dalam menjalankan *climate change communication*?

Tahap 2: Kriteria kelayakan dan sumber informasi, persyaratan kelayakan, dan sumber data. Kriteria ini meliputi artikel berbahasa Indonesia yang dipublikasikan di Scopus antara tahun 2014 hingga 2024 yang memiliki kata kunci *"Public Relations", "code of conduct", "PR Ethics", "Public Relations* Ethics*", "climate change communication", "climate change", "reputation", "ethics", "honesty", "integrity", "moral conditions", "open", "transparent", "avoid conflicts", "truth", "accuracy", "not disseminate misleading information",* "IPRA", *"International Public Relations Association"* dalam judul, abstrak dan kata kunci. Kriteria eksklusi diantaranya tidak menggunakan Bahasa Inggris, bukan jurnal dan terbit sebelum tahun 2014.

Tahap 3: Strategi pencarian. Pemilihan artikel menggunakan Scopus. Scopus merupakan indeks global yang paling bereputasi. Waktu publikasi jurnal terbatas selama sepuluh tahun antara tahun 2014 sampai awal tahun 2024. Pembatasan ini berdasarkan relevansi topik dalam jurnal.

Tahap 4: Proses pemilihan literatur. Pencarian awal dari Scopus menghasilkan 106 artikel. Mengikuti kriteria inklusi dan eksklusi, peneliti mengevaluasi 106 artikel berdasarkan filter artikel, Bahasa Inggris dan jurnal. Hasilnya ada 80 artikel. Pada seleksi putaran kedua, para membatasi tahun artikel menjadi sepuluh tahun ke belakang, dan keputusan dibuat untuk menghilangkan 47 artikel. Sebanyak 33 artikel (n=33) didapatkan yang melengkapi sampel akhir dokumen untuk tinjauan sistematis.

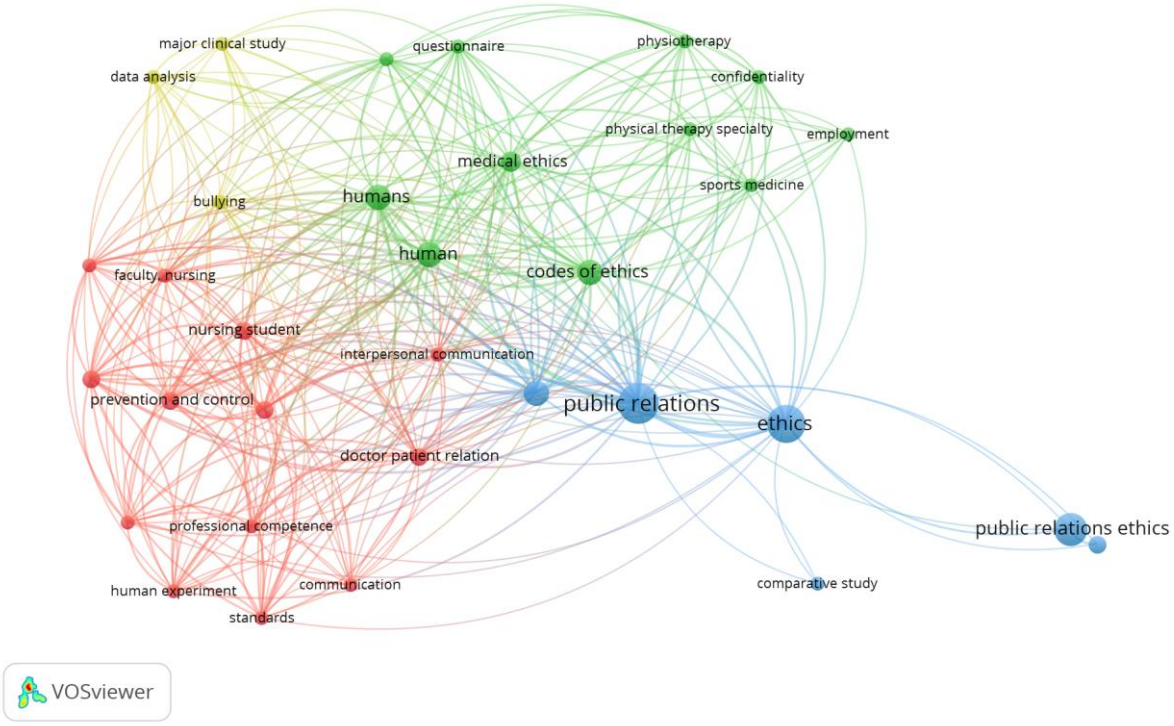
Tahap 5: Koding dan sintesis data. Manajemen bibliografi Mendeley digunakan untuk pengumpulan data. Lembar pengkodean digunakan untuk sintesis data. VOS Viewer digunakan untuk mengelompokkan publikasi dan menganalisis hasil pengelompokan yang dihasilkan (van Eck & Waltman, 2017). Dalam peninjauan tersebut, peneliti awalnya bertindak secara independen dan kemudian sepakat di berbagai tahapan seleksi, sesuai dengan kriteria inklusi sebelumnya dan inklusi final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

Kelompok Kata Kunci tentang Kode Etik Public Relations pada Komunikasi Perubahan Iklim

Analisis dari penelitian ini menemukan beberapa kelompok yang dihasilkan dari kemunculan bersama dari kata kunci yang ada di dalam artikel. Kata *"public relations"* terhubung dengan kata *"ethics"*, dan *"public relations ethics"* teridentifikasi pada kelompok pertama dengan warna biru. Kelompok kedua teridentifikasi dengan warna hijau di mana kata *"human"* terhubung dengan kata *"codes of ethics"* dan *"humans"*. Kelompok ketiga teridentifikasi berwarna merah dengan kata *"prevention and control"* terhubung dengan *"professional competence"* dan *"communication"*. Kelompok terakhir berwarna kuning teridentifikasi dengan warna kuning di mana kata *"bullying"*, *"data analysis"* dan *"major clinical study"* saling terhubung.



Gambar 3. Kelompok kata kunci
(Sumber: Data yang ditarik penulis dari VOSviewer)

Karakteristik Dokumen

Penelitian ini menemukan penelitian mengenai Kode Etik *Public Relations* pada Komunikasi Perubahan Iklim pada indeks Scopus. Dalam indeks Scopus, artikel ditemukan dari negara Eropa (51,5%), Asia (12,1%), Amerika Serikat (30,3%) dan Oceania (12,1%).

Di dalam Scopus menggunakan sistem *clustering* kualitas jurnal yang dikenal dengan istilah Quartile (Q) untuk menilai kualitas jurnal, dimana terdapat empat kategori, yaitu Kuartil 1 (Q1), yang merupakan level tertinggi, Kuartil 2 (Q2), Kuartil 3 (Q3), dan Kuartil 4 (Q4), yang merupakan level terendah. Dari jurnal yang didapatkan di dalam penelitian ini teridentifikasi bahwa 25 artikel merupakan Q1, 5 dokumen merupakan Q2, 2 dokumen merupakan Q3, dan 1 dokumen merupakan Q4. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen yang kami dapat di dalam penelitian ini hampir semua berasal dari sumber yang berkualitas tinggi dan terpercaya.

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

Sedangkan untuk negara tempat penulis berafiliasi dengan institusi tersebut, berikut dapat dilihat pada Diagram 2. Di mana penelitian afiliasi terbanyak dari negara Amerika Serikat sebanyak 15 dokumen (35,7%), kemudian Australia dan Selandia Baru sebanyak masing-masing empat dokumen (9,5%), lalu diikuti Korea Selatan dan Inggris masing-masing tiga dokumen (7,1%) lalu Kroasia sebanyak dua dokumen (4,8%). Dapat dilihat juga negara Austria, Bangladesh, Brazil, Finlandia, Jerman, Israel, Malaysia, Norwegia, Spanyol, Switzerland dan Taiwan masing-masing memiliki satu dokumen (2,4%).

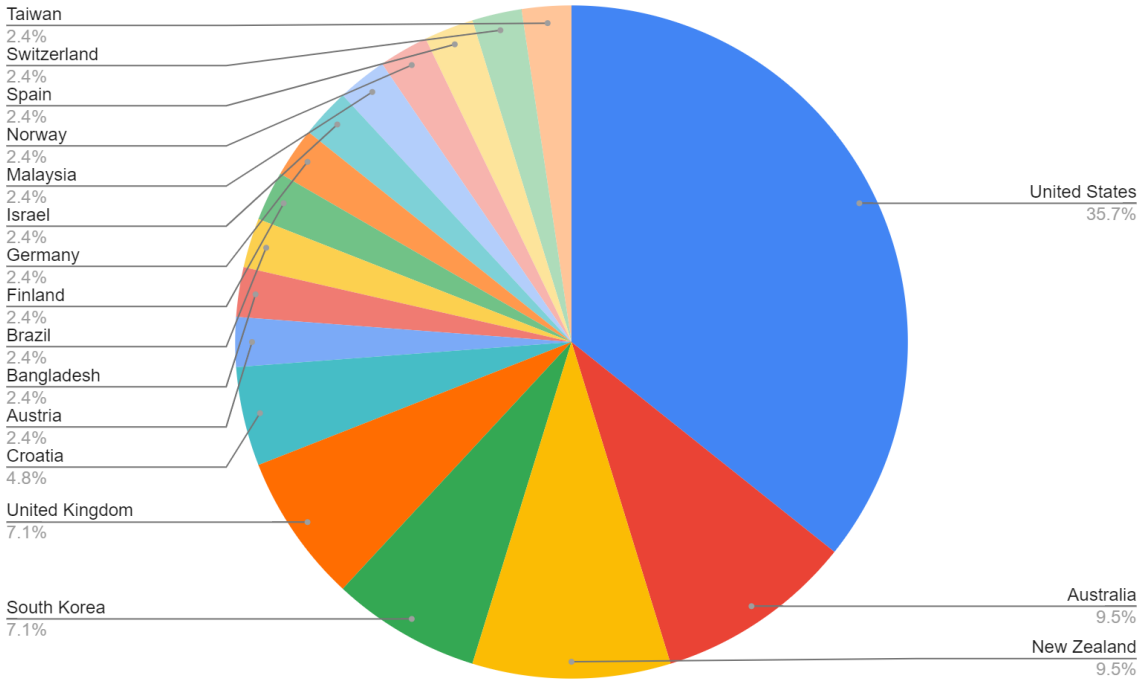


Diagram 2. Negara tempat institusi penulis terafiliasi
(Sumber: analisis penulis)

Analisis dalam penelitian ini menemukan terdapat beberapa area subjek penelitian. Area yang paling banyak adalah *Social Science* sebanyak 40,7%, kemudian Business, *Management and Accounting* sebanyak 27,7%, *Arts and Humanities* sebanyak 13,6%, *Medicine* sebanyak 4%, dan lainnya area subjek Nursing, Economics, *Econometrics and Finance*, *Health Professions*, *Computer Science dan Engineering* dengan total sebanyak 25,9%.

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

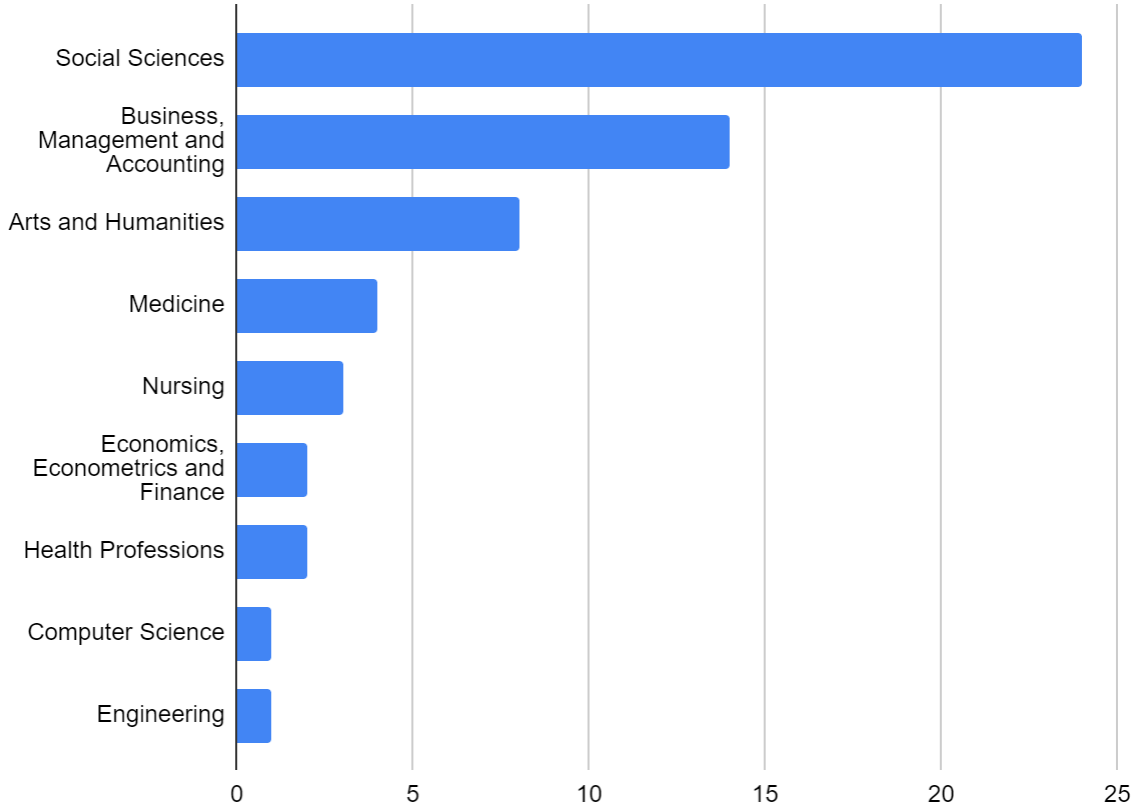
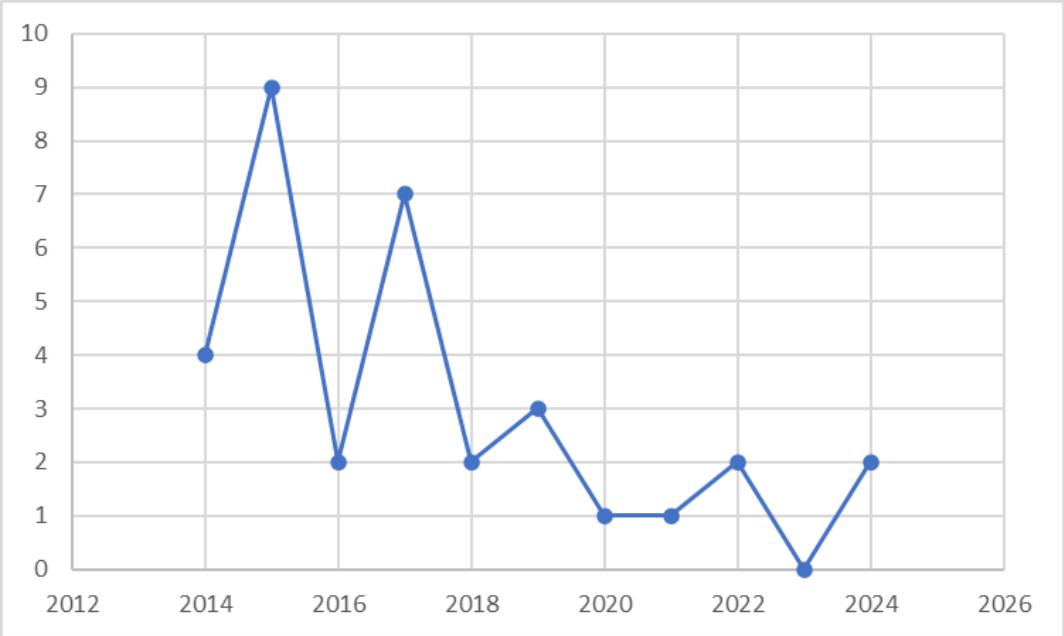


Diagram 3. Dokumen berdasarkan area subjek
(Sumber: analisis penulis)

Publikasi per Tahun

Kami memperoleh 33 artikel Scopus dari tahun 2014 hingga tahun 2024 mengenai topik Kode Etik PR. Dapat dilihat adanya penurunan jumlah publikasi terkait topik ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 terdapat empat artikel terkait, tahun 2015 terdapat sembilan artikel, tahun 2016 terdapat dua artikel, tahun 2017 terdapat tujuh artikel, tahun 2018 terdapat dua artikel, tahun 2019 terdapat tiga artikel, tahun 2020 dan 2021 terdapat masing-masing satu artikel, tahun 2022 terdapat dua artikel, tahun 2023 tidak terdapat artikel dan tahun 2024 terdapat dua artikel.

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.



Grafik 1. Publikasi artikel per tahun
(Sumber: analisis penulis)

Topik dan Tema Diskusi

Tabel 1. Dimensi Kode Etik PR

No.	Dimensi	F (N=33)	%
1.	Kode Etik PR	24	72,7%
2.	*Climate Change Communication*	0	0%
3.	*Honesty*	8	24,2%
4.	*Integrity*	8	24,2%
5.	*Moral Condition*	6	18,1%
6.	*Open*	4	12,1%
7.	*Transparent*	9	27,2%
8.	*Avoid conflict*	4	12,1%
9.	*Truth*	12	36,3%
10.	*Accuracy*	5	15,1%
11.	*Not disseminate misleading information*	1	3%

(Sumber: analisis penulis)

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

Penelitian ini menemukan dimensi dari kode etik PR di dalam *climate change communication* yang paling banyak adalah dimensi kode etik PR (72,7%), dan menempati posisi kedua adalah *truth* (36,3%), dan ketiga adalah *transparent* (27,2%). Kemudian, dimensi *honesty* dan *integrity* keduanya menduduki posisi keempat (24,2%), dimensi *moral condition* (18,1%) kelima, *accuracy* (15,1%) keenam, dan ketujuh yaitu *open* dan *avoid conflict* (12,1%). Selanjutnya, dimensi *not disseminate misleading information* (3%), dan dimensi yang tidak keluar sama sekali adalah *climate change communication* (0%).

KESIMPULAN

Dari analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai Kode Etik PR masih terfokus di negara Amerika Serikat dan hampir semua menggunakan metode penelitian kualitatif. Dapat dilihat juga bahwa publikasi terbanyak terkait kode etik PR adalah pada tahun 2015 silam, dimana itupun hanya terdapat sembilan publikasi, dan semenjak itu artikel mengenai topik ini semakin berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun. Selain itu, tidak ditemukan artikel yang membahas mengenai Kode Etik PR yang berkaitan dengan *climate change communication*, padahal di dalam melakukan komunikasi perubahan iklim para praktisi PR perlu menerapkan dan menjunjung tinggi kode etik, karena dengan kode etik standar kinerja profesi PR akan lebih terjaga. Hal ini membuat peneliti tidak dapat menganalisis bagaimana praktisi PR di dunia saat ini menerapkan Kode Etik PR dalam menjalankan *climate change communication.*

Climate change communication merupakan topik yang rumit untuk dikomunikasikan dan tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk mendidik dan juga membujuk masyarakat terkait dengan perubahan iklim. Dari data yang didapat, selain dimensi kode etik PR yang terdapat paling banyak di dalam kode etik PR di dalam komunikasi perubahan iklim, dimensi *truth, transparent, honesty*, dan *integrity* juga cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan aktivitas PR, para praktisi diharapkan untuk menerapkan sifat-sifat tersebut agar publik menjadi lebih percaya atas pesan dan informasi yang diterimanya, sehingga mereka dan pemerintahan dapat melakukan perubahan yang positif terkait dengan *climate change*.

Untuk penelitian kedepannya, terbukti dari data yang penelitian ini dapatkan, diharapkan semakin banyak penelitian mengenai *Public Relations* terutama yang berkaitan dengan Kode Etik PR dan *climate change communication*. Hal ini tentu akan berguna untuk tujuan yang ingin dicapai oleh PBB dan IPRA, yaitu meningkatkan kesadaran publik akan perubahan iklim dan upaya untuk menghentikannya. Selain itu, perlu adanya kesepakatan Kode Etik PR yang disepakati untuk dipatuhi oleh seluruh praktisi PR yang ada di dunia.

Dari segi kebijakan, pemerintah selaku pembuat regulasi di setiap negara seharusnya dapat memberikan perhatian lebih pada permasalahan *climate change*. Pemerintah dapat secara tegas mengatur aktivitas industri yang dapat makin memperparah perubahan iklim. Pemerintah juga dapat menghimbau setiap industri untuk turut mensosialisasikan mengenai perubahan iklim dan upaya untuk menghentikannya, salah satunya melalui divisi *Public Relations*.

Pada tataran praktis, praktisi *Public Relations* di seluruh dunia, khususnya di Indonesia seharusnya lebih menyadari tanggung jawab sosialnya selaku agen komunikasi penghubung antara perusahaan dan *stakeholder*, dan menjadikan *climate change communication* sebagai salah satu fokus utamanya.

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

REFERENSI

Armstrong, A. K., Krasny, M. E., & Schuldt, J. P. (2018). *Communicating Climate Change: A Guide for Educators*. Cornell University Press.

Besio, C., & Pronzini, A. (2014). Morality, Ethics, and Values Outside and Inside Organizations: An Example of the Discourse on Climate Change. *Journal of Business Ethics*, *119*(3), 287–300. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1641-2

Chartered Institute of Public Relations. (n.d.). *About PR*. Retrieved April 5, 2024, from https://cipr.co.uk/CIPR/CIPR/About_Us/About_PR.aspx#:~:text=Public%20Relations%20is%20the%20discipline,an%20organisation%20and%20its%20publics

climatecommunication.yale.edu. (n.d.). *What is Climate Change Communication?* Yale Program on Climate Change Communication. Retrieved June 3, 2024, from https://climatecommunication.yale.edu/about/what-is-climate-change-communication/

Greenberg, J., Knight, G., & Westersund, E. (2011). Spinning climate change: Corporate and NGO public relations strategies in Canada and the United States. *International Communication Gazette*, *73*(1), 65–82. https://doi.org/10.1177/1748048510386742

IPRA. (n.d.). *IPRA's Story*. Retrieved April 5, 2024, from https://www.ipra.org/history/ipras-story/

IPRA. (2011). *IPRA Code of Conduct*. IPRA. https://www.ipra.org/member-services/code-of-conduct/

IPRA. (2023, January). *IPRA Climate Change Communications Guidelines*. Www.Ipra.Org. https://www.ipra.org/member-services/climate-guidelines/

Kim, S.-Y., & Ki, E.-J. (2014). An Exploratory Study of Ethics Codes of Professional Public Relations Associations: Proposing Modified Universal Codes of Ethics in Public Relations. *Journal of Mass Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality*, *29*(4), 238–257. https://doi.org/10.1080/08900523.2014.946602

Kolić Stanić, M., & Barišić, A. F. (2019). Social Responsibility and Loyalty in Public Relations Codes. *Business Systems Research*, *10*(2), 151–162. https://doi.org/10.2478/bsrj-2019-024

Meredith, S. (2022, July 11). *PR firms are facing a backlash for 'greenwashing' Big Oil — and the pressure on them is growing*. Www.Cnbc.Com. https://www.cnbc.com/2022/02/16/big-oil-and-the-climate-crisis-the-fight-to-hold-pr-firms-accountable.html

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. In *The BMJ* (Vol. 372). BMJ Publishing Group. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Schäfer, M. S. (2012). Online communication on climate change and climate politics: a literature review. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, *3*(6), 527–543. https://doi.org/10.1002/wcc.191

Stanic, M. K. (2019). Transparency in Public Relations: Evidence from Associations' Ethics Codes. *Interdisciplinary Description of Complex Systems*, *17*(2), 417–429. https://doi.org/10.7906/indecs.17.2.15

Tawfik, G. M., Dila, K. A. S., Mohamed, M. Y. F., Tam, D. N. H., Kien, N. D., Ahmed, A. M., & Huy, N. T. (2019). A step by step guide for conducting a systematic review and meta-analysis with simulation data. In *Tropical Medicine and Health* (Vol. 47, Issue 1). BioMed Central Ltd. https://doi.org/10.1186/s41182-019-0165-6

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

United Nations. (n.d.). *Take urgent action to combat climate change and its impacts*. Sdgs.Un.Org. Retrieved April 5, 2024, from https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/

van Eck, N. J., & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. *Scientometrics*, *111*(2), 1053–1070. https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7

Wang, G., & Huan, C. (2024). Negotiating climate change in public discourse: insights from critical discourse studies. *Critical Discourse Studies*, *21*(2), 133–145. https://doi.org/10.1080/17405904.2023.2198725

Hak Cipta © 2024, Riezka Khairunnisa, Naomi Amadea Tumbelaka dan Irwansyah Irwansyah.

Pemanfaatan Aplikasi Srikandi terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis dalam rangka Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Risa Fatima Kartiana[1], Sri Indrahti[2]
[1,2] Program Studi Kearsipan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
E-mail: risakartiana@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintah merupakan hal yang menjadi suatu keharusan dan tidak lagi menjadi sebuah pilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas pemanfaatan Aplikasi Srikandi terhadap pengelolaan arsip dinamis dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan good governance. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode yaitu observasi partisipatif, wawancara, dan studi pustaka. Dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Srikandi telah mampu menjadi pendukung kegiatan pemerintahan dalam administrasi pemerintah terhadap pengelolaan kearsipan. Berbagai aspek telah dilakukan untuk mewujudkan good governance dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Namun demikian masih terdapat kendala yang dirasakan berupa lambannya akses aplikasi yang terjadi secara repetitif, ketidaklengkapan fungsi fitur pengamanan naskah pada aplikasi dalam pengelolaan arsip vital. Berbagai saran telah disampaikan agar dapat memberikan usulan penambahan dan memperhatikan keamanan server, memberikan informasi atau pelaporan dalam rangka transparansi informasi kepada user, serta memberikan penambahan standar keamanan berupa enkripsi password terhadap naskah yang bersifat terbatas/rahasia mulai dari penciptaan hingga pemindahan arsip.

Kata kunci: *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengelolaan Arsip Dinamis, Aplikasi Srikandi*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital saat ini telah berjalan begitu melesat, dimana telah membawa perubahan terhadap perkembangan sosial di masyarakat. Dampak positif yang telah dirasakan dengan adanya perkembangan tersebut adanya kemudahan mendapatkan informasi serta terciptanya peningkatan terhadap taraf kesejahteraan pada masyarakat luas.[1] Dalam era globalisasi diperlukan untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik, dimana sering diungkapkan dengan kalimat "*good governance"* untuk mendukung kemajuan penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Penyelenggaraan pemerintah akan menjadi lebih transparan dan akuntabel dengan memperbaiki kualitas kinerja pemerintah maka dihubungkan dengan prinsip *good governance*.[2] Selanjutnya hal ini dijelaskan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan

[1] Rusdy, RM Iman Rifai; Flambonita, Suci. 2023. "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance"* dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 5 No 2* (hlm. 219). Sumatera Selatan: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
[2] *Ibid, hal. 220*

Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.

dan Strategi Nasional Pembangunan *E-Government*, bahwasannya "Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan dengan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*". Kebijakan tersebut dapat merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Telah ditetapkan oleh pemerintah berbagai aplikasi umum SPBE salah satunya yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Disampaikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati (20/10) menjelaskan "Sesuai dengan amanat dalam Perpres Nomor 95/2018 pembangunan dan pengembangan aplikasi umum adalah untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.[3] Aplikasi Srikandi ini berkaitan erat dengan dukungan pemerintahan pada bidang kearsipan. Program Srikandi ini bertujuan untuk menghasilkan pengelolaan kearsipan yang lebih terintegrasi, efisien dan efektif serta Lembaga pemerintah pusat dan daerah tidak perlu untuk membangun aplikasinya masing-masing cukup dengan melakukan pemanfaatan Aplikasi Srikandi. Hal tersebut sangat jelas bahwa penggunaan Aplikasi Srikandi ini adalah penggabungan dari prosedur pengelolaan kearsipan dengan teknologi informasi dalam mewujudkan SPBE khususnya bidang kearsipan.[4]

Sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwasannya arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bahwasannya arsip dapat berupa berbagai bentuk sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan pada bidang pengawasan obat dan makanan memberikan Kesehatan hidup di masyarakat Indonesia yg berupa obat dan makanan. Oleh karena itu, Arsip Badan POM harus dikelola sesuai dengan aturan melalui penerapan e-*government*. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (Dit. SPO) merupakan salah satu unit kerja di Badan POM yang memiliki tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi pangan olahan. Sedangkan salah satu fungsi yang diselenggarakan yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan yaitu pelaksanaan urusan tata

[3] *https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-pemerintahan-digital-tim-koordinasi-spbe-nasional-lakukan-kolaborasi*, diakses pada 10 Mei 2024 pukul 22.22 WIB.

[4] Millenia; RFS, Harapan Tua. 2023. "Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru" dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Volume 9 No. 15* (hlm. 404). Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.

operasional direktorat. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk membangun kesadaran pegawai bukanlah hal yg mudah, maka Badan POM sangat berharap komitmen pimpinan unit kerja untuk menyerahkan arsip dan memastikan bahwa arsip dapat terkelola dengan baik. sehingga arsip dapat berperan sebagai alat pengawasan, dan input pengambilan keputusan di level pimpinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan kondisi, masalah, situasi yang terjadi saat ini secara objektif, sehingga dapat bersifat kooperatif dalam melakukan pengumpulan data serta menjabarkan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi. Teknik pengumpulan data tersebut berupa studi pustaka, wawancara dan observasi partisipatif. Studi pustaka yang didapatkan penulis adalah berupa e-*book* atau jurnal serta regulasi/kebijakan yang terkait. Wawancara yang dilakukan penulis adalah mewawancarai secara langsung dengan Muhammad Mulkan Abror, A.Md sebagai Arsiparis Biro Umum dan Andrea Damayanti, S.Kom sebagai pengelola arsip (keduanya merupakan Tim Admin Srikandi Badan POM). Selanjutnya untuk observasi partisipatif ini merupakan kegiatan profesi penulis sebagai Arsiparis di lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan POM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Badan POM harus dapat bertransformasi secara digital/elektronik dengan adanya kemajuan teknologi di Indonesia saat ini. Salah satu langkah percepatan transformasi digital adalah menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemanfaatan aplikasi yang telah diterapkan, mulai dari implementasi Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (Sipanda) hingga pemanfaatan aplikasi Srikandi. Aplikasi Sipanda bertujuan untuk pengambilan nomor naskah dinas. Selanjutnya beralih dengan melakukan implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang diinisiasi oleh ANRI lalu diterapkan di lingkungan Badan POM. Aplikasi SIKD ini juga menerapkan versi lama pada 3 Agustus 2020 lalu di*upgrade* SIKD versi baru pada 1 Mei 2021. Selanjutnya beranjak mengimplementasikan Aplikasi Srikandi V.2 pada 27 Juni 2022 dan di*upgrade* dengan Srikandi V.3 pada tahun 2024. Implementasi aplikasi yang telah disebutkan tak luput adanya peran SDM yang mampu mewujudkan pengelolaan kearsipan menuju *good governance*.

Implementasi aplikasi terkait pengelolaan kearsipan ini terlihat sangat bergerak cepat dan dinamis, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan arsip dan penyajian informasi di lingkungan Badan POM dengan sistem informasi berbasis teknologi sesuai kaidah kearsipan. Dengan adanya kolaborasi tersebut maka hal itu merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE untuk sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional.

Sistem yang dimanfaatkan saat ini di Lingkungan Badan POM adalah Aplikasi Srikandi. Srikandi merupakan Sistem Aplikasi Layanan Persuratan dan Kearsipan Dinamis yang digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar Hukum dari penggunaan SRIKANDI yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD). Aplikasi ini diinisiasi oleh tim koordinasi nasional Srikandi diantaranya: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.

(Kementerian PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Latar Belakang Implementasi Aplikasi Srikandi di Badan POM

Badan POM telah melakukan implementasi Aplikasi Srikandi sejak bulan Agustus tahun 2022. Implementasi Aplikasi Srikandi dilakukan secara serentak di seluruh unit kerja Badan POM baik di lingkungan pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Seiring dengan penerapan Aplikasi Srikandi, telah ditetapkan juga kebijakan penerapan aplikasi dimaksud. Kebijakan tersebut dibuat dalam rangka pemenuhan implementasi aplikasi serta memastikan bahwa implementasi telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.[5]

Implementasi Aplikasi Srikandi di Badan POM dilakukan secara bertahap mulai dari V.2 hingga V.3 saat ini. Penerapan Srikandi V.3 ini mulai adanya informasi dari ANRI sesuai surat Nomor: BDI.01.01/518/2024 tanggal 2 Februari 2024 hal Penutupan Akses Sementara Aplikasi Srikandi versi 2. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan POM memberikan arahan untuk seluruh unit kerja baik di lingkungan pusat maupun UPT untuk melakukan peralihan Aplikasi Srikandi V.2 menuju ke V.3. Informasi tersebut selaras dengan arahan Kepala Biro Umum Badan POM Nomor: B-KA.02.25.02.24.100 tanggal 5 Februari 2024 mengenai Peralihan Aplikasi Srikandi V.2 ke Aplikasi Srikandi V.3.

Dengan adanya arahan tersebut maka Dit. SPO menggunakan Aplikasi Srikandi V.3, namun seiring penggunaan tersebut masih banyak permasalahan dalam mengakses aplikasi, mulai dari penciptaan maupun dalam hal pemberian TTE (Tanda Tangan Elektronik) Tersertifikasi. Kejadian tersebut tidak hanya dirasakan oleh Dit. SPO namun juga dirasakan oleh unit kerja lain serta UPT yang telah mengimplementasikan aplikasi tersebut.

Badan POM terus berupaya untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi implementasi Aplikasi Srikandi secara berkala. Adanya monitoring dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka perbaikan selanjutnya agar dapat termonitor dengan baik dan dapat mengimplementasikan SPBE secara optimal. Pelaksanaan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengelolaan Arsip Dit. SPO dengan Aplikasi Srikandi

Untuk mendukung dalam pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien maka diperlukan dengan pengelolaan arsip yang baik disesuaikan dengan kaidah kearsipan. Telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. Seorang arsiparis/pengelola arsip diperlukan untuk mengetahui serta paham akan alur pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan, agar pengelolaan tersebut dapat dilakukan secara tertib arsip. Berikut alur pengelolaan arsip arsip dinamis terdapat 4 (empat) Elemen[6], antara lain:

a. Penciptaan

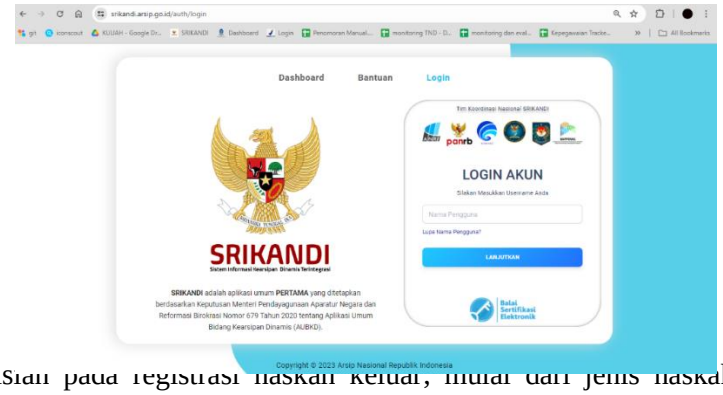
[5] Laporan Implementasi Sistem Kearsipan Srikandi Triwulan III Tahun 2023 di Lingkungan Badan POM
[6] Desi Pratiwi, Modul Manajemen Rekod Aktif (Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka:2021) Hlm. 1.34 s.d. 1.48

Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.

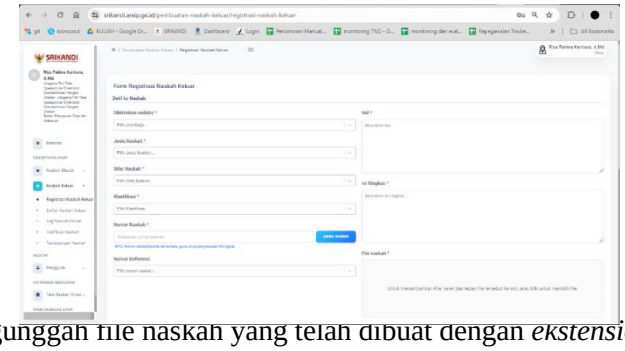
Penciptaan ini merupakan awal dari sebuah dokumen tercipta, dalam penciptaan ini dapat berupa naskah masuk/naskah keluar. Dalam penciptaan tata naskah dinas diharapkan dapat menyesuaikan format atau alur dalam pedoman/regulasi terkait Tata Naskah Dinas (TND) pada masing-masing instansi/lembaga. Instrumen pendukung dalam kegiatan ini adalah pedoman/regulasi terkait TND tersebut. Dalam melakukan kegiatan pembuatan atau penerimaan ini juga perlu disediakan daftar registrasi pembuatan atau penerima naskah tersebut. Daftar registrasi tersebut berfungsi sebagai kontrol dokumen berkas yang terdapat pada instansi/lembaga tersebut.

Dalam proses penciptaan naskah dinas, Dit SPO telah mengimplementasikan Aplikasi Srikandi. Penciptaan naskah dinas ini meliputi naskah yang diciptakan maupun naskah yang diterima. Dimana proses tersebut telah masuk dalam kategori arsip digital. Dalam penciptaan atau registrasi naskah tersebut dilakukan oleh masing-masing pegawai dimana terdapat verifikator yang bertujuan sebagai verifikasi naskah dalam rangka kesesuaian isi naskah baik konteks maupun konten pada naskah terkait. Berikut adalah tampilan proses registrasi naskah keluar:

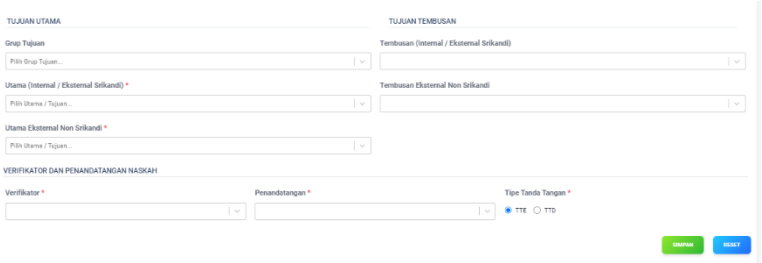
- *Login* terlebih dahulu dengan menggunakan *username* yang telah dibuat oleh admin



- Melakukan pengisian pada registrasi naskah keluar, mulai dari jenis naskah hingga perihal naskah yang disampaikan

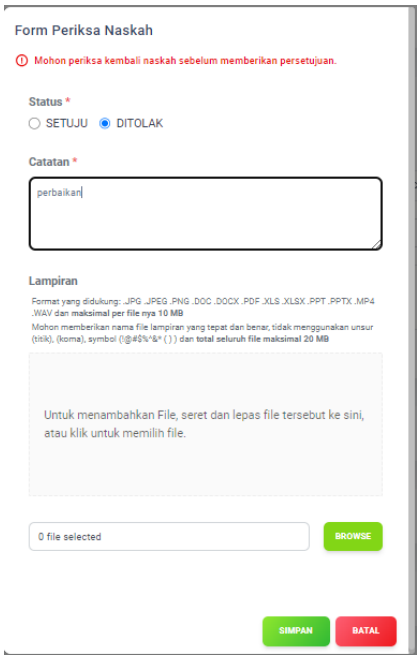


- Setelah mengisi dan mengunggah file naskah yang telah dibuat dengan *ekstension* docx., selanjutnya dapat mengisi tujuan naskah naskah, verifikator, beserta penandatanganan sebagaimana gambar dibawah ini.

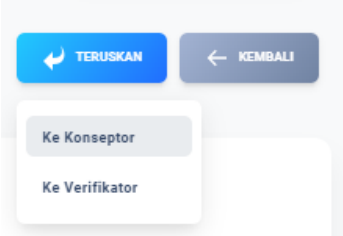


Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.

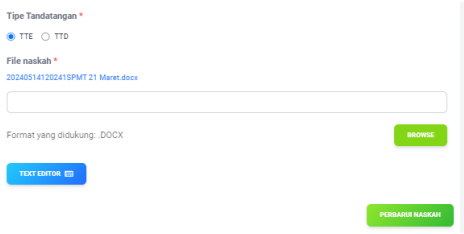
- Selanjutnya verifikator dapat melakukan verifikasi setelah naskah tersebut telah benar dan tidak ada revisi, sebagaimana tampilan verifikator ada pada gambar dibawah ini.



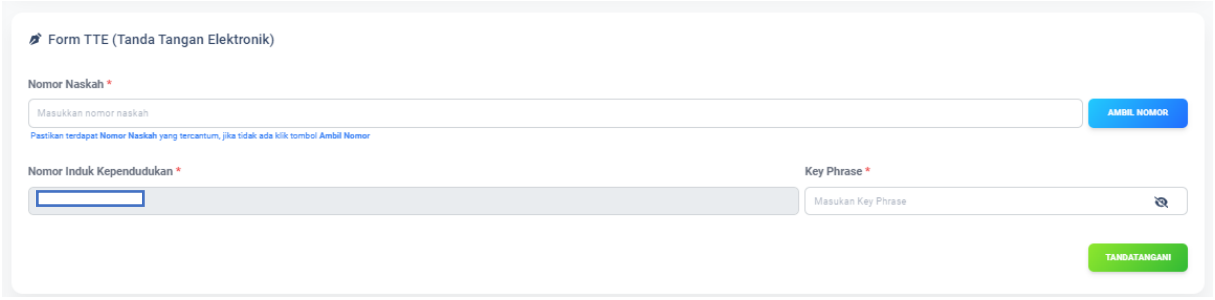
Verifikator ini dapat melakukan persetujuan maupun penolakan. Ketika verifikator melakukan persetujuan maka naskah tersebut dapat langsung ada pada akun penandatanganan, namun ketika terdapat penolakan/revisi maka dapat dilakukan perbaikan dahulu. Dalam perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh konseptor maupun verifikator.



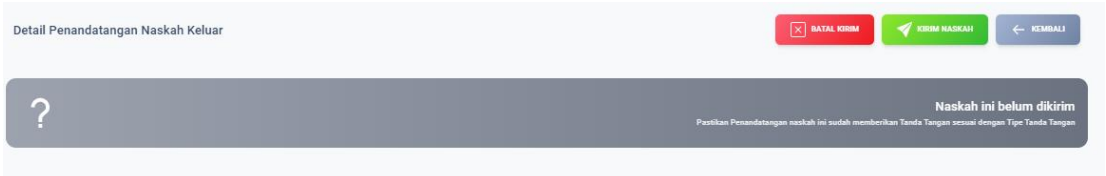
Serta dalam perbaikan pada Aplikasi Srikandi V.3 ini cukup mudah karena dapat dilakukan/diakses pada aplikasi tersebut dengan cara klik "*text editor*" maka akan tampil berupa docx dan user tidak perlu untuk mendownload lalu mengunggah, hal ini merupakan pengembangan dari Aplikasi Srikandi V.2.



- Selanjutnya akun penandatanganan dapat melakukan persetujuan dengan mengisikan form dibawah ini

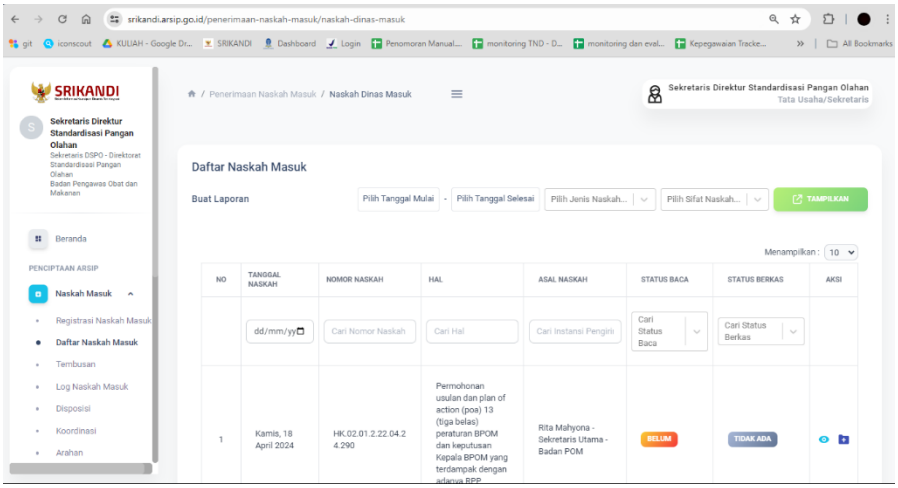


- Selanjutnya, pejabat penandatangan agar dapat mengirimkan naskah yang telah disetujui dengan klik "kirim naskah", namun pada aplikasi ini terdapat tanda kehati-hatian, ketika masih terjadi kesalahan atau yang semisalnya maka naskah tersebut dapat dilakukan "batal kirim" hal ini juga salah satu antisipasi ketika naskah tersebut batal untuk dikirim ke penerima, sebagaimana pada gambar berikut.



Sedangkan untuk yang diterima atau surat masuk ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini melalui akun pencatat/sekretaris.

Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.



Pada Aplikasi Srikandi ini juga memudahkan dalam pendistribusian surat masuk, pimpinan unit kerja dapat melakukan pendistribusian melalui disposisi/arahan/koordinasi kepada Staff/Ketua Tim/Pejabat lainnya. Penerima juga dapat melihat pada menu disposisi/arahan/koordinasi sesuai dengan arahan pimpinan. Hal ini juga merupakan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan tugas/arahan dari pimpinan.

b. Penggunaan

Aktivitas penggunaan dalam rangka kegiatan pemanfaatan kearsipan, disajikan dalam daftar informasi arsip aktif. Adanya daftar informasi arsip tersebut, maka unit kerja/instansi terkait telah membuatkan petunjuk dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis dan penentuan hak akses arsip bagi publik, serta perlindungan terhadap keamanan arsip. Contoh kegiatan yang diambil penulis adalah menyediakan daftar informasi arsip aktif, dimana daftar tersebut sebagai penyajian informasi dari segi klasifikasi keamanan dan akses arsip yang disimpan tersebut. Instrumen pendukung pada kegiatan ini, merujuk pada Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada klasifikasi keamanan arsip dinamis terdiri atas biasa/terbuka, terbatas, dan rahasia. Pengguna daripada akses arsip tersebut terdiri dari pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal yaitu Kepala Badan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sedangkan untuk pengguna eksternal yaitu Pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana.

Pemberian hak akses ini dilakukan dalam rangka penerapan sistem pengelolaan arsip digital yang efektif sehingga dapat membantu menjamin arsip tersedia saat digunakan, tidak digunakan oleh pengguna yang tidak berhak, tidak dapat diubah-ubah, serta tidak dapat dimunsnahkan dengan cara yang tidak prosedural.[7]

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan ini sangat penting dalam pengelolaan kearsipan, dengan adanya pemeliharaan kearsipan yang baik maka akan mudah dalam temu balik pada arsip tersebut, serta arsip tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sebuah pengambilan keputusan. Dalam pemeliharaan ini terdapat kegiatan yaitu melakukan pemberkasan arsip aktif. Dalam pemberkasan arsip aktif tersebut dapat dilakukan berbagai metode pemberkasan dengan sistem abjad, penomoran,

[7] Rustam, Muhammad. 2019. Pengelolaan Arsip Elektronik. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

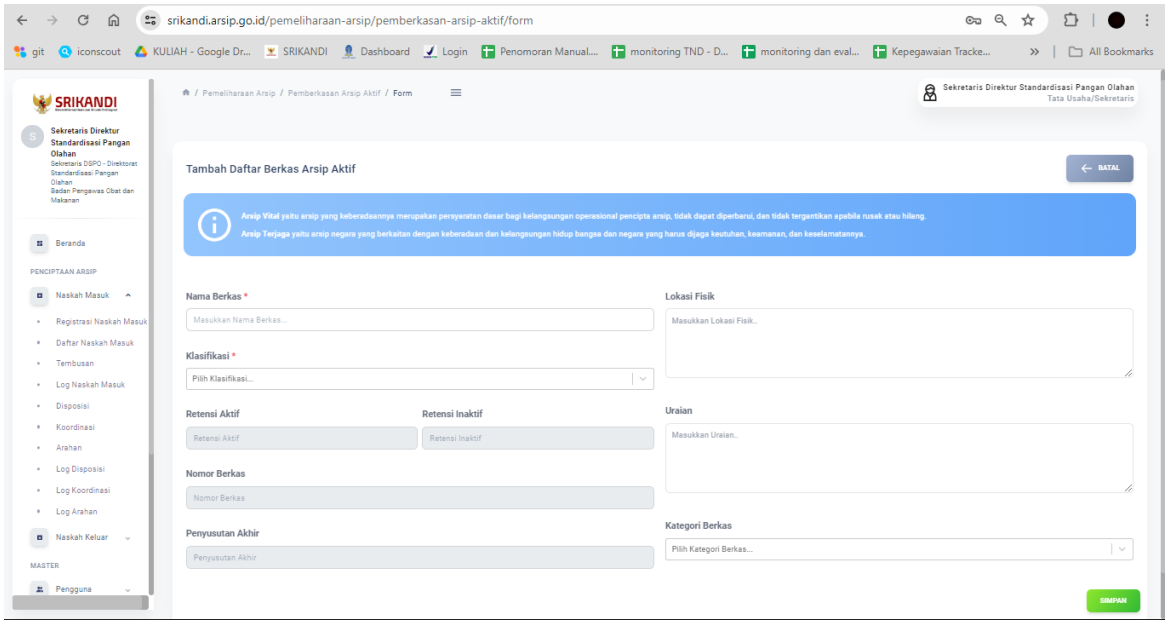
Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.

masalah, tanggal (kronologi), dan sistem wilayah. Pemberkasan tersebut dapat disesuaikan dengan arsip yang tercipta di masing-masing instansi/lembaga dalam memudahkan temu balik arsip. Dit. SPO dalam melakukan pemberkasan dengan menggunakan sistem masalah. Instrumentasi dalam kegiatan pemberkasan ini sesuai pada pedoman/regulasi klasifikasi arsip sebagai proses identifikasi dalam penataan arsip.

Dijelaskan pada Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, bahwa Pemeliharaan Arsip Dinamis merupakan kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya yang meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, dan Alih Media Arsip. Hal ini bertujuan untuk:

- Menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pencipta Arsip;
- Menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan Arsip;
- Menjamin ketersediaan informasi Arsip

Pada kegiatan pemberkasan ini dapat dilakukan melalui Aplikasi Srikandi V.3. yang meliputi naskah yang diciptakan maupun naskah yang diterima. Sehubungan dengan adanya kegiatan pengawasan kearsipan eksternal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dimana terdapat indikator penilaian baru bahwa pengguna Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (UBKD) Srikandi pada K/L melakukan pemberkasan terhadap naskah dinas pada seluruh Unit Pengolah eselon II yang berada di tingkat pusat, maka Badan POM berupaya tetap melakukan pemberkasan pada Aplikasi Srikandi V.3. Sebagaimana informasi tersebut, Dit SPO telah melakukan pemberkasan. Berikut adalah tampilan pemberkasan dalam Aplikasi Srikandi.



Kegiatan pemberkasan ini dilakukan pada akun sekretaris. Tampilan diatas merupakan tampilan dalam pembuatan berkas dengan melengkapi seluruh kolom. Selanjutnya dapat memasukan item-item arsip yang sesuai melalui daftar naskah masuk ataupun daftar naskah keluar sesuai dengan nama berkas yang telah dibuat.

d. Penyusutan

Dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib arsip sebagai bagian dari bukti

Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.

bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional, maka dilakukan pelaksanaan penyusutan arsip. Penyusutan ini merupakan proses penentuan penilaian pada nilai guna arsip yang digunakan sebagai keberlanjutan organisasi. Dalam penyusutan ini Dit SPO mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Prasetyo Utomo selaku Tim pengembangan Srikandi dan helpdesk nasional Srikandi (21/2) menjelaskan terhadap paparanya pada kegiatan Bimtek Pemantapan Tertib Arsip menuju Transformasi Digital Badan POM di Bandung, bahwa pada pengembangan Aplikasi Srikandi salah satunya terdapat modul pemindahan arsip inaktif, modul pemusnahan arsip, serta modul penyerahan arsip statis.[8] Kegiatan penyusutan tersebut telah masuk dalam rangkaian pengembangan aplikasi selanjutnya. Untuk saat ini hanya sampai dalam pemberkasan arsip. Penyusutan arsip yang dilakukan di Dit SPO masih bersifat *offline* sebagaimana belum dapat mengimplementasikan pada Aplikasi Srikandi.

Pemeliharaan Arsip Vital Dit. SPO dengan Aplikasi Srikandi

Berbagai macam arsip yang diciptakan pada Dit SPO, salah satunya adalah arsip vital. Arsip vital dimaksud berupa peraturan/pedoman yang berkaitan dengan kejadian yang bersifat nasional. Setiap arsip vital tentunya memerlukan pengelolaan yang tepat, oleh karenanya pentingnya pengelolaan arsip vital dalam manajemen kearsipan secara keseluruhan. Proses dalam penyusunan peraturan/pedoman dimaksud telah dilakukan melalui Aplikasi Srikandi. Dalam Aplikasi Srikandi telah mengimplementasikan standar keamanan. Keamanan dimaksud adalah teknis implementasi Aplikasi Srikandi dengan adanya kode derajat keamanan, adanya verifiktor pada registrasi naskah, notifikasi dalam pengiriman naskah yang dijadikan sebagai kehati-hatian dalam pengiriman naskah, serta autentikasi dalam melakukan penandatanganan TTE bersertifikat elektronik. Pada penandatanganan TTE bersertifikat elektronik ini akan hilang (berubah menjadi rumus) ketika naskah tersebut diubah/diedit, hal ini sebagai parameter terhadap keautentikan naskah yang dibuat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi partisipatif dapat disimpulkan bahwa Dit. SPO merupakan salah satu unit kerja pusat di Badan POM yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pengelolaan kearsipan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan SPBE lingkup nasional melalui Aplikasi Srikandi. Aplikasi Srikandi telah memberikan dampak nyata terhadap penerapan transformasi digital. Adanya aplikasi tersebut sangat memberikan kemudahan dalam pendistribusian informasi kepada pegawai/staff terkait dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional.

Disamping kemudahan yang ada, namun masih terdapat kendala yang dirasakan oleh pihak pengguna, pencatat, serta admin Srikandi. Hal tersebut terlihat pada laporan monitoring dan evaluasi Aplikasi Srikandi pada Dit. SPO, diantaranya berupa:

- **Penciptaan naskah**

kelambanan akses aplikasi yang terjadi secara repetitif. Hal ini terjadi karena banyakanya pengguna yang memanfaatkan aplikasi tersebut sehingga server seringkali mengalami masalah, seperti kendala saat melakukan registrasi naskah pada saat membuat konsep

[8] Prasetyo Utomo, Ketua Tim Pengembangan Srikandi dan Helpdesk Nasional ANRI

Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.

naskah yang tidak ter- *record* pada aplikasi sehingga harus dilakukan secara berulang, permasalahan pada proses penandatanganan elektronik yang sering eror dan harus dilakukan reload ulang, terdapat permasalahan pada verifikator atau penandatangan, dimana didapati akun yang sama muncul berulang sehingga naskah tidak dapat ditindaklanjut, Kendala *server down* pada layanan PDN yang dirasakan secara berulang, serta naskah masuk yang seringkali muncul secara rangkap.

- **Pemberkasan arsip**

Pada proses pemberkasan ini seringkali ditemui naskah yang telah diberkaskan hilang (tidak ter- *record*) ketika adanya perpindahan dari Srikandi V.2 ke V.3, hal ini menyebabkan pengulangan dalam melakukan pemberkasan arsip digital melalui Aplikasi Srikandi. Dalam pemberkasan ini juga ditemui beberapa kendala ketika ingin membuatkan berkas terlebih dahulu diharuskan untuk kembali ke awal menu pemberkasan, hal ini menyebabkan waktu yang hilang terbuang. Dalam pemberkasan Aplikasi V.3 ini juga tidak terdapat pengelompokan arsip vital, arsip umum, ataupun arsip terjaga sehingga menjadi satu kesatuan pada daftar arsip tersebut.

- **Pengelolaan arsip vital pada Aplikasi Srikandi**

Dalam pengelolaan arsip vital ini masih terdapat ketidaklengkapan fasilitas pada fitur pengamanan naskah pada Aplikasi Srikandi, dimana belum terdapat keamanan informasi pada akses dalam sebuah naskah seperti penambahan *password* dengan enkripsi *end-to-end*. Pada keamanan ini sangat dibutuhkan ketika terdapat arsip vital yang bersifat terbatas atau rahasia dalam proses penanganannya. Tim admin Aplikasi Srikandi BPOM telah mengusulkan kepada ANRI agar diberikan keamanan pada informasi naskah berupa password, dan hal tersebut akan dibuatkan pada pengembangan selanjutnya berupa *cyprography as as service* sebagai bentuk keamanan aplikasi.

Saran

1. Memberikan usulan terkait penambahan server dan *storage* serta memperhatikan keamanan server yang terpusat di PDN, agar tidak terjadi kelamabanan dalam akses secara repetitive.
2. Memberikan informasi/ laporan secara transaparan ketika terdapat perubahan/ pengembangan fungsi pada Aplikasi Srikandi.
3. Adanya pemantauan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, agar dapat diketahui secara transparan apa saja yang telah ditindaklanjut oleh ANRI selaku administrator Aplikasi Srikandi pusat dalam rangka melakukan *continues improvement*.
4. Pada pelaksanaan pemberkasan agar dapat difasilitasi fitur “tambah berkas” yang bertujuan untuk penambahan berkas tanpa harus membuka di laman awal pemberkasan, agar lebih dapat efektif dan efisien.
5. Agar dapat memberikan penambahan standar keamanan berupa enkripsi *password* terhadap naskah yang bersifat terbatas/rahasia baik mulai dari penciptaan hingga pemindahan arsip, baik dibuatkan secara pengelompokan atau sebuah notifikasi/tanda pada naskah tersebut.

REFERENSI

Akselerasi Pemerintahan Digital, Tim Koordinasi SPBE Nasional Lakukan Kolaborasi.(2022).Kementerian PANRB. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-pemerintahan-digital-tim-koordinasi-spbe-nasional-lakukan-kolaborasi

Bahari, Krisna Marta; Frinaldi, Aldri. (2023). “Inovasi Pengolahan Arsip Dinamis Melalui Aplikasi Srikandi Di Kabupaten Solok” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Volume 8 No 2* (hlm. 874-879). Padang: Universitas Negeri Padang

Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.

Berlian, Bambang. (2019). *Manajemen Arsip Inaktif*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Damayanti, Andrea. Hasil Wawancara Pribadi: (2024). Pengelola Arsip Biro Umum selaku Admin Srikandi di Badan POM

Fadli, Muhammad Rijal. (2021). "Memahami desain metode penelitian kualitatif" dalam *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Volume 21 No. 1* (hlm. 33-54). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Ibrahim, Adelina; Arief, Assaf; Abdullah, Saiful Do. (2020). "Keamanan untuk Penerapan Layanan Publik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Sebuah Kajian Pustaka Sistematis" dalam Indonesian Journal on Information System Volume 5 No. 2 (hlm. 135-143). Maluku Utara: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan *E-Government*

Krihanta. (2019). *Pengelolaan Arsip Vital (Edisi 2).* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Laporan Implementasi Sistem Kearsipan Srikandi Triwulan III Tahun 2023 di Lingkungan Badan POM

Minarni, Anon, dkk. (2016). *Akses dan Layanan Arsip*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Millenia; RFS, Harapan Tua. (2023). "Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru" dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Volume 9 No. 15* (hlm. 403-408). Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Muhidin, Sambas Ali; Winata, Hendri; Santoso, Budi. (2016). "Pengelolaan Arsip Digital" dalam *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen Volume 2 No. 3* (hlm. 178-183). Malang: Universitas Negeri Malang

Mulkan Abror, Muhammad. Hasil Wawancara Pribadi: (2024). Arsiparis Terampil Biro Umum selaku Admin Srikandi di Badan POM

Noor, Anastacia Sherren Syah Putri, dkk. (2023). "Aplikasi Srikandi dalam Meningkatkan Komunikasi Tertulis di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat" dalam *Manajemen: Jurnal Manajemen dan Sistemf Informasi Volume 22 No.2* (hlm. 215 – 226). Bandung: Akademi Sekretari Manajemen Taruna Bakti Bandung

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prasetyo Utomo, Ketua Tim Pengembangan Srikandi dan Helpdesk Nasional ANRI. (2024) dalam "Bimtek Pemantapan Tertib Arsip menuju Transformasi Digital Badan POM" di Bandung pada 21 Februari 2024

Pratiwi, Desi. (2019). *Manajemen Rekod Aktif*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Pratiwi, Desi. (2019). *Perancangan Skema Klasifikasi dan Tesaurus*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.

Pratiwi, Desi; Sujoko, Tumini; Mirmani, Anon. (2022). *Pengurusan Surat, Tata Persuratan dan Formulir (Edisi 2)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Pratiwi, Desi. (2018). *Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip (Edisi 2)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Rahmah, Faizatur; Meirinawati. (2023). "Penerapan Electronic Government Melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Probolinggo" dalam *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 11 No. 3* (hlm. 2341-2350). Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

Rusdy, RM Iman Rifai; Flambonita, Suci. (2023). "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan *Good Governance"* dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 5 No 2* (hlm. 218-239). Sumatera Selatan: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Rustam, Muhammad. (2019). *Pengelolaan Arsip Elektronik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Hak Cipta © 2024, Risa Fatima Kartiana, Sri Indrahti.

Keberlanjutan Program Pengembangan Arsip dengan Konsep "*Green Archive*"

Siti Samsiyah
Prodi D4 Kearsipan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
e-mail: siti@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian dengan tema Keberlanjutan Program Pengembangan Arsip Dengan Konsep *"Green Archive"* bertujuan untuk mendeskripsikan program kearsipan yang ramah lingkungan/*green archive*, utamanya pada pusat arsip serta perangkat lunaknya. Penelitian dekriptif kualitatif ini menghimpun data primer berupa interview dengan arsiparis, perancang konstruksi, teknisi pemelihara gedung pusat arsip. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tercetak dan elektronik yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Ruang lingkup penelitian adalah gedung pusat arsip yang berada di lokasi Tangerang Selatan, Banten. Setelah data terkumpul , diklasifikasikan, ditabulasi serta diolah hasilnya menunjukkan bangunan gedung pusat arsip di lingkup Tangerang Selatan belum mengarah ke konsep *green archive*, artinya program pengembangan kearsipan saat ini belum berjalan realitasnya bangunan gedung pusat arsip bertingkat dengan mayoritas memperlihatkan penggunaan kaca, pemeliharaan manuskrip arsip dengan bahan kimia keras yang menimbulkan kerusakan lingkungan, penggunaan ac, lampu 24 jam, penggunaan sarana dan prasarana perangkat kearsipan belum menerapkan penggunaan bahan daur ulang namun tetap terstandarisasi sesuai konsep kearsipan. Kondisi ini bertahap perlu diarahkan dengan penerapan konsep *green archive* yakni pemanfaatan bahan bangunan gedung yang ramah lingkungan, sirkulasi udara yang alami, pemeliharaan manuskrip arsip tidak menggunakan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Demikian pula diperlukan pengkajian yang lebih mendalam penggunaan sarana dan prasarana perangkat kearsipan dari bahan daur ulang namun tetap terstandarisasi sesui prosedur, kaidah dan konsep kearsipan.

Kata Kunci : *green archiv, program pengembangan kearsipan, era 5.0*

PENDAHULUAN

Dengan semakin majunya teknologi telah merubah berbagai tatanan kehidupan dalam masyarakat. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Kemajuan di bidang *food and beverages* (FnB) misalnya, dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan tanah karena pestisida, demikian pula kumpulan sampah plastik yang dikirim ke tempat pembuangan massal yang memancarkan gas beracun, pabrik tekstil pencemaran air dan dampak kerusakan lingkungan lainnya yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

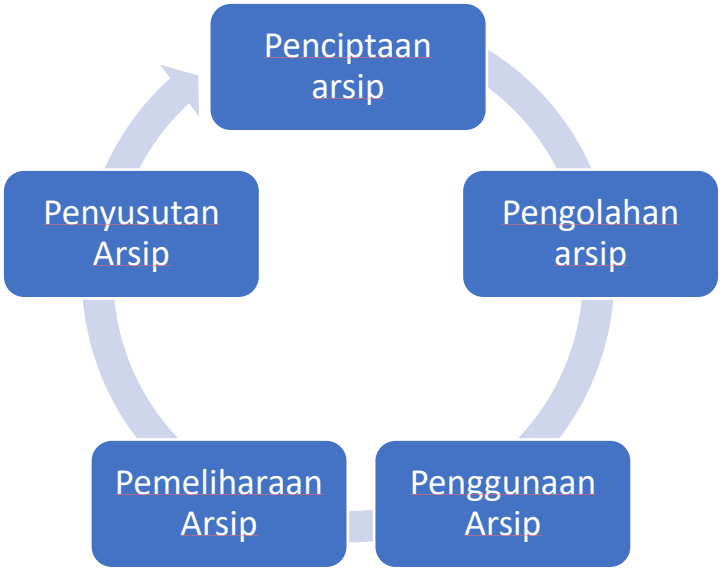
Berbicara pada kemajuan teknologi efek positifnya tentu juga banyak, selain menghemat waktu bekerja, juga efisien dan mampu menghasilkan hasil produksi yang lebih baik. Termasuk penggunaan teknologi dalam pengelolaan arsip yang lengkap dan bangunan gedung pusat arsip sebagai bagian komponen penting dalam pengembangan arsip dari sisi desain bangunan. Mengenai pengelolaan arsip didasarkan pada Undang Undang Kearsipan No.43 tahun 2009 yang menyatakan :

(1)Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan

Hak Cipta © 2024, Siti Samsiyah.

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Definisi mengenai arsip ini memiliki makna bahwa setiap kegiatan harus didokumentasikan sebagai bukti kegiatan yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah bagi pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya bukti dari berbagai kegiatan ini dihimpun, diklasifikasikan dalam system yang telah ditentukan.
(2) Pencipta arsip yang terkena kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45, dan Pasal 47 sampai dengan Pasal 54, serta Pasal 56 berlaku bagi: a. lembaga negara; b. pemerintahan daerah; c. perguruan tinggi negeri; dan d. BUMN dan/atau BUMD. Definisi ini memiliki makna adalah kewajiban arsip dinamis dikelola oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi dan BUMN / atau BUMD.
(3)Arsip statis harus dikelola dan diserahkan ke ANRI, bagi kementrian dan lembaga. Bagi perguruan tinggi yang memiliki LKPT maka arsip statisnya diserahkan ke LKPT. Demikian pula untuk arsip pemerintah daerah diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) di tingkat kabupaten/kota dan propinsi. Sedangkan untuk kementrian dan lembaga arsip statisnya diserahkan ke ANRI.

Untuk melakukan pengelolaan arsip termasuk menyimpan arsip dinamis dan statis inilah memerlukan berbagai sarana serta prasarana. Ada beberapa persyaratan dalam pengelolaan, penyimpanan arsip dinamis dan statis ini. Namun seiring kemajuan teknolgi serta penyelamatan lingkungan pengelolaan arsip sudah memerlukan pengarahan ke konsep *green archiv* atau gerakan arsip hijau, yang maknanya dalam pengelolaan arsip diusahakan telah menerapkan sarana dan prasarana yang ramah terhadap lingkungan. Gerakan yang disebut '*green archiv"* ini memang belum populer namun praktisi arsip serta pemerhati arsip perlu menerapkan penggunaaan sarana prasarana arsip yang ramah lingkungan sebagai upaya dalam melestarikan bumi dari kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin meluas bagi profesi kearsipan.
Sebelum membahas mengenai pengembangan program arsip dengan konsep *green archiv* terlebih dahulu dipahami mengenai konsep daur hidup arsip.



Skema 1, siklus hidup arsip

Hak Cipta © 2024, Siti Samsiyah.

Di dalam siklus daur hidup arsip yang tercantum di atas menjelaskan mengenai perjalanan dalam pengelolaan arsip.

1.Arsip diciptakan, arsip diciptakan adalah dokumen yang dibuat atau diterima pada instansi. Apabila instansi tersebut membuat dokumen harus sesuai dengan tata naskah dinas (TND) yang sudah disahkan oleh pimpinan tertnggi pada instansi tersebut, atau arsip tercipta berupa penerimaan arsip dari pihak eksternal atau diluar instansi.

2.Arsip diolah, arsip diolah dengan memberikan kode klasifikasi sebagai kode penyimpanan arsip ke dalam formulir berkas arsip. Kode klasifikasi ini ada 2 kategori yakni klasifikasi fasilitatif adalah klasifikasi untuk arsip -arsip yang berkaitan dengan unsur penunjang bagi instansi meliputi

1. Perencanaan
2. Hukum
3. Organisasi dan ketatalaksanaan
4. Kearsipan
5. Kerumahtanggaan
6. Perlengkapan
7. Hubungan masyarakat
8. Pendidikan dan Pelatihan
9. Teknologi komunikasi dan informasi
10. Pengawasan
11. Kepegawaian
12. Keuangan
13. badan usaha

Klasifikasi substantif merupakan sistem penyimpanan arsip untuk unsur substansi di instansi meliputi (diantaranya) – sebagai contoh klasifikasi untuk perguruan tinggi

1. Penerimaan mahasiswa
2. Kurikulum
3. Tenaga pendidik
4. Kemahasiswaan
5. Perkuliahan
6. Data, informasi dan pengembangan akademik
7. Penunjang akademik
8. Penelitian
9. Pengabdian kepada masyarakat
10. Publikasi jurnal/ buku
11. Wisuda dan alumni
12. Penjaminan mutu
13. Tata pamong

3. penggunaan arsip, setelah arsip diolah selanjutnya arsip tersebut dikirim ke yang berhak dan selanjutnya arsip dipelihara melalui fase alih media arsip atau preservasi dan restorsi arsip.

4. Tahap akhir adalah penyusutan, pada tahap ini arsip mengalami penanganan sebagai berikut,

a. arsip dipindahkan dari unit pengolah arsip ke *record center* atau penyimpanan arsip inaktif.
b. arsip dimusnahkan karena arsip-arsip ini sudah tidak memiliki nilai guna lagi dan berketerangan musnah pada jadwal retensi arsipnya (JRA) nya. Arsip yang musnah harus musnah dari sisi fisik serta informasinya. Tatacara pemusnahan arsip ini, arsip harus dilebur menjadi bubur kertas, ada juga yang melalui pembakaran atau menuangkan zat kimia

Hak Cipta © 2024, Siti Samsiyah.

tertentu hingga arsip musnah/hancur.

c. arsip diserahkan, yakni arsip yang diserahkan dari unit kearsipan 2 ke pusat arsip/LKPT/LKD setempat.

Didalam teori pengelolaan arsip komposisi dalam penanganan arsip adalah

a. arsip aktif 30%
b. arsip inaktif 25%
c. arsip musnah 30%
d. arsip statis 15%

Dengan melihat komposisi tersebut maka pengelola arsip dapat memperkirakan jumlah perangkat arsip yang diperlukan yang berkaitan dengan program pengelolaan arsip dengan konsep *green archiv.*

Serangkaian siklus arsip yang telah dijelaskan di atas memerlukan sarana serta prasarananya demikian pula volume arsip tersebut juga memerlukan ruang atau tempat untuk penyimpanan arsip. Dengan berdasarkan kondisi ini serta kosep *green archiv* atau pengelolaan arsip yang ramah lingkungan maka diperlukan identifikasi tahapan dalam pengelolaan arsip yang dapat difasilitasi dengan pengelolaan arsip dengan konsep *green archive*.

Bagaimanakah keberlanjutan program pengembangan arsip dengan konsep 'green archive'

METODE

Penelitian dekriptif kualitatif ini adalah penelitian yang menggambarkan keadaan atau situasi yag riel terjadi saat ini. Data yang dihimpun berupa data primer dan data sekunder.

Data primer dihimpun dengan mengobservasi lokasi pusat arsip atau *record center* yang ada di lingkup kota Tangerang Selatan. Dari bangunan pusat arsip dan *record center* ini diidentifikasi kondisinya dari sisi bangunannya hingga sarana dan prasarananya termasuk tatacara dalam pengelolaan arsip. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dalam format cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Data – data tersebut selanjutnya dihimpun, dikodifikasi dan ditabulasikan, terakhir dari data yang telah diolah ini diberikan narasi sehingga memperjelas temuan-temuan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pengambilan data primer dan data sekunder sebagai pendukung menyatakan program kearsipan yang ramah lingkungan/*green archive* unsur –unsurnya meliputi

1. Konstruksi

Bahan bangunan untuk pusat arsip harus kokoh dan telah memperhitungkan daya muat penyimpanan arsip. Untuk kepentingan keselamatan maka secara berkala perlu di kalibrasi daya muat lantai pada penyimpanan arsip. Mengenai material bangunannya telah terstandar yakni bukan bahan yang mudah mendatangkan rayap atau semut (misalnya kayu). Jendela disesuaikan dengan luas ruangan terutama untuk ruangan layanan arsip yang memungkinkan tidak 24 jam menggunakan *ac*. Posisi gedung, jendela, dan pintu harus dirancang sedemikian rupa sehingga sinar matahari, angin, dan debu tidak langsung masuk ke ruangan. Gedung pusat arsip sebaiknya dibuat lebih tinggi sebab ruangan yang tinggi akan mengoptimalkan penggunaan ruangan. Gedung pusat arsip dapat bertingkat dan dapat pula tidak bertingkat. Apabila bangunan bertingkat, masing-masing lantai tingginya 260—280 cm. Apabila bangunan tidak bertingkat, tinggi ruangan disesuaikan dengan tinggi rak yang digunakan.

Hak Cipta © 2024, Siti Samsiyah.

2. Ruangan

Ruangan untuk pusat arsip diatur dan dirancang sehingga kekuatan lantai, dinding, atap, atau langit-langit dalam kondisi yang baik. Penggunaan ruang untuk peralatan penyimpanan arsip, baik rak penyimpanan vertikal maupun rak penyimpanan horizontal, harus diperhitungkan dengan baik.



Gambar 2. Rak Arsip

3. Perlengkapan

Perlengkapan pokok dari pusat arsip sebagai tempat khusus menyimpan arsip inaktif adalah rak arsip yang terbuat dari baja atau metal yang memiliki ketinggian yang dapat disesuaikan dengan tinggi ruangan. Untuk ruang simpan yang memiliki ketinggian 260—280 cm, dapat dipergunakan rak setinggi 200—220 cm. Penggunaan rak dinamis yang pada umumnya disebut roll o'pact dapat menampung volume arsip yang lebih banyak dibandingkan rak statis.

Hak Cipta © 2024, Siti Samsiyah.



Gambar 3. Roll Opack

Boks arsip yang digunakan berukuran 37 x 9 x 27 cm untuk boks kecil dan 37 x 19 x 27 cm untuk boks besar. (untuk boks arsip tingkat keasaman pH 7 - 8) untuk realisasi green archiv bahan material boks dapat berasal dari bahan daur ulang dengan memperhatikan Tingkat keasaman bahan boks tesebut.

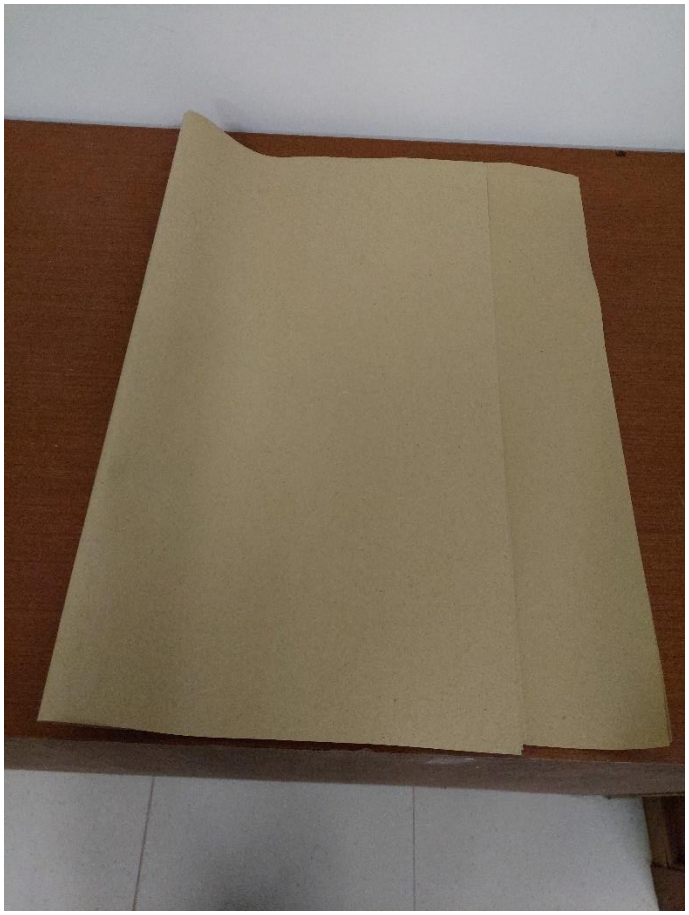


Gambar 4. Boks kecil dan boks besar

Hak Cipta © 2024, Siti Samsiyah.

4. Kertas Kissing

Kertas kissing adalah kertas yang digunakan untuk membungkus arsip statis yang disimpan, tujuannya supaya arsip tidak mudah terkena rayap.



Gambar 5. kertas kissing

5. Peralatan preservasi arsip

Untuk mengurangi keasaman pada arsip dilakukan deadifikasi. Pada proses ini memerlukan perangkat yang digunakan dalam pengeringan arsip. Berikut contoh alat pengeringan yang terbuat dari kayu.

Hak Cipta © 2024, Siti Samsiyah.



Gambar 6. Rak tempat pengeringan arsip setelah proses deasidifikasi

Sebagai kegiatan yang menghasilkan bahan yang dapat di daur ulang kegiatan kearsipan dapat melakukan re- cycle seperti arsip tekstual yang sudah dihancurkan menjadi bahan baru yang siap digunakan.



Gambar 7. arsip tekstual yang sudah dihancurkan

Hak Cipta © 2024, Siti Samsiyah.

KESIMPULAN

Kegiatan kearsipan selain keberadaan gedung pusat arsip sebagai tempat penyimpanan arsip juga terdapat perangkat lunak kearsipan sebagai bagian dari sarana dan prasarana arsip yang dapat menggunakan bahan daur ulang. Namun penggunaan daur ulang yang berbahan kertas ini perlu standarisasi terlebih dahulu diantaranya pH sekitar 7-8. Dengan melihat jumlah pusat arsip yang ada secara nasional saat ini dan yang ada di lingkup Tangerang Selatan pengembangan program kearsipan dengan konsep green archive ini akan berdampak pada pelestarian lingkungan. Pengembangan program kearsipan dengan konsep green archiv ini dimulai dari sarana kearsipan atau perangkat lunak seperti guide arsip, penggunaan kertas daur ulang, box arsip, folder, dan sarana lain yang dapat diperoleh dari proses daur ulang.

REFERENSI

Azmi. (2016). Signifikansi Empat Instrumen Pokok Pengelolaan Arsip Dinamis (Significance of Four Main Instruments on Records Management). ANRI : Jurnal Kearsipan, Vol. 11. No. 12 Desember 2016

Daryana, Yayan. (2014) *(Buku Materi Pokok) Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip.* Tangerang Selatan : P2M Universitas Terbuka

Gunarto, Imam. Eka Kusmayadi. (2022) *(Buku Materi Pokok) Management Pusat Arsip*. Tangerang Selatan, P2M Universitas Terbuka

Hidaya, Sevi Sulistiani. (2021). Preservasi Pengetahuan Arsiparis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Jogjakarta : UGM, Jurnal Khazanah, Vol. 14. No. 2

Pratama, Raistiwar. 2018. Dari Dutch Manual Hingga Records in Contexts : Perubahan Kesinambungan Prinsip -Prinsip Kearsipan. ANRI : Jurnal Kearsipan Vol.13. No.2, Desember 2018.

Widiatmoko, Adi Putanto dkk. (2022). Restorasi Arsip di KHP Widyabudaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jogjakarta : UGM, Jurnal Khazanah, Vo. 15 No. 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

Hak Cipta © 2024, Siti Samsiyah.

Studi Pengelolaan Arsip Vital di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Sri Widiyanti[1], Ismaya[2]
[1]Kearsipan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Jakarta
[2]Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Muhammadiyah Enrekang
e-mail: widiyanti232017@gmail.com

Abstrak

Arsip vital merupakan catatan atau dokumen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan operasional sebuah organisasi atau institusi. Arsip vital berisi informasi krusial yang tidak dapat digantikan jika hilang atau rusak. Oleh karena itu, pengelolaan arsip vital menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan, kelengkapan, dan akses yang tepat terhadap arsip-arsip tersebut. Pengelolaan arsip vital meliputi proses identifikasi, perlindungan, penyimpanan, dan pemulihan arsip vital dalam kondisi darurat atau bencana. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup Kementerian Pertanian, bahwa "kebijakan yang terkait dengan program arsip vital ditetapkan oleh Menteri Pertanian" serta "Penangungjawab program arsip vital pada Unit Pengolah Kementerian Pertanian adalah: a) Pimpinan Unit Kerja Eselon II pada Satuan Kerja Kantor Pusat; dan b) Pimpinan Unit Kerja Eselon II dan Eselon III pada Satuan Kerja di UPT/Instansi Vertikal. Bersumber dari hasil pengawasan internal kearsipan Tahun 2021 di Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dari aspek pemeliharaan mendapatkan nilai 1.270 dengan pemenuhan nilai standard 2.200. Penulis tertarik untuk membahas bagaimana pengelolaan dan pelindungan serta pengamanan akses arsip vital pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Partanian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi kualitatif yang bersifat eksploratif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview), studi dokumen dan refrensi serta pengamatan langsung (observasi partisipasi). Hasil penelitian dan pembahasan pada pengelolaan dan pelindungan serta pengamanan akses arsip vital pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sudah cukup baik.

Kata Kunci: *Arsip, Arsip Vital, Pengelolaan Arsip Vital*

PENDAHULUAN

Kegiatan administrasi sebuah organisasi atau lembaga akan menghasilkan arsip, yang tercipta dan merupakan bukti otentik serta rekam jejak perjalanan sebuah organisasi. Pelaksanaan oprasional sebuah organisasi atau lembaga tidak akan dapat terlepas dari proses penciptaan arsip. Arsip vital merupakan catatan atau dokumen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan operasional sebuah organisasi atau institusi. Arsip vital berisi informasi krusial yang tidak dapat digantikan jika hilang atau rusak. Oleh karena itu, pengelolaan arsip vital menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan, kelengkapan, dan akses yang tepat terhadap arsip-arsip tersebut. Pengelolaan arsip vital meliputi proses identifikasi, pelindungan, penyimpanan, dan pemulihan arsip vital dalam kondisi darurat atau bencana. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan

Hak Cipta © 2024, Sri Widiyanti , Ismaya.

risiko kehilangan atau kerusakan arsip vital yang dapat mengganggu kegiatan operasional organisasi atau institusi.

Arsip vital sering kali menjadi bukti hukum untuk melindungi hak dan kepentingan organisasi, karyawan, atau pihak terkait lainnya. Dokumen seperti perjanjian kerja, catatan kepegawaian, dan paten dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau tuntutan hukum. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian. A.P., & Amin T.K. (2017) bahwa pengelolaan arsip vital yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan informasi para pegawai.

Berdasarkan Pasal 56, ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 bahwa "Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib membuat program arsip vital". Hal ini dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup Kementerian Pertanian, bahwa "kebijakan yang terkait dengan program arsip vital ditetapkan oleh Menteri Pertanian" serta "Penangungjawab program arsip vital pada Unit Pengolah Kementerian Pertanian adalah: a) Pimpinan Unit Kerja Eselon II pada Satuan Kerja Kantor Pusat; dan b) Pimpinan Unit Kerja Eselon II dan Eselon III pada Satuan Kerja di UPT/Instansi Vertikal."

Penting arsip vital bagi keberadaan suatu organisasi menuntut untuk dilakukan pengelolaan arsip vital dengan baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, salah satu tanggungjawab dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (KBMN) menyelenggarakan fungsi pengelolaan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian. Bersumber dari hasil pengawasan internal kearsipan Tahun 2021 di Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa Biro KBMN dari aspek pemeliharaan mendapatkan nilai 1.270 dengan pemenuhan nilai standard 2.200. Salah satu aspek dalam penilaian tersebut adalah mengenai pemeliharaan arsip vital, dengan fokus penilaian pada identifikasi arsip vital dan penyusunan daftar arsi vital yang belum sesuai ketentuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana pengelolaan dan pelindungan serta pengamanan akses arsip vital pada Biro KBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

TINJAUAN PUSTAKA

Arsip berdasarkan fungsinya menurut Armida Silvia Asriel (2018) dapat dibedakan menjadi dua yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah "arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009). Konsep dari arsip dinamis memiliki dua hal yang sangat mendasar, yaitu fungsi dan kewajiban penyimpanan. Fungsi ditekankan untuk kepentingan organisasi yang menciptakan sementara penyimpan arsip dinamis harus sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang diatur dalam jadwal retensi arsip yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga (Imam Gunarto, dkk., 2021).

Pencipta arsip bertanggungjawab untuk pengelolaan arsip dinamis karena pencipta arsip sangat memahami konteks dari penciptaan, penggunaan, dan nilai arsip tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pada organisasi. Dalam kegiatan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dilakukan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan pengelolaan arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif.

Hak Cipta © 2024, Sri Widiyanti , Ismaya.

Berdasarkan Pasal 1, ayat (4) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan bahwa "Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang."

Menurut Krihanta (2022) bahwa "ciri-ciri arsip vital harus ada demi keberlangsungan hidup organisasi, fisik dan informasinya memerlukan perlindungan dan pengamanan, fisik arsipnya tidak dapat tergantikan, merupakan asset bagi organisasi, memiliki fungsi dinamis, diklasifikasikan sebagai arsip tingkat/kelas satu". Selain ciri-ciri tersebut, arsip vital juga mempunyai fungsi besar bagi kelangsungan oprasional penciptanya, selain sebagai memori organisasi, arsip vital dapat dijadikan sebagai bukti hukum dan menunjang litigasi, serta arsip vital merupakan asset yang berfungsi untuk melindungi kepentingan hak pribadi maupun hak lainnya (Krihanta, 2022).

Untuk kelancaran dan berjalannya program arsip vital pada suatu organisasi, maka perlu dilaksanakan sesuai dengan ketetapan. Ketetapan-ketetapan tersebut diantaranya adalah dengan penetapan kebijakan mengenai pengelolaan arsip vital, pengorganisasian arsip vital, pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar pengelolaan arsip vital, prosedur baku pengelolaan arsip vital, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program arsip vital serta peran penting sumber daya manusia dalam pengelola arsip vital. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 bahwa "Prosedur pengelolaan, pelindungan dan pengamanan arsip vital meliputi:

1) Prosedur Pengelolaan terdiri dari kegiatan: (a) Identifikasi, memuat: analisis organisasi, pendataan, pengolahan, dan penentuan arsip vital; (b) Penataan Arsip Vital, meliputi: pemeriksaan, menentukan indeks berkas, penggunaan tunjuk silang, pelabelan dan penempatan arsip; (c) Menyusun Daftar Arsip Vital yang ada di Unit Kerja.
2) Pelindungan dan Pengamanan Arsip Vital meliputi: (a) Metode pelindungan arsip vital, meliputi: duplikasi, pemencaran, dan dengan peralatan khusus (*vaulting*); (b) Pengamanan fisik arsip vital, mencakup: sistem keamanan ruang penyimpanan, tingkat ketinggian penempatan, struktur bangunan dan penggunaan ruang; (c) Pengamanan informasi arsip, meliputi: menjamin penggunaan oleh pihak yang berhak, memberi kode rahasia, dan menetapkan spesifikasi hak akses".

Upaya untuk melindungi dan memulihkan arsip vital yang memiliki nilai tinggi bagi sebuah organisasi atau institusi maka perlu dilakukan penyelamatan dan pemulihan arsip vital. Berikut beberapa poin penting terkait penyelamatan dan pemulihan arsip vital menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No 06 Tahun 2005 antara lain: "1) Penyelamatan, meliputi: evakuasi arsip vital, identifikasi jenis arsip, pemulihan kondisi (*recovery*); 2) Pemulihan (*recovery*), meliputi: stabilisasi dan pelindungan arsip yang dievakuasi, penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi kebutuhan pemulihan, pelaksanaan penyelamatan, prosedur penyimpanan kembali, dan evaluasi".

Dalam upaya melindungi kerahasiaan informasi pada arsip vital maka dibuat prosedur ketentuan akses yang ketat terhadap arsip vital, hal ini bertujuan untuk menjaga agar kelangsungan operasional organisasi tetap berjalan jika terjadi insiden seperti kebakaran, bencana alam, atau ancaman lainnya. Ketentuan akses arsip vital, memuat: ketentuan akses bagi pengguna yang berhak di lingkungan internal dan pengguna yang berhak di lingkungan eksternal (Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015).

Hak Cipta © 2024, Sri Widiyanti , Ismaya.

Untuk mencegah/menghambat unsur perusak fisik arsip dan sekaligus mencegah pencurian isi informasi dari arsip vital maka arsip vital disimpan pada tempat penyimpanan khusus. Menurut Krihanta (2022) bahwa "Lokasi penyimpanan arsip vital dapat dilakukan baik secara *on site* yaitu penyimpanan arsip vital yang ditempatkan pada ruangan tertentu dalam satu gedung atau perkantoran dalam lingkungan lembaga pencipta arsip ataupun *off site* yaitu penyimpanan arsip vital yang ditempatkan di luar lingkungan gedung perkantoran lembaga pencipta arsip".

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi kualitatif yang bersifat eksploratif. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk dapat melihat bagaimana gambaran pengelolaan arsip vital di Biro KBMN. Sementara metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) pada informan dari unit pengolah. Studi dokumen dan refrensi yang berkaitan dengan pengelolaan arsip vital, dan pengamatan langsung (*observasi partisipasi*) pada unit pengolah pengelola arsip vital pada Biro KBMN. Dari data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis data, meliputi reduksi data, penyajian data, dan tahap terkahir yaitu pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Arsip Vital pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Biro KBMN memiliki empat kelompok kerja yaitu Kelompok Pengendalian Intern, Kelompok Pelaporan Keuangan, Kelompok Barang Milik Negara, Kelompok Pelaksanaan Anggaran dan Sub Bagian Tata Usaha. Dari pendataan dan analisis organisasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kelompok Barang Milik Negara memiliki fungsi sebagai penyelenggara pengelolaan barang milik negara, pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara wajib "melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya" (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014). Sementara Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pada Biro KBMN. Berdasarkan identifikasi mengenai arsip vital, terdapat dua unit kerja yang penciptakan dan mengelola arsip vital yaitu Kelompok Barang Milik Negara dan Sub Bagian Tata Usaha.

Tabel 1. Daftar Hasil Identifkasi Arsip Vital di Biro KBMN Tahun 2024

Unit Kerja	Jenis Arsip Vital
Kelompok Barang Milik Negara	
1) Tim Kerja Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara	1. Berkas Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara 2. Berkas Surat Keputusan Status Penggunaan Barang Milik Negara 3. Berkas Surat Keputusan Status Rumah Negara
2) Tim Kerja Penertiban Barang Milik Negara	1. Sertipikat Tanah 2. BPKB
Sub Bagian Tata Usaha	1. Personal file pegawai Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hak Cipta © 2024, Sri Widiyanti , Ismaya.

Unit Kerja	Jenis Arsip Vital
	2. BPKB
	3. STNK

(Sumber: Biro KBMN, Tahun 2024)

Pada Tabel 1. tergambar sebaran arsip vital yang tercipta dan dikuasai oleh Biro KBMN. Penggunaan arsip vital pada Biro KBMN selain sebagai asset untuk melindungi kepentingan hak individu dan organisasi juga dimanfaatkan sebagai bukti hukum dan litigasi (penyelesaian masalah hukum di pengadilan).

Penataan arsip vital pada Biro KBMN dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan berkas arsip serta dilakukan pelabelan pada arsip vital yang disimpan. Jenis media rekam arsip vital pada Biro KBMN sebagaian besar masih menggunakan kertas sebagai media rekam dan sebagaian kecil sudah dialihmediakan dalam format file Pdf.

Tabel 2. Sarana Penyimpanan Arsip Vital di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Unit Kerja	Jenis Arsip Vital	Sarana Penyimpanan
Kelompok Barang Milik Negara		
1) Tim Kerja Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara	1. Berkas Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara	Boks arsip dan Roll Opack
	2. Berkas Surat Keputusan Status Penggunaan Barang Milik Negara	Boks arsip dan Roll Opack
	3. Berkas Surat Keputusan Status Rumah Negara	Boks arsip dan Roll Opack
2) Tim Kerja Penertiban Barang Milik Negara	1. Sertipikat Tanah	Brankas
	2. BPKB	Brankas
Sub Bagian Tata Usaha	1. Personal file pegawai Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Roll Opack
	2. BPKB	Brankas
	3. STNK	Brankas

(Sumber: Biro KBMN, Tahun 2024)

Pada Tabel 2. tergambar sarana penyimpanan arsip vital yang digunakan pada Biro KBMN. Arsip vital pada Tim Kerja Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa surat keputusan disimpan pada boks arsip dan roll Opack. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa jumlah arsip vital yang tercipta pada Tim Kerja Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara, pada setiap tahunnya lebih dari 100 berkas arsip vital. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan arsip pada ruang kerja Tim Kerja Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/PERMENTAN/TU.140/09/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip lingkup Kementerian Pertanian bahwa pemanfaatan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara berketerangan permanen pada nasib akhir arsip, nampaknya perlu dikaji ulang. Hal ini berkaitan

Hak Cipta © 2024, Sri Widiyanti , Ismaya.

dengan pengelolaan risiko menyimpan arsip yang terlalu lama sehingga organisasi dapat mengoptimalkan penyimpanan arsip yang diperlukan dan membuang arsip yang tidak lagi bernilai guna serta dapat menghemat biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip.

Pengamanan dan Pelindungan Arsip Vital pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pelindungan arsip vital merupakan upaya untuk melindungi arsip-arsip penting agar terhindar dari kerusakan, kehilangan, atau akses yang tidak sah. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melindungi arsip vital diantaranya adalah duplikasi, pemencaran, vaulting/dengan peralatan khusus (Krihanta, 2022).

Tabel 3. Metode Pelindungan Arsip Vital di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Unit Kerja	Jenis Arsip Vital	Metode Perlindungan
Kelompok Barang Milik Negara		
1) Tim Kerja Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara	1. Berkas Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara	Duplikasi
	2. Berkas Surat Keputusan Status Penggunaan Barang Milik Negara	Duplikasi
	3. Berkas Surat Keputusan Status Rumah Negara	Duplikasi
2) Tim Kerja Penertiban Barang Milik Negara	1. Sertipikat Tanah	Vaulting
	2. BPKB	Vaulting
Sub Bagian Tata Usaha	1. Personal file pegawai Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Duplikasi & Vaulting
	2. BPKB	Vaulting
	3. STNK	Vaulting

(Sumber: Biro KBMN, Tahun 2024)

Dari hasil identifikasi arsip vital dan wawancara dapat tergambar bahwa pada Biro KBMN menggunakan metode pelindungan Duplikasi dan Vaulting untuk penyimpanan arsip vital. Peralatan penyimpan khusus yang digunakan antara lain brankas untuk menyimpan sertipikat tanah, BPKB dan STNK pada Tim Kerja Penertiban Barang Milik Negara dan Sub Bagian Tata Usaha. Semetara roll Opack digunakan untuk menyimpan personal file dan surat keputusan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Tim Kerja Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara

Metode pelindungan duplikasi yang dilakukan oleh Tim Kerja Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara adalah dengan melakukan digitalisasi arsip vital dengan cara memindai atau mengonversikan dari format kertas menjadi arsip elektronik. Dari hasil wawancara dengan responden, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan alih media belum membuat berita acara alih media dan hanya membuat daftar arsip alih media. Namun demikian pada daftar arsip alih media belum mencantumkan nilai hash. Mengutip dari Arsip Nasional Republik Indonesia, (2022) bahwa “Nilai hash adalah nilai numerik dengan panjang yang tetap sesuai algoritma yang digunakan untuk dapat mengidentifikasi data/konten arsip digital secara unik. Nilai hash mewakili

Hak Cipta © 2024, Sri Widiyanti , Ismaya.

sejumlah besar data sebagai nilai numerik yang jauh lebih kecil, sehingga dapat digunakan bersamaan dengan tanda tangan digital". Fungsi mencantumkan nilai hash pada daftar arsip alih media adalah untuk memastikan tidak ada perubahan konten pada file/arsip digital, serta untuk memastikan jika data dikirimkan melalui jaringan yang tidak aman dapat terverifikasi mutu dari data atau konten arsip alih media tersebut.

Pengamanan fisik dan informasi arsip vital merupakan bagian penting dalam manajemen kearsipan yang bertujuan untuk melindungi arsip dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Untuk pengamanan fisik arsip vital, Biro KBMN telah menerapkan kontrol akses, yaitu dengan membatasi akses ke ruangan penyimpanan arsip hanya untuk staf yang berwenang. Sementara untuk pengamanan informasi sudah menggunakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) untuk guide peminjaman arsip.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *pertama*, dalam pengelolaan arsip vital pada Biro KBMN sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 yaitu dengan melaksanakan kegiatan identifikasi arsip vital berdasarkan analisa fungsi organisasi dalam menetukan arsip vital hingga tersusun daftar arsip vital yang berada di Biro KBMN. *Kedua* pada kegiatan pelindungan arsip vital sudah menggunakan metode pelindungan duplikasi, vaulting. Meskipun pada pelindungan vaulting belum dilengkapi dengan berita acara dan nilai hash pada daftar arsip alih media. *Ketiga* pada kegiatan pengamanan fisik arsip dan informasi arsip telah menerapkan kontrol akses, yaitu dengan membatasi akses ke ruangan penyimpanan arsip hanya untuk staf yang berwenang. Sementara untuk pengamanan informasi sudah menggunakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) sebagai guide untuk peminjaman arsip. *Keempat*, belum ada program untuk penyelamatan dan pemulihan dari pelaksanaan program arsip vital pada Biro KBMN.

REFERENSI

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2022). *Naskah Akademik: Kebijakan Standar Metadata Arsip*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Asriel, Armida Silvia. (2018). *Manajemen Kearsipan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Diana Ayu Pamungkas dan Amin Taufiq Kurniawan. (2017). Pengaruh Pengelolaan Arsip Vital Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pegawai di PT. PELINDO III Cabang Tanjung Emas Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3), 51-60.

Gunarto, Imam, dkk. (2021). *Manajemen Pusat Arsip*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Krihanta. (2022). *Pengelolaan Arsip Vital*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Mulyono. Puji, dkk. (2015). *Metodologi Penelitian dan Laporan Kearsipan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Nita Ismayati. (2014). Preservasi Arsip Vital Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Universitas X. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 13(2), 59-68.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No 06 Tahun 2005 Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara. https://jdih.anri.go.id/peraturan/eyJpdiI6InhGcVhHUnUyR0U2djZPbm1RV1NLK2c9PSIsInZhbHVlIjoiVVd1VENLcENRRWM5TlhXWHdNTVFvdz09IiwibWFjIjoiY2RlNWIx

Hak Cipta © 2024, Sri Widiyanti , Ismaya.

NjVkOWNhZWRmN2EyNTc5ZmNkYzY3MTkyOGU1NzVkMTRkMjM4YTIwM2MwZDM0NDk5YzlhZjVjNzViZiIsInRhZyI6IiJ9

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Arsip Vital Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. https://anri.go.id/download/peraturan-kepala-arsip-nasional-republik-indonesia-nomor-49-tahun-2015-tentang-program-arsip-vital-di-lingkungan-arsip-nasional-republik-indonesia-1592972761

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. https://psp.pertanian.go.id/storage/1583/Permentan-Nomor-19-Tahun-2022-Upload-JDIH.pdf

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Lingkup Kementerian Pertanian. https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Permentan_30-2019_tentang_Penyelenggaraan_Kearsipan_lingkup_kementan%20(2).pdf

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/PERMENTAN/TU.140/09/2018 Tentang Jadwal Retensi Arsip Lingkup Kementerian Pertanian https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/Permentan_402018_jadwal_retensi_arsip_kementan.pdf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/27TAHUN2014PP.HTM#:~:text=pembinaan%2C%20pengawasan%20dan%20pengendalian.&text=Menteri%20Keuangan%20selaku%20bendahara%20umum%20negara%20adalah%20Pengelola%20Barang%20Milik%20Negara.

Pratiwi, Desi. (2022). *Manajemen Rekod Aktif.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Hak Cipta © 2024, Sri Widiyanti , Ismaya.

Pengaruh Kebiasaan Bermain Game Online Terhadap Minat Baca Siswa Kelas VI di SD Kerdonmiri I Rongkop

Suharyoto[1], Resty Jayanti Fakhlina[2]
[1]Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
[2]UIN Imam Bonjol Padang
Email : yatataubatannasuha@gmail.com, restyjf@uinib.ac.id

Abstrak

Maraknya permainan-permainan game online oleh anak-anak sekolah dasar, menjadikan game online lebih diminati dari pada membaca buku. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh game online *terhadap minat baca siswa kelas VI di SD Kerdonmiri I Rongkop. Metode penelitian kuantitatif digunakan pada penelitian ini, dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menjadikan seluruh siswa kelas VI dengan jumlah 16 siswa sebagai populasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner untuk mengetahui kebiasaan bermain game online dan minat baca siswa. Selain itu peneliti juga menggunakan instrumen observasi untuk mengetahui kebiasaan bermain game online pada siswa saat di sekolah. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa kebiasaan bermain game online berpengaruh dan memiliki hubungan negatif terhadap minat baca siswa kelas VI di SD Kerdonmiri I Rongkop.*

Kata Kunci: *Minat Baca, Game Online, Perpustakaan, dan Sekolah Dasar*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi baru yang lebih canggih merupakan dampak dari tumbuhnya ilmu pengetahuan (Sima, V., Gheorghe, I. G., Subić, J., & Nancu, D., 2020). Perubahan dalam perkembangan teknologi pendidikan tidak dapat dihindari. Kehidupan sehari-hari masyarakat terus berubah karena kemajuan teknologi baru, yang juga memengaruhi cara mereka belajar, bekerja, bermain, dan bersosialisasi (Fania Isnani, 2023).

Dahulu kehidupan masyarakat sangat berbeda dengan saat ini. Teknologi kini memainkan peran besar dalam dunia pendidikan berkat kemajuan dan kecanggihannya. Banyak metode dan model pembelajaran berbasis teknologi yang tersedia. Kemajuan ini menyederhanakan dan memperbarui cara mengajar dan belajar, sehingga orang lebih sering menggunakan perangkat seluler dalam kehidupan sehari-hari. (Bernacki, M. L., Greene, J. A., & Crompton, H., 2020; Escueta, M., Nickow, A. J., Oreopoulos, P., & Quan, V. (2020)

Kemajuan teknologi telah menjadikan perangkat dengan fungsi praktis menjadi sangat umum dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang menggunakan gadget sering kali masih sangat muda. Salah satu alasannya adalah karena banyak orang tua yang lebih memilih untuk menjaga anak-anak mereka di rumah daripada membiarkan mereka bermain di luar. Akibatnya, banyak siswa yang lebih sering bermain dengan gadget mereka dari pada mengejar minat lainnya (Fania Isnani, 2023). Mereka menganggap bermain gadget lebih menarik daripada membaca buku. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh para pelajar saat menggunakan gadget adalah bermain game online, sehingga mereka menghabiskan waktu untuk kegiatan yang kurang produktif.

Peran orang tua sangat penting dalam kehidupan keluarga, terutama bagi anak-anaknya. Orang tua harus bisa menyampaikan pesan dengan baik dan benar agar anak mengikuti arahannya.

Hak Cipta © 2024, Suharyoto, Resty Jayanti Fakhlina

Jika orang tua selalu memberikan pesan-pesan positif kepada anak, maka anak akan mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Seorang anak dapat berhasil dalam melakukan sesuatu jika ia percaya bahwa ia mampu melakukannya, dan sebaliknya, ia akan gagal jika ia berpikir bahwa ia akan gagal. Pikiran seorang anak sangat dipengaruhi oleh kekuatan komunikasi yang disampaikan oleh orang tua. (Rosy Febriani Daud, 2022)

Game online telah menjadi tren baru bagi banyak orang. Dahulu, anak-anak hanya mengenal permainan tradisional yang dimainkan bersama teman-teman secara langsung, seperti bermain kelereng dan petak umpet. Mereka juga menciptakan permainan mereka sendiri, seperti bermain layang-layang dan mobil-mobilan. Namun, saat ini, anak-anak cenderung tidak tertarik lagi dengan permainan tradisional karena sudah mengenal permainan elektronik seperti game online, baik di ponsel maupun di komputer melalui akses internet. Game online merupakan permainan modern yang menjadi tren saat ini, dengan peminatnya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Anak-anak dianggap lebih sering dan lebih rentan terhadap penggunaan game online dibandingkan orang dewasa.

Menurut Ahmad Tantoni (2019), game online adalah permainan di dunia maya yang memungkinkan terjadinya pertandingan antar manusia dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet, dengan pertandingan yang dapat berlangsung secara lokal, antar negara, atau bahkan global. Game online memiliki fitur-fitur yang menarik dengan gambar dan animasi yang menarik perhatian anak-anak maupun orang dewasa. Game-game ini dirancang khusus untuk membuat pemainnya ingin terus bermain. Salah satu alasan mengapa siswa menjadi kecanduan game online adalah tantangan yang ada di setiap game, yang membuat pemain merasa tertantang. Akibatnya, orang yang kecanduan akan merasa ketergantungan dan sulit untuk melepaskan diri dari game tersebut jika tidak bisa mengendalikan diri. Banyak orang yang kini menghabiskan waktu kesehariannya hanya untuk bermain game online, baik di ponsel, di rumah, maupun di warnet. Banyaknya anak sekolah, khususnya siswa sekolah dasar, yang bermain game online mendorong peneliti untuk meneliti pengaruh bermain game online terhadap minat baca siswa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, sebuah survei pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 91,47% anak usia sekolah lebih suka menonton televisi, dan hanya 13,11% yang suka membaca (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018). Secara umum, data dari BPS pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 91,58% penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas lebih suka menonton televisi, dan hanya sekitar 17,58% yang suka membaca buku, koran, atau majalah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi penghalang bagi minat baca anak-anak.

Atas dasar itulah peneliti meneliti dampak game online terhadap minat baca siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada dampak bermain game online terhadap minat baca siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Fokusnya adalah menggambarkan, menginvestigasi, dan menjelaskan fenomena yang diamati tanpa melakukan manipulasi. Penelitian dilakukan di SD Kerdonmiri I Rongkop dengan melibatkan 16 siswa kelas VI. Tahapan penelitian diawali dengan merancang angket kuesioner. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain dengan menggunakan angket, observasi,

Hak Cipta © 2024, Suharyoto, Resty Jayanti Fakhlina

dan dokumentasi. Oleh karena itu, instrumen pengumpulan data yang diperlukan antara lain lembar kuesioner, observasi langsung, dan dokumen terkait.

1. Kuesoner

   Alat penelitian yang digunakan adalah kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai dampak game online terhadap minat baca siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop. Kuesioner ini diberikan secara langsung kepada responden dan berisi pertanyaan tertutup untuk memastikan jawaban yang cepat dan objektif. Peneliti menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban: (1) Selalu (skor 4), (2) Sering (skor 3), (3) Jarang (skor 2), dan (4) Tidak Pernah (skor 1). Setiap pertanyaan dalam kuesioner diberi skor dari 1 hingga 4. Pilihan jawaban yang ambigu dihilangkan untuk menghindari hasil yang bias.

Tabel 1. Skala Likert

No.	Pilihan Jawaban	Skor
1.	Selalu	4
2.	Sering	3
3.	Jarang	2
4.	Tidak Pernah	1

2. Observasi

   Observasi digunakan untuk mengamati dan mendeskripsikan perilaku subjek dalam penelitian ini. Observasi ini merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengamati secara langsung, sehingga dapat disebut sebagai penelitian partisipatif karena peneliti harus terlibat langsung dengan responden. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi terkendali, dilakukan dalam ruang yang terkendali. Peneliti memiliki kebebasan untuk menentukan lokasi, waktu, dan kondisi observasi, serta siapa yang akan diobservasi. Partisipan dipilih secara acak dari kelompok variabel penelitian. Peneliti mengamati dan mencatat perilaku secara rinci dan deskriptif, kemudian mengelompokkan data ke dalam berbagai kategori.

3. Dokumentasi

   Teknik dokumentasi digunakan untuk memverifikasi keabsahan data yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut penilaian. Hal ini meliputi pengumpulan data sekolah, identitas guru, serta foto-foto kegiatan penelitian. Dokumentasi dilakukan selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop yang berlokasi di Dusun Kerdonmiri, Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul. Analisis deskriptif dari hasil penelitian meliputi data yang diperoleh dari kuesioner, observasi, dan dokumentasi, dengan fokus pada siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop. Berikut ini adalah informasi dasar yang menggambarkan informasi narasumber:

Tabel 2. Informasi Narasumber

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelas
1	Ade Nizam Nur Hidayat	L	VI
2	Airi Nur Kifalin	P	VI
3	Allifia Nadia Zulfaa	P	VI
4	Allifna Aulia Rahma	P	VI

Hak Cipta © 2024, Suharyoto, Resty Jayanti Fakhlina

5	Annasva Ray Tama	L	VI
6	Annisa Widyawati	P	VI
7	Ardhisya Fitriana	P	VI
8	Clara Fidelia Angelin	P	VI
9	Eva Jesika Yulianti	P	VI
10	Hana Fadila Sari	P	VI
11	Jessica Daniella	P	VI
12	Leoni Asta Anfaya	P	VI
13	Niwa Razan Hibatullah	L	VI
14	Nurul Adzimah Uluani	P	VI
15	Pram Aditian	L	VI
16	Rayhan Setiawan	L	VI

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan pengaruh kebiasaan bermain game online terhadap minat baca siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop. Peneliti berpendapat bahwa *bermain game online* akan memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi anak.

1. Hasil Kuesioner

a. Hasil Angket Pengaruh Game Online

Data yang dikumpulkan dalam penelitian mengenai game online meliputi 15 pernyataan dalam kuesioner yang dijawab oleh 16 siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop. Hasil kuesioner mengenai dampak game online terhadap minat baca siswa dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.
Hasil Angket Pengaruh Game Online

No.	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Jml.
1	Ade Nizam Nur Hidayat	4	4	3	3	4	3	2	3	1	3	2	3	1	3	4	43
2	Airi Nur Kifalin	4	3	2	3	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	4	44
3	Allifia Nadia Zulfaa	4	2	3	4	4	3	3	4	2	4	3	4	2	4	4	50
4	Allifna Aulia Rahma	4	3	4	2	3	4	4	2	3	3	4	2	3	3	2	46
5	Annasva Ray Tama	3	4	3	4	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	43
6	Annisa Widyawati	3	3	2	4	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	46
7	Ardhisya Fitriana	4	2	3	2	2	4	2	3	4	4	4	3	4	4	3	48
8	Clara Fidelia Angelin	4	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	44
9	Eva Jesika Yulianti	2	2	4	3	3	3	4	3	4	2	4	1	4	2	2	43
10	Hana Fadila Sari	4	1	3	4	4	3	3	2	3	2	3	2	3	3	4	44
11	Jessica Daniella	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	49

Hak Cipta © 2024, Suharyoto, Resty Jayanti Fakhlina

12	Leoni Asta Anfaya	3	4	3	2	4	3	3	4	3	2	3	4	3	2	2	45
13	Niwa Razan Hibatullah	4	2	4	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	41
14	Nurul Adzimah Uluani	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	41
15	Pram Aditian	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	44
16	Rayhan Setiawan	2	3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	2	3	4	2	44
	JUMLAH	**54**	**45**	**48**	**49**	**51**	**49**	**47**	**48**	**47**	**46**	**49**	**41**	**47**	**47**	**47**	**715**

Berdasarkan data hasil angket yang terdapat pada tabel 3. hasil angket pengaruh game online diatas, dapat dipahami bahwa pernyataan angket tentang dampak postif game online terdapat pada nomor 1-8. Dengan item hasil angket pernyataan nomor 1 dengan isi penyataan *"Bermain game online dapat meningkatkan kelincahan tangan dan mata Anda",* mendapat skor paling tinggi dibandingkan item pernyataan lainnya. Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami, bahwa salah satu dampak positif dari bermain game online yang paling banyak dirasakan oleh siswa yaitu dapat meningkatkan kemampuan motorik siswa, yaitu melatih kelincahan gerakan tangan dan mata serta koordinasi otak. Berdasarkan data hasil angket yang terdapat pada tabel diatas, dapat dipahami bahwa pernyataan angket tentang dampak negatif game online terdapat pada nomor 9-15. Dengan item hasil angket pernyataan nomor 11 dengan isi penyataan *"Bermain game online dapat membuat Anda sering lupa waktu",* mendapat skor paling tinggi dibandingkan item pernyataan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu dampak negatif dari bermain game online yang banyak dirasakan oleh siswa kelas VI di SD Kerdonmiri I Rongkop bahwa game online dapat membuat mereka terlalu asyik bermain sehingga sering lupa waktu, dan membuang-buang waktu hanya untuk bermain game online.

b. Hasil Angket Minat Baca Siswa

Informasi mengenai minat baca dikumpulkan melalui 15 pernyataan dalam kuesioner yang dijawab oleh 16 siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop. Hasil dari kuesioner tentang minat baca siswa dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4.
Hasil Angket Minat Baca Siswa

No.	Nama	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Jml.
1	Ade Nizam Nur Hidayat	4	4	3	3	4	3	2	3	1	3	2	3	1	3	4	43
2	Airi Nur Kifalin	3	3	2	3	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	4	43
3	Allifia Nadia Zulfaa	3	2	3	4	4	3	3	4	2	4	3	4	2	4	4	49
4	Allifna Aulia Rahma	3	3	4	2	3	4	4	2	3	3	4	3	3	3	2	46
5	Annasva Ray Tama	3	4	3	4	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	46
6	Annisa Widyawati	3	3	2	4	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	46
7	Ardhisya Fitriana	3	2	3	2	2	4	2	3	4	4	4	3	4	4	3	47
8	Clara Fidelia Angelin	3	3	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	45

Hak Cipta © 2024, Suharyoto, Resty Jayanti Fakhlina

9	Eva Jesika Yulianti	2	2	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	2	2	45
10	Hana Fadila Sari	4	1	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	45
11	Jessica Daniella	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	49
12	Leoni Asta Anfaya	3	4	3	2	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	48
13	Niwa Razan Hibatullah	4	2	4	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	42
14	Nurul Adzimah Uluani	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	42
15	Pram Aditian	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
16	Rayhan Setiawan	2	3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	2	3	4	2	44
	JUMLAH	**49**	**45**	**47**	**49**	**50**	**49**	**47**	**48**	**47**	**53**	**49**	**48**	**48**	**49**	**48**	**726**

Berdasarkan hasil kuesioner yang tertera pada tabel 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan nomor 25 yang menyatakan 'Anda selalu mencatat materi pelajaran yang diberikan oleh guru' memperoleh skor tertinggi diantara pernyataan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa sering mencatat materi pelajaran ketika pembelajaran berlangsung. Di sisi lain, pernyataan nomor 17 yang menyatakan 'Anda tidak merasa bosan dalam membaca di sekolah maupun di rumah' memperoleh skor terendah, hal ini mengindikasikan bahwa siswa merasa bosan dan kurang bersemangat dalam membaca baik di sekolah maupun di rumah.

Dari hasil kuesioner tentang pengaruh game online terhadap minat baca siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop, dapat diketahui bahwa game online memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif terbesar dari game online adalah meningkatkan kelincahan tangan dan mata siswa, sedangkan dampak negatifnya, terlihat dari pernyataan angket “Bermain game online dapat membuat Anda sering lupa waktu” dan “Anda merasa bosan membaca di sekolah dan di rumah”, dialami oleh sebagian besar siswa. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan bermain game online memiliki hubungan yang negatif terhadap minat baca siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop. Oleh karena itu, mengatur waktu bermain game online dengan baik dapat memberikan dampak positif bagi minat baca siswa, sedangkan bermain secara berlebihan dan tanpa pengawasan dapat merugikan minat baca siswa.

2. Hasil Observasi

Peneliti telah melakukan observasi mengenai pengaruh kebiasaan bermain game online terhadap minat baca siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop. Observasi dilakukan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 13 sampai 15 Mei 2024, di SD Kerdonmiri I Rongkop. Selama observasi, peneliti mengamati kebiasaan 16 siswa kelas VI di sekolah. Berbagai hasil dan aspek yang diamati selama observasi didokumentasikan dalam tabel berikut:

Observasi hari pertama, Senin 13 Mei 2024

No.	Aspek yang diamati	Jumlah Siswa	Jumlah	
			Ya	Tidak
1.	Siswa sering bermain game saat istirahat	16	11	5
2.	Siswa lebih senang bermain game daripada bermain dengan temannya	16	11	5

Hak Cipta © 2024, Suharyoto, Resty Jayanti Fakhlina

3.	Siswa lebih senang bermain game daripada mengunjungi perpustakaan sekolah	16	13	3
	Jumlah		35	13
	Prosentase (%)		73%	27%

Observasi hari kedua, Selasa 14 Mei 2024

No.	Aspek yang diamati	Jumlah Siswa	Jumlah Ya	Jumlah Tidak
1.	Siswa sering bermain game saat istirahat	16	10	6
2.	Siswa lebih senang bermain game daripada bermain dengan temannya	16	9	7
3.	Siswa lebih senang bermain game daripada mengunjungi perpustakaan sekolah	16	14	2
	Jumlah		33	15
	Prosentase (%)		69%	31%

Observasi hari ketiga, Rabu 15 Mei 2024

No.	Aspek yang diamati	Jumlah Siswa	Jumlah Ya	Jumlah Tidak
1.	Siswa sering bermain game saat istirahat	16	11	5
2.	Siswa lebih senang bermain game daripada bermain dengan temannya	16	9	7
3.	Siswa lebih senang bermain game daripada mengunjungi perpustakaan sekolah	16	14	2
	Jumlah		34	14
	Prosentase (%)		71%	29%

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama tiga hari, ditemukan bahwa 71% siswa memiliki kebiasaan bermain game online, sedangkan 29% siswa cenderung tidak bermain game online.



Gambar 1. Situasi saat istirahat sekolah
Anak-anak lebih memilih bermain game online daripada bermain dengan temannya
(Sumber: dokumentasi pribadi)



Gambar 2. Situasi saat istirahat sekolah
Anak-anak lebih memilih bermain game online daripada berkunjung ke perpustakaan sekolah
(Sumber: dokumentasi pribadi)

Hak Cipta © 2024, Suharyoto, Resty Jayanti Fakhlina

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian kuantitatif mengenai dampak kebiasaan bermain game online terhadap minat baca siswa kelas VI SD Kerdonmiri I Rongkop ini menunjukkan hasil negative. Dimana terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan bermain game online dengan minat baca siswa, sehingga dapat memberikan implikasi yang beragam, seperti perluasan penelitian untuk menyelidiki faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi minat baca siswa, seperti lingkungan rumah, penggunaan teknologi, atau program-program literasi di sekolah. Sekolah juga dapat mengembangkan strategi alternatif untuk meningkatkan minat baca siswa dengan menyajikan program yang inspiratif dan relevan. Pendidikan literasi digital sangat penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari kebiasaan bermain game online dan memperoleh keterampilan membaca yang penting untuk era digital. Meskipun hasil penelitian menunjukkan dampak negatif, penting untuk memahami alasan di balik temuan tersebut. Hal ini akan membantu dalam perancangan studi yang lebih baik di masa depan serta identifikasi variabel yang harus dipertimbangkan dalam penelitian tentang minat baca siswa. Evaluasi lebih lanjut terhadap metodologi penelitian dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi minat baca siswa akan membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dinamika yang terlibat.

REFERENSI

Ahyani, Latifah Nur. 2018. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Kudus : Universitas Muria Kudus

Ama, Roy Gustaf Tupen. 2020. Membangun Minat Baca Pada Siswa Sekolah Dasar. Jawa Tengah : CV. Pena Persada

Ariantoro, T. R. (2016). Dampak game online terhadap prestasi belajar pelajar. *JUTIM (Jurnal Teknik Informatika Musirawas)*, *1*(1). DOI: https://doi.org/10.56248/educativo.v1i1.21

Arum Sari, D., Trimawati, T., & Apriyatmoko, R. (2020). *Hubungan Kecanduan Game Online Dengan Kecerdasan Emosi Pada remaja SMP Negeri 3 Ungaran: Tinjauan Dari Beberapa Artikel Penelitian* (Doctoral dissertation, Universitas Ngudi Waluyo). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, *5*(1), 682-690.

Bernacki, M. L., Greene, J. A., & Crompton, H. (2020). Mobile technology, learning, and achievement: Advances in understanding and measuring the role of mobile technology in education. *Contemporary Educational Psychology*, *60*, 101827. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2019.101827

Daud, R. F., Marini, M., & Monica, D. (2022). Pengaruh Game Online "Mobile Legend" dan Psikologi Anak Terhadap Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi dalam Keluarga. *Empiricism Journal*, *3*(2), 254-263.

Dewayani, Sofie. 2021. Penguatan Literasi dan Numerasi di Sekolah. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dewi, M. P., Neviyarni, S., & Irdamurni, I. (2020). Perkembangan bahasa, emosi, dan sosial anak usia sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *7*(1), 1-11.

Escueta, M., Nickow, A. J., Oreopoulos, P., & Quan, V. (2020). Upgrading education with technology: Insights from experimental research. *Journal of Economic Literature*, *58*(4), 897-996. DOI: 10.1257/jel.20191507

Furqan, S. (2020). *Model Komunikasi Mahasiswa Pemain Game Online Free Fire (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas UAD IAIN Bengkulu)* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

Hak Cipta © 2024, Suharyoto, Resty Jayanti Fakhlina

Ismi, N. (2020). *Dampak game online terhadap perilaku siswa di lingkungan sma negeri 1 bayang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial)

Isma, C. N., Rohman, N., & Istiningsih, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Minat Baca Siswa Kelas 4 Di Min 13 Nagan Raya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(1), 7932-7940.

Isnani, F. (2023). Pengaruh Game Online Terhadap Minat Baca Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif:* Fauzi, A. (2019). Pengaruh game online PUBG (Player Unknown's Battle Ground) terhadap prestasi belajar peserta didik. *ScienceEdu*, *2*(1), 61-66.

Mahmud. 2024. Gerakan Literasi Sekolah. Jawa Timur : Yayasan Darul Falah

Mertika, M., & Mariana, D. (2020). Fenomena game online di kalangan anak sekolah dasar. *Journal of Educational Review and Research*, *3*(2), 99-104.

Nisrinafatin, N. (2020). Pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa. *Jurnal Edukasi Nonformal*, *1*(1), 135-142.

Prasetyo, A. F., & Shofia, D. (2019). Pengaruh Game Online Android Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Iv Mi Islamiyah Kebomlati Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tahun Pelajaran 2017-2018. *PREMIERE: Journal of Islamic Elementary Education*, *1*(1), 49-65.

Sukiman. 2018. Menumbuhkan Minat Baca Anak. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Syifa, L., Setianingsih, E. S., & Sulianto, J. (2019). Dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, *3*(4), 527-533.

Tantoni, A., Zaen, M. T. A., & Imtihan, K. (2019). ANALISIS KEBUTUHAN KECEPATAN BANDWIDTH GAME ONLINE (Free fire, Mobile Legends, Pubg mobile): The Analysis of Bandwidth Speed Needs for Online Games (Free fire, Mobile Legends, Pubg mobile). *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Elektronik*, *2*(2), 81-90.

Walyyunita, R., Indriati, D. K., Mustanfidah, A., & Fitriana, A. (2021, December). Dampak Gedget terhadap minat baca peserta didik SD/MI: Pengaruh gadget. In *Prosiding SEMAI: Seminar Nasional PGMI* (Vol. 1, pp. 555-568).

Zuhria, A. F., Kurnia, M. D., Jaja, J., & Hasanudin, C. (2022). Dampak era digital terhadap minat baca remaja. *Jubah Raja: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajaran*, *1*(2), 17-23.

Sima, V., Gheorghe, I. G., Subić, J., & Nancu, D. (2020). Influences of the industry 4.0 revolution on the human capital development and consumer behavior: A systematic review. *Sustainability*, *12*(10), 4035. DOI: https://doi.org/10.3390/su12104035

Hak Cipta © 2024, Suharyoto, Resty Jayanti Fakhlina

Upaya Pelestarian Naskah Kuno pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo

Sutanto[1], Raden Fasha Nurlidia[2]
[1] Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Perpustakaan, Universitas Terbuka
[2] Dosen Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
e-mail: ut.sutanto@gmail.com, fashajannata@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kegiatan pelestarian yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Fokus penelitian ini adalah pada kegiatan pelestarian naskah kuno, baik yang bersifat preventif maupun kuratif. Selain itu, penelitian juga membahas kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam upaya pelestarian naskah kuno tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yang berusaha menggambarkan fenomena yang ditemukan di lapangan secara naratif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tahapan analisis data yang dipergunakan merujuk pada teori Miles dan Huberman yaitu terdiri dari tiga tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelestarian naskah kuno dilakukan melalui dua tahap utama. Pertama, tahap kebijakan pelestarian yang mencakup pengaturan kegiatan pelestarian, seperti tindakan kuratif melalui penggunaan portepel (cover box), pengaturan suhu, dan kelembaban. Kedua, tahap preventif yang melibatkan digitalisasi dan fumigasi. Selain itu, kendala yang ada telah dikelola dengan langkah-langkah solutif yang diterapkan oleh perpustakaan dengan melakukan pendekatan pada unsur manajemen man, money, materials, machines and methodes. Hasil penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pelestarian naskah kuno dan dapat memberikan masukan penting bagi praktisi dan akademisi di bidang perpustakaan.

***Kata kunci**; Arpusda Wonosobo; Pelestarian Naskah Kuno; Manuskrip.*

PENDAHULUAN

Pelestarian naskah kuno adalah suatu upaya penting dalam menjaga warisan budaya dan sejarah suatu bangsa. Naskah-naskah kuno seringkali berisi pengetahuan, cerita, dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan merupakan sumber informasi berharga tentang peradaban masa lalu. Naskah kuno adalah jendela menuju masa lalu, memberikan kita gambaran tentang bagaimana kehidupan, pemikiran, dan budaya orang-orang pada masa itu. Mereka adalah saksi bisu perjalanan sejarah dan perkembangan peradaban manusia. Namun, karena kerentanan mereka terhadap kerusakan fisik dan hilangnya pengetahuan tentang cara membaca dan memahami mereka, banyak naskah kuno yang berisiko hilang selamanya. Alamsyah (2022) mengemukakan naskah kuno merupakan hasil pemikiran, imajinasi, dan kreasi leluhur. Keberadaanya saat ini semakin memprihatinkan, padahal di dalamnya tersimpan berjuta pengetahuan yang sangat berguna. Naskah kuno merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia yang di

Hak Cipta © 2024, Sutanto, Raden Fasha Nurlidia

dalamnya mencerminkan kepribadian dan budaya bangsa yang luhur.

Kabupaten Wonosobo memiliki sejarah yang kaya dan merupakan bagian penting dari peradaban kuno di Pulau Jawa. Kata Wonosobo telah dikenal jauh sebelum 18251. Dalam tradisi kerajaan Mataram Kuno, sebelum dinobatkan menduduki tahta, calon-calon raja harus tinggal di daerah yang berdekatan dengan kawasan Dieng dan para calon raja yang tinggal di Wonosobo dan berbaur dengan masyarakat biasa. Berdasarkan peninggalan sejarah, wangsa-wangsa Jawa awal diperkirakan muncul di daerah sekitar Dieng, Wonosobo. Misalnya, Kerajaan Kalingga dan selanjutnya disusul oleh Dinasti Sanjaya-Syailendra dari Kerajaan Mataram Kuno. Bukti-bukti munculnya wangsa Kerajaan Mataram Kuno ini dapat dilihat dari prasasti dan candi yang tersebar di Dieng. Namun, hingga kini belum ditemukan informasi tertulis mengenai candi yang disebut sebagai bangunan keagamaan tertua di Jawa itu.

Dengan demikian, Kabupaten Wonosobo memiliki peran penting dalam sejarah peradaban kuno di Pulau Jawa. Pengetahuan tentang sejarah ini membantu kita memahami bagaimana peradaban berkembang dan berubah sepanjang waktu. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah-sejarah peradaban tersebut memungkinkan dapat kita gali dari naskah-naskah kuno yang saat ini perlu kita jaga dan lestarikan. Namun, pelestarian naskah kuno menghadapi banyak tantangan. Banyak naskah yang berada dalam kondisi yang buruk dan memerlukan perawatan khusus untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Meski begitu, penting bagi kita untuk terus berupaya melestarikan naskah-naskah kuno ini. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan sejarah kita, dan dengan melestarikan mereka, kita membantu memastikan bahwa pengetahuan dan cerita yang mereka bawa dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pelestarian naskah kuno adalah investasi dalam masa depan kita, sebuah pengakuan bahwa masa lalu kita memiliki nilai dan relevansi bagi masa depan kita.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pelestarian naskah kuno, seperti kondisi fisik naskah, teknik penyimpanan, dan aksesibilitas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Anwar Mujahidin, 2022). Lebih lanjut Anwar Mujahidin menyatakan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan fakta-fakta atau keadaan yang tampak

Hak Cipta © 2024, Sutanto, Raden Fasha Nurlidia

dari kajian mengenai preservasi naskah kuno yang ada pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara saksama suatu objek atau fenomena yang diteliti. Observasi melibatkan peneliti secara langsung dengan mengamati apa yang terjadi pada objek pada lokus penelitian tanpa mengubah situasi. Wawancara dilakukan peneliti dengan berinteraksi langsung dengan Kepala Bidang Perpustakaan dan Pustakawan sebagai responden untuk memperoleh informasi secara langsung. Dokumentasi melibatkan analisis terhadap dokumen tertulis atau rekaman yang relevan dengan penelitian tanpa harus berinteraksi langsung dengan responden. Dokumen ini berupa arsip, catatan, laporan, atau sumber-sumber lain yang relevan. analisis data yang dipergunakan merujuk pada teori Miles dan Huberman yaitu terdiri dari tiga tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelestarian naskah kuno bukan hanya tentang menjaga kondisi fisik dokumen, tetapi juga tentang memahami dan melestarikan isi di dalamnya. Dalam pelaksanaannya perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk arkeologi, filologi, paleografi, dan konservasi. Penelitian naskah kuno perlu dilengkapi dengan kerja lapangan, kerjasama dengan ahli lain dalam bidangnya, dan studi kebudayaan pada umumnya (Jumsari Jusuf, 1983). Pelestarian ini juga memerlukan pemahaman tentang teknologi dan material yang digunakan dalam pembuatan naskah, serta konteks budaya dan sejarah mereka.

Berbagai kebijakan dan strategi telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo untuk memastikan naskah kuno tetap terjaga dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Salah satunya adalah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan menyampaiakan informasi bahwa pemerintah tidak akan mengambil alih kepemilikan naskah kuno yang ada di masyarakat, namun hanya ingin mendata dan melakukan preservasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan: Pasal 6 ayat 1 (b) menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban untuk menyimpan, merawat, melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional. Ini menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam “memenangkan hati masyarakat” dengan menggunakan terminologi perubahan yang berasal dari kearifan lokal. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih dekat dan punya rasa memiliki.

Pelestarian naskah kuno menjadi proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, pengembangan koleksi, sarana dan prasarana dan metode pelestarian yang diterapkan yang masing-masing memiliki keterkaitan erat satu sama lainnya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo memiliki 52 personil sebagai dukungan sumber daya manusia memainkan

Hak Cipta © 2024, Sutanto, Raden Fasha Nurlidia

peranan penting dalam pelestarian dan pengelolaan naskah kuno. Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah perusahaan. Tanpa didukung SDM yang memadai dan berkualitas unggul, kegiatan di dalam perusahaan tidak akan berjalan dengan baik dan efektif (Firdaus, 2023). Menyikapi kebutuhan ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo telah bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan non formal yakni bimbingan teknis. Dalam kurun waktu tiga tahun secara berturut-turut Perpustakaan Nasional diundang menjadi narasumber dalam bimbingan teknis pelestarian naskah kuno. Kurang lebih 20 personil yang meliputi Pustakawan, Arsiparis dan tenaga teknis lainnya diikutsertakan dalam setiap bimbingan teknis dengan menempuh sebanyak 36 jam pelajaran. Harapan dari bimbingan teknis yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo sumber daya yang ada memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam teknik konservasi dan restorasi, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi digital dan proses digitalisasi, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengkatalogkan dan penyimpanan naskah dengan benar dan aman.

Untuk memastikan kegiatan pelestarian naskah kuno ini berjalan sebagaimana mestinya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran berkisar antara 21 juta setiap tahunnya yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti pendataan, konservasi, digitalisasi dan fumigasi naskah kuno. Anggaran tersebut bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diakomodir pada bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang disusun sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pelestarian naskah kuno ini hanya sekitar 2,7% dari total anggaran yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Besaran anggaran yang ada secara umum jauh dari cukup namun tidak mematahkan semangat untuk terus berupaya melestarikan keberadaan naskah kuno dengan kondisi standar minimal. Beruntung dalam pengadaan naskah kuno Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo selama ini bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian anggaran dapat dioptimalkan untuk kebutuhan lain karena tidak ada kegiatan pembelian naskah.

Pendataan dan Penelitian

Proses pendataan naskah kuno yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Pendataan ini telah dipayungi oleh ikatan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang menuangkan garis besar kesepakatan yang akan dicapai oleh dua pihak. Meskipun tidak mengikat secara hukum, MOU ini bertujuan mengkomunikasikan harapan bersama dari kedua pihak dalam visi dan misi yang sama.

Bersama Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo pendataan naskah kuno dilaksanakan dengan menelusuri pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Wonosobo. Pondok pesantren dipandang sebagai institusi pendidikan yang melahirkan

Hak Cipta © 2024, Sutanto, Raden Fasha Nurlidia

ulama besar dengan tradisi menulisnya. Pesantren dahulunya dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai lembaga pendidikan keislaman yang digali dari kepribadian masyarakat itu sendiri. Jauh sebelum Indonesia mengenal pendidikan formal seperti sekolah, pesantren sudah lebih dulu mengembangkan pola pembelajaran yang didominasi dengan pembelajaran kitab-kitab klasik karangan ulama tempo dulu. Itu sebabnya, Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.

Selaras dengan hal itu bila mendengar nama Wonosobo saat ini, sejumlah sinonim religius untuk kabupaten muncul sebagai "kota santri". Sebutan kota santri ini tidaklah berlebihan, karena berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, jumlah Pesantren di kabupaten tersebut pada tahun 2020 sebanyak 252 dengan Santri yang terdata kurang lebih sebanyak 9.954, Taman Pendidikan Al-Qur'an sebanyak 1373 beserta para santrinya yang berjumlah rata-rata 25 anak per TPQ, dan Madrasah Diniyah sejumlah 902 dengan santri yang rata-rata 20 anak per Madin-nya. Dengan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Wonosobo merupakan kota yang identik dengan Islam.

Di banyak pesantren, naskah-naskah langka dan berharga disimpan dan dirawat dengan baik. Beberapa pesantren bahkan menjadi pusat pengembangan dan reproduksi naskah kuno yang langka untuk tujuan pelestarian dan penelitian. Pesantren sebagai "skriptorium naskah" juga berperan dalam memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkandung dalam naskah-naskah tersebut tetap hidup dan relevan. Dalam konteks ini, pesantren berfungsi sebagai tempat di mana tradisi tulis menulis dan pengetahuan Islam terus diperkaya dan dilestarikan melalui naskah-naskah kuno yang ada.

Pada saat proses pendataan dilakukan identifikasi lanjutan untuk menggali dan memastikan usia naskah kuno yang diperoleh. Sesuai undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Identifikasi lain yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo meliputi; (1) identifikasi isi teks naskah kuno untuk mengetahui pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis? (2) identifikasi bahasa dan aksara, fisik naskah; bahan, ukuran, tinta, dan kondisi fisik secara keseluruhan, (3) identifikasi penulis dan pengarang. Data identifikasi nakah kuno ditulis dalam form indentifikasi naskah kuno sesuai yang disarankan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Kerjasama vertikal bersama Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo telah berhasil meningkatkan target naskah kuno yang didata dan dilestarikan pada kurun waktu lima tahun terakhir. Seluruh koleksi naskah kuno di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo saat ini berjumlah 133 eksemplar yang sebagian besar berbentuk kitab kuno. Pendataan yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 memperoleh sejumlah kitab-kitab kuno yang rata-rata berusia lebih dari 100 tahun. Kitab yang telah

Hak Cipta © 2024, Sutanto, Raden Fasha Nurlidia

diketahui penulisnya diantaranya sebagai berikut:

1. Risalah Latifah fi Bayani Ba'iati Dzikri wa Silsilah Salsilatil Qodriyah wa Naqshobandiyah ditulis oleh KH Muhammad Mustajab;
2. Minhajul Abidin/ Tasawuf ditulis oleh Kyai R Muhammad Fadhil Naibul Qodhi Wadaslintang;
3. Sarah Sulam Taufiq/ Fiqh ditulis oleh Syaikh Nawawi al Bantani;
4. Minhjul Atqiya fi Sarah Ma'rifati Hidayatil Adkiya' ditulis oleh KH Sholeh Darat;
5. Ushuluddin/ Fiqih/ Pokok-Pokok Agama ditulis oleh Kyai R Muhammad Fadhil;
6. Bahjatul Ulum ditulis oleh Abu Lais as Samarkandi.

Koleksi kitab kuno pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo berhuruf hijaiyah dengan mayoritas berbahasa Arab dengan topik tentang ajaran Agama Islam. Terdapat satu koleksi kitab yang berbahasa Jawa yaitu kitab Khutbah Jumat.

Kitab yang ada kebanyakan tidak mencantumkan tahun terbit dan beberapa yang lain tidak terlacak karena kitab telah rusak atau kitab telah direnovasi dengan kondisi informasi tahun terbit telah rusak atau hilang. Usia tertua dari koleksi kitab di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo adalah berumur 402 Tahun yaitu Kitab Al Fatawi al Kabir dan Fatawi al Kubro. Kedua kitab ini dicetak pada Tahun 1004 Hijriyah atau Tahun 1595 M.

Digitalisasi (Alih Media)

Digitalisasi naskah kuno merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyaraka. Digitalisasi merupakan proses lanjutan dari digitisasi. Jika digitisasi hanya berfokus pada konversi data ke bentuk digital, digitalisasi menekankan pada tindak lanjut atau pemanfaatan informasi digital. Oleh karena itu, digitalisasi berhubungan erat dengan pengembangan bisnis dengan menggunakan basis data digital (Wirawan, 2023). Digitisasi adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital (Asaniyah dalam Muhammad Ilham Nurrahman, 2023). Dengan mengubah naskah kuno menjadi format digital *(digitasi)*, informasi yang terkandung di dalamnya dapat lebih mudah diakses dan dilestarikan serta dapat mengurangi risiko kerusakan fisik pada naskah. Naskah yang telah didigitalisasi dapat disimpan dalam kondisi yang lebih aman dan tahan lama. Digitalisasi yang dilakukan telah membantu mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan fisik untuk naskah kuno. Sebagai gantinya, naskah kuno pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo disimpan dalam bentuk file digital di komputer, perangkat penyimpanan seperti DVD dan *hardisk eksternal*.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo telah memiliki 2 unit alat pemindai yang digunakan sesuai standar minimal Perpustakaan Nasional yaitu

Hak Cipta © 2024, Sutanto, Raden Fasha Nurlidia

Scanner CZUR Aura Pro. Scanner CZUR Aura Pro merupakan scanner buku cocok untuk digitalisasi dokumen berharga. Scanner ini memiliki kecepatan pemindaian hanya 2 detik per halaman, CZUR Aura Pro mampu memindai buku dengan cepat dan akurat. Dapat memindai semua jenis buku, majalah dan dokumen kertas hingga ukuran A3. Dilengkapi dengan kamera 14 Megapixel yang ditenagai oleh Panasonic, Aura Pro menghasilkan gambar pemindaian yang jelas dan akurat dengan detail dengan baik. Aura Pro dapat memindai buku hingga 300 halaman dalam 15 menit. Selain itu, scanner ini dapat digunakan untuk memindai dokumen dengan ukuran lebih kecil dari A3 dan mengkonversinya menjadi format PDF, Word, Excel, TIFF, atau PDF yang dapat dicari (searchable PDF). CZUR Aura Pro menggunakan teknologi "Book Curve Flattening" yang memanfaatkan tiga garis laser presisi untuk meningkatkan akurasi pemindaian dan kejernihan gambar. Dengan teknologi ini, Aura dapat memindai dan mereplikasi halaman buku yang melengkung dengan sangat baik.

Beberapa naskah kuno dan buku langka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo yang sudah dialihmediakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kitab Minhajul Abidin, Kitab Taqrib, Syarah kitab Fathul Qorib karya tulis Kyai R Muhammad Fadhil, Qodhi Wadaslintang;
2. Satu jilid kitab yang terdiri dari kitab Bi Bahjatil Ulum fi Syarhi 'Aqidatul Ushul kitab tentang Tauhid, kitab Sittina Mas'alah (60 masalah fiqih) karangan Ahmad Muhamad al Misri dan Syarah kitab Sittina Mas'alah karangan Imam Romli;
3. Kitab Umil Barahim karangan Imam Sanusi dan Syarah kitab Umil Barahim karangan Muhammad bin Imron bin Ibrohim kitab tersebut ditulis oleh Kyai R Muhammad Fadhil;
4. Kitab Risalah Latifah fi Bayani Ba'iati Dzikri wa Silsilah Salsilatil Qodiriyah wa Naqshabandiyah karya KH Muhammad Mustajab dan kitab Minhajul Atqiya karya tulis KH Sholeh Darat tahun 1895 M;
5. Kitab yang ditulis oleh Kyai Muhammad Saubari, Kaliwiro yaitu kitab Syaroful Anam karangan Imam al Barjanji kitab yang menerangkan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW;
6. Kitab Tadzkiru Tarikus Sholah dan kitab Nuhzatul Majalis karangan Imam Asyofuri yang menerangkan fadhilah bulan Sya'ban;
7. Kitab Bibahjatil 'Ulum Fi Syarhi 'Aqidatul Usul Ditulis KH Muhammad Mustajab, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Islahut Tholibin, Kaligowong, Wadaslintang;
8. Kitab Tafsir Al Qur'an peninggalan Kyai Rofi'i, Sigedong, Tegalgot, Kepil karya KH Muhammad Amin yang ditulis tahun 1901;

Terdapat karya ulama besar Nusantara Syaikhona KH Muhammad Amin bin Syaikhul masyayikh KH R Abdul Fatah Baturono berupa kitab Tafsir Faidur Rochman berbahasa Jawa pegon yang disimpan almaghfurlah KH Muhammad Afif. Kitab tafsir tersebut adalah milik Kyai Muhammad Rofi'i adik ipar Syaikhona KH R Muhammad Amin dan menantu dari Syaikhul Masyayikh KH R Abdul Fatah Baturono karena

Hak Cipta © 2024, Sutanto, Raden Fasha Nurlidia

menikah dengan putrinya yaitu Nyai RA Zaenah. Tertulis dalam kitab tafsir tersebut -al haq Muhammad Rofi'i Baturono, Tegalgot, Sapuran, Wonosobo.

Syaihkhona KH R Muhammad Amin Baturono adalah seorang ulama yang 'alim 'alamah putera pertama Syaikhul masyayikh KH R Abdul Fatah Baturono, Sigedong, Kepil, Wonosobo. Kitab tafsir Faidur Rahman adalah salah satu kitab tafsir generasi awal di Nusantara karena dibuat oleh Syaikhona KH R Muhammad Amin Baturono pada tahun 1892 M sampai 1894 M atau 1309 H - 1311 H selama dua tahun di Singapura, dengan demikian kitab tafsir Faidur Rochman tersebut telah berusia 131 tahun.

Konservasi Naskah Kuno

Konservasi atau pelestarian mengacu pada kebijakan dan metode khusus untuk melindungi bahan perpustakaan dan arsip dalam rangka melestarikan koleksi, karena tinta yang digunakan manuskrip kuno mengandung kadar asam. Keasaman dalam naskah harus dihilangkan agar tetap dalam kondisi baik. Setelah keasaman dihilangkan, naskah dibungkus dengan kertas bebas asam dan disimpan dalam kotak kardus bebas asam. Ini adalah salah satu cara melestarikan manuskrip (Baquee & Raza dalam Ute Lies Siti Khadijah, 2023).

Naskah-naskah kuno yang ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo sudah disimpan dalam kotak penyimpanan (Portepel). Portepel adalah sarana penyimpanan bahan perpustakaan yang berfungsi untuk melindungi koleksi-koleksi berharga, terutama yang rentan terhadap kerusakan fisik (Indah Puswani, 2014). Portepel membantu memperpanjang usia bahan perpustakaan dengan menyediakan lingkungan penyimpanan yang bebas asam dan melindungi dari kerusakan. Portepel digunakan untuk menyimpan koleksi berharga seperti naskah kuno dan buku langka yang kondisinya sudah rapuh dan memerlukan perlindungan. Dalam pembuatan portepel, diperlukan standar bahan dan alat tertentu. Hal ini termasuk pemilihan bahan yang bebas asam dan sesuai dengan ukuran koleksi yang akan disimpan. Portepel juga harus memenuhi standar penyimpanan agar bahan perpustakaan tetap terjaga dengan baik.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo telah membuat berbagai ukuran portepel untuk kebutuhan perlindungan seluruh naskah kuno yang disimpan. Pembuatan portabel juga diperuntukkan bagi naskah-naskah kuno milik perseorangan yang sudah dialih mediakan dan diserahkan kembali kepada pemiliknya. Secara umum kondisi fisik naskah kuno dan buku langka yang ada bervariasi dari baik hingga rusak berat. Untuk kitab yang rusak berat beberapa diantaranya rusak parah yaitu Kitab Saratahrir, Kitab Al Mu'taj Juz 1, dan Al Qur'an. Secara umum 26 Kitab atau 25,49% dalam kondisi baik, 31 kitab atau 30,99% dalam kondisi cukup baik, 8 kitab atau 7,84% rusak ringan, 27 kitab atau 26,47% rusak sedang, dan 10 kitab atau 9,80% rusak berat dimana 3 diantaranya rusak parah.

Pada tahapan selanjutnya dilakukan penyimpanan di rak yang dikhususkan untuk penyimpanan naskah kuno. Penyimpanan di rak menjadi satu pada ruang koleksi referensi, naskah kuno dijajarkan sesuai kode naskah yang sebelumnya telah ditempelkan pada portepel. Ruangan sudah diatur kondisi lingkungan ruangannya dengan mengatur

Hak Cipta © 2024, Sutanto, Raden Fasha Nurlidia

suhu, kelembaban, dan pencahayaan di ruangan penyimpanan naskah kuno. Lingkungan yang stabil dan terkontrol dapat membantu mencegah kerusakan pada naskah. Dalam perawatan naskah kuno, pengendalian kelembaban dan lingkungan sangat penting untuk menjaga kondisi fisik dan kualitas naskah.

Rata-rata kelembaban udara di ruangan naskah kuno pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo sekitar 85% sementara itu kelembaban ruang naskah kuno idealnya berkisar antara 40% hingga 60%. Untuk mengatasi kondisi ini diruangan telah dipasang dehumidifier (alat pengering udara) agar kelembaban di ruang penyimpanan naskah lebih stabil. Penggunaan dehumidifier dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa kelembaban tetap berada dalam rentang yang aman karena terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat merusak naskah. Petugas yang bertugas di ruangan naskah kuno secara berkala membersihkan filter dan mengganti air atau mengosongkan wadah pengumpul air dehumidifier.

Disamping dipasang dehumidifier pada ruangan naskah kuno juga telah dipasang *Air Conditioner* (AC). Jenis AC yang digunakan adalah Split AC yaitu AC yang terdiri dari dua bagian, yaitu 1 unit dalam ruangan *(evaporator)* dan 1 unit lainnya di luar ruangan *(kondensor)* dengan kapsitas 1 PK. AC ini digunakan untuk memberikan suhu sesuai kenyamanan, membantu mengurangi kelembaban udara, mengurangi risiko pertumbuhan jamur dan bau tidak sedap dan membantu menyaring debu dan partikel lain dari udara.

Fumigasi (Pengasapan)

Fumigasi atau pengasapan dilakukan pada naskah untuk menghilangkan jamur dan binatang yang menempel pada naskah. Fumigasi bertujuan untuk membunuh serangga atau sejenisnya yang sudah menyerang dan merusak manuskrip. Fumigasi Ini penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada naskah. Fumigasi juga bertujuan untuk menetralisir atau menghilangkan bau busuk pada manuskrip untuk menjaga kualitas fisik dan estetika naskah.

Proses fumigasi naskah kuno dan buku langka yang dilakukan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan cara mengasapi bahan kimia *(fumigan)* berupa pestisida dalam bentuk gas dalam ruangan tertutup rapat. Proses ini efektif digunakan dalam perawatan naskah kuno dalam membasmikan hama, termasuk saat diterapkan pada struktur bangunan seperti perpustakaan, gudang arsip, dan ruangan laboratorium. Fumigasi dilakukan dengan menggunakan fumigator berupa tabung yang dihubungkan dengan selang dan pendorong untuk melakukan pengasapan. Tim yang melakukan pengasapan menggunakan alat pelindung diri (APD) untuk keamanan. Campuran bahan kimia lain yang digunakan dalam proses fumigasi yaitu: *Metil bromida, Fosfin (Phosphine), Chloropicrin, Formaldehida, Sulfuryl fluoride, Iodoform, Hydrogen cyanide*.

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wonosobo fumigasi dilakukan setiap tahun sekali. Kegiatan fumigasi tidak dilakukan sendiri oleh bidang perpustakaan, namun dititipkan dengan bidang kearsipan. Ini dilakukan untuk efektifitas anggaran

Hak Cipta © 2024, Sutanto, Raden Fasha Nurlidia

fumigasi karena anggaran berada di Bidang Kearsipan. Pada bidang kearsipan terdapat arsip-arsip yang perlu diperlu dilakukan fumigasi yang volumenya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah naskah kuno dan buku langka yang ada.

SIMPULAN DAN SARAN

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan upaya pelestarian naskah kuno dengan berbagai kebijakan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kebijakan penganggaran, pengembangan koleksi, pengadaan sarana dan prasarana dan kebijakan pelestarian yang digunakan. Kebijakan-kebijakan yang digunakan dan diterapkan dalam upaya pelestarian naskah kuno pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo selama ini masih dalam taraf standar minimal.

Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang transliterasi dan terjemahan menjadi hambatan dalam pemahaman dan interpretasi isi naskah kuno, sehingga naskah kuno tidak bisa diidentifikasi muatannya sebelum dialih mediakan atau disimpan. Sementara itu keterbatasan anggaran menjadi kendala yang paling vital dalam proses pelestarian dan pengelolaan naskah kuno menyebabkan lembaga penanggung jawab tidak mampu berbuat banyak untuk memenuhi Standar Nasional RI. Minimnya sarana dan prasarana belum memadai, seperti; peralatan konservasi, digitalisasi, dukungan server dan perangkat jaringan, juga menjadi tantangan dalam pelestarian naskah kuno. Hasil alih media masih disimpan secara *offline* karena belum memperoleh dukungan perangkat server dan jaringan sehingga naskah kuno yang telah didigitalisasi belum dapat diakses secara daring oleh publik.

Dari kendala dan hambatan yang telah disampaikan secara keseluruhan merupakan tanggung jawab internal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo yang tidak dapat di*interferensi* dari pihak luar karena menyangkut dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Lebih khusus peneliti memberikan saran kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo untuk dapat segera meng-*online*-kan hasil alih media naskah kuno. Naskah yang telah didigitalisasi disimpan dalam server dan diindeks dalam Sistem Manajemen Informasi Perpustakaan sehingga dapat ditelusur secara daring. Ini memudahkan para peneliti, mahasiswa dana masyarakat umum untuk menemukan informasi relevan yang terkandung dalam naskah untuk dipelajari dan dimanfaatkan sesuai tujuan penelitian dan peningkatan ilmu pengetahuan.

REFERENSI

Alamsyah (2022). *Naskah Kuno/ Manuskrip: Penyimpanan, Perawatan dan Pelestarian*. Semarang: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Bahar, H., & Mathar, T. (2015). *Upaya Pelestarian Naskah Kuno Di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, 3(1), 89-100.

Fathurahman, Oman. (2022). *Filologi Indonesia: Teori dan Metode Edisi Revisi*. Jakarta:

Hak Cipta © 2024, Sutanto, Raden Fasha Nurlidia

Kencana.

Gusmanda, Riko, & Nelisa, Malta. (2013). *Pelestarian Naskah-Naskah Kuno Di Museum Nagari Adityawarman Sumatera Barat*. Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan FBS Universitas Negeri Padang, 2(1), Seri G.

Indonesia. (n.d.). *Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. bpk.go.id. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39968/uu-no-43-tahun-2007

Khadijah, Ute Lies Siti, et.all. (2023). *Strategi Pelestarian Naskah Kuno Peninggalan Prabu Geusan Ulun Di Kabupaten Sumedang*. Jurnal Pustaka Budaya Universitas Padjajaran, 10(2), 2355-1186.

Ningsih, Widya Lestari & Nailufar, Nibras Nada. (2024). *Sejarah Wonosobo dan Asal-usul Namany*a. Diakses pada 8 Mei 2024. https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/26/141011579/sejarah-wonosobo-dan-asal-usul-namanya#google_vignette.

Nugraha, Herwin Cahya, & Laugu, Nurdin. (2021). *Pelestarian Naskah Kuno dalam Upaya Menjaga Warisan Budaya Bangsa di Perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa Yogyakarta*. Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 7 (1) 105-120.

Pramana, Wahyu Dian. (2022). *Strategi pelestarian naskah kuno di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur*. Daluang: Journal of Library and Information Science, 2(2), 31-41.

Purwani, Indah. (2014). *Pedoman Pembuatan Protepel: Sarana Penyimpanan Bahan Perpustakaan.* Jakarta : Perpustakaan Nasional RI.

Sidiq, Umar & Choiri, Miftachul. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Supriatna, Agus. (2021). *Tekstologi dan Kodikologi (Sebuah Pengantar Pengkajian Naskah Kuno)*. Kendari: Ud. Al-Hasanah.

Wirawan. (Juni 15, 2023). *Perbedaan Digitisasi, Digitalisasi, dan Transformasi Digital*. Tangerang: PT Primacom Interbuana.
https://primacom.com/news/perbedaan-digitisasi-digitalisasi-dan-transformasi-digital/#:~:text=Digitalisasi%20merupakan%20proses%20lanjutan%20dari,dengan%20menggunakan%20basis%20data%20digital.

Wiwin Indiarti & Suyami (2023). *Khazanah Pernaskahan Nusantara: Rekam Jejak dan Perkembangan Kontemporer*. Jakarta: Penerbit BRIN.

Hak Cipta © 2024, Sutanto, Raden Fasha Nurlidia

Open Government: Studi Kasus di Cotabato Selatan

Syed Agung Afandi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. HR. Soebrantas Km. 15 Pekanbaru
e-mail: syedagungafandi@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tren dan kebijakan open government Cotabato Selatan. Pendekatan kualitatif, metode analisis bibliomterik, dan metode analisis konten digunakan pada penelitian ini. Data penelitian bersumber dari database Scopus, Web of Science, Semantic Scholar, Crossref, dan dokumen kebijakan Cotabato Selatan. Penelitian ini menemukan 127 artikel relevan, 683 sitasi, 13 h-index, dan 24 g-index yang menunjukkan bahwa studi open government Cotabato Selatan memiliki dampak dan produktivitas yang tinggi. Terdapat 2646 total link strength, 668 occurrences, 103 topik, dan 9 klaster pada studi ini. Access information, public participation, open legislation, public access, public service, infrastructure, public monitoring, public information, information openness, dan extractive merupakan topik-topik yang mendominasi. Sedangkan topik-topik penelitian potensial yakni public service, service quality, acess, public information, communication, interactive, information openness, information quality, accountability, monitoring, dan evaluation. Saat ini Cotabato Selatan fokus pada komimen open legislation, public participation in extractives, public monitoring of infrastructure, dan access to information. Komitmen-komitmen tersebut berpotensi menjadikan Cotabato Selatan lebih terbuka.

***Kata kunci**: Analisis Bibliometrik; Analisis Konten; Open Government; Cotabato Selatan*

PENDAHULUAN

Open government menjadi strategi penting untuk reformasi administrasi sehingga mendorong banyak negara di seluruh dunia merancang dan mengimplementasikan inisiatif yang terkait dengan akses informasi, transparansi, partisipasi, dan kolaborasi (Afandi, Afandi, Erdayani, & Afandi, 2023; Afandi, Erdayani, & Afandi, 2024; De Blasio & Selva, 2019; Gil-Garcia, Gasco-Hernandez, & Pardo, 2020). Banyak pemerintah yang telah memperluas konsep open government, misalnya pemerintahan Obama mengumumkan Open Government Directive pada tahun 2009 dan mengambil peran utama dalam membentuk Open Government Partnership (OGP), sebuah upaya multinasional untuk mempromosikan open government di seluruh dunia (Afandi, Afandi, & Anugerah, 2023; Kamaruddin & Afandi, 2024; Moon, 2020; Schmidthuber & Hilgers, 2021).

Open Government Partnership didasarkan pada gagasan bahwa open government lebih mudah diakses, lebih responsif, dan lebih bertanggung jawab kepada warga negara, dan bahwa meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah memiliki manfaat jangka panjang dan eksponensial bagi semua (Afandi, 2024; Erdayani, Afandi, & Afandi, 2023; Ruijer & Meijer, 2020; Tai, 2021). OGP merupakan kemitraan luas yang mencakup anggota di tingkat nasional dan local (Gao, Janssen, & Zhang, 2021; Ingrams, 2020; Ruijer, Détienne, Baker, Groff, & Meijer, 2020).

Menjadi bagian dari OGP local memberikan manfaat untuk mendorong reformasi terbuka yang telah menjadi bagian dari visi dan misi setiap pemerintah local untuk mencapai level akuntabel, responsif, inklusif, dan transparan (Afandi, Afandi, & Erdayani, 2023; Ingrams,

Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

Piotrowski, & Berliner, 2020; Zulfa & Afandi, 2023). Melalui keanggotaan pada komunitas global ini, setiap pemerintah local dapat memperoleh informasi baru tentang penerapan pemerintahan terbuka, serta memungkinkan untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan sumber daya untuk mencapai prinsip-prinsip pemerintahan terbuka (Afandi, Erdayani, & Afandi, 2023; Wirtz, Weyerer, & Sch, 2019).

Open Government Partnership telah meluncurkan Program Percontohan Pemerintah Daerah, yang menyadari bahwa banyak inovasi dan reformasi pemerintahan terbuka terjadi di tingkat lokal dimana pemerintah dapat terlibat lebih langsung dengan masyarakat dan menghasilkan banyak layanan publik yang penting. Program percontohan ini dilaksanakan oleh lima belas pemerintah local yakni Austin, Basque Country, Buenos Aires, Elgeyo Marakwet, Jalisco, Kaduna State, La Libertad, Madrid, Paris, São Paulo, Skotlandia, Sekondi-Takoradi, Seoul, Tbilisi, dan Cotabato Selatan.

Adapun Cotabato Selatan merupakan salah satu pemerintah local di Filipina, Filipina adalah satu di antara delapan negara yang berperan utama terhadap terbentuknya Open Government Partnership. Di Filipina, Cotabato Selatan telah berhasil memelopori penerapan program integritas di tingkat pemerintah local melalui program iSouthCotabato atau South Cotabato for Integrity and Jobs. Lingkaran Integritas Cotabato Selatan (SCIC) dibentuk dan telah dikembangkan dua puluh empat mekanisme integritas mengikuti model Web Institusionalisasi Caren Levy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren open government Cotabato Selatan dan menganalisis komitmen pemerintah local ini dalam penerapan open government.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis bibliometrik dan analisis konten. Analisis bibliometrik merupakan metode untuk menganalisis literatur ilmiah dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu (Donthu, Kumar, Mukherjee, Pandey, & Lim, 2021; Moral-Muñoz, Herrera-Viedma, Santisteban-Espejo, & Cobo, 2020). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi tren dan menyoroti wawasan kritis yang dihasilkan dari literatur ilmiah (Gaviria-Marin, Merigó, & Baier-Fuentes, 2019; Kulsum et al., 2022). Sedangkan analisis konten merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami isu atau topik tertentu dengan menganalisis isi dokumen (Subedi, Nyamasvisva, & Pokharel, 2022; Wang & Shepherd, 2020).

Pada analisis bibliometrik, data yang digunakan diperoleh dari database Scopus, Web of Science, Semantic Scholar, dan Crossref menggunakan Publish or Perish dengan kata kunci “South Cotabato open government”. Data tersebut disimpan dalam format RIS, diseleksi menggunakan OpenRefine, dan dianalisis menggunakan VOSviewer untuk memperoleh peta bibliometrik. Sedangkan untuk analisis konten, data bersumber dari dokumen kebijakan open government Cotabato Selatan yang diperoleh dari website pemerintah. Data selanjutnya dikategorikan dan diinterpretasi sehingga diperoleh hasil analisis kebijakan open government Cotabato Selatan.

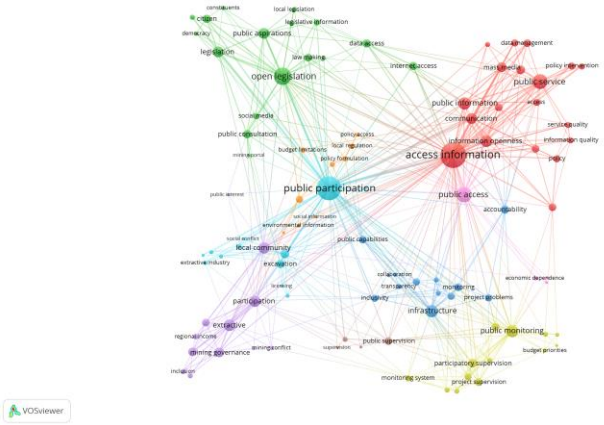
HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Open Government Cotabato Selatan

Pada studi ini ditemukan 127 artikel relevan, 683 sitasi, 13 h-index, dan 24 g-index yang menunjukkan bahwa artikel open government Cotabato Selatan diminati, memiliki

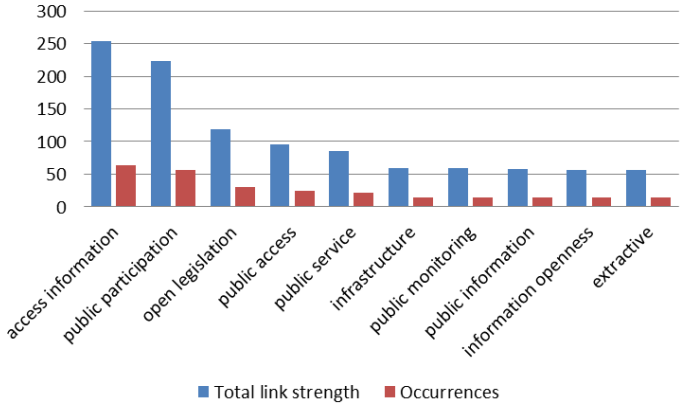
Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

dampak, dan memiliki produktivitas yang tinggi. H-index dan g-index familiar digunakan untuk mengukur produktivitas maupun dampak dari artikel yang diterbitkan. Perbedaannya adalah h-index didasarkan pada jumlah artikel yang dihasilkan dan jumlah sitasi yang diterima, sedangkan g-indeks dihitung berdasarkan distribusi sitasi dan rata-rata jumlah sitasi.



Gambar 1. Network Visualization
(Sumber: Diproses oleh Penulis)

Gambar di atas terbentuk berdasarkan keyword artikel yang digunakan pada penelitian ini. Tidak ada item ganda yang ditampilkan pada visualisasi di atas. Item identik yang muncul dibanyak artikel dihitung sebagai item tunggal (Gaviria-Marin et al., 2019). Visualisasi ini merepresentasikan item dengan label dan lingkaran. Ukuran label dan lingkaran tersebut ditentukan oleh bobotnya masing-masing. Semakin sering kemunculan suatu item maka semakin besar pula label dan lingkaran yang dihasilkan (Gaviria-Marin et al., 2019). Garis antar item mewakili tautan dan letak setiap item menunjukkan keeratan keterkaitannya (Ham, Koo, & Lee, 2019; Lnenicka & Saxena, 2021). Item yang mendominasi dapat dilihat pada gambar 2, klaster item dapat dilihat pada gambar 3, dan item tahun terbaru dapat dilihat pada gambar 4.

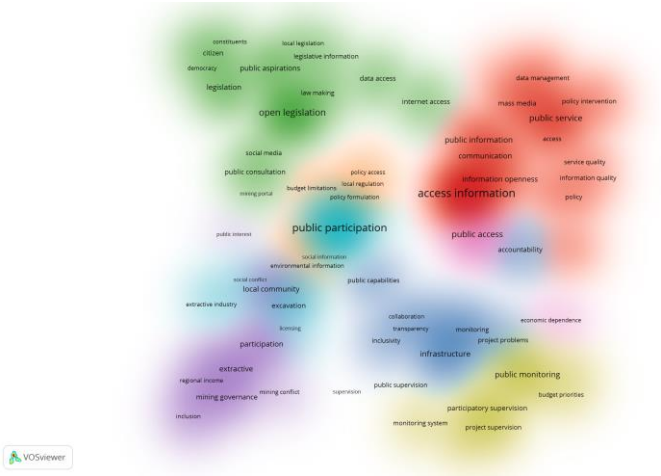


Gambar 2. Dominasi Item
(Sumber: Diproses oleh Penulis)

Pada gambar di atas, warna biru menunjukkan total kekuatan link suatu item, sedangkan warna merah menunjukkan total kemunculan suatu item disemua artikel. Terdapat 2646 total link strength dan 668 occurrences pada artikel open government Cotabato Selatan. Access information (Total link strength 254 dan Occurrences 64), public participation (Total link

Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

strength 223 dan Occurrences 56), open legislation (Total link strength 119 dan Occurrences 30), public access (Total link strength 96 dan Occurrences 24), public service (Total link strength 86 dan Occurrences 22), infrastructure (Total link strength 60 dan Occurrences 15), public monitoring (Total link strength 59 dan Occurrences 15), public information (Total link strength 58 dan Occurrences 15), information openness (Total link strength 56 dan Occurrences 14), dan extractive (Total link strength 56 dan Occurrences 14) merupakan daftar topik yang mendominasi pada studi ini. Topik-topik tersebut paling banyak digunakan para peneliti dan menjadi fokus utama pada studi open government Cotabato Selatan.



Gambar 3. Density Visualizatio
(Sumber: Diproses oleh Penulis)

Seratus tiga topik ditemukan pada artikel open government Cotabato Selatan. Topik-topik tersebut terbagi menjadi sembilan cluster dengan jumlah yang beragam. Klaster topik ini terbentuk berdasarkan garis penghubung antar topik (gambar 1) sehingga setiap topik pada cluster yang sama memiliki keterkaitan yang sangat erat. Topik-topik pada klaster satu yakni policy making, information, information quality, service quality, access, policy, policy intervention, public dialogue, data management, development project, interactive, policy allocation, public policy, mass media, communication, information openness, public information, public service, dan access information.

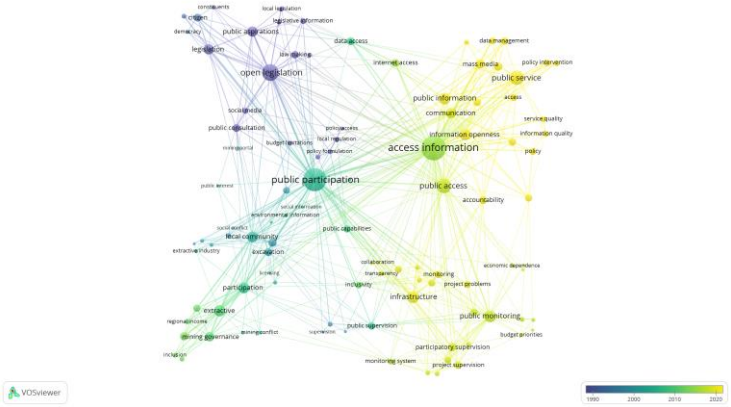
Topik-topik pada klaster dua yakni mining portal, constituents, decision making, democracy, legislative data, local legislation, political process, legislative information, social media, law making, citizen, data access, internet access, public consultation, legislation, public aspirations, dan open legislation. Topik-topik pada klaster tiga yakni civil society, collaboration, secretariat process, strategic projects, transparency, evaluation, inclusivity, project monitoring, project problems, monitoring, public capabilities, accountability, dan infrastructure.

Topik-topik pada klaster empat yakni central funds, budget priorities, regional funds, infrastructure projects, monitoring process, open data kit, update data, monitoring system, project status, project quality, project supervision, participatory supervision, dan public monitoring. Topik-topik pada klaster lima yakni culture, public interest, mining conflict, inclusion, local economy, regional income, environmental protection, social protection, mining governance, local community, participation, dan extractive.

Topik-topik pada klaster enam yakni licensing, production information, public capacity, social conflict, contract, extraction information, extractive industry, industry information,

Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

environmental degradation, excavation, mining, dan public participation. Topik-topik pada klaster tujuh yakni economic information, social information, environmental information, policy access, budget limitations, local regulation, policy formulation, public involvement, and public awareness. Topik-topik pada klaster delapan yakni illegal extractives, supervision, illegal mining, dan public supervision. Sedangkan topik-topik pada klaster sembilan yakni basic services, social services, economic dependence, dan public access.



Gambar 4. Overlay Visualization
(Source: Processed by the Author)

Visualisasi di atas identik dengan visualisasi jaringan (Gambar 1) kecuali pada warna setiap item. Pada visualisasi ini, warna berkisar dari biru (skor terendah), hijau (skor menengah), hingga kuning (skor tertinggi). Semakin gelap warna suatu item maka semakin tertinggal, sebaliknya semakin kuning menunjukkan suatu item sedang mendapat perhatian. Topik-topik yang sedang mendapat perhatian yakni public service, service quality, acess, public information, communication, interactive, information openness, information quality, accountability, monitoring, dan evaluation. Topik-topik tersebut memungkinkan penelitian potensial di masa yang akan datang.

Komitmen Cotabato Selatan

Menjadi salah satu dari lima belas pemerintah local yang dipilih pada program percontohan pemerintah daerah OGP, Cotabato Selatan telah menetapkan empat komitmen dalam mendukung implementasi open government di daerah tersebut. *Pertama*, open legislation. Dalam demokrasi, keterlibatan warga negara dalam proses politik sangatlah penting. Saat ini, keterlibatan warga negara masih terbatas karena para konstituen mempunyai pengetahuan yang terbatas mengenai langkah-langkah legislative, terutama karena dengar pendapat publik tidak wajib untuk semua langkah legislatif. Untuk tindakan legislasi yang memerlukan konsultasi publik, hanya sebagian kecil penduduk lokal yang terjangkau karena keterbatasan dana dalam mengirimkan komunikasi dan melakukan pertemuan tatap muka.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa mereka sebenarnya bisa dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan peraturan daerah, serta cara mengakses kebijakan menjadi masalah utama. Selain itu, catatan peraturan perundang-undangan juga tidak mudah diakses dan tersedia baik secara offline maupun online. Semua ini menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pada saat pembuatan undang-undang. Sementara mereka yang sadar akan haknya untuk berpartisipasi atau mengakses informasi legislatif kehilangan minat karena tidak jelasnya proses dalam

Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

menyuarakan pendapat.

Komitmen ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak ruang bagi keterlibatan masyarakat guna meningkatkan proses legislasi daerah melalui saluran online, sehingga meningkatkan relevansi peraturan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan permasalahan pembangunan. Ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Sistem Teknologi Informasi Legislatif. Sistem tersebut berfungsi sebagai basis data untuk catatan legislatif dimana masyarakat dapat dengan mudah mencari kebijakan dan peraturan saat ini dan yang sedang berjalan/yang tertunda.

Basis data legislatif ini juga akan dihubungkan dengan Basis Data Online Provinsi sehingga dapat diakses oleh masyarakat kapan saja secara online. Platform online juga mencakup pembuatan Facebook resmi dan menghubungkannya ke situs web resmi dimana siapa pun dapat menyarankan kebijakan dan peraturan baru serta memberikan komentar mengenai kebijakan dan peraturan yang sudah ada. Ini akan menjadi platform bagi masyarakat umum untuk mengusulkan ide-ide mengenai peraturan perundang-undangan baru, dan memberikan umpan balik mengenai kebijakan dan peraturan daerah yang ada. Ini akan menjadi tambahan dari konsultasi publik tatap muka yang saat ini dilakukan.

Membangun saluran online untuk menyebarkan dan berkonsultasi dengan warga mengenai proses dan langkah-langkah legislatif akan memperluas keterlibatan warga dalam legislasi dan memastikan pengesahan dan penerapan undang-undang relevan yang efektif menanggapi isu-isu nyata dan permasalahan pembangunan di masyarakat. Komitmen ini berpotensi memiliki dampak terhadap peningkatan keterlibatan masyarakat dan akses terhadap informasi dalam proses legislatif daerah.

Bergantung pada protokol yang rumit, dengar pendapat publik secara offline, dan prosedur manual untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat mengenai usulan undang-undang, proposisi komitmen untuk menyediakan platform online untuk pencatatan legislatif, dan membangun saluran media sosial untuk partisipasi warga dalam pembuatan undang-undang, mewakili sebuah langkah maju yang besar dalam keterlibatan masyarakat dan akses terhadap informasi legislatif. Namun, karena tidak semua wilayah memiliki akses internet yang baik, ketergantungan komitmen ini pada platform online membuat cakupan komitmen ini masih terbatas.

Kedua, Public participation in extractives. Akses yang tidak memadai dan informasi yang salah mengenai kegiatan pertambangan dan penggalian sama dengan hilangnya pendapatan, degradasi lingkungan, dan konflik sosial. Seringkali, masyarakat yang berada di sekitar kegiatan penambangan dan penggalian ilegal akan menganggap operasi tersebut biasa saja sampai masyarakat tersebut terkena dampak langsung dari praktik-praktik tersebut atau jika penambangan ilegal telah ditangkap oleh pihak yang berwenang. Selain terbatasnya tenaga pemerintah untuk memantau kegiatan ilegal ini, partisipasi masyarakat dalam memantau dan melaporkan kegiatan ekstraktif ilegal juga rendah karena tidak memiliki akses dan kapasitas untuk memahami informasi pertambangan dan penggalian.

Masyarakat masih kurang mengapresiasi informasi industri ekstraktif karena angka-angka tersebut tidak diterjemahkan ke dalam sesuatu yang dapat mereka kaitkan atau sesuatu yang penting bagi mereka, misalnya, informasi mengenai jumlah produksi/ekstraksi diubah menjadi pendapatan nyata atau manfaat bagi masyarakat tuan rumah. Hal ini diperburuk dengan degradasi lingkungan hidup dan konflik dalam penerapan hak pertambangan dan penggalian. Saat ini, terdapat banyak operator tambang dengan izin reguler dan khusus yang beroperasi di

Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

wilayah Masyarakat Adat. Area tersebut masuk ke dalam wilayah kontrak Perjanjian Bagi Hasil Tambang.

Komitmen ini akan berfokus pada pengembangan kebijakan dan penciptaan sistem dan saluran elektronik yang transparan untuk lebih melibatkan masyarakat agar berpartisipasi dalam tata kelola pertambangan, sehingga meningkatkan inklusi khususnya kelompok minoritas di wilayah pertambangan. Akses terhadap informasi pertambangan dan penggalian akan ditingkatkan melalui portal pertambangan online yang akan dikembangkan dan dihubungkan dengan website pemerintah provinsi, Interactive Province Online Database, dan media sosial, untuk mendorong interaksi publik. Konsultasi dengan pemangku kepentingan akan dilakukan mengenai data apa yang merupakan kepentingan publik, relevansi, dan daya tarik yang perlu diungkapkan. Partisipasi OMS di Badan Pengatur dan Pertambangan Provinsi (PMRB) akan diperluas hingga mencakup partisipasi masyarakat akar rumput.

Melalui portal, standar, saluran, dan branding online berbasis teknologi dan partisipatif, akan ada peningkatan keterbukaan informasi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, sehingga memperkuat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait industri ekstraktif. Hal ini akan menghasilkan peningkatan akses terhadap informasi dan partisipasi masyarakat akar rumput dalam tata kelola pertambangan khususnya Masyarakat Adat dimana wilayah pertambangan berada, meminimalkan perselisihan dan konflik terkait pertambangan dan penggalian, dan tumbuhnya budaya dengan sistem pemantauan yang melibatkan masyarakat. Konsekuensinya, semua hal ini dapat meningkatkan pengumpulan pendapatan, memberikan peningkatan peluang ekonomi lokal, meningkatkan inklusi dalam tata kelola pertambangan, dan mendorong perlindungan sosial budaya dan lingkungan di wilayah yang terkena dampak.

Komitmen ini berpotensi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pertambangan dan peningkatan akses terhadap informasi. Penggunaan teknologi dan sistem, standar, dan branding berbasis partisipatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat meminimalkan perselisihan dan konflik, meningkatkan pengumpulan dan pembagian pendapatan antara unit provinsi dan subprovinsi, serta mendorong perlindungan sosial budaya dan lingkungan. Peningkatan keanggotaan PMRB, termasuk partisipasi akar rumput, dapat meningkatkan platform keterlibatan dimana diskusi dan permasalahan dapat ditangani secara kolaboratif dan konstruktif. Secara kolektif, inisiatif-inisiatif ini merupakan sebuah langkah maju yang besar.

Ketiga, Public Monitoring of Infrastructure. Setiap tahunnya, pemerintah melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang bersumber dari dana daerah maupun pusat. Proyek infrastruktur biasanya mendapat porsi besar dari anggaran. Namun, banyak proyek infrastruktur mengalami keterlambatan pelaksanaan dan penyelesaian, kualitas buruk, dan pemanfaatan dana yang buruk. Oleh karena itu, pemantauan terhadap proyek-proyek ini harus dilakukan secara teratur, efisien, transparan, dan partisipatif. Demikian pula, hasil pemantauan harus tersedia bagi masyarakat untuk mendapatkan umpan balik. Namun saat ini hasil pemantauan hanya terbatas pada anggota Pemantau Proyek Provinsi (PPMC) dan Dewan Pembangunan Provinsi sehingga masyarakat umum tidak mengetahui status proyek secara real-time.

Kondisi tersebut membuat masyarakat mempunyai kesempatan yang terbatas untuk memberikan umpan balik mengenai status proyek yang sebenarnya (misalnya keterlambatan pelaksanaan, *kualitas* bahan yang buruk atau penggunaan dana yang buruk) atau apakah rekomendasi yang tercermin pada hasil pemantauan dilaksanakan oleh pemerintah.

Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

Permasalahan dalam pemantauan dan pelaksanaan proyek infrastruktur berdampak terhadap penerima manfaat, terutama dalam meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, meningkatkan akses masyarakat pedesaan yang tertinggal, miskin, dan terisolasi secara geografis terhadap layanan sosial dasar, serta mendukung saling ketergantungan ekonomi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan.

Komitmen ini mencakup upaya menjadikan hasil pemantauan PPMC lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum dengan mempostingnya kepada masyarakat umum untuk memberikan umpan balik atau mengakses hasil pemantauan. Hal ini mencakup pemaparan hasil pemantauan ke situs web pemerintah provinsi sehari setelah pelaksanaan pemantauan triwulanan PPMC untuk memberikan status proyek yang hampir real-time kepada publik. Dengan demikian, PPMC akan mengadopsi Open Data Kit atau sistem pemantauan proyek berbasis seluler untuk memantau proyek hampir secara real-time. Komitmen ini juga mencakup pemutakhiran situs web pemerintah provinsi serta halaman facebooknya untuk memuat hasil pemantauan proyek oleh masyarakat untuk mendapatkan rekomendasi. Masyarakat umum juga mempunyai kesempatan untuk mengunggah gambar proyek yang sedang berjalan di komunitas mereka dan memposting status proyek tersebut secara online. Komitmen ini juga akan meningkatkan proses pemantauan dan komposisi PPMC untuk memperkuat keterlibatan masyarakat atau komunitas yang terkena dampak langsung.

Komitmen ini dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan proyek seperti penundaan, buruknya kualitas proyek, dan buruknya pemanfaatan dana. Partisipasi dalam proses ini dapat memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik guna meningkatkan pelaksanaan proyek. Ketika temuan pemantauan dan rekomendasi dipublikasikan, kontraktor dan pejabat pemerintah terkait akan bertanggung jawab atas keterlambatan proyek atau ketidakpatuhan lembaga terkait lainnya terhadap rekomendasi dalam laporan. Sejalan dengan hal ini, mekanisme penanganan keluhan yang ada (misalnya memasukkan kontraktor ke dalam daftar hitam atau mengajukan kasus) di provinsi ini akan diperkuat untuk memastikan akuntabilitas.

Komitmen ini dapat meningkatkan proses pemantauan dan evaluasi pemerintah, dengan memperkuat keterlibatan PPMC dengan masyarakat. Inisiatif ini dapat menjadi langkah maju yang besar dalam pemantauan proyek yang inklusif. Saat ini, laporan pemantauan dan evaluasi harus melalui proses sekretariat yang memakan waktu, sehingga dapat menghambat pertimbangan tepat waktu PPMC mengenai proyek-proyek penting. Sebaliknya, akses masyarakat terhadap hasil pemantauan proyek yang hampir real-time, seperti yang diharapkan melalui komitmen ini, dapat secara signifikan mengurangi buruknya pelaksanaan proyek. Hal ini akan semakin ditingkatkan dengan kemampuan masyarakat untuk secara proaktif memberikan umpan balik dan komentar, serta melaporkan pelaksanaan infrastruktur. Transparansi, serta peningkatan kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil, dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi pada setiap tahap pelaksanaan proyek.

Keempat, Access to information. Di antara faktor-faktor lainnya, terbatasnya akses terhadap informasi pemerintah sangat menghambat pemberian layanan dan intervensi yang tepat untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Akses terhadap informasi yang benar memiliki hubungan yang langsung dan menguatkan dalam memastikan pemberian intervensi dan layanan yang tepat kepada masyarakat. Meskipun Cotabato Selatan sudah mematuhi Kebijakan Keterbukaan Informasi Penuh yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

Daerah, pemerintah provinsi belum memiliki kebijakan keterbukaan informasi yang disederhanakan. Permintaan khusus atas informasi umumnya dipenuhi setelah diterima, dan pengungkapan proaktifnya terbatas.

Pemerintah telah menetapkan mekanisme untuk menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi dari masyarakat, dan menunjuk Petugas Informasi Provinsi (PIO) yang berdedikasi untuk memproses dan menindaklanjuti permintaan tersebut secara manual. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap informasi seringkali ditentukan oleh kehadiran fisik warga dan bahkan kedekatannya dengan ibu kota provinsi dimana permohonan diajukan ke PIO. Terhadap informasi yang tidak dimuat secara rutin di fasilitas umum, atau disiarkan melalui media cetak, radio, atau televisi, sehingga warga harus menulis surat kepada instansi pemerintah terkait dan menunggu keputusan persetujuan. Informasi untuk menanggapi permintaan semacam ini sering kali harus diteruskan dari kantor provinsi, regional, atau nasional lainnya.

Komitmen ini bertujuan untuk membangun saluran online dan offline untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintah, dan memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap program dan layanan pemerintah. Kualitas informasi yang lebih banyak dan lebih baik akan diungkapkan untuk mencakup tidak hanya informasi yang diwajibkan berdasarkan Kebijakan Pengungkapan Penuh Filipina dan data dasar mengenai profil sosio-ekonomi provinsi tersebut, namun juga informasi mengenai program, proyek, atau layanan dan laporan pemantauan proyek.

Hal ini mencakup pengembangan platform online interaktif bagi masyarakat umum untuk mengakses, melihat, menyimpan dan mencetak data dan informasi pemerintah mengenai program dan layanan langsung di rumah mereka secara gratis, dengan fitur khusus bagi masyarakat umum untuk memberikan masukan mereka mengenai layanan dan program pemerintah. Bagian dari komitmen tersebut mencakup penyelenggaraan lokakarya untuk mengembangkan mekanisme dalam menanggapi masukan dari masyarakat. Komitmen ini juga mencakup pelokalisasian kebijakan pemerintah pusat mengenai Kebebasan Informasi melalui peraturan daerah, dan pelembagaan hak masyarakat atas informasi.

Sebagai mekanisme offline, program partisipasi masyarakat secara langsung akan diluncurkan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses internet, dimana pertanyaan warga kepada Gubernur akan direkam selama pelaksanaan Program Penjangkauan mingguan kepada masyarakat miskin dan terpencil dimana pemerintah provinsi menghadirkan pelayanannya langsung kepada masyarakat, dan tanggapan Gubernur terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan direkam dan disiarkan melalui program radio resmi provinsi setiap minggu dan pada tanggal tertentu yang akan diumumkan kepada masyarakat.

Komitmen ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi pemerintah, dan memungkinkan adanya umpan balik terhadap program dan layanan pemerintah, dengan membangun platform online dan offline untuk dialog masyarakat, lokakarya pelatihan mengenai pengelolaan data, dan menciptakan peraturan daerah yang memungkinkan untuk melembagakan komitmen tersebut. Penerapan gabungan berbagai saluran media dapat memicu putaran umpan balik yang dapat menghubungkan masyarakat dengan pejabat di tingkat provinsi, kota, dan bahkan desa, serta membantu pembuat kebijakan merancang layanan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

Tabel 1. Komitmen Cotabato Selatan

No	Komitmen	Potensi Kebijakan
1	Open legislation	Menciptakan lebih banyak ruang bagi keterlibatan masyarakat guna meningkatkan proses legislasi daerah melalui saluran online, sehingga meningkatkan relevansi peraturan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan permasalahan pembangunan.
2	Public participation in extractives	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pertambangan dan peningkatan akses terhadap informasi. Penggunaan teknologi dan sistem, standar, dan branding berbasis partisipatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat meminimalkan perselisihan dan konflik, meningkatkan pengumpulan dan pembagian pendapatan antara unit provinsi dan sub-provinsi, serta mendorong perlindungan sosial budaya dan lingkungan.
3	Public Monitoring of Infrastructure	Memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan proyek seperti penundaan, buruknya kualitas proyek, dan buruknya pemanfaatan dana. Partisipasi dalam proses ini dapat memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik guna meningkatkan pelaksanaan proyek. Sejalan dengan hal ini, mekanisme penanganan keluhan (misalnya memasukkan kontraktor ke dalam daftar hitam) diperkuat sehingga memastikan akuntabilitas.
4	Access to information	Meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan informasi pemerintah, dan memungkinkan adanya umpan balik terhadap program dan layanan pemerintah, dengan membangun platform online dan offline untuk dialog masyarakat, lokakarya pelatihan pengelolaan data, dan menciptakan peraturan daerah. Penerapan gabungan berbagai saluran media dapat memicu putaran umpan balik yang dapat menghubungkan masyarakat dengan pejabat di tingkat provinsi, kota, dan bahkan desa, serta membantu pembuat kebijakan merancang layanan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.

(Sumber: Pemerintah Cotabato Selatan)

KESIMPULAN

Studi open government Cotabato Selatan telah diminati, memiliki dampak, dan memiliki produktivitas yang tinggi. Ini tampak dari ditemukannya 127 artikel relevan, 683 sitasi, 13 h-index, dan 24 g-index. Terdapat pula 2646 total link strength, 668 occurrences, 103 topik, dan 9 klaster pada studi ini. Topik-topik yang mendominasi pada studi ini diantaranya yakni access information, public participation, open legislation, public access, dan public service. Sedangkan public service, service quality, acess, public information, dan communication merupakan

Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

beberapa topik studi yang potensial di masa mendatang. Ini menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam temuan saat ini.

Cotabato Selatan merupakan satu di antara belasan pemerintah local di dunia yang terpilih pada program percontohan pemerintah daerah Open Government Partnership. Sebagai bentuk keserius pemerintah dalam mengimplementasikan program tersebut, Cotabato Selatan telah menetapkan empat komitmen yang meliputi open legislation, public participation in extractives, public monitoring of infrastructure, dan access to information. Komitmen-komitmen tersebut apabila diimplementasikan secara optimal berpotensi untuk mendorong Cotabato Selatan menjadi lebih terbuka.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap penelitian ini, terutama dukungan yang sangat berharga dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

REFERENSI

Afandi, S. A. (2024). *Local Open Government: Strategi Reformasi Administrasi Publik*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Afandi, S. A., Afandi, M., & Anugerah, M. F. (2023). *Open Government*. Kediri: Kreator Cerdas Indonesia.

Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2023). Local Open Government: Studies in West Nusa Tenggara, Indonesia. *Jurnal Administrative Reform*, *11*(2), 85–98.

Afandi, S. A., Afandi, M., Erdayani, R., & Afandi, N. H. (2023). Indonesia's Open Government: A Bibliometric Analysis. *Journal of Governance and Social Policy*, *3*(1), 1–23.

Afandi, S. A., Erdayani, R., & Afandi, M. (2023). Open Government: A Bibliographic Study of The Semarang and Gwangju Experiences. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, *6*(2), 217–234.

Afandi, S. A., Erdayani, R., & Afandi, M. (2024). Open Parliament: Study from Indonesia and Philippines. *Journal of Governance and Social Policy*, *5*(1), 126–147.

De Blasio, E., & Selva, D. (2019). Implementing open government: a qualitative comparative analysis of digital platforms in France, Italy and United Kingdom. *Quality and Quantity*, *53*(2), 871–896.

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to Conduct a Bibliometric Analysis: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, *133*(1), 285–296.

Erdayani, R., Afandi, M., & Afandi, S. A. (2023). Bibliometric Analysis of Open Government: A Study on The Open Government Partnership. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *3*(2), 76-89.

Gao, Y., Janssen, M., & Zhang, C. (2021). Understanding the Evolution of Open Government Data Research: Towards Open Data Sustainability and Smartness. *International Review of Administrative Sciences*, *10*(1), 1–17.

Gaviria-Marin, M., Merigó, J. M., & Baier-Fuentes, H. (2019). Knowledge management: A global examination based on bibliometric analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, *140*(12), 194–220.

Gil-Garcia, J. R., Gasco-Hernandez, M., & Pardo, T. A. (2020). Beyond Transparency,

Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

Participation, and Collaboration? A Reflection on the Dimensions of Open Government. *Public Performance & Management Review*, *43*(3), 483–502.

Ham, J., Koo, Y., & Lee, J. N. (2019). Provision and Usage of Open Government Data: Strategic Transformation Paths. *Industrial Management and Data Systems*, *119*(8), 1841–1858.

Ingrams, A. (2020). Administrative Reform and the Quest for Openness: A Popperian Review of Open Government. *Administration and Society*, *52*(2), 319–340.

Ingrams, A., Piotrowski, S., & Berliner, D. (2020). Learning from Our Mistakes: Public Management Reform and the Hope of Open Government. *Perspectives on Public Management and Governance*, *3*(4), 257–272.

Kamaruddin, & Afandi, S. A. (2024). Anti-corruption Policy Analysis: Indonesian Open Government Study. *IAPA 2023 Annual International Conference*, 572–589.

Kulsum, U., Nurmandi, A., Isnaini, Muallidin, Jafar, M., Loilatu, & Kurniawan, D. (2022). A Bibliometric Analysis of Open Government: Study on Indonesia and Philippines. *Journal of Governance*, *7*(1), 133–143.

Lnenicka, M., & Saxena, S. (2021). Re-Defining Open Government Data Standards for Smart Cities' Websites: A Case Study of Selected Cities. *Digital Policy, Regulation and Governance*, *23*(4), 398–411.

Moon, M. J. (2020). Shifting from Old Open Government to New Open Government: Four Critical Dimensions and Case Illustrations. *Public Performance and Management Review*, *43*(3), 535–559.

Moral-Muñoz, J. A., Herrera-Viedma, E., Santisteban-Espejo, A., & Cobo, M. J. (2020). Software Tools for Conducting Bibliometric Analysis in Science: An Up-to-date Review. *Multidisciplinar*, *29*(1), 629–635.

Ruijer, E., Détienne, F., Baker, M., Groff, J., & Meijer, A. J. (2020). The Politics of Open Government Data: Understanding Organizational Responses to Pressure for More Transparency. *The American Review of Public Administration*, *50*(3), 156–172.

Ruijer, E., & Meijer, A. (2020). Open Government Data as an Innovation Process: Lessons from a Living Lab Experiment. *Public Performance & Management Review*, *43*(3), 613–635.

Schmidthuber, L., & Hilgers, D. (2021). Trajectories of local open government: An empirical investigation of managerial and political perceptions. *International Public Management Journal*, *24*(4), 537–561.

Subedi, R., Nyamasvisva, T. E., & Pokharel, M. (2022). An Integrated-Based Framework For Open Government Data Adoption In Kathmandu. *Webology*, *19*(2), 7936–7961.

Tai, K.T. (2021). Open government research over a decade: A systematic review. *Government Information Quarterly*, *38*(2), 796-811.

Wang, V., & Shepherd, D. (2020). Exploring the extent of openness of open government data – A critique of open government datasets in the UK. *Government Information Quarterly*, *37*(1), 1035–1050.

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Sch, M. R. (2019). Open government and citizen participation: an empirical analysis of citizen expectancy towards open government data. *International Review of Administrative Sciences*, *85*(3), 566–586.

Zulfa, R. G., & Afandi, S. A. (2023). Analisis Open Government Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *3*(2), 57–62.

Hak Cipta © 2024, Syed Agung Afandi.

Masa Depan Kebijakan Pengendalian Sosial Kejahatan Di Indonesia (Refleksi atas Kasus Ujaran Kebencian di Era Digital)

Teuku Fahmi
Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung
e-mail: teuku.fahmi@fisip.unila.ac.id

Abstrak

The Digital Society sebagai gejala sosial baru berimplikasi pada munculnya beragam fenomena kejahatan digital. Salah satu diantaranya kejahatan ujaran kebencian yang menjadi isu hangat di era media sosial. Tulisan dalam artikel ini memfokuskan pada ulasan mengenai masa depan kebijakan pengendalian kejahatan dengan membahas fenomena kejahatan ujaran kebencian yang marak terjadi di dunia maya untuk konteks Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada kajian kepustakaan dengan melakukan penelusuran sumber sekunder yang memuat tematik penelitian dalam wujud teks tertulis berupa buku, artikel jurnal, pemberitaan online, dan laporan penelitian berkenaan dengan fenomena kejahatan ujaran kebencian. Penggunaan studi kasus juga dilakukan dalam rangka mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena kejahatan ujaran kebencian di Indonesia menjadi salah satu fakta kongkrit kejahatan era kontemporer yang tidak dapat terelakkan. Fenomena kejahatan ini akan selalu tumbuh seiring dengan berkembangnya era digital ditengah masyarakat. Pengaturan hukum mengenai kejahatan ujaran kebencian sebenarnya telah diatur oleh pemerintah kedalam seperangkat perundang-undangan. Penulis megidentifikasikan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ini juga harus terus didorong dengan melibatkan pihak kepolisian, instansi terkait (Kominfo), kalangan masyarakat sipil, media massa, dan platform media sosial. Kedepannya, perlu untuk mempertimbangkan penggunaan pendekatan multidisiplin sebagai langkah "pengayaan" kebijakan pengendalian sosial kejahatan ujaran kebencian ini.

***Kata kunci**: era digital, kebijakan, pengendalian sosial kejahatan, ujaran kebencian.*

PENDAHULUAN

Saat tatanan sosial terus berubah sebagai dampak dari perubahan sosial, maka selaras dengan hal itu, pengendalian sosial juga turut "bertumbuh" lalu "menyesuaikan" dengan perubahan yang terjadi. Kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan sosial bermasyarakat terdapat alat kontrol (kendali) untuk mengatur berbagai tingkah laku komunitas masyarakat agar terciptanya tatanan sosial yang harmonis.

Tautan yang erat antara konsepsi tatanan sosial dan pengendalian sosial ini sebenarnya telah banyak dibahas oleh ilmuwan sosial. Innes (2003) menjabarkan jikalau penerapan kontrol sosial sejatinya dimaksudkan untuk melindungi tatanan sosial (negara), namun ia juga mengungkapkan bahwa tatanan sosial tidaklah semata-mata produk dari kontrol sosial. Untuk konteks ini, ada variabel lain juga yang berkontribusi pada tercipta suatu tatanan sosial.

Menarik untuk dielaborasi penjelasan tatanan sosial dari Innes (2003) yang memiliki kaitan erat dengan pengendalian sosial. Ia menjabarkan konsep tatanan sosial sejatinya mengacu pada kondisi keberadaan suatu masyarakat, untuk itu tatanan sosial tidaklah statis. Dalam artian, tatanan sosial akan terus berproses secara terus menerus, diproduksi dan direproduksi dengan mengombinasikan sikap, nilai, praktek, pelembagaan dan tindakan anggotanya. Realitas ini dapat dilihat dikeseharian kita dalam kerangka hidup bernegara, akan ada produk sosial/hukum baru

Hak Cipta © 2024, Teuku Fahmi.

untuk mencapai cita-cita bersama.

Lebih lanjut, Innes (2003) mengungkapkan bahwa tatanan sosial juga terdiri dari berbagai seperangkat ide, tindakan, dan interaksi, yang dalam beberapa cara berkontribusi pada struktur organisasi kemasyarakatan yang terus berlangsung. Tatkala tatanan sosial terus mengupayakan pada terciptanya keadaan (keteraturan) suatu masyarakat dengan skema pengaturan yang terorganisir melalui kesepakatan akan nilai-nilai dan tindakan, disituasi bersamaan, kontrol sosial juga memainkan perannya dalam upaya/proses pengelolaan dari apa yang menyimpang atau bertentangan dengan tatanan sosial. Disinilah peran kontrol sosial yang memiliki signifikansi penting dalam memastikan tiap anggota masyarakat/kelompok sosial agar tetap berada dalam batas-batas tingkah konformis.

Poin penting lainnya dikemukakan oleh Innes (2003) yang juga patut diperhatikan yakni konsepsi mengenai "social control" erat dengan pemaknaan (bagaimana konsep tersebut dipahami) dan implementasi pada tataran praktik. Hal inilah yang kemudian dapat digunakan dalam mendiagnosis cara-cara (baru) dimana kontrol sosial tersebut dapat diterapkan dalam masyarakat kontemporer. Perubahan di dalam struktur masyarakat kontemporer ini juga telah banyak disinggung oleh Giddens (2016) dalam karya Modernity and self-identity.

Penggambaran Giddens mengenai situasi masyarakat "late-modern" juga dianalisis kembali oleh Innes saat mengaitkan konsepsi tatanan sosial masyarakat late-modern dengan social control. Innes mengindetifikasi enam poin yang mempengaruhi upaya perbaikan/revisi yang cukup mendalam yang terkait dengan struktur sosial utama dalam masyarakat. Keenam poin tersebut, mencakup: logika kapitalisme, lalu pergeseran komposisi dan peran negara serta agennya, penyebaran bentuk jaringan organisasi sosial, adanya rasa identitas yang lebih lunak dan cair, perubahan pemaknaan akan ruang/tempat sebagai konsekuensi perkembangan teknologi, dan terkait dengan pergeseran ke pertukaran media interpersonal dan komunikasi massa. Kesemua hal tersebut diindetifikasi Innes memunculkan "ketidakamanan ontologis" yang sangat mendarah daging dan mengarah pada "ketidakamanan lingkungan". Hal inilah yang kemudian menjadi momentum perubahan penting dalam logika dan praktik penerapan kontrol sosial agar lebih responsif guna mengatasi 'ketidakamanan' yang dialami para masyarakat late-modern tersebut.

Hal yang kurang lebih sama juga telah disinyalir oleh Garland (2012) dalam karyanya The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society. Dalam karyanya tersebut, Garland menjabarkan banyak perubahan yang terjadi dalam upaya pengendalian kejahatan dan peradilan pidana yang terjadi di Inggris dan Amerika. Ia menjelaskan bahwa tranformasi organisasi sosial masyarakat late modern yang telah mendorong serangkaian adaptasi politik dan budaya yang mengubah cara pemerintah dan warga negara berpikir dan bertindak dalam kaitannya dengan kejahatan.

Terlebih dengan munculnya posmodernitas sebagai kelanjutan dari era modern, pendekatan yang selama ini kerap digunakan dalam pengendalian kejahatan tidak cukup relevan/memadai lagi untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang terus tumbuh (posmodern). Pada bagian ini penting untuk memperhatikan karakteristik masyarakat posmodern lalu mempertimbangkan/ merelevansikanya guna membentuk (cara baru) pengendalian (sosial) kejahatan di masa depan. Terkait dengan karakteristik posmodern, Staples (2013) mengemukakannya kedalam enam ciri berikut: (1) fragmentasi dan ketidakpastian; (2) ruang sosial dan geografis "menyusut" melalui komputer dan teknologi, penyimpanan informasi massal, pengetahuan ilmiah dan media; (3) kultur komoditas dan konsumerisme; (4) aparat negara yang birokratis (walaupun ada kecenderungan desentralisasi) dalam upaya mengatur regulasi

Hak Cipta © 2024, Teuku Fahmi.

kehidupan sosial; (5) pengaruh media dalam membentuk kehidupan sosial, dan; (6) disintegrasi kehidupan publik dan diskursus.

Untuk konteks kekinian, dimensi ruang sosial yang berubah melalui komputer dan teknologi serta pengaruh media dalam pembentukan kehidupan sosial secara signifikan mempengaruhi tatanan sosial kemasyarakatan kita. Masyarakat sebagai entitas sosial sudah menyatu dengan beragam perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mengalami perkembangan begitu pesat. Martin (2008) menyajikan satu konsep menarik yang merepresentasikan dunia sosial kekinian dengan sebutan "The Digital Society". Ia memberikan menjelaskan perihal keterkaitan antara dunia sosial yang ada saat ini dengan beragam perangkat digital yang mendukung kehidupan manusia.

"*The Digital Society*" sebagai gejala sosial baru dengan serta merta melahirkan fenomena kejahatan digital. Terkait dengan itu, Taylor et al. (2014) memberikan delapan ramalan bagi masa depan kejahatan digital diantaranya yakni:

1. Kejahatan yang melibatkan komputer akan meningkat secara substantial, menuntut perubahan utama dalam alokasi sumber daya manusia dan pelatihan, serta pembuatan spesialitas polisi yang baru.
2. Penipuan internet, termasuk pencurian identitas, akan menjadi masalah komputer terbesar.
3. Kejahatan virtual terhadap orang akan meningkat dengan langkah yang lebih cepat, menuntut hukum baru dan tipe baru dalam penyelidikan dan pencegahan kejahatan.
4. Sebagian kelompok hacker akan berevolusi ke dalam kejahatan berjaringan.
5. Kelompok penjahat terorganisasi akan semakin banyak menggunakan komputer sebagai instrumen kriminal.
6. Kelompok teroris akan semakin banyak menggunakan internet untuk berkomunikasi serta untuk melakukan terorisme siber.
7. Spionase akan terus berkembang ke dalam perang informasi, spionase ekonomi, dan pencurian hak milik intelektual.
8. Kriminal, terorisme, dan anarkis akan semakin mempercepat penggunaan teknologi untuk mencuri data, menghancurkan komunikasi, dan dengan kata lain menimbulkan kerusakan.

Lebih lanjut, Maheswari (2015) dalam artikelnya "*Global Aspects of Cyber Crime*" menguraikan penggolongan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) diantarnya:

1. Kejahatan terhadap orang yang mencakup *cyber defamation*/fitnah, *cyber stalking*/penguntitan, *cyber* pornografi.
2. Kejahatan terhadap properti yang meliputi penipuan kartu kredit, phising, pelanggaran kekayaan intelektual ,perjudian online.
3. Kejahatan terhadap pemerintah (negara) yang termasuk didalamnya *cyber* terorisme.

Khusus kejahatan *cyber* yang ditujukan terhadap orang, varian lain yang menarik untuk dicermati ialah fenomena ujaran kebencian di dunia maya. Balica (2017) mengemukakan jikalau ujaran kebencian di dunia maya memungkinkan berkembangnya retorika yang merusak di jagat maya, mampu menghadirkan ledakan kampanye rasis dan radikal di internet, serta menciptakan lingkungan (sosial) online yang berisiko terhadap perlakuan buruk. Untuk konteks Indonesia, fenomena ujaran kebencian juga menjadi isu hangat di era media sosial. Darmalaksana et al. (2021) mengungkapkan bahwa ujaran kebencian merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat merusak ketertiban dan kerukunan masyarakat. Apalagi jika ujaran kebencian tersebut mengandung isu sensitif seperti isu agama.

Fenomena ujaran kebencian di dunia maya ini tampak selaras dengan apa yang telah

Hak Cipta © 2024, Teuku Fahmi.

dikemukakan Staples (2013) mengenai salah satu karakteristik posmodern yang ia kemukakan. Saat ruang sosial dan geografis "menyusut" melalui komputer dan teknologi, maka akan ada celah/peluang yang berpotensi “merusak” tatanan sosial masyarakat. Berkaca dari realitas tersebut maka tulisan dalam kajian ini akan mengulas fenomena kejahatan ujaran kebencian yang marak terjadi di dunia maya untuk konteks Indonesia. Ada tiga pertanyaan penelitian yang diajukan dalam tulisan ini diantaranya:

1. Bagaimana gambaran fenomena kejahatan ujaran kebencian di Indonesia?
2. Apakah regulasi/aturan yang ada saat ini telah mampu mengatasi permasalahan tersebut?
3. Apa saja langkah pengendalian yang perlu diperhatian/perbaiki sebagai langkah upaya pencegahan?

METODE

Tulisan ini didasarkan pada kajian kepustakaan dengan melakukan penelusuran pada sumber-sumber sekunder yang memuat tematik penelitian dalam wujud teks tertulis berupa buku, artikel jurnal, pemberitaan online, dan laporan penelitian yang berkenaan dengan fenomena ujaran kebencian. Penggunaan studi kasus juga dilakukan dalam rangka mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik kajian. Tahapan analisis yang digunakan mencakup: (1) melakukan proses identifikasi dan melakukan inventarisir sumber acuan pustaka yang terkait dengan fenomena ujaran kebencian, (2) lalu mengidentifikasi pola dari kasus yang diangkat/muncul, pada tahapan lanjutan, dilakukan analisis dan penyajian secara deskriptif pada kasus diangkat/muncul tersebut lalu mengaitkannya dengan lingkup bahasan upaya pengendalian kejahatan, dan (3) mengemukakan hasil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk konteks kekinian sudah bukan lagi barang baru. Khusus penggunaan internet, mengutip data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2020) terungkap bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2018 mencapai 171,1 juta. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 27,9 juta bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 143,2 juta. Intensitas penggunaan platform online sebagai tempat bagi para pengguna untuk memposting beragam konten juga terus mengalami peningkatan. Seiring dengan bertambahnya jumlah platform, pada saat bersamaan juga memunculkan intesitas interaksi yang agresif seperti ujaran kebencian.

Assimakopoulos, Baider & Millar (2017) menjelaskan bahwa untuk lingkup Komunitas Uni Eropa, ujaran kebencian merujuk pada aktivitas ujaran yang dimotivasi oleh bias ras/etnis/kebangsaan dan seruan untuk kekerasan. Sementara itu, Musyafak & Ulama'i (2020) menerangkan bahwa ujaran kebencian dapat dimaknai sebagai bentuk dari sikap ketidaksukaan (unlike) atau intoleran pada kelompok komunitas masyarakat lainnya. Ujaran kebencian kerap diekspresikan dengan berbagai ungkapan yang ditujukan untuk memprovokasi, menyerang, dan bahkan mendorong munculnya kekerasan baik verbal dan non-verbal. Musyafak & Ulama'i (2020) juga menekankan bahwa problematika ujaran kebencian menjadi semakin signifikan apabila dibarengi dengan kasus tindak kekerasan yang terjadi akibat provokasi melaui kanal media sosial. Mereka mencontohkan dua kasus ujaran kebencian di tahun 2015 yang cukup mendapatkan perhatian publik yakni pengerusakan masjid Tolikara di Papua lalu provokasi yang dilakukan pendukung Persija (JakMania) pada pertandingan Sriwijaya melawan Persib Bandung.

Hak Cipta © 2024, Teuku Fahmi.

Kasus ujaran kebencian di Indonesia juga memiliki variasi yang cukup beragam, bahkan intensitas yang cukup tinggi saat berkaitan dengan isu politik. Pada Maret 2017, publik digemparkan dengan salah satu kasus hukum yang menimpa musisi Ahmad Dhani terkait dengnan ujaran kebencian. Melalui akun Twitter-nya, ia secara tidak langsung mengarahkan cuitannya tersebut kepada Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Gambar 1). Pada akhirnya, kasus ujaran kebencian ini ditindaklanjuti dan diproses secara hukum oleh pihak kepolisian setelah para pendukung dari Basuki Tjahaja Purnama melaporkannya ke polisi.



Gambar 1. Cuitan Ahmad Dhani di platform Twitter yang menghantarkannya ke penjara atas kasus ujaran kebencian.

(Sumber: detiknews, 2017. retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3751250/ini-3-cuitan-ahmad-dhani-yang-dipolisikan)

Pada kasus Ahmad Dhani tersebut, hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis selama 18 bulan penjara (1,5 tahun) pada kasus ujaran kebencian (Tempo.co, 2019). Putusan hakim menerangkan bahwa Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus tersebut. Musisi Ahmad Dhani dijatuhi hukuman penjara karena terbukti berbuat tindak pidana dengan niat kesengajaan dan tanpa hak guna melakukan dan menyebar informasi yang dimaksudkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan kepada kelompok komunitas masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Selain berkenaan isu politik, kasus ujaran kebencian dapat disinyalir pada isu-isu lainnya. Pada awal reformasi, dilema terkait dengan ujaran kebencian juga muncul dalam eskalasi yang cukup intens bersamaan dengan konflik berbau SARA juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, semisal: Poso, Ambon, Maluku Utara, Pontianak, Sampit, dan lain-lain (Pasaribu, Mulyadi & Wulan, 2020).

Hak Cipta © 2024, Teuku Fahmi.

Hingga April 2021, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI mengklaim sudah menangani konten negatif yang mengarah pada ujaran mengandung SARA sebanyak 3.640 buah sedari tahun 2018. Data fantastis ini dirilis oleh Kominfo dalam konferensi pers virtual dari media center kantor kementerian kominfo (Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021 tentang Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Ruang Digital). Pihak Kominfo juga menegaskan bahwa konten digital itu sudah dilakukan pemutusan akses (*takedown*). Berkaca dari situasi yang ada, kasus ujaran kebencian menjadi tantangan yang serius di era keterbukaan informasi saat ini. Situasi tersebut harus diantisipasi dengan regulasi yang memadai guna mencegah/menghindari hal-hal yang tidak diinginkan semisal perpecahan, polarisasi ditengah masyarakat hingga ancaman disintegrasi bangsa.

Pengaturan Hukum Pada Kasus Ujaran Kebencian di Indonesia

Pengaturan hukum terkait dengan kejahatan ujaran kebencian telah diatur dalam seperangkat perundang-undangan. Mengutip dari Darmalaksana et al. (2021), berikut aturan hukum yang mengatur ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut, diantaranya: Pasal 156 KUHP; Pasal 157 ayat 1 dan 2; Pasal 310 ayat 1, 2 dan 3; Pasal 311 ayat 1; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1 dan 2; Pasal 45A ayat 2; UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 16. Bahkan Surat Edaran Polisi Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015 juga telah memuat ciri-ciri "pesan" yang dikategorikan sebagai ungkapan kebencian, antara lain:

- **Penghinaan**. Yang dimaksud dengan penghinaan yakni suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan juga nama baik orang/pihak lain, baik individu maupun kelompok.
- **Pencemaran nama baik**. Pencemaran nama baik merupakan tindaakan yang berdampak pada pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang yang dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis.
- **Perbuatan yang tidak menyenangkan**. Tindakan yang menyinggung perasaan seseorang disebut dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan, ancaman pencemaran baik secara lisan maupun tertulis.
- **Memprovokasi**. Memprovokasi berarti melakukan tindakan untuk memancing kemarahan seseorang baik dengan menghasut atau dengan sengaja memprovokasi kemarahan.
- **Menghasut**. Tindakan menghasut mengandung maksud ajakan, lalu mendorong, hingga membangkitkan semangat seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kasus ujaran kebencian, hasutan dapat menimbulkan provokasi negatif lalu memicu tindakan kekerasan.
- **Menyebarkan berita bohong**. Menyebarkan berita bohong (*hoax)* juga termasuk dalam kategori ujaran kebencian, karena berita yang disebarkan adalah berita bohong dan dapat menimbulkan fitnah dan kebencian.

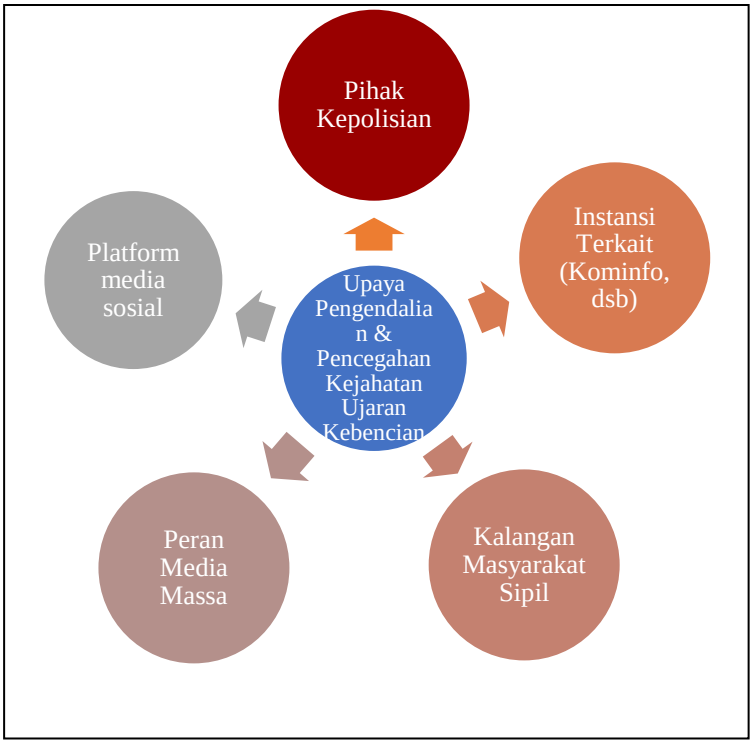
Tak bisa dipungkiri, dengan berkembang pesatnya teknologi media sosial maka semakin canggih pula cara penyebaran konten kebencian. Fenomena ini dapat dilihat dari beragamnya akun provokatif dan terorganisir dalam mengunggah konten provokatif bernuansa SARA. Salah satu contoh akun provokatif yang berhasil dibongkar modus operandinya ialah Saracen. Pada Agustus 2017 silam Kepolisian Indonesia behasil mengungkap sindikat Saracen yang diduga kerap menyebarkan berita bohong (hoax) bernuansa SARA pada kanal media sosial sesuai dengan pesanan oknum tertentu (Bbc.com, 2017). Berdasarkan penyelidikan secara forensik digital,

Hak Cipta © 2024, Teuku Fahmi.

diketahui bahwa sindikat kejahatan dunia maya ini menggunakan grup medsos Facebook yakni Saracen Cyber Team dan Saracen News dan kanal website Saracennews.com untuk menggerakkan lebih dari 800.000 akun. Realitas ini menunjukkan bahwa akan ada selalu "celah" yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu guna melancarkan aksinya dalam menyebarkan ujaran kebencian.

Langkah Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian (Prediksi Masa Depan)

Pemerintah Indonesia terus melakukan serangkaian upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian baik dari sisi kebijakan dan tataran praktik. Kompleksitas perkembangan teknologi juga terus menuntut pemerintah agar bergerak lebih cepat dan adaptif dalam upaya mengendalikan dan mencegah kejahatan ujaran kebencian. Pada konteks ini penting untuk kita adopsi pemikiran Innes (2003) yang menguraikan pendapatnya tentang logika kontemporer dari konsepsi pengendalian sosial (*social control*). Innes berpandangan bahwa masyarakat akan selalu dan terus mengalami perkembangan dengan cara yang kompleks dan pada lingkup ini perilaku kelompok masyarakat juga akan semakin tunduk (patuh) pada berbagai bentuk kontrol tersebut. Untuk itu, dibutuhkan 'kendali aparat' yang senantiasa perlu terus untuk "dikonfigurasi ulang", secara teknis, kendali aparat tersebut juga dapat menggunakan berbagai teknologi berlapis dan saling terkait.



Gambar 2. Keterlibatan para pihak dalam upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian.

Hak Cipta © 2024, Teuku Fahmi.

Pada Gambar 2 di atas, penulis mencoba untuk menskemakan keterlibatan para pihak dalam upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian yang saat ini telah banyak menombinasikan pada beragam pendekatan. Pencegahan kejahatan berpendekatan "penal" dijalankan melalui penerapan kebijakan kriminal hukum pidana (*penal policy*) tetap menjadi kerangka yang utama. Mengutip pendapat Arief (2016) yang mengemukakan sejatinya pencegahan kejahatan perlu ditempuh dengan memadukan beragam pendekatan kebijakan yang integral, yakni: (a) ada keterpaduan (integralitas) baik politik kriminal dan politik sosial; dan (b) ada keterpaduan (integralitas) baik penanggulangan kejahatan melalui "penal" dan "non-penal".

Upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian perlu untuk melibatkan banyak kalangan, disamping upaya peningkatan/pengoptimalan fungsi kepolisian sebagai aparat hukum. Tataran praktik pemolisian juga sudah cukup responsif dalam upaya mencegah dan mengendalikan isu ini, semisal: lahirnya Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Siber pada 2017 dan dibentuknya *Virtual Police* sebagai upaya dan media edukasi apabila ada indikasi potensi pelanggaran pidana saat menggunakan beragam platform media sosial.

Kementerian Kominfo juga memiliki peran yang penting dalam menangani konten digital yang mengandung atau terindikasi adanya unsur kebencian/permusuhan berbasiskan SARA. Hal ini sebagaimana yang telah menjadi kewenangan Kominfo sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan pemutusan sebagai bagian dari penanganan konten yang dilakukan pihak Kominfo dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan lintas kementerian dan/atau lembaga, dan juga para pengelola platform.

Kalangan komunitas dari masyarakat sipil sebagai pengguna beragam platform media sosial juga perlu didorong partisipasinya sebagai agen pengendali sosial (kejahatan). Hal ini selaras dengan pernyataan Innes (2003) yang menyatakan bahwa setiap dari kita merupakan subjek kendali, dalam rangka pelaksanaan pengendalian sosial. Untuk itu, seluruh entitas masyarakat perlu untuk terus didorong keterlibatannya dalam upaya pelaksanaan kontrol tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Untuk konteks Indonesia, publik terus didorong untuk dapat berpartisipasi dalam menginformasikan beragam konten yang berpotensi "merusak" dengan melaporkannya via daring melalui "aduan konten" layanan Kominfo RI atau "Laporkan!" Patroli Siber Dittipidsiber Kepolisian RI. selain itu telah muncul partisipasi publik dalam meng-*counter* narasi/konten ujaran kebencian, semisal: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang mengelola laman https://turnbackhoax.id/ guna memerangi informasi palsu di internet.

Peran media massa, baik cetak dan online, juga turut andil dalam upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian. Penekanannya ada pada upaya edukasi keseluruh entitas masyarakat mengenai informasi palsu dan menyesatkan. Penting untuk tiap kalangan media massa memerhatikan kualitas pemberitaan yang disajikan, guna menghindari "pelanggengan" penyebaran berita palsu yang tersebar di tengah masyarakat. Pihak lain yang juga turut terlibat ialah platform penyedia layanan media sosial. Untuk konteks kekinian, mereka telah memiliki teknologi yang mampu mendeteksi konten/pemberitaan yang tidak sesuai dan perlu diklarifikasi lebih lanjut. Semisal pada layanan Twitter, telah memperluas peraturan/kebijakan perilaku atau tindakan kebencian untuk juga melarang digunakannya bahasa atau teks yang cenderung merendahkan berbasis kewarganegaraan, ras, dan suku.

Hak Cipta © 2024, Teuku Fahmi.

Terlepas dari pengoptimalan peran para pihak yang telah disebutkan di atas, dalam upaya pengendalian & pencegahan kejahatan ujaran kebencian, perlu juga untuk mempertimbangkan penggunaan pendekatan multidisiplin sebagai langkah "pengayaan" pengendalian masa depan pengendalian sosial, khususnya kejahatan ujaran kebencian. Salah satu contoh pendekatan tersebut sebagai mana yang dikemumakakan Darmalaksana et al. (2021) yang mengusulkan metode *text mining* sebagai bagian dari data *mining technique* yang digabungkan dengan *sequential pattern mining* untuk mendeteksi ujaran kebencian dari media sosial dengan data teks.

Poin lain yang juga perlu diperhatikan yakni pandangan Innes (2003) yang mengemukakan jiakalau *social control* akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kontekstualitas dan kompleksitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, kita harus memegang dua hal penting dalam mengawali perubahan tersebut yakni logika dan praktik dari penerapan *social control*. Untuk itu, kebijakan pengendalian sosial kejahatan (*social control of crime*) juga akan terus mengelami perkembangan selaras dengan beragamnya 'kompleksitas' yang cenderung bermunculan sebagai konsekusensi berkehidupan di tengah komunitas masyarakat.

Penekanan yang juga diberikan Innes (2003) yakni *social control* 'perlu' untuk (selalu) dikonfigurasi ulang baik secara konseptualisasi dan tataran praktik. Cukup relevan jiakalau upaya pengembangan *crime control policy* didekati dengan pemanfaatan teknologi, melalui varian *big data*, *internet of things*, dan *artificial intelligence*. Hal ini dapat menjadi peluang perluasan bagi praktik pengendalian sosial kejahatan.

KESIMPULAN

Fenomena kejahatan ujaran kebencian di Indonesia menjadi salah satu fakta kongkrit kejahatan era kontemporer yang tidak dapat terelakkan. Pengaturan hukum terkait dengan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) ini juga telah dikerangkan kedalam seperangkat perundang-undangan. Tidak hanya itu, pemerintah juga terus melakukan serangkaian upaya pengendalian dan pencegahan kejahatan ujaran kebencian baik dari sisi kebijakan dan tataran praktik. Hasil telaah yang penulis lakukan juga menunjukkan ada banyak pihak yang juga telah terlibat dalam upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ujaran kebencian ini, diantaranya: pihak kepolisian, instansi terkait (Kominfo), kalangan masyarakat sipil, media massa, dan platform media sosial. Kedepannya, perlu juga untuk mempertimbangkan penggunaan pendekatan multi disiplin sebagai langkah "pengayaan" kebijakan pengendalian sosial, khususnya kejahatan ujaran kebencian. Pemanfaatan teknologi melalui penggunaan *big data*, *internet of things*, dan *artificial intelligence* dapat menjadi peluang perluasan bagi praktik kebijakan pengendalian sosial kejahatan atas kasus ujaran kebencian.

REFERENSI

APJII, A. (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019–2020 (Q2). *Indonesia Survey Center*.

Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*: Prenada Media.

Assimakopoulos, S., Baider, F. H., & Millar, S. (2017). *Online hate speech in the European Union: A discourse-analytic perspective*: Springer Nature.

Balica, R. (2017). The criminalization of online hate speech: It's complicated. *Contemporary Readings in Law and Social Justice, 9*(2), 184-190.

Bbc.com. (2017). Kasus Saracen: Pesan kebencian dan hoax di media sosial 'memang terorganisir'. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41022914

Darmalaksana, W., Irwansyah, F., Sugilar, H., Maylawati, D., Azis, W., & Rahman, A. (2021).

Hak Cipta © 2024, Teuku Fahmi.

Logical framework for hate speech detection on religion issues in Indonesia. Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

Garland, D. (2012). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*: University of Chicago Press.

Giddens, A. (2016). Modernity and self-identity. In *Social Theory Re-Wired* (pp. 512-521): Routledge.

Innes, M. (2003). *Understanding social control*: McGraw-Hill Education (UK).

Maheswari, K. (2015). Global aspects of cyber crime. *Indian Social Science Journal, 4*(1), 41.

Martin, A. (2008). Digital literacy and the "digital society". *Digital literacies: Concepts, policies and practices, 30*(2008), 151-176.

Musyafak, H. N., & Ulama'i, H. H. A. a. (2020). *Agama dan ujaran kebencian: kritik muatan hate speech dalam media online*: Penerbit Lawwana.

Pasaribu, R. G., & Wulan, G. A. (2020). Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian, 14*(3), 19.

Staples, W. G. (2013). *Everyday surveillance: Vigilance and visibility in postmodern life*: Rowman & Littlefield.

Taylor, R. W., Fritsch, E. J., & Liederbach, J. (2014). *Digital crime and digital terrorism*: Prentice Hall Press.

Tempo.co. (2019). Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian. Retrieved from https://metro.tempo.co/read/1169680/ahmad-dhani-divonis-15-tahun-penjara-atas-kasus-ujaran-kebencian

Hak Cipta © 2024, Teuku Fahmi.

Implementasi Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Asmorobangun Kabupaten Kediri

Tita Miftafulia [1], Nong Ayu Triyanti Utami Hakim [2]
[1,2] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
Email: titamiftafulia04@gmail.com

Abstrak

Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa merupakan bentuk upaya yang harus dilakukan oleh para birokrat pemerintah guna melaksanakan kebijakan publik dengan baik. Kebijakan publik ialah bentuk dari aturan yang perlu dilakukan dan tidak oleh pemerintah. Realitanya, pelayanan publik di beberapa desa di Indonesia masih cenderung lamban dan tidak kondusif disebabkan oleh pola kinerja dan kebijakan yang tidak ditaati. Di Desa Asmorobangun, pelayanan publik di sebagian bidang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini memerlukan upaya yang sesuai dengan program yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Di Desa Asmorobangun pemberdayaan masyarakat terlaksana cukup baik namun perlu peningkatan sosialisasi dan pengarahan lebih dari para birokrat pemerintah desa. Nampak sekali bahwa prinsip, etika dan norma yang ditanamkan di dalam diri para birokrat pemerintah Desa Asmorobangun perlu ditingkatkan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan publik yang seharusnya dilakukan oleh para birokrat pemerintah guna mewujudkan terciptanya pelayanan publik dan pembangunan masyarakat secara merata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data ialah studi literatur dimana mengumpulkan data informasi melalui buku, media cetak maupun digital lainnya serta melakukan observasi/ pengamatan tidak langsung melalui perantara. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi berupa foto dan SOP desa setempat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di bidang pelayanan administrasi sudah optimal, akan tetapi pada sebagian bidang perlu dilakukan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nampak terlaksana cukup baik namun perlu upaya peningkatan yang lebih optimal agar kebijakan publik yang telah ada terimplementasikan dengan efektif di tengah perkembangan teknologi digital.

Kata kunci: *Kebijakan, Masyarakat, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan*

PENDAHULUAN

Melayani masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di segala bidang kehidupan merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu melayani kebutuhan masyarakat luas dalam kapasitasnya sebagai pelaku pelayanan publik. Di negara Indonesia yang multikultural, sebagai bentuk dari upaya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik maka pelayanan publik dilakukan dengan cara pemerintah membentuk berbagai badan atau lembaga yang dinaungi dan diawasi oleh pemerintah yakni kantor pemerintahan dari tingkat paling bawah hingga atas yaitu kantor pemerintahan tingkat desa hingga kantor pemerintahan tingkat pusat. Pemerintahan desa membantu proses pelaksanaan dan penyelenggaraan ketatanegaraan di wilayah yang dihuni oleh orang atau kelompok orang yang diakui secara sah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara efektif dan efisien

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

dalam hal kesejahteraan dan kepentingan maka birokrat pemerintah harus melaksanakan kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan dengan maksimal. Dalam rangka memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan, pemerintah beserta para pelaku birokrasi pemerintahan harus berupaya secara totalitas untuk mewujudkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan publik adalah seluruh hal yang dibuat atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pelayanan publik adalah suatu aktivitas nyata yang harus dilakukan oleh birokrat pemerintah kepada masyarakat. Permintaan dan kebutuhan masyarakat disuatu negara tidak dapat ditunda dan dihindari karena hal itu terjadi secara alamiah. Namun, pada realitanya pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa masih cenderung rendah pelaksanaannya. Padahal kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrat pemerintah haruslah bernilai tinggi. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan sikap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan menggali secara terus-menerus melalui pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. (Irfan, 2019)

Organisasi desa yaitu pemerintah desa sangat diperlukan pada zaman sekarang ini untuk mendukung dan membina pembangunan desa menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan makmur. Desa yang semakin maju dan berkembang di berbagai bidang, mentransformasikan masyarakat menjadi lebih maju, kuat, dan mandiri (Mu'alim et al., 2020). Tanggung jawab utama kantor desa atau kelurahan adalah merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan desa. Hal ini juga sekaligus memberikan ajakan kepada masyarakat untuk bahu-membahu demi kemajuan desa dan menumbuhkan ketrampilan masyarakat guna mewujudkan masyarakat sejahtera dan sejahtera. Pada hakikatnya pelayanan masyarakat diberikan untuk meningkatkan standar birokrasi pemerintahan dan meningkatkan efektivitas struktur tata kelola pelayanan tersebut (Haryanto, 2012). Untuk mewujudkan sistem pemerintahan dan pelayanan yang baik serta memperkuat sistem pemerintahan desa guna mewujudkan masyarakat sejahtera dan madani, maka kewenangan dalam proses pemerintahan di kantor desa didasarkan pada kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan peraturan pemerintah (Irawan, 2018).

Di Kabupaten Kediri terdapat Kecamatan yang bernama Kecamatan Puncu. Kecamatan Puncu merupakan salah satu daerah dataran tinggi yang terletak di lereng Gunung Kelud. Dengan jumlah penduduk 59.548 jiwa, Kecamatan Puncu mempunyai luas kurang lebih 2.672,19 hektar. Dengan jumlah penduduk 59.548 jiwa, Kecamatan Puncu mempunyai luas kurang lebih 2.672.19 hektar dengan sumber pendapatan utama berasal dari pertanian holtikultura, perkebunan, dan palawija. Komoditas industri di Kecamatan Puncu adalah roti dari Mlinjo, roti dari Brambang, jamu herbal dari rempah-rempah, batik, sepatu, sulaman, roti tape, dan roti pisang. Terdapat tiga pabrik di sektor industri besar: pabrik kayu lapis, pabrik kopi, dan pabrik baut. Wisata Hutan Simpenan merupakan salah satu contoh sektor pariwisata. Sedangkan trekking Kelud via Laharpang dan air terjun menjadi salah satu daya tarik Kecamatan Puncu. Kayu bakar digunakan oleh mayoritas masyarakat di Kecamatan Puncu sebagai bahan bakar memasak dan sumber air berasal dari PDAM serta jenis penerangannya listrik dari pemerintah. Desa Puncu, Desa Satak, Desa Manggis, Desa Sidomulyo, Desa Watugede, Desa Gadungan, Desa Wonorejo, dan Desa Asmorobangun merupakan delapan (delapan) desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan Puncu. Dengan melimpahnya sumber daya alam, tenaga kerja, dan barang-barang manufaktur,

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

peneliti memilih salah satu desa di Kecamatan Puncu untuk mengkaji penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang terjadi. (W, Nur, 2014)

Di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, penerapan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang ada secara signifikan perlu dianalisis dengan cermat. Desa Kepung dan Desa Puncu serta Desa Kampung Baru dan Desa Wonorejo merupakan perbatasan letak geografis Desa Asmorobangun. Desa Asmorobangun terletak pada -7°49'35.29" Lintang Selatan dan 112°15'2.14" Bujur Timur menurut ilmu astronomi. Dengan kepadatan penduduk 3.016 jiwa/KM² dan luas ±1.513,29 HA, wilayah ini dihuni sekitar 9.800 jiwa. Seharusnya dengan luas dan jumlah penduduk yang demikian, dibutuhkan kinerja yang ekstra dari para birokrat pemerintah desa untuk mewujudkan implementasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa Asmorobangun.

Pada hakikatnya masyarakat Desa Asmorobangun mempunyai potensi, dari sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Akan tetapi, pada realita di lapangan masih terdapat beberapa pelayanan yang tidak memenuhi harapan masyarakat desa. Keluhan masyarakat akhir-akhir ini terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah adalah terkesan lamban dan tidak sesuai target, sulit (artinya sulit menggunakan aplikasi yang menggunakan media teknologi digital bagi warga masyarakat yang tergolong lansia) serta cenderung memandang kelas sosial. Dengan bentuk pelayanan publik yang demikian, akan timbul argumen dari masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah dan negara hanya tegas pada kebijakan yang dibuat dan lamban pada penerapannya. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis mencoba menganalisis bagaimana implementasi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat jika diterapkan dengan baik pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Asmorobangun akan efektif atau sebaliknya. Dengan mengacu pada penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sejalan dengan konsep UN Development Program dalam Sedarmayanti (2004) dan prinsip good governance. Mengacu pada pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat. Serta mengacu pada aspek-aspek yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat yang terjadi di Desa Asmorobangun.

Kebijakan publik adalah suatu kewenangan yang dimiliki pemerintah. Menurut James E. Anderson (1979). Interaksi antara entitas pemerintah dengan lingkungannya dikenal dengan istilah kebijakan publik (Irfan, 2019). Misi otoritas ini adalah untuk melaksanakan tanggung jawab dan perannya dalam masyarakat, komunitas bisnis, dan sektor swasta. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat. Suatu kebijakan tentu memiliki tujuan atau berorientasi kepada sebuah tujuan tertentu. Widodo (2002: 190) menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif memerlukan penyertaan berbagai komponen. Berikut ini adalah komponen-komponen tersebut;

- Kegiatan atau pola perilaku seorang pejabat akan dimasukkan dalam sebuah kebijakan.
- Sebuah kebijakan bukanlah sesuatu yang ingin dicapai oleh pejabat pemerintah; sebaliknya, itulah yang sebenarnya mereka lakukan.

Kebijakan publik mempunyai jangkauan yang sangat luas, mencakup berbagai sektor atau domain pembangunan. Beberapa contoh sektor tersebut antara lain sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, pertanian, pertahanan, dan lainnya. Studi tentang perilaku birokrasi dan elit politik, fungsi kelompok kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan, keprihatinan dan kesulitan bersama di antara para pemain politik yang terlibat dalam perumusan, implementasi, dan

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

penilaian kebijakan, menjadi landasan kebijakan publik. Berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengatasi permasalahan masyarakat dikenal sebagai kebijakan publik. (Widya,2018)

Menurut Komarudin (2014: 27), Penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien memerlukan penerapan dan pemanfaatan konsep dasar, pedoman, strategi pengendalian biaya, bantuan bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, anak kecil, layanan kebutuhan khusus, dan biro layanan. Selain itu, penyelesaian konflik, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan pelaksanaan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik juga harus dipertimbangkan. Kriteria yang dapat mengetahui tingkat kinerja suatu organisasi publik menurut Dwiyanto, dkk (2017: 50-51), ialah sebagai berikut:

1. Keefektifan pelayanan akan diukur selain efisiensi berdasarkan konsep produktivitas. Dimana rasio input terhadap output biasanya digunakan untuk menentukan kinerja yang dihasilkan. Kantor Akuntansi Umum (GAO) berusaha untuk mewujudkan definisi produktivitas yang lebih komprehensif dengan menginput sejauh mana sektor publik menghasilkan produk yang diharapkan sebagai indikator kinerja utama karena gagasan tentang produktivitas terlalu terbatas.
2. Kualitas Layanan ialah ketika mencoba menjelaskan kinerja organisasi layanan publik, topik kualitas layanan cenderung menjadi penting. Ketidakpuasan masyarakat dengan mutu layanan yang mereka terima dari organisasi publik telah menimbulkan opini negatif tentang organisasi tersebut. Dalam organisasi publik, kepuasan publik berfungsi sebagai indikator kinerja. Informasi yang tersedia untuk menilai kebahagiaan masyarakat merupakan manfaat utama dari pemanfaatannya sebagai indikator kinerja.
3.Daya tanggap mengacu pada kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan tujuan dan agenda layanan, dan mengembangkan inisiatif layanan publik yang sejalan dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas ialah bagi kedua belah pihak yang terlibat dan yang tidak, tanggung jawab merupakan cara untuk merefleksikan bagaimana operasi organisasi publik dilaksanakan sesuai dengan aturan organisasi dan prinsip administratif (Lenvine, 1990).
5. Akuntabilitas mengacu pada seberapa baik kinerja pegawai negeri dan perlu dievaluasi menggunakan metrik eksternal seperti standar dan cita-cita masyarakat. (Dwiyanto, 2017)

Dari kelima penjelasan diatas dapat dipahami bahwa untuk mengetahui implementasi kebijakan publik harus melihat kinerja pelayan publik serta penilaian terhadap organisasi pemerintah terkait.

Pelayanan publik didefinisikan oleh Mahmudi (2010:223) sebagai setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut, pelayanan publik mencakup semua kegiatan dalam rangka monitoring, pembinaan, bimbingan, pemberian fasilitas dan pelayanan, dan lain-lain, yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Syarat terlaksananya pelayanan publik adalah harus efektif, efisien dan hemat. Sedangkan prinsip umumnya adalah bahwa pelayanan publik harus mengikuti hal-hal berikut: kesederhanaan, kejelasan, ketepatan waktu, keakuratan, akuntabilitas, keamanan, kelengkapan prasarana dan sarana, aksesibilitas, disiplin, termasuk kesopanan, keramahan, dan kenyamanan.

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

Menurut Komarudin (2014: 27), penyelenggaraan pelayanan publik yang baik memerlukan perwujudan dan penerapan prinsip, standar, pola pelaksanaan biaya, dan pelayanan kepada lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan balita. Selain itu, pemerintah juga harus membentuk badan pemantauan layanan publik, menyediakan layanan yang unik, membuat divisi layanan untuk meningkatkan kepuasan publik, menangani keluhan dan perselisihan, serta menilai seberapa baik kinerja penyedia layanan publik dalam memberikan layanan.

Secara khusus, *Carter of Fundamental Right of the European Union* menyatakan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai berikut:

- Agar urusannya dikelola secara adil, tidak memihak, dan tepat waktu.
- Hak untuk diajak berkonsultasi sebelum mengambil tindakan apa pun yang dapat merugikan dirinya secara pribadi.
- Kemampuan untuk melihat dan mendapatkan berkas pribadi sambil menegakkan hak seseorang atas kerahasiaan profesional dan pribadi.
- Kewajiban administrasi negara untuk memberikan pembenaran atas pilihannya.
- Mencari ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh aparatur atau lembaga pemerintah saat menjalankan fungsinya. (Ayu, 2022)

Selain berdasarkan prinsipnya, pelayanan publik harus berdasarkan atas asas-asasnya. Asas-asas tersebut antara lain:

- Transparansi: Informasi yang jelas, mudah dipahami, tersedia bagi semua pihak yang membutuhkan dan memiliki cukup sumber daya.
- Akuntabilitas: Mematuhi ketentuan perundang-undangan untuk tujuan akuntansi.
- Bersyarat: Sesuai dengan kapasitas dan kondisi penerima dan penyedia layanan, dengan tetap menjunjung tinggi konsep efikasi dan efisiensi.
- Partisipatif: Mempertimbangkan kebutuhan, harapan, dan tujuan masyarakat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan layanan publik.
- Hak yang Sama: Tidak membeda-bedakan berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, kelas, ras, agama, suku, atau status ekonomi.
- Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Baik penyedia maupun penerima layanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama.(Nurcholis,Hanif, 2023)

Bentuk-bentuk pelayanan publik meliputi pelayanan pembuatan berkas administrasi dan layanan administrasi lainnya meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Relokasi, Surat Keterangan Nikah, dan Surat Pendaftaran Penduduk Tidak Tetap.

Pemberdayaan masyarakat ialah bentuk nyata dari pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat termasuk bentuk usaha untuk meningkatkan derajat masyarakat kelas bawah dari kondisi tidak mampu menjadi mampu guna menarik diri dari kondisi kemiskinan dan keterbelakangan serta memandirikan masyarakat agar memiliki ketrampilan untuk mengatasi permasalahan permasalahan mereka sendiri. Nilai-nilai sosial dijelaskan oleh gagasan pembangunan ekonomi tentang pemberdayaan masyarakat yang bersifat *people centered, participatory, empowering and sustainable.* (Nurcholis,Hanif, 2023)

Kindervatter dalam Kusnadi ((2007):222), mengemukakan 3 (tiga) pendekatan pada proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. *Community organization*, adalah atribut yang berkontribusi pada tujuan untuk memberi energi pada komunitas dalam tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka. Posisi pelatih terbatas pada perantara,

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

pemandu, motivator, dan fasilitator dalam hal manajemen kelompok atau tugas; pendekatan dan proses memprioritaskan teknik pemecahan masalah dan mengatur komunitas sebagai kekuatan fundamental.

b. *Participatory approaches*, adalah metode yang memberi penekanan kuat pada partisipasi setiap anggota dalam semua kegiatan yang menyerukan partisipasi spesialis lokal, pejabat pemerintah, dan pemimpin masyarakat.
c. *Education for justice*, adalah strategi yang berfokus pada penciptaan kondisi yang memungkinkan anggota masyarakat merasa terlibat dalam mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan. (Tri,Drajat Kartono, 2023)

Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat mengacu pada PNPM-Mandiri mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan sukarela (demokratis), berasaskan desentralisasi sederhana dengan fokus utama adalah masyarakat miskin serta berupaya untuk menyetarakan gender memalui kerjasama yang sifatnya terbuka, akuntabel dan berkelanjutan. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat/kelompok rentan diusahakan mampu memiliki ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang berguna untuk memengaruhi diri sendiri dan orang lain. Mereka mencoba melakukan ini dalam upaya untuk menghasilkan lebih banyak uang dan mendapatkan persediaan dan layanan yang mereka butuhkan. Komponen utama tata kelola desa adalah layanan publik dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadikan penelitian ini penting. Memberikan layanan terbaik yang memungkinkan bagi masyarakat sebagai objek utama tentu secara efektif dan efisien, dan terlepas dari peringkat sosia serta perbedaan kelas, merupakan salah satu tanggung jawab utama birokrat dan pejabat pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis serta membuktikan bahwa implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan di Desa Asmorobangun belum sesuai dengan ukuran tingkat kinerja birokrat pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat jika tidak didorong dengan suatu perubahan pola pikir, sistem, prosedur dan model baru pendekatan antara masyarakat dan birokrat pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan individu yang kurang mampu atau tidak beruntung dilakukan dengan cara pengubahan struktur sosial yang terarah dan membutuhkan partisipasi dan interaksi antara rakyat, organisasi, komunitas dan pemerintah.

METODE

Pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Selain pengamatan tidak langsung melalui perantara, metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah dengan membaca buku-buku, artikel ilmiah, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data secara langsung menggunakan dokumen (dokumentasi foto dan SOP, atau standar operasi pelayanan) yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan perkantoran di Desa Asmorobangun serta kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak terkait dan masyarakat setempat (Aslichati, 2017). Fokus utama penelitian ini adalah sumber daya manusia Desa Asmorobangun secara keseluruhan. Reduksi data yakni memilih dan menganalisis data dan informasi yang sesuai dengan tema penelitian merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dianalisis kemudian disajikan, dan kesimpulan diambil dari dokumentasi dan hasil observasi yang

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

disajikan. Penelitian dilakukan oleh peneliti antara tahun 2020 dan 2023, yaitu rentang waktu tiga tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

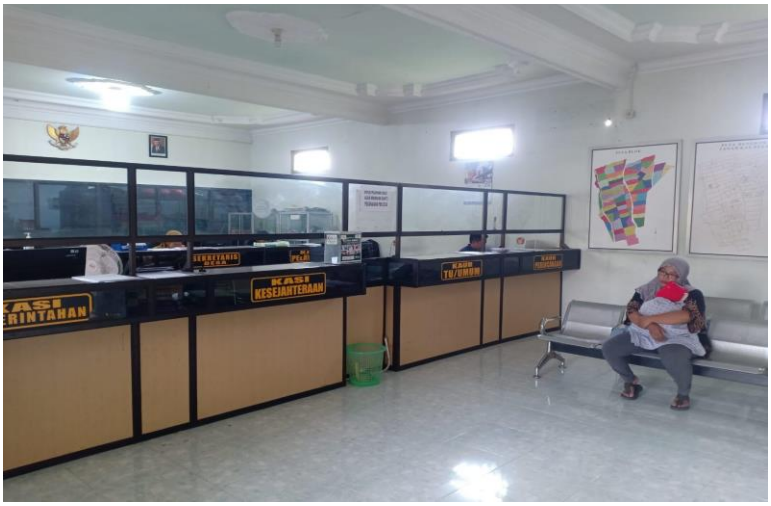
Pokok kajian penelitian ini ialah implementasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa Asmorobangun. Proses pemberdayaan masyarakat di Desa Asmorobangun menunjukkan bahwa dilakukan dengan langkah awal yaitu melakukan sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat melalui perwakilan tiap dusun, di dalam musyarawah tersebut pembahasan dimulai dengan cara menganalisis apa saja hambatan yang ada dan perlu dilakukan program dan inovasi sebagai langkah pengentasan tersebut. Kemudian membentuk organisasi-organisasi swadaya masyarakat. Setelah terbentuknya organisasi tersebut, maka susunan rencana atau program dimusyawarahkan bersama kepada masyarakat, lalu pelaksanaan kegiatan mulai dilaksanakan. Langkah selanjutnya adalah manfaat dan pemeliharaan hasil kegiatan dimusyawarahkan bersama dan kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan publik yang telah ada. Dalam menganalisis implementasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Asmorobangun, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kajian dari sudut *"outputs and effects of public policy"* dimana melihat implemestasi kebijakan dari hasil dan dampak kebijakan publik (Nicholas Henry (1975)). Pendekatan ini termasuk dalam pendekatan "*prescriptive"* karena lebih banyak menilai dari hasil dan dampak kebijakan terhadap implemestasinya. (Irfan, 2019)

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan publik terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Asmorobangun dengan memanfaatkan metode pengumpulan data dan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang bersumber dari literatur serta dokumentasi berupa foto terdapat 2 hasil yakni sebagai berikut;

1. Kebijakan Publik Diterapkan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Desa Asmorobangun Merujuk Pada UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Menurut Dwiyanto et al. (2017: 50–51), pengukuran kinerja organisasi publik dalam penelitian ini didasarkan pada faktor-faktor berikut, yang diukur dari:

1. Produktivitas dan akuntabilitas



Gambar 1.1 Ruang Pelayanan Kantor Desa Asmorobangun
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

Pada gambar 1.1 pelayanan publik di Desa Asmorobangun di bidang pembuatan dokumen administrasi seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan dokumen lainnya lebih cepat, tepat waktu, terstruktur sesuai dengan SOP Desa Asmorobangun. Semenjak kehadiran Bupati Kediri yakni Bpk. Hanindito Himawan Pramana S.H, terdapat inovasi baru bernama SAHAJA LEKAT dan SAHAJA ONLINE (Satu Hari Jadi). Dengan adanya inovasi/ program baru tersebut, di setiap desa di Kabupaten Kediri di tuntut untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam proses pembuatan dokumen administrasi secara cepat. Tujuànnya adalah memenuhi keinginan dan kebutuhan publik (masyarakat) melalui kebijakan yang telah dibuat tersebut dengan memanfaatkan media teknologi digital. Oleh sebab itu, kinerja pemerintah Desa Asmorobangun meningkat dari pada sebelum diluncurkannya program dari Bapak Bupati Kediri. Pelayanan yang diberikan birokrat pemerintah Desa Asmorobangun sudah memenuhi harapan masyarakat Desa Asmorobangun. Jika dipresentasikan jumlah masyarakat Desa Asmorobangun yang mengajukan permohonan dokumen administrasi (menerima pelayanan publik) sekitar 30% lebih banyak dibanding sebelum adanya program (Satu Hari Jadi). Presentasi tersebut diperoleh dari hasil olahan dan pengamatan peneliti. Terlihat pada saat penyelesaian dokumen, pemberitahuan prosedur permohonan dokumen kepada masyarakat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sopan, ramah, dan tepat waktu. Selain itu, tempat (ruangan) pelayanan nampak lebih bersih, rapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang semakin lengkap. Hal ini otomatis memberikan kesan nyaman dan kepuasan dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah Desa Asmorobangun.

2. Kualitas Layanan



Gambar 1.2 Halaman Depan Kantor Desa Asmorobangun
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Persepsi positif dan negatif yang dimiliki masyarakat terhadap organisasi publik sebenarnya dibentuk oleh rasa senang atau tidak puas mereka terhadap tingkat layanan yang mereka terima dari para birokrat di pemerintahan daerah mereka. Layanan publik (khususnya layanan administratif) di Desa Asmorobangun dilakukan oleh para birokrat pemerintah desa kepada masyarakat sudah lebih baik dari pada tahun sebelumnya yang terkesan lamban. Terkait dengan pelayanan di bidang administrasi, para birokrat pemerintah Desa Asmorobangun memiliki *attitude* yang sopan, ramah dalam memberikan pengarahan dari setiap prosedur pembuatan

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

dokumen secara terstruktur dan mudah dimengerti oleh pemohon (masyarakat). Hal ini menunjukkan bahwa para birokrat pemerintah Desa Asmorobangun memiliki kualitas layanan yang baik, lebih efektif dan cepat tanggap apalagi dengan adanya kebijakan Ombudsman dimana terdapat lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu, pejabat pemerintah akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Responsivitas



Gambar 1.3 Raturan Warga Desa Asmorobangun Antri Saat Mengambil Bantuan Sosial Dari Pemerintah di Halaman Kantor Desa Asmorobangun.
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Pada gambar 1.3 dalam proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, di Desa Asmorobangun masih terdapat masyarakat (lansia) yang seharusnya mendapatkan namun hingga kini tidak mendapatkan. Hal ini dapat dikatakan bahwa masih kurang merata pihak pemerintah dalam memberikan bantuan sosial. Terkadang masyarakat dari segi pekerjaan dan tempat tinggal sudah layak dan mampu tetapi masih tetap mendapatkan bantuan sosial. Entah hal itu murni karena penjaringan yang belum tepat atau karena faktor lain, namun yang dikeluhkan adalah yang mendapat bantuan cenderung masih tergolong masyarakat dengan kategori mampu. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga atau organisasi pemerintah desa belum optimal dalam menentukan kebutuhan mendasar masyarakat, membuat rencana kegiatan dan prioritas layanan, serta membuat inisiatif layanan publik yang mencerminkan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Dimana unsur-unsur pelayanan publik yakni para birokrat atau sistemnya nampak kurang profesional. Respon yang diberikan juga kurang cepat tanggap karena dengan realita demikian, seharusnya para birokrat dengan cepat mengajukan kembali ke pihak pusat guna penjaringan ulang untuk siapa yang lebih pantas dan tepat mendapatkan bantuan. Tidak sedikit pula para birokrat pemerintah desa yang mendapatkan kritikan dan usulan dari masyarakat, namun hanya dibalas dengan feedback yang kurang tepat. Hal ini menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah menurun dan muncul rasa ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah.

4. Responsibilitas

Dari penelitian yang dilakukan pada gambar 1.3, dengan mengamati pelaksanaan pelayanan publik di Desa Asmorobangun (di bagian pelayanan administrasi) dijalankan oleh birokrat pemerintah desa sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik seperti prinsip transpararansi, akuntabilitas, kondisional, jelas, tersedia sarana dan prasaranan pendukung dan

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

tepat waktu. Sedangkan di bagian penyaluran bantuan sosial ke masyarakat, prinsip -prinsip pelayanan publik belum sepenuhnya dilaksanakan seperti prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban. (Dwiyanto, 2017)

2. Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Asmorobangun Mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Dengan aspek kajian berdasar pada 3 (tiga) pendekatan proses pemberdayaan masyarakat oleh Kindervatter dalam Kusnadi (2007:222) yakni *community organization, participatory approaches, dan education for justice.* Dimana peran para birokrat pemerintah desa dan masyarakat saling terlibat satu sama lain dalam proses pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan ketrampilan dan motivasi bersama. (Tri,Drajat Kartono, 2023)

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para birokrat di pemerintah Desa Asmorobangun dalam 3 tahun terakhir sudah nampak berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu guna menumbuhkan capacity and capability, masyarakat untuk meningkatkan posisi bernegosiasi *(bargaining power)*, para birokrat pemerintah desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa, dan seluruh anggota masyarakat Desa Asmorobangun melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang. Sehingga masyarakat mempunyai *trip* dan kemampuan *(skill)* untuk mengambil keuntungan yang setara dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan fasilitas sarana berupa 2 HandTraktor untuk masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani dan Kios Booth untuk pedagang kecil (UMKM).



Gambar 1.4 Ketua Dekranasda Arumi Bachsin Menyerahkan 2 (Dua) Handtraktor Kepada Kepala Desa Asmorobangun
(Sumber: https://klikjatim.com/ arumi-bachsin-serahkan-bantuan-handtractor-kepada-petani-kediri/)

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.



Gambar 1.5 Penyerahan 2 (Dua) Handtraktor kepada Ketua Kelompok Tani Desa Asmorobangun
(Sumber: https://klikjatim.com/ arumi-bachsin-serahkan-bantuan-handtractor-kepada-petani-kediri/)

Pada gambar 1.4 dan 1.5 pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa Asmorobangun adalah membentuk organisasi Kelompok Tani menjadi 2 organisasi. Tujuannya adalah guna mempermudah akses sosialisasi dan pembelajaran serta tempat bertukar argumen mengenai progres pertanian, jenis pupuk obat-obatan yang tepat guna mengatasi permasalahan yang sedang dialami dan akan dijalani.

Dua kelompok tani yang mendapat bantuan itu diantaranya, Kelompok Tani Maju Mapan dan Kelompok Tani Maju Makmur. Penyerahan bantuan dilakukan di halaman depan Balai Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. (Shohibul, 2021) (Tri,Drajat Kartono, 2023)



Gambar 1.6 Pemberian Gerobak Dagang (Booth) Untuk UMKM Desa Asmorobangun
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pada gambar 1.6 Pemerintah Desa Asmorobangun memberikan fasilitas sarana berupa booth sebagai bentuk pelatihan BUMDES untuk masyarakat yang tidak memiliki modal untuk belajar membangun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selama kurang lebih 6 bulan

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

setelah penyerahan booth ini, program UMKM yang dirancang berhasil berjalan sesuai dengan target. Nampak bahwa dengan adanya booth UMKM, anak-anak SD, pejalan kaki, banyak yang mampir untuk membeli dan lahan kosong di depan balai Desa Asmorobangun pun menjadi bermanfaat bagi masyarakat.



Gambar 1.7 Kepala Desa Asmorobangun Memberikan Sosialisasi Kepada Tim Pendamping Keluarga di Balai Pertemuan Desa Asmorobangun
(Sumber: Dokumentasi peneliti)



Gambar 1.8 Kegiatan Pertemuan Srikandi Biru (PKK) Di Balai Pertemuan Desa Asmorobangun Dipimpin Oleh Kepala Desa Asmorobangun
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Pada gambar 1.7 dan 1.8 kegiatan PKK terkait Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK) Desa Asmorobangun, Puncu, dan Satak di Balai Desa Asmorobangun. Pemberdayaan masyarakat dilakukan pada bidang sosial yakni diperuntukkan bagi ibu-ibu untuk ikut serta dalam organisasi PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Pemberdayaan masyarakat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa dan pihak-pihak kesehatan Kecamatan Puncu. Tujuan dilakukannya

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

pemberdayaan tersebut ialah mempercepat terbangunnya relasi bersama antar ibu-ibu PKK Desa Asmorobangun dan PKK Desa Satak, agar seluruh masyarakat Desa Asmorobangun tanggap akan ilmu pengetahuan (di bidang kesehatan) dan memiliki ilmu yang cukup untuk mengenali dan menghadapi jika terjadi suatu masalah kesehatan.



Gambar 1.9 Kegiatan Posyandu di Dusun Dampit Desa Asmorobangun oleh Ibu PKK Desa Asmorobangun
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



Gambar 1.10 Kegiatan Posyandu Ibu-ibu PKK di Dusun Parangagung Desa Asmorobangun
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Pada gambar 1.9 dan 1.10 posyandu dilakukan setiap bulan di tanggal 9 di tiap-tiap pos posyandu yang ada di dusun masing-masing guna memantau perkembangan kesehatan bayi dan balita masyarakat Desa Asmorobangun secara berkala. Hal ini sudah menunjukkan kesesuaian antara kegiatan dengan kebijakan yang ada yaitu UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat. Para birokrat pemerintah desa seperti Kepala Dusun juga turut mendampingi jalannya pelaksanaan posyandu. Sumber daya aparaturnya sangat pro aktif karena semua ikut

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

terjun langsung ke lapangan guna memantau perkembangan kesehatan bayi, balita dan anak-anak yang ada di dusun-dusun Desa Asmorobangun.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan publik terhadap pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dapat disimpulkan hal-hal berikut:

a. Implementasi kebijakan publik terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Desa Asmorobangun dilihat dari sudut pandang penilaian kinerja organisasi publik yang dilakukan oleh Dwiyanto, dkk (2017: 50–51), dari sisi produktivitas dan akuntabilitas, di bidang pelayanan administrasi (pembuatan dokumen seperti KK, KTP, Akta Kelahiran dan dokumen lainnya) berjalan lebih kondusif daripada sebelum diluncurkannnya inovasi/ program SAHAJA oleh Bupati Kediri dimana efektifitas dari *input dan output* yang diberikan oleh birokrat pemerintah terhadap masyarakat Desa Asmorobangun menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat setempat, terdapat peningkatan jumlah pengguna layanan publik di bidang pelayanan administrasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum publik atau norma adat kepada pemerintah dan masyarakat. Dari sisi kualitas layanan, di bidang pelayanan administrasi layanan yang diberikan para birokrat pemerintah Desa Asmorobangun kepada masyarakat setempat sudah efektif dan efisien serta cepat tanggap dalam menanggapi keluhan dan kritikan yang diberikan oleh masyarakat terkait pelayanan yang didapatkan. Dari sisi responsivitas, disebabkan oleh kurang meratanya pihak pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yang menimbulkan kritik. Dari sisi responsibilitas, di bidang pelayanan administrasi terlaksana dengan baik oleh birokrat pemerintah desa sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik seperti transparan, akuntabel, tepat waktu serta efektif dan efisien, sedangkan di bagian penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, prinsip -prinsip pelayanan publik belum sepenuhnya dilaksanakan seperti prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban.

b. Implementasi kebijakan publik terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Asmorobangun dilihat berdasarkan pada 3 (tiga) pendekatan proses pemberdayaan masyarakat menurut Kindervatter dalam Kusnadi (2007:222) yakni *community organization, participatory approaches, dan education for justice* dimana peran para birokrat pemerintah desa dan masyarakat saling terlibat satu sama lain dalam proses pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan ketrampilan dan motivasi bersama sudah berlangsung dan terlaksana dengan baik. Nampak bahwa Pemerintah Provinsi Jatim, Pemerintah Daerah Kabupaten dan birokrat pemerintah Desa Asmorobangun bersama masyarakat setempat bersatu padu melakukan pemberdayaan di segala bidang kehidupan masyarakat mulai dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Pemerintah desa memberi wadah masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pembangunan masyarakat yakni dengan menciptakan organisasi Kelompok Tani, membangun UMKM Mandiri, bergabung dalam organisasi PKK dimana melaksanakan kegiatan Posyandu setiap bulan di tiap dusun. Tujuan pemberdayaan ini adalah guna meningkatkan taraf pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang terampil, berkualitas serta berguna baik bagi dirinya maupun masyarakat luas serta tanggap akan perubahan teknologi digital saat ini.

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas, jadi saran yang dapat diberikan peneliti ialah sebagai berikut:

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

1. Untuk implementasi pelayanan publik di Desa Asmorobangun Kabupaten Kediri, sebaiknya para birokrat pemerintah desa lebih fokus pada problematika yang sedang dialami masyarakat setempat guna meningkatkan pelayanan (baik di bidang administrasi maupun lainnya) kepada masyarakat dengan cara membangun relasi yang baik, memberikan sosialisasi dan pengarahan, serta menerima kritik dan saran dari masyarakat dengan respon yang baik. Upaya yang perlu dilakukan di bidang pelayanan administrasi adalah melengkapi sarana dan prasarana pendukung serta melakukan evaluasi kinerja setiap satu tahun masa kerja. Akan tetapi, pada pelayanan di bidang penyaluran bantuan sosial, masih banyak masyarakat (ibu-ibu) yang masih muda mendapatkan bantuan sosial namun masyarakat lansia justru belum seluruhnya mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan haknya. Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan penjaringan ulang agar bantuan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
2. Untuk implementasi pemberdayaan masyarakat di Desa Asmorobangun Kabupaten Kediri, sebaiknya para birokrat pemerintah desa setempat meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih luas dan membuat program-program pemberdayaan baru yang lebih inovatif guna meningkatkan keterampilan*(skill)*, pengetahuan *(knowlegde)* yang mumpuni, dan kekuatan (*power)* masyarakat Desa Asmorobangun Kabupaten Kediri dalam memanfaatkan potensi SDM dan SDA yang dimiliki dengan menggunakan media teknologi digital.

REFERENSI

Aris, M. Y. (2021). *15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*. Jakarta, Jawa Barat, www.gramedia.com. Diakses pada tanggal 18 Mei 2024, from https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/

Aslichati, L. d. (2017). *Metode Penelitian Sosial* (1 ed., Vols. 1-9). (S. Atmana, Ed.) Tangerang Selatan, Jawa Barat: Universitas Terbuka.

Ayu, M. C. (2022, 03 10*). Prinsip dan Asas Pelayanan Publik.* Jakarta, Jawa Barat, nasional.kompas.com. Diakses pada tanggal 17 Mei 2024, from https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/02000061/prinsip-dan-asas-pelayanan-publik

Ayuning, A. S. (2023). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Digital Marketing Bagi UMKM di Desa Kutuk. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, *4*(1), 24-32. Diakses pada tanggal 30 Mei 2024, from http://ejournal.unwaha.ac.id/

Buku Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)2007-2008. (n.d.).

Gandawangi, S. (2023, 8 24*). Pemberdayaan Masyarakat Dapat Tekan Kemiskinan*. Jakarta, Jawa Barat, www.kompas.id. Diakses pada tanggal 20 Mei 2024, from https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/22/pemberdayaan-masyarakat-dapat-tekan-kemiskinan

Gede, Y. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*, *04*(01), 25-35. Diakses pada tanggal 1 Juni 2024, from http://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/242

Haryanto. (2012). Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik Di Kelurahan Paringin Kota Kabupaten Balongan. *Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, *1*, 137-147. Diakses pada tanggal 29 Mei 2024, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ka+perubahan+status+desa+menjadi+kelurahan+terhadap+pelayanan+publik+di+kelurahan+paringin&btnG=

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

Irfan, M. I. (2019). *Kebijakan Publik.* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Komarudin. (2014*). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung, Jawa Barat, Genesindo. Diakses pada tanggal 15 Mei 2024, from https://jdih.jatengprov.go.id/perpus/index.php?p=show_detail&id=19053&keywords=

Kusnadi. (2012). *Pendidikan Keaksaraan.Filosofi,Strategi,Implementasi*. Diakses pada tanggal 17 Mei 2024, from Direktorat Pendididkan Masyarakat:, from https://books.google.co.id/books/about/Pendidikan_keaksaraan.html?id=E6peNQAACAAJ&redir_esc=y

Maulana , A. (2015). Pengembangan Komunitas Pedesaan Dalam Pembangunan Masyarakat Pertanian Berkelanjutan. *Institut Pertanian Bogor Journal of Bussiness*, 169-182. https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/1851

Nur, M. D. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5*(4), 2950-2960. From, http://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/article/view/1807

Nur, W. (2014). *KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI*. JAWA TIMUR, GENERASI MARITIM INDONESIA, wixsite.com. Diakses pada tanggal 14 Mei 2024, from https://wahyunursmanta.wixsite.com/generasimaritim/copy-of-laporan-kkn

Nurcholis,Hanif, S. T. (2023). *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota* (Vols. 1-9). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Prastyo, V. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia,Administrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo, IX*, 777-789. Diakses pada tanggal 19 Mei 2024, from https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/440

Rusfiana, Y. S. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan.* Bandung: Alfabeta.

Shohibul, M. (2021, 9 4). *Arumi Bachsin Serahkan Bantuan Handtraktor kepada Petani Kediri*. Surabaya, Jawa Timur, klikjatim.com. Diakses pada tanggal 2 Mei 2024, from https://klikjatim.com/arumi-bachsin-serahkan-bantuan-handtractor-kepada-petani-kediri/

Tri,Drajat Kartono, N. H. (2023). *Pembangunan Masyarakat* (Vols. 1-9). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Widya, K. M. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potangga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6*, 102-108. Diakses pada tanggal 30 Mei 2024, from https://journal.umgo.ac.id/index.php/publik/article/view/82

UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Diakses pada tanggal 16 Mei 2024 https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Diakses pada tanggal 16 Mei 2024 https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014

Hak Cipta © 2024, Tita Miftafulia, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim.

Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan *Society 5.0* yang Inklusif

Ufa Anita Afrilia[1], Riki Satia Muharam[2], dan Elly Nurlia[3]
[1,2] Universitas Padjadjaran, Indonesia, [3] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
e-mail: ufaanitaafrilia@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi krusial dalam era Society 5.0, yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi canggih guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas. Artikel ini mengkaji latar belakang permasalahan kesenjangan digital, rendahnya partisipasi publik, dan tantangan transparansi di sektor pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teknologi seperti AI, IoT, dan big data dalam tata kelola pemerintahan serta dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik. Metode yang digunakan meliputi studi literatur dan analisis kasus dari berbagai negara yang telah berhasil menerapkan teknologi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait privasi data dan kesenjangan akses teknologi. Implikasi dari kajian ini menekankan perlunya kebijakan adaptif dan inklusif yang memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari Society 5.0, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses transformasi digital ini.

***Kata kunci**: Inklusivitas, Pelayanan Publik, Society 5.0, Tata Kelola Pemerintahan, Transformasi Digital.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting di era *Society* 5.0, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang. *Society* 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi canggih seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial (Fukuyama, 2018; Mourtzis et al., 2022; Narvaez Rojas et al., 2021). Dalam konteks pemerintahan, transformasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun potensi manfaat dari transformasi digital sangat besar, terdapat beberapa masalah utama yang perlu diatasi. Pertama, kesenjangan digital yang signifikan masih menjadi hambatan utama, di mana akses terhadap teknologi dan layanan digital belum merata di berbagai kelompok masyarakat (Van Dijk, 2005; Warschauer, 2004). Kedua, partisipasi publik dalam proses pemerintahan masih rendah, yang mengakibatkan kurangnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka (Fung, 2015). Ketiga, meskipun teknologi digital memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, implementasi yang buruk dapat menimbulkan masalah baru seperti privasi data dan kesenjangan akses teknologi (Meijer, 2012).

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana transformasi digital dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan digital dan rendahnya partisipasi publik, serta meningkatkan transparansi dalam tata kelola

Hak Cipta © 2024, Afrilia,U.A., et.al.

pemerintahan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan memahami bagaimana menerapkan teknologi canggih secara efektif untuk mewujudkan Society 5.0 yang inklusif. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademis tetapi juga aplikasi praktis yang signifikan untuk perbaikan kebijakan publik dan implementasinya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai manfaat dan tantangan dari transformasi digital dalam pemerintahan. Teo menunjukkan bahwa e-government dapat meningkatkan kualitas informasi, efisiensi dan aksesibilitas layanan publik (Teo, 2008). Van Dijk dan Warschauer membahas bagaimana kesenjangan digital dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial (Van Dijk, 2005; Warschauer, 2004). Fung dan Meijer menyoroti bahwa teknologi dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, namun implementasi yang tidak tepat dapat mengurangi kepercayaan publik (Fung, 2015; Meijer, 2012). Munyoka menyatakan bahwa tingkat pendidikan, sarana prasarana, keamanan data, dan pengaruh politik juga mempengaruhi penerapan e-government (Munyoka, 2020). Selanjutnya Blasio menemukan bahwa transformasi digital juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik suatu negara (Blasio, 2019). Penelitian-penelitian ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami kompleksitas transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kasus dari berbagai negara yang telah berhasil menerapkan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Studi literatur akan mengkaji teori dan temuan dari penelitian sebelumnya, sedangkan analisis kasus akan mengevaluasi implementasi teknologi di negara-negara seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi digital di pemerintahan.

Penelitian ini menawarkan beberapa inovasi dan kontribusi baru, termasuk pendekatan holistik yang menggabungkan studi literatur dan analisis kasus untuk memberikan pandangan komprehensif tentang transformasi digital dalam pemerintahan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan adaptif dan inklusif yang memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari Society 5.0. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses transformasi digital, yang merupakan aspek krusial namun sering kali diabaikan dalam literatur sebelumnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan bahwa transformasi digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, yang sangat penting dalam konteks globalisasi dan digitalisasi saat ini (DESA., 2020). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kasus. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber akademis dan dokumen resmi yang relevan mengenai implementasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Analisis kasus digunakan untuk mengevaluasi praktik dan kebijakan transformasi digital di beberapa negara yang telah berhasil menerapkan teknologi tersebut, seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura.

Hak Cipta © 2024, Afrilia,U.A., et.al.

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi bagaimana teknologi digital seperti AI, IoT, dan big data diimplementasikan dalam pemerintahan, serta dampaknya terhadap efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan inklusivitas.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan dan praktik transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan di negara-negara yang menjadi studi kasus. Fokusnya adalah pada kebijakan, implementasi teknologi, partisipasi publik, dan hasil yang dicapai.

Data yang dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis kasus dengan bantuan aplikasi *Publish or Perish*, dan *VOSviewer* akan dianalisis peneliti menggunakan analisis tematik. Proses analisis tematik meliputi langkah-langkah berikut:

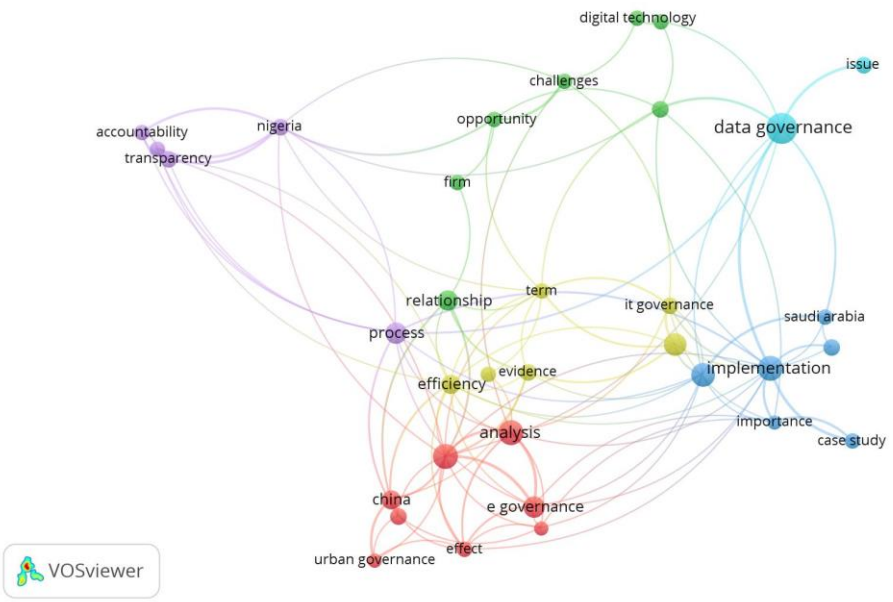
1. Pengumpulan data: Mengumpulkan data dari dokumen resmi, laporan pemerintah, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan. Data bibliometrik akan dikumpulkan menggunakan *Publish or Perish*.
2. Transkripsi data: Mentranskrip data yang telah dikumpulkan untuk memudahkan analisis.
3. Pengkodean data: Mengidentifikasi tema dan pola dalam data menggunakan teknik pengkodean terbuka, aksial, dan selektif. *VOSviewer* digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan bibliometrik.
4. Analisis tema: Menganalisis tema-tema utama yang muncul dari data untuk memahami hubungan antara teknologi digital dan aspek-aspek seperti efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan inklusivitas.
5. Validasi data: Melakukan validasi temuan melalui triangulasi data dengan berbagai sumber dan metode untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini berdasarkan dari Analisis Bibliometrik dan Studi Kasus yang mengkaji hubungan dan implementasi teknologi canggih seperti AI, IoT, dan *big data* dalam tata kelola pemerintahan di beberapa negara yang telah berhasil menerapkan transformasi digital, yaitu Estonia, Korea Selatan, dan Singapura. Hasil temuan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait privasi data dan kesenjangan akses teknologi.

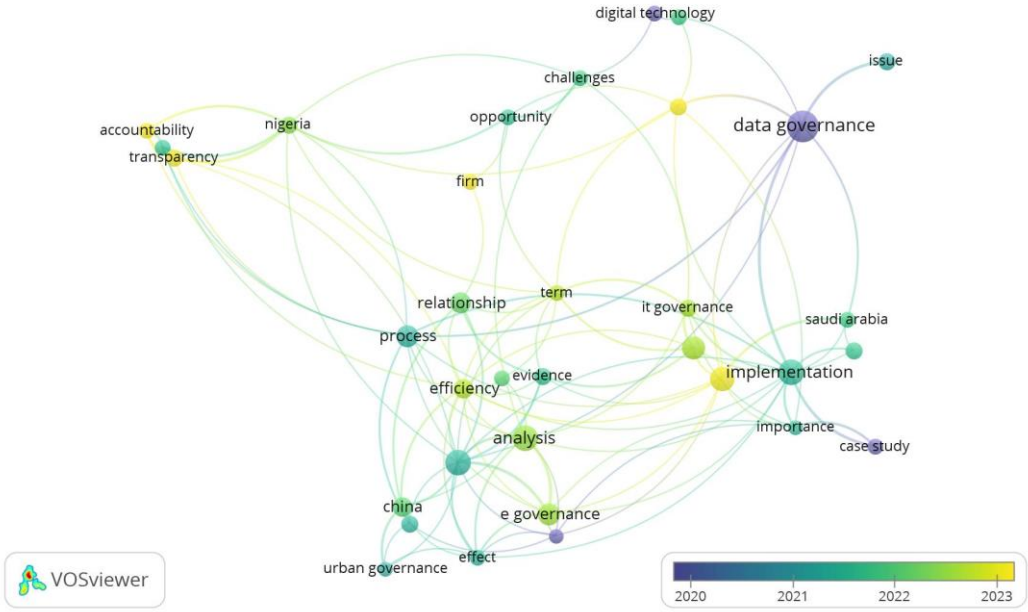
Analisis Bibliometrik dapat dilihat dalam hasil dari *VOSviewer*, yang sebelumnya mengambil data dari Scopus dan Google Scholar menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dengan kata kunci *Digital Transformation in Governance* dalam rentang waktu 2020-2024. Setelah mendapatkan data dengan menyimpan dalam bentuk RIS dan memasukkan data tersebut ke Mendeley lalu di analisis dengan menggunakan *Vosviewer* dengan *fields title and abstract fields, binary counting, minimum number of accurance of a term 5 or the 1004 term, 5 meet the threshold and number of terms to be selected 34*, dapat terlihat seperti dalam gambar dibawah ini:

Hak Cipta © 2024, Afrilia,U.A., et.al.



Gambar 1.1 *Network Visualization* dari Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan
(Sumber: VOSviewer, 2024)

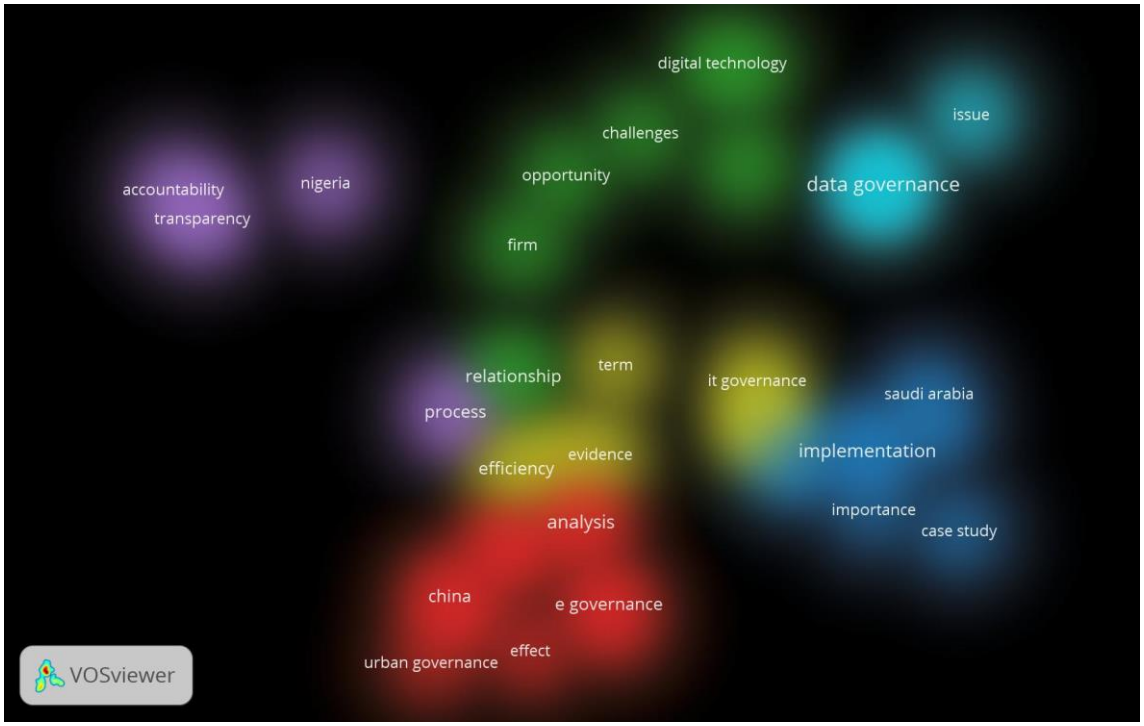
Pada hasil *Network Visualization*, terdapat 34 *items*, 6 *clusters*, 112 *links*, dan 176 *total link strength*. Dapat terlihat bahwa belum banyak yang meneliti mengenai teknologi digital yang berkaitan dengan transparansi publik, privasi data, dan kesenjangan akses teknologi.



Gambar 1.2 *Overlay Visualization* dari Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan
(Sumber: VOSviewer, 2024)

Hak Cipta © 2024, Afrilia,U.A., et.al.

Pada hasil *Overlay Visualization*, dapat terlihat bahwa artikel pada tahun lebih lama yaitu pada tahun 2020 memiliki warna lebih gelap dibandingkan artikel pada tahun lebih baru.



Gambar 1.3 *Density Visualization* dari Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan
(Sumber: VOSviewer, 2024)

Pada hasil *Density Visualization*, terlihat pengelompokan, lebih pekat warnanya lebih sering dilakukan penelitian. Terdapat 6 warna yang menggambarkan 6 *cluster*, yaitu: *cluster* 1 (merah) terdiri dari; analisis, china, *development*, *effect*, india, *urban governance*,; *cluster* 2 (hijau) terdiri dari; *challenges*, *digital technology*, *firm*, *opportunity*, *order*, *public administration*, *relationship*,; *cluster* 3 (biru) terdiri atas: *case study*, *digital transformation governance*, *implementation*, *importance*, saudi arabia, studi,; *cluster* 4 (kuning) terdiri dari; *efficiency*, *evidence*, *governance mechanism*,*it governance*, *public sector*, *term*,; *cluster* 5 (ungu) terdiri dari; *accountability*, *nigeria*, *process*, *public governance*, *transparency*,; cluster 6 (tosca) terdiri dari; *data governance*, dan *issue*. Dapat terlihat bahwa kajian mengenai "*Digital Transformation in Governance*" tidak muncul warnanya, sehingga kajian mengenai transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan masih jarang dilakukan.

Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Studi Kasus Estonia, Korea Selatan, dan Singapura

Dalam penelitian ini akan mengevaluasi implementasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan di negara-negara seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura. Berikut hasil temuan penelitian akan penulis tampilkan dalam bentuk tabel, lebih lanjut dilakukan pembahasan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi digital di pemerintahan.

Hak Cipta © 2024, Afrilia,U.A., et.al.

Negara	Inisiatif Utama	Hasil Utama	Tantangan
Estonia	*e-Residency, e-Government Services, Blockchain Technology*	Akses global meningkat, partisipasi publik tinggi, Keamanan data	Kesenjangan digital, biaya implementasi tinggi
Korea Selatan	*Digital New Deal, Smart City Projects, Government 24 Platform*	Penciptaan lapangan kerja, efisiensi perkotaan meningkat, layanan publik terintegrasi	Resistensi terhadap perubahan, keamanan siber
Singapura	*Smart Nation Initiative, GovTech Agency, Digital Identity (SingPass)*	Layanan publik efisien, respons krisis (COVID-19), partisipasi digital warga tinggi, akses digital yang aman	Kesenjangan digital, regulasi dan kebijakan

Tabel 1.1 Penerapan Tranformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan
(sumber: Olahan Peneliti, 2024)

Estonia

Di Estonia, penandatanganan digital dimulai dengan Undang-Undang Tanda Tangan Digital sejak tahun 2000. Tujuan untuk membuat penandatanganan digital dan penggunaannya dengan berbagai jenis dokumen menjadi lebih nyaman dan efisien telah menjadi prioritas utama dalam inisiatif *e-governance* (Pappel, 2012, 2017). Estonia telah memimpin dengan program *e-Residency*, yang memungkinkan orang dari seluruh dunia menjadi penduduk digital Estonia dan mengakses layanan digital negara tersebut (Kimmo, 2018; Tammpuu, 2019). Hampir semua layanan publik dapat diakses secara online, termasuk pemungutan suara digital yang meningkatkan partisipasi demokrasi (Reiners, 2017). Penggunaan teknologi *blockchain* dalam sistem pemerintah memastikan keamanan data dan integritas informasi, yang meningkatkan kepercayaan publik. Implementasi *e-Residency* dan *blockchain* dalam sistem *e-government* telah meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi (Sullivan, 2017). Warga negara dan bisnis internasional dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah dan cepat (Volik, 2019). Implementasi AI dan big data dalam layanan publik juga membantu meningkatkan efisiensi administrasi dan personalisasi layanan kepada warga.

Korea Selatan

Korea Selatan menduduki peringkat pertama dalam evaluasi *e-government* PBB pada tahun 2010. Sejak saat itu, Korea telah menjadi pemimpin *e-government* global selama satu dekade terakhir, menduduki peringkat pertama dalam Indeks Partisipasi Elektronik (EPI) dan peringkat ketiga dalam EGDI dari Survei *e-government* PBB pada tahun 2018 (Chung, 2019). Dalam perjalanan transformasi digital di Korea Selatan terdapat perspektif, tantangan dan peluang yang dimana tertuju pada kepemimpinan presiden untuk inovasi pemerintahan transisi tata kelola pemerintahan digital (Chung, 2020, 2022)

Korea Selatan meluncurkan kebijakan *Digital New Deal* yang fokus pada investasi besar dalam infrastruktur digital dan teknologi canggih seperti AI dan 5G. Proyek kota cerdas di Korea Selatan, seperti di Songdo, menunjukkan peningkatan efisiensi energi dan penurunan emisi karbon melalui integrasi IoT dalam manajemen kota. Platform *Government 24* mengintegrasikan

Hak Cipta © 2024, Afrilia,U.A., et.al.

berbagai layanan publik dalam satu portal, meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi warga.

Adapun sistem *MyData* dimana pengguna dapat secara proaktif membuat keputusan mengenai pembagian dan pemindahan data mereka sendiri dimana dapat dikembangkan dalam sistem catatan kesehatan pribadi (PHR) di masa depan yang berorientasi pada pengguna dan pemanfaatan data kesehatan pribadi (Choi, 2021). Penggunaan AI dan big data dalam pelayanan publik telah mempercepat proses administrasi (Aftab, 2023) dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan (Kim, 2008). AI digunakan dalam analisis data besar untuk meningkatkan respons pemerintah terhadap kebutuhan warga dan dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Singapura

Model *e-government* Singapura yang sukses mengintegrasikan layanan untuk kenyamanan publik. Portal *2-citizen* menghemat $14,5 juta per tahun. Keberhasilan Singapura dalam mengatasi masalah diantaranya kebutuhan mengubah pola pikir pegawai negeri sipil, ambiguitas tujuan *e-government*, kurangnya kemampuan teknis dan sumber daya keuangan, dan masalah kesenjangan digital adalah dengan kepemimpinan yang kuat yang merumuskan rencana aksi strategis, memberikan dukungan yang kuat, mengambil pendekatan terpusat untuk pendanaan dan infrastruktur serta melakukan upaya menjembatani kesenjangan yang ada (Ke, 2004; Mayakul, 2019). Adapun beberapa hal yang digunakan dengan berbagai inovasi seperti *E-Filling* untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam pelaksanaan *e-government* (Lim, 2012).

Singapura, melalui inisiatif *Smart Nation*, telah mengimplementasikan berbagai proyek inovatif seperti *National Digital Identity (SingPass)*, yang memungkinkan akses aman ke lebih dari 200 layanan pemerintah (Tan, 2022). *GovTech Agency* mengembangkan aplikasi dan platform yang meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Penggunaan AI dalam pelacakan COVID-19 melalui aplikasi *TraceTogether* menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk respons cepat terhadap krisis kesehatan. IoT diterapkan dalam manajemen transportasi dan layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Teknologi digital memungkinkan partisipasi publik untuk terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital dan aplikasi mobile. Transformasi digital yang diterapkan Singapura telah meningkatkan transparansi dalam berbagai layanan publik dan memungkinkan partisipasi digital yang lebih luas dari warga negara.

Peningkatan Partisipasi Publik dan Transparansi, serta Tantangan Privasi Data dan Kesenjangan Akses Teknologi

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan secara signifikan meningkatkan partisipasi publik dan transparansi. Di Estonia, program *e-Residency* dan layanan *e-Government* telah memungkinkan warga dan bahkan non-warga untuk berinteraksi dengan pemerintah secara digital. Ini tidak hanya mempermudah akses layanan tetapi juga meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemungutan suara digital. Di Korea Selatan, platform *Government 24* yang mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu portal meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi warga, memungkinkan mereka untuk lebih mudah berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Singapura, melalui inisiatif *Smart Nation* dan aplikasi *TraceTogether*, menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk respons cepat terhadap krisis kesehatan serta meningkatkan transparansi dalam penanganan situasi darurat seperti pandemi COVID-19.

Namun, peningkatan partisipasi publik dan transparansi ini juga membawa tantangan baru,

Hak Cipta © 2024, Afrilia,U.A., et.al.

terutama terkait privasi data dan kesenjangan akses teknologi. Penggunaan teknologi canggih seperti AI, IoT, dan *big data* memerlukan pengumpulan dan analisis data dalam skala besar, yang menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data (Savage, 2018). Misalnya, meskipun *blockchain* di Estonia menjamin keamanan data, ada tantangan dalam memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Di Korea Selatan dan Singapura, meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital juga menyoroti kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Meskipun kota-kota besar memiliki akses yang baik terhadap teknologi canggih, wilayah pedesaan sering kali tertinggal, menciptakan disparitas dalam akses layanan digital. Kesenjangan digital perlu diatasi dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Program pendidikan digital dan subsidi teknologi dapat membantu mengurangi kesenjangan ini. Temuan ini sesuai dengan teori Kesenjangan Digital yang menunjukkan bahwa akses teknologi yang tidak merata dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial (Van Dijk, 2005).

Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari pegawai pemerintah dan warga yang terbiasa dengan sistem tradisional dapat menghambat implementasi teknologi baru. Tantangan lain termasuk ancaman keamanan siber yang meningkat seiring dengan digitalisasi. Pemerintah harus terus memperbarui dan meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi data dari serangan siber. Biaya implementasi yang tinggi juga menjadi kendala, terutama bagi negara dengan anggaran terbatas. Regulasi yang kaku dan tidak adaptif terhadap teknologi baru dapat memperlambat proses digitalisasi, sehingga diperlukan kebijakan yang fleksibel dan mendukung inovasi.

Secara keseluruhan, meskipun teknologi digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, tantangan-tantangan tersebut harus diatasi melalui strategi yang komprehensif dan Berkelanjutan, sehingga negara-negara dapat memastikan bahwa transformasi digital membawa manfaat yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan *Society 5.0* yang inklusif. Implementasi teknologi canggih seperti AI, IoT, dan *big data* di negara-negara seperti Estonia, Korea Selatan, dan Singapura menunjukkan bahwa teknologi digital dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Namun, tantangan terkait privasi data dan kesenjangan digital tetap ada dan perlu dikelola dengan kebijakan yang adaptif dan inklusif.

Pemerintah perlu mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan data yang kuat untuk menjaga privasi dan keamanan informasi pribadi warga. Untuk mengatasi kesenjangan digital, pemerintah harus memastikan akses teknologi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, melalui program pendidikan digital dan subsidi teknologi. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital yang mudah diakses dan inklusif. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi teknologi yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk prospek studi lebih lanjut dapat melakukan penelitian komparatif antara negara-negara dengan tingkat adopsi teknologi yang berbeda untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan hambatan dalam transformasi digital. Penelitian jangka panjang dapat dilakukan untuk mengamati perubahan dan perkembangan implementasi teknologi digital dalam

Hak Cipta © 2024, Afrilia,U.A., et.al.

pemerintahan dari waktu ke waktu. Melibatkan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang dampak transformasi digital pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

REFERENSI

Aftab, M. (2023). An analysis of foreign residents' perceptions and behaviors regarding digital government portal services in the Republic of South Korea. *International Review of Administrative Sciences*, *89*(2), 536–554. https://doi.org/10.1177/00208523221084498

Blasio, E. De. (2019). Digital government between technology and participation: An analysis of urban platforms' design. In *Rivista Italiana di Politiche Pubbliche* (Vol. 14, Issue 3, pp. 349–382). https://doi.org/10.1483/95209

Choi, W. (2021). Development of a mydata platform based on the personal health record data sharing system in Korea. *Applied Sciences (Switzerland)*, *11*(17). https://doi.org/10.3390/app11178208

Chung, C. S. (2019). Analysis on the 2018 UN E-government survey. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, *11*(7), 1242–1252. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85074164448

Chung, C. S. (2020). WHY AND HOW SOUTH KOREA BECAME THE WORLD'S BEST E-GOVERNMENT COUNTRY: FOCUSING ON THE LEADERSHIP OF PRESIDENT ROH, MOO-HYUN. In *E-Government: Perspectives, Challenges and Opportunities* (pp. 92–136). https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85144456245

Chung, C. S. (2022). Analysis of Digital Governance Transition in South Korea: Focusing on the Leadership of the President for Government Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *8*(1). https://doi.org/10.3390/joitmc8010002

DESA., U. N. D. F. O. R. E. A. N. D. S. A. (2020). *UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2020: Digital Government in the Decade of Action For... Sustainable Development*. UN.

Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a new human-centered society. *Japan Spotlight*, *27*(5), 47–50.

Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, *75*(4), 513–522.

Ke, W. (2004). Successful e-government in Singapore. In *Communications of the ACM* (Vol. 47, Issue 6, pp. 95–99). https://doi.org/10.1145/990680.990687

Kim, S. (2008). Local Electronic Government Leadership and Innovation: South Korean Experience. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, *30*(2), 165–192. https://doi.org/10.1080/23276665.2008.10779349

Kimmo, M. (2018). E-residency as a nation branding case. In *ACM International Conference Proceeding Series* (pp. 419–428). https://doi.org/10.1145/3209415.3209447

Lim, E. T. K. (2012). Advancing public trust relationships in electronic government: The Singapore E-Filing journey. *Information Systems Research*, *23*(4), 1110–1130. https://doi.org/10.1287/isre.1110.0386

Mayakul, T. (2019). A Comparison of National Enterprise Architecture and e-Government Perspectives. In *TIMES-iCON 2019 - 2019 4th Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference*. https://doi.org/10.1109/TIMES-iCON47539.2019.9024591

Hak Cipta © 2024, Afrilia,U.A., et.al.

Meijer, A. (2012). Co-production in an information age: Individual and community engagement supported by new media. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, *23*, 1156–1172.

Mourtzis, D., Angelopoulos, J., & Panopoulos, N. (2022). A Literature Review of the Challenges and Opportunities of the Transition from Industry 4.0 to Society 5.0. *Energies*, *15*(17), 6276.

Munyoka, W. (2020). Electronic government adoption in voluntary environments – a case study of Zimbabwe. *Information Development*, *36*(3), 414–437. https://doi.org/10.1177/0266666919864713

Narvaez Rojas, C., Alomia Peñafiel, G. A., Loaiza Buitrago, D. F., & Tavera Romero, C. A. (2021). Society 5.0: A Japanese concept for a superintelligent society. *Sustainability*, *13*(12), 6567.

Pappel, I. (2012). Digital records keeping to information governance in Estonian local governments. In *International Conference on Information Society, i-Society 2012* (pp. 199–204). https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/84867392044

Pappel, I. (2017). Systematic digital signing in Estonian e-Government processes: Influencing factors, technologies, change management. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* (Vol. 10720, pp. 31–51). https://doi.org/10.1007/978-3-662-56266-6_2

Reiners, M. (2017). Electronic voting in comparative perspective: Status quo in Estonia and trends in central Europe. *Journal of Comparative Politics*, *10*(1), 40–56. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85040529146

Savage, N. (2018). Making digital government a better government. In *Nature* (Vol. 563, Issue 7733). https://doi.org/10.1038/d41586-018-07502-x

Sullivan, C. (2017). E-residency and blockchain. *Computer Law and Security Review*, *33*(4), 470–481. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.03.016

Tammpuu, P. (2019). Transnational Digital Identity as an Instrument for Global Digital Citizenship: The Case of Estonia's E-Residency. *Information Systems Frontiers*, *21*(3), 621–634. https://doi.org/10.1007/s10796-019-09908-y

Tan, G. K. S. (2022). Citizens go digital: A discursive examination of digital payments in Singapore's Smart Nation project. *Urban Studies*, *59*(12), 2582–2598. https://doi.org/10.1177/00420980211039407

Teo, T. S. H. (2008). Trust and electronic government success: An empirical study. *Journal of Management Information Systems*, *25*(3), 99–132. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222250303

Van Dijk, J. (2005). *The Deepening Divide, Inequality in the Information Society. Sage Publications*. Thousand Oaks CA London, New Delhi.

Volik, V. (2019). Electronic governance in Ukraine and Estonia current situation and prospectives. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, *22*. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85071490430

Warschauer, M. (2004). *Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide*. MIT press.

Hak Cipta © 2024, Afrilia,U.A., et.al.

Penyelesaian Inklusif Sengketa Tanah Adat: Interdisipliner, Hukum, Mediasi, Menyonsong Society 5.0

Wahyu Budiyanto
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
e-mail: wahyubyanto@gmail.com

Abstrak

Sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat menjadi permasalahan krusial di era Society 5.0. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana membangun perspektif inklusif dalam mengatasi sengketa tersebut melalui pendekatan interdisipliner, integrasi hukum dan mediasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan menganalisis regulasi, dokumen terkait, dan literatur kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman holistik terhadap kompleksitas sengketa pertanahan dapat diperoleh dengan mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, hukum, dan humaniora. Integrasi antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai kerangka hukum dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi menjadi kunci dalam membangun perspektif inklusif. UUPA melindungi hak-hak masyarakat adat, sementara mediasi mengakomodasi kepentingan semua pihak secara partisipatif. Teknologi digital, seperti aplikasi video conference, memfasilitasi mediasi yang lebih efisien dan transparan. Dengan pendekatan interdisipliner, kerangka hukum responsif, mediasi inklusif, dan teknologi digital, penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi yang dihasilkan dapat menjadi adil, berkelanjutan, serta mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang dalam mengatasi sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat di era Society 5.0.

***Kata kunci**: Perspektif Inklusif, Society 5.0, Integrasi Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Mediasi*

PENDAHULUAN

Era Society 5.0 menandai transformasi masyarakat yang didorong oleh kemajuan teknologi digital(Irawan et al., 2024), membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, politik, dan budaya. Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan terglobalisasi, tantangan utama yang dihadapi adalah menciptakan inklusi sosial yang memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Salah satu permasalahan krusial yang muncul di era Society 5.0 adalah sengketa pertanahan, di mana perkembangan teknologi dan kebijakan pembangunan yang masif seringkali berbenturan dengan hak-hak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, atas tanah dan sumber daya alam (Waluyo, 2014).

Sebagai contoh konkret, terdapat sengketa lahan di Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah terkait penggalian batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Konflik ini melibatkan masyarakat adat setempat dengan perusahaan pertambangan, di mana masyarakat adat mengklaim bahwa lahan yang digunakan untuk penggalian merupakan tanah mereka yang telah digarap secara turun-temurun. Mereka mengkhawatirkan dampak lingkungan dari aktivitas penggalian terhadap sumber daya alam dan mata pencaharian mereka yang berbasis pertanian. Sementara itu, perusahaan pertambangan menyatakan bahwa mereka telah memperoleh izin dan

Hak Cipta © 2024, Wahyu Budiyanto.

legalitas untuk melakukan penggalian batu andesit di wilayah tersebut.(Anggraini, 2022)

Permasalahan sengketa pertanahan ini menunjukkan urgensi untuk membangun perspektif inklusif dalam ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora. Pendekatan interdisipliner diperlukan untuk memahami secara komprehensif dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terlibat dalam sengketa pertanahan, serta merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan (Soenartho & Sudiro, 2023). Integrasi ilmu hukum berperan dalam membangun kerangka regulasi yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat lokal, serta menjamin akses yang setara bagi semua kelompok masyarakat terhadap sumber daya alam dan pembangunan.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi kerangka hukum fundamental yang mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah di Indonesia. UUPA memberikan landasan bagi pengakuan hak-hak atas tanah, termasuk hak-hak adat, serta menetapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, menjadi landasan kebijakan yang penting dalam upaya menyelesaikan sengketa pertanahan.

Dalam mengatasi sengketa pertanahan, mediasi menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif dan partisipatif (Oktopiani & Akbar, 2023), di mana semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dalam mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi kunci dalam membangun perspektif inklusif ini, karena mengatur proses mediasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-dimensi, di mana berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum saling berinteraksi dan memengaruhi dinamika sengketa tersebut. Pemahaman yang holistik terhadap kompleksitas ini menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pada aspek sosial dan budaya, sengketa pertanahan seringkali melibatkan kelompok masyarakat adat atau lokal yang memiliki ikatan kuat dengan tanah dan sumber daya alam. Dari perspektif ekonomi, sengketa pertanahan juga terkait dengan kepentingan pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi(Kamilah, 2013; Rahman et al., 2023). Aspek politik juga memainkan peran penting, di mana kebijakan pemerintah dan kekuatan politik lokal dapat memengaruhi pengelolaan dan penyelesaian sengketa (Ipu & Singkoh, 2021).

Untuk memahami kompleksitas sengketa pertanahan secara holistik, diperlukan integrasi berbagai disiplin ilmu. Ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan studi pembangunan dapat memberikan perspektif mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan ekonomi. Ilmu politik dan ilmu pemerintahan dapat menganalisis aspek kebijakan dan tata kelola pemerintahan, sementara ilmu hukum dan antropologi hukum dapat memberikan wawasan tentang kerangka hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan konteks lokal.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu mengungkapkan beberapa celah dan kesenjangan yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Studi yang dilakukan oleh Handyka mengkaji esensi pluralisme budaya dalam membangun masyarakat yang inklusif, namun kurang menekankan peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif dan partisipatif(Ammar Nur Handyka, 2023). Sementara itu, penelitian Nurbaedah mengeksplorasi potensi mediasi dalam menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan hukum adat dalam sengketa tanah perkebunan, tetapi mengalami kegagalan karena kurangnya peran interdisipliner dalam proses

Hak Cipta © 2024, Wahyu Budiyanto.

mediasi (Nurbaedah, 2020). Di sisi lain, studi Irawan et al. (2024) menyelidiki peran teknologi digital dalam memfasilitasi proses mediasi yang lebih efisien, namun kurang membahas secara mendalam bagaimana platform digital tersebut dapat diintegrasikan dengan pendekatan interdisipliner dan kerangka hukum yang responsif dalam mengatasi sengketa pertanahan di era Society 5.0(Irawan et al., 2024).

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi perspektif inklusif dalam ilmu sosial, politik, dan humaniora pada era Society 5.0, serta mengkaji integrasi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan menggabungkan perspektif inklusif dan pendekatan interdisipliner, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan yang ada dengan mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dalam ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora, kerangka hukum yang responsif, dan mekanisme mediasi yang efektif untuk mengatasi sengketa pertanahan secara adil dan inklusif di era Society 5.0. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana teknologi digital, khususnya platform video conference seperti Zoom Meeting, dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi proses mediasi yang lebih efisien dan transparan dalam konteks sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih adil dan berkelanjutan, serta menjawab tantangan kompleks yang muncul dalam penyelesaian sengketa pertanahan di era digital. Melalui pendekatan yang komprehensif dan inklusif, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam penyelesaian sengketa pertanahan, serta memberikan wawasan baru dalam menghadapi tantangan Society 5.0 dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat dan kelompok rentan. Metode yang digunakan adalah studi kasus, memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap perspektif, dan konteks sosial-budaya dalam sengketa pertanahan. Penelitian ini bersifat interdisipliner, mengintegrasikan perspektif dari ilmu sosial, politik, humaniora, dan hukum untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang sengketa pertanahan. Analisis dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, literatur terkait, serta praktik-praktik penyelesaian sengketa pertanahan yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen untuk mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi *(content analysis)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi-dimensi, di mana berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum saling berinteraksi dan memengaruhi dinamika sengketa tersebut. Pemahaman yang holistik terhadap kompleksitas ini menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. Pada aspek sosial dan budaya, sengketa pertanahan seringkali melibatkan kelompok masyarakat adat atau lokal yang memiliki ikatan kuat dengan tanah dan sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Hak Cipta © 2024, Wahyu Budiyanto.

Dari perspektif ekonomi, sengketa pertanahan juga berhubungan erat dengan kepentingan pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi (Taib, 2020; Yamin et al., 2022). Pemerintah dan sektor swasta sering mendorong pembukaan lahan untuk proyek-proyek besar seperti perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur dengan dalih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, masyarakat lokal sering kali kehilangan akses terhadap sumber penghidupan mereka dan mengalami marginalisasi ekonomi akibat proyek-proyek tersebut.

Aspek politik juga memiliki peran yang signifikan dalam sengketa pertanahan. Kebijakan pemerintah, kepentingan politik, dan kekuatan politik lokal dapat mempengaruhi cara sengketa dikelola dan diselesaikan. Seringkali, kepentingan politik dan kekuasaan mengesampingkan aspirasi serta hak-hak masyarakat lokal, yang mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam penyelesaian sengketa(Halim, 2023).

Faktor hukum merupakan aspek penting dalam sengketa pertanahan. Kerangka hukum yang mengatur kepemilikan tanah, penggunaan lahan, dan hak-hak masyarakat adat seringkali tidak selaras, sehingga dapat menjadi sumber konflik. Adanya kesenjangan antara hukum formal negara dan hukum adat yang berlaku di masyarakat lokal seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan penyelesaian sengketa.

Untuk memahami kompleksitas sengketa pertanahan secara holistik, diperlukan integrasi berbagai disiplin ilmu (Morizcha, 2021). Ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan studi pembangunan dapat memberikan perspektif mendalam tentang dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terlibat dalam sengketa pertanahan. Ilmu politik dan ilmu pemerintahan dapat menganalisis aspek kebijakan, kepentingan politik, dan tata kelola pemerintahan yang memengaruhi penyelesaian sengketa. Sementara itu, ilmu hukum dan antropologi hukum dapat memberikan wawasan tentang kerangka hukum, hukum adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan konteks lokal.

Dengan mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu tersebut, dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang sengketa pertanahan dan merumuskan solusi yang lebih holistik, adil, dan berkelanjutan. Integrasi ini memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, mengenali kepentingan dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat, serta mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang mengakomodasi aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum secara seimbang. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu menjadi kunci dalam memahami dan mengatasi kompleksitas sengketa pertanahan. Hanya dengan pemahaman yang holistik dapat menciptakan solusi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta mencegah sengketa serupa di masa depan. (Suyudi et al., 2023)

Dalam upaya membangun perspektif inklusif dan mengatasi sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat, peran hukum menjadi sangat krusial. Salah satu landasan hukum yang dapat digunakan adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengakui keberadaan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.

Melalui UUPA, kerangka regulasi diharapkan dapat melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam, serta menjamin akses mereka secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kesenjangan antara hukum formal negara dan hukum adat

Hak Cipta © 2024, Wahyu Budiyanto.

yang berlaku di masyarakat lokal. Di sinilah peran mediasi menjadi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan hukum yang mengatur proses mediasi dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pertanahan. Perma ini mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Melalui proses mediasi, semua pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan, termasuk masyarakat adat, dapat berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan solusi yang mengakomodasi kepentingan dan perspektif masing-masing. Berdasarkan Pasal 8 Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi dapat dilakukan oleh mediator hakim atau mediator non hakim.

Mediator hakim adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim untuk menjalankan fungsi mediator dalam perkara tertentu yang ditanganinya. Mediator hakim memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengatur proses mediasi, serta berupaya membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Sementara itu, mediator non hakim adalah pihak yang bukan merupakan hakim, tetapi memiliki sertifikat sebagai mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan di lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Mediator non hakim ini dapat berasal dari kalangan profesi hukum, akademisi, tokoh masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kompetensi dalam menjalankan proses mediasi.

Keberadaan mediator hakim dan mediator non hakim memberikan fleksibilitas dalam proses mediasi, sehingga para pihak yang bersengketa dapat memilih mediator yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik dan konteks sengketa yang dihadapi (Saraswati et al., 2020). Dalam kasus sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat, mediator non hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan hukum adat dapat menjadi pilihan yang tepat untuk memfasilitasi proses mediasi secara inklusif dan partisipatif, serta merumuskan solusi yang kontekstual dan diterima oleh semua pihak.

Dalam proses mediasi, hukum adat dan kearifan lokal masyarakat adat dapat dipertimbangkan dan diintegrasikan dengan kerangka hukum formal negara yang diatur dalam UUPA. Mediasi memungkinkan dialog yang terbuka dan inklusif antara perwakilan masyarakat adat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kerangka hukum formal seperti UUPA, tetapi juga kontekstual dan diterima oleh semua pihak, terutama masyarakat adat.

Integrasi antara UUPA sebagai landasan hukum dan Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai landasan proses mediasi menjadi sangat penting dalam membangun perspektif inklusif dan mengatasi sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat. UUPA berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan menciptakan kerangka regulasi yang responsif, sementara Perma No. 1 Tahun 2016 menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan hukum adat melalui proses mediasi yang inklusif dan partisipatif.

Kolaborasi antara kedua aspek ini memungkinkan terciptanya solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat adat. Solusi yang dihasilkan melalui mediasi cenderung lebih berkelanjutan dan dapat mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan, sesuai dengan semangat UUPA dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat ketentuan yang mengatur kemungkinan untuk melaksanakan mediasi secara daring atau online bagi para pihak yang tidak dapat hadir secara langsung. Hal ini dapat

Hak Cipta © 2024, Wahyu Budiyanto.

dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi video conference seperti Zoom Meeting.

Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 menyatakan:

"Mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh yang dibantu oleh teknologi komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam proses mediasi."

Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak yang bersengketa, termasuk masyarakat adat, dapat mengikuti proses mediasi secara daring atau online menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom Meeting. Hal ini memungkinkan para pihak yang memiliki keterbatasan geografis atau kendala lainnya untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses mediasi tanpa harus hadir secara fisik di tempat mediasi.

Penggunaan aplikasi video conference seperti Zoom Meeting dalam proses mediasi dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi para pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan, termasuk masyarakat adat yang mungkin tinggal di wilayah berjauhan.
2. Mengurangi biaya perjalanan dan akomodasi yang dibutuhkan jika harus hadir secara fisik di tempat mediasi.
3. Memfasilitasi proses mediasi yang lebih efisien dan fleksibel, karena para pihak dapat mengikuti proses mediasi dari lokasi masing-masing.
4. Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses mediasi, karena semua pihak dapat melihat dan mendengar secara langsung melalui video conference.

Jika dilakukan melalui video conference seperti Zoom Meeting, mediasi memiliki keunggulan tambahan dalam hal transparansi karena proses tersebut dapat direkam dan disimpan sebagai bukti kehadiran serta partisipasi aktif dari para pihak yang terlibat. Ini menjamin proses yang lebih transparan dan akuntabel, serta memudahkan pemantauan keterlibatan semua pihak dalam mencapai kesepakatan bersama. Dengan adanya rekaman video conference, seluruh jalannya proses mediasi dapat terdokumentasi dengan baik. Hal ini memberikan bukti yang jelas mengenai siapa saja yang hadir dan terlibat dalam proses mediasi, serta menunjukkan secara transparan bagaimana proses tersebut berlangsung. Rekaman ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan dapat diverifikasi, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari mengenai apa yang telah disepakati dalam proses mediasi.

Ketersediaan rekaman juga memungkinkan para pihak, pengamat, atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengakses dan memeriksa kembali jalannya proses mediasi jika diperlukan. Ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik atau masyarakat adat.

Dengan demikian, Perma No. 1 Tahun 2016 memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi video conference dalam proses mediasi, termasuk dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengintegrasikan teknologi digital dengan pendekatan interdisipliner dan kerangka hukum yang responsif dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Platform digital ini dapat untuk menjadi sarana yang mempermudah pertukaran informasi, pengajuan bukti-bukti pendukung, dan perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses mediasi, serta mengurangi potensi bias dan subjektivitas yang seringkali muncul dalam penyelesaian sengketa secara konvensional.(Irawan et al., 2024)

Hak Cipta © 2024, Wahyu Budiyanto.

Membangun perspektif inklusif dalam ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora memiliki implikasi penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan di era Society 5.0. Pendekatan inklusif ini menekankan pada keterlibatan, partisipasi, dan akomodasi kepentingan semua pihak. Dalam konteks sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat, pendekatan inklusif dapat berkontribusi secara signifikan dalam menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan melibatkan perspektif dari ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, dan studi pembangunan dapat memahami secara mendalam dinamika sosial-budaya, praktik-praktik tradisional, dan kearifan lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat. Pemahaman ini menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menghargai identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

Ilmu-ilmu politik dan ilmu pemerintahan juga berperan penting dalam menganalisis aspek kebijakan, tata kelola, dan kepentingan politik yang seringkali menjadi faktor penting dalam sengketa pertanahan (Zulkarnaen, 2023). Dengan memahami dinamika politik dan proses pengambilan keputusan dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan ketidakadilan dan konflik, serta merumuskan strategi yang tepat untuk membangun dialog dan konsensus antara berbagai pihak yang berkepentingan.

Selain itu, ilmu-ilmu humaniora seperti sejarah, filsafat, dan studi budaya dapat memberikan wawasan kritis dalam memahami akar permasalahan sengketa pertanahan dan mempromosikan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Perspektif dari ilmu-ilmu humaniora dapat membantu memahami konteks historis, nilai-nilai budaya, dan etika yang terlibat dalam sengketa pertanahan, serta merumuskan solusi yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan yang lebih luas.

Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif dari ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora dapat membangun pemahaman yang lebih holistik tentang tantangan sosial-budaya yang terkait dengan sengketa pertanahan. Hal ini memungkinkan untuk merumuskan solusi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga merangkul aspek-aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang melekat dalam kehidupan masyarakat adat. Pendekatan inklusif ini juga menekankan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat adat, dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa. Dengan memberikan ruang bagi suara-suara yang seringkali terpinggirkan, dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga diterima dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat.

Perspektif inklusif dalam ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di era Society 5.0. Dengan memahami kompleksitas tantangan sosial-budaya yang terkait dengan sengketa pertanahan dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak dapat merumuskan solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang. Hal ini akan membantu mencegah konflik serupa di masa depan dan menjamin keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Di era Society 5.0, penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat dan kelompok membutuhkan perspektif inklusif. Perspektif ini dibangun dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi, studi pembangunan, ilmu politik, sejarah,

Hak Cipta © 2024, Wahyu Budiyanto.

dan filsafat untuk memahami kompleksitas dinamika sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum yang melatarbelakangi sengketa tersebut. Integrasi kerangka hukum formal (UUPA) dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi (Perma No.1/2016) menjadi kunci. UUPA melindungi hak-hak masyarakat adat, sementara mediasi mengakomodasi kepentingan semua pihak secara inklusif dan partisipatif. Teknologi digital seperti aplikasi video conference berperan memfasilitasi mediasi yang efisien, transparan, dan terbuka. Dengan pendekatan interdisipliner, kerangka hukum responsif, mediasi inklusif, dan pemanfaatan teknologi digital, diharapkan menjadi solusi yang dihasilkan adil, berkelanjutan, serta mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang dalam mengatasi sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat.

REFERENSI

Ammar Nur Handyka, M. (2023). Pluralisme Budaya dalam Masyarakat Kontemporer: Pendekatan Interdisipliner terhadap Keragaman Kultural. *Jecth : Journal Economy, Technology , Social and Humanities Vol.1 No.1, September 2023*, *1*(1), 1–7.

Anggraini, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *Jurnal El-Dusturie*, *1*(1). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4197

Halim, A. (2023). Sosialisasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengeketa Dibidang Pertanahan pada Kegiatan PPL Mahasiswa STIS Darul Falah Bondowoso Socialization. *Jurnal Pengabdian*, *2*(1), 204–210. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v2i1.2712

Ipu, V., & Singkoh, H. N. F. S. (2021). Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Governace*, *1*(1), 1–8.

Irawan, H., Hasan, Z., Lampung, U. B., Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum : Tren dan Inovasi di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4600-4613 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: Https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative*, *4*, 4600–4613. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9735

Kamilah, A. (2013). Analisis Ekonomi Alihfungsi Lahan Pertanian di Kota Bekasi (Kasus Kecamatan Bekasi Utara dan Bantar Gebang). *Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Wilayah*, *5*(1), 36–49.

Morizcha, A. B. (2021). Dampak Investasi Perkebunan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pemilik Tanah Hak Ulayat (Studi Kasus Sengketa Lahan Masyarakat Hukum Adat Umalulu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Hukum Visio Justisia*, *1*(1), 1–29. https://republika.co.id/berita/py2duj383/kementan-514-investor-berminat-tanam-modal-di-perkebunan.

Nurbaedah, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha. *Diversi: Jurnal Hukum*, *6*(2), 220. https://doi.org/10.32503/diversi.v6i2.1350

Oktopiani, L., & Akbar, I. (2023). Collaborative Governance, Sejauh Mana Mampu Menyelesaikan Konflik? (Studi Pada Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *1*(11), 350–355. https://doi.org/10.5281/zenodo.10277664

Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Hak Cipta © 2024, Wahyu Budiyanto.

Ekonomis: Journal of Economics and Business, *7*(2), 1461. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492

Saraswati, R., Hadiyono, V., Kusniati, Y., & Boputra, E. (2020). Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Justitia et Pax*, *36*(2), 159–179. https://doi.org/10.24002/jep.v36i2.3164

Soenartho, G. A., & Sudiro, A. (2023). *Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dikabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*. *6*(2), 4277–4284. https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Suyudi, I., Oktari, R., Sekartaji, H., & Zhafira, A. (2023). *Analisis Faktor Dukungan Komunitas Masyarakat terhadap Penanganan Illegal Waste Dumping di Situ Perigi dengan Pendekatan Conservation Criminology Theory*. *7*, 172–201.

Taib, Z. (2020). Konflik Agraria Penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. *Agroprimatech*, *4*(1), 27–33. https://doi.org/10.34012/agroprimatech.v4i1.1329

Waluyo, A. (2014). Secara Terpadu Yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura). *Jurnal Kelautan*, *7*(2), 75–85.

Yamin, M., Purba, H., Sembiring, R., & Sari, E. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum* |, *7*, 50–67.

Zulkarnaen, J. T. A. H. P. (2023). Strategi Kolaboratif Berbasis Masalah dalam Pengelolaan Batas Wiyalah Kelurahan Bangka Beliting Darat Kota Pontianak dengan Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, *25*(2), 190–219. https://doi.org/https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i2.657

Hak Cipta © 2024, Wahyu Budiyanto.

Kegagalan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Dampak *Social Harms* Bagi Masyarakat Sebagai Bentuk Kejahatan Negara

Yogo Tri Hendiarto
Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Kampus UI Depok
e-mail: yogo.tri@ui.ac.id

Abstrak

Perilaku korupsi yang membudaya secara sistemik dan masif di lembaga pemerintahan memberikan dampak social harms dan mengancam kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia seperti sel kanker yang menyebar dalam stadium tingkat akhir dan membutuhkan pengendalian sosial kejahatan yang optimal. Dampak korupsi ini berakibat pada ancaman pemenuhan kebutuhan dasar bagi kebutuhan individu, mulai dari hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial budaya serta hak mendapatkan kesejahteraan sosial yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kegagalan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia dan memberikan analisis dampak social harms bagi masyarakat sebagai bentuk kejahatan negara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Ragam metode penelitian dengan menggunakan metode analisis data sekunder dari beragam dokumen dengan analisis teks deskriptif. Implikasi dari penelitian ini adalah merumuskan rekomendasi pengendalian sosial kejahatan dalam bentuk kebijakan kriminal dalam meningkatkan keberhasilan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

***Kata kunci**: Kebijakan Kriminal, , Kejahatan Negara, Korupsi, Strategi Pemberantasan Korupsi, Social harms*

PENDAHULUAN

Artikel ini bertujuan untuk memahami tentang kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana dampak *social harms* yang dimunculkan bagi masyarakat Indonesia ketika negara dalam menjalankan kebijakan kriminal dalam pencegahan kejahatan korupsi. Tema ini penting dibahas mengingat Indonesia masih masuk dalam kategori dengan tingkat korupsi yang tinggi dan masih menunjukan bahwa strategi pemberantasan korupsi cenderung berjalan di tempat dan tidak memberikan dampak signifikan serta membahayakan kesejahteraan sosial warga negaranya yang terancam terjebak dalam kemiskinan dan *social harms* yang mengancam akibat kegagalan pemberantasan korupsi ini.

Korupsi di Indonesia memiliki sejarah panjang, sejak zaman kolonialisme hingga kondisi saat ini. Mulai dari pemberian upeti, hukum yang bersifat diskriminatif dan konspirasi dalam melakukan tindakan korupsi menjadi catatan sejarah bahwa Indonesia terbelenggu oleh kejahatan korupsi yang begitu masif. Ironisnya perilaku korupsi di Indonesia juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang seharusnya menjalankan good governance. Namun penyimpangan perilaku korupsi di kalangan aparatur sipil negara ini cukup tinggi. Dari laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2022 menunjukan bahwa mayoritas terjadi di sektor pemerintahan daerah sebesar 32%, diikuti oleh lembaga penegak hukum sebesar 23% dan posisi ketiga diisi oleh aparat BUMN/BUMD. Sementara pelaku korupsi dari posisi jabatan ditempati oleh posisi Kepala Daerah sebesar 28% , diikuti oleh anggota DPR/DPRD sebesar 21%, dan Pejabat Eselon III sebesar 14 % (ICW, 2024). Dari temuan data tersebut menunjukan bahwa aparatur sipil

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

negara (ASN) merupakan profesi yang paling banyak terlibat dalam kasus kejahatan korupsi. Dimana seharusnya ASN ini harusnya adalah profesi yang harus mencegah terjadinya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah namun ternyata merekalah yang menjadi pelaku. Fenomena ini sungguh sangat ironi sekali bagi masyarakat Indonesia(Lynch et al., 2013).

Beberapa kasus korupsi melibatkan pola relasi kekuasaan antara pemilik modal di bidang ekonomi dan pemilik kekuasaan di pemerintah. Korupsi yang melibatkan korporasi dan negara mendominasi bentuk korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bentuk relasi kuasa yang menunjukkan power dan dominasi dalam melakukan perbuatan jahat. Kondisi ini diperparah dengan bentuk kerugian dalam bentuk dampak sosial bagi bidang kesejahteraan rakyat, yakni dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan akses kesehatan bagi masyarakat banyak. Korupsi merupakan kejahatan extraordinary crime yang tak kasat mata, namun memiliki dampak yang luas dan tidak dapat langsung dirasakan namun memiliki social harms yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kerugian akibat korupsi juga memberikan dampak yang sangat besar dalam bentuk kerugian negara. Kerugian negara ini akibat korupsi yang dilakukan secara berkelompok dan merugikan korban dalam bentuk masif. Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi negara dalam jumlah yang sangat besar

Tabel 1. Data Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar

No	Nama Kasus	Pelaku	Jumlah Kerugian
1	Korupsi PT Timah Tbk	Harvey Moeis dkk	271 Triliun
2	Korupsi Surya Darmadi, penyerobot lahan di Provinsi Riau	Surya Darmadi Raja Thamsir Rachman	87 Triliun
3	Korupsi PT TPPI	Honggo Wendratno Djoko Harsono	42,4 Triliun
4	Korupsi PT Asabri	Adam Rachmat Damiri (Direktur Utama PT Asabri 2011-2016) 2. Sonny Widjaja (Dirut PT Asabri 2016-2020) 3. Bachtiar Effendi (Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri 2008-2014) 4 Hari Setianto (Direktur Asabri 2013-2014 dan 2015-2019) 5 Heru Hidayat (Direktur PT Trada Alam Minera dan PT Maxima Integra) 6 Jimmy Sutopo (Direktur Jakarta Emiten Investor Relation) 7. Lukman Purnomosidi (Dirut PT Prima Jaringan)	22,7 Triliun

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

No	Nama Kasus	Pelaku	Jumlah Kerugian
5	Kasus Korupsi PT Jiwasraya	Hary Prasetyo (Direktur Keuangan Jiwasraya) Hendrisman Rahim (mantan Dirut Jiwasraya) Syahmirwan (mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya) Joko Hartono Tirto (Direktur PT Maxima Integra) Benny Tjokrosaputro (Dirut PT Hanson International) Heru Hidayat (Direktur PT Trada Alam Minera)	16,8 Triliun
6	Korupsi Bank Century	Budi Mulya	Rp 7 Triliun
7	Korupsi Pelindo 2	RJ Lino	Rp 7 Triliun
8	Korupsi Bupati Kotawaringin Timur	Supian Hadi	Rp 5.8 Triliun
9	Korupsi Kasus BLBI	Sjamsul Nursalim Sjahruddin Arsjad Tumenngung	Rp 4,28 Triliun
10	Korupsi e KTP	Setya Novanto Irman Gusman Andi Narogong	Rp 2,3 Triliun
11	Korupsi Hambalang	Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat) Muhammad Nazaruddin (mantan Bendahara Partai Demokrat) Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI) Angelina Sondakh	Rp 706 Miliar

Sumber : Diolah dari beragam sumber media massa, 2024

Dari data tersebut menunjukan bahwa kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia cenderung dilakukan oleh pemilik modal, aparatur sipil negara dan pengusaha yang memiliki relasi kuasa dalam melakukan kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi tidak dapat dilakukan seorang diri namun dilakukan secara bersama sama untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pelakunya sangat beragam mulai ASN, direktur BUMN BUMD, politisi sampai ke pejabat publik. Kondisi ini menunjukan korupsi yang dilakukan terjadi konspirasi antara pemerintah dengan dunia bisnis, yang terlihat berpola secara terus menerus hingga hari ini terjadi corporate state crime untuk mendapatkan keuntungan besar bagi kelompok yang terlibat. Hal ini menunjukan komplikasi dari pelaku korupsi memiliki sifat beragam dari aspek pekerjaan dan fungsi pekerjaan untuk mendapatkan tujuan material tertentu. Kerugian yang sangat besar ini akan sangat memengaruhi kualitas layanan publik yang akan diterima oleh masyarakat Indonesia

Korupsi tentu memunculkan social harms bagi masyarakat Indonesia walaupun tidak

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

terlibat secara langsung dari peristiwa kejahatan tersebut namun korupsi memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya korupsi akan berdampak pada keterbatasan akses pembangunan infrastruktur karena adanya kasus kejahatan korupsi. Akses pendidikan untuk pembangunan sekolah, pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan kualitas guru, juga akan mengalami hambatan dalam pemenuhan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan termarjinalisasikan. Social harms kedua juga terjadi dalam pemenuhan akses kebutuhan pokok, yakni pangan, sandang dan papan. Korupsi juga meningkatkan resiko munculnya masyarakat miskin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sebagai seorang manusia dan social harms yang ketiga adalah adanya masalah akses kesehatan, dimana fasilitas kesehatan yang masih terbatas dengan sarana dan prasarana terbatas di berbagai wilayah menyebabkan individu kesulitan dalam pemenuhan akses kesehatan. Social harms sangat terkait erat dengan kasus kejahatan korupsi sehingga akan memunculkan indikasi keberbahayaan dan berdampak bagi kehidupan manusia dalam pemenuhan kesejahteraan.

Kegiatan pemberantasan korupsi sebagai upaya tindakan pencegahan korupsi di Indonesia ternyata juga belum dapat memberikan dampak signifikan bagi penurunan angka kejahatan korupsi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan indeks persepsi korupsi yang mengalami penurunan dan dalam 2 tahun terakhir memiliki skor stagnan di angka 34 (Laporan Tahunan ICW,2023) .Angka skor tersebut menunjukan bahwa penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia cenderung stagnan atau makin menurun. Hal ini menunjukan bahwa kampanye pemberantasan korupsi di Indonesia tidak memberikan dampak signifikan dalam membawa perubahan dalam pencegahan korupsi.

Apabila penegakan hukum dalam pencegahan korupsi dibiarkan maka yang terjadi adalah social harms bagi masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial . Kondisi ini akan mengakibatkan terhambatnya kegiatan Pembangunan akibat kasus korupsi yang akan menghambat kinerja pembangunan di perdesaan dan perkotaan. Hal ini juga perlu menjadi perhatian serius dalam pencegahan kasus korupsi sebagai upaya menurunkan risiko social harms bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Masalah korupsi merupakan masalah yang terus terjadi di negara Indonesia. Karena dalam sejarah perkembangan korupsi di Indonesia, korupsi terus hadir dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menujukan bahwa korupsi merupakan bagian kebudayaan menyimpang yang terus hidup bersama dengan masyarakat Indonesia. Isu korupsi di Indonesia juga menjadi isu politik yang terus konsisten menjadi isu kolektif yang sering digunakan dalam perdebatan politik oleh pimpinan di negara Indonesia.

Korupsi di Indonesia sampai saat ini masih belum dapat ditangani dengan baik, walaupun sudah ada lembaga superpower yang bekerja di Indonesia, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi RI, namun KPK masih banyak mengalami hambatan, mulai masalah perundangan , politisasi KPK, sampai masalah internal yang membuat KPK kesulitan dan mengalami penurunan performa. Kondisi ini akan mempengaruhi kualitas dalam pemberantasan korupsi dalam hal penindakan dan pencegahan. Kondisi ini akan mempengaruhi indeks persepsi korupsi yang diberikan oleh stakeholders. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia berkembang dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Kasus korupsi di Indonesia yang ditangani oleh Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Masalah ego sektoral dan komunikasi antar lembaga pencegahan dan penanganan kasus korupsi menyebabkan terhambatnya kegiatan pencegahan dan penanganan kasus korupsi di Indonesia. Ketika negara gagal dalam melakukan tindakan pencegahan korupsi maka negara dianggap gaagal dalam memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan negara

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

dianggap telah melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh negara (state crime) .

Kajian literatur yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi banyak dilakukan oleh beragam negara, pengalaman negara lain dalam melakukan tindakan pencegahan ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana strategi pencegahan kejahatan dapat dilakukan dan diterapkan di Indonesia. Xiao, Scott, dan Gong dalam hasil penelitiannya mendefinisikan kepercayaan dalam konteks pencegahan korupsi sebagai komponen penting yang mempengaruhi efektivitas lembaga anti-korupsi di Hong Kong, China (ACA)Xiao & Scott, 2022). Mereka menekankan bahwa kepercayaan bukan hanya tentang persepsi publik yang positif, tetapi juga tentang hubungan antara kepercayaan dan efektivitas di dalam lembaga antikorupsi. Perdebatan berkisar pada apakah kepercayaan menentukan efektivitas, efektivitas menentukan kepercayaan, atau apakah hubungan tersebut saling menguatkan, membentuk lingkaran yang baik di mana kepercayaan meningkatkan efektivitas dan efektivitas menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan dipandang sebagai faktor kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya anti-korupsi dan terkait erat dengan persepsi efektivitas ACA.

Salah satu temuan utama yang disoroti dalam artikel tersebut adalah pentingnya hubungan antara kepercayaan institusional dan efektivitas yang dirasakan oleh lembaga anti-korupsi (ACA).

Sementara tesis oleh Ting Gong dan Wenyan Tu (2022) tentang "Memerangi Korupsi di Tiongkok" membahas beberapa aspek utama yang berkaitan dengan masalah kebutuhan akan efektivitas yang berkelanjutan dalam mengendalikan praktik-praktik korupsi. Efektivitas strategi antikorupsi, peran teknologi, dan pentingnya kepercayaan publik dalam memerangi korupsi, membangun kerangka kerja institusional, memanfaatkan teknologi, dan menumbuhkan kepercayaan publik demi penegakan antikorupsi yang efektif .

Sementara Quah (2018) menuliskan beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan upaya anti-korupsi di negara-negara Asia, sebagaimana dibahas dalam dokumen tersebut, antara lain: Negara-negara yang berhasil seperti Singapura dan Hong Kong SAR telah menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk memerangi korupsi, yang mengarah pada penegakan hukum antikorupsi yang efektif. Negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong SAR telah mengandalkan lembaga anti-korupsi tunggal dan khusus dengan kapasitas yang lebih baik, seperti Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) dan Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC), yang telah terbukti lebih efektif dibandingkan dengan beberapa lembaga yang memiliki sumber daya lebih sedikit. Lembaga anti-korupsi yang efektif di negara-negara yang sukses telah menunjukkan ketidakberpihakan dalam menegakkan hukum anti-korupsi, terlepas dari status individu yang terlibat. Menerapkan proses yang transparan dan meminta pertanggungjawaban individu dan lembaga atas praktik korupsi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya anti-korupsi yang berhasil. Membangun kepercayaan publik melalui langkah-langkah anti-korupsi yang berhasil telah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong SAR. Para pembuat kebijakan di negara-negara yang berhasil telah berfokus pada pemahaman dan penanganan akar penyebab korupsi, seperti gaji sektor publik yang rendah, birokrasi yang berbelit-belit, dan kurangnya akuntabilitas pejabat pemerintah(Quah, 2018). Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan dalam memerangi korupsi membutuhkan kombinasi faktor seperti keberanian politik, lembaga anti-korupsi yang andal, transparansi pemerintahan, dan keterlibatan masyarakat. Dengan belajar dari pengalaman negara-negara Asia yang berbeda, dapat diambil pelajaran berharga untuk meningkatkan efektivitas upaya anti-korupsi di seluruh wilayah.

Studi Stanczak (2017) menunjukan bahwa kejahatan yang melibatkan korporasi dan negara dalam melakukan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas kapas di India ternyata mengalami kegagalan dalam proyek nasional. Hal ini diakibatkan adanya

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

kegagalan teknologi resitensi hama dan kegagalan pemasaran yang berakibat pada kodisi social harms yang membahayakan petani di India(Stańczak, 2017). Isu social harms yang muncul dari tindakan kejahatan negara ini adalah munculnya masalah utang pada petani, kemiskinan struktural dan akhirnya adalah isu bunuh diri. Kegagalan negara dalam mengambil kebijakan dapat menyebabkan social harms dalam konteks yang lebih luas bagi orang orang yang terlibat. Sementara Rothe dan Friedrichs (2006),menunjukkan terdapat keterkaitan antara kejahatan negara dan dampak social harms. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjelaskan hubungan. Kejahatan negara dapat merusak prinsip keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia masyarakat. Tindakan kejahatan negara yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas dapat menciptakan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kerentanan bagi masyarakat yang menjadi korban. Pengabaian penanganan kasus korupsi merupakan salah satu bentuk dari kejahatan negara(Rothe & Friedrichs, 2006).

Sementara King (2000) menunjukkan apakah korupsi berskala besar dapat disembuhkan atau tidak di Indonesia akan sangat bergantung pada karakter rezim yang sedang berkuasa pada periode yang terbentuk pada periode pasca-Soeharto. Dalam artikelnya yang berpengaruh yang ditulisnya pada akhir tahun 1970-an, pemilihan presiden yang dilakukan untuk pertama kalinya melalui pemungutan suara memperlihatkan perpecahan yang jelas antara kekuatan politik yang berorientasi Islam dan sekuler nasionalis, dan menghasilkan dua pemimpin yang berkuasa, yang mewakili masing-masing pihak, yang keduanya tidak pernah terlibat dalam pengambilan kebijakan nasional, serta distribusi ekonomi patrimonial menyebabkan korupsi terus tumbuh di Indonesia dan tingkat partisipasi politik oposisi yang rendah akibat kekuatan politik dikuasi oleh rezim(King, 2000) .

Dick dan Mulholland (2016) menuliskan bahwa Indonesia adalah masyarakat patronase dan korupsinya tidak hanya bersifat sistemik tetapi juga merupakan cara yang kekuasaan dan kekayaan dibagi di antara faksi-faksi elit penguasa yang berkuasa dengan norma-norma demokrasi .Sementara Dick & Mulholland memyatakan bahwa kondisi ini menyebabkan sulitnya pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia untuk ditangani sejak masa orde baru.

Robertson-Snape (1999) menulis strategi untuk mengakhiri KKN - singkatan dari korupsi, kolusi dan korupsi, kolusi, dan nepotisme-saat merupakan strategi politik yang sebenarnya dilakukan untuk mearik hati masyarakat namun sebenarnya tidak dilaksanakan secara sungguh - sungguh sebagai suatu program pemberantasan korupsi secara prioritas utama sehingga budaya korupsi tetap terjadi hingga saat ini (Robertson-Snape, 1999).

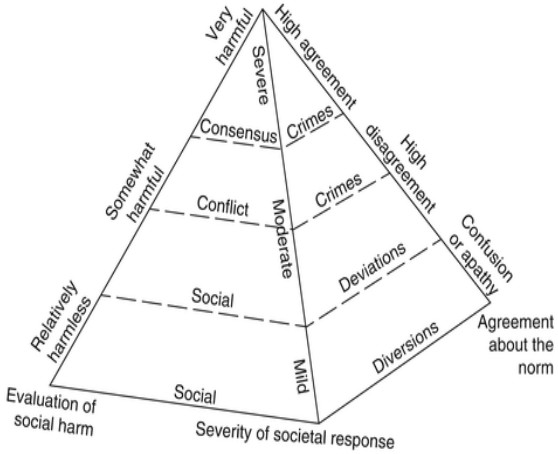
Untuk menganalisis temuan data maka konsep yang digunakan dalam makalah ini antara lain , social harms adalah suatu dampak lanjutan tentang dampak dari kejahatan yang terjadi secara lebih luas bukan tentang hubungan antara pelaku dan korban kejahatan saja. Tapi kejahatan itu memiliki dampak yang luas bagi kehidupan kesejahteraan individu di dalam masyarakat. Dampak negatif dari social harms dapat bersifat secara material, psikis sosial dan budaya(Bernal et al., 2014). Misalkan social harms yang terjadi dalam kasus kejahatan korupsi bulog yang melibatkan pengusaha dan pemerintah menyebabkan harga beras naik dan akibatnya masyarakat miskin mengalami kesulitan dalam mengakses beras, mengalami depresi dan memiliki risiko bunuh diri yang cukup besar karena terjerat dalam kemiskinan yang disebabkan oleh kasus korupsi.

Konsep strategi pemberantasan korupsi (corruption combating) suatu ide gagasan suatu mekanisme intervensi yang dikelola oleh lembaga pemerintah dalam memerangi kasus korupsi di Indonesia, Penetapan kebijakan politik ini merupakan satu kebijakan reformasi birokrasi yang merupakan suatu dukungan negara dalam memerangi korupsi dengan beragam metode untuk mencapai tujuan Indonesia bebas korupsi(Quah, 2018).

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

Kejahatan negara adalah dimana negara melakukan kejahatan dengan segala kebijakan yang merugikan bagi kepentingan publik, Dimana korban bersifat kolektif dan cenderung tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban, bentuk bentuk kejahatan negara antara lain kasus korupsi pemerintahan, kasus kejahatan lingkungan, praktik bisnis yang curang antara pemerintah dengan korporat(Bradshaw, 2014). Kejahatan negara ini juga menimbulkan dampak lanjutan yaitu munculnya social harms yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

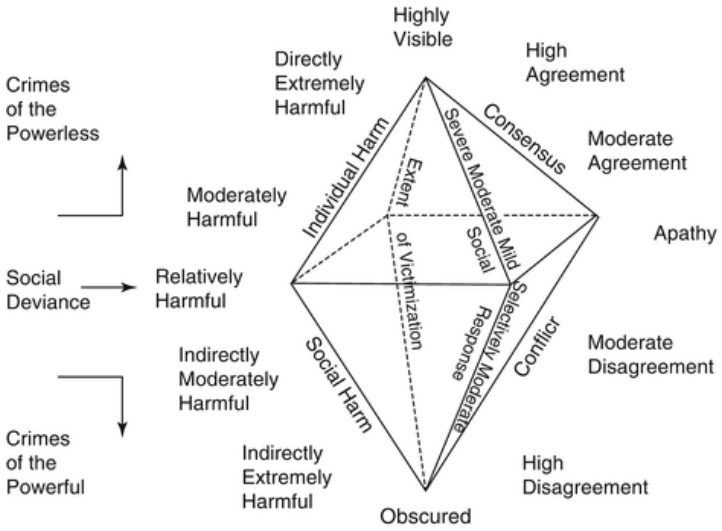
Piramida Kejahatan (Hagan et al., 1987)menjelaskan tentang perbedaan keseriusan kejahatan tergantung pada tiga dimensi yang masing masing mempunyai rentang rendah /ringan sampai ke kategori tinggi/berat. Dimensi pertama adalah agreement about the norm, yaitu derajat consensus tentang perbuatan yang melanggar norma atau tidak. Dengan kategori, tidak jelas, tidak sepakat, hingga sepakat bahwa perbuatan itu salah. Dimensi kedua adalah severity of social responses, bentuk sanksi yang diberikan dalam penghukuman formal. Bentuk hukumannya antara lain sanksi sosial, pidana denda, kurungan penjara, semakin berat sanksi hukuman maka akan semakin besar Tingkat seriuitas kejahatan. Dimensi ketiga adalah evaluation of social harms, melihat dampak kejahatan yang dihasilkan apakah berdampak pada individu yang bersangkutan, orang lain secara individual atau berdampak masif dan kolektif.



Gambar1. Piramida Kejahatan Hagan
Sumber : (Mustofa, 2015)

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

Prisma Kejahatan Lanier dan Henry, muncul karena kritik dari Piramida Hagan yang hanya menjelaskan 3 dimensi indikator dalam menjelaskan indikator kejahatan, Kritik utamanya adalah adanya kejahatan yang terlihat dan ada kejahatan yang tidak terlihat sehingga terkadang korban pun tidak merasa dirinya adalah korban kejahatan. Dimana setiap kejahatan memunculkan kerugian *(social harms)* namun belum tentu memunculkan korban kejahatan. Dari prisma kejahatan Lanier Henry juga terlihat bahwa kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu *powerless crime* dan *powerful crime*. *Powerless crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang orang biasa yang tidak memiliki kekuatan politik, berasal dari kelompok menengah bawah jenis kejahatan biasanya berkaitan dengan kekerasan dan alasan ekonomi, sedang *powerful crime* adalah kejahatan yang terjadi dilakukan oleh orang yang berkuasa, mendominasi perilaku ekonomi dan biasanya berkiatan dengan penguasaan aset ekonomi. Kejahatannya bersifat tidak tampak dan tidak mudah dirasakan dampaknya oleh korban secara langsung. *Social harms* muncul dalam kategori *crime with the powerful*.



Gambar 2. Prisma Kejahatan Lanier dan Henry
Sumber : (Mustofa, 2015)

Kejahatan pihak yang berkuasa adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi ekonomi dan politik yang sah secara relatif kuat di masyarakat . Kejahatan tersebut mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi pekerjaan atau politik yang berkuasa, seperti eksekutif bisnis, profesional, pengacara, dokter, akuntan, dan politisi. Di sini, kita melihat kejahatan seperti perdagangan orang dalam, penghindaran pajak, penyuapan dan korupsi, penipuan asuransi kesehatan, penetapan harga, polusi, bahaya pekerjaan, produk konsumen yang berbahaya, dan sebagainya. Kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa mencakup banyak hal yang disebut kejahatan kerah putih

Oleh karena itu, kita perlu mencakup hal-hal berikut: (1) kejahatan korporasi seperti kesalahan produksi produk, kondisi kerja yang berbahaya, penetapan harga, dan penipuan konsumen; (2) kejahatan lembaga pemerintah, seperti korupsi polisi yang sistemik, subversi penegakan peraturan, dan kekerasan; dan (3) kejahatan negara akibat kebijakan pemerintah seperti pelanggaran hak privasi, eksperimen medis yang tidak disengaja (monopoli negara dan subsidi pemerintah, serta kejahatan terhadap negara lain(Lanier et al., n.d.). Dalam kasus korupsi yang dilakukan pemerintah terlihat jelas bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara ini merupakan kejahatan *powerful* yang melibatkan relasi kuasa antara pemilik kekuasaan dengan individu yang ingin melakukan pertukaran materi dengan sesuatu yang dibutuhkan.

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

Korban juga tidak mendapatkan dampak langsung dari kasus korupsi yang dilakukan namun secara *social harms* memiliki dampak yang cukup luas.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami proses strategi pemberantasan korupsi yang telah dilakukan dalam satu dekade terakhir yang dilakukan oleh negara. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis data sekunder yang diperoleh dari beragam dokumentasi dari media massa, artikel jurnal dan laporan penelitian yang berfokus pada isu penanganan kasus korupsi. Kelebihan metode data sekunder ini akses yang terbuka *(open source)* dari media internet sehingga dapat memberikan keragaman data, Namun ada kekurangannya dari metode data sekunder ini yaitu data kurang memberikan gambaran proses tentang fenomena yang diamati secara holistik. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitik, yakni memberikan analisis dari data yang diperoleh dengan menguraikan fenomena tersebut dan memberikan analisis yang dikaitkan dengan konsep dan teori yang telah diperoleh. Analisis deskriptif analitik ini sangat bergantung pada kualitas data sekunder yang berhasil dikumpulkan oleh penulis secara komprehensif dalam menjelaskan isu penanganan kasus korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk kampanya pencegahan korupsi yag digunakan oleh pemerintah RI adalah dengan menggunakan kampanye zona Integritas. Zona Integritas (ZI) merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia. Berdasarkan Permen PANRB No 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani (WBBM) serta bebas dari korupsi (WBK) di seluruh instansi pemerintah. WBK adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sementara WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik

Tabel 2. Tahapan Prosedural Pengaturan Zona Integritas

Tahapan	Kegiatan
Pencangan Zona Integritas	•Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai •Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas
Pembangunan Zona Integritas	Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM •Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

Pengusulan	Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) •TPI melaporkan kepada pimpinan instansi •Pengusulan ke Kemen PAN RB
Review TPN	Review oleh Tim Penilai Nasional (Kemenpan-RB, KPK, dan Ombudsman RI)
Penetapan WBK/WBBM	MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK •MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM
Pembinaan dan Pengawasan	• Pembinaan dilakukan Pimpinan Instansi K/L

Sumber : website resmi Kementerian PANRB

Dari kegiatan pencegahan yang dilakukan dalam kegiatan zona integritas ini lebih memiliki persyaratan yang bersifat *administrative* dan pengawasan yang sifatnya kontinu tidak dilakukan maka akibat yang terjadi adalah terjadi penyalahgunaan dalam proses penilaian dimana status WBM dan WBBM tidak sebagaimana mestinya artinya tetap terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terjadi biropatologi sampai pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi tetap terjadi. Artinya terjadi manipulatif yang dilakukan oleh negara untuk mendapatkan pencitraan di Masyarakat bahwa negara bersungguh sungguh dalam melakukan pemberantasan korupsi walaupun realitasnya tidak demikian, disini terjadi kejahatan negara dimana kegiatan pemberatasan yang diharapkan secara ideal sebagai bentuk strategi dalam penanganan kasus korupsi namun realitasnya lebih dari sekedar seremoni yang bersifat manipulatif sehingga tidak masuk dalam esensi sejati dalam pencegahan kejahatan korupsi di Indonesia, hal ini sesuai dengan nilai indeks persepsi korupsi yang skornya hanya 34 dari hasil penilaian transparansi internasional pada tahun 2023.

Berikut ini adalah temuan data yang telah mengikuti zona integritas dan telah mendapatkan penilaian wilayah bebas korupsi namun tetap melakukan tindakan korupsi

Tabel 3. Daftar Lembaga dengan Status Zona Integritas dan Melakukan Korupsi

No	Nama Lembaga	Status Zona Integritas	Modus
1	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan	WBK	tahun 2021, beberapa pegawai DJP di Kanwil Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbarat) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus suap pajak(Irfan Kamil, 2021).
2	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp 525 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan	WBK	OTT tersebut digelar pada Kamis (23/11/2023). Sebanyak 11 orang diamankan dalam OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di wilayah KalimantanTimur.(Krisiandi, 2023)

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

	Timur (Kaltim).		
3	Lapas Sukamiskin Bandung	WBK	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Wahid Husein, ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu dinihari, 21 Juli 2018. Kalapas Sukamiskin itu ditangkap karena diduga menerima hadiah sebagai imbalan untuk pemberian fasilitas mewah kepada napi kasus korupsi di lapas tersebut.(Syaiful Hadi, 2018)
4	Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung	WBK	Tahun 2022, beberapa hakim dan pegawai PN Tanjungkarang terjaring OTT KPK terkait kasus suap perkara korupsi.(NA, 2021)

Sumber : diolah dari beragam media massa,2024

Data tersebut menunjukan kondisi yang sangat ironi. Model pencegahan pemberantasan korupsi yang diterapkan Menpan RB ternyata tidak bisa melakukan kontrol terhadap perilaku korupsi. Zona integritas yang digadang gadang dapat memberikan dampak positif dalam pencegahan korupsi ternyata gagal dalam realitas pelaksanaannya.

Dari data tersebut menunjukan bahwa masih ada sebagian penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan zona integritas yang dimana seharusnya program kegiatan yang diinisiasi pemerintah ini merupakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data tersebut menunjukan bahwa modus yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan penyuapan kepada orang orang yang memiliki kekuasaan. Hal ini sangat merugikan rasa keadilan dan melanggar nilai moral bagi warga negara. Dari kasus diatas juga dapat ditemukan bahwa dari 4 kasus yang terjadi walaupun memiliki status wilayah bebas korupsi namun tetap melakukan korupsi. Mengapa srategi pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung mengalami kegagalan ? karena dalam penerapan kegiatan zona integritas ini mengalami beberapa hhambatan dan kendala dalam operasionalisasi kebijakan publik. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab pendorong terjadinya korupsi dari 4 kasus diatas:

Mekanisme pengawasan internal dan eksternal dari stakeholders yang berwenang tidak berjalan dengan baik. Tim penilai internal cenderung memiliki kepentingan untuk memberikan penilaian subyektif yang seakan akan lembaga internal yang dinilainya memiliki skor yang dianggap layak untuk mendapatkan nilai WBK atau WBBM. Kedua, Mekanisme penilaian nasional juga memiliki masalah dengan kualitas, konsistensi dan mekanisme penilaian oleh asesor. Terkadang asesor mempermudah proses penilaian secara subyektif sehingga nilai yang diberikan merupakan nilai subyektif dan tidak sesuai indikator. Ketiga, Zona integritas lebih memenuhi unsur persyaratan administratif bukan pada konteks substantif bagaimana lembaga bekerja dalam pencegahan korupsi yang sebaiknya dimiliki dan dikembangkan oleh masing masing instansi lembaga tidak bersifat top down. Terakhir, dalam bagian pengawasan dan pembinaan tidak dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan sehingga berakibat pada pola penyimpangan pada masing masing unit lembaga tetap melakukan kegiatan korupsi secara

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

sistematis. Data diatas cenderung korupsi dilakukan secara kolektif dan tidak individual. Ada bentuk relasi kuasa yang dimunculkan dari pelaku, pelaku memiliki jabatan di suatu unit instansi pemerintahan.

Dari analisis diatas menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan dan pemberatasan korupsi masih banyak mengalami hambatan di lembaga pemerintahan yang sudah mengikuti program zona integritas dan telah lulus penilaian dengan memiliki nilai wilayah bebas korupsi namun hal itu lebih bersifat seremonial dan manipulatif, mereka mendapatkan hasil WBK karena memenuhi semangat pemenuhan kewajiban sebagai lembaga yang bebas korupsi namun tidak menjalankan esensi filosofi pemberantasan korupsi. Hal ini juga terkait dengan public trust dari masyarakat dan aparatur sipil negara yang masih rendah tentang program zona integritas. Public trust menjadi salah satu isu penting dalam pencegahan kejahatan korupsi. Lembaga pemerintahan yang ikut dalam program zona integritas ingin menunjukan bahwa lembaganya adalah lembaga terpercaya oleh publik dan mendukung program bebas korupsi walaupun realitas sesungguhnya tidak demikian

Dari analisis teori Piramida Hagan bahwa terlihat kasus kejahatan korupsi yang dilakukan dalam kegiatan pemberantasan korupsi dalam kegiatan zona integritas menunjukan dimensi pertama tentang agreement about norm menunjukan bahwa kejahatan korupsi masuk dalam kategori kesepakatan yang disadari secara kolektif, bahwa perilaku korupsi merupakan bentuk pelanggaran kejahatan yang perlun dibasmi dan dienyahkan dari bumi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, masyarakat setuju bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat merugikan dari beragam aspek. Dimensi kedua adalah severity of societal respons , adalah keseriusan respon masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi dalam pemberian hukuman yang bersifat pasti. Kejahatan korupsi diatur dalam undang undang tindak pidana korupsi yang dibuat secara definitive dan khusus untuk memberikan hukuman bagi para koruptor. Dimensi ketiga adalah evaluation of social harms, keseriusan relative yang diakibatkan dari munculnya kejahatan. Tingkat kerugian untuk kejahatan yang dimunculkan dalam kasus kejahatan korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap public trust masyarakat terhadap aparatur sipil negara. Disini korban kejahatan korupsi mengalami kesulitan dalam pengukuran dampak yang dimunculkan akibat kejahatan korupsi dan hal ini kemudian diperbaiki dalam prisma kejahatan Lanier dan Henry.

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara merupakan bentuk kejahatan berdaya kuat yang dicirikan dilakukan oleh penguasa yang memiliki akses kekuasaan. Oleh karena itu, beberapa kejahatan yang dilakukan oleh negara mencakup hal-hal berikut: (1) kejahatan korporasi seperti kesalahan produksi produk, kondisi kerja yang berbahaya, penetapan harga, dan penipuan konsumen; (2) kejahatan lembaga pemerintah, seperti korupsi polisi yang sistemik, subversi penegakan peraturan, dan kekerasan; dan (3) kejahatan negara akibat kebijakan pemerintah seperti pelanggaran hak privasi, eksperimen medis yang tidak disengaja (misalnya, tes radiasi terhadap subjek tanpa disadari dan penelitian sifilis Tuskegee), monopoli negara dan subsidi pemerintah, serta kejahatan terhadap negara lain (Lanier, 2015). Dari temuan data yang ditemukan menunjukan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan oleh ASN merupakan bentuk kejahatan negara yang dilakukan secara sistemik dalam bidang penyuapan petugas ASN dalam bidang pajak, petugas pemasyarakan dan hakim pengadilan. Kejahatan ini memiliki pola kejahatan yang bersifat tersembunyi (invisible crime) karena dampak yang dirasakan oleh korban tidak dirasakan langsung oleh korban. Kejahatan dalam manipulative pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian menjadi satu alat perlindungan bahwa lembaga mereka dinyatakan bersih dari kasus korupsi namun dalam praktiknya mereka tetap melakukan tindakan korupsi. Perilaku ini dapat dinyatakan dalam kategori kejahatan negara, dimana negara membiarkan kebijakan zona

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

integritas sebagai mekanisme kontraproduktif dalam kegiatan pemberantasan korupsi yang dianggap sebagai tindakan pro anti korupsi untuk melindungi rakyat dari kerugian kasus korupsi, padahal tindakan tersebut merupakan tindakan manipulative ke publik sebagai tindakan pencitraan yang dapat merugikan individu dalam memperoleh kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Keterkaitan antara pemberantasan korupsi dalam zona integritas dalam kegiatan di lembaga pemerintahan dapat memunculkan kejahatan negara dan memunculkan social harms di masyarakat. Social harms dari kasus pemberantasan korupsi dalam kasus zona integritas dapat memberikan dampak lanjutan bagi masyarakat. Dampak social harms yang dimunculkan dari kasus tersebut adalah hukum bersifat diskriminatif dan bersifat merugikan, hukum diciptakan untuk kepentingan penguasa. Kedua adalah isu aksesibiltas pelayanan publik yang terhambat bagi seluruh masyarakat dalam pelayanan hak hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Masalah kemiskinan yang bersifat struktural akibat dampak dari perilaku korupsi yang masif serta terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena terjadi eksploitasi ekonomi dimana masyarakat menjadi korban struktural dalam proses kekuasaan yang dilakukan pemerintah sebagai penguasa politik

Ketika kejahatan negara yang diwujudkan dalam kegiatan pemberantasan korupsi yang tidak bersifat holistik dalam proses pembuatan kebijakan politik maka akan berdampak dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Kegiatan ekseskusi dalam pemberantasan korupsi hal ini terlihat dalam kebijakan zona integritas yang diinisiasi oleh Kementerian PAN RB yang beranggapan bahwa zona Integritas adalah mekanisme pemberantasan korupsi yang dianggap efektif dalam pencegahan kejahatan namun nyatanya merupakan bentuk kejahatan negara dalam memanipulasi persepsi publik dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Kejahatan negara dalam pemberantasan korupsi ternyata juga memberikan dampak social harms dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sekedar relasi pelaku dan korban namun berdampak lanjutan akibat perilaku korupsi terhadap kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Dari hasil perbandingan jurnal menunjukan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum dilandaskan pada kepercayaan publik sehingga zona integritas tidak dapat berjalan dengan baik karena masih mengalami kendala dalam dukungan publik terhadap terciptanya efektivitas dalam pemberantasan kasus korupsi. Hal ini berbeda dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara Singapura dan Hong Kong yang mendapatkan dukungan publik sehingga tekanan eksternal dapat dikendalikan, misalkan penegakan hukum yang bersifat bagi semua pelaku korupsi tanpa memandang pangkat dan institusi. Di Indonesia belum dapat dilakukan karena masih terhambat dengan isu dukungan publik kepada institusi KPK. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Xiao, H., Scott, I., & Gong, T. (2022).

Sementara riset dari tesis oleh Gong dan Tu (2022) memberikan analisis yang komprehensif mengenai tantangan, strategi, dan dampak pemberantasan korupsi di Tiongkok, menyoroti pentingnya pendekatan yang berkembang, membangun kerangka kerja institusional, memanfaatkan teknologi, dan menumbuhkan kepercayaan publik demi penegakan antikorupsi yang efektif. Lembaga anti-korupsi yang efektif di negara-negara yang sukses telah menunjukkan ketidakberpihakan dalam menegakkan hukum. Apabila dibandingkan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung bermasalah dimulai dari strategi kebijakan pencegahan yang dimulai salah dalam operasionalisasi, penegakan hukum masih bersikap diskriminatif dan mengabaikan kepercayaan publik sehingga strategi pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung bersifat politik dan tidak mendapatkan dukungan kepercayaan publik. Jadi strategi pencegahan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang luar biasa untuk mencapai tujuan yang efektif.

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

Sementara Quah (2018) menuliskan Beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan upaya anti-korupsi di negara-negara Asia, sebagaimana dibahas dalam dokumen tersebut, antara lain: Negara-negara yang berhasil seperti Singapura dan Hong Kong SAR telah menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk memerangi korupsi, yang mengarah pada penegakan hukum antikorupsi yang efektif. Indonesia walaupun sudah memiliki undang undang tindak pidana korupsi namun dalam pelaksanaan hukumnya masih belum efektif karena faktor politik dianggap lebih dominan dalam menentukan proses hukum dibandingkan dengan fakta hukum, impunitas dalam penegakan hukum korupsi juga masih bersifat sistemik dalam melindungi pelaku korupsi, hal ini sangat berbeda jauh dengan kondisi di Singapura, Hong Kong atau pun China. Dan pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat jauh dari kondisi ideal karena adanya faktor politik yang lebih kuat dalam mempengaruhi penegakan hukum, termasuk dalam penerapan zona integrasi.

Stanczak (2017) dala studinya menjelaskan bagaimana "social harms" merujuk pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh interaksi antara negara dan korporasi serta penagtruh social harms dalam kasus kejahatan korupsi dimana regulasi hukum tidak berlaku adil. Social harms merupakan dampak lanjutan dari kejahatan negara dan Lembaga korporat dalam mempengaruhi kehidupan banyak orang. Termasuk dalam data kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporat yang bekerjasama dengan negara menyebabkan terjadinya social harms di Indonesia, Dimana ada korban yang mucul yang menderita dalam berbagai aspek kehidupan. Pelaku kejahatan korporat bekerjasama dengan penguasa negara dalam mengeksploitasi kekayaan alam. Kejahatan negara ini berakibat pada eksplotasi alam dan manusia yang menimbulkan beragam kerugian, termasuk di dalamya Ketika pemberantasan korupsi dilakukan namun tidak bekerja sebagaimana mestinya hal tersebut dalam memproduksi social harms yang berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat.

Rothe dan Friedrichs (2006) ,menunjukkan terdapat keterkaitan antara kejahatan negara dan dampak social harms. Korupsi merupakan salah satu kejahatan negara yang memberikan dampak pada social harms,. Strategi pemberantasan korupsi dalam zona integritas merupakan salah satu bentuk kejahatan negara yang memberikan ketidakpercayaan publik dalam model pencegahan karena hanya bersifat administrative tidak menyentuh esensi dari penegakan hukum anti korupsi di Indonesia. Kejahatan negara dapat merusak prinsip keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia masyarakat. Tindakan kejahatan negara yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas dapat menciptakan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kerentanan bagi masyarakat yang menjadi korban yang merupakan dampak yang muncul dari social harms.

Sementara King (2000) menunjukkan Apakah korupsi berskala besar dapat disembuhkan atau tidak di Indonesia akan sangat bergantung pada karakter rezim yang sedang berkuasa pada periode yang terbentuk pada periode pasca-Soeharto. Pada rezim Jokowi pemberantasan korupsi juga mengalami kemunduran karena dianggap tidak serius dan melakukan intervensi kepada KPK dan ironinya ketua KPK melakukan Tindakan korupsi . Pemberantasan korupsi dengan model zona integritas ini dirintis pada tahun 2014 dan dimulai pada rezim Jokowi dan hasilnya tidak berdampak secara positif terlihat dari indeks persepsi korupsi yang terus menurun dan stagnan. Kecenderungan pelaku korupsi di Indonesia bagi kekuasan terlihat dalam era patrimonial dalam zaman Soeharto dan budaya tersebut masih berlanjut hingga saat ini.

Dick dan Mulholland (2016) menyatakan bahwa jika kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah tantangan sosial dan ekonomi terbesar di Indonesia, maka korupsi adalah tantangan politik yang utama. Dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat endemic seperti penyakit kanker sulit untuk diatasi. Termasuk kesalahan dalam pencegahan korupsi dalam bentuk zona integritas yang belum menyelesaikan akar masalah

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

namun lebih pada urusan birokrasi administrative. Kegagalan dalam pemberantasan korupsi cenderung merupakan perilaku manipulatif yang dilakukan oleh penguasa untuk memberikan citra ke publik bahwa mereka serius dalam melakukan tindakan antikorupsi walaupun realitasnya tidak demikian. Hal ini sungguh membahayakan dalam perjalanan penegakan hukum anti korupsi di Indonesia dan memunculkan risiko munculnya social harms.

korupsi adalah penyakit akut dan tidak dapat disembuhkan dengan mudah, setidaknya tidak hanya dengan meningkatkan transparansi saja (Robertson-Snape, F, 1999). Penegakan kasus korupsi di Indonesia masih memiliki hambatan yang nyata dan Panjang sehingga diperlukan political will dari semua stakeholders sehingga dapat memberikan warna perubahan dalam kegiatan penegakan hukum di Indonesia. Sistem hukum yang lemah masih menyulitkan penegakan hukum anti korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari artikel tersebut menunjukan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara dalam hal ini Kementerian PAN RB dengan system zona integritas masih belum memiliki daya optimal dalam pencegahan korupsi, Dari data menunjukan bahwa lembaga yang memiliki status wilayah bebas korupsi ternyata terbukti melakukan korupsi. Data yang tercatat seperti fenomena gunung es artinya data yang terungkap lebih sedikit, artinya kementerian lembaga tetap melakukan korupsi walaupun telah dilakukan tindakan pencegahan melalui zona integritas. Hal ini disebabkan karena zona integritas lebih berfokus pada pengumpulan data secara administrative, tidak ada pengawasan secara berkelanjutan dan tidak ada kewajiban dalam melaporkan perkembangan dengan indicator pengukuran yang valid dan reliabel. Zona Integritas lebih bersifat manipulatif sebagai tujuan pencitraan menyebabkan terjadinya kejahatan negara yang memunckan social harms bagi masyarakat luas. Bentuk social harms adalah pelanggaran terhadap perlindungan hak asasi manusia, serta diskriminasi dalam pelayanan hukum dan impunitas pelaku korupsi yang akhirnya akan memberikan keberlanjutan transaksi antara pelaku korupsi dengan lembaga atau individu yang terlibat. Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum dalam menegakan kasus korupsi yang lebih didominasi oleh variable politik dibandingkan dengan variable penegakan hukum hal ini berakibat gagalnya pemberantasan korupsi, serta tidak ada dukungan kepercyaan publik terhadap lembaga anti korupsi dalam hal ini KPK yang sekarang sudah disusupi oleh berbagai kepentingan politik sehingga dapat dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Untuk mencegah kegagalan strategi pemberantasan korupsi harus dimulai dari pimpinan kepala negara untuk memiliki komitmen dan prioritas dalam pemeberantasan korupsi. Kebijakan kepala negara harus menwarnai seluruh kebijakan publik dalam mekanisme pemberantasan korupsi secara sporadis, dengan dukungan isntrumentasi hukum dan dukungan operasional. Ada kesadaran politik dari seluruh unsur kekuatan politik untuk bersama sama berkordinasi untuk melakukan kesadaran bersama bahwa Indonesia memiliki ancaman besar dari perilaku korupsi bila tidak dihentikan mulai saat ini. Perilaku korupsi memunculkan social harms bagi masyarakat sehingga mulai perlu penanganan yang lebih serius. Social harms akan membahayakan kesejahteraan sosial warga negara, dari mulai tidak terpenuhinya hak hak mendasar sampai mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara negara diperlukan agar proses pemberantasan korupsi dapat didukung oleh seluruh stakeholders. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum juga harus diperbaiki, jangan sampai pelaku korupsi dimulai dari institusi penegak hukum, lembaga dan kementerian yang sebenarnya sudah memberikan pelemahan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

REFERENSI

Bernal, C., Forero, A., & Rivera, I. (2014). State-Corporate Crime and Social Harm in the Spanish Crisis. *State Crime Journal*, *3*(2). https://doi.org/10.13169/statecrime.3.2.0220

Bradshaw, E. A. (2014). State-Corporate Environmental Cover-Up: The Response to the 2010 Gulf of Mexico Oil Spill. *State Crime Journal*, *3*(2). https://doi.org/10.13169/statecrime.3.2.0163

Dick, H., & Mulholland, J. (2016). The Politics of Corruption in Indonesia. In *Georgetown Journal of International Affairs* (Vol. 17, Issue 1). Winter/Spring.

Hagan, J., Simpson, J., & Gillis, A. R. (1987). Class in the Household: A Power-Control Theory of Gender and Delinquency. In *Source: American Journal of Sociology* (Vol. 92, Issue 4).

ICW. (2024). *Laporan Akhir Tahunan ICW 2023* .

Irfan Kamil. (2021, December 30). Kasus Suap Pajak, KPK Tetapkan Pejabat DJP Wawan Ridwan Tersangka TPPU Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Suap Pajak, KPK Tetapkan Pejabat DJP Wawan Ridwan Tersangka TPPU", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/12/30/19401341/kasus-suap-pajak-kpk-tetapkan-pejabat-djp-wawan-ridwan-tersangka-tppu. . *Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/12/30/19401341/Kasus-Suap-Pajak-Kpk-Tetapkan-Pejabat-Djp-Wawan-Ridwan-Tersangka-Tppu*.

King, D. Y. (2000). Shadow Economies: Promoting Prosperity or Undermining Stability? In *Source: Journal of International Affairs* (Vol. 53, Issue 2). https://www.jstor.org/stable/24357767

Krisiandi. (2023, November 25). KPK Sita Uang Rp 525 Juta dari Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Kaltim Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Sita Uang Rp 525 Juta dari Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Kaltim", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/11/25/17500031/kpk-sita-uang-rp-525-juta-dari-kasus-korupsi-pembangunan-jalan-di-kaltim. . *Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2023/11/25/17500031/Kpk-Sita-Uang-Rp-525-Juta-Dari-Kasus-Korupsi-Pembangunan-Jalan-Di-Kaltim*.

Lanier, Mark., Henry, S., & Anastasia, D. J. M. (n.d.). *Essential Criminology*.

Lynch, M. J., Long, M. A., Barrett, K. L., & Stretesky, P. B. (2013). Is it a crime to produce ecological disorganization? Why green criminology and political economy matter in the analysis of global ecological harms. *British Journal of Criminology*, *53*(6), 997–1016. https://doi.org/10.1093/bjc/azt051

Mustofa, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Kencana .

NA. (2021, January 21). Harta Mantan Hakim PN Tanjungkarang Tersangka OTT KPK. *Https://Kirka.Co/Harta-Mantan-Hakim-Pn-Tanjungkarang-Tersangka-Ott-Kpk/*.

Quah, J. S. T. (2018). *Combating Corruption in Asian Countries*. https://doi.org/10.2307/48563090

Robertson-Snape, F. (1999). Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia. In *Source: Third World Quarterly* (Vol. 20, Issue 3).

Rothe, D. L., & Friedrichs, D. O. (2006). *The State of the Criminology of Crimes of the State* (Vol. 33, Issue 1). https://about.jstor.org/terms

Stańczak, D. (2017). State–Corporate Crime and the Case of Bt Cotton: On the Production of Social Harm and Dialectical Process. *State Crime Journal*, *6*(2). https://doi.org/10.13169/statecrime.6.2.0214

Syaiful Hadi. (2018, July 23). 5 Fakta Terkait OTT Kalapas Sukamiskin oleh KPK. *Https://Nasional.Tempo.Co/Read/1109548/5-Fakta-Terkait-Ott-Kalapas-Sukamiskin-*

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

Oleh-Kpk.

Xiao, H., & Scott, I. (2022). *Trust and Effectiveness in Corruption Prevention*. *22*(2), 145–170. https://doi.org/10.2307/48671502

Hak Cipta © 2024, Yogo Tri Hendiarto.

Promosi Perpustakaan Umum Daerah Boyolali dengan Memanfaatkan Media Sosial

Yulia Kurnia Sari[1], Yasir Riady[2]
[1,2]Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Fhisip, Universitas Terbuka
e-mail: Yuliakur8@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 yang menekankan peran perpustakaan umum sebagai sarana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa. Meskipun kemajuan teknologi telah membuat informasi lebih mudah diakses, perpustakaan umum menghadapi tantangan dengan menurunnya jumlah pengunjung dan kurang dimanfaatkannya sumber daya. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menjajaki strategi untuk mempromosikan perpustakaan umum menggunakan platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan penggunaan. Permasalahan penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi promosi dan platform media sosial yang digunakan oleh Perpustakaan Umum Daerah Boyolali. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami strategi promosi perpustakaan dan aplikasi media sosial yang digunakan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, meliputi pengumpulan data melalui observasi non partisipan dan wawancara mendalam dengan informan terkait. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Umum Daerah Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa perpustakaan secara efektif menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, X, situs web, dan YouTube untuk mempromosikan layanan dan informasinya. Strategi seperti membangun tim promosi, melakukan survei untuk mengidentifikasi target, dan mengatur program promosi diterapkan untuk melibatkan khalayak yang lebih luas dan memastikan relevansi konten dan menarik bagi komunitas. Studi ini memberikan wawasan dalam mempromosikan perpustakaan di era digital, menawarkan informasi berharga untuk meningkatkan visibilitas perpustakaan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya.

***Kata Kunci**: boyolali, media sosial, perpustakaan umum, strategi promosi.*

Pendahuluan

Menurut Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 3 menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Pada pasal 4 menyebutkan bahwa perpustakaan bertujuan untuk menyediakan layanan kepada pemustaka, menningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 Bab 1 bahwa perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajran sepanjang hayat tanpa memendang umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi. Menurut Rahayuningsih (2007:4) perpustakaan umum didirikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan informasi dan layanan perpustakaan. Perpustakaan umum terbuka untuk umum, dibiayai oleh masyarakat umum dan menyediakan layanan tanpa biaya.

Namun seiring berkembang pesatnya teknologi yang mampu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tanpa harus repot mengunjungi perpustakaan membuat

Hak Cipta © 2024, Yulia Kurnia Sari, Yasir Riady.

perpustakaan umum menjadi sepi pengunjung dan bahan pustaka yang disediakan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga perpustakaan umum seharusnya bisa mengikuti perkembangan teknologi tersebut dengan memanfaatkan dan menjadikan peluang yang besar untuk membuat perpustakaan lebih maju lagi. Perpustakaan umum dapat memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan dan mempromosikan dirinya sehingga dapat dikenal lagi oleh masyarakat.

Promosi perpustakaan adalah upaya untuk mengkomunikasikan dan mengenalkan perpustakaan dan semua fasilitas, sumber informasi dan keuntungan yang dapat diperoleh emustaka. Dengan tujuan agar perpustakaan lebih dikenal pada kalangan masyarakat dan bahan pustaka dan fasilitas yang disediakan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu juga kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi. Sebelum era teknologi, perpustakaan melakukan promosi dengan cara membuat poster, pamflet dan book display yang masih tradisional dan berorientasi pada bentuk fisik.

Saat ini untuk dapat menjangkau masyarakat luas tanpa batas dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet yang salah satunya adalah media sosial. Ini disebabkan bahwa fakta hampir semua masyarakat didunia menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-harinya sebagai media komunikasi dan penelusuran informasi yang dibutuhkan. Laporan dari We Are Social dan Hootsuite yang mencatat jumlah pengguna sosial media dunia sebanyak 5,04 Milyar penduduk pada januari 2024 yang artinya 62,3% dari populasi penduduk dunia.

Indonesia menurut We Are Social dan Hootsuite terdapat 139 juta identitas sosial media yang artinya setara dengan 49,9% dari total populasi nasional. Dengan Indonesia menjadi salah satu negara pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia, pustakawan harus melihat peluang untuk dengan cermat mempromosikan perpustakaan kepada masyarakat dengan cermat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diurakan diatas maka peneliti akan mengkaji tentang:

1. Bagaimana strategi promosi Perpustakaan Umum Daerah Boyolali?
2. Apasaja media sosial yang digunakan untuk mempromosikan Perpustakaan Umum Daerah Boyolali?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi promosi perpustakaan yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Daerah Boyolali.
2. Untuk mengetahui aplikasi media sosial yang dimanfaatkan oleh Perpustakaan Umum Daerah Boyolali.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi ilmiah mengenai strategi promosi perpustakaan dengan memanfaatkan media sosial.
2. Memberikan gambaran mengenai strategi yang harus dilakukan untuk mempromosikan perpustakaan di era digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Wahfiuddin Rahmad Harahap (2021) dosen Ilmu Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Strategi Promosi Perpustakaan”.

Hak Cipta © 2024, Yulia Kurnia Sari, Yasir Riady.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi promosi perpustakaan untuk meningkatkan minat kunjung pemustaka di Perpustakaan Umum Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan studi kasus.

Menurut Khusnus Nadhifah dan Ighfirlina Yaumil Akhda (2024) UPA Perpustakaan Universitas Jember dalam penelitiannya yang berjudul "Strategi Promosi Perpustakaan Universitas Jember Melalui Media Sosial". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan metode promosi yang efektif di Perpustakaan Universitas Jember melalui penggunaan media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner melalui formulir google, observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Menurut Putut Suharso dan Aninda Nurwindu Pramesti (2019) program studi S1 Ilmu Perpustakaan dan Pusat Studi Ilmu Informasi dan Pengembangan Perpustakaan Universitas Diponegoro dalam penelitiannya yang berjudul "Promosi Perpustakaan Melalui Instagram : Studi di Perpustakaan Universitas Airlangga". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui promosi perpustakaan melalui media social instagram di Perpustakaan Universitas Airlangga. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian komunikasi dengan studi literature dan obsevasi langsung pada akun instagram Perpustakaan Universitas Jember.

Menurut Sulistyo-Basuki (1991), Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh dana umum dengan tujuan melayani umum. Menurut Sulistyo Basuki (1991) perpustakaan umum dikelompokkan menjadi beberapa yang salah satunya adalah perpustakaan umum kabupaten. Perpustakaan umum kabupaten adalah perpustakaan umum yang dikelola oleh kabupaten dan berfungsi sebagai pusat belajar, jasa referensi dan informasi, penelitian dan referensi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Saleh dan Said (2019) promosi merupakan kegiatan terpenting yang berperan akti dalam memperkenalkan, memberitahukan dan meningkatkan kembali manfaat suatu produk agar mendorong konsumen untuk memberi produk yang dipromosikan tersebut. Promosi perpustakaan adalah proses memperkenalkan semua kegiatan, layanan dan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan kepada masyarakat umum. Tujuan dari promosi perpustakaan adalah agar masyarakat dapat mengenal dan memanfaatkan sepenuhnya produk dan jasa yang ada di perpustakaan tersebut. (Nadia Amelia Qurrpta A`yunin, 2018:51)

Menurut Binalay (2016) tujuan promosi perpustakaan adalah untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perustakaan sekaligus membujuk pemustaka untuk emanfaatkan produk atau jasa yang ditawarkan.

Media Sosial tersusun dari kata "media" dan "sosial". Tidak seperti media, sosial adalah tindakan yang dilakukan setiap orang untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Oleh karena itu, media sosial didefinisikan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan aktivitas sosialnya di masyarakat. (Mulawarman & Aldila Dyas Nurfitri, 2017:37).

Menurut Luckty media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada atau keadaan apa adanya pada saat dilakukan penelitian yang kemudian akan menghasilkan

Hak Cipta © 2024, Yulia Kurnia Sari, Yasir Riady.

kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Pengumpulan data-data deskriptif mengenai Promosi Perpustakaan Umum Daerah Boyolali dengan Memanfaatkan Media Sosial dilakukan dengan observasi non-partisipan dan wawancara secara mendalam terhadap informan atau narasumber yang dianggap sudah memenuhi kriteria dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan di Perpustakaan Umum Daerah Boyolali yang terletak di Jl Pandanaran No 167, Bayanan, Siswodipuran, Kec Boyolali Kab Boyolali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpustakaan adalah instansi penyedia layanan jasa kepada masyarakat yang bersifat non profit. dimana perpustakaan menyediakan layanan guna menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan usia, jenis kelamin, suku, ras dan agama. Perpustakaan Umum Daerah Boyolali adalah salah satu jenis perpustakaan umum daerah yang disediakan oleh Pemkab Boyolali guna memfasilitasi masyarakat Boyolali dalam mengakses dan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Serta melaksanakan tugas Negara yaitu turut andil dalam mencerdaskan masyarakat.

Sebagai instansi yang bersifat non profit Perpustakaan Umum Daerah Boyolali menerapkan strategi promosi perpustakaan guna memperkenalkan apa saja yang dimiliki kepada masyarakat luas. Promosi merupakan hal penting dalam sebuah instansi sebagai sarana komunikasi antara instansi dengan masyarakat luas. Instansi menyebarkan informasi mengenai apasaja yang mereka miliki dengan tujuan dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Perpustakaan Umum Daerah Boyolali merupakan salah satu perpustakaan umum daerah yang memanfaatkan media sosial sebagai media promosi perpustakaan. Perpustakaan Umum Daerah Boyolali cukup aktif membagikan kegiatan-kegiatan perpustakaan melalui media sosial. Selain membagikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perpustakaan juga menyajikan informasi mengenai fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan. Perpustakaan Umum Daerah Boyolali menganggap promosi menggunakan media sosial lebih efektif dan efisien karena saat ini sebagian besar masyarakat sudah memanfaatkan internet dalam setiap aktivitasnya. Selain itu promosi dengan media sosial juga sebagai bentuk mengikuti perkembangan zaman sehingga perpustakaan harus bisa melihat peluang untuk terus membawa perpustakaan tetap eksis dikalangan masyarakat.

Ada beberapa strategi yang diterapkan oleh Perpustakaan Umum Daerah Boyolali dalam promosi melalui media sosial yaitu:

1. Membangun tim promosi yang efektif untuk mengelola media sosial untuk membagi tugas dan memastikan akun tetap aktif, responsif, dan profesional. Selain itu, pembentukan tim media promosi menentukan siapa yang bertanggung jawab atas promosi kegiatan Perpustakaan Umum Daerah Boyolali, siapa yang bekerja sama untuk merencanakan dan melakukan kegiatan yang akan dibagikan, dan siapa yang mendesain konten yang akan dibagikan.
2. Melakukan survey untuk menentukan target promosi Perpustakaan Umum Daerah Boyolali dengan melihat karakter sehingga promosi dapat tepat sasaran. Target promosi ini adalah masyarakat luas sehingga survey dilakukan secara berkala untuk dapat merangkum semua informasi yang dibutuhkan.
3. Menyusun program promosi perpustakaan agar lebih terstruktur dan selalu ada bahan untuk dibagikan sehingga konten yang dibagikan tidak sama dan tumpang tindih. Ada beberapa jenis konten yang disediakan oleh Perpustakaan Umum Daerah Boyolali yaitu:

Hak Cipta © 2024, Yulia Kurnia Sari, Yasir Riady.

a. Konten yang ditunjukkan untuk memberikan informasi-informasi umum sebagai selingan namun tetap mengedukasi seperti informasi mengenai hari besar, informasi mengenai koleksi digital dan non digital yang dimiliki perpustakaan, informasi mengenai ha-hal yang sedang trand dan informasi lainnya. Informasi ini diberikan untuk membangun hubungan yang baik antara perpustakaan dan pemustaka.
b. Konten literasi informasi yang mana isi dari konten ini adalah untuk mengedukasi pemustaka dalam memanfaatkan e-resources, cara penelusuran informasi yang benar, etika penyebaran informasi, etika menerima informasi dan lain sebagainya.
c. Konten kegiatan yang dilakukan di perpustakaan. Tujuan dari konten ini adalah untuk menarik keikutsertaan pemustaka juga untuk menarik perhatian pemustaka untuk datang ke perpustakaan.
d. Melakukan kerjasama dengan akun resmi Pemkab Boyolali sehingga akan lebih mudah untuk ditemukan oleh masyarakat dan bisa membuat konten kolaborasi yang memungkinkan akan lebih membuat penasaran.

Perpustakaan Umum Daerah Boyolali memiliki beberapa media sosial yang dikelola oleh salah satu staff perpustakaan yang sudah ditunjuk sebagai admin media social. Beberapa media sosial yang dimiliki yaitu:

1. Instagram

   Instagram adalah salah satu aplikasi yang sudah umum digunakan oleh masyarakat untuk membagikan foto dan video melalui internet. Instagram dapat dimanfaatkan sebagai media promosi perpustakaan dengan menyajikan konten-konten yang menarik dan informative. Akun instagram milik Perpustakaan Umum Daerah Boyolali yaitu *@perpusdaboy* yang memiliki 4.833 pengikut dan 1.393 postingan. Konten yang diunggah pada media social instagram ini mengenai informasi umum, kegiatan perpustakaan, informasi layanan perpustakaan, edukasi, menampilkan koleksi-koleksi dan lain sebagainya. Menurut penjelasan dari Bapak Damar sebagai narasumber bahwa :

   “konten yang sering diunggah di instagram biasanya mengenai kegiatan yang dilakukan, informasi umum, edukasi, jam layanan dan juga mengenai iBoyolali. Namun untuk story akan lebih banyak lagi.”

   Perpustakaan Umum Daerah Boyolali memiliki strategi tersendiri untuk mengunggah postingan pada instagram yaitu postingan berisi konten-konten kegiatan yang dilakukan dan story untuk keseruan kegiatan dan beberapa quiz harian. Terdapat jadwal postingan seperti hari senin dan selasa untuk postingan yang dimiliki oleh iBoyolali. Hari rabu, kamis dan jumat untuk mengunggah postingan kunjungan sekolah ke Perpustakaan Umum Daerah Boyolali. Untuk story sendiri diunggah setiap hari dengan memperhatikan jam-jam aktif masyarakat pada media sosial seperti jam 09.00, 11.00, 12.00 dan 14.00 dimana masyarakat biasanya sedang beristirahat dari kegiatannya dan membuka media sosial.

   Konten yang diunggah pada instagram bertujuan agar masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan dan informasi terbaru seputar perpustakaan umum daerah kabupaten boyolali.

Hak Cipta © 2024, Yulia Kurnia Sari, Yasir Riady.



Gambar 1. Akun Instagram Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Boyolali (Sumber: https://www.instagram.com/perpusdaboy)

2. Facebook

Facebook adalah aplikasi yang hampir mirip dengan instagram dimana penggunanya dapat berinteraksi dan membagikan foto, video, teks maupun link melalui internet. Facebook yang dimiliki Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Boyolali yaitu *@Perpustakaan Umum Daerah Boyolali* yang memiliki 1.999 teman atau pengikut. Konten yang berada di facebook ini sama dengan konten yang di unggah pada instagram karena saat ini dapat dilakukan secara otomatis dalam pengunggahan konten yang langsung dibagikan pada media sosial lainnya. Pengunggahan postingan pada facebook juga memiliki jadwal dan strategi yang sama dengan instagram.



Gambar 2. Akun Facebook Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Boyolali (Sumber: https://m.facebook.com/perpus.boyolali/)

Hak Cipta © 2024, Yulia Kurnia Sari, Yasir Riady.

3. X / Twitter

   X / Twitter adalah aplikasi media sosial yang mirip dengan facebook dan instagram sehingga konten yang diunggah juga sama. Namun pada aplikasi X lebih banyak mengunggah gambar dan teks saja. Akun X yang dimiliki Perpustakaan Umum Daerah Boyolali yaitu *@Perpusdaboy* dengan 164 pengikut. Untuk aplikasi X sendiri masih sedikit pengikutnya dibanding dengan media sosial yang lain karena tidak terlalu banyak masyarakat yang memanfaatkan X itu sendiri. Pengunggahan postingan pada X tidak begitu terjadwal sehingga tidak banyak postingan yang disajikan.

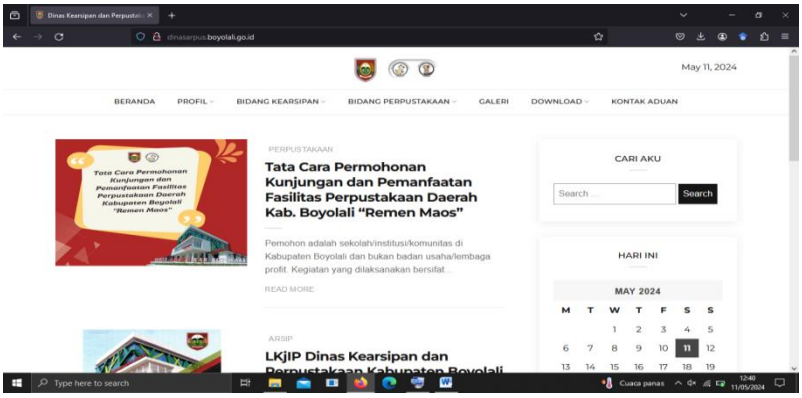


Gambar 3. Akun X Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Boyolali
(Sumber: https://x.com/perpusdaboy?t=LVOOyor2GXIUsTaaDwxLdA&s=08)

4. Website

   Website adalah kumpulan dari beberapa halaman web yang saling terhubung dan berisikan informasi baik dari individu maupun kelompok yang dapat diakses secara online. Website yang dimiliki Perpustakaan Umum Daerah Boyolali yaitu www.*dinasarpus.boyolali.go.id* yang mana website tersebut menjadi satu dengan website kearsipan Kabupaten Boyolali. Pemustaka dapat mengakses berbagai macam informasi yang sudah diunggah oleh Perpustakaan Umum Daerah Boyolali dan Kearsipan Boyolali melalui website tersebut. Konten yang diunggah pada website berupa artikel, berita terkini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, profile perpustakaan, galeri dan kontak perpustakaan. Namun website ini lebih banyak dimanfaatkan untuk membagikan informasi mengenai lomba dan syarat-syaratnya yang diadakan oleh Perpustakaan Umum Daerah Boyolali. Sehingga website hanya ramai dalam masa-masa tertentu saja.

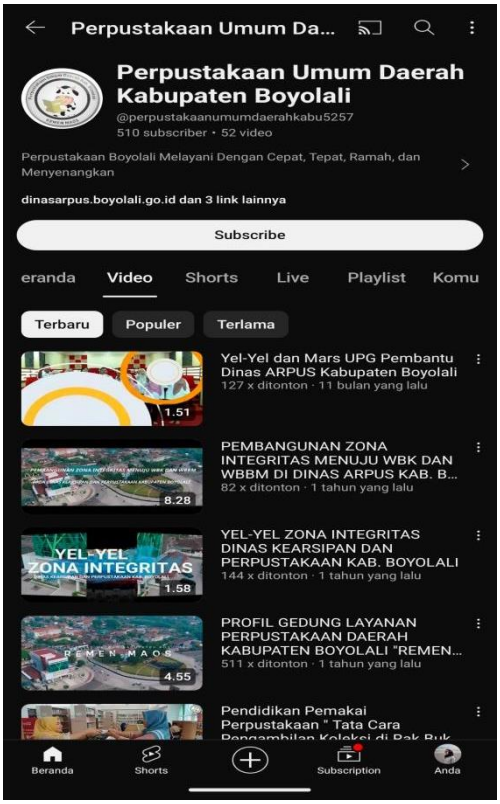
Hak Cipta © 2024, Yulia Kurnia Sari, Yasir Riady.



Gambar 4. Website Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Boyolali
(Sumber: www.*dinasarpus.boyolali.go.id*)

5. Youtube

Youtube adalah aplikasi media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan, mengunduh dan menonton video secara online. Selain itu youtube juga dapat digunakan sebagai media siaran langsung. Akun youtube yang dimiliki adalah *Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Boyolali* dengan 510 subscriber atau pengikut dan 52 video yang dibagikan. Video yang dibagikan adalah video kegiatan yang dilakukan Perpustakaan Umum Daerah Boyolali dan lomba-lomba yang telah berlangsung. Pengunggahan video pada youtube ini biasanya hanya dilakukan apabila ada kegiatan perlombaan saja. Sehingga tidak ada jadwal yang pasti.



Gambar 5. Akun Youtube Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Boyolali
(Sumber:https://youtube.com/@perpustakaanumumdaerahkabu5257?si=VWhJ9adOumxcVN7O)

Hak Cipta © 2024, Yulia Kurnia Sari, Yasir Riady.

KESIMPULAN

Perpustakaan umum daerah Boyolali menggunakan media sosial sebagai strategi promosi untuk memperkenalkan layanan dan informasi yang dimiliki kepada masyarakat luas. Mereka memanfaatkan Instagram, Facebook, X, website, dan YouTube sebagai platform untuk membagikan konten-konten yang menarik dan informatif. Ada beberapa strategi yang diterapkan oleh Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Boyolali agar media sosialnya dapat dijangkau masyarakat luas dan konten yang diunggah dapat menarik minat masyarakat yaitu dengan membangun tim promosi, melakukan survey untuk menentukan target promosi dan menyusun program promosi perpustakaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar perpustakaan tetap eksis dikalangan masyarakat dan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

REFERENSI

A'yunin Qurrota, N. A. (2018). Promosi Perpustakaan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Melalui Media Sosial. *Libria*, *1*(1), 48–63. Retrieved from https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/libria/article/view/3381

Asdam, Basmi. (2015). Minat Baca dan Promosi Peprustakaan sebagai Sarana Mendekatkan Masyarakat pada Perpustakaan. Jupiter, 14 (1), 32-37.

Budiman, Ernita Arif, & Elva Ronaning Roem. (2019). Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Promosi Perpusda Kabupaten Belitung Timur. Jurnal Ranah Komunikasi, 3 (1), 34-44

Fatmawati, Endang. (2017). Dampak Media Sosial Terhadap Perpustakan. Libraria, 5 (1), 1-28.

Harahap, W. R. (2021). Penerapan Strategi promosi perpustakaan. *JIPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, *6*(1), 103. https://doi.org/10.30829/jipi.v6i1.9314

Lucktty Giyan Sukarno, Promosi Peprustakaan dari Sudut Pandang Pustakawan; Best Practice, dalam http://perpus.sman2metro.sch.id/berita-promosi-perpustakaan-dari-sudut-pandang-pustakawan-best-practice.html

Maretno, S., & Marlini, M. (2021). Pemanfaatan media sosial Sebagai media Promosi Perpustakaan. Baitul `Ulum: *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 5(1),* 58-71. https://doi.org/10.30631/baitululum.v5il.98

Nadhifah, K., & Akhda, I. Y. (2024). Strategi promosi Perpustakaan Universitas jember melalui media sosial. *UNILIB : Jurnal Perpustakaan*, *15*(1). https://doi.org/10.20885/unilib.vol15.iss1.art2

Saleh, M. Y., & Said, M. (2019). *Konsep dan Strategi Pemasaran*. Makassar: CV Sah Media.

Suharso, P., & Pramesti, A. N. (2020). Promosi perpustakaan Melalui Instagram: Studi di perpustakaan universitas airlangga. *Publication Library and Information Science*, *3*(2), 66. https://doi.org/10.24269/pls.v3i2.2074

Sulistyo-Basuki. (1991). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.

Yenianti, Ifonilla. (2019). Promosi Perpustakaan Melalui Media Sosial di Perpustakaan IAIN Salatiga. Pustabiblia, 3 (2), 223-237.

Hak Cipta © 2024, Yulia Kurnia Sari, Yasir Riady.

Strategi Digitalisasi dan Pengelolaan Arsip Elektronik Era Revolusi Industri 4.0 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Zeni Patmawati[1], Ismaya[2]
[1] Mahasiswa Kearsipan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Yogyakarta
[2] Dosen Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Muhammadiyah Enrekang
e-mail: zenipatma@gmail.com

Abstrak

Era revolusi industri 4.0 membawa perubahan yang sanga pesat bagi bidang kearsipan. Era revolusi industri 4.0 juga menyebabkan perubahan dalam industri dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memudahkan proses digitalisasi dan pengelolaan arsip secara elektronik. Arsip fisik rentan terhadap kerusakan dan kehilangan, sehingga strategi digitalisasi dan pengelolaan arsip sangat diperlukan untuk perlindungan terhadap arsip. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan secara rinci strategi digitalisasi dan pengelolaan arsip elektronik era revolusi industry 4.0 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi partisipasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menyusun strategi digitalisasi dan pengelolaan arsip elektroniknya. Dalam mengelola arsipnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dan aplikasi E-Surban untuk mengelola arsip dinamis elektroniknya. Sedangkan untuk arsip statis menggunakan aplikasi SIKN-JIKN. Strategi digitalisasi mempunyai hubungan yang saling terikat dengan pengelolaan arsip elektronik sehingga pengelolaan arsip elektronik akan berjalan dengan baik dan lancar apabila strategi digitalisasi yang digunakan baik.

***Kata kunci**: Arsip Elektroni, Digitalisasi, Revolusi industri 4.0*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era revolusi industri 4.0 menghadirkan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan berorganisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memudahkan proses digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip di beberapa lembaga memang telah dilakukan, tetapi hanya sebatas mengalih mediakan arsip konvensional menjadi format digital. Proses digitalisasi berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu pembuatan arsip, pemindaian, pengeditan, dan pengunggahan isi arsip. Perkembangan teknologi dan informasi di era revolusi industri 4.0 sangat mempengaruhi pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip berbasis kertas dialihkan ke dalam format elektronik yang pemakaiannya semakin bertambah. Pengarsipan elektronik dinilai lebih cocok untuk keperluan informasi yang laju, mudah digunakan, dan fleksibel.

Hak Cipta © 2024, Zeni Patmawati, Ismaya.

Organisasi pemerintah daerah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen arsip, sehingga digitalisasi arsip dapat meningkatkan aksesbilitas, kemampuan pencarian, serta kemudahan berbagi informasi secara cepat. Arsip elektronik dan pengelolaan arsip kini banyak dikelola oleh lembaga pemerintah dan swasta, sehingga arsiparis harus melihatnya sebagai bagian dari program pengelolaan arsip mereka. Oleh karena itu diperlukan dukungan berbagai pihak dan pengelolaan informasi dan komunikasi arsiparis harus lebih dikembangkan agar pengelolaan arsip dapat berfungsi dengan baik. Di era revolusi industri 4.0 dalam pengelolaan arsip, kebutuhan pengguna informasi juga harus diperhatikan agar manfaat dari terciptanya sistem pengelolaan publik yang lebih baik dapat dirasakan secara luas.

Arsip fisik rentan terhadap kerusakan dan kehilangan, sehingga digitalisasi sangat diperlukan untuk perlindungan terhadap arsip. Digitalisasi sebagai upaya untuk melestarikan dan melindungi eksistensi atau keberadaan berbagai arsip agar tidak punah. Sebagai sumber sejarah, arsip dapat rusak bahkan hilang, sehingga arsip harus dilestarikan. Arsip adalah catatan yang dibuat oleh suatu organisasi dan disimpan di berbagai media. Arsip merupakan pusat memori, sumber informasi, dan alat pengawasan yang penting. Arsip pada umumnya berupa naskah-naskah, buku, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, peta, bagan, dan dokumen lainnya. Mengingat pentingnya peran arsip sebagai dasar akuntabilitas dan pengambilan keputusan, serta untuk melindungi arsip dari kerusakan atau kehilangan, arsip harus dikelola dengan baik. Untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang baik maka diperlukan strategi digitalisasi dan arsiparis yang handal dan mahir dalam bidang kearsipan serta dapat mengikuti resistensi teknologi.

Digitalisasi arsip dan pengelolaan arsip elektronik di era revolusi industri 4.0 penting karena akses terhadap informasi dapat dilakukan dari lokasi yang jauh dan menyediakan alat pencarian yang lebih efisien. Digitalisasi dianggap sebagai strategi tepat untuk melindungi arsip dari kepunahan dengan cara yang lebih modern. Dengan digitalisasi, arsip-arsip yang mudah rusak dapat terjaga dengan baik, sehingga perlindungannya menjadi lebih efektif. Digitalisasi membantu mendokumentasikan data arsip dengan lebih baik dibandingkan metode manual. Selain itu, informasi kearsipan lebih mudah diperoleh secara digital. Mengingat pentingnya arsip bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, maka arsip harus dilindungi dan dilestarikan dengan baik. Digitalisasi mempermudah setiap orang untuk mengakses informasi kearsipan dengan cara yang lebih sederhana dan praktis. Digitalisasi arsip juga dimaksudkan sebagai sarana transmisi jejak masa lalu kepada generasi mendatang.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai digitalisasi, namun tema ini belum banyak dibahas di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sehingga penelitian ini berupaya mengkaji strategi digitalisasi dan pengelolaan arsip elektronik era revolusi industri 4.0 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Penelitian ini merumuskan bagaimana strategi digitalisasi dan pengelolaan arsip elektronik era revolusi industri 4.0 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul serta hubungan strategi digitalisasi dengan pengelolaan arsip elektronik era revolusi industri 4.0 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan wawasan untuk pembacanya dan memperbanyak referensi penulisan karya ilmiah di bidang kearsipan selanjutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan periode saat ini telah mengalami banyak perubahan yang cukup subtansial, era digital memberikan dampak positif terhadap pengarsipan arsip dalam format digital, serta

Hak Cipta © 2024, Zeni Patmawati, Ismaya.

revolusi industri 4.0 yang memunculkan tantangan tersendiri bagi bidang kearsipan. Dalam bidang kearsipan, digitalisasi adalah proses pengubahan dokumen cetak menjadi dokumen digital. Digitalisasi adalah proses mengalih mediakan arsip dari yang awalnya berbentuk cetak, audio atau video ke dalam format digital. Digitalisasi mengubah arsip tradisional menjadi duplikat digital dan arsip digital. Digitalisasi bertujuan untuk mencapai akurasi dan memaksimalkan banyak hal, seperti akurasi dan maksimalisasi ruang penyimpanan, perlindungan terhadap berbagai jenis kerusakan aset, bahan arsip, dan lain-lain (Halomoa, et al., 2024, p. 198).

Era revolusi industri 4.0 merupakan perubahan elemen kecepatan ketersediaan informasi di seluruh bidang produk industri melalui kerjasama teknologi digital dan Sumber Daya Manusia dengan tingkat keahlian yang memadai (Rodin, et al., 2022, p. 5). Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan penggunaan Internet yang kini ada dimana-mana dan informasinya mengalir dimana pun dan kapan pun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Lestari, 2022, p. 16). Pada masa ini arsip dikelola menggunakan teknologi digital. Dengan adanya digitalisasi arsip maka akan tercipta arsip elektronik. Arsip elektronik adalah arsip yang dibuat, dikirim, disimpan atau diambil dengan memakai alat elektronik dan disimpan dalam media elektronik (Wulandari & Ismaya, 2023, p. 42).

Arsip elektronik adalah suatu sistem atau prosedur pengumpulan informasi berupa pemindaian atau penyimpanan dokumen sebagai arsip elektronik dengan menggunakan teknologi komputer untuk menjamin kemudahan temu balik arsip dan pengunaan kembali arsip. Arsip elektronik memiliki fungsi dan nilai guna sehinga arsip elektronik harus dikelola dengan baik. Pengelolaan arsip elektronik merupakan suatu kegiatan pemanfaatan fasilitas untuk meraih tujuan yang sudah ditentukan dalam pengelolaan arsip (Putra & Nelisa, 2020, pp. 40-41).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui strategi digitalisasi dan pengelolaan arsip elektronik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Deskriptif merupakan sesuatu yang menjabarkan dan menguraikan suatu peristiwa, fakta berserta situasi sosial yang menjai fokus penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu teknik penelitian dengan memanfaatkan cerita untuk menerangkan dan menguraikan penjelasan dari suatu fakta, gejala dan situasi sosial yang tertentu. (Wawuru, 2023, pp. 2898).

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi partisipasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi partisipasi adalah salah satu metode untuk memperoleh data atau informasi dari suatu topik penelitian yang digunakan peneliti dengan cara mengamati secara langsung keadaan topik yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengamati, mendengarkan, mencatat, dan ikut andil dalam kegiatan digitalisasi dan pengelolaan arsip elektronik era revolusi industri 4.0 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Wawancara adalah kegiatan interaksi atau tanya jawab yang dilaksanakan antara narasumber dengan pewawancara untuk mendapatkan informasi. Peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada arsiparis-arsiparis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Selaku penanggung jawab dibidang digitalisasi dan pengelolaan arsip elektronik. Wawancara ini dilakukan selama peneliti melakukan Praktik Kerja Kearsipan selama 2 bulan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Hasil wawancara dianalisis dengan mereduksi data hasil wawancara, merangkum hasil wawancara dan melakukan interpretasi data sehingga dapat diketahui strategi digitalisasi dan pengelolaan arsip elektronik era revolusi industri 4.0 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Sedangkan studi pustaka merupakan kumpulan data dari berbagai sumber untuk penelitian.

Hak Cipta © 2024, Zeni Patmawati, Ismaya.

Pengumpulan data bisa diperoleh dengan studi pustaka melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, literatur, dan sumber bahan lainnya. Studi pustaka dilakukan untuk mempertegas argumen yang relevan dengan tema penulisan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Digitalisasi Era Revolusi Industri 4.0

Arsip merupakan kumpulan dokumen atau catatan yang tersimpan secara sistematis berupa angka, gambar dan huruf yang mempunyai nilai guna, mudah diakses dan temu balik arsip lebih mudah (Widyawati & Adino, 2022, p. 23). Arsip rentan terhadap kerusakan dan kehilangan terhadap fisiknya sehingga arsip harus dikelola dengan baik. Seiring dengan berkembangnya waktu dan teknologi, pengelolaan arsip akan lebih efektif dan efisien jika arsip dikelola dalam bentuk digital. Menurut Permana, et al (2024 p. 21) digital merupakan pemanfaatan teknologi komputer yang memakai angka dan simbol sebagai penyimpan, pengirim dan pemroses informasi. Dalam arti luas, digital merupakan penggunaan teknologi yang prosesnya memanfaatkan komputer dan peran elektronik sebagai sarana pelaksanaan tugas secara manual atau non digital.

Saat ini di era revolusi industri 4.0 pengelolaan arsip sudah sepantasnya berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu agar pelaksanaan pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul era revolusi industri 4.0 berjalan dengan baik maka perlu disusun strategi digitalisasi. Strategi digitalisasi adalah suatu sarana atau rencana yang disusun sebelum melaksanakan digitalisasi agar pelaksanaannya berlangsung dengan tertib dan lancar. Untuk keberhasilan dalam pelaksanaanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Menciptakan sumber daya kepegawaian yang handal sebagai pendukung keberhasilan digitalisasi. Sumber daya kepegawaian yang handal bisa didapatkan dengan diadakannya seminar, sosialisasi, pelatihan dan bimtek terhadap arsiparis/petugas arsip yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.
b. Pengadaan infrastruktur teknologi informasi yang support untuk pelaksanaan digitalisasi arsip. Infrastruktur teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan.
c. Pendanaan sebagai pembiayaan untuk proses digitalisasi agar berjalan dengan baik dan lancar.
d. Pembuatan kebijakan dan panduan untuk kegiatan digitalisasi. Pembuatan kebijakan dan panduan ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan proses digitalisasi.

Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sudah menerapkan strategi-strategi digitalisasi dalam kegiatan kearsipan. Strategi digitalisasi inilah yang akan menjadi acuan berjalannya aktivitas kearsipan di suatu lembaga.

Pengelolaan Arsip Elektronik Era Revolusi Industri 4.0

Arsip elektronik merupakan dokumen yang dibuat, dipakai dan dijaga untuk kesaksian transaksi, perbuatan dan aktivitas instansi atau personal, yang dikirimkan dan dioperasikan oleh sistem komputer (Muhidin, et al., 2018, p. 426). Sedangkat menurut Mulyadi (2023, 213) arsip elektronik merupakan himpunan informasi yang discan oleh komputer menjadi data elektronik sehingga bisa dilihat dan digunakan lagi. Arsip elektronik diakui sebagai barang bukti yang sah maka arsip elektronik harus kelola dan dipelihara dengan baik.

Hak Cipta © 2024, Zeni Patmawati, Ismaya.

Pengelolaan arsip atau manajemen arsip merupakan wilayah administratif yang bertanggung jawab untuk menerapkan pengendalian yang efektif dan sistematis atas pembuatan, penerimaan, pemakaian, dan pemusnahan arsip, merupakan mekanisme pengumpulan dan pemeliharaan petunjuk dan informasi terkait kegiatan dan negosiasi bisnis (Rustam, 2020, p. 1.16). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan arsip elektronik membutuhkan berbagai sarana atau peralatan untuk mengelola arsip elektroniknya. Peralatan yang dibutuhkan dalam mengolah dokumen elektronik adalah perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras adalah suatu perangkat fisik yang merupakan bagian dari komputer yang dapat dilihat dan dirasakan. Perangkat keras yang dipakai untuk mengelola dokumen elektronik adalah 1) laptop atau komputer; 2) pemindai (scanner); 3) pencetak (printer); 4) penyimpan data seperti harddisk, drive MMC, CD dan flash drive. Sedangkan software adalah bagian dari komputer yang wujudnya tidak dapat dilihat atau tidak berwujud. Pengelolaan arsip elektronik berbeda dengan pengelolaan arsip kertas. Pengelolaan arsip elektronik lebih efisien dan efektivitas disbanding dengan pengelolaan arsip kertas. Pengelolaan arsip elektronik dijelaskan melalui tahap-tahap berikut ini:

1. Penciptaan dan penyimpanan

   Tahap pertama pengelolaan arsip yaitu penciptaan dan penyimpanan arsip. Arsip yang tercipta dalam tahap ini berbentuk digital dan berbentuk kertas. Arsip digital merupakan arsip yang tercipta dari pemanfaatan teknologi komputer. Sedangkan arsip kertas merupakan arsip yang informasinya tercipta dari media kertas. Untuk arsip digital bisa langsung digabungkan kedalam sistem pengelolaan arsip elektronik, akan tetapi untuk arsip kertas perlu dialih mediakan terlebih dahulu sebelum digabungkan kedalam sistem pengelolaan arsip elektronik. Alih media arsip dapat dilakukan dengan menggunakan metode 1) Scanning; 2) conversion; 3) importing.

   Arsip yang sudah selesai didigitalisasi harus disimpan dalam sistem penyimpanan dengan baik dan benar. Arsip elektronik rentan akan kehilangan dan kerusakan akibat virus dan sistemnya. Oleh karena itu perlu dilakuka pengecekan secara rutin dan perlu dipersiapkan sistem cadangan untuk mengantisipasi kerusakan dan kehilangan. Terdapat tiga metode dalam penyimpanan arsip elektronik 1) online (terkoneksi); 2) offline (terputus); 3) nearline (semi terkoneksi).

2. Distribusi dan penggunaan

   Arsip didistribusikan kepada pengguna dengan melalui berbagai pengiriman dan digunakan oleh pengguna. Dalam tahap ini harus ada pemilihan peralatan pengiriman yang tepat agar penyaluran arsip berjalan dengan baik. Ketepatan dalam pemilihan peralatan pengiriman ini bisa membantu berjalannya kegiatan kearsipan dengan baik sehingga visi dan misi yang ingin diraih suatu lembaga akan terwujud.

3. Pemeliharaan

   Pemeliharaan arsip elektronik dapat dilakukan dengan pengurusan arsip, perlindungan arsip serta perawatan pada arsip elektroniknya. Pengurusan arsip dapat dilakukan dengan cara menggunakan peralatan pengelolaan arsip elektronik sebaik mungkin. Perlindungan arsip dapat dilaksanakan dengan membuat prosedur yang menjamin keamanan arsip elektronik dan hanya petugas yang berhak saja yang dapat mengakses arsip elektronik untuk meminimalisir penyalahgunaan srdip elektronik. Sedangkan untuk perawatan arsip dapat dilaksanakan dengan pengecekan peralatan dan fisik arsip secara berkala.

Hak Cipta © 2024, Zeni Patmawati, Ismaya.

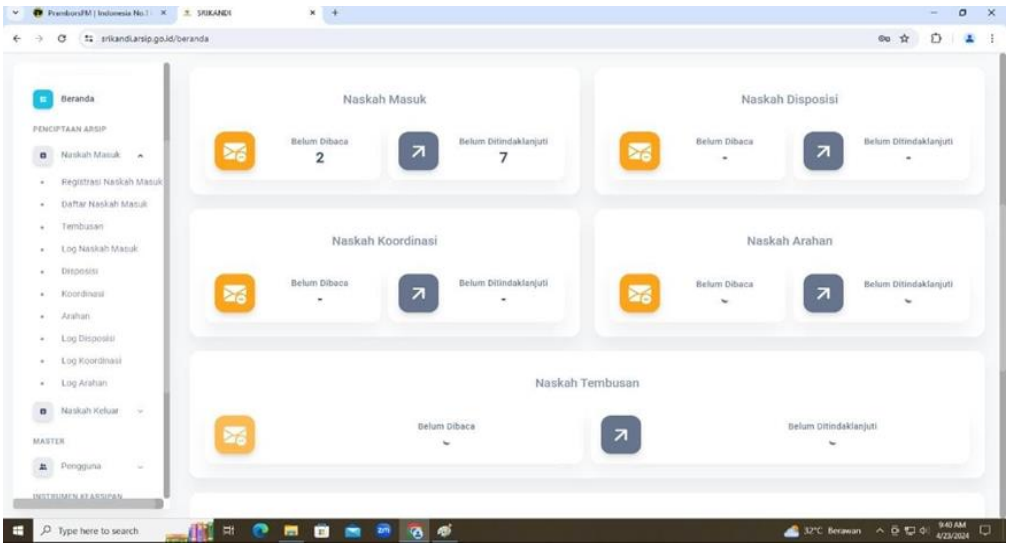
4. Disposisi

Disposisi merupakan suatu kegiatan dalam persuratan yang merupakan suatu komunikasi kedinasan. Disposisi biasanya terlampir untuk proses surat masuk dan keluar.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul adaah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di dirikan untuk menyelenggarakan pemerintahan di bagian perpustakaan dan urusan pemerintahan di bagian kearsipan serta merupakan gabungan antara kantor perpustakaan dan kantor kearsipan. Menurut Mulyantono (2019, p. 3.23) dalam lingkup perkantoran era revolusi industri 4.0, sistem Pengelolaan arsip elektronik tertanam dalam lingkungan jaringan dengan hubungan terdistribusi di berbagai tingkatan. Di era revolusi industri 4.0 saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul memanfaatkan Sistem Pengelolaan Berbasis Elektronik dalam pengelolaan arsip elektroniknya. Terdapat 3 sistem pengelolaan arsip elektronik yang dimanfaatkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Aplikasi SRIKANDI

Aplikasi SRIKANDI adalah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di bidang kearsipan untuk membantu pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul mulai menerapkan aplikasi SRIKANDI mulai dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Aplikasi SRIKANDI diterapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan. Aplikasi ini digunakan untuk mengirim dan menerima surat dari berbagai wilayah baik dari wilayah pemerintahan Bantul ataupun diluar pemerintah kabupaten Bantul. SRIKANDI merupakan aplikasi berbasis cloud yang tersimpan di pusat data nasional (PDN), oleh karena itu suatu lembaga tidak wajib mempersiapkan infrastruktur secara mandiri. Pembuatan, penerimaan dan pengiriman dokumen kedinasan antar lembaga dengan aplikasi ini bisa dilaksanakan secara elektronik setiap saat. Pengelolaan dokumen dinas sebagai arsip juga bisa dilaksanakan dengan gampang dan pembagian arsip lintas lembaga bisa berjalan dengan lebih sigap, ringan, dan aman.



Gambar 1. Aplikasi SRIKANDI

2. Aplikasi E-Surban

Aplikasi E-Surban merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana pengurusan surat masuk dan surat keluar milik Pemerintah Kabupaten Bantul. Aplikasi ini digunakan

Hak Cipta © 2024, Zeni Patmawati, Ismaya.

dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. E-Surban merupakan aplikasi yang diciptakan untuk mempermudah pelaksanaan surat menyurat ke daerah. Aplikasi E-Surban hanya berlaku di wilayah Kabupaten Bantul saja, sehingga aplikasi ini hanya bisa dipakai untuk mengirim surat di dalam wilayah Kabupaten Bantul saja. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang lebih sering digunakan dalam melakukan kegiatan kearsipan daripada aplikasi yang lain. Aplikasi E-surban mudah digunakan dan lebih mempermudah dalam kegiatan surat-menyurat.



Gambar 2. Aplikasi E-Surban

3. Aplikasi SIKN-JIKN

Aplikasi SIKN merupakan aplikasi berupa web service untuk menghimpun data dan bahan kearsipan. Aplikasi SIKN merupakan aplikasi antarmuka yang bisa dipakai oleh ikatan jaringan sebagai sarana memasukan data yang kemudian diumumkan di website Jaringan Informasi Arsip Nasional (JIKN)). Aplikasi SIKN mampu mengolah informasi kearsipan untuk membantu mempermudah temu balik arsip baik arsip digital ataupun arsip fisiknya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul memanfaatkan aplikasi SIKN-JIKN ini sebagai tempat publikasi dan pengelolaan arsip statis yang berupa foto. Hal ini dilakukan karena foto-foto ini lebih menarik dilihat oleh pengguna dibanding dengan arsip tekstual.

Hak Cipta © 2024, Zeni Patmawati, Ismaya.



Gambar 3. Aplikasi SIKN-JIKN

Dalam hal ini maka bisa disimpulkan bahwa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul untuk mengirim dan menerima surat memanfaatkan aplikasi SRIKANDI dan aplikasi E-Surban. Aplikasi SRIKANDI untuk mengirim dan menerima surat dari luar OPD Bantul sedangkan untuk aplikasi E-Surban untuk mengirim dan menerima surat didalam OPD Bantul. Aplikasi SRIKANDI dan aplikasi E-surban merupakan aplikasi pengelolaan arsip dinamis dalam bentuk elektronik. Untuk pengelolaan arsip statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul menggunakan aplikasi SIKN-JIKN. Arsiparsip statis yang diupload merupakan arsip-arsip yang berupa foto. Hal ini dikarenakan arsip foto lebih menarik perhatian dibanding arsip tekstual.

Hubungan Strategi Digitalisasi dengan Pengelolaan Arsip Elektronik Era Revolusi Industri 4.0

Strategi digitalisasi memiliki hubungan yang saling terikat dengan pengelolaan arsip elektronik. Apabila strategi digitalisasi yang digunakan baik maka pengelolaan arsip elektroniknya akan berlamhsung dengan baik juga. Namun jika strategi digitalisasi yang digunakan kurang baik maka kegiatan pengelolaan arsip elektoniknya juga kurang baik. Jadi strategi digitalisasi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan dari kegiatan pengelolaan arsip elektroniknya.

Pengelolaan arsip elektronik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik. Hal ini karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul mempunyai strategi digitalisasi yang baik sehingga kegiatan pengelolaan arsipnya berjalan dengan baik. Strategi digitalisasi yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sehingga di era revolusi industri 4.0 ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul mudah dan lancar dalam melaksanakan pengelolaan arsip. Dengan strategi digitalisasi yang baik ini maka pengelolaan arsip elektronik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul berjalan dengan baik.

Hak Cipta © 2024, Zeni Patmawati, Ismaya.

KESIMPULAN

Digitalisasi arsip merupakan proses alih media arsip konvensional menjadi arsip elektronik. Proses digitalisasi arsip dilakukan menggunakan scanning, conversion, importing. Di era revolusi industry 4.0 dalam melakukan kegiatan digitalisasi arsip diperlukan strategistrategi agar kegiatan digitalisasi arsip ini berjalan dengan baik. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul melakukan strategi digitalisasi seperti menciptakan sumber daya kepegawaian yang handal, pengadaan infrastruktur teknologi informasi yang support, pendanaan, dan pembuatan kebijakan dan panduan untuk kegiatan digitalisasi. Arsip elektronik merupakan arsip media baru yang tercipta dari perkembangan teknologi sistem pengelolaan arsipnya yang diakui sebagai arsip yang dapat dijadikan bukti hukum yang sah seperti arsip konvensional. Pengelolaan arsip elektronik dilakukan dalam 4 tahapan yaitu 1) penciptaan dan penyimpanan; 2) distribusi dan penggunaan; 3) pemeliharaan; dan 4) disposal. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul melakukan kegiatan pengelolaan arsip elektronik dengan menggunakan aplikasi SRIKANDI, Aplikasi E-Surban , dan aplikasi SIKN sebagai sebagai aplikasi umum bidang kearsipan. Strategi digitalisasi memiliki hubungan yang saling terikat dengan pengelolaan arsip elektronik yaitu strategi digitalisasi yang baik maka pengelolaan arsip elektroniknya juga akan berjalan dengan baik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam menciptakan strategi digitalisasi sudah sesuai dengan perkembangan teknologi apalagi di era revolusi industry 4.0 seperti sekarang ini, sehingga pengelolaan arsip elektroniknya juga sudah berjalan dengan baik.

REFERENSI

Halomoa, F. K. et al. (2024). Digitalisasi Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Dalam Menunjang Riset Kesejarahan, *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 2(1), 197-201. DOI https://doi.org/10.57235/jamparing.v2i1.1908

Lestari, A. D. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Pengelolaan Arsip Dinamis di Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Karanganyar, *Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 4(2), 13-23. DOI https://doi.org/10.24952/ktb.v4i2.5193

Muhidin, S.A. & Winata, H. (2018). *Manajemen Kearsipan : untuk organisasi public, bisnis, social, politik, dan kemasyarakatan*. Bandung: Pustaka Setia.

Mulyadi. (2023). *Pengelolaan Arsip Berbasis Otomasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mulyantono, M.I. (2019). *Otomasi Kearsipan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Permana, B.S. et al. (2024). Teknologi Pendidikan: Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi di Era Digitalisasi, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(1), 19-28. DOI: https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2702

Putra, W. I., & Nelisa, M. (2020). Pengelolaan Arsip Elektronik di Unit Kerasipan PT Semen Padang, *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 8(2), 39-47. DOI https://doi.org/10.24036/109093-0934

Rodin, R. et al. (2022). Kebijakan Pengelolaan Arsip Perguruan Tinggi Islam di Era Industri 4.0 (Studi Pada Record Center Institut Agama Islam Negeri Curup), *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 4(1), 1-17. DOI https://doi.org/10.24952/ktb.v4i1.5131

Rustam, M. (2020). *Pengelolaan Arsip Elektronik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Hak Cipta © 2024, Zeni Patmawati, Ismaya.

Wawuru, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910. DOI https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187

Widyawati, A.T. (2022). *Penilaian dan Retensi Rekod*. Universitas Brawijaya Press.

Wulandari, D. S., & Ismaya. (2023). Pengelolaan Arsip Elektronik di Era Digital. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 3(2), 39–43. DOI https://doi.org/10.33830/ikomik.v3i2.5252

Hak Cipta © 2024, Zeni Patmawati, Ismaya.

Meretas Ketidakadilan dengan Kebijakan Hukum Inklusif dalam Konteks Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Era Society 5.0

Nur Aripkah[1], Khairunnisa Noor Asufie[2]
[1,2]Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
e-mail: nuraripkah@fh.unmul.ac.id

Abstrak

Persoalan ketidakadilan tidak hanya terjadi di lingkup masyarakat saja, namun perguruan tinggi juga menjadi salah satu tempat ketidakadilan tersebut. Civitas akademika di perguruan tinggi kerap kali menjadi korban dari berbagai ketidakadilan yang terjadi di kampus, salah satunya yaitu menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual terjadi di lingku perguruan tinggi, mulai dari kekerasan atau pelecehan secara fisik sampai dengan kekerasan dan pelecehan berbasis online. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji meretas ketidakadilan dengan kebijakan hukum inklusif dalam konteks perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi era society 5.0. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dam pendekatan konseptual. Salah satu bentuk kebijakan inkulsif yang tengah hadir di lingkup perguruan tinggi untuk meretas ketidakadilan tersebut adalah Permendikbudristekdikti No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi dan UU TPKS.

***Kata kunci**: ketidakadilan, kebijakan inklusif, kekerasan seksual*

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini marak terjadi di berbagai tempat dan beberapa kalangan sosial, tentu hal ini bukan suatu hal yang baik melainkan suat hal yang memprihatinkan. Setiap perilaku yang merendahkan, mempermalukan, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang sebagai akibat dari ketidakseimbangan gender atau kekuasaan dan menyebabkan kerugian psikologis atau fisik, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk memiliki anak yang sehat atau menerima pendidikan yang memadai, dianggap sebagai kekerasan seksual (Kebudayaan, 2024). Kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual, berdasarkan beberapa data yang ada tampak bahwa kasus kekerasan seksual di tempat tebuka sama banyaknya dengan kasus kekerasan non seksual (Husna, 2023). Menurut data statistik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, terdapat 9.517 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia pada saat artikel ini diterbitkan (bukan Juni 2024) dengan klasifikasi gender yaitu laki-laki sebanyak 2.076 kasus dan 8.302 kasus Perempuan (Anak, 2024). Secara keseluruhan, terjadi penurunan 55.920 insiden, atau hampir 12%, dalam jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan, lembaga pendukung, dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) pada tahun 2022 menjadi 401.975 dari 457.895. Dua belas persen responden menyerahkan kuesioner Catahu (catatan akhir tahun), turun dari dua puluh lima persen pada tahun 2022. Dari 993 survei yang dikeluarkan untuk Catahu 2023, 123 dikembalikan (Perempuan, 2024). Berdasarkan data tersebut maka tingkat

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.

kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, baik dalam ruang terbuka seperti di fasilitas umum dan sejenisnya atau di ruang tertutup.

Pelecehan seksual di kampus-kampus telah menjadi pemberitaan akhir-akhir ini. Dua kasus kini sedang dibahas: satu kasus melibatkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh rektor sebuah universitas swasta di Indonesia, dan kasus lainnya melibatkan pemecatan seorang dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) karena mengirim pesan bernada seksual. Lingkungan akademis, yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, justru menjadi salah satu tempat yang paling rentan terhadap pelecehan seksual. Lingkungan sekolah atau kampus di mana peserta utamanya adalah pengajar, mahasiswa, dan staf lain yang terlibat dalam penyampaian pendidikan.

Telah terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam insiden kekerasan seksual yang dilaporkan di kampus-kampus. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi mensurvei para profesor dan menemukan bahwa 77% pernah mengalami pelecehan seksual di kampus, dengan 63% tidak melaporkan insiden yang mereka ketahui kepada pihak sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) juga menemukan bahwa pelecehan seksual paling sering terjadi di kampus-kampus dalam jajak pendapat mereka. Pada Juli 2023, 65 insiden kekerasan seksual didokumentasikan di lingkungan universitas, menurut catatan survei yang dikelola oleh Kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah di perguruan tinggi, di mana kesadaran dan solusinya masih kurang (Online, 2024). Sebagai gambaran data kekerasan seksual di Universitas Mulawarman terdapat 23 kasus dalam rentang tahun 2023 (Sketsa Unmul, 2023), kemudian di Universitas Indonesia dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 24 Juli 2023 terdapat 30 orang terlapor dan/atau pelaku dengan 40 korban (PPKSUI, 2023), di Universitas Brawijaya pada tahun 2022 terdapat 44 kasus kekerasan seksual dan perundungan (UB, 2022). Terlapor dan/atau pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi berasal dari civitas akademika yaitu: dosen, mahasiswa, serta staf.

Di antara beberapa penyebab kekerasan seksual di kampus, ada bukti bahwa ada ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Hirarki di kampus terkenal menempatkan akademisi di posisi atas dan mahasiswa di posisi bawah, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam interaksi antara kedua kelompok tersebut. Akibatnya, ketika dihadapkan pada perilaku tidak bermoral oleh profesor tertentu, mahasiswa yang tidak sejajar dengan mereka mungkin merasa lemah dan tidak berdaya. Banyak profesor yang terangsang secara seksual dan terlibat dalam perilaku yang tidak pantas ketika murid mereka berkonsultasi atau mengikuti ujian. Tingginya kasus pelecehan seksual di kampus dapat dikaitkan dengan tiga penyebab utama. Pertama, karena ada ketidakseimbangan dalam dinamika korban-pelaku, dengan profesor dipandang sebagai pihak yang lebih tinggi dan mahasiswa sebagai pihak yang lebih rendah. Kekhawatiran kedua adalah kemungkinan profesor atau administrator universitas lainnya menyalahgunakan posisi otoritas mereka. Mereka yang berada dalam posisi otoritas dapat membahayakan mahasiswa mereka jika mereka tidak berperilaku dengan integritas. Ketiga, terkait dengan jaminan dan godaan tertentu yang ditawarkan oleh pelaku kepada korban; misalnya, seorang profesor mungkin terlihat sebagai orang yang peduli untuk menyembunyikan orientasi seksualnya dari mahasiswanya. Pelecehan seksual di kampus dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk quid pro quo, di mana pelaku menggunakan otoritasnya untuk mengendalikan korban (Irfawandi & Zahra Mawarda Aziz, 2023).

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.

Selain faktor yang dijelaskan diatas, perkembangan teknologi saat ini juga turut dalam mempengaruhi perkembangan bentuk-bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan maraknya media sosial, kekerasan seksual hanyalah satu lagi cara teknologi mempermudah para penjahat untuk menyasar populasi yang rentan, media sosial menjadi ruang baru terjadinya pelecehan seksual yang rata-rata dilakukan melalui fitur chatting (Ni Kadek Putri Anggreni & Ni Putu Tia Astini, 2022). Berdasarkan data kekerasan gender berbasis online sepanjang tahun 2019 ada 669 kasus dalam rentang waktu 10 bulan dan diestimasi akan meningkat lebih dari 40% (Nurtjahyo, 2024). Perkembangan teknologi membuat munculnya bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam bentuk baru termasuk kekerasan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Beberapa kasus yang akhir-akhir ini terjadi bermula dari aplikasi media sosial dengan chatting kemudian berlanjut sampai bertatap muka.

Kondisi yang demikian perlu menjadi perhatian dan harus dicegah agar tidak terjadi lagi mengingat dampak dari kekerasan seksual. Sebelum lahirnya Peraturan Menteri Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta dibentuknya Satgas PPKS di lingkungan pergurua tinggi kekerasan seksual masih mengalami kesulitan untuk diatasi, akan tetapi setelah lahirnya aturan tersebut menjadi solusi akan permasalahan tersebut. Adanya Satgas juga mempermudah untuk korban kekerasan seksual menyampaikan apa yang dialami dan mendapatkan pendampingan. Akan tetapi, meskipun demikian dalam perjalanan di lapangan terdapat beberapa kendala seperti di beberapa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya didapatkan.

Penelitian ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan kebijakan hukum inklusif dalam konteks perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi era *society* 5.0. Urgensi dari penelitian ini guna mengetahui lebih dalam mengenai kebijakan berkaitan perlindungan kekerasan seksual serta bentuk kekerasan seksual di era *society* 5.0.

METODE

Studi hukum empiris adalah metode yang akan digunakan oleh penulis. Menyelidiki peristiwa-peristiwa kehidupan nyata dan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan merupakan tujuan dari penelitian yuridis empiris, sebuah subbidang dari sosiologi hukum yang juga dikenal sebagai studi lapangan (Waluyo, 2002). Singkatnya, ini adalah studi tentang fenomena sosial yang ada dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Ketika dinamika gender atau kekuasaan seseorang mengarah pada tindakan merendahkan, mempermalukan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksinya, hal ini dikenal sebagai kekerasan seksual. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, hal ini mencakup tindakan yang membahayakan kesehatan reproduksi seseorang dan mengurangi kesempatannya untuk menyelesaikan pendidikan tinggi secara aman dan optimal, pada Pasal 1 ayat (1). Ketidaksetaraan gender dalam relasi kuasa terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan kurangnya pengetahuan, sumber daya finansial, status sosial, atau akseptabilitas pihak lain

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.

untuk melakukan kontrol terhadap pihak tersebut (Kemendikbud, 2023).

Bentuk-bentuk kekerasan seksual berikut ini didefinisikan menurut Pasal 5 Permendikbud No. 30 Tahun 2021, yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan insiden semacam itu dalam konteks pendidikan tinggi:

1) Segala jenis kekerasan seksual, baik secara verbal, non-fisik, fisik, maupun melalui penggunaan komunikasi elektronik, dianggap sebagai kekerasan seksual.
2) Istilah "kekerasan seksual" yang digunakan dalam paragraf pertama meliputi:
   a. Membuat komentar yang menghina tentang tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, atau aspek lain dari penampilan fisik korban.
   b. Memperlihatkan alat kelamin di depan umum tanpa izin korban.
   c. Membisikkan kata-kata kotor, lelucon, atau ajakan seksual kepada korban.
   d. Menatap mata korban dengan cara yang menjurus ke arah seksual atau mengganggu.
   e. Meskipun korban telah melarang, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, audio, atau video yang bernada seksual tanpa persetujuan korban tidak dapat diterima.
   f. Mengambil gambar atau rekaman audio/visual yang bernada seksual dari korban dan membagikannya tanpa persetujuan mereka.
   g. g. Memposting gambar-gambar eksplisit secara seksual dari korban atau informasi pribadi lainnya tanpa izin dari korban.
   h. Distribusi berita.
   i. Bersikap usil atau dengan sengaja mengawasi korban ketika mereka sendirian atau di tempat pribadi.
   j. Memaksa, menawarkan, mengancam, atau mempengaruhi korban untuk berpartisipasi dalam tindakan atau transaksi seksual yang bertentangan dengan kehendaknya.
   k. Menjatuhkan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual kepada seseorang.
   l. Meletakkan tangan, kaki, atau bagian tubuh lain pada orang lain tanpa izin; menyentuh, meraba, membelai, memegang, memeluk, mencium, atau menggosok.
   m. Mencoba membuka pakaian korban tanpa izin.
   n. Meminta hubungan seksual dari korban yang bertentangan dengan keinginan mereka.
   o. Merangkul budaya komunitas dengan seluk-beluk seksual di antara para pendidik, siswa, dan administrator.
   p. Ada upaya pemerkosaan, tetapi tidak terjadi penetrasi.
   q. Pemerkosaan yang disengaja melibatkan penetrasi menggunakan benda.
   r. Menyebabkan serangan seksual dengan sengaja.
   s. Memanipulasi atau memaksa korban untuk hamil.
   t. Terlibat dalam lebih banyak kekerasan seksual.
   u. Menggunakan ancaman atau kekuatan fisik untuk memaksa korban melakukan aborsi.
3) Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf m, dianggap tidak sah dalam korban:
   a. Dianggap sebagai anak di bawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Di bawah ancaman, paksaan, atau penyalahgunaan oleh pelaku;

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.

c. Di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau keduanya;
d. Dalam keadaan tidak sehat, tidak sadarkan diri, atau tertidur;
e. Mempunyai kondisi fisik atau mental yang tidak stabil;
f. Lumpuh untuk sementara waktu (imobilitas tonik) atau dalam kondisi syok; dan/atau.

Perlindungan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan suatu hal yang penting guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para civitas akademika di kampus untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar sehingga perlu perhatian dan adanya pencegahan serta solusi berkaitan dengan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Apabila dilihat dari jenis perlindungan kekerasan seksual di lingkungan kampus ini dapat dilihat dari skema dibawah ini, yaitu:



Gambar 1. Bagan Peraturan Perlindungan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan di mana siswa terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran secara teratur; oleh karena itu, melindungi siswa dari pelecehan seksual di kampus sangat penting. Karena universitas sekali lagi adalah tempat untuk belajar, mereka juga harus menjadi tempat yang bebas dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan mana pun, tetapi sangat berbahaya di perguruan tinggi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan yang melekat di sana. Misalnya, jika seorang mahasiswi sedang menjalani bimbingan oleh dosen pembimbing yang berlawanan jenis kelamin, keduanya dapat melakukan percakapan yang lebih mendalam dari biasanya. Namun, karena ketidakseimbangan kekuatan di antara keduanya, supervisor dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dengan, misalnya, mengirim pesan bernada seksual secara online atau bertindak kasar saat bertemu langsung, yang mengarah pada kekerasan seksual di kampus. Hal ini menyoroti perlunya langkah-langkah untuk mencegah kekerasan seksual di kampus.

Peraturan mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah ada, akan

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.

tetapi dalam pelaksanaannya semuanya kadang tidak berjalan seharusnya masih terdapat banyak ketidakadilan didalamnya khususnya bagi korban, mengingat dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini sangat rentan adanya ketimpangan relasi kuasa yang sangat berpengaruh. Relasi kuasa yang ada membuat beberapa korban tidak berani *speak up* tentang kekerasan seksual yang dialami oleh para korban, hingga ada yang berani *speak up* kemudian tidak mendapat ketidakadilan. Sebut saja beberpa tahun yang lalu ada kasus kekerasan seksualyang dilakukan oleh oknum yang menjabat sebagai dekan di salah satu perguruan tinggi negeri setelah korban melakukan *speak up* kemudian Masyarakat geger dan menjadi viral, akan tetapi setelah diproses ternyata mendapat putusan vonis bebas, hal ini membuat Masyarakat geram dan melakukan demo, Masyarakat merasa kasus ini terindikasi karena adanya ketimpangan relasi kuasa sehingga rentan kejadian yang demikian. Kondisi demikian tentu membuat para korban takut jika harus *speak up*.

Beberapa korban kekerasan seksual tidak melaporkan kejadian tersebut karena mereka merasa malu atau takut pelaku akan membunuh mereka jika mereka melaporkannya. Korban lain tidak melaporkan kejadian tersebut karena dasar hukumnya lemah, hukuman bagi pelaku tidak setimpal dengan kerugian yang mereka sebabkan, dan korban tidak merasa terlindungi. Hal lain yang membuat korban enggan untuk terlibat dalam sistem peradilan saat ini adalah ketakutan akan menjadi korban kembali di tangan polisi, serta kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti. Tentu saja, proses penegakan hukum, dalam upaya untuk mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat, dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang disebutkan di atas, yang pada gilirannya dapat berdampak pada perkembangan mental atau psikologis korban dan menghambat tujuan keadilan bagi korban dan masyarakat. Keberanian korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada penegak hukum merupakan hal yang krusial untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Pengaduan korban membuka kasus dan memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan, memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan atas apa yang telah menimpanya (Alpian, 2022).

Ketika terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, perguruan tinggi wajib mengikuti protokol tertentu yang tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia:

a. Pendampingan;
b. Pelindungan;
c. Pengenaan sanksi administratif; dan
d. Pemulihan korban.

Pasal 12 Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi merupakan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang membahas tentang perlindungan korban, yaitu:

1) Korban atau saksi yang merupakan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau warga kampus berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
2) Keselamatan setiap orang yang terlibat, termasuk saksi dan korban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
   a. jaminan bahwa siswa akan dapat menyelesaikan studi mereka.
   b. aminan bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai pendidik dan/atau tenaga

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.

kependidikan di universitas yang disetujui.

c. jaminan keamanan dari pelaku atau pihak lain yang memberikan ancaman fisik atau non-fisik, atau dari kekerasan seksual di masa depan, dengan mempermudah pengungkapan ancaman tersebut kepada pihak berwenang.
d. menjaga kerahasiaan informasi pribadi.
e. menyebarluaskan rincian tentang hak-hak dan layanan perlindungan.
f. menyediakan data tentang pelaksanaan langkah-langkah keamanan.
g. melindungi Korban dari sikap dan tindakan yang merendahkan dan menstigmatisasi dari aparat penegak hukum.
h. melindungi pelapor dan/atau Korban dari kemungkinan tuntutan pidana.
i. kasus kekerasan seksual berdasarkan kejadian yang sebenarnya
j. penyediaan tempat tinggal yang aman.
k. menjaga keamanan dan kebebasan dari bahaya yang berkaitan dengan bukti yang diberikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, mereka yang terlibat dalam pelecehan seksual di kampus universitas dapat dikenakan sanksi administratif. Meskipun kekerasan seksual tidak secara langsung diatur dalam Pasal 289-296 KUHP, mereka yang melakukan pelecehan seksual di lingkungan kampus tetap dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk memastikan keselamatan korban dan tercapainya keadilan dan keamanan bagi semua orang, perlu untuk mengesahkan undang-undang yang mendefinisikan dan mengkriminalisasi kekerasan seksual. Hal ini akan memungkinkan pengenaan hukuman pidana terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini.

Ada kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan yang ada saat ini, seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021, hanya berfokus pada pemberian bantuan, perlindungan, sanksi administratif, dan layanan pemulihan kepada korban dalam konteks pendidikan tinggi. Hal ini tidak cukup untuk memastikan bahwa korban dapat mengakses keadilan melalui sistem peradilan pidana, yang membutuhkan serangkaian prosedur yang berbeda untuk pelaporan dan pengaduan, investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Sementara itu, korban, keluarga, dan saksi harus dipenuhi hak-haknya sebelum, selama, dan setelah proses peradilan untuk membantu pemulihan fisik, mental, sosial, dan ekonomi korban (Ardianti, 2024). Korban dari kekerasan seksual yang sulit untuk mengungkapkan apa yang dialami (sulit *speak up*), ketimpangan relasi kuasa menyebabkan peluang ketidakadilan terjadi.

Kebijakan Hukum Inklusif dalam Konteks Perlindungan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Era Society 5.0

Diskusi sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan kekerasan seksual di universitas sering kali menghasilkan ketidakadilan. Anggota civitas akademika yang telah menjadi korban pelecehan seksual termasuk mahasiswa yang telah menjadi target perilaku yang tidak pantas oleh fakultas, staf, atau bahkan senior. Mahasiswa sering kali tidak dapat melanjutkan perkuliahan atau ujian akhir mereka karena trauma yang mungkin dialami oleh para korban. Para korban semakin sering menghadapi situasi yang menakutkan di universitas,

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.

yang seharusnya menjadi lingkungan yang ramah dan aman untuk belajar (Dinar, 2023). Pelecehan seksual, baik secara fisik maupun verbal, adalah hal yang sangat umum terjadi di lingkungan akademis, dan sering kali berawal dari ketidakseimbangan kekuasaan, perilaku yang tidak pantas dari para profesor saat mengajak mahasiswa melakukan penelitian, atau metode yang tidak tepat dalam membimbing mahasiswa melalui proses tesis (Faturani, 2022).

Memasuki *era society* 5.0 yang penuh dengan perkembangan pesat teknologi di tengah-tengah masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam hal perlindungan kekerasan seksual. Seiring dengan munculnya dunia maya dan komunitas siber yang telah membawa beberapa aktivitas dan perilaku dunia nyata ke dunia maya, dapat dikatakan bahwa teknologi mempengaruhi perilaku manusia (Utomo, 2020). Evolusi teknologi, menurut Satjipto Rahardjo, memiliki dampak yang sangat besar terhadap norma-norma sosial tentang hubungan interpersonal. (Satjipto Rahardjio, 2009). Selain itu, Sudarto juga menjelaskan bagaimana teknologi baru berdampak pada tren kejahatan.(Sudarto, 1983). Selain itu, Barda Nawawi Arief memperjelas bahwa kejahatan siber merupakan sisi negatif dari kemajuan teknologi yang berdampak negatif pada setiap aspek kehidupan kontemporer (Arief, 2006).

Begitu juga dengan perkembangan kejahatan asusila yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi seperti munculnya *cyberporn, cybersex, cyber grooming, video call sex*, dan berbagai bentuk kejahatan-kejahatan seksual atau asusila online lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual *online* ini juga berkembang di lingkup perguruan tinggi di era perkembangan teknologi saat ini. Berbagai bentuk kekerasan seksual tersebut perlu ditangani dengan kebijakan-kebijakan hukum yang memadai apalagi di lingkup kampus.

Untuk mengatasi kejahatan seksual secara efektif, perlu untuk menunjukkan dengan tepat isu-isu spesifik yang berkontribusi atau menciptakan lingkungan di mana kejahatan semacam itu dapat berkembang, dan ini termasuk memeriksa prevalensi kekerasan seksual di kampus-kampus. Dengan menunjukkan masalah-masalah tersebut, kita dapat mengurangi kemungkinan hal itu akan terulang kembali. Berikut adalah beberapa area utama yang perlu diselidiki: Masalah pertama adalah hukum yang tidak memadai. Kedua, sejauh mana hukum dipraktikkan. Terakhir, aspek budaya dan sosial. Terakhir, tingkat pendidikan.

Kita harus menekankan masalah kebijakan atau regulasi karena ini adalah elemen sentral dalam melindungi komunitas kampus dari kekerasan seksual. Seperti yang telah diketahui, sebelum adanya Permendikbudristekdikti No. 30 Tahun 2021, yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, kampus dan universitas tidak dapat memberikan perlindungan penuh kepada para korban kekerasan seksual.

Adanya kebijakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hukum karena menjadi pedoman atau menjadi acuan dalam penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum tidak dapat berjalan jika tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan yang memadai. Memasuki era perkembangan teknologi, maka tentu juga harus didukung dengan kebijakan-kebijakan hukum reponsif dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Kebijakan hukum yang terbuka yang dapat memberikan akses keadilan dan ketertiban kepada masyrakat.

Membahas mengenai kebijakan yang terbuka tentu sangat lekat dengan istilah zaman sekarang yaitu inklusif yang berarti terbuka untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Begitupun halnya jika kita membahas kebijakan hukum inklusif, maka kebijakan hukum tersebut tentu harus terbuka untuk perkembangan zaman dan terbuka untuk semua kalangan. Dibutuhkan keberanian dari sistem hukum untuk menafsirkan pasal-pasal dalam rangka membudayakan negara, yang sangat penting bagi keberadaan Hukum Inklusif. Jika semuanya berjalan sesuai

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.

rencana, cita-cita Indonesia dalam penegakan hukum akan sejalan dengan upaya negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Kondisi ketidakadilan hukum yang tidak terkendali saat ini akan dapat dihindari dengan berpegang pada prinsip ini. Untuk memastikan bahwa undang-undang tidak mendiskriminasi siapa pun di Indonesia, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, di masa depan. Ketika perlakuan yang adil oleh hukum tidak mungkin dicapai, maka bias menjadi mutlak. Manusia menyusun undang-undang demi kepentingan rakyat dan untuk memastikan kepastian mereka (Zainuddin, 2018).

Ketika hukum membentuk tindakan orang dan ketika tindakan tersebut sejalan dengan hukum, maka hukum memiliki makna; sebaliknya, pertanyaan tentang seberapa efektif hukum sangat terkait dengan norma orang yang mengikuti hukum. Di sisi lain, kebijakan dasar bersifat netral dan bertumpu pada nilai universal dari tujuan dan alasan hukum. Sebenarnya, ada beberapa contoh ketika kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus tidak tersentuh oleh peraturan nasional. Secara teoritis, legislasi inklusif harus dibangun di atas landasan pemikiran yang komprehensif untuk menghasilkan kebijakan politik dan hukum yang berkualitas tinggi dan berkeadilan (Zainuddin, 2018).

Ketentuan pidana dalam Bab XIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu contoh bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur tindak pidana kesusilaan dalam konteks kebijakan hukum nasional. Pembuat undang-undang menyusun ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran kesusilaan dengan tujuan untuk melindungi individu dari apa yang mereka anggap sebagai perlindungan yang diperlukan dari tindakan asusila, yang juga dikenal sebagai ontuchte handelingen, dan dari perilaku yang menyinggung perasaan susila, baik secara verbal maupun fisik (Nurul Lisa Andriani, 2021). Nyatanya peraturan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kekerasan seksual atau kejahatan-kejatahan asusila yang berada di lingkup kampus terutama yang berkaitan dengan Tri dharma perguruan tinggi.

Menyoal di titik legislasi atau kebijakan hukum sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan aturan untuk menjawab kegelisahan para civitas akademika terkait dengan persoalan-persoalan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Hadirnya Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai aturan yang cukup inklusif untuk menakar persoalan perlindungan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang terjadi selama ini.

Dalam rangka menjamin agar semua orang dapat memenuhi hak dasar mereka atas pendidikan, langkah ini menunjukkan keseriusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menangani dan menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi. Untuk memastikan bahwa upaya untuk mengakhiri kekerasan seksual di dalam kelas tidak menghambat kemampuan siswa untuk mendaftar dan menyelesaikan pendidikan mereka, hal ini dilakukan sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan Pendidikan 4 dan Tujuan Kesetaraan Gender 5 (Wartoyo & Ginting, 2023). Setiap institusi dapat memberikan kebijakan atau program yang sesuai dengan budaya perguruan tinggi yang sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Permendikbudristekdikti No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi (Fitri et.al., 2022). Definisi yuridis dari kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021. Menurut definisi ini, kekerasan seksual mencakup

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.

segala bentuk tindakan merendahkan, mempermalukan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Hal ini didasarkan pada relasi kuasa dan gender yang timpang dan dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik, serta terganggunya kesehatan reproduksi seseorang dan ketidakmampuan untuk menempuh pendidikan tinggi secara aman dan optimal.

Selain itu, berbagai bentuk kekerasan seksual didefinisikan dalam Pasal 5 Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021: 1) Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan verbal, nonfisik, fisik, dan/atau yang dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik. 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berikut ini adalah contoh-contoh kekerasan seksual: a) Membuat komentar yang menghina tentang fisik, jenis kelamin, atau daya tarik korban b) Dengan sengaja mengekspos bagian pribadi korban tanpa izin korban c) Membuat komentar, lelucon, atau siulan yang bernada seksual atau tidak pantas kepada korban d) Memandang korban dengan cara yang berbau seksual atau membuat korban merasa tidak nyaman e) Mengirimkan pesan teks, lelucon, gambar, atau video kepada korban tanpa izin korban f) Mengirimkan pesan teks, lelucon, gambar, atau video kepada korban tanpa izin korban g) Memperoleh, mengambil, dan / atau membagikan gambar, audio, atau video yang eksplisit secara seksual tanpa izin korban h) Mempublikasikan gambar, audio, atau video yang eksplisit secara seksual atau detail individu korban secara online tanpa izin korban i) Membagikan gambar, audio, atau video yang eksplisit secara seksual kepada korban atau video korban tanpa persetujuan korban h) Mempublikasikan gambar eksplisit seksual atau detail individu korban secara online tanpa izin korban i) Membagikan gambar atau video porno atau eksplisit seksual korban tanpa izin korban j) Secara sengaja memata-matai korban saat mereka berada dalam privasi rumah mereka sendiri atau lokasi pribadi lainnya k) Menekan korban untuk melakukan tindakan seksual di luar kehendaknya l) Menerapkan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual m) Tanpa persetujuan korban, menyentuh, memegang, meraba, mencium, memeluk, atau menggesekkan anggota tubuh ke tubuh korban o) Menggunakan bahasa atau praktik yang bernuansa seksual di antara komunitas peserta didik, pendidik, atau tenaga kependidikan p) Melepaskan pakaian korban tanpa seijin korban n) Memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual q) Melakukan kekerasan seksual, termasuk melakukan penetrasi pada tubuh seseorang dengan alat atau bagian selain alat kelaminnya r) Dengan sengaja menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan/atau melakukan tindakan kekerasan seksual lainnya s) Memaksa atau menipu korban untuk hamil.

Pasal 14 Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021 menetapkan tiga tingkatan hukuman administratif: ringan, sedang, dan berat, dan berlaku bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual di kampus. Sebagai hukuman administratif ringan, Anda mungkin diharuskan untuk memposting pernyataan permintaan maaf atau peringatan tertulis di buletin universitas atau di papan pengumuman kampus. Di sisi lain, skorsing dari kelas, pembatasan hak, atau bahkan kehilangan beasiswa adalah contoh hukuman administratif sedang. Institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan dapat menjatuhkan hukuman administratif yang lebih berat, seperti pencabutan permanen pendaftaran atau pekerjaan mahasiswa sebagai pendidik atau penduduk di kampus, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Setelah Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021 hadir, maka pada tahun 2022 juga diundangkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang semakin melegitimasi perlindungan kekerasan seksual untuk masyarakat. Dengan disahkannya UU TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, para korban menjadi lebih

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.

terlindungi tidak hanya di ranah perguruan tinggi, namun juga penyelesaian kasus yang berada di ranah pergurun tinggi dapat dibawa ke jalur sistem peradilan pidana pada umumnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Peremndikburistekdikti No. 30 Tahun 2021 terbatas hanya pada penyelesaian administratif. Secara umum, korban kekerasan seksual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari ketentuan UU TPKS. UU TPKS akan membantu korban kekerasan seksual dalam beberapa hal, antara lain: 1) Fungsi Lembaga dalam Membantu Korban Kekerasan Seksual Dalam rangka proses pertolongan dan perlindungan terhadap korban, negara harus menjamin dan menyertakan fungsi lembaga sebagai fasilitator pelayanan bagi masyarakat melalui pusat pelayanan terpadu. 2) Kompensasi bagi Korban Bantuan keuangan bagi penyintas kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS. Ketika korban menjalani proses penanganan kasus, litigasi perdata, atau eksekusi putusan, dana bantuan ini tersedia untuk mereka. Ketiga, dalam upaya menjaga kesehatan mental korban, UU TPKS melarang pelaku untuk melakukan kontak dengan korban dalam jangka waktu tertentu selama proses hukum berlangsung. Lebih lanjut, UU TPKS mengamanatkan bahwa penegak hukum harus menjalankan proses hukum dengan cara yang tidak menambah penderitaan bagi korban. 4) Keselamatan Saksi dan Keluarga Korban Harus Dijamin Untuk memastikan hak-hak korban atas keadilan dan perlindungan terpenuhi, UU TPKS mengatur tentang perlindungan saksi dan keluarga korban (Lathif et al., 2022).

KESIMPULAN

Persoalan-persoalan kejahatan-kejahatan seksual atau kekerasan seksual di lingkup kampus juga harus ditinjau dari kebijakan-kebijakan hukum yang memadai, yang dapat menjadi pedoman dan landasan dalam memberikan perlindungan kekerasan seksual di lingkup tri dharma perguruan tinggi. Kebijakan hukum yang sifatnya inklusif seperti Permendikburistekdikti No. 30 Tahun 2021 serta UU TPKS menjadi hal yang dibutuhkan untuk memberikan payung hukum dalam hal penanganan kekerasan seksual yang terjadi. Kebijakan hukum yang iklusif demikian di era *society* 5.0 dapat menopang berbagai bentuk kejahatan-kejahatan asusila atau kekerasan seksual yang bermunculan serta dapat memberikan perlindungan hukum dan memberikan akses keadilan secara terbuka untuk para korban.

REFERENSI

Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, 78.

Anak, K. P. (2024, Juni). *Kementrian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Diambil kembali dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Andriani, l. et.al. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Pasca Berlakunya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, *2*(2020), 54–69.

Arief, B. (2006). *Tindak Pidana mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia."* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ardianti, N. (2024). *Rumah Keadilan*. Diambil kembali dari https://rumahkeadilan.or.id/problematika-perlindungan-terhadap-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan/

Dinar, C. (2023). Perlindungan Hukum Oleh Satuan Tugas Pencegahan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *4*(3), 321–328.

Ema Mutia Fitri, E. et.al. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. *Journal Of Gender Equality*

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.

And Social Inclusion (Gesi) Implementasi, *1*(1), 14.

Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(15), 480–486.

Husna, K. (2023). *Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Diambil kembali dari https://umj.ac.id/opini/memahami-konsep-kekerasan-seksual/

Irfawandi, I. H., & Zahra Mawarda Aziz, M. I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 388.

Kebudayaan, K. P. (2024). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Diambil kembali dari https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/

Kemendikbud. (2023). *Kemendikbud*. Diambil kembali dari https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/

Lathif, N., Kamilah Roza Irawan, K., Putri Purwinarto, D., Faizah, S., & Mandala Putra, R. (2022). Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani. *Palar (Pakuan Law Review)*, *8*(4), 91–105.

Ni Kadek Putri Anggreni, N. P., & Ni Putu Tia Astini, P. A. (2022). Perguruan Tinggi: Garda Terdepan Mengatasi Pelecehan Seksual di Media Sosial. *Prosiding Webinar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*, 227.

Nurtjahyo, L. I. (2024). *Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Diambil kembali dari https://law.ui.ac.id/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/

Online, H. (2024, Februari). *Hukum Online*. Diambil kembali dari https://www.hukumonline.com/berita/a/minimnya-fasilitas-kampus-jadi-penyebab-kekerasan-seksual-marak-di-perguruan-tinggi-lt65bb8cf8cf830/#

Perempuan, K. (2024). *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Diambil kembali dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085

PPKSUI. (2023, Juli). *PPKSUI*. Diambil kembali dari https://www.instagram.com/satgasppksui/p/CvH3blHyYGf/?img_index=4

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.

Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Sketsa Unmul. (2023, Desember). *Sketsa Unmul*. Diambil kembali dari https://sketsaunmul.co/berita-kampus/capai-23-kasus-dalam-setahun-terakhir-satgas-ppks-unmul-berkomitmen-mengupayakan-kampus-yang-bebas-dari-kekerasan-seksual/baca

UB, P. P. (2022). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Progresif*. Diambil kembali dari https://www.instagram.com/em_ubofficial/p/Cm3cKBTrFcX/?img_index=4

Utomo, S. (2020). *Tantangan Hukum Modern Di Era Digital*. http://www.bogor.net/idkf-2/publik-

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wartoyo, F dan Ginting, Y. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, *11*(1), 29–46. Zainuddin, A. (2018). Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Al-Himayah*, *2*(1), 17–30.

Hak Cipta © 2024, Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie.